



Kata Pengantar

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,



Laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan disusun sebagai upaya untuk mewujudkan akuntabilitas pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan daerah. Secara khusus, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) selalu menjadi komitmen Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) dalam memandang bahwa setiap proses pembangunan harus dapat dilihat tingkat keberhasilannya, obyektif, dan sekaligus sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan selanjutnya. Oleh karena itu, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan pembangunan daerah DIY selama tahun 2021, penyusunan LKPJ Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 ini disusun dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DPRD DIY). Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen LKPJ DIY ini disusun untuk melaksanakan amanat Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dokumen LKPJ Tahun 2021 menggambarkan hasil kinerja pelaksanaan APBD DIY pada Tahun Anggaran 2021 yang merupakan tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (RPJMD DIY Tahun 2017-2022). Efektivitas pelaksanaan pembangunan Pemda DIY dapat diukur berdasar capaian sasaran pembangunan yang tertuang dalam indikator kinerja utama (IKU) Pemda, indikator Program Pemda, dan indikator kinerja utama terhadap pelaksanaan urusan. Ruang lingkup

dokumen LKPJ Tahun 2021 meliputi: (1) Pendahuluan; (2) Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah; (3) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah; (4) Penyelenggaraan Tugas Pembantuan; (5) Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan DIY; (6) Program Strategis DIY; (7) Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintah; dan (8) Penutup.

Pada tahun 2021, hasil penyelenggaraan urusan pembangunan Pemda DIY selama tahun kedua pandemi COVID-19 ini telah dapat diukur keberhasilan dan manfaatnya kepada publik. Sebagian besar sasaran dan indikator kinerja optimal tercapai sesuai target RPJMD DIY Tahun 2017-2022 pada tahun 2021. Keberhasilan tersebut menjadi penyemangat bagi segenap *stakeholder* DIY untuk pulih dari pandemi. Namun demikian tidak dipungkiri pandemi COVID-19 berdampak pada seluruh aspek sosial ekonomi masyarakat, termasuk pada kemampuan belanja Pemda DIY untuk publik yang telah beberapa kali di-*refocusing* sesuai kebijakan Pemerintah Pusat dan pada akhirnya berdampak pada belum optimalnya sebagian capaian kinerja pembangunan. Dibandingkan capaian tahun 2021, gap tahun 2022 cenderung semakin menyempit, sehingga dapat terlihat adanya hasil dari upaya-upaya pemulihan sosial ekonomi yang telah dilakukan oleh segenap *stakeholder*.

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan laporan ini mendapatkan masukan dan saran perbaikan untuk rekomendasi pembangunan ke depan, terutama catatan dan rekomendasi dari DPRD DIY. Masukan dan saran tersebut diharapkan menjadi bagian kolaborasi bersama *sawiji, greget, sengguh, ora mingkuh* membangun DIY sebagai satu kesatuan semangat pikiran, perkataan dan perbuatan sebagai “Jogja Satu Bangkit Bersama” untuk pulih, menjadi lebih kuat, serta mewujudkan masyarakat DIY yang sejahtera dan bermartabat. Sekian, Terima Kasih

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yogyakarta, Maret 2022

GOVERNOR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



HAMENGKU BUWONO X

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI	III
DAFTAR TABEL.....	XXIX
DAFTAR GAMBAR.....	LI
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1-1
A. DASAR HUKUM	1-1
B. VISI DAN MISI JANGKA PANJANG	1-4
1. Visi Jangka Panjang	1-4
2. Misi Jangka Panjang	1-6
C. FILOSOFI, VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH.....	1-6
1. Dasar Filosofi	1-6
2. Visi	1-9
3. Misi.....	1-13
4. Tujuan.....	1-17
5. Sasaran	1-17
D. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAERAH, PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA DALAM RPJMD 2017-2022	1-18
1. Strategi	1-19
2. Arah Kebijakan Daerah.....	1-21
3. Program Pemda.....	1-25
E. TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021	1-29
1. Tema Pembangunan Tahun 2021	1-29
2. Prioritas Pembangunan Tahun 2021.....	1-30

F. GAMBARAN UMUM DAERAH	1-33
1. Kondisi Geografis Daerah	1-33
a. Batas Administrasi	1-33
b. Luas Wilayah.....	1-34
c. Topografi	1-35
1) Kemiringan Lahan	1-35
2) Ketinggian Lahan.....	1-35
3) Satuan Fisiografis.....	1-36
2. Gambaran Umum Demografi.....	1-37
a. Jumlah Penduduk	1-37
b. Pertumbuhan Penduduk	1-38
c. Angkatan Kerja dan Ketenagakerjaan	1-39
1) Penduduk Usia Kerja.....	1-40
2) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	1-40
3) Angkatan Kerja.....	1-41
4) Penduduk yang Bekerja	1-42
5) Pengangguran Terbuka	1-44
d. Pendidikan	1-46
e. Kondisi Ekonomi Daerah	1-53
1) Sektor Unggulan	1-53
a) Sektor Industri Pengolahan.....	1-53
b) Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.....	1-54
c) Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1-57
2) Pertumbuhan Ekonomi.....	1-69
3) Inflasi.....	1-72
3. Gambaran Umum Penyelenggaraan Pemerintahan	1-73
a. Gambaran Umum Birokrasi Pemda DIY.....	1-73
b. Gambaran Kondisi ASN yang dimiliki.....	1-75
c. Ringkasan Realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Dalam APBD P 2020	1-77
1) Penerimaan Pembiayaan	1-80
2) Pengeluaran Pembiayaan	1-80

BAB 2. KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DALAM PERUBAHAN APBD.....	2-1
A. PERUBAHAN TERHADAP KEGIATAN.....	2-1
B. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2-3
1. Upaya Peningkatan Sumber dan Nilai Pendapatan Daerah	2-3
2. Target dan Realisasi Pendapatan	2-5
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2-6
1) Pajak Daerah	2-7
2) Hasil Retribusi Daerah	2-8
3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2-13
4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.....	2-15
b. Pendapatan Transfer	2-16
c. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2-17
d. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH).....	2-18
e. Dana Alokasi Umum (DAU).....	2-18
f. Dana Alokasi Khusus (DAK).....	2-19
g. Dana Insentif Daerah (DID).....	2-20
h. Dana Keistimewaan (DAIS)	2-21
i. Pendapatan Transfer Antar Daerah	2-21
j. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	2-22
1) Pendapatan Hibah	2-22
2) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.....	2-23
3. Permasalahan dan Solusi Terkait Pengelolaan Pendapatan	2-23
a. Permasalahan	2-23
b. Solusi	2-24
C. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH	2-24
1. Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah.....	2-24
2. Target dan Realisasi Belanja.....	2-27

a.	Belanja Operasi.....	2-29
1)	Belanja Pegawai	2-29
2)	Belanja Barang dan Jasa	2-30
3)	Belanja Subsidi	2-32
4)	Belanja Hibah	2-33
5)	Belanja Bantuan Sosial.....	2-34
b.	Belanja Modal.....	2-35
c.	Belanja Dana Keistimewaan	2-36
d.	Belanja Tak terduga	2-39
e.	Belanja Transfer.....	2-42
1)	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota.....	2-42
2)	Belanja Bantuan Keuangan.....	2-43
a)	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Kabupaten/ Kota	2-44
b)	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa	2-45
3.	Permasalahan dan Solusi Belanja Daerah	2-45
a.	Permasalahan	2-45
b.	Solusi	2-46
D.	PEMBIAYAAN DAERAH.....	2-47
1.	Kebijakan Pembiayaan Daerah	2-47
a.	Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	2-47
b.	Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	2-48
2.	Target dan Realisasi Pembiayaan.....	2-48
a.	Penerimaan Pembiayaan.....	2-48
b.	Pengeluaran Pembiayaan	2-48
E.	PENGELOLAAN ASET YANG DIPISAHKAN	2-49
1.	Kinerja BUMD	2-49
a.	PT. Bank Pembangunan Daerah DIY	2-49
b.	PT Anindya Mitra Internasional (AMI).....	2-49

c.	PT Taru Martani	2-50
d.	Perumda Air Bersih Tirtatama	2-51
e.	Badan Usaha Kredit Perdesaan (BUKP)	2-51
F.	PENGLOLAAN BARANG MILIK DAERAH.....	2-52
1.	Penatausahaan Barang Milik Daerah	2-53
a.	Dasar Hukum Pelaksanaan	2-54
b.	Tantangan dan Permasalahan	2-55
c.	Upaya-upaya yang Dilaksanakan	2-55
d.	Capaian	2-55
2.	Pensertifikatan Tanah Hak Pakai Pemda DIY	2-56
3.	Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah.....	2-58
4.	Pendayagunaan Barang Daerah	2-69
a.	Pemanfaatan Barang Milik Daerah.....	2-69
b.	Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Daerah.....	2-80
1)	Rehabilitasi Rumah Daerah.....	2-80
2)	Pembersihan dan Penataan Lahan	2-80
3)	Penjaminan Barang Milik Daerah	2-81
BAB 3.	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH.....	3-1
A.	TINGKAT KETERCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMDA	3-1
1.	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM – Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	3-3
2.	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM – Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	3-8
3.	Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat – Indeks Gini	3-13
4.	Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat – Persentase Angka Kemiskinan	3-17
5.	Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan – Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak Benda yang Diapresiasi	3-19

6. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan – Pertumbuhan Ekonomi	3-21
7. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan – Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).....	3-24
8. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan – Kesesuaian Pemanfaatan Ruang.....	3-26
9. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan – Capaian Penataan Ruang pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan	3-29
10. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah – Indeks Williamson	3-33
11. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan – Opini BPK.....	3-34
12. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan – Nilai AKIP	3-36
13. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan – Persentase Capaian Program Urusan Keistimewaan	3-38
14. Meningkatnya Fasilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa – Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa yang Terfasilitasi untuk Dikelola serta Dimanfaatkan	3-40
B. CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMDA	3-43
1. Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan, dengan indikator:	3-46
a. Persentase Sekolah Menengah dan Khusus yang Memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	3-46
b. Harapan Lama Sekolah	3-48
c. Peningkatan Jumlah Pemuda Kader Aktif	3-50
d. Persentase Sekolah yang Melakukan Pendidikan Berbasis Budaya dengan Kategori Maju.....	3-51
2. Program Peningkatan Usia Harapan Hidup, dengan indikator Angka Harapan Hidup	3-53
3. Program Pembangunan Sosial Masyarakat, dengan indikator:	3-56

a.	Jumlah Kabupaten/Kota Layak Anak Berkategori Nindya ke Atas	3-56
b.	Persentase Perempuan Pengambil Keputusan di Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif	3-58
c.	Total Fertility Rate	3-59
d.	Peningkatan Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang	3-59
e.	Angka Kejahatan per 100.000 Penduduk (<i>Crime Rate</i>).....	3-61
4.	Program Penanggulangan Kemiskinan, dengan indikator:	3-64
a.	Persentase Peningkatan Penumbuhan Wirausaha Baru	3-64
b.	Jumlah Penduduk Miskin (Jumlah Penduduk Miskin (Pada Tahun n))	3-66
c.	Pengeluaran per Kapita Masyarakat	3-67
5.	Program Pelestarian Budaya Benda dan Tak Benda, dengan indikator:	3-69
a.	Persentase Peningkatan Budaya Benda yang Dilestarikan.....	3-69
b.	Persentase Peningkatan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan.....	3-70
6.	Program Pengembangan Sektor Dominan (Pertanian, Industri Pengolahan, Jasa), dengan indikator:	3-72
a.	Kontribusi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Perdagangan dalam PDRB DIY	3-72
1)	Sektor Pertanian	3-74
2)	Penyediaan Akomodasi dan Makan	3-76
3)	Industri Pengolahan dan Perdagangan.....	3-79
b.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3-80
c.	Jumlah Desa Mandiri Budaya (Desa/Kampung Wisata, Desa/Kelurahan Budaya, Desa Preneur, Desa Prima)	3-82

7.	Program Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana, dengan indikator:.....	3-84
a.	Indeks Kualitas Air	3-84
b.	Indeks Kualitas Udara	3-87
c.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).....	3-91
d.	Indeks Risiko Bencana	3-94
8.	Program Peningkatan Keterpaduan Program Pemanfaatan Ruang, dengan indikator Persentase Dukungan Program Pemda terhadap Keterwujudan Struktur dan Pola Ruang	3-96
9.	Program Pengembangan Pusat Petumbuhan, dengan indikator:	3-100
a.	Persentase Peningkatan PDRB pada Kabupaten yang Belum Maju (GK, KP, Bantul)	3-100
b.	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Layanan Transportasi pada Sistem Jaringan Jalan Provinsi	3-101
10.	Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah, dengan indikator:	3-106
a.	Kemampuan Keuangan Daerah	3-106
b.	Optimalisasi Aset-aset Pemda DIY.....	3-108
c.	Nilai Eksternal pelayanan Publik, Nilai Internal Integritas Organisasi, Nilai Eksternal Persepsi Korupsi.....	3-110
11.	Program Pengelolaan Kelembagaan dan Tata Cara Pengisian Kepala Daerah, dengan indikator Terwujudnya Pelaksanaan Urusan Kelembagaan sesuai dengan Perdas Kelembagaan.....	3-112
12.	Program Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa, dengan indikator Persentase Fasilitasi Tertib Administrasi Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa	3-114
C.	PENGHARGAAN.....	3-117

D. KINERJA URUSAN PEMERINTAHAN.....	3-123
1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB.....	3-123
a. Urusan Terkait Dengan Pelayanan Dasar	3-123
1) Urusan Pendidikan.....	3-123
a) Kondisi Umum	3-123
b) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2021	3-126
2) Urusan Kesehatan.....	3-151
a) Kondisi Umum	3-151
b) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2021	3-154
3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3-180
a) Sub Urusan Pekerjaan Umum	3-180
b) Sub Urusan Penataan Ruang.....	3-208
4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	3-219
a) Kondisi Umum	3-219
b) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2021	3-220
5) Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	3-223
a) Sub Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3-223
b) Sub Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	3-240
c) Sub Urusan Penanggulangan Bencana.....	3-264
6) Urusan Sosial	3-286
a) Kondisi Umum	3-286
b) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2021	3-289
b. Urusan yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.....	3-344
1) Urusan Tenaga Kerja.....	3-344
a) Kondisi Umum	3-344
b) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2021	3-347

2)	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	3-358
a)	Kondisi Umum	3-358
b)	Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2021	3-361
3)	Urusan Pangan.....	3-369
a)	Kondisi Umum	3-369
b)	Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2021	3-375
4)	Urusan Pertanahan	3-380
a)	Kondisi Umum	3-380
b)	Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2021	3-384
5)	Urusan Lingkungan Hidup.....	3-391
a)	Kondisi Umum	3-391
b)	Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2021	3-394
6)	Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	3-413
a)	Kondisi Umum	3-413
b)	Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2021	3-416
7)	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	3-422
a)	Kondisi Umum	3-422
b)	Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2021	3-425
8)	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3-432
a)	Kondisi Umum	3-432
b)	Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2021	3-436
9)	Urusan Perhubungan	3-440
a)	Kondisi Umum	3-440
b)	Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2021	3-444

10) Urusan Komunikasi dan Informatika	3-465
a) Kondisi Umum	3-465
b) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2021	3-470
11) Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3-472
a) Kondisi Umum	3-472
b) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2021	3-476
12) Urusan Penanaman Modal	3-498
a) Kondisi Umum	3-498
b) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2021	3-507
13) Urusan Kepemudaan dan Olahraga	3-512
a) Kondisi Umum	3-512
b) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2021	3-514
14) Urusan Statistik	3-520
a) Kondisi Umum	3-520
b) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2021	3-524
15) Urusan Persandian	3-530
a) Kondisi Umum	3-530
b) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2021	3-535
16) Urusan Kebudayaan	3-537
a) Kondisi Umum	3-537
b) Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2021	3-543
17) Urusan Perpustakaan	3-557
a) Kondisi Umum	3-557
b) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2021	3-559

18) Urusan Kearsipan.....	3-570
a) Kondisi Umum.....	3-570
b) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2021	3-573
2. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3-577
a. Urusan Kelautan dan Perikanan	3-577
1) Kondisi Umum.....	3-577
2) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2021	3-579
b. Urusan Pariwisata.....	3-597
1) Kondisi Umum.....	3-597
2) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2021	3-599
c. Urusan Pertanian.....	3-616
1) Kondisi Umum.....	3-616
2) Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2021	3-623
d. Urusan Kehutanan.....	3-638
1) Kondisi Umum.....	3-638
2) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2021	3-640
e. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	3-648
1) Kondisi Umum.....	3-648
2) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2021	3-651
f. Urusan Perdagangan	3-659
1) Kondisi Umum.....	3-659
2) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2021	3-660
g. Urusan Perindustrian.....	3-666
1) Kondisi Umum.....	3-666
2) Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2021	3-667
h. Urusan Ketransmigrasian	3-680
1) Kondisi Umum.....	3-680
2) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2021	3-682

3. PENUNJANG URUSAN	3-686
a. Perencanaan Pembangunan.....	3-686
1) Kondisi Umum.....	3-686
2) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2021.....	3-687
b. Perencanaan Pembangunan Urusan Keistimewaan	3-714
1) Kondisi Umum.....	3-714
2) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2021	3-719
c. Administrasi Keuangan Daerah	3-735
1) Kondisi Umum.....	3-735
2) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2021	3-736
d. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	3-763
1) Kepegawaian.....	3-763
a) Kondisi Umum	3-763
b) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2021	3-770
2) Pendidikan dan Pelatihan	3-781
a) Kondisi Umum	3-781
b) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2021	3-783
e. Sekretariat Daerah	3-791
1) Tata Pemerintahan	3-791
a) Kondisi Umum.....	3-791
b) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2021	3-795
2) Fasilitasi Perundang-undangan dan Hukum	3-806
a) Kondisi Umum	3-806
b) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2021	3-814
3) Fasilitasi Perekonomian dan SDA	3-825
a) Kondisi Umum	3-825
b) Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2021	3-831

4)	Fasilitasi Kesra.....	3-835
a)	Kondisi Umum.....	3-835
b)	Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2021	3-839
5)	Kelembagaan dan Tata Laksana	3-846
a)	Kondisi Umum.....	3-846
b)	Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2021	3-849
6)	Fasilitasi Administrasi Pembangunan	3-864
a)	Kondisi Umum.....	3-864
b)	Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2021	3-869
7)	Fasilitasi Umum, Kehumasan dan Protokol	3-876
a)	Kondisi Umum.....	3-876
b)	Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2021	3-878
8)	Fasilitasi Pemerintahan.....	3-888
a)	Kondisi Umum.....	3-888
b)	Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2021	3-889
f.	Pengawasan.....	3-898
1)	Kondisi Umum.....	3-898
a)	Pemeriksaan BPK RI Perwakilan DIY	3-899
b)	Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.....	3-901
c)	Pemeriksaan Inspektorat DIY.....	3-901
2)	Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2021	3-903
g.	Penelitian dan Pengembangan.....	3-913
1)	Kondisi Umum.....	3-913
2)	Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2021	3-915
h.	Sekretaris Dewan.....	3-918
1)	Kondisi Umum.....	3-918
2)	Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2021	3-920

E.	KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN	3-933
F.	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN 2020	3-949
1.	Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Dalam Perubahan APBD	3-949
a.	Pendapatan dan Belanja Daerah	3-953
b.	Pembiayaan Daerah	3-954
c.	Pengelolaan Aset yang Dipisahkan.....	3-954
d.	Pengelolaan BARANG MILIK DAERAH.....	3-954
2.	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH.....	3-955
a.	KETERCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH DAERAH.....	3-955
b.	URUSAN WAJIB.....	3-958
1)	URUSAN TERKAIT DENGAN PELAYANAN DASAR	3-958
a)	URUSAN PENDIDIKAN	3-958
b)	URUSAN KESEHATAN	3-962
c)	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3-966
d)	URUSAN KENTENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	3-969
e)	URUSAN SOSIAL	3-969
2)	URUSAN YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR.....	3-970
a)	URUSAN URUSAN TENAGA KERJA	3-970
b)	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.....	3-971
c)	URUSAN PANGAN	3-972
d)	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP.....	3-974
e)	URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL.....	3-977
f)	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA.....	3-978

g)	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3-979
h)	URUSAN PERHUBUNGAN	3-981
i)	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3-982
j)	URUSAN KOPRASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	3-983
k)	URUSAN PENANAMAN MODAL	3-986
l)	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	3-990
m)	URUSAN PERSANDIAN	3-993
n)	URUSAN KEBUDAYAAN	3-994
o)	URUSAN PERPUSTAKAAN	3-995
p)	URUSAN KEARSIPAN	3-997
c.	URUSAN PEMERINTAH PILIHAN	3-998
1)	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	3-998
2)	URUSAN PARIWISATA	3-1001
3)	URUSAN PERTANIAN	3-1005
4)	URUSAN KEHUTANAN	3-1006
5)	URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3-1009
6)	URUSAN PERDAGANGAN	3-1011
7)	URUSAN PERINDUSTRIAN	3-1011
8)	URUSAN KETRANSMIGRASIAN	3-1012
d.	PENUNJANG URUSAN	3-1013
1)	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN URUSAN KEISTIMEWAAN	3-1013
2)	KEPEGAWAIAN DAERAH	3-1014
3)	URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	3-1014
3.	CAPAIAN KINERJA URUSAN TUGAS PEMBANTUAN	3-1015
4.	PENYELENGGARAAN URUSAN KEISTIMEWAAN	3-1015
a.	URUSAN KELEMBAGAAN	3-1015
b.	URUSAN KEBUDAYAAN	3-1016
c.	URUSAN PERTANAHAN	3-1018
d.	URUSAN TATA RUANG	3-1019

5.	PROGRAM STRATEGIS DIY.....	3-1020
a.	PENANGANAN COVID-19.....	3-1020
b.	JOGJA SMART PROVINCE.....	3-1020
c.	REFORMASI BIROKRASI	3-1021
d.	PELABUHAN TANJUNG ADIKARTA.....	3-1022
e.	JOGJA AGRO PARK.....	3-1023
f.	YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT	3-1023
g.	PENATAAN KAWASAN SUMBU FILOSOFIS	3-1026
h.	PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN LINTAS SELATAN	3-1027
i.	PEMBANGUNAN TAMAN BUDAYA SE DIY	3-1028
j.	PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT BERTARAF INTERNASIONAL RSUD WATES.....	3-1028
k.	REVITALISASI TPA PIYUNGAN	3-1030
l.	PENANGGULANGAN KEMISKINAN	3-1031
6.	PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN.....	3-1032
a.	KERJA SAMA ANTARDAERAH.....	3-1032
b.	KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH	3-1032
c.	PEMBINAAN BATAS DAERAH.....	3-1033
d.	PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA	3-1033
e.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3-1034
7.	TUGAS-TUGAS UMUM PEMERINTAHAN LAINNYA YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH.....	3-1035
a.	KOMISI PENANGGULANGAN AIDS DAERAH (KPAD) DIY.....	3-1035
b.	PALANG MERAH INDONESIA (PMI) DIY	3-1036
c.	TIM PENGGERAK PEMBINA KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP PKK).....	3-1036
d.	KOMISI INFORMASI DIY	3-1038
e.	TRANS JOGJA	3-1038
f.	LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH (LOD) DIY	3-1039
g.	KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI)	3-1043
h.	KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DIY	3-1044

i.	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)	
	DIY.....	3-1044
j.	PENANGANAN COVID-19.....	3-1045
BAB 4.	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN.....	4-1
A.	PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN TUGAS	
	PEMBANTUAN.....	4-1
1.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	4-1
a.	Satker Tanaman Pangan (049087)	4-1
b.	Satker Hortikultura (049088).....	4-2
c.	Satker Perkebunan (049089).....	4-2
d.	Satker Peternakan dan Kesehatan Hewan (049090).....	4-3
e.	Satker Sarana dan Sarana Pertanian (049094).....	4-4
f.	Permasalahan dan Solusi.....	4-4
1)	Pemasalahan.....	4-4
2)	Solusi.....	4-5
B.	PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN TUGAS	
	PEMBANTUAN.....	4-6
1.	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber	
	Daya Mineral	4-6
a.	Program Kegiatan yang Diterima dan	
	Pelaksanaannya	4-7
1)	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase	4-7
2)	Bidang Bina Marga.....	4-7
3)	Pengelolaan Sumber Daya Air	4-8
4)	Program Pengelolaan Penyelenggaraan Jalan	4-9
BAB 5.	PENYELENGGARAAN URUSAN KEISTIMEWAAN DIY	5-1
A.	URUSAN KELEMBAGAAN	5-1
1.	Kondisi Umum	5-1
2.	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021	5-3
3.	Permasalahan dan Solusi	5-6
B.	URUSAN KEBUDAYAAN.....	5-8
1.	Kondisi Umum	5-8
2.	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021	5-9

a.	BKK Kalurahan dan Belanja Tidak Terduga COVID-19	5-11
1)	BKK Kalurahan - Desa Balai Budaya	5-12
2)	BKK Kalurahan - Desa Mandiri Budaya	5-12
3)	BKK Kalurahan - Arsitektur	5-13
4)	BKK Kalurahan - Desa Maritim.....	5-13
5)	BKK Kalurahan - Padat Karya Penetapan Tata Nilai Semangat Ke-Yogyakarta-an.....	5-14
6)	BKK Kalurahan - Papan Nama Keistimewaan	5-15
7)	BKK Kalurahan – COVID-19 (Jagawarga).....	5-15
b.	BTT COVID-19	5-16
3.	Permasalahan dan Solusi	5-16
a.	Permasalahan	5-16
b.	Solusi	5-17
C.	URUSAN PERTANAHAN	5-17
1.	Kondisi Umum	5-17
2.	Program dan Kegiatan Tahun 2021.....	5-18
3.	Permasalahan dan Solusi	5-19
a.	Permasalahan	5-19
b.	Solusi	5-20
D.	URUSAN TATA RUANG	5-20
1.	Kondisi Umum	5-20
2.	Program dan Kegiatan Tahun 2021	5-21
3.	Permasalahan dan Solusi	5-23
a.	Permasalahan	5-23
b.	Solusi	5-23
BAB 6.	PROGRAM STRATEGIS DIY.....	6-1
A.	PENANGANAN COVID-19	6-1
1.	Latar Belakang.....	6-1
2.	Upaya Penanganan COVID-19 oleh BPBD	6-4
a.	Layanan Hotline.....	6-4
b.	Penanganan Jenazah dan Dekontaminasi	6-5
c.	Asistensi dan Peran Masyarakat.....	6-6

d.	Pos Kesehatan	6-6
e.	Pemeriksaan Swab dan Polymerase Chain Reaction test (PCR)	6-7
f.	Rujukan dan Karantina	6-7
g.	Pemeriksaan Gula Darah, Kolesterol, dan Asam Urat	6-7
h.	Pengelolaan Obat dan Alat Kesehatan,	6-7
i.	Promosi Kesehatan Bagi Seluruh Petugas dan Pegawai BPBD DIY melalui media Whatsapp Poskes dengan Nomor 0821-3446-1685.	6-8
j.	Pelayanan Pertolongan Pertama dan Pelayanan Protokol Kesehatan.	6-8
k.	Edukasi.....	6-8
l.	Lembaga yang Terlibat	6-9
3.	Upaya Penanganan COVID-19 oleh Dinsos	6-9
a.	Kota Yogyakarta.....	6-9
b.	Kabupaten Bantul.....	6-10
c.	Kabupaten Sleman	6-10
d.	Kabupaten Gunungkidul	6-11
4.	Upaya Penanganan COVID-19 oleh Dinas Kesehatan	6-11
5.	Upaya Penanganan COVID-19 oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	6-12
6.	Permasalahan dan Solusi	6-13
a.	Permasalahan	6-13
b.	Solusi	6-14
B.	JOGJA SMART PROVINCE	6-14
1.	Latar Belakang.....	6-14
2.	Progres sampai dengan Akhir Tahun 2021	6-16
3.	Permasalahan dan Solusi	6-18
C.	REFORMASI BIROKRASI.....	6-18
1.	Latar Belakang.....	6-18
2.	Progres sampai dengan Akhir Tahun 2021	6-19
3.	Permasalahan dan Solusi	6-23

D.	PELABUHAN TANJUNG ADIKARTA	6-24
1.	Latar Belakang.....	6-24
2.	Progres sampai dengan Akhir Tahun 2021	6-25
3.	Permasalahan dan Solusi	6-26
E.	JOGJA AGRO PARK	6-27
1.	Latar Belakang.....	6-27
2.	Progress Sampai dengan Tahun 2021	6-28
3.	Permasalahan dan Solusi	6-29
F.	BANDARA YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT	6-30
1.	Latar Belakang.....	6-30
2.	Progres sampai dengan Tahun 2021	6-31
a.	Aerotropolis.....	6-32
b.	Akses Jalan.....	6-33
c.	Layanan Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Menuju Bandara YIA.....	6-33
d.	Layanan Angkutan Umum Berbasis Rel Menuju Bandara YIA	6-33
e.	VVIP Room	6-34
f.	SPAM Regional Kamijoro	6-34
3.	Permasalahan dan Solusi	6-35
a.	Permasalahan	6-35
b.	Solusi	6-35
G.	PENATAAN KAWASAN SUMBU FILOSOFI.....	6-37
1.	Latar Belakang.....	6-37
2.	Progres Sampai Dengan Tahun 2021	6-39
a.	Penyusunan Naskah, Studi, Kajian dan Sosialisasi yang sudah dilaksanakan:.....	6-39
b.	Rehabilitasi Pedestrian Malioboro	6-45
c.	Pemeliharaan Bangunan Cirebon dan Cendrawasih	6-46
d.	Dokumen Perencanaan dan <i>Appraisal</i> Pengadaan Tanah Akses Penghubung Tempat Parkir Beskalan dan Eks Bioskop Indra.....	6-46

e.	Penataan dan Pengendalian Lalu Lintas di Kawasan Semi Pedestrian Malioboro	6-46
3.	Permasalahan dan Solusi	6-48
a.	Permasalahan	6-48
b.	Solusi	6-48
H.	PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN LINTAS SELATAN	6-49
1.	Latar Belakang	6-49
2.	Progress Sampai dengan Tahun 2021	6-50
a.	Perencanaan Pembebasan Lahan untuk Segmen Legundi – Planjan (Lanjutan; 9,5 km)	6-52
b.	Persiapan Pembebasan Lahan untuk Segmen Garongan-Cogot (Lanjutan; 8,89 km)	6-53
3.	Permasalahan dan Solusi	6-55
a.	Permasalahan	6-55
b.	Solusi	6-55
I.	PEMBANGUNAN TAMAN BUDAYA SE DIY	6-55
1.	Latar Belakang	6-55
2.	Progres sampai dengan Tahun 2021	6-56
3.	Permasalahan dan Solusi	6-58
J.	PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT BERTARAF INTERNASIONAL - RSUD WATES	6-59
1.	Latar Belakang	6-59
2.	Progres Sampai dengan Tahun 2021	6-60
a.	Pemanfaatan Bangunan dan Jenis Layanan	6-60
1)	Gedung Medik Terpadu	6-60
2)	Gedung Rawat Inap	6-61
b.	Pengadaan Alat Kesehatan/Kedokteran	6-62
3.	Permasalahan dan Solusi	6-62
a.	Permasalahan:	6-62
b.	Solusi/penyelesaian:	6-62

K.	REVITALISASI TPA PIYUNGAN	6-63
1.	Latar Belakang.....	6-63
2.	Progress Sampai dengan Tahun 2021	6-64
3.	Permasalahan dan Solusi	6-65
a.	Permasalahan.....	6-65
b.	Solusi	6-66
L.	PENANGGULANGAN KEMISKINAN.....	6-66
1.	Latar Belakang.....	6-66
2.	Progres Sampai Dengan Tahun 2021	6-67
a.	Ulasan kegiatan penanggulangan kemiskinan di DIY	6-67
b.	Capaian Kemiskinan pada 2021.....	6-70
3.	Permasalahan dan Solusi	6-72
BAB 7. PENYELENGGARA TUGAS UMUM PEMERINTAH		7-1
A.	KERJA SAMA ANTAR DAERAH	7-1
1.	Kerja sama Daerah Dengan Pemerintah Pusat	7-1
a.	Sinergi Dengan Pemerintah Pusat.....	7-1
2.	Kerja sama Antar Daerah	7-4
a.	Daerah yang melakukan kerja sama.....	7-4
b.	Bidang Kerja sama	7-7
c.	Mitra Praja Utama (MPU).....	7-7
3.	Kerja sama Daerah dengan Pihak Ketiga.....	7-8
a.	Pihak Ketiga/Badan/Swasta yang telah bekerjasama	7-8
b.	Bidang Kerja sama	7-10
4.	Permasalahan dan Solusi	7-10
a.	Permasalahan.....	7-10
b.	Solusi	7-10
B.	KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH	7-10
1.	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)	7-10
2.	Komite Intelijen Daerah (Kominda).....	7-12

3.	Permasalahan dan Solusi	7-13
a.	Forkopimda	7-13
1)	Permasalahan	7-13
2)	Solusi.....	7-13
b.	Kominda.....	7-13
1)	Permasalahan	7-13
2)	Solusi.....	7-14
C.	PEMBINAAN BATAS DAERAH	7-14
1.	Gambaran Umum.....	7-14
2.	Program dan Kegiatan Pembinaan Batas Wilayah.....	7-15
3.	Permasalahan dan Solusi	7-16
a.	Permasalahan	7-16
b.	Solusi	7-16
D.	PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA	7-17
1.	Gambaran Umum.....	7-17
2.	Potensi Bencana	7-18
a.	Banjir	7-19
b.	Epidemi dan Wabah Penyakit.....	7-19
c.	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	7-19
d.	Gempa Bumi	7-19
e.	Tsunami	7-20
f.	Kegagalan Teknologi.....	7-20
g.	Kekeringan.....	7-21
h.	Letusan Gunung Api	7-21
i.	Cuaca ekstrim	7-21
j.	Tanah Longsor	7-22
k.	Kebakaran Gedung dan Permukiman.....	7-22
l.	Konflik Sosial.....	7-22
3.	Permasalahan dan Solusi	7-23
a.	Permasalahan	7-23
b.	Solusi	7-24

E. PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7-25
1. Gambaran Umum.....	7-25
2. Permasalahan dan Solusi	7-27
a. Permasalahan.....	7-27
b. Solusi	7-27
F. TUGAS-TUGAS UMUM PEMERINTAHAN LAINNYA YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH.....	7-28
1. Lembaga Ombudsman Daerah (LOD).....	7-28
a. Narasi Umum.....	7-28
b. Bidang Sosialisasi, Kerja Sama, dan Penguatan Jaringan (SKPJ)	7-31
c. Bidang Monitoring dan Evaluasi.....	7-31
d. Bidang Penelitian dan Pengembangan Jaringan	7-32
e. Permasalahan dan Solusi.....	7-34
1) Properti.....	7-34
2) Pendidikan.....	7-34
3) Ketenagakerjaan	7-35
4) Keuangan	7-36
5) Pertanahan	7-36
2. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)	7-37
a. Narasi Umum.....	7-37
b. Permasalahan dan Solusi.....	7-37
3. Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DIY	7-38
a. Narasi Umum.....	7-38
b. Permasalahan dan Solusi.....	7-39
4. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)	7-40
a. Narasi Umum.....	7-40
b. Permasalahan dan Solusi.....	7-42
5. Badan Pengawasan Pemilihan Umum DIY	7-42
a. Narasi Umum.....	7-42
b. Permasalahan dan Solusi.....	7-44

6.	Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD).....	7-45
a.	Narasi Umum.....	7-45
b.	Permasalahan dan Solusi.....	7-47
1)	Permasalahan:	7-47
2)	Solusi:.....	7-47
7.	Palang Merah Indonesia (PMI).....	7-48
a.	Narasi Umum.....	7-48
1)	Visi.....	7-49
2)	Misi	7-49
b.	Permasalahan dan Solusi.....	7-51
1)	Permasalahan	7-51
2)	Solusi	7-51
8.	Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK) DIY	7-51
a.	Narasi Umum.....	7-51
9.	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY	7-52
a.	Narasi Umum.....	7-52
b.	Permasalahan dan Solusi.....	7-55
10.	Komisi Informasi DIY	7-56
a.	Narasi Umum.....	7-56
1)	Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI).....	7-57
2)	Bidang Advokasi Sosialisasi dan Edukasi (ASE)	7-57
3)	Bidang Kelembagaan	7-60
b.	Permasalahan dan Solusi.....	7-63
11.	Trans Jogja.....	7-64
a.	Narasi Umum.....	7-64
b.	Permasalahan dan Solusi.....	7-70
1)	Permasalahan:	7-70
2)	Solusi:.....	7-70
BAB 8.	PENUTUP	8-1

Daftar Tabel

Tabel 1.1.	Tujuan yang Hendak Dicapai	1-17
Tabel 1.2.	Sasaran Pembangunan DIY	1-17
Tabel 1.3.	Rumusan Prioritas Daerah	1-30
Tabel 1.4.	Interkoneksi Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional Tahun 2021	1-32
Tabel 1.5.	Pembagian Wilayah DIY menurut Kabupaten/Kota	1-34
Tabel 1.6.	Jumlah Penduduk DIY Semester II Tahun 2021 Menurut Wilayah Administrasi Pemerintahan	1-37
Tabel 1.7.	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2017-2021	1-39
Tabel 1.8.	Penduduk Usia Kerja Menurut Kegiatan DIY Tahun 2017-2021	1-39
Tabel 1.9.	Jumlah Penduduk Usia Sekolah Menurut Wilayah di DIY Tahun 2021	1-46
Tabel 1.10.	Jumlah Lembaga Pendidikan Formal di DIY Tahun 2021	1-47
Tabel 1.11.	Jumlah Guru di DIY Tahun 2021	1-48
Tabel 1.12.	Angka Mengulang dan Angka Putus Sekolah Tahun 2021	1-51
Tabel 1.13.	Perkembangan PDRB Sektor Industri Pengolahan di DIY Tahun 2017-2021	1-53
Tabel 1.14.	PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Tahun 2021	1-56
Tabel 1.15.	Perkembangan Jumlah Wisatawan, MICE, dan Rata-rata Lama Tinggal di DIY Tahun 2015-2021	1-56
Tabel 1.16.	Jumlah Wisatawan yang mengunjungi Destinasi Wisata per Kabupaten/Kota di DIY pada Tahun 2017-2021	1-57

Tabel 1.17. Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Tanaman Pangan Unggulan Tahun 2020-2021*	1-58
Tabel 1.18. Jumlah Kapal Perikanan di DIY Tahun 2019-2021 (Unit)	1-62
Tabel 1.19. Produksi Hortikultura Unggulan DIY Tahun 2020-2021	1-62
Tabel 1.20. Produksi Komoditas Perkebunan Unggulan DIY Tahun 2020-2021**	1-65
Tabel 1.21. Populasi Ternak Unggulan di DIY Tahun 2020-2021*	1-65
Tabel 1.22. Target dan Realisasi Produksi Minyak Kayu Putih di DIY Tahun 2017-2021	1-67
Tabel 1.23. Produksi Daun Kayu Putih di DIY tahun 2021	1-68
Tabel 1.24. Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (%) (C to C, TW I – IV 2021 terhadap TW I – IV 2020)	1-70
Tabel 1.25. Nilai dan Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Pengeluaran Tahun 2017-2021 (menurut jenis pengeluaran)	1-71
Tabel 1.26. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota, 2017-2021	1-71
Tabel 1.27. Nilai Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi Kota Yogyakarta Menurut Pengeluaran Tahun 2020-2021	1-72
Tabel 1.28. Data Pilah Pegawai Pemda DIY Tahun 2017-2021 (Berdasarkan Golongan)	1-76
Tabel 1.29. Data Pilah Pegawai Pemda DIY Tahun 2017-2021 (Berdasarkan Pendidikan)	1-77
Tabel 1.30. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021	1-77
Tabel 1.31. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	1-79
Tabel 1.32. Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2021	1-80
Tabel 1.33. Rincian Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2021	1-81

Tabel 2.1.	Komposisi Pendapatan Pemda DIY Tahun 2021 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)	2-6
Tabel 2.2.	Capaian Realisasi Pendapatan Pemda DIY Tahun 2021 terhadap Rencana Pendapatan RPJMD (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)	2-6
Tabel 2.3.	Realisasi Pendapatan Asli Daerah DIY Tahun 2021 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)	2-7
Tabel 2.4.	Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah DIY Tahun 2021 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)	2-8
Tabel 2.5.	Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah DIY Tahun 2021 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)	2-9
Tabel 2.6.	Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan DIY Tahun 2021 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI).....	2-14
Tabel 2.7.	Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah DIY Tahun 2021 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)	2-16
Tabel 2.8.	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer DIY Tahun Anggaran 2021 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI).....	2-17
Tabel 2.9.	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat DIY Tahun 2021 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)	2-18
Tabel 2.10.	Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik DIY Tahun 2021 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)	2-19
Tabel 2.11.	Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik DIY Tahun 2021 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI).....	2-20
Tabel 2.12.	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2021 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)	2-21
Tabel 2.13.	Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah DIY Tahun 2021 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)	2-22
Tabel 2.14.	Anggaran dan Realisasi Belanja menurut Organisasi Perangkat Daerah DIY Tahun 2021(sebelum dilakukan Audit)	2-27

Tabel 2.15. Realisasi Belanja DIY Tahun 2021 (sebelum dilakukan Audit BPK RI).....	2-29
Tabel 2.16. Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi DIY Tahun 2021 (sebelum dilakukan Audit).....	2-29
Tabel 2.17. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai DIY Tahun 2021 (sebelum dilakukan Audit).....	2-30
Tabel 2.18. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa DIY Tahun 2021 (sebelum dilakukan Audit).....	2-31
Tabel 2.19. Realisasi Belanja Hibah Tahun 2021 (sebelum dilakukan Audit)	2-34
Tabel 2.20. Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial DIY Tahun 2021 (sebelum dilakukan Audit)	2-35
Tabel 2.21. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal DIY Tahun 2021 (sebelum dilakukan Audit).....	2-35
Tabel 2.22. Anggaran dan Realisasi Belanja Dana Keistimewaan Tahun 2021 (sebelum dilakukan Audit)	2-37
Tabel 2.23. Anggaran dan Realisasi Belanja Tak Terduga 2021 (sebelum dilakukan Audit).....	2-40
Tabel 2.24. Anggaran dan Realisasi Belanja Tak Terduga 2021 untuk Penanganan COVID-19 (sebelum dilakukan Audit)	2-41
Tabel 2.25. Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota DIY Tahun 2021 (sebelum dilakukan Audit)	2-43
Tabel 2.26. Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Kabupaten/Kota DIY Tahun 2021 (sebelum dilakukan Audit)	2-44
Tabel 2.27. Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi atau Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa DIY Tahun 2021 (sebelum dilakukan Audit)	2-45
Tabel 2.28. Rekapitulasi Buku Induk Inventaris Tahun 2021.....	2-55
Tabel 2.29. Daftar Obyek Tanah yang disertifikatkan	2-57
Tabel 2.30. Warkah Tanah Pemda DIY Pada Tahun 2021	2-57

Tabel 2.31. Hasil Penjualan dan Lelang Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2021.....	2-64
Tabel 2.32. Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan/atau Bangunan yang Dimanfaatkan Melalui Sewa	2-70
Tabel 2.33. Barang Milik Daerah Berupa Rumah Daerah yang Dimanfaatkan Melalui Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2-72
Tabel 2.34. Barang Milik Daerah yang Dipotimalkan Melalui Pinjam Pakai.....	2-73
Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemda DIY	3-1
Tabel 3.2. IPM DIY dan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2017-2021	3-6
Tabel 3.3. IPM Kabupaten/ Kota di DIY menurut Komponen 2021.....	3-7
Tabel 3.4. IDG Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2018-2020	3-9
Tabel 3.5. Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen, Perempuan Sebagai Tenaga Profesional, dan Sumbangan Pendapatan Perempuan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2018-2020	3-10
Tabel 3.6. Gini Ratio DIY dan Indonesia Periode September 2020 – September 2021	3-15
Tabel 3.7. Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2016-2020 (%)	3-18
Tabel 3.8. Warisan Budaya Benda Kekayaan DIY yang ditetapkan di Tingkat Nasional dan Internasional Tahun 2007 -2021	3-19
Tabel 3.9. Penetapan Warisan Budaya Tak benda Kekayaan DIY tingkat Nasional dan Internasional Pada Tahun 2013 – 2021	3-20
Tabel 3.10. Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (%).....	3-22
Tabel 3.11. Nilai dan Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Pengeluaran Tahun 2017-2021.....	3-23
Tabel 3.12. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota, 2017-2021	3-23

Tabel 3.13. Kategori Nilai IKLH secara Nasional	3-25
Tabel 3.14. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Eksisting dengan Rencana Pola Ruang RTRW DIY	3-27
Tabel 3.15. Daftar Dokumen Perencanaan Tata Ruang di 18 Satuan Ruang Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta.....	3-32
Tabel 3.16. Nilai Per Komponen dalam Penilaian AKIP Tahun 2019-2020.....	3-37
Tabel 3.17. Capaian Data Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.....	3-41
Tabel 3.18. Capaian Pendaftaran Tanah Desa.....	3-41
Tabel 3.19. Capaian Indikator Kinerja Program Pemda DIY Tahun 2021	3-43
Tabel 3.20. Rincian Jumlah Sekolah yang Memenuhi SNP>90	3-47
Tabel 3.21. Target dan Capaian Indikator Program Persentase Sekolah Menengah dan Khusus yang Memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) Tahun 2021	3-47
Tabel 3.22. Target dan Capaian Indikator Program Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 2021	3-49
Tabel 3.23. Jumlah Pemuda Kader Aktif 2020-2021 di DIY	3-50
Tabel 3.24. Target dan Capaian Indikator Program Peningkatan Jumlah Pemuda Kader Aktif Tahun 2021	3-51
Tabel 3.25. Target dan Capaian Indikator Program Persentase Sekolah yang Melakukan Pendidikan Berbasis Budaya dengan Kategori Maju Tahun 2021	3-52
Tabel 3.26. Target dan Capaian Indikator Program Angka Harapan Hidup Tahun 2021	3-53
Tabel 3.27. Target dan Capaian Indikator Program Jumlah Kabupaten/Kota Layak Anak berkategori Nindya ke atas Tahun 2021	3-57
Tabel 3.28. Target dan Capaian Indikator Program Persentase Perempuan Pengambil Keputusan Di Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif Tahun 2021.....	3-58

Tabel 3.29. Target dan Capaian Indikator Program <i>Total Fertility Rate</i> (TFR) Tahun 2021.....	3-59
Tabel 3.30. Target dan Capaian Indikator Program Peningkatan Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang Tahun 2021.....	3-60
Tabel 3.31. Jumlah Tindak Kejahatan Terlaporkan dan Angka Kejahatan per 10.000 Penduduk Tahun 2017-2021	3-62
Tabel 3.32. Target dan Capaian Indikator Program Angka Kejahatan (<i>Crime Rate</i>) Tahun 2021	3-63
Tabel 3.33. Target dan Capaian Indikator Program Persentase Peningkatan Penumbuhan Wirausaha Baru Tahun 2021.....	3-65
Tabel 3.34. Target dan Capaian Indikator Program Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2021	3-66
Tabel 3.35. Jumlah Pengeluaran Per Kapita DIY Tahun 2017-2021	3-68
Tabel 3.36. Target dan Capaian Indikator Program Pengeluaran Per Kapita Masyarakat Tahun 2021	3-68
Tabel 3.37. Target dan Capaian Indikator Program Persentase Peningkatan Budaya Benda yang Dilestarikan Tahun 2021	3-69
Tabel 3.38. Target dan Capaian Indikator Program Persentase Peningkatan Budaya Takbenda yang Dilestarikan Tahun 2021	3-71
Tabel 3.39. Target dan Capaian Indikator Program Kontribusi sektor pertanian, industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum serta perdagangan dalam PDRB DIY Tahun 2021	3-74
Tabel 3.40. Perkembangan Jumlah Wisatawan, MICE, dan Rata-rata Lama Tinggal di DIY Tahun 2015-2021.....	3-77
Tabel 3.41. Target dan Capaian Indikator Program Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2021.....	3-80
Tabel 3.42. Desa Mandiri Budaya 2020.....	3-83
Tabel 3.43. Desa/Kalurahan Mandiri Budaya yang Diusulkan Pada Tahun 2021	3-83

Tabel 3.44. Target dan Capaian Indikator Program Jumlah Desa Mandiri Budaya (Desa/Kampung Wisata, Desa/Kelurahan Budaya, Desa Preneur, Desa Prima) Tahun 2021	3-84
Tabel 3.45. Hasil Perhitungan Agregasi IKA DIY dan Kabupaten/Kota tahun 2018 – 2021	3-86
Tabel 3.46. Target dan Capaian Indikator Program Indeks Kualitas Air (IKA) Tahun 2021	3-86
Tabel 3.47. Data IKU DIY tahun 2021	3-89
Tabel 3.48. Kategori IKU	3-89
Tabel 3.49. Target dan Capaian Indikator Program Indeks Kualitas Udara Tahun 2021	3-89
Tabel 3.50. Tren Nilai IKU Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2018-2021	3-90
Tabel 3.51. Data Luas dan Hasil Konversi Penggunaan Lahan	3-93
Tabel 3.52. Target dan Capaian Indikator Program Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Tahun 2021	3-94
Tabel 3.53. Jumlah Kapanewon/Kemantren Berdasarkan Tingkat Risiko Bencana	3-95
Tabel 3.54. Target dan Capaian Indikator Program Indeks Risiko Bencana Tahun 2021	3-96
Tabel 3.55. Target dan Capaian Indikator Program Persentase Dukungan Program Pemerintah Daerah Terhadap Keterwujudan Struktur dan Pola Ruang Tahun 2021	3-97
Tabel 3.56. Nilai Keterpaduan Program Struktur Ruang Tahun 2021	3-97
Tabel 3.57. Target dan Capaian Indikator Program Persentase Peningkatan PDRB pada Kabupaten yang belum maju (GK, KP, Bantul) Tahun 2021	3-101
Tabel 3.58. PDRB ADHK dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota DIY 2021	3-101
Tabel 3.59. Target dan Capaian Indikator Program Persentase penyediaan sarana dan prasarana layanan transportasi pada sistem jaringan jalan provinsi Tahun 2021	3-103

Tabel 3.60. Kondisi Jalan Provinsi Per Kabupaten /Kota di Wilayah DIY pada Tahun 2021	3-105
Tabel 3.61. Target dan Capaian Indikator Program Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2021.....	3-107
Tabel 3.62. Target dan Capaian Indikator Program Optimalisasi Aset-aset Pemda DIY Tahun 2021.....	3-109
Tabel 3.63. Rincian Penerimaan Pendapatan dari Optimalisasi Aset 2021	3-109
Tabel 3.64. Target dan Capaian Indikator Program Nilai Eksternal Pelayanan Publik, Nilai Internal Integritas Organisasi, dan Nilai Eksternal Persepsi Korupsi Tahun 2021.....	3-110
Tabel 3.65. Unit Kerja Pelayanan Predikat WBK/WBBM.....	3-112
Tabel 3.66. Target dan Capaian Indikator Program Terwujudnya Pelaksanaan Urusan Kelembagaan Sesuai Dengan Perdas Kelembagaan Tahun 2021	3-113
Tabel 3.67. Target dan Capaian Indikator Program Persentase Fasilitas Tertib Administrasi Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa Tahun 2021	3-115
Tabel 3.68. Capaian Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.....	3-116
Tabel 3.69. Capaian Pendaftaran Tanah Desa.....	3-116
Tabel 3.70. Capaian Penetapan Peraturan Desa/Kalurahan	3-116
Tabel 3.71. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022).....	3-124
Tabel 3.72. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Pendidikan Tahun 2021	3-127
Tabel 3.73. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022).....	3-152

Tabel 3.74. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Kesehatan Tahun 2021	3-155
Tabel 3.75. Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)	3-182
Tabel 3.76. Jumlah SR Air Limbah Rumah Tangga.....	3-184
Tabel 3.77. Jumlah IPAL Komunal sampai dengan Tahun 2021	3-185
Tabel 3.78. Pengelolaan Sampah Perkotaan Kabupaten/Kota Tahun 2021 (ton/hari)	3-186
Tabel 3.79. Infrastruktur Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota di DIY	3-187
Tabel 3.80. Data Kependudukan D.I. Yogyakarta Terlayani Air Minum Tahun 2021	3-189
Tabel 3.81. Rincian hitungan capaian kinerja tahun 2021 disajikan pada tabel di bawah:	3-192
Tabel 3.82. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Sub Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2021	3-194
Tabel 3.83. Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Penataan Ruang Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)	3-209
Tabel 3.84. Penilaian Hasil Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang DIY (Metode pembobotan dan skoring)	3-209
Tabel 3.85. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Sub Urusan Penataan Ruang Tahun 2021.....	3-212
Tabel 3.86. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)	3-219
Tabel 3.87. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021	3-221

Tabel 3.88. Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022).....	3-225
Tabel 3.89. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021	3-227
Tabel 3.90. Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)	3-247
Tabel 3.91. Detail Indeks Ketahanan Nasional DIY disandingkan dengan capaian skor Nasional per Desember 2021	3-248
Tabel 3.92. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Sub Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021	3-250
Tabel 3.93. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022).....	3-267
Tabel 3.94. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Sub Urusan Penanggulangan Bencana Tahun 2021.....	3-272
Tabel 3.95. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Sosial Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)	3-287
Tabel 3.96. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Sosial Tahun 2021	3-290
Tabel 3.97. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022).....	3-345
Tabel 3.98. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Tenaga Kerja Tahun 2021	3-348
Tabel 3.99. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022).....	3-358

Tabel 3.100. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021	3-362
Tabel 3.101. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pangan Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)	3-369
Tabel 3.102. Capaian Program dan Sub Kegiatan Urusan Pangan Tahun 2021	3-376
Tabel 3.103. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022).....	3-381
Tabel 3.104. Rincian Permohonan Ijin Penetapan Lokasi	3-382
Tabel 3.105. Capaian Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.....	3-383
Tabel 3.106. Capaian Pendaftaran Tanah Desa.....	3-383
Tabel 3.107. Capaian Program dan Sub Kegiatan Urusan Pertanahan Tahun 2021	3-385
Tabel 3.108. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022).....	3-393
Tabel 3.109. Capaian Program dan Sub Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2021	3-395
Tabel 3.110. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022).....	3-415
Tabel 3.111. Capaian Program dan Sub Kegiatan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021	3-417
Tabel 3.112. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)	3-422
Tabel 3.113. Capaian Program dan Sub Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021	3-426

Tabel 3.114. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)	3-433
Tabel 3.115. Rata-Rata Usia Menikah Perempuan.....	3-433
Tabel 3.116. Capaian Program dan Sub Kegiatan Urusan Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Tahun 2021.....	3-437
Tabel 3.117. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022).....	3-441
Tabel 3.118. Capaian Program dan Sub Kegiatan Urusan Perhubungan Tahun 2021	3-445
Tabel 3.119. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Komunikasi dan Informasi Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022).....	3-469
Tabel 3.120. Capaian Program dan Sub Kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2021	3-471
Tabel 3.121. Perkembangan Jumlah Koperasi Tahun 2017-2021	3-472
Tabel 3.122. Perkembangan Jumlah UMKM Menurut Skala Usaha Tahun 2017-2021	3-473
Tabel 3.123. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Koperasi dan UKM Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022).....	3-475
Tabel 3.124. Capaian Program dan Sub Kegiatan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021	3-477
Tabel 3.125. Perkembangan Investasi di DIY 2017 – 2021.....	3-500
Tabel 3.126. Perkembangan Investasi Kabupaten/Kota di DIY 2017 - 2021 (Rp Juta)	3-503
Tabel 3.127. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)	3-506

Tabel 3.128. Capaian Program dan Sub Kegiatan Urusan Penanaman Modal Tahun 2021.....	3-508
Tabel 3.129. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)	3-512
Tabel 3.130. Capaian Program dan Sub Kegiatan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021.....	3-515
Tabel 3.131. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Statistik Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022).....	3-523
Tabel 3.132. Capaian Program dan Sub Kegiatan Urusan Statistik Tahun 2021	3-525
Tabel 3.133. Capaian Program dan Sub Kegiatan Urusan Persandian Tahun 2021	3-536
Tabel 3.134. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2020-2021, serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022).....	3-537
Tabel 3.135. Budaya Benda yang dikelola dan dilestarikan pada Tahun 2021	3-539
Tabel 3.136. Pengembangan Nilai Sejarah, Warisan Budaya, dan Museum pada Tahun 2021	3-540
Tabel 3.137. Penyelenggaraan <i>Event</i> Taman Budaya DIY pada Tahun 2021	3-542
Tabel 3.138. Pengembangan Kinerja Seni di DIY pada Tahun 2021	3-542
Tabel 3.139. Capaian Program dan Sub Kegiatan Urusan Kebudayaan Tahun 2021	3-544
Tabel 3.140. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022).....	3-558
Tabel 3.141. Capaian Program dan Sub Kegiatan Urusan Perpustakaan Tahun 2021	3-560

Tabel 3.142. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022).....	3-571
Tabel 3.143. Jumlah Pemanfaatan Arsip Tahun 2021	3-573
Tabel 3.144. Capaian Program dan Sub Kegiatan Urusan Kearsipan Tahun 2021	3-574
Tabel 3.145. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)	3-578
Tabel 3.146. Capaian Program dan Sub Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2021	3-580
Tabel 3.147. Perkembangan Hotel dan Akomodasi Lain Per Kab/Kota di DIY Tahun 2020-2021	3-597
Tabel 3.148. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022).....	3-598
Tabel 3.149. Capaian Program dan Sub Kegiatan Urusan Pariwisata Tahun 2021	3-600
Tabel 3.150. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022).....	3-616
Tabel 3.151. PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahunan Berdasarkan Harga Konstan 2010 (Juta Rupiah) series 2017-2021	3-617
Tabel 3.152. Produksi Tanaman Pangan di DIY Tahun 2020-2021.....	3-618
Tabel 3.153. Produksi Hortikultura di DIY Tahun 2020-2021	3-621
Tabel 3.154. Populasi Ternak di DIY Tahun 2020-2021	3-621
Tabel 3.155. Produksi Komoditas Perkebunan DIY Tahun 2020-2021**	3-623
Tabel 3.156. Capaian Program dan Sub Kegiatan Urusan Pertanian Tahun 2021	3-625

Tabel 3.157. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kehutanan Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022).....	3-638
Tabel 3.158. Angka produksi kehutanan 2020-2021.....	3-639
Tabel 3.159. Capaian Program dan Sub Kegiatan Urusan Kehutanan Tahun 2021	3-641
Tabel 3.160. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022).....	3-649
Tabel 3.161. Capaian Program dan Sub Kegiatan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2021	3-652
Tabel 3.162. Perkembangan Ekspor DIY Tahun 2017-2021	3-659
Tabel 3.163. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022).....	3-659
Tabel 3.164. Capaian Program dan Sub Kegiatan Urusan Perdagangan Tahun 2021	3-661
Tabel 3.165. Perkembangan PDRB Industri Pengolahan 2017 - 2021.....	3-666
Tabel 3.166. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022).....	3-667
Tabel 3.167. Capaian Program dan Sub Kegiatan Urusan Perindustrian Tahun 2021	3-668
Tabel 3.168. Jumlah Pemberangkatan Transmigran ke Luar Jawa dari DIY tahun 2017-2021	3-680
Tabel 3.169. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Ketransmigrasian Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022).....	3-681
Tabel 3.170. Capaian Program dan Sub Kegiatan Urusan Ketransmigrasian Tahun 2021	3-683

Tabel 3.171. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)	3-686
Tabel 3.172. Capaian Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2021.....	3-688
Tabel 3.173. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Urusan Keistimewaan Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022).....	3-715
Tabel 3.174. Pengukuran Capaian Fisik dan Keuangan Dana Keistimewaan Tahun 2021	3-716
Tabel 3.175. Pengukuran Capaian Sasaran	3-718
Tabel 3.176. Pengukuran Capaian Sasaran	3-719
Tabel 3.177. Capaian Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Urusan Keistimewaan Tahun 2021	720
Tabel 3.178. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Administrasi Keuangan Daerah Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)	3-735
Tabel 3.179. Capaian Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Administrasi Keuangan Daerah Tahun 2021	3-738
Tabel 3.180. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sub Urusan Kepegawaian Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)	3-769
Tabel 3.181. Capaian Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Kepegawaian Tahun 2021.....	3-771
Tabel 3.182. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sub Urusan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)	3-781
Tabel 3.183. Capaian Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021	3-784
Tabel 3.184. Nama Bupati dan wakil Bupati yang dilantik 26 Februari Tahun 2021	3-793

Tabel 3.185. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Tata Pemerintahan Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)	3-794
Tabel 3.186. Capaian Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Tata Pemerintahan Tahun 2021	3-796
Tabel 3.187. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitas Perundang-undangan dan Hukum Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022).....	3-807
Tabel 3.188. Kegiatan pembahasan Raperda menjadi Perda oleh Pemda DIY pada Tahun 2021.....	3-808
Tabel 3.189. Capaian Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Fasilitas Perundang-undangan dan Hukum Tahun 2021	3-815
Tabel 3.190. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitas Perekonomian dan SDA Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)	3-826
Tabel 3.191. Capaian Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Fasilitas Perekonomian dan SDA Tahun 2021	3-832
Tabel 3.192. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitas Kesra Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD (2022)	3-837
Tabel 3.193. Capaian Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Fasilitas Kesra Tahun 2021.....	3-840
Tabel 3.194. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Kelembagaan dan Tata Laksana Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)	3-848
Tabel 3.195. Capaian Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Kelembagaan dan Tata Laksana Tahun 2021	3-850
Tabel 3.196. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitas Administrasi Pembangunan Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022).....	3-864

Tabel 3.197. Capaian Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Tahun 2021	3-870
Tabel 3.198. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitasi Umum, Kehumasan dan Protokol Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022).....	3-877
Tabel 3.199. Capaian Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Fasilitasi Administrasi Umum, Kehumasan dan Protokol Tahun 2021	3-879
Tabel 3.200. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitasi Pemerintahan Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022).....	3-888
Tabel 3.201. Capaian Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Fasilitasi Pemerintahan Tahun 2021.....	3-890
Tabel 3.202. Rekapitulasi Hasil Pemantauan TLHP BPK RI Tahun 2002 s.d. Semester I Tahun 2021 Pada Pemda DIY.....	3-900
Tabel 3.203. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Pengawasan Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)	3-902
Tabel 3.204. Capaian Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Pengawasan Tahun 2021	3-904
Tabel 3.205. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)	3-913
Tabel 3.206. Capaian Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021	3-916
Tabel 3.207. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sekretaris Dewan Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022).....	3-919
Tabel 3.208. Capaian Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Sekretaris Dewan Tahun 2021	3-922

Tabel 4.1.	Rekapitulasi Satker Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Penerima DIPA Tugas Pembantuan Tahun 2021.....	4-1
Tabel 4.2.	Tabel Pagu Anggaran Tugas Pembantuan Dinas PUPESDM DIY Tahun 2021.....	4-7
Tabel 4.3.	Capaian Pelaksanaan Program/Kegiatan Tugas Pembantuan Program Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2021.....	4-8
Tabel 4.4.	Lokasi Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan di DIY Tahun 2021	4-10
Tabel 4.5.	Lokasi Kegiatan Preservasi Jembatan di DIY Tahun 2021	4-10
Tabel 4.6.	Lokasi Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan di DIY Tahun 2021	4-10
Tabel 4.7.	Target dan Realisasi Kegiatan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Jalan di DIY TA 2021.....	4-11
Tabel 4.8.	Cakupan Perjanjian Kinerja TP Kegiatan Penyelenggaraan Jalan TA 2021	4-11
Tabel 4.9.	Pengukuran Kinerja Satker Dinas PUPESDM DIY Tahun 2021	4-12
Tabel 5.1.	Realisasi Keuangan Program dan Kegiatan Urusan Kelembagaan Tahun Anggaran 2021	5-4
Tabel 5.2.	Realisasi Keuangan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan Tahun Anggaran 2021	5-9
Tabel 5.3.	Realisasi Keuangan Program dan Kegiatan Urusan Pertanahan Tahun Anggaran 2021	5-18
Tabel 5.4.	Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik Urusan Tata Ruang Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2021	5-22
Tabel 6.1.	Lokasi Shelter di Kota Yogyakarta.....	6-9
Tabel 6.2.	Lokasi Shelter di Kabupaten Bantul	6-10
Tabel 6.3.	Lokasi Shelter di Kabupaten Sleman.....	6-10
Tabel 6.4.	Lokasi Shelter di Kabupaten Gunungkidul	6-11
Tabel 6.5.	Progres vaksinasi di DIY per 31 Desember 2021	6-11

Tabel 6.6.	Daftar Rumah Sakit Rujukan COVID-19 di DIY (Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/169/2020).....	6-12
Tabel 6.7.	Daftar Rumah Sakit Rujukan COVID-19 di DIY (Berdasarkan KepGub DIY Nomor 162/KEP/2021)	6-12
Tabel 6.8.	Komponen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB) pada tahun 2020.....	6-19
Tabel 6.9.	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Birokrasi Tahun 2020	6-20
Tabel 6.10.	Capaian 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi DIY.....	6-20
Tabel 6.11.	Unit Kerja Pelayanan Predikat WBK/WBBM.....	6-22
Tabel 6.12.	Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	6-23
Tabel 6.13.	Lalu Lintas Penerbangan di Bandara YIA Tahun 2020 - 2021	6-31
Tabel 6.14.	Hasil Penegakan Hukum Lalu Lintas di Kawasan Sumbu Filosofi.....	6-47
Tabel 6.15.	Jadwal Rencana Pelaksanaan Pembebasan Lahan JJLS DIY Segmen Garongan - Congot.....	6-53
Tabel 6.16.	Ringkasan progress pembebasan lahan dan konstruksi Jalur Jalan Lintas Selatan DIY.....	6-54
Tabel 6.17.	Progres Pembangunan Taman Budaya se-DIY.....	6-56
Tabel 6.18.	Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah	6-69
Tabel 6.19.	Jumlah Penduduk Miskin di Perkotaan dan Perdesaan Tahun 2021	6-72
Tabel 7.1.	Sinergi Pemerintah Daerah DIY dengan Pemerintah Pusat Tahun 2021	7-1
Tabel 7.2.	Daftar Rencana Kerja Tindak Lanjut Nota Kesepakatan Pemda DIY Dengan Pemerintah Pusat Tahun 2021.....	7-2
Tabel 7.3.	Kerja sama Pemda DIY dengan Daerah Lain Tahun 2021	7-5
Tabel 7.4.	Rincian Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama	7-8
Tabel 7.5.	Permendagri tentang Batas Daerah Lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta	7-14

Tabel 7.6.	Data Kejadian Bencana Alam di DIY Tahun 2018 – 2021.....	7-22
Tabel 7.7.	Perkara yang Masuk Ke Lembaga Ombudsman DIY Berdasarkan Bidang Periode Tahun 2021.....	7-30
Tabel 7.8.	Kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu DIY selama tahun 2021	7-43
Tabel 7.9.	Klasifikasi Berdasarkan <i>Claster</i> Badan Publik DIY	7-62
Tabel 7.10.	Jumlah Penumpang Bus Trans Jogja per Bulan pada Tahun 2021	7-68

Daftar Gambar

Gambar 1.1.	Keterkaitan Visi-Misi RPJPD dan Visi-Misi RPJMD	1-16
Gambar 1.2.	Proporsi Luas Wilayah Kabupaten/Kota se-DIY	1-35
Gambar 1.3.	Kepadatan Penduduk di DIY Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa/km ²) Tahun 2020 dan 2021	1-38
Gambar 1.4.	Penduduk Usia Kerja Tahun 2017 -2021 (orang)	1-40
Gambar 1.5.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja DIY Tahun 2017-2021	1-41
Gambar 1.6.	Angkatan Kerja Tahun 2017-2021	1-42
Gambar 1.7.	Penduduk yang Bekerja Tahun 2017-2021	1-43
Gambar 1.8.	Pengangguran Terbuka dan TPT Tahun 2017-2021	1-44
Gambar 1.9.	TPT Nasional dan DIY Tahun 2017-2021	1-45
Gambar 1.10.	Jumlah Guru Berkualifikasi di DIY Tahun 2021	1-49
Gambar 1.11.	Capaian APK dan APM DIY Tahun 2021	1-50
Gambar 1.12.	Capaian Akreditasi Sekolah/Madrasah DIY Tahun 2021	1-52
Gambar 1.13.	Perkembangan Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara 2018-2021	1-55
Gambar 1.14.	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi DIY Tahun 2017- 2021 (%)	1-69
Gambar 3.1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DIY dan Indonesia Tahun 2017-2021	3-4
Gambar 3.2.	Perkembangan Usia Harapan Hidup saat lahir (UHH) DIY Tahun 2017-2021	3-5
Gambar 3.3.	Perkembangan HLS dan RLS DIY Tahun 2017-2021	3-6
Gambar 3.4.	Tren Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender di DIY Tahun 2016-2020	3-8

Gambar 3.5.	Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen Menurut Kabupaten/ Kota di DIY Tahun 2019-2020.....	3-11
Gambar 3.6.	Perkembangan Gini Ratio Menurut Daerah Tempat Tinggal di DIY Bulan September 2017 – September 2021.....	3-14
Gambar 3.7.	Persentase Penduduk Miskin di DIY dan Indonesia Tahun 2017-2021.....	3-18
Gambar 3.8.	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi DIY Tahun 2017-2021 (%).....	3-22
Gambar 3.9.	Target dan Realisasi IKLH tahun 2018 - 2021	3-25
Gambar 3.10.	Peta Lokasi 18 Satuan Ruang Strategis.....	3-30
Gambar 3.11.	Indeks Williamson DIY Tahun 2017-2021.....	3-34
Gambar 3.12.	Perkembangan Nilai AKIP DIY, 2012-2020.....	3-37
Gambar 3.13.	Capaian Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2016-2021	3-48
Gambar 3.14.	Capaian HLS Kabupaten/Kota dan DIY 2017-2021	3-49
Gambar 3.15.	Capaian Evaluasi Pendidikan Berbasis Budaya	3-52
Gambar 3.16.	Perbandingan AHH DIY dan AHH Nasional 2017-2021.....	3-54
Gambar 3.17.	<i>Crime Rate</i> Tahun 2017-2021	3-62
Gambar 3.18.	<i>Crime Total</i> per Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2020-2021	3-63
Gambar 3.19.	Perkembangan WUB Tahun 2017-2021	3-64
Gambar 3.20.	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin DIY Tahun 2017 – 2021 (Ribu Orang).....	3-66
Gambar 3.21.	Kontribusi 4 Lapangan Usaha terhadap PDRB DIY tahun 2017 - 2021.....	3-73
Gambar 3.22.	Rincian Perkembangan Kontribusi Masing-Masing Sektor.....	3-73
Gambar 3.23.	Kontribusi Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan) terhadap PDRB DIY dan PDB Indonesia Tahun 2017-2021	3-75
Gambar 3.24.	Jumlah Wisman dan Wisnus di DIY Tahun 2021.....	3-78
Gambar 3.25.	Perkembangan TPT DIY dan Indonesia tahun 2017 - 2021	3-81

Gambar 3.26.	Tren Indeks Kualitas Air di DIY tahun 2018 - 2021	3-86
Gambar 3.27.	Tren Nilai Indeks Kualitas Udara DIY tahun 2018 – 2021	3-90
Gambar 3.28.	Tren Indeks Risiko Bencana di DIY Tahun 2019 – 2021	3-95
Gambar 3.29.	Data Series Kejadian Bencana di DIY periode 2018-2021.....	3-264
Gambar 3.30.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di DIY tahun 2017-2021....	3-369
Gambar 3.31.	Desa Rawan Pangan di DIY Tahun 2017-2021	3-373
Gambar 3.32.	Persentase Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Sebulan Untuk Makanan di DIY tahun 2017-2021	3-375
Gambar 3.33.	Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2021	3-468
Gambar 3.34.	Pangsa dan Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran, 2021 (c-to-c)	3-501
Gambar 3.35.	Struktur PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha, 2021 (c-to-c)	3-502
Gambar 3.36.	Realisasi Investasi Tahun 2021 (Tambahan Investasi) berdasarkan Kabupaten/Kota (Rp).....	3-504
Gambar 3.37.	Persentase Realisasi Investasi Tahun 2021 (Tambahan Investasi) berdasarkan Kabupaten/Kota	3-505
Gambar 3.38.	Produksi Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap di DIY Tahun 2016-2021	3-577
Gambar 3.39.	Nilai Sub sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Jasa Pertanian dan Perburuan dalam PDRB DIY Tahun 2017-2021**	3-617
Gambar 3.40.	Penyaluran KUR Tahun 2017-2021.....	3-829
Gambar 6.1.	Pencapaian Dimensi <i>Jogja Smart Province</i>	6-17
Gambar 6.2.	Tampak Atas Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarta.....	6-25
Gambar 6.3.	Fasilitas di Pelabuhan Tanjung Adikarta	6-25
Gambar 6.4.	Rencana Trase Jalan Tol Pada Kawasan Sekitar Bandara YIA	6-32
Gambar 6.5.	Peta Jalur Jalan Lintas Selatan di Pulau Jawa	6-49

Gambar 6.6.	Progres Pembangunan JJLS pada Sepanjang Wilayah Selatan DIY	6-51
Gambar 6.7.	Foto Udara Delineasi Rencana Lokasi Pembangunan Taman Budaya Bantul.....	6-58
Gambar 6.8.	Kondisi TPA pada Akhir Tahun 2021	6-63
Gambar 6.9.	Jumlah Penduduk Miskin di DIY 2014 - 2021	6-70
Gambar 7.1.	Klasifikasi Berdasarkan Pemeringkatan	7-62
Gambar 7.2.	Grafik Jumlah Penumpang Bus Trans Jogja per Bulan pada Tahun 2021	7-69

PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

Kedudukan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (UU Nomor 3 Tahun 1950). Kedudukan ini merupakan implikasi dari keputusan Sultan Hamengku Buwono IX dan Adipati Paku Alam VIII setelah Proklamasi 17 Agustus 1945 yang mengakui bahwa Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman menjadi bagian NKRI di mana Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII berkedudukan sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia (RI). Keputusan ini membawa konsekuensi, daerah Kasultanan Ngayogyakarta selanjutnya dinyatakan sebagai DIY dengan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. UU Nomor 3 Tahun 1950 juga merupakan pengakuan kewenangan untuk menangani berbagai urusan dalam menjalankan pemerintahan serta urusan yang bersifat khusus. UU ini telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 1955 tentang Pengubahan UU Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa DIY merupakan daerah setingkat provinsi dan meliputi bekas daerah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan daerah Kadipaten Pakualaman

Berdasarkan Amandemen Kedua UUD 1945, DIY sebagai daerah istimewa diakui dalam UUD 1945, Pasal 18B ayat (1) dan (2), yaitu: 1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang; 2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

DIY memasuki era baru pemerintahan dengan disahkannya UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. UU Keistimewaan ini adalah bentuk pengakuan dan penghormatan negara atas satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa. Pengaturan Keistimewaan DIY bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan demokratis, ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat, menjamin *ke-bhinneka-tunggal-ika-an*, serta melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga sekaligus mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa. Pengaturan dilakukan berlandaskan asas pengakuan hak asal-usul, kerakyatan, demokrasi, *ke-bhinneka-tunggal-ika-an*, efektivitas pemerintahan, kepentingan nasional, dan pendayagunaan kearifan lokal. Karena itu, dengan memperhatikan aspek historis, sosiologis, dan yuridis, DIY diletakkan pada tingkatan pemerintahan provinsi.

Pemerintah Daerah (Pemda) DIY memiliki 2 (dua) kewenangan yaitu kewenangan keistimewaan berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY dan kewenangan pemerintahan daerah berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Urusan keistimewaan berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, kelembagaan Pemda DIY, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. Penyelenggaraan kewenangan dalam urusan keistimewaan tersebut didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat.

Dalam rangka pertanggungjawaban kinerja terhadap kewenangan yang diberikan, Gubernur menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2021. Adapun dasar hukum penyusunan LKPJ Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
15. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022;
16. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 120 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

B. VISI DAN MISI JANGKA PANJANG

1. Visi Jangka Panjang

Visi pembangunan yang hendak diwujudkan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta dalam jangka waktu 20 tahun tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yakni “Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya, dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam Lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”. Pada akhir periode RPJPD tersebut diharapkan DIY akan bertransformasi menjadi pusat pendidikan terkemuka, pusat budaya terkemuka, dan daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara.

Sebagai pusat pendidikan terkemuka, DIY diharapkan dapat menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berdaya saing tinggi, dan berakhlak mulia yang dilandasi pengamalan agama dan didukung oleh lembaga pendidikan yang kredibel, berstandar nasional ataupun internasional. Di samping itu, DIY diharapkan dapat menyediakan kultur lingkungan sosial masyarakat yang mendukung suasana kondusif dan nyaman untuk belajar.

Sebagai pusat budaya terkemuka, DIY diharapkan dapat menjadi tempat pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya sehingga terwujud masyarakat yang menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai budaya. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY memperoleh dukungan dalam mengimplementasikan kewenangan Urusan Kebudayaan secara lebih luas untuk mewujudkan visi DIY sebagai pusat budaya terkemuka.

Sebagai daerah tujuan wisata terkemuka, DIY diharapkan dapat menjadi daerah tujuan wisata yang diminati oleh wisatawan nasional maupun internasional karena memiliki daya tarik tersendiri dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas.

Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang makmur secara ekonomi, mempunyai tingkat pengetahuan dan kearifan tinggi, berpendidikan baik, memiliki derajat kesehatan yang tinggi, serta memiliki sistem dan kelembagaan politik dan hukum yang baik, terjamin hak-haknya, serta kehidupannya didukung oleh infrastruktur yang baik, lengkap, dan memadai. Masyarakat yang mandiri berarti mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan masyarakat dan bangsa lain yang telah maju dengan

mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Kemandirian masyarakat tercermin antara lain pada ketersediaan SDM yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunan. Masyarakat yang sejahtera berarti terpenuhi kebutuhan hidupnya baik material maupun spiritual secara layak dan berkeadilan.

2. Misi Jangka Panjang

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka panjang tersebut, DIY mempunyai empat misi pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJPD 2005-2025 yaitu:

- a. Mewujudkan pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya pendidikan yang handal;
- b. Mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan;
- c. Mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif;
- d. Mewujudkan sosio-kultural dan sosio-ekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan budaya lokal, serta ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat.

C. FILOSOFI, VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

1. Dasar Filosofi

"Renaisans Yogyakarta" sebagai pangkal berpikir perubahan ke depan yang berlandaskan pada nilai-nilai lama yang unggul atau nilai-nilai yang pernah menjadi rujukan bagi praktik kehidupan Yogyakarta dan telah membawa Yogyakarta pada posisi keistimewaan dalam perjalanan sejarah bangsa dan negara Indonesia. Dibawah payung paradigma "Renaisans Yogyakarta", maka DIY akan bergerak menjadi daerah yang maju, tetapi tetap berpijak pada nilai-nilai keluhuran, nilai-nilai keutamaan, dan nilai-nilai yang mencerminkan ke-Yogyakarta-an yang pernah menjadi penuntun gerak kehidupan Yogyakarta, hingga memiliki martabat yang istimewa dalam peta sejarah Indonesia.

Sangat disadari, bahwa nilai-nilai tersebut saat ini telah mengalami peluruhan yang mengkhawatirkan, sehingga melalui paradigma "Renaisans Yogyakarta", maka pembangkitan kembali nilai-nilai tersebut ke dalam alam pikiran dan praktik kehidupan bermasyarakat, bernegara, kerja birokrasi, dan perilaku pemimpin menjadi sangat penting untuk dilakukan.

Konsep "Renaisans Yogyakarta" atau "Jogja Renaisans" merupakan sintesa dari trilogi filosofi Keistimewaan Yogyakarta (*Hamemayu Hayuning Bawana*, *Sangkan Paraning Dumadi*, dan *Manunggaling Kawula Gusti*), ideologi negara Kesatuan Republik Indonesia: Pancasila, dan etos asli (*Golong-Gilig*, *Sawiji*, *Greget*, *Sungguh*, *Ora Mingkuh*) dalam melahirkan kembali masa keemasan budaya klasik Yogyakarta. "Renaisans Yogyakarta" diwujudkan dengan semangat kolektif *Jogja Gumregah* untuk bergerak bersama membawa kebudayaan Yogyakarta ke tingkat yang lebih unggul. Semangat Jogja Gumregah tersebut dapat menjadi wahana penggerak masyarakat menuju ke peningkatan dimensi nilai, pencarian nilai-nilai kebenaran, dimensi ekonomi terkait nilai kegunaan, dimensi estetis pada keindahan, dimensi sosial pada nilai "*trust*", dimensi politik pada nilai kuasa, dimensi keagamaan, dan nilai ketuhanan yang berkebudayaan. Dalam pelaksanaannya, spirit dari konsep "Renaisans Yogyakarta" secara konsisten tetap akan dipelihara, namun substansi dan penekanannya akan disesuaikan dengan perkembangan jaman dan prediksi atas kondisi-kondisi yang sekiranya akan terjadi dalam kurun lima tahun ke depan.

Konsep Renaisans Jogjakarta yang terwujud dalam Semangat Jogja Gumregah mendasari tema visi pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017-2022 yaitu "*Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja*". Abad Samudera Hindia merupakan momentum untuk memanfaatkan potensi kelautan di sisi selatan DIY sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan warga serta mengurangi angka kemiskinan. Menyongsong Abad Samudera Hindia yang dimaksud dalam tema visi tersebut dilandasi pada aspek kesejahteraan, fenomena-fenomena *Indian Ocean Rim Association* (IORA), *Kra-Canal/Thai Canal Project* serta Kemiskinan di Kawasan Jogja Selatan.

Kemuliaan martabat manusia Jogja dapat digambarkan dalam **“Lima Kemuliaan”** atau **“Panca Mulia”** sebagaimana yang disampaikan dalam pidato Gubernur pada Sidang Paripurna Istimewa DPRD DIY tahun 2017 yaitu:

- a. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan keterampilan sumber daya manusia Jogja yang berdayasaing;
- b. Terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumber daya lokal (keunikan teritori ekonomi) untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan;
- c. Terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan;
- d. Terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis; dan
- e. Terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Berdasarkan Panca Mulia tersebut, manusia Jogja yang bermartabat mulia digambarkan sebagai manusia sejahtera paripurna baik dari segi hidup-kehidupan-penghidupan secara individu, terlibat dan memperoleh manfaat dari ekonomi yang tumbuh dan berkeadilan, hidup dalam harmoni kolektif dan terlindungi oleh penyelenggaraan pemerintahan demokratis yang dijalankan oleh aparatur yang berintegritas. Manusia Jogja yang bermartabat mulia merupakan substansi penting dari tujuan peningkatan harkat dan martabat manusia Jogja.

Peningkatan harkat dan martabat manusia Jogja mencakup pengertian peningkatan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan sosial dan beradab, sehingga strategi kebudayaan untuk meningkatkan harmoni kehidupan bersama masyarakat serta mengatasi kesenjangan dan kemiskinan di wilayah DIY dalam kerangka meningkatkan harkat dan martabat manusia Jogja sangat perlu diutamakan. Pembangunan ekonomi di wilayah DIY yang ditopang dengan pembangunan infrastruktur wilayah diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mampu menopang pemerataan peningkatan pendapatan masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat yang kurang beruntung. *Panca Mulia* ketiga dicapai melalui berbagai program serta urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Pada *Panca Mulia* keempat dan kelima, upaya meningkatkan harkat dan martabat manusia Jogja memerlukan kemantapan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan sumber daya manusia aparatur sipil negara yang memiliki etos, etika dan kualitas sebagai “Trilogi SDM-DIY”. Birokrasi tidak lagi dipandang sebagai pekerjaan kantor, tetapi perlu diwujudkan sebagai sebuah "karya peradaban", yang tidak lagi hanya menjalankan fungsinya sebagaimana adanya, namun mempunyai rasa memiliki atas apa yang dilaksanakan.

2. Visi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 disusun sebagai penjabaran dan pewujudan visi pembangunan jangka menengah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017-2022 yaitu: “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”. Visi tersebut berangkat dari tema pidato Visi Misi Gubernur DIY 2017-2022 “Menyongsong Abad Samudera Hindia Untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja” dengan misi *Panca Mulia* untuk mewujudkan kemuliaan martabat tersebut. Dari aspek kewilayahan, tema Menyongsong Abad Samudera Hindia tersebut mengindikasikan upaya Daerah Istimewa Yogyakarta untuk lebih memperhatikan pengembangan wilayah selatan dengan mengoptimalkan potensi-potensi yang ada. Harapannya potensi-potensi tersebut dapat menjawab tantangan untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat DIY pada umumnya dan kawasan selatan khususnya.

Harapan akan potensi dan tantangan masa depan dari Abad Samudra Hindia tentunya berada di Selatan DIY. Kabupaten-kabupaten yang berada di selatan DIY memiliki kesenjangan relatif tinggi dibanding wilayah utara dengan melihat dari persentase penduduk miskin. Sebagian besar penduduk miskin berada di wilayah perdesaan. Sebagian besar warga miskin di wilayah perdesaan masih terjerat pada persoalan penyediaan bahan pangan berupa pengeluaran untuk pembelian beras. Selanjutnya kesenjangan antar kelompok pendapatan digambarkan sebagai Indeks Gini. Indeks Gini di DIY masih termasuk yang tertinggi di Indonesia, dimana kesenjangan di perkotaan lebih tinggi dibanding perdesaan.

Fenomena kemiskinan dan kesenjangan di Kawasan Selatan DIY memberikan latar belakang penting lima tahun ke depan untuk memberikan fokus dan perhatian terhadap pembangunan wilayah bagian selatan Yogyakarta. Hal ini selaras dengan Tema Visi untuk menyongsong *"Abad Samudera Hindia"* juga untuk meningkatkan *"Harkat dan Martabat Warga Miskin di Wilayah Bagian Selatan Yogyakarta khususnya, dan di seluruh Wilayah Yogyakarta pada umumnya"*. Dengan demikian, potensi kawasan selatan Yogyakarta perlu dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan warganya, agar lebih memiliki harkat dan martabat mulia.

Berangkat dari tinjauan filosofis, berpijak pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY, memperhatikan perkembangan dan kondisi terkini masyarakat di DIY, serta selaras dengan uraian tema Visi "Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja" dapat dirumuskan bahwa Abad Samudera Hindia menjadi arah dari pembangunan DIY untuk mengangkat potensi selatan Yogyakarta dalam kurun waktu 2017-2022. Sehingga visi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (RPJMD DIY) tahun 2017-2022 adalah:

"Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja"

Terwujudnya dapat dipahami sebagai suatu kondisi yang diharapkan pada lima tahun ke depan untuk terlaksana atau terbukti melalui peningkatan, yaitu proses, cara, perbuatan meningkatkan suatu kondisi yang telah ada menuju kondisi yang lebih baik.

Kemuliaan dimaknai paripurna dalam memenuhi *Panca Mulia* yakni dengan terpenuhinya:

- a. Peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban;
- b. Peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat yang tumbuh, dan berkeadilan;
- c. Terwujudnya kondisi hidup dalam harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi;
- d. Pelayanan publik dengan tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis; dan
- e. Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur yang bermartabat dan memiliki integritas.

Martabat adalah tingkat harkat kemanusiaan, atau harga diri. Manusia yang bermartabat adalah manusia yang berumur panjang dan hidup bahagia, mempunyai akses yang luas terhadap pengetahuan, dan dapat hidup layak.

Manusia Jogja adalah insan di DIY yang menjadi subyek pembangunan. "Manusia Jogja" adalah semua individu yang hidup, berkehidupan dan berpenghidupan di wilayah DIY. Secara lebih rinci, yang dimaksud dengan manusia Jogja adalah:

- a. Semua individu yang telah menggantungkan hidupnya pada sumber daya yang berada di wilayah DIY;
- b. Semua individu yang telah membangun jaringan dan juga telah dikuatkan serta dimuliakan oleh jaringan kehidupan sosial budaya masyarakat di wilayah DIY.
- c. Semua individu yang telah membangun serta menggantungkan penghidupannya pada sumber daya dan jaringan perekonomian dan jaringan sumber pendapatan yang berada di wilayah DIY.

- Ciri khas manusia Jogja dalam perumusan visi "Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja" adalah mencakup pengertian mulia martabat hidupnya, mulia martabat kehidupannya, dan mulia martabat penghidupannya. Ciri khas tersebut secara lebih rinci dapat digambarkan sebagai berikut: Manusia Jogja yang memiliki hidup biologis yang mulia karena didukung oleh kualitas dan kuantitas asupan makanan yang baik, memiliki tingkat kesehatan yang baik, dan hidup dalam kualitas lingkungan fisik yang baik. Sebaliknya, manusia Jogja akan memiliki martabat yang buruk apabila kondisi fisik biologisnya buruk karena asupan makanan yang buruk serta memiliki tingkat kesehatan yang buruk, serta hidup dalam lingkungan fisik infrastruktur yang buruk. Sebagai catatan, bahwa di wilayah DIY masih terdapat kasus-kasus keluarga dan anak yang memiliki tingkat kesehatan buruk akibat bergizi buruk.
- Manusia Jogja yang memiliki kehidupan bermasyarakat yang mulia, termasuk: (i) mulia dalam berlalu lintas (sopan santun, tenggang rasa serta taat disiplin pada peraturan lalu lintas), (ii) mulia dalam perilaku berkehidupan bersama di ruang publik (perilaku memarkir kendaraan yang tidak menzalimi orang lain sehubungan ukuran lebar jalan-jalan di Jogja relatif kecil, tidak membuang sampah dan limbah ke sungai atau jalan atau ruang publik, tidak membuat atau memancing rasa permusuhan terhadap kelompok masyarakat lain), (iii) mulia dalam berkehidupan menjalankan agama (saling menghormati kehidupan beragama kelompok agama lain).
- Manusia Jogja yang memiliki penghidupan yang mulia, mencakup: (i) cara-cara menjalankan kegiatan penghidupan yang mulia untuk memenuhi kebutuhan hidup (tidak merendahkan martabat diri, tidak melanggar hukum atau melakukan tindak pidana kriminal, tidak mengganggu kesehatan diri maupun orang lain), (ii) tempat menjalankan penghidupan yang mulia (tidak menjalankan usahanya pada tempat-tempat yang mengganggu atau menzalimi atau merugikan hak orang lain, (iii) sistem kerja yang mulia (tidak mengeksploitasi anak-anak dan perempuan, memberi atau mendapat imbalan sesuai ketentuan yang berlaku, tidak merusak dan mencemari alam serta warisan budaya).

3. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai berbagai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Hal tersebut diharapkan dapat membantu memperjelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi dalam RPJMD dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan eksternal dan internal yang strategis dan berpengaruh, serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah di DIY. Rumusan misi tersebut diupayakan memenuhi substansi tujuan dan sasaran dalam rangka:

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. Memajukan daerah;
- c. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- d. Menyelesaikan persoalan daerah;
- e. Menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan Provinsi dengan nasional; dan
- f. Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.

Oleh karena itu, perwujudan visi tersebut dapat dirumuskan kedalam dua misi pembangunan DIY tahun 2017–2022 sebagai berikut:

a. Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berkeadaban

Rumusan misi pertama ini menerjemahkan kemuliaan martabat manusia Jogja yang tertuang dalam rumusan Panca Mulia 1, 2 dan 3. Pemda DIY segenap pemangku kepentingan dan masyarakat melalui misi pertama ini akan mewujudkan peningkatan kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan dari aspek:

- 1) Pemenuhan kebutuhan dasar, misalnya dari aspek kesehatan dan akses infrastruktur dasar;
- 2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, misalnya dari aspek pendidikan;

- 3) Peningkatan perekonomian masyarakat dengan basis sumber daya lokal dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan termasuk didalamnya upaya menurunkan angka kemiskinan DIY, menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan dan menurunkan ketimpangan antar wilayah;
- 4) Peningkatan harmoni kehidupan sosial, budaya dan politik yang memenuhi rasa aman, nyaman dan tertib bagi seluruh warga.

b. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis

Rumusan misi kedua ini menerjemahkan kemuliaan martabat manusia Jogja yang termuat pada *Panca Mulia* ke-4 dan ke-5. Misi kedua akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, dan mewujudkan perilaku aparatur sipil negara yang berintegritas. Upaya mewujudkan misi kedua ini antara lain melalui:

- 1) Semangat perjumpaan dan silang birokrasi sebagai strategi untuk menciptakan tatakelola pemerintahan yang demokratis, baik melalui "strategi silang vertikal" (keterbukaan di internal SKPD), "strategi silang horisontal" (keterbukaan antar SKPD), dan "strategi silang heterarki" (gabungan keterbukaan vertikal dan horizontal antar SKPD).
- 2) Semangat "Perjumpaan" dan "Silang Kelembagaan" sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur sipil negara, melalui "silang belajar" ke lembaga-lembaga lain baik di dalam maupun di luar Lembaga Pemerintahan DIY, termasuk lembaga pendidikan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga perekonomian swasta, serta belajar dari pengalaman-pengalaman daerah dan negara lain, dalam rangka menciptakan "Trilogi SDM-DIY" atau "E2-K" yakni: Etos, Etika, dan Kualitas. Dalam konteks Trilogi SDM-DIY, Etos, Etika dan Kualitas merupakan satu kesatuan yang utuh dan dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Etos menyanggah pesan perubahan persepsi dari tugas birokrasi sebagai pekerjaan kantor, menjadi tugas birokrasi sebagai "karya peradaban", yang mengandung arti bahwa semua karya pelayanan birokrasi adalah "karya peradaban", yang memberikan kontribusi pada perkembangan peradaban di DIY seperti sekarang ini;
- b) Etika, menyanggah pesan "kemuliaan" dalam pengertian bersatunya "pikiran mulia, niat mulia, dan tindakan mulia", dalam rangka menciptakan SDM yang "berintegritas" yang menjunjung tinggi budaya malu dan budaya merasa bersalah apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan.
- c) Kualitas, menyanggah pesan adanya pergeseran paradigma, bahwa karya birokrasi tidak hanya dilihat sebagai "karya proyek berbasis kinerja penyerapan anggaran", melainkan menuju pada pembentukan "sikap" bahwa karya birokrasi DIY adalah "karya yang dapat menjadi rujukan" bagi birokrasi-birokrasi dan lembaga-lembaga lainnya (nasional maupun internasional). Ketika karya tersebut menjadi "rujukan", maka karya tersebut merupakan karya yang berkualitas, yang merupakan hasil dari karya yang "diniati" untuk menjadi "karya berkualitas tinggi". Untuk itu, membangun birokrasi dengan "Ruh budaya karya berkualitas tinggi" akan menjadi penting bagi DIY dalam Lima Tahun ke depan.

Misi kedua pada hakikatnya adalah penguatan secara menyeluruh kelembagaan Pemda mulai dari kualitas individu, institusi hingga perbaikan pola kerja menjadi sebuah karya yang berkualitas tinggi yang untuk mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis. Dalam pelaksanaannya Misi kedua menjadi sebuah *"initial condition"* untuk terwujudnya Misi pertama yaitu "Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berkeadaban".



Gambar 1.1. Keterkaitan Visi-Misi RPJPD dan Visi-Misi RPJMD

Sumber: RPJMD DIY 2017-2022 (data diolah)

4. Tujuan

Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah dengan memperhatikan visi. Untuk mewujudkan suatu misi, dapat dicapai melalui beberapa tujuan. Tujuan pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam RPJMD DIY Tahun 2017-2022 adalah:

Tabel 1.1. Tujuan yang Hendak Dicapai

Misi	Tujuan
Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berkeadaban	Meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin ke- <i>bhinneka-tunggal-ika</i> -an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta
Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis	Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>)

5. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan dan merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dan rasional. Sesuai dengan kaidah perumusan sasaran yang harus memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bound* dan *continuously improve* (SMART-C), maka sasaran harus mempunyai indikator yang terukur dan penetapan sasaran akan lebih mengarahkan pencapaian tujuan secara lebih fokus sehingga pengerahan dan pendayagunaan sumber daya untuk mencapainya dapat lebih efektif dan efisien. Sasaran pembangunan DIY dalam RPJMD DIY Tahun 2017-2022 adalah:

Tabel 1.2. Sasaran Pembangunan DIY

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat yang	Meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin ke- <i>bhinneka-tunggal-ika</i> -an	1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
Berkeadilan dan Berkeadaban	dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta	2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat.	a. Indeks Gini b. Persentase Angka Kemiskinan
		3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	a. Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Takbenda yang Diapresiasi
		4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	a. Pertumbuhan Ekonomi b. IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) c. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang d. Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan
		5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	a. Indeks Williamson
Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis	Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>)	1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	a. Opini BPK b. Nilai Akuntabilitas Pemerintah (AKIP)
		2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	a. Persentase Capaian Sasaran Pelaksanaan Keistimewaan.
		3. Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa	a. Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa yang Terfasilitasi Untuk Dikelola serta Dimanfaatkan

D. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAERAH, PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA DALAM RPJMD 2017-2022

Untuk mencapai Visi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah, ditetapkan langkah-langkah yang akan dilakukan yang dirumuskan dalam strategi dan arah kebijakan pembangunan.

1. Strategi

Perumusan strategi pembangunan didasarkan pada tujuan dan sasaran yang akan dicapai dengan memperhatikan capaian kinerja pembangunan periode sebelumnya serta isu-isu strategis yang berkembang. Rumusan strategi pembangunan jangka menengah sebagaimana tercantum dalam RPJMD DIY Tahun 2017-2022 disajikan sebagai berikut:

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan, dan Penghidupan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berkeadaban	Meningkatnya kualitas hidup, kehidupan, dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin menjamin ke-bhinneka-tunggal-ikaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta	1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas manajemen dan layanan pendidikan di DIY yang inklusif dan berkeadilan. 2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 3. Internalisasi nilai-nilai budaya yang berorientasi pada ketahanan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan 4. Memperkuat implementasi dan advokasi pengarus-utamaan gender. 5. Mengendalikan pertumbuhan penduduk. 6. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat. 7. Pengembangan keterlindungan warga, keamanan dan ketertiban umum.
		2. Meningkatkan Derajat Ekonomi Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menumbuhkan kewirausahaan dan kemandirian ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan. 2. Pemenuhan layanan dasar masyarakat miskin. 3. Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat. 4. Memperluas kesempatan kerja, perlindungan pekerja, dan proporsi angkatan kerja dan lulusan pendidikan tinggi
		3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pemeliharaan (perlindungan secara hukum dan fisik) dan pengembangan (penguatan dan pemanfaatan) kebudayaan untuk mewujudkan pemukiman yang inklusif, aman, berketahanan, dan berkelanjutan

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
		4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan kinerja sektor dominan dengan fokus ekonomi berkelanjutan dan ekonomi kreatif 2. Meningkatkan penyediaan infrastruktur dasar yang berketahanan dan berkelanjutan khususnya pada kawasan yang belum maju, maju tertekan, dan potensi cepat tumbuh. 3. Pengelolaan pencemaran dan kerusakan lingkungan. 4. Pengurangan risiko bencana. 5. Mencari alternatif pembiayaan non pemerintah melalui kerja sama dengan badan usaha/ swasta
		5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penumbuhan pusat-pusat pertumbuhan baru. 2. Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan
Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis	Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>good governance</i>)	1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang transparansi, akuntabel, dan partisipatif. 2. Optimalisasi aset-aset pemerintah daerah 3. Meningkatkan kepuasan masyarakat atas kualitas pelayanan publik.
		2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Urusan Keistimewaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan sinergitas kelembagaan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, sampai dengan Desa. 2. Penguatan keistimewaan dalam Perangkat Daerah, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa
		3. Meningkatnya Fasilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipaten, dan Tanah Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas badan hukum (Kasultanan dan Kadipaten) dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten, dan Desa. 2. Pengembangan struktur dan pola ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten

2. Arah Kebijakan Daerah

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah sesuai dengan tujuan dan sasaran dalam RPJMD DIY Tahun 2017-2022 disajikan sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas hidup, kehidupan, dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin ke-bhinneka-tunggal-ikaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta	1. Meningkatkan derajat Kualitas SDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas manajemen dan layanan pendidikan di DIY yang inklusif dan berkeadilan 2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 3. Internalisasi nilai-nilai budaya yang berorientasi pada ketahanan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan 4. Memperkuat implementasi dan advokasi pengarus-utamaan gender 5. Mengendalikan pertumbuhan penduduk 6. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat. 7. Pengembangan keterlindungan warga, keamanan dan ketertiban umum. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan 2. Peningkatan kualitas pendidik dan sarana pendukung pendidikan 3. Peningkatan layanan pendidikan di DIY 4. Memperkuat dan mengembangkan pendidikan karakter 5. Peningkatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). 6. Peningkatan penganeka-ragaman dan keamanan pangan (termasuk olahan) 7. Peningkatan pelayanan medis, rehab medis, rehab sosial, dan dukungan dari masyarakat bagi penderita gangguan jiwa 8. Peningkatan aksesibilitas dan pelayanan kesehatan yang berkualitas 9. Perencanaan dan penganggaran responsif gender 10. Pengendalian usia perkawinan pertama penduduk 11. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			12. Peningkatan ketertiban masyarakat dan ketaatan pada hukum 13. Peningkatan akses dan kualitas Keluarga Berencana.
	2. Meningkatkan derajat ekonomi masyarakat	1. Menumbuhkan kewirausahaan dan kemandirian ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan 2. Pemenuhan layanan dasar masyarakat miskin. 3. Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat 4. Memperluas kesempatan kerja, perlindungan pekerja, dan proporsi angkatan kerja dan lulusan pendidikan tinggi	1. Penumbuhan wirausaha baru yang mandiri 2. Pemenuhan ketercukupan pangan dan gizi masyarakat 3. Pemenuhan perlindungan sosial dan jaminan sosial masyarakat miskin 4. Peningkatan penduduk berakses air bersih layak 5. Peningkatan penduduk berakses energi 6. Penyediaan tempat tinggal yang layak dengan prioritas masyarakat berpenghasilan rendah 7. Peningkatan kapasitas dan akses usaha bagi rumah tangga miskin 8. Meningkatkan peluang kesempatan kerja, memperbanyak penempatan tenaga kerja, peningkatan kualitas pekerja dan calon pekerja, serta pengawasan dan hubungan industrial
	3. Terpelihara dan berkembangnya kebudayaan	1. Meningkatkan pemeliharaan (perlindungan secara hukum dan fisik) dan pengembangan (penguatan dan pemanfaatan) kebudayaan untuk mewujudkan	1. Menumbuhkembangkan kesadaran <i>multi stakeholder</i> pembangunan budaya benda dan takbenda. 2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		pemukiman yang inklusif, aman, berketahanan, dan berkelanjutan	layanan dan pengelolaan fasilitas kebudayaan 3. Memperkuat lembaga pelestari budaya dan mengembangkan budaya di Kawasan Cagar Budaya, Saujana Budaya, Desa, dan Kelurahan Budaya
	4. Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan kinerja sektor dominan dengan fokus ekonomi berkelanjutan dan ekonomi kreatif 2. Meningkatkan penyediaan infrastruktur dasar yang berketahanan dan berkelanjutan khususnya pada kawasan yang belum maju, maju tertekan, dan potensi cepat tumbuh. 3. Pengelolaan pencemaran dan kerusakan lingkungan. 4. Pengurangan risiko bencana. 5. Mencari alternatif pembiayaan non pemerintah melalui kerja sama dengan badan usaha/swasta 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan produksi, kualitas, inovasi dan nilai tambah produk-produk unggulan terutama pada sektor pertanian, perikanan, kehutanan, industri, perdagangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. 2. Mengendalikan alih fungsi lahan pertanian (PLP2B) 3. Penyediaan ruang dan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. 4. Memperkuat daya saing dan perlindungan tenaga kerja. 5. Penyiapan regulasi yang kondusif untuk perekonomian 6. Mengembangkan sosial-ekonomi masyarakat dengan memberdayakan lembaga-lembaga organik lokal, mendayagunakan potensi wisata, budaya, dan kearifan lokal untuk meningkatkan kemandirian masyarakat.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			7. Memperkuat partisipasi warga dan kelembagaan lokal dalam industri wisata. 8. Memperkuat peran pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi dalam kegiatan perekonomian daerah. 9. Pengelolaan pencemaran dan kerusakan lingkungan. 10. Pengurangan risiko bencana secara komprehensif. 11. Menyediakan regulasi yang memperkuat kerja sama antara Pemda dengan badan usaha/swasta. 12. Pembentukan lembaga yang khusus menangani KPBU dan investasi masyarakat lainnya. 13. Melakukan <i>capacity building</i> terkait pembiayaan non APBD dengan intensif
	5. Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah	1. Penumbuhan pusat-pusat pertumbuhan baru. 2. Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan	1. Pengembangan transportasi dan infrastruktur pendukung Bandara <i>Yogyakarta International Airport</i> (YIA). 2. Pengembangan Kawasan Selatan sebagai pusat pertumbuhan. 3. Pengembangan sektor pariwisata di kawasan prioritas yang terintegrasi dengan sektor lainnya. 4. Penyiapan potensi dan iklim investasi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			yang kondusif untuk mendorong realisasi dan pemerataan investasi.
Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>good governance</i>)	1. Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan	1. Meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang transparansi, akuntabel, dan partisipatif. 2. Optimalisasi aset-aset pemerintah daerah 3. Meningkatkan kepuasan masyarakat atas kualitas pelayanan publik.	1. Optimalisasi potensi pendapatan daerah dan peningkatan kualitas belanja daerah 2. Menyusun regulasi pengelolaan keuangan 3. Membuat/mengembangkan sistem keuangan daerah yang terintegrasi 4. Peningkatan efektivitas pengelolaan aset daerah melalui pemanfaatan dan kerja sama pihak ketiga.
	2. Meningkatnya kapasitas pengelolaan urusan keistimewaan	1. Mewujudkan sinergitas kelembagaan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota, sampai dengan Desa. 2. Penguatan keistimewaan dalam Perangkat Daerah, Kabupaten/ Kota, Kecamatan, dan Desa	1. Perumusan regulasi sebagai acuan pelaksanaan urusan keistimewaan di tingkat Kabupaten /Kota s.d Desa 2. Internalisasi budaya pemerintahan pada Pemda dan Kab/Kota
	3. Meningkatnya fasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa	1. Peningkatan kapasitas badan hukum (Kasultanan dan Kadipaten) dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten, dan Desa. 2. Pengembangan struktur dan pola ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	1. Melakukan fasilitasi Penatausahaan, pemeliharaan dokumen dan pengawasan tanah Kasultanan, Kadipaten, dan tanah desa. 2. Melakukan fasilitasi perlindungan, pemanfaatan dan pelepasan tanah Kasultanan, Kadipaten, dan tanah desa

3. Program Pemda

Program Pembangunan Pemerintah Daerah (Program Pemda) merupakan wujud konkrit dari upaya yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran daerah. Dari strategi yang telah ditetapkan kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Program Pemda yang merupakan Program Lintas Sektor yang menaungi program-program perangkat daerah dalam rangka pencapaian pencapaian tujuan dan sasaran daerah. Berikut Program Pemda untuk masing-masing tujuan dan sasaran:

- 1) Tujuan 1: Meningkatnya kualitas hidup, kehidupan, dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin menjamin *kebhinneka-tunggal-ika-an* dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta

Sasaran	Program Pemda	Indikator Kinerja	Penanggungjawab
1. Meningkatnya derajat Kualitas SDM	1. Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Persentase sekolah menengah dan khusus yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP);	- Sekretaris Daerah - Asisten Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat
		2. Harapan Lama Sekolah	
		3. Peningkatan Jumlah Pemuda Kader Aktif	
		4. Persentase sekolah yang melakukan pendidikan berbasis budaya dengan kategori maju	
	2. Program Peningkatan Usia Harapan Hidup	1. Angka Harapan Hidup	- Sekretaris Daerah - Asisten Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat
	3. Program Pembangunan Sosial Masyarakat	1. Jumlah Kabupaten/Kota Layak Anak Berkategori Nindya ke Atas	- Sekretaris Daerah - Asisten Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat
		2. Persentase perempuan pengambil keputusan di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif	
		3. <i>Total Fertility Rate</i>	

Sasaran	Program Pemda	Indikator Kinerja	Penanggungjawab
		4. Perkembangan Desa/ Kelurahan Kategori Cepat Berkembang 5. Angka Kejahatan per 100.000 penduduk (<i>crime rate</i>)	
2. Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat	1. Program Penanggulangan Kemiskinan	1. Persentase peningkatan penumbuhan wirausaha baru 2. Jumlah penduduk miskin (jumlah penduduk miskin (pada tahun n)) 3. Pengeluaran per kapita masyarakat	- Sekretaris Daerah - Asisten Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat
3. Terpelihara dan berkembangnya kebudayaan	1. Program Pelestarian Budaya Benda dan Tak benda	1. Persentase peningkatan budaya benda yang dilestarikan 2. Persentase peningkatan budaya takbenda yang dilestarikan	- Sekretaris Daerah - Paniradya Keistimewaan
4. Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan	1. Program Pengembangan sektor Dominan (Pertanian, Industri Pengolahan; Jasa) 2. Program Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana 3. Peningkatan Keterpaduan Program	1. Kontribusi sektor pertanian, industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum serta perdagangan dalam PDRB DIY 2. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) 3. Jumlah Desa Mandiri Budaya* (desa/ kampung wisata, desa/kelurahan budaya, Desa Preneur, Desa Prima): Target 2022: 1 Desa Mandiri Budaya 1. Indeks Kualitas Air 2. Indeks kualitas Udara 3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan 4. Indeks Risiko Bencana 1. Persentase dukungan program pemda terhadap keterwujudan	- Sekretaris Daerah - Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan - Sekretaris Daerah - Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan - Sekretaris Daerah - Paniradya Keistimewaan

Sasaran	Program Pemda	Indikator Kinerja	Penanggungjawab
	Pemanfaatan Ruang	struktur dan pola ruang	
5. Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah	1. Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan	1. Persentase peningkatan PDRB pada kabupaten yang belum maju (GK, KP, Bantul) 2. Persentase penyediaan sarana dan prasarana transportasi	- Sekretaris Daerah - Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan

2) Tujuan 2: Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*good governance*)

Sasaran	Program Pemda	Indikator Kinerja	Penanggungjawab
1. Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan	1. Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	1. Kemapanan keuangan daerah. 2. Optimalisasi aset-aset pemda DIY (satuan Rp) 3. Nilai eksternal pelayanan publik 4. Nilai internal integritas organisasi 5. Nilai eksternal persepsi korupsi	- Sekretaris Daerah - Asisten Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum
2. Meningkatnya kapasitas pengelolaan urusan keistimewaan	1. Program Pengelolaan Kelembagaan dan Tata Cara Pengisian Kepala Daerah	1. Terwujudnya penetapan Kepala Daerah sesuai UU Keistimewaan 2. Terwujudnya pelaksanaan Urusan Kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan	- Sekretaris Daerah - Paniradya Keistimewaan
4. Meningkatnya fasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa	1. Program Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipaten, dan Tanah Desa	1. Persentase tertib administrasi tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa. 2. Capaian pengelolaan (persen) ditambah capaian pemanfaatan (persen)	- Sekretaris Daerah - Paniradya Keistimewaan

E. TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021

1. Tema Pembangunan Tahun 2021

Penyusunan tema pembangunan dalam RKPD DIY 2021 diantaranya mempedomani tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD DIY 2017-2022 pada tahun perencanaan bersangkutan, mempertimbangkan aspek tema indikatif yang telah dirumuskan dalam RPJMD DIY Tahun 2017-2022 serta arah kebijakan umum pembangunan sebagai referensi tema indikatif. Pilihan tema pembangunan RKPD DIY 2021 yang ada memperhatikan internalisasi paradigma Abad Samudra Hindia dalam visi misi Gubernur DIY, aspek keistimewaan, mempedomani RKP 2021 beserta tema pembangunan nasional yang termuat, memperhatikan fokus tematik, serta identifikasi masalah sehingga diharapkan sinergitas perencanaan pembangunan Tahun 2021 di DIY dapat tercapai. Munculnya Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 juga melandasi penentuan Tema RKPD DIY Tahun 2021 dengan asumsi sebagai berikut:

- a. Pandemi COVID-19 berakhir pada Tahun 2021.
- b. Pascapandemi COVID-19 berakhir dilakukan pemulihan kondisi sosial ekonomi di tahun 2021.
- c. Proyek Infrastruktur Nasional masih dilakukan di DIY pada Tahun 2021

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka tema RKPD DIY Tahun 2021 yaitu;
“Penguatan SDM Unggul dan Percepatan Pemulihan Sosial Ekonomi Masyarakat DIY”

Tema tersebut mengandung pernyataan kunci sebagai berikut:

- a. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul

SDM merupakan subyek dari pembangunan yang harus ditingkatkan terus menerus dengan penguatan SDM Unggul Dasar (Pendidikan dan Kesehatan), SDM Unggul Kebudayaan, dan SDM Unggul Ekonomi.

b. Pemulihan Sosial Ekonomi

Pemulihan Sosial Ekonomi merupakan obyek atau aktivitas pembangunan sosial ekonomi masyarakat dalam rangka pemulihan kondisi sosial ekonomi sebagai dampak COVID-19 dengan fokus pada sektor kesehatan, pariwisata, industri, dan investasi.

2. Prioritas Pembangunan Tahun 2021

Berdasarkan tema RKPD DIY 2021 yaitu “Penguatan SDM Unggul dan Percepatan Pemulihan Sosial Ekonomi Masyarakat DIY” dapat dirumuskan Prioritas Daerah DIY sebagai berikut:

Tabel 1.3. Rumusan Prioritas Daerah

No.	Tema RKPD DIY 2021	Prioritas Daerah	Fokus	Sasaran Daerah
1.	Penguatan SDM Unggul dan Percepatan Pemulihan Sosial Ekonomi Masyarakat DIY	Pembangunan Manusia unggul	Pembangunan Manusia unggul difokuskan kepada pembangunan SDM dalam berbagai sektor (pendidikan, kesehatan, kebudayaan, sosial, ekonomi) agar semakin berkompeten dan unggul di masing-masing sektor serta merupakan tahapan mewujudkan visi RPJMD 2017- 2022 yaitu mewujudkan kemuliaan martabat manusia jogja	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM 1.1.2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat
2.		Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Perekonomian yang berkelanjutan difokuskan pada pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat pasca pandemi COVID-19 berakhir	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan 1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan
3.		Penguatan Infrastruktur Strategis	Penguatan infrastruktur strategis difokuskan pada respon terhadap proyek strategis nasional dan daerah guna mendukung pengurangan ketimpangan wilayah	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah
4.		Pendukung Prioritas Pembangunan	Pendukung Prioritas Pembangunan difokuskan pada dukungan prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan

No.	Tema RKPD DIY 2021	Prioritas Daerah	Fokus	Sasaran Daerah
			pembangunan melalui perbaikan kualitas tata Kelola pemerintahan dan pengelolaan keistimewaan	2.1.2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan 2.1.3. Meningkatnya Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa

Prioritas Daerah tersebut diselaraskan dengan Prioritas Nasional yang tertuang di dalam Rancangan Awal RKP 2021. Pada Rancangan Awal RKP Tahun 2021, Fokus Pembangunan diarahkan pada:

- a. Pemulihan Industri, Pariwisata, dan Investasi
- b. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
- c. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial
- d. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana

Keempat fokus pembangunan Tahun 2021 tersebut ditekankan pada empat dari tujuh prioritas nasional, yaitu:

- a. PN 1; Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
- b. PN 3; Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
- c. PN 5; Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- d. PN 6; Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.

Hasil penyelarasan Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional Tahun 2021 disajikan dalam Tabel berikut ini.

Tabel 1.4. Interkoneksi Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional Tahun 2021

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Pembangunan Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PN3; meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia Unggul	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	1.1.1.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan Program Peningkatan Usia Harapan Hidup
					1.1.1.2. Indeks Pemberdayaan Gender
2	PN 4; Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		1.1.3. Terpelihara dan Berkembang-nya Kebudayaan	1.1.3.1. Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasi	Program Pelestarian budaya benda dan tak benda
3	PN1; Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	1.1.2.1. Indeks Gini	Program Penanggulangan Kemiskinan
4	PN6; Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim			1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4.2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
5	PN 5; Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar			1.1.4.3. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Program peningkatan keterpaduan program pemanfaatan ruang
				1.1.4.4. Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan	
					1.1.4.1. Pertumbuhan Ekonomi

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Pembangunan Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					Industri Pengolahan; Jasa)
6	PN2; Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Infrastruktur Strategis	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	1.1.5.1. indeks Williamson	Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan
7	PN7;. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	2.1.1.1. Opini BPK	Program sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
				2.1.1.2. Nilai Akuntabilitas Pemerintah	Program sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
			2.1.2. Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	2.1.2.1. Persentase capaian program urusan keistimewaan	Program Pengelolaan Kelembagaan dan Tata Cara Pengisian Kepala Daerah
			2.1.3. Meningkatkan Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa	2.1.3.1. Bidang tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan	Program Fasilitasi Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa

F. GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Kondisi Geografis Daerah

a. Batas Administrasi

Secara astronomis, DIY terletak di antara 7°33'-8°12' Lintang Selatan dan 110°00'-110°50' Bujur Timur. Sedangkan secara geografis, DIY berada di bagian tengah Pulau Jawa bagian selatan yang dikelilingi dan berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Di sebelah utara, DIY berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan

Kabupaten Boyolali. Di sebelah barat, DIY berbatasan dengan Kabupaten Purworejo. Di sebelah selatan, DIY berbatasan dengan Samudra Hindia. Sedangkan di sebelah timur, DIY berbatasan dengan 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019, luas seluruh wilayah DIY adalah 3.133,15 km² atau 0,17% dari total luas Indonesia (1.860.359,67 km²). DIY merupakan provinsi dengan luas terkecil kedua di Indonesia setelah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta.

Secara administratif, wilayah pemerintahan di DIY terdiri atas 5 (lima) kabupaten/kota, 78 kecamatan, dan 438 desa/kelurahan. Pada tingkat pemerintahan yang lebih rendah, di DIY terdapat sejumlah 4.673 pedukuhan/kampung, 6.905 RW, dan 27.290 RT.

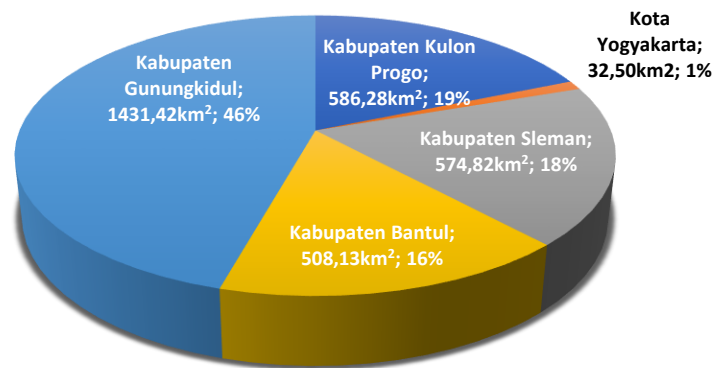
Tabel 1.5. Pembagian Wilayah DIY menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/ Kota	Ibukota	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Padukuhan/ Kampung	RW	RT
Kulon Progo	Wates	12	88	930	1.862	4.472
Bantul	Bantul	17	75	933	-	5.905
Gunungkidul	Wonosari	18	144	1.429	1.492	6.822
Sleman	Sleman	17	86	1.212	2.934	7.556
Kota Yogyakarta	Yogyakarta	14	45	169	617	2.535
DI Yogyakarta		78	438	4.673	6.905	27.290

Sumber: Biro Tata Pemerintahan SETDA DIY, 2022 (data diolah)

b. Luas Wilayah

Kabupaten/Kota dengan wilayah paling luas di DIY adalah Kabupaten Gunungkidul yaitu 1.431,42 km² atau 45,69% dari luas DIY. Sedangkan Kota Yogyakarta merupakan wilayah paling kecil yaitu 32,50 km² atau 1,04% dari luas DIY. Proporsi luas masing-masing wilayah kabupaten/kota di DIY terhadap luas DIY secara keseluruhan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 disajikan pada gambar berikut.



Gambar 1.2. Proporsi Luas Wilayah Kabupaten/Kota se-DIY
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

c. Topografi

Bentang alam DIY secara topografi dibagi menjadi kemiringan lahan dan ketinggian lahan dengan penjabaran sebagai berikut:

1) Kemiringan Lahan

Menurut kemiringan lahan, wilayah DIY dibagi dalam empat kategori yaitu lahan dengan kemiringan 0-2% seluas 1.223,47 km², lahan dengan kemiringan 3-15% seluas 767,46 km², lahan dengan kemiringan 16-40% seluas 806,17 km², dan lahan dengan kemiringan lebih dari 40% seluas 388,21 km².

2) Ketinggian Lahan

Wilayah DIY dibagi menjadi empat kategori menurut ketinggian lahan yaitu wilayah yang memiliki ketinggian lahan kurang dari 100 meter di atas permukaan laut (mdpl) sebesar 28,84%, wilayah dengan ketinggian lahan 100-499 mdpl sebesar 65,65%, dan wilayah dengan ketinggian lahan 500-999 mdpl sebesar 5,04%, serta wilayah dengan ketinggian lahan di atas 1000 mdpl sebesar 0,47%.

3) Satuan Fisiografis

Wilayah DIY terdiri dari berbagai ekosistem, yaitu gunung api, karst, dataran alluvial, dan Samudra Hindia yang seluruh ekosistem tersebut memiliki potensi sumber daya alam. Berdasarkan penampang topografis yang dimilikinya dan juga menurut satuan fisiografis, wilayah DIY terbagi menjadi sebagai berikut:

- a) Satuan Pegunungan Selatan, seluas $\pm 1.656,25 \text{ km}^2$, ketinggian 150-700 m, dan terletak di Kabupaten Gunungkidul, merupakan suatu wilayah perbukitan batu gamping (*limestone*) yang kritis, tandus, dan selalu mengalami kekurangan air. Pada bagian tengah berupa dataran basin Wonosari. Wilayah ini merupakan suatu bentang alam solusional dengan bahan batuan induk batu gamping, yang mempunyai karakteristik lapisan tanah yang dangkal dan vegetasi penutup yang relatif jarang.
- b) Satuan Gunung Berapi Merapi, seluas $\pm 582,81 \text{ km}^2$, ketinggian 80-2.911 m, dan terbentang mulai dari kerucut gunung api sampai dengan dataran fluvial Gunung Merapi, meliputi Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, sebagian Kabupaten Bantul, serta termasuk bentang alam vulkanik. Daerah kerucut lereng Gunung Merapi adalah hutan lindung dan sebagai kawasan resapan air.
- c) Daerah dataran rendah terletak di antara pegunungan selatan dan pegunungan Kulon Progo seluas $\pm 215,62 \text{ km}^2$, ketinggian 0-80 m yang berupa bentang alam *fluvial* yang didominasi oleh dataran *alluvial*. Membentang di bagian selatan DIY mulai Kabupaten Kulon Progo sampai Kabupaten Bantul dan berbatasan dengan Pegunungan Seribu, daerah ini termasuk wilayah yang subur. Bentang alam lain yang belum digunakan adalah bentang alam *marine* dan *aeolin* yang merupakan satuan wilayah pantai yang terbentang luas dari Kabupaten Kulon Progo sampai Kabupaten Bantul. Khusus Pantai

Parangtritis, daerah pantai ini terkenal dengan laboratorium alamnya berupa gumuk pasir.

- d) Pegunungan Kulon Progo dan dataran rendah di bagian selatan seluas $\pm 706,25 \text{ km}^2$, ketinggian 0-572 m, dan terletak di Kabupaten Kulon Progo. Daerah bagian utara merupakan lahan struktural denudasional dengan topografi berbukit yang mempunyai kendala lereng yang curam dan potensi air tanah yang kecil.

2. Gambaran Umum Demografi

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk DIY pada tahun 2021 tercatat sebanyak 3.675.662 jiwa yang tersebar di lima kabupaten/kota. Kabupaten Sleman tercatat sebagai wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu 1.087.339 jiwa atau 29,58% dari seluruh penduduk DIY. Sedangkan wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit di DIY adalah Kota Yogyakarta yakni sebanyak 415.382 jiwa atau 11,3% dari seluruh penduduk DIY. Lebih lanjut mengenai jumlah penduduk di DIY pada tahun 2021 menurut wilayah administrasi pemerintahan disajikan dalam tabel berikut.

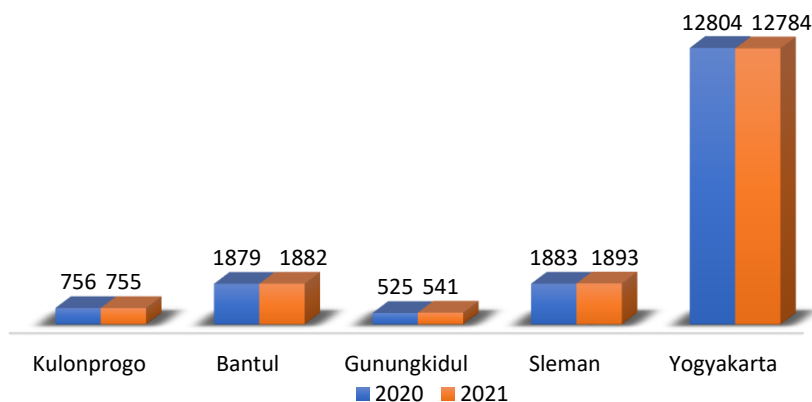
Tabel 1.6. Jumlah Penduduk DIY Semester II Tahun 2021 Menurut Wilayah Administrasi Pemerintahan

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (jiwa)	Persentase
1.	Kulon Progo	442.874	12,04%
2.	Bantul	956.513	26,01%
3.	Gunungkidul	774.441	21,06%
4.	Sleman	1.088.109	29,59%
5.	Yogyakarta	415.509	11,30%
	Jumlah	3.677.446	100%

Sumber: Biro Tata Pemerintahan SETDA DIY, 2021

Perbedaan jumlah penduduk dan luas wilayah menyebabkan kepadatan penduduk masing-masing wilayah di DIY berbeda-beda. Secara umum, kepadatan penduduk di DIY pada tahun 2021 adalah 1.173 jiwa/km² meningkat dari 1.155 jiwa/km² pada tahun 2020. Wilayah paling padat penduduk di DIY adalah Kota Yogyakarta, meskipun memiliki jumlah penduduknya paling sedikit di DIY. Kepadatan penduduk di Kota

Yogyakarta pada tahun 2021 tercatat sebesar 12.784 jiwa/km². Wilayah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk paling rendah di DIY adalah Kabupaten Gunungkidul. Kepadatan penduduk di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2021 adalah 541 jiwa/km². Grafik di bawah ini memberikan gambaran mengenai perbandingan kepadatan penduduk di wilayah administratif DIY pada tahun 2020 dan 2021.



Gambar 1.3. Kepadatan Penduduk di DIY Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa/km²) Tahun 2020 dan 2021

Sumber: Biro Tata Pemerintahan SETDA DIY, 2021 (Data Diolah)

b. Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk dapat digambarkan dalam sebuah angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk setiap tahun di antara rentang waktu tertentu. Angka ini dinyatakan dalam persentase dari penduduk dasar. Pertambahan penduduk dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi. Di dalam demografi, dikenal dua istilah umum yaitu pertambahan penduduk alami dan pertambahan penduduk total. Sesuai istilahnya, pertambahan penduduk alami hanya dipengaruhi oleh kejadian alami, seperti kelahiran dan kematian. Sedangkan pertambahan penduduk total dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu kelahiran, kematian, migrasi masuk (imigrasi) dan migrasi keluar (emigrasi). Dengan melihat pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan laju pertumbuhan penduduk di DIY pada tahun 2021 menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 1.7. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2017-2021

No.	Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Penduduk DIY				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kulon Progo	0,17%	0,47%	-0,19%	-0,95%	-0,04%
2.	Bantul	-0,16%	1,35%	1,02%	0,57%	0,12%
3.	Gunungkidul	-0,69%	1,07%	0,60%	0,61%	-0,04%
4.	Sleman	-3,02%	1,65%	1,09%	0,67%	0,42%
5.	Yogyakarta	-0,34%	0,74%	0,02%	0,50%	-0,18%
	DIY	-1,10%	1,20%	0,69%	0,41%	0,12%

Sumber: Biro Tata Pemerintahan SETDA DIY, 2021 (Data Diolah)

c. Angkatan Kerja dan Ketenagakerjaan

Kondisi ketenagakerjaan DIY pada tahun 2021 masih dipengaruhi oleh gelombang kedua COVID-19. Jumlah Penduduk Usia Kerja (PUK) dalam lima tahun terakhir terus meningkat, seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan tingkat harapan hidup yang tinggi di DIY. Struktur penduduk usia kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja, selama tahun 2017 - 2021 jumlah angkatan kerja fluktuatif. Terjadi penurunan di tahun 2020 dan meningkat pada tahun 2021, demikian juga terhadap penduduk yang bekerja jumlahnya telah meningkat kembali pada tahun 2021. Tingkat Penganggur Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) fluktuatif sehingga secara langsung mempengaruhi jumlah penganggur terbuka dan jumlah bukan angkatan kerja. Penduduk usia 15 tahun keatas yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya masuk dalam kelompok penduduk bukan angkatan kerja.

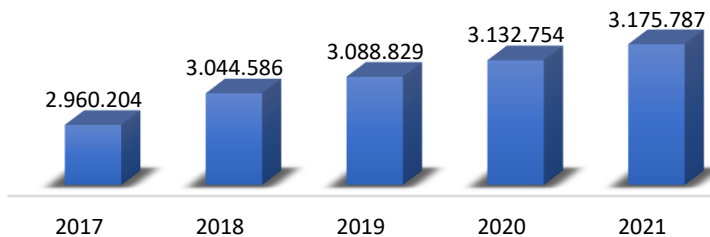
Tabel 1.8. Penduduk Usia Kerja Menurut Kegiatan DIY Tahun 2017-2021

Kegiatan	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Angkatan kerja	2.117.187	2.226.284	2.246.194	2.228.162	2.334.955
Bekerja	2.053.168	2.151.252	2.174.712	2.126.316	2.228.523
Penganggur	64.019	75.032	71.482	101.846	106.432
Bukan angkatan kerja	843.017	818.302	842.635	904.592	840.832
Sekolah	266.870	259.491	278.350	277.808	253.480
Mengurus rumah tangga	472.108	461.036	463.355	526.850	472.342
Lainnya	104.039	97.775	100.930	99.934	115.012
Penduduk usia kerja	2.960.204	3.044.586	3.088.829	3.132.754	3.175.787
TPAK (%)	71,52	73,12	72,72	71,12	73,52
TPT (%)	3,02	3,37	3,18	4,57	4,56
TKK (%)	96,98	96,63	96,82	95,43	95,44

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

1) Penduduk Usia Kerja

Penduduk Usia Kerja (PUK) adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih, terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Selama lima tahun terakhir, penduduk usia kerja DIY mengalami tren yang cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk.



Gambar 1.4. Penduduk Usia Kerja Tahun 2017 -2021 (orang)

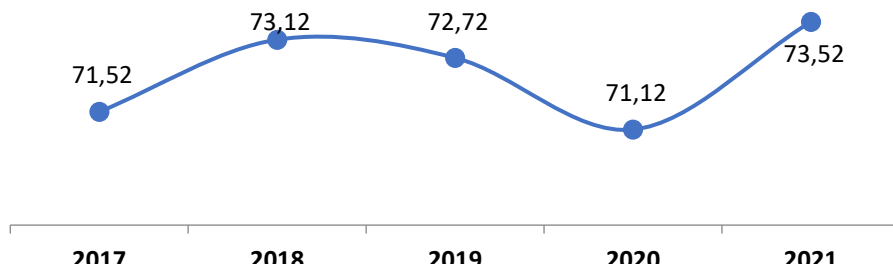
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

Penduduk usia kerja Tahun 2021 sebanyak 3.175.787 orang, naik 1,37% dibandingkan Tahun 2020. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 2,34 juta orang (73,52%), sisanya termasuk bukan angkatan kerja.

Keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan DIY sangat dipengaruhi oleh kualitas PUK. Ketersediaan PUK yang berkualitas, akan semakin baik dalam capaian terhadap indikator Ketenagakerjaan.

2) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dapat digunakan untuk mengukur komposisi pasokan tenaga kerja di dalam perekonomian, yaitu dengan membandingkan jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. TPAK di DIY selama lima tahun terakhir cenderung fluktuatif, terendah pada tahun 2020 sebesar 71,12% dan tertinggi pada tahun 2021 sebesar 73,52%. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam kegiatan perekonomian, dengan demikian pasokan tenaga kerja DIY cukup memadai.



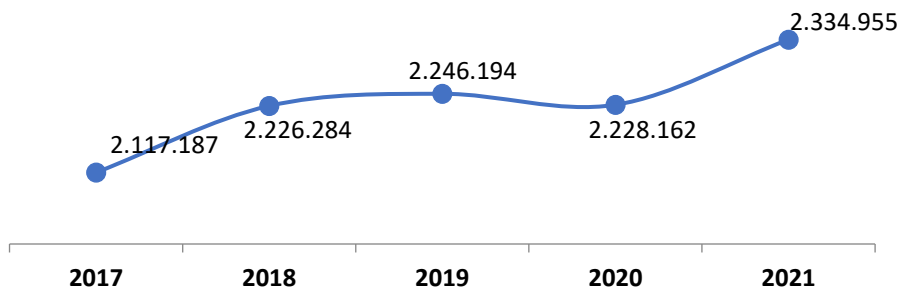
Gambar 1.5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja DIY Tahun 2017-2021
 Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

Kebutuhan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan tinggi di pasar kerja menyebabkan TPAK didominasi oleh angkatan kerja dengan pendidikan tinggi dibandingkan dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah. Sedangkan TPAK menurut gender, tahun 2021 komposisi TPAK laki-laki sebesar 82,83% lebih tinggi dibanding TPAK perempuan sebesar 64,59%, masih terjadi kesenjangan antara TPAK laki-laki dengan TPAK perempuan. Laki-laki masih menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga, sehingga diperlukan peningkatan ketrampilan bagi perempuan agar yang tadinya mengurus rumah tangga dapat menjadi bagian dalam kelompok angkatan kerja yang siap melakukan kegiatan ekonomi.

3) Angkatan Kerja

Komponen angkatan kerja terdiri atas penduduk usia kerja yang bekerja dan pengangguran. Angkatan kerja dari tahun 2017 -2021 terus meningkat kecuali tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 18.032 orang dibandingkan tahun 2019 dan pada tahun 2021 bertambah sebesar 106.793 orang menjadi 2.334.955 orang. Peningkatan ini dikarenakan adanya tambahan angkatan kerja yang baru lulus sekolah dan pergeseran dari kelompok bukan angkatan kerja masuk kembali ke angkatan kerja. Pergeseran ini didorong adanya peningkatan ketrampilan dan pemberdayaan masyarakat.

Gambar berikut menunjukkan kondisi angkatan kerja di DIY tahun 2017-2021.



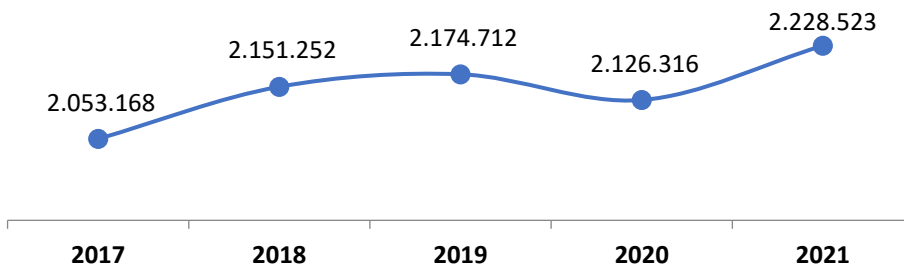
Gambar 1.6. Angkatan Kerja Tahun 2017-2021

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

Tingkat pendidikan yang semakin baik menjadi faktor pendorong meningkatnya kualitas angkatan kerja DIY. Sehingga jumlah angkatan kerja dengan tingkat pendidikan tinggi perlu ditingkatkan dan sebaliknya jumlah angkatan kerja dengan pendidikan rendah diupayakan untuk diturunkan. Angkatan kerja di DIY masih didominasi oleh angkatan kerja dengan pendidikan menengah dengan jumlah angkatan kerja pada tahun 2021 sebanyak 935.194 orang, meningkat dari tahun sebelumnya yang sejumlah 884.482 orang. Sementara jumlah angkatan kerja dengan pendidikan tinggi pada tahun 2021 sejumlah 320.196 orang. Sedangkan jumlah angkatan kerja dengan pendidikan setingkat SD sampai dengan tahun 2021 jumlahnya masih sebanyak 568.318 orang.

4) *Penduduk yang Bekerja*

Pertumbuhan angkatan kerja harus diimbangi dengan perluasan kesempatan kerja baik di sektor formal maupun informal, sehingga mendorong peningkatan penduduk yang bekerja. Selama lima tahun terakhir jumlah penduduk yang bekerja mengalami fluktuasi, tahun 2017 sampai dengan 2019 terus meningkat dan pada tahun 2020 terjadi penurunan karena dampak pandemi COVID-19. Dengan mendorong kesempatan kerja di sektor informal, tahun 2021 penduduk yang bekerja kembali bertambah 126.316 orang dibanding tahun sebelumnya menjadi 2.228.523 orang. Selama lima tahun penduduk yang bekerja mengalami peningkatan rata-rata sebesar 37 ribu orang per tahun.



Gambar 1.7. Penduduk yang Bekerja Tahun 2017-2021

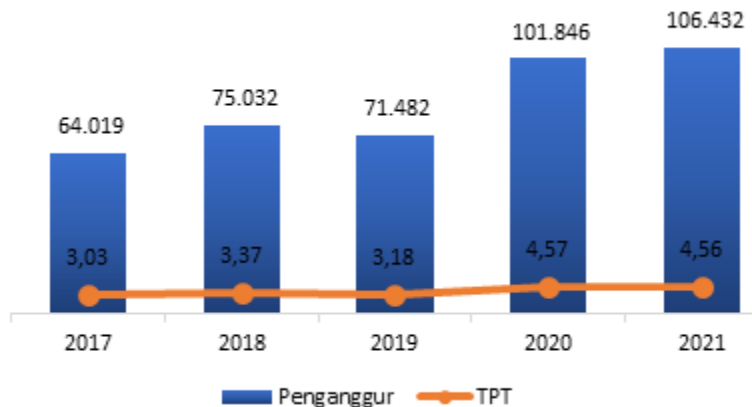
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

Struktur penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama di DIY pada tahun 2021 masih didominasi oleh tiga lapangan pekerjaan utama yaitu sektor perdagangan sebanyak 21,97%, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 18,22% serta sektor industri pengolahan sebanyak 17,71%. Terdapat tiga sektor yang mulai menggeliat di tahun 2021 yaitu sektor akomodasi dan makan minum, sektor konstruksi dan sektor jasa pendidikan, mengalami kenaikan dibanding tahun 2020. Sedangkan sektor yang mengalami penurunan paling besar adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Pada tahun 2021 capaian sektor ini sebesar 406.070 orang turun sebanyak 22.904 orang dibanding tahun 2020. Hal ini disebabkan penduduk yang sebelumnya beralih ke sektor pertanian karena pandemi, mulai kembali ke sektor sebelumnya atau beralih sektor lain yang mulai meningkat aktivitasnya sehingga membuka penyerapan tenaga kerja.

Penduduk bekerja di DIY pada tahun 2021, terbesar dengan status pekerjaan utama sebagai buruh/karyawan/pegawai sebesar 41,12%, meningkat 2,34% dibanding tahun 2020. Status pekerjaan ini menyumbang peningkatan penduduk bekerja di sektor formal menjadi sebesar 44,65% pada tahun 2021, mengalami kenaikan jika dibanding tahun 2020 sebesar 42,85%. Penduduk yang bekerja di sektor informal terjadi penurunan dari 57,15% di tahun 2020 menjadi 55,35% pada tahun 2021. Struktur ini menggambarkan kondisi ketenagakerjaan di DIY selama pandemi COVID-19 berangsur-angsur mulai membaik.

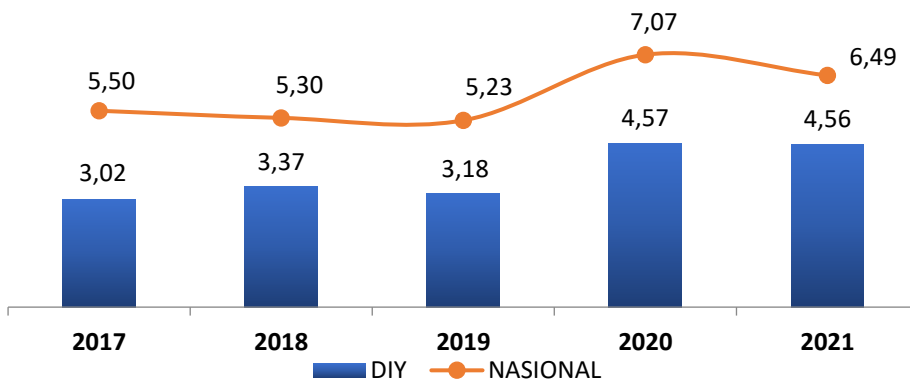
5) Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka adalah sebuah kondisi dimana angkatan kerja tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya karena terbatasnya jumlah lapangan pekerjaan, sementara tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah persentase antara ketersediaan lapangan kerja dengan pertambahan jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka juga dipicu adanya penurunan kegiatan ekonomi yang berdampak pada penurunan permintaan tenaga kerja dan ketidakcocokan antara kesempatan kerja dengan kompetensi pencari kerja. Karakteristik penganggur terbuka di DIY adalah angkatan kerja usia muda dengan tingkat pendidikan menengah hingga tinggi (SMA/SMK, Diploma dan Sarjana). Kurangnya ketrampilan dan kompetensi sesuai permintaan pasar kerja perlu dijembatani dengan pelatihan, pemagangan dan uji kompetensi sehingga pencari kerja dapat terhubung dengan dunia industri/usaha. Pelibatan seluruh pemangku kepentingan perlu didorong untuk mewujudkan *Link and Match* berbasis *market driven*.



Gambar 1.8. Pengangguran Terbuka dan TPT Tahun 2017-2021
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

Pada tahun 2021 jumlah penganggur terbuka di DIY sebanyak 106.432 orang, didominasi lulusan SMP ke bawah sebanyak 53,41% serta penganggur berpendidikan SMA dan SMK menduduki posisi kedua sebanyak 33,81%. Kondisi ini berbeda dengan tahun 2020 dimana penganggur SMA dan SMK menempati posisi terbesar yaitu 53,48%. Tingginya penganggur dengan tingkat pendidikan SMP kebawah disebabkan karena pekerjaan di sektor formal lebih sulit dimasuki oleh angkatan kerja dengan tingkat pendidikan rendah, sedangkan pada tahun 2021 pekerjaan di sektor informal mengalami penurunan.



Gambar 1.9. TPT Nasional dan DIY Tahun 2017-2021

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DIY selama lima tahun terakhir menunjukkan angka yang fluktuatif, pada tahun 2020 sebesar 4,57% merupakan angka TPT tertinggi ini disebabkan adanya pandemi COVID-19. Sementara TPT pada tahun 2021 sebesar 4,56 hanya turun 0,01% dibanding tahun sebelumnya hal ini disebabkan masih adanya gelombang kedua pandemi COVID-19. Capaian TPT DIY masih dibawah rata-rata nasional, untuk tahun 2021 TPT Nasional sebesar 6,49%. TPT digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi indikator ketenagakerjaan dalam pembangunan, sehingga harus diupayakan untuk tidak cenderung naik.

d. Pendidikan

Penduduk usia sekolah (7-18 tahun) pada tahun 2021 di DIY mencapai 19,95% dari total penduduk, dengan 98,83% dari penduduk pada usia 7-18 tahun tersebut tercatat sebagai peserta didik aktif pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar, menengah, khusus, maupun nonformal. Rincian jumlah penduduk usia sekolah di DIY pada tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1.9. Jumlah Penduduk Usia Sekolah Menurut Wilayah di DIY Tahun 2021

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Seluruh- nya	Penduduk Menurut Usia Sekolah								
			7 - 12			13 - 15			16 - 18		
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Bantul	955	44	41	85	21	20	42	20	18	39
		.807	.282	.688	.970	.848	.544	.392	.363	.968	.331
2	Gunungkidul	774	31	29	61	15	14	30	15	14	30
		.296	.883	.657	.540	.971	.803	.774	.561	.656	.217
3	Kulon Progo	442	19	18	37	9	9	18	9	9	18
		.838	.570	.235	.805	.661	.107	.768	.588	.221	.809
4	Sleman	1.087	51	48	99	25	23	48	23	22	46
		.339	.019	.548	.567	.250	.746	.996	.783	.555	.338
5	Yogyakarta	415	18	17	36	9	9	19	9	9	19
		.382	.496	.850	.346	.843	.360	.203	.887	.547	.434
DIY		3.675	165	155	321	82	77	160	79	74	154
		.662	.250	.978	.228	.573	.560	.133	.182	.947	.129

Sumber: Disdikpora, 2022

Sebagai salah satu faktor utama dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia, keberhasilan penyelenggaraan pendidikan ditentukan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1) Sarana dan prasarana pendidikan

Sarana pendidikan yang utama adalah keberadaan bangunan tempat berlangsungnya proses pendidikan. Ketersediaan jumlah lembaga pendidikan yang memadai diperlukan untuk memfasilitasi penduduk bersekolah dan mendukung penyelenggaraan proses belajar mengajar yang berkualitas. Rincian jumlah lembaga pendidikan formal di DIY pada tahun 2021 ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.10. Jumlah Lembaga Pendidikan Formal di DIY Tahun 2021

No	Satuan Pendidikan	Jumlah Lembaga	
		Negeri	Swasta
1	SD/ MI	1.450	577
2	SMP/ MTs	248	320
3	SMA/ MA	84	145
4	SMK	50	163
5	SLB	9	70

Sumber: Disdikpora DIY, 2022

Keberadaan lembaga pendidikan formal didukung pula oleh keberadaan lembaga nonformal. Keberadaan lembaga nonformal seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di DIY banyak membantu penduduk yang mengalami kendala dalam mengikuti pendidikan formal untuk tetap memperoleh pendidikan melalui pendidikan kesetaraan. Sampai dengan saat ini terdapat 122 PKBM dan 5 SKB di DIY.

Penyelenggaraan pendidikan usia dini di DIY juga mendapatkan dukungan besar dibuktikan dengan banyaknya TK/RA yang telah didirikan. Terdapat 2.298 TK/RA swasta dan 48 TK negeri di DIY yang mampu mendukung tahap awal pengenalan pendidikan formal kepada anak-anak usia 5-6 tahun dan penanaman pendidikan karakter sesuai nilai-nilai luhur budaya.

Tersedianya lembaga pendidikan perlu didukung dengan kondisi fasilitas yang layak. Fasilitas di sekolah meliputi perpustakaan, laboratorium, UKS, toilet, tempat cuci tangan, dan ruang praktik siswa bagi siswa SMK beserta dengan seluruh media pembelajaran yang dibutuhkan. Secara keseluruhan di DIY kondisi ruang sekolah (ruang kelas, ruang guru, ruang tata usaha, ruang kepala sekolah) beserta fasilitasnya dalam keadaan baik dan hanya memerlukan pemeliharaan rutin yang dapat dilakukan sekolah dengan bantuan operasional sekolah dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

2) Pendidik di sekolah

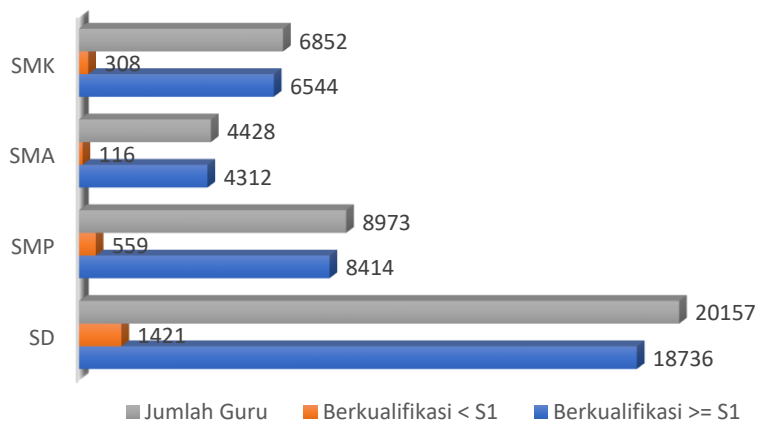
Guru sebagai pendidik di sekolah wajib memiliki kompetensi memadai untuk melakukan manajemen kelas dan memastikan kelancaran proses pembelajaran. Jumlah guru jenjang pendidikan formal di DIY pada tahun 2021 dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 1.11. Jumlah Guru di DIY Tahun 2021

No	Satuan Pendidikan	Jumlah Guru		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
1	SD/ MI	6.828	15.347	22.175
2	SMP/ MTs	4.467	6.761	11.228
3	SMA/ MA	2.725	3.595	6.320
4	SMK	3.189	3.663	6.852
5	SLB	462	734	1.196

Sumber: *Disdikpora DIY, 2022*

Sesuai ketentuan UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, guru wajib memiliki kualifikasi akademik yang diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Satuan pendidikan dengan pendidik yang tidak memenuhi tingkat pendidikan minimal tidak akan dapat memenuhi standar mutu pendidik sesuai standar nasional pendidikan. Pemda DIY pada tahun 2021 terus mendukung pemenuhan standar kualifikasi pendidik ini melalui pemberian akses guru yang akan menempuh studi lanjut. Perekrutan guru baru juga sudah dilakukan sesuai kualifikasi akademik minimum tersebut. Grafik jumlah guru berkualifikasi di DIY tahun 2021 jenjang pendidikan dasar, menengah, dan khusus ditampilkan di bawah ini.

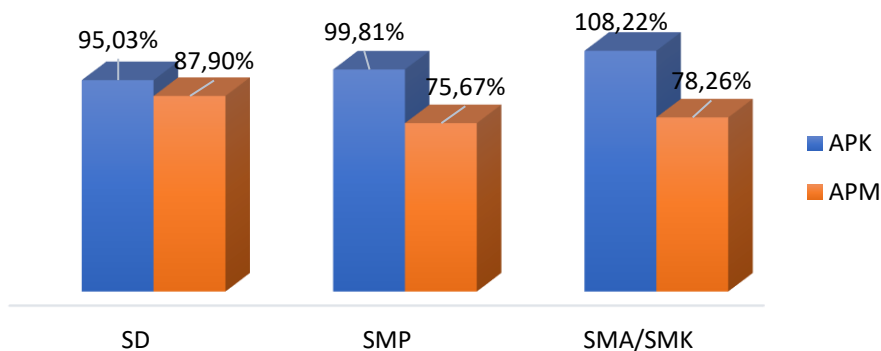


Gambar 1.10. Jumlah Guru Berkualifikasi di DIY Tahun 2021
 Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, 2022

Berdasarkan grafik di atas, jumlah guru yang memenuhi ketentuan minimal kualifikasi pendidikan telah mendekati jumlah keseluruhan guru masing-masing jenjang di DIY. Pemenuhan kualifikasi akademik para pendidik ini perlu terus ditingkatkan untuk mendukung peningkatan mutu pembelajaran di sekolah.

3) Partisipasi penduduk usia sekolah

Terpenuhinya sarana prasarana dan tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi pada satuan pendidikan akan mendorong pemberian layanan pendidikan yang layak pada masyarakat. Semakin berkualitas layanan pendidikan yang diberikan, diharapkan partisipasi penduduk usia sekolah juga makin meningkat. Partisipasi dalam pendidikan diukur menggunakan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APK menunjukkan perbandingan antara jumlah siswa jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk pada usia jenjang pendidikan tersebut. APM menggambarkan perbandingan jumlah siswa pada usia dan jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk pada usia jenjang pendidikan tersebut. Grafik berikut menunjukkan capaian APK dan APM DIY tahun 2021 ditunjukkan pada grafik di bawah ini.



Gambar 1.11. Capaian APK dan APM DIY Tahun 2021

Sumber: Dikpora DIY, 2022

Berdasarkan grafik di atas, capaian APK SD dan SMP sederajat menunjukkan bahwa aksesibilitas pendidikan dasar di DIY berada dalam kategori sangat baik karena mendekati 100%, artinya layanan pendidikan dasar DIY sudah menjangkau hampir seluruh penduduk usia sekolah jenjang pendidikan dasar. APK pendidikan menengah (SMA dan SMK sederajat) di DIY pada tahun 2021 mencapai angka 108,22%, artinya bahwa jumlah penduduk yang bersekolah pada jenjang pendidikan menengah di DIY melampaui jumlah penduduk DIY usia 16-18 tahun. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa partisipasi penduduk DIY untuk menuntaskan pendidikan sampai di jenjang menengah sangat tinggi. Salah satu faktor pendukung capaian APK ini adalah peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Dalam PPDB jalur zonasi menjadi prioritas utama penerimaan sehingga dipastikan bahwa sekolah dapat menampung seluruh penduduk usia sekolah di lingkungannya. Peraturan PPDB juga memberikan kepastian layanan pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu karena menetapkan kuota penerimaan jalur afirmasi bagi setiap sekolah.

Partisipasi sekolah juga bisa dilihat dari capaian Angka Partisipasi Murni (APM). APM mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. Oleh karena itu, nilai APM umumnya lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak di luar usia sekolah pada jenjang

pendidikan yang bersangkutan. Capaian APM DIY untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah seluruhnya menunjukkan bahwa masih ada peserta didik yang tidak berada pada usia sesuai jenjang pendidikannya. Berdasarkan Data Pokok Pendidikan, sebanyak 6,67% siswa SD/MI sederajat masih berusia kurang dari 7 tahun sedangkan sebanyak 0,75% sudah berusia lebih dari 12 tahun. Pada tingkat SMP/MTs sederajat tercatat 21,7% siswa masih berusia kurang dari 13 tahun dan 2,16% siswa berusia lebih dari 15 tahun. Pada jenjang SMA/MA/SMK sederajat terdapat 22,99% siswa yang berusia kurang dari 16 tahun dan 2,94% siswa yang berusia lebih dari 18 tahun.

4) Capaian angka mengulang dan angka putus sekolah

Angka mengulang menggambarkan seberapa banyak siswa yang tinggal kelas pada suatu jenjang pendidikan. Angka putus sekolah menggambarkan proporsi anak yang sudah tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Berikut adalah capaian angka mengulang dan angka putus sekolah di DIY jenjang pendidikan dasar dan menengah pada tahun 2021.

Tabel 1.12. Angka Mengulang dan Angka Putus Sekolah Tahun 2021

No	Satuan Pendidikan	Angka Mengulang (%)	Angka Putus Sekolah (%)
1	SD/MI	0,16	0,05
2	SMP/MTs	0,09	0,10
3	SMA/MA /SMK	0,58	0,75

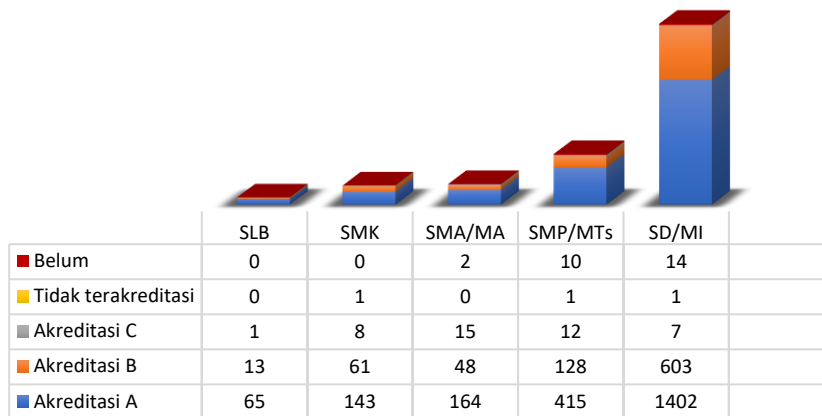
Sumber: Disdikpora DIY, 2022

Berdasarkan tabel di atas, angka mengulang dan angka putus sekolah pada jenjang pendidikan menengah menunjukkan capaian yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenjang pendidikan dasar. Hal ini menunjukkan kecenderungan siswa mengulang maupun putus sekolah pada jenjang pendidikan menengah lebih tinggi dari jenjang pendidikan dasar. Permasalahan ekonomi, sosial, psikologis dapat melatarbelakangi penyebab siswa putus sekolah atau mengulang kelas. Pemda DIY berupaya menurunkan angka putus sekolah ini melalui berbagai beasiswa pendidikan untuk

meringankan beban ekonomi siswa dari keluarga kurang mampu. Pendekatan dari sekolah pun sudah dilaksanakan bagi siswa yang dirasa rawan mengulang kelas atau putus sekolah melalui bimbingan khusus dan kunjungan rumah.

5) Capaian hasil akreditasi sekolah/madrasah

Akreditasi merupakan penilaian kelayakan satuan dan/atau program Pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan. Capaian akreditasi sekolah/madrasah di tahun 2021 berdasarkan data Badan Akreditasi Nasional Provinsi DIY adalah sebagai berikut.



Gambar 1.12. Capaian Akreditasi Sekolah/Madrasah DIY Tahun 2021

Sumber: BAN Provinsi DIY, 2022

Berdasarkan grafik di atas, status akreditasi A dan B telah dipenuhi banyak sekolah/madrasah di DIY walaupun masih ada sekolah terakreditasi C maupun Tidak Terakreditasi. Untuk memenuhi sistem akreditasi baru yang dimulai pada tahun 2021, dilakukan peningkatan kesiapan dan kemandirian satuan pendidikan agar mampu melaksanakan evaluasi diri secara menyeluruh agar memenuhi syarat untuk dilakukan akreditasi. Selain itu dilakukan optimalisasi pendampingan oleh pengawas sekolah untuk memastikan proses pembelajaran dan pendukung pembelajaran sesuai standar nasional pendidikan.

e. Kondisi Ekonomi Daerah

1) Sektor Unggulan

a) Sektor Industri Pengolahan

PDRB sektor Industri pengolahan di DIY pada tahun 2021 adalah sebesar Rp12.670.356,70 Juta atau tumbuh sebesar 0,37% dari tahun 2020. Sub sektor utama yang mendukung sektor ini adalah Industri Makanan dan Minuman dengan PDRB sebesar Rp6.966.042,50 Juta, Industri Tekstil dan Pakaian Jadi dengan PDRB sebesar Rp1.494.396,30 Juta, serta Industri Pengolahan Tembakau dengan PDRB sebesar Rp631.428,80 Juta.

Tabel 1.13. Perkembangan PDRB Sektor Industri Pengolahan di DIY Tahun 2017-2021

Sub Sektor	2017	2018	2019	2020	2021
Industri Makanan dan Minuman	6.505 .523,40	6.954 .983,10	7.508 .502,40	7.163 .558,80	6.966 .042,50
Industri Pengolahan Tembakau	489 .335,70	514 .937,10	523 .804,60	567 .978,80	631 .428,80
Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	1.274 .075,80	1.348 .910,60	1.439 .852,50	1.372 .243,50	1.494 .396,30
Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	323 .933,90	307 .907,20	305 .131,30	251 .673,80	256 .987,70
Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	198 .305,10	209 .431,90	209 .621,10	198 .957,70	187 .173,90
Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	278 .534,70	287 .372,30	307 .555,50	296 .474,70	283 .779,00
Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	152 .557,20	154 .825,80	157 .737,70	174 .644,00	175 .133,20
Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	254 .141,50	253 .462,10	256 .768,10	249 .830,90	268 .043,30
Industri Barang Galian bukan Logam	360 .404,30	373 .123,90	369 .065,30	318 .837,10	332 .928,30
Industri Barang Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik, dan Peralatan Listrik	799 .598,50	770 .480,60	785 .492,20	792 .349,70	806 .190,50
Industri Mesin dan Perlengkapan	465 .140,10	476 .242,60	471 .570,00	417 .445,60	411 .897,30
Industri Alat Angkutan	2 .610,90	2 .703,00	2 .770,60	2 .787,10	2 .428,20
Industri Furnitur	503 .683,80	545 .914,70	566 .496,20	542 .971,70	584 .490,80

Sub Sektor	2017	2018	2019	2020	2021
Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	271 .117,60	286 .560,50	296 .359,60	274 .361,00	269 .436,80
Jumlah	11.878 .962,40	12.486 .855,40	13.200 .727,10	12.624 .114,40	12.670 .356,70

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

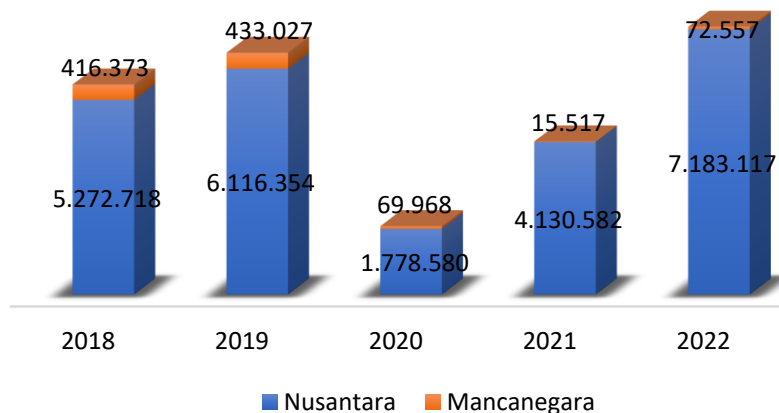
b) Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Dalam rangka menyiapkan pembukaan kembali destinasi wisata, Pemda DIY memberikan prioritas pelaksanaan vaksinasi untuk para pelaku pariwisata DIY. Vaksinasi dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak seperti Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Badan Otorita Borobudur, PT.GRAB, Tiket.com, KOWANI, GIPI DIY, TNI, POLDA DIY, Bank Indonesia, BPD DIY, Paniradya Pati, Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan pihak-pihak lain.

Selanjutnya seiring dengan dibukanya Kembali destinasi wisata, Pemda DIY mengupayakan aktivitas pariwisata dilaksanakan dengan berpedoman pada protokol kesehatan. Beberapa langkah yang telah dilakukan antara lain: penggunaan aplikasi registrasi online VisitingJogja, sertifikasi CHSE, sosialisasi *pranatan anyar*, dan pemberian bantuan alat-alat penegakan prokes untuk sembilan hotel yang menjadi sarana isolasi terpadu. Selain itu Pemda DIY juga memberikan dukungan berupa hibah kepada 169 pokdarwis se-DIY.

Dengan berbagai upaya tersebut, tahun 2021 kegiatan pariwisata DIY mulai menunjukkan peningkatan aktivitas. Hal tersebut dapat dilihat dari pertumbuhan kunjungan wisatawan pada tahun 2021 tercatat sebanyak 4.146.099 wisatawan, meningkat dibandingkan tahun 2020 yang hanya mencapai 1.848.548 wisatawan. Wisatawan domestik sangat mendominasi jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2021. Hal ini disebabkan kasus COVID-19 di dalam negeri cenderung menunjukkan penurunan dan keberhasilan program vaksinasi

pemerintah. Namun kondisi tersebut tidak terjadi pada peningkatan wisatawan mancanegara karena penyebaran COVID-19 di mancanegara masih cenderung meningkat, khususnya terkait dengan menyebarnya varian *delta* atau B.1.617.2 dan varian *omicron* atau B.1.1.529.



Gambar 1.13. Perkembangan Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara 2018-2021

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Peningkatan aktivitas pariwisata mendorong peningkatan belanja wisatawan dan PDRB untuk lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum. Akomodasi dan makan minum di tahun 2021 mengalami pertumbuhan 7,55% bila dibandingkan dengan tahun 2020. Pada tahun 2021 capaian tertinggi lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum terjadi pada triwulan IV sedangkan capaian terendah ada di triwulan III. Hal tersebut berkaitan dengan penurunan kasus COVID-19 di triwulan IV, sehingga PDRB dari penyediaan akomodasi dan makan minum yang berasal dari aktivitas pariwisata DIY meningkat.

Tabel 1.14. PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Tahun 2021

2021	Harga Konstan				
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Tahunan
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.333.587	2.369.428	2.031.723	2.396.354	9.131.091

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Jumlah wisatawan yang menggunakan jasa akomodasi di DIY pada tahun 2021 mencapai 4.294.725 orang terdiri dari jumlah wisatawan mancanegara 14.740 orang (0,34%) dan jumlah wisatawan nusantara sebanyak 4.279.985 orang (99,66%). Terjadi peningkatan sebesar 56,96 % dibandingkan tahun 2020 yang sejumlah 1.848.548 wisatawan. Peningkatan tersebut didominasi oleh wisatawan nusantara, sementara jumlah wisatawan mancanegara justru mengalami penurunan dari 69.968 wisatawan menjadi 14.740 wisatawan.

Tabel 1.15. Perkembangan Jumlah Wisatawan, MICE, dan Rata-rata Lama Tinggal di DIY Tahun 2015-2021

Tahun	Jumlah		Jumlah Wisatawan (Wisman+Wisnus) (Orang)	Jumlah MICE (Kali)	Lama Tinggal/LOS (Hari)	
	Wisman	Wisnus			Wisman	Wisnus
2015	308.485	3.813.720	4.122.205	11.337	2,07	1,85
2016	355.313	4.194.261	4.549.574	14.069	2,00	1,95
2017	397.951	4.831.347	5.229.298	16.135	2,13	1,98
2018	416.374	5.272.719	5.689.093	17.814	2,15	1,99
2019	433.027	6.116.354	6.549.381	19.370	2,31	1,99
2020	69.968	1.778.580	1.848.548	1.568	1,95	1,65
2021	14.740	4.279.985	4.294.725	6.427	2,24	1,41

Sumber: Dispar DIY, 2022 (data sementara, diolah)

Seiring meningkatnya jumlah kunjungan pada tahun 2021, lama tinggal wisatawan khususnya wisatawan nusantara juga mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2020. Pada tahun 2021 terdapat peningkatan jumlah wisatawan yang mengunjungi Destinasi wisata. Kabupaten Sleman masih menjadi destinasi wisata dengan jumlah wisatawan yang paling banyak, diikuti dengan Kabupaten Bantul di posisi nomor dua. Minat wisatawan untuk mengunjungi destinasi wisata alam cukup besar, hal tersebut sesuai dengan unggulan

destinasi-destinasi alam yang ada di Kabupaten Sleman dan Bantul. Potensi wisata pantai yang terdapat di Kabupaten Gunungkidul juga menjadi nilai lebih bagi para wisatawan yang datang ke DIY.

Tabel 1.16. Jumlah Wisatawan yang mengunjungi Destinasi Wisata per Kabupaten/Kota di DIY pada Tahun 2017-2021

No	ODTW	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
		Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
1	Kota Yogyakarta	5.347.303	4.752.351	4.828.646	534.376	1.597.672
2	Kab. Sleman	6.814.558	7.898.088	8.024.885	4.250.119	5.078.277
3	Kab. Bantul	9.141.150	8.840.442	8.982.367	2.352.659	2.721.950
4	Kab. Kulon Progo	1.400.786	1.969.623	2.001.243	966.432	1.161.316
5	Kab. Gunungkidul	3.246.996	3.055.284	3.104.334	1.978.657	2.377.046
Jumlah Kunjungan Wisatawan di Provinsi DIY		25.950.793	26.515.788	26.941.475	10.082.243	11.680.444

Sumber: BPPSD Bappeda DIY, 2022 (data sementara)

Jumlah kunjungan wisatawan di DIY pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 850.301 wisatawan dibanding tahun 2020. Peningkatan wisatawan pada destinasi wisata sangat dipengaruhi adanya kebijakan penurunan level PPKM dari pusat dari level 4 menjadi level 2, serta telah terlaksananya program vaksinasi COVID-19 disebagian besar masyarakat, sehingga memberikan kepercayaan masyarakat untuk melakukan kegiatan wisata, khususnya pada bulan September-Desember.

c) *Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan*

Pertanian berperan penting dalam kehidupan manusia karena berfungsi sebagai penyedia pangan, pakan untuk ternak, dan bioenergi. Peran pertanian sangat strategis dalam mendukung perekonomian daerah maupun nasional, terutama untuk mewujudkan ketahanan pangan, peningkatan daya saing, penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan. Sektor pertanian juga mendorong pertumbuhan agroindustri di hilir dan memacu ekspor komoditas pertanian untuk

meningkatkan pendapatan daerah. Di sisi lain, penyediaan kebutuhan pangan bagi 3.668.719 jiwa penduduk DIY (BPS, 2021) merupakan tugas utama yang tidak ringan. Peran penting sektor pertanian telah terbukti secara empiris baik di kala kondisi ekonomi normal maupun saat menghadapi krisis.

(1) Tanaman Pangan

Sub sektor tanaman pangan memiliki peran strategis dalam menunjang kehidupan sebagian besar penduduk. Hal ini disebabkan mayoritas penduduk masih mengandalkan konsumsi makanan pokok yang berasal dari padi. Tingkat konsumsi beras sebagai bahan pangan pokok masyarakat DIY mencapai 82,20kg/kapita/tahun (Dataku Bappeda, 2022). Berdasar kebutuhan ini DIY harus mampu menyediakan 301.569 ton beras/tahun. Dilihat dari produksi padi DIY tahun 2021 sebesar 855.355 ton Gabah Kering Giling (GKG) atau senilai dengan 539.387 ton beras, sedangkan kebutuhan beras DIY adalah 301.569 ton, maka produksi di DIY masih *surplus*.

Tabel 1.17. Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Tanaman Pangan Unggulan Tahun 2020-2021*

No	Komoditas	LuasPanen (ha)		Produktivitas (ku/ha)		Produksi (ton)	
		2020	2021*	2020	2021*	2020	2021*
1	Padi	144.650	144.628	58,60	59,14	848.140	855.355
2	Jagung	66.422	67.037	55,61	54,08	369.347	362.525
3	Ubi Kayu	46.877	46.678	228,97	214,33	1.073.314	1.000.444

Keterangan: *) Angka sementara

Sumber: DPKP DIY, 2022

Tahun 2021, produksi padi DIY sebesar 855.355 ton GKG meningkat 0,85% dibanding tahun 2020. Peningkatan produksi karena curah hujan optimal yang mendukung kondisi pertanaman padi pada *sub round* pertama tahun 2021, sehingga mampu meningkatkan produktivitas padi total sebesar 0,54 kuintal/hektar atau naik sebesar 0,92% dibandingkan tahun 2020.

Produksi jagung DIY tahun 2021 mencapai angka 362.525 ton pipilan kering atau turun 1,85% dibandingkan produksi tahun 2020 yang sebesar 369.347 ton pipilan kering. Penurunan produksi tersebut disebabkan tidak sempurnanya pembungaan dan pengisian biji pada tongkol jagung akibat kondisi iklim sehingga menyebabkan produktivitas jagung menurun.

Komoditas ubi kayu DIY tahun 2021 sebesar 1.000.444 ton atau turun 6,79% dibandingkan produksi tahun 2020 sebesar 1.073.314 ton. Penurunan pada komoditas ubi kayu disebabkan produktivitas tahun 2021 turun 6,39% dan luas panen turun 0,36% dibandingkan tahun 2020. Penurunan produktivitas ubi kayu dipengaruhi kurangnya *input* unsur hara karena petani lebih mengutamakan pemupukan untuk tanaman pangan prioritas. Penurunan luas panen ubi kayu dikarenakan beralih ke komoditas lain yang mempunyai nilai jual yang lebih tinggi.

(2) Kelautan dan Perikanan

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki 34 Desa Maritim yang berada di Kabupaten Gunungkidul, Bantul, dan Kulon Progo. Desa Maritim yang ada di DIY memiliki berbagai macam potensi. Kalurahan (desa) yang mempunyai Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) maupun Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP), seperti Songbanyu, Girikarto, Karangsewu, Glagah, dan Poncosari mempunyai potensi perikanan tangkap laut yang besar. Terdapat juga beberapa kalurahan (desa) yang merupakan destinasi wisata, seperti Tepus (Pantai Sundak, Indrayanti, Pok tunggal) dan Parangtritis. Selain itu, terdapat juga kalurahan yang mengembangkan potensi garam diantaranya Kemadang, Kanigoro, dan Gadingsari. Beberapa kalurahan juga merupakan wilayah konservasi

pesisir, seperti Jepitu (Wediombo), mangrove di Jangkar dan Banaran, serta konservasi penyu di Gadingsari dan Srigading. Di sisi lain, pertanian lahan pantai juga dikembangkan di beberapa kalurahan, seperti Tirtohargo.

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan khususnya pada tahun 2021 ini tidak begitu terdampak pandemi COVID-19. Jumlah produksi perikanan di DIY masih didominasi oleh perikanan budidaya melalui pengembangan usaha perikanan budidaya di kolam, sawah (mina padi dan udang galah padi), dan telaga. Produksi perikanan budidaya pada tahun 2020 sebesar 93.846 ton dan meningkat menjadi 96.401 ton pada tahun 2021. Komoditas unggulan dalam perikanan budidaya antara lain Lele (48.600 ton), Nila (33.665 ton), Gurami (5.459 ton), Udang Vaname (4.028 ton), Bawal (3.996 ton), Mas (301 ton), Patin (279 ton), Tawes (64 ton), Udang Galah (6 ton) dan Gabus (3 ton) (Sumber : Data Produksi DKP DIY 2021). Selain itu terdapat beberapa jenis komoditas ikan budidaya yang telah dirilis dan ditetapkan berdasarkan SK penetapan dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Komoditas perikanan pertama yang dirilis adalah ikan Nila Merah Nilasa dengan nomor SK 47/KEPMEN-KP/2012. Ikan nila merah nilasa merupakan salah satu komoditas perikanan yang banyak dibudidayakan karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Memiliki kekuatan yang memiliki laju pertumbuhan yang relatif cepat, mampu bertahan pada suhu 38,66°C dan salinitas hingga 18ppt. Komoditas perikanan kedua yang dirilis adalah ikan Mas Najawa dengan nomor SK 41/KEPMEN-KP/2014. Ikan Mas Merah Najawa memiliki ciri khas warna merah menyala dan bentuk tubuh bulat memanjang. Komoditas perikanan ketiga yang dirilis

adalah ikan Tawes Jois dengan nomor SK 53/KEPMEN-KP/2018. Ikan ini memiliki derajat fekunditas yang tinggi, sehingga memiliki potensi produksi benih yang cukup tinggi untuk mendukung peningkatan produksi ikan tawes untuk konsumsi masyarakat.

Produksi perikanan tangkap tidak terpengaruh adanya pandemi COVID-19, hal ini dapat dilihat peningkatan produksi dari sekitar 6.545 Ton pada tahun 2020 (Satudata KKP) meningkat sekitar 8,1 % menjadi 7.123 Ton di tahun 2021 (Data Produksi DKP DIY 2021). Peningkatan produksi perikanan tangkap di laut didukung dengan optimalisasi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sadeng yang berada di Gunungkidul serta 19 titik Tempat Pendaratan Ikan yang tersebar di 3 kabupaten. Produksi perikanan tangkap juga didukung oleh komoditas perikanan tangkap yang berasal dari perairan umum daratan seperti sungai, embung, waduk maupun genangan air lainnya. Saat ini, komoditas unggulan perikanan tangkap yang ada di DIY adalah komoditas ikan tuna, layur, bawal, dan lobster. Potensi tangkapan untuk ikan tuna sebesar 500,6 ton, ikan layur sebesar 728,66 ton, ikan bawal sebesar 170,32 ton dan lobster sebesar 82,53 ton.

Dukungan sarpras untuk peningkatan produksi perikanan tangkap terlihat dengan adanya penambahan jumlah kapal. Peningkatan jumlah kapal di DIY diharapkan mampu meningkatkan produksi perikanan tangkap di pesisir. SDM yang terlibat dalam usaha perikanan tangkap juga harus dipersiapkan semaksimal mungkin untuk tetap mendukung dalam produksi perikanan tangkap yang ada di DIY.

Tabel 1.18. Jumlah Kapal Perikanan di DIY Tahun 2019-2021 (Unit)

Ukuran Kapal	2019	2020	2021
<10 GT	529	521	678
≥10 GT	25	54	52
JUMLAH	554	575	730

Sumber: Dislautkan DIY, 2021

Hasil olahan perikanan yang diproduksi oleh poklhas di DIY yang menggunakan bahan baku ikan seperti nugget, bakso, otak-otak, sosis ikan, crispy ikan sangat diminati masyarakat karena gencarnya kampanye gemar makan ikan (Gemarikan). Kampanye Gemarikan sudah berhasil di mana konsumsi makan ikan tahun 2021 sebesar 31,34 kg/kapita/tahun (Data Sementara Dislautkan DIY Tahun 2021) yang melebihi dari target 25,48 kg/kapita/tahun.

(3) Hortikultura

Komoditas hortikultura strategis yang menjadi perhatian baik ketika sedang panen raya maupun saat stok menipis adalah cabai besar, cabai rawit, bawang merah. Komoditas ini merupakan primadona yang banyak dibudidayakan oleh petani karena bernilai ekonomi lebih tinggi dibandingkan komoditas hortikultura yang lain. Beberapa komoditas buah-buahan mengalami kenaikan produksi yang cukup signifikan, seperti mangga, durian, pisang, pepaya, dan salak. Produksi biofarmaka jahe dan kunyit juga naik.

Tabel 1.19. Produksi Hortikultura Unggulan DIY Tahun 2020-2021

No	Komoditas	Satuan	Produksi	
			2020	2021*
1	Cabai besar	Ton	44.521	38.378
2	Cabai rawit	Ton	15.052	15.933
3	Bawang merah	Ton	18.811	29.809
4	Durian	Ton	6.771	9.258
5	Salak	Ton	54.996	57.290

Keterangan: *) Angka sementara

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Aneka cabai dan bawang merah merupakan komoditas sayuran unggulan di DIY yang menjadi andalan petani terutama di Kulon Progo, Bantul, dan Sleman. Permasalahan pemasaran yang kerap terjadi telah diupayakan diatasi dengan pendekatan seperti sistem lelang saat panen. Upaya ini didukung dengan fasilitasi pasar lelang dan pengolahan pasca panen. Saat ini Pemda DIY melalui kegiatan Informasi Pasar Komoditas Hortikultura, telah memfasilitasi sarana prasarana pengolahan hortikultura, serta jejaring pasar sehingga diperoleh akses informasi harga komoditas pertanian dari berbagai pasar besar di Indonesia.

Dalam perkembangannya DIY juga mendukung program *food estate* dari Kementerian Pertanian, yang dikembangkan di daerah-daerah sentra penghasil komoditas unggulan hortikultura. *Food estate* ini dikembangkan dalam beberapa bentuk seperti: kemitraan dengan pasar, meningkatkan kapasitas kelembagaan ekonomi petani, meningkatkan produktivitas hortikultura, meningkatkan kontinuitas, kualitas, kuantitas pasokan dan harga komoditas strategis hortikultura serta menyediakan benih bermutu.

Pengembangan buah–buahan di DIY menerapkan sistem kawasan. Sistem kawasan adalah suatu kawasan dikembangkan secara berkelanjutan dengan memperhatikan potensi wilayah, kecocokan agroklimat, dan potensi ekonominya. Kawasan yang dikembangkan misalnya Kawasan Durian, Kawasan Kelengkeng, dan Kawasan Salak. Pengembangan durian di beberapa kawasan mulai memberikan hasil dengan adanya peningkatan produksi, dari 6.771 ton menjadi 9.258 ton di tahun 2021 atau naik 36,72%. Salak sebagai buah khas Yogyakarta khususnya Sleman mengalami peningkatan

produksi dari 54.996 ton menjadi 57.290 ton di tahun 2021 atau naik 4,17%. Kelengkeng yang mulai dikembangkan di DIY juga sudah mulai menghasilkan namun secara statistik baru mulai dihitung tahun ini dengan produksi 694,47 ton.

(4) Perkebunan

Peran ekologis perkebunan adalah menjadi paru-paru ekosistem yang menyerap dan mereduksi karbondioksida sekaligus mengeluarkan oksigen ke atmosfer bumi, penyedia bahan bakar nabati dan bioenergi yang bersifat ramah lingkungan yang terbarukan, penurun emisi gas rumah kaca serta mendukung pelestarian Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup.

Upaya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan dilakukan antara lain dengan: penggunaan benih unggul, didukung penggunaan sarana produksi yang tepat sesuai rekomendasi, dan penerapan sistem manajemen usaha tani yang sesuai. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan pengembangan kakao, kopi, teh dan kelapa melalui dana APBN Perkebunan. Upaya ini menjadi bagian dari kerangka agenda prioritas agroindustri untuk meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

Capaian produksi perkebunan cenderung mengalami peningkatan pada tahun 2021 dibandingkan capaian tahun 2020. Capaian produksi perkebunan tahun 2021 sebesar 69.181,13 ton atau tercapai sebesar 100,04% dari target 69.153 ton. Peningkatan ini salah satunya didukung oleh Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 sektor ekonomi.

Tabel 1.20. Produksi Komoditas Perkebunan Unggulan DIY Tahun 2020-2021**

No	Komoditas	Produksi (Ton)			Wujud Produksi
		2020	2021**	% Pertumbuhan	
1	Kelapa	48.375,90	51.727,30	6,93	kopra
2	Tebu	11.035,49	10.854,85	-1,64	gula hablur
3	Kakao	1.893,99	2.145,65	13,29	biji kering

Keterangan: ** Angka Sangat Sementara

(Sumber: DPKP DIY, 2022)

Dari beberapa komoditas unggulan, komoditas kelapa mengalami peningkatan sebesar 6,93% dan kakao meningkat 13,29%. Peningkatan produksi komoditas tersebut didukung oleh implementasi kegiatan rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi yang dibarengi dengan penyediaan benih/varietas unggul, pengendalian OPT, penanganan pascapanen dan pengolahan, standarisasi mutu, pemberdayaan pekebun, serta peningkatan kapasitas SDM serta penguatan kelembagaan.

(5) *Peternakan*

Meningkatnya populasi peternakan dan kesehatan hewan merupakan sasaran pembangunan peternakan di DIY. Hal ini dilaksanakan melalui peningkatan ketersediaan dan mutu bibit ternak, tanaman pakan ternak, dan bahan pakan, peningkatan kapasitas SDM peternak melalui bimbingan teknis budidaya peternakan dan pengembangan pakan, optimalisasi reproduksi, pengawasan pemotongan betina produktif, pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan.

Tabel 1.21. Populasi Ternak Unggulan di DIY Tahun 2020-2021*

No	Jenis Ternak	Jumlah (ekor)	
		2020	2021*
1	Sapi Potong	309.259	317.425
2	Sapi Perah	3.520	3.469
3	Kambing	416.400	440.748

Keterangan: *) Angka sementara

Sumber: DPKP DIY, 2022

Populasi sapi potong mengalami peningkatan sebesar 2,64% atau mengalami penambahan populasi sebanyak 8.166 ekor dari semula 309.259 ekor di tahun 2020 menjadi 317.425 ekor di tahun 2021. Hal ini didukung oleh adanya program unggulan Kementerian Pertanian yang memfokuskan pada kegiatan optimalisasi reproduksi meliputi fasilitasi sarana prasarana, operasional inseminasi buatan, dukungan akses pembiayaan dengan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR), fasilitasi premi asuransi sapi betina produktif, dan pengawasan pemotongan betina produktif.

Wilayah sentra pengembangan sapi perah penghasil susu berada di Kabupaten Sleman yang meliputi 3 wilayah Kapanewon yaitu Cangkringan, Pakem, dan Turi. Populasi sapi perah pada tahun 2021 adalah 3.469 ekor atau turun 1,45% (51 ekor) dibanding tahun 2020 yang berjumlah 3.520 ekor. Sedangkan dari sisi produksi susu yang dihasilkan, pada tahun 2021 sebanyak 5.385.600 liter, meningkat dibanding produksi 2020 yang mencapai 5.160.092 liter. Penurunan populasi sapi perah dan produksi susu, salah satu nya disebabkan turunnya minat generasi muda untuk menjadi peternak.

Sedangkan populasi kambing mengalami peningkatan sejumlah 24.348 ekor (5,85%). Hal ini dipengaruhi oleh kondisi permintaan pasar terhadap susu kambing dalam bentuk segar maupun olahan yang cukup besar. Keadaan ini meningkatkan minat petani peternak untuk membudidayakan kambing terutama kambing perah. Sampai saat ini kebutuhan susu kambing di DIY belum dapat dipenuhi seluruhnya oleh para peternak lokal.

(6) Kehutanan

Pemanfaatan hutan lestari harus berpegang pada konsep lima pilar pengelolaan hutan lestari yaitu kepastian kawasan, jaminan berusaha, produktivitas, diversifikasi produk, dan daya saing. Berdasarkan Permen LHK Nomor 8 tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, pemanfaatan hutan meliputi pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.

Secara berangsur-angsur, kinerja usaha sektor kehutanan sudah mulai bangkit dari keterpurukan karena efek pandemi COVID-19 dan menunjukkan tren yang positif. Salah satu indikatornya yaitu meningkatnya jumlah produksi kayu bulat pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Pada tahun 2021 jumlah produksi kayu bulat sebesar 95.420,08 m³ atau meningkat 38,11% dibandingkan tahun 2020 dengan jumlah produksi sebesar 69.085,70 m³. Peningkatan kinerja juga terjadi pada produksi minyak kayu putih seperti sebagai berikut:

Tabel 1.22. Target dan Realisasi Produksi Minyak Kayu Putih di DIY Tahun 2017-2021

Tahun	Target Produksi (liter)	Realisasi Produksi (liter)	PAD (Rp)
2017	44.285	44.297	8.420.859.700
2018	44.285	44.296	10.458.285.600
2019	39.316	39.323	9.887.974.000
2020	41.610	40.353	9.748.035.000
2021	40.353	42.317	12.170.672.000

Sumber: DLHK DIY, 2022

Produksi minyak kayu putih pada tahun 2021 mencapai 42.317 liter. Realisasi ini telah melebihi target yang ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar 40.353 liter. Produksi minyak kayu putih pada tahun 2021 juga mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan produksi tahun 2020 sebesar 1.964 liter. Produksi minyak kayu putih dilakukan di 2 (dua) pabrik yaitu di Pabrik Gelaran dengan jumlah produksi sebesar 20.072 liter dan di Pabrik Sendangmole sebesar 22.245 liter. Tenaga kerja yang terserap dari proses produksi ini lebih dari 1.500 orang yang berasal dari masyarakat sekitar hutan. Dalam produksinya dibutuhkan daun kayu putih sebanyak 4.559 ton yang berasal dari hutan kayu putih seluas \pm 3.000 ha yang berada di Kabupaten Gunungkidul. Secara terperinci tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 1.23. Produksi Daun Kayu Putih di DIY tahun 2021

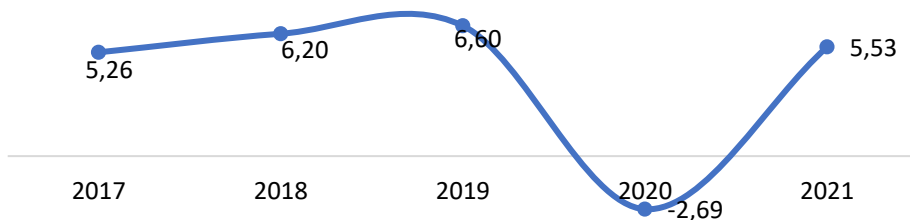
No	Kawasan Hutan Produksi		Luas Tegakan Kayu Putih (Ha)	Jumlah Daun (Ton)	Realisasi Daun (Ton)	Keterangan
	BDH	RPH				
1	Playen	Kemuning	205,50	148,00	148,00	Pabrik Sendangmole
		Wonolagi	292,50	185,00	185,00	
		Gubugrubuh	474,60	245,00	245,00	
		Menggoran	275,80	130,00	130,00	
		Kepek	113,80	200,00	200,00	
	Jumlah BDH Playen		1362,20	908,00	908,00	
2	Paliyan	Grogol	450,90	550,00	550,00	
	Jumlah BDH Paliyan		450,90	550,00	550,00	
3	Panggang	Pucanganom	99,90	43,00	43,00	
	Jumlah BDH Panggang		99,90	43,00	43,00	
4	Karangmojo	Gelaran	221,3	280,00	280,00	Pabrik Sendangmole
			529,30	858,00	857,10	Pabrik Gelaran
			489,80	645,00	643,00	Pabrik Sendangmole
			176,90	240,00	240,00	Pabrik Gelaran
		Kenet	651,80	805,00	787,93	Pabrik Gelaran
		Candi	202,10	290,00	289,97	Pabrik Gelaran
		Jumlah BDH Karangmojo		2271,2	3118,00	3098,00
	Pabrik Sendangmole		2624,10	2426,00	2424,00	
Pabrik Gelaran		1560,10	2193,00	2175,00		
Total		4184,20	4619,00	4599,00		

Sumber: DLHK DIY, 2022

Harga lelang minyak kayu putih menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini salah satunya produksi minyak kayu putih dalam negeri baru mampu memenuhi setengah dari seluruh kebutuhan nasional yang mencapai 4.500 ton/ tahun, sehingga berpengaruh terhadap harga jual itu sendiri.

2) *Pertumbuhan Ekonomi*

Kapasitas perekonomian DIY terus mengalami pertumbuhan positif sejak tahun 2016 hingga mencapai puncaknya pada tahun 2019 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 6,60%. Perekonomian DIY selanjutnya mengalami kontraksi atau tumbuh negatif akibat dampak pandemi COVID-19 pada tahun 2020 dengan pertumbuhan -2,69%, kemudian mengalami *rebound* di tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 5,53%. Berikut ini gambar pertumbuhan ekonomi DIY selama lima tahun terakhir.



Gambar 1.14. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi DIY Tahun 2017-2021 (%)

Sumber: BPS Provinsi DIY 2018-2022

Perlambatan ekonomi DIY pada tahun 2020 disumbang oleh pertumbuhan negatif di hampir semua lapangan usaha seiring dengan pemberlakuan kebijakan pembatasan fisik dan mobilitas yang berpengaruh pada menurunnya dinamika aktivitas masyarakat. Pada tahun 2021, hanya dua lapangan usaha yang mengalami tumbuh negatif yaitu Pertambangan dan Penggalian serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial

Wajib. Kondisi ekspansif di sektor lainnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sekitar 5,53% seiring dengan membaiknya penanganan pandemic COVID-19, gencarnya vaksinasi dan pelonggaran pembatasan kegiatan masyarakat sehingga membawa perbaikan kondisi aktivitas ekonomi masyarakat terutama di bulan-bulan terakhir 2021. Sektor yang tumbuh paling tinggi adalah Informasi dan Komunikasi dengan tingkat pertumbuhan 16,69%. Seiring naiknya dinamika pariwisata mendorong pertumbuhan sektor Akomodasi dan Makan Minum. Sektor tersebut mengalami kontraksi di tahun 2020 dengan pertumbuhan sebesar -16,91%.

Tabel 1.24. Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (%) (C to C, TW I – IV 2021 terhadap TW I – IV 2020)

	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,94	2,16	1,02	4,19	0,61
2	Pertambangan dan Penggalian	3,39	10,59	3,04	-8,84	-3,11
3	Industri Pengolahan	5,74	5,12	5,73	-4,38	0,37
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3,96	5,31	5,43	-0,38	2,40
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	3,46	5,13	8,90	0,51	6,82
6	Konstruksi	6,94	13,1	14,39	-15,64	10,82
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,72	5,54	5,16	-4,52	1,51
8	Transportasi dan Pergudangan	4,74	6,6	3,55	-20,21	1,93
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	6,21	6,77	8,89	-16,91	7,55
10	Informasi dan Komunikasi	6,14	6,48	7,45	19,70	16,69
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,80	6,14	8,62	-1,09	1,45
12	Real Estat	4,94	5,54	5,93	1,27	0,57
13	Jasa Perusahaan	5,86	5,51	6,75	-14,89	8,09
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,51	4,06	3,30	-2,22	-0,39
15	Jasa Pendidikan	5,56	6,01	6,57	4,47	5,00
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,84	6,05	6,61	19,18	4,47
17	Jasa lainnya	5,76	6,06	6,25	-15,74	21,53
	PDRB	5,05	5,26	6,20	-2,69	5,53

Sumber: BPS Provinsi DIY 2018-2022

Menurut PDRB berdasarkan pendekatan pengeluaran, jenis pengeluaran yang tumbuh terbesar pada tahun 2021 adalah Ekspor Luar Negeri yaitu sebesar 21,68%. Pada tahun sebelumnya, jenis pengeluaran ini tumbuh negatif sebesar 12,90%. Net Ekspor antar

daerah mengalami kontraksi yaitu sebesar 148,78%. Pengeluaran lain yang dapat tumbuh cukup tinggi adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto yang tumbuh 8,20% dan Perubahan Inventori tumbuh 8,63%.

Tabel 1.25. Nilai dan Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Pengeluaran Tahun 2017-2021 (menurut jenis pengeluaran)

No	Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5,22	3,95	3,81	-2,75	1,77
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	9,61	2,63	9,58	-6,56	0,39
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,20	3,74	3,12	-0,93	0,26
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,97	10,17	9,74	-13,41	8,20
5	Perubahan Inventori	2,02	3,54	3,04	6,24	8,63
6	Ekspor Luar Negeri	9,26	12,82	-0,22	-12,90	21,68
7	Impor Luar Negeri	9,19	6,22	-9,16	-14,87	7,30
8	Net Ekspor Antar-Daerah	-6,16	-3,14	-9,95	-74,74	-148,78
	PDRB	5,26	6,20	6,60	-2,69	5,53

Sumber: BPS Provinsi DIY 2018-2022

Selama tahun 2014 sampai 2017, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta adalah dua wilayah yang mencapai pertumbuhan tertinggi. Namun di tahun 2018 dan 2019, Kabupaten Kulon Progo mencapai pertumbuhan tertinggi yaitu masing-masing 10,62% dan 13,49% yang didukung oleh beberapa mega proyek termasuk pembangunan YIA. Pada tahun 2020, semua wilayah tumbuh negatif dengan kontraksi terbesar dialami oleh Kabupaten Kulon Progo dengan pertumbuhan -4,06%. Semua Kabupaten dan Kota kemudian tumbuh positif seiring dengan kembali meningkatnya aktivitas perekonomian daerah. Pada tahun 2021, Kota Yogyakarta merupakan wilayah dengan pertumbuhan tertinggi yaitu 6,00%.

Tabel 1.26. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota, 2017-2021

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021*
Kulon Progo	5,97	10,84	13,49	-4,06	5,00
Bantul	5,10	5,47	5,53	-1,66	5,20
Gunungkidul	5,01	5,16	5,33	-0,68	5,15
Sleman	5,34	6,42	6,49	-3,91	5,90
Yogyakarta	5,24	5,49	5,96	-2,42	6,00
DIY	5,26	6,20	6,60	-2,69	5,53

Keterangan:*) Proyeksi

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021 dan olahan

3) Inflasi

Kota Yogyakarta selama tahun 2021 mengalami inflasi sebesar 2,29% yang didominasi oleh naiknya indeks harga konsumen kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 4,09% yang meningkat dari 107,42 di tahun 2020 menjadi 111,81 di tahun 2021 dengan andil sebesar 0,53%. Kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan adalah Rekreasi, Olah raga dan Budaya sebesar 4,09%. Kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan merupakan pengeluaran yang naik terkecil yaitu sebesar 0,64%. Sementara itu kelompok pakaian dan alas kaki mengalami penurunan indeks harga konsumen sebesar 0,01% yaitu dari indeks sebesar 109,90 di tahun 2020 menjadi 109,89 di tahun 2021.

Tabel 1.27. Nilai Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi Kota Yogyakarta Menurut Pengeluaran Tahun 2020-2021

Kelompok Pengeluaran	IHK Desember 2020	IHK Desember 2021	Inflasi Desember 2021 * %	Inflasi Tahun Kalender 2021 ** %	Inflasi Tahun ke n *** %	Andil Inflasi Desember 2021 %
Umum	106,1	108,53	0,71	2,29	2,29	0,71
1. Makanan, Minuman, dan Tembakau	107,42	111,82	2,38	4,09	4,09	0,53
2. Pakaian dan Alas Kaki	109,9	109,89	-0,02	-0,01	-0,01	0
3. Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	103,84	104,92	0,21	1,04	1,04	0,04
4. Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	106,73	109,15	0,19	2,27	2,27	0,01
5. Kesehatan	109,26	111,4	0,02	1,96	1,96	0
6. Transportasi	101,26	104,7	0,72	3,4	3,4	0,1
7. Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	99,32	99,96	0,05	0,64	0,64	0
8. Rekreasi, Olahraga dan Budaya	104,83	109,12	-0,04	4,09	4,09	0
9. Pendidikan	110,5	112,07	0	1,42	1,42	0
10. Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran	107,29	108,42	0,12	1,05	1,05	0,02
11. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	115,87	120	0,19	3,56	3,56	0,01

* Persentase perubahan IHK Desember 2021 terhadap bulan November 2021

** Persentase perubahan IHK Desember 2021 terhadap bulan Desember 2020

*** Persentase perubahan IHK Desember 2021 terhadap bulan Desember 2020

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

3. Gambaran Umum Penyelenggaraan Pemerintahan

a. Gambaran Umum Birokrasi Pemda DIY

Kelembagaan Pemda DIY diatur berdasarkan Perdas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah. Desain kelembagaan disusun berdasarkan konsep *Performance Based Organization (PBO)* dimana keberadaan suatu perangkat daerah untuk dapat mewujudkan target-target RPJMD sesuai dengan urusannya. Implementasi PBO mengarahkan masing-masing perangkat daerah untuk berorientasi pada pencapaian kinerja. Menjelang akhir tahun 2019 pada saat sidang paripurna MPR RI, Presiden RI menyampaikan perlunya penyederhanaan birokrasi pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Arahan Presiden RI sesuai dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemda DIY.

Berdasarkan Permenpan dan arah kebijakan yang ada, telah dilakukan identifikasi dan pemetaan terdapat 81 jabatan struktural eselon IV yang dapat disederhanakan dan disetarakan ke dalam jabatan fungsional. Hasil pemetaan telah disampaikan kepada Pemerintah Pusat melalui surat Nomor 061/17559 Tanggal 30 Des 2019 perihal Tindak Lanjut Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Surat Nomor 061/3715 Tanggal 28 Februari 2020 perihal Penyampaian Hasil Penyederhanaan Birokrasi Pemda DIY Tahap Pertama. Jumlah struktur yang direncanakan untuk disetarakan adalah sebanyak 246 orang, dengan rincian 13 orang eselon III dan 233 orang eselon IV. Pada akhir Tahun 2021, telah disetarakan sebanyak 99 orang eselon IV. Pemda DIY harus menyiapkan infrastruktur dalam mendukung manajemen ASN paska penyetaraan jabatan. Beberapa tantangan baru paska penyetaraan jabatan yang muncul antara lain kesiapan infrastruktur kepegawaian dalam menghadapi kebijakan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional terkait pola karier, pengembangan kompetensi dan kesejahteraan.

Terkait penguatan kapasitas aparatur birokrasi, Pemda DIY telah menyusun Analisis Kebutuhan Diklat dan *Human Capital Development Program* (HCDP) sebagai dasar dan acuan dalam perencanaan kebutuhan pengembangan kompetensi ASN melalui pelatihan klasikal maupun nonklasikal. Penguatan manajemen kinerja dan manajemen karier juga telah dilakukan, sehingga untuk tahun 2021 Pemerintah Daerah DIY mendapatkan skor Indeks Sistem Merit 313,5 poin dengan indeks 0,78 pada kategori III (Baik).

Transformasi digital yang mengarah pada efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan maupun pelayanan publik telah banyak dilakukan. Kondisi pandemi COVID-19 semakin memicu pergeseran proses bisnis perangkat daerah ke arah serba digital. Aplikasi Jogja Pass, E-Posti, *Jogja Library for All* (Jolifa), Jogja Belajar Class, E-Lapor adalah contoh-contoh digitalisasi pelayanan publik. Berikutnya aplikasi Jogjaplan, satriya.jogjaprovo.go.id, aplikasi *Co-Reform Space*, Si-Informan, e-Prima, SIMPEG2, pengurusan pensiun secara digital, rapat secara daring merupakan contoh digitalisasi tata kelola pemerintahan.

Era 4.0 menjadi tantangan sekaligus memberikan peluang bagi Pemda DIY untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat, yang lebih cepat, lebih mudah, lebih transparan, lebih efisien, didukung dengan kemudahan teknologi informasi yang tersedia. Pelayanan publik menjadi salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Masyarakat dapat langsung menilai kinerja pemerintah berdasarkan kualitas layanan publik yang diterima. Salah satu upaya yang dilakukan Pemda DIY untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik tersebut adalah dengan melakukan evaluasi untuk menilai kinerja pelayanan yang disediakan oleh berbagai unit pelayanan di lingkungan Pemda DIY, salah satunya melalui monitoring dan evaluasi kepatuhan terhadap UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat pada unit penyelenggara pelayanan publik tersebut, nilai Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) tertinggi 93,16 dan nilai terendah 78,59. Sedangkan dari 95 unit penyelenggaraan pelayanan publik ada 17 unit penyelenggara pelayanan publik yang memperoleh nilai IKM dengan kategori mutu pelayanan A (kinerja layanan Sangat Baik), 78 unit penyelenggara pelayanan publik dengan kategori mutu pelayanan B (kinerja layanan Baik). Pada tahun 2021 terdapat 95 unit penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Pemda DIY yang telah memenuhi variabel/indikator kepatuhan terhadap UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sehingga masuk pada zona hijau (kepatuhan tinggi) dengan skor komposit penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik yang tinggi.

Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan oleh 95 unit penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Pemda DIY dengan jumlah responden sebanyak 22.766 (dua puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh enam) responden menghasilkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) rata-rata sebesar 84,73 (mutu pelayanan B atau dikategorikan Baik); meningkat (1,09) poin dari nilai IKM tahun 2020 (83,64), meningkat 2,04 poin dari nilai IKM tahun 2019 (82,69). Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan publik secara konstan mengalami peningkatan kearah yang lebih baik.

Selanjutnya, pembangunan Zona Integritas juga telah menghasilkan capaian yang signifikan. Terdapat 4 unit kerja yang mendapatkan predikat WBK pada tahun 2021, yakni Badan Kepegawaian Daerah DIY, Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Kulon Progo, Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kota Yogyakarta, Balai Layanan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Arsip DIY; sehingga total terdapat 9 unit kerja berpredikat WBK. Hal ini membuktikan bahwa upaya pembangunan integritas menuju birokrasi yang bersih dan melayani telah melembaga.

b. Gambaran Kondisi ASN yang dimiliki

Sumber Daya Aparatur merupakan salah satu unsur penting dalam reformasi birokrasi sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 5 Tahun

2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). UU ini mengamankan perubahan pengelolaan sumber daya aparatur dari perspektif lama yang menekankan hak dan kewajiban individual pegawai, menuju perspektif baru yang menekankan pada manajemen pengembangan sumber daya manusia secara strategis (*strategic human resource management*). Perspektif baru ini bertujuan menciptakan sumber daya ASN yang unggul, dan selaras dengan dinamika perubahan dan misi ASN. Tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan kondisi ASN yang ideal adalah membentuk aparatur negara yang profesional, visioner, mampu bersinergi dengan *stakeholder* lain, berkinerja tinggi, akuntabel, bersih dari praktik KKN, independen dari kepentingan politik, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Langkah DIY dalam menjawab tantangan adalah dengan memperkuat penyelenggaraan bidang kepegawaian untuk meningkatkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan lainnya. Salah satu amanat Pemerintah Pusat yang diselenggarakan adalah dianutnya sistem merit. Penerapan sistem merit bermanfaat bagi Pemda DIY untuk mendapatkan ASN profesional, berintegritas, berkompeten, dan berkinerja secara optimal. Formasi ASN yang berdasarkan pada sistem merit akan menjadi mesin penggerak untuk mencapai visi dan misi Gubernur DIY yang tertuang dalam RPJMD DIY 2017-2022.

Kondisi ASN Pemda DIY sampai dengan akhir tahun 2021, terdiri dari 10.504 orang, terdiri dari 4.990 laki-laki, dan 5.514 perempuan.

Tabel 1.28. Data Pilah Pegawai Pemda DIY Tahun 2017-2021 (Berdasarkan Golongan)

No	Elemen	Tahun										Satuan
		2017		2018		2019		2020		2021		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
	Jumlah PNS Berdasarkan Golongan	12.231		11.387		11.347		10.558		10.504		Orang
1	Golongan I	152	10	125	9	113	8	106	8	86	8	Orang
2	Golongan II	975	243	877	217	782	215	706	193	748	434	Orang
3	Golongan III	3.237	3.526	3.004	3.423	3.114	3.755	2.879	3.601	2809	3661	Orang
4	Golongan IV	2.146	1.942	1.942	1.790	1.715	1.645	1.532	1.533	1347	1411	Orang

Sumber : BKD DIY, 2022

Berdasarkan tabel di atas, dari tahun ke tahun ASN Pemda DIY didominasi oleh Golongan III. Pada Tahun 2021, jumlah PNS Golongan III sebesar 61,59% dari keseluruhan ASN Pemda DIY. Banyaknya Golongan III ini dikarenakan adanya pembatasan tingkat pendidikan bagi CPNS baru, yaitu minimal D3. Sedangkan pegawai dengan Pendidikan SMA atau sederajat jumlahnya semakin menurun setiap tahunnya karena Pemda DIY sudah tidak membuka formasi untuk tingkat Pendidikan SMA atau sederajat, sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.29. Data Pilah Pegawai Pemda DIY Tahun 2017-2021 (Berdasarkan Pendidikan)

No	Elemen	Tahun										Satuan
		2017		2018		2019		2020		2021		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
	Jumlah PNS Berdasarkan Pendidikan	12.231		11.387		11.347		10.558		10.504		Orang
1	SD	146	12	110	12	117	39	62	6	53	6	Orang
2	SMP	247	21	201	14	203	58	138	6	114	4	Orang
3	SMA	1.515	693	1.310	618	1.208	615	1.007	444	867	357	Orang
4	DIPLOMA	434	564	374	498	277	403	224	357	295	592	Orang
5	S1	3.625	4.006	3.368	3.801	3.207	3.871	3.064	3.834	2.919	3.806	Orang
6	S2	538	424	582	494	704	630	723	686	736	745	Orang
7	S3	3	1	3	2	3	3	4	2	6	4	Orang

Sumber : BKD DIY , 2022

c. Ringkasan Realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Dalam APBD P 2020

Ringkasan Realisasi Pendapatan

Pendapatan Daerah pada tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp5.674.896.535.689,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp5.703.059.499.850, 23 atau 100,50% dari target yang ditetapkan. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan daerah sebagai berikut:

Tabel 1.30. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Kurang/ Lebih dari Anggaran	%
PENDAPATAN DAERAH	5.674.896.535.689,00	5.703.059.499.850,23	28.162.964.161,23	100,50
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.861.579.698.446,00	1.900.882.265.389,46	39.302.566.943,46	102,11
Pajak Daerah	1.668.485	1.688.443	19.958	101,2

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Kurang/ Lebih dari Anggaran	%
	.236.037,00	.843.923,00	.607.886,00	
Hasil Pengelolaan	34.367	38.512	4.145	112,06
	.915.101,00	.949.895,00	.034.794,00	
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	93.923	96.338	2.415	102,57
	.341.444,00	.516.913,54	.175.469,54	
Lain-lain PAD yang Sah	64.803	77.586	12.783	119,73
	.205.864,00	.954.657,92	.748.793,92	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	1.861.579	1.900.882	39.302	102,11
	.698.446,00	.265.389,46	.566.943,46	
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.576	7.321	-254	96,64
	.500.000,00	.573.929,77	.926.070,23	
Pendapatan Hibah	7.576	7.141	-434	94,26
	.500.000,00	.630.000,00	.870.000,00	
Dana Darurat	-	-	-	-
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	179	179	-
		.943.929,77	.943.929,77	
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	7.576	7.321	254	96,64
	.500.000,00	.573.929,77	.926.070,23	
JUMLAH PENDAPATAN	5.674.896	5.703.059	28.162	100,5
	.535.689,00	.499.850,23	.964.161,23	

Sumber: BPKA DIY, 2022

Ringkasan Realisasi Belanja

Pada Tahun Anggaran 2021, Pemda DIY menetapkan Belanja sebesar Rp6.046.849.748.828,00 Realisasi belanja sampai dengan akhir tahun 2021 adalah sebesar Rp5.530.710.447.316,34 atau 91,46%. Realisasi Belanja pada tahun 2021 mengalami kenaikan secara nominal dibandingkan tahun 2020. Pada tahun 2020, realisasi belanja sebesar Rp5.433.180.699.355,67. Salah satu penyebab Kenaikan serapan anggaran atau realisasi belanja ini adalah dimulainya aktivitas kegiatan paska pandemi COVID-19, serta meningkatnya Belanja bagi hasil pendapatan dan bantuan keuangan. Belanja tahun 2021 dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah sebagai Pengguna Anggaran, dengan rincian anggaran dan realisasi belanja sebagai berikut:

Tabel 1.31. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Kurang/Lebih dari Anggaran	%
1	2	3	4	5
BELANJA OPERASI	3.968.292.407 .780,00	3.575.466.408 .670,29	(392,825,999 ,109.71)	90,10
Belanja Pegawai	1.678.299.261 .750,00	1.561.559.864 .240,00	(116,739,397 ,510.00)	93,04
Belanja Barang dan Jasa	1.266.990.234 .707,00	1.039.487.445 .730,29	(227,502,788 ,976.71)	82,04
Belanja Bunga	-	-	-	-
Belanja Subsidi	73.414.802 .510,00	73.318.555 .056,00	(96,247 ,454.00)	99,87
Belanja Hibah	920.256.898 .813,00	878.523.383 .831,00	(41,733,514 ,982.00)	95,47
Belanja Bantuan Sosial	29.331.210 .000,00	22.577.159 .813,00	(6,754,050 ,187.00)	76,97
Jumlah Belanja Operasi	3.968.292.407 .780,00	3.575.466.408 .670,29	(392,825,999 ,109.71)	90,10
BELANJA MODAL	723.326.438 .796,00	654.996.019.756, 54	(68,330,419 ,039.46)	90,55
Belanja Modal tanah	195.827.455 .687,00	185.266.900 .550,00	(10,560,555 ,137.00)	94,61
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	186.750.430 .670,00	153.263.972 .565,00	(33,486,458 ,105.00)	82,07
Belanja Modal gedung dan Bangunan	79.353.042 .040,00	66.855.285 .344,54	(12,497,756 ,695.46)	84,25
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	225.341.014 .425,00	214.446.885 .477,00	(10,894,128 ,948.00)	95,17
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	36.054.495 .974,00	35.162.975 .820,00	(891,520 ,154.00)	97,53
Jumlah Belanja Modal	723.326.438 .796,00	654.996.019 .756,54	(68,330,419 ,039.46)	90,55
BELANJA TIDAK TERDUGA	90.726.238 .027,00	53.344.634 .701,00	(37,381,603 ,326.00)	58,80
Belanja Tidak Terduga	90.726.238 .027,00	53.344.634 .701,00	(37,381,603 ,326.00)	58,80
Jumlah Belanja Tidak Terduga	90.726.238 .027,00	53.344.634 .701,00	(37,381,603 ,326.00)	58,80
BELANJA TRANSFER	1.264.504.664 .225,00	1.246.903.384 .188,51	(17,601,280 ,036.49)	98,61
Belanja Bagi Hasil	713.118.316 .167,00	713.118.316 .167,00	-	100,00
Belanja Bantuan Keuangan	551.386.348 .058,00	533.785.068 .021,51	(17,601,280 ,036.49)	96,81
Jumlah Belanja Transfer	1.264.504.664 .225,00	1.246.903.384 .188,51	(17,601,280 ,036.49)	98,61
JUMLAH BELANJA	6.046.849.748 .828,00	5.530.710.447 .316,34	(516,139,301 ,511.66)	91,46

Sumber: BPKA DIY, 2022

Realisasi Pembiayaan

1) Penerimaan Pembiayaan

Pada Tahun Anggaran 2021 penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar Rp489.453.213.139,00 dengan realisasi Rp494.060.546.739,46 atau 100,94%. Realisasi Penerimaan pembiayaan tersebut terdiri dari penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp484.453.213.139,46 dan Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp9.067.333.600,00. Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.32. Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2021

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Kurang/Lebih dari Anggaran	%
1	3	4	5	6
Penerimaan Pembiayaan	489.453.213.139,00	494.060.546.739,46	4.607.333.600,46	100,94
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	484.453.213.139,00	484.453.213.139,46	0,46	100
Penerimaan Pinjaman Daerah	500.000.000.000,00	9.607.333.600,00	4.607.333.600,00	192,15
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah			-	
Jumlah Penerimaan	489.453.213.139,00	494.060.546.739,46	4.607.333.600,46	100,94

Sumber: BPKA DIY, 2022

2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp117.500.000.000,00 dengan realisasi Rp112.500.000.000,00 atau 95,74% dengan peruntukan penambahan Penyertaan Modal kepada PT Bank BPD DIY sebesar Rp112.060.000.000,00 dan kepada PT ASKRIDA sebesar Rp440.000.000,00. Pemberian Pinjaman daerah Tahun Anggaran 2021 tidak direalisasikan. Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.33. Rincian Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2021

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Kurang/Lebih dari Anggaran	%
1	3	4	5	6
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	117.500.000 .000,00	112.500.000 .000,00	5.000.000 .000,00	95,74
Penyertaan Modal Daerah	112.500.000 .000,00	112.500.000 .000,00		100
Pemberian Pinjaman Daerah	5.000.000 .000,00		5.000.000 .000,00	
Jumlah Pengeluaran	117.500.000 .000,00	112.500.000 .000,00	-5.000.000 .000,00	95,74

Sumber: BPKA DIY, 2022

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DALAM PERUBAHAN APBD

A. PERUBAHAN TERHADAP KEGIATAN

Dalam rangka merealisasikan pelaksanaan Visi dan Misi Daerah Istimewa Yogyakarta maka pada tataran operasional pelaksanaan pembangunan, perencanaan ditetapkan untuk memberikan arah terhadap kegiatan pembangunan yang hendak dilaksanakan serta memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran masing-masing misi yang telah ditetapkan. Perencanaan pembangunan Tahun 2021 telah disusun pada Tahun Anggaran 2020 melalui Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 dan telah menjadi pedoman di dalam menyusun dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020.

Seiring dengan dinamika yang terjadi, pada triwulan II Tahun 2021, Pemda DIY memandang perlu melakukan Perubahan RKPD Tahun 2021. Hal tersebut sejalan dengan mandat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada pasal 343 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Lebih lanjut dalam pasal tersebut pada ayat (4) disebutkan bahwa Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

Pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020 telah ditetapkan menjadi Bencana Nasional Non Alam melalui Keppres Nomor 12 Tahun 2020 yang ditindaklanjuti dengan penetapan Tanggap Darurat Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Gubernur DIY melalui Kepgub DIY Nomor 65/KEP/2020 dan telah diperpanjang sesuai dengan perkembangan kondisi daerah. Sebagai upaya penanganan pandemi di tahun 2021, pemerintah pusat telah menggalakkan vaksinasi COVID-19 dan pemenuhan sarana prasana kesehatan serta perlindungan sosial sehingga diperlukan refocusing anggaran tahun 2021.

Perubahan terhadap rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan RKPD Tahun 2021 disusun berdasarkan pada beberapa hal, sebagai berikut:

1. Pergeseran: antar rekening belanja, antar program/kegiatan/subkegiatan, antar subkegiatan dan antar rekening;
2. Penambahan/pengurangan Tolok Ukur Kinerja (berdasarkan realisasi pelaksanaan sub kegiatan);
3. Penambahan sub kegiatan baru (misal: karena ada ketentuan dari pusat);
4. Tambahan karena kebutuhan mendesak berkaitan dengan kerja sama pihak ketiga;
5. Efisiensi karena penyesuaian dengan indikator kinerja dan standar belanja, serta kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, dan lain sebagainya.

Sedangkan khusus untuk kegiatan yang didukung dengan dana keistimewaan, perubahan dilakukan dengan memperhatikan Permenkeu Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Permenkeu Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya, pasal 14A menyebutkan bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan/atau penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), Dana Keistimewaan dapat digunakan untuk mendanai pencegahan dan/atau penanganan pandemi COVID-19. Menindaklanjuti peraturan tersebut dilakukan perubahan rencana penggunaan Dana Keistimewaan tahun 2021 yang kemudian dialokasikan untuk pencegahan dan/atau penanganan pandemi COVID-19.

B. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

1. Upaya Peningkatan Sumber dan Nilai Pendapatan Daerah

Capaian pendapatan asli daerah yang optimal dan akuntabel merupakan tujuan utama dalam pengelolaan pendapatan daerah. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah. Citra keuangan pemerintah daerah akan tercermin dari pendapatan asli daerah yang diperoleh, semakin besar persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah maka tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat akan semakin kecil. Sebagai aspek penting dalam pembiayaan pembangunan daerah maka upaya optimalisasi pendapatan asli daerah selalu dilaksanakan. Terdapat dua cara yang dapat dilakukan dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi pendapatan dilakukan dengan cara validasi data dan pemuthakiran data untuk dapat menghitung potensi seakurat mungkin, sehingga target penerimaan bisa mendekati potensinya, sedangkan ekstensifikasi pendapatan asli daerah dilakukan dengan cara menggali berbagai potensi pendapatan baru yang mungkin muncul dan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Selain itu penguatan kelembagaan

juga menjadi faktor penting yang berpengaruh terhadap kesuksesan optimalisasi pendapatan asli daerah yang dilaksanakan, penguatan kelembagaan dilakukan dengan cara peningkatan kualitas SDM sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan dan juga adanya modernisasi administrasi dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah serta penyederhanaan dalam proses bisnis.

Selama pandemi aktivitas masyarakat menjadi terbatas. Hal ini disikapi dengan adanya perbaikan layanan yang dilakukan termasuk melakukan inovasi dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah, modernisasi administrasi juga dilakukan sebagai upaya memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang mudah dan tidak berbelit-belit. Salah satu hal yang dilakukan adalah dengan menambah metode dan kanal-kanal pembayaran pajak serta retribusi daerah, penambahan kanal pembayaran digital dirasa mampu memberikan kemudahan bagi wajib pajak dan retribusi daerah dalam melaksanakan kewajibannya di masa pandemi yang mengakibatkan aktivitas serba dibatasi. Penyediaan kanal-kanal pembayaran digital baru juga sejalan dengan semangat pemerintah pusat untuk mendorong adanya elektronifikasi transaksi keuangan pemerintah daerah. Dari sisi pengelolaan pajak dan retribusi, Pemda DIY bekerjasama dengan PT Bank BPD DIY untuk menyediakan layanan pembayaran pajak melalui *e-commerce* gojek, serta menyediakan kanal pembayaran QRIS BPD DIY yang tersedia di hampir seluruh layanan pemungutan pajak dan sebagian besar layanan retribusi daerah. Selain itu dalam rangka mencapai target kinerja sasaran tahun 2021, intensifikasi pajak daerah dilakukan dengan cara pendataan dan penagihan wajib pajak secara *door to door*, mengirimkan surat kepada wajib pajak melalui kegiatan Super Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), melakukan sosialisasi kepada kelurahan di wilayah Samsat untuk melakukan pendataan kepemilikan kendaraan di wilayah Samsat. Selain itu terdapat layanan *Drive Thru* untuk memudahkan Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak tanpa turun dari kendaraan, adanya fasilitas E-Posti dimana wajib pajak melakukan pembayaran pajak cukup melalui mesin ATM. Perluasan jangkauan layanan dengan mendirikan SAMSAT Desa dirasakan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di sekitar SAMSAT Desa.

Peningkatan pendapatan retribusi melalui Intensifikasi dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki pendapatan potensi, untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap Wajib Retribusi. Ekstensifikasi dilakukan menggali potensi dari aset yang dimiliki Organisasi Perangkat Daerah untuk menggali potensi pendapatan yang menjadi wewenangnya. Realisasi PAD Tahun 2021 berhasil melampaui target yang dianggarkan, yaitu sebesar Rp39.335.065.525,23 atau 2,11% dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan keberhasilan Pemda DIY dalam memungut sumber-sumber PAD. Penyumbang terbesar PAD sampai saat ini masih berasal dari penerimaan pajak daerah yaitu sebesar 88,82% dari total penerimaan PAD Tahun 2021.

Selain hal tersebut diatas, dalam rangka pemulihan ekonomi paska pandemi dan juga dalam rangka mengurangi beban masyarakat, di tahun 2021 Pemda DIY membuat kebijakan penghapusan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Respon positif dari masyarakat luas yang memanfaatkan adanya kebijakan tersebut dapat terlihat dari animo masyarakat yang melakukan pembayaran pajak sebelum berakhirnya kebijakan, oleh karena itu kebijakan bebas denda ini juga dapat dinilai berhasil dan menjadi salah satu faktor tercapainya target penerimaan pajak daerah di tahun 2021.

2. Target dan Realisasi Pendapatan

Pada APBD 2021, target pendapatan Pemda DIY ditetapkan sebesar Rp5.674.896.535.689,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp5.703.059.499.850,23 atau 100,50% dari target yang ditetapkan. Realisasi pendapatan Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp91.548.875.550,52 atau 1,63% dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun 2020 yaitu sebesar Rp5.611.510.924.299,71. Secara rinci anggaran dan realisasi per kelompok pendapatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Komposisi Pendapatan Pemda DIY Tahun 2021 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	PAD	1.861.579.698.446,00	1.900.914.763.971,23	102,11
2	Pendapatan Transfer	3.805.740.337.243,00	3.794.855.660.531,00	99,71
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	7.576.500.000,00	7.289.075.348,00	96,21
Jumlah		5.674.896.535.689,00	5.703.059.499.850,23	100,50

Sumber: BPKA DIY, 2022

Pendapatan transfer menjadi komponen pendapatan tertinggi dari total pendapatan daerah yaitu sebesar 66,54%, Pendapatan Asli Daerah sebesar 33,33% dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 0,13%. Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa target Pendapatan yang berasal dari Pendapatan Transfer yang hanya mencapai 99,71%.

Tabel 2.2. Capaian Realisasi Pendapatan Pemda DIY Tahun 2021 terhadap Rencana Pendapatan RPJMD (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana RPJMD (Rp)	Realisasi APBD (Rp)	%
1	PAD	2.323.388.008.177,02	1.900.914.763.971,23	81,82
2	Pendapatan Transfer	4.391.750.542.665,61	3.794.855.660.531,00	86,41
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	9.046.233.200,00	7.289.075.348,00	80,58
Jumlah		6.724.184.784.042,63	5.703.059.499.850,23	84,81

Sumber: BPKA DIY, 2022

Capaian Realisasi Pendapatan Pemda DIY Tahun 2021 terhadap Rencana Pendapatan RPJMD Tahun 2022 tidak tercapai, hal ini dikarenakan adanya Pandemi COVID-19 yang memberikan dampak yang sangat besar terhadap sisi sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya daya beli masyarakat yang menurun.

Penjelasan dari anggaran dan realisasi masing-masing kelompok pendapatan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD adalah pendapatan yang berasal dari: (i) Pajak daerah; (ii) Retribusi Daerah; (iii) Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan; serta (iv) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. PAD merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur tingkat kemandirian

daerah, kemampuan keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan. Semakin tinggi pendapatan asli daerah maka semakin kecil tingkat ketergantungan daerah terhadap Pendapatan Transfer dan Transfer Pusat ke Daerah.

Pendapatan Asli Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp1.861.579.698.446,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp1.900.914.763.971,23 atau 102,11%. Realisasi PAD Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp24.208.234.616,52 atau 1,29% dibandingkan dengan realisasi penerimaan PAD Tahun 2020 yaitu sebesar Rp1.876.706.829.354,71. Realisasi PAD Tahun 2021 masih didominasi penerimaan Pajak Daerah (88,82%), Retribusi Daerah (2,03%), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah (5,07%), dan Lain-Lain PAD yang Sah (4,08%).

Tabel 2.3. Realisasi Pendapatan Asli Daerah DIY Tahun 2021 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pajak Daerah	1.668.485.236.037,00	1.688.443.843.923,00	101,20
2	Hasil Retribusi Daerah	34.367.915.101,00	38.512.949.895,00	112,06
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	93.923.341.444,00	96.338.516.913,54	102,57
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	64.803.205.864,00	77.619.453.239,69	119,78
Jumlah		1.861.579.698.446,00	1.900.914.763.971,23	102,11

Sumber: BPKA DIY, 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan target PAD tercapai, bahkan lebih dari target yang ditetapkan sebesar 2,11%. Adapun rincian anggaran dan realisasi per jenis pendapatan adalah sebagai berikut.

1) Pajak Daerah

Sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, pajak daerah yang pemungutannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan Pajak Rokok.

Target Pajak Daerah Tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp1.668.485.236.037,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp1.688.443.843.923,00 atau mencapai 101,20%. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp41.884.645.060,00 atau 2,54% dibandingkan dengan Tahun 2020 yaitu sebesar Rp1.646.559.198.863,00. Hal ini dikarenakan kondisi perekonomian masyarakat yang sudah mulai pulih paska pandemi. Rincian anggaran dan realisasi per obyek Pajak Daerah Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4. Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah DIY Tahun 2021 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pajak Kendaraan Bermotor	845.334.000.000,00	874.731.430.750,00	103,48
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	345.420.000.000,00	362.977.665.400,00	105,08
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	223.000.000.000,00	232.244.843.244,00	104,15
4	Pajak Air Permukaan	1.204.000.000,00	1.301.742.775,00	108,12
5	Pajak Rokok	253.527.236.037,00	217.188.161.754,00	85,67
	Jumlah	1.668.485.236.037,00	1.688.443.843.923,00	101,20

Sumber: BPKA DIY, 2022

Data tersebut menunjukkan bahwa dari total realisasi Pendapatan Pajak Daerah telah mencapai target yaitu 101,20%, namun Pendapatan Pajak Rokok hanya terealisasi sebesar Rp217.188.161.754,00 atau 85,67%. Hal ini karena integrasi antara Pemda DIY dengan BPJS kesehatan belum dilaksanakan maka berpengaruh terhadap capaian realisasi Pajak Rokok yang disebabkan adanya pemotongan dari pemerintah pusat sebesar 37,5% dari penerimaan yang seharusnya diterima.

2) Hasil Retribusi Daerah

Berdasarkan UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah didefinisikan sebagai pungutan yang dilakukan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Jenis Retribusi Daerah yang dikelola oleh Pemda DIY dikelompokkan menjadi: (i)

Retribusi Jasa Umum; (ii) Retribusi Jasa Usaha; dan (iii) Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi Jasa Umum terdiri dari Retribusi Pelayanan Pendidikan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Retribusi Jasa Usaha terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dan Retribusi Tempat Khusus Parkir. Retribusi Perizinan Tertentu meliputi Retribusi Izin Trayek, Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Retribusi Perpanjangan IMTA (Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing).

Target Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp34.367.915.101,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp38.512.949.895,00 atau 112,06% dari target anggaran yang ditetapkan. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp1.966.872.752,29 atau 5,38% dibandingkan dengan realisasi Retribusi Daerah Tahun 2020 yaitu sebesar Rp36.546.077.142,71,71. Hal ini karena kondisi perekonomian dan daya beli masyarakat yang mulai membaik paska pandemi COVID-19 sehingga banyak masyarakat yang memanfaatkan layanan retribusi yang disediakan oleh Pemda DIY. Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Daerah DIY Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah DIY Tahun 2021 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Retribusi Jasa Umum	11.875.692.550,00	13.410.600.459,00	112,92
	Pelayanan Kesehatan	31.141.000,00	25.713.000,00	82,57
	Pelayanan Pendidikan	6.209.558.000,00	6.258.488.000,00	100,79
	Pelayanan Persampahan/Kebersihan	4.799.793.550,00	6.259.415.459,00	130,41
	Pengolahan Limbah Cair	835.200.000,00	866.984.000,00	103,81
2	Retribusi Jasa Usaha	22.104.552.551,00	24.887.724.436,00	112,59
	Pemakaian Kekayaan Daerah	4.406.119.001,00	5.746.160.687,00	130,41
	Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	227.210.000,00	340.880.000,00	150,03
	Pelayanan Kepelabuhan	93.290.000,00	98.709.200,00	105,81
	Tempat Rekreasi dan Olah Raga	34.340.500,00	74.130.500,00	215,87

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Penjualan Produk Usaha Daerah	16.539.203.050,00	17.276.546.049,00	104,46
	Tempat Khusus Parkir	437.876.000,00	681.189.000,00	155,57
	Retribusi Terminal	366.514.000,00	670.109.000,00	182,83
3	Retribusi Perizinan Tertentu	387.670.000,00	214.625.000,00	55,36
	Retribusi Izin Trayek	49.920.000,00	27.260.000,00	54,61
	Retribusi Izin Usaha Perikanan	1.750.000,00	525.000,00	30,00
	Retribusi Perpanjangan IMTA	336.000.000,00	186.840.000,00	55,61
	Jumlah	34.367.915.101,00	38.512.949.895,00	112,06

Sumber: BPKA DIY, 2022

Secara umum realisasi penerimaan Retribusi Daerah telah melampaui target anggaran yang ditetapkan, namun terdapat beberapa retribusi yang tidak mencapai target yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan dari anggaran Rp31.141.000,00 hanya terealisasi Rp25.713.000,00 atau 82,57%, Retribusi Izin Trayek dari anggaran Rp49.920.000,00 hanya terealisasi Rp27.260.000,00 atau 54,61%, Retribusi Izin Usaha Perikanan dari anggaran sebesar Rp1.750.000,00 hanya terealisasi Rp525.000,00 atau 30,00%, serta Retribusi Perpanjangan IMTA dari anggaran sebesar Rp336.000.000,00 hanya terealisasi Rp186.840.000,00 atau 55,61%. Tidak tercapainya retribusi ini disebabkan:

- Retribusi Pelayanan Kesehatan dari anggaran Rp31.141.000,00 hanya terealisasi Rp25.713.000,00 atau 82,57%. Hal ini disebabkan adanya Pandemi COVID-19 sehingga perusahaan tidak begitu fokus untuk memeriksakan kesehatan kerja para karyawannya karena secara kemampuan keuangan perusahaan mengalami penurunan diakibatkan adanya pandemi COVID-19, hal ini menyebabkan retribusi pelayanan kesehatan tidak tercapai karena pengguna layanan retribusi ini adalah perusahaan-perusahaan yang ada di DIY.
- Retribusi Izin Trayek dari anggaran Rp49.920.000,00 hanya terealisasi Rp27.260.000,00 atau 54,61%. Hal ini disebabkan Pandemi COVID-19 sehingga tidak banyak yang mengajukan izin trayek baru maupun perpanjangan termasuk angkutan sewa khusus.

- c. Retribusi Izin Usaha Perikanan dari anggaran sebesar Rp1.750.000,00 hanya terealisasi Rp525.000,00 atau 30%. Hal ini disebabkan adanya kebijakan PPKM selama pandemi yang membuat mobilitas masyarakat menjadi terbatas akibatnya penggunaan izin di bidang/kegiatan usaha penangkapan ikan masih rendah (pengadaan kapal baru maupun perpanjangannya).
- d. Retribusi Perpanjangan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dari anggaran sebesar Rp336.000.000,00 hanya terealisasi Rp186.840.000,00 atau 55,61%. Hal ini disebabkan terbitnya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2021 maka Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia tidak berlaku. Sebagai tindak lanjutnya terbit SE Menteri Ketenagakerjaan No. M/8/HK.04/VI/2021 tentang Penyesuaian Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah Mengenai Retribusi Daerah yang Berasal Dari Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing atas Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan, sehingga harus segera dilakukan perubahan/peninjauan terhadap materi, muatan dan ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah DIY No. 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Dikarenakan Perda tersebut masih dalam proses perubahan maka untuk sementara Pemda DIY tidak dapat memungut retribusi IMTA dan dimulai tanggal 27 Oktober 2021 rekening pembayaran di aplikasi Tenaga Kerja Asing (TKA) sudah dialihkan ke rekening pusat.

Pada tahun anggaran 2021 juga terdapat beberapa penerimaan yang melampaui target hingga lebih dari 50% dari target yang ditetapkan. Penerimaan tersebut antara lain:

- a. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa ditargetkan sebesar Rp227.210.000,00 dan terealisasi sebesar Rp340.880.000,00 atau sebesar 150,03% dari target. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa berasal dari pengelolaan Wisma Erlangga pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Wisma Kaliurang Dinas PU ESDM dan juga Wisma BIK dan BIP Kaliurang Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi. Pelampauan target ini disebabkan karena adanya penurunan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di DIY mulai kuartal empat 2021 menjadikan aktivitas dan mobilitas masyarakat meningkat, sehingga layanan penginapan di Badan Penghubung Daerah menjadi satu pilihan yang diminati masyarakat.
- b. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang ditargetkan sebesar Rp34.340.500,00 dan terealisasi sebesar Rp74.130.500,00 atau sebesar 215,87% dari target. Retribusi rekreasi dan olahraga bersal dari pengelolaan Taman Hutan Raya Bunder DLHK dan Pengelolaan Museum Sonobudoyo pada Dinas Kebudayaan DIY. Pencapaian yang lebih dari target ini disebabkan karena penurunan level PPKM dan ada kelonggaran dari Pemda melalui Instruksi Gubernur DIY, sehingga masyarakat banyak yang berkunjung dan pengunjung dari luar DIY semakin bertambah jumlahnya.
- c. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang ditargetkan sebesar Rp437.876.000,00 dan terealisasi sebesar Rp681.189.000,00 atau 155,57% dari target. Hal ini disebabkan adanya pemberlakuan semi pedestrian dan penurunan level PPKM, sehingga terjadi lonjakan wisatawan domestik dan pengunjung di kawasan Malioboro, perjalanan orang dengan menggunakan Kereta Api di Stasiun Maguwo, penambahan Jam Operasional Layanan Perparkiran, retribusi parkir Trans Jogja *Buy The Service* (BTS) Koridor Ngemplak, Bus pengantar dan penjemput Rombongan penumpang KA dan Pesawat, sehingga mengakibatkan adanya lonjakan pengguna parkir di tempat

husus parkir beskalan dan tempat khusus parkir di Bandara Adi Sutjipto.

- d. Retribusi Terminal yang ditargetkan sebesar Rp366.514.000,00 dan terealisasi sebesar Rp670.109.000,00 atau 182,83% dari target. Realisasi retribusi terminal jauh melampaui target yang ditetapkan karena adanya penurunan Level PPKM di Provinsi DIY. Penurunan level PPKM ini mengakibatkan adanya Pelonggaran aturan tentang syarat perjalanan menggunakan moda transportasi darat terhadap kapasitas penumpang bus dari 50 % menjadi 75 % sehingga jumlah bus yang beroperasi dan menggunakan layanan pada Terminal Jombor dan Terminal Wates juga meningkat. serta kemudahan Protokol kesehatan yang makin dapat dipahami dan diterapkan masyarakat membuat masyarakat menjadi lebih berani untuk menggunakan kendaraan umum sebagai pilihan mode transportasi selama pandemi.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Klasifikasi jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat (UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan). Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dilakukan oleh Pemda DIY dilakukan dalam bentuk Penyertaan Modal. Sampai dengan Tahun 2021, Pemda DIY telah melakukan penyertaan modal pada beberapa badan usaha yaitu pada PT Taru Martani, PT Anindya Mitra Internasional (AMI), PT Bank BPD DIY, PT Asuransi Bangun Askrida, dan Badan Usaha Kredit Perdesaan (BUKP). Atas penyertaan modal tersebut, Pemda DIY memperoleh

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dengan target sebesar Rp93.923.341.444,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp96.338.516.913,54 atau 102,57 dari target anggaran yang ditetapkan.

Realisasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp5.121.865.237,92 atau 5,05% dari penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2020 yaitu sebesar Rp101.460.382.151,46. Penurunan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2021 dikarenakan deviden yang diperoleh di tahun 2021 merupakan deviden atas kegiatan usaha yang dilakukan oleh badan usaha pada tahun 2020, dimana tahun 2020 merupakan tahun pertama terjadinya pandemi COVID-19 sehingga berakibat pada kondisi perekonomian dan juga iklim usaha, sehingga perolehan laba perusahaan tahun 2020 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan perolehan laba tahun 2019. Penurunan terbesar berasal dari bagian laba yang dibagikan atas penyetaraan modal pada lembaga keuangan (PT BPD DIY) yang disebabkan adanya : 1) Permintaan kredit/pembiayaan akibat perlambatan ekonomi; 2) adanya kebijakan OJK terkait relaksasi kredit bagi debitur terdampak COVID-19 (penundaan pembayaran angsuran), serta adanya kebijakan terkait penurunan suku bunga kredit; dan 3) Adanya tambahan biaya bunga yang terkait kebijakan penyaluran dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan DIY Tahun 2021 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
A	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	95.336.062.563,26	95.336.062.572,26	100,00
	PT Asuransi Bangun Askrida (PT. ABA)	110.733.653,00	110.733.653,00	100,00
B	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	89.837.573.863,00	89.837.573.863,22	100,00
	PT. Bank BPD DIY	84.955.839.874,00	84.955.839.874,00	100,00

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	PT. Tarumartani	3.837.562.289,00	3.837.562.289,00	100,00
	PT. Anindya Mitra Internasional (PT. AMI)	1.044.171.700,00	1.044.171.700,00	100,00
C	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	3.975.033.928,00	6.390.209.397,32	160,76
	Badan Usaha Kredit Perdesaan (BUKP)	3.975.033.928,00	6.390.209.397,32	160,76
	Jumlah	93.923.341.444,00	96.338.516.913,54	102,57

Sumber: BPKA DIY, 2022

4) *Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah*

Pemungutan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berdasarkan pada Peraturan Daerah DIY No. 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagai mandat Pasal 286 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan penerimaan Pendapatan Asli Daerah di luar Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp64.803.205.864,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp77.619.453.239,69 atau 119,78% dari target yang ditetapkan.

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp14.521.717.957,85 atau 15,76% dibandingkan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2020 sebesar Rp92.141.171.197,54 dikarenakan pada Tahun 2021 ada kebijakan penghapusan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Rincian anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah di Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.7. Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah DIY Tahun 2021 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	575.959.999,00	1.399.579.436,00	243,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	5.588.814.600,00	6.550.610.680,00	117,21
Jasa Giro	18.000.000.000,00	20.120.993.703,96	111,78
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	334.168.183,00	590.688.235,01	176,76
Pendapatan Bunga	2.500.000.000,00	3.214.611.877,48	128,58
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	3.500.000,00	100,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	760.577.134,00	100,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	86.674.000,00	86.793.688,00	100,14
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	103.297.987,00	100,00
Pendapatan dari Pengembalian	2.373.895.882,00	3.354.252.525,02	141,30
Pendapatan BLUD	35.299.949.200,00	41.384.343.973,22	117,24
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	43.744.000,00	50.204.000,00	114,77
Jumlah	64.803.205.864,00	77.619.453.239,69	119,78

Sumber: BPKA DIY, 2022

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah pendapatan yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Transfer terdiri atas: (i) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan (ii) Pendapatan Transfer Antar Daerah. Transfer pemerintah pusat ke Daerah adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian. Dana Transfer ke Daerah dialokasikan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah, mengurangi kesenjangan pendanaan urusan pemerintahan antardaerah, mengurangi kesenjangan layanan publik antardaerah, mendanai pelaksanaan otonomi khusus dan keistimewaan daerah. Target Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2021 sebesar

Rp3.805.740.337.243,00 dan realisasi sebesar Rp3.794.855.660.531,00 atau 99,71% dari target yang ditetapkan.

Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer sebagai berikut.

Tabel 2.8. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer DIY Tahun Anggaran 2021 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PENDAPATAN TRANSFER	3.805.740.337.243,00	3.794.855.660.531,00	99,71
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.804.935.291.933,00	3.794.050.615.221,00	99,71
Pendapatan Transfer Antar Daerah	805.045.310,00	805.045.310,00	100,00
Jumlah	3.805.740.337.243,00	3.794.855.660.531,00	99,71

Sumber: BPKA DIY, 2022

Penerimaan negara dari sektor pajak tidak tercapai sehingga berpengaruh pada penyaluran dana transfer ke daerah. Hal ini dikarenakan kondisi perekonomian negara yang tidak stabil karena dampak pandemi COVID-19, sehingga mempengaruhi pemasukan negara. Realisasi penerimaan Pendapatan Transfer Tahun 2021 sebesar Rp3.794.855.660.531,00 atau 99,71% dari target yang ditetapkan sebesar Rp3.805.740.337.243,00.

c. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pos penerimaan dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang diterima oleh Pemerintah Daerah DIY terdiri dari: (i) Dana Perimbangan; (ii) Dana Insentif Daerah (DID); dan (iii) Dana Keistimewaan. Target Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2021 ditetapkan sebesar Rp3.804.935.291.933,00 dengan realisasi Rp3.794.050.615.221,00 atau sebesar 99,71%.

Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat DIY Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.9. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat DIY Tahun 2021 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.804.935.291.933,00	3.794.050.615.221,00	99,71
Dana Perimbangan	2.447.769.129.853,00	2.436.884.453.142,00	99,56
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	107.591.375.932,00	132.615.520.738,00	123,26
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.224.852.487.000,00	1.224.852.487.000,00	100,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	161.117.379.000,00	135.901.240.001,00	84,35
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	954.207.887.921,00	943.515.205.403,00	98,88
Dana Insentif Daerah (DID)	77.593.507.000,00	77.593.507.000,00	100,00
Dana Keistimewaan	1.279.572.655.080,00	1.279.572.655.079,00	100,00
Jumlah	3.804.935.291.933,00	3.794.050.615.221,00	99,71

Sumber: BPKA DIY, 2022

d. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

Merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dengan tujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Alokasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun Anggaran 2021 ditetapkan sebesar 107.591.375.932,00 dengan realisasi 132.615.520.738,00 atau 123,26%.

e. Dana Alokasi Umum (DAU)

Penerimaan Dana Perimbangan terbesar pada Pemda DIY berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU). DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Alokasi DAU Tahun Anggaran 2021 ditetapkan sebesar Rp1.224.852.487.000,00 dengan realisasi 1.224.852.487.000,00 atau 100,00%.

f. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK meliputi DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Alokasi DAK pada Pemda DIY Tahun Anggaran 2021 ditetapkan sebesar Rp1.115.325.266.921,00 terdiri dari DAK Fisik Rp161.117.379.000,00 dan DAK Non Fisik 954.207.887.921,00. Sedangkan realisasi DAK sebesar Rp1.079.416.445.404,00 atau 96,78% terdiri DAK Fisik Rp135.901.240.001,00 dan DAK Non Fisik Rp943.515.205.403,00. Realisasi penerimaan DAK Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp50.827.597.693,00 atau 5,19% dibandingkan dengan Tahun 2020 yaitu Rp1.029.119.335.346,00.

DAK Fisik meliputi DAK Fisik reguler dan penugasan, diperuntukkan bagi: (i) Pendidikan; (ii) Kesehatan; (iii) Kelautan dan Perikanan; (iv) Infrastruktur Jalan; (v) Infrastruktur Irigasi; dan (vi) Lingkungan Hidup. Peruntukan DAK Non Fisik meliputi (i) Bantuan Operasional Sekolah (BOS); (ii) Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM; (iii) Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan; (iv) Dana Tunjangan Profesi Guru; dan (vi) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

Perincian DAK Fisik pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut

Tabel 2.10. Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik DIY Tahun 2021 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendidikan	85.760.626.000,00	71.026.649.100,00	82,82
2	Kesehatan	13.675.139.000,00	10.782.742.338,00	78,85
3	Kelautan dan Perikanan	2.472.332.000,00	1.988.950.000,00	80,45
4	Infrastruktur Jalan	35.456.552.000,00	33.793.737.400,00	95,31
5	Infrastruktur Irigasi	18.163.988.000,00	13.483.387.000,00	74,23
6	Lingkungan Hidup	5.588.742.000,00	4.825.774.163,00	86,35
Jumlah		161.117.379.000,00	135.901.240.001,00	84,35

Sumber: BPKA DIY, 2022

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tidak terelaisasi sesuai target yang direncanakan dikarenakan dana yang disalurkan oleh pemerintah pusat adalah dana yang sesuai dengan nilai kontrak hasil pengadaan barang dan jasa.

Perincian DAK Non Fisik pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut

Tabel 2.11. Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik DIY Tahun 2021 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Bantuan Operasional Sekolah	683.235.400.000,00	672.553.167.000,00	98,44
2	Dana Tunjangan Profesi Guru	262.327.807.000,00	262.327.807.000,00	100,00
3	Dana Tamsil Guru PNSD	609.000.000,00	609.000.000,00	100,00
4	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	1.820.863.043,00	1.820.863.043,00	100,00
5	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	3.556.274.059,00	3.556.274.059,00	100,00
6	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	920.492.819,00	910.043.301,00	98,86
7	Dana Pelayanan Kepariwisata	962.578.000,00	962.578.000,00	100,00
8	Dana Fasilitas Penanaman Modal	500.021.000,00	500.021.000,00	100,00
9	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	275.452.000,00	275.452.000,00	100,00
Jumlah		954.207.887.921,00	943.515.205.403,00	98,88

Sumber: BPKA DIY, 2022

Tidak tercapainya realisasi DAK Non Fisik untuk Bantuan Operasional Sekolah dikarenakan realisasi Penyaluran dana transfer dari pusat disesuaikan dengan data real yang dibuat oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan pada tahun berkenaan sedangkan untuk dana pelayanan administrasi kependudukan tidak terealisasi dikarenakan ada silpa tahun sebelumnya sehingga mengurangi jumlah salur tahun 2021

g. Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Insentif Daerah (DID) bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian Kinerja tertentu. Alokasi DID Tahun Anggaran 2021 ditetapkan sebesar Rp77.593.507.000,00 dengan realisasi Rp77.593.507.000,00 atau 100,00%. Realisasi penerimaan DID Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp9.539.513.000,00 atau 14,02% dibandingkan realisasi

penerimaan Dana Alokasi Umum Tahun 2020 yaitu sebesar Rp68.053.994.000,00

h. Dana Keistimewaan (DAIS)

Dana Kesitimewaan (DAIS) adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa dan merupakan bagian dari dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa. Alokasi DAIS Tahun Anggaran 2021 ditetapkan sebesar Rp1.279.572.655.080,00 dengan realisasi Rp1.279.572.655.079,00 atau 100,00%. Realisasi penerimaan DAIS Tahun 2021 mengalami sedikit penurunan sebesar Rp7.003.573.142,00 atau 0,54% dibandingkan realisasi penerimaan DAIS Tahun 2020 yaitu sebesar Rp1.286.576.228.221,00

i. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pos penerimaan dari Pendapatan Transfer Antar Daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah berasal dari Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota. Bantuan keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota ini merupakan sharing pembiayaan atas instalasi pengelolaan air limbah terpusat dimana pendapatan yang kita peroleh diperuntukan sepenuhnya untuk pengelolaan instalasi air limbah terpusat pada Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. Target Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2021 ditetapkan sebesar Rp805.045.310,00 dengan realisasi Rp805.045.310,00 atau sebesar 100,00%

Tabel 2.12. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2021 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan Transfer Antar Daerah	805.045.310,00	805.045.310,00	100,00
Bantuan Keuangan	805.045.310,00	805.045.310,00	100,00
Jumlah	805.045.310,00	805.045.310,00	100,00

Sumber: BPKA DIY, 2022

j. **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berasal dari (i) Pendapatan Hibah; dan (ii) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2021 ditetapkan sebesar Rp7.576.500.000,00 dengan realisasi Rp7.289.075.348,00 atau 96,21% dari target yang ditetapkan.

Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp1.060.424.165,00 atau 12,70% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 yaitu Rp8.349.499.513,00.

Tabel 2.13. Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah DIY Tahun 2021 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	7.576.500.000,00	7.289.075.348,00	96,21
Pendapatan Hibah	7.576.500.000,00	7.141.630.000,00	94,26
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	147.445.348,00	100,00
Jumlah	7.576.500.000,00	7.289.075.348,00	96,21

Sumber: BPKA DIY, 2022

Rincian realisasi penerimaan dari komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut.

1) Pendapatan Hibah

Target Pendapatan Hibah Tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp7.576.500.000,00 dengan realisasi Rp7.141.630.000,00 atau 94,26%. Realisasi Pendapatan Hibah Tahun 2021 mengalami penurunan yaitu sebesar Rp1.207.869.513,00 atau 14,47% dibandingkan realisasi 2020 yaitu Rp8.349.499.513,00. Penerimaan Hibah tersebut berasal dari Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri dengan rincian: Dealer Otomotif Rp3.189.730.000,00, Main Dealer Rp27.900.000,00 dan PT. Jasa Raharja Rp3.924.000.000,00.

Capaian realisasi pendapatan paling berpengaruh terhadap Pendapatan Hibah adalah penerimaan dari Hibah Dealer Otomotif, hal ini disebabkan karena menurunnya daya beli masyarakat sehingga berdampak pada penjualan kendaraan bermotor baru dan hal itu menyebabkan kontribusi dari Dealer Otomotif ke Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta juga mengalami penurunan.

2) *Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan*

Target Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp0,00 dengan realisasi Rp147.445.348,00 atau 100,00%. Penerimaan tersebut berasal dari Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah Rp115.604.550,00 dan Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia Rp31.840.798,00.

3. Permasalahan dan Solusi Terkait Pengelolaan Pendapatan

a. Permasalahan

Secara umum, target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD telah mampu mencapai target yang ditetapkan. Dalam rangka memacu peningkatan pendapatan, perlu diidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Perangkat Daerah berpendapatan. Kendala tersebut antara lain:

- 1) Kurangnya *chanel* pembayaran pajak online dalam pembayaran pajak Kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- 2) Pandemi COVID-19 menghancurkan semua sektor baik itu di bidang Ekonomi, Pariwisata dan Transportasi sehingga menyebabkan penurunan kemampuan masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaran Bermotor serta menurunnya penerimaan dari pendapatan Retribusi.

- 3) Penerimaan Bagi Hasil dan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat berkurang karena *refocusing* Anggaran akibat dari adanya Pandemi COVID-19.

b. Solusi

Berdasarkan kendala tersebut di atas, secara bertahap telah dilakukan upaya perbaikan antara lain:

- 1) Menambahkan kanal pembayaran pajak *online* dengan cara bekerjasama dengan beberapa bank dan layanan pembayaran *online*.
- 2) Membebaskan denda pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, untuk meringankan beban masyarakat.
- 3) Memberikan keringanan dan pembebasan pembayaran retribusi dalam periode tertentu.
- 4) Melakukan penataan Anggaran terkait pengeluaran Belanja yang bersumber dari dana Bagi Hasil dan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat.
- 5) Memberikan keringanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan cara diangsur bagi perusahaan-perusahaan persewaan kendaraan ataupun perusahaan pariwisata.
- 6) Melakukan kegiatan sosialisasi melalui media sosial, radio serta iklan tentang pembayaran pajak kendaraan bermotor.
- 7) Melakukan pemberitahuan jatuh tempo pajak melalui WA ataupun SMS reminder untuk mengingatkan wajib pajak agar segera membayar pajak Kendaraan Bermotor.

C. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

1. Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah

Dalam rangka merealisasikan pelaksanaan Visi dan Misi Daerah Istimewa Yogyakarta maka pada tataran operasional pelaksanaan pembangunan, perencanaan ditetapkan untuk memberikan arah terhadap kegiatan

pembangunan yang hendak dilaksanakan serta memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran masing-masing misi yang telah ditetapkan. Perencanaan pembangunan Tahun 2021 telah disusun pada Tahun Anggaran 2020 melalui Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 dan telah menjadi pedoman di dalam menyusun dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020.

Seiring dengan dinamika yang terjadi, pada triwulan II Tahun 2021, Pemda DIY memandang perlu melakukan Perubahan RKPD Tahun 2021. Hal tersebut sejalan dengan mandat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada pasal 343 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Lebih lanjut dalam pasal tersebut pada ayat (4) disebutkan bahwa Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

Pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020 telah ditetapkan menjadi Bencana Nasional Non Alam melalui Keppres Nomor 12 Tahun 2020 yang ditindaklanjuti dengan penetapan Tanggap Darurat Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Gubernur DIY melalui Kepgub DIY Nomor 65/KEP/2020 dan telah diperpanjang sesuai dengan perkembangan kondisi daerah. Sebagai upaya penanganan pandemi di tahun 2021, pemerintah pusat telah menggalakkan vaksinasi COVID-19 dan pemenuhan sarana prasana kesehatan serta perlindungan sosial sehingga diperlukan refocusing anggaran tahun 2021.

Perubahan terhadap rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan RKPD Tahun 2021 disusun berdasarkan pada beberapa hal, sebagai berikut:

- a. Pergeseran: antar rekening belanja, antar program/kegiatan/subkegiatan, antar subkegiatan dan antar rekening;
- b. Penambahan/pengurangan Tolok Ukur Kinerja (berdasarkan realisasi pelaksanaan sub kegiatan);
- c. Penambahan sub kegiatan baru (misal: karena ada ketentuan dari pusat);
- d. Tambahan karena kebutuhan mendesak berkaitan dengan kerja sama pihak ketiga;
- e. Efisiensi karena penyesuaian dengan indikator kinerja dan standar belanja, serta kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, dan lain sebagainya.

Sedangkan khusus untuk kegiatan yang didukung dengan dana keistimewaan, perubahan dilakukan dengan memperhatikan Permenkeu Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Permenkeu Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya, pasal 14A menyebutkan bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan/atau penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), Dana Keistimewaan dapat digunakan untuk mendanai

pencegahan dan/atau penanganan pandemi COVID-19. Menindaklanjuti peraturan tersebut dilakukan perubahan rencana penggunaan Dana Keistimewaan tahun 2021 yang kemudian dialokasikan untuk pencegahan dan/atau penanganan pandemi COVID-19.

2. Target dan Realisasi Belanja

Pada Tahun Anggaran 2021, Pemda DIY menetapkan Belanja sebesar Rp6.046.849.748.828,00 Realisasi belanja sampai dengan akhir tahun 2021 adalah sebesar Rp5.530.710.447.316,34 atau 91,46%. Realisasi Belanja pada tahun 2021 mengalami kenaikan secara nominal dibandingkan tahun 2020. Pada tahun 2020, realisasi belanja sebesar Rp5.433.180.699.355,67. Salah satu penyebab kenaikan serapan anggaran atau realisasi belanja ini adalah dimulainya aktivitas kegiatan paska pandemi COVID-19, serta meningkatnya Belanja bagi hasil pendapatan dan bantuan keuangan. Belanja tahun 2021 dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah sebagai Pengguna Anggaran, dengan rincian anggaran dan belanja sebagai berikut:

Tabel 2.14. Anggaran dan Realisasi Belanja menurut Organisasi Perangkat Daerah DIY Tahun 2021(sebelum dilakukan Audit)

No	Uraian	Tahun 2021		%
		Rencana	Realisasi	
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1.981.006 .857.742,00	1.832.047 .859.966,25	92,48
2	Dinas Kesehatan	342.481 .747.911,00	235.528 .032.420,00	68,77
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan energi Sumber Daya Mineral	585.538 .092.429,00	527.178 .028.580,00	90,03
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	23.138 .596.469,00	21.648 .898.986,00	93,56
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	18.160 .410.392,00	16.231 .805.020,00	89,38
6	Satuan Polisi Pamong Praja	35.410 .478.299,00	32.150 .459.996,00	90,79
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	38.079 .990.529,00	31.866 .871.558,00	83,68
8	Dinas Sosial	103.085 .207.542,00	89.699 .907.923,04	87,02
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	15.666 .469.099,00	14.774 .445.070,00	94,31
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	82.682 .830.180,00	75.063 .968.347,00	90,79

No	Uraian	Tahun 2021		%
		Rencana	Realisasi	
11	Dinas Perhubungan	114.672 .916.996,00	111.475 .031.813,00	97,21
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	34.750 .247.276,00	33.509 .159.808,00	96,43
13	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	57.379 .305.400,00	54.531 .653.169,00	95,04
14	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	11.741 .649.555,00	11.154 .975.685,60	95,00
15	Dinas Kebudayaan	337.363 .749.575,00	313.890 .221.458,00	93,04
16	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	57.891 .052.131,00	54.355 .900.057,00	93,89
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	66.762 .350.562,00	64.336 .313.019,74	96,37
18	Dinas Pariwisata	37.339 .761.132,00	33.492 .035.119,00	89,70
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	88.380.600.8 67,00	81.940 .765.505,00	92,71
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	44.297 .960.103,00	41.438 .672.211,00	93,55
21	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	51.236 .111.669,00	47.438 .498.800,00	92,59
22	Sekretariat Daerah	131.405 .531.192,00	119.255 .286.737,00	90,75
23	Sekretariat DPRD	113.530 .437.821,00	94.528 .891.366,00	83,26
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	22.503 .094.670,00	21.157 .843.246,00	94,02
25	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	1.527.363 .558.582,00	1.460.669 .833.009,71	95,63
26	Badan Kepegawaian Daerah	31.053 .890.479,00	28.162 .354.731,00	90,69
27	Badan Pendidikan dan Pelatihan	22.460 .697.634,00	16.389 .328.345,00	72,97
28	Badan Penghubung Daerah	8.835 .355.247,00	8.419 .862.845,00	95,30
29	Inspektorat	39.734 .364.969,00	37.188 .614.109,00	93,59
30	Paniradya Kaistimewan	22.896 .432.376,00	21.184 .928.416,00	92,53
Jumlah		6.046.849 .748.828,00	5.530.710 .447.316,34	91,46

Sumber: BPKA DIY, 2022

Belanja Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp6.046.849.748.828,00, realisasi sebesar Rp5.530.710.447.316,34, atau 91,46%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.15. Realisasi Belanja DIY Tahun 2021 (sebelum dilakukan Audit BPK RI)

No.	Uraian	Tahun 2021		
		Rencana	Realisasi	%
1	Belanja Operasi	3.968.292.407.780,00	3.575.466.408.670,29	90,1
2	Belanja Modal	723.326.438.796,00	654.996.019.756,54	90,55
3	Belanja Tak Terduga	90.726.238.027,00	53.344.634.701,00	58,8
4	Belanja Transfer	1.264.504.664.225,00	1.246.903.384.188,51	98,61
	Jumlah	6.046.849.748.828,00	5.530.710.447.316,34	91,46

Sumber: BPKA DIY, 2022

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi dianggarkan pada semua OPD yang terdiri dari jenis belanja: (i) Belanja Pegawai, (ii) Belanja Barang Jasa (iii) Belanja Subsidi, (iv) Belanja Hibah, (v) Belanja Bantuan Sosial, (v). Belanja Operasi Tahun 2021 dianggarkan Rp3.968.292.407.780,00, realisasi Rp3.575.466.408.670,29 atau 90,10%. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Operasi Tahun 2021, sebagai berikut:

Tabel 2.16. Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi DIY Tahun 2021 (sebelum dilakukan Audit)

No	Uraian	Tahun 2021		
		Rencana	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	1.678.299.261.750,00	1.561.559.864.240,00	93,04
2	Belanja Barang dan Jasa	1.266.990.234.707,00	1.039.487.445.730,29	82,04
3	Belanja subsidi	73.414.802.510,00	73.318.555.056,00	99,87
4	Belanja Hibah	920.256.898.813,00	878.523.383.831,00	95,47
5	Belanja Bantuan Sosial	29.331.210.000,00	22.577.159.813,00	76,97
	Jumlah	3.968.292.407.780,00	3.575.466.408.670,29	90,1

Sumber: BPKA DIY, 2022

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan. Selain itu, Belanja Pegawai juga menampung uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD,

honorarium, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya dan honorarium yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan. Anggaran Belanja Pegawai tahun 2021 sebesar Rp1.678.299.261.750,00, realisasi sebesar Rp1.561.559.864.240,00 atau 93,04%. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.17. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai DIY Tahun 2021 (sebelum dilakukan Audit)

No	Uraian	Tahun 2021		%
		Rencana	Realisasi	
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	952.660.781 .993,00	861.405.997 .132,00	90,42
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	355.117.099 .218,00	349.449.335 .761,00	98,40
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	311.721.433 .680,00	294.252.372 .945,00	94,40
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	40.535.548 .440,00	39.604.033 .739,00	97,70
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	243.020 .793,00	235.925 .116,00	97,08
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	3.120.000 .000,00	3.120.000 .000,00	100,00
7	Belanja Pegawai BLUD	14.901.377 .626,00	13.492.199 .547,00	90,54
Jumlah		1.678.299.261 .750,00	1.561.559.864 .240,00	93,04

Sumber: BPKA DIY, 2022

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain, meliputi belanja barang berupa barang pakai habis, dan barang tak habis pakai. Belanja Jasa berupa jasa kantor, asuransi, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, konsultasi, ketersediaan layanan, bea siswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi. Belanja pemeliharaan berupa belanja Pemeliharaan digunakan untuk menganggarkan

belanja pemeliharaan tanah, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi, belanja pemeliharaan aset tetap lainnya, dan belanja perawatan kendaraan bermotor. Belanja Perjalanan Dinas berupa perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri serta belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat. Anggaran Belanja barang dan Jasa Tahun 2021 sebesar Rp1.266.990.234.707,00, realisasi sebesar Rp1.039.487.445.730,29 atau 82,04%.

Tabel 2.18. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa DIY Tahun 2021 (sebelum dilakukan Audit)

Uraian	Tahun 2021		
	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	%
Belanja Barang Habis Pakai	274.558.993 .770,00	204.391.505 .949,00	74,44
Belanja Barang Tak Habis Pakai	459.076 .650,00	419.614 .552,00	91,40
Belanja Jasa Kantor	413.645.441 .786,00	365.331.264 .625	88,32
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	76.403.26 .360,00	50.566.371 .339,00	66,18
Belanja Sewa Tanah	4.490.287 .327,00	1.411.563 .539,00	31,44
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	21.384.888 .500,00	16.396 .748,03	76,67
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	21.051.915 .000,00	17.305.297 .582,00	82,20
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	2.477.230 .000,00	2.108.510 .900,00	85,12
Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi	22.010.469 .620,00	20.305.640 .759,00	92,25
Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi	40.528.291 .681,00	3.805.387 .029,00	93,89
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	3.475.156 .000,00	3.114.000 .800,00	89,61
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek	5.044.147 .450,00	3.764.769 .630,00	74,64
Belanja Pemeliharaan Tanah	1.071.548 .000,00	826.882 .340,00	77,17
Belanja Pemeliharaan Peralatan Mesin	18.683.574 .800,00	17.138.789 .996,00	91,73
Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan	36.431.726 .817,00	34.196.742 .217,29	93,87

Uraian	Tahun 2021		
	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	%
Belanja Pemeliharaan Jalan Jaringan Irigasi	33.628.142 .750,00	30.002.369 .804,00	89,22
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lain	1.669.563 .000,00	1.488.017 .680,00	89,13
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	79.305.067 .000,00	55.225.679 .177,00	69,64
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	4.561.791 .200,00	3.211.642 .796,00	70,4
Belanja Uang kepada Pihak Ketiga	43.332.047 .000,00	43.011.152 .640,00	99,26
Belanja Jasa kepada Pihak Ketiga	71.726 .100,00	66.495 .500,00	92,71
Belanja Barang Jasa BOS	114.205.947 .066,00	110.577.958 .025,00	96,82
Belanja Barang Jasa BLUD	48.499.976 .830,00	20.572.557 .625,00	42,42
JUMLAH	1.266.990.234 .707,00	1.039.487.445 .730,29	82,04

Sumber: BPKA DIY, 2022

3) *Belanja Subsidi*

Belanja Subsidi pada Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp73.414.802.510,00 dan realisasi sebesar Rp73.318.555.056,00 atau sebesar 99,87%. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh BUMN, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. BUMN, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (*public service obligation*). Belanja Subsidi dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi. Belanja Subsidi pada Pemda DIY merupakan bantuan biaya produksi yang diberikan kepada PT. Anindya Mitra Internasional yang merupakan salah satu badan usaha milik daerah

yang diberi hak pengelolaan dan pengoperasian angkutan perkotaan bersubsidi Trans Jogja sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2019 tentang Penugasan Pengelolaan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja dengan Sistem *Buy The Service* kepada PT. Anindya Mitra Internasional. Dalam melaksanakan pengoperasian Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja, PT. AMI berhak atas subsidi, pendapatan dari tiket dan pendapatan lain-lain, dan mengusulkan tarif layanan angkutan. Secara rinci ketentuan tentang Subsidi diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2019 tentang Subsidi Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja Dengan Sistem *Buy The Service*.

4) *Belanja Hibah*

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang dan barang. Belanja hibah uang diberikan kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang di bentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, Badan dan Lembaga Nirlaba, sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar, Badan dan Lembaga Nirlaba, sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan, Hibah Dana BOS, dan Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Belanja Hibah barang diberikan kepada Pemerintah Pusat, Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang di bentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, Badan dan Lembaga Nirlaba, sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar, kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan, dan Koperasi. Pemberian hibah dilakukan secara selektif disesuaikan dengan kepentingan daerah dan kemampuan keuangan daerah agar tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib. Alokasi Anggaran Belanja Hibah pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp920.256.898.813,00 dengan realisasi sebesar Rp878.523.135.000,00 atau 95,47%. Anggaran dan realisasi Belanja Hibah dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.19. Realisasi Belanja Hibah Tahun 2021 (sebelum dilakukan Audit)

No	Uraian	Tahun 2021		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat	199.638.000,00	181.578.000,00	90,95
2	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba.Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	19.096.174.000,00	16.026.634.077,00	83,93
3	Belanja Hibah Barang keppada Badan dan lembaga Nirlaba Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	43.261.357.563,00	39.347.017.395,00	90,95
4	Belanja Hibah barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	80.397.183.250,00	63.724.414.560,00	79,26
5	Belanja Hibah Barang kepada Koperasi	12.269.979.000,00	1.226.222.640,00	99,94
6	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Birlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	69.689.180.000,00	62.602.958.666,00	89,83
7	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba. Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	154.047.200.000,00	154.038.800.000,00	99,99
8	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba. Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	183.850.000.000,00	18.039.376.493,00	98,12
9	Belanja Hibah Uang Dana BOS	531.473.649.000,00	520.855.844.000,00	98,00
10	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.480.538.000,00	2.480.538.000,00	100,00
Jumlah		920.256.898.812,00	878.523.383.831,00	95,47

Sumber: BPKA DIY, 2022

5) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan Sosial adalah digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang dianggarkan pada OPD direncanakan diberikan kepada kelompok masyarakat, Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan, dan Bidang Lainnya). Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang direncanakan diberikan kepada individu, keluarga, dan kelompok masyarakat. Anggaran Belanja Bantuan

Sosial Tahun Anggaran 2021 ditetapkan sebesar Rp29.331.210.000,00 dengan realisasi sebesar Rp22.577.159.813,00 atau 76,97%. Secara rinci realisasi Belanja Bantuan Sosial dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.20. Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial DIY Tahun 2021 (sebelum dilakukan Audit)

No	Uraian	Tahun 2021		%
		Rencana	Realisasi	
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	100,00
2	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	3.196.000.000,00	3.196.000.000,00	100,00
3	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	23.782.500.000,00	17.129.025.033,00	72,02
4	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	1.127.710.000,00	1.027.134.780,00	91,08
5	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
Jumlah		29.331.210.000,00	22.577.159.813,00	76,97

Sumber: BPKA DIY, 2022

b. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Anggaran Belanja Modal Tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp723.326.438.796,00 dengan realisasi Rp654.996.019.756,54 atau 90,55%.

Tabel 2.21. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal DIY Tahun 2021 (sebelum dilakukan Audit)

No	Uraian	Tahun 2021		
		Anggaran(%)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Modal Tanah	195,827,455,687.00	185,266,900,550.00	94,61
2	Belanja Modal Alat Besar	8,346,869,000.00	7,756,555,842.00	92,93

No	Uraian	Tahun 2021		
		Anggaran(%)	Realisasi (Rp)	%
3	Belanja Modal Alat Angkutan	12,683,687,900.00	10,010,730,091.00	78,93
4	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	2,035,986,948.00	1,871,244,194.00	91,91
5	Belanja Modal Alat Pertanian	243,446,000.00	216,683,750.00	89,01
6	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	28,060,662,638.00	26,336,523,212.00	93,86
7	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	5,984,645,000.00	5,035,882,835.00	84,15
9	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	6,775,388,740.00	4,536,116,359.00	66,95
10	Belanja Modal Alat Laboratorium	51,581,395,825.00	30,630,410,132.00	59,38
11	Belanja Modal Komputer	28,725,572,598.00	26,443,511,284.00	92,06
13	Belanja Modal Alat Eksplorasi	231,665,000.00	210,248,000.00	90,76
14	Belanja Modal Alat Pengeboran	12,000,000.00	11,718,000.00	97,65
16	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	1,049,000,000.00	856,634,100.00	81,66
17	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	125,705,000.00	124,225,000.00	98,82
18	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	3,214,767,500.00	2,738,638,887.00	85,19
19	Belanja Modal Alat Peraga	81,128,000.00	80,622,825.00	99,38
20	Belanja Modal Peralatan Proses/ Produksi	4,641,000.00	4,470,600.00	96,33
21	Belanja Modal Rambu-Rambu	237,853,000.00	227,105,105.00	95,48
22	Belanja Modal Peralatan Olahraga	59,540,000.00	54,566,250.00	91,65
23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	33,661,432,271.00	33,087,525,586.00	98,3
24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3,635,044,250.00	3,030,560,513.00	83,37
25	Belanja Modal Bangunan Gedung	77,011,065,540.00	64,960,463,211.54	84,35
26	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/ Pasti	1,445,463,000.00	1,123,974,556.00	77,76
27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	896,513,500.00	770,847,577.00	85,98
28	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	189,945,979,784.00	187,267,833,838.00	98,59
29	Belanja Modal Bangunan Air	30,687,714,000.00	23,319,887,411.00	75,99
30	Belanja Modal Instalasi	86,350,000.00	68,275,572.00	79,07
31	Belanja Modal Jaringan	4,620,970,641.00	3,790,888,656.00	82,04
32	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	154,644,500.00	152,899,500.00	98,87
33	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	19,821,319,000.00	19,507,782,287.00	98,42
34	Belanja Modal Hewan	60,000,000.00	59,000,000.00	98,33
35	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	2,079,429,000.00	1,854,790,500.00	89,2
36	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	13,939,103,474.00	13,588,503,533.00	97,48
Jumlah		723,326,438,796.00	654,996,019,756.54	90,55

Sumber: BPKA DIY, 2022

c. Belanja Dana Keistimewaan

Anggaran Belanja Daerah Tahun 2021 sebesar Rp6.046.849.748.828,00 dan realisasi sebesar Rp5.530.710.447.316,34, di dalamnya termasuk anggaran dan realisasi belanja yang sumber dananya dari Dana Keistimewaan sesuai dengan amanat UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang

Keistimewaan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan telah ditetapkan dengan Perda DIY Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Alokasi Dana Keistimewaan Tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 (Lampiran V) ditetapkan sebesar Rp1.320.000.000.000,00. Penyaluran Dana Keistimewaan Tahun 2021 sebesar Rp1.279.572.655.079,00 berasal dari nilai alokasi sebesar Rp1.320.000.000.000,00 dikurangi dengan sisa Dana Keistimewaan Tahun 2020 sebesar Rp40.427.344.921,00.

Belanja Dana Keistimewaan Tahun 2021 dilaksanakan oleh OPD dilingkungan Pemda DIY, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Kalurahan. Untuk Dana Keistimewaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan dilakukan dengan mekanisme Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan. Dana Keistimewaan ditransfer dari rekening Kas Daerah Pemda DIY ke rekening Pemda Kabupaten/Kota dan rekening Pemerintah Kalurahan untuk pembiayaan Program dan Kegiatan sesuai dengan Urusan Keistimewaan. Sisa Dana Keistimewaan pada Pemda Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan pada akhir tahun anggaran disetorkan kembali ke rekening Kas Daerah Pemda DIY. Anggaran Belanja Dana Keistimewaan sebesar Rp1.320.000.000.000,00 sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 telah terserap sebesar Rp1.259.358.730.517,05 atau 95,41%.

Tabel 2.22. Anggaran dan Realisasi Belanja Dana Keistimewaan Tahun 2021 (sebelum dilakukan Audit)

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%
I	Kelembagaan Pemerintah Daerah			
1	Kota Yogyakarta	51.613.900,00	48.503.050,00	93,97
2	Kabupaten Bantul	2.527.056.350,00	2.442.210.150,00	96,64
3	Kabupaten Kulon Progo	2.022.107.300,00	1.956.183.280,00	96,74
4	Kabupaten Gunungkidul	1.741.551.600,00	1.583.149.931,00	90,90
5	Kabupaten Sleman	803.212.293,00	736.398.918,00	91,68
6	Biro Organisasi Setda DIY	3.031.542.400,00	2.614.740.262,00	86,25
7	Biro Hukum Setda DIY	540.277.000,00	521.709.026,00	96,56
8	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	4.692.406.000,00	3.164.026.135,00	67,43
9	Badan Kepegawaian Daerah	330.076.000,00	282.035.050,00	85,45

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%
10	Badan Pendidikan dan Pelatihan	1.596.311.220,00	1.386.599.900,00	86,86
11	Paniradya Kaistimewan	16.014.803.400,00	14.849.901.825,00	92,73
II Kebudayaan				
1	Kota Yogyakarta	30.128.799.295,00	28.237.021.176,89	93,72
2	Kabupaten Bantul	43.587.131.099,00	41.247.327.474,54	94,63
3	Kabupaten Kulon Progo	39.232.907.187,00	37.328.340.034,00	95,15
4	Kabupaten Gunungkidul	40.958.033.000,00	38.436.947.960,20	93,84
5	Kabupaten Sleman	17.554.994.504,00	17.333.682.853,00	98,74
6	Dinas Kebudayaan DIY	273.473.840.304,00	256.600.698.767,00	93,83
7	Biro Tata Pemerintah Setda DIY	364.827.500,00	265.310.000,00	72,72
8	Taman Budaya Yogyakarta	10.118.856.000,00	9.655.568.107,00	95,42
9	Museum Sonobudoyo Yogyakarta	26.894.622.365,00	24.454.355.744,00	90,93
10	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	11.736.159.500,00	10.075.691.608,00	85,85
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	18.334.401.900,00	17.964.384.302,00	97,98
12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	15.148.691.425,00	14.345.234.497,00	94,70
13	Badan Penghubung Daerah	2.246.300.000,00	2.169.880.800,00	96,60
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.231.191.000,00	845.760.080,00	68,69
15	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	20.587.823.600,00	20.306.572.066,00	98,63
16	Dinas Pariwisata	21.249.950.500,00	18.398.962.851,00	86,58
17	Dinas Kesehatan	1.036.261.800,00	716.639.020,00	69,22
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	2.971.521.000,00	2.749.661.234,00	92,53
19	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	31.989.994.441,00	30.927.629.324,00	96,68
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3.385.191.063,00	3.365.432.209,00	99,42
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	30.452.873.500,00	30.220.871.467,00	99,24
22	Dinas Sosial	5.914.647.000,00	5.730.099.665,00	96,88
23	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	534.818.250,00	522.700.250,00	97,73
24	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	3.679.767.000,00	3.429.348.728,00	93,19
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.211.805.000,00	1.641.136.941,00	74,20
26	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	225.053.000,00	224.702.900,00	99,84
27	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.107.595.800,00	4.898.532.225,00	95,91
28	Satuan Polisi Pamong Praja	14.035.307.600,00	12.371.199.267,00	88,14
29	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral	109.464.000	107.483.324,00	98,19
30	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA	53.710.000	53.334.000,00	99,30

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%
31	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	249.867.100,00	211.594.280,00	84,68
	BKK Kalurahan			
	BKK Kalurahan-Desa Balai Budaya	463.600.000,00	4.567.362.256,22	98,53
	BKK Kalurahan-Desa Mandiri Budaya	10.000.000.000,00	9.863.235.126,00	98,63
	BKK Kalurahan-Arsitektur	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00
	BKK Kalurahan-Desa Bahari	3.000.000.000,00	2.551.154.000,00	85,04
	BKK Kalurahan-Padat Karya	3.035.000.000,00	2.974.638.375,00	98,01
	BKK Kalurahan-Apapan Penanda Keistimewaan	5.651.145.000,00	5.651.145.000,00	100,00
	BKK Kalurahan-Covid (Jagawarga)	22.570.000.000,00	20.961.644.964,00	92,87
	BTT-Covid	30.400.000.000,00	22.952.367.800,00	75,50
III	Pertanian			
1	Kota Yogyakarta	486.038.000,00	421.827.000,00	86,79
2	Kabupaten Bantul	3.517.317.428,00	3.051.582.195,00	86,76
3	Kabupaten Kulon Progo	2.283.952.800,00	191.417.730,00	85,00
4	Kabupaten Gunungkidul	6.058.749.000,00	5.517.727.440,00	91,07
5	Kabupaten Sleman	4.067.515.032,00	2.511.771.388,50	61,75
6	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	5.167.742.466,00	4.646.780.711,00	89,92
7	Biro Hukum Setda DIY	35.321.162.000,00	343.540.900,00	97,28
IV	Tata Ruang			
1	Kota Yogyakarta	41.489.743.000,00	41.314.777.777,71	99,58
2	Kabupaten Bantul	245.431.500,00	245.431.500,00	100,00
3	Kabupaten Kulon Progo	545.590.500,00	514.289.864,00	94,26
4	Kabupaten Gunungkidul	579.926.000,00	470.184.200,00	81,08
5	Kabupaten Sleman	198.137.933.270,00	195.930.949.039,00	98,89
6	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	5.401.345.258,00	51.310.061.176,00	94,99
7	Paniradya Kaistimewan	120.000.000,00	118.730.000,00	98,94
8	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY	10.239.743.465,00	10.202.081.946,00	99,63
9	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	249.230.662.577,00	248.480.491.854,00	99,70
10	Dinas Perhubungan DIY	2.928.247.008,00	289.794.937,00	98,97
11	Dinas Kelautan dan Perikanan	198.792.500,00	175.076.256,00	88,07
	Jumlah	13.200.000.000.000,00	1.259.358.730.517,05	95,41

Sumber: BPKA DIY, 2021

d. Belanja Tak terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya,

termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp90.726.238.027,00 dengan realisasi Rp53.344.634.701,00 atau 58,80%. Realisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga Tahun 2021 sebesar Rp 49.353.014.851,00 digunakan untuk penanganan pandemi COVID-19 melalui Satuan Tugas Penanganan Corona Disease 2019 (COVID-19) Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah ditetapkan oleh Gubernur DIY dengan Keputusan Gubernur Nomor 3/KEP/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah Istimewa Yogyakarta dan terakhir dirubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 32/KEP/2021. Selanjutnya mekanisme kerja Satuan Tugas mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2021 tentang Mekanisme Kerja Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-12/MK.7/PK.3/2020 Tanggal 29 Desember 2020 Perihal perpanjangan waktu kedua pelaksanaan kegiatan hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Tahun Anggaran 2018, ijin perpanjangan waktu kedua tidak diberikan, sehingga sisa dana sebesar Rp. 3.991.619.850,00 tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 bahwa sisa dana Hibah Tahun Anggaran 2018 harus disetorkan ke Kas Negara. Rincian Belanja Tidak Terduga Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.23. Anggaran dan Realisasi Belanja Tak Terduga 2021 (sebelum dilakukan Audit)

No	Uraian	No/Tanggal SP2D		SP2D	Realisasi	Capaian (%)
1	Tahap 3 Phase 1	00050/TU/5.02.04 /IV/02/2021	03 Feb 2021	3.487.802 .000,00	3.392.350 .273,00	97,26
2	Tahap 3 Phase 2	00440/TU/5.02.04 /03/2021	12 Mar 2021	1.877.983 .000,00	1.799.547 .406,00	95,82
3	Tahap 3 Phase 3	03456/TU/5.02.04 /07/2021	23 Ju l2021	3.387.662 .000,00	3.063.636 .364,00	90,44
4	Tahap 3 Phase 4	03528/TU/5.02.04 /07/2021	27 Jul 2021	20.479.617 .995,00	17.974.792 .800,00	87,77
5	Tahap 3 Phase 5	03745/TU/5.02.04 /08/2021	2 Agst 2021	16.450.000 .000,00	15.975.000 .000,00	97,11
6	Tahap 3 Phase 6	03905/TU/5.02.04 /08/2021	10 Agst 2021	589.874 .500,00	561.967 .273,00	95,27

No	Uraian	No/Tanggal SP2D		SP2D	Realisasi	Capaian (%)
7	Tahap 3 Phase 7	04842/TU/5.02.04	02 Sep 2021	65.900	58.363	88,56
		/09/2021		.000,00	.636,00	
	Tahap 3 Phase 7	04841/TU/5.02.04	02 Sep 2021	269.808	191.179	70,86
		/09/2021		.000,00	.800,00	
8	Tahap 3 Phase 8	05131/TU/5.02.04	10 Sep 2021	1.439.411	1.277.882	88,78
		/09/2021		.000,00	.605,00	
	Tahap 3 Phase 8	05132/TU/5.02.04	10 Sep 2021	32.175	29.250	90,91
		/09/2021		.000,00	.000,00	
9	Tahap 3 Phase 9	05406/TU/5.02.04	20 Sep 2021	42.540	42.540	100,00
		/09/2021		.000,00	.000,00	
10	Tahap 3 Phase 10	05450/TU/5.02.04	22 Sep 2021	85.220	75.442	88,53
		/09/2021		.000,00	.272,00	
11	Pengembalian sisa dana Hibah	05662/LS/5.02.04	28 Sep 2021	3.991.619	3.991.619	100,00
		/09/2021		.850,00	.850,00	
12	Tahap 3 Phase 11	05865/TU/5.02.04	05 Okt 2021	405.810	310.218	76,44
		/10/2021		.000,00	.000,00	
	Tahap 3 Phase 11	05864/TU/5.02.04	05 Okt 2021	86.000	77.038	89,58
		/10/2021		.000,00	.300,00	
13	Tahap 3 Phase 12	06287/TU/5.02.04	18 Okt 2021	685.592	682.417	99,54
		/10/2021		.000,00	.200,00	
14	Tahap 3 Phase 13	06519/TU/5.02.04	26 Okt 2021	2.554.140	2.367.883	92,71
		/10/2021		.000,00	.457,00	
15	Tahap 3 Phase 14	06733/TU/5.02.04	01 Nov 2021	1.147.800	931.478	81,15
		/11/2021		.000,00	.192,00	
16	Tahap 3 Phase 15	07505/TU/5.02.04	28 Nov 2021	57.600	57.600	100,00
		/11/2021		.000,00	.000,00	
17	Tahap 3 Phase 16	08329/TU/5.02.04	17 Des 2021	193.200	184.272	95,38
		/12/2021		.000,00	.727,00	
18	Tahap 3 Phase 17	08713/TU/5.02.04	23 Des 2021	302.635	300.154	99,18
		/12/2021		.000,00	.546,00	
	JUMLAH			57.632	53.344.634	92,56
				.390.345,00	.701,00	

Sumber: BPKA DIY, 2022

Tabel 2.24. Anggaran dan Realisasi Belanja Tak Terduga 2021 untuk Penanganan COVID-19 (sebelum dilakukan Audit)

	URAIAN	SP2D	REALISASI	SISA	%
A PENANGANAN KESEHATAN					
BELANJA TIDAK TERDUGA					
	Operasional Posko Terpadu Penanganan COVID-19 DIY	975.626	954.443	21.182	97,83
		.000	.181	.819	
	Dukungan Penerapan Protokol Kesehatan untuk Masyarakat	1.864.500	1.852.950	11.550	99,38
		.000	.000	.000	
	Dukungan Kesehatan untuk Penanganan COVID-19	26.352.813	23.241.693	3.111.120	88,19
		.995	.783	.212	
	Penegakan Hukum untuk Penerapan Protokol Kesehatan	1.657.901	1.649.440	8.460	99,49
		.000,00	.546	.454	

URAIAN	SP2D	REALISASI	SISA	%
Dukungan Penegakan Hukum	83.500	83.500	-	100
Penanganan COVID-19	.000	.000		
Pemenuhan Alat Kesehatan untuk	1.146.068	985.779	160.288	86,01
Penanganan COVID-19	.000	.177	.823	
Dukungan Operasional Gedung Isolasi	299.990	278.723	21.266	92,91
Terpadu	.000	.636	.364	
Dukungan Keamanan Ketertiban	260.884	257.243	3.640	98,60
Penanganan COVID-19	.500	.637	.863	
Dukungan pelaksanaan Vaksinasi	1.441.487	1.228.214	213.272	85,20
	.000	.773	.227	
Penerapan Protokol Kesehatan pelaku	57.600	57.600	-	100
Wisata DIY	.000	.000		
Subtotal	34.140.370	30.589.588	3.550.781	89,60
	.495	.733	.762	
B PENANGANAN DAMPAK EKONOMI				
BELANJA TIDAK TERDUGA				
Dukungan Pemulihan Ekonomi utk	164.500	15.975.000	475.000	97,11
Koperasi terdampak PPKM	.000,00	.000	.000	
Subtotal	164.500.000,	15.975.000.0	475.000	97,11
	00	00	.000	
C PENYEDIAAN SOCIAL SAFETY NET/ JARING PENGAMAN SOSIAL				
BELANJA TIDAK TERDUGA				
Bantuan Sosial kepada Masyarakat	3.050.400	2.788.426	261.973	91 41
Terdampak	.000	.119	.881	
Subtotal	3.050.400	788.426	261.973	91,41
	.000	.119	.881	
TOTAL	53.640.770	49.353.014	4.287.755	92,01
	.495	.852	.643	

Sumber: BPKA DIY, 2022

e. Belanja Transfer

Belanja Transfer Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp1.264.504.664.225,00 dan realisasi sebesar Rp1.246.903.384.188,51 atau 98,61%, dengan rincian sebagai berikut:

1) *Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota*

Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota. Belanja Bagi Hasil ini merupakan pembagian hasil/realisasi pendapatan dari pajak daerah. Alokasi anggaran Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021 ditetapkan sebesar Rp713.118.316.167,00 dan direalisasikan sebesar

Rp713.118.316.167,00 atau 100%. Realisasi Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp19.226.395.563,00 atau 2,77% dibandingkan realisasi Tahun 2020 yaitu sebesar Rp693.891.920.604,00. Secara rinci realisasi Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.25. Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota DIY Tahun 2021 (sebelum dilakukan Audit)

No	Uraian	Tahun 2021		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota Yogyakarta	123.562.921.230,00	123.562.921.230,00	100
2	Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten Bantul	163.305.276.389,00	163.305.276.389,00	100
3	Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	89.292.015.362,00	89.292.015.362,00	100
4	Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul	103.103.480.235,00	103.103.480.235,00	100
5	Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten Sleman	233.854.622.951,00	233.854.622.951,00	100
	Jumlah	713.118.316.167,00	713.118.316.167,00	100

Sumber: BPKA DIY, 2022

2) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, serta dalam rangka kerja sama antardaerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Pemberian bantuan keuangan tersebut bersifat khusus yaitu khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp551.386.348.058,00 dan realisasi sebesar Rp533.785.068.021,51 atau 96,81%. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2021

mengalami kenaikan sebesar Rp141.840.289.628,88 atau 36,18% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 yaitu sebesar Rp391.944.778.392,63. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan meliputi Belanja Bantuan Keuangan ke Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp487.445.811.457,29 dan Belanja Bantuan Keuangan ke Desa sebesar Rp46.339.256.564,22 dengan rincian sebagai berikut:

a) *Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Kabupaten/Kota*

Belanja Bantuan Keuangan Provinsi ke Kabupaten/Kota Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp499.894.603.058,00 dan realisasi sebesar Rp484.644.483.000,29 atau 96,95%. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Provinsi ke Kabupaten/Kota Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp94.004.704.607,66 atau 24,07% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 yaitu sebesar Rp390.599.778.392,63. Belanja Bantuan Keuangan Provinsi ke Kabupaten/Kota tersebut merupakan Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dengan peruntukkan masing-masing adalah sebagai berikut:

Tabel 2.26. Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Kabupaten/Kota DIY Tahun 2021 (sebelum dilakukan Audit)

No	Uraian	Tahun 2021		%
		Rencana	Realisasi	
1	Bantuan Keuangan Ke Kota Yogyakarta	72.754.194.195,00	70.217.129.004,59	96,51
2	Bantuan Keuangan Ke Kabupaten Bantul	100.803.936.377,00	97.862.551.320,00	97,08
3	Bantuan Keuangan Ke Kabupaten Kulon Progo	47.366.557.787,00	45.022.230.908,00	95,05
4	Bantuan Keuangan Ke Kabupaten Gunung Kidul	54.548.259.600,00	51.170.009.531,20	93,81
5	Bantuan Keuangan Ke Kabupaten Sleman	224.421.655.099,00	220.372.562.236,50	98,20
Jumlah		499.894.603.058,00	484.644.483.000,29	96,95

Sumber: BPKA DIY, 2022

b) Belanja Bantuan Keuangan Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa

Belanja Bantuan Keuangan Provinsi kepada Desa Tahun 2021 merupakan belanja bantuan keuangan khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan, dianggarkan sebesar Rp51.491.745.000,00 dan realisasi sebesar Rp49.140.000.000,00 atau 95,43%. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Provinsi kepada Desa Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp47.795.585.021,22 atau sebesar 3553,57% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 yaitu sebesar Rp1.345.000.000,00. Rincian Belanja Bantuan Keuangan Provinsi kepada Desa adalah sebagai berikut:

Tabel 2.27. Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi atau Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa DIY Tahun 2021 (sebelum dilakukan Audit)

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa/Kalurahan	51.491.745.000,00	49.140.585.021,00	95,43
	Jumlah	51.491.745.000,00	49.140.585.021,00	95,43

Sumber: BPKA DIY, 2022

3. Permasalahan dan Solusi Belanja Daerah

a. Permasalahan

Secara umum capaian realisasi belanja tahun 2021 pada perangkat daerah lebih dari 91% dari anggaran belanja yang ditetapkan. Namun masih terdapat beberapa perangkat daerah yang capaian realisasi belanjanya kurang dari 90% dari anggaran yang ditetapkan, antara lain Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial, Dinas Pariwisata, Sekretariat DPRD, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta Badan Pendidikan dan Pelatihan. Sisa anggaran sebagian besar berasal dari sisa lelang dan efisiensi. Permasalahan utama Belanja Daerah tahun 2021 dapat diinventarisasi sebagai berikut:

- 1) Adanya kebijakan penggunaan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) dalam proses penatausahaan, yang mengakibatkan kegiatan tidak bisa dilaksanakan.
- 2) Kegiatan yang bersifat persediaan seperti listrik, perjalanan dinas, rapat-rapat, mengalami penurunan.
- 3) Beberapa pos anggaran tidak dioptimalkan karena masih menyesuaikan dengan kondisi pandemi.
- 4) Masih adanya temuan-temuan kelebihan volume pekerjaan konstruksi sebagai hasil pemeriksaan, baik yang dilakukan oleh Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah maupun Pemeriksa Eksternal.
- 5) Masih adanya pengadaan barang/jasa yang gagal untuk memilih/ menetapkan penyedia barang/jasa.
- 6) Masih adanya kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan namun dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) dilakukan efisiensi.

b. Solusi

- 1) Melakukan komunikasi dengan Pemerintah Pusat terkait dengan penggunaan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah), serta menyiapkan aplikasi pendamping dalam proses penatausahaan dan pelaporan.
- 2) Berkenaan dengan capaian indikator kinerja yang tidak optimal dalam masa pandemi, untuk dilakukan evaluasi perencanaan yang komprehensif baik dari aspek sasaran, program, dan kegiatan.
- 3) Untuk dilakukan perencanaan strategis program/kegiatan yang fokus pada prioritas dan capaian sasaran strategis serta mempertimbangkan adaptasi *pranatan anyar* agar memperoleh capaian *outcome* yang optimal dan akuntabel.
- 4) Temuan-temuan kelebihan volume konstruksi dapat diminimalisir dengan penyusunan dokumen perencanaan yang lebih cermat, memperbaiki manajemen pelaksanaan kegiatan, dan pengawasan pelaksanaan konstruksi.

- 5) Meningkatkan sumber daya pengelola pengadaan barang/jasa di Organisasi Perangkat Daerah dalam memahami mekanisme dan prosedur pengadaan barang/jasa.
- 6) Meningkatkan koordinasi antara bagian program dengan bagian pelaporan sehingga permasalahan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan tidak terkendala dengan tidak tersedianya anggaran karena pergeseran dan efisiensi.

D. PEMBIAYAAN DAERAH

1. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Dalam hal terjadi defisit anggaran, sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan dapat berbentuk angsuran hutang, bantuan modal dan/atau transfer ke dana cadangan.

Kebijakan pembiayaan pembangunan diarahkan pada upaya membangun investasi di daerah khususnya pengeluaran pembiayaan. Aspek investasi tersebut digunakan untuk membiayai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di DIY dalam peningkatan usaha dan berorientasi pada profit. Lebih lanjut BUMD di DIY yang didukung Pemda DIY harus memberikan nilai manfaat kepada masyarakat, serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan pembangunan daerah.

a. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Pada APBD Tahun Anggaran 2021 penerimaan pembiayaan sebesar Rp489.453.213.139,00 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp484.453.213.139,00 dan penerimaan kembali pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp5.000.000.000,00.

b. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pada APBD Tahun Anggaran 2021, pengeluaran pembiayaan sebesar Rp117.500.000.000,00 berasal dari Penyertaan Modal daerah sebesar Rp112.500.000.000,00 dan pemberian pinjaman daerah sebesar Rp5.000.000.000,00.

2. Target dan Realisasi Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan

Pada Tahun Anggaran 2021 penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar Rp489.453.213.139,00 dengan realisasi Rp494.060.546.739,46 atau 100,94%. Realisasi Penerimaan pembiayaan tersebut terdiri dari penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp484.453.213.139,46 dan Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp9.067.333.600,00.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp117.500.000.000,00 dengan realisasi Rp112.500.000.000,00 atau 95,74% dengan peruntukan penambahan Penyertaan Modal kepada PT Bank BPD DIY sebesar Rp112.060.000.000,00 dan kepada PT ASKRIDA sebesar Rp440.000.000,00. Untuk tahun 2021 anggaran pemberian pinjaman daerah sebesar Rp5.000.000.000,00 tidak direalisasikan.

E. PENGELOLAAN ASET YANG DIPISAHKAN

1. Kinerja BUMD

a. PT. Bank Pembangunan Daerah DIY

Pada tahun 2021, PT Bank BPD DIY memberikan Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pemda DIY sebesar Rp84.955.839.874,22. Penerimaan Bagian Laba tersebut berasal dari Laba PT Bank BPD DIY Tahun 2020 dan dihitung berdasarkan nilai modal Pemda DIY yang telah diaktakan tahun 2021 sebesar Rp870.440.000.000,00. Penerimaan tersebut mengalami penurunan sebesar Rp9.045.873.740,04 atau 9,62% dibandingkan dengan penerimaan bagian laba tahun 2020 sebesar Rp 94.001.713.614,26.

Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pemda DIY mengalami penurunan karena laba bersih yang diperoleh PT Bank BPD DIY mengalami penurunan. Laba bersih PT Bank BPD DIY tahun 2020 sebesar Rp240.622.000.000,00. Laba bersih tersebut mengalami penurunan sebesar Rp30.927.000.000,00 atau 11,39% dibandingkan laba bersih tahun 2019 sebesar Rp271.549.000.000,00. Penurunan laba bersih tersebut disebabkan karena:

- 1) Menurunnya permintaan kredit/pembiayaan akibat perlambatan ekonomi;
- 2) Adanya kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait relaksasi kredit bagi debitur terdampak COVID-19 (penundaan pembayaran angsuran), serta adanya kebijakan terkait penurunan suku bunga kredit;
- 3) Adanya tambahan biaya bunga yang harus ditanggung oleh PT Bank BPD DIY terkait kebijakan penyaluran dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

b. PT Anindya Mitra Internasional (AMI)

PT AMI merupakan BUMD Pemda DIY yang lingkup usahanya terdiri dari Unit Percetakan, Unit Pertambangan, Unit Pariwisata, Unit *Realty*, Unit Air Minum dan Unit Transportasi. Pada tahun 2021, PT AMI memberikan

Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pemda DIY sebesar Rp1.044.717.700,00. Penerimaan tersebut menurun sebesar Rp140.933.626,00 atau 11,89% dibandingkan dengan penerimaan bagian laba tahun 2020 sebesar Rp1.185.651.326,00. Hal ini disebabkan karena penurunan laba sebesar 39,29% dibandingkan laba tahun 2019. Laba Tahun 2020 sebesar Rp3.706.987.172,00 menurun dibandingkan laba tahun 2019 sebesar Rp5.855.923.802,00. Penurunan laba tersebut dikarenakan antara lain sebagai berikut:

- 1) Penerimaan pendapatan dari Unit transportasi (penerimaan tiket Trans Jogja) mengalami penurunan karena jumlah penumpang yang turun akibat pandemi COVID-19;
- 2) Pendapatan dari Unit Pariwisata menurun karena kebijakan PPKM dan erupsi merapi;
- 3) Pendapatan dari Unit Air Minum juga terjadi penurunan, disebabkan pelanggan Unit air minum dominan dari pengunjung Kaliurang dan tamu penginapan di sekitar Kaliurang yang berkurang drastis karena adanya kebijakan PPKM.

Nilai penyertaan modal Pemda DIY pada PT AMI sampai dengan akhir tahun 2021 sebesar Rp31.144.910.000,00, sedangkan modal dasar sebesar Rp50.000.000.000,00 sehingga terdapat kekurangan penyertaan modal sebesar Rp18.855.090.000,00.

c. PT Taru Martani

Pada tahun 2021 PT Taru Martani memberikan Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pemda DIY sebesar Rp3.837.562.289,00. Penerimaan tersebut meningkat sebesar Rp3.688.865.289,00 dibandingkan dengan penerimaan bagian laba tahun 2020 sebesar Rp148.697.632,00.

Laba bersih PT Taru Martani tahun 2020 sebesar Rp9.593.905.721,00. Laba bersih tersebut mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebesar Rp9.222.161.641 atau 2.481% dibandingkan laba bersih tahun 2019 sebesar Rp371.744.080,00. Peningkatan tersebut disebabkan karena:

- 1) Perubahan sistem produksi. PT Taru Martani yaitu merubah sistem produksi yang semula produksi dilakukan berdasarkan pesanan, saat ini produksi dilakukan setiap hari;
- 2) PT Taru Martani memiliki cadangan bahan baku sesuai standar mutu untuk proses produksi;
- 3) Berkurangnya retur produk dan peningkatan penjualan karena stok bahan yang berkualitas;
- 4) Meningkatnya hasil usaha lain-lain yang terdiri dari usaha pertanian dan restoran. Dalam menjalankan usaha pertanian dan restoran tersebut, PT Taru Martani bekerjasama dengan pihak ketiga dengan sistem bagi hasil;
- 5) PT Taru Martani telah membiayai seluruh beban amortisasi yang ditangguhkan pada tahun 2019.

d. Perumda Air Bersih Tirtatama

Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Bersih Tirtatama merupakan BUMD Pemda DIY yang bergerak di bidang pengelolaan dan penyediaan air bersih. Pada tahun 2021, Perumda Air Bersih Tirtatama masih mengalami kerugian sebesar Rp10.783.559.581,16. Defisit operasional Perumda Air Bersih Tirtatama disebabkan antara lain sebagai berikut:

- 1) Tahun 2021 merupakan tahun pertama peralihan pengelolaan SPAM dari UPT Balai Pialam ke Perumda Air Bersih Tirtatama. yang mana pada saat dikelola oleh UPT, SPAM Kartamantul merupakan unit *cost center*. Ketika beralih menjadi BUMD, maka perlu adanya pengembangan agar dapat menjadi *profit center*.
- 2) Pada tahun 2021 yang merupakan tahun pertama bagi Perumda Air Bersih Tirtatama, target penyerapan produksi air curah oleh PDAM Kota Yogyakarta, PDAM Kabupaten Sleman, dan PDAM Bantul masih belum optimal.

e. Badan Usaha Kredit Perdesaan (BUKP)

BUKP pada tahun 2021 memberikan Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pemda DIY sebesar Rp6.385.055.910,53. Penerimaan tersebut

meningkat sebesar Rp360.054.342,30 atau 5,98% dibandingkan dengan penerimaan bagian laba tahun 2020 sebesar Rp6.025.001.568,23. Laba bersih BUKP yang menjadi dasar penghitungan Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pemda DIY sebesar Rp13.354.678.679,86. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp724.926.064,00 atau 5,74% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp12.629.752.615,64. Peningkatan bagian laba tersebut dikarenakan peningkatan pendapatan operasional BUKP sebesar Rp731.371.995,00 atau 1,43% dari pendapatan operasional tahun sebelumnya. Pendapatan operasional BUKP pada tahun 2020 sebesar Rp51.924.804.095,00, sementara pendapatan operasional BUKP pada tahun 2019 sebesar Rp51.193.432.100,00. Peningkatan pendapatan operasional BUKP dikarenakan antara lain dari peningkatan pendapatan bunga kredit. Nasabah BUKP yang sebagian besar merupakan pedagang pasar dan pedagang skala mikro, dalam kondisi pandemi masih dapat menjalankan usahanya dan membayar pinjamannya di BUKP.

F. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Peran penting aset dalam roda pemerintahan daerah menjadikan pengelolaan aset yang dimiliki daerah harus dikelola secara profesional. Barang Milik Daerah yang merupakan bagian dari aset daerah perlu ditingkatkan pengelolaannya sehingga dapat mendukung tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemda serta dapat menjadi bagian dari sumber pendapatan daerah.

Pengelolaan Barang Milik Daerah yang merupakan suatu siklus yang terdiri dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, dalam setiap siklusnya harus dikelola dengan baik dan profesional. Pengelolaan barang milik daerah yang optimal merupakan kolaborasi dari seluruh organisasi perangkat daerah dalam mengelola barang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dukungan para pengelola barang dalam hal ini Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang, Kepala BPKA selaku Pejabat Penatausahaan BMD, Kepala OPD selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang serta Pengurus Barang yang ada di pengelola dan di OPD merupakan modal utama terciptanya pengelolaan barang milik daerah yang optimal. Dukungan pengawas internal dan pengawas eksternal seperti pemeriksa BPK, BPKP dan KPK akan lebih meningkatkan kualitas pengelolaan barang milik daerah.

Dalam mengelola barang milik daerah, disamping dapat menjadi sumber pendapatan, masih ada tantangan dan permasalahan yang dihadapi, pengelolaan yang baik dan optimal membutuhkan suatu Sistem Informasi yang handal juga. Sistem Informasi Aset yang dimiliki seharusnya dapat terintegrasi dengan aplikasi lain yang berkaitan langsung maupun aplikasi pendukung lain. Sumber daya manusia pengelola barang juga dituntut untuk lebih melek teknologi informasi dan selalu dapat mengikuti perkembangan pengetahuan yang ada.

1. Penatausahaan Barang Milik Daerah

Terbitnya Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah, maka tantangan juga bagi Pemda untuk segera menyesuaikan aturan dan pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah.

Penatausahaan barang milik daerah merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMD. Semakin besarnya jumlah barang milik daerah semakin membutuhkan suatu aplikasi yang handal untuk menatausahakan barang yang ada. Pada tahun 2021 dalam penatausahaan aset tetap dan aset lainnya digunakan SIM Aset dan untuk penatausahaan barang persediaan digunakan aplikasi e Persediaan. Kedua aplikasi ini telah disesuaikan dengan ketentuan mengenai kodifikasi barang sesuai dengan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah, Pergub DIY Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah, dan Pergub Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah.

a. Dasar Hukum Pelaksanaan

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
- 6) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 7) Peraturan Gubernur DIY Nomor 120 Tahun 2014 Tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah;
- 8) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Persediaan;
- 9) Peraturan Gubernur DIY Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi Barang Milik Daerah;
- 10) Peraturan Gubernur DIY Nomor 112 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemda.
- 11) Peraturan Gubernur DIY Nomor 56 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah,
- 12) Peraturan Gubernur DIY Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah.

b. Tantangan dan Permasalahan

Sumber Daya Manusia masih menjadi tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam penatausahaan barang milik daerah, disusul dengan perlu adanya sistem informasi manajemen aset yang handal. Aplikasi yang handal akan sangat membantu sumber daya manusia menatausahakan barang sehingga pencatatan menjadi tertib dan pelaporan dapat tepat waktu dengan angka yang akurat. Apalagi jika didukung adanya integrasi sistem informasi manajemen barang dan keuangan.

c. Upaya-upaya yang Dilaksanakan

Pada tahun 2021 telah digunakan SIM aset, aplikasi yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun (berbasis web dan online), rencana kedepan akan dibuat pengembangan menu untuk menghubungkan sistem aplikasi keuangan dengan SIM aset ini.

d. Capaian

Tahun 2021 Pemda DIY telah mencatat barang milik daerah baik berupa aset tetap maupun aset lainnya sebanyak 3.524.831 unit senilai Rp14.020.344.455.822,40. Aset tersebut berada di seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemda DIY. Barang Milik Daerah tertuang dalam Rekapitulasi Buku Inventaris Tahun 2021 sebagaimana Tabel 2.28 berikut.

Tabel 2.28. Rekapitulasi Buku Induk Inventaris Tahun 2021.

No	Instansi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	3.137.547	2.173.680.890.271,87
2	Dinas Kesehatan	23.522	278.139.145.731,54
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	11.870	6.581.831.088.813,80
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	1.684	179.252.586.173,58
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.560	9.409.689.968,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	2.085	17.300.498.935,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.504	81.587.005.532,51
8	Dinas Sosial	18.627	149.587.917.186,32
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	13.847	87.563.003.891,98

No	Instansi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	2.176	28.813.231.539,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	11.552	187.547.515.421,92
12	Dinas Perhubungan	19.374	251.186.415.690,30
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	15.751	124.512.283.785,77
14	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	5.064	137.303.155.317,30
15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	1.348	9.982.801.364,91
16	Dinas Kebudayaan	91.532	604.006.706.648,76
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	49.769	228.463.944.187,11
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	9.647	266.780.495.603,30
19	Dinas Pariwisata	6.447	87.212.805.289,02
20	Dinas Pertanian	15.084	287.190.531.698,49
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.048	56.271.790.547,00
22	Biro Tata Pemerintahan	1.691	6.625.187.901,25
23	Biro Hukum	6.937	5.898.598.181,00
24	Biro Bina Mental Spiritual	523	2.069.021.440,00
25	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	782	2.420.646.733,00
26	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	1.118	3.718.518.669,99
27	Biro Organisasi	738	3.700.006.965,03
28	Biro Umum, Humas dan Protokol	9.681	292.311.646.682,85
29	Biro Pemberdayaan Masyarakat	271	1.451.665.669,00
30	Badan Penghubung Daerah	4.384	33.078.334.457,00
31	Sekretariat DPRD	4.574	602.664.847.372,10
32	Inspektorat	1.810	39.011.802.641,42
33	Paniradya Kaistimewan	1.786	7.281.563.729,96
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.542	26.161.569.676,96
35	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	17.840	1.093.230.545.334,40
36	Badan Kepegawaian Daerah	5.311	30.955.001.906,00
37	Badan Pendidikan dan Pelatihan	16.805	42.141.994.865,00
	Jumlah	3.524.831	14.020.344.455.822,40

Sumber: BPKA DIY, Unaudited 2021

2. Pensertifikatan Tanah Hak Pakai Pemda DIY

Upaya pengamanan hukum terhadap barang milik daerah berupa tanah dilakukan dengan pensertifikatan tanah dan balik nama sertifikat yang belum atas nama Pemda DIY. Untuk pengadaan tanah yang dilakukan oleh SKPD teknis, proses pengadaan sampai dengan pensertifikatan tanah dilakukan oleh SKPD teknis yang bersangkutan, sedang untuk tanah-tanah yang sudah tercatat tapi belum sertifikat atau masih atas nama bukan Pemda DIY dilakukan oleh pengelola.

Pada Tahun Anggaran 2021, dilakukan pensertifikatan dan balik nama sertifikat menjadi atas nama Pemda DIY, dengan obyek sebagai berikut:

Tabel 2.29. Daftar Obyek Tanah yang disertifikatkan

No	Lokasi	Luas (m ²)	Keterangan
1	Eks Kanwil PU Jalan Malioboro Nomor 56 Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta	8.472	Hak Pakai 00019 tanggal 08-12-2021 seri BT707305 seluas 8.472 m ²
2	Kantor BIPP Pertanian Kedungkeris, Nglipar, Gunungkidul	15.000	Hak Pakai 00044 tanggal 19 Januari 2022 seri AAV343000 seluas 15.000 m ²
3	Kantor RPH Bibal Bibal Girisuko, Panggang	1.861	Hak Pakai 00009 tanggal 31 Oktober 2014 seri BL172844 seluas 1.861 m ²
4	SMA N 4 Yogyakarta Karangwaru, Tegalrejo, Yogyakarta	5.899	Hak Pakai 00061 tanggal 08 Nopember 2021 seri BT707045 seluas 5.899 m ²
5	Aset hibah KPK Panembahan, Kraton, Yogyakarta	573	Hak Pakai 00019 tanggal 27 Desember 2021 seri BT707367 seluas 573 m ²
6	Aset hibah KPK Patehan, Kraton, Yogyakarta	2.057	Hak Pakai 0004 tanggal 17 September 2021 seri BT707186 seluas 2.057 m ²
7	SMKN 1 Samigaluh Pagerharjo, Samigaluh, Kulonprogo	± 3.750	Sertifikat belum terbit
8	Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Mantrijeron, Mantrijeron, Yogyakarta	± 4.367	Sertifikat belum terbit

Sumber: BPKA DIY, 2022

Disamping pensertifikatan tanah dalam rangka melengkapi dokumen asal usul tanah, dilakukan juga pengumpulan dokumen warkah melalui permohonan salinan/fotocopy warkah kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Kegiatan ini merupakan bentuk pengamanan barang milik daerah untuk mengantisipasi apabila ada pihak lain yang mengajukan gugatan terhadap tanah-tanah Pemda DIY tersebut. Kegiatan pendokumentasian warkah sertifikat pada tahun 2021 dapat terealisasi sejumlah 17 warkah sertifikat tanah, sebagaimana tersaji pada Tabel 2.30 di bawah ini.

Tabel 2.30. Warkah Tanah Pemda DIY Pada Tahun 2021

No.	Kab/Kota	Jumlah	Warkah dari Sertifikat
1	Kota Yogyakarta	5 bidang	1. Hak Pakai 00017 seluas 2.031m ² di Panembahan, Kraton, Yogyakarta 2. Hak Pakai 00071 seluas 222m ² di Ngupasan, Gondomanan, Yogyakarta 3. Hak Pakai 00083/Prenggan seluas 247 m ² di Kelurahan Prenggan, Kotagede, Yogyakarta (SMAN 5 Yogyakarta)

No.	Kab/Kota	Jumlah	Warkah dari Sertifikat
			4. Hak Pakai 00085/Prenggan seluas 237 m ² di Kelurahan Prenggan, Kotagede, Yogyakarta (SMAN 5 Yogyakarta)
			5. Hak Pakai 00084/Prenggan seluas 255 m ² di Kelurahan Prenggan, Kotagede, Yogyakarta (SMAN 5 Yogyakarta)
2	Kabupaten Bantul	5 bidang	6. Hak Pakai P.4 tanggal 19 Juli 1993 seluas 61.700m ² di Kadekrowo, Gilangharjo, Pandak, Bantul (SMKN 1 Pandak)
			7. Hak Pakai P.02 tanggal 07 Oktober 1992 seluas 37.360m ² di Kadekrowo, Gilangharjo, Pandak, Bantul (SMKN 1 Pandak)
			8. Hak Pakai P.03 tanggal 07 Oktober 1992 seluas 8.214 m ² di Kadekrowo, Gilangharjo, Pandak, Bantul (SMKN 1 Pandak)
			9. Hak Pakai P.3 tanggal 18 Januari 1995 seluas 9.175 m ² Sabdodadi, Bantul (SMKN 1 Bantul)
			10. Hak Pakai P.2/Mangunan tanggal 11 April 1998 seri AJ 094459 seluas 4117m ² (Dinas Kehutanan)
3	Kabupaten Kulon Progo	7 bidang	11. Hak Pakai P.12 tanggal 20 Mei 1991 seluas 4.105 m ² terletak di Jl. Kawijo 11 Pengasih (SMKN 1 Pengasih)
			12. Hak Pakai P.2 tanggal 14 Mei 1991 seluas 25.400m ² terletak di Tanjung, Ngargosari (SMAN 1 Samigaluh)
			13. Hak Pakai P.20 tanggal 27 Januari 1998 seluas 760 m ² terletak di Jl Kawijo 11 Pengasih (SMKN 1 Pengasih)
			14. Hak Pakai P.00080 tanggal 07 September 2015 seluas 2.102m ² terletak di Ngemplak, Pagerharjo (SMKN 1 Samigaluh)
			15. Hak Pakai P.03 tanggal 09 Juni 1999 seluas 24.200 m ² terletak di Ngipikrejo II Banjararum, Kalibawang (SMAN Kalibawang)
			16. Hak Pakai P.02 tanggal 09 Juni 1999 seluas 4.640m ² terletak di Ngasem, Hargorejo, Kokap, Kulon Progo (SMAN1 Kokap)
			17. Hak Pakai P.06 tanggal 24 Juli 1998 seluas 9.930m ² terletak di Banguncipto, Sentolo, Kulon Progo (SMAN 1 Lendah)
4	Kabupaten Gunungkidul	-	
5	Kabupaten Sleman	-	
	Jumlah	17 bidang	

Sumber: BPKA DIY, 2022

3. Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara, dijelaskan bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Adapun salah satu bentuk pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu pemindahtanganan.

Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 mempertegas siklus pengelolaan BMD dalam bentuk pemindahtanganan yang terpisah dari penghapusan. Siklus pengelolaan BMD dimulai dengan perencanaan, pengadaan, dan pengelolaan, di mana pengelolaan dibagi dua, yaitu dikelola untuk keperluan tugas dan fungsi atau dikelola untuk dimanfaatkan. Jika tidak digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan tidak sedang dimanfaatkan, maka BMD wajib diserahkan kepada Pengelola Barang. Pemusnahan dan pemindahtanganan merupakan kegiatan sebelum proses penghapusan. Dengan demikian, penghapusan merupakan *ending point* dari semua siklus pengelolaan BMD yang membebaskan Pengguna Barang dan Pengelola Barang dari kewajiban untuk mengadministrasikan dan mengelola BMD. Artinya proses pemindahtanganan dan penghapusan ini memberikan dukungan terhadap proses pengelolaan BMD secara keseluruhan.

Bentuk pemindahtanganan Barang Milik Daerah meliputi:

- a. Penjualan
- b. Tukar Menukar
- c. Hibah
- d. Penyertaan Modal Pemda

Dalam rangka pemindahtanganan barang milik daerah dilakukan penilaian. Dikecualikan dari ketentuan tersebut, untuk pemindahtanganan dalam bentuk hibah. Penilaian dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar.

Dasar Pemindahtanganan Barang Milik Daerah

Masing-masing bentuk pemindahtanganan Barang Milik Daerah dilakukan untuk tujuan atau pertimbangan tertentu.

- a. Penjualan

Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:

- 1) untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan;
 - 2) secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan/atau
 - 3) sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Tukar Menukar, dilaksanakan dengan pertimbangan untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan, untuk optimalisasi barang milik daerah, dan tidak tersedia dana dalam APBD.

Proses penjualan barang milik daerah melalui tahapan penting yaitu penilaian untuk mendapatkan nilai wajar. Sesuai amanat Pasal 325 ayat (1) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemda, pemanfaatan atau pemindahtanganan.

Penilaian dalam rangka pemindahtanganan barang milik daerah (dalam hal ini lelang/penjualan) dilaksanakan untuk memperoleh nilai sisa, sebagai dasar penetapan harga limit. Penilaian barang milik daerah berupa bangunan dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang ditetapkan oleh Gubernur. Syarat Penilai Publik adalah Penilai selain Penilai Pemerintah yang mempunyai izin praktik Penilaian dan menjadi anggota asosiasi Penilai yang diakui oleh pemerintah.

Penilaian barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Gubernur dan dapat melibatkan Penilai yang ditetapkan Gubernur. Adapun Tim Penilai di atas adalah panitia penaksir harga yang unsurnya terdiri dari Perangkat Daerah terkait.

Pada Tahun Anggaran 2021, Pemda DIY membentuk Tim Pengelolaan Barang Milik Daerah sub kegiatan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah dengan Keputusan Gubernur Nomor 143/TIM/2021 Tahun 2021.

c. Hibah

Hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, penyelenggaraan pemerintahan pusat/pemerintahan daerah, Penyelenggaraan pemerintahan pusat/daerah termasuk hubungan antar negara, hubungan antara pemerintah pusat dan Pemda, hubungan antara Pemda dengan masyarakat/lembaga internasional, dan pelaksanaan kegiatan yang menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah pusat atau Pemda.

d. Penyertaan Modal Pemda

Penyertaan modal Pemda atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyertaan modal Pemda dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Barang milik daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara dalam rangka penugasan pemerintah; atau
- 2) Barang milik daerah lebih optimal apabila dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.

Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah melalui Penjualan dan Lelang

Pemindahtanganan Barang Milik Daerah merupakan kegiatan pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah. Bentuk pemindahtanganan barang milik daerah diatur Pasal 329 Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Selain itu, Pemda DIY juga berpedoman pada Pergub DIY No. 42 Tahun

2019 tentang Tata Cara Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah.

Sebelum masuk pada tahap pelaksanaan, proses pemindahtanganan barang milik daerah pada Pemda DIY melalui beberapa tahapan persiapan, sebagai berikut:

- 1) Verifikasi Usulan Barang Milik Daerah;
- 2) Penilaian Barang Milik Daerah; dan
- 3) Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah oleh Gubernur.

Pada Tahun Anggaran 2021, Pemda DIY melaksanakan proses pemindahtanganan dengan cara penjualan dan lelang sebanyak 10 kali, sebagai berikut:

- 1) Penjualan Barang Milik Daerah berupa Bangunan Gedung Asrama Permanen pada UPTD Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Dinas Sosial DIY, yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 356/KEP/2020 tentang Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Bangunan Gedung pada Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Dinas Sosial DIY dan SMA Negeri 1 Rongkop.
- 2) Penjualan Barang Milik Daerah berupa Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen di Jl. Kusumanegara No. 168 H Yogyakarta, yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 74/KEP/2021 tentang Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen di Jl. Kusumanegara No. 168 H Yogyakarta.
- 3) Lelang Barang Milik Daerah berupa Bangunan Gedung pada Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo, yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 268/KEP/2020 tentang Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang

Milik Daerah berupa Bangunan Gedung pada Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo, dan Keputusan Gubernur DIY Nomor 85/KEP/2021 tentang Harga Dasar Penjualan Kedua Barang Milik Daerah berupa Bangunan Gedung pada Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo.

- 4) Penjualan Ulang Barang Milik Daerah berupa Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen di Jl. Kusumanegara No. 168 H Yogyakarta, yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 74/KEP/2021 tentang Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen di Jl. Kusumanegara No. 168 H Yogyakarta. Pada penjualan pertama dinyatakan Tidak Ada Penawaran (TAP), sehingga dilakukan penjualan ulang, dan BMD dinyatakan laku terjual.
- 5) Penjualan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya dari Daftar Barang Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2021, yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 147/KEP/2021 tentang Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya dari Daftar Barang Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2021.
- 6) Lelang Kendaraan Bermotor Dinas Operasional Roda 4 dan Roda 2, yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 160/KEP/2021 tentang Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Bermotor Dinas Operasional dari Daftar Barang Pengelola, Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2021.
- 7) Penjualan Barang Milik Daerah berupa Hasil Penebangan Pohon pada Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Planjan-Baron-Tepus, yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 166/KEP/2021 tentang Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Hasil Penebangan Pohon

pada Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Planjan-Baron-Tepus di Kabupaten Gunungkidul.

- 8) Penjualan Barang Milik Daerah berupa Bongkaran Sisa Bangunan Gedung Kantor Permanen serta Peralatan dan Mesin di Jl. Sisingamangaraja No. 21 Yogyakarta, yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 277/KEP/2021 tentang Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Bongkaran Sisa Bangunan Gedung Kantor Permanen serta Peralatan dan Mesin di Jl. Sisingamangaraja No. 21 Yogyakarta.
- 9) Penjualan Barang Milik Daerah berupa Hasil Penebangan Pohon dalam rangka Peningkatan Jalan Provinsi DIY Ruas Jalan Sentolo-Nanggulan-Dekso-Klangon di Kabupaten Kulon Progo, yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 142/KEP/2021 tentang Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Hasil Penebangan Pohon dalam rangka Peningkatan Jalan Provinsi DIY Ruas Jalan Sentolo-Nanggulan-Dekso-Klangon di Kabupaten Kulon Progo.
- 10) Penjualan Barang Milik Daerah berupa Bangunan Asrama Permanen pada SMK Negeri 1 Tanjungsari, yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 317/KEP/2021 tentang Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Bangunan Asrama Permanen pada SMK Negeri 1 Tanjungsari di Rejosari, Kemadang, Tanjungsari, Gunungkidul.

Tabel 2.31. Hasil Penjualan dan Lelang Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2021

No	Kegiatan Lelang/Penjualan	Tanggal Lelang / Penjualan	Nilai/Harga Penjualan (Rp)	Keterangan
1	Penjualan BMD berupa Bangunan Gedung Asrama Permanen pada UPTD BPRSR Dinas Sosial DIY	12 April 2021	-	Tidak Ada Penawaran / TAP
2	Penjualan BMD berupa Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen di Jl. Kusumanegara No. 168 H Yogyakarta	20 April 2021	-	Tidak Ada Penawaran / TAP
3	Lelang BMD Bangunan Gedung pada Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo (sebanyak 3 unit)	22 Juni 2021	233,999,999	

No	Kegiatan Lelang/Penjualan	Tanggal Lelang / Penjualan	Nilai/Harga Penjualan (Rp)	Keterangan
4	Penjualan Ulang BMD berupa Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen di Jl. Kusumanegara No. 168 H Yogyakarta	30 Juli 2021	15,150,000	
5	Penjualan BMD berupa Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya	23 Agustus 2021	136,200,000	
6	Penjualan Kendaraan Dinas:	9 September 2021	662,472,587	
	- Roda 4 (10 unit)	dan	505,355,942	
	- Roda 2 (34 unit)	12 Oktober 2021	53,180,557	
			103,936,088	
7	Penjualan BMD berupa Hasil Penebangan Pohon pada Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Planjan-Baron-Tepus	5 Oktober 2021	75,600,000	
8	Penjualan BMD berupa Bongkaran Sisa Bangunan Gedung Kantor Permanen serta Peralatan dan Mesin di Jl. Sisingamangaraja No. 21 Yogyakarta	21 Oktober 2021	46,400,000	
9	Penjualan BMD berupa Hasil Penebangan Pohon dalam rangka Peningkatan Jalan Provinsi DIY Ruas Jalan Sentolo-Nanggulan-Dekso-Klangon di Kab. Kulon Progo	1 November 2021	-	Tidak Ada Penawaran / TAP
10	Penjualan BMD berupa Bangunan Asrama Permanen pada SMKN 1 Tanjung Sari	19 November 2021	35,000,000	
	TOTAL PENJUALAN		1,204,822,586	

Sumber: BPKA DIY, 2022

Pelaksanaan Penatausahaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah

Penghapusan Barang Milik Daerah merupakan tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya

Secara ringkas, pelaksanaan penatausahaan penghapusan Barang Milik Daerah meliputi:

- 1) Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna;

- 2) Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola; dan
- 3) Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.

Penghapusan barang milik daerah merupakan proses terakhir yang dilaksanakan dalam sistem pengelolaan barang milik daerah. Ada beberapa syarat pelaksanaan penghapusan Barang Milik Daerah, sebagai berikut:

- 1) Syarat penghapusan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan adalah sebagai berikut:
 - a) Memenuhi persyaratan teknis:
 - (1) secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak, dan tidak ekonomis apabila diperbaiki;
 - (2) secara teknis barang tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi;
 - (3) barang telah melampaui batas waktu kegunaannya/kedaluwarsa;
 - (4) barang mengalami perubahan dalam spesifikasi karena penggunaan, seperti terkikis, aus, dan lain-lain sejenisnya; atau
 - (5) berkurangnya barang dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan/susut dalam penyimpanan/pengangkutan.
 - b) Memenuhi persyaratan ekonomis, yaitu lebih menguntungkan bagi negara apabila barang dihapus, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh; atau
 - c) Barang hilang, atau dalam kondisi kekurangan perbendaharaan atau kerugian karena kematian hewan atau tanaman.
- 2) Syarat penghapusan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan adalah sebagai berikut:
 - a) barang dalam kondisi rusak berat karena bencana alam atau karena sebab lain di luar kemampuan manusia (*force majeure*);

- b) lokasi barang menjadi tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) karena adanya perubahan tata ruang kota;
- c) sudah tidak memenuhi kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas;
- d) penyatuan lokasi barang dengan barang lain milik negara dalam rangka efisiensi; atau
- e) pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis pertahanan.

Adapun proses penghapusan barang milik daerah yang telah dilaksanakan Pemda DIY pada Tahun Anggaran 2021 dengan diterbitkannya Surat Keputusan, adalah sebagai berikut:

- 1) Keputusan Gubernur DIY Nomor 283/KEP/2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Bangunan Gedung dari Daftar Barang Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo;
- 2) Keputusan Sekretaris Daerah DIY Nomor 9/SEKDA/I/2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa 1 (satu) unit Camera Digital dan 1 (satu) Unit Handy Cam pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sedayu Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY;
- 3) Keputusan Gubernur DIY Nomor 114/KEP/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur DIY Nomor 106/KEP/2020 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah yang Dihilangkan kepada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
- 4) Keputusan Sekretaris Daerah DIY Nomor 68/SEKDA/IX/2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen di Jl. Kusumanegara No. 168 H Yogyakarta dari Daftar Barang Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY;
- 5) Keputusan Sekretaris Daerah DIY Nomor 105/SEKDA/XII/2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Bangunan Asrama Permanen pada SMK Negeri 1 Tanjungsari di Rejosari, Kemadang, Tanjungsari, Gunungkidul;
- 6) Keputusan Sekretaris Daerah DIY Nomor 43/SEKDA/V/2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Hewan Ternak pada Balai

Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;

- 7) Keputusan Sekretaris Daerah DIY Nomor 7/SEKDA/I/2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Tanah, Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2021;
- 8) Keputusan Gubernur DIY Nomor 80/KEP/2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah;
- 9) Keputusan Sekretaris Daerah DIY Nomor 106/SEKDA/XII/2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Bermotor Dinas Operasional dari Daftar Barang Pengelola, Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna Barang;
- 10) Keputusan Sekretaris Daerah DIY Nomor 81/SEKDA/XI/2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya dari Daftar Barang Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2021;
- 11) Keputusan Gubernur DIY Nomor 375/KEP/2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin dari Daftar Barang Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY di Jl. Sisingamangaraja No. 21 Yogyakarta;
- 12) Keputusan Sekretaris Daerah DIY Nomor 16/SEKDA/II/2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Sisa Barang Persediaan pada Balai Pengelola Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum Dinas Perkerjaan Umum, Perumahan dan ESDM DIY;
- 13) Keputusan Sekretaris Daerah DIY Nomor 45/SEKDA/V/2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Bangunan Gedung pada SMA Negeri 1 Rongkop Kabupaten Gunungkidul;
- 14) Keputusan Gubernur DIY Nomor 17/KEP/2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Tanah, Peralatan dan Mesin dari Daftar Barang Pengelola Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2021;

- 15) Keputusan Gubernur DIY Nomor 266/KEP/2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah di Jalan Lempuyangan dan Tanah Kampung Lainnya di SMKN 1 Tanjungsari Gunungkidul dari Daftar Barang Milik Daerah.
- 16) Keputusan Gubernur DIY Nomor 81/KEP/2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Tanah dari Daftar Barang Dinas Perkerjaan Umum, Perumahan dan ESDM DIY.

Pemusnahan Barang Milik Daerah

Pada Tahun Anggaran 2021, Pemda DIY tidak melaksanakan kegiatan pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa pemusnahan.

4. Pendayagunaan Barang Daerah

a. Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) adalah pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikannya. Pemanfaatan BMD memberikan peluang bagi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Merujuk Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Perda Nomor 6 Tahun 2018 bahwa pemanfaatan barang milik daerah dilakukan melalui mekanisme sewa, pinjam pakai, bangun guna serah/bangun serah guna (BGS/BSG), kerja sama pemanfaatan (KSP), dan kerja sama penyediaan infrastruktur (KSPI).

Menindaklanjuti pemanfaatan BMD Pemda DIY telah menerbitkan Pergub DIY Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagai tindak lanjut dari Perda DIY Nomor 6 Tahun 2018. Pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan pada tahun 2021, meliputi:

- 1) Barang milik daerah berupa Tanah dan/atau Bangunan yang dimanfaatkan melalui sewa ada sebanyak 27 (dua puluh tujuh) obyek sebagaimana tersaji pada Tabel 3.26.

Tabel 2.32. Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan/atau Bangunan yang Dimanfaatkan Melalui Sewa

No	Lokasi	Penyewa	Realisasi Pendapatan Sewa 2021 (Rp)	Keterangan
1	Tanah Eks Pabrik sabut Pengasih Kulonprogo	PT. Formula Land	112.000.000	-
2	Bangunan Eks DIPARDA Lantai I Bagian Selatan	BPD	-	Pembayaran dilakukan pada tahun 2017 utk 5 th sekaligus (2017-2022)
3	Tanah di Desa Sentolo Kulon Progo	PT. Selo Adi Karto	-	Pembayaran dilakukan utk 2 th sekaligus (2020-2022)
4	Tanah dan Bangunan Eks Rumah Dinas Jl. AM Sangaji	Suprihanto, B.Sc	191.250.000	-
5	Tanah dan Bangunan eks Rumah Dinas Jl. Munggur No.32 Yogyakarta	BUKP Gondokusuman	-	Pembayaran dilakukan pada tahun 2019 utk 3 th sekaligus (2019-2022)
6	Tanah di Jl. Wisata, Babarsari, Sleman	Yayasan Dharmapala	-	Pembayaran dilakukan pada tahun 2017 utk 4 th sekaligus (2017-2021)
7	Tanah Srimulyo, Piyungan, Bantul	Pemkab Bantul	15.500.000	-
8	Tanah di Jl. D I Panjaitan 66 Yogyakarta	dr. Soedarman	-	Pembayaran dilakukan pada tahun 2018 utk 5 th sekaligus (2018-2023)
9	Tanah di Jl. Perwakilan, Wates, Kulon Progo	KPRI Sumber Rejeki	12.400.000	Pembayaran dilakukan pada tahun 2021 utk 2 tahun sekaligus (2021-2023)
10	Tanah di Hargotirto, Kokap, Kulon Progo	Kelompok Tani Tirto Manunggal	-	Pembayaran dilakukan pada tahun 2019 utk 5 tahun sekaligus (2019 - 2024)
11	Lahan Parkir Basement Malioboro Mall	PT. Yogya Indah Sejahtera	1.000.000.000	-
12	Gedung Jogja Expo Center	PT. Alam Indah Organix	2.000.000.000	-

No	Lokasi	Penyewa	Realisasi Pendapatan Sewa 2021 (Rp)	Keterangan
13	Tanah di Jangkang, Widodomartani, Ngemplak, Sleman	Pemerintah Kalurahan Widodomartani	24.000.000	
14	Tanah di Jl. Kenari Yogyakarta (Eks Gudang BLPT)	Talenta Body Repair	-	Pembayaran dilakukan pada tahun 2020 utk 2 tahun sekaligus (2020-2022)
15	Tanah di Patehan Tengah No. 25 Kraton, Yogyakarta	Suka Astuti	3.000.000	-
		Tien Setiantoro	10.000.000	-
		Roos Ani	2.600.000	-
		Sumartiningsih	4.000.000	-
		Aris Purnomo	2.000.000	-
16	Sebagian tanah dan bangunan di Karangjati, Mlati, Sleman	Badan Anti Korupsi	9.100.000	-
		Sarjuri	6.400.000	-
		PT. Avo Innovation Technology	29.600.000	Pembayaran dilakukan utk 2 tahun sekaligus (2021-2023)
17	Tanah dan bangunan di Mrican Baru, Caturtunggal, Depok, Sleman	Ir. Bambang Priambodo	36.000.000	-
18	Lahan Tambak Udang di Gadingsari, Sanden, Bantul	YB. Pratomo	-	Pembayaran dilakukan pada tahun 2016 utk 5 th sekaligus (2017-2022)
19	Tanah dan bangunan di Komplek Colombo No.56 Caturtunggal, Depok, Sleman	Aswin Kumala DS.	-	Pembayaran dilakukan pada tahun 2019 utk 2 th 6 bulan sekaligus (08/2019-01/2022)
20	Tanah dan bangunan di Jl. Janti (Eks Dinas Gedung Pertambangan)	PT. Anindya Mitra Internasional	312.800.000	-
21	Tanah di Sorok, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul	Muhyudi Prabowo	4.500.000	Pembayaran dilakukan utk 3 th sekaligus (2021 - 2023)
		Widodo Mulyo	1.500.000	-
22	Tanah dan bangunan di Jl. DI. Panjaitan No. 70 Mantrijeron, Suryodiningratan, Yogyakarta	Early Childhood Care and Development Resource Center (ECCD-RC)	126.000.000	Pembayaran dilakukan utk 5 th sekaligus (2021-2026)
23	Tanah dan bangunan di Komplek Griya Permata Hijau Nomor D.1	CV. Plainthing Group	43.600.000	Pembayaran dilakukan utk 2 th sekaligus (2021-2023)

No	Lokasi	Penyewa	Realisasi Pendapatan Sewa 2021 (Rp)	Keterangan
	Purwomartani, Kalasan, Sleman			
24	Tanah dan bangunan di Jl. Sriti No. 20 G Caturtunggal, Depok, Sleman	Lembaga Konsumen Yogyakarta	12.000.000	Pembayaran dilakukan utk 3 th sekaligus (2021-2024)
25	Tanah dan bangunan di Jl. Kusumanegara No. 168E Yogyakarta	LP2Desaku	16.500.000	Pembayaran dilakukan utk 2 th sekaligus (2021-2023)
26	Tanah eks Tanah Kas Desa Wates (67 Bidang Tanah)	104 Penyewa	262.917.365	-
27	Tanah dan Bangunan di Jalan Warung Boto Nomor 918	Gabungan Bridge Seluruh Indonesia	-	Pembayaran dilakukan utk 2 th sekaligus (2019-2021)

Sumber: BPKA DIY, 2022

- 2) Barang milik daerah berupa Rumah Daerah yang dimanfaatkan melalui Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Tabel 2.33. Barang Milik Daerah Berupa Rumah Daerah yang Dimanfaatkan Melalui Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

No	Lokasi	Penyewa	Realisasi Pendapatan Sewa 2021 (Rp)	Ket
1	Jl. Colombo Nomor 59 Yogyakarta	Mrabawani Ati	6.960.000	-
2	Jl. Colombo Nomor 60 Yogyakarta	Ir. Syahbenol Hasibuan	7.527.000	-
3	Jl. Colombo Nomor 61 Yogyakarta	Sugistiati	6.236.640	-
4	Jl. Janturan Nomor 29 Yogyakarta	Iwan Kurniawan, S.STPar	2.792.400	-
5	Jl. Janturan Nomor 29 A Yogyakarta	Asmita	1.396.200	-
6	Jl. Sriti Nomor 20 B Demangan, Yogyakarta	Ny. Dra. Sulistyaningsih	3.396.000	-
7	Jl. Sriti Nomor 20 C Demangan, Yogyakarta	Bambang Hermanto, SH, M.Hum	5.085.000	-
8	Jl. Bima Nomor 25 Jurugentong, Banguntapan, Bantul	Eko Fajar Laksana	3.202.560	-
9	Jl. Bima Nomor 25 A Jurugentong, Banguntapan, Bantul	Maria Kristina Budi	3.202.560	-
10	Jl. Bima Nomor 25 B Jurugentong, Banguntapan, Bantul	Dra. Mulyati Yunipratiwi, M.Si / Adjie Mardana	2.928.630	-
11	Jl. Bima Nomor 25 C Jurugentong, Banguntapan, Bantul	Drs. Djoko Aryanto, MM/M Ridwan S	1.298.950	-
12	Jl. D.I. Panjaitan No. 74 Mantrijeron, Suryodiningratan, Yogyakarta	Ny. Djaenab Murniati	6.284.000	-
13	Jl. Nyi Adisari, Pilahan, Kotagede, Yogyakarta (1)	Monika Irene Donatirin	3.811.490	-

No	Lokasi	Penyewa	Realisasi Pendapatan Sewa 2021 (Rp)	Ket
14	Jl. Nyi Adisari, Pilahan, Kotagede, Yogyakarta (2)	Jaka Surana, SE	6.071.400	-
15	Jl. Gedongan Baru I Nomor A.1 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Siti Mukaronah	2.305.050	-
16	Jl. Gedongan Baru I Nomor A.2 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Aida Kusuma Wahyuni / Arum Iswandari	3.829.050	-
17	Jl. Gedongan Baru I Nomor A.3 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Rini Setraparwati	1.581.150	-
18	Jl. Gedongan Baru I Nomor A.4 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Dwi Nugroho	2.367.600	-
19	Jl. Gedongan Baru I Nomor B.1 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Eko Supriyanto, SH	2.340.000	-
20	Jl. Gedongan Baru I Nomor B.2 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Tri Mulyadi, S. Hut, MP	2.305.050	-
21	Jl. Gedongan Baru I Nomor B.3 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Agus Dwi Anggraito / Nitis Mito	2.095.500	-
22	Jl. Gedongan Baru I Nomor B.4 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Hasan Khoiri, A.Md	3.103.200	-
23	Randubelang No.40 RT.02/RW.08 Bangunharjo, Sewon, Bantul	Saimin / Sigit Ariayanta Wibawa	2,858,400	-
24	Panggungharjo, Sewon, Bantul (1)	Suhartati	2.994.000	-
25	Panggungharjo, Sewon, Bantul (3)	Mashudi	3.043.900	-
26	Panggungharjo, Sewon, Bantul (4)	Gutik Lestarna, SPT	3.243.500	-
27	Panggungharjo, Sewon, Bantul (5)	Wahyuningsih	5.988.000	-
28	Asrama Transito, Jalan HOS Cokroaminoto Yogyakarta (3)	Sugiyanta, SIP	2.175.600	-
29	Jalan Manukan, Condongcatur, Depok, Sleman	Yasrizal, S.Sos, M.Si	1.003.800	-
30	Jumeneng, Sumberadi, Mlati, Sleman	Parjono/Zulaiha	1.738.400	-
31	Jl. Panembahan Romo Nomor 65 Prenggan, Kotagede, Yogyakarta	Dra. Rahayu Endang Pujiati	7.393.800	-
32	Jl. Podang No. 4 Caturtunggal, Depok, Sleman	Anastasia Sri Winarsi	2.537.350	-

Sumber: BPKA DIY, 2022

- 3) Barang Milik Daerah yang dioptimalkan melalui pinjam pakai sebanyak 144 obyek, yang terangkum dalam 47 perjanjian pinjam pakai, sebagai berikut:

Tabel 2.34. Barang Milik Daerah yang Dipotimalkan Melalui Pinjam Pakai

No	Lokasi	Peminjam
1.	Barang Milik daerah Pemda DIY berupa 13 bidang tanah dan 2 bangunan gedung yang terletak di Kabupaten Kulon Progo dengan rincian sebagai berikut: <i>Tanah</i>	Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

No	Lokasi	Peminjam
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanah eks Tanah Kas Desa (TKD) Sertifikat Hak Pakai (SHP) 34 Dipan, Wates; 2. Tanah eks TKD SHP 35 Dipan, Wates; 3. Tanah eks TKD SHP 37 Dipan, Wates; 4. Tanah eks TKD SHP 39 Dipan, Wates; 5. Tanah eks TKD SHP 77 Punukan, Wates; 6. Tanah eks TKD SHP 90 Punukan, Wates; 7. Tanah eks TKD SHP 91 Mutihan, Wates; 8. Tanah eks TKD SHP 92 Kedungdowo, Wates; 9. Tanah eks TKD SHP 93 Durungan, Wates; 10. Tanah eks TKD SHP 94 Durungan, Wates; 11. Tanah eks TKD SHP 107 Kedunggong, Wates; 12. Tanah SHP 14 Pengasih, Pengasih; 13. Tanah SHP 112 di Jl. Tentara Pelajar, Wates. <p><i>Bangunan</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bangunan gedung Kantor Permanen di Jl. Tentara Pelajar Wates; 2. Bangunan gedung tempat kerja lainnya di Jl. Tentara Pelajar, Wates. 	
2.	<p>Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa tanah yang terletak di Kabupaten Kulon Progo dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanah SHP 1 terletak di Hargorejo, Kokap, Kulon Progo; 2. Tanah SHP 1 terletak di Bantar Kulon, Banguncipto, Sentolo, KP; 3. Tanah SHP 1 terletak di Karangsewu, Galur, Kulon Progo; 4. Tanah SHP 1 terletak di Karangsewu, Galur, Kulon Progo; 5. Tanah SHP 5 terletak di Kulwaru, Wates, Kulon Progo; 6. Tanah SHP 8 terletak di Jl. Sugiman, Gang Bisma, Margosari, Pengasih, Kulon Progo; 7. Tanah SHP 10 terletak di Sugiman, Gang Bisma, Margosari, Pengasih, Kulon Progo; 8. Tanah SHP 7 terletak di Jalan Khudori Nomor 49, Wates, Kulon Progo; 9. Tanah SHP 26 terletak di Jalan Kweni, Wates, Wates, Kulon Progo; 10. Tanah SHP 40 terletak di Hargotirto, Kokap, Kulon Progo; 	Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
3.	<p>Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa sebidang tanah yang terletak di Punukan, Kelurahan Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, seluas 62.663 m², sesuai dengan sertifikat Hak Pakai Nomor P.00089 Seri AS 12613 tanggal 13 Desember 2006.</p>	Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
4.	<p>Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagian tanah Pemda DIY sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor P.3/Kpr, Nomor Seri B.8302803 tanggal 17 Juni 1988 dengan luas ± 2.376 m² dari luas keseluruhan 6.775 m², terletak di Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Keparakan, Kemantren Mergangsan, Kota Yogyakarta; 2. Kendaraan Operasional Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T Luxury tahun 2013 Nomor Polisi: AB 1390 UH Nomor Rangka: MHFXW42G4D2276646, Nomor Mesin: 1TR7616020, Warna: Hitam Metalik. 	Kanwil BPN DIY
5.	<p>Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten Bantul dengan rincian sebagai berikut:</p> <p><i>Tanah</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanah SHP 2 terletak di Wijirejo, Pandak, Bantul; 2. Tanah SHP 1 terletak di Wijirejo, Pandak, Bantul; 	Pemerintah Kabupaten Bantul

No	Lokasi	Peminjam
3. Tanah SHP 1 terletak di Argorejo, Sedayu, Bantul; 4. Tanah SHP 3 terletak di Murtigading, Sanden, Bantul; 5. Tanah SHP 5 terletak di Murtigading, Sanden, Bantul; 6. Tanah SHP 6 terletak di Murtigading, Sanden, Bantul; 7. Tanah SHP 105 terletak di Timbulharjo, Sewon, Bantul; 8. Tanah SHP 1 terletak di Timbulharjo, Sewon, Bantul; 9. Tanah SHP 5 terletak di Srigading, Sanden, Bantul; 10. Tanah SHP 1 terletak di Sendangsari, Pajangan, Bantul. <i>Bangunan</i> 1. Rumah Jaga di BBI Gesikan, Wijirejo, Pandak, Bantul; 2. Bak Penetasan di BBI Gesikan, Wijirejo, Pandak, Bantul; 3. Bak Penampungan di BBI Gesikan, Wijirejo, Pandak, Bantul.		
6.	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa Tanah yang terletak di Jalan Brigadir Jenderal Katamso, Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan, Yogyakarta seluas $\pm 1.000 \text{ m}^2$ dari seluruh luas tanah $\pm 6.775 \text{ m}^2$ sesuai dengan Sertifikat Nomor P.3/Kpr Seri B.8302803 Tanggal 17 Juni 1988.	BPS Kota Yogyakarta
7.	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa tanah SHP 07 terletak di Karangduwet, Paliyan, Gunungkidul.	Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
8.	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa tanah yang terletak di Kabupaten Gunungkidul dengan rincian sebagai berikut: 1. Tanah SHP 00001 terletak di Giricahyo, Purwosari, Gunungkidul; 2. Tanah SHP 00002 terletak di Giricahyo, Purwosari, Gunungkidul; 3. Tanah SHP 00004 terletak di Giricahyo, Purwosari, Gunungkidul; 4. Tanah SHP 00003 terletak di Giricahyo, Purwosari, Gunungkidul; 5. Tanah SHP 00002 terletak di Ngestirejo, Tanjungsari, Gunungkidul; 6. Tanah SHP 00003 terletak di Ngestirejo, Tanjungsari, Gunungkidul; 7. Tanah SHP 00001 terletak di Ngestirejo, Tanjungsari, Gunungkidul; 8. Tanah SHP 00005 terletak di Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul; 9. Tanah SHP 00003 terletak di Kemadang, Tanjungsari, Gunungkidul; 10. Tanah SHP 00002 terletak di Kemadang, Tanjungsari, Gunungkidul; 11. Tanah SHP 8 dan bangunan terletak di Semin, Semin, Gunungkidul; 12. Tanah SHP 03 terletak di Semanu, Semanu, Gunungkidul; 13. Tanah SHP 04 terletak di Bandung, Playen, Gunungkidul; 14. Tanah SHP 04 terletak di Putat, Patuk, Gunungkidul; 15. Tanah SHP 1 terletak di Sumberejo, Semin, Gunungkidul; 16. Tanah SHP 9 terletak di Kepek, Wonosari, Gunungkidul 17. Sebagian tanah terletak di Kedung Keris, Nglipar, Gunungkidul seluas 1.825 m^2 ; 18. Tanah di Ngalenggeran, Patuk, Gunungkidul.	Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
9.	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kota Yogyakarta dengan rincian sebagai berikut: 1. Tanah SHP 47 terletak di Jl Veteran, Muja-Muju, Umbulharjo, Yogyakarta; 2. Tanah SHP 8 terletak di Jl Kyai Mojo, Bener, Tegalrejo, Yogyakarta; 3. Tanah SHP 3 terletak di Jalan Notowinatan PA II/437, Gunungketur, Pakualaman, Yogyakarta; Bangunan yang terletak di Jalan Notowinatan PA II/437, Gunungketur, Pakualaman, Yogyakarta.	Pemerintah Kota Yogyakarta

No	Lokasi	Peminjam
10.	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa Sebagian bangunan/gedung dengan rincian sebagai berikut: 1. Sebagian bangunan gedung seluas $\pm 123 \text{ m}^2$ terletak di Jalan Malioboro Nomor 14 Yogyakarta; 2. Sebagian bangunan gedung seluas $\pm 123 \text{ m}^2$ terletak di lantai 2 sisi utara eks Kantor Satuan Polisi Pamong Praja DIY terletak di Jalan Malioboro Nomor 14 Yogyakarta.	Sekber Kartamantul
11.	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa Tanah yang terletak di Jalan Suryodiningratan Nomor 8 Yogyakarta, dengan luas 8.049 m^2 sesuai Sertifikat Nomor P.13/Syd, Seri AD.734426, Tanggal 5 April 1994	Institut Seni Indonesia Yogyakarta,
12.	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa tanah yang terletak di Kabupaten Sleman dengan rincian sebagai berikut: 1. Tanah SHP 1 terletak di Sumberagung, Moyudan, Sleman; 2. Tanah SHP 1 terletak di Margodadi, Seyegan, Sleman; 3. Tanah SHP 3 terletak di Pandowoharjo, Sleman; 4. Tanah SHP 4 terletak di Pandowoharjo, Sleman; 5. Tanah SHP 1 terletak di Bimomartani, Ngemplak, Sleman; 6. Tanah SHP 1 terletak di Kalitirto, Berbah, Sleman; 7. Tanah SHP 44 terletak di Hargobinangun, Pakem, Sleman; 8. Tanah SHP 16 terletak di Jl. Pangukan, Beran Kidul, Tridadi, Sleman; 9. Tanah SHP 19 terletak di Gatak, Bokoharjo, Prambanan, Sleman.	Pemerintah Kabupaten Sleman
13.	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa tanah dan Peralatan Mesin dengan rincian sebagai berikut: <i>Tanah</i> 1. Tanah SHP 66 terletak di Jalan Ipda Tut Harsono 47 Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta; 2. Tanah SHP 67 terletak di Jalan Ipda Tut Harsono 47 Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta. 3. Tanah SHP 68 terletak di Jalan Ipda Tut Harsono 47 Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta; <i>Peralatan Mesin</i> 1. Kursi besi/ metal (kursi kerja sekretaris) 1 unit; 2. Meja Rapat 19 unit; 3. Kursi Rapat 56 unit; 4. Kursi Putar 3 unit; 5. Kursi Lipat 11 unit; 6. Sofa 1 unit; 7. Taplak meja 18 unit; 8. <i>Notebook</i> Accer 5 unit.	Komisi Pemilihan Umum DIY
14.	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa 5 kendaraan roda empat dan 2 kendaraan roda 2.	Komisi Pemilihan Umum DIY
15.	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa Tanah dan Kendaraan roda empat dengan rincian sebagai berikut: 1. Tanah yang terletak di Jalan Brigjen Katamso, Keparakan, Mergangsan, Yogyakarta seluas $\pm 1.380 \text{ m}^2$ dari luas keseluruhan $\pm 6.775 \text{ m}^2$ sesuai Sertifikat Nomor P.3/Kpr Seri B.8302803 Tanggal 17 Juni 1988.	BNNP DIY

No	Lokasi	Peminjam
2.	Minibus/MP, Suzuki/GC 415 V-APVSTD 2008/1493CC/AB 1660 UA/MHYGDN41V8J-300414/G15AID 165659/ F730905/Warna Merah berlogo BNN.	
16.	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa kendaraan dinas operasional jenis minibus nomor polisi AB 1870 UA, Toyota Kijang Innova G tahun 2005, isi silinder 1.998 cc, warna hitam metalik, nomor rangka MHFXW42G152056978, Nomor mesin IR-6195917, Nomor BPKB 77734031.	Pangkalan TNI AL Yogyakarta
17.	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa Tanah yang terletak di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman dengan rincian sebagai berikut: 1. Tanah yang terletak di Gesikan, Kelurahan Wijirejo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul seluas $\pm 850 \text{ m}^2$ dari seluruh luas tanah $\pm 47.597 \text{ m}^2$ sesuai dengan Sertifikat Nomor P.1 Seri B.8578015 Tanggal 1 Juni 1988; 2. Tanah yang terletak di Desa Gatak, Kelurahan Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman seluas $\pm 264 \text{ m}^2$ dari seluruh luas tanah $\pm 2.244 \text{ m}^2$ sesuai dengan Sertifikat Nomor P.19 Seri AR.721913 Tanggal 1 Juni 2001.	Detasemen Zeni Bangunan 2/IV Yogyakarta
18.	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa tanah dan bangunan dengan luas tanah 2.142 m^2 dan luas bangunan 845 m^2 yang terletak di Jalan Faridan Muridan Noto Nomor 21 Kota Baru Yogyakarta, sesuai dengan sertifikat Nomor 81 Seri BB 172946 tanggal 20 Mei 2009.	Badan Siber dan Sandi Negara
19.	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa tanah seluas 306 m^2 yang terletak di Komplek Colombo No 57 Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.	BPS Provinsi DIY
20.	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa: 1. Tanah yang terletak di Jalan DI Panjaitan No 49, Kelurahan Mantrijeron, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta seluas $\pm 1.662 \text{ m}^2$ dari luas keseluruhan $\pm 2.915 \text{ m}^2$ berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor P.00014 Seri AZ 043039 tanggal 18 April 2007 atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 2. Bangunan Gedung kantor permanen dengan luas $\pm 783.75 \text{ m}^2$ dari luas keseluruhan $\pm 1.380 \text{ m}^2$.	Bawaslu DIY
21.	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa kendaraan dinas operasional jenis Minibus sebanyak 2 (dua) unit Yaitu: 1. Nomor Polisi AB 1253 UH, Merk & Type Toyota Kijang Innova G, Tahun pembuatan 2012, Isi silinder 1.998 cc, warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MHFXW42G4C2241958, Nomor Mesin 1TR7441106, Nomor BPKB 04939025; 2. Nomor Polisi AB 1255 UH, Merk & Type Toyota Kijang Innova G, Tahun pembuatan 2012, Isi silinder 1.998 cc, warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MHFXW42GXC2242368, Nomor Mesin 1TR7443972, Nomor BPKB 04939022.	Komando Resor Militer 072/Pamungkas
22.	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa kendaraan operasional dinas Toyota Camry AB 1017 UH.	Komandan Pangkalan TNI AU Adisutjipto
23.	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa kendaraan operasional dinas Nissan Terrano AB 1095 UH.	Komandan Pangkalan TNI AU Adisutjipto

No	Lokasi	Peminjam
24.	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa satu unit Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T, Hitam Metalik, Tahun 2020, Nomor Polisi: AB 1511 UH	Komando Resor Militer 072/ Pamungkas
25.	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa satu unit Toyota Camry 2.5 SV A/T, Hitam Metalik, Tahun 2020, Nomor Polisi: AB 1632 UH	Kejaksaaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta
26.	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa satu unit Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T, Hitam Metalik, Tahun 2020, Nomor Polisi: AB 1533 UH	Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
27.	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa Tanah yang terletak di Dusun Gatak, Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman seluas $\pm 1.298 \text{ m}^2$ dari luas keseluruhan $\pm 2.244 \text{ m}^2$ sesuai dengan Sertifikat Nomor P.19 Seri AR. 721913 Tanggal 01 Juni 2001.	Kalurahan Bokoharjo, Prambanan
28.	Barang Milik Daerah DIY berupa 3 (tiga) tanah dan 1 (satu) unit bangunan yang berlokasi di Kelurahan Gedongkiwo, Kemantren Mantrijeron, Kota Yogyakarta, dengan rincian sebagai berikut: 1. tanah seluas 162 m^2 , sesuai SHP No.P.5/Gdk; 2. tanah seluas 181 m^2 , sesuai SHP No.P.7/Gdk; 3. tanah seluas 127 m^2 , sesuai SHP No.P.6/Gdk; 4. satu unit bangunan seluas $\pm 64 \text{ m}^2$ yang berdiri di atas tanah seluas 162 m^2 .	Pemerintah Kota Yogyakarta
29.	Barang Milik Daerah DIY berupa 1 (satu) bidang tanah milik Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta dengan luas 8.472 m^2 yang terletak di Jalan Malioboro Nomor 56, Kelurahan Suryatmajan, Kemantren Danurejan, Kota Yogyakarta. Tercatat pada pengelola barang dengan nomor kode barang 01.03.01.01.01.04.001 dan nomor register 000001.	Pemerintah Kota Yogyakarta
30.	Sebagian tanah milik Pemda DIY yang terletak di Desa Hargobinangun, Pakem, Sleman dengan luas $+ 30.000 \text{ m}^2$ dari total luas keseluruhan 128.000 m^2 sesuai sertifikat Hak Pakai Nomor 1 seri B.2624929 tanggal 9 Juli 2009.	Pemerintah Kabupaten Sleman
31.	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa Tanah yang terletak di Jalan Kusumanegara Nomor 9 Yogyakarta seluas $\pm 646,35 \text{ m}^2$ ($41,7 \text{ m} \times 15,5 \text{ m}$) dari luas keseluruhan 6.064 m^2 sesuai dengan sertifikat Nomor P.76/Smk tanggal 19 April 1995.	Balai Pemerintah Desa di Yogyakarta
32.	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa Serat <i>Fiber Optic</i> sebanyak 12 <i>core</i> dari 96 <i>core</i> yang telah terbangun.	Pemerintah Kota Yogyakarta
33.	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa bangunan parkir dengan tipe knockdown yang bisa menampung 40 unit bus dan 2.600 unit kendaraan roda dua dan bangunan kios pedagang kaki lima sebanyak 144 unit	Pemerintah Kota Yogyakarta
34.	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa sebagian tanah yang terletak di Jalan Kyai Mojo, Pingit, Yogyakarta dengan luas 8.877 m^2 dari luas keseluruhan 29.841 m^2 sesuai Sertifikat Nomor P.5/Bnr Seri B 8972861 Tanggal 26 September 1987.	Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan.
35.	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa Sebagian tanah dan bangunan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY yang terletak di Jalan Argolubang Nomor 19 Kelurahan Baciro Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta seluas $\pm 100 \text{ m}^2$ untuk Resort KSDA Kota Yogyakarta.	Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta

No	Lokasi	Peminjam
36.	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa sebagian seluas 560 m ² dari luas tanah 2.411 m ² sesuai dengan sertifikat Nomor 00027 Seri AX 705701 tanggal 31 Mei 2007 dan bangunan seluas 120 m ² yang terletak di Jalan Retno Dumilah Nomor 23 C Kotagede Yogyakarta.	Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta
37.	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa tanah dan bangunan kantor, terletak di Jalan Sisingamangaraja No 21 Brontokusuman, Mergangsan, Kota Yogyakarta, dengan rincian sebagai berikut: 1. Tanah Hak Pakai Pemda DIY dengan luas 4.832 m ² , sertifikat hak pakai nomor 53 tanggal 01 September 2020; 2. Bangunan gedung kantor permanen bertingkat dengan luas 1.012 m ² .	Badan Intelejen Negara
38	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa tanah dan bangunan terletak di Jalan Besi-Jangkang, Dusun Klidon, Desa Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman dengan rincian sebagai berikut: 1. Tanah bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah) LBK Klidon, seluas 1.927 m ² dengan sertifikat hak pakai nomor P.12 seri AX 7853 tanggal 17 April 2020; 2. 10 unit bangunan terdiri atas pagar keliling, bangunan bengkel, bangunan tempat ibadah permanen, gedung pos jaga permanen, bangunan gedung tempat kerja (4 unit), rumah negara dan asrama permanen.	Pemerintah Kabupaten Sleman
39	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa dua bidang tanah terletak di Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta dengan rincian sebagai berikut: 1. Tanah Hak Pakai Pemda DIY seluas 187 m ² sesuai sertifikat hak pakai nomor 00073 seri BO 408799 tanggal 28 Februari 2019; 2. Tanah Hak Pakai Pemda DIY seluas 401 m ² sesuai sertifikat hak pakai nomor 00074 seri BO 408800 tanggal 26 Februari 2019.	BPCB Yogyakarta
40	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa tanah dan bangunan rumah daerah, terletak di Jalan Nyi Adisari Nomor 4 Pilahan, rejoywinangun, Kotagede, Kota Yogyakarta dengan rincian sebagai berikut: 1. Sebagian Tanah Hak Pakai Pemda DIY seluas ± 250 m ² dari luas keseluruhan 2.411 m ² , berdasarkan sertifikat hak pakai nomor 00027 Seri AX 705701 tanggal 31 Mei 2007; 2. Bangunan rumah negara luas ± 70 m ² .	Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta
41	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa Tanah Bangunan Kantor, seluas + 5.000 m ² dari luas keseluruhan 30.000 m ² hak pakai Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 tanggal 21 Maret 1985 yang terletak di Bromonilan, Purwomartani, Kalasan, Sleman.	Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta
42	Barang Milik Daerah berupa tanah seluas ±694 m ² dari luas keseluruhan 5.800 m ² sesuai sertifikat hak pakai nomor 166 seri AX.216169 tanggal 17 April 2006. Terletak di Kalurahan Maguwoharjo, Depok, Sleman.	Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan RI.
43	Barang Milik Daerah berupa bangunan gedung Wisma Tamu Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Dinas Sosial DIY di Dusun Drono, Kalurahan Tridadi, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman dengan luas bangunan 120 m ² .	Pemerintah Kabupaten Sleman.

Sumber: BPKA DIY, 2022

- 4) BMD berupa Tanah dan/atau bangunan yang dimanfaatkan melalui bentuk Bangun Guna Serah sebanyak tiga bidang, yaitu Tanah di Jl. Malioboro dengan PT. Yogya Indah Sejahtera (YIS) selama 30 tahun, dengan kontribusi pada tahun 2020 sebesar Rp833.000.000,00 sesuai dengan:
- a) Akta Perjanjian Kerja sama Kontrak Bagi Tempat Usaha dan Kontrak Bagi Keuntungan Nomor 53.
 - b) Addendum Perjanjian Bersama Kontrak Bagi Tempat Usaha dan Kontrak Bagi Keuntungan antara Pemda DIY dengan PT. Yogya Indah Sejahtera dalam pembangunan dan pengelolaan Malioboro Hotel di Jl. Malioboro Yogyakarta tanggal 12 September 1992 Nomor 665.2/3076 tanggal 8 Desember 1993.
 - c) Addendum Perjanjian Bersama Kontrak Bagi Tempat Usaha dan Kontrak Bagi Keuntungan antara Pemda DIY dengan PT. Yogya Indah Sejahtera dalam pembangunan dan pengelolaan Malioboro Hotel di Jl. Malioboro Yogyakarta tanggal 12 September 1992 Nomor 199/KPTS/1998 tanggal 14 Agustus 1998.

b. Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Daerah

1) *Rehabilitasi Rumah Daerah*

Kegiatan Rehabilitasi Rumah Dinas digunakan untuk Rumah Dinas yang terletak di Jurugentong Nomor 25 A Yogyakarta dan 3 Rumah Dinas yang terletak di Komplek Asrama Transito dengan Pagu Anggaran Rp175.069.500,00 oleh CV. Kuncup Mekar dengan realisasi anggaran sebesar Rp173.508.500,00.

2) *Pembersihan dan Penataan Lahan*

Kegiatan Pembersihan dan Penataan Lahan dilakukan untuk Barang Milik Daerah yang terletak di Tanah di Kawasan Jogja Expo Center, Tanah di Jalan Malioboro Nomor 56 Yogyakarta dan Tanah yang terletak di Jalan Parangtritis Km.7,5 Timbulharjo, Sewon, Bantul dengan Pagu Anggaran Rp160.000.000,00 rehabilitasi dilakukan

oleh CV. Bima Karya dengan realisasi anggaran sebesar Rp159.989.000,00.

3) *Penjaminan Barang Milik Daerah*

Dalam rangka pengamanan BMD, Pemda DIY menyelenggarakan asuransi barang milik daerah. Pada APBD tahun 2021 tersedia anggaran sebesar Rp1.300.000.000,00 untuk sub kegiatan pengamanan barang milik daerah yang dilaksanakan dalam bentuk asuransi barang milik daerah. Pemilihan penyedia asuransi dilaksanakan dengan dengan cara tender oleh Balai Layanan Pengadaan (BLP), dengan rincian sebagai berikut:

- a) Asuransi Kendaraan Roda 4 ke atas milik Pemda DIY, dimenangkan oleh PT. Asuransi Sinar Mas dengan pertanggungan berupa 240 unit kendaraan dengan pertanggungan *comprehensive* dan 74 unit kendaraan dengan pertanggungan *Total Loss Only* dengan nilai premi sebesar Rp638.100.000,00 untuk masa pertanggungan 21 Juli 2021 sampai dengan 21 Juli 2022;

Asuransi Kebakaran dan Gempa Bumi Gedung Kantor Milik Pemda DIY, dimenangkan oleh PT. Asuransi Sinar Mas. Terdapat 102 unit bangunan yang di asuransikan terbagi menjadi: 2 unit bangunan dengan asuransi kebakaran (*flexas*), Gempa Bumi dengan Perluasan *Riots, Strikes, Malicious Damage and Civil Commotion* (RSMDCC), 20 unit bangunan dengan asuransi Kebakaran (*flexas*) dan Gempa Bumi dan 80 unit bangunan dengan asuransi kebakaran (*flexas*). Nilai premi sebesar Rp548.556.315,00 untuk masa pertanggungan 21 Juli 2020 sampai dengan 21 Juli 2021.

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

A. TINGKAT KETERCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMDA

Pada dokumen RPJMD DIY Tahun 2017-2022 terdapat 8 sasaran dengan 14 indikator kinerja sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemda DIY. Capaian indikator tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemda DIY

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020	Target RKPDP 2021	Target RPJMD 2021	Realisasi 2021	% Capaian RKPDP 2021	% Capaian RPJMD 2021
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka Indeks	79,97	80,93	81,40	80,22	99,12	98,55
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka Indeks	73,59	70,19	70,22	74,73	106,47	106,27
3	Indeks Gini	Angka Indeks	0,437	0,4335 - 0,4188	0,3705	0,436	99,42	83,00
4	Persentase Angka Kemiskinan	Persen	12,80	12,86 - 10,84	8,07	11,91	107,39	40,64
5	Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Takbenda yang Diapresiasi	Persen	11,97	11,99	11,99	12,22	101,92	101,92
6	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	- 2,69	4,08 - 6,86	5,31	5,53	135,54	104,14
7	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	Angka indeks	61,60	64,18	64,18	60,53	94,31	94,31
8	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persen	78,95	79,50	81,00	81,04	101,94	100,05
9	Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan	Persen	40,69	49,03	49,03	51,81	105,67	105,67
10	Indeks Williamson	Angka Indeks	0,453	0,464 - 0,455	0,4506	0,4504	102,93	97,03

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020	Target RKPDP 2021	Target RPJMD 2021	Realisasi 2021	% Capaian RKPDP 2021	% Capaian RPJMD 2021
11	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	100	100,00
12	Nilai Akuntabilitas Pemerintah (AKIP) 1=AA;2=A;3=BB;4=B; 5=CC;6=C;7=D	Nilai	A	A	A	AA	150	150,00
13	Persentase Capaian Program Urusan Keistimewaan	Persen	84,62	82,61	82,61	92,31	111,74	111,74
14	Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa yang Terfasilitasi Untuk Dikelola serta Dimanfaatkan	Bidang	12.437	15.188	17.619	15.335	100,97	87,04

Sumber: Bappeda DIY, 2022 (data diolah)

Dari tabel di atas terlihat capaian IKU Pemda DIY tahun 2021 jika dibandingkan dengan target RKPDP Perubahan (RKPDP) 2021 terdapat 10 indikator yang memiliki persentase capaian >100%, terdapat satu indikator dengan capaian sesuai target 100%, dan 3 indikator dengan capaian <100%, dari total 14 indikator yang ada. Sedangkan, jika dibandingkan dengan target tahun 2021 yang ada dalam RPJMD, terdapat 7 indikator yang memiliki persentase capaian >100%, satu indikator dengan capaian sesuai target 100%, dan 6 indikator dengan capaian <100% dari total 14 indikator.

Adapun 3 indikator yang tidak mencapai target yang ditetapkan dalam RPKDP 2021, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Gini, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Selanjutnya, 6 indikator yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2021, yaitu IPM, Indeks Gini, Persentase Angka Kemiskinan, IKLH, Indeks Williamson, dan Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa yang Terfasilitasi untuk Dikelola serta Dimanfaatkan. Dampak pandemi COVID-19 masih berpengaruh terhadap capaian kinerja sasaran pemda tersebut. Uraian pencapaian dari masing-masing indikator kinerja sasaran pemda yang merupakan IKU Pemda DIY, seperti tersebut di bawah ini.

1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM – Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

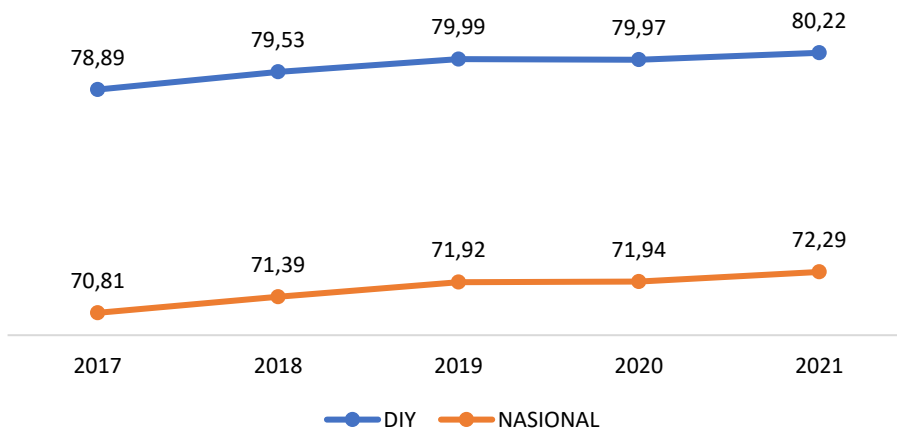
RPJMD DIY tahun 2017-2022 memuat visi Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, dijabarkan ke dalam dua misi yaitu Meningkatnya Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berkeadaban serta Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis. Salah satu sasaran yang ingin dicapai pada misi Meningkatnya Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berkeadaban yaitu Meningkatnya Derajat Kualitas SDM salah satunya diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

IPM merupakan indikator untuk melihat kualitas penduduk DIY yang diukur dengan Umur Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan Pengeluaran Riil per Kapita. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dapat digunakan untuk mengkaji perkembangan pembangunan manusia dalam suatu wilayah maupun perbandingan antar wilayah. IPM merupakan indikator yang sangat berguna untuk melihat perkembangan capaian pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu tingkat kecepatan dan status pencapaian.

IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks dilakukan melalui proses standarisasi menggunakan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks. IPM merupakan indeks komposit yang merangkum tiga dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar kehidupan layak (*decent standard of living*). Aspek umur panjang dan hidup sehat diukur dengan indikator Usia Harapan Hidup saat lahir (UHH). Dimensi pengetahuan direpresentasikan dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Sedangkan

standar hidup layak dapat didekati dengan pengeluaran per kapita riil disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

Angka IPM DIY beserta komponen-komponennya cenderung meningkat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Capaian IPM sempat turun di tahun 2020 karena terjadi pandemi COVID-19, namun meningkat kembali di tahun 2021. Capaian IPM DIY sampai tahun 2021 menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat. Posisi IPM DIY pada tahun 2021 berada dalam kategori “sangat tinggi” (berdasarkan kriteria dari *United Nations Development Programme* (UNDP)).

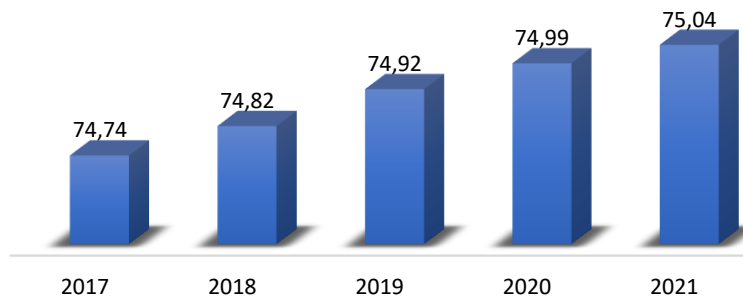


Gambar 3.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DIY dan Indonesia Tahun 2017-2021
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022 (data diolah)

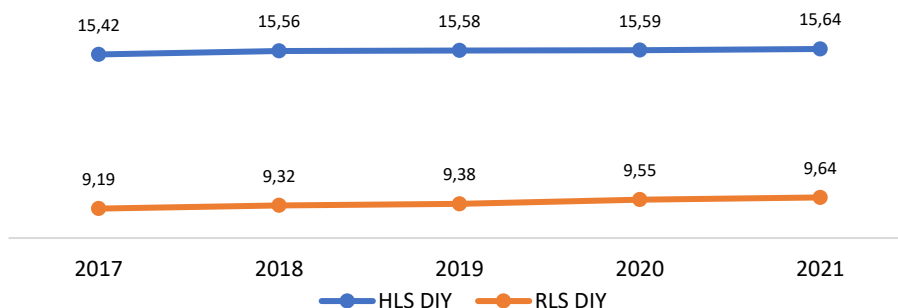
Capaian pembangunan manusia DIY sampai dengan tahun 2021 berada pada level 80,22. Secara umum, capaian ini terus mengalami peningkatan selama periode 2017 hingga 2021. IPM DIY meningkat dari 78,89 pada tahun 2017 menjadi 80,22 pada tahun 2021. Perkembangan ini menggambarkan kualitas pembangunan manusia yang semakin membaik. Level IPM DIY selama periode 2017-2020 selalu berada dalam kategori IPM tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$), sedangkan pada tahun 2021 meningkat menjadi kategori sangat tinggi ($\text{IPM} > 80$). Dibandingkan dengan level IPM nasional, capaian IPM DIY tercatat selalu lebih tinggi dan menempati peringkat kedua tertinggi di antara 34

provinsi di Indonesia. Hal ini menunjukkan capaian pembangunan manusia DIY lebih berkualitas dibandingkan dengan capaian rata-rata nasional. Capaian IPM DIY sangat ditentukan oleh ketiga dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Ketiga dimensi yang paling esensial tersebut secara bertahap semakin meningkat kualitasnya. Hal ini terlihat dari perkembangan empat indikator yang mencirikan ketiga dimensi, yakni usia harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan yang semakin membaik dari tahun ke tahun.

Tingginya IPM DIY didorong oleh semua indikator penyusun yang memiliki capaian cukup tinggi. Angka harapan hidup dan harapan lama sekolah memberi sumbangan terbesar terhadap capaian IPM DIY. Usia Harapan Hidup saat lahir (UHH) DIY cukup tinggi dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat DIY semakin baik. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) juga menunjukkan tren yang terus meningkat. Hal ini menggambarkan kualitas modal manusia yang semakin membaik, sehingga diharapkan akan berdampak pada peningkatan produktivitas perekonomian daerah tersebut.



Gambar 3.2. Perkembangan Usia Harapan Hidup saat lahir (UHH) DIY Tahun 2017-2021
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022 (data diolah)



Gambar 3.3. Perkembangan HLS dan RLS DIY Tahun 2017-2021
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022 (data diolah)

Ditinjau dari capaian IPM kabupaten/kota di DIY menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta selalu mempunyai nilai IPM tertinggi dibandingkan dengan empat kabupaten lainnya di DIY.

Tabel 3.2. IPM DIY dan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2017-2021

Kabupaten/Kota	IPM				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Bantul	78,67	79,45	80,01	80,01	80,28
Kabupaten Sleman	82,85	83,42	83,85	83,84	84,00
Kabupaten Gunungkidul	68,73	69,24	69,96	69,98	70,16
Kabupaten Kulon Progo	73,23	73,76	74,44	74,46	74,71
Kota Yogyakarta	85,49	86,11	86,65	86,61	87,18
DIY	78,89	79,53	79,99	79,97	80,22

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Pencapaian pembangunan manusia pada tingkat kabupaten/kota di DIY selama tahun 2021 mengindikasikan perkembangan pembangunan manusia yang sangat baik karena kabupaten/kota di DIY kini sudah berstatus tinggi dan sangat tinggi. Capaian IPM menurut wilayah sangat bervariasi, yang berarti bahwa pola pembangunan antar wilayah di DIY masih timpang. Level IPM tertinggi dicapai Kota Yogyakarta dan diikuti oleh Sleman serta Bantul. Ketiga daerah tersebut memiliki IPM di atas level DIY dan sudah berada pada kategori “sangat tinggi” (IPM>80). IPM Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul berada dalam kategori “tinggi” (IPM antara 70-80). IPM Gunungkidul tercatat paling rendah namun telah menunjukkan peningkatan. Tahun 2020 capaian IPM Gunungkidul pada kategori “sedang”, namun pada tahun 2021 telah meningkat pada kategori “tinggi”.

Perkembangan indikator penyusun IPM menurut kabupaten/kota di DIY cukup bervariasi. Pada tahun 2021, dimensi umur yang panjang dan sehat (indikator UHH) tertinggi di Kulon Progo (75,27 tahun) dan terendah di Bantul (73,89 tahun). Pada dimensi pengetahuan, capaian Gunungkidul, Kulon Progo dan Bantul masih cukup tertinggal dibanding Sleman dan Kota Yogyakarta. Pada indikator HLS penduduk usia 7 tahun ke atas Gunungkidul sebesar 12,98 tahun, Kulon Progo sebesar 14,27 tahun, dan Bantul sebesar 15,38 tahun. Ketiga kabupaten tersebut berada di bawah rata-rata HLS provinsi. HLS Sleman (16,74 tahun) dan Kota Yogyakarta (17,60 tahun) sudah di atas rata-rata provinsi sekaligus tertinggi. Begitu juga, rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas terendah sebesar 7,30 tahun berada di Gunungkidul, Kulon Progo beserta Bantul juga tergolong rendah di bawah rata-rata provinsi. RLS tertinggi di Kota Yogyakarta hingga mencapai 11,72 tahun. Sementara, capaian komponen pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan terendah sebesar Rp9,50 juta per tahun di Gunungkidul.

Tabel 3.3. IPM Kabupaten/ Kota di DIY menurut Komponen 2021

Komponen	UHH (Tahun)	HLS (Tahun)	RLS (Tahun)	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (Ribu rupiah)
Kabupaten Kulon Progo	75,27	14,27	9,02	10.069
Kabupaten Bantul	73,89	15,38	9,57	15.545
Kabupaten Gunungkidul	74,19	12,98	7,30	9.505
Kabupaten Sleman	74,92	16,74	10,92	16.060
Kota Yogyakarta	74,76	17,60	11,72	18.801
DIY	75,04	15,64	9,64	14.111

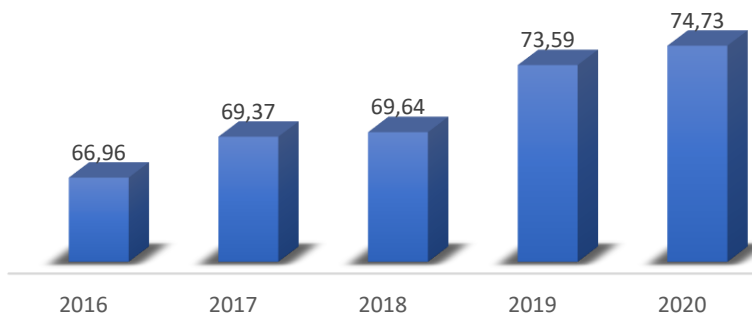
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Dari capaian indikator kinerja IPM pada tahun 2021 yang sebesar 80,22, jika dibandingkan dengan target pada RKPDP 2021 persentase capaiannya sebesar 99,12%. Sedangkan, jika dibandingkan dengan target tahun 2021 yang ada di RPJMD persentase capaian sebesar 98,55%. Artinya capaian tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPDP 2021 maupun RPJMD.

2. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM – Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Kesetaraan gender sebagai salah satu tujuan pembangunan global membutuhkan aksi nyata dalam meraihnya. Salah satu aksi yang terus diupayakan di DIY adalah meningkatkan partisipasi perempuan khususnya pada jabatan strategis di lembaga eksekutif dan legislatif. Peran aktif perempuan pada jabatan tersebut diharapkan akan menghasilkan kebijakan yang lebih responsif gender sehingga diharapkan mampu membawa peluang perubahan terwujudnya kesetaraan gender di DIY.

Dalam menilai sejauh mana keberhasilan pemberdayaan gender, digunakan sebuah indeks komposit yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Berbeda dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG), IDG lebih fokus untuk melihat sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif perempuan di bidang politik, pengambilan keputusan dan ekonomi.



Gambar 3.4. Tren Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender di DIY Tahun 2016-2020
Sumber: DP3AP2 DIY, 2021

Sejak tahun 2017 Pemberdayaan Gender di Yogyakarta selalu mengalami peningkatan meskipun belum menunjukkan tren yang maksimal karena dibandingkan IDG Nasional ternyata posisi DIY masih dibawah rata-rata angka nasional. Tabel di atas menunjukkan bahwa IDG DIY pada tahun 2020 juga mengalami peningkatan, yaitu sebesar 1,14% dari 73,59 di tahun 2019 menjadi 74,73. Meski terjadi peningkatan, IDG DIY masih berada dibawah

rata-rata nasional yang juga mengalami peningkatan di tahun 2020 menjadi 75,57. Peningkatan IDG diharapkan berkontribusi pada semakin menguatnya dukungan pada peningkatan kualitas hidup perempuan melalui kebijakan, program dan pembangunan yang responsif gender.

Apabila dilihat dari perbandingan antar wilayah kabupaten di DIY dalam IDG DIY Tahun 2020 terlihat adanya perbedaan antar wilayah yang signifikan. Capaian IDG tahun 2020 tertinggi ada di Sleman yakni sebesar 81,25; sedangkan capaian IDG terendah terjadi pada Kabupaten Bantul yakni sebesar 64,78. Adapun perbandingan IDG antar kabupaten/kota dibandingkan dengan provinsi dan angka nasional dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.4. IDG Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2018-2020

Kab/Kota	2018	2019	2020
Kulon Progo	63,36	71,68	71,74
Bantul	61,01	65,29	64,78
Gunungkidul	67,45	75,34	75,53
Sleman	78,47	80,40	81,25
Kota Yogyakarta	80,65	71,06	71,05
DI. Yogyakarta	69,64	73,59	74,73
Nasional	72,10	75,24	75,57

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

Pada tahun 2020 tampak bahwa Kabupaten Sleman menjadi satu-satunya wilayah di DIY dengan nilai capaian IDG di atas rata-rata nasional. Sementara, semua kabupaten dan kota lainnya berada di bawah rata-rata nasional. Untuk memahami permasalahan terkait dengan partisipasi perempuan yang menyebabkan IDG DIY berada di bawah rata-rata nasional, dapat kita bedah Indeks ini kedalam indikator penyusunnya yaitu: 1) Keterlibatan Perempuan di Parlemen; 2) Perempuan Sebagai Tenaga Profesional; dan 3) Sumbangan Pendapatan Perempuan.

Tabel 3.5. Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen, Perempuan Sebagai Tenaga Profesional, dan Sumbangan Pendapatan Perempuan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2018-2020

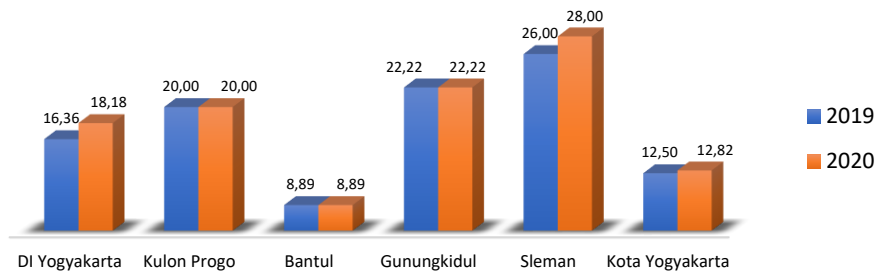
Kab/Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)			Perempuan Sebagai Tenaga Profesional (%)			Sumbangan Pendapatan Perempuan (%)		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Kulon Progo	17,50	20,00	20,00	56,95	51,28	52,13	33,91	34,15	34,09
Bantul	6,67	8,89	8,89	40,46	51,39	55,37	38,75	38,76	38,75
Gunungkidul	13,33	22,22	22,22	55,74	44,52	46,13	39,66	39,74	39,90
Sleman	24,00	26,00	28,00	45,51	48,41	52,12	38,44	38,52	38,46
Kota Yogyakarta	25,00	12,50	12,82	55,79	52,34	53,67	44,19	44,65	44,63
DI. Yogyakarta	12,73	16,36	18,18	47,70	49,65	53,69	40,78	40,85	40,82
Nasional	17,32	20,52	20,52	47,02	47,46	48,76	36,70	37,10	37,26

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

Dalam tabel di atas terlihat bahwa dalam indikator Perempuan Sebagai Tenaga Profesional dan persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan DIY berada di atas rata-rata nasional. Walaupun apabila dicermati lebih dalam Gunungkidul berada di bawah rata-rata nasional dalam Perempuan Sebagai Tenaga Profesional dan Kulon Progo dalam Sumbangan Pendapatan Perempuan.

Indikator Penyusun IDG DIY yang capaiannya di bawah rata-rata nasional adalah Keterlibatan Perempuan di Parlemen. Walaupun di Sleman dan Gunungkidul angkanya sudah di atas rata-rata nasional namun belum dapat mengangkat keseluruhan DIY.

Rendahnya partisipasi perempuan dalam parlemen ini penting diperhatikan karena berisiko pada pemenuhan hak-hak perempuan, juga kebijakan terkait dengan peran-peran yang selama ini diampu oleh perempuan tidak cukup kuat diperjuangkan di parlemen. Hal ini sangat mungkin bila terjadi pengambilan suara secara *voting*, jumlah perempuan yang sedikit memungkinkan mereka tidak bisa memenangkan pengambilan suara.



Gambar 3.5. Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen Menurut Kabupaten/ Kota di DIY Tahun 2019-2020

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

Perempuan di parlemen di semua kabupaten/kota maupun di tingkat provinsi persentasenya masih dibawah kuota afirmasi yang diharapkan yaitu setidaknya 30%. Kabupaten Sleman memperlihatkan kondisi paling baik dimana tahun 2020 mencapai 28%, disusul Kabupaten Gunungkidul diangka 22%. Kabupaten Bantul menjadi daerah dengan keterwakilan paling rendah, hanya 8,89%. Memang, jumlah saja tidak cukup, yang tidak kalah penting adalah keberpihakan perempuan pada agenda pemenuhan hak perempuan yang menjadi pra syarat bagi peningkatan kualitas hidup perempuan.

Meski berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan di parlemen, namun dalam kenyataannya masih diperlukan upaya yang lebih besar untuk dapat mencapai batas psikologis afirmasi 30%.

Kendala yang dihadapi adalah rendahnya kapasitas Perempuan. Hal ini khususnya terkait dengan kemampuan sosial, pengambilan keputusan serta kontrol terhadap modal dan sumber daya untuk dapat mendukung pencalonannya. Dari sisi kapasitas dan kapabilitas sebenarnya banyak perempuan yang memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota parlemen. Berbagai upaya meningkatkan kapasitas seperti sekolah (politik) perempuan dan pendampingan dilakukan, namun itu saja tidak cukup. Persoalannya bukan hanya ada di sisi internal perempuan, namun faktor relasi interpersonal, relasi sosial menjadi salah satu kunci untuk mendapatkan dukungan publik. Di sisi internal perempuan, soal akses dan kontrol atas sumber daya kapital perempuan relatif rendah. Kemampuan berbicara di

depan umum, keterampilan membangun argumen juga masih harus terus diasah untuk bisa meyakinkan publik sehingga dalam pemilihan anggota parlemen mampu mendulang suara.

Strategi yang telah dilakukan selama ini adalah dengan meningkatkan kemampuan dan kemauan para perempuan potensial untuk mulai masuk dalam dunia politik. Berawal dari meningkatkan peran perempuan di lembaga perwakilan terendah yaitu di Badan Permusyawaratan Kelurahan (Basmusykal) hingga untuk aktif di partai politik. Strategi ini dilakukan melalui pelatihan maupun sekolah politik perempuan hingga memfasilitasi Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) DPD DIY untuk bersama membangun kemampuan perempuan potensial di DIY.

Ke depan pengembangan kerja sama lintas sektor diperlukan untuk menggarap sektor komitmen dan dukungan partai politik yang memang memerlukan peran serta dari banyak sektor untuk membuka kesadaran dan akhirnya menumbuhkan komitmen partai politik di DIY untuk dapat mendukung perempuan menjadi wakil di parlemen.

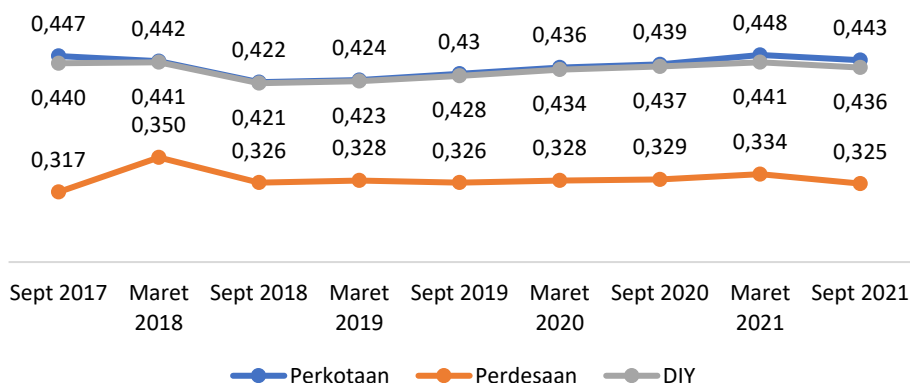
Upaya peningkatan pemahaman gender terhadap masyarakat terkait dengan pentingnya wakil perempuan di parlemen juga menjadi agenda penting yang perlu di tingkatkan. Hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi ke masyarakat atau melalui pendidikan yang menasar pada pemilih pemula. Literasi politik masyarakat juga perlu di kuatkan agar praktik politik uang dan praktik lain yang merugikan tidak terjadi. Hal ini perlu dilakukan secara lintas sektor dan didukung oleh semua elemen di DIY.

Dari capaian indikator kinerja IDG pada tahun 2021 yang sebesar 74,73, jika dibandingkan dengan target pada RKPDP 2021 persentase capaiannya sebesar 106,47%. Sedangkan, jika dibandingkan dengan target tahun 2021 yang ada di RPJMD persentase capaian sebesar 106,27%. Artinya capaian tersebut telah mencapai target yang ditetapkan dalam dokumen RKPDP 2021 maupun RPJMD.

3. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat – Indeks Gini

Pengukuran yang biasa digunakan untuk menghitung derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk suatu wilayah, salah satunya adalah Indeks Gini atau Rasio Gini (Gini Ratio). Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Angka Gini Ratio berkisar antara 0 hingga 1. Angka Gini Ratio yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Gini Ratio bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Gini Ratio bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang lainnya tidak memiliki. Gini Ratio diupayakan agar mendekati 0 yang menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Pada September 2021, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk DIY menunjukkan penurunan dibandingkan kondisi pada Maret 2021. Angka Gini Ratio DIY pada September 2021 tercatat sebesar 0,436 atau turun 0,005 poin dibandingkan Maret 2021 yang tercatat sebesar 0,441. Berdasarkan kriteria Bank Dunia, angka tersebut termasuk pada kategori ketimpangan sedang. Hal ini tercermin dari persentase pengeluaran kelompok 40 persen penduduk terbawah yang besarnya mencapai 15,98 persen dari total pengeluaran penduduk DIY. Lebih lanjut perkembangan Gini Ratio menurut daerah tempat tinggal di DIY bulan September 2017-September 2021 disajikan pada gambar berikut.



Gambar 3.6. Perkembangan Gini Ratio Menurut Daerah Tempat Tinggal di DIY Bulan September 2017 – September 2021
 Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022 (data diolah)

Dari gambar di atas, tampak bahwa angka Gini Ratio pada periode bulan September 2017 – September 2020 bersifat fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Selama periode September 2017 – September 2021, ketimpangan pengeluaran penduduk di DIY tertinggi tercatat pada Maret 2018 dan Maret 2021. Hal tersebut ditunjukkan dengan angka Gini Ratio sebesar 0,441. Sejak September 2018, angka Gini Ratio DIY mengalami peningkatan secara berturut dan mencapai puncaknya pada Maret 2021, namun pada September 2021 mengalami penurunan pada angka 0,436.

Sedangkan berdasarkan tempat tinggal, angka Gini Ratio menunjukkan perbedaan yang cukup besar. Di perkotaan, angka Gini Ratio per September 2021 tercatat sebesar 0,443. Sedangkan angka Gini Ratio di perdesaan per September 2021 tercatat sebesar 0,325. Hal tersebut sesuai dengan karakteristik wilayah di mana wilayah perkotaan sebagai pusat kegiatan ekonomi akan menyebabkan distribusi pendapatan yang kurang merata antar penduduk dibandingkan dengan wilayah perdesaan. Lebih lanjut mengenai Gini Ratio di wilayah perkotaan dan perdesaan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.6. Gini Ratio DIY dan Indonesia Periode September 2020 – September 2021

Daerah	Periode	Kriteria Bank Dunia			Gini Ratio
		Penduduk 40% Terbawah	Penduduk 40% Menengah	Penduduk 20% Teratas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perkotaan	September 2020	14,90	34,41	50,69	0,439
	Maret 2021	14,87	33,49	51,64	0,448
	September 2021	15,41	33,16	51,42	0,443
Perdesaan	September 2020	20,91	36,66	42,43	0,329
	Maret 2021	19,86	38,79	41,35	0,334
	September 2021	21,00	37,38	41,62	0,325
Perkotaan dan	September 2020	15,66	33,39	50,94	0,437
	Maret 2021	15,44	33,17	51,39	0,441
Perdesaan	September 2021	15,98	32,53	51,49	0,436

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022 (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa baik di daerah perkotaan maupun perdesaan di DIY, tingkat ketimpangan dalam periode satu tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Di daerah perkotaan, pada September 2020 angka Gini Ratio sebesar 0,439. Selanjutnya, pada Maret 2021, angka rasio gini meningkat menjadi 0,441. Demikian juga di daerah perdesaan, dimana tingkat ketimpangan juga menunjukkan kecenderungan yang meningkat meskipun dengan laju yang lebih rendah. Pada September 2020, angka Gini Ratio perdesaan adalah 0,329. Kemudian pada Maret 2021, angka Gini Ratio naik menjadi 0,334. Lebih rendahnya angka Gini Ratio dan laju perubahannya di perdesaan dibandingkan di perkotaan menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan di perdesaan lebih baik daripada di perkotaan.

Pada September 2021, DIY tercatat sebagai daerah dengan gini ratio tertinggi secara nasional, yaitu sebesar 0,436. Sementara Gini Ratio terendah tercatat di Bangka Belitung dengan Gini Ratio sebesar 0,247. Jika dibandingkan dengan Gini Ratio nasional yang sebesar 0,381, terdapat tujuh provinsi dengan angka Gini Ratio lebih tinggi, yaitu DIY (0,436), DKI Jakarta (0,411), Gorontalo (0,409), Jawa Barat (0,406), Papua (0,396), Sulawesi Tenggara (0,394), dan Nusa Tenggara Timur (0,339).

Masih tingginya Gini Ratio di DIY terutama dipengaruhi oleh belum meratanya distribusi pendapatan antar kelompok. Golongan ekonomi atas, saat ini masih mendominasi total pengeluaran masyarakat di DIY yaitu

sebesar 51,49 persen. Kelompok 40 persen penduduk terbawah hanya menyumbang 15,98 persen dari total pengeluaran penduduk di DIY. Adapun untuk kelompok menengah juga mengalami penurunan konsumsi selama tahun 2021, yang diduga sebagai respon terhadap kondisi yang ada.

Pandemi COVID-19 yang telah berlangsung selama dua tahun berdampak besar pada berbagai sektor di DIY. Melemahnya kinerja sektor yang secara signifikan terdampak pandemi COVID-19 seperti industri dan perdagangan mendorong terjadinya pemutusan hubungan kerja yang menyebabkan pengangguran. COVID-19 juga berdampak besar pada sektor pariwisata dan pendidikan karena Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Dampak lainnya adalah adanya banyak usaha mikro dan kecil yang terhambat maupun berhenti akibat menurunnya permintaan, kesulitan bahan baku maupun keterbatasan modal. Dengan demikian upaya awal yang dilakukan Pemda adalah optimalisasi program kerja gugus tugas ekonomi selama penanganan pandemi COVID-19 untuk melakukan pemulihan ekonomi di DIY serta mengupayakan situasi yang kondusif untuk pemulihan sektor-sektor ekonomi. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor unggulan dan potensial, antara lain jasa (informasi dan komunikasi; kesehatan), pertanian, wisata, dan industri kreatif.

Salah satu upaya yang dapat membangkitkan ekonomi di DIY adalah pengembangan ekonomi kreatif. Pengembangan ekonomi kreatif menjadi potensi unggulan yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi DIY. Predikat DIY sebagai pusat pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata menjadikan DIY memiliki modal sosial dan ekosistem yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif.

Selanjutnya upaya yang terus dilakukan dalam rangka mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan adalah membuka peluang akses produktif bagi kelompok berpendapatan terendah dan mendorong penumbuhan lapangan usaha yang digeluti agar kelompok tersebut dapat meningkatkan pendapatannya. Upaya tersebut antara lain dengan terus melakukan pembinaan UMKM dalam berbagai aspek usaha agar dapat naik kelas, peningkatan produktivitas sektor pertanian sebagai sektor yang digeluti

mayoritas kelompok dengan pendapatan rendah, serta melakukan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat yang disinergikan dengan pemerintah kabupaten/kota dan desa. Upaya kolaborasi dan sinergi juga diperkuat antara pemerintah dan swasta untuk mengoptimalkan penyaluran *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan serta penyediaan infrastruktur dasar.

Dari capaian indikator kinerja Indeks Gini pada tahun 2021 yang sebesar 0,436, jika dibandingkan dengan target pada RKPDP 2021 persentase capaiannya sebesar 99,42%. Sedangkan, jika dibandingkan dengan target tahun 2021 yang ada di RPJMD persentase capaian sebesar 83,00%. Artinya capaian tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPDP 2021 maupun RPJMD di tahun 2021.

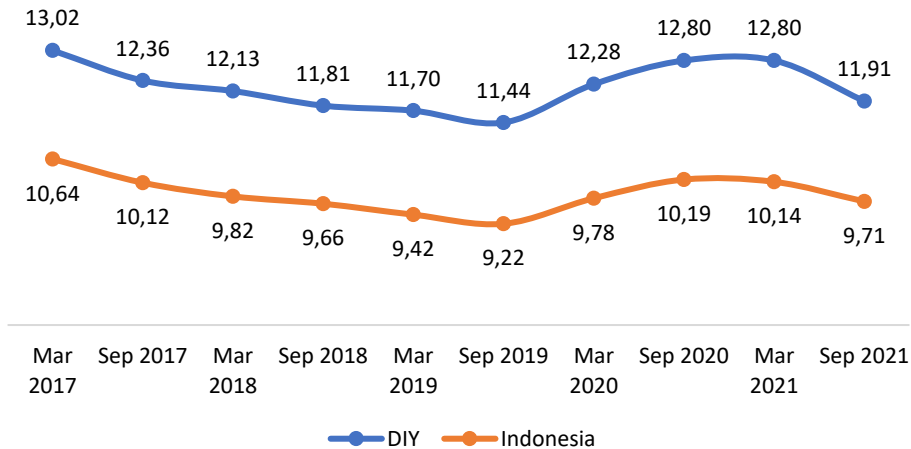
4. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat – Persentase Angka Kemiskinan

DIY masih menghadapi salah satu masalah kesejahteraan yaitu kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional sehingga menjadi salah satu prioritas pembangunan.

Tingkat kemiskinan DIY senantiasa di atas rata-rata nasional, meskipun demikian tingkat penurunan rata-rata DIY lebih tinggi dibandingkan nasional. Selama periode Maret 2017 sampai dengan September 2021, persentase penduduk miskin di DIY berkurang 1,11 poin dari 13,02% menjadi 11,91%. Selama periode 2017 sampai 2019, persentase penduduk miskin di DIY cenderung turun secara berangsur-angsur. Penurunan kemiskinan di DIY pada periode tersebut mempunyai kaitan dengan semakin meningkatnya kondisi perekonomian di DIY.

Pada tahun 2020 terjadi peningkatan akibat dampak pandemi yaitu menjadi 12,28% (Maret) dan 12,80% (September). Kenaikan persentase penduduk miskin disebabkan oleh terkontraksinya perekonomian DIY yang mengalami pertumbuhan -2,69%. Hal tersebut menyebabkan pendapatan penduduk mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin selanjutnya menurun di tahun 2021. Penurunan tersebut didukung oleh membaiknya kondisi

perekonomian yang mendorong ekonomi DIY tumbuh positif dan meningkatnya pendapatan penduduk.



Gambar 3.7. Persentase Penduduk Miskin di DIY dan Indonesia Tahun 2017-2021
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Tabel 3.7. Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2016-2020 (%)

Kabupaten/Kota	Maret 2016	Maret 2017	Maret 2018	Maret 2019	Maret 2020
Kulon Progo	20,30	20,03	18,30	17,39	18,01
Bantul	14,55	14,07	13,43	12,92	13,5
Gunungkidul	19,34	18,65	17,12	16,61	17,07
Sleman	8,21	8,13	7,65	7,41	8,12
Kota Yogyakarta	7,70	7,64	6,98	6,84	7,27

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

Persentase penduduk miskin di tingkat Kabupaten/Kota menunjukkan variasi dan cenderung menurun selama periode 2016-2019. Tingkat kemiskinan meningkat di semua wilayah di tahun 2020 akibat dampak pandemi. Selama tahun 2016 sampai 2020, tingkat kemiskinan tertinggi terdapat di Kabupaten Kulon Progo yang diikuti oleh Kabupaten Gunungkidul. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo tahun 2020 adalah 18,01% dan Gunungkidul 17,07%. Kota Yogyakarta merupakan wilayah dengan tingkat kemiskinan terendah selama periode 2016-2020. Tingkat kemiskinan Kota Yogyakarta adalah 7,27% di tahun 2020.

Dari capaian indikator kinerja Persentase Angka Kemiskinan pada tahun 2021 yang sebesar 11,91%, jika dibandingkan dengan target pada RKPDP 2021 persentase capaiannya sebesar 107,39%. Sedangkan, jika dibandingkan dengan target tahun 2021 yang ada di RPJMD persentase capaian sebesar 40,64%. Artinya capaian tersebut telah mencapai target yang ditetapkan dalam dokumen RKPDP 2021, namun belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2021 sesuai dokumen RPJMD.

5. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan – Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak Benda yang Diapresiasi

Budaya benda adalah segala sesuatu wujud hasil karya budaya berupa benda yang mempunyai nilai penting bagi ilmu pengetahuan, politik, sosial dan keagamaan, bergaya tertentu dan sudah langka serta berusia lebih dari 50 tahun. Budaya benda meliputi struktur, situs, benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan kawasan cagar budaya. DIY memiliki keragaman dan kekayaan budaya benda yang terbentang sejak jaman prasejarah, Hindu-Budha, Islam hingga masa kolonial. Sebagai salah satu pusat peradaban di Indonesia, tentu saja seluruh potensi budaya benda yang ada perlu dipelihara dan dikembangkan.

Tabel 3.8. Warisan Budaya Benda Kekayaan DIY yang ditetapkan di Tingkat Nasional dan Internasional Tahun 2007 -2021

No	Tahun	Penetapan Nasional	Penetapan Internasional	Jumlah
1	2007	28	-	28
2	2010	16	-	16
3	2011	95	-	95
4	2013	1	-	1
5	2014	1	-	1
7	2016	1	-	1
8	2018	2	-	2
9	2019	6	-	6
10	2020	16	-	16
11	2021	-	-	-
Jumlah		166		166

Sumber: Disbud DIY, 2022

Budaya benda kekayaan DIY yang ditetapkan di tingkat nasional dan internasional pada tahun 2020 meliputi Rumah Sakit Bethesda, SMA Negeri 3 Yogyakarta, Jembatan Mbeling (Jembatan Kereta Api di Sungai Progo (BH No. 2034 Sisi Utara), Kantor Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Goa Braholo, Gedung Agung, Monumen Perjuangan Rumah Makan Sate Pulas, Gedung Pusat UGM, Hotel Garuda, nDalem Joyodipuran (kantor Balai Pelestarian Nilai Budaya DIY), Korem 072 Pamungkas, Rumah Jenderal Sudirman Bintaran (Museum Sudirman), Siti Hinggil Kraton Yogyakarta, SMA Negeri 11 Yogyakarta, Rumah Sakit Panti Rapih dan Jembatan Bantar. Sedangkan untuk tahun 2021 tidak ada penetapan cagar budaya DIY di tingkat nasional.

Budaya takbenda adalah seluruh hasil perbuatan dan pemikiran yang terwujud dalam identitas, ideologi, mitologi, ungkapan – ungkapan konkrit dalam bentuk suara, gerak, maupun gagasan yang termuat dalam benda, sistem perilaku, sistem kepercayaan, dan adat istiadat di Indonesia.

Tabel 3.9. Penetapan Warisan Budaya Tak benda Kekayaan DIY tingkat Nasional dan Internasional Pada Tahun 2013 – 2021

No	Tahun	Penetapan Nasional	Penetapan Internasional	Jumlah
1	2013	1	-	1
2	2014	5	-	5
3	2015	4	-	4
4	2016	9	-	9
5	2017	18	-	18
6	2018	27	-	27
7	2019	30	-	30
8	2020	14	-	14
9	2021	26	-	26
Jumlah		134	-	134

Sumber: Kemendikbud RI, 2022

Sejak tahun 2013 -2021 sudah 134 Warisan Budaya Tak benda kekayaan DIY yang telah ditetapkan. Pada Tahun 2021 ditetapkan sebesar 26 warisan budaya tak benda, yaitu Kerajinan Perak Kotagede, Jemparingan Yogyakarta, Thiwul, Lemper, Gudeg Manggar, Tradisi Wiwitan Panen Padi, Sengkalan Yogyakarta, Motif Batik Yogyakarta, Metode Belajar Sariswara Ki Hajar Dewantara, Beksan Inum, Langen Toyo, Incling, Beksan Lawung Alit, Trengganon, Bedhaya Angron Akung, Upacara Bersih Desa Mbah Bregas, Upacara Adat Gumbregan, Upacara Adat Tuk Si Bedug, Nyadran Agung

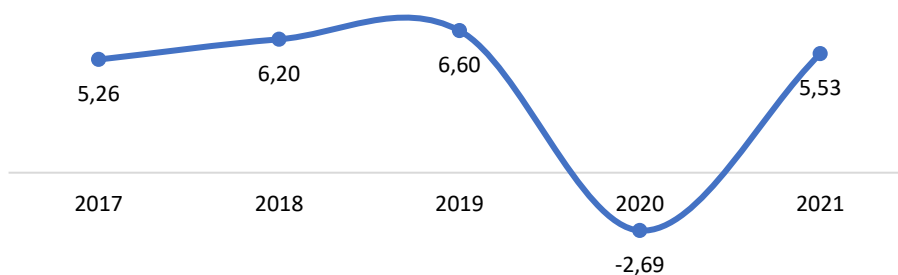
Makam Sewu, Upacara Adat Luwaran Tuksono, Upacara Tradisi Babad Dalam, Upacara Adat Tarapan, Upacara Adat Gondhangho, Labuhan Merapi, Ngalangi, dan Upacara Bathok Bolu.

Realisasi Kinerja Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan berdasarkan Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Takbenda yang Diapresiasi pada tahun 2021 adalah sebesar 12,22% dengan target 11,99%. Pencapaian ini diukur dari peningkatan Budaya Benda dan Takbenda yang diapresiasi nasional dan internasional. Sedangkan capaian terhadap target akhir pencapaian RPJMD di tahun 2022 yang sebesar 12,04% telah terealisasi sebesar 101,50% sehingga dengan besaran pencapaian tersebut, target akhir RPJMD optimis dapat dicapai.

Dari capaian indikator kinerja Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasi pada tahun 2021 yang sebesar 12,22%, jika dibandingkan dengan target pada RKPDP 2021 maupun RPJMD persentase capaiannya sebesar 101,92%. Artinya capaian tersebut telah mencapai target yang ditetapkan dalam dokumen RKPDP 2021 maupun RPJMD di tahun 2021.

6. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan – Pertumbuhan Ekonomi

Kapasitas perekonomian DIY terus mengalami pertumbuhan positif sejak tahun 2016 hingga mencapai puncaknya pada tahun 2019 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 6,60%. Perekonomian DIY selanjutnya mengalami kontraksi atau tumbuh negatif akibat dampak pandemi COVID-19 pada tahun 2020 dengan pertumbuhan -2,69%, kemudian mengalami *rebound* di tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 5,53%. Berikut ini gambar pertumbuhan ekonomi DIY selama lima tahun terakhir.



Gambar 3.8. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi DIY Tahun 2017-2021 (%)

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Pada tahun 2021, hanya dua lapangan usaha yang mengalami tumbuh negatif yaitu Pertambangan dan Penggalan serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Kondisi ekspansif di sektor lainnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sekitar 5,53% seiring dengan gencarnya vaksinasi dan perbaikan kondisi aktivitas masyarakat terutama di bulan-bulan terakhir 2021. Sektor yang tumbuh paling tinggi adalah Informasi dan Komunikasi dengan tingkat pertumbuhan 16,69%.

Tabel 3.10. Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (%)

Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,94	2,16	1,02	4,19	0,61
2 Pertambangan dan Penggalan	3,39	10,59	3,04	-8,84	-3,11
3 Industri Pengolahan	5,74	5,12	5,73	-4,38	0,37
4 Pengadaan Listrik dan Gas	3,96	5,31	5,43	-0,38	2,40
5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	3,46	5,13	8,90	0,51	6,82
6 Konstruksi	6,94	13,1	14,39	-15,64	10,82
7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,72	5,54	5,16	-4,52	1,51
8 Transportasi dan Pergudangan	4,74	6,6	3,55	-20,21	1,93
9 Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	6,21	6,77	8,89	-16,91	7,55
10 Informasi dan Komunikasi	6,14	6,48	7,45	19,70	16,69
11 Jasa Keuangan dan Asuransi	2,80	6,14	8,62	-1,09	1,45
12 Real Estat	4,94	5,54	5,93	1,27	0,57
13 Jasa Perusahaan	5,86	5,51	6,75	-14,89	8,09
14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,51	4,06	3,30	-2,22	-0,39
15 Jasa Pendidikan	5,56	6,01	6,57	4,47	5,00
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,84	6,05	6,61	19,18	4,47
17 Jasa lainnya	5,76	6,06	6,25	-15,74	21,53
PDRB	5,05	5,26	6,20	-2,69	5,53

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Menurut PDRB berdasarkan pendekatan pengeluaran, jenis pengeluaran yang tumbuh terbesar pada tahun 2021 adalah Ekspor Luar Negeri yaitu sebesar 21,68%. Pada tahun 2020, jenis pengeluaran ini tumbuh negatif sebesar 12,90%. Net Ekspor antar daerah mengalami kontraksi yaitu sebesar 148,78%. Pengeluaran lain yang dapat tumbuh cukup tinggi adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto yang tumbuh 8,20% dan Perubahan Inventori tumbuh 8,63%.

Tabel 3.11. Nilai dan Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Pengeluaran Tahun 2017-2021

No	Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5,22	3,95	3,81	-2,75	1,77
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	9,61	2,63	9,58	-6,56	0,39
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,20	3,74	3,12	-0,93	0,26
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,97	10,17	9,74	-13,41	8,20
5	Perubahan Inventori	2,02	3,54	3,04	6,24	8,63
6	Ekspor Luar Negeri	9,26	12,82	-0,22	-12,90	21,68
7	Impor Luar Negeri	9,19	6,22	-9,16	-14,87	7,30
8	Net Ekspor Antar-Daerah	-6,16	-3,14	-9,95	-74,74	-148,78
PDRB		5,05	5,26	6,20	-2,69	5,53

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Periode tahun 2017 - 2019, Kabupaten Kulon Progo mencapai pertumbuhan tertinggi yaitu masing-masing 5,97%, 10,62% dan 13,49% yang didukung oleh beberapa proyek mega termasuk pembangunan YIA. Pada tahun 2020, semua wilayah tumbuh negatif dengan kontraksi terbesar dialami oleh Kabupaten Kulon Progo dengan pertumbuhan -4,06%. Semua Kabupaten dan Kota kemudian tumbuh positif seiring dengan meningkatnya kembali dinamika aktivitas perekonomian daerah. Kota Yogyakarta merupakan wilayah yang mencapai pertumbuhan tertinggi yaitu sekitar 6,00%.

Tabel 3.12. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota, 2017-2021

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021*
Kulon Progo	5,97	10,84	13,49	-4,06	5,00
Bantul	5,10	5,47	5,53	-1,66	5,20
Gunungkidul	5,01	5,16	5,33	-0,68	5,15
Sleman	5,34	6,42	6,49	-3,91	5,90
Yogyakarta	5,24	5,49	5,96	-2,42	6,00
DIY	5,26	6,20	6,60	-2,69	5,53

Keterangan: *) Angka Proyeksi

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022 (data diolah)

Dari capaian indikator kinerja Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2021 yang sebesar 5,53%, jika dibandingkan dengan target pada RKPDP 2021 persentase capaiannya sebesar 135,54%. Sedangkan, jika dibandingkan dengan target tahun 2021 yang ada di RPJMD persentase capaian sebesar 104,14%. Artinya capaian tersebut telah mencapai target yang ditetapkan dalam dokumen RKPDP 2021 maupun RPJMD di tahun 2021.

7. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan – Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Seiring dengan meningkatnya akses masyarakat terhadap hasil pembangunan yang ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang juga terus naik, maka diperlukan instrumen yang digunakan untuk memastikan bahwa terjadi keseimbangan antar dimensi pembangunan. Salah satu instrumen yang bisa digunakan adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Dengan demikian maka status lingkungan hidup di suatu daerah akan tergambar secara kuantitatif. Sebagai bentuk komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan maka DIY juga menetapkan IKLH menjadi salah satu indikator sasaran dalam RPJMD 2017-2022.

Perhitungan IKLH dilakukan dengan mengagregasi tiga (3) indeks yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Adapun perhitungannya menggunakan rumus sebagai berikut :

$$IKLH = (30\% \times IKA) + (30\% \times IKU) + (40\% \times IKTL)$$

Nilai IKA diperoleh dengan pengukuran yang dilakukan terhadap tujuh parameter kualitas air sungai, yaitu parameter BOD, DO, TSS, COD, Fosfat, bakteri Coli Tinja, dan bakteri Coli Total. Sedangkan pengukuran parameter SO₂ dan NO₂ terhadap udara ambien dengan metode *passive sampler* pada kawasan-kawasan transportasi, permukiman, komersial, dan industri akan menghasilkan angka IKU. Untuk IKTL dilakukan pengukuran dengan cara menghitung tutupan lahan di DIY berdasarkan interpretasi citra satelit dan penetapan kawasan hutan berdasarkan SK. Berdasarkan hasil perhitungan, nilai IKA untuk DIY adalah sebesar 35,42, nilai IKU sebesar 88,57, dan nilai IKTL adalah sebesar 58,34. Berdasarkan rumus tersebut di atas maka nilai

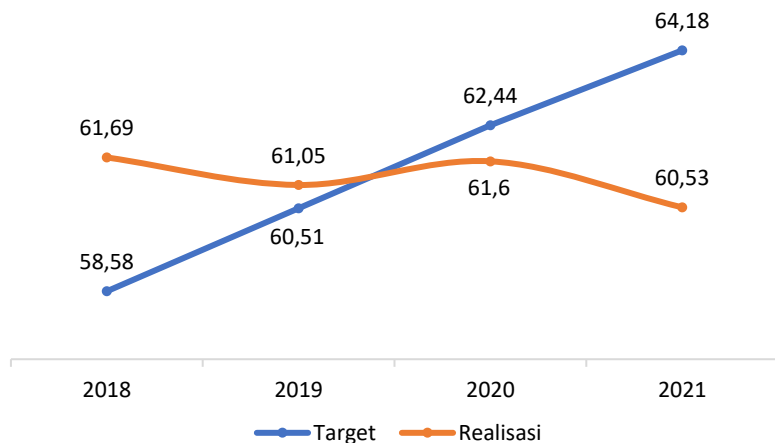
IKLH di DIY berada pada angka 66,15 Sehingga kualitas IKLH di DIY masuk dalam kategori cukup baik, walaupun tidak mencapai target RPJMD (64,18). Sedangkan untuk kategori predikatnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13. Kategori Nilai IKLH secara Nasional

No	Predikat	Kisaran Nilai IKLH
1	Sangat baik	IKLH > 80
2	Baik	70 < IKLH ≤ 80
3	Cukup Baik	60 < IKLH ≤ 70
4	Kurang Baik	50 ≤ IKLH ≤ 60
5	Sangat kurang baik	40 ≤ IKLH < 50
6	Waspada	30 ≤ IKLH < 40

Sumber: Kementerian LHK RI, 2022

Adapun tren realisasi IKLH tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada gambar di bawah.



Gambar 3.9. Target dan Realisasi IKLH tahun 2018 - 2021

Sumber: DLHK DIY, 2022

Berdasarkan tabel dan grafik memperlihatkan bahwa tren nilai IKLH cenderung menurun. Hal ini disebabkan karena nilai IKA dan IKU yang cenderung menurun, sedangkan untuk IKTL relatif tetap setiap tahunnya, perubahan data IKTL terjadi karena adanya perubahan penggunaan sumber data, koreksi data dan penyesuaian penggunaan lahan hutan berdasarkan SK. Penurunan nilai IKA dan IKU menunjukkan bahwa di DIY terjadi kecenderungan penurunan kualitas lingkungan terutama air dan udara.

Dari capaian indikator kinerja IKLH pada tahun 2021 yang sebesar 60,53, jika dibandingkan dengan target pada RKPDP 2021 maupun target tahun 2021 yang ada pada dokumen RPJMD persentase capaiannya sebesar 94,31%. Artinya capaian tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPDP 2021 maupun RPJMD.

8. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan – Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Target kinerja untuk sasaran kesesuaian pemanfaatan ruang, pencapaian untuk tahun 2021 mengalami peningkatan dan mencapai target. Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW provinsi yang meningkat capaiannya adalah sebesar 81,04%. Indikator ini diukur dari perbandingan luas pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW dibandingkan dengan luas total pemanfaatan ruang. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian ini berarti 98,23% dari target kinerja akhir RPJMD sebanyak 82,5%. Capaian tersebut menjadikan Indikator Kinerja Utama kesesuaian pemanfaatan ruang tahun 2021 masuk dalam kriteria tinggi. Namun demikian, pengendalian pemanfaatan ruang masih menjadi tantangan dalam mempertahankan maupun meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang.

Berdasarkan Permen ATR Nomor 21 Tahun 2021 capaian indikator Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang tahun 2021 diperoleh dari hasil perhitungan kesesuaian pemanfaatan ruang berdasarkan perbandingan antara peta pola ruang dengan penggunaan lahan eksisting.

Rincian perhitungan kesesuaian pemanfaatan ruang dilakukan dengan membandingkan pemanfaatan ruang kawasan lindung eksisting dengan luas pemanfaatan ruang kawasan lindung pada RTRW dan kesesuaian pemanfaatan ruang kawasan budidaya dengan membandingkan pemanfaatan ruang kawasan budidaya eksisting dengan luas pemanfaatan ruang kawasan budidaya pada RTRW. Terdapat 3 (tiga) klasifikasi kesesuaian pemanfaatan ruang yakni sesuai, tidak sesuai, dan belum terwujud melalui proses *superimpose* antara peta rencana pola ruang dengan peta penggunaan lahan tahun 2021.

Tabel 3.14. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Eksisting dengan Rencana Pola Ruang RTRW DIY

NO	PERWUJUDAN POLA RUANG	KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG					
		Sesuai (ha)	Sesuai	Belum Terwujud (ha)	Belum Terwujud	Tidak Sesuai (ha)	Tidak Sesuai
A	Perwujudan Kawasan Lindung						
1	Kawasan Taman Hutan Raya	612,68	99.59%	0.00	0.00%	2.50	0.41%
2	Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi	1865,29	99.99%	0.00	0.00%	0.16	0.01%
3	Kawasan Taman Wisata Alam	0,99	95.44%	0.00	0.00%	0.05	4.56%
4	Kawasan Cagar Alam	11,82	99.54%	0.00	0.00%	0.06	0.46%
5	Kawasan Suaka Margasatwa	608,01	98.13%	0.00	0.00%	11.58	1.87%
6	Kawasan Hutan Penelitian	101,46	99.82%	0.00	0.00%	0.18	0.18%
7	Kawasan Cagar Alam Geologi	145,18	100.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
8	Kawasan Sempadan Waduk	72,19	99.99%	0.00	0.00%	0.01	0.01%
9	Kawasan Sempadan Pantai	1059,37	80.80%	0.00	0.00%	251.74	19.20%
10	Kawasan Sempadan Sungai	4036,45	73.99%	0.00	0.00%	1418.95	26.01%
11	Kawasan Rawan Bencana Geologi	2628,09	78.31%	0.00	0.00%	727.77	21.69%
12	Kawasan Hutan Lindung	2282,42	99.45%	0.00	0.00%	12.51	0.55%
13	Sungai	2307,55	100.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
14	Danau/Waduk	151,19	100.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total		15882,69	86,75%	0.00	0.00%	2425,51	13,25%
B	Perwujudan Kawasan Budidaya						
1	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi	12124,178	89,73%	1271,180	9,41%	115,740	0,86%
2	Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat	14426,471	75,36%	2759,255	14,41%	1957,106	10,22%
3	Kawasan peruntukan Industri	100,339	1,80%	3539,733	63,32%	1949,723	34,88%
4	Kawasan Peruntukan Permukiman Perdesaan	56753,180	85,74%	9256,353	13,98%	183,769	0,28%
5	Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan	16010,647	76,08%	5010,431	23,81%	23,107	0,11%
6	Kawasan Peruntukan Perkebunan	15094,020	70,31%	3685,791	17,17%	2687,469	12,52%

NO	PERWUJUDAN POLA RUANG	KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG					
		Sesuai (ha)	Sesuai	Belum Terwujud (ha)	Belum Terwujud	Tidak Sesuai (ha)	Tidak Sesuai
7	Kawasan Peruntukan Lahan Pangan Beririgasi	41754,476	82,15%	5332,725	10,49%	3741,662	7,36%
8	Kawasan Peruntukan Lahan Pangan Tidak Beririgasi	84297,843	83,91%	11173,042	11,12%	4992,156	4,97%
9	Kawasan Peruntukan Bandar Udara	827,379	92,61%	65,973	7,38%	0,043	0,00%
10	Kawasan Peruntukan Pelabuhan	14,255	61,78%	8,818	38,22%	0,000	0,00%
11	Kawasan Riset dan Pendidikan Tinggi	22,198	85,53%	0,000	0,00%	3,757	14,47%
Total		241424,98	80,69%	42103.30	14.07%	15654.53	5.23%
Rekap Kesesuaian Keseluruhan		257307,68	81,04%	42103.30	13.26%	18080.03	5.69%

Sumber: DPTR DIY, 2022

Berdasarkan tabel rincian kesesuaian kawasan lindung dan kawasan budidaya dapat diketahui bahwa kesesuaian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung di DIY sebesar 86,75% dengan ketidaksesuaian sebesar 13,25%. Ketidaksesuaian pada kawasan lindung diantaranya adanya aktivitas budidaya pada kawasan sempadan sungai, Kawasan rawan bencana geologi dan Kawasan sempadan pantai. Sedangkan kesesuaian pemanfaatan ruang kawasan budidaya di DIY sebesar 80,69%, belum terwujud sebesar 14,07% dan tidak sesuai sebesar 5,23%. Persentase dukungan belum terwujudnya kawasan budidaya adalah pada kawasan peruntukan industri yang belum terwujud sebesar 34,90% dan Kawasan riset dan Pendidikan tinggi sebesar 14,47%.

Perhitungan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap RTRW diperoleh dari total luas kesesuaian kawasan lindung ditambah total luas kesesuaian kawasan budidaya, dibagi total luas kawasan lindung ditambah total luas kawasan budidaya, menghasilkan angka 81,04%.

Capaian kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW tahun 2021 sebesar 81,04% melebihi target capaian 2021 sebesar 81% atau 100,05% dari target capaian. Meskipun melebihi target namun masih terdapat pemanfaatan

ruang yang tidak sesuai dan belum terwujud. Ketidaksesuaian pada Kawasan lindung paling tinggi yaitu Kawasan sempadan sungai sebesar 26,01% dan Kawasan budidaya paling tinggi pada Kawasan peruntukan industri sebesar 34,88%. Pemanfaatan ruang yang belum terwujud yaitu pada Kawasan peruntukan industri sebesar 63,33%.

Dalam pencapaian kinerja terdapat beberapa kendala yakni keterlibatan pemangku kepentingan termasuk masyarakat dalam pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang masih sangat terbatas. serta dinamika kebijakan penataan ruang setelah diterbitkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mempengaruhi proses penyelenggaraan penataan ruang di DIY. Kendala-kendala tersebut diatasi dengan sosialisasi dan penyebarluasan informasi rencana tata ruang kepada pemangku kepentingan termasuk masyarakat, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang secara sistematis dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan khususnya unsur masyarakat, serta upaya penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Selanjutnya, mendorong percepatan rencana detail tata ruang (RDTR) kabupaten sebagai bagian dalam upaya perwujudan kesesuaian kegiatan yang memanfaatkan ruang.

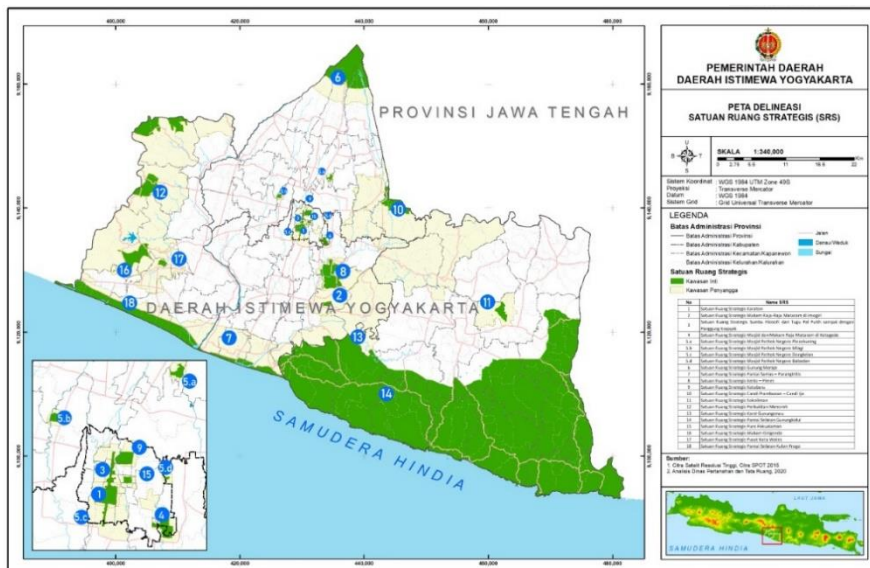
Dari capaian indikator kinerja Kesesuaian Pemanfaatan Ruang pada tahun 2021 yang sebesar 81,04%, jika dibandingkan dengan target pada RKPDP 2021 persentase capaiannya sebesar 101,94%. Sedangkan, jika dibandingkan dengan target tahun 2021 yang ada di RPJMD persentase capaian sebesar 100,05%. Artinya capaian tersebut telah mencapai target yang ditetapkan dalam dokumen RKPDP 2021 maupun RPJMD di tahun 2021.

9. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan – Capaian Penataan Ruang pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan

Pengaturan Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam Peraturan Daerah Istimewa merupakan implementasi untuk mewujudkan salah satu kewenangan dalam urusan Keistimewaan DIY sebagaimana

dimaksud dalam UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penataan Ruang keistimewaan DIY diselenggarakan berdasarkan nilai keistimewaan harmoni, kelestarian lingkungan, sosial ekonomi (*Hamemayu hayuning bawana*), asas spiritual-transenden (Sangkan paraning dumadi), humanisme, asas kepemimpinan demokratis (*Manunggaling Kawula lan Gusti*), asas kebersamaan (tahta untuk rakyat), asas harmonisasi lingkungan (poros imajiner Laut Selatan-Kraton-Gunung Merapi), ketaatan historis (sumbu filosofis Tugu-Kraton-Panggung Krapyak), asas filosofi inti kota (*catur gatra tunggal*) dan asas delineasi spasial (*pathok negara*).



Gambar 3.10. Peta Lokasi 18 Satuan Ruang Strategis
Sumber: DPTR DIY, 2022

Penataan ruang pada satuan ruang strategis keistimewaan menjadi salah satu indikator kinerja utama DIY yang dicapai melalui beberapa komponen meliputi :

- Penyusunan dokumen perencanaan penataan ruang:
 - Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang
 - Penyusunan Rencana Induk (*Masterplan*)
 - Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

- b. Pemanfaatan Ruang
- c. Pengendalian Pemanfaatan ruang

Capaian kinerja untuk sasaran Capaian penataan ruang pada satuan ruang strategis keistimewaan, pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 11,12% dari tahun 2020. Capaian persentase penataan ruang pada satuan ruang strategis keistimewaan adalah sebesar 51,81% dari target yang ditetapkan sebesar 49,03 % atau sebesar 105,67%. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebanyak 54,44 %, capaian tahun 2021 ini mencapai 95,17%. Indikator ini diukur dari jumlah persentase capaian satuan ruang strategis yang mempunyai dokumen perencanaan berupa Rencana rinci tata ruang, rencana induk dan RTBL, keterwujudan pemanfaatan ruang sesuai dokumen perencanaan, dan pengendalian pemanfaatan ruang pada Satuan Ruang Strategis.

Realisasi capaian kinerja tersebut merupakan penjumlahan dari capaian beberapa aspek diantaranya jumlah Satuan Ruang Strategis yang mempunyai dokumen perencanaan berupa Rencana rinci, rencana induk dan RTBL sebesar 23,47 %, keterwujudan pemanfaatan ruang sesuai dokumen perencanaan sebesar 13,89 % dan pengendalian pemanfaatan ruang pada Satuan Ruang Strategis sebesar 14,44%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2020, capaian tahun ini mengalami peningkatan pada satuan ruang strategis yang mempunyai dokumen perencanaan berupa Rencana rinci, rencana induk dan RTBL meningkat sebesar 8,61 %, keterwujudan pemanfaatan ruang sesuai dokumen perencanaan meningkat sebesar 1,39 %, dan pengendalian pemanfaatan ruang pada Satuan Ruang Strategis meningkat sebesar 1,11 %. Berikut ini daftar satuan ruang strategis yang sudah mempunyai dokumen perencanaan, didorong untuk melakukan perwujudan ruang sesuai dokumen rencana dan satuan ruang strategis yang dilakukan upaya peningkatan kesesuaian sebagai berikut :

Tabel 3.15. Daftar Dokumen Perencanaan Tata Ruang di 18 Satuan Ruang Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Satuan Ruang Strategis	RTBL	Rencana Induk	RRTR
1	Karaton	2015	2014	2018 (1)
2	Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	2014 2015 2020	2015	2021
3	Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak	2014	2015	2018(2)
4	Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede	2015 2019		2018 (3)
5	Masjid Pathok Nagoro	2015	2018	2018 (6) 2019 (Validasi KLHS)
6	Gunung Merapi		2015 2018	2021
7	Pantai Samas – Parangtritis	2015 2019 2021	2014	2019 (10)
8	Kerto – Pleret	2015 2020		2021
9	Kotabaru	2015	2015	2018 (4)
10	Candi Prambanan - Candi Ijo		2016	2020
11	Sokoliman	2016	2018	2021
12	Perbukitan Menoreh	2015 2018	2015 2020	2018 (7) 2019 (Validasi KLHS)
13	Karst Gunungsewu	2014	2015 2018	2019 (9)
14	Pantai Selatan Gunungkidul	2016	2019	2018 (8)
15	Puro Pakualaman	2015	2014	2018 (5)
16	Makam Girigondo	2015		2021
17	Pusat Kota Wates			2020
18	Pantai Selatan Kulon Progo			2021

Sumber: DPTR DIY, 2022

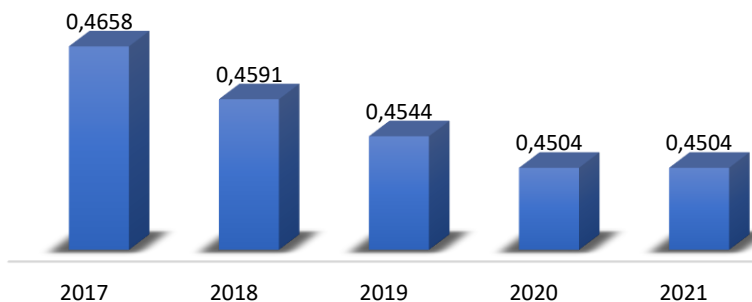
Beberapa kendala yang dihadapi pada Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan, yaitu: 1)Dinamika kebijakan penataan ruang setelah diterbitkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menghapus produk hukum Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi; 2) Dokumen Perencanaan Tata Ruang pada satuan ruang strategis berupa Rencana induk masih belum ditetapkan menjadi peraturan Gubernur; serta 3) Keterlibatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang perlu ditingkatkan.

Upaya dalam mengatasi kendala tersebut yaitu: 1) Penyusunan Peraturan Gubernur DIY tentang Strategi Pengembangan Wilayah dan Peraturan Gubernur Rencana Induk pada Satuan Ruang Strategis Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tata ruang serta pemanfaatan ruangnya; serta 2) Pengaturan bentuk dan tata cara peran masyarakat untuk menjamin hak dan kewajiban masyarakat terutama dalam hal Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang agar terwujud pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Dari capaian indikator kinerja Capaian Penataan Ruang pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan pada tahun 2021 yang sebesar 51,81%, jika dibandingkan dengan target pada RKPDP 2021 maupun target tahun 2021 pada dokumen RPJMD persentasenya sebesar 105,67%. Artinya capaian tersebut telah mencapai target yang ditetapkan dalam dokumen RKPDP 2021 maupun RPJMD di tahun 2021.

10. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah – Indeks Williamson

Untuk mengukur tingkat kesenjangan ekonomi antar wilayah dalam hal ini antar kab/kota yang ada di DIY dapat menggunakan berbagai macam pendekatan. Salah satunya adalah menggunakan Indeks Williamson. Dasar perhitungannya adalah dengan menggunakan PDRB per kapita dalam kaitannya dengan jumlah penduduk per daerah. Indeks Williamson merupakan koefisien persebaran (*coefficient of variation*) dari rata-rata nilai sebaran dihitung berdasarkan estimasi dari nilai-nilai PDRB dan penduduk daerah-daerah yang berada pada lingkup wilayah yang dikaji dan dianalisis. Nilai indeks Williamson di DIY saat ini di tunjukkan dalam gambar berikut ini.



Gambar 3.11. Indeks Williamson DIY Tahun 2017-2021

Keterangan: 2017-2018 Proyeksi SP2010, 2019-2021 Proyeksi Supas2015

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Dari gambar tersebut, terlihat bahwa kesenjangan ekonomi antar daerah di DIY tidak terlampau besar karena masih di bawah 0,5000. Ketimpangan menurun pada periode 2017 sampai 2020 yaitu dari Indeks Williamson 0,4658 (2017) yang turun menjadi 0,4504 (2020). Selanjutnya ketimpangan tidak mengalami perubahan pada periode selanjutnya dengan Indeks Williamson sebesar 0,4504 di tahun 2021.

Dari capaian indikator kinerja Indeks Williamson pada tahun 2021 yang sebesar 0,4504, jika dibandingkan dengan target pada RKPDP 2021 persentase capaiannya sebesar 102,93%. Sedangkan, jika dibandingkan dengan target tahun 2021 yang ada di RPJMD persentase capaian sebesar 97,03%. Artinya capaian tersebut telah mencapai target yang ditetapkan dalam dokumen RKPDP 2021, namun belum mencapai target yang ditetapkan di tahun 2021 pada dokumen RPJMD.

11. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan – Opini BPK

Laporan keuangan pemerintah daerah meliputi tujuh laporan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk dilakukan pemeriksaan.

Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara disebutkan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan dilakukan untuk memberikan keyakinan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yaitu:

- a. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
- b. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
- c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
- d. Efektivitas sistem pengendalian intern.

Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan di dalamnya memuat Opini BPK atas laporan keuangan yang diperiksa. Opini BPK terdiri dari Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*), Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*), Tidak Wajar (*adversed opinion*) dan Tidak Menyatakan Pendapat (*disclaimer of opinion*). Dalam hal ini opini Wajar Tanpa Pengecualian merupakan opini terbaik dan opini Tidak Menyatakan Pendapat merupakan opini terburuk yang diberikan oleh BPK atas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

Pada tahun 2021, BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemda DIY Tahun 2020 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian. Laporan hasil pemeriksaan tersebut meliputi LHP atas Laporan Keuangan Nomor 10B/LHP/XVIII.YOG/04/2021, LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan Nomor 10C/LHP/XVIII.YOG/04/2021. Opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut telah sesuai dengan target yang ditetapkan dan merupakan pencapaian untuk ke-11 kalinya sejak Laporan Keuangan Tahun 2010.

Keberhasilan Pemda DIY dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut didukung dengan faktor-faktor sebagai berikut.

- a. Komitmen dan dukungan semua stakeholder laporan keuangan.
- b. Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pelaksanaan pengendalian internal pemerintah daerah. Hasil-hasil tugas pengawasan membantu memberikan keyakinan yang memadai dan peringatan dini (*early warning system*) terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan, kelemahan, maupun tindak pelanggaran terhadap sistem akuntabilitas instansi pemerintah.
- c. Rekomendasi yang diberikan oleh BPK telah ditindaklanjuti.
- d. Adanya penyesuaian regulasi pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan akuntansi karena adanya perubahan-perubahan regulasi yang dilakukan oleh Pemerintah.

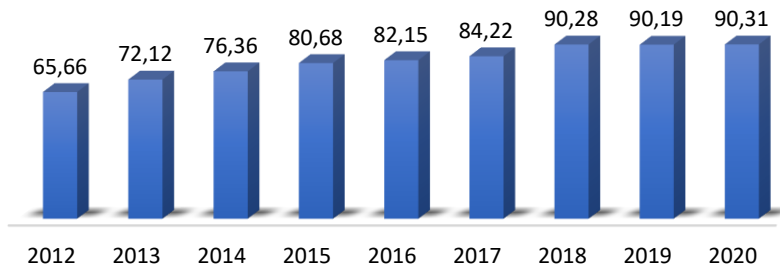
Dari capaian indikator kinerja Opini BPK pada tahun 2021 mendapatkan opini WTP. Jika dilihat dari target pada RKPDP 2021 maupun RPJMD persentase capaiannya sebesar 100%. Artinya capaian tersebut telah mencapai target yang ditetapkan dalam dokumen RKPDP 2021 maupun RPJMD di tahun 2021.

12. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan – Nilai AKIP

Akuntabilitas sebagai salah satu pengungkit reformasi birokrasi memiliki peran yang sangat strategis. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang handal, efektif dan efisien, mampu mewujudkan *Good Government and Clean Governance*. Perbaikan terhadap akuntabilitas DIY secara nyata telah menghasilkan peningkatan efisiensi melalui perumusan sasaran yang lebih berorientasi hasil, tetap berkomitmen untuk terus berproses melakukan Reformasi Birokrasi.

Pada tahun 2021, belum disampaikan hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN dan RB RI), sehingga nilai terakhir masih 90,31 dengan predikat AA yang merupakan nilai AKIP DIY pada tahun 2020. Sampai dengan Penilaian terakhir yang

dikeluarkan KemenPAN dan RB, Pemda DIY merupakan satu-satunya institusi yang memperoleh Predikat AA yang merupakan predikat tertinggi dalam penilaian AKIP.



Gambar 3.12. Perkembangan Nilai AKIP DIY, 2012-2020
Sumber: Bappeda DIY, 2021

Tabel 3.16. Nilai Per Komponen dalam Penilaian AKIP Tahun 2019-2020

Komponen yang Dinilai	Bobot	Tahun	
		2019	2020
a. Perencanaan Kinerja	30	27,65	27,66
b. Pengukuran Kinerja	25	21,74	21,80
c. Pelaporan Kinerja	15	13,58	13,62
d. Evaluasi Internal	10	9,85	9,85
e. Capaian Kinerja	20	17,37	17,38
Nilai Hasil Evaluasi	100	90,19	90,31
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		AA	AA

Sumber: KemenPAN RB RI, 2021

Pada Tahun 2020, nilai AKIP DIY mengalami peningkatan sebesar 0,12 poin jika dibandingkan dengan nilai AKIP tahun 2019. Dari 5 komponen penilaian AKIP, terdapat 4 komponen mengalami kenaikan nilai yaitu: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Capaian Kinerja. Sedangkan pada Komponen penilaian Evaluasi Internal, nilai capaiannya tidak mengalami kenaikan yaitu sebesar 9,85 poin. Komponen penilaian yang paling besar peningkatannya pada Komponen Pengukuran Kinerja sebesar 0,06 poin dari 21,74 di tahun 2019 menjadi 21,80 di tahun 2020. Nilai AKIP “AA” Pemda DIY menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya sudah cukup memadai, serta kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemda DIY sudah menunjukkan hasil yang sangat memuaskan.

Secara umum Pemda DIY berhasil mempertahankan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan. Beberapa catatan terkait hasil evaluasi AKIP antara lain: Kualitas penerapan SAKIP di tingkat Pemerintah Daerah sudah menunjukkan kondisi yang membaik, terlihat dari penyusunan RPJMD yang sudah berorientasi pada manfaat yang akan diterima masyarakat, sudah berpedoman pada integrated development plan serta fokus pada prioritas pembangunan yang menjadi kebutuhan Pemda DIY. Selain itu Pemda DIY sudah berupaya menerapkan *performance based organization*, sehingga korelasi antara kinerja yang akan dicapai dalam RPJMD dengan penentuan organisasi perangkat daerah sangat jelas. Implementasi SAKIP pada Pemda DIY juga sudah mampu melakukan penyederhanaan program dan kegiatan. Penetapan Program dan Kegiatan termasuk penganggarannya mengacu pada kinerja yang akan dihasilkan, sehingga mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Dari capaian indikator kinerja Nilai AKIP pada tahun 2021 yang merupakan penilaian di tahun 2020, telah mendapatkan nilai AA. Jika dibandingkan dengan target pada RKPDP 2021 maupun RPJMD persentasenya sebesar 150%. Artinya capaian tersebut telah mencapai target yang ditetapkan dalam dokumen RKPDP 2021 maupun RPJMD di tahun 2021.

13. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan – Persentase Capaian Program Urusan Keistimewaan

DIY memiliki status istimewa berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut UUD 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa. Kewenangan Istimewa adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY pada Pasal 7 ayat (4) memberikan amanat bahwa kewenangan dalam urusan Keistimewaan mencakup: (a) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan kewenangan Gubernur dan Wakil Gubernur, (b) kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, (c) kebudayaan, (d) pertanahan. Dasar pelaksanaan program dan kegiatan Urusan

Keistimewaan harus mengacu pada UU Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan DIY, Peraturan Menteri Keuangan RI No. 173/PMK.07/2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan, dan Peraturan Gubernur DIY No. 140 tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan yang sudah direvisi melalui Pergub DIY Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan.

Program-program keistimewaan tersebut dapat dikategorikan dalam beberapa kelompok:

- a. Program untuk menghubungkan satuan-satuan ruang strategis keistimewaan di DIY;
- b. Program yang memusatkan peran desa sebagai lumbung budaya, lumbung ekonomi, dan lumbung peradaban;
- c. Program yang menggerakkan organisasi-organisasi dan lembaga budaya yang tersebar di perdesaan dan perkotaan;
- d. Program untuk meningkatkan industri kreatif;
- e. Program untuk melestarikan simbol-simbol kejayaan Yogyakarta pada masa lalu;
- f. Program untuk menjamin status kepemilikan tanah penduduk dan desa;
- g. Program untuk penataan kelembagaan asli berciri khas keistimewaan Yogyakarta.

Sejalan dengan kewenangan istimewa yang dimiliki oleh DIY, pengelolaan keistimewaan DIY masuk ke dalam unsur tata kelola Pemerintahan Daerah DIY yang harus diperhatikan. Sasaran “Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan” mendukung tujuan Pemda DIY kedua “Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)”.

Sasaran Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan diukur dengan indikator persentase capaian program urusan keistimewaan. Meta indikator untuk menghitung persentase capaian program urusan keistimewaan adalah jumlah program urusan keistimewaan yang targetnya tercapai dibagi jumlah seluruh program urusan keistimewaan dikali 100%.

Program urusan keistimewaan terdiri dari 26 program. Pada tahun 2021 dilaksanakan pembaruan pemetaan Program/ Kegiatan/sub kegiatan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga 26 program tersebut berubah menjadi kegiatan dan masuk ke dalam 1 program yaitu Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan. Dari total 26 program, terdapat 24 program yang tercapai dan 2 program yang tidak tercapai, sehingga capaian program adalah sebesar 92,31%.

Dari capaian indikator kinerja Persentase Capaian Program Urusan Keistimewaan pada tahun 2021 yang sebesar 92,31%. Jika dibandingkan dengan target pada RKPDP 2021 maupun RPJMD persentase capaiannya sebesar 111,74%. Artinya capaian tersebut telah mencapai target yang ditetapkan dalam dokumen RKPDP 2021 maupun RPJMD di tahun 2021.

14. Meningkatnya Fasilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa – Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa yang Terfasilitasi untuk Dikelola serta Dimanfaatkan

Sebagai amanat dari UU Nomor 13 Tahun 2012, telah ditetapkan Perdas DIY Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Kadipaten yang menjabarkan ruang lingkup Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten meliputi penatausahaan, pemeliharaan dokumen, dan pengawasan. Penatausahaan pertanahan meliputi aspek inventarisasi, identifikasi, verifikasi, pemetaan, dan pendaftaran.

Bidang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang difasilitasi dan dikelola berdasarkan data inventarisasi sejumlah 14.044 bidang. Sesuai dengan tahapan penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, telah dilakukan inventarisasi, identifikasi, verifikasi, dan pemetaan. Selanjutnya perlu ditindaklanjuti dengan pendaftaran sertipikat terhadap bidang Tanah

Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagai upaya untuk mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi pertanahan. Pada tahun 2021 ditargetkan bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten, dan Tanah Desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan sebanyak 17.619 bidang.

Capaian bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan untuk tahun 2021 tidak mencapai target. Dari target 17.619 bidang terealisasi sejumlah 15.335 bidang dengan persentase terhadap target tahun 2021 mencapai 87,04%. Secara kumulatif pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sampai dengan tahun 2021 telah direalisasikan sebanyak 13.710 bidang dari target 13.877 bidang pada akhir RPJMD tahun 2022, sedangkan untuk pendaftaran Tanah Desa telah direalisasikan sebanyak 1.625 bidang dari target 8.000 bidang pada akhir RPJMD tahun 2022.

Tabel 3.17. Capaian Data Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

No	Kabupaten/ Kota	Pendaftaran									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	JML
1	Yogyakarta	45	166	75	50	70	50	75	100	42	673
2	Bantul	0	171	1367	300	350	359	500	395	230	3672
3	Kulon Progo	0	216	176	240	350	400	400	402	151	2335
4	Gunungkidul	0	54	300	300	250	750	785	500	1000	3939
5	Sleman	0	137	252	250	250	1000	1000	202	0	3091
	Jumlah	45	744	2170	1140	1270	2559	2760	1599	1423	13710

Sumber : DPTR DIY, 2022

Adapun data capaian pendaftaran Tanah Desa pada masing-masing kabupaten/kota sampai dengan tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.18. Capaian Pendaftaran Tanah Desa

No	Kabupaten	Jumlah Bidang	Bidang Sudah Sertipikat	Bidang Belum Sertipikat	Sertipikat Terverifikasi s.d. 2021	Sertipikat Belum diverifikasi	Penyesuaian Sertifikat s.d. 2021
1	Bantul	15,743	2,117	13,626	1,889	228	287
2	Kulon Progo	4,156	3,649	507	3,649	0	0
3	Gunungkidul	10,882	3,295	7,599	3,295	0	544
4	Sleman	19,498	7,007	12,491	7,007	0	794
	Jumlah	50,279	16,068	34,223	15,840	228	1,625

Sumber : DPTR DIY, 2022

Beberapa kendala yang dihadapi pada capaian kinerja tersebut, yaitu: 1) Belum dapat dilaksanakannya pendaftaran terhadap Tanah Desa yang belum bersertipikat karena belum adanya regulasi yang mengatur tentang pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang ditindaklanjuti dengan Standar Operasional Prosedur (SOP); 2) Terdapat bidang Tanah Desa yang masih bermasalah. Masalah tersebut antara lain belum selesainya proses administrasi tukar menukar Tanah Desa dengan tanah warga serta, sehingga belum dapat didaftarkan ke Kantor Pertanahan; serta 3) Kantor Pertanahan belum dapat memproses pendaftaran pencatatan perubahan data sertifikat Tanah Desa yang berupa tanah pengganti hasil dari pelepasan Tanah Desa yang digunakan untuk kepentingan umum.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut adalah: 1) Mendorong percepatan penyelesaian penyusunan draft Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional RI tentang Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang mulai diinisiasi pada tahun 2021; 2) Perlu dilakukan koordinasi dan pendampingan kepada Pemerintah Desa/Kalurahan dalam rangka pengumpulan bukti-bukti pelaksanaan tukar menukar Tanah Desa dengan tanah warga yang dilaksanakan sebelum tahun 1985 dan perlu diusulkan pengaturan lebih lanjut dalam revisi Pergub Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa; serta 3) Perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan Kantor Pertanahan terkait pelaksanaan pendaftaran pencatatan perubahan data sertifikat Tanah Desa yang berupa tanah pengganti hasil dari pelepasan Tanah Desa yang digunakan untuk kepentingan umum.

Dari capaian indikator kinerja Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten, dan Tanah Desa yang Terfasilitasi untuk Dikelola serta Dimanfaatkan pada tahun 2021 yang sebesar 15.335 bidang, jika dibandingkan dengan target pada RKPDP 2021 persentase capaiannya sebesar 100,97%. Sedangkan, jika dibandingkan dengan target tahun 2021 yang ada di RPJMD persentase capaian sebesar 87,04%. Artinya capaian tersebut telah mencapai target yang ditetapkan dalam dokumen RKPDP 2021, namun belum mencapai target yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD.

B. CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMDA

Berdasarkan cascading RPJMD 2017-2022, pencapaian IKU Pemda DIY didukung oleh beberapa program Pemda. Berdasarkan evaluasi capaian indikator kinerja program Pemda DIY sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.19. Capaian Indikator Kinerja Program Pemda DIY Tahun 2021

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (%)	Keterangan
1	Persentase sekolah menengah dan khusus yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Persen	14,32	12,59	14,35	113,98	Tercapai
2	Harapan Lama Sekolah	tahun	15,59	15,97	15,64	97,93	Tidak Tercapai
3	Peningkatan Jumlah Pemuda Kader Aktif	Orang	238	215	257	119,53	Tercapai
4	Persentase Sekolah yang Melakukan Pendidikan Berbasis Budaya dengan Kategori Maju	persen	25,14	8,22	48,83	594,04	Tercapai
5	Angka Harapan Hidup	tahun	74,99	75,41	75,04	99,51	Tidak Tercapai
6	Jumlah Kabupaten/ Kota Layak Anak Berkategori Nindya ke Atas	Kab/Kota	2	5	2	40,00	Tidak Tercapai
7	Persentase Perempuan Pengambil Keputusan di Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif	persen	24,92	21,62	30,16	139,50	Tercapai
8	Total Fertility Rate	Angka	1,80	2,10	1,90	109,52	Tercapai

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (%)	Keterangan
9	Peningkatan Jumlah Desa/ Kelurahan cepat berkembang	Desa/ Kelurahan	48,00	54,00	54,00	100,00	Tercapai
10	Angka Kejahatan per 100.000 Penduduk (<i>Crime Rate</i>)	persen	12,10	8,39	13,73	36,35	Tidak Tercapai
11	Persentase Peningkatan Penumbuhan Wirausaha Baru	persen	0,40	0,40	0,49	122,50	Tercapai
12	Jumlah Penduduk Miskin	Angka	503.140	309.021	474.490	46,45	Tidak Tercapai
13	Pengeluaran Per Kapita Masyarakat	Angka	16.943	14.333	17.014	118,71	Tercapai
14	Persentase Peningkatan Budaya Benda yang dilestarikan	persen	13,27	14,18	14,22	100,28	Tercapai
15	Persentase Peningkatan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	persen	36,60	16,82	16,89	100,42	Tercapai
16	Kontribusi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Perdagangan	persen	40,27	45,00	39,39	87,53	Tidak Tercapai
17	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	persen	4,57	2,24	4,56	49,12	Tidak Tercapai
18	Jumlah Desa Mandiri Budaya (Desa/Kampung Wisata, Desa/ Kelurahan Budaya, Desa	desa	10,00	15,00	18,00	120,00	Tercapai

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (%)	Keterangan
	Preneur, Desa Prima)						
19	Indeks Kualitas Air	Angka Indeks	38,43	40,80	35,42	86,81	Tidak Tercapai
20	Indeks Kualitas Udara	Angka Indeks	89,14	89,07	88,57	99,44	Tidak Tercapai
21	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Angka Indeks	58,32	63,05	58,34	92,53	Tidak Tercapai
22	Indeks Risiko Bencana	Angka Indeks	125,15	135,00	124,15	108,04	Tercapai
23	Persentase Dukungan Program Pemda Terhadap Keterwujudan Struktur dan Pola Ruang	persen	66,26	77,20	78,66	101,89	Tercapai
24	Persentase Peningkatan PDRB Pada Kabupaten yang Belum Maju (GK, KP, Bantul)	persen	40,09	40,25	40,08	99,58	Tidak Tercapai
25	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Layanan Transportasi Pada Sistem Jaringan Jalan Provinsi	persen	81,46	78,00	81,45	104,42	Tercapai
26	Kemampuan Keuangan Daerah	Nilai	Sedang	Sedang	Sedang	100,00	Tercapai
27	Optimalisasi Aset-Aset Pemda DIY	Rupiah	9016510978	9.237.591.665	13.406.469.567	145,13	Tercapai
28	Nilai Eksternal Pelayanan Publik	persen	8,95	8,75	8,95	102,29	Tercapai
29	Nilai internal integritas organisasi	persen	8,60	4,50	8,60	191,11	Tercapai

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (%)	Keterangan
30	Nilai eksternal persepsi korupsi	persen	9,33	5,90	9,33	158,14	Tercapai
31	Terwujudnya pelaksanaan Urusan Kelembagaan Sesuai dengan Perda/Kelembagaan	persen	100	100	100	100,00	Tercapai
32	Presentase Tertib Administrasi Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa	persen	61,25	73,16	74,11	101,30	Tercapai

Sumber: Bappeda DIY, 2022 (diolah)

Berdasar tabel di atas, capaian kinerja program Pemda DIY tahun 2021 dari 32 indikator kinerja, terdapat 11 indikator yang tidak mencapai target atau realisasi masih di bawah 100%. Selanjutnya, terdapat 3 indikator yang mencapai target dengan realisasi 100%. Kemudian terdapat 18 indikator telah mencapai target dengan realisasi lebih dari 100%.

1. Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan, dengan indikator:

a. Persentase Sekolah Menengah dan Khusus yang Memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)

Pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pengembangan potensi setiap warga negara. Dalam mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu, dibutuhkan kriteria minimal pedoman penyelenggaraan pendidikan yang harus dipenuhi penyelenggara pendidikan. Kriteria minimal tersebut mencakup delapan aspek, yaitu Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian Pendidikan. Penilaian capaian kedelapan standar tersebut akan menunjukkan nilai

rapor mutu satuan pendidikan yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi pembelajaran. Perhitungan capaian SNP diperoleh dari persentase jumlah SMA, SMK, dan SLB dengan nilai SNP lebih dari 90 pada tahun n-1 sampai dengan tahun n dibagi jumlah seluruh SMA, SMK dan SLB (Negeri dan Swasta) dikali 100%. Berikut adalah pencapaian SNP di DIY pada tahun 2020 dan 2021.

Tabel 3.20. Rincian Jumlah Sekolah yang Memenuhi SNP>90

Sekolah	Sekolah dengan pencapaian SNP >90		Jumlah Sekolah Total di DIY
	2020	2021	
SMA	2	26	168
SMK	4	21	213
SLB	1	12	79
Jumlah	7	59	460
Persentase:	$(7+59)/460 \times 100\% = 14,35\%$		

Sumber: BAN-P DIY, 2022

Berdasarkan data tabel di atas pada tahun 2021 diperoleh capaian Persentase sekolah menengah dan khusus yang memenuhi SNP adalah sebesar 14,35%. Berikut adalah perbandingan capaian tahun 2020 dengan target tahun 2021 dan target akhir RPJMD:

Tabel 3.21. Target dan Capaian Indikator Program Persentase Sekolah Menengah dan Khusus yang Memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) Tahun 2021

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase sekolah menengah dan khusus yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	%	14,32	12,59	14,35	113,98	13,20	108,71

Sumber: Disdikpora DIY, 2022

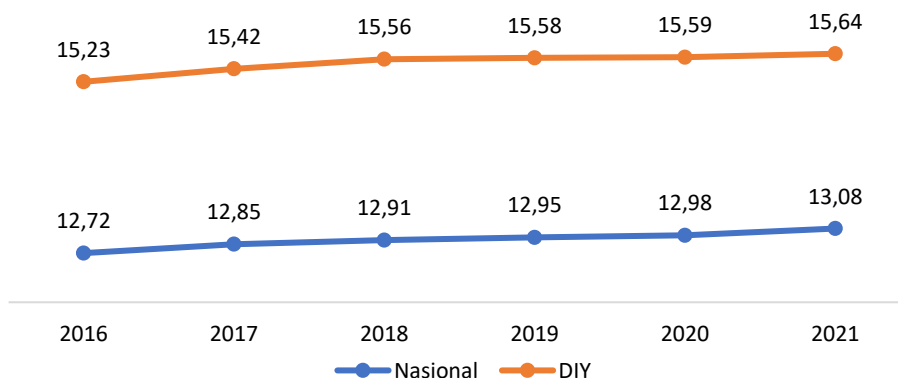
Capaian SNP pada tahun 2021 sebesar 14,35% telah melampaui target tahun 2021 maupun target akhir RPJMD sebesar 13,20%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 14,32%, terdapat peningkatan capaian di tahun 2021 sebesar 0,03%.

Capaian SNP pada jenjang pendidikan menengah dan khusus di DIY dilakukan melalui pemberian bantuan operasional sekolah bagi seluruh satuan pendidikan negeri dan swasta. Pemberian bantuan operasional pada tahun 2021 difokuskan pada dukungan terhadap pembelajaran jarak jauh yang kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran tatap muka terbatas pada akhir 2021. Diharapkan pemberian bantuan operasional ini dapat turut menjaga kualitas satuan pendidikan di tengah upaya mengejar ketertinggalan pembelajaran siswa akibat pemberlakuan pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19.

b. Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) sesuai definisi Badan Pusat Statistik (BPS), diukur dari lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan dapat ditempuh oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Perhitungan Angka HLS berlaku bagi penduduk berusia 7 tahun ke atas. Sesuai data BPS, nilai capaian HLS DIY pada tahun 2020 adalah 15,59 tahun dan pada tahun 2021 sebesar 15,64 tahun. Dibandingkan dengan capaian tahun 2020, terdapat peningkatan HLS sebesar 0,05 tahun pada tahun 2021.

Angka HLS DIY mengalami peningkatan selama kurun waktu 2016-2021. Capaian angka HLS DIY juga melampaui capaian HLS nasional seperti yang digambarkan pada grafik di bawah ini.



Gambar 3.13. Capaian Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2016-2021

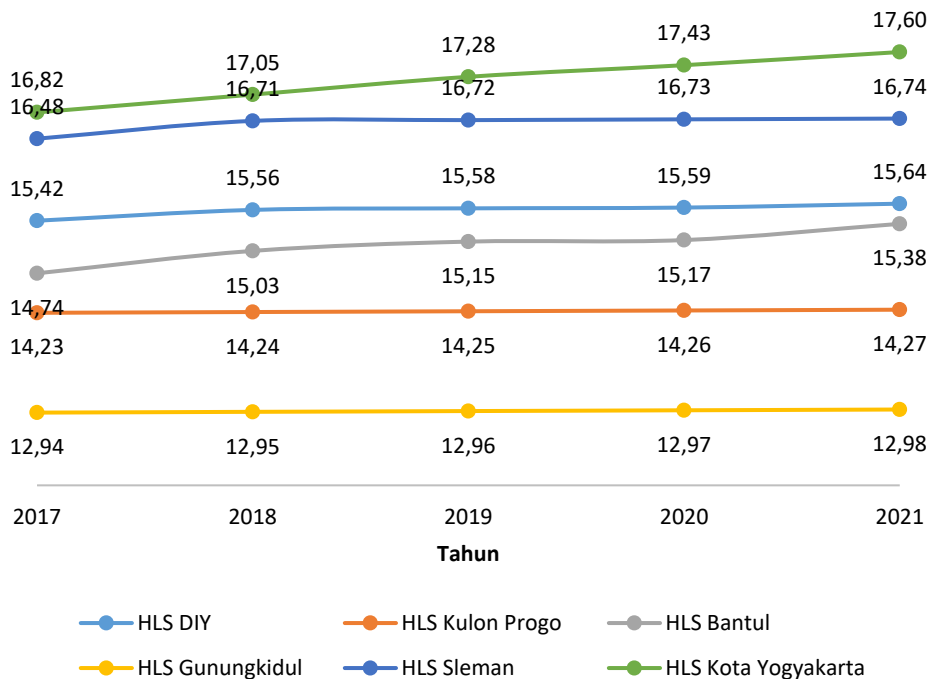
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Tabel 3.22. Target dan Capaian Indikator Program Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 2021

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	15,59	15,97	15,64	97,93	16,12	97,02

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa target HLS pada RPJMD tahun 2021 sebesar 15,97 tahun baru tercapai pada angka 15,64 tahun. Hal ini disebabkan adanya ketimpangan angka HLS antar kabupaten/kota di DIY.



Gambar 3.14. Capaian HLS Kabupaten/Kota dan DIY 2017-2021

Sumber: BPPSD DIY, 2022 (data diolah)

Grafik di atas menunjukkan bahwa ada 3 kabupaten yang capaian HLS nya di bawah rata-rata DIY yaitu Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul. Solusi yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan pemanfaatan

bantuan operasional bagi satuan pendidikan maupun beasiswa pendidikan bagi siswa kurang mampu guna memastikan seluruh penduduk usia sekolah memperoleh pelayanan pendidikan yang berkualitas. Selain itu dukungan sektor lain untuk peningkatan akses penunjang pendidikan, seperti transportasi, jaringan internet, perpustakaan, dan pemberdayaan masyarakat khususnya di 3 kabupaten yang HLS nya masih di bawah rata-rata DIY.

c. Peningkatan Jumlah Pemuda Kader Aktif

Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional mutlak diperlukan demi membangun masyarakat di lingkungannya. Guna mendukung peran aktif tersebut, dibutuhkan pendidikan kepemudaan untuk membentuk mental pemuda yang tangguh dan berwawasan luas. Sesuai UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan sesuai karakteristik dan potensi daerah masing-masing. Potensi pemuda DIY yang sangat besar memberikan kesempatan luas bagi penyelenggaraan pendidikan kepemudaan yang dapat memicu kreatifitas, inovasi, dan kemandirian pemuda.

Peningkatan jumlah pemuda kader aktif dihitung dari selisih jumlah pemuda kader aktif pada tahun n dengan jumlah pemuda kader aktif pada tahun $n-1$. Berikut adalah rincian perhitungan jumlah kader pemuda aktif pada tahun 2020 dan 2021.

Tabel 3.23. Jumlah Pemuda Kader Aktif 2020-2021 di DIY

	Tahun 2020	Tahun 2021
Pemuda yang berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan (Kwarda) dan pelatihan yang diselenggarakan organisasi kepemudaan	1.268	1.295
Pemuda yang berpartisipasi dalam pelatihan kewirausahaan (alumni pelatihan pemasaran <i>online</i> dan pelatihan kewirausahaan tahun sebelumnya, pelatihan pemasaran <i>online</i> , pelatihan kewirausahaan pemuda di kantong kemiskinan, sosialisasi kewirausahaan; partisipan Sentra Kewirausahaan Pemuda 2021)	2.823	3.014

	Tahun 2020	Tahun 2021
Pemuda yang berpartisipasi dalam kegiatan kepemudaan (alumni Paskibraka, seleksi dan pembinaan Paskibraka, pemilihan Duta Pancasila, sosialisasi kepemudaan)	3.176	3.215
Jumlah	7.267	7.524
Selisih jumlah pemuda kader aktif tahun 2020 dan 2021:	7.524-7.267 = 257	

Sumber: BPO DIY, 2022

Capaian indikator peningkatan jumlah pemuda kader aktif pada tahun 2021 ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.24. Target dan Capaian Indikator Program Peningkatan Jumlah Pemuda Kader Aktif Tahun 2021

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Peningkatan jumlah pemuda kader aktif	orang	238	215	257	119,53	220	116,82

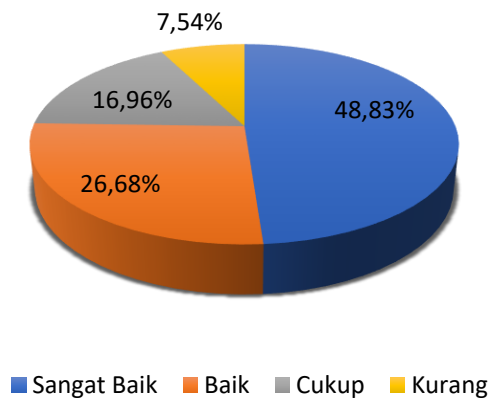
Sumber: Disdikpora DIY, 2022

Pada tahun 2021 terjadi peningkatan jumlah pemuda kader aktif sebesar 257 orang. Jumlah ini melampaui target tahun 2021 sebesar 215 orang dan juga melampaui target akhir RPJMD sebesar 220 orang. Dibandingkan dengan tahun 2020, terdapat peningkatan partisipasi yang menunjukkan antusiasme pemuda untuk berpartisipasi dalam kegiatan kepemudaan. Pemda DIY pada tahun 2021 berupaya untuk meningkatkan partisipasi pemuda, khususnya pemuda di kantong-kantong kemiskinan, melalui pelatihan kewirausahaan. Para pemuda tersebut diharapkan dapat menginisiasi usaha berbasis potensi lokal dengan tujuan akhir meningkatkan produktifitas masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan.

d. Persentase Sekolah yang Melakukan Pendidikan Berbasis Budaya dengan Kategori Maju

Sekolah yang telah mengimplementasikan pendidikan berbasis budaya dengan kategori maju diartikan sebagai sekolah yang telah dapat memenuhi seluruh standar implementasi pendidikan berbasis budaya secara maksimal. Pemenuhan ini mencakup ketersediaan sarana

prasarana pembelajaran budaya, implementasi ke dalam kurikulum muatan lokal sekolah, serta kapasitas yang memadai dari pendidik dan tenaga kependidikan untuk memfasilitasi pembelajaran berbasis budaya yang mencerminkan nilai-nilai luhur budaya Yogyakarta. Hasil evaluasi pendidikan berbasis budaya disajikan pada grafik berikut.



Gambar 3.15. Capaian Evaluasi Pendidikan Berbasis Budaya
Sumber: Disdikpora DIY, 2022

Pada grafik di atas sekolah yang telah melakukan pendidikan berbasis budaya dengan kategori maju mendapatkan predikat sangat baik dalam penilaian evaluasi, yaitu sebesar 48,83% dari seluruh sekolah jenjang pendidikan dasar, menengah, dan khusus yang menjadi sasaran evaluasi. Rincian realisasi Persentase sekolah yang melakukan pendidikan berbasis budaya dengan kategori maju ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.25. Target dan Capaian Indikator Program Persentase Sekolah yang Melakukan Pendidikan Berbasis Budaya dengan Kategori Maju Tahun 2021

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase sekolah yang melakukan pendidikan berbasis budaya dengan kategori maju	%	25,14	8,22	48,83	594,04	8,98	543,76

Sumber: Disdikpora DIY, 2022

Berdasarkan tabel di atas, capaian tahun 2021 sebesar 48,83% telah melampaui target 2021 maupun target akhir RPJMD sebesar 8,98%. Dengan penerapan pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran tatap muka terbatas pada tahun 2021, Pemda DIY tetap memberikan dukungan penyelenggaraan pendidikan berbasis budaya melalui *workshop* internalisasi nilai-nilai budaya Jawa kepada para pendidik, penyempurnaan kurikulum bahasa Jawa, serta pelaksanaan pentas seni tradisional siswa. Seluruh kegiatan dapat dilaksanakan optimal dengan sistem bauran demi mengikuti ketentuan pelaksanaan kegiatan di masa pandemi.

2. Program Peningkatan Usia Harapan Hidup, dengan indikator Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) merupakan salah satu indikator yang menunjukkan perbaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). AHH didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Selain itu, AHH juga mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.

AHH menjadi parameter bagaimana pembangunan kesehatan dilaksanakan di DIY. Beberapa faktor yang berpengaruh pada AHH diantaranya adalah pendidikan, inflasi, gizi masyarakat, pelayanan kesehatan, dan sosial ekonomi. Dalam hal ini bidang kesehatan memegang peranan penting.

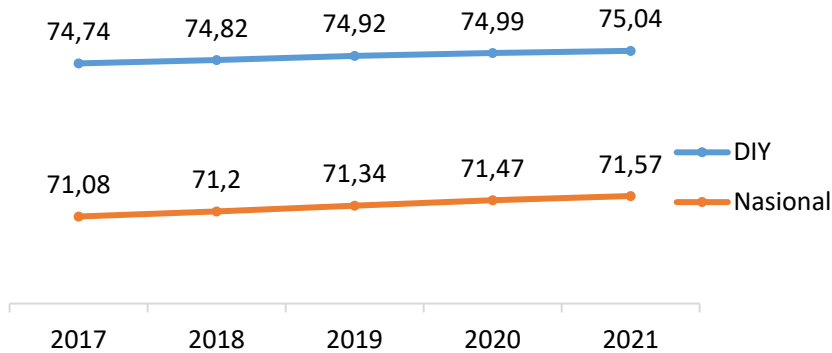
Tabel 3.26. Target dan Capaian Indikator Program Angka Harapan Hidup Tahun 2021

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2020	2021			Target akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Angka Harapan Hidup	Tahun	74,99	75,41	75,04	99,51	75,49	99,40

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022 (data diolah)

Tingginya AHH DIY didorong oleh perbaikan kualitas kesehatan penduduk, terutama pada kelompok bayi, balita, dan wanita berusia subur. Selama masa pandemi perbaikan kualitas kesehatan ini ditandai oleh tingkat kemudahan

penduduk dalam mengakses sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan kualitas asupan gizi, serta berkurangnya angka kesakitan (morbiditas).



Gambar 3.16. Perbandingan AHH DIY dan AHH Nasional 2017-2021

Sumber: BPS Indonesia, 2022

Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk DIY saat lahir pada tahun 2021 sebesar 75,04 yang merupakan tertinggi dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia. Dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 75,41 maka tingkat ketercapaiannya sebesar 99,51%. AHH penduduk DIY pada saat lahir setiap tahun secara konsisten mengalami peningkatan dan berada di atas capaian nasional.

Pada sisi lain, prevalensi penyakit tidak menular relatif masih tinggi dan beberapa diantaranya (hipertensi, diabetes melitus, kanker, jantung) menjadi komorbid (penyakit penyerta) yang berisiko mengalami kondisi berat ketika individu terinfeksi COVID-19. Selain itu, penyakit menular seperti HIV dan belum optimalnya penemuan kasus tuberculosis tetap menjadi perhatian. Masalah kesehatan lainnya yang menonjol dimasa pandemi adalah tingginya angka kematian ibu. Jumlah kematian ibu di tahun 2020 sebanyak 40 kasus, dan mengalami peningkatan tajam pada tahun 2021 menjadi 131 kasus.

Upaya promotif dan preventif terus dilakukan dengan menggunakan berbagai media, baik secara virtual maupun pertemuan terbatas untuk penyebaran informasi untuk program kesehatan ibu, kesehatan anak, kesehatan reproduksi, lansia, dan gizi. Demikian juga untuk pembinaan pendampingan bumil dan balita oleh kader bekerja sama dengan PKK

(Pembinaan Kesejahteraan Keluarga). Pendampingan permasalahan kematian ibu dan anak pada masa pandemi, bekerjasama dengan institusi pendidikan.

Upaya untuk menekan angka penyakit tidak menular yang cenderung terus mengalami peningkatan adalah dengan meningkatkan keberadaan dan keterlibatan Pos Binaan Terpadu (Posbindu), baik di lingkungan kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun desa di DIY. Upaya lain adalah meningkatkan kualitas 96% Desa di DIY yang telah memiliki dengan peningkatan kapasitas petugas dan penyediaan alat yang dibutuhkan serta memperbanyak kawasan tanpa rokok.

Kegiatan sosialisasi gerakan masyarakat hidup sehat melalui 7 gerakan: 1) melakukan aktivitas fisik, 2) budaya konsumsi buah dan sayur, 3) tidak merokok di dalam rumah, 4) tidak mengonsumsi minuman beralkohol, 5) melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, 6) menjaga kebersihan lingkungan dan 7) menggunakan jamban. Upaya lain dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan deteksi dini khususnya IVA Test dan pemeriksaan payudara klinis (SADANIS), menggalakkan Posbindu yang melibatkan komitmen lintas sektor untuk bekerjasama, dan peningkatan SDM di puskesmas untuk menjadi Pelayanan Ante Natal Care Terpadu menuju Triple Eliminasi (PANDU TEMAN).

Untuk meningkatkan penemuan kasus TB, akan dilaksanakan Revitalisasi *District Public Private Mix* (DPPM), membangun jejaring dengan lintas sektor serta menggalakkan upaya promotif dan preventif ke masyarakat. Juga akan meningkatkan kualitas sistem pelaporan dan *feedback* bagi semua fasyankes termasuk klinik dan dokter praktek mandiri, meningkatkan akses layanan TB yang bermutu (sarana prasarana dan fasyankes untuk diagnostik maupun pengobatan TB). Selama masih masa pandemi COVID-19, pelayanan pasien TB masih menyesuaikan dengan edaran Kementerian Kesehatan No. PM.01.02/1/840/2020 mengenai Keberlangsungan Pelayanan TBC selama masa Pandemi COVID-19 yaitu pengambilan obat bagi pasien TB sensitif obat yang biasanya dilakukan seminggu sekali, berubah menjadi 1 bulan sekali. Untuk pasien TB resistan obat, yang biasanya melakukan kunjungan ke

puskesmas untuk minum obat setiap hari, dilakukan pengawasan minum obat di rumah dengan menggunakan *video call* untuk tetap memastikan bahwa pasien meminum obatnya. Seiring dengan terbitnya Perpres No.67 tahun 2021 tentang Penanggulangan TB, akan dibentuk Tim Percepatan Eliminasi TB DIY yang melibatkan Lintas Sektor (semua Organisasi Perangkat Daerah/ OPD DIY) untuk mempercepat penemuan kasus TBC, meningkatkan keberhasilan pengobatan TB, dan meningkatkan pemberian pengobatan pencegahan TB (TPT).

Memasyarakatkan gerakan hidup sehat (Germas) dengan menitikberatkan pada upaya perubahan gaya hidup sehat di masyarakat untuk memasyarakatkan budaya hidup sehat serta meninggalkan kebiasaan dan perilaku masyarakat yang kurang sehat. Upaya tanpa henti adalah terus mensosialisasikan dan melakukan monitoring evaluasi terhadap penerapan protokol kesehatan selama dengan 3M yaitu mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak selama pandemi COVID-19.

3. Program Pembangunan Sosial Masyarakat, dengan indikator:

a. Jumlah Kabupaten/Kota Layak Anak Berkategori Nindya ke Atas

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen antara sumber daya Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh, berkelanjutan dalam kebijakan, program maupun kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak serta perlindungan anak. Agregasi dari pencapaian Kabupaten / Kota Layak Anak (KLA) menjadikan DIY Layak Anak.

KLA meliputi 4 klaster pemenuhan hak anak dan 1 klaster perlindungan khusus anak yang pelaksanaannya melibatkan berbagai OPD sesuai kluster dan indikator KLA sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 tahun

2010 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi.

Tabel 3.27. Target dan Capaian Indikator Program Jumlah Kabupaten/Kota Layak Anak berkategori Nindya ke atas Tahun 2021

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Jumlah Kabupaten/ Kota Layak Anak berkategori Nindya ke atas.	Kab/ Kota	2	5	2	40	5	40

Sumber: DP3AP2 DIY, 2022

Pada tahun 2021 Kota Yogyakarta mendapatkan kenaikan kategori dari Nindya menjadi Utama, sedangkan 4 kabupaten lainnya tetap tidak mengalami perubahan kategori. Kabupaten Sleman tetap di kategori Nindya, sedangkan Kabupaten Bantul, Gunungkidul, dan Kulon Progo tetap di kategori Madya. Di lain kesempatan, pada tahun 2018 Pemda DIY juga mendapatkan penghargaan sebagai Pendorong kabupaten/kota layak anak dan pada Tahun 2019 mengalami kenaikan kategori menjadi Pelopor Provinsi Layak Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Dalam rangka membina dan mendorong KLA telah dilakukan beberapa upaya, antara lain: 1) Melakukan advokasi dan pembinaan kepada Gugus Tugas Provila dan Gugus Tugas Kab / Kota Layak Anak, 2) Mendampingi Kabupaten / Kota dalam evaluasi KLA, 3) Penyusunan Juknis Sekolah Ramah Anak (SRA) / Madrasah Ramah Anak (MRA) guna percepatan mewujudkan SRA/MRA, 4) Membuka telekonseling TESAGA melalui wa, telepon, medsos, Surat Kabar, dan Radio, 5) Komunikasi, Informasi, dan Edukasi melalui medsos, dan 6) Pelatihan Perlindungan Anak baik luring dan daring.

b. Persentase Perempuan Pengambil Keputusan di Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif

Peran aktif perempuan dalam politik dapat dilihat dari komposisi dan kontribusi dalam lembaga-lembaga strategis, antara lain di lembaga eksekutif; legislatif; dan yudikatif.

Keterwakilan perempuan dilembaga-lembaga strategis menjadi salah satu indikator SDGs yang tercantum pada target 5.5 yaitu “Menjamin partisipasi penuh dan efektif dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin disemua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan masyarakat”.

Persentase perempuan pengambil keputusan di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif sebagai Indikator Kinerja Program Pemda di sini dihitung dari jumlah perempuan pengambil keputusan di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dibagi jumlah seluruh pejabat pengambil keputusan pada lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dikali 100%.

Capaian di DIY selalu menunjukkan tren kenaikan meskipun belum bisa mencapai komposisi 50 : 50 sebagaimana kampanye yang digaungkan oleh PBB yaitu Gender Equality Planet 50 : 50 yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Tren kenaikan yang dicapai oleh DIY diharapkan selalu meningkat sehingga komposisi tersebut dapat terwujud.

Tabel 3.28. Target dan Capaian Indikator Program Persentase Perempuan Pengambil Keputusan Di Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif Tahun 2021

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase perempuan pengambil keputusan di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.	%	24,92	21,62	30,16	139,50	21,62	139,50

Sumber: DP3AP2 DIY, 2022

c. Total Fertility Rate

Total Fertility Rate (TFR) adalah rata-rata jumlah bayi yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama usia reproduksinya, yaitu umur 15 – 49 tahun. Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2007, 2012 dan 2017 TFR di DIY cenderung mengalami peningkatan dari 1,8 menjadi 2,1 dan meningkat lagi menjadi 2,2.

Karena SDKI dilaksanakan setiap lima tahunan, maka capaian TFR tahun 2021 dihitung berdasarkan hasil Survei Kinerja dan Akuntabilitas Publik (SKAP) BKKBN yang dikeluarkan setiap tahun.

Tabel 3.29. Target dan Capaian Indikator Program *Total Fertility Rate* (TFR) Tahun 2021

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2020	Target	2021		Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Realisasi	% Realisasi		
<i>Total Fertility Rate</i>	angka	1,8	2,1	1,9	109,52	2,1	109,52

Sumber: BKKBN, 2022

Berdasarkan SKAP yang dilakukan oleh BKKBN pada tahun 2021, TFR di DIY menunjukkan kenaikan dari tahun 2020 yaitu di angka 1,8. Dengan demikian, target TFR tahun 2021 sudah tercapai. Keberhasilan pencapaian target TFR tersebut disebabkan karena meningkatnya minat masyarakat terhadap program Keluarga Berencana.

d. Peningkatan Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang

Sesuai dengan Permendagri Nomor 81 Tahun 2015, evaluasi perkembangan desa dan kalurahan memiliki 4 ruang lingkup, yaitu: evaluasi perkembangan desa dan kalurahan, perlombaan desa dan kalurahan, pekan inovasi perkembangan desa dan kalurahan, serta penentuan lokasi Labsite untuk model pengembangan desa dan kalurahan. Evaluasi perkembangan desa dan kalurahan dimaksudkan untuk mengevaluasi, mendorong serta memberikan motivasi kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/Kalurahan/Kelurahan beserta masyarakatnya untuk turut serta dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan

pelayanan kepada masyarakat serta mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat serta daya saing desa dan kelurahan. Untuk Tahun 2021 Realisasi dan capaian Indikator Kinerja Program Peningkatan jumlah desa/kelurahan cepat berkembang dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.30. Target dan Capaian Indikator Program Peningkatan Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang Tahun 2021

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Peningkatan Jumlah Desa/ Kelurahan Cepat Berkembang	Desa/ Kelurahan	48	54	54	100	60	90

Sumber: Biro Bermas Setda DIY, 2022

Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan melakukan analisis dan validasi secara berjenjang terhadap hasil penilaian dan pemeringkatan perkembangan desa dan kalurahan. Analisis, validasi dan pengujian kesesuaian data akan menghasilkan pemeringkatan desa dan kalurahan pada kategori cepat berkembang, berkembang maupun kurang berkembang. Desa dan kalurahan cepat berkembang hasil penilaian perlombaan desa dan kalurahan tahun 2021 sebagai berikut:

- 1) Desa/Kelurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul
- 2) Desa/Kelurahan Gulurejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo
- 3) Desa/Kelurahan Gari, kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul
- 4) Desa Tamanmartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman
- 5) Kalurahan Terban, Kemantren Gondokusuman, Kota Yogyakarta
- 6) Kalurahan Wates, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo

Dengan demikian secara kumulatif sampai dengan tahun 2021 terdapat 54 desa/kelurahan cepat berkembang di DIY, memenuhi target tahun 2021 yang tercantum dalam RPJMD sebanyak 54 desa, atau dengan capaian kinerja sebesar 100%.

e. **Angka Kejahatan per 100.000 Penduduk (*Crime Rate*)**

Statistik dan indikator yang biasa digunakan untuk mengukur rasa aman masyarakat merupakan indikator negatif, misalnya jumlah angka kejahatan (*crime total*), dan jumlah orang yang berisiko terkena tindak kejahatan.

Angka *crime rate* menggambarkan jumlah orang yang berisiko terkena tindak kejahatan setiap 100.000 penduduk di wilayah tertentu pada satuan waktu tertentu. Penghitungan angka ini setidaknya mengacu pada angka kriminalitas yang tercatat di Kepolisian Daerah DIY dan jumlah penduduk DIY.

$$\text{Crime Rate} = \frac{\text{Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun } t}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100.000$$

Secara umum situasi Kamtibmas sepanjang tahun 2020-2021 di wilayah hukum Polda DIY mengalami tren kenaikan kasus pada beberapa jenis tindak pidana dan penurunan kasus pada jenis jenis tindak pidana yang lain. Kasus tindak kriminal tahun 2020 dan 2021 didominasi tindak pidana Narkoba, pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, tindak pidana KDRT, dan pencurian dengan kekerasan. Jenis kasus lain yang tetap eksis dalam jumlah kecil antara lain tindakan kekerasan seperti pengancaman, pemerasan, penganiayaan, pemerkosaan, dan pembunuhan. Jenis tindak kriminal terhadap kekayaan negara meliputi *illegal logging*, *illegal fishing*, *illegal mining*, dan uang palsu terlapor sangat minim terjadi.

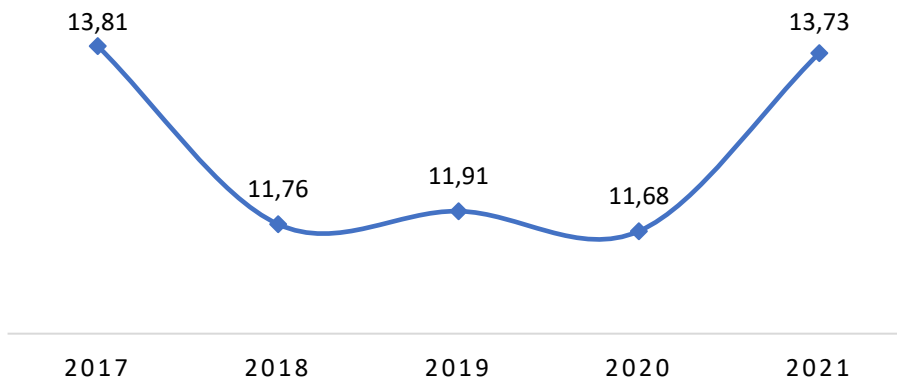
Jumlah kejahatan terlapor atau *crime total* yang diterima oleh Polda DIY tahun 2020 tercatat 745 kasus, sedangkan untuk gabungan jumlah kejahatan terlapor dari Polres kabupaten/kota dan Polda DIY adalah 4.353 kasus. Data berkenaan pada tahun 2021 adalah 609 kasus di Polda DIY dan 4.886 kasus untuk angka gabungan jumlah kejahatan terlapor dari Polres kabupaten/kota dan Polda DIY. Berdasarkan Jumlah total penduduk DIY semester 1 tahun 2021 dari rilis Biro Tata Pemerintahan Setda DIY 3.675.662 jiwa, maka Angka Kejahatan per 100.000 penduduk

(*crime rate*) sesuai rumus di atas berada pada angka 132.93. Jika dalam penghitungan *crime rate* menggunakan jumlah kasus terlapor hanya di Polda DIY saja yaitu 609 kasus per tahun 2021 maka angka *crime rate* tahun 2021 adalah 16,56. Perlu dicatat disini bahwa terdapat perbedaan definisi *crime rate* dengan rilis Polda DIY yang menyatakan bahwa *crime rate* merupakan Jumlah orang yang berisiko terkena tindak kejahatan setiap 10.000 penduduk. Rilis data Polda DIY untuk angka *crime rate* tahun 2020 adalah 11,68 dan meningkat menjadi 13,73 pada tahun 2021.

Tabel 3.31. Jumlah Tindak Kejahatan Terlaporkan dan Angka Kejahatan per 10.000 Penduduk Tahun 2017-2021

Elemen Data Kriminal	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Tindak Kejahatan Terlapor dari Polres kabupaten/ Kota dan Polda DIY (gabungan)	5.194	4.471	4.576	4.353	4886
Jumlah Penduduk	3.587.921	3.631.015	3.656.108	3.671.189	3.675.662
Angka Kejahatan per 10.000 penduduk	13,81	11,76	11,91	11,68	13,73

Sumber: BPPSD DIY, 2022, : https://jogja.polri.go.id/website/?page_id=12075 diakses 3 februari 2022, diolah



Gambar 3.17. *Crime Rate* Tahun 2017-2021

Sumber: https://jogja.polri.go.id/website/?page_id=12075 diakses 3 februari 2022

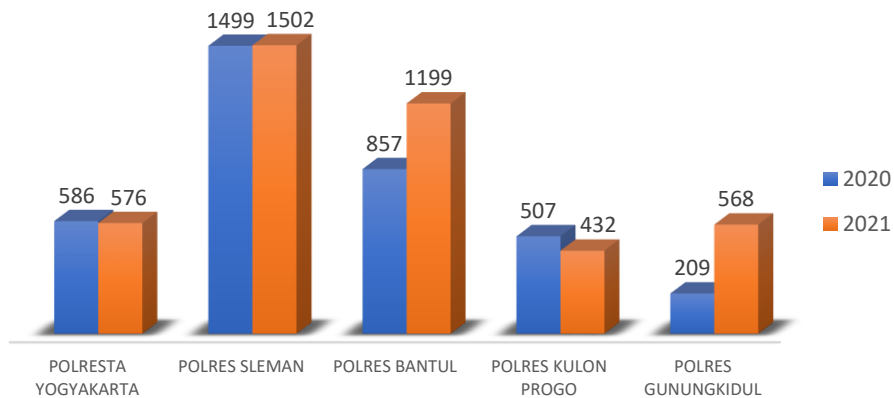
Berdasarkan data tersebut, target dan capaian indikator angka *crime rate* DIY (kejahatan per 100.000 penduduk) sesuai data *crime rate* di Aplikasi Jogjadatuku yang diakses bulan Februari 2022.

Tabel 3.32. Target dan Capaian Indikator Program Angka Kejahatan (*Crime Rate*) Tahun 2021

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2020	2021			Target akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap Target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Angka Kejahatan per 10.000 penduduk (<i>crime rate</i>)	angka	12,10	8,39	13,73	36,35	7,33	12,69

Sumber: BPPSD DIY, 2022 (data diolah)

Memenuhi dan menciptakan rasa aman pada masyarakat merupakan langkah strategis yang turut memengaruhi keberhasilan pembangunan nasional. Terciptanya dan terpenuhinya keamanan pada masyarakat akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas termasuk aktivitas ekonomi. Aktivitas usaha ekonomi produktif akan tumbuh pada wilayah yang memiliki iklim investasi yang ramah. Salah satu faktor dominan pembentuk iklim investasi yang ramah adalah rasa aman dan suasana kondusif.



Gambar 3.18. *Crime Total* per Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2020-2021

Sumber : https://jogja.polri.go.id/website/?page_id=12075 diakses 3 februari 2022

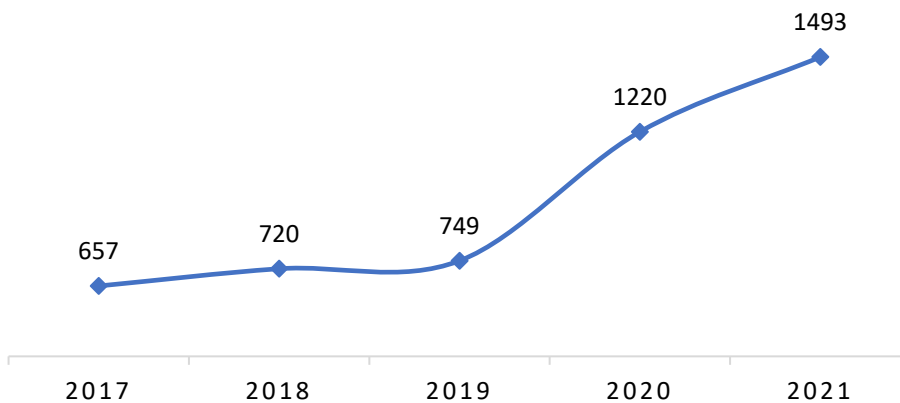
Wilayah Kabupaten Sleman memiliki kerawanan tindak kejahatan tertinggi dengan angka *crime total* tahun 2020 sebanyak 1.449 kasus dan meningkat menjadi 1.502 kasus di tahun 2021 atau meningkat 3.65%. Kabupaten Bantul menempati peringkat 2 dengan angka *crime total* tahun 2020 sebanyak 857 kasus meningkat menjadi 1.199 kasus di tahun

2021 atau meningkat 39,9%. Kabupaten Gunungkidul mengalami peningkatan tertinggi diantara kabupaten yang lain, yaitu dari 209 di tahun 2020 menjadi 568 kasus di tahun 2021 atau meningkat 171 %. Sementara di Kota Yogyakarta angka *crime total* justru mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 586 kasus menjadi 576 kasus di tahun 2021 atau menurun 1,7%. Kabupaten Kulon Progo juga mengalami penurunan kasus, dari 507 kasus di tahun 2020 menjadi 432 kasus di tahun 2021 atau menurun 14,79%. Pada sumber data yang diakses tidak disebutkan tentang jenis kejahatan yang mengalami peningkatan dan penurunan.

4. Program Penanggulangan Kemiskinan, dengan indikator:

a. Persentase Peningkatan Penumbuhan Wirausaha Baru

Dampak pandemi COVID-19 memberi kontribusi positif terhadap peningkatan jumlah wirausaha baru di DIY. Hal ini disebabkan adanya pergeseran dari masyarakat pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja yang beralih menjadi wirausaha. Namun agar wirausaha baru ini dapat terus berkelanjutan perlu adanya pembinaan dan pendampingan dari pemerintah daerah agar dapat meningkatkan kapasitas, produktifitas dan daya saing. Peningkatan jumlah wirausaha baru selama lima tahun terakhir dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut:



Gambar 3.19. Perkembangan WUB Tahun 2017-2021

Sumber: Diskop dan UKM DIY, 2022

Tabel 3.33. Target dan Capaian Indikator Program Persentase Peningkatan Penumbuhan Wirausaha Baru Tahun 2021

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2020	2021			Target akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase Peningkatan Penumbuhan Wirausaha Baru	%	0,4	0,4	0,49	122,50	0,4	122,50

Sumber: Diskop dan UKM DIY, 2022

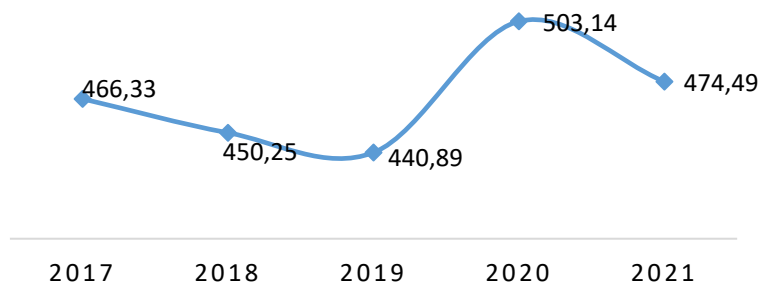
Persentase Peningkatan Penumbuhan WUB tahun 2021 dapat tercapai atas dukungan dan fasilitasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan UKM DIY. Pembinaan dan pendampingan lintas sektoral, peningkatan pemasaran melalui Galeri YIA dan SMESCO serta optimalisasi pemasaran melalui Sibakul markethub, Gelaran Ngombe Jamu, Pameran Semarak SiBakul, Pameran Virtual serta pendampingan melalui pelatihan, coaching, mentoring, pendamping PLUT dan kolaborasi Pentahelix. Perluasan pasar dengan tindak lanjut PP Nomor 7 Tahun 2021 dengan on boarding pengadaan barang dan jasa, adanya fasilitasi dan sertifikasi produk seperti halal, PIRT, MD, Nilai gizi dan TKDN di laksanakan untuk meningkatkan nilai produk UMKM di pasaran.

Selain itu, Pemda DIY juga berupaya mendukung tumbuhnya WUB melalui penumbuhan semangat kewirausahaan di desa-desa preneur dengan skeman G2R, K45PAK, Blangkon dan Giriloji. Perda tentang Pemberdayaan Koperasi dan UKM serta Perda tentang Kewirausahaan yang diharapkan dapat memperluas kesempatan berusaha bagi WUB. Perda tersebut memberikan dampak signifikan terhadap penumbuhan semangat berusaha terutama pada WUB yang berada di lokasi desa wisata maupun wisata minat khusus yang tumbuh pesat di DIY.

b. Jumlah Penduduk Miskin (Jumlah Penduduk Miskin (Pada Tahun n))

Kemiskinan telah menjadi permasalahan daerah yang mendesak dan membutuhkan berbagai intervensi penanganan yang dikombinasikan dengan pendekatan yang sistematis, terpadu, dan menyeluruh.

Hasil pendataan Susenas September 2021 menunjukkan bahwa besaran Garis Kemiskinan DIY adalah Rp 496.904,00 per kapita per bulan atau naik 6,76% jika dibandingkan dengan Garis Kemiskinan pada September 2020 yang besarnya Rp465.428,00. Sementara itu jumlah penduduk miskin pada September 2021 di DIY sebanyak 474.490 ribu orang atau 11,91% terhadap total penduduknya. Penduduk miskin pada periode September 2020 adalah 503.140 ribu orang atau 12,80% dari penduduk DIY. Data perkembangan jumlah penduduk miskin selama lima tahun terakhir ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 3.20. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin DIY Tahun 2017 – 2021 (Ribu Orang)

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Tabel 3.34. Target dan Capaian Indikator Program Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2021

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Jumlah Penduduk Miskin	Ribu jiwa	503.140	309.021	474.490	46,45	278.509	29,63

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Dalam rangka penurunan jumlah penduduk miskin, Pemda DIY melaksanakan beberapa intervensi pada tahun 2021 melalui program penanggulangan kemiskinan. Upaya ini juga dilaksanakan bersama dengan perbaikan *data base* kelompok sasaran serta diselaraskan dengan penganggulangan dampak akibat pandemi COVID-19.

c. Pengeluaran per Kapita Masyarakat

Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan.

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan non makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Pada tahun 2021, pengeluaran per kapita per tahun adalah Rp17.014.440,00 lebih besar daripada target yang telah ditentukan sebesar Rp14.333.000,00 atau tingkat pencapaian targetnya adalah 118,71%. Pengeluaran per kapita per tahun mengalami peningkatan sebesar 0,42% dibandingkan tahun 2020 sebagai indikasi adanya proses *economic recovery* usai pandemi COVID-19. Kemampuan ekonomi rumah tangga di DIY cenderung mengalami penguatan jika dilihat dari perkembangan pengeluaran rumah tangga. Jumlah Pengeluaran Per Kapita DIY Tahun 2017 hingga 2021 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3.35. Jumlah Pengeluaran Per Kapita DIY Tahun 2017-2021

Jenis Pengeluaran	2017	2018	2019	2020	2021
Pengeluaran per kapita per bulan	1.140.167	1.302.661	1.339.726	1.411.972	1.417.870
Pengeluaran Per Kapita per tahun	13.682.004	15.631.932	16.076.712	16.943.664	17.014.440

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Untuk target dan capaian angka pengeluaran per kapita masyarakat secara rinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.36. Target dan Capaian Indikator Program Pengeluaran Per Kapita Masyarakat Tahun 2021

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap Target Akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Pengeluaran Per Kapita Masyarakat	Ribu Rp /tahun	16.943	14.333	17.014	118,71	14.593	116,59

Sumber: BPPSD DIY, 2022

Pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk komoditas non makanan selalu lebih besar dari komoditas makanan. Rata-rata pengeluaran per kapita penduduk pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp1.417.870,00 per kapita per bulan yang terdiri dari pengeluaran non makanan sebesar Rp823.248,00 (41,94%) dan makanan sebesar Rp594.622,00 (58,06%). Proporsi rata-rata pengeluaran non makanan tahun 2020 yaitu Rp832.693,00 per kapita per bulan. Dapat disimpulkan bahwa tahun 2021 rata-rata pengeluaran non makanan turun sebesar 1,13% dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan proporsi rata-rata pengeluaran makanan tahun 2020 yaitu Rp579.279,00 per kapita per bulan. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran makanan pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 2,65% dibanding tahun sebelumnya.

5. Program Pelestarian Budaya Benda dan Tak Benda, dengan indikator:

a. Persentase Peningkatan Budaya Benda yang Dilestarikan

Prioritas pelestarian budaya benda pada tahun 2021 masih melanjutkan prioritas di tahun 2020, diarahkan untuk mewujudkan Yogyakarta sebagai warisan budaya dunia. Berbagai kegiatan pengelolaan dan pelestarian dilakukan di sekitar Sumbu Filosofi dan Kota Yogyakarta, antara lain Revitalisasi Pojok Beteng Lor Wetan Kraton Yogyakarta, Rehabilitasi Bangunan Kraton, kegiatan pemeliharaan aset Kraton dan Pura Pakualaman, pembenahan fasad di sepanjang Malioboro, Penataan Kotabaru, pemeliharaan Jagang Benteng Vredeburg, Rehabilitasi Bioskop Permata, Penataan Pekapalan, dan lain sebagainya. Selain itu, pelestarian budaya benda juga didukung oleh pembinaan dan pengelolaan serta pengembangan museum yang ada di DIY.

Tabel 3.37. Target dan Capaian Indikator Program Persentase peningkatan budaya benda yang dilestarikan Tahun 2021

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase peningkatan budaya benda yang dilestarikan	%	13,27	14,18	14,22	100,42	15,17	93,74

Sumber: Disbud DIY, 2022

Pencapaian Indikator sasaran Jumlah budaya benda yang dilestarikan dari target 14,18% terealisasi 14,22% pada tahun 2021. Bila diukur dari pencapaian target akhir RPJMD sebesar 15,17%, mempunyai andil sebesar 93,74% sehingga target pada tahun 2022 diproyeksikan akan tercapai. Pencapaian kinerja ini didukung dengan program kegiatan yang dilakukan secara kolaborasi oleh pemerintah dan masyarakat. Realisasi budaya benda yang dikelola dan dilestarikan pada tahun 2021 terdiri dari 763 budaya benda, dengan rincian dari 1 struktur, 11 Situs, 373 Benda Cagar Budaya, 376 Bangunan Cagar Budaya dan 2 Kawasan Cagar Budaya.

b. Persentase Peningkatan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan

Budaya tak benda merupakan budaya yang tidak berwujud fisik barang. Warisan budaya tak benda antara lain meliputi nilai, bahasa, adat dan tradisi, dan kesenian. Bahasa menjadi penting untuk menumbuhkan jati diri dan mengembangkan kepribadian. Peningkatan budaya tak benda berupa bahasa dilakukan dengan diselenggarakannya Kongres Aksara Jawa yang merupakan kongres bertaraf nasional, Kompetisi Bahasa dan Sastra (10 kategori), macapatan di 22 lokasi di DIY, Pergelaran karya Bahasa dan Sastra dalam bentuk webinar, temu karya sastra pelajar, Digitalisasi Aksara Jawa, pemberdayaan pelaku seni budaya secara daring melalui aplikasi sistem pembayaran digital QRIS, webinar Ksatria Winaya, penerbitan majalah Sempulur dan Tabloid Carakita setiap triwulan, sandiwara radio berbahasa Jawa sebanyak 25 kali, pengembangan kethoprak kekinian, dan pengembangan naskah kuno.

Keistimewaan DIY bukan hanya membawa budaya DIY ke even nasional dan internasional juga menarik even nasional dan internasional ke DIY. Budaya DIY hadir melalui finalisasi penyelenggaraan kongres kebudayaan Jawa di Surabaya, even kebudayaan berupa muhibah budaya di Bandung, dan misi kebudayaan di Dubai, UEA. Pemda DIY bekerjasama dengan berbagai organisasi seni dan budaya ternama seperti Padepokan Bagong Kusudiharjo, PBB I Sekar Jagad, aliansi mahasiswa nusantara, Retno Aji Mataram. Pemda DIY telah menyelenggarakan *workshop*, pementasan dan lomba seni Lukis DIY-Kyoto bagi pelaku seni dan budaya DIY.

Budaya tak benda berupa kesenian menurut jenisnya dibagi menjadi seni musik, seni tari, dan seni drama. Salah satu bentuk budaya tak benda yang perlu dilestarikan adalah upacara adat. Upacara adat merupakan wahana interaksi sosial serta media pewarisan tata nilai. Upacara adat biasanya terkait dengan religi, peristiwa tertentu, tokoh tertentu dan situs tertentu. Sejauh ini, DIY telah memfasilitasi 56 upacara adat dan festival upacara adat di 438 desa/kelurahan.

Desa/Kelurahan Budaya menjadi bagian penting dari pemerataan pemajuan kebudayaan kepada desa dan masyarakat secara langsung. Desa Budaya awalnya ditetapkan dengan SK Gubernur DIY No. 325/KPTS/1995 tentang Desa Budaya, yang berisi penetapan 32 Desa Budaya dan selanjutnya diatur dengan Pergub DIY No. 36 Tahun 2014 Tentang Desa/Kelurahan Budaya. Selanjutnya dilakukan penetapan Desa Budaya melalui SK Gubernur DIY No. 262/KEP/2016 Tentang Penetapan Desa/Kelurahan Budaya. Pada tahun 2021 dilakukan pengiriman 112 pendamping ke 56 Desa/Kelurahan Budaya, pemberian bantuan 8 gamelan perunggu sebagai penunjang sarana dan prasarana Desa Budaya, pentas seni di bandara YIA oleh Desa Budaya, gelar potensi, pembuatan profil, bantuan pakaian adat.

Sesuai amanat UU No. 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, Pemda DIY melakukan upaya pembinaan terhadap kebudayaan lain yang berkembang di DIY. Hal ini dilakukan dengan Program Selendang Sutera yang di dalamnya mencakup Seminar Budaya, Jelajah Budaya sebanyak 3 kali, dan Gelar Budaya Etnis.

Peran serta masyarakat penting dalam memajukan kebudayaan. Guna meningkatkan peran serta masyarakat, telah dilakukan dengan penyerahan bantuan 65 gamelan dan fasilitasi 235 organisasi seni pertunjukan. Peran serta seniman juga mendapat perhatian dan penghargaan dari Pemda DIY. Pada tahun 2021 Pemda DIY memberikan penghargaan Anugerah Budaya berupa pemberian penghargaan bagi 24 Pelestari dan/atau Pelaku WBCB, Adat, Seni, dan Budayawan.

Tabel 3.38. Target dan Capaian Indikator Program Persentase peningkatan budaya takbenda yang dilestarikan Tahun 2021

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Tar-get	Realisasi	% Realisasi		
Persentase peningkatan budaya takbenda yang dilestarikan	%	36,60	16,82	16,89	100,41	20,00	84,45

Sumber: Disbud DIY, 2022

Berbagai program dan kegiatan yang telah dilakukan mampu mendukung pencapaian Kinerja Program Pemda. Pencapaian kinerja Peningkatan budaya takbenda yang dilestarikan pada tahun 2021 melampaui angka yang ditargetkan yaitu 16,89%. Pencapaian terhadap target akhir RPJMD pada tahun 2022 sebesar 84,45% dari target 20%.

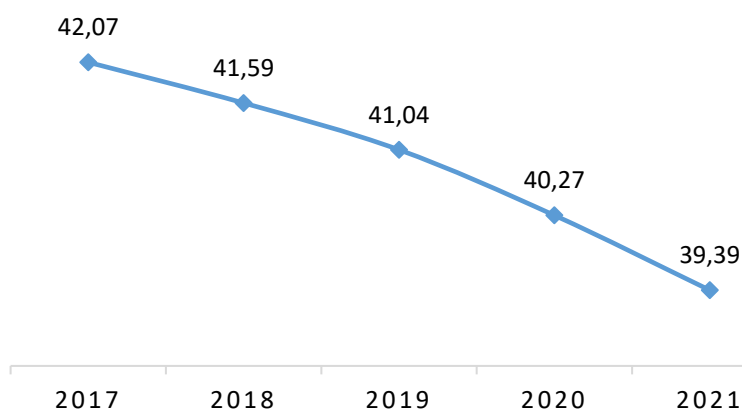
Realisasi budaya tak benda yang dikelola dan dilestarikan pada tahun 2021 terdiri dari 353 budaya tak benda, dengan rincian: 61 upacara adat, 6 upacara tradisi, 235 organisasi seni pertunjukan, 13 organisasi perfilman, 4 lembaga budaya, dan 34 organisasi kepercayaan.

6. Program Pengembangan Sektor Dominan (Pertanian, Industri Pengolahan, Jasa), dengan indikator:

a. Kontribusi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Perdagangan dalam PDRB DIY

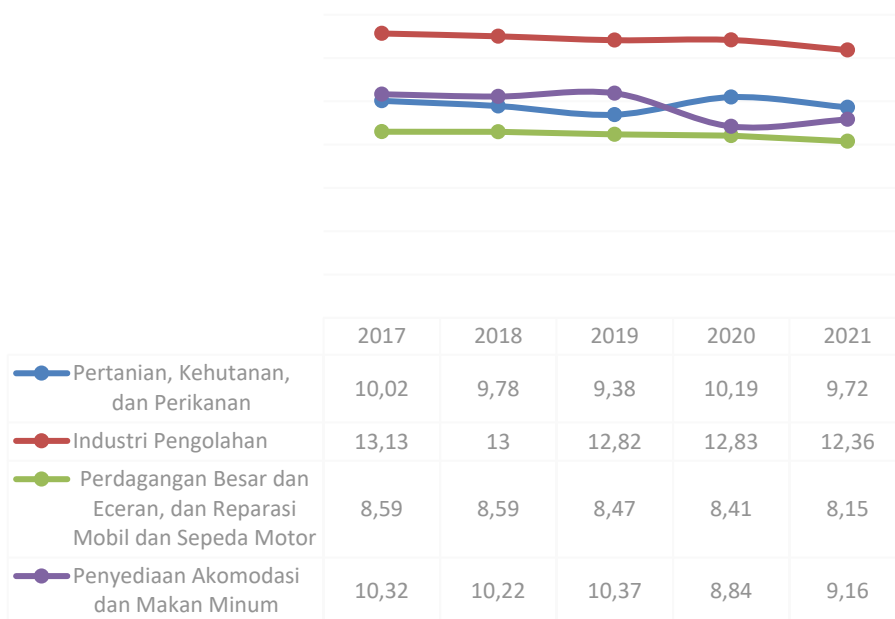
Empat sektor atau lapangan usaha yang relatif mendominasi kontribusi terhadap total PDRB DIY yaitu pertanian, industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum serta perdagangan merupakan empat sektor penyumbang selama beberapa tahun terakhir. Secara rerata pada periode 2017 sampai 2021, sumbangan lapangan industri pengolahan yang merupakan lapangan usaha paling dominan di kelompok empat lapangan usaha tersebut yaitu 12,83%. Sementara itu kontribusi lapangan usaha lainnya adalah akomodasi dan makan minum 9,78%, pertanian, kehutanan dan perikanan adalah 9,82% dan perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor adalah 8,44%.

Selama periode tahun 2017 dan 2021, tren sumbangan empat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian DIY cenderung menurun. Pada tahun 2020, sumbangan gabungan empat lapangan usaha tersebut adalah 40,27% dan kemudian menurun menjadi 39,39% di tahun 2021.



Gambar 3.21. Kontribusi 4 Lapangan Usaha terhadap PDRB DIY tahun 2017 - 2021
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022 (data diolah)

Secara rinci perkembangan kontribusi masing-masing sektor disajikan pada gambar berikut ini. Perkembangan kontribusi tiap lapangan usaha menunjukkan kecenderungan menurun.



Gambar 3.22. Rincian Perkembangan Kontribusi Masing-Masing Sektor
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Tabel 3.39. Target dan Capaian Indikator Program Kontribusi sektor pertanian, industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum serta perdagangan dalam PDRB DIY Tahun 2021

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Kontribusi Sektor Pertanian, industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum serta perdagangan dalam PDRB DIY	%	40,27	45,00	39,39	87,53	46	85,63

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022 (data diolah)

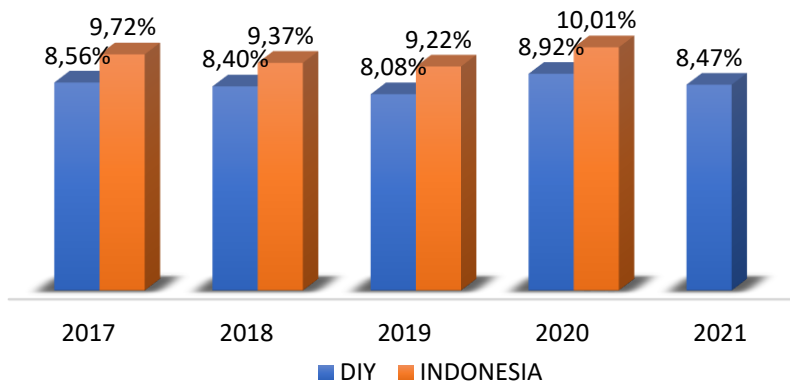
Capaian kontribusi sektor pertanian, industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum serta perdagangan di tahun 2021 adalah 39,39% yang mencapai sekitar 87,53% dari target sebesar 45,00%. Ketidaktercapaian tersebut disebabkan oleh penurunan kontribusi kumulatif empat lapangan usaha tersebut selama beberapa tahun terakhir. Penurunan kontribusi empat lapangan usaha tersebut dipengaruhi oleh penurunan sumbangan lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dari waktu ke waktu sejak tahun 2017 dan penurunan kontribusi lapangan usaha industri manufaktur sejak tahun 2017. Sumbangan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tren nya terus menurun dari 10,02% di tahun 2015 menjadi 9,72% di tahun 2021.

1) Sektor Pertanian

Cerminan keberhasilan pembangunan ekonomi daerah terlihat pada indikator nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari setiap perkembangan periode waktu. Di masa sulit seperti pandemi sekarang ini, sektor pertanian telah memberikan kontribusi dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang positif dan cukup signifikan.

Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan dalam PDRB DIY tersusun atas kategori (1) Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian; (2) Kehutanan dan Penebangan Kayu; dan (3) Perikanan. Kategori pertama terdiri dari sub kategori Tanaman

Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, serta Jasa Pertanian dan Perburuan. Sektor pertanian yang akan dilaporkan adalah sub kategori Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan. Pertanian sebagai salah satu penyumbang utama dalam perekonomian DIY pada kurun waktu 2017-2019 mengalami penurunan dan di tahun 2020 saat pandemi COVID-19 menyerang kontribusinya terhadap PDRB DIY justru mengalami peningkatan. Namun di tahun 2021 ini kontribusinya kembali menurun karena turunnya produksi tanaman pangan dan populasi peternakan dibanding tahun sebelumnya. Walaupun kontribusinya menurun pada tahun 2021 pertanian masih menjadi penyumbang terbesar keempat dalam PDRB DIY.



Gambar 3.23. Kontribusi Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan) terhadap PDRB DIY dan PDB Indonesia Tahun 2017-2021

Keterangan: *) Data capaian untuk Indonesia Tahun 2021 belum dirilis

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Dinamika kontribusi pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sejalan dengan kontribusi pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DIY. Dari tahun 2017-2019 secara berturut-turut mengalami penurunan dan di tahun 2020 mengalami peningkatan, untuk DIY naik cukup signifikan sebesar 0,84%. Pada tahun 2021 kontribusinya kembali menurun sebesar

0,45%. Capaian DIY berada di bawah capaian Nasional, dipengaruhi terbatasnya lahan pertanian yang merupakan salah satu faktor utama produksi. Ketangguhan sektor pertanian di masa pandemi telah membuktikan bahwa pertanian dapat memberikan penghidupan bagi masyarakat khususnya petani sehingga ke depan diperlukan terobosan program/kegiatan yang mampu mempertahankan eksistensi sektor pertanian, serta peningkatan proporsi anggaran yang lebih tinggi.

2) *Penyediaan Akomodasi dan Makan*

Tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, terjadi pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan jumlah kunjungan wisatawan. Pada masa pandemi COVID-19 mobilitas masyarakat sangat dibatasi, sehingga berdampak pada jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke DIY. Pada tahun 2020 kunjungan wisatawan yang berkunjung ke DIY menurun sebesar 72%, atau berkurang sebesar 4.700.833 orang bila dibandingkan dengan tahun 2019. Pada tahun 2020 adalah masa awal pandemi COVID-19, pembatasan mobilitas masyarakat dilaksanakan cukup ketat pada tahun 2020, sehingga aktivitas pariwisata sangat menurun pada tahun 2020. Pada tahun 2021 Pemerintah Pusat telah memulai kegiatan vaksinasi secara nasional, yang bertahap dilakukan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Awal tahun 2021 Pemda DIY juga mengeksekusi kegiatan vaksinasi secara masif dengan harapan dapat memulihkan kegiatan perekonomian di masyarakat yang terpuruk karena pandemi COVID-19. Dinas Pariwisata DIY pada tahun 2021 juga menyelenggarakan kegiatan vaksinasi yang ditujukan kepada para pelaku pariwisata se-DIY. Tahun 2021 COVID-19 varian Delta telah masuk ke Indonesia dan menyebabkan peningkatan kasus COVID-19 yang sangat signifikan dan hal tersebut terjadi di DIY. COVID-19 varian Delta menyebabkan penurunan aktivitas pariwisata yang cukup tajam.

Tabel 3.40. Perkembangan Jumlah Wisatawan, MICE, dan Rata-rata Lama Tinggal di DIY Tahun 2015-2021

Tahun	Jumlah		Jumlah Wisatawan (Wisman+Wisnus) (Orang)	Jumlah MICE (Kali)	Lama Tinggal/LOS (Hari)	
	Wisman	Wisnus			Wisman	Wisnus
2015	308.485	3.813.720	4.122.205	11.337	2,07	1,85
2016	355.313	4.194.261	4.549.574	14.069	2,00	1,95
2017	397.951	4.831.347	5.229.298	16.135	2,13	1,98
2018	416.374	5.272.719	5.689.093	17.814	2,15	1,99
2019	433.027	6.116.354	6.549.381	19.370	2,31	1,99
2020	69.968	1.778.580	1.848.548	1.568	1,95	1,65
2021	14.740	4.279.985	4.294.725	6.427	2,24	1,41

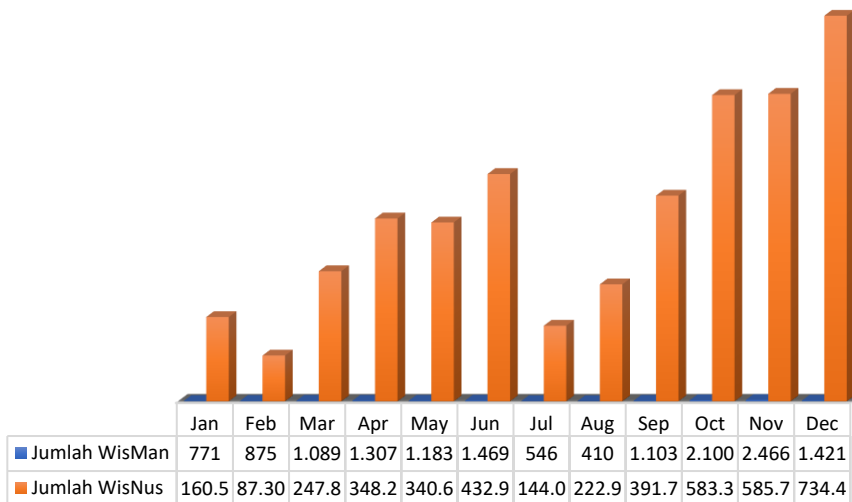
Sumber: Dispar DIY, 2021 (data diolah)

Wisatawan yang datang ke DIY masih didominasi oleh Wisatawan Nusantara (Wisnus), sedangkan Wisatawan Mancanegara (Wisman) yang datang ke DIY bila dibandingkan dengan tahun 2020 menunjukkan penurunan. Penurunan jumlah wisman yang berkunjung ke DIY disebabkan oleh kasus COVID-19 dengan varian Delta dan varian Omicron pada tahun 2021 telah meningkat kasusnya di luar negeri. COVID-19 di luar negeri masih memperlihatkan adanya peningkatan kasus COVID-19 per harinya di tahun 2021 sehingga berdampak kepada menurunnya jumlah kunjungan wisman ke DIY.

Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional, pada bulan Agustus menerbitkan Surat Edaran nomor 18 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi COVID-19. Dalam surat edaran tersebut, diberlakukan berbagai pembatasan bagi orang yang akan masuk di Indonesia baik Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA), yang bertujuan untuk memproteksi masyarakat dari varian baru, yaitu varian Alpha, varian Beta, varian Delta dan varian Gamma. Kondisi peningkatan persebaran varian Delta di luar negeri pada pertengahan hingga akhir tahun 2021 cukup mengkhawatirkan.

Pada tahun 2021, titik terendah kunjungan wisatawan terjadi pada bulan Februari, hal itu dikarenakan terdapat lonjakan kasus COVID-19 pada bulan Januari dan Februari, sebagai dampak dari mobilitas

orang dari luar DIY masuk ke dalam DIY pada saat akhir tahun 2020 sampai pada bulan Januari tahun 2021. Jumlah wisatawan kembali mengalami penurunan kembali pada bulan Juli dan Agustus dikarenakan COVID-19 varian Delta telah masuk ke DIY dan mengakibatkan lonjakan kasus yang sangat tinggi. Kondisi tersebut tidak hanya terjadi di DIY, namun terjadi di seluruh daerah di pulau Jawa dan Bali. Kondisi tersebut membuat Pemerintah Pusat menerbitkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang berlangsung selama dua bulan (Juli dan Agustus).



Gambar 3.24. Jumlah Wisman dan Wisnus di DIY Tahun 2021
Sumber: Dispar DIY, 2022

Untuk lama tinggal wisatawan, baik wisman maupun wisnus diuraikan sebagai berikut. Tahun 2021 rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara mencapai 2,24 hari. Penerapan protokol kesehatan dalam bentuk sertifikasi CHSE (*Cleanliness Health Safety and Environment Sustainability*) di hotel-hotel di DIY menjadi jaminan bagi para wisatawan yang menginap, bahwa hotel yang sudah bersertifikasi CHSE telah sepenuhnya menerapkan protokol kesehatan. Pada tahun 2021 hotel di DIY yang sudah bersertifikasi CHSE sebanyak 173 hotel.

Lama tinggal wisatawan nusantara pada tahun 2021 menurun jika dibandingkan dari tahun 2020. Peningkatan jumlah wisatawan nusantara pada tahun 2021 terutama di Tri Wulan IV tidak mempengaruhi peningkatan lama tinggal wisatawan nusantara. Anomali tersebut disebabkan karena masih ada kekhawatiran dari sebagian masyarakat untuk menginap di hotel meskipun banyak hotel sudah menerapkan protokol CHSE. Selain itu adanya kebijakan dari pemerintah pusat yang menggeser libur panjang dan menghapus cuti bersama menyebabkan wisatawan yang berkunjung tidak memiliki waktu lebih lama untuk menginap di DIY. Rata-rata wisatawan yang datang dari luar kota hanya berkunjung satu hari lalu kembali ke daerah masing-masing.

3) *Industri Pengolahan dan Perdagangan*

Industri pengolahan masih menjadi salah satu penopang utama PDRB DIY dengan kontribusi sebesar 12,36% ditahun 2021 atau sebesar Rp12.670.357 juta meningkat 0,37% dari tahun 2020. Meskipun mengalami peningkatan, namun belum mampu mencapai target kinerja yang ditetapkan, dengan capaian kinerja sebesar 92,70%. Pembangunan sektor industri memerlukan dukungan dari pemangku kepentingan lainnya seperti pemerintah pusat, perguruan tinggi, swasta dan lain-lain.

Selain industri, sektor perdagangan dengan sasaran meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri juga berkontribusi cukup besar pada struktur PDRB DIY sebesar 8,15%. Sasaran ini memiliki indikator kinerja nilai sektor perdagangan dalam PDRB dengan target di tahun 2021 sebesar Rp9.403.163 Juta dengan realisasi Rp8.379.070 Juta atau meningkat sebesar 1,51% dibandingkan tahun sebelumnya walaupun peningkatannya di bawah PDB di sektor yang sama.

Peningkatan PDRB sektor ini dikarenakan adanya peningkatan aktivitas perdagangan dalam dan luar negeri. Peningkatan aktivitas perdagangan luar negeri ditandai dengan meningkatnya nilai

ekspor. Berbagai program dari pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka pemulihan ekonomi tentu berkontribusi pada pertumbuhan PDRB sektor ini. Namun demikian pertumbuhan PDRB sektor ini terhambat karena adanya penurunan aktivitas ekonomi akibat pandemi COVID-19 sehingga target yang sudah ditetapkan tidak tercapai.

b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DIY selama lima tahun terakhir bersifat fluktuatif, jumlah tenaga kerja yang tidak terserap pasar kerja sangat dipengaruhi oleh kesesuaian kualifikasi pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan kegiatan ekonomi. TPT pada tahun 2021 sebesar 4,56% mengalami penurunan 0,01% poin jika dibanding dengan TPT tahun 2020 sebesar 4,57%, dengan kata lain terdapat 4 sampai 5 orang penganggur dari 100 orang angkatan kerja di DIY.

Tabel 3.41. Target dan Capaian Indikator Program Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2021

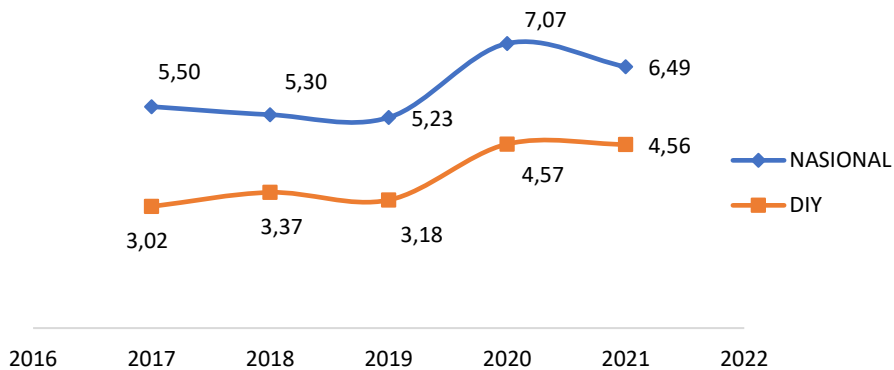
Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2020	2021			Target akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,57	2,24	4,56	49,12	2,07	45,40

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Tingkat Pengangguran Terbuka dipengaruhi oleh jumlah penganggur dan jumlah angkatan kerja, sehingga keberhasilan menekan pertambahan jumlah angkatan kerja akan berpengaruh positif terhadap TPT. Sesuai hasil Sakernas Agustus 2021 BPS, jumlah angkatan kerja DIY sebanyak 2.334.955 orang bertambah 106.793 orang dibanding agustus 2020 sebanyak 2.228.162 orang, atau mengalami kenaikan sebesar 4,79%. Komponen pembentuk angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran, kondisi 2021 penduduk yang bekerja 2.228.523 orang dan pengangguran 106.432 orang. Jumlah penganggur

bertambah sebesar 4.586 orang dibandingkan tahun 2020 sebanyak 101.846 orang. Sedangkan penduduk yang bekerja bertambah 48.396 orang dibanding tahun 2020 sebanyak 2.126.316 orang. Meskipun penduduk yang bekerja mengalami kenaikan, tetapi masih diperlukan kebijakan perluasan kesempatan kerja untuk mengimbangi laju pertambahan jumlah angkatan kerja.

TPT di DIY dalam kurun waktu 2017 – 2021 mengalami fluktuasi, TPT tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 4,57% naik 1,39 poin dibanding tahun 2019 sebesar 3,18%, namun tetap berada di bawah TPT nasional. Pada Agustus 2021 TPT Nasional sebesar 6,49% turun 0,58 poin dibanding Agustus 2020 sebesar 7,07%. Perkembangan TPT Nasional dan DIY Tahun 2017–2021 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3.25. Perkembangan TPT DIY dan Indonesia tahun 2017 - 2021

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Realisasi TPT pada tahun 2021 sebesar 4,56% dari target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 2,24% atau capaian realisasi sebesar 49,12%. Tidak tercapainya target TPT ini sangat dipengaruhi adanya pandemi COVID-19, yang pada tahun 2021 DIY mengalami gelombang kedua pandemi COVID-19. Sektor ketenagakerjaan yang terdampak tidak hanya pengangguran tetapi juga penduduk usia kerja. Diperlukan optimalisasi seluruh sektor untuk bersama-sama mengupayakan terciptanya kesempatan kerja serta menjaga kondusifitas iklim dunia usaha di DIY.

c. Jumlah Desa Mandiri Budaya (Desa/Kampung Wisata, Desa/Kelurahan Budaya, Desa Preneur, Desa Prima)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY 2017-2022 memiliki visi Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja dan misi meningkatkan kualitas hidup, kehidupan, dan penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban serta mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis. Terdapat berbagai rencana kebijakan, program, dan sasaran yang ditujukan pada pemenuhan target dan capaian sesuai dengan visi dan misi RPJMD DIY tersebut. Salah satu nya adalah terwujudnya Desa/Kelurahan Mandiri Budaya.

Kelurahan mandiri budaya adalah kelurahan yang secara otonom mampu memenuhi kebutuhannya sendiri melalui pendayagunaan dan pemanfaatan segenap sumber daya internal desa dan eksternal (supra-desa) untuk mengaktualisasikan, mengembangkan, dan mengkonservasi kekayaan potensi budaya (benda dan/atau takbenda) yang dimilikinya melalui pelibatan partisipasi aktif warga dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Desa/Kelurahan Mandiri Budaya adalah Desa yang mempunyai serangkaian atribut desa/kampung wisata, desa/kelurahan budaya, desa preneur, desa prima. Program Desa/Kelurahan Mandiri Budaya merupakan program yang telah dicanangkan dalam Perda DIY Nomor 3 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY. Hal tersebut tertuang pada Program Pembangunan Daerah dengan berdasar pada arah kebijakan dan program strategis, dimana Desa/Kelurahan Mandiri Budaya merupakan prioritas pembangunan DIY dengan target pada capaian kinerja program terdapat 5 Desa/Kelurahan Mandiri Budaya pada tahun 2019, 10 Desa/Kelurahan Mandiri Budaya pada tahun 2020, 15 Desa/Kelurahan Mandiri Budaya pada tahun 2021, dan tahun 2022 ditargetkan tercapai sebanyak 20 Desa/Kelurahan Mandiri Budaya.

Pada tahun 2020, Pemda DIY telah mengeluarkan regulasi berupa Pergub DIY Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya dan Kepgub DIY Nomor 129/TIM/2020 tentang Pembentukan Tim Penilaian dan Monitoring Evaluasi Desa/Kalurahan Mandiri Budaya. Selain itu melalui Kepgub DIY Nomor 364/KEP/2020 tentang Penetapan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2020 telah menetapkan 10 Desa/Kalurahan sebagai Desa/kalurahan Mandiri Budaya yaitu:

Tabel 3.42. Desa Mandiri Budaya 2020

No	Desa/Kalurahan	Kabupaten	Desa/Kel Budaya
1	Bejiharjo	Gunungkidul	Utama
2	Pagerharjo	Kulon Progo	Utama
3	Putat	Gunungkidul	Utama
4	Pandowoharjo	Sleman	Utama
5	Girikerto	Sleman	Utama
6	Wedomartani	Sleman	Utama
7	Sabdodadi	Bantul	Utama
8	Jatimulyo	Kulon Progo	Madya
9	Margodadi	Sleman	Madya
10	Bangunkerto	Sleman	Madya

Sumber: Disbud DIY, 2022

Sedangkan untuk tahun 2021, dilakukan penilaian dan pengusulan terhadap calon Desa/Kalurahan Mandiri Budaya yang kemudian ditetapkan dengan Kepgub P/2021 tentang Penetapan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2021, sebagai berikut :

Tabel 3.43. Desa/Kalurahan Mandiri Budaya yang Diusulkan Pada Tahun 2021

No	Desa/Kalurahan	Kabupaten	Desa/Kel Budaya
1	Tuksono	Kulon Progo	Utama
2	Banjarharjo	Kulon Progo	Madya
3	Jerukwudel	Gunungkidul	Madya
4	Tanjungharjo	Kulon Progo	Madya
5	Hargomulyo	Kulon Progo	Madya
6	Bangunjiwo	Bantul	Madya
7	Giring	Gunungkidul	Madya
8	Glagah	Kulon Progo	Madya

Sumber: Disbud DIY, 2022

Tabel 3.44. Target dan Capaian Indikator Program Jumlah Desa Mandiri Budaya (Desa/Kampung Wisata, Desa/Kelurahan Budaya, Desa Preneur, Desa Prima) Tahun 2021

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Desa mandiri budaya	Desa/Kelurahan	10	15	18	120	20	90

Sumber: Disbud DIY, 2022

Sampai tahun 2021 terdapat 18 Desa Mandiri Budaya yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur. Terdapat 8 Desa Mandiri Budaya dengan klasifikasi Utama yaitu Bejiharjo Gunungkidul, Pagerharjo Kulon Progo, Putat Gunungkidul, Pandowoharjo Sleman, Girikerto Sleman, Wedomartani Sleman, Sabdodadi Bantul dan Tuskono Kulon Progo. Di samping itu, terdapat 10 Desa Mandiri Budaya dengan peringkat Madya yaitu Jatimulyo Kulon Progo, Margodadi Sleman, Bangunkerto Sleman, Banjarharjo Kulon Progo, Jerukwudel Gunungkidul, Tanjungharjo Kulon Progo, Hargomulyo Kulon Progo, Bangunjiwo Bantul, Giring Gunungkidul, Glagah Kulon Progo.

7. Program Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana, dengan indikator:

a. Indeks Kualitas Air

Berdasarkan Permen LHK RI Nomer 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), kualitas air sungai ditetapkan menjadi indikator penilaian kualitas air di suatu daerah. Penilaian kualitas air sungai ini diasumsikan telah mewakili kondisi kualitas air secara umum dalam bentuk Indeks Kualitas Air (IKA). Indeks Kualitas Air yang semakin tinggi menunjukkan kualitas air yang semakin baik di suatu wilayah. IKA dihitung dari hasil analisis beberapa parameter kualitas air sungai pada periode dan titik-titik pemantauan tertentu.

IKA pada tahun 2021 ini menggunakan konsep perhitungan dari KLHK tahun 2019, yang menggunakan Indeks Pencemar (IP) dengan mempertimbangkan segmen hulu, tengah dan hilir Daerah Aliran Sungai (DAS). Nilai IKA berbanding terbalik dengan IP, semakin tinggi nilai IP maka nilai IKA semakin rendah. Nilai IP diperoleh berdasarkan perhitungan tujuh parameter kualitas air sungai hasil pemantauan kualitas air sungai pada sepuluh sungai yang menjadi kewenangan DIY. Tolok ukur parameter menggunakan Baku Mutu air berdasarkan Pergub DIY No. 20 Tahun 2008 Tentang Baku Mutu Air di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun tujuh parameter kualitas air sungai yang dihitung adalah *Dissolved Oxygen (DO)*, *Biological Oxygen Demand (BOD)*, *Chemical Oxygen Demand (COD)*, *Total Suspended Solid (TSS)*, *Phosphat (PO₄)*, *Fecal Coli*, dan *Total Coliform*. Sedangkan 10 sungai sasaran pemantauan yang menjadi kewenangan DIY adalah Sungai Winongo, Gajahwong, Code, Bedog, Konteng, Kuning, Tambakbayan, Oyo, Belik, dan Bulus, dengan titik pemantauan sebanyak 50 titik. Periode pemantauan pada tahun 2021 adalah sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu bulan Juni, Agustus dan Oktober yang masing-masing mewakili musim hujan, kemarau dan peralihan musim hujan dan kemarau. Penentuan titik pantau berdasarkan pada wilayah administratif, letak geografis, sumber pencemar, outlet DAS, titik *intake* pengelolaan air minum, dan hulu sungai yang dianggap tidak banyak aktivitas manusia. Validitas data kualitas air sungai didukung oleh analisis laboratorium lingkungan yang terakreditasi dan pengambilan sampel dilakukan oleh personil yang tersertifikasi sebagai pengambil contoh uji.

Adapun hasil perhitungan nilai IKA pada sepuluh sungai di DIY tahun 2018 - 2021 cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Realisasi IKA dari tahun 2018 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.45. Hasil Perhitungan Agregasi IKA DIY dan Kabupaten/Kota tahun 2018 – 2021

No.	Sungai	Nilai IKA			
		2018	2019	2020	2021
1	Winongo	37,50	43,33	32,5	35,9
2	Code	41,67	42,5	38,75	32,07
3	Gajahwong	38,33	30	42,5	29,64
4	Kuning	35,00	38,33	37,5	40,93
5	Konteng	36,67	30	20,00	27,67
6	Bedog	43,33	40,67	28,00	42,36
7	Belik	43,33	36,67	40,00	33,33
8	Bulus	43,33	40	40,00	33,33
9	Oyo	50,00	41,67	37,5	47,96
10	Tambakbayan	33,33	43,33	35,00	33,33
Rata-Rata IKA		40,25	38,65	35,18	35,42

Sumber: DLHK DIY, 2022

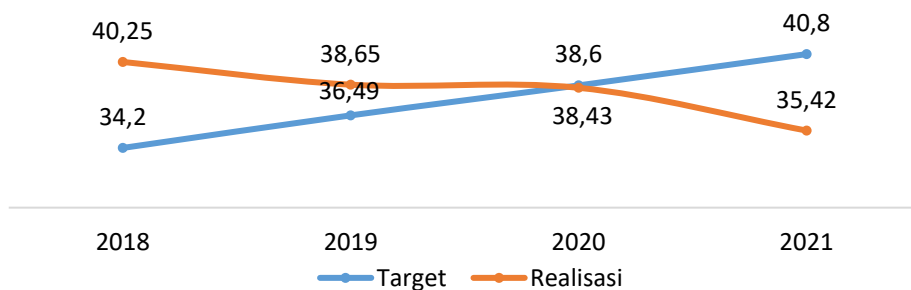
Target IKA tahun 2021 sebesar 40,80, sedangkan realisasi IKA sebesar 35,42, sehingga target IKA belum tercapai.

Tabel 3.46. Target dan Capaian Indikator Program Indeks Kualitas Air (IKA) Tahun 2021

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2020	2021			Target akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka Indeks	38,43	40,80	35,42	86,81	42,45	83,44

Sumber: DLHK DIY, 2022

Tren penurunan nilai IKA dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3.26. Tren Indeks Kualitas Air di DIY tahun 2018 - 2021

Sumber: DLHK DIY, 2022

Penurunan nilai IKA menunjukkan bahwa kualitas air sungai di DIY semakin buruk yang salah satunya karena pencemaran air sungai. Berdasarkan laporan pemantauan kualitas air sungai di DIY pada tahun 2021, kondisi sungai di DIY rata-rata tercemar ringan sampai berat. Sungai-sungai yang tercemar berat adalah sungai Gajahwong, Code dan Winongo terutama pada penggal tengah, yaitu sungai yang melintas di daerah perkotaan Kota Yogyakarta. Pencemar dominan adalah Bakteri Coli Tinja dan Bakteri Total Coliform yang melebihi baku mutu air sungai. Adanya bakteri Coli menunjukkan bahwa air telah terkontaminasi dengan limbah manusia dan hewan berdarah panas yang mengandung bakteri atau virus patogen. Selain pencemaran sungai, buruknya kualitas air sungai juga disebabkan karena terjadinya sedimentasi sungai dan hilangnya beberapa mata air yang menyebabkan debit sungai kecil. Tidak tercukupinya debit air menyebabkan proses netralisasi alami tidak berjalan dan konsentrasi kadar pencemar sungai menjadi tinggi.

Upaya dalam pengendalian pencemaran air sungai yang telah dilakukan DLHK adalah upaya pembinaan, pengawasan lingkungan dan koordinasi dengan instansi terkait di DIY dan Kabupaten/Kota. Pembinaan dilakukan terhadap usaha/kegiatan dalam pengelolaan air limbah. Sedangkan pengawasan dilakukan terhadap ketaatan usaha/kegiatan dalam pengelolaan air limbah berdasarkan peraturan, dan sanksi akan diberlakukan jika terdapat pelanggaran. Koordinasi dengan instansi dan lembaga di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota juga dilakukan agar upaya pengendalian pencemaran air sungai dapat dilakukan secara terpadu. Sedangkan upaya pencegahan juga dilakukan melalui pemberian rekomendasi terhadap ijin lingkungan yang akan diberikan terhadap usaha/kegiatan.

b. Indeks Kualitas Udara

Sumber pencemar udara di perkotaan antara lain disebabkan dari aktivitas transportasi, permukiman, persampahan dan industri. Pencemaran udara di DIY disebabkan sebagian besar dari aktivitas transportasi yang berkorelasi dengan laju pertumbuhan penduduk yang

cukup tinggi, dilaporkan sebesar 1,01% per tahun (DIKPLHD DIY, 2021). Hal ini mengingat DIY sebagai tujuan pendidikan dan wisata, dimana setiap tahunnya akan bertambah jumlah kendaraan dari pelajar dan kebutuhan mobilitas wisatawan.

Untuk mengukur tingkat pencemaran udara di suatu wilayah, KLHK telah menetapkan instrumen berupa Indeks Kualitas Udara (IKU). IKU ini berlaku secara Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. IKU dihitung berdasarkan Permen LHK Nomor 27 tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, terdiri dari 2 (dua) parameter, yaitu Nitrogen dioksida (NO_2) dan Sulfur dioksida (SO_2). Parameter NO_2 mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, dan SO_2 mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya. IKU DIY dihitung dari agregasi data pemantauan kualitas udara secara passive sampler DIY dan Kabupaten/Kota. Jumlah titik pantau di DIY sebanyak 20 lokasi mewakili wilayah transportasi, industri, permukiman dan perkantoran dengan kriteria persyaratan yang telah ditentukan. Adapun kriteria lokasi pemantauan kualitas udara ambien adalah : a. daerah padat transportasi yang meliputi jalan utama dengan lalu lintas padat; b. daerah atau kawasan industri; c. pemukiman padat penduduk; dan d. kawasan perkantoran yang tidak terpengaruh langsung transportasi.

Rumus IKU:

$$\text{IKU} = 100 - [50/0.9 \times (\text{Ieu} - 0.1)]$$

IKU mengadopsi metode dari EU (*European Union*) yang merupakan metode pengukuran kualitas udara di Eropa. Rumus tersebut digunakan dengan asumsi bahwa data kualitas udara yang diukur merupakan data konsentrasi pencemar, sehingga harus dilakukan konversi ke dalam konsentrasi kualitas udara, dengan melakukan pengurangan dari 100 persen.

Berdasarkan perhitungan IKU di DIY diperoleh data kualitas udara sebagai berikut:

Tabel 3.47. Data IKU DIY tahun 2021

No.	Lokasi	Rerata NO ₂	Rerata SO ₂	Ieu	IKU
		µg/Nm ³	µg/Nm ³	Indeks	Indeks
1.	Kulon Progo	9,11	5,15	0,24253	92,08
2.	Bantul	14,92	8,58	0,40103	83,28
3.	Gunungkidul	10,93	3,46	0,22332	93,15
4.	Sleman	11,87	9,75	0,39209	83,77
5.	Kota Yogyakarta	11,07	5,26	0,26974	90,57
IKU Rata-rata					88,57

Sumber : Analisis data kualitas udara DLHK DIY 2022

Berdasarkan hasil perhitungan rerata IKU Kabupaten/Kota diperoleh nilai Indeks Kualitas Udara DIY sebesar 88,57, sehingga belum memenuhi target RPJMD (89,07). Walaupun belum memenuhi target IKU RPJMD tahun 2021, tetapi berdasarkan kriteria kualitas udara nasional, nilai IKU 88,57 tergolong Baik.

Tabel 3.48. Kategori IKU

No.	Kategori	Angka Rentang
1	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
2	Baik	$70 \leq x < 90$
3	Sedang	$50 \leq x < 70$
4	Kurang	$25 \leq x < 50$
5	Sangat kurang	$0 \leq x < 25$

Sumber : PermenLHK No. 27 Tahun 2021 tentang IKLH

Jika dibandingkan dengan nilai IKU tahun 2020 sebesar 89,14, maka pada tahun 2021 ini, nilai IKU mengalami penurunan seperti pada tabel berikut.

Tabel 3.49. Target dan Capaian Indikator Program Indeks Kualitas Udara Tahun 2021

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2020	2021			Target akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka Indeks	89,14	89,07	88,57	99,44	89,74	98,70

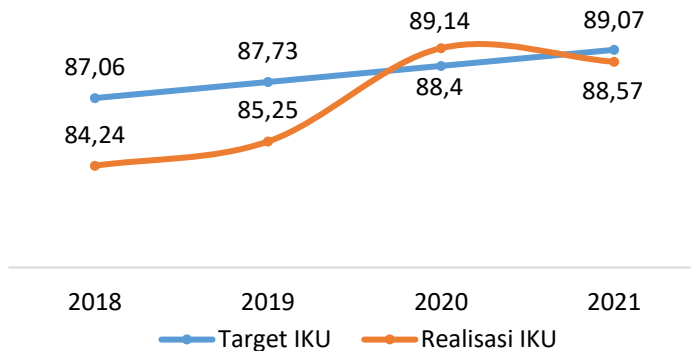
Sumber: DLHK DIY, 2022

Nilai IKU tahun 2018 – 2021 fluktuatif, mengalami kenaikan dari tahun 2018 sampai tahun 2020, kemudian turun pada tahun 2021. Tren nilai IKU dapat dilihat dalam tabel dan gambar di bawah.

Tabel 3.50. Tren Nilai IKU Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2018-2021

No.	Lokasi	Nilai IKU			
		2018	2019	2020	2021
1	Kulon Progo	85,54	93,26	92,91	92,08
2	Bantul	80,51	90,90	85,18	83,28
3	Gunungkidul	94,01	79,46	93,96	93,15
4	Sleman	78,74	78,63	86,66	83,77
5	Kota Yogyakarta	82,40	84,02	86,97	90,57
Rerata IKU DIY		84,24	85,25	89,14	88,57

Sumber: DLHK DIY, 2022



Gambar 3.27. Tren Nilai Indeks Kualitas Udara DIY tahun 2018 – 2021

Sumber: DLHK DIY, 2022

Faktor yang mempengaruhi nilai IKU terutama berasal dari emisi transportasi dan industri, tetapi emisi dari sektor transportasi lebih tinggi daripada industri. Hal ini ditunjukkan dari kadar NO₂ yang berasal dari emisi kendaraan bermotor lebih tinggi daripada kadar SO₂ yang merupakan emisi dari industri. Emisi kendaraan bergantung dari kualitas bahan bakar yang digunakan, sehingga penggunaan bahan bakar ramah lingkungan telah menjadi kebutuhan. Selain itu, kondisi mesin kendaraan juga memberikan andil terhadap kualitas emisi yang dihasilkan, dimana pemeliharaan perlu dilakukan agar kualitas mesin tetap terjaga. Penggunaan mesin-mesin motor untuk transportasi umum perlu pengawasan dan/atau pembatasan agar kualitas udara

tidak semakin memburuk. Adanya peningkatan moda transportasi udara juga berpengaruh terhadap turunnya nilai IKU, yang ditunjukkan dari data IKU Kabupaten Kulon Progo tahun 2021 sebesar 92,91 mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 92,08.

Upaya yang dilakukan DLHK DIY dalam pengendalian pencemaran udara di antara lain melalui pembinaan, pengawasan dan pencegahan. Pembinaan dan pengawasan dilakukan terhadap usaha/kegiatan industri. Adanya insentif pemberian penghargaan memberikan motivasi pada pelaku usaha/kegiatan, dan sebaliknya disinsentif berupa sanksi akan memberikan efek jera. Upaya pencegahan dilakukan melalui penerbitan rekomendasi persetujuan lingkungan usaha/kegiatan, yang diharapkan dapat membatasi munculnya usaha/kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran. Selain upaya penanggulangan pencemaran udara dari sumber emisi, adanya ruang terbuka hijau (RTH) yang mencukupi sangat penting dalam purifikasi udara di daerah perkotaan. Oleh karenanya, Pemda DIY mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota, yang mempunyai kewenangan dalam pembangunan RTH, untuk mengoptimalkan pembangunan RTH publik.

c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dijadikan salah satu indikator dalam IKLH yang dapat merepresentasikan eksistensi tutupan lahan bervegetasi yang masih bisa menjalankan fungsi ekologi.

Rumus perhitungan IKTL beberapa kali telah mengalami penyesuaian untuk validitas hasil. Pada tahun 2021, perhitungan IKTL berdasarkan metode perhitungan tahun 2019. Penyempurnaan metode perhitungan IKTL dilakukan dengan penambahan parameter, yang awalnya hanya tutupan hutan menjadi tutupan vegetasi yang terdiri dari tutupan hutan, tutupan belukar dan belukar rawa pada kawasan hutan, tutupan belukar dan belukar rawa pada penggunaan lain yang berfungsi lindung (sempadan sungai, danau dan pantai), tutupan vegetasi berupa RTH (hutan kota dan taman kota), kebun raya dan taman keanekaragaman hayati.

Rumus perhitungan IKTL sebagai berikut

$$IKTL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times 50/54,3)$$

Keterangan :

- 84,3 : persentase tutupan hutan tertinggi di Papua
TH Tutupan Hutan (tutupan vegetasi dan konversinya dibagi luas wilayah administratif)
50 dan 54,3 : konstanta

Dalam rumus perhitungan IKTL ini diasumsikan bahwa, daerah yang ideal memiliki kawasan hutan adalah Provinsi Papua pada tahun 1982 (84,23% dari luas wilayah administrasinya). Oleh karenanya nilai tutupan tertinggi diberikan kepada papua dengan nilai 100, sedangkan daerah-daerah yang mempunyai tutupan 30% dari wilayah administrasinya diberi nilai 50.

Data yang digunakan untuk menghitung IKTL adalah data campuran berdasarkan SK penetapan untuk lahan tutupan hutan negara dan data *shapefile* penggunaan lahan yang berasal dari olah data citra satelit KLHK. Data citra KLHK Tahun 2018 yang di-overlay-kan terhadap *shapefile* kemiringan lahan dari DLHK DIY Tahun 2021 dan hasil kajian Feasibility Study RTH di DIY Tahun 2018. Adapun SK penetapan kawasan hutan sebagai berikut :1) SK Nomor 122/MENLHK/Setjen/PLA.073/2018 Tanggal 5 Maret 2018 terkait dengan penetapan kawasan hutan produksi dan hutan lindung; 2) KPHK Tahura Bunder SK Nomor 351/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2019 Tanggal 21 Mei 2019 terkait dengan penetapan kawasan TAHURA; 3) SM Paliyan Gunungkidul SK 1870/Menhut-VII/KUH/2014 Tgl 25 Maret 2014 terkait dengan penetapan kawasan suaka margasatwa Paliyan; 4) CA Imogiri Bantul SK.1869/Menhut-VII/KUH/2014 Tgl 25 Maret 2014 terkait dengan penetapan kawasan Cagar alam; 5) TWA Gunung Gamping SK.758/Kpts-II/1989 Tgl 16 Desember 1989 terkait dengan penetapan kawasan taman wisata alam; 6) TN Merapi SK.3627/Menhut-VII/KUH/2014 Tgl 6 Mei 2014 terkait dengan penetapan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi; 7) SM Sermo SK. 3112/Menhut-VII/KUH/2014 Tgl 25 April 2014

terkait dengan penetapan kawasan suaka margasatwa Sermo. Hasil perhitungan luas dan konversi penggunaan lahannya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.51. Data Luas dan Hasil Konversi Penggunaan Lahan

No.	Penggunaan Lahan	Luasan (ha)	Faktor Konversi	Hasil Konversi
1	Hutan Produksi	13.421,000	1	13.421,000
2	Hutan Lindung	2.160,000	1	2.160,000
3	Hutan Rakyat	79.249,990	1	79.249,990
4	Cagar Alam Geologi	145,179	1	145,179
5	Cagar Alam	11,820	1	11,820
6	Taman Wisata Alam	1,080	1	1,080
7	Taman Hutan Raya	771,320	1	771,320
8	Taman Nasional	2.050,040	1	2.050,040
9	Hutan Penelitian	101,645	1	101,645
10	Suaka Marga Satwa	619,820	1	619,820
11	Rawan Bencana Alam Geologi	3.355,859	1	3.355,859
12	Perkebunan	21.002,973	0,4	8.401,189
13	Lahan Pangan Tidak Beririgasi	40.594,840	0,1	4.059,484
14	Sempadan Pantai	1.311,106	0,6	786,664
15	Sempadan Sungai	5.498,068	0,6	3.298,841
16	RTH	9.818,780	0,6	5.891,268
	TOTAL			124.325,198

*) Data RTH merupakan data Kajian Feasibility Study RTH di DIY Tahun 2018 oleh BLH DIY

Sumber data : Olah data citra satelit KLHK yang dioverlaykan terhadap shapefile kemiringan lahan DLHK DIY tahun 2021

Perhitungan IKTL dengan menggunakan rumus di atas, sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Luas Administrasi Provinsi DIY} &= 318.600 \text{ hektar} \\
 \text{TH} &= \text{Total Hasil Konversi} / \text{Luas Admin DIY} \\
 &= 124.325,198 / 318.600 = 0,39 \\
 \text{IKTL} &= 100 - [(84,3 - (0,39 \times 100)) \times 50 / 54,3] \\
 &= 100 - (45,3 \times 0,92) \\
 &= 58,34
 \end{aligned}$$

Berdasarkan data pada tabel di atas, maka diperoleh realisasi IKTL tahun 2021 adalah 58,34 yang termasuk dalam kategori sedang. Adapun target IKTL dalam RPJMD tahun 2021 adalah 63,05 sehingga realisasi IKTL belum mencapai target. Apabila dibandingkan dengan realisasi IKTL tahun 2020 sebesar 58,32, realisasi IKTL tahun 2021 mengalami kenaikan. Kenaikan berasal dari penyesuaian data luas hutan di dalam kawasan yang semula menggunakan data citra, pada tahun 2021

menggunakan luasan berdasarkan penetapan SK. Data shapefile berasal dari citra satelit KLHK yang di-overlay-kan terhadap shapefile kemiringan lahan DLHK DIY tahun 2021. Data shapefile olahan citra tahun 2021 juga telah terupdate dari tahun sebelumnya. Kenaikkan data IKTL dari tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.52. Target dan Capaian Indikator Program Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Tahun 2021

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2020	2021			Target akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Indeks Kualitas tutupan Lahan (IKTL)	Angka Indeks	58,32	63,05	58,34	92,53	66,20	88,13

Sumber: DLHK DIY, 2022

Tutupan lahan berupa hutan rakyat masih menjadi tutupan lahan terbesar dari penggunaan lainnya, sementara Hutan rakyat bisa beralih fungsi sewaktu-waktu karena hak dan kewenangan penggunaannya menjadi hak pemilik lahan. Untuk itu perlu upaya mempertahankan eksistensi hutan rakyat, antara lain dengan :

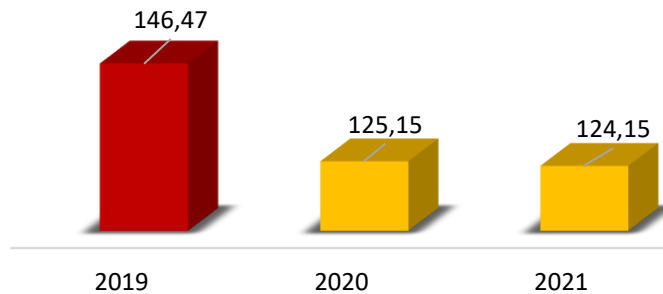
- 1) Memberikan fasilitasi akses pasar penjualan kayu, fasilitasi sertifikasi kayu dan dukungan untuk pengadaan bibit.
- 2) Pendampingan dan Penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya fungsi hutan bagi tabungan masa depan dan fungsi ekologi, serta pembinaan tentang pengelolaan hutan secara lestari, misalnya dengan pola *argoforestry*.

Penggunaan lahan berupa RTH menjadi kewenangan Kabupaten/Kota karena lahan yang digunakan adalah milik pemerintah Kabupaten/Kota atau privat. Perlu peningkatan kualitas data RTH dari Kabupaten/Kota dan upaya penambahan tutupan vegetasinya.

d. Indeks Risiko Bencana

Berdasarkan hasil perhitungan indeks risiko bencana di DIY Tahun 2021 dengan 7 ancaman, mendapatkan hasil bahwa indeks risiko bencana di

DIY turun dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 125,15 “**Sedang**” pada Tahun 2020 menjadi 124,15 “**Sedang**” pada tahun 2021. Berikut ini grafik tren penurunan indeks risiko bencana di DIY Tahun 2019 – 2021:



Gambar 3.28. Tren Indeks Risiko Bencana di DIY Tahun 2019 – 2021
Sumber: BPBD DIY, 2022

Risiko Bencana di DIY Tahun 2021

Risiko bencana merupakan potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang berupa kematian, luka, sakit, penduduk terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat. Berdasarkan kajian indeks risiko bencana di DIY Tahun 2021 dengan *mapping unit* analisis kapanewon/kemantren mendapatkan data jumlah dari 78 kapanewon/kemantren keseluruhan di DIY yaitu Tingkat Risiko Bencana Sedang berjumlah 29 Kapanewon/Kemantren dan 49 Kapanewon/Kemantren dengan Risiko bencana Tinggi, berikut ini data jumlah Kapanewon/Kemantren dengan Tingkat Risiko di DIY.

Tabel 3.53. Jumlah Kapanewon/Kemantren Berdasarkan Tingkat Risiko Bencana

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kapanewon/Kemantren Tingkat Risiko Bencana			Jumlah
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Bantul	0	2	15	17
2	Gunungkidul	0	18	0	18
3	Kulon Progo	0	8	4	12
4	Sleman	0	1	16	17
5	Kota Yogyakarta	0	0	14	14
	D.I. Yogyakarta	0	29	49	78

Sumber: Hasil Kajian Risiko Bencana Indonesia (diolah), 2022

Indeks risiko bencana didapatkan dari nilai bahaya, kerentanan dan kapasitas.

Tabel 3.54. Target dan Capaian Indikator Program Indeks Risiko Bencana Tahun 2021

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian 2021 terhadap Target Akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Indeks Risiko Bencana	Angka Indeks	125,15	135	124,15	108,04	125	112,98

Sumber: Kajian Indeks Risiko Bencana Indonesia, 2022

Data untuk perhitungan IRBI yang dilakukan BPBD DIY berbasis data Kabupaten dengan 7 (tujuh) ancaman bencana. Nilai IRBI pada Tahun 2021 sebesar 124,15. Pemda DIY berupaya untuk menurunkan indeks tersebut dengan melakukan berbagai hal untuk meminimalisir dampak terhadap bencana, diantaranya dengan melakukan upaya pembinaan kepada masyarakat, sosialisasi dan penguatan kelembagaan bencana di masyarakat antara lain melalui pembentukan Desa Tangguh Bencana. Pada tahun 2020 nilai IRBI turun 21,32 dari tahun 2019 yaitu sebesar 146,47 menjadi 125,15. Upaya untuk menurunkan indeks risiko bencana terus dilakukan sehingga pada tahun 2021 terjadi penurunan sebesar 1,00 menjadi 124,15.

8. Program Peningkatan Keterpaduan Program Pemanfaatan Ruang, dengan indikator Persentase Dukungan Program Pemda terhadap Keterwujudan Struktur dan Pola Ruang

Upaya menyelaraskan indikasi program utama perwujudan rencana tata ruang (struktur ruang dan pola ruang) dengan program sektoral dan kewilayahan dengan penilaian persentase dukungan program pemerintah daerah terhadap keterwujudan struktur dan pola ruang terus dilakukan oleh Pemda DIY. Hal tersebut sesuai dengan Perda DIY Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DIY Tahun 2019-2039 yang disandingkan dengan program-program yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD pada tahun 2021.

Tabel 3.55. Target dan Capaian Indikator Program Persentase Dukungan Program Pemerintah Daerah Terhadap Keterwujudan Struktur dan Pola Ruang Tahun 2021

No	Indikator	Capaian 2020	2021			Target akhir RPJMD (2022)	Capaian 2021 terhadap Target Akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase dukungan program pemerintah daerah terhadap keterwujudan struktur dan pola ruang	66,26	77,20	78,66	101,89	78,70	99,95

Sumber: DPTR DIY, 2022

Pada tahun 2021 penilaian indikator persentase dukungan program pemerintah daerah terhadap keterwujudan struktur dan pola ruang mengalami kenaikan yaitu dari 66,26% (2020) menjadi 78,66%. Berdasar pada angka tersebut indikator Persentase Dukungan Program Pemerintah Daerah terhadap Keterwujudan Struktur dan Pola Ruang sudah mencapai target capaian sebesar 101,89% dari target capaian dalam RPJMD yaitu 77,20%. Hasil penilaian keterpaduan program dan lokasi pemanfaatan ruang untuk Program utama dalam Struktur Ruang berdasarkan tabel Indikasi Program Perda DIY Nomor 5 Tahun 2019 tentang RTRW Provinsi DIY tahun 2019-2039 yang disandingkan dengan program yang dilaksanakan OPD terkait tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.56. Nilai Keterpaduan Program Struktur Ruang Tahun 2021

ARAHAN RTRW 2021	Nilai Keterpaduan Indikasi Program Tahun 2021	
	Program (%)	Klasifikasi
NILAI TOTAL KESESUAIAN INDIKASI PROGRAM	78,66	Kurang Berkualitas
KESESUAIAN STRUKTUR RUANG PROVINSI	66,99	Kurang Berkualitas
Program Perwujudan Pengembangan Pusat Kegiatan	68,42	Kurang Berkualitas
Pemantapan dan penataan Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	100,00	Berkualitas
Pemantapan dan penataan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	100,00	Berkualitas
Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal	57,14	Kurang Berkualitas
Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah	66,67	Kurang Berkualitas
Perwujudan sistem jaringan Transportasi	65,79	Kurang Berkualitas

ARAHAN RTRW 2021	Nilai Keterpaduan Indikasi Program Tahun 2021	
	Program (%)	Klasifikasi
Perwujudan sistem jaringan energi	83,33	Berkualitas
Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi	83,33	Berkualitas
Perwujudan Jaringan Sumber Daya Air	40,00	Kurang Berkualitas
Perwujudan Jaringan Irigasi	100,00	Berkualitas
Perwujudan sistem penyediaan air minum	100,00	Berkualitas
Perwujudan sistem pengelolaan air limbah	40,00	Tidak Berkualitas
Perwujudan sistem jaringan persampahan	100,00	Berkualitas
Perwujudan sistem pengelolaan drainase	50,00	Kurang Berkualitas
Perwujudan sistem jalur evakuasi bencana	100,00	Berkualitas
KESESUAIAN POLA RUANG	88,72	Berkualitas
Perwujudan Kawasan Lindung	90,74	Berkualitas
Program untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya	85,71	Berkualitas
Program kawasan perlindungan setempat	90,91	Berkualitas
Program Perwujudan Kawasan Konservasi	100,00	Berkualitas
Perwujudan Pengelolaan Kawasan Lindung Geologi	100,00	Berkualitas
Perwujudan Pengelolaan Kawasan Ruang Terbuka Hijau	100,00	Berkualitas
Perwujudan Pengelolaan Kawasan Rawan Bencana Alam	85,00	Berkualitas
Kawasan Cagar Budaya	100,00	Berkualitas
Perwujudan Kawasan Budidaya	87,34	Berkualitas
Program Perwujudan Kawasan hutan Produksi	100,00	Berkualitas
Program Perwujudan Kawasan Hutan Rakyat	100,00	Berkualitas
Program Perwujudan Kawasan Peruntukan Pertanian	86,67	Berkualitas
Program Perwujudan Kawasan Perikanan	87,50	Berkualitas
Program perwujudan Kawasan Pertambangan	100,00	Berkualitas
Program Perwujudan Kawasan Industri	60,00	Kurang Berkualitas
Program Perwujudan Kawasan peruntukan Pariwisata	95,83	Berkualitas
Program Perwujudan Kawasan Peruntukan Permukiman	100,00	Berkualitas
Program perwujudan Kawasan Hankam	0,00	Tidak Berkualitas
Program Perwujudan Kawasan Budidaya Lainnya	60,00	Kurang Berkualitas
KESESUAIAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI	70,59	Kurang Berkualitas
Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya	75,00	Kurang Berkualitas
Kawasan Strategis Kepentingan Ekonomi	71,43	Kurang Berkualitas
Kawasan Strategis Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan	60,00	Kurang Berkualitas
Kawasan Strategis Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi	100,00	Berkualitas

Sumber: DPTR DIY, 2022

Nilai keterwujudan indikasi program RTRW DIY pada tahun 2021 secara keseluruhan 78,66% dengan klasifikasi Kurang Berkualitas. Arahan RTRW 2021 dalam keterwujudan struktur ruang dengan nilai terendah yaitu perwujudan sistem jaringan sumber daya air dengan nilai kesesuaian 40%. Pada arahan keterwujudan Pola Ruang, program dengan nilai terendah yaitu Program Perwujudan Kawasan hamkam dengan nilai kesesuaian 0%. Nilai terendah pada kesesuaian terhadap program keterwujudan Pola Ruang yaitu Program Perwujudan Kawasan Strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan dengan nilai 60%.

Permasalahan yang mendapat perhatian untuk meningkatkan dukungan program pemerintah daerah terhadap keterwujudan struktur dan pola ruang di DIY adalah: (1) Sinkronisasi Indikasi Program Utama dengan Program Perencanaan Pembangunan terhadap aspek fungsi, lokasi, waktu dan pendanaan perlu ditingkatkan; dan (2) Keterpaduan program dalam perwujudan struktur ruang berupa pengembangan pusat kegiatan mempunyai nilai yang rendah sehingga memerlukan perhatian agar program pemerintah dapat lebih terfokus dan terstruktur dalam perwujudan pengembangan pusat kegiatan.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu: (1) Menyusun dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) Jangka Menengah 5 Tahunan dengan menyelaraskan indikasi program utama Rencana Tata Ruang dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan. SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan yang merupakan turunan dari SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan yang disusun untuk menghasilkan prioritas program Pemanfaatan Ruang; dan (2) Meningkatkan koordinasi dan sosialisasi Tata Ruang ke Kepada Daerah, OPD, dan pejabat terkait agar keterpaduan program yang dilakukan oleh OPD dapat lebih terpadu sehingga dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah bisa menjadi *mainstreaming* kebijakan.

9. Program Pengembangan Pusat Petumbuhan, dengan indikator:

a. Persentase Peningkatan PDRB pada Kabupaten yang Belum Maju (GK, KP, Bantul)

Salah satu permasalahan pembangunan suatu daerah adalah ketimpangan perkembangan perekonomian antar sub daerah di bawah daerah bersangkutan. DIY masih menghadapi ketimpangan perkembangan pembangunan ekonomi antarkabupaten dan kota. Penurunan ketimpangan wilayah menjadi bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Ketimpangan wilayah menjadi salah satu isu strategis dan harus ditangani dengan pemerataan pembangunan. Semangat untuk mengurangi ketimpangan wilayah diamanatkan di dalam RPJMD DIY 2017 – 2022 dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh dan produktif bagi semua orang.

Terjadinya ketimpangan wilayah di DIY karena kegiatan ekonomi masih terkonsentrasi di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Selama ini nilai PDRB ADHK kedua wilayah ini menyumbang lebih 50% dari total PDRB DIY. Di lain pihak, Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul yang luas wilayahnya 65% dari luas wilayah DIY hanya menyumbang sekitar 21,22% dari keseluruhan *output* DIY selama periode 2017 - 2020. Ketimpangan tersebut disebabkan oleh struktur ekonomi tiap kabupaten/kota yang mencerminkan kemampuan daya saing ekonomi dan kapasitas pertumbuhan ekonomi lokal. Kabupaten Bantul, Sleman, dan Kota Yogyakarta mempunyai sektor industri pengolahan sebagai penyumbang PDRB terbesar di DIY, sedangkan Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul mengandalkan sektor pertanian dalam menopang pertumbuhan ekonominya.

Tabel 3.57. Target dan Capaian Indikator Program Persentase Peningkatan PDRB pada Kabupaten yang belum maju (GK, KP, Bantul) Tahun 2021

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase Peningkatan PDRB pada Kabupaten yang belum maju (GK, KP, Bantul)	%	40,09	40,25	40,08	99,58	40,26	99,52

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022 (data diolah)

Pertumbuhan ekonomi tahun 2021 meningkat menjadi 5,53% setelah pertumbuhan ekonomi di tahun sebelumnya mengalami minus sebesar 2,69%. Demikian juga pertumbuhan ekonomi tingkat wilayah di tahun 2021 juga menunjukkan perkembangan yang positif. Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta di tahun 2021 tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan tiga wilayah lainnya. Perkembangan kinerja-kinerja ekonomi tersebut menunjukkan bahwa gabungan kontribusi PDRB ADHK dari Kulon Progo, Gunungkidul, dan Bantul masih di bawah gabungan kontribusi Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Total pangsa PDRB ADHK tiga wilayah yang belum maju hanya berkisar 40,08%, sedangkan nilai total pangsa dua wilayah yang lebih maju adalah 59,92%. Perkembangan PDRB ADHK menurut wilayah pada tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.58. PDRB ADHK dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota DIY 2021

Kab/Kota	PDRB ADHK (JutaRp)	Pangsa PDRB ADHK (%)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
Kulon Progo	8.874.558,20	8,26	5,00
Bantul	19.933.714,34	18,56	5,20
Gunungkidul	14.231.297,15	13,25	5,15
Sleman	35.708.089,52	33,25	5,90
Yogyakarta	28.640.895,79	26,67	6,00

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022 (Data diolah)

b. Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Layanan Transportasi pada Sistem Jaringan Jalan Provinsi

Perda DIY Nomor 5 Tahun 2019 berisi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 – 2039. Rencana

struktur wilayah ruang DIY terdiri dari sistem perkotaan dan sistem jaringan prasarana, yang terdiri dari sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air dan prasarana lainnya. Sistem jaringan transportasi meliputi sistem jaringan transportasi darat, transportasi laut dan transportasi udara. Sistem jaringan transportasi tersebut dapat terwujud melalui beberapa pengembangan sistem transportasi yang meliputi pengembangan:

- 1) Sistem jaringan jalan
- 2) Sistem lalu lintas dan angkutan jalan
- 3) Sistem jaringan kereta api

Perwujudan dari ketiga sistem tersebut menjadi faktor kunci dalam peningkatan aksesibilitas dan mobilitas transportasi darat di wilayah DIY. Sistem jaringan jalan di wilayah DIY didukung oleh kontribusi penyediaan prasarana Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten/kota serta Jalan Lingkungan. Total Panjang jalan Provinsi di DIY adalah 760.45 km. Panjang Jalan Provinsi di Kabupaten Sleman sepanjang 116,32 km, Kabupaten Bantul sepanjang 162,15 km, Kabupaten Kulon Progo sepanjang 175,14 km, Kabupaten Gunungkidul sepanjang 306,84 Km sedangkan untuk wilayah Kota Yogyakarta tidak dilalui Jalan Provinsi.

Perwujudan sistem jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan di DIY didukung dengan adanya penyediaan simpul transportasi seperti terminal angkutan antar kota, antar provinsi, serta terminal angkutan intermodal. Berdasarkan tingkat kewenangannya, maka layanan angkutan umum dapat dibagi kedalam dua kategori yaitu:

- 1) Angkutan Dalam Trayek yaitu Angkutan Perkotaan dan Angkutan Antar kota Dalam Provinsi (AKDP).
- 2) Angkutan Tidak Dalam Trayek: angkutan taksi dan angkutan sewa (umum dan khusus).

Penyediaan layanan angkutan perkotaan Trans Jogja yang merupakan Angkutan Perkotaan berbasis subsidi melayani beberapa cakupan wilayah pelayanan. Cakupan wilayah pelayanan tersebut meliputi

seluruh Kota Yogyakarta, sebagian Kabupaten Sleman, dan sebagian Kabupaten Bantul dengan jumlah kecamatan yang telah dilayani pada tahun 2020 yakni sebanyak 25 kecamatan. Jumlah trayek angkutan perkotaan Trans Jogja terdiri atas 14 trayek (Trayek 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 6B, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 14). Tiga trayek terakhir merupakan perwujudan subsidi program dari Kementerian Perhubungan, melalui Program *Buy the Service*.

Tabel 3.59. Target dan Capaian Indikator Program Persentase penyediaan sarana dan prasarana layanan transportasi pada sistem jaringan jalan provinsi Tahun 2021

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase penyediaan sarana dan prasarana layanan transportasi pada sistem jaringan jalan provinsi	%	81,46	78	81,45	104,42	83	98,13

Sumber: Dishub DIY dan DPUPESDM DIY, 2022 (data diolah)

Capaian indikator penyediaan sarana dan prasarana layanan transportasi pada sistem jaringan jalan provinsi pada tahun 2021 berada di atas target yakni dengan nilai 81,45%. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan nilai target yang ada, yakni sebesar 78% (sehingga persentase realisasi mencapai 104,42%). Nilai capaian tersebut sebesar 98,13% terhadap target akhir RPJMD tahun 2022 sebesar 83%. Capaian realisasi sebesar 81,45 % tersebut diperoleh dari perhitungan rata-rata dua variabel, yang meliputi:

- 1) Persentase cakupan pelayanan angkutan di DIY sebesar 92,38% diperoleh dari rata-rata variabel:
 - a) Cakupan pelayanan Angkutan Dalam Trayek adalah sebesar 84,76 %. Nilai tersebut diperoleh dari besarnya cakupan pelayanan AKDP ditambah dengan cakupan Angkutan Perkotaan. Kegiatan Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek dihitung dengan meta indikator yakni nilai rata-rata cakupan pelayanan Angkutan Perkotaan dan Angkutan AKDP.

Terget layanan angkutan perkotaan yakni melayani 24 kecamatan dari 25 kecamatan di kawasan Perkotaan Yogyakarta aatau sebesar 96%, sedangkan Angkutan AKDP yang semula 17 trayek, ditargetkan bertambah 1 trayek rute Bandara YIA sehingga mencapai (66,48%). Angkutan Perkotaan sejak tahun 2020 telah melayani 25 kecamatan dari 25 kecamatan di kawasan Perkotaan Yogyakarta sehingga telah mencapai 100%, sedangkan Angkutan AKDP yang semula 17 trayek, pada saat ini telah bertambah sebanyak 5 trayek DAMRI sehingga secara keseluruhan terdapat 14 trayek beroperasi dari 22 trayek yang ada atau sebesar 63,63%. Sehingga persentase rata-rata cakupan angkutan dalam trayek perkotaan dan AKDP adalah sebesar 81,81%. Capaian tersebut selanjutnya ditambah dengan adanya studi angkutan AKDP ke BIY, sosialisasi serta optimalisasi pemanfaatan lahan Pasar Belut Godean dan Terminal Pakem sebagai Park and Ride. Sehingga hasil akhir perhitungan nilai indikatornya telah mencapai 84,76%. Dengan telah beroperasinya angkutan DAMRI yakni sebanyak 5 trayek sehingga terjadi penambahan jumlah trayek dari 17 trayek menjadi 22 trayek (rute Bandara YIA) menjadi faktor eksternal yang berkontribusi pada capaian kinerja tersebut.

- b) Cakupan pelayanan Angkutan Tidak Dalam Trayek telah tercapai 100%. Nilai ini melonjak dari tahun-tahun sebelumnya karena terjadi perubahan regulasi pada moda angkutan sewa khusus yang memudahkan para operator untuk mendapatkan dokumen legalitas perizinan. Peraturan semula yaitu KM.35 Tahun 2003, diubah beberapa kali yaitu dengan PM.32 Tahun 2014, PM.26 tahun 2016, dan PM.108 Tahun 2017, kemudian terakhir diubah dengan PM.118 tahun 2018. Sejak perubahan terakhir ini, permohonan izin penyelenggaraan angkutan sewa khusus meningkat drastis. Semula ditargetkan hanya sejumlah 100 armada pada tahun 2022, karena tahun 2017 hanya berjumlah 15 armada yang memiliki izin. Pada tahun 2021

ditargetkan 92% kendaraan tertib ijin yang terdiri atas taksi sebanyak 1.025 armada, angkutan pariwisata sebanyak 766 armada serta angkutan sewa khusus sebanyak 80 armada. Nilai rata-rata persentase tertib perijinan taksi, angkutan pariwisata dan angkutan sewa khusus, pada tahun 2021 yang telah tertib ijin sebanyak 1.025 armada taksi dari 1025 kendaraan yang ada atau sebesar 100%, angkutan pariwisata 766 armada dari 805 armada atau sebesar 95% serta angkutan sewa khusus sebanyak 80 armada dari 100 armada atau sebesar 80%. Sehingga realisasi tertib perizinan tahun 2021 untuk taksi adalah sebanyak 400 armada atau sebesar 39%; angkutan pariwisata 550 armada atau sebesar 68%; serta angkutan sewa khusus 496 armada atau sebesar 496%. Sehingga dapat disimpulkan rata-rata capaian untuk tahun 2021 adalah sebesar 201%, nilai tersebut tetap diasumsikan tercapai 100% dalam perhitungan.

- 2) Persentase kondisi mantap di jalan provinsi sebesar 70,523%, yang dihitung berdasarkan data kondisi jalan berkategori baik dan sedang, sepanjang 536,295 km terhadap total panjang jalan provinsi sepanjang 760,45 km. Dapat lihat pada gambar dibawah untuk kondisi Provinsi per kabupaten/ kota yang berada di wilayah DIY.

Tabel 3.60. Kondisi Jalan Provinsi Per Kabupaten /Kota di Wilayah DIY pada Tahun 2021

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan		Kondisi Jalan	Panjang Jalan	
		Km	%		Km	%
1	Mantap	536,295	70,523	Baik	341,440	44,900
				Sedang	194,855	25,624
2	Tidak Mantap	224,155	29,477	Rusak Ringan	156,935	20,637
				Rusak Berat	67,22	8,840
Jumlah		760,45	100	Jumlah	760,450	100

Sumber: DPUPESDM DIY, 2022

Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2021 target capaian kinerja Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan, dengan indikator persentase penyediaan sarana dan prasarana layanan transportasi pada sistem jaringan jalan provinsi telah tercapai.

10. Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah, dengan indikator:

a. Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan Daerah diatur dalam Permendagri No. 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional. Kemampuan Keuangan Daerah dikelompokkan menjadi tinggi, sedang dan rendah.

Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara. Pendapatan umum daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum. Belanja pegawai terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara. Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2021 merupakan data realisasi APBD Tahun Anggaran 2019 dan 2020.

Kemampuan Keuangan Daerah bagi daerah provinsi dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Di atas Rp4.500.000.000.000,00 (empat trilyun lima ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
- 2) Rp1.400.000.000.000,00 (satu trilyun empat ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp4.500.000.000.000,00 (empat trilyun lima ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
- 3) Di bawah Rp1.400.000.000.000,00 (satu trilyun empat ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

Hasil analisis atas Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020 menunjukkan bahwa tingkat kemampuan keuangan daerah pada Pemda DIY pada posisi sedang dengan nilai sebesar Rp1.823.021.441.344,32.

Tabel 3.61. Target dan Capaian Indikator Program Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2021

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Kemampuan Keuangan Daerah	Nilai	Sedang	Sedang	Sedang	100	Sedang	100

Sumber: BPKA DIY, 2022

Tingkat kemampuan keuangan daerah pada posisi sedang tersebut telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Tingkat kemampuan keuangan daerah tetap pada kategori sedang walaupun adanya penurunan penerimaan PAD pada tahun 2020 sebesar 9,89% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 atau sebesar Rp-206.088.505.079,79 karena ada peningkatan penerimaan dari dana bagi hasil sebesar 103,85% atau sebesar Rp58.216.760.875,00. Penurunan PAD tahun 2020 disebabkan:

- 1) Pajak yang berasal dari BBN-KB mengalami penurunan sebesar Rp158.060.749.800,00 dikarenakan masa pandemi COVID-19 yang membuat menurunnya minat masyarakat untuk membeli kendaraan baru.
- 2) Pajak Rokok mengalami penurunan karena adanya pemotongan dari Pemerintah Pusat sebesar 37.5 % dari penerimaan yang seharusnya Pemda DIY terima terkait peran Pemda DIY dalam mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional.
- 3) Pendapatan dari Denda Pajak mengalami penurunan karena adanya kebijakan Pemda DIY untuk pembebasan denda pajak sebagai dampak terjadinya Pandemi COVID-19.
- 4) Retribusi pelayanan pendidikan pada Badan Diklat mengalami penurunan karena pada masa Pandemi COVID-19 tidak ada yang menggunakan jasa layanan pendidikan.
- 5) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Badan Penghubung Daerah mengalami penurunan karena penggunaan pendopo sebagian besar merupakan kegiatan internal Pemda DIY sehingga tidak dipungut retribusi.

- 6) Retribusi tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa mengalami penurunan karena berkurangnya masyarakat yang memanfaatkan penginapan/pesanggrahan/villa akibat Pandemi COVID-19.
- 7) Retribusi Tempat Rekreasi dan olah Raga mengalami penurunan karena berkurangnya masyarakat yang memanfaatkan Tempat Rekreasi dan Olah Raga akibat Pandemi COVID-19.
- 8) Penurunan pendapatan yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dikarenakan adanya penurunan pada Hasil penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan.
- 9) Penurunan dan pengelolaan BLUD dikarenakan penurunan jumlah pelatihan yang diselenggarakan sebagai dampak Pandemi COVID-19.

b. Optimalisasi Aset-aset Pemda DIY

Optimalisasi aset dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan nilai guna secara ekonomis dari Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah DIY, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pemanfaatan barang milik daerah merupakan salah satu tahapan dalam pengelolaan barang milik daerah. Optimalisasi atau pendayagunaan barang milik daerah selama ini telah dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset selaku Pejabat Penatusahaan Barang Milik Daerah bersama sama dengan OPD Pemda DIY selaku Pengguna Barang Milik Daerah. Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dapat dilakukan dengan cara sewa, pinjam pakai, bangun guna serah/bangun serah guna, kerja sama pemanfaatan, dan kerja sama penyediaan infrastruktur. Pandemi COVID-19 yang terjadi tahun 2021 mengakibatkan beberapa kendala terhadap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah terutama yang dimanfaatkan melalui sewa. Beberapa penyewa yang terdampak secara ekonomi, kemudian mengembalikan barang milik daerah dan ada yang mengajukan keringanan sewa. Target dan realisasi indikator kinerja Optimalisasi Aset-aset Pemda DIY ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3.62. Target dan Capaian Indikator Program Optimalisasi Aset-aset Pemda DIY Tahun 2021

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Optimalisasi aset-aset pemda DIY	Rupiah	9.016.510.978	9.237.591.665	13.406.469.567	145,13	9.626.994.395	139,26

Sumber: BPKA DIY, 2022

Pendapatan dari pemanfaatan barang milik daerah merupakan pendapatan daerah. Pendapatan Pemda DIY dari kegiatan pemanfaatan barang milik daerah terdiri dari penerimaan Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah (Pendapatan dari Pengelolaan Kekayaan Daerah) dengan realisasi pada Tahun 2021 sebesar Rp13.406.469.567,00. Rincian penerimaan pendapatan dari optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah sebesar Rp13.406.469.567,00 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3.63. Rincian Penerimaan Pendapatan dari Optimalisasi Aset 2021

No	Uraian	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi %
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.406.119.001,00	5.746.160.687,00	130,41
2.	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	227.210.000,00	340.880.000,00	150,03
3.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	93.290.000,00	98.709.200,00	105,81
4.	Retribusi Terminal	366.514.000,00	670.109.000,00	182,83
5.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	5.588.814.600,00	6.550.610.680,00	117,21
	Jumlah	10.681.947.601.00	13.406.469.567.00	125,51

Sumber: BPKA DIY, 2022

Optimalisasi aset-aset yang dilakukan Pemda DIY yaitu dengan: (1) Reviu/penyesuaian atas nilai *appraisal*/penilaian berdasarkan kondisi perekonomian (khususnya berdasar dampak Pandemi COVID-19); (2) *Appraisal* atau penilaian dalam rangka pemanfaatan terhadap aset - aset yang belum dilaksanakan penilaian; (3) Penilaian *High Best Use* (HBU) untuk melihat potensi dan peruntukan yang dapat dioptimalkan atas aset - aset Pemda DIY; (4) Penawaran kerja sama sewa/pemanfaatan kepada pihak ketiga; dan (5) Pemasangan papan penawaran sewa atas aset-aset *idle* di Pemda DIY.

c. **Nilai Eksternal pelayanan Publik, Nilai Internal Integritas Organisasi, Nilai Eksternal Persepsi Korupsi**

Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah merupakan program strategis Pemda DIY yang mendukung sasaran pemda meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan. Terdapat lima indikator kinerja program, yaitu kemampuan keuangan daerah, optimalisasi aset-aset pemda DIY, nilai eksternal pelayanan publik, nilai internal integritas organisasi dan nilai eksternal persepsi korupsi. Capaian tiga indikator terakhir yaitu nilai eksternal pelayanan publik, nilai internal integritas organisasi dan nilai eksternal persepsi korupsi termasuk komponen penghitungan Indeks Reformasi Birokrasi yang dievaluasi dan dipublikasikan oleh KemenPAN-RB.

Tabel 3.64. Target dan Capaian Indikator Program Nilai Eksternal Pelayanan Publik, Nilai Internal Integritas Organisasi, dan Nilai Eksternal Persepsi Korupsi Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Nilai Eksternal Pelayanan Publik	Nilai	8,95	8,75	8,95	102,29	8,80	101,70
2.	Nilai internal Integritas organisasi	Nilai	8,60	4,50	8,60	191,11	4,60	186,96
3.	Nilai eksternal persepsi korupsi	Nilai	9,33	5,90	9,33	158,14	6,00	155,50

Sumber: Biro Organisasi Setda DIY, 2022

Secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Nilai Eksternal Pelayanan Publik, Nilai internal Integritas dan Nilai eksternal persepsi Korupsi merupakan Nilai Komponen Hasil dalam Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Ketiga nilai tersebut termuat dalam Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (LHE RB) yang diterbitkan Kementerian PAN dan RB. Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (LHE RB) Tahun 2020 dirilis oleh Kementerian Pan dan RB RI pada 31 Maret 2021, sehingga data yang tersaji pada LKPJ Tahun 2020 merupakan data capaian dalam LHE RB Tahun 2019.

- 2) Capaian Nilai Eksternal Pelayanan Publik, Nilai internal Integritas dan Nilai eksternal persepsi Korupsi Tahun 2021 masih menggunakan angka sementara yaitu capaian Tahun 2020 berdasarkan LHE RB Tahun 2020 karena sampai Laporan ini disusun Kementerian PAN dan RB RI belum merilis Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (LHE RB) Tahun 2021.
- 3) Sejak Tahun 2020, Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB RI No 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan regulasi tersebut, terdapat perubahan penilaian Nilai Eksternal Pelayanan Publik, Nilai internal Integritas dan Nilai Eksternal Persepsi Korupsi.
- 4) Secara umum capaian indikator Nilai Eksternal Pelayanan Publik, Nilai internal Integritas dan Nilai eksternal persepsi Korupsi mengalami peningkatan signifikan. Kenaikan nilai indikator tersebut kemungkinan besar akan berdampak pada peningkatan capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah DIY Tahun 2021. Optimisme kenaikan Indeks reformasi birokrasi juga didasarkan atas berbagai capaian prestasi nasional sebagai berikut:
 - a) Terdapat satu inovasi pelayanan publik Pemda DIY yang berhasil masuk TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 1024 tahun 2021 Tentang TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik Terpuji Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Tahun 2021 yaitu RAJUTAN SIBAKUL JOGJA (Cara Jitu Tangguh dengan Sistem Pembinaan Koperasi dan Pelaku Usaha) – Dinas Koperasi dan UKM DIY.
 - b) Tahun 2021 terdapat tambahan 4 (empat) unit kerja yang mendapatkan Penghargaan Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan 1 (satu) unit kerja pelayanan berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi. Perkembangan unit kerja pelayanan yang telah meraih Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) sebagai berikut:

Tabel 3.65. Unit Kerja Pelayanan Predikat WBK/WBBM

No	Unit Kerja	Predikat	Tahun
1	Balai laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan DIY	WBK dan WBBM	2016 dan 2021
2	RS paru Respira Dinas Kesehatan DIY	WBK	2017
3	Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial Dinas Kesehatan DIY	WBK	2020
4	Balai Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan DIY	WBK	2020
5	Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman	WBK	2020
6	Badan Kepegawain Daerah DIY	WBK	2021
7	Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kota Yogyakarta	WBK	2021
8	Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Kulon Progo	WBK	2021
9	Balai Layanan Perpustakaan Dinas erpustakaan dan Arsip DIY	WBK	2021

Sumber: Biro Organisasi Setda DIY, 2022

11. Program Pengelolaan Kelembagaan dan Tata Cara Pengisian Kepala Daerah, dengan indikator Terwujudnya Pelaksanaan Urusan Kelembagaan sesuai dengan Perdas Kelembagaan

Program Pengelolaan Kelembagaan dan Tata Cara Pengisian Kepala Daerah merupakan program strategis Pemda DIY dalam rangka pelaksanaan kewenangan urusan keistimewaan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kewenangan urusan keistimewaan bidang kelembagaan diselenggarakan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli.

Ketercapaian pelaksanaan urusan keistimewaan bidang kelembagaan diukur dari indikator terwujudnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan Perdas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan tersebut mengatur asas, pembentukan, dan susunan kelembagaan Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan keistimewaan.

Pelaksanaan urusan kelembagaan istimewa sesuai dengan Perdais Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemda DIY telah ditindaklanjuti dengan (1) Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, dan (2) Peraturan Gubernur tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kelurahan. Sehingga semua urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan telah terwadahi dalam Perangkat Daerah dan dilaksanakan sesuai kewenangan dalam perundang-undangan. Dengan demikian capaian kesesuaian pelaksanaan urusan kelembagaan pada tahun 2021 telah mencapai 100%.

Tabel 3.66. Target dan Capaian Indikator Program Terwujudnya Pelaksanaan Urusan Kelembagaan Sesuai Dengan Perdais Kelembagaan Tahun 2021

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Terwujudnya Pelaksanaan urusan Kelembagaan sesuai dengan Perdais kelembagaan	%	100	100	100	100	100	100

Sumber: Biro Organisasi Setda DIY, 2022

Capaian tersebut ditandai dengan telah ditetapkan Pergub yang mengatur Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tatakerja Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang telah diselaraskan dengan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program pembangunan sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yakni:

- a) Tahun 2021: telah ditetapkan 9 Pergub DIY tentang Perubahan atas Pergub DIY yang mengatur tentang Susunan Organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Perangkat Daerah dan UPT.
- b) Untuk menindaklanjuti kebijakan Penyederhanaan Birokrasi, pada Tahun 2021 juga telah ditetapkan 24 Pergub DIY yang mengatur Susunan Organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Perangkat Daerah

12. Program Fasilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa, dengan indikator Persentase Fasilitas Tertib Administrasi Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa

Sebagai amanat dari UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, ruang lingkup Perda DIY Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten meliputi Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten terdiri dari penatausahaan, pemeliharaan dokumen, dan pengawasan. Adapun Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten terdiri dari perlindungan, penggunaan, dan pelepasan. Pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dilakukan terhadap Tanah Keprabon dan Tanah Bukan Keprabon atau *Dede Keprabon*.

Dalam menjalankan kewenangan pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, Kasultanan dan Kadipaten difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dalam hal :

- a. Kegiatan inventarisasi, identifikasi, verifikasi, pemetaan dan pendaftaran tanah;
- b. Pengadaan sarana prasarana untuk perawatan dan pemeliharaan dokumen;
- c. Penyelenggaraan pemantauan dan penertiban penggunaan Tanah Kasultanan atau Tanah kadipaten yang menyalahi Serat kekancingan;
- d. Penanganan sengketa atas Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten;
- e. Penyiapan bahan pertimbangan teknis izin penggunaan tanah; dan
- f. Kegiatan peremajaan data Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten.

Capaian Program Fasilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa di urusan pertanahan dapat diukur melalui : (1) Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten dengan formulasi perhitungan capaian kinerja berupa persentase jumlah bidang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang sudah didaftarkan, perawatan dokumen tanah

Kasultanan dan Tanah Kadipaten, serta pengawasan pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa; (2) Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dengan formulasi perhitungan capaian kinerja berupa Pendaftaran Tanah Desa, jumlah desa yang mempunyai perdes, dan pengajuan permohonan kekancingan yang diajukan dan ditindaklanjuti. Data capaian kinerja pada tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.67. Target dan Capaian Indikator Program Persentase Fasilitas Tertib Administrasi Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa Tahun 2021

No	Indikator	Satuan	Capaian 2020	2021			Target akhir RPJMD (2022)	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase Fasilitas Tertib Administrasi Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa	%	61,25	73,16	74,11	101,30	88,67	83,58

Sumber: DPTR DIY, 2022

Perhitungan capaian Program Fasilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa untuk tahun 2021 melampaui target. Dari target 73,16% realisasi capaian program 74,11% atau terealisasi sebesar 101,30%. Dibandingkan dengan capaian 2020 capaian tersebut meningkat sebesar 12,86%. Formulasi indikatornya meliputi persentase jumlah bidang yang sudah didaftarkan, perawatan dokumen Tanah kasultanan dan Tanah Kadipaten, pengawasan pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa serta fasilitas Tanah Desa yang meliputi pendaftaran Tanah Desa, permohonan pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa, dan jumlah desa yang sudah difasilitasi dalam penyusunan draft raperdes. Meta indikator dan pembobotannya adalah Capaian pengelolaan (60%) ditambah capaian pemanfaatan (40%).

Angka capaian terhadap persentase jumlah bidang yang sudah didaftarkan merupakan hasil perhitungan realisasi pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sejumlah 13.710 bidang dan 1.625 bidang Tanah Desa dari target keseluruhan 21.877 bidang. Berikut ini disampaikan data pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sampai dengan tahun 2021 pada masing-masing kabupaten/kota:

Tabel 3.68. Capaian Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

No	Kabupaten /Kota	Pendaftaran									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Jml
1	Yogyakarta	45	166	75	50	70	50	75	100	42	673
2	Bantul	0	171	1367	300	350	359	500	395	230	3672
3	Kulon Progo	0	216	176	240	350	400	400	402	151	2335
4	Gunungkidul	0	54	300	300	250	750	785	500	1000	3939
5	Sleman	0	137	252	250	250	1000	1000	202	0	3091
	Jumlah	45	744	2170	1140	1270	2559	2760	1599	1423	13710

Sumber: DPTR DIY, 2022

Hasil capaian pendaftaran Tanah Desa sampai dengan tahun 2021 pada masing-masing kabupaten/kota sebagai berikut:

Tabel 3.69. Capaian Pendaftaran Tanah Desa

No	Kabupaten	Jumlah bidang	Bidang Sudah Sertipikat	Bidang Belum Sertipikat	Sertipikat Terverifikasi s.d. 2021	Sertipikat Belum diverifikasi	Penyesuaian Sertifikat s.d. 2021
1	Bantul	15,743	2,117	13,626	1,889	228	287
2	Kulon Progo	4,156	3,649	507	3,649	0	0
3	Gunung-kidul	10,882	3,295	7,599	3,295	0	544
4	Sleman	19,498	7,007	12,491	7,007	0	794
	Jumlah	50,279	16,068	34,223	15,840	228	1,625

Sumber: DPTR DIY, 2022

Penetapan Peraturan Desa/Kalurahan tentang Pemanfaatan Tanah Desa sampai dengan tahun 2021 pada masing-masing kabupaten sebagai berikut:

Tabel 3.70. Capaian Penetapan Peraturan Desa/Kalurahan

No	Kabupaten	Jumlah Desa	Sudah Disahkan
1	Bantul	75	75
2	Gunungkidul	144	144
3	Kulon Progo	87	87
4	Sleman	86	86
	JUMLAH	392	392

Sumber: DPTR DIY, 2022

Terkait pemanfaatan tanah desa, masih perlu adanya regulasi khusus sebagai payung hukum terhadap pendaftaran Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan tanah Desa, serta belum semua dokumen pertanahan pada satu desa dilakukan pemeliharaan.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan dalam Perdas DIY Nomor 1 Tahun 2017, terhadap Tanah Kasultanan maupun Tanah Kadipaten perlu dilakukan penatausahaan pertanahan yang meliputi aspek inventarisasi, identifikasi, verifikasi, pemetaan, dan pendaftaran. Berkenaan dengan Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, termasuk didalamnya Tanah Desa yang asal-usulnya dari hak anggaduh Kasultanan/Kadipaten, dalam implementasinya tidak bisa dilaksanakan hanya dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur pendaftaran tanah secara umum. Dengan demikian, perlu dilakukan upaya-upaya koordinatif dengan Badan Pertanahan Nasional serta mendorong percepatan penyelesaian penyusunan regulasi khusus yang mengatur pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Selain itu, perlu adanya pemahaman mengenai urgensi memelihara dokumen pertanahan agar sejarah asal-usul tanah di desa/kalurahan tetap terjaga guna mendukung terwujudnya tertib administrasi pertanahan. Pemerintah Desa/Kalurahan diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dokumen pertanahan melalui pelaksanaan inventarisasi terhadap seluruh dokumen pertanahan yang dimiliki. Harapannya dalam satu tahun anggaran dapat diselesaikan pemeliharaan seluruh dokumen pertanahan di tiap desa. Jika tidak dimungkinkan, maka Pemerintah Desa/Kalurahan dapat mengidentifikasi dokumen yang akan diprioritaskan untuk dilakukan perawatan dokumen terlebih dahulu. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi keterbatasan kuota layanan pemeliharaan dokumen dari ANRI.

C. PENGHARGAAN

Pada tahun 2021 Pemda DIY memperoleh berbagai penghargaan dalam pelaksanaan kinerja urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, yaitu:

1. Piagam Penghargaan pada kategori Komitmen Pengawasan dan Pengendalian Tahun 2021, Juara II di tingkat Nasional yang diperoleh dari Badan Kepegawaian Negara RI.

2. Piagam Penghargaan pada kategori Implementasi Penilaian Kinerja Tahun 2021, Juara II di tingkat Nasional yang diperoleh dari Badan Kepegawaian Negara RI.
3. Piagam penghargaan pada Kategori Perencanaan Kebutuhan Pelayanan Pengadaan Kepangkatan Pensiun Tahun 2021, Juara II di tingkat Nasional yang diperoleh dari Badan Kepegawaian Negara RI.
4. Penghargaan sebagai unit kerja pelayanan berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2021 yang diperoleh dari Kemenpan dan RB RI.
5. LAN Award Tahun 2021 terkait Penghargaan *Collaborative and Inclusive Learning Center* Peringkat Terbaik III di tingkat Nasional, penghargaan diperoleh dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI.
6. Penghargaan untuk Unit kerja Pelayanan Berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2021 di KPPD Kota Yogyakarta dan KPPD Kabupaten Kulon Progo. Penghargaan diperoleh dari Kemenpan RB RI.
7. Penghargaan Lomba Tari Kreasi Daerah Nusantara Tahun 2021 di tingkat Nasional dengan meraih Juara II di Grand Final, Juara I Kategori Group SMP, Juara II Kategori Group Sekolah Dasar, Juara Umum Kategori Group SMP/SMA/SMK, dan Juara I Kategori Group. Penghargaan tersebut diperoleh dari PN Production.
8. Penghargaan untuk TPID Provinsi Berkinerja Terbaik Wilayah Jawa-Bali Tahun 2021, Juara 1 yang diperoleh dari Kemenko Bidang Perekonomian RI.
9. Penghargaan terkait Wilayah Terbaik dalam Implementasi SimPel/SimPel iB Tahun 2021 yang mendapatkan Juara 1 dari Otoritas Jasa Keuangan.
10. KPPU Award 2021 dengan penghargaan terkait Apresiasi Pratama pada kategori Persaingan Usaha Tingkat Daerah dan Apresiasi Utama pada Kategori Kemitraan Tingkat Daerah. Penghargaan tersebut diperoleh dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
11. Anugerah Media Humas 2021 sebagai Pengelolaan Media Sosial dengan Peringkat 1 yang diperoleh dari Kemenkominfo RI.
12. *Public Relation Indonesia Award 2021 (PRIA 2021)* dalam Kategori Kanal Digital sub kategori Website mendapatkan *Gold Winner* yang diperoleh dari PR Indonesia.

13. Ajang Humas *Entrepreneur Award* 2021 dalam Kategori Humas Pemerintah Provinsi mendapatkan Silver yang diperoleh dari Markplus Inc.
14. Sertifikat dalam rangka Penetapan Warisan Budaya Benda Tak Benda DIY menjadi Warisan Budaya Tak Benda Indonesia di Tahun 2021 pada tingkat Nasional dari Kemendikbud RI.
15. Penghargaan bagi Institusi yang Berjasa dalam Pembangunan Bidang Kesehatan dalam Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Perkantoran dan Protokol Kesehatan Kategori Perkantoran Organisasi Perangkat Daerah Tingkat Satu. Penghargaan ini diperoleh dari Kemenkes RI.
16. Indonesia *Healthcare Innovation Awards* (IHIA) V-2021 untuk Kategori Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) di tingkat Nasional, penghargaan tersebut diperoleh dari Indonesian *Healthcare* Forum.
17. Piagam penghargaan Kelengkapan dan Ketepatan Laporan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) serta Respon Alert Tertinggi Tahun 2021 di tingkat Nasional terkait Bencana/Kejadian Luar Biasa (KLB). Piagam diperoleh dari Kemenkes RI.
18. Piagam penghargaan terkait Data dan Informasi Kesehatan Tahun 2021, Peringkat II dalam Kategori Konsistensi Antar Indikator pada Pemeringkatan Profil Kesehatan di tingkat Nasional. Penghargaan diperoleh dari Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI.
19. Piagam penghargaan terkait Data dan Informasi Kesehatan, Peringkat II dalam Kategori Antar Variabel pada Pemeringkatan Profil Kesehatan Tahun 2021 di tingkat Nasional yang diperoleh dari Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI.
20. Anugerah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Sebagai Badan Publik Kualifikasi Informatif Tahun 2021 di tingkat Nasional dengan menduduki 10 level Provinsi. Penghargaan terkait Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang diperoleh dari Komisi Informasi Daerah DIY.
21. Anugerah Media Humas (AMH) 2021 Kategori Media Sosial Pemerintah Daerah Provinsi sebagai Terbaik I di tingkat Nasional yang diperoleh dari Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (BAKOHUMAS).
22. Penghargaan dalam rangka SPBE Pemerintah Provinsi Tahun 2021 dengan Peringkat II di tingkat Nasional yang diperoleh dari Kemenpan RB RI.

23. Piagam penghargaan terkait Rajutan Sibakul Jogja Juara 8 di tingkat Nasional sebagai TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021 yang diperoleh dari Kemenpan RB RI.
24. Penganugerahan sebagai Badan Publik Informatif Juara 4 di tingkat Regional terkait Keterbukaan Informasi Badan Publik DIY Tahun 2021 Kategori OPD Pemda DIY, yang diperoleh dari Ketua Komisi Informasi Daerah.
25. Penghargaan Adiwiyata Mandiri Tahun 2021 atas nama SMA 1 Bantul sebagai Sekolah yang Menerapkan Pendidikan Berbudaya Lingkungan Hidup di tingkat Nasional yang diperoleh dari Kementerian LHK RI.
26. Penghargaan Adiwiyata Nasional Tahun 2021 atas nama SMK N 1 Godean, MTs N 4 Sleman, MTs N 1 Sleman, SMP N 2 Srandakan, MIS Ma'arif Bego, dan SD N Sungapan, sebagai Sekolah yang Menerapkan Pendidikan Berbudaya Lingkungan Hidup, yang diperoleh dari Kementerian LHK RI.
27. Penghargaan Program Kampung Iklim (ProKlim) Kategori Utama atas nama Dusun Plumbon, Banguntapan, Bantul. Penghargaan tersebut terkait Kampung yang Menerapkan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim di tingkat Nasional yang diperoleh dari Kementerian LHK RI.
28. Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 sebagai Desa Wisata Terbaik dengan Kategori Desa Digital yang diberikan kepada Desa Wisata Tinalah, Kabupaten Kulon Progo dengan menduduki Juara 4 di tingkat Nasional; Kategori CHSE yang diberikan kepada Desa Wisata Rejowinangun, Kota Yogyakarta dengan menduduki Juara 2 di tingkat Nasional; serta Kategori Desa Wisata Maju yang diberikan kepada Desa Wisata Dewi Sambi, Kabupaten Sleman; yang diperoleh dari Kemenparekraf RI.
29. Piagam penghargaan yang diberikan kepada Desa Wisata Kaki Langit Mangunan, Kabupaten Bantul sebagai Desa Wisata Berkelanjutan. Piagam tersebut di tingkat Nasional yang diperoleh dari Kemenparekraf RI.
30. Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 sebagai Desa Wisata Mandiri Inspiratif yang diberikan kepada Desa Wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunungkidul dan Desa Wisata Pentingsari, Kabupaten Sleman. Penghargaan tersebut di tingkat Nasional yang diperoleh dari Kemenparekraf RI.

31. Nominasi Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Komitmen terhadap Perlindungan Anak dan Pelaporan berbasis Sistem Informasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (SIMEP) Tahun 2021 di tingkat Nasional yang diperoleh dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
32. Parahita Ekapraya Tahun 2021 sebagai Komitmen Pemerintah Daerah terhadap Pengarusutamaan Gender dalam Kategori Mentor. Penghargaan ini pada tingkat Nasional yang diperoleh dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak RI.
33. Penghargaan Provinsi Layak Anak Tahun 2021 terkait Komitmen Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kabupaten/Kota Layak Anak sebagai Pelopor di tingkat Nasional, yang diperoleh dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak RI.
34. Penghargaan terkait Institusi yang Berjasa dalam Pembangunan Bidang Kesehatan dalam hal Penerapan K3 Kategori OPD Provinsi di tingkat Nasional yang diperoleh dari Kemenkes RI.
35. Penghargaan atas Dedikasi Membina dan Mengembangkan Perpustakaan dan Kegemaran Membaca di Wilayah Kerja Tahun 2021 pada tingkat Nasional yang diperoleh dari Perpustakaan RI.
36. Nugra Jasadharmas Pustaloka atas Dedikasi dan Sumbangsiah Terhadap Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca Tahun 2021 pada tingkat Nasional yang diperoleh dari Perpustakaan RI.
37. Penghargaan dalam hal Kontributor Data Tertinggi Portal Indonesia *One Search* (IOS) Tahun 2021 dengan Peringkat X sebagai Dedikasi dan Sumbangsiah Terhadap Pengembangan Data Portal Indonesia *One Search* di tingkat Nasional, yang diperoleh dari Perpustakaan RI.
38. Penghargaan Wilayah Bebas Korupsi sebagai Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Tahun 2021 di tingkat Nasional yang diperoleh dari Kemenpan RB RI.
39. Penghargaan dalam rangka Inovasi Pemanfaatan Informasi Geospasial Tahun 2021 melalui Integrasi Pertanahan dan Tata Ruang Berbasis Informasi (INTANTARU BERINFO) dengan menduduki Juara III di tingkat Nasional. Penghargaan tersebut yang diperoleh dari Badan Informasi Geospasial.

40. Penghargaan terkait PMT/TTIC dengan Jenis Penyaluran Online Terbanyak Selama Masa PPKM Darurat pada tingkat Nasional yang diperoleh dari Badan Ketahanan Pangan.
41. Penghargaan Abdi Baktitani sebagai Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi Utama Atas Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan Kepada Masyarakat Dengan Baik Tahun 2021 di tingkat Nasional yang diperoleh dari Kementan RI. Penghargaan ini diberikan kepada Balai Pengembangan Perbibitan ternak dan Diagnostik Kehewanan, serta Balai Pengembangan Perbenihan dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pertanian.
42. Penghargaan terkait Program Kartu Tani BRI Tahun Anggaran 2021 sebagai Terbaik ke-2 di tingkat Nasional yang diperoleh dari Bank BRI.
43. Penghargaan dalam Kategori Penetapan LP2B dengan Dana APBD Tahun 2021 sebagai Daerah Berkomitmen di tingkat Nasional. Penghargaan diperoleh dari Kementan RI.
44. Penghargaan dalam rangka Lomba Manajemen Shelter pada Kegiatan Bakti Sosial dan Jambore Tagana Tingkat Nasional Tahun 2021 dengan menduduki Juara 1. Penghargaan diperoleh dari Kemensos RI.
45. Penghargaan dalam rangka Lomba Manajemen Dapur Umum pada Kegiatan Bakti Sosial dan Jambore Tagana Tingkat Nasional Tahun 2021 dengan menduduki Juara 1, yang diperoleh dari Kemensos RI.
46. Penghargaan Paramakarya Tahun 2021 dalam hal dukungan dan pembinaan pada perusahaan yang berhasil mendapatkan penganugerahan produktivitas paramakarya di tingkat Nasional. Penghargaan diperoleh dari Kementerian Ketenagakerjaan RI.

D. KINERJA URUSAN PEMERINTAHAN

1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB

a. Urusan Terkait Dengan Pelayanan Dasar

1) *Urusan Pendidikan*

a) *Kondisi Umum*

Pemerataan akses pendidikan yang bermutu menjadi target utama Pemda DIY dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pandemi yang masih berlangsung di tahun 2021 tidak menyurutkan upaya Pemda DIY untuk memberikan dukungan operasional kepada seluruh satuan pendidikan menengah dan khusus. Beasiswa pendidikan juga tetap diberikan kepada para siswa kurang mampu untuk mencegah mereka mengalami putus sekolah. Pada jenjang pendidikan khusus, pemberian makanan tambahan anak sekolah, beasiswa inklusi, dan beasiswa asrama juga tetap dilakukan guna mendukung pembelajaran bagi anak-anak berkebutuhan khusus.

Adanya Surat Edaran Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI Nomor HK.02.02/I/1727/2021 Tanggal 30 Juni 2021 tentang Vaksinasi Tahap 3 bagi Masyarakat Rentan serta Masyarakat Umum Lainnya dan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 bagi Anak Usia 12 - 17 Tahun serta menurunnya laju positif COVID-19 di DIY memberikan kesempatan besar untuk pemberlakuan pembelajaran tatap muka terbatas pada akhir tahun 2021. Pembelajaran tatap muka terbatas ini diharapkan mampu mendorong satuan pendidikan mengejar ketertinggalan pembelajaran selama pemberlakuan pembelajaran jarak jauh dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat bagi seluruh warga sekolah.

Tabel 3.71. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Tar-get	Realisasi	% Realisasi		
1	Rata-rata hasil ujian nasional SMA	rerata nilai ujian SMA	N/A	58,30	N/A	N/A	58,41	N/A
2	Rata-rata hasil ujian nasional SMK	rerata nilai ujian SMA	N/A	58,16	N/A	N/A	58,29	N/A
3	Persentase guru layak mengajar jenjang pendidikan menengah	persen	98,42	98,39	98,41	100,02	98,63	99,77
4	Capaian APK pendidikan Menengah	persen	98,49	99,05	108,22	109,26	99,74	108,5
5	Capaian APK pendidikan khusus	persen	83,38	84,93	84,97	100,05	86,50	98,23

Sumber: Disdikpora DIY, 2022

Sesuai Surat Edaran Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021 Tanggal 1 Februari 2021 tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan serta Pelaksanaan Ujian Sekolah dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19, Ujian Nasional (UN) dan ujian kesetaraan tahun 2021 ditiadakan. Dengan demikian, UN SMA dan SMK tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Peserta didik dinyatakan lulus dari SMA dan SMK setelah:

- (1) Menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang dibuktikan dengan rapor tiap semester;
- (2) Memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik;
- (3) Mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk portofolio, penugasan, tes secara luring atau daring, bentuk kegiatan penilaian lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan, dan uji kompetensi keahlian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikator Persentase guru layak mengajar jenjang pendidikan menengah pada tahun 2021 mencatatkan capaian 98,41%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2020, terdapat penurunan sebesar 0,01%. Penurunan ini dipengaruhi oleh jumlah guru yang purna tugas pada tahun 2021. Capaian tahun 2021 masih dibawah angka target akhir RPJMD. Guna mendukung ketercapaian target akhir RPJMD sebesar 98,63%, Pemda DIY mendorong pemenuhan kualifikasi guru sebagai salah satu faktor penentu mutu sekolah dan memberikan perluasan akses peningkatan kualifikasi pendidikan melalui kesempatan bagi guru untuk melakukan studi lanjut agar mencapai jenjang minimal S1.

Capaian APK Pendidikan Menengah adalah sebesar 108,22% pada tahun 2021, dengan demikian terdapat peningkatan sebesar 9,73% dibandingkan tahun 2020. Capaian tahun 2021 juga telah melampaui target akhir RPJMD sebesar 99,74%. Adanya peningkatan capaian APK Pendidikan Menengah ini menunjukkan peningkatan partisipasi penduduk usia 16-18 tahun di DIY untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah. Capaian APK yang melampaui 100% menunjukkan adanya penduduk yang berusia kurang dari 16 tahun atau lebih dari 18 tahun di jenjang pendidikan menengah.

Pemda DIY secara rutin memberikan bantuan operasional dan beasiswa, baik kepada sekolah negeri maupun swasta jenjang pendidikan menengah, agar kebutuhan pembelajaran dapat tercukupi dan peserta didik tidak terkendala oleh kondisi ekonomi keluarga. Selain itu, pemberian sarana prasarana pendidikan yang memadai, serta peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan selalu mendapatkan dukungan Pemda DIY demi mewujudkan pendidikan bermutu bagi seluruh penduduk DIY.

Peningkatan capaian partisipasi penduduk usia 4-18 tahun yang berkebutuhan khusus dalam pendidikan di tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 adalah sebesar 1,59%. Capaian angka partisipasi tahun 2021 adalah 84,97% dan angka capaian ini masih sebesar 98,23% dari target akhir RPJMD. Pemda DIY melalui bantuan operasional dan beasiswa pendidikan khusus terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan khusus, termasuk pemberian dukungan operasional Pusat Layanan Autis di Sentolo, Kulon Progo sebagai salah satu sarana pembinaan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Pemberian advokasi kepada masyarakat akan pentingnya pelayanan pendidikan terhadap anak-anak berkebutuhan khusus juga menjadi salah satu target Pemda DIY guna memastikan seluruh penduduk memperoleh pendidikan layak tanpa adanya diskriminasi.

b) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2021

Alokasi anggaran Urusan Pendidikan tahun 2021 adalah sebesar Rp1.912.109.929.167,00 yang dibagi dalam 5 program, 11 kegiatan, dan 74 sub kegiatan. Realisasi belanja tahun 2021 adalah Rp1.765.310.266.846,00 atau 92,35% dan realisasi fisik sebesar 99,37%. Deviasi fisik disebabkan adanya wanprestasi pada pelaksanaan pengadaan alat praktik siswa SMK. Sedangkan deviasi keuangan berasal dari sisa pengadaan barang/jasa dan penyesuaian dengan kebutuhan penyelenggaraan kegiatan karena masih banyak kegiatan yang dilaksanakan secara daring pada tahun 2021. Berikut adalah rincian capaian kinerja Urusan Pendidikan.

Tabel 3.72. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Pendidikan Tahun 2021

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		PROGRAM PENUNJANG DAERAH PROVINSI	URUSAN	PEMERINTAHAN		- Masih ada anak-anak usia sekolah yang tidak melanjutkan sampai ke jenjang pendidikan menengah karena alasan sosial ekonomi; masih adanya ABK tidak bersekolah - Adanya pandemi covid-19 yang menghambat pelaksanaan KBM di sekolah - Kurang efektifnya pembelajaran jarak jauh di masa pandemi bagi peningkatan kualitas pendidikan	Sosialisasi bantuan operasional sekolah dan beasiswa bagi ABK; pemanfaatan beasiswa kartu cerdas, bantuan operasional sekolah dan DAK	Urusan Wajib a. Urusan Pendidikan Tindak lanjut yang akan dilakukan: 1) Memperoleh pendidikan yang bermutu merupakan hak setiap warga negara sesuai ketentuan Undang-Undang. Dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 26 ayat (1), disebutkan bahwa Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Sesuai ketentuan tersebut, pendidikan nonformal dapat menjadi alternatif bagi warga negara yang karena kondisi tertentu tidak dapat mengikuti pendidikan formal. Dengan demikian, hak untuk mendapatkan pendidikan tetap terpenuhi walaupun tidak melalui jalur pendidikan formal. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan pendidikan
				Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100			
				Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100			
				Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100			
				Angka Kelulusan jenjang SMA, SMK dan SLB	Persen	99,59	99,97			
				Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100	100			
				Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100	100			
				Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100			
				Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100	100			
				Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100			
				Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100			
				Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100			nonformal menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga Pemda DIY di tahun 2021 hanya menyelenggarakan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di DIY terkait pendataan partisipasi pendidikan nonformal karena partisipasi peserta didik pendidikan nonformal mendukung capaian Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni Pendidikan di DIY. 2) Sebagai kelanjutan dari penyaluran insentif pada tahun 2020, pada tahun 2021 dianggarkan pemberian insentif kepada 1.351 pendidik dan tenaga kependidikan yang terdiri dari GTY dan PTY SMA dan SMK Swasta, GTY dan PTY SLB, serta guru inklusi sebesar Rp8.872.800.000,00. Pemberian insentif ini juga akan dilanjutkan di tahun 2022 dengan rencana anggaran sebesar Rp8.403.000.000,00 kepada 1.275 PTK sebagai bentuk penghargaan atas upaya para PTK memajukan pendidikan DIY. Pemberian insentif tetap berpedoman kepada persyaratan yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
				Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100			
				Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100			
				Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100			
				Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100	100			
				Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100	100			
				Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100	100			
				Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100	100			
				Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persen	100	100			
				Jumlah medali lomba kompetisi nasional dan internasional	Medali	61	31			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
				Perencanaan dan jenjang Monitoring DAK		3	3			
				Renja, Renja Perubahan, Renstra	dokumen	3	3			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pengelolaan Sistem Informasi Pendidikan (Dapodik SMA, SMK, SLB) RKA, RKAP, DPA, DPPA Sinkronisasi Kegiatan di bidang Pendidikan PPDB Online Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Februari 2021 Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan Asesment standarisasi pendidikan daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Gaji dan tunjangan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Penyusunan Laporan barang inventaris dan barang persediaan Pelatihan dan pendampingan sekolah aplikasi SIPBOSKEUDA Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	sistem informasi dokumen orang SMAN dan SMKN tahun tahun tahun tahun tahun tahun orang sekolah dokumen	3 4 70 118 1 1 1 1 1 1 296 127 1	3 4 70 118 1 1 1 1 1 296 127 1			Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Insentif Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 3) Pemenuhan kompetensi pendidik merupakan syarat mutlak bagi pencapaian standar mutu pendidik yang dipersyaratkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Guna mendukung pemenuhan kompetensi ini Pemda DIY di tahun 2021 tetap memberikan kemudahan akses bagi para guru yang akan melaksanakan studi lanjut maupun yang mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) dengan dukungan pembiayaan dari Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK). Sesuai instruksi dari Ditjen GTK, di tahun 2021 Pemerintah Daerah Provinsi diminta untuk mengkoordinasikan kesiapan peserta dan melakukan monitoring penyelenggaraan kegiatan PPG. Seiring dengan penetapan persyaratan kualifikasi pendidikan minimum bagi para calon pendidik, peningkatan kompetensi melalui Pendidikan Profesi Guru juga menjadi salah satu tolak ukur kualitas pendidik yang akan meningkatkan mutu satuan pendidikan. Untuk

No	Urutan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						tahun anggaran 2022, dukungan Pemda DIY terhadap peningkatan kompetensi pendidik direncanakan melalui kegiatan penyediaan biaya Pendidikan Profesi Guru (PPG) jenjang pendidikan menengah dan khusus dengan target jumlah guru yang dapat mengikuti pendidikan profesi tersebut sebanyak 100 guru. Alokasi anggaran yang direncanakan sebesar Rp750.000.000,00. Diharapkan melalui pendidikan profesi ini para guru bisa meningkatkan kompetensi sekaligus mendapatkan pengakuan atas kualifikasi yang dimiliki. 4) Sebagai bentuk keberlanjutan dukungan terhadap pemenuhan biaya pendidikan siswa dari keluarga kurang mampu di tahun 2020, pada tahun 2021 telah dianggarkan pemberian beasiswa Kartu Cerdas untuk 13.400 siswa SMA dan SMK di DIY dengan total anggaran sebesar Rp20.100.000.000,00. Dengan adanya bantuan pembiayaan ini, diharapkan para siswa jenjang pendidikan menengah yang berlatar belakang dari keluarga kurang mampu dapat menuntaskan pendidikannya. Pemberian beasiswa Kartu
				Penguatan pengelolaan keuangan	orang	272	272			
				Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	dokumen	3	3			
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						
				Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	dokumen	1	1			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
				Komponen Listrik/penerangan bangunan	jenis	4	4			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
				Peralatan Kantor sesuai dengan RKBMD	jenis	4	4			
				Mebeleur sesuai dengan RKBMD	jenis	2	2			
				Alat Tulis Kantor	jenis	28	28			
				Alat/alat perlengkapan untuk sarana kearsipan	jenis	4	4			
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
				Pembelian Bendera	lembar	4	4			
				Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	jenis	10	10			
				umbul-umbul	lembar	10	10			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
				Jilid	buah	200	117			
				Barang cetakan	jenis	9	9			
				Penggandaan	lembar	499700	207206			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Langganan Surat kabar/majalah	tahun	1	1			Cerdas juga direncanakan untuk berlanjut di tahun 2022 dengan target sasaran 15.000 siswa SMA dan SMK di DIY dengan alokasi anggaran Rp22.500.000.000,00. Sama halnya dengan tahun 2020, pembiayaan di jenjang pendidikan tinggi pada tahun 2021 untuk calon mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu masih diarahkan pada pemanfaatan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah). KIP-Kuliah adalah salah satu upaya yang dilakukan Kemendikbud untuk membantu para lulusan pendidikan menengah berprestasi namun memiliki keterbatasan ekonomi untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi. Informasi lebih lengkap mengenai bantuan pembiayaan di jenjang pendidikan tinggi bisa diperoleh melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi DIY yang membawahi Perguruan Tinggi di DIY. 5) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) selalu mengacu kepada regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Pada tahun 2021, regulasi PPDB mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
				Penyediaan rapat-rapat koordinasi	tahun	1	1			
				Konsultasi dan koordinasi dalam daerah dan luar daerah	tahun	1	1			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
				Perangko, meterai dan benda pos lainnya	jenis	2	2			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
				Pembayaran rekening telepon, air, listrik dan kawat/faksimil/internet	tahun	1	1			
				Jasa Pengolahan Sampah	Bulan	12	12			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
				Honor Pengelola Keuangan	orang	15	15			
				Instruktur senam	jpl	88	16			
				Honor Pengelola Barang	orang	14	14			
				Jasa Kebersihan	tahun	1	1			
				Jasa Keamanan	tahun	1	1			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
				Pajak kendaraan dinas roda 6	unit	1	1			
				Pemeliharaan Kendaraan Dinas roda 2	unit	12	12			
				Pemeliharaan Kendaraan Dinas roda 4	unit	11	11			
				Pemeliharaan Kendaraan Dinas roda 6	unit	1	1			
				Pajak kendaraan dinas roda 2	unit	12	12			

No	Urutan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				KIR kendaraan roda 6 (enam)	unit	1	1			Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Dengan demikian, penyelenggaraan PPDB DIY tahun 2021 akan berpedoman kepada Permendikbud tersebut dan Peraturan Gubernur DIY mengenai PPDB tahun 2021. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dalam pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat meliputi: a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; b. peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan c. pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. Sejalan dengan Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10
				Pajak kendaraan dinas roda 4	unit	24	24			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
				Gedung kantor Induk dan PLA	unit	2	2			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
				Pemeliharaan Instalasi Listrik	tahun	1	1			
				Pemeliharaan Jaringan Pos dan Telekomunikasi	tahun	1	1			
				Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	tahun	1	1			
				Pemeliharaan Alat-alat berat	tahun	1	1			
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						
			- Mendorong penduduk usia 16-18 tahun untuk tetap bersekolah di pendidikan menengah	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten	Persen	87.61	87.74			
			- Menyediakan beasiswa atau bantuan sekolah bagi penduduk usia 16-18 tahun yang miskin	Jumlah SLB dengan Akreditasi A	Persen	58.97	82.28			
				Peserta didik yang mendapatkan layanan pendidikan teknik berstandar	peserta	2113	2127			
				Prosentase Sekolah dengan Akreditasi A	Persen	81.65	81.89			
				Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kabupaten Gunungkidul	Persen	85.31	83.33			
				Persentase sekolah dan program keahlian yang	Persen	78.67	83.67			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				memenuhi SNP di Kabupaten Kulon Progo						Tahun 2013 Tentang Pedoman Pendanaan Pendidikan pasal 11 menyebutkan bahwa Pengelola satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dalam pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan yang dikelolanya: a. membebaskan atau meringankan biaya pendidikan bagi peserta didik yang tidak/kurang mampu; b. dapat menarik pungutan biaya satuan pendidikan kepada peserta didik atau orang tua/wali peserta didik; c. dapat menerima bantuan dana pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan d. dapat menerima sumbangan dana pendidikan dari orang tua/wali peserta didik, masyarakat atau pihak lain secara sukarela dan tidak mengikat. Mengacu kepada Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah di atas, satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, terlepas dari kebijakan pengelolaan sekolah oleh yayasan, wajib mengikuti ketentuan untuk membebaskan atau memberikan keringanan biaya pendidikan kepada peserta didik yang kurang/tidak mampu. Terkait dengan
				Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kota Yogyakarta	Persen	88.97	88.57			
				Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kabupaten Bantul	Persen	82.67	81.18			
				Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kabupaten Sleman	Persen	86.67	86.24			
				Prosentase Sekolah dengan Akreditasi A	Persen	81.65	81.89			
				Prosentase Sekolah dengan Akreditasi A	Persen	81.65	81.89			
				Prosentase Sekolah dengan Akreditasi A	Persen	81.65	81.89			
				Jumlah SLB dengan Akreditasi A	Persen	58.97	82.28			
				Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten	Persen	87.61	87.74			
				Jumlah SLB dengan Akreditasi A	Persen	58.97	82.28			
				Prosentase Sekolah dengan Akreditasi A	Persen	81.65	81.89			
				Prosentase Sekolah dengan Akreditasi A	Persen	81.65	81.89			
				Jumlah medali dalam kompetisi nasional dan internasional jenjang pendidikan menengah	Medali	42	49			
				Jumlah medali dalam kompetisi nasional dan	Medali	42	49			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				internasional jenjang pendidikan menengah						penggunaan label internasional dalam pelaksanaan pembelajaran, etika dan pembiayaan pendidikan oleh satuan pendidikan, salah satu faktor yang mempengaruhi adalah adanya tantangan eksternal yang dihadapi satuan pendidikan antara lain kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan perkembangan pendidikan di tingkat internasional. Penggunaan label internasional ini diharapkan selaras dengan upaya satuan pendidikan menghadapi berbagai tantangan global sekaligus menjaga komitmen pemberian layanan pendidikan yang berkualitas kepada masyarakat tanpa adanya diskriminasi sosial ekonomi. Terkait dengan pembiayaan pendidikan, asumsi kebutuhan biaya operasional tanpa adanya pandemi COVID-19 di jenjang pendidikan menengah DIY tahun 2020 untuk SMA adalah Rp4.950.000,00 - Rp5.150.000,00 per siswa per tahun bergantung pada jurusan yang dipilih sedangkan untuk SMK adalah Rp6.432.000,00 - Rp8.472.000,00 per siswa per tahun bergantung kepada
				Jumlah medali dalam kompetisi nasional dan internasional jenjang pendidikan menengah	Medali	42	49			
				Jumlah medali dalam kompetisi nasional dan internasional jenjang pendidikan menengah	Medali	42	49			
				Jumlah medali pada kompetisi nasional dan Internasional jenjang pendidikan khusus	Medali	11	19			
				Jumlah medali pada kompetisi nasional dan Internasional jenjang pendidikan khusus	Medali	11	19			
				Jumlah medali dalam kompetisi nasional dan internasional jenjang pendidikan menengah	Medali	42	49			
				Jumlah medali dalam kompetisi nasional dan internasional jenjang pendidikan menengah	Medali	42	49			
				Jumlah medali pada kompetisi nasional dan Internasional jenjang pendidikan khusus	Medali	11	19			
				Angka Putus Sekolah	Persen	0.19	0.11			
				Angka Putus Sekolah	Persen	0.19	0.11			
				Angka Putus Sekolah	Persen	0.19	0.11			
				Angka Putus Sekolah	Persen	0.19	0.11			
				Angka Putus Sekolah	Persen	0.19	0.11			
				Angka Putus Sekolah	Persen	0.19	0.11			
				Penambahan Ruang Kelas Baru						

No	Urutan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pembangunan ruang sekolah pusat sumber pendidikan inklusif		1	1			kompetensi keahlian yang dipilih. Dukungan untuk pembiayaan ini diperoleh dari BOSNAS, BOSDA, dan pembiayaan dari masyarakat. Dana BOSNAS di tahun 2021 sebesar rata-rata Rp1.572.000,00 per siswa per tahun untuk SMA dan Rp1.676.000,00 per siswa per tahun untuk SMK. Dengan asumsi kondisi tanpa pandemi, dukungan BOSDA adalah sebesar Rp2.600.000,00 per siswa per tahun untuk SMK Negeri, Rp2.100.000,00 per siswa per tahun untuk SMK Negeri, Rp400.000,00 - Rp600.000,00 per siswa per tahun untuk SMA Swasta, dan Rp550.000,00 - Rp800.000,00 per siswa per tahun untuk SMK Swasta. Dari perbandingan antara kebutuhan dan dukungan pembiayaan, untuk mencukupi pembiayaan operasional SMA Negeri masih dibutuhkan Rp1.278.000,00 - Rp1.478.000,00 per siswa per tahun sedangkan untuk SMK Negeri masih dibutuhkan Rp2.156.000,00 - Rp4.196.000,00 per siswa per tahun. Untuk mencukupi kebutuhan operasional SMA Swasta, masih diperlukan rata-rata Rp2.978.000,00 per siswa
				Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						
				Pembangunan ruang tata usaha		1	1			
				Pembangunan ruang guru sekolah		1	1			
				Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi						
				Pembangunan ruang laboratorium biologi		2	2			
				Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika						
				Pembangunan ruang laboratorium fisika		3	3			
				Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia						
				Pembangunan ruang laboratorium kimia		1	1			
				Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa						
				Pembangunan ruang laboratorium bahasa		4	4			
				Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah						
				Pembangunan ruang UKS sekolah		3	3			
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						
				Pembangunan toilet sekolah (jamban)		1	1			
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah						
				Rehabilitasi ruang kelas sekolah		4	4			
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						
				Rehabilitasi ruang guru sekolah		4	4			
				Rehabilitasi ruang Kepala Sekolah		1	1			
				Rehabilitasi ruang tata usaha		4	4			
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika						
				Rehabilitasi ruang laboratorium fisika		2	2			
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer						

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Rehabilitasi ruang sekolah laboratorium komputer		1	1			per tahun dan untuk SMK Swasta masih dibutuhkan Rp4.206.000,00 - 5.996.000,00 per siswa per tahun. Dengan demikian diharapkan adanya dukungan masyarakat untuk memenuhi biaya operasional satuan pendidikan menengah demi mewujudkan pendidikan yang berkualitas di DIY. 6) Dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pendanaan Pendidikan pasal 6 ayat (2) disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat membantu pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Pada pasal 11 disebutkan pula bahwa Pengelola satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dalam pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan yang dikelolanya dapat menerima bantuan dana pendidikan dari Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah ini sejalan dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah pasal 8
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa						
				Rehabilitasi ruang sekolah laboratorium bahasa		1	1			
				Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah						
				Rehabilitasi ruang sekolah perpustakaan		2	2			
				Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						
				Rehabilitasi ruang ibadah sekolah		1	1			
				Rehabilitasi toilet sekolah (jamban)		3	3			
				Pengadaan Mebel Sekolah						
				Pengadaan Mebel Sekolah sekolah		16	16			
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik						
				Pengadaan peralatan pendidikan IPA sekolah		3	3			
				Pengadaan Peralatan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi sekolah		7	7			
				Pengadaan Media Pendidikan sekolah		3	3			
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas						
				BOSDA Swasta Sekolah Menengah	tahun	1	1			
				Kajian Biaya Pendidikan SMA/SMK	Dokumen	1	1			
				Beasiswa Jaminan Kelangsungan Pendidikan	siswa	225	225			
				Kartu Cerdas	siswa	13400	13400			
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						
				Pembinaan Debat Bahasa	medali	2	3			
				Pembinaan Kompetisi Penelitian Siswa Indonesia	medali	4	1			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				Pembinaan Kompetisi Sains Nasional (KSN)	peringkat nasional	7	8			yang menyebutkan bahwa: (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan biaya pendidikan kepada siswa SMA dan SMK dari masyarakat miskin/kurang mampu dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah. (2) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk beasiswa. (3) Siswa dari masyarakat miskin/kurang mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima bantuan biaya pendidikan dengan syarat memiliki dan dapat menunjukkan dokumen resmi dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, atau instansi pemerintahan lainnya yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan benar-benar miskin/tidak mampu. (4) Sekolah melaksanakan pendataan siswa yang miskin/kurang mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mengusulkan bantuan pendidikan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemda DIY pada tahun 2021 berkomitmen untuk tetap memberikan dukungan	
				Pembinaan Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa	medali	6	6				
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas							
				Sosialisasi TPG	orang	160	160				
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas							
				Forum Pengawas SMA	Kegiatan	1	1				
				Penguatan Kelembagaan	lembaga	3	3				
				Bidang Pendidikan							
				Koordinasi Pokja	dokumen	1	1				
				Pengembang Kurikulum							
				Forum Kepala SMA	Kegiatan	3	3				
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas							
				Penyediaan BOSNAS	jenjang	3	3				
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas							
				Sosialisasi, pendataan dan verifikasi BOS SMA	Kegiatan	2	2				
				Pembangunan Ruang Praktik Siswa							
				Pembangunan ruang praktik siswa (RPS)	sekolah	9	9				
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
				Pembangunan toilet sekolah (jamban)		4	4				
				Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah							
				Rehabilitasi ruang kelas sekolah		3	3				
				Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa							
				Rehabilitasi ruang praktik kejuruan sekolah		1	1				
				Rehabilitasi Ruang Laboratorium							
				Rehabilitasi ruang laboratorium kimia sekolah		1	1				

No	Urutan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah						terhadap satuan-satuan pendidikan menengah swasta melalui penyaluran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan beasiswa pendidikan menengah bagi peserta didik kurang mampu, baik di satuan pendidikan negeri maupun swasta. Pada tahun 2021 selain menganggarkan BOSDA sebesar Rp22.220.115.000,00 untuk satuan-satuan pendidikan menengah swasta, Pemda DIY menganggarkan pula Beasiswa Kartu Cerdas sebesar Rp20.100.000.000,00 bagi 13.400 siswa kurang mampu dan Beasiswa Jaminan Kelangsungan Pendidikan bagi 225 orang sebesar Rp900.000.000,00. Beasiswa Jaminan Kelangsungan Pendidikan ini ditujukan bagi para peserta didik SMA dan SMK yang sudah lulus namun belum bisa melakukan pengambilan ijazah karena masih terhambat dalam penyelesaian administrasi sekolah. Di tahun 2022 Pemda DIY merencanakan alokasi BOSDA sebesar Rp37.033.525.000,00, Beasiswa Kartu Cerdas untuk 15.000 siswa SMA dan SMK dengan alokasi anggaran
				Rehabilitasi ruang UKS sekolah		1	1			
				Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						
				Rehabilitasi toilet sekolah (jamban)		2	2			
				Pengadaan Mebel Sekolah						
				Pengadaan Mebel Sekolah sekolah		9	9			
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik						
				Pengadaan peralatan praktik utama sekolah		38	38			
				Pengadaan Peralatan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi sekolah		12	12			
				Pengadaan Media Pendidikan sekolah		4	4			
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan						
				Perijinan sekolah		14	14			
				Sinkronisasi antara sekolah dengan dunia industri		1	1			
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan						
				Penyediaan BOSNAS jenjang		1	1			
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan						
				Sosialisasi, pendataan dan verifikasi BOS SMK Kegiatan		2	2			
			Mendorong penduduk usia 4-18 tahun yang berkebutuhan khusus untuk tetap bersekolah	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah		6	6			
				Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						
				Rehabilitasi ruang guru sekolah		3	3			
				Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						
				Rehabilitasi selasar penghubung sekolah		2	2			
			Menyediakan beasiswa atau	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus						

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			bantuan sekolah bagi penduduk usia 4-18 tahun	BOSDA SLB Swasta Penyediaan Biaya Asrama SLB Negeri Pemberian makanan tambahan bagi SLB (PMTAS) Penyaluran Beasiswa Inklusi	SLB Swasta siswa siswa siswa	70 90 1435 655	70 90 1435 655			Rp22.500.000.000,00, dan Beasiswa Jaminan Kelangsungan Pendidikan bagi 225 orang sebesar Rp900.000.000,00. Diharapkan melalui bantuan operasional dan beasiswa ini, kebutuhan operasional satuan pendidikan swasta dan kebutuhan personal siswa untuk pembelajaran dapat terpenuhi secara layak. Pemda DIY juga terus melakukan pemantauan dan evaluasi berkala untuk penyaluran dan pemanfaatan bantuan operasional serta beasiswa pendidikan menengah guna memastikan seluruhnya direalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku.
			Mendorong penduduk usia 4-18 tahun yang berkebutuhan khusus untuk tetap bersekolah	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Operasional pada SLB sekolah Negeri Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Layanan terapi, Asesmen anak dan Pendidikan Transisi bagi Anak Autis Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus Penilaian Kinerja Kepala Sekolah Insentif Guru Inklusi Pemberian Insentif GTY dan PTY						
			Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia 4-18 tahun berkebutuhan khusus yang belum mendapatkan pendidikan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus Advokasi Pendidikan Berkebutuhan Khusus Pembinaan Pendidikan Inklusif	lokasi sekolah	46 17	46 17			
			Mendorong penduduk usia 4-18 tahun yang berkebutuhan khusus untuk tetap bersekolah	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus Penyediaan BOSNAS jenjang Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus Sosialisasi dan verifikasi BOS SLB	jenjang Jenjang	1 1	1 1			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- Meningkatkan kualitas pendidik dengan latar belakang pendidikan minimal S-1 - Meningkatkan jumlah Pendidik yang mendapatkan sertifikasi pendidik, dan sertifikat CAKEP bagi Kepala Sekolah	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Pemetaan Data sekolah Kebutuhan Guru Dikmensus Aplikasi Penilaian Angka Kredit Guru Penilaian Angka Kredit dokumen	Persen dokumen	87.61 5200	87.74 5196			
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	Mengimplementasikan pendidikan karakter berbasis budaya di satuan pendidikan	PROGRAM PENYELENGGARAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan karakter Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan karakter Pembinaan Muatan Lokal Pelatihan Manajemen SMK Sekolah Kemaritiman Ngudhar kawruh Tembang Penyelarasan Kurikulum jenjang Bahasa Jawa (SD-SMK) Satu Abad Taman Siswa Internalisasi nilai-nilai pendidikan berbasis budaya Gerakan Seniman Masuk Sekolah Gladhi Kawruh Evaluasi dan monitoring pelaksanaan pendidikan	Persen Persen episode jenjang Paket orang episode sekolah	46.74 46.74 10 4 1 500 10 8 455	75.51 75.51 3 10 4 1 500 10 8 455			

No	Urutan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				berbasis budaya di sekolah/madrasah						
				Pengembangan Model PAUD	pelayanan	1	1			
				Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan						
				Rehab SMKN 1 Kasihan (Pendopo) dan SMKN 2 Kasihan (Auditorium)	unit	2	2			
				Laboratorium Seni dan Budaya	laboratorium	2	2			
				Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta						
				Penyelenggaraan operasional Akademi Komunitas Seni dan Budaya	program studi	3	3			
				Rehab Gedung Latihan Mandiri	unit	1	1			
				Perlengkapan pembelajaran	paket	1	1			
		BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN	Mendukung penguatan pembelajaran digital dan meningkatkan kemampuan PTK di bidang teknologi informasi	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah						
				Produksi Media untuk jogjabelajar.org	Judul	40	40			
				Peningkatan Kompetensi Guru Dibidang TIK	Guru	340	340			
				Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah						
				Layanan Pembelajaran dan Pendampingan TIK dengan Mobile Learning Services	Lokasi	30	30			
				Pengembangan Jogja Belajar	Konten	1	1			
				Pengelolaan IDC dan Jaringan	Jaringan	30	30			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK	Mendorong peningkatan kompetensi dan keterampilan peserta pelatihan di bidang teknik	Kajian Efektivitas Pembelajaran Jarak Jauh PROGRAM PENUNJANG DAERAH PROVINSI Pelayanan dan Penunjang Pelayan BLUD Tercapainya Kegiatan Peningkatan Pelayanan Seksi Layanan Pendidikan Teknik Pada BLUD Tercapainya Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendidikan Pada BLUD PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Roadshow dan Sosialisasi Program BLPT Terlaksananya Roadshow dan Sosialisasi Program BLPT Program-program yang Ada di BLPT Dapat Tersosialisasi Dengan Baik dan Membangun Jejaring Kepala SMA, Kepala SMK, Kepala SLB dan Pengawas di DIY, Jawa Tengah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Bengkel Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Bengkel Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Dengan Pelaksanaan Praktek Sesuai Standar Nasional dan Pelayanan Produksi Jasa untuk Masyarakat Umum Sesuai Target yang Diharapkan	dokumen Bulan % Lokasi Jurusan %	2 12 100 100 100 8 4 100	2 12 100 100 8 4 100			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Review Pergub Standar Pelayanan Minimal						
				Terselenggaranya Penyusunan Draf Standar Pelayanan Minimal	Dokumen	1	1			
				Tercapainya Penyusunan Draft Standar Pelayanan Minimal	%	100	100			
				Kegiatan FGD Pengembangan Teknologi Tepat Guna						
				Terlaksananya FGD Pengembangan Teknologi Tepat Guna	Dokumen	1	1			
				Terwujudnya Rancangan dan RAB Bahan Untuk Hasil Karya Inovasi Satu Unit Kendaraan Listrik	%	100	100			
				Peningkatan Kompetensi Peserta Didik SMK						
				Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Peserta Didik SMK se-DIY	%	100	100			
				Terlaksananya Pelaksanaan Diklat Peningkatan Kompetensi Peserta Didik SMK	Paket Diklat	8	8			
				Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)						
				Terlaksananya Kegiatan IKM	Bulan	10	10			
				Tersusunnya Laporan Survey IKM	Dokumen	1	1			
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran						
				Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Peralatan Kantor	Unit	9	9			
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran Sebagai Pendukung Produktifitas	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasana Perlengkapan Kantor	Item	19	19			
				Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasana Alat Rumah Tangga Lainnya	Item	55	55			
				Monitoring dan Evaluasi						
				Tercapainya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	%	100	100			
				Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	Bulan	12	12			
				Sinkronisasi dan Pengembangan Silabi						
				Dokumen Program Diklat	Dokumen	4	4			
				Terwujudnya Workshop Program Pengembangan Program Diklat	Program	4	4			
				Penyusunan Program dan Penataan Anggaran						
				Dokumen Anggaran	Dokumen	1	1			
				Terwujudnya Penyusunan Program dan Penataan Anggaran	%	100	100			
				LSP P2						
				Terwujudnya Sertifikat Lisensi LSP P2 Jurusan Mesin dan Jurusan Elektro dan Informatika	%	100	100			
				Terselenggaranya Sertifikat Lisensi LSP P2 Jurusan Mesin dan Jurusan Elektro dan Informatika	Dokumen Sertifikat	2	2			
				Kegiatan SMM ISO 9001:2015						
				Terselesaikannya Tindakan Perbaikan Atas Temuan Audit Eksternal ISO 9001:2015	%	100	100			

No	Ururan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Terselesaikannya Awareness ISO 9001:2015	%	100	100			
				Terselenggaranya Awareness ISO 9001:2015	Kali	1	1			
				Terselenggaranya Audit Eksternal ISO 9001:2015	Kali	1	1			
				Terselenggaranya Audit Internal ISO 9001:2015	Kali	1	1			
				Terselesaikannya Tindakan Perbaikan Atas Temuan Audit Internal ISO 9001:2015	%	100	100			
				Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana						
				Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	Unit	30	30			
				Pemeliharaan Bagunan Gedung Tempat Pendidikan	Kegiatan	5	5			
				Pemeliharaan Alat Angkut -Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas	Unit	5	5			
				Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Unit	68	68			
				Terpeliharanya Sarana Prasarana Kantor Untuk Menunjang Kelancaran Kegiatan Perkantoran	%	100	100			
				Administrasi Perkantoran						
				Penyediaan Alat/ Bahan Kegiatan Kantor -Perabot Kantor	Unit	1	1			
				Penyediaan Bahan-bahan Kimia	Tahun	1	1			
				Penyediaan Alat/ Bahan Kegiatan Kantor -Bahan Cetak	Tahun	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penyediaan Alat/ Bahan Kegiatan Kantor -Benda Pos	Tahun	1	1			
				Penyediaan Jasa Pengelola Asrama	Tahun	1	1			
				Penyediaan Makan dan Minum	Tahun	1	1			
				Penyediaan Alat/ Bahan Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	Tahun	1	1			
				Penyediaan Alat/ Bahan Kegiatan kantor -Kertas dan Cover	Tahun	1	1			
				Penyediaan Bukti Pembayaran Honorarium Pengelolaan Keuangan	Berkas	12	12			
				Penyediaan Pengelolaan Air Limbah	Tahun	1	1			
				Penyediaan Bahan-Isi Tabungan Pemadam Kebakaran	Kegiatan	2	2			
				Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan	Tahun	1	1			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Kearsipan	Kegiatan	1	1			
				Penyediaan Bahan Bacaan Langganan Jurnal/ Surat Kabar/ Majalah	Bulan	12	12			
				Lancarnya Tugas Pokok Fungsi Kantor Dalam Penatausahaan Keuangan dan Untuk Menunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran	%	100	100			
				Penyediaan Bahan-bahan Bakar dan Pelumas	Tahun	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penyediaan Alat/ Bahan Kegiatan Kantor -Alat Listrik	Tahun	1	1			
				Penyediaan Bahan-bahan/ Bibit Tanaman	Unit	125	125			
				Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan	Tahun	1	1			
				Penyediaan Suku Cadang- Suku Cadang Alat Angkut	Unit	14	14			
				Penyediaan pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Unit	7	7			
				Penyediaan Tagihan Telepon	Bulan	12	12			
				Penyediaan Jasa Listrik	Bulan	12	12			
				Penyediaan Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	Tahun	1	1			
				Penyediaan Bukti Pembayaran Honorarium Pengelolaan Barang	Berkas	12	12			
				Pengadaan Peralatan Bengkel						
				Penambahan Fasilitas Peralatan Praktek di Seksi Layanan Pendidikan Teknik	%	100	100			
				Tersedianya Peralatan Praktek di Seksi Layanan Pendidikan Teknik	Item	172	172			
				Peningkatan Kompetensi Guru SMK/ Instruktur						
				Terlaksananya Pelaksanaan Diklat Peningkatan Kompetensi Peserta Diklat Guru/ Instruktur	Paket Diklat	2	2			
				Meningkatnya Pengetahuan dan	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Ketrampilan Peserta Didik Guru/ Instruktur						
		BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL	- Mendorong penduduk usia 16-18 tahun untuk tetap bersekolah di pendidikan menengah - Menyediakan beasiswa atau bantuan sekolah bagi penduduk usia 16-18 tahun yang miskin	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Operasional Sekolah Menengah Negeri Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Operasional Sekolah Menengah Negeri Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan Verifikasi Alat UKK SMK Pembinaan OSIS dan FKPO siswa SMK	sekolah	19	19			
		BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Operasional Sekolah Menengah Negeri Operasional KKO Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Operasional Sekolah Menengah Negeri Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan Verifikasi Alat UKK	sekolah	11	11			
		BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Operasional Sekolah Menengah Negeri Operasional Sekolah Menengah Negeri Operasional KKO	sekolah % sekolah	11 0 2	11 0 2			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Operasional KKO	%	0	0			
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas						
				Pendidikan Karakter Siswa	%	0	0			
				Pendidikan Karakter Siswa	orang	100	100			
				Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik						
				Operasional Sekolah	sekolah	8	8			
				Menengah Negeri						
				Operasional Sekolah	%	0	0			
				Menengah Negeri						
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan						
				Verifikasi Alat Uji	sekolah	36	36			
				Kompetensi Keahlian						
				Verifikasi Alat Uji	%	0	0			
				Kompetensi Keahlian						
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						
				Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik						
				Operasional Sekolah	Sekolah	17	17			
				Menengah Negeri						
				Operasional KKO	sekolah	2	2			
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas						
				Pendidikan Karakter Siswa	siswa	56	56			
				Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik						
				Operasional Edutel	sekolah	1	1			
				Operasional Sekolah	Sekolah	8	8			
				Menengah Negeri						
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan						
				Verifikasi Alat UKK	sekolah	57	57			
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						
		BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN								

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik						
				Operasional KKO Sekolah	Sekolah	1	1			
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	Sekolah	11	11			
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas						
				Forum FKPO	Siswa	30	30			
				Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik						
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	Sekolah	6	6			
				Operasional Edutel	Sekolah	1	1			
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan						
				Verifikasi Alat UKK Dikmen Kota Yogyakarta	Sekolah	30	30			

2) *Urusan Kesehatan*

a) *Kondisi Umum*

Rencana Aksi Daerah (RAD) Bidang Kesehatan yang sesuai 5 prioritas nasional yakni; 1) percepatan penurunan stunting, 2) percepatan penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian neonatal (AKN), 3) peningkatan cakupan dan mutu imunisasi, 4) percepatan eliminasi tuberkulosis (TB), dan 5) pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular (PTM) tetap dilaksanakan di tengah pandemi melalui berbagai inovasi dan modifikasi.

Kelima upaya tersebut dilaksanakan ditengah upaya penanganan pandemi COVID-19, termasuk diantaranya percepatan vaksinasi di DIY. Cakupan vaksinasi COVID-19 di DIY tahun 2021 mencapai 98,63% untuk dosis 1 dan 89,20% untuk dosis 2 yang merupakan peringkat ke-3 terbaik nasional.

Pada tahun 2021 Jumlah kematian ibu mengalami peningkatan cukup tajam menjadi 131 kasus. Tingginya angka kematian Ibu antara lain dipicu oleh kondisi lonjakan kasus konfirmasi positif COVID-19 di DIY maupun nasional serta belum adanya rekomendasi vaksinasi COVID-19 bagi ibu hamil, yang mengakibatkan tingginya keterisian tempat tidur (*Bed Occupation Rate*) di rumah sakit. Kebutuhan *bed maternal* COVID-19, kelangkaan oksigen dan keterbatasan tenaga kesehatan akibat terpapar COVID-19, juga berdampak pada peningkatan kasus kematian. Adapun jumlah kematian bayi, pada tahun 2020 sebanyak 282 kasus, menurun menjadi 270 pada tahun 2021.

Kondisi kesehatan di DIY relatif lebih baik dengan meningkatnya pelayanan kesehatan yang ditandai dengan akses masyarakat yang semakin tinggi. Hal ini didukung oleh: (1) Akreditasi layanan kesehatan, dari 76 Rumah Sakit di

wilayah DIY terdapat 39 rumah sakit terakreditasi utama dan paripurna, sedangkan untuk 121 Puskesmas di DIY semua telah terakreditasi; (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Grhasia dalam hal pelayanan kesehatan jiwa paripurna, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, serta kesehatan lainnya secara paripurna; dan (3) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Khusus Paru Respira khususnya pelayanan kesehatan paru dan saluran pernafasan.

Beberapa masalah kesehatan terkait dengan penyakit menular masih perlu mendapatkan perhatian. Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018, penyakit yang harus ditekankan meskipun angka tersebut cenderung berada di bawah angka nasional diantaranya adalah kasus Pneumonia, Tuberkulosis (TB) Paru, Diare dan Malaria. Sebaliknya prevalensi penyakit tidak menular cenderung naik, di antaranya penyakit Kanker, Stroke, Ginjal Kronis, Diabetes Melitus, Jantung, dan Hipertensi. Capaian indikator urusan kesehatan pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.73. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase Puskesmas melaksanakan program Jogja Sehat dengan pendekatan keluarga	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi	%	75,19	70,99	75,19	105,92	69,08	100
3	Persentase Pemenuhan Standar Mutu Pelayanan Kesehatan Jiwa	%	81,39	70	81,39	116,27	77,2	100

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
4	Persentase Pemenuhan Standar Mutu Pelayanan Kesehatan Paru	%	77,2	78,9	78,9	100	65	100

Sumber: Dinkes DIY, 2022

Perilaku sadar sehat diukur melalui persentase puskesmas yang melaksanakan program Jogja Sehat dengan pendekatan keluarga pada tahun 2021 dari target sebesar 100% terealisasi 100%. Tercapainya target puskesmas melaksanakan Program Jogja Sehat dengan pendekatan keluarga, diantaranya adanya dukungan anggaran yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik dan APB Desa.

Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu diukur dengan persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi, pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 70,99% terealisasi 75,19% atau dengan persentase capaian sebesar 105,92%. Tercapainya target pelayanan kesehatan yang terakreditasi didorong upaya pendampingan teknis dan asistensi ke puskesmas oleh sumber daya manusia kesehatan secara mandiri.

Pelayanan kesehatan jiwa yang bermutu diukur melalui persentase pemenuhan standar mutu pelayanan kesehatan jiwa. Pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 70% terealisasi 81,39% atau dengan persentase capaian sebesar 116,27%.

Pelayanan kesehatan paru yang bermutu diukur melalui persentase pemenuhan standar mutu pelayanan kesehatan paru. Pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 78,9% tercapai 100% atau terealisasi 78,9%. Faktor pendorong tercapainya

pelayanan kesehatan paru yang bermutu yaitu adanya sinergi antara tim mutu dan satuan pemeriksa internal rumah sakit.

b) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2021

Pada tahun 2021 Urusan Kesehatan dilaksanakan melalui 5 Program dan 15 sub kegiatan dengan alokasi anggaran Rp192.574.070.283,00. Secara keseluruhan realisasi keuangan sebesar Rp116.870.230.819,00 (60,32%), dengan pencapaian fisik sebesar 100%. Selanjutnya rincian capaian kinerja program dan kegiatan tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 3.74. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Kesehatan Tahun 2021

No	Urusan Pemerin-tahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	1. Peningkatan cakupan, mutu, akses dan keberlangsungan upaya pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, remaja, usia kerja dan usia lanjut. Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				- Hal teknis terkait aplikasi - Pada kondisi pandemi, kontak nakes dengan sasaran (bumil dan balita) berkurang. Kontak tetap dilakukan pada kondisi risti, sedangkan yang normal, yang diupayakan pemantauan jarak jauh dan pemantauan mandiri dengan Buku KIA.	Rekomendasi merubah indikator dari persentase puskesmas melaksanakan Program Jogja Sehat dengan Pendekatan Keluarga dengan indikator Indeks Keluarga Sehat (IKS) karena target sudah terpenuhi sejak tahun lalu	Tindak Lanjut: 1. Dinas Kesehatan DIY berkomitmen tinggi untuk selalu meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di DIY. Dalam masa Pandemi COVID-19 ini Dinas Kesehatan DIY telah melakukan banyak hal untuk mewujudkan komitmen tersebut, sebagai untuk mempertahankan kondisi pelayanan kesehatan yang sudah baik, antara lain sebagai berikut: a. Sosialisasi secara daring tentang komitmen menjaga mutu fasilitas pelayanan kesehatan baik Rumah Sakit, Puskesmas dan Klinik di seluruh DIY. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Februari 2021 dengan peserta penanggungjawab mutu Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Tim Mutu Rumah Sakit, Puskesmas dan Klinik. b. Pengiriman Komitmen menjaga mutu Rumah Sakit, Puskesmas dan Klinik dengan dokumen surat pernyataan menjaga mutu dan diteruskan kepada Kementerian Kesehatan bagi seluruh Rumah Sakit, Klinik dan Puskesmas. Pengiriman dokumen dikirimkan melalui email : may3subdit@gmail.com c. Koordinasi Mutu Akreditasi Pelayanan Dasar pada tanggal 22 Februari 2021. Kegiatan ini khusus dilaksanakan untuk Kabupaten Kulon
			2. Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat serta intervensi masalah gizi di masyarakat seperti stunting	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100	- Koordinasi dengan fasyankes dan dinas kesehatan kabupaten kota terkait kewenangan - selama pandemi covid 19 kegiatan akreditasi fasyankes ditunda	Intensifkan koordinasi	
			3. Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat serta penggalangan kerja sama melalui Corporate Social	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	- Koordinasi teknis lapangan - adanya pandemi covid-19	Intensifkan koordinasi	

No	Urutan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Responsibility dengan pihak swasta							Progo, selanjutnya akan dilakukan untuk Kabupaten/Kota lainnya. d. Sosialisasi Indikator Mutu Rumah
			4. Peningkatan Penyehatan Lingkungan serta implementasi Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) melalui pembinaan dan pengawasan bersama dengan puskesmas	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan pelaporan keuangan	%	100	100	- Persiapan yang membutuhkan banyak energi dan waktu - rujukan berjenjang oleh bpjs berakibat puskesmas tidak bisa langsung merujuk ke RS Jiwa Grhasia sehingga terjadi penurunan kunjungan - adanya pandemi covid-19	- Indikator yang digunakan terdiri dari indikator yang ada di SPM RS Jiwa Grhasia (berdasarkan Pergub DIY no 25 tahun 2009 tentang SPM RS Jiwa Grhasia) dan indikator BLUD (berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan nomor 36 tahun 2016 tentang indikator kinerja Kesehatan. BLUD). Total indikator yang digunakan untuk perhitungan adalah 172 indikator	Sakit di masa Pandemi Covid 19 di DIY pada tanggal 22 Maret 2021. Selama masa Pandemi COVID-19 Rumah Sakit akan menyampaikan laporan kesiapan di masa Pandemi Covid 19 secara online melalui web : http://103.74.143.45/ubm/ e. Webinar Bimtek Pelaksanaan Mutu Akreditasi Klinik Pratama tanggal 23 Maret 2021. Kegiatan ini untuk mereview kembali tentang pentingnya menjaga mutu bagi Klinik Pratama selama belum ada kegiatan survey akreditasi. Kegiatan ini mengundang narasumber dari Kementerian Kesehatan. f. Rapat Koordinasi Pernyataan Komitmen Mutu Fasyankes tanggal 26 Maret 2021. Kegiatan ini dilakukan dengan penanggungjawab mutu Dinkes Kabupaten/Kota dalam rangka menjaga mutu Fasyankes di DIY. g. Webinar Bimtek Pelaksanaan Mutu Akreditasi Klinik Pratama 22 April 2021. Kegiatan ini untuk mereview kembali tentang pentingnya menjaga mutu bagi Klinik Pratama selama belum ada kegiatan survey akreditasi. Kegiatan ini mengundang nara sumber dari Klinik yang sudah menerapkan mutu dengan baik dan terakreditasi paripurna. h. Melakukan
			5. Peningkatan Pencegahan serta Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase peningkatan kualitas pegawai dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%	100	100			
			6. Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dalam pengendalian penyakit menular seperti tenaga epidemiologi, sanitasi dan laboratorium terutama mengantisipasi jika terjadi wabah	Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	100			
			7. Deteksi dini secara pro-aktif untuk penyakit menular	Presentase pasien yang mampu ADL (activity daily living)	%	89	96.3			
			8. Peningkatan Mutu dan Akses Pelayanan	Persentase Angka pasien cedera karena fiksasi	%	2	0			

No	Urutan Pemerin-tahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Kesehatan Dasar dan Rujukan							pendampingan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Puskesmas untuk melakukan penyesuaian pelayanan dalam masa Pandemi COVID-19 melalui Sosialisasi Petunjuk Teknis Pelayanan Puskesmas pada Masa Pandemi COVID-19. i. Melakukan pendampingan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Puskesmas dalam hal pemanfaatan SISROUTE sebagai alat komunikasi rujukan antar Fasyankes. j. Kerja sama dengan FK KMK UGM, RSUP DR. Sardjito dan Dinas Kominfo DIY dalam melakukan bridging aplikasi RS Online dan aplikasi SPGDT untuk mempermudah Fasyankes melihat ketersediaan tempat tidur untuk merujuk pasien. k. Mendorong terbitnya Surat Edaran Gubernur DIY No. 10/SE/II/2021 tentang Pemanfaatan Aplikasi Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) sebagai Sistem Informasi Data Ketersediaan Tempat Tidur untuk Rujukan Pasien Corona Virus Disease-19. l. Melakukan pendampingan pemanfaatan SISROUTE ke Puskesmas. m. Bersama AHS FKMK UGM mewujudkan sistem rujukan maternal neonatal untuk menurunkan AKI dan AKB. n. Melakukan sosialisasi registrasi Klinik sebagai syarat hak akses penggunaan SISROUTE. o.
			9. Peningkatan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan	Penyelesaian berkas klaim pasien jaminan kesehatan	%	79	79			
			10. Penguatan tenaga SDM Kesehatan melalui pelatihan dan perijinan	Penyusunan laporan tahunan RS	%	84	84			
			11. Penguatan mutu advokasi, pembinaan dan pengawasan	Pemenuhan SDM sesuai ABK	%	89	87			
			12. Pengembangan pembiayaan jaminan kesehatan penyangga sebagai komplemen dan suplemen	Kesesuaian inventarisasi barang RS	%	95	95			
			13. Penguatan Manajemen, Penelitian Pengembangan dan Sistem Informasi	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
				Dokumen perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan sinkron antara PA dan KPA	Dokumen	1	1			
				Pengembangan aplikasi/software/website pendukung kinerja Dinas Kesehatan dan Puskesmas DIY	Dokumen	1	1			
				Dokumen Renja yang sesuai dengan Renstra 2017 - 2022	Dokumen	1	1			
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD						

No	Urusan Pemerin-tahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Dokumen DPPA SKPD	Dokumen	1	1			Melakukan pertemuan reviu PHCDP Puskesmas sebagai salah satu upaya peningkatan layanan kesiapsiagaan bencana di masa Pandemi COVID-19. p. Melakukan pendampingan pada praktek mandiri bidan (PMB) melalui sosialisasi juknis pelayanan di tempat mandiri bidan pada masa Pandemi COVID-19. q. Memasukkan keaktifan penggunaan SISRUDE oleh RS sebagai salah satu syarat perpanjangan PKS dengan BPJS. r. Melakukan pembinaan melalui visitasi perizinan Rumah Sakit. s. Memantau setiap hari keaktifan update data ketersediaan tempat tidur Rumah Sakit. t. Mendorong pemenuhan jaringan internet untuk mendukung pelayanan kesehatan melalui fasilitasi koordinasi dengan Bakti Kominfo. u. Mendorong akses pelayanan spesialis untuk mengurangi angka rujukan non spesialis melalui fasilitasi usulan pemenuhan sarpras dan pembiayaan telemedicine. 2. Masalah TB 1. Untuk menuju eliminasi TB 2030 ada dua hal pokok yang harus didukung semua sektor : a. Pasif : skrinning TBC terhadap semua pengunjung fasilitas kesehatan b. Aktif : skrinning TBC terhadap semua orang yang kontak dengan pasien di
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
				Insentif nakes ASN	Orang Nakes	106	106			
				Gaji dan tunjangan ASN	Tahun	1	1			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
				Laporan Tahunan SKPD	Dokumen	1	1			
				Laporan bulanan/Fungsional	Dokumen	24	24			
				Laporan Semester/Prognosis	Dokumen	1	1			
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						
				Pembayaran PBB	Tahun	1	1			
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						
				Terselenggaranya SMM Paket ISO 9001:2015		1	1			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
				Alat listrik	Paket	1	1			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
				PC	Unit	2	2			
				Laptop	Unit	2	2			
				Belanja ATK	Paket	1	1			
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
				Belanja alat kebersihan	Paket	1	1			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
				Logistik Coldroom	Paket	1	1			
				Pengisian pemadam kebakaran	tabung Paket	1	1			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
				Penggandaan	Tahun	1	1			
				Belanja cetakan	Tahun	1	1			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						

No	Urutan Pemerin-tahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pembayaran layanan surat kabar	Bulan	12	12			masyarakat (kontak investigasi) maupun skrining TBC terhadap semua orang tanpa kecuali 2. Mencegah semua orang yang belum sakit TBC tetapi berisiko sakit TBC agar dalam perjalanan alamiahnya tidak menjadi sakit TBC dengan cara : a. Meningkatkan cakupan imunisasi BCG b. Memberikan pengobatan pencegahan TBC (TPT : Tuberculosis Prevention Treatment) kepada semua orang dan semua kelompok umur yang kontak dengan pasien TBC terkonfirmasi bakteriologis (kuman TB positif) tetapi tidak terbukti sakit TBC. Diluar dua hal pokok tersebut, upaya lintas sektoral adalah dukungan dalam hal : a. Perbaikan status gizi masyarakat b. Perbaikan kualitas rumah tempat tinggal menuju rumah sehat Masalah HIV Penanggulangan HIV dan AIDS tidak hanya merupakan tugas pemerintahan atau pelaku kesehatan saja. Tetapi juga merupakan tugas seluruh masyarakat. Dalam penanggulangan HIV dan AIDS masyarakat secara mandiri dapat :
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
				Belanja makan minum oh rapat		2999	1367			
				Perjalanan Dinas luar daerah	Tahun	1	1			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
				Belanja benda pos dan Paket pengiriman surat		1	1			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
				Belanja telepon, air, listrik dan fax	Tahun	1	1			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
				Pembayaran Jasa Keamanan Kantor	Bulan	12	12			
				Pembayaran Honor Pengelola Keuangan	Bulan	12	12			
				Honorarium Pegawai Honorer/PTT	Paket	1	1			
				Jasa kebersihan kantor Dinkes dan Instalasi Farmasi	Bulan	12	12			
				Pembayaran Jasa Pengelola Kepegawaian	Bulan	12	12			
				Pembayaran retribusi sampah	Bulan	12	12			
				Jasa Pestcontrol	Paket	1	1			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
				Pembayaran STNK Roda 4 dan Roda 2	Tahun	1	1			
				Kendaraan dinas sebanyak 23 unit roda 4 dan 27 unit roda 2 terpelihara	Tahun	1	1			
				KIR R4	Kali	2	2			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						

No	Urutan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Belanja Pemeliharaan alat-alat kantor	Tahun	1	1			pasal 25 Perda DIY No. 12 Tahun 2010 sesuai dengan kemampuannya Dinas Kesehatan DIY juga sudah menyiapkan Peer Edukator HIV bagi Kelompok Disabilitas, dikarenakan sudah terdata 24 Difabel dengan HIV positif. Maka Dinas Kesehatan DIY perlu penguatan ke kelompok Disabilitas mengenai masalah HIV dan AIDS ini. Dinas Kesehatan DIY juga akan meningkatkan penyebaran informasi HIV melalui pembuatan media yang sesuai dengan disabilitas mereka. Selain itu di media sosial juga dilakukan penguatan, untuk kontennya Dinas Kesehatan DIY berikan kepada Dinas Kominfo. 3. Pandemi ini telah memunculkan juga inovasi strategi komunikasi yang lebih baik berbasis teknologi sehingga edukasi kepada masyarakat terkait kebersihan dan kesehatan diri dan lingkungan dapat dilakukan secara efektif dan efisien melalui upaya peningkatan literasi untuk perbaikan perilaku. Menggalakan gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) dengan menekankan pada upaya perubahan gaya hidup sehat di masyarakat melalui sebuah gerakan yang bertujuan untuk memasyarakatkan budaya hidup sehat serta meninggalkan kebiasaan dan perilaku masyarakat
				Belanja Pemeliharaan Perlengkapan kantor	Tahun	1	1			
				Pemeliharaan alat-alat kantor	Tahun	1	1			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
				Pemeliharaan lift gudang farmasi	Kali	4	4			
				Pemeliharaan Gedung bangunan tempat kerja	Tahun	1	1			
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
				Persentase pelayanan kesehatan primer, kesehatan rujukan, dan pelayanan Kesehatan lainnya sesuai standar pelayanan	%	45.82	44.81			
				Persentase keberhasilan pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	%	61.26	61.78			
				Persentase Balita Sehat	%	30.28	39.8			
				Persentase Desa Mandiri Sehat	%	76.2	79.27			
				Persentase Mutu Pelayanan Kefarmasian, Perbekalan Kesehatan dan Makanan	%	76.19	67.65			
				Jumlah Layanan Pengembangan Laboratorium untuk mendukung program,	layanan	14	14			

No	Urutan Pemerin-tahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				rujukan dan kebutuhan masyarakat Persentase Waktu tunggu pelayanan rawat jalan jiwa < 60 menit Persentase Tingkat penggunaan tempat tidur (Bed occupancy rate / BOR) Persentase Waktu tunggu pelayanan obat jadi < 30 menit Rata-rata jam pelatihan karyawan dalam setahun Persentase Penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan Jenis layanan jaminan kesehatan Komplemen dan Suplemen kesehatan Angka keberhasilan pengobatan (succsess rate) TB Angka kematian Pasien > 48 jam Rata-rata kunjungan rawat jalan per hari Bed Occupancy Rate (BOR) Length of stay (LOS) Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya Obat, Vaksin dan perbekalan kesehatan terdistribusi ke 5 Kabupaten / Kota Jumlah sarana produksi dan distribusi makanan yang di bina	% % % % % % layanan % % hari % hari	72 64 88 78 100 26 85 1 80 60 5	97.28 34.5 88 25 100 26 86.2 2.49 84.84 22.43 3.93			yang kurang sehat. Penerapan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19 dengan salah satunya melakukan sosialisasi gerakan 3M yaitu mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Selain itu terbentuknya Forum Sosialisasi Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan guna mengintegrasikan pesan-pesan mengenai COVID-19 yang akan disampaikan pada masyarakat, sehingga sumber daya yang digunakan menjadi lebih efisien dan jangkauan penyebaran informasinya menjadi lebih luas. Telesurvey tanggapan masyarakat terhadap COVID-19 juga merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana sikap dan harapan masyarakat dalam penanganan COVID-19. Pemahaman masyarakat terhadap protokol kesehatan COVID-19 sudah cukup baik, 93,36% responden selalu menggunakan masker, 80,43% responden selalu cuci tangan pakai sabun, 66,52% responden tidak berkerumun. 4. Dikarenakan permasalahan ODHA difabel dan ODHA gangguan jiwa merupakan kasus baru, sehingga media edukasi bagi mereka masih belum tersedia, sehingga perlu adanya integrasi program yang akan disediakan bagi

No	Urutan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Jumlah sampel makanan yang diperiksa dan memenuhi syarat	Persen	60	60			ODHA difabel dan ODHA gangguan jiwa termasuk salah satunya edukasi HIV. Langkah-langkah yang sudah dan akan dilakukan : a. Pendalaman permasalahan dengan pendekatan pada kelompok difabel b. Perencanaan program dan kegiatan bersama yang terintegrasi dengan LSM disabilitas c. Melakukan koordinasi dengan bidang pendidikan, agar info HIV terintegrasi dalam mata pelajaran di SLB Kegiatan yang belum dilakukan: a. Menyediakan media informasi mengenai HIV sesuai dengan disabilitasnya b. Pelatihan fasilitator HIV bagi perwakilan komunitas disabilitas c. Penguatan jejaring dalam Kespro, HIV, dan kekerasan seksual bagi disabilitas 5. Dinas Kesehatan DIY sangat mengapresiasi keberadaan PMI sebagai salah satu organisasi masyarakat yang banyak bergerak di bidang kesehatan. Beberapa hal yang telah dilakukan Dinas Kesehatan DIY kaitannya dengan kegiatan PMI adalah : a. Selalu menggandeng PMI dalam koordinasi pelaksanaan pelayanan darah di DIY b. Melakukan pembinaan UDD PMI melalui kegiatan visitasi perizinan UDD c. Melakukan koordinasi dengan PMI untuk meningkatkan pelayanan darah di DIY d. Melakukan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana						
				Audit Kasus KIPI	Kegiatan	4	4			
				Monev Pelaksanaan OH		200	50			
				Imunisasi COVID-19						
				Media KIE Covid	Jenis	6	6			
				Terlaksananya SPM Bencana	Persen	100	100			
				Tenaga Pendistribusi Obat	OB	4	4			
				Sentra Vaksinasi	Kali	94	91			
				Update Knowledge Petugas Surveilans Puskesmas	Kegiatan	3	3			
				Vaksinasi massal	Kegiatan	8	8			
				Pengelolaan data covid-19	Bulan	10	10			
				Tenaga mahasiswa kesehatan pendamping	Bulan	4	4			
				Alat PCR	Paket	1	1			
				Perlengkapan PSC 119	Paket	1	1			
				Reagen pemeriksaan covid-19	Sampel	193000	193000			
				Pengelolaan vaksin covid-19	Bulan	10	10			
				Hibah Kelembagaan PMI	Paket	1	1			
				Obat dan perbekalan kesehatan	Paket	1	1			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						
				Penambahan APD	Jenis	2	2			
				Persentase Penyelidikan Epidemiologi	Persen	100	100			
				Multivitamin	Strip	22000	22000			

No	Urutan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Terlaksananya Sentra Kegiatan Vaksin		16	16			koordinasi dengan PMI untuk pemenuhan kebutuhan SDM pada acara-acara tertentu yang membutuhkan layanan kesiapsiagaan gawat darurat e. Menganggarkan dana hibah PMI sebesar Rp 500.000.000,00 di tahun 2021 6. Selama Pandemi COVID-19, Dinas Kesehatan DIY selalu berupaya untuk melakukan penanganan COVID-19, antara lain : 1. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit a) Peningkatan Penemuan Kasus COVID-19 (Standar PCR) b) Peningkatan Kapasitas Penyelidikan Epidemiologi dan Kontak Tracing c) Penguatan Koordinasi Pencatatan dan Pelaporan d) Analisa Situasi COVID-19 Periodik 2. Program Pelayanan Kesehatan a) Penyusunan Draft Kebijakan/Edaran/Juknis/Alur Terkait Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan b) Penyiapan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan, dan Sumber Daya Manusia di Fasilitas Pelayanan Kesehatan c) Koordinasi dan Komunikasi dengan RS Rujukan COVID-19 d) Monitoring Utilisasi Kapasitas Pelayanan Kritisal dan Non Kritisal di RS Rujukan COVID-19 e) Monitoring dan Evaluasi Implementasi Protokol Manajemen Klinis Tatalaksana Pasien di RS Rujukan COVID-19 f) Penguatan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak						
				Anak baduta memperoleh imunisasi lanjutan/booster	%	90	57			
				Anak kurang dari 1 tahun mendapat imunisasi lengkap	%	95	75.6			
				Persentase KN1	%	88	81.29			
				Persentase K4	%	76	77.53			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif						
				Persentase puskesmas KPR	%	69	69.4			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut						
				Persentase puskesmas santun lansia	%	90	90.1			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
				Persentase balita kurus	%	0.1	0.1			
				Persentase bumil KEK	%	0.25	0.25			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						
				Puskesmas Melaksanakan Kesehatan olahraga	Puskesmas	121	121			
				Jumlah Pos UKK yang terbentuk di wilayah kerja puskesmas	Pos	197	193			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						
				Desa/Kelurahan yang dilakukan verifikasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	%	100	100			
				Puskesmas dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)	Puskesmas	96	121			
				Kab/Kota dilakukan pembinaan Kab/Kota Sehat (KKS)	Kabupaten/Kota	5	5			
				Pasar dilakukan IKL	Pasar	120	143			

No	Urutan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Jamban sehat untuk masyarakat miskin	%	100	92.19			Sistem Rujukan g) Ketugasan Lain
				Hotel dilakukan IKL	Hotel	444	251			Terkait Pengendalian Pandemi COVID-19 3. Program Sumber Daya Kesehatan a) Pelatihan
				RS dilakukan IKL	RS	62	73			Pengambilan Swab Nasofaring dan Orofaring b) Verifikasi Insentif dan Santunan Kematian Nakes yang Menangani COVID-19 di DIY c) Pengadaan Logistik tahap I dan II fase 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13 d) Pembiayaan Jaminan Kesehatan COVID-19 Bersumber Pemda DIY 4. Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat a) Penyebarluasan Informasi Program b) Pembinaan dan Pendampingan Masa Pandemi c) Kegiatan Rutin dan Pengembangan Program Pada Masa Pandemi d) Kajian KIA Gizi Masa Pandemi (Audit Maternal Perinatal) e) Kemitraan Program KIA dan Gizi Masa Pandemi f) Kampanye Masker g) Pembinaan Petugas dalam Pencegahan COVID-19 h) Kajian Perubahan Perilaku Pencegahan COVID-19 i) Kampanye Posyandu dan Desa Siaga Adaptasi Kebiasaan Baru j) Kampanye Pencegahan COVID-19 k) Pendampingan Protokol Adaptasi Kebiasaan Baru 7. Capaian IPM DIY tahun 2020 masih belum mencapai target yang ditetapkan masih dikarenakan angka pengangguran yang masih cukup tinggi serta target harapan lama sekolah masih
				Sekolah (SD, SMP, SLTA) yang dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)	Desa	2365	2991			
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						
				Kampanye GERMAS	Kabupaten/Kota	5	5			
				Penilaian aksi konvergensi stunting	Dokumen	1	1			
				Kajian pemanfaatan media dan pembuatan media promosi kesehatan	Kabupaten/Kota	5	5			
				Media Promosi Film/Iklan Layanan Masyarakat	Kabupaten/Kota	5	5			
				Penerbitan majalah Mensana	Kabupaten/Kota	5	5			
				Media Promosi Cetak	Kabupaten/Kota	5	5			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
				Sasaran yang mendapat Imunisasi COVID-19	%	80	86			
				Kab/Kota yang melakukan posbindu standar dan PANDU PTM	Kabupaten/Kota	5	5			
				Klinik yang melaksanakan strategi DOTS	%	100	100			
				Desa terlatih pengamatan jentik nyamuk	Desa	40	40			
				% fasyankes yang mampu tata laksana kasus pneumonia	%	92.38	92.38			
				Kab/kota yang melaksanakan skrining jiwa	Kabupaten/Kota	5	5			

No	Ururan Pemerin-tahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				% DPS yang tersosialisasikan ISCT kab/kota yang melakukan deteksi dini kanker	% Kabupaten/Kota	80	100			belum tercapai. Dengan adanya Pandemi COVID-19 ini semakin memperparah kondisi tersebut. Namun secara umum IPM DIY mengalami kemajuan setiap tahunnya, perkembangan ini menggambarkan kualitas pembangunan manusia yang semakin membaik. Beberapa langkah-langkah yang tetap dijalankan untuk mengurangi tingkat pengangguran seperti pelatihan kewirausahaan dan pelatihan tenaga kerja mandiri terdidik dengan tetap menjalankan protokol kesehatan, mendorong dan memudahkan investasi di DIY, tetap menjalankan kegiatan belajar mengajar dengan media online agar pendidikan tetap dapat dijalankan. Mulai dibukanya pariwisata di DIY juga diharapkan dapat menumbuhkan ekonomi yang sempat menurun. Dari segi kesehatan juga berupaya untuk menekan penyebaran COVID-19, dengan melakukan sosialisasi dan penerapan protokol kesehatan. 8. UHH DIY tahun 2020 berada pada level 74,99. Kabupaten dengan nilai UHH lebih dari UHH DIY adalah Kabupaten Kulon Progo sebesar 75,24. Sedangkan untuk 4 kabupaten/kota lainnya berada dibawah nilai UHH DIY. Namun dengan nilai yang tidak terlalu jauh.
				fasilitas kesehatan yang melakukan strategi DOTS	% Kabupaten/Kota	100	100			
				Kab/kota yang melakukan pengendalian kasus malaria	Kabupaten/Kota	5	5			
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						
				FKTL menerapkan pedoman pencegahan kecurangan/ fraud dalam pelayanan jaminan kesehatan	RS / FKTL	10	10			
				FKTL yang mendapatkan pembinaan pemenuhan standar tenaga dan sarana dan jaminan kesehatan	RS / FKTL	13	13			
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan						
				Kab/Kota yang merespon % peringatan dini KLB (alert system) minimal 95%	%	100	100			
				Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan						
				Puskesmas mendapatkan pembinaan pelayanan	Puskesmas	121	121			
				Kajian Sistem Informasi Manajemen Puskesmas	Paket	1	1			
				Klinik pratama mendapatkan pembinaan pelayanan	Klinik	30	30			
				Laboratorium Kesehatan mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan	Laboratorium	3	3			
				Rumah Sakit mendapatkan pembinaan pelayanan	Rumah Sakit	80	80			

No	Urusan Pemerin-tahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Puskesmas dan Rumah Sakit yang mendapatkan pembinaan pelayanan kefarmasian	Fasyankes	40	40			Kabupaten Bantul 73,86, Kabupaten Gunung Kidul 74,12, Kabupaten Sleman 74,81 dan Kota Yogyakarta sebesar 74,65. Capaian UHH Kabupaten/Kota yang tidak terlalu berbeda jauh, menunjukkan kebijakan penyediaan infrastruktur dan layanan kesehatan dasar yang baik dan mudah diakses oleh seluruh lapisan penduduk. Sehingga semakin menunjukkan sudah cukup meratanya infrastruktur dan layanan kesehatan yang ada di DIY.
				Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)						
				Pengembangan pelayanan sistem informasi / Faskes yang terintegrasi dengan sistem SPGDT	Paket	1	1			
				Kelengkapan PSC 119 DIY	Paket	1	1			
				Aplikasi Avaya Call Center PSC 119 DIY	Paket	1	1			
				Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan						
				Buku Data Kesehatan Tahun 2020	Dokumen	1	1			
				Jumlah materi tentang informasi kesehatan yang lengkap	Materi	180	197			
				Buku Profil Kesehatan Tahun 2020	Dokumen	1	1			
				Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						
				Pengadaan Monitor pemantauan Covid	Unit	1	1			
				Jumlah pengelolaan sistem informasi kesehatan	Sistem Informasi	6	6			
				Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan						
				Laboratorium yang mendapatkan Pembinaan Mutu	Laborato-rium	5	5			
				RS yang mendapatkan pembinaan mutu	Rumah Sakit	78	78			
				Puskesmas yang mendapatkan pembinaan mutu	Puskes-mas	121	121			

No	Urutan Pemerin-tahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Klinik pratama yang mendapatkan pembinaan mutu	Klinik	3	3			
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						
				Persentase Fasyankes Kesehatan Memenuhi Standar Sarpras Perijinan SDMK dan Pembiayaan	%	71.98	62.8			
				Persentase Mantan linatih yang meningkat kompetensinya	%	66	84.5			
				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan						
				Insentif tenaga Kesehatan Bidan	Orang	2	2			
				Insentif tenaga Kesehatan Perawat	Orang	23	23			
				Insentif tenaga kesehatan Rekam Medis	Orang	3	3			
				Insentif tenaga Kesehatan Radiografer	Orang	1	1			
				Insentif tenaga kesehatan ATLM	Orang	25	28			
				Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan						
				FKTL mendapatkan pembinaan pemenuhan standar tenaga dan sarana perizinan	RS	20	20			
				Pembinaan Organisasi Profesi	Organisasi Profesi	20	20			
				FKTP yang mendapatkan pembinaan pemenuhan standar tenaga dan sarana	Laboratorium Klinik	20	20			
				Sarana Kesehatan mendapat visitasi untuk rekomendasi perizinan	%	100	100			

No	Ururan Pemerin-tahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pedoman Instrumen Perizinan RS Pembinaan Perizinan tenaga dan sarana kesehatan Pembinaan Wahana Program Internsip Dokter Indonesia PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Persentase kefarmasian, % perbekkes dan makanan sesuai standar Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional Sarana produksi dan Sarana distribusi obat tradisional yang mendapatkan pembinaan	Dokumen Kabupaten/Kota Wahana	1 5 18	1 5 18			
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	DINAS KESEHATAN	1. Peningkatan cakupan, mutu, akses dan keberlangsungan upaya pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, remaja, usia kerja dan usia lanjut. Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas	PROGRAM PENYELENGGARAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		KEISTIMEWAAN		- Hal teknis terkait aplikasi - Pada kondisi pandemi, kontak nakes dengan sasaran (bumil dan balita) berkurang. Kontak tetap dilakukan pada kondisi risti, sedangkan yang normal, diupayakan pemantauan jarak jauh dan pemantauan mandiri dengan Buku KIA.	Rekomendasi merubah indikator dari persentase puskesmas melaksanakan Program Jogja Sehat dengan Pendekatan Keluarga dengan indikator Indeks Keluarga Sehat (IKS) karena target sudah terpenuhi sejak tahun lalu	Tindak Lanjut: 1. Dinas Kesehatan DIY berkomitmen tinggi untuk selalu meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di DIY. Dalam masa Pandemi COVID-19 ini Dinas Kesehatan DIY telah melakukan banyak hal untuk mewujudkan komitmen tersebut, sebagai untuk mempertahankan kondisi pelayanan kesehatan yang sudah baik, antara lain sebagai berikut : a. Sosialisasi secara daring tentang komitmen menjaga mutu fasilitas pelayanan kesehatan baik Rumah Sakit, Puskesmas dan Klinik di seluruh DIY. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Februari

No	Uraian Pemerin-tahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			2. Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat serta intervensi masalah gizi di masyarakat seperti stunting	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional				- Koordinasi dengan fasyankes dan dinas kesehatan kabupaten kota terkait kewenangan - selama pandemi covid 19 kegiatan akreditasi fasyankes ditunda - Koordinasi teknis lapangan - adanya pandemi covid-19	Intensifkan koordinasi	2021 dengan peserta penanggungjawab mutu Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Tim Mutu Rumah Sakit, Puskesmas dan Klinik. b. Pengiriman Komitmen menjaga mutu Rumah Sakit, Puskesmas dan Klinik dengan dokumen surat pernyataan menjaga mutu dan diteruskan kepada Kementerian Kesehatan bagi seluruh Rumah Sakit, Klinik dan Puskesmas. Pengiriman dokumen dikirimkan melalui email : may3subdit@gmail.com c. Koordinasi Mutu Akreditasi Pelayanan Dasar pada tanggal 22 Februari 2021. Kegiatan ini khusus dilaksanakan untuk Kabupaten Kulon Progo, selanjutnya akan dilakukan untuk Kabupaten/Kota lainnya. d. Sosialisasi Indikator Mutu Rumah Sakit di masa Pandemi Covid 19 di DIY pada tanggal 22 Maret 2021. Selama masa Pandemi COVID-19 Rumah Sakit akan menyampaikan laporan kesiapan di masa Pandemi Covid 19 secara online melalui web : http://103.74.143.45/ubm/ e. Webinar Bimtek Pelaksanaan Mutu Akreditasi Klinik Pratama tanggal 23 Maret 2021. Kegiatan ini untuk mereview kembali tentang pentingnya menjaga mutu bagi Klinik Pratama selama belum ada kegiatan survey akreditasi. Kegiatan ini mengundang narasumber dari Kementerian Kesehatan. f. Rapat Koordinasi	
			3. Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat serta penggalangan kerja sama melalui Corporate Social Responsibility dengan pihak swasta							Intensifkan koordinasi	
			4. Peningkatan Penyehatan Lingkungan serta implementasi Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) melalui pembinaan dan pengawasan bersama dengan puskesmas						-Persiapan yang membutuhkan banyak energi dan waktu - rujukan berjenjang oleh bpjs berakibat puskesmas tidak bisa langsung merujuk ke RS Jiwa Grhasia sehingga terjadi penurunan kunjungan - adanya pandemi covid-19	- Indikator yang digunakan terdiri dari indikator yang ada di SPM RS Jiwa Grhasia (berdasarkan Pergub DIY no 25 tahun 2009 tentang SPM RS Jiwa Grhasia) dan indikator BLUD (berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan nomor 36 tahun 2016 tentang indikator kinerja	
			6. Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dalam pengendalian penyakit menular seperti tenaga epidemiologi,								

No	Ururan Pemerin-tahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			sanitasi dan laboratorium terutama mengantisipasi jika terjadi wabah						BLUD). Total indikator yang digunakan untuk perhitungan adalah 172 indikator	Pernyataan Komitmen Mutu Fasyankes tanggal 26 Maret 2021. Kegiatan ini dilakukan dengan penanggungjawab mutu Dinkes Kabupaten/Kota dalam rangka menjaga mutu Fasyankes di DIY. g. Webinar Bimtek Pelaksanaan Mutu Akreditasi Klinik Pratama 22 April 2021. Kegiatan ini untuk mereview kembali tentang pentingnya menjaga mutu bagi Klinik Pratama selama belum ada kegiatan survey akreditasi. Kegiatan ini mengundang nara sumber dari Klinik yang sudah menerapkan mutu dengan baik dan terakreditasi paripurna. h. Melakukan pendampingan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Puskesmas untuk melakukan penyesuaian pelayanan dalam masa Pandemi COVID-19 melalui Sosialisasi Petunjuk Teknis Pelayanan Puskesmas pada Masa Pandemi COVID-19. i. Melakukan pendampingan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Puskesmas dalam hal pemanfaatan SISROUTE sebagai alat komunikasi rujukan antar Fasyankes. j. Kerja sama dengan FK KMK UGM, RSUP DR. Sardjito dan Dinas Kominfo DIY dalam melakukan bridging aplikasi RS Online dan aplikasi SPGDT untuk mempermudah Fasyankes melihat
			7. Deteksi dini secara pro-aktif untuk penyakit menular	Kajian Pengembangan Kesehatan Tradisional	Dokumen	1	1			
			8. Peningkatan Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Penyehat Tradisional mendapatkan pembinaan legalitas pelayanan	Dokumen	1	1			
			9. Peningkatan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan	Pengembangan Yankestrad Di Tempat Pariwisata	Dokumen	1	1			
			10. Penguatan tenaga SDM Kesehatan melalui pelatihan dan perijinan	Video Pengembangan Kestrad	Video	1	1			
			11. Penguatan mutu advokasi, pembinaan dan pengawasan	Vaksinasi Massal COVID-19 (2 dosis)	Orang	7500	8484			
			12. Pengembangan pembiayaan jaminan kesehatan penyangga sebagai komplemen dan suplemen	Perawat RS dan Puskesmas terlatih Akupresur	Orang	15	15			

No	Urutan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			13. Penguatan Manajemen, Penelitian Pengembangan dan Sistem Informasi	Pemenuhan Kebutuhan/material Umum RSPAU Hardjolukito Workshop Saintifikasi Jamu	Jenis Orang	24 30	24 30			ketersediaan tempat tidur untuk merujuk pasien. k. Mendorong terbitnya Surat Edaran Gubernur DIY No. 10/SE/II/2021 tentang Pemanfaatan Aplikasi Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) sebagai Sistem Informasi Data Ketersediaan Tempat Tidur untuk Rujukan Pasien Corona Virus Disease-19. l. Melakukan pendampingan pemanfaatan SISROUTE ke Puskesmas. m. Bersama AHS FKMK UGM mewujudkan sistem rujukan maternal neonatal untuk menurunkan AKI dan AKB. n. Melakukan sosialisasi registrasi Klinik sebagai syarat hak akses penggunaan SISROUTE. o. Melakukan pertemuan reuvi PHCDP Puskesmas sebagai salah satu upaya peningkatan layanan kesiapsiagaan bencana di masa Pandemi COVID-19. p. Melakukan pendampingan pada praktek mandiri bidan (PMB) melalui sosialisasi juknis pelayanan di tempat mandiri bidan pada masa Pandemi COVID-19. q. Memasukkan keaktifan penggunaan SISROUTE oleh RS sebagai salah satu syarat perpanjangan PKS dengan BPJS. r. Melakukan pembinaan melalui visitasi perizinan Rumah Sakit. s. Memantau setiap hari keaktifan update data ketersediaan tempat tidur Rumah Sakit. t. Mendorong

No	Urutan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<p>pemenuhan jaringan internet untuk mendukung pelayanan kesehatan melalui fasilitasi koordinasi dengan Bakti Kominfo. u. Mendorong akses pelayanan spesialis untuk mengurangi angka rujukan non spesialis melalui fasilitasi usulan pemenuhan sarpras dan pembiayaan telemedicine. 2. Masalah TB 1. Untuk menuju eliminasi TB 2030 ada dua hal pokok yang harus didukung semua sektor : a. Pasif : skrinning TBC terhadap semua pengunjung fasilitas kesehatan b. Aktif : skrinning TBC terhadap semua orang yang kontak dengan pasien di masyarakat (kontak investigasi) maupun skrinning TBC terhadap semua orang tanpa kecuali 2. Mencegah semua orang yang belum sakit TBC tetapi berisiko sakit TBC agar dalam perjalanan alamiahnya tidak menjadi sakit TBC dengan cara : a. Meningkatkan cakupan imunisasi BCG b. Memberikan pengobatan pencegahan TBC (TPT : Tuberculosis Prevention Treatment) kepada semua orang dan semua kelompok umur yang kontak dengan pasien TBC terkonfirmasi bakteriologis (kuman TB positif) tetapi tidak terbukti sakit TBC. Diluar dua hal pokok tersebut, upaya lintas sektoral adalah dukungan dalam hal : a. Perbaikan status gizi masyarakat b. Perbaikan kualitas</p>

No	Ururan Pemerin-tahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<p>rumah tempat tinggal menuju rumah sehat Masalah HIV Penanggulangan HIV dan AIDS tidak hanya merupakan tugas pemerintahan atau pelaku kesehatan saja. Tetapi juga merupakan tugas seluruh masyarakat. Dalam penanggulangan HIV dan AIDS masyarakat secara mandiri dapat :</p> <p>a. Melakukan promosi penanggulangan HIV dan AIDS melalui komunikasi, informasi, dan edukasi; dan/atau b. Melakukan rehabilitasi sosial kepada ODHA, OHIDHA dan populasi kunci sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 Perda DIY No. 12 Tahun 2010 sesuai dengan kemampuannya Dinas Kesehatan DIY juga sudah menyiapkan Peer Educator HIV bagi Kelompok Disabilitas, dikarenakan sudah terdata 24 Difabel dengan HIV positif. Maka Dinas Kesehatan DIY perlu penguatan ke kelompok Disabilitas mengenai masalah HIV dan AIDS ini. Dinas Kesehatan DIY juga akan meningkatkan penyebaran informasi HIV melalui pembuatan media yang sesuai dengan disabilitas mereka. Selain itu di media sosial juga dilakukan penguatan, untuk kontennya Dinas Kesehatan DIY berikan kepada Dinas Kominfo. 3. Pandemi ini telah memunculkan juga inovasi strategi komunikasi yang lebih baik berbasis</p>

No	Urutan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<p>teknologi sehingga edukasi kepada masyarakat terkait kebersihan dan kesehatan diri dan lingkungan dapat dilakukan secara efektif dan efisien melalui upaya peningkatan literasi untuk perbaikan perilaku. Menggalakan gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) dengan menekankan pada upaya perubahan gaya hidup sehat di masyarakat melalui sebuah gerakan yang bertujuan untuk memasyarakatkan budaya hidup sehat serta meninggalkan kebiasaan dan perilaku masyarakat yang kurang sehat. Penerapan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19 dengan salah satunya melakukan sosialisasi gerakan 3M yaitu mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Selain itu terbentuknya Forum Sosialisasi Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan guna mengintegrasikan pesan-pesan mengenai COVID-19 yang akan disampaikan pada masyarakat, sehingga sumber daya yang digunakan menjadi lebih efisien dan jangkauan penyebaran informasinya menjadi lebih luas. Telesurvey tanggapan masyarakat terhadap COVID-19 juga merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana sikap dan harapan masyarakat dalam penanganan</p>

No	Urutan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<p>COVID-19. Pemahaman masyarakat terhadap protokol kesehatan COVID-19 sudah cukup baik, 93,36% responden selalu menggunakan masker, 80,43% responden selalu cuci tangan pakai sabun, 66,52% responden tidak berkerumun. 4. Dikarenakan permasalahan ODHA difabel dan ODHA gangguan jiwa merupakan kasus baru, sehingga media edukasi bagi mereka masih belum tersedia, sehingga perlu adanya integrasi program yang akan disediakan bagi ODHA difabel dan ODHA gangguan jiwa termasuk salah satunya edukasi HIV. Langkah-langkah yang sudah dan akan dilakukan :</p> <p>a. Pendalaman permasalahan dengan pendekatan pada kelompok difabel b. Perencanaan program dan kegiatan bersama yang terintegrasi dengan LSM disabilitas c. Melakukan koordinasi dengan bidang pendidikan, agar info HIV terintegrasi dalam mata pelajaran di SLB Kegiatan yang belum dilakukan:</p> <p>a. Menyediakan media informasi mengenai HIV sesuai dengan disabilitasnya b. Pelatihan fasilitator HIV bagi perwakilan komunitas disabilitas c. Penguatan jejaring dalam Kespro, HIV, dan kekerasan seksual bagi disabilitas 5. Dinas Kesehatan DIY sangat mengapresiasi keberadaan PMI sebagai salah satu organisasi</p>

No	Urutan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<p>masyarakat yang banyak bergerak di bidang kesehatan. Beberapa hal yang telah dilakukan Dinas Kesehatan DIY kaitannya dengan kegiatan PMI adalah : a. Selalu menggandeng PMI dalam koordinasi pelaksanaan pelayanan darah di DIY b. Melakukan pembinaan UDD PMI melalui kegiatan visitasi perizinan UDD c. Melakukan koordinasi dengan PMI untuk meningkatkan pelayanan darah di DIY d. Melakukan koordinasi dengan PMI untuk pemenuhan kebutuhan SDM pada acara-acara tertentu yang membutuhkan layanan kesiapsiagaan gawat darurat e. Menganggarkan dana hibah PMI sebesar Rp 500.000.000,00 di tahun 2021 6. Selama Pandemi COVID-19, Dinas Kesehatan DIY selalu berupaya untuk melakukan penanganan COVID-19, antara lain :</p> <p>1. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit a) Peningkatan Penemuan Kasus COVID-19 (Standar PCR) b) Peningkatan Kapasitas Penyelidikan Epidemiologi dan Kontak Tracing c) Penguatan Koordinasi Pencatatan dan Pelaporan d) Analisa Situasi COVID-19 Periodik 2. Program Pelayanan Kesehatan a) Penyusunan Draft Kebijakan/Edaran/Juknis/Alur Terkait Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan b)</p>

No	Urutan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<p>Penyiapan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan, dan Sumber Daya Manusia di Fasilitas Pelayanan Kesehatan c) Koordinasi dan Komunikasi dengan RS Rujukan COVID-19 d) Monitoring Utilisasi Kapasitas Pelayanan Kritis dan Non Kritis di RS Rujukan COVID-19 e) Monitoring dan Evaluasi Implementasi Protokol Manajemen Klinis Tatalaksana Pasien di RS Rujukan COVID-19 f) Penguatan Sistem Rujukan g) Ketugasan Lain Terkait Pengendalian Pandemi COVID-19 3. Program Sumber Daya Kesehatan a) Pelatihan Pengambilan Swab Nasofaring dan Orofaring b) Verifikasi Insentif dan Santunan Kematian Nakes yang Menangani COVID-19 di DIY c) Pengadaan Logistik tahap I dan II fase 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13 d) Pembiayaan Jaminan Kesehatan COVID-19 Bersumber Pemda DIY 4. Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat a) Penyebarluasan Informasi Program b) Pembinaan dan Pendampingan Masa Pandemi c) Kegiatan Rutin dan Pengembangan Program Pada Masa Pandemi d) Kajian KIA Gizi Masa Pandemi (Audit Maternal Perinatal) e) Kemitraan Program KIA dan Gizi Masa Pandemi f) Kampanye Masker g) Pembinaan Petugas dalam Pencegahan COVID-19 h) Kajian Perubahan Perilaku Pencegahan COVID-19 i) Kampanye</p>

No	Urutan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<p>Posyandu dan Desa Siaga Adaptasi Kebiasaan Baru j) Kampanye Pencegahan COVID-19 k) Pendampingan Protokol Adaptasi Kebiasaan Baru 7. Capaian IPM DIY tahun 2020 masih belum mencapai target yang ditetapkan masih dikarenakan angka pengangguran yang masih cukup tinggi serta target harapan lama sekolah masih belum tercapai. Dengan adanya Pandemi COVID-19 ini semakin memperparah kondisi tersebut. Namun secara umum IPM DIY mengalami kemajuan setiap tahunnya, perkembangan ini menggambarkan kualitas pembangunan manusia yang semakin membaik. Beberapa langkah-langkah yang tetap dijalankan untuk mengurangi tingkat pengangguran seperti pelatihan kewirausahaan dan pelatihan tenaga kerja mandiri terdidik dengan tetap menjalankan protokol kesehatan, mendorong dan memudahkan investasi di DIY, tetap menjalankan kegiatan belajar mengajar dengan media online agar pendidikan tetap dapat dijalankan. Mulai dibukanya pariwisata di DIY juga diharapkan dapat menumbuhkan ekonomi yang sempat menurun. Dari segi kesehatan juga berupaya untuk menekan penyebaran COVID-19, dengan melakukan sosialisasi dan penerapan protokol kesehatan. 8.</p>

No	Ururan Pemerin-tahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<p>UHH DIY tahun 2020 berada pada level 74,99. Kabupaten dengan nilai UHH lebih dari UHH DIY adalah Kabupaten Kulon Progo sebesar 75,24. Sedangkan untuk 4 kabupaten/kota lainnya berada dibawah nilai UHH DIY. Namun dengan nilai yang tidak terlalu jauh. Kabupaten Bantul 73,86, Kabupaten Gunungkidul 74,12, Kabupaten Sleman 74,81 dan Kota Yogyakarta sebesar 74,65. Capaian UHH Kabupaten/Kota yang tidak terlalu berbeda jauh, menunjukkan kebijakan penyediaan infrastruktur dan layanan kesehatan dasar yang baik dan mudah diakses oleh seluruh lapisan penduduk. Sehingga semakin menunjukkan sudah cukup meratanya infrastruktur dan layanan kesehatan yang ada di DIY.</p>

3) *Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

a) *Sub Urusan Pekerjaan Umum*

(1) *Kondisi Umum*

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pelaksanaan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan dan Permukiman merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah terkait Pelayanan Dasar. Pelayanan dasar yang dimaksud yaitu melaksanakan ketugasan penyediaan infrastruktur dasar (*basic infrastructure*) yang terdiri dari pelayanan di Sub Urusan Sumber Daya Air, Sub Urusan Jalan, Sub Urusan Keciaptakarya (Air Minum, Persampahan, Air Limbah, Permukiman, Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya) serta Sub Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Pemda DIY dalam pelaksanaan Sub Urusan Sumber Daya Air mengelola 41 Daerah Irigasi Kewenangan DIY dengan total luasan areal oncoran sebesar 13.987 ha yang terdiri dari 35 daerah irigasi lintas kabupaten/kota dan 6 daerah irigasi utuh dengan luasan (1000 – 3000 ha) yang berada di Kabupaten Bantul, Gunungkidul, dan Kulon Progo. Sub Urusan Sumber Daya Air dilaksanakan menurut UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi. Dalam penyediaan dan pengelolaan air baku bagi masyarakat sampai tahun 2021, Pemda DIY telah melaksanakan pengelolaan embung yang berjumlah 25 embung dan tersebar di DIY dengan rincian: 1) Kabupaten Sleman 8 unit; 2) Kabupaten Bantul 3 unit; 3) Kabupaten Kulon Progo 4 unit; 4) Kabupaten Gunungkidul 9 unit; dan 5) Kota Yogyakarta 1

unit. Adapun pelaksanaan pengelolaan sungai di DIY merupakan kewenangan dari Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, KemenPUPPR.

Sub Urusan Jalan memegang peranan penting guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan aksesibilitas di wilayah DIY. Dengan panjang jaringan jalan nasional sepanjang 247,91 km dan jaringan jalan provinsi sepanjang 760,45 Km (SK Gubernur Nomor 118 Tahun 2016 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Provinsi), perlu dilakukan pengembangan fungsi jalan dan selalu mempertahankan status jalan provinsi dalam kondisi mantap. Pengembangan jaringan jalan antara lain Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS), Prambanan - Gading, serta rintisan Bedah Menoreh. Pengembangan fungsi jalan dapat meningkatkan aksesibilitas baik dari aspek kewilayahan maupun aspek sektoral.

Pada Sub Urusan Keciaptakaryaan dalam hal ini adalah Sub Urusan Air Minum, Persampahan, Air Limbah, Permukiman, Bangunan Gedung, Penataan Bangunan, dan Lingkungannya dilaksanakan untuk mewujudkan peningkatan akses penduduk terhadap air minum dan sanitasi yang layak, serta mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga diharapkan mampu menunjang pencapaian target SDGs seperti pengurangan jumlah rumah tangga tanpa akses terhadap air minum dan sanitasi dasar.

Pelaksanaan pelatihan tenaga ahli konstruksi dan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi sebagai wujud Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi. Hal ini merupakan amanat pada UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

dan PP Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Perda DIY Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 menyebutkan sasaran Pembangunan Urusan Pekerjaan Umum meliputi: 1) Penduduk Berakses Sanitasi; 2) Penduduk Berakses Air Minum; 3) Meningkatnya luas fungsional Daerah Irigasi yang terlayani air irigasi; 4) Meningkatnya aksesibilitas wilayah; dan 5) Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan jasa Konstruksi yang diukur menggunakan lima indikator kinerja sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.75. Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Jumlah Penduduk Berakses Sanitasi	%	96,46	93,36	96,18	103,02	94,25	102,05
2	Jumlah Penduduk Berakses Air Minum	%	92,82	92,30	92,92	100,67	94,14	98,70
3	Peningkatan luas fungsional Daerah Irigasi yang terlayani air irigasi	%	84,85	85,50	85,74	100,28	86,25	99,40
4	Peningkatan aksesibilitas Jalan	%	98,03	98,22	98,87	100,66	100	99,21
5	Peningkatan kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi	%	75,13	85,86	98,82	115,09	99,57	99,25

Sumber: DPUPESDM DIY, 2022

(a) *Jumlah Penduduk Berakses Sanitasi*

Akses Sanitasi dicapai melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan Regional, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah serta Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase. Jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi berjumlah 3.759.997 jiwa atau setara dengan 96,18% dari jumlah penduduk DIY. Sampai dengan akhir tahun 2021 persentase capaian penduduk berakses sanitasi telah mencapai 103,02% dari target sebesar 93,36%.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung capaian sampai dengan tahun 2021 sebagai berikut:

- **Penanganan air limbah terpusat**

Layanan jaringan infrastruktur limbah terpusat diprioritaskan pada daerah yang terlewati jaringan limbah terpusat akan tetapi Sambungan Rumah (SR) belum tersedia. Prioritas penambahan layanan jaringan infrastruktur limbah terpusat tersebut dibagi menjadi 2 skala yaitu skala desa dan skala kecamatan. Penanganan limbah komunal diprioritaskan pada daerah dengan kepadatan penduduk lebih dari 100 jiwa/ha, dan merupakan daerah yang tidak terlayani karena berada pada daerah cekungan.

Jumlah penambahan SR air limbah Sistem IPAL Terpusat Sewon untuk tahun 2021 masih dibatasi karena kapasitas IPAL yang sudah melebihi kapasitas rencana. Pada tahun 2021 dengan kontrak tahun jamak (2020-2021), APBN

melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) DIY melakukan pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Kapasitas IPAL Regional Sewon untuk menambah kapasitas pengolahan IPAL Sewon menjadi sebesar 52.000 m³/hari yang setara dengan pengolahan sampai dengan 75.000 SR terpasang. Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas IPAL Sewon oleh BPPW DIY telah selesai dilaksanakan pada bulan Desember 2021 dan bisa mulai dioperasikan di tahun 2022. Sedangkan untuk pemasangan Jumlah SR Air Limbah Rumah Tangga Sistem IPAL Terpusat Sewon pada tahun 2020 adalah 25.294 SR dan pada tahun 2021 terbangun SR sebanyak 756, sehingga jumlah SR air limbah rumah tangga sampai dengan akhir tahun 2021 sebanyak 26.050 SR, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.76. Jumlah SR Air Limbah Rumah Tangga

No	Wilayah KPY	Jumlah SR		
		s.d 2020	2021	s.d 2021
1	Kota Yogyakarta	18.566	531	19.097
2	Kabupaten Bantul	2.899	225	3.124
3	Kabupaten Sleman	3.829	-	3.829
Jumlah Total		25.294	756	26.050

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2022

Selain peningkatan kapasitas IPAL Regional Sewon yang dilaksanakan oleh APBN sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan akses sanitasi aman di DIY, APBN melalui BPPW DIY pada tahun 2021 juga melaksanakan pembangunan SPALDT sebagai lanjutan pembangunan sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut: Pembangunan SPALDT Depok,

Sleman dan Pembangunan SPALDT Bambanglipuro, Bantul

- **Penanganan air limbah berbasis masyarakat**

Pada tahun 2021, BPPW DIY melaksanakan Program Sanitasi Berbasis Masyarakat di untuk 5 lokasi di DIY, 3 lokasi di Sleman dan 2 lokasi di Kulon Progo. Selain Program Sanitasi Berbasis Masyarakat, BPPW DIY juga melaksanakan program pembangunan sanitasi perdesaan padat karya dengan membangun tangki septik dan bilik toilet di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunungkidul. Jumlah IPAL Komunal yang sudah terbangun sampai tahun 2021 sejumlah sebagaimana tersebut pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.77. Jumlah IPAL Komunal sampai dengan Tahun 2021

No	Wilayah	Jumlah IPAL Komunal
1	Kota Yogyakarta	58
2	Kabupaten Bantul	145
3	Kabupaten Sleman	147
4	Kabupaten Gunungkidul	72
5	Kabupaten Kulon Progo	39
Jumlah Total		461

Sumber: Data Pokja AMPL/Sanitasi Kabupaten/Kota, 2022

- **Sampah**

Jumlah timbulan sampah perkotaan di DIY tahun 2021 adalah 1.133,94 ton/hari. Sampah yang tereduksi di rumah tangga baik secara mandiri, melalui bank sampah, pengolahan di Tempat Pengolahan Sampah – *Reduce Reuse Recycle* (TPS3R), maupun pemulung di DIY sebesar 276,20 ton/hari atau 24,36% dari volume timbulan sampah. Sementara itu, sampah yang

ditangani oleh sistem kota berupa pengumpulan, pemilahan, pengangkutan dan pemrosesan sebesar 617,33 ton/hari atau 54,44% dari volume timbunan sampah. Masih ada timbunan sampah yang tidak terkelola di perkotaan DIY sebesar 240,41 ton/hari atau 21,20%. Neraca Pengelolaan Sampah Perkotaan DIY Tahun 2021 (ton/hari) sebagai berikut.

Tabel 3.78. Pengelolaan Sampah Perkotaan Kabupaten/Kota Tahun 2021 (ton/hari)

No	Kabupaten/ Kota	Satuan	Potensi Timbunan Sampah	Penanganan (Diangkut Ke Tpa)	Pengurangan (Tps3r, Bank Sampah Dll)	Sampah Terkelola	Sampah Belum Terkelola
1	Yogyakarta	Ton/ Hari	362,09	256,73	102,34	359,07	3,02
		%		70,50	28,10	98,61	0,83
2	Bantul	Ton/ Hari	227,36	64,86	102,42	167,28	60,08
		%		28,53	45,05	73,58	26,42
3	Kulon Progo	Ton/ Hari	94,53	43,18	8,93	52,11	42,42
		%		45,68	9,44	55,12	44,88
4	Gunungkidul	Ton/ Hari	80,09	47,47	22,15	69,62	10,47
		%		59,27	27,65	86,93	13,07
5	Sleman	Ton/ Hari	369,87	205,09	40,37	245,45	124,42
		%		55,45	10,91	66,36	33,64
	Jumlah	Ton/ Hari	1.133,94	617,33	276,20	893,53	240,41
		%		54,44	24,36	78,80	21,20

Sumber: Data Pokja AMPL/Sanitasi Kabupaten/Kota, 2022

Terdapat tiga unit TPA di DIY yaitu: 1) TPA Regional (TPA Piyungan) yang melayani Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta; 2) TPA Banyuroto yang melayani Kabupaten Kulon Progo; serta 3) TPA Wukirsari yang melayani Kabupaten Gunungkidul.

TPS3R, Bank Sampah, dan Rumah Kompos merupakan infrastruktur penanganan sampah rumah tangga yang dibutuhkan untuk mengurangi jumlah timbunan sampah yang masuk ke TPA Regional Piyungan.

Tabel 3.79. Infrastruktur Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota di DIY

No	Wilayah KPY	Jumlah TPA (unit)	Bank Sampah (unit)	TPS3R/TPST (unit)	Rumah Kompos (unit)
1	Kota Yogyakarta	1	481	2	0
2	Kabupaten Bantul		165	18	5
3	Kabupaten Sleman		247	29	104
4	Kabupaten Gunungkidul	1	100	11	0
5	Kabupaten Kulon Progo	1	83	9	0
Jumlah Total		3	1.076	69	109

Sumber: DPUPESDM DIY, 2022

Upaya peningkatan program pengelolaan persampahan yang didanai APBD DIY, pada tahun 2021 telah dilakukan kegiatan berupa: 1) Tahap persiapan pengadaan lahan TPA Regional Piyungan seluas 5,7 ha; 2) Perkerasan jalan operasional TPA Regional Piyungan; 3) Talud sungai saluran lindi; 4) Tambah daya listrik untuk pengolahan lindi TPA Regional Piyungan 240 kVA; 5) DED konstruksi sel baru di TPA Transisi Regional Piyungan; 6) DED Penanganan Drainase Kawasan Permukiman TPA Regional Piyungan; 7) Penyediaan lahan untuk zona transisi TPA Regional Piyungan seluas 2,8 ha; 8) Kajian Uji Tanah di TPA Transisi Regional Piyungan.

Di samping itu, BPPW DIY telah melaksanakan pekerjaan Peningkatan Kapasitas TPA Piyungan dengan melakukan penataan sel sampah untuk membantu meningkatkan kapasitas TPA

Regional Piyungan dan persiapan penutupan sel sampah di TPA Regional Piyungan. Kegiatan ini dilaksanakan secara tahun jamak yang dimulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Selain pekerjaan di TPA Regional Piyungan, BPPW DIY melaksanakan pembangunan TPS3R di 2 lokasi yaitu Nogotirto dan Sendangtirto Kabupaten Sleman.

- **Drainase**

Kegiatan yang dilakukan pada tahun anggaran 2021 sebagai upaya mengurangi titik genangan di Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) yaitu: 1) Pemeliharaan Saluran Drainase di MM UGM dan di Desa Ngestiharjo, Kasihan, Bantul; 2) Penyusunan FS dan DED Drainase Kawasan Kulur; 3) Penyusunan Dokumen Lingkungan Pembangunan Saluran Drainase Kawasan JEC dan Ngestiharjo.

(b) *Jumlah Penduduk Berakses Air Minum*

Pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum melalui dukungan dari APBN Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kemen PUPR berupa kegiatan pembangunan SPAM Regional, SPAM IKK, Optimalisasi SPAM IKK dan swadaya masyarakat. Hingga tahun 2021 jumlah penduduk berakses air minum secara kumulatif mencapai 92,92% dari jumlah penduduk DIY atau setara dengan 3.607.576 jiwa. Sampai dengan akhir tahun 2021 capaian penduduk berakses air minum telah mencapai 100,67% dari target sebesar 92,82% dan apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2017-2022 telah tercapai sebesar 98,70%.

Tabel 3.80. Data Kependudukan D.I. Yogyakarta Terlayani Air Minum Tahun 2021

No	Kabupaten	Perpipaan	Non Perpipaan	Belum Ada Akses
1	Sleman	422.876	743.909	65.813
2	Bantul	227.077	795.531	7.390
3	Yogyakarta	204.649	231.287	-
4	Gunung Kidul	347.510	224.442	177.321
5	Kulon Progo	207.342	221.797	5.344
Jumlah		1.394.587	2.212.989	274.717
Total Akses Air Minum		3.607.576		
Capaian Akses		92,92%		

Sumber: DPUPESDM DIY, 2022

Melalui dana APBN sebagai wujud keterpaduan program penyediaan air minum layak, dilakukan Pembangunan infrastruktur air minum sebagai berikut: 1) Pembangunan SPAM Regional Kartamantul Tahap II Kapasitas 300 L/det. SPAM Regional Kartamantul yang dilaksanakan merupakan Sistem Kebon Agung yang akan melayani Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul, 2) Peningkatan Kapasitas IPA SPAM IKK Selopamioro Kabupaten Bantul dan Optimalisasi SPAM IKK Samigaluh Kabupaten Kulon Progo.

(c) *Peningkatan luas fungsional Daerah Irigasi yang terlayani air irigasi*

Realisasi sampai akhir tahun 2021 luas fungsional daerah irigasi yang terlayani air irigasi sebesar 85,74% atau seluas 11.992,46 ha dari luas total areal Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan DIY sebesar 13.987 dari luas areal daerah irigasi DIY. Dengan demikian meningkatnya luas fungsional daerah irigasi yang terlayani air irigasi telah mencapai 100,28% dari target sebesar 85,50%, dan apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2017-2022 telah mencapai sebesar 99,40%.

Pencapaian tersebut didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1) Peningkatan Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi Simo, Daerah Irigasi Mergangsan, dan Daerah Irigasi Pijenan yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi. 2) Rehabilitasi Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi Pijenan/Kamijoro yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi. Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Pijenan/Kamijoro melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). 3) Pengelolaan Jaringan Irigasi yang mencakup 41 daerah irigasi kewenangan DIY.

(d) Peningkatan aksesibilitas Jalan

Peningkatan aksesibilitas Jalan berupa pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan memegang peranan penting dalam rangka mendukung konektivitas antar wilayah yang berdampak pada pengembangan pertumbuhan ekonomi daerah.

Realisasi tahun 2021 terdapat penambahan panjang jalan nasional dan jalan provinsi sepanjang 26,62 km atau 98,87% dari target 98,22%. Jadi sampai tahun 2021 total panjang jalan yang terbangun mencapai 984,93 km dari total kebutuhan panjang jalan yang direncanakan sepanjang 996,16 km. Formulasi perhitungannya adalah jumlah panjang jalan nasional dan jalan provinsi yang tersedia dibagi dengan kebutuhan panjang jalan yang direncanakan x 100% = $(984,93 \text{ km} / 996,16 \text{ km}) \times 100\% = 98,87\%$.

(e) *Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Jasa Konstruksi*

Kewenangan Pemerintah Daerah provinsi pada sub-urusan Jasa Konstruksi meliputi: Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi; dan Penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi.

Sasaran peningkatan kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi dirumuskan ke dalam indikator persentase capaian program, yang dihitung menggunakan dua sub-capaian kinerja meliputi: Peningkatan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi (bobot 50%); dan Sertifikat/Laporan Hasil Uji yang diterbitkan (bobot 50%).

Pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi di DIY dilaksanakan melalui program Pengembangan Jasa Konstruksi. Bentuk kegiatan yang dilakukan berupa layanan Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi dan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi baik di sisi pengelolaan informasi, penyediaan data, hingga penyebarluasan informasi bagi masyarakat.

Pelaksanaan pelatihan/pembekalan teknis pada tahun 2021 telah diberikan kepada 150 orang. Jumlah tenaga ahli konstruksi yang tersertifikasi hingga akhir tahun 2021 sebanyak 92 orang, sedangkan 58 orang masih menunggu jadwal pelaksanaan sertifikasi. Terhambatnya proses sertifikasi karena masa transisi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang mengubah kebijakan tata kelola jasa konstruksi tingkat nasional, khususnya dalam hal

penyelenggaraan layanan sertifikasi kompetensi tenaga kerja konstruksi. Adapun layanan sistem informasi jasa konstruksi telah diakses sejumlah 501.715 orang dari target 422.480 orang melalui website Klinik Konstruksi berikut media sosial terkait lainnya; serta melalui penyediaan data informasi di aplikasi SIPJAKI cakupan DIY yang mencapai 83%.

Sedangkan untuk layanan Jasa Pengujian dilakukan melalui layanan penerbitan sertifikat/Laporan Hasil Uji (LHU) sejumlah 1045 dokumen LHU. Data tersebut diperoleh dari laporan hasil pengujian pada Laboratorium Jasa Konstruksi Balai Pengembangan Jasa Konstruksi (BPJK) DIY.

Tabel 3.81. Rincian hitungan capaian kinerja tahun 2021 disajikan pada tabel di bawah:

N o	Komponen Kegiatan	Bob ot	Target s/d 2022 (RPJMD)	Target s/d 2021 (RPJMD)	Capaian s/d akhir 2021 (realisasi)	Target s/d 2021	Capaian akhir 2021
		<i>X</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	$(b/a)*x$	$(c/a)*x$
Kegiatan Pembinaan Tenaga Kerja Konstruksi dan Layanan Informasi Jasa Konstruksi (bobot 50 persen)							
1	Jumlah orang terlayani melalui sistem informasi Jasa Konstruksi	25%	440.750	422.480	501.715	23,96%	28,46%
2	Persentase layanan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi	25%	100%	70,00%	83,00%	18,42%	20,75%
3	Jumlah Tenaga Ahli Konstruksi bersertifikat	50%	2.406	1.533	1.625	43,77%	33,77%
Sub Jumlah						86,15%	82,98%
Kegiatan Pelayanan Jasa Pengujian Konstruksi (bobot 50 persen)							
1	Sertifikat/Laporan Hasil Uji (LHU) yang diterbitkan	100 %	5.544	4.744	5.440	85,57%	114,67%
Sub Jumlah						85,57%	114,67%
Jumlah						85,86%	98,82%

Sumber: DPUPESDM DIY, 2022

(2) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2021

Pada tahun 2021 jumlah alokasi dana untuk pelaksanaan Sub Urusan Pekerjaan Umum sebesar Rp254.348.200.592,00 yang dilaksanakan melalui 8 program dengan 10 kegiatan dan 28 sub kegiatan. Hingga akhir tahun anggaran, realisasi keuangan sebesar Rp212.242.924.510,00 atau 83,45% dan realisasi fisik sebesar 98,84%. Berikut tabel capaian program dan kegiatan.

Tabel 3.82. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Sub Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2021

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	Meningkatkan cakupan pelayanan air limbah permukiman skala regional pada kawasan permukiman padat penduduk yang tidak memungkinkan dengan skala kawasan ataupun individual Melakukan pembangunan dan pengembangan sistem distribusi air minum Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan air irigasi Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan Provinsi Dukungan penguasaan teknologi dan penyebarluasan informasi bidang ke PU an dan pelayanan jasa pengujian	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Jaringan Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap Penambahan Jaringan Jalan Baru Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan Lahan Appraisal Ruas Jalan Hargomulyo - Watugajah, Gunungkidul Tahapan penyiapan/bahan IPL Ruas Jalan Hargomulyo - Watugajah, Gunungkidul SPS Permohonan Hak DED Peningkatan bangunan pelengkap jalan Provinsi pada ruas Jalan Karangmojo-Semin Pembangunan Dinding Penahan Tanah Pada Ruas Sampakan-Singosaren Peningkatan Jalan Ruas Sermo - Klepu Peningkatan Jalan Ruas Pandanan - Candirejo DED Bangunan Pelengkap Jalan Di Ruas Hargomulyo-Watugajah	% % Dokumen Dokumen SPS dokumen meter km km Dokumen	74.66 69.11 1 1 153 1 15 1 1.5 1	70.52 70.34 1 1 133 1 15 1 1.5 1	Belum terpenuhinya pelayanan sanitasi yang mudah dan pendampingan terkait system sanitasi Program 3R yang belum optimal Belum adanya pembagian kewenangan penanganan drainase Masih kurangnya akses air minum yang layak dan aman bagi masyarakat Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam peningkatan luas fungsional daerah irigasi Masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan jalan	Perlu peningkatan jumlah penduduk yang mengakses sanitasi dengan kemudahan pelayanan sanitasi serta pendidikan dan pendampingan terkait system sanitasi Perlu ditingkatkan program pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat dengan Bank Sampah yang menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) serta menambah titik-titik TPS3R yang dapat menjadi penyaring sampah sebelum masuk ke TPA Piyungan. Penerapan Prinsip 3R dalam pengelolaan sampah juga dapat memberikan insentif pendapatan bagi para pengelola sampah 3R. Selain itu, perlu diadakan Pemanfaatan Teknologi Pengolahan sampah berskala kecil yang dapat ditempatkan diTPS3R sebelum kemudian diolah di TPA Piyungan yang menggunakan teknologi berskala lebih besar. Perlu dilakukan evaluasi sistem drainase beserta pembagian kewenangan penanganan Optimalisasi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtatama Daerah Istimewa Yogyakarta	Pada tahun 2022 akan dilakukan Penyusunan Roadmap penambahan Sumbungan Rumah limbah terkait optimalisasi IPAL Sewon dimana dalam kegiatan tersebut akan melibatkan masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota guna menyampaikan pentingnya pengelolaan sanitasi Optimalisasi pelaksanaan pengelolaan sampah di bagian hulu dengan pelaksanaan pengelolaan sampah di TPS 3R dan Bank Sampah serta pelaksanaan pembangunan TPST di Kabupaten/Kota sebagai upaya dalam pengurangan sampah yang akan diangkut ke TPA Pada tahun 2022 akan dilakukan penyusunan <i>Roadmap</i> Penanganan Drainase sebagai upaya evaluasi system drainase yang telah ada dan pembagian kewenangan penanganan drainase Terjadi peningkatan penduduk berakses air minum dari 92,82% ditahun 2020 menjadi 92,92% di tahun 2021 atau bertambah 360.757 jiwa dengan adanya pembangunan SPAM Kartamantul

No	Ururan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar prasarana, sarana dan utilitas (PSU) pada kawasan permukiman di kecamatan miskin serta pemanfaatan sumberdaya mineral dan air tanah	Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Jalan Di Ruas Seyegan-Balangan Peningkatan Jalan Ruas Klepu-Siluwok Rehabilitasi Jalan Ruas Sentolo-Pengasih Rehabilitasi Jalan Ruas Sambipitu-Nglipar DED Peningkatan Jalan Ruas Klangon-Tempel Rehabilitasi Jalan Ruas Nglipar-Semin DED Peningkatan Jalan Ruas Yogyakarta-Kaliurang Peningkatan Ruas jalan Brosot - Toyan Rekonstruksi Jalan Survei Kondisi Jalan Survei Kondisi Jembatan Peningkatan Ruas Jalan Deggung Wonorejo (DAK) Peningkatan Ruas Jalan Prambanan-Piyungan (DAK) Pemeliharaan Rutin Jalan Dipertahankannya kondisi mantap jalan provinsi di Kabupaten Gunungkidul: 36 ruas sepanjang 197,125KM dari 292,615KM (67,37%)	meter km km km Dokumen km Dokumen km Paket Paket km km Persen	40 1 0.15 0.2 1 0.2 1 2 1 1 1 1 3.15 65.35	40 1 0.15 0.2 1 0.2 1 2 1 1 1 1 3.15 65.35	Perlunya konektivitas antar wilayah Perlunya rest area pada lokasi tol Masih kurangnya informasi dan ketersediaan tenaga ahli konstruksi bersertifikat -	dan meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan PDAM/Kota dalam rangka meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat Peningkatan luas fungsional daerah irigasi dengan memperhatikan sumber daya manusia pengelola jaringan irigasi antara lain tenaga operasional lapangan yang dapat menjaga dan melestarikan fungsi lahan daerah irigasi agar tetap dapat berfungsi dengan semestinya Pemerintah DIY perlu membuat sistem pemeliharaan jalan yang dapat melibatkan partisipasi masyarakat dengan mengedepankan prinsip respon cepat (fast respon) dan didukung oleh Teknologi Informasi dan Media Sosial Perlu perhatian terkait konektivitas antar daerah yang memiliki potensi perekonomian yang prospektif yang mendukung sentra pertanian, daerah tujuan wisata dan juga wilayah perbatasan. Koordinasi dengan pusat dan kabupaten Sleman terkait pembebasan lahan pembangunan jalan Tol Yogyakarta Bawen dan Yogyakarta-Solo dan tambahan	Telah dianggarkan operasional kelembagaan yang berfungsi untuk memfasilitasi dan mewadahi peran serta masyarakat petani yang tergabung dalam P3A/IP3A/GP3A maupun petugas operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi baik sarana dan prasarannya serta komisi irigasi untuk dapat menjaga dan melestarikan fungsi lahan daerah irigasi agar tetap dapat berfungsi dengan semestinya A. Pemerintah DIY membuat sistem pemeliharaan jalan yang dapat melibatkan partisipasi masyarakat dengan mengedepankan prinsip respon cepat (fast respon) B. Partisipasi masyarakat dalam mendukung prinsip respon cepat bisa dilakukan melalui WA aduan Dinas PUPESDM DIY, aplikasi e-lapor , SP4N lapor dan web Dinas PUPESDM DIY A. Konektivitas antar daerah yang memiliki potensi perekonomian yang prospektif dan juga di daerah perbatasan dengan provinsi lain ditingkatkan kemandirian ruas jalan baik itu dengan Peningkatan Jalan atau Pembangunan Jalan Baru B. Untuk mempertahankan kemandirian jalan sebagai

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Dipertahankannya kondisi mantap jalan provinsi di Kabupaten Kulon Progo: 23 ruas sepanjang 141,8KM dari 175,14KM (80,96%)	Persen	78.53	78.53		rest area yang dapat menampung usaha bidang ekonomi warga sekitarnya	pendukung konektivitas dilakukan Pemeliharaan rutin jalan dan jembatan diseluruh ruas jalan kewenangan provinsi
				Dipertahankannya kondisi mantap jalan provinsi di Kabupaten Bantul: 19 ruas sepanjang 130,375KM dari 156,525KM (83,29%)	Persen	80.79	80.79		Peningkatan pembinaan dan pengawasan Pemerintah DIY terhadap pelaku jasa konstruksi termasuk didalamnya dilaksanakannya Pelatihan dan pembekalan teknis Tenaga Ahli konstruksi dan memberikan informasi terkait penyelenggaraan jasa konstruksi	Desain Jalan Tol di DIY khususnya Solo - Jogja tidak terdapat rest Area di dalam ruas jalan tol. Tujuannya adalah pengguna jalan tol diharapkan akan keluar dari jalan tol dan memanfaatkan ketersediaan fasilitas publik yang tersedia di DIY. Fasilitas yang dimaksud adalah pom bensin, tempat makan, masjid, pertokoan yg sudah tersedia di area terdekat dgn exit tol di DIY.. Pemerintah Kabupaten Sleman jg telah mendorong untuk menyediakan Fasilitas Transit Multi Fungsi (TMF) di daerah Bokoharjo, Prambanan sebagai fasilitas publik sebagai antisipasi kebijakan tersebut. TMF tersebut selain dapat diakses melalui jalan provinsi
				Operasional Underpass Kulur dan YIA	Liter	5400	3600		-	Piyungan juga direncanakan dapat diakses langsung dari akses jalan tol dari simpang susun purwomartani menuju jalan provinsi Prambanan - Piyungan. Untuk Yogyakarta - Kulon Progo (YIA) direncanakan akan ada 2 rest area Tipe A di daerah Gamping Sleman dan Pengasih Kulon Progo. Kedua Rest Area
				Dipertahankannya kondisi mantap jalan provinsi di Kabupaten Sleman: 15 ruas sepanjang 94,51KM dari 116,32KM (81,25%)	Persen	78.81	78.81			
				Penggantian Jembatan						
				Pembangunan Jembatan Sambirejo	meter	30	30			
				DED Peningkatan Jembatan Tangisan dan Blaburan, Sleman	dokumen	1	1			
				Pembangunan Jembatan Branjang	meter	19.8	19.8			
				Peningkatan Jembatan Buyutan, Gunungkidul	meter	7	7			
				Peningkatan Jembatan Bancang Gedangsari, Gunungkidul	meter	20	20			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pembangunan Jembatan Kenet, Bantul	meter	8.4	8.4			tersebut dikelola oleh PT. JMM sebagai BUJT Solo – Yogyakarta – Kulon Progo (YIA). Untuk Rest Area Gamping, lokasinya direncanakan dapat diakses dari jalan Nasional Yogyakarta – Wates maupun jalan tol. Untuk Rest Area Pengasih, juga dapat diakses dari jalan tol dan dari jalan Provinsi Sentolo - Pengasih. Dari sisi ekonomi, ada aturan bahwa UMKM memiliki kesempatan untuk terlibat di Rest Area sebesar 40% A. Guna meningkatkan profesionalitas penyelenggaraan jasa konstruksi yang berdampak pada peningkatan kualitas pekerjaan yang dilaksanakan, akan dilakukan Pelatihan dan pembekalan teknis Tenaga Ahli konstruksi untuk 100 Orang B. Sebagai wahana penyebaran informasi terkait penyelenggaraan jasa konstruksi dilakukan melalui web klinik konstruksi
				Pemeliharaan Rutin Jembatan						
				Dipertahankannya kondisi mantap jembatan provinsi di Kabupaten Bantul: 61 buah sepanjang 1307,61M dari 1674,81KM (78,08%)	Persen	78.08	78.08			
				Dipertahankannya kondisi mantap jembatan provinsi di Kabupaten Sleman: 56 buah sepanjang 670,7M dari 919,5M (72,94%)	Persen	72.94	72.94			
				Dipertahankannya kondisi mantap jembatan provinsi di Kabupaten Gunungkidul: 55 buah sepanjang 574,10M dari 833,30M (68,89%)	Persen	68.89	68.89			
				Dipertahankannya kondisi mantap jembatan provinsi di Kabupaten Kulon Progo: 77 buah sepanjang 1613,65M dari 2330,5M (69,24%)	Persen	69.24	69.24			
				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)						
				Penyediaan PSU layak di kawasan permukiman	titik	48	278			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman						
				Penyusunan DED Dokumen		1	1			
				Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman						
				Monitoring dan evaluasi Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi (4 Kab/Kota DIY)	Laporan	1	1			
				Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada kawasan permukiman	Titik	218	218			
				PSU Permukiman DIY	Titik	60	60			
				Inventarisasi Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman DIY	Dokumen	1	1			
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM						
				Panjang jaringan distribusi SPAM regional	meter	92374	91447			
				Pengelolaan Air Curah pada SPAM Regional	liter/ detik	1100	750			
				Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan						
				Tersedianya bahan bangunan untuk pengembangan sistem penyediaan air minum pada kelompok SPAMDES	Lokasi	6	6			
				Survei dan Investigasi untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota						

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pendataan SPM bidangke PU an (Air Minum)	Dokumen	1	1			
				Penyediaan Lahan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota						
				Pembebasan lahan untuk SPAM Regional Kamijoro	Meter	2097	2003			
				PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL						
				Penanganan sampah sistem regional	Ton/hari	720	699.29			
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan						
				Talud Sungai Saluran Lindi	Paket	1	1			
				Perkerasan jalan operasional TPA Piyungan	Paket	1	1			
				Tambah daya listrik untuk pengolahan lindi TPA Piyungan 240 KVA	Paket	1	1			
				DED Penanganan Drainase Kawasan Permukiman TPA Piyungan	Dokumen	1	1			
				DED Konstruksi sel baru di TPA Transisi Regional Piyungan	Dokumen	1	1			
				Review RKL RPL TPA Transisi Piyungan	Dokumen	1	0			
				Kajian Uji Tanah di TPA Transisi Regional Piyungan	Dokumen	1	1			
				Pengadaan Lahan Tanah SG TPA Piyungan	Ha	2.8	20403			
				Pengembangan TPST Piyungan : Tahap	Ha	5.7	5.7			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Persiapan Pengadaan Lahan TPA Piyungan						
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH						
				Layanan Sistem air SR limbah terpusat		26300	26050			
				Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat						
				Pendataan SPM bidang ke PU an (Limbah)	Paket	1	1			
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE						
				Penanganan Lokasi genangan	Lokasi	1	1			
				Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya						
				Pemeliharaan Saluran Drainase di MM UGM dan di Desa Ngestiharjo, Kasihan, Bantul	Lokasi	2	2			
				Penyusunan FS dan DED Drainase Kawasan Kulur	Dokumen	2	2			
				Penyusunan Dokumen Lingkungan	Dokumen	2	2			
				Pembangunan Saluran Drainase Kawasan JEC dan Ngestiharjo						
				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						
				Rerata hasil penilaian kondisi fisik prasarana jaringan irigasi pada seluruh daerah irigasi kewenangan pemda DIY	%	75.85	74.96			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Rerata hasil penilaian Kinerja Daerah Irigasi pada seluruh daerah irigasi kewenangan Pemda DIY	%	82.41	79.11			
				Penyediaan Air Baku	liter/ detik	19.05	56.56			
				Pengelolaan Air Baku	liter/ detik	73.20	566.10			
				Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota						
				Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya						
				Pemanfaatan sumber mata air untuk masyarakat untuk Kelompok Tani Padukuhan se Desa Bunder *	paket	1	1			
				Feasibility Study Longstorage Beji, Dusun Tekik, Desa Temuwuh, Kec. Dlingo, Kab. Bantul	dokumen	1	1			
				Sub Kegiatan Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku						
				Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam dan sumur resapan pada Daerah Sulit Air di Kabupaten Bantul	3 Sumur Bor 30 Resa	3	3			
				Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam dan sumur resapan pada Daerah Sulit Air di Kabupaten Sleman	3 Sumur Bor 30 Resa	3	3			
				Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam dan sumur resapan	5 Sumur Bor 50 Resa	5	5			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				pada Daerah Sulit Air di Kabupaten Gunungkidul						
				Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam dan sumur resapan pada Daerah Sulit Air di Kabupaten Kulonprogo	4 Sumur Bor 40 Resa	4	3			
				Sub Kegiatan Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya						
				DED Rehabilitasi Embung Kewenangan DIY (1 embung)	dokumen	1	1			
				Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku						
				Pemeliharaan Berkala Embung/Telaga (Embung Songbolong Ds. Selopamiro Kec. Imogiri Kab. Bantul)	Embung	1	1			
				Pemeliharaan Rutin Embung/Telaga	Embung	25	25			
				Pemeliharaan Berkala Embung Langensari	Kawasan Embung	1	1			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi						
				Operasi & pos Pemeliharaan Pos Hidrologi		64	64			
				Pengelolaan Data Kegiatan Sumber Daya Air	Kegiatan SISDA	1	1			
				Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi						
				Rekomendasi kebijakan pengelolaan irigasi di DIY melalui Komisi Irigasi	dokumen	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Rekomendasi kebijakan sumber daya air melalui Dewan SDA	dokumen	1	1			
				Rekomendasi Teknis (Rekomtek)	dokumen	40	70			
				Pemanfaatan SDA DIY						
				Fasilitasi Tata	sosialisasi	8	8			
				Pengaturan Irigasi						
				Sosialisasi Gerakan	sosialisasi	2	2			
				Irigasi Bersih						
				Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota						
				Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan						
				Operasi Jaringan Irigasi	Daerah Irigasi	41	41			
				Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi	Daerah Irigasi	9	9			
				Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi	Daerah Irigasi	41	41			
				Kampanye Pengelolaan Sumber Daya Air	Kegiatan	1	1			
				Pemeliharaan Pompa D.I. Simo	Paket	1	1			
				Pengamanan & Pengendalian Jaringan Irigasi	Daerah Irigasi	41	41			
				Fasilitasi Tata Pengaturan SDA	Kegiatan	1	1			
				Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan						
				Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Mergansan	Bendung	1	1			
				Updating Pengeloaan Aset Irigasi (PAI) dan AKNPI 41 Daerah Irigasi	Dokumen	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Studi penyelesaian masalah daerah Irigasi Pelen Sidomulyo, Pengasih, Kulon Progo	Dokumen	1	1			
				Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Pijenan	m	1000	1000			
				Kajian dampak budidaya perikanan darat di Saluran Irigasi terhadap layanan Air Irigasi	Dokumen	1	1			
				Pembangunan Irigasi Dusun Pulesari Wonokerto, Turi	Paket	1	1			
				Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Simo	1500 m + 3 rumah po	1500	1500			
				Bangket Irigasi Bulak Ngepet di Dukuh Ngepet Srigading Sanden	Paket	1	1			
				Pembangunan Irigasi Dusun Manggungsari, Wonokerto, Turi	Paket	1	1			
				Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan						
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Pijenan/ Kamijoro (DAK)	1491 Meter+6 Unit P	1491	1491			
				Tersusunnya Kajian Tunnel saluran Irigasi Pijenan/Kamijoro (DAK)	Dokumen	1	0			
				Tersusunnya Rencana Kerja 2022, Rapat Koordinasi Persiapan Rencana Kerja (DAK)	Dokumen	1	1			
				Penyusunan Data E-Paksi D.I.	Database	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pijenan/Kamijoro (DAK)						
				PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI						
				Peningkatan Kinerja persen		86.15	82,98			
				Tenaga Konstruksi dan Masyarakat Jasa Konstruksi						
				Sertifikat/Laporan Hasil Uji yang diterbitkan	LHU	800	1045			
				Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi						
				Pelatihan dan orang		150	92			
				sertifikasi Tenaga Ahli konstruksi						
				Dukungan %		100	100			
				penambahan tenaga ahli konstruksi dan peningkatan kinerja jasa konstruksi melalui pelatihan, sosialisasi dan akreditasi laboratorium untuk mendukung kinerja jasa konstruksi						
				Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi						
				Dukungan %		100	100			
				penambahan tenaga ahli konstruksi dan peningkatan kinerja jasa konstruksi melalui pelatihan, sosialisasi dan akreditasi laboratorium untuk mendukung peningkatan kinerja jasa konstruksi						

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Kalibrasi Alat	Jenis	43	43			
				Laboratorium						
				Konstruksi						
				Inventarisasi data	Laporan	1	1			
				penyelenggaraan						
				konstruksi						
				Pemeliharaan Alat	Jenis	15	15			
				Laboratorium						
				Konstruksi						
				Pelayanan Umum	LHU	790	1031			
				Laboratorium						
				Konstruksi						
				Pelayanan Uji Aspiratif	LHU	10	14			
				Laboratorium						
				Konstruksi						
				Akreditasi Parameter	Parameter	2	2			
				Pengujian						
				Pengadaan Alat dan	Jenis	100	100			
				Perlengkapan						
				Akreditasi	Akreditasi	1	1			
				Laboratorium						
				Konstruksi						
				Laporan Hasil Uji yang	LHU	800	1045			
				diterbitkan sebanyak						
				Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa						
				Konstruksi						
				Dukungan penyediaan %		100	100			
				informasi jasa						
				konstruksi melalui						
				SIPJAKI untuk						
				mendukung						
				Peningkatan						
				pelayanan jasa						
				laboratorium						
				pengujian						
				Pengelolaan aplikasi	laporan	1	1			
				sistem informasi jasa						
				konstruksi						

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi						
				Penyusunan informasi teknis bahan bangunan	laporan	12	12			
				Penyebaran informasi dan pameran teknologi ke-PUan melalui Klinik Konstruksi	laporan	1	1			
				Dukungan penyediaan informasi jasa konstruksi melalui SIPJAKI untuk mendukung Peningkatan pelayanan jasa laboratorium pengujian	%	100	100			

b) Sub Urusan Penataan Ruang

(1) Kondisi Umum

Penyelenggaraan Urusan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Penyelenggaraan tersebut dimaksudkan untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan yang terwujud dalam penyusunan rencana tata ruang, pemadu-serasian antara struktur ruang dan pola ruang, penyelarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungan, perwujudan keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah, serta penciptaan kondisi peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang yang mendukung iklim investasi dan kemudahan berusaha.

Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY merupakan daerah setingkat provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan Istimewa disini meliputi wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tentang Pemerintahan Daerah meliputi: a) Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; b) Kelembagaan Pemda DIY; c) Kebudayaan; d) Pertanahan; dan e) Tata ruang.

Capaian kinerja sasaran pada tahun 2021 diukur menggunakan dua indikator, yaitu indikator Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dan Persentase penataan ruang pada kawasan keistimewaan. Target dan realisasi kinerja untuk tahun 2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.83. Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Penataan Ruang Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang	%	75,83	79,42	89,17	112,28	87,81	110,56
2	Peningkatan kinerja penataan ruang pada satuan ruang strategis keistimewaan	%	36,67	40,42	43,64	107,97	44,49	98,09

Sumber: DPTR DIY, 2022

(a) *Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang*

Capaian indikator sasaran Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang pada tahun 2021 sebesar 89,17% melampaui dari target sebesar 79,42%. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2022 sebesar 87,81%, capaian pada tahun 2021 sebesar 110,56%. Berikut rincian perhitungan capaian indikator kinerja penyelenggaraan penataan ruang.

Tabel 3.84. Penilaian Hasil Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang DIY (Metode pembobotan dan skoring)

No	Aspek/Komponen	Nilai
I	ASPEK PENGATURAN PENATAAN RUANG	83,33
A	Penetapan Perda atau Keputusan Perencanaan Tata Ruang Provinsi	100,00
B	Penetapan Peraturan atau Keputusan terkait Pemanfaatan Ruang Provinsi	100,00
C	Penetapan Peraturan atau Keputusan terkait Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi	33,33
D	Penetapan peraturan dan/atau keputusan terkait Pembinaan Penataan Ruang	100,00
II	ASPEK PEMBINAAN PENATAAN RUANG	100,00
A	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	100,00
B	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang	100,00

No	Aspek/Komponen	Nilai
C	Pemberian Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Pelaksanaan Penataan Ruang	100,00
D	Pendidikan dan pelatihan	100,00
E	Penelitian, kajian, dan pengembangan	100,00
F	Pengembangan sistem informasi dan komunikasi Penataan Ruang	100,00
G	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang kepada Masyarakat	100,00
H	Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	100,00
I	Pengembangan profesi perencana Tata Ruang	100,00
III	ASPEK PERENCANAAN TATA RUANG	100,00
A	Ketersediaan dan Kelengkapan RTRW Provinsi	100,00
IV	ASPEK PEMANFAATAN RUANG	100,00
A	Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	100,00
V	ASPEK PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	62,50
A	Pemberian Insentif dan Disinsentif	00,00
B	Pengenaan Sanksi Administratif	50,00
C	Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang	100,00
Penilaian Kinerja		89,17
Kinerja		MEMUASKAN

Sumber: DPTR DIY, 2022

Berdasarkan tabel di atas, rincian kinerja penyelenggaraan penataan ruang di DIY tergolong memuaskan dengan nilai sebesar 89,17%. Aspek pengaturan penataan ruang, aspek perencanaan tata ruang, dan aspek pemanfaatan ruang mempunyai skor yang dapat dikategorikan baik, namun aspek pengendalian pemanfaatan ruang sehingga mempunyai skor dengan kategori cukup.

(b) *Peningkatan kinerja penataan ruang pada satuan ruang strategis keistimewaan*

Pencapaian indikator sasaran peningkatan kinerja penataan ruang pada satuan ruang strategis keistimewaan tahun 2021 telah melampaui target yaitu sebesar 43,64% atau 107,97% dari target yang ditetapkan sebesar 40,42%. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 44,49%, capaiannya adalah 98,09%. Pencapaian kinerja diukur melalui

indikator: 1) jumlah persentase capaian satuan ruang strategis yang mempunyai dokumen perencanaan berupa Rencana Rinci, Rencana Induk, dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) yang mencapai 26,97%; serta 2) Keterwujudan pemanfaatan ruang sesuai dokumen perencanaan mencapai 16,67%.

(2) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2021

Alokasi anggaran Sub Urusan Penataan Ruang pada tahun 2021 adalah sebesar Rp17.686.586.903,00. Pengalokasian anggaran tersebut dibagi dalam 3 program, 10 kegiatan dan 30 sub kegiatan. Secara keseluruhan belanja langsung dapat direalisasi sebanyak Rp16.828.710.892,00 atau 95,15%, dengan pencapaian fisik sebesar 100%. Selanjutnya rincian capaian kinerja program dan sub kegiatan tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 3.85. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Sub Urusan Penataan Ruang Tahun 2021

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	1. Sinkronisasi regulasi penataan ruang (vertikal dan horisontal)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				Belum adanya instrumen pengendalian pemanfaatan ruang. Adanya penetapan UU No.11 tahun 2020 tentang cipta kerja yang didalamnya memuat tentang penghapusan aturan rencana tata ruang Kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota Adanya perubahan jadwal dari rencana yang sudah dilakukan	Menindaklanjuti adanya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang beberapa hal yang sudah dilakukan tindak lanjut, antara lain (1) Pendampingan Percepatan Penyusunan RDTR; (2) Review RTRRW yang kemudian akan disinergikan dengan RZWP3; (3) Penyusunan Bahan Materi Teknis Reprgub terkait dengan Sempadan Pantai Selatan sebagai bagian dari pengawasan terhadap tata ruag di sempadan pantai.	1. Urusan Wajib Tindak lanjut yang akan dilakukan: 1. Terkait dengan peningkatan konsistensi dalam implementasi RTRW pada tahun 2021 telah dilaksanakan beberapa aktifitas kegiatan berupa, antara lain : a. Evaluasi keterpaduan indikasi program. b. Publikasi terkait dengan informasi tata ruang yang dikemas melalui talkshow; c. Publikasi terkait dengan informasi tata ruang yang ditayangkan di media massa (media cetak); 2. Kegiatan sosialisasi yang sudah dilakukan pada tahun 2021, yaitu Penyebarluasan informasi dokumen tata ruang (Perdais Nomor 2 Tahun 2017) melalui sosialisasi yang dilaksanakan pada Desa/ Kelurahan di 32 lokasi dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang regulasi penataan ruang keistimewaan.
			2. Menyebarluaskan informasi penataan ruang	Capaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang aspek pengaturan dan pembinaan	%	90,09	91,67	Adanya perubahan jadwal dari rencana yang sudah dilakukan	percepatan dalam fasilitasi pemohon ijin penetapan lokasi	
			3. Meningkatkan peran serta aparatur dan masyarakat dalam penataan ruang	Capaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang aspek pelaksanaan dan pengawasan	%	86,38	87,50	a. Adanya penetapan UU no.11 tahun 2020 tentang cipta kerja yang didalamnya memuat tentang penghapusan aturan rencana tata ruang Kawasan strategis provinsi	Percepatan penyusunan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang serta perwujudan	
			4. Mewujudkan pelaksanaan kerja	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota						

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			sama penyelenggaraan penataan ruang antar wilayah dan sektoral					dan kabupaten/kota; b. Belum tersedianya beberapa instrumen pengendalian sehingga	struktur dan pola ruang	3. Model kegiatan yang disebutkan pada poin 1 dan 2 akan menjadi aktifitas kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun akan datang dengan melibatkan pihak terkait.
			5. Mengefektifkan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW	Berita Acara Perbaikan materi RDTR kabupaten	BWP	4	4	pengendalian pemanfaatan ruang belum optimal		
			6. Mengembalikan, memperbaiki, menguatkan, dan mengembangkan fungsi satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	Dukungan 5 % terhadap capaian penyelenggaraan penataan ruang hingga mencapai 86,38%	%	5	5			
			7. Meningkatkan kualitas penataan administrasi pertanahan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah						
			8. Mewujudkan penataan dan pemanfaatan tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa sesuai peruntukan	Rekomendasi kesesuaian pemanfaatan ruang oleh TKPRD DIY	%	100	100			
			9. Persentase peningkatan Budaya tak benda yang dilestarikan	Kajian Perkembangan Kawasan Sekitar Selokan Mataram	Dokumen	1	1			
				Rumusan bahan kebijakan penataan ruang daerah melalui TKPRD DIY sebanyak 2 dokumen dalam 1 tahun	Dokumen	2	2			
				Dokumen Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dan Keterpaduan Indikasi Program pada RTR Kawasan Strategis	Dokumen	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penyusunan Profil Kesesuaian Pemanfaatan Tanah dan Tata Ruang di Kawasan Sleman Timur	dokumen	1	1			
				Kajian Dampak Rencana Pembangunan Jalan Tol Terhadap Perkembangan Kawasan Exit Tol Banyurejo, Tempel	Dokumen	1	1			
				Dokumen Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dan Keterpaduan Indikasi Program pada RTRW	Dokumen	1	1			
				Dukungan 40 % terhadap capaian penyelenggaraan penataan ruang hingga mencapai 86,38%	%	40	40			
				Kajian Potensi Eko Edu Tourism Berbasis Religi di Kawasan Pantai Selatan Kabupaten Bantul	Dokumen	1	1			
				Sistem Informasi Penataan Ruang						
				Dukungan 40 % terhadap capaian penyelenggaraan penataan ruang hingga mencapai 86,38%	%	40	40			
				Pengembangan SIPR (Sistem Informasi Penataan Ruang)	Aplikasi	1	1			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang						
				Dokumen identifikasi pelanggaran pemanfaatan ruang di DIY	Dokumen	1	1			
				Publikasi di Media Massa	Kali	3	3			
				Penyebarluasan informasi dokumen tata ruang	Kali	30	28			
				Dukungan 45 % terhadap capaian penyelenggaraan	%	45	45			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				penataan ruang hingga mencapai 86,38%						
				Penilaian Desa Tertib Tata Ruang dan Pertanahan	Kali	1	1			
				Dokumen audit tata ruang	Dokumen	1	1			
				Publikasi berupa Talkshow	Kali	3	3			
				Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang						
				Rekomendasi hasil evaluasi ketidakesesuaian pemanfaatan ruang	dokumen	1	1			
				Dukungan 45 % terhadap capaian penyelenggaraan penataan ruang hingga mencapai 86,38%	%	45	45			
				Dokumen pengawasan teknis penyelenggaraan penataan ruang di 4 kabupaten dan 1 kota di DIY	dokumen	1	1			
				PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG						
				Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang startegis Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	%	40	68,33			
				Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	%	65	70,14			
				Penyusunan Rencana Induk Kasultanan dan Kadipaten	Satuan Ruang Strategis					
				Materi Teknis Rapergub Rencana Induk Karst Gunungsewu	Dokumen	1	1			
				Materi Teknis Rapergub Rencana Induk Candi Prambanan - Candi Ijo	Dokumen	1	1			
				Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang						

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Updating database sistem informasi database dana keistimewaan urusan tata ruang	aplikasi	1	1			
				Dukungan 30% terhadap meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan hingga mencapai 44,49 %	%	30	30			
				Penyusunan peta dasar dan tematik Tata Ruang se-DIY	dokumen	1	1			
				Dokumen Kinerja Pelaksanaan Urusan Keistimewaan tata ruang	dokumen	3	3			
				Pendampingan penetapan RDTR	Dokumen	2	2			
				Hasil pembahasan usulan perubahan tahun n, rencana n+1 dan rencana n+2 urusan tata ruang	dokumen	3	3			
				Tersedianya Mateks Strategi Pengembangan Wilayah SRS : 1. Satuan Ruang Strategis Gunung Merapi 2. Satuan Ruang Strategis Sokoliman 3. Satuan Ruang Strategis Girigondo 4. Satuan Ruang Strategis Kerto Pleret 5. Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul 6. Satuan Ruang Strategis Imogiri 7. Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo	dokumen	7	7			
				Pendampingan pengusulan program/kegiatan pemanfaatan ruang satuan ruang strategis	Dokumen	10	10			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang						
				Penyebarluasan informasi dokumen tata ruang berupa : Perdais Tata Ruang Keistimewaan	SRS	4	4			
				Dukungan 30% terhadap meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan hingga mencapai 44,49 %	%	30	30			
				Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang						
				Penyusunan dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap arahan tata ruang pada satuan ruang kawasan strategis	Dokumen	1	1			
				Penyusunan Dokumen Kajian Pemanfaatan Ruang Kawasan sempadan Pantai DIY, mulai dari Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul sampai Kabupaten Gunungkidul sebagai dasar penyusunan Rapergub Pemanfaatan Ruang pada Sempadan Pantai DIY	Dokumen	1	1			
				Dukungan 20% terhadap meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan hingga mencapai 44,49 %	%	20	20			
				Penyusunan dokumen keterpaduan program pada satuan ruang kawasan strategis tanah kasultanan dan tanah kadipaten	Dokumen	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penyusunan Dokumen Evaluasi Dampak Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas pada Kawasan Nglanggeran	Dokumen	1	1			
				Penyusunan dokumen Pemberian Insentif dan Pengenaan Disinsentif Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Dokumen	1	1			

4) *Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman*

a) *Kondisi Umum*

Penanganan perumahan dan permukiman kumuh terutama dicapai dengan peningkatan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) sesuai dengan Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Peraturan tersebut mengamanatkan tentang aspek bangunan dan PSU yang digunakan untuk menilai tingkat kekumuhan dan akhirnya sebagai acuan dasar (*baseline*) peningkatan kualitas. Pengembangan Perumahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh menjadi salah satu program yang mendukung misi RPJMD yakni meningkatkan kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban.

Kawasan kumuh yang menjadi dasar dari RPJMD adalah berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh bupati dan walikota. Total kawasan kumuh DIY adalah seluas 965,51 Ha, dimana 110,39 Ha di antaranya adalah kewenangan Pemda DIY, sampai dengan tahun 2020 kawasan kumuh yang menjadi kewenangan provinsi sudah selesai ditangani.

Tabel 3.86. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase penduduk yang menempati tempat tinggal yang layak	%	97,37	96,83	97,75	100,95	97,50	100,25

Sumber: DPUPESDM DIY, 2022

Pada tahun 2021 realisasi indikator kinerja Persentase penduduk yang menempati tempat tinggal yang layak melalui Program Pengembangan Perumahan dengan capaian melalui penanganan rumah tidak layak huni berbagai sumber pendanaan yaitu dari anggaran DAK, BSPS, APBD Kab/Kota, CSR, dan APBD Provinsi. Penanganan RTLH sampai dengan tahun 2021 berjumlah 36.801 unit dari total rumah tangga 1.276.606 unit, sehingga jumlah rumah layak huni di DIY sebanyak 1.247.829 unit atau sebesar 97,75%.

b) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2021

Pada tahun Anggaran 2021, Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam APBD DIY sejumlah Rp21.516.185.000,00 yang terealisasi sebesar Rp16.446.360.633,00 atau 76,44% melalui 1 program dengan 2 kegiatan 2 sub kegiatan dan realisasi fisik sebesar 99,27%.

Tabel 3.87. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	1. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar prasarana, sarana dan utilitas (PSU) pada kawasan permukiman di kecamatan miskin serta pemanfaatan sumberdaya mineral dan air tanah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERUMAHAN Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Perwujudan kawasan perumahan sesuai RTRW Cakupan penanganan kawasan kumuh Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi Identifikasi kawasan perumahan rawan bencana tanah longsor Rekomendasi Kebijakan PKP (Pokja) Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi Terlaksananya Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (Pembangunan Baru) Kab Sleman 24 unit : a.Kec. Sayegan : 18 unit b.Kec. Godean : 1 unit c.Kec. Mlati : 1 unit d.Kec. Berbah : 4 unit Terlaksananya Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (Peningkatan Kualitas) Kab. Bantul 314 unit: a.Kec. Sewon : 2 unit b.Kec. Bantul : 7 unit c.Kec. Pandak : 8 unit d.Kec. Sanden : 38 unit e.Kec. Dlingo : 8 unit f.Kec. Bambanglipuro : 12 unit g.Kec. Jetis : 1 unit h.Kec. Imogiri : 194 unit i.Kec. Pundong : 3 unit j.Kec. Pleret : 4 unit k.Kec. Pajangan : 7 unit l.Kec. Srandakan : 9 unit m.Kec. Sedayu : 16 unit n.Kec. Kasihan : 5 unit Terlaksananya Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (Peningkatan Kualitas) Kab Sleman 66 unit: a.Kec. Godean : 12 unit b.Kec. Moyudan : 3 unit c.Kec. Berbah : 3 unit d.Kec. Mlati : 2 unit e.Kec. Seyegan : 1 unit f.Kec. Depok : 6 unit g.Kec. Turi : 5 unit h.Kec. Prambanan : 2 unit i.Kec. Ngaglik : 6 unit j.Kec. Sleman : 5 unit k.Kec. Cangkringan : 1 unit l.Kec. Gamping : 4 unit m.Kec. Pakem : 5 unit n.Kec. Tempel : 11 unit Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RP3KP Daerah Istimewa Yogyakarta	% % % dokumen Rekomendasi	43,1 16 86,08 1 1	56,12 45,49 70,06 1 1	NIHIL	NIHIL	NIHIL

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Terlaksananya Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (Peningkatan Kualitas) Kab. Kulon Progo 121 unit: a.Kec. Pengasih : 24 unit b.Kec. Sentolo: 1 unit c.Kec. Kokap : 52 unit d.Kec. Samigaluh : 44 unit	Unit	121	120			
				Pemutakhiran Data RTLH	Dokumen	1	1			
				Terlaksananya Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (Pembangunan Baru) Kab Gunungkidul 11 unit : a.Kec. Purwosari : 1 unit b.Kec. Paliyan : 1 unit c.Kec. Nglipar : 9 unit	Unit	11	11			
				Terlaksananya Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (Peningkatan Kualitas) Kota Yogyakarta 35 unit a.Kec. Danurejan : 5 unit b.Kec. Kotagede : 7 unit c.Kec. Wirobrajan : 7 unit d.Kec. Mergangsan : 5 unit e.Kec. Kraton : 1 unit f.Kec. Umbulharjo : 6 unit g.Kec. Mantrijeron : 2 unit h.Kec. Ngampilan : 1 unit i.Kec. Pakualaman : 1 unit	Unit	35	34			
				Kajian Indikator Rumah Layak Huni Daerah Istimewa Yogyakarta	Dokumen	1	1			
				Terlaksananya Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (Peningkatan Kualitas) Kab. Gunungkidul 462 unit: a.Kec. Tanjungsari : 10 unit b.Kec. Paliyan : 22 unit c.Kec. Gedangsari : 105 unit d.Kec. Ponjong : 3 unit e. Kec. Saptosari : 197 unit f. Kec. Playen : 53 unit g. Kec. Semin : 72 unit	Unit	462	460			
				Terlaksananya Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (Pembangunan Baru) Kab. Bantul 54 unit : a.Kec. Bambanglipura : 17 unit b.Kec. Dlingo : 12 unit c.Kec. Imogiri : 11 unit d.Kec. Jetis : 7 unit e.Kec. Kretek : 1 unit f.Kec. Pleret : 1 unit g.Kec. Pundong : 4 unit h.Kec. Sewon : 1 unit	Unit	54	54			
				Terlaksananya Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (Pembangunan Baru) Kab. Kulon Progo 11 unit : a.Kec. Samigaluh : 1 unit b.Kec. Lendah : 1 unit c.Kec. Sentolo: 1 unit d.Kec. Kokap : 8 unit	Unit	11	11			

5) *Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat*

a) *Sub Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat*

(1) *Kondisi Umum*

Urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan salah satu urusan pemerintahan yang termasuk ke dalam urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sebagai urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, maka setiap satuan pemerintahan, termasuk Pemda DIY mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, maka Gubernur DIY membentuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY. Pasal 255 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa “Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat”. Selanjutnya, dalam Pasal 255 ayat (2) huruf b UU Nomor 23 Tahun 2014 ditentukan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja berwenang untuk menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

DIY sebagai daerah yang penduduknya majemuk baik dari sisi etnis maupun kulturenya, berimplikasi pada perkembangan perkotaan dengan segala aspek yang berpengaruh. Kemajemukan tersebut dapat melahirkan konflik yang mungkin dapat berujung pada konflik sosial,

salah satunya berlatar belakang SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan). Selain itu ada beberapa permasalahan yang muncul di DIY seperti: 1) Reklame-reklame yang sebagian masih membutuhkan penataan dan penertiban, misalnya yang tidak berizin; 2) Aksi kejahatan jalanan marak terjadi yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja yang mengancam keselamatan masyarakat; 3) Penambangan liar di aliran sungai, perbukitan dan gunung yang dilakukan oleh masyarakat tanpa ijin sehingga terjadi kerusakan lingkungan baik sosial maupun alam; 4) Beredarnya minuman keras/minuman beralkohol ilegal di wilayah DIY; 5) Banyaknya gelandang dan pengemis di persimpangan jalan yang mengganggu ketentraman masyarakat serta melanggar Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis; 6) Masih beredarnya rokok ilegal yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan negara yang bersumber dari cukai rokok; 7) Pandemi COVID-19 yang muncul di awal tahun 2020 membuat masyarakat harus selalu diingatkan untuk menerapkan protokol kesehatan yang seringkali diabaikan.

Berangkat dari beberapa contoh permasalahan di atas, penegakan Perda, Perdais, dan Perkada perlu dilakukan untuk menjaga suasana kondusif di masyarakat. Suasana kondusif merupakan modal utama bagi suatu daerah dalam melaksanakan pembangunan.

Tabel 3.88. Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2020	2021			Target akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Rerata Desa/ Kelurahan yang melakukan upaya menjaga keamanan lingkungan	Desa / Kelurahan	334	350	350	100	360	97,20

Sumber: Satpol PP DIY, 2022

Indikator kinerja sasaran Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada tahun 2021 adalah “Rerata Desa / Kelurahan yang melakukan upaya menjaga keamanan lingkungan”. Dari target yang sudah ditetapkan yaitu 350 Desa / Kelurahan terealisasi sebanyak 350 Desa / Kelurahan, sehingga capaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2021 sudah tercapai dengan persentase 100%. Capaian kinerja sasaran tersebut sudah memenuhi target karena parameter yang digunakan dalam perhitungan indikator sudah terpenuhi. Parameter tersebut berdasarkan data statistik Potensi Desa (Podes) BPS Provinsi DIY tahun 2018. Satpol PP DIY masih menggunakan data Podes BPS Tahun 2018 dikarenakan pendataan BPS Podes dilakukan 3 (tiga) kali dalam 10 tahun dan terakhir melakukan pendataan di tahun 2018. Berikut ini adalah formulasi perhitungan kinerja Satpol PP DIY tahun 2021: 1) Pembangun dan pemeliharaan pos kamling se - DIY sejumlah 400 pos; 2) Pembentukan regu keamanan lingkungan se - DIY sejumlah 560 regu; 3) Penambahan jumlah anggota hansip / linmas se - DIY sejumlah 260 anggota; 4) Pelaporan tamu yang menginap lebih dari 24 jam ke aparat lingkungan sejumlah 180 tamu.

Realisasi target kinerja sasaran pada tahun 2021 mencapai 100%, atau jika dibandingkan target akhir RPJMD 2022 telah tercapai sebesar 97,20%.

(2) *Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2021*

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat tahun anggaran 2021 terdiri atas 3 program dan 11 sub kegiatan. Belanja dianggarkan sebesar Rp35.410.478.299,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp32.150.459.996,00 atau 90,79%, serta realisasi fisik mencapai 100%. Secara umum pelaksanaan belanja daerah dan kinerja dapat dicapai dengan baik dan tidak ada kendala yang material. Kesenjangan antara target dan realisasi capaian keuangan disebabkan karena: 1) Kondisi COVID-19 yang masih fluktuatif dan aturan pada saat memberlakukan PPKM Darurat, PPKM Level 4, PPKM Level 3 dan PPKM Level 2 yang membatasi dilaksanakannya kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa. 2) Efisiensi dari hasil pengadaan barang/jasa sehingga terdapat sisa anggaran yang tidak dapat dipergunakan. 3) Gagal lelang dari penyedia jasa (pengadaan kendaraan mobil *double cabin* dan *ambulance*) sehingga anggarannya tidak terserap.

Rincian capaian kinerja program dan kegiatan disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.89. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1. Melakukan peningkatan kemampuan SDM Satpol PP secara gradual 2. Melakukan peningkatan koordinasi dengan instansi/ OPD Provinsi, Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal terkait penegakan Perda/Perkada 3. Melakukan peningkatan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 4. Melakukan peningkatan koordinasi dengan Provinsi lain di daerah perbatasan 5. Peningkatan pembinaan satuan perlindungan masyarakat dan unsur rakyat terlatih lainnya	PROGRAM PENUNJANG DAERAH PROVINSI Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Buku Data Satpol PP Dukungan 2,34% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD. Dokumen perencanaan OPD TA. 2022 dan perubahan TA. 2021 Web GIS Satpol PP yang terbaru	%	100	100	1. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang belum memadai, terutama anggota Satuan Polisi Pamong Praja DIY yang bersertifikasi/ memiliki keahlian khusus seperti Intelijen, PPNS, maupun Pengadaan barang / jasa; 2. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang ketugasan; 3. Koordinasi didalam kerja sama antar instansi, Kabupaten / Kota, masyarakat dan stake holders masih belum dapat optimal; 4. Pengawasan dan penegakan peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah belum optimal; 5. Wilayah perbatasan rawan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang masih belum mendapat perhatian khusus.	Pengusulan diklat/ bimtek untuk meningkatkan kualitas SDM, Pengusulan pengadaan sarana prasarana penunjang ketugasan Meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan, Melakukan inventarisasi beralkohol sebanyak 47 kali, permasalahan dan evaluasi program/ kegiatan, Peningkatan inovasi program/ kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja DIY.	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 1) Pemda DIY pada Tahun Anggaran 2021 memiliki program kegiatan penanganan terhadap pelanggaran Perda dan Perkada melalui operasi Yustisi dan Non Yustisi sebanyak 86 kali. Khusus untuk operasi pelanggaran reklame, penambangan liar dan operasi minuman beralkohol sebanyak 47 kali, sedangkan untuk operasi pelanggaran Perda dan Perkada yang lainnya sebanyak 39 kali. 2) Dalam rangka membangun budaya tertib di masyarakat, Pemda DIY pada Tahun Anggaran 2021 memiliki program kegiatan sosialisasi Perda dan Perkada sebanyak 15 kali dengan target sebanyak 750 warga masyarakat. Selain hal tersebut Pemda DIY juga melakukan internalisasi nilai-nilai ketertiban melalui Kader Penagak Perda dan Perkada sebanyak 5 kelompok Kader. 3) Penanganan penyakit masyarakat yang meliputi prostitusi dan minuman

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Kesepakatan Hasil Forum Perencanaan OPD	BA	1	1			beralkohol, Pemda DIY sampai dengan bulan Mei 2021 telah melakukan operasi tipiring sebanyak 14 kali.
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
				Dukungan 2,34% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD.	%	100	100			
				Realisasi Capaian Fisik dan Keuangan Sesuai ROPK	%	100	84			
				Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)	Nilai LKJIIP A = 1	1	1			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
				Gaji dan Tunjangan ASN Tahun dibayarkan	Tahun	1	1			
				Dukungan 97,66% terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						
				Dukungan 97,66% terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Laporan Keuangan sesuai dengan realisasi	Laporan	14	14			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				penggunaan anggaran, dokumen perencanaan anggaran dan dapat memberikan informasi keuangan bagi pengguna informasi						
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						
				Dukungan 3,89 % terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	91.67			
				Informasi yang tersampaikan kepada masyarakat melalui media elektronik	Kali	518	579			
				Masyarakat rentan pelanggaran cukai rokok ilegal memahami peraturan perundang-undangan cukai rokok	Orang	250	250			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
				Dukungan 19,53% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis	5	5			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
				Dukungan 19,53% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Alat tulis kantor	Jenis	43	43			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
				Penggandaan	Lembar	26.190	24.008			
				Barang cetakan	Jenis	12	12			
				Dukungan 19,53% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	91.67			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
				Dukungan 19,53% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Bukti pembayaran langganan surat kabar harian/majalah dan buku	Eksemplar	24	24			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
				Dukungan 19,53% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Laporan dan Rencana Tindak Lanjut Hasil Konsultasi dan Koordinasi	Bulan	12	12			
				Laporan dan rencana tindak lanjut hasil rapat koordinasi	Bulan	12	12			
				Pengadaan Mebel						
				Mebeuler	Jenis	1	1			
				Dukungan 7,83% terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD.	%	100	100			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Dukungan 7,83% terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD.	%	100	100			
				Peralatan gedung kantor Sesuai RKBMD	Jenis	3	3			
				Perlengkapan gedung kantor sesuai RKBMD	Jenis	3	3			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
				Benda-benda pos (materai dan perangko)	Jenis	2	2			
				Dukungan 80,47% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
				Dukungan 80,47% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Bukti Penambahan Daya Listrik	Paket	1	1			
				Bukti pembayaran tagihan internet, listrik dan telepon	Bulan	12	12			
				Bukti pembayaran langganan video conference	Bulan	12	12			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
				Dukungan 80,47% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Gedung kantor seluas 34.200 m2 yang terpelihara kebersihannya	m2	34200	34200			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Keamanan Kantor Terjaga Dengan Baik	Bulan	12	12			
				Administrasi Perkantoran yang terselesaikan dengan baik dan tepat waktu	Bulan	12	12			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
				Dukungan 92,17% terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD.	%	100	100			
				Kendaraan dinas/operasional roda 2 yang Terpelihara sesuai RKPBMMD	Unit	16	16			
				Kendaraan dinas/operasional roda 4 yang Terpelihara sesuai RKPBMMD	Unit	20	20			
				Bukti pembayaran pajak/STNK/KIR kendaraan dinas/operasional roda 2	Unit	16	16			
				Kendaraan dinas/operasional roda 6 yang Terpelihara sesuai RKPBMMD	Unit	2	2			
				Bukti pembayaran pajak/STNK/KIR kendaraan dinas/operasional roda 6	Unit	2	2			
				Bukti pembayaran pajak/STNK/KIR kendaraan dinas/operasional roda 4	Unit	20	20			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
				Peralatan kantor yang terpelihara sesuai RKPBMMD	Jenis	17	17			
				Perlengkapan kantor yang terpelihara sesuai RKBMD	Jenis	4	5			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Dukungan 92,17% terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD.	%	100	100			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
				Ruang Kerja Sekretariat Satpol PP DIY yang sudah terehabilitasi	Paket	1	1			
				Dukungan 92,17% terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD.	%	100	100			
				Pos Pantau SRI (Satlinmas Rescue Istimewa) di Korwil III Parangtritis yang terbangun	Unit	1	1			
				PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						
				Presentase gangguan tibumtranmas yang tertangani	%	55	55			
				Presentase pelanggaran Perda, Perdais dan Perkada yang tertangani	%	78	78			
				Presentase desa yang memiliki Satlinmas dan Jaga Warga yang aktif	%	40	40			
				Presentase gangguan tibumtranmas yang tertangani	%	70	70			
				Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan						

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Laporan Pengamanan dan Pengendalian Masa Unjuk Rasa berlangsung dengan kondusif di 5 Kab/Kota	Laporan	120	120			
				Kantor Gubernur dan Wakil Gubernur dalam kondisi aman	Tahun	1	1			
				Kunjungan Kerja Gubernur, Wakil Gubernur dan Tamu Daerah dalam kondisi aman	Laporan	96	96			
				Laporan Deteksi dini gejala permasalahan masyarakat untuk penyajian data tentang situasi daerah dalam pelaksanaan penegakan produk hukum daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (Permendagri No.54 Tahun 2011)	Laporan	60	60			
				Aset Pemda DIY yang terjaga dari kerawanan penyimpangan penggunaan	Titik	120	120			
				Data lokasi rawan gangguan tibusmantras perbatasan	Laporan	9	9			
				Laporan penertiban penerapan protokol kesehatan COVID-19	Laporan	198	198			
				Event Pemda DIY dan sosial kemasyarakatan dalam kondisi aman	Kali	10	10			
				Dukungan 80 % terhadap Persentase gangguan tibusmantras yang tertangani	%	100	100			
				Data lokasi rawan gangguan tibusmantras di 5 Kab/Kota DIY	Laporan	16	16			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Laporan pengendalian tibuntranmas di 5 Kab/Kota DIY	Laporan	10	10			
				Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi						
				Dukungan 80 % terhadap Persentase gangguan tibun tranmas yang tertangani	%	100	100			
				Laporan Hasil Penanganan Pengaduan dan Keluhan Masyarakat terhadap gangguan tibuntranmas dan linmas	Dokumen	1	1			
				Rumusan Kerja sama Tibuntranmas Satpol PP DIY dengan Satpol PP Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1			
				Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum						
				Data Potensi Masyarakat Tentang Trantibumlinmas	Jenis Data	1	1			
				Dukungan 80 % terhadap Persentase gangguan tibun tranmas yang tertangani	%	100	100			
				Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia						
				Dukungan 80 % terhadap Persentase gangguan tibun tranmas yang tertangani	%	100	100			
				Kebugaran, jiwa koorps, ketrampilan, kemampuan dan kapasitas anggota Sat Pol.PP DIY dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional	Orang	125	125			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Anggota Satlinmas yang meningkat kapasitasnya dalam rangka memberikan perlindungan masyarakat	Orang	820	820			
				Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan						
				Rekomendasi penanganan kerja sama antara Satpol PP DIY dengan Polda	Rekomendasi	1	1			
				Surat Keputusan Bersama (SKB) Gubernur-Anggota FKD-MPU	Dokumen	2	2			
				Dukungan 80 % terhadap Persentase gangguan tibus tranmas yang tertangani	%	100	100			
				Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum						
				Seragam Pakaian Dinas Satpol PP DIY	stel	125	113			
				Dukungan 80 % terhadap Persentase gangguan tibus tranmas yang tertangani	%	100	100			
				Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur						
				Masyarakat memahami perda/perkada DIY	Orang	150	150			
				Dukungan 100 % terhadap Pelanggaran Perda, Perdais dan Perkada yang tertangani	%	100	100			
				Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur						
				Pelanggaran Perda dan/atau Perkada yang tertangani secara Yustisi dengan mekanisme Acara Pemeriksaan Singkat	Laporan	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pelanggar Perda dan atau Perkada yang tertangani secara non yustisi	Laporan	44	44			
				Masyarakat rentan pelanggar cukai rokok ilegal memahami peraturan perundang-undangan cukai rokok	Orang	0	0			
				Dukungan 100 % terhadap Pelanggaran Perda, Perdais dan Perkada yang tertangani	%	100	100			
				Pelanggaran Perda dan/atau Perkada yang tertangani secara Yustisi dengan mekanisme Acara Pemeriksaan Cepat	Laporan	29	29			
				Masyarakat pelanggar cukai rokok ilegal tertangani secara non yustisial	Kali	0	0			
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1. Melakukan peningkatan kemampuan SDM Satpol PP secara gradual 2. Melakukan peningkatan koordinasi dengan instansi / OPD Provinsi, Kabupaten / Kota dan Instansi Vertikal terkait 3. Melakukan peningkatan pembinaan Rescue Istimewa dan kelompok Jagawarga	PROGRAM PENYELENGGARAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Pembinaan Jagawarga Jumlah kelompok Jaga warga terbina dan mampu menjalankan fungsinya Tradisi larung laut dan budaya masyarakat pantai, waduk, dan gunung	KEISTIMEWAAN Kelompok Angkatan	 600 5	 600 5	1. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang belum memadai; 2. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang ketugasan; 3. Koordinasi didalam kerja sama antar instansi, kabupaten/kota, masyarakat dan stake holders masih belum dapat optimal;	. Mengoptimalkan seefektif mungkin sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang ada, i. Meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan, baik di tingkat Provinsi, Kabupaten / Kota sampai tingkat Desa / Kelurahan.	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 1) Guna menanggulangi dampak COVID-19, Pemda DIY telah menyalurkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada 391 Desa / Kelurahan di wilayah DIY. 2) Di masa pandemi COVID-19, Pemda DIY telah mengoptimalkan peran kelompok Jagawarga untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di lingkungannya masing – masing.

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				terselenggara dengan aman (Sarasehan)						3) Pemda DIY pada Tahun Anggaran 2021 memiliki program kegiatan pembinaan kelompok Jagawarga sebanyak 600 kelompok.
				Tradisi larung laut dan budaya masyarakat pantai, waduk, dan gunung terselenggara dengan aman (Pelatihan)	Pelatihan	2	2			
				Sarpras Penanganan Covid (Masker Full Face)	buah	80	80			
				Sarpras Penanganan Covid (Sarung Tangan Karet)	pasang	80	80			
				Pengadaan mobil operasional	unit	1	1			
				Kendaraan roda 2 trail dan perlengkapan pengamanan dan pengawasan proses	unit	10	10			
				Standar sarana prasarana dan kebutuhan SDM Satlinmas Rescue Istimewa	Dokumen	1	1			
				Sarpras Penanganan Covid (Mobil Ambulance)	unit	4	4			
				BKK Jagawarga	Kalurahan	391	391			
				Dukungan 50% terhadap capaian peningkatan jumlah kelompok jaga warga yang terbina dan mampu menjalankan fungsinya	%	100	100			
				Sarpras Penanganan Covid (Hazmat)	buah	1000	1000			
				Sarpras Penanganan Covid (Mobil Jenazah)	unit	1	1			
				Pembinaan / pendampingan / pengembangan kapasitas Jaga warga	Kali	15	15			
				Sarpras Penanganan Covid (Sarung Tangan Latek)	box	20	20			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Tradisi larung laut dan budaya masyarakat pantai, waduk, dan gunung terselenggara dengan aman (Pengamanan event)	event	2	2			
				Pembuatan Film Dokumentasi Penangan COVID-19	film	1	1			
				Sarpras Penanganan Covid (Sepatu Boot)	pasang	80	80			
				Sarana prasarana Satlinmas Rescue Istimewa	Paket	1	1			
				Kendaraan roda 2 pengawalan Gubernur dan Wakil Gubernur	unit	2	2			
				Rakor money	Kali	5	5			

b) Sub Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

(1) Kondisi Umum

Melihat Tantangan Kemajemukan Daerah Istimewa Yogyakarta: Dua Sisi

Adanya keanekaragaman etnik, suku, budaya, agama, bahasa dan budaya membuat DIY menjadi daerah majemuk dan diakui sebagai representasi Indonesia dan dijuluki sebagai miniatur Indonesia. Melihat realitas bahwa DIY merupakan daerah yang majemuk, sehingga diperlukan kondisi harmoni.

Upaya Pemda DIY dalam Mewujudkan Ketenteraman Masyarakat

Stabilitas keharmonisan, keamanan dan meningkatkan kerukunan serta menjalin komunikasi antar elemen masyarakat di wilayah DIY menjadi tanggungjawab bagi kita baik pemerintahan, masyarakat maupun keluarga sehingga dapat menjadikan DIY sebagai daerah yang toleran dan nir konflik horizontal di Indonesia. Dalam hal ini Pemda DIY melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY ikut ambil bagian dalam menciptakan keharmonisan di masyarakat untuk mencegah konflik yang dapat menjadi potensi negatif dari keberagaman yang ada. Beberapa upaya strategis dilakukan melalui koordinasi dengan kemitraan yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan lain sebagainya sebagai sarana komunikasi dan penguat yang bergerak di masyarakat.

Selain bekerjasama dengan mitra, Pemda DIY melalui Badan Kesbangpol DIY juga melaksanakan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Penanganan Konflik Sosial; Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan; Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik; Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya; Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan berupa kegiatan Sosialisasi Bhinneka Tunggal Ika sebagai salah satu wujud dan sarana untuk menguatkan kapasitas masyarakat dalam menjaga keharmonisan dalam bermasyarakat serta mewujudkan kesatuan dan persatuan bangsa.

Peluang dan Tantangan Yogyakarta Sebagai Destinasi Pendidikan, Wisata dan Budaya

Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang dikenal sebagai miniatur Indonesia. Berbagai macam kelompok masyarakat dengan beragam agama, suku, ras, dan kepentingan tinggal dan menetap di wilayah dengan jumlah penduduk sebesar 3.668.719 jiwa ini ¹ . Keberagaman juga terlihat dari komposisi masyarakat DIY berdasarkan jumlah agama yang dianut, yang dapat disimak melalui tabel hasil penelitian Kantor Wilayah Kementerian Agama RI DIY: 1) Islam (3.406.213 jiwa); 2) Protestan (89.399 jiwa); 3) Katolik (150.584 jiwa); 4) Hindu (15.651 jiwa); 5) Budha (3.191 jiwa); serta 6) Konghuchu (94 jiwa).

1 Berita Resmi Statistik. No. 08/01/34/Th. XXIII, 21 Januari 2021. Hasil Sensus Penduduk 2020

Seiring dengan perkembangan waktu, banyak pendatang dari berbagai daerah di Indonesia datang ke Yogyakarta untuk berwisata, menimba ilmu, bekerja maupun untuk menetap. Keberagaman atau kemajemukan sebagai imbas dari banyaknya pendatang dan dinamika sosial ekonomi di Yogyakarta, di satu sisi dapat melahirkan konflik sosial. Di era global saat ini merawat perdamaian merupakan salah satu tantangan utama karena kemajemukan yang kita rasakan mulai terancam.

Bukan hanya itu, faktor eksternal yang kita rasakan saat ini adalah munculnya pandemi COVID-19 yang dirasakan oleh seluruh dunia. Selain berdampak pada faktor kesehatan, dari segi faktor ekonomi, masyarakat juga mengalami penurunan daya beli sehingga dapat memicu perilaku tindak kriminal.

Selain permasalahan di atas, beberapa problema yang sedang dihadapi saat ini antara lain konflik berlatarbelakang ekonomi pada masyarakat, sikap fanatisme negatif dan intoleransi. Menjadi pekerjaan rumah bagi Pemda DIY, terutama Badan Kesbangpol DIY untuk menciptakan kegiatan maupun inovasi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Beberapa kasus menonjol dan beragam kegiatan yang sudah dilakukan Badan Kesbangpol DIY sebagai upaya dalam mengatasi beberapa problematika yang ada di dalam masyarakat, antara lain:

(a) *Bersatu, Bersama dan Bergerak Dalam Perang Melawan Narkoba Melalui Forum P4GN DIY*

Kasus mengenai penyalahgunaan narkoba yang ada di Yogyakarta ternyata masih menjadi isu krusial yang menjadi tantangan bagi Pemda DIY. Pandemi COVID-

19 yang melanda DIY ternyata tak serta merta menurunkan prevalensi pengguna narkoba di DIY.

(b) Penguatan Koordinasi dengan Forum-forum Kemitraan

Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) berperan dalam menciptakan situasi kondusif melalui pembauran mahasiswa/masyarakat luar DIY dari berbagai suku dengan masyarakat lokal serta melakukan Rapat Konsolidasi Antar Pemerintah Daerah se-Indonesia dalam rangka pengelolaan asrama mahasiswa melalui inventarisasi permasalahan asrama mahasiswa daerah di DIY.

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Fenomena radikalisme baik intoleransi maupun terorisme agama akhir-akhir ini semakin memprihatinkan. Oleh karena itu diharapkan FKUB dapat bersinergi dengan instansi terkait untuk menumbuhkan toleransi di masyarakat dan membantu pemerintah untuk mengatasi permasalahan intoleransi yang ada di masyarakat.

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) DIY diselenggarakan sebagai wadah komunikasi, koordinasi dan fasilitasi serta upaya membina, memelihara dan meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat, dalam rangka meningkatkan wawasan kebangsaan serta persatuan dan kesatuan bangsa.

Tim Penanganan Konflik Sosial (PKS)

Kegiatan Penanganan Konflik Sosial (PKS) DIY Tahun 2021 diselenggarakan dalam rangka meningkatkan koordinasi serta sinergitas antara Tim Terpadu PKS DIY dan Tim Terpadu PKS Kabupaten/Kota se-DIY guna membina, memelihara dan meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat di DIY.

Terkait penanganan konflik sosial, Mendagri RI telah menerbitkan surat Nomor 332.05/6394/SJ tanggal 25 November 2020 yang memberi arahan bahwa Rencana Aksi Terpadu PKS tingkat daerah terdapat dua substansi pokok yaitu: Rencana Aksi terkait penanganan konflik faktual di daerah tahun 2021 dan Rencana Aksi terkait penanganan potensi konflik berkaitan Pandemi COVID-19.

Dalam upaya penanganan konflik sosial disusun Rencana Aksi Terpadu PKS DIY melalui *Focussed Group Discussion* (FGD) untuk memberikan gambaran secara umum kepada Tim PKS DIY terkait hasil Analisa dan Evaluasi Sitkamtibmas Wilayah DIY Tahun 2020 serta Prediksi Potensi Kerawanan Tahun 2021.

Forum Kemitraan DIY

Rapat Kerja Forum Kemitraan DIY diselenggarakan sebagai wadah komunikasi, koordinasi dan fasilitasi forum-forum kemitraan Pemda DIY yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), dalam rangka mendukung terciptanya stabilitas dan kondusivitas wilayah DIY.

(c) ***Pemahaman Nilai-Nilai Pancasila dan Ke-Bhinneka Tunggal Ika-an Dalam Bingkai Keistimewaan DIY***

Yogyakarta sebagai *city of tolerance*, toleransi berarti terdapat harmoni, saling pengertian, dan kesediaan untuk saling menerima, saling mengakui dan mau bekerjasama. Karena itu toleransi dalam konteks *city of tolerance*, mengandung makna yang lebih luas melampaui pengertian toleransi antarsuku/etnis, agama dan budaya, toleransi juga menyentuh aspek struktur sebuah masyarakat dimana tidak ada kesenjangan sosial dan ekonomi yang tidak terjembatani di dalam masyarakat yang dapat memicu konflik antarkelompok.

Semangat toleransi ini juga menjadikan masyarakat DIY memiliki kekompakkan yang tinggi tanpa membedakan status dan kelas sosial dalam menjaga keamanan dan ketertiban. *City of tolerance* harus menjadi bagian dari keistimewaan Yogyakarta disamping keistimewaan Yogyakarta yang lainnya.

(d) ***Capaian DIY dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)***

IDI adalah gambaran demokrasi Indonesia yang kompleks. IDI mengukur kebebasan berpendapat, kebebasan pers, peran lembaga legislatif, serta supremasi hukum. Hasil pengukuran IDI tahun 2020 tercatat skor indeks sebesar 73,66 yang dimaknai terjadi koreksi sebesar 1,26 poin bila dibandingkan dengan skor IDI tahun 2019 yang mencapai 74,92. Koreksi IDI merupakan sebuah dinamika karena pengaruh lingkungan strategis antara lain disebabkan oleh pandemi COVID-19 termasuk dampak turutan tahun 2020 mengalami koreksi,

namun secara kualitas capaian kinerja demokrasi Indonesia pada tahun 2020 masih tetap kategori yang sama dengan tahun 2019 yaitu “sedang”.

Pada tahun 2024, Indonesia akan menghadapi agenda besar demokrasi yaitu pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 dengan berbagai tantangan. Untuk itu perlu dilakukan persiapan matang dalam rangka menyukseskan Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024. Untuk meminimalisir potensi permasalahan yang dapat muncul, seperti potensi terbelahnya masyarakat secara politik maupun gangguan keamanan, permasalahan terkait pemilu serta dampak pandemi COVID-19, antisipasi dan kesiapan terhadap permasalahan ini dapat memanfaatkan hasil pengukuran IDI. Pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya dapat melakukan intervensi perbaikan terhadap berbagai kelemahan yang ditemui, seperti indikator-indikator pada masing-masing aspek yang masih berkategori “baik”. Upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain melalui Pendidikan politik untuk membangun karakter politik masyarakat yang cerdas dan bertanggungjawab paralel dengan perbaikan pada berbagai instrument demokrasi lainnya.

Hasil pencapaian IDI pada tahun 2020, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) untuk DIY tercatat sebesar 81,59. Angka tersebut menunjukkan kenaikan 0,92 poin dibandingkan dengan angka IDI pada tahun 2019 dengan besaran 80,67. Jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019, terdapat satu aspek yang mengalami penurunan, yaitu Aspek Hak-hak Politik. Adapun Aspek Kebebasan Sipil dan Aspek Lembaga Demokrasi menunjukkan adanya

peningkatan dibandingkan dengan kondisi setahun sebelumnya. Adapun Aspek Hak-hak Politik turun menjadi 72,51, Aspek Kebebasan Sipil mengalami peningkatan menjadi 96,46 dan Aspek Lembaga-lembaga Demokrasi meningkat menjadi 80,43.

Menindaklanjuti hasil tersebut, Pemda DIY melalui Badan Kesbangpol DIY pada tahun 2021 telah melaksanakan kegiatan *Focus Group Discussion* dengan tema “Strategi Peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia dan Pemanfaatannya Dalam Pembangunan Politik DIY”, yang bertujuan untuk mendorong seluruh stakeholders untuk meningkatkan capaian IDI sehingga proses konsolidasi demokrasi tetap dapat berjalan sesuai harapan.

Tabel 3.90. Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Skor Indeks Ketahanan Nasional DIY di Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, dan Sosial Budaya	Angka	3,13	3,05	2,48	81,31	3,06	81,05

Sumber: Lemhannas RI, 2021

Capaian kinerja Meningkatnya Ketahanan Nasional di DIY dengan indikator skor indeks ketahanan nasional di DIY tahun 2021 terealisasi sebesar 2,48 atau setara 81,31% dari target 3,05. Angka tersebut mencapai kriteria penilaian realisasi kinerja predikat “baik”.

Capaian kinerja sebesar 2,48 merupakan rerata dari capaian skor indeks ketahanan nasional DIY gatra ideologi, politik, sosial budaya dan ekonomi. Adapun hasil capaian dari masing-masing gatra adalah sebagai berikut:

Tabel 3.91. Detail Indeks Ketahanan Nasional DIY disandingkan dengan capaian skor Nasional per Desember 2021

No.	Gatra	Capaian Skor (DIY)
1.	Ideologi	2,85
2.	Politik	1,82
3.	Sosial Budaya	2,98
4.	Ekonomi	2,26
Rerata		2,48

Sumber: Skor Ketahanan Wilayah DIY per Desember 2021 dari laman <https://siskurtannas.lemhannas.go.id/>

Pada tahun 2021, Badan Kesbangpol DIY tidak dapat mencapai target kinerja yang telah ditentukan karena adanya perubahan model pengukuran yang diterapkan oleh Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Labkurtannas) Lemhannas RI. Perubahan model ini mengakibatkan adanya perubahan dalam proses penilaian sehingga menghasilkan skor yang berbeda dari model sebelumnya. Menurut Lemhannas RI, sebagai implikasi dari perubahan model pengukuran, semua provinsi mengalami penurunan capaian skor yang cukup signifikan, termasuk DIY. Selain itu, adanya penerapan masa PPKM di berbagai provinsi di Indonesia diklaim oleh Lemhannas RI sebagai penyebab menurunnya skor karena banyaknya instansi yang ditunjuk sebagai responden tidak mengirimkan *feedback* kuesioner. Namun demikian, Badan Kesbangpol DIY telah menunjukkan peran aktif dalam upaya mendukung cipta kondusif daerah

melalui program dan kegiatan di bidang ideologi, politik, sosial budaya dan ekonomi.

(2) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2021

Pada tahun 2021 Sub Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dilaksanakan melalui kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp18.160.410.392,00 dengan capaian kinerja fisik sub kegiatan sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp16.231.805.020,00 atau 89,38%. Pengalokasian anggaran tersebut dibagi dalam 7 Program dan 31 sub kegiatan. Selanjutnya rincian capaian kinerja program dan kegiatan tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 3.92. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Sub Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1. Pemantapan wawasan kebangsaan, ideologi dan kewaspadaan nasional, pembauran kebangsaan, kesadaran dan kemampuan bela negara, serta wawasan ketahanan ekonomi dalam tatanan politik, sosial, budaya dan kemasyarakatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				Adanya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan banyak penundaan kegiatan khususnya pada kegiatan sosialisasi yang bersifat mengumpulkan banyak orang.	Peningkatan cegah dini dan deteksi dini, penguatan koordinasi lintas sektor, dan lain-lain.	A. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah 1) Koordinasi menjadi hal yang mutlak dilakukan dalam rangka peningkatan koordinasi masalah keamanan, ketertiban, dan ketentraman di Daerah Istimewa Yogyakarta. Koordinasi antar instansi yang terlibat dalam Forkopimda DIY akan difasilitasi melalui rapat-rapat koordinasi yang diselenggarakan menjelang momentum-momentum tertentu yang membutuhkan kesiapan dan koordinasi antar berbagai pemangku kepentingan. Rapat-rapat koordinasi dimaksud antara lain: rapat koordinasi menjelang hari Raya Idul Fitri, Hari Buruh, Hari Natal dan Tahun Baru, Pemilihan Umum, dan lain sebagainya. Selain adanya penguatan sisi koordinasi, dilaksanakan pula kegiatan dalam rangka pencegahan dini terhadap aktivitas yang mengganggu keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat, antara lain: Pemantauan Orang Asing (POA), pembinaan dan penguatan kapasitas organisasi kemasyarakatan, Penanganan Konflik Sosial, Update Data Perubahan Sosial dan Potensi Konflik, pemantauan perkembangan politik di DIY dan
			2. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam peningkatan pemberdayaan kelembagaan	Terselenggaranya pembangunan ketahanan sosial budaya di DIY	persen	100	61.31			
			3. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pencegahan dan penanganan potensi konflik dan atau konflik	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya (2021)						
				Pembentukan Kader mahasiswa	mahasiswa	0	0			
				Pembauran Budaya di DIY	%	100	100			
				Dukungan terhadap presentase nilai adat, seni dan tradisi yang sudah direvitalisasi	%	100	100			
				Kemah kebhinnekatunggalikaan	event	0	0			
				Penyusunan panduan nilai-nilai kebhinnekatunggalikaan dalam bingkai keistimewaan DIY	panduan	1	1			
				Sosialisasi Kebhinnekatunggalikaan	lokasi	60	60			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<p>penguatan forum-forum kemitraan seperti Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Pembauran Kebangsaan, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan forum-forum lainnya. B. Tugas Umum Pemerintahan : Kesatuan Bangsa dan Politik Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) selain dilakukan melalui upaya sosialisasi, edukasi dan seminar, juga akan dilaksanakan melalui penguatan lembaga masyarakat yang bergerak dalam gerakan cegah berantas narkoba. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY selaku koordinator tim P4GN DIY melibatkan beragam lembaga masyarakat yang bergerak dalam gerakan cegah berantas narkoba antara lain Grannat DIY, Jogja Care House, IPWL Elkana, Satgas Anti Narkoba beragam universitas, dan beragam yayasan yang bergerak di bidang rehabilitasi narkoba di DIY sebagai bagian aktif dalam tim dan berperan serta dalam upaya pemecahan berbagai permasalahan terkait narkoba di DIY. C. Tugas-Tugas Umum Pemerintahan Lainnya yang Dilaksanakan Oleh Daerah 1. KPU DIY 1) Penguatan koordinasi dan komunikasi dengan penyelenggara Pemilu, dalam hal</p>

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										ini adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah DIY dan Badan Pengawas Pemilihan Umum DIY. Permasalahan terkait updating data DPT dan penguatan komunikasi dengan partai politik akan disampaikan dan menjadi tema dalam rapat-rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY. 2) Pelibatan KPU DIY dalam kegiatan sosialisasi kepemiluan yang ditujukan kepada berbagai elemen dalam masyarakat, khususnya pada generasi muda (pelajar/mahasiswa) sebagai pemilih pemula yang perlu dikuatkan kapasitasnya dalam menghadapi perhelatan Pemilihan Umum. 2. Bawaslu DIY Pelibatan Bawaslu DIY dalam kegiatan sosialisasi kepemiluan yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY sebagai narasumber untuk memberikan paparan terkait pelibatan masyarakat khususnya pemilih pemula dalam upaya pengawasan pemilihan umum.
2	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1. Pemantapan wawasan kebangsaan, ideologi dan kewaspadaan nasional, pembauran kebangsaan, kesadaran dan kemampuan bela negara, serta wawasan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Adanya pandemi Covid 19 yang mengakibatkan banyak penundaan kegiatan khususnya pada kegiatan sosialisasi yang bersifat	Peningkatan cegah dini dan deteksi dini, penguatan koordinasi lintas sektor, dan lain-lain.	A. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah 1) Koordinasi menjadi hal yang mutlak peningkatan koordinasi masalah keamanan, ketertiban, dan ketentraman di Daerah Istimewa Yogyakarta. Koordinasi antar

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ketahanan ekonomi dalam tatanan politik, sosial, budaya dan kemasyarakatan					mengumpulkan banyak orang.		instansi yang terlibat dalam Forkopimda DIY akan difasilitasi melalui rapat-rapat koordinasi yang diselenggarakan menjelang momentum-momentum tertentu yang membutuhkan kesiapan dan koordinasi antar berbagai pemangku kepentingan. Rapat-rapat koordinasi dimaksud antara lain: rapat koordinasi menjelang hari Raya Idul Fitri, Hari Buruh, Hari Natal dan Tahun Baru, Pemilihan Umum, dan lain sebagainya. Selain adanya penguatan sisi koordinasi, dilaksanakan pula kegiatan dalam rangka pencegahan dini terhadap aktivitas yang mengganggu keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat, antara lain: Pemantauan Orang Asing (POA), pembinaan dan penguatan kapasitas organisasi kemasyarakatan, Penanganan Konflik Sosial, Update Data Perubahan Sosial dan Potensi Konflik, pemantauan perkembangan politik di DIY dan penguatan forum-forum kemitraan seperti Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Pembauran Kebangsaan, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan forum-forum lainnya. B. Tugas Umum Pemerintahan : Kesatuan Bangsa
			2. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam peningkatan pemberdayaan kelembagaan	Presentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	persen	100	77.85			
			3. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pencegahan dan penanganan potensi konflik dan atau konflik	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	persen	100	75.26			
				Terwujudnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	persen	100	87.42			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
				Kesepakatan hasil forum BA	BA	1	1			
				perencanaan OPD						
				Renja, Renja Perubahan, Renstra Perubahan	dokumen	3	3			
				Dukungan 2,29% terhadap presentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	%	23.62	23.62			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						
				RKA, RKAP, DPA, DPPA, ROPK, RKT, RKT	dokumen	7	7			
				Dukungan 2,29% terhadap presentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	%	42.41	42.41			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
				Dukungan 2,29% terhadap presentase peningkatan	%	33.97	33.97			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)	nilai LKJIP (A=2)	2	2			dan Politik Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) selain dilakukan melalui upaya sosialisasi, edukasi dan seminar, juga akan dilaksanakan melalui penguatan lembaga masyarakat yang bergerak dalam gerakan cegah berantas narkoba. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY selaku koordinator tim P4GN DIY melibatkan beragam lembaga masyarakat yang bergerak dalam gerakan cegah berantas narkoba antara lain Grannat DIY, Jogja Care House, IPWL Elkana, Satgas Anti Narkotika beragam universitas, dan beragam yayasan yang bergerak di bidang rehabilitasi narkoba di DIY sebagai bagian aktif dalam tim dan berperan serta dalam upaya pemecahan berbagai permasalahan terkait narkoba di DIY. C. Tugas-Tugas Umum Pemerintahan Lainnya yang Dilaksanakan Oleh Daerah 1. KPU DIY 1) Penguatan koordinasi dan komunikasi dengan penyelenggara Pemilu, dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah DIY dan Badan Pengawas Pemilihan Umum DIY. Permasalahan terkait updating data DPT dan penguatan komunikasi dengan partai politik
				Realisasi capaian fisik dan keuangan sesuai tahapan ROPK	persen	100	100			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
				Dukungan 97,71% terhadap presentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	%	97.47	97.47			
				Tersalurkannya gaji dan tunjangan bagi ASN	bulan	12	12			
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
				Tamu yang datang melalui front office terlayani dengan baik	bulan	12	12			
				Administrasi perkantoran yang terselesaikan dengan baik dan tepat waktu	bulan	12	12			
				Dukungan 97,71% terhadap presentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	%	1.852	1.85			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
				Laporan keuangan akhir tahun	dokumen	1	1			
				Dukungan 97,71% terhadap presentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	%	0.23	0.23			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Dokumen laporan bulanan dan dokumen laporan semesteran	laporan	14	14			akan disampaikan dan menjadi tema dalam rapat-rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY. 2) Pelibatan KPU DIY dalam kegiatan sosialisasi pemilu yang ditujukan kepada berbagai elemen dalam masyarakat, khususnya pada generasi muda (pelajar/mahasiswa) sebagai pemilih pemula yang perlu dikuatkan kapasitasnya dalam menghadapi perhelatan Pemilihan Umum. 2. Bawaslu DIY Pelibatan Bawaslu DIY dalam kegiatan sosialisasi pemilu yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY sebagai narasumber untuk memberikan paparan terkait pelibatan masyarakat khususnya pemilih pemula dalam upaya pengawasan pemilihan umum.
				Dukungan 97,71% terhadap presentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	%	0.218	0.22			
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						
				Laporan prognosis	dokumen	1	1			
				Dukungan 97,71% terhadap presentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	%	0.231	0.23			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
				Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jenis	6	6			
				dukungan 34,12% terhadap presentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	1.625	1.63			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
				Alat tulis kantor	jenis	24	24			
				dukungan 34,12% terhadap presentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	5.358	5.36			
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
				dukungan 34,12% terhadap presentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	13.34	13.34			
				Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	jenis	5	5			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				dukungan 34,12% terhadap presentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	2.245	2.25			
				Dokumen hasil cetak dan pengadaan	jenis	3	3			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
				dukungan 34,12% terhadap presentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	3.667	3.67			
				Surat kabar harian	bulan	12	12			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
				dukungan 34,12% terhadap presentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	73.76	73.76			
				Laporan dan rencana tindak lanjut hasil konsultasi dan koordinasi	bulan	12	12			
				Laporan dan rencana tindak lanjut hasil rapat koordinasi	bulan	12	12			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
				Dukungan 65,88% terhadap presentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	28.82	28.82			
				Bukti pembayaran tagihan rekening listrik, telepon, internet dan PDAM	bulan	12	12			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
				Gedung kantor seluas 1.392m2 yang terpelihara kebersihannya	bulan1	12	12			
				Dukungan 65,88% terhadap presentase pemenuhan	%	71.18	71.18			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				pelayanan administrasi perkantoran							
				Keamanan kantor yang terjaga dengan baik	bulan	12	12				
				Mobilitas pimpinan terlayani dengan baik	bulan	12	12				
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
				Dukungan 100% terhadap presentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	42.02	42.02				
				Kendaraan dinas operasional roda 4 yang terpelihara sesuai RKPBMMD	unit	7	7				
				Kendaraan dinas operasional roda 2 yang terpelihara sesuai RKPBMMD	unit	9	9				
				Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 2 dan roda 4	bulan	12	12				
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
				Gedung kantor yang terpelihara sesuai RKPBMMD	bulan	12	12				
				Dukungan 100% terhadap presentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	35.02	35.02				
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
				Peralatan kantor yang terpelihara sesuai RKPBMMD	jenis	18	18				
				Dukungan 100% terhadap presentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	13.03	13.03				

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
				Dukungan 100% terhadap % presentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur		9.937	9.94			
				Perlengkapan kantor yang terpelihara sesuai RKPBM	Jenis	8	8			
				PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN						
				Skor/Nilai indek ketahanan nasional gatra ideologi	angka	2.9	1.78			
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan						
				Kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Kelompok	127	127			
				Dukungan 48,02% terhadap skor/nilai indeks ketahanan nasional gatra ideologi sebesar 2,90	%	89.12	89.12			
				Ormas, Orpol dan Organisasi Kepemudaan yang mendapat pembinaan ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Kelompok	3	3			
				Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan						
				Rekomendasi dalam Kerukunan Umat Beragama melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Rekomendasi	6	6			
				Rekomendasi dalam Pembauran Kebangsaan	Rekomendasi	6	6			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				melalui Forum Pembauran Bangsa (FPK)						
				Rekomendasi dalam Kerukunan Umat Beragama melalui Rapat Kerja Pemuda Lintas Agama	Rekomendasi	2	2			
				Dukungan 48,02% terhadap skor/nilai indeks ketahanan nasional gatra ideologi sebesar 2,90	%	10.88	10.88			
				PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK						
				Skor/Nilai indek ketahanan nasional gatra politik	angka	3.35	1.41			
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						
				Dukungan 89,75% terhadap skor/nilai indeks ketahanan nasional gatra politik sebesar 3,35	%	95.68	95.68			
				Partai potilik yang mendapatkan kursi di DPRD DIY mendapat bantuan keuangan Parpol sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Parpol	10	10			
				Perwakilan kelompok masyarakat (difabel, pemilih pemula, kelompok perempuan) yang mendapat pendidikan politik dan kewargaan	Orang	330	330			
				Partai politik yang memperoleh pemahaman mengenai tatacara penyusunan laporan bantuan keuangan	Parpol	10	10			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				partai politik sesuai dengan peraturan yang berlaku						
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						
				Laporan Pemantauan Perkembangan Politik di DIY	Laporan	1	1			
				Laporan dan rekomendasi tindak lanjut hasil IDI DIY	Laporan	1	1			
				Dukungan 89,75% terhadap skor/nilai indeks ketahanan nasional gatra politik sebesar 3,35	%	4.316	4.32			
				Rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi perkembangan politik di DIY	Rekomendasi	1	1			
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN						
				Skor/Nilai indek ketahanan nasional gatra politik	angka	3.35	1.41			
				Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						
				Rekomendasi Forum Ormas di DIY	Rekomendasi	1	1			
				Dukungan 10,25% terhadap skor/nilai indeks ketahanan nasional gatra politik sebesar 3,35	%	100	100			
				Laporan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Laporan	1	1			
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA						

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Rerata skor/nilai indeks ketahanan nasional gatra sosial budaya dan ekonomi	angka	2.89	2.47			
				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						
				Rencana Aksi Kolaborasi Ketahanan Ekonomi Masyarakat Berdasarkan Analisa Rantai Nilai	Dokumen	1	2			
				Dokumen Implementasi Rencana Aksi Penguatan Ekonomi Masyarakat Sekitar Bandara	Dokumen	0	1			
				Dukungan 100% terhadap skor/nilai indeks ketahanan nasional gatra ekonomi, sosial dan budaya sebesar 2,89	%	20.71	20.72			
				Dokumen Rencana Aksi Peningkatan Ketahanan Ekonomi	Dokumen	1	2			
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						
				Perwakilan pelajar, mahasiswa dan organisasi pemuda yang mendapat sosialisasi terkait pencegahan narkoba	Orang	1680	1680			
				Dukungan 100% terhadap skor/nilai indeks ketahanan nasional gatra ekonomi, sosial dan budaya sebesar 2,89	%	64.48	46.48			
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas						

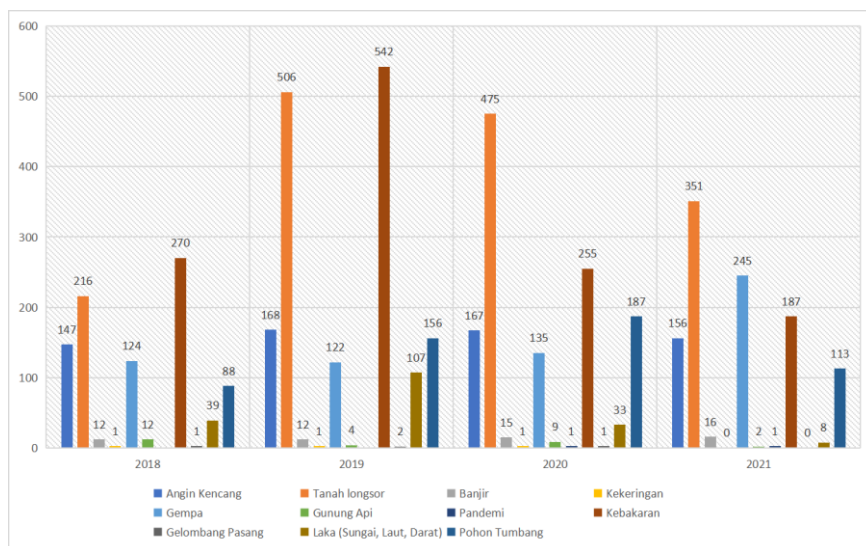
No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						
				Rekomendasi Peningkatan Ketahanan Ekonomi	Rekomendasi	1	1			
				Laporan dan rekomendasi Gerakan Nasional Revolusi Mental GNRN	Rekomendasi	1	1			
				Dukungan 100% terhadap skor/nilai indeks ketahanan nasional gatra ekonomi, sosial dan budaya sebesar 2,89	%	14.81	14.81			
				Rekomendasi P4GN	Rekomendasi	1	1			
				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL						
				Skor/Nilai indek ketahanan nasional gatra ideologi	angka	2.9	1.78			
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						
				Dukungan 51,98% terhadap skor/nilai indeks ketahanan nasional gatra ideologi sebesar 2,90	%	81.12	81.12			
				Laporan hasil koordinasi dan upaya tindak lanjut Forkopimda DIY	Laporan	3	3			
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						
				Rekomendasi Forum Kemitraan di DIY	Rekomendasi	1	1			

No	Ururan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Laporan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Pusat Komunikasi dan Informasi	Laporan	1	1			
				Laporan Update Data Perubahan Sosial dan Potensi Konflik	Laporan	3	3			
				Rekomendasi FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) tentang peningkatan kewaspadaan dini masyarakat DIY	Rekomendasi	4	4			
				Dukungan 51,98% terhadap skor/nilai indeks ketahanan nasional gatra ideologi sebesar 2,90	%	18.88	18.88			
				Laporan Penanganan Konflik Sosial (PKS) di DIY	Laporan	1	1			
				Laporan Pemantauan Orang Asing (POA) di DIY	Laporan	1	1			

c) Sub Urusan Penanggulangan Bencana

(1) Kondisi Umum

Bencana memiliki sifat *uncertainty* yang tinggi sehingga ancamannya selalu ada. Komitmen Pemda DIY dalam penanggulangan bencana sudah cukup baik, salah satunya dalam perencanaan pembangunan telah mengakomodir isu penanggulangan bencana sebagai bagian dari Misi Pertama RPJMD tahun 2017–2022. Strategi Penanggulangan Bencana yang diterapkan adalah menitikberatkan pada pengurangan risiko bencana sehingga dampak bencana dapat dikurangi seminimal mungkin. Wilayah DIY memiliki intensitas kejadian bencana yang cenderung tinggi. Hal tersebut dapat terlihat pada grafik kejadian bencana di DIY dalam empat tahun terakhir mulai dari tahun 2018 sampai akhir 2021.



Gambar 3.29. Data Series Kejadian Bencana di DIY periode 2018-2021

Sumber: PUSDALOPS BPBD DIY, 2022 (data diolah)

Selama tahun 2018 sampai dengan 2021, terjadi sejumlah kejadian bencana alam. Pada tiga tahun terakhir periode tersebut, tiga kejadian terbanyak adalah bencana alam

kebakaran, tanah longsor dan angin kencang/puting beliung. Berdasarkan data yang masuk ke Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB) DIY, pada tahun 2018 terdapat data kejadian sebanyak 910 terjadi di wilayah DIY. Selanjutnya pada tahun 2019 sebanyak 1620 kejadian dan tahun 2020 ada 1.279 kali kejadian. Terjadi kenaikan jumlah kejadian yang cukup signifikan pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 dengan kejadian sebanyak 710 lalu pada tahun 2020 mengalami penurunan kejadian bencana sebanyak 341 dari tahun 2019 dan pada tahun 2021 terdapat 1079 kejadian bencana.

Pada tahun 2021 telah terjadi 1.079 kejadian bencana baik bencana alam maupun non Alam. Informasi kejadian yang masuk di Pusdalops pada tahun 2021 meliputi 11 jenis kejadian, seperti: 156 kejadian Angin kencang, 351 kejadian Tanah longsor, 16 kejadian Banjir, 0 kejadian Kekeringan, 245 kejadian Gempa, 2 Kejadian Gunung Api, 187 Kejadian Kebakaran, 1 kejadian Pandemi COVID-19, 8 kejadian Laka (Sungai, Laut, Darat), dan 113 Pohon Tumbang. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang *Early Warning System* (EWS) pada cuaca ekstrim sering dipandang sebagai prakiraan cuaca tanpa adanya tindakan atau persiapan lebih lanjut dalam mengantisipasi potensi bencana.

Sampai dengan tahun 2021 Sistem peringatan dini/EWS yang terkoneksi secara manual dengan PUSDALOPS DIY antara lain ancaman cuaca ekstrim hidrometrologi (banjir, angin kencang, longsor dan gelombang tinggi). Ancaman gempa dan tsunami bekerjasama dengan Badan Metrologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), sedangkan untuk ancaman erupsi Merapi bekerjasama dengan Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan

Geologi (BPPTKG). Pengembangan EWS tanah longsor juga dilaksanakan oleh BPBD DIY pada beberapa lokasi dengan ancaman tinggi, antara lain di Kabupaten Kulon Progo (Klepu, Ngrancah, Jeruk) dan Bantul (Srimartani, Lemahrubuh, Wonolelo). Untuk proses pengintegrasian EWS dengan PUSDALOPS DIY masih diperlukan 1 tahapan pengembangan. Selama ini masih mengalami kendala teknis karena belum adanya MOU dengan pengelola alat EWS serta adanya rasionalisasi dan *refocusing* anggaran untuk percepatan penanganan COVID-19.

Pada tahun 2021 Pemda DIY melalui BPBD DIY telah melaksanakan kajian tingkat Indeks Risiko Bencana di DIY, yang mencakup seluruh 5 kabupaten/kota dimana capaian tahun 2021 lebih baik dibanding tahun 2020.

Perhitungan Indeks Pemulihan Pascabencana dilakukan terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi lima sektor yang rusak akibat bencana yang terjadi sebelumnya.

Sepanjang tahun 2021, terdapat dua kejadian yang dikategorikan sebagai bencana tingkat provinsi yaitu pandemi COVID-19 dan Erupsi Gunung Merapi. Total nilai kerusakan dampak bencana pada tahun 2021 cukup besar yaitu Rp59.260.864.000,00 yang terdiri dari kejadian Bencana sebesar Rp19.445.004.000,00 dan kejadian lainnya sebesar Rp39.815.860.000,00. Data tersebut berdasarkan laporan yang dihimpun oleh PUSDALOPS BPBD DIY dari BPBD Kab/Kota.

Capaian Penilaian Indeks Ketahanan Daerah DIY berdasarkan lima prioritas di atas telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebesar 79 dari target yaitu:

Tabel 3.93. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	75,26	77	79	102,5	80	98,75

Sumber: BPBD DIY, 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilakukan analisis atas sasaran “Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana” dengan indikator Indeks Ketahanan Daerah. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat, dan stakeholder lainnya dalam penanggulangan bencana tersebut menjadi tolok ukur kinerja utama sasaran BPBD DIY, yaitu indeks ketahanan daerah (indikator sasaran BPBD DIY). Strategi-strategi BPBD DIY untuk mencapai sasaran peningkatan indeks ketahanan daerah pada periode lima tahun 2017-2022, sebagai kelanjutan/pengembangan dari periode lima tahun sebelumnya, terarah pada pengembangan dan penguatan faktor: komponen kelembagaan, peringatan dini, pendidikan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Faktor-faktor tersebut menjadi target dari kinerja program/kegiatan atau pelayanan dari BPBD DIY.

Pada tahun 2021, capaian indikator Indeks Ketahanan Daerah sebesar 79 atau 102,59%. Dibandingkan realisasi tahun 2020 yang sebesar 75,26 (102%), capaian tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,59%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD mencapai 98,75%. Sasaran ini diproyeksikan akan berhasil mencapai target pada akhir periode RPJMD dengan skor 80. Keberhasilan atas pencapaian target kinerja Indeks

ketahanan daerah dapat diwujudkan karena peningkatan kapasitas dan komitmen aparaturnya dan masyarakat untuk mewujudkan ketangguhan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY ke depan, sebagai berikut: 1) Kerentanan bencana di DIY meningkat seiring pertumbuhan penduduk, perubahan pola pemanfaatan lahan dan perubahan iklim; 2) Kapasitas dalam menghadapi bencana di DIY belum merata dan masih memerlukan penguatan pada semua aspek kapasitas; serta 3) Dinamika jenis ancaman bencana yang dihadapi, termasuk kelanjutan penanganan pandemi COVID-19 di tahun 2022. Pandemi kali ini termasuk jenis bencana non-alam, kategori bencana dengan karakteristik *slow on - set disaster*, tidak bisa dipastikan kapan akan berakhir, termasuk mengakhiri status tanggap daruratnya. Hal tersebut menjadi tantangan bagi pelaksanaan mandat BPBD dan pencapaian target-target kinerja BPBD ke depan.

Ketercapaian kinerja sasaran dengan indikator Indeks Ketahanan Daerah didukung oleh beberapa program sebagai berikut: 1) Peningkatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana sebanyak 25 desa/kelurahan; 2) Peningkatan Sekolah Siaga Bencana (SSB)/ Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di Kawasan Rawan Bencana sebanyak 35 sekolah; 3) Rerata kecepatan waktu respon kejadian bencana menjadi 12 detik; serta 4) Indeks Pemulihan Pascabencana sebesar 123,66%.

Program Desa/Kalurahan/Kelurahan Tangguh Bencana merupakan salah satu program utama BNPB yang mulai dilaksanakan pada tahun 2012 dan terus dikembangkan sampai saat ini.

Terkait Peningkatan Sekolah Siaga Bencana (SSB)/ Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di Kawasan Rawan Bencana materi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) sangat mendesak untuk diimplementasikan di sekolah sebagai bagian materi yang harus diberikan kepada siswa. Dari sisi regulasi, Pemda DIY bersama DPRD DIY telah mengeluarkan Perda Provinsi DIY Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana. Dengan beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka sangat diperlukan kesadaran masyarakat yang tinggi tentang PRB untuk mencegah secara dini agar korban dapat dihindarkan setidaknya meminimalkan korban, baik korban manusia maupun material.

Penghitungan rata-rata kecepatan waktu respon kejadian bencana pada program pengelolaan kedaruratan dan logistik bencana merupakan hasil penghitungan waktu yang dibutuhkan petugas penerima laporan untuk memverifikasi laporan dan sampai adanya petugas penanganan di lapangan. Rerata kecepatan waktu respon kejadian bencana dihitung dari penghitungan kecepatan waktu respon penanganan laporan dari kejadian utama yang dilaporkan (angin kencang, tanah longsor, kebakaran, banjir, banjir lahar dingin, gelombang pasang dan abrasi) di lima kabupaten/kota yang merupakan akumulasi dalam satu tahun.

Dalam Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2012 yang terkait penghitungan Indeks Ketahanan Daerah DIY sebagai bagian dari penghitungan Indeks Risiko Bencana yang

dilaksanakan pada akhir tahun 2021. Kajian risiko bencana yang digunakan untuk mendapatkan nilai indeks risiko bencana dilakukan pada 7 bencana yakni Tsunami, Longsor, Erupsi Gunung Api, Gempa Bumi, Banjir, Kekeringan, dan Cuaca Ekstrim. Indeks bernilai sama untuk seluruh kawasan pada suatu kabupaten/kota di DIY yang merupakan lingkup kawasan terendah kajian ini. Indeks diperoleh dengan melaksanakan diskusi terfokus kepada pelaku penanggulangan bencana melibatkan BPBD, Bappeda, Dinsos, Dinkes, UKM, Dunia Usaha, Universitas, LSM, Tokoh masyarakat, serta Tokoh Agama.

Dalam menghadapi ancaman pandemi COVID-19 Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X telah memberikan arahan melalui Surat Instruksi Gubernur DIY Nomor 2/Instr./2020 tanggal 3 Maret 2020 tentang peningkatan kewaspadaan terhadap risiko penularan infeksi COVID-19 sebagai dasar penanganan epidemi COVID-19 di wilayah DIY.

Penanganan bencana COVID-19 di DIY meliputi dua Tahapan Rencana Operasi berdasarkan Kepgub DIY Nomor 64/KEP/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kemudian diubah menggunakan Kepgub DIY Nomor 78/Kep/2020 Tanggal 8 April 2020 tentang Perubahan Sk Gub Nomor 64/Kep/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanganan COVID-19. Kebijakan Status Tanggap Darurat Bencana COVID-19 ini telah dilakukan sebanyak 19 kali perpanjangan, berawal dari Bulan Maret tahun 2020 hingga Desember 2021.

Kegiatan dilaksanakan oleh BPBD DIY selama masa tanggap darurat mulai Maret sampai dengan berakhirnya pelaksanaan Belanja Tidak Langsung (BTL) dalam rangka Penanganan COVID-19 pada tahun 2021 adalah menjalankan Sekretariat Pos Komando Terpadu, Bidang Logistik serta membentuk Pos Dukungan Operasi Gugus Tugas COVID-19 DIY (Posduk DIY) yang berada dibawah Sekretariat Satgas COVID-19 DIY.

(2) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2021

Pada tahun 2021 Sub Urusan Penanggulangan Bencana mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari pendanaan APBD sebesar Rp38.079.990.529,00 dengan mengampu 3 program dan 36 sub kegiatan. Realisasi keuangan sebesar Rp31.868.501.558,00 atau 83,69% dan realisasi fisik mencapai 98,52%.

Tabel 3.94. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Sub Urusan Penanggulangan Bencana Tahun 2021

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1. Peningkatan pemahaman aparat dan masyarakat akan risiko bencana dengan penguatan kebijakan dan implementasi didasarkan pada pemahaman kerentanan, keterpaparan, kapasitas, karakteristik bahaya dan lingkungan 2. Penguatan tata kelola risiko untuk mendorong kerja sama kemitraan, perbaikan/pengembangan mekanisme, penguatan kelembagaan pada pelaksanaan pengurangan risiko bencana & pengelolaan sumber daya 3. Peningkatan investasi PRB untuk ketangguhan/resiliensi dengan meningkatkan investasi publik dan swasta dalam mitigasi struktural dan non-struktural untuk meningkatkan ketahanan sebagai pendorong inovasi, pertumbuhan, dan penciptaan lapangan kerja 4. Peningkatan manajemen risiko dan manajemen krisis dengan memperkuat kesiapsiagaan, respon kedaruratan, dan pemulihan pasca-bencana di semua tingkatan	PROGRAM PENUNJANG DAERAH PROVINSI Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Terwujudnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	100	1) Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan dalam mengantisipasi bencana yang dipicu oleh hidrometeorologi sehingga mengakibatkan lemahnya kesiapsiagaan aparat dan masyarakat. 2) Banyak pihak yang memiliki EWS baik pemerintah maupun non pemerintah dengan indikator yang berbeda-beda sehingga sistem peringatan dini bencana di DIY belum terintegrasi dan pengelolaannya belum efektif dan efisien.	1) Menyusun Rencana Kontijensi bencana yang dipicu oleh hidrometeorologi 2) EWS di DIY memerlukan penguatan regulasi dan kelembagaan dalam rangka pengelolaan EWS terintegrasi.	1. Penanganan Bencana COVID-19 Tindak lanjut : a. Memberikan sosialisasi serta edukasi tentang permasalahan COVID-19 kepada pemangku kepentingan dan masyarakat di tingkat kalurahan/kelurahan b. Melaksanakan gerakan kampanye 5 M c. Melaksanakan pemantauan kegiatan masyarakat serta kegiatan lembaga pemerintah/swasta melalui penerbitan surat rekomendasi izin kegiatan d. Melaksanakan pemantauan kondisi zona status wilayah pada tingkatan RT/Kalurahan/Kelurahan melalui data yang masuk dari kabupaten/kota. 2. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Tindak lanjut : a. Melakukan sosialisasi serta edukasi tentang penanggulangan bencana kepada masyarakat di tingkat Kalurahan/Kelurahan di DIY b. Membentuk Kalurahan/Kelurahan tangguh bencana c.
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						

No	Ururan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				02. RKA, RKAP, DPA, DPPA, ROPK, RKT, RKTP	Dokumen	7	7			Membentuk Satuan Pendidikan Aman Bencana d. Gladi Penanggulangan Bencana e. Memberikan fasilitasi serta koordinasi kepada Forum Pengurangan Risiko Bencana di tingkat DIY dan Kabupaten/Kota f. Koordinasi relawan g. Memberikan fasilitasi alat penanggulangan bencana pada tingkat Kalurahan/Kelurahan di DIY h. Sosialisasi dan pemasangan alat peringatan dini bencana.
				01. Renja, Renja Perubahan, Renstra Perubahan	Dokumen	3	3			
				03. Kesepakatan hasil forum perencanaan OPD	Berita Acara	1	1			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
				Laporan Kinerja % Instansi Pemerintahan (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) (Nilai LKjIP A)		100	100			
				Realisasi capaian fisik dan keuangan sesuai tahapan ROPK (Nilai LKjIP A)	%	100	100			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
				Terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai	Tahun	1	1			
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
				Administrasi Keuangan yang terselesaikan dengan baik dan benar	Bulan	12	12			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
				Dokumen laporan keuangan akhir tahun	Dokumen	1	1			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				12 dokumen laporan bulanan dan 2 dokumen laporan semesteran	Dokumen	14	14			
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						
				Dokumen laporan prognosis	Dokumen	1	1			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
				Alat listrik dan elektronik	Jenis	5	5			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
				Alat-alat/ Perlengkapan Kantor	Jenis	15	15			
				Alat tulis kantor	Jenis	60	60			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
				Barang hasil cetak	Jenis	5	5			
				Hasil penggandaan	Lembar	100000	100000			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
				Bukti pembayaran surat kabar harian	Bulan	12	12			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
				Laporan dan rencana tindak lanjut hasil rapat koordinasi	Bulan	12	12			
				Laporan dan rencana tindak lanjut hasil konsultasi dan koordinasi	Bulan	12	12			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
				Perlengkapan kantor sesuai RKBMD	Jenis	3	3			
				Peralatan kantor sesuai RKBMD	Jenis	14	14			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
				Pengiriman paket	Tahun	1	0			

No	Ururan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
				Bukti pembayaran rekening air PDAM	Bulan	12	12			
				Bukti pembayaran rekening listrik (pelanggan PLN premium)	Bulan	12	12			
				Penambahan rekening listrik	Rekening	2	2			
				Bukti pembayaran tagihan internet/ TV berlangganan	Bulan	12	12			
				Bukti pembayaran rekening telepon	Bulan	12	12			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
				Mobilitas pimpinan terlayani dengan baik	Bulan	12	12			
				Arsip kantor terkelola dengan baik	Bulan	12	12			
				Kemamanan kantor terjaga dengan baik	Bulan	12	12			
				Repeater kantor terjaga dengan baik	Bulan	12	12			
				Bukti pembayaran jasa kebersihan gedung kantor BPBD DIY	Bulan	12	12			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
				Bukti mutasi balik nama kendaraan dinas operasional	Unit	1	1			
				Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas operasional roda 2	Unit	20	20			
				Bukti pembayaran pajak/STNK	Unit	10	10			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				kendaraan dinas operasional roda 6						
				Kendaraan dinas operasional roda 2 yang terpeliharasesuai RKPBMMD	Unit	8	8			
				Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas operasional roda 4	Unit	18	18			
				Bukti KIR Kendaraan dinas operasional roda 4	Unit	5	5			
				Bukti KIR Kendaraan dinas operasional roda 6	Unit	9	9			
				Kendaraan dinas operasional roda 4 solar yang terpelihara sesuai RKPBMMD	Unit	2	2			
				Kendaraan dinas operasional roda 4 bensin yang terpelihara sesuai RKPBMMD	Unit	7	7			
				Pemeliharaan Mebel						
				Mebeleur kantor terpelihara/ terawat	Jenis	8	8			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
				Perlengkapan kantor terpelihara sesuai RKPBMMD	Jenis	32	32			
				Peralatan kantor terpelihara sesuai RKPBMMD	Jenis	38	38			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						

No	Ururan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Revitalisasi gudang logistik dan peralatan	Jenis	2	2			
				Penataan ruang rapat/ lingkungan	Jenis	4	4			
				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						
				Peningkatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana	desa/kalurahan	25	25			
				Peningkatan Sekolah Aman (SSB) di Kawasan Rawan Bencana	sekolah	35	35			
				Rerata kecepatan waktu respon kejadian bencana	menit	12	12			
				Rerata kecepatan waktu respon kejadian bencana	menit	12	12			
				Indeks pemulihan pasca-bencana	angka	95	95			
				Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi						
				Hasil Review Peta Bencana	Dokumen	2	2			
				Hasil Kajian IRBI (Indeks Risiko Bencana Indonesia)DIY	Dokumen	1	1			
				Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)						
				Kelompok pemuda desa yang meningkat pemahamannya dalam penanggulangan bencana	Kelompok	10	10			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Sosialisasi Penanggulangan Bencana	Lokasi	60	60			
				Data website BPBD DIY yang terbaru secara kontinyu	%	100	100			
				Kelompok masyarakat yang meningkat pemahamannya dalam mitigasi bencana di obyek wisata	Lokasi	15	15			
				Kelompok masyarakat yang meningkat pemahamannya tentang kebencanaan melalui Literasi Digital	Kelompok	10	10			
				Kelompok masyarakat yang meningkat pemahamannya dalam penanganan COVID-19	Kelompok	25	25			
				Publikasi Media Massa	Kali	12	12			
				Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana						
				Hasil Rekomendasi Forum PRB untuk Pengurangan Risiko Bencana	Rekomendasi	6	6			
				Dokumen Rencana Kontijensi gempa bumi, dan banjir	Dokumen	2	2			
				Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana						
				Relawan dan Petugas yang meningkatkan kemampuan Kesiapsiagaan	Angkatan	1	1			

No	Ururan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penanggulangan Bencana						
				Jumlah unsur masyarakat dan aparat yang menjadi terampil dalam manajemen Logistik dalam Penanggulangan Bencana (35 orang)	Angkatan	0	0			
				Relawan, Aparat dan Petugas yang meningkatkan kapasitasnya dalam Penanganan Kedaruratan (ICS) (35orang)	Angkatan	1	1			
				Jumlah Instansi yang terlibat dalam Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKBN) di DIY	OPD	0	0			
				Personil Pemda DIY yang mampu melaksanakan JituPasna	Orang	35	35			
				Kelompok Masyarakat Desa yang mampu untuk mengelola Dapur Umum dalam Penanggulangan Bencana	Kelompok	0	0			
				Relawan dan Petugas yang meningkatkan kapasitasnya dalam Pengelolaan Pos Aju (40 orang)	Angkatan	1	1			

No	Ururan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Aparat, relawan, dan masyarakat yang terampil dalam Manajemen Peralatan Penanggulangan bencana (200orang)	Angkatan	4	4			
				Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana						
				Blue print dan Detail Engineering Design/DED fasilitas Pusdalops	Dokumen	2	2			
				EWS (Early Warning System) yang terintegrasi	Sistem	1	1			
				Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana						
				Peralatan Penanggulangan Bencana sesuai rencana kebutuhan	Jenis	38	38			
				Mobil Komunikasi yang siap pakai	Jenis	1	1			
				Peralatan dan Kendaraan operasional PB siap pakai	Jenis	25	25			
				Sewa gudang jembatan bailey 1 tahun	Unit	1	1			
				Radio Komunikasi dalam PB yang terkelola	Paket	1	1			
				Laporan Update Data Perlatan Penanggulangan Bencana secara periodik	Laporan	2	2			

No	Ururan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penguatan Kapasitas Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan untuk Pencegahan dan					
				Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) yang terbentuk dan terbina	Sekolah	35	35			
				Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana baru yang terbentuk dan berkembang di DIY	Desa/Kel	25	25			
				Penanganan Pascabencana Provinsi						
				Jumlah Kelompok yang menerima stimulan pemulihan sosial	Kelompok	5	5			
				Hasil Perhitungan DRI (Disaster Recovery Index) -Indeks Pemulihan Pascabencana	Dokumen	1	1			
				Jumlah KK penerima/ pemanfaat huntap (hunian tetap) Merapi dan Sarpras Lingkungan	KK	5	5			
				Rehabilitasi Jalan Baron - Mulo	Km	0	0			
				Jumlah KK yang mendapat Stimulan Perbaikan rumah	KK	18	18			
				Laporan Monev kegiatan RR	Laporan	1	1			
				Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana						
				Tim Reaksi Cepat yang siap siaga dalam	Orang	32	30			

No	Ururan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				penanganan darurat bencana						
				Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana						
				03. Laporan bulan Operasional Posko Terpadu Penanganan COVID-19 pada BPBD DIY		10	10			
				02. Laporan Kejadian/Kedaruratan yang ditangani petugas/relawan	Laporan/Kejadian	360	360			
				01. Laporan operasional PUSDALOPS PB DIY beroperasi selama 12 bulan untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana	Laporan	12	12			
				Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						
				03. Laporan Semeteran Pengelolaan dan Pendistribusian Logistik	Laporan	2	2			
				01. Hasil Update Data Logistik secara Periodik	Laporan	1	1			
				02. Kajian Kebutuhan Logistik	Dokumen	1	1			
				04. Logistik penanggulangan bencana kekeringan berupa bantuan Air bersih	Tangki	200	0			

No	Ururan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				05. Logistik posko pendukung penanggulangan bencana banjir dan longsor	Paket	20	20			
				06. Paket bantuan Logistik dalam rangka Penanggulangan Bencana	Paket	1500	1500			
				07. Paket perlengkapan untuk penanggulangan bencana Seng (300), Deklit (200), Karung (10000), Sekop panjang (200), Sekop pendek (100), Bronjong(550)	Jenis	6	6			
				08. Logistik PB Dukungan Penanganan COVID-19	bulan	10	10			
				Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah						
				Panduan penyelenggaraan rumah sakit aman bencana di DIY	Dokumen	0	0			
				Rancangan Pergub tentang santunan dan bantuan sosial perbaikan pascabencana	Dokumen	1	1			
				Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah						
				Pengelola media center dan komunitas media yang meningkat kapasitasnya	Orang	80	80			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Kerja sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana						
				Laporan Koordinasi Laporan Klaster PB		24	24			
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1. Peningkatan pemahaman aparat dan masyarakat akan risiko bencana dengan penguatan kebijakan dan implementasi didasarkan pada pemahaman kerentanan, keterpaparan, kapasitas, karakteristik bahaya dan lingkungan 2. Penguatan tata kelola risiko untuk mendorong kerja sama kemitraan, perbaikan/pengembangan mekanisme, penguatan kelembagaan pada pelaksanaan pengurangan risiko bencana & pengelolaan sumber daya 3. Peningkatan investasi PRB untuk ketangguhan/resiliensi dengan meningkatkan investasi publik dan swasta dalam mitigasi struktural dan non-struktural untuk meningkatkan ketahanan sebagai pendorong inovasi, pertumbuhan, dan penciptaan lapangan kerja 4. Peningkatan manajemen risiko dan manajemen krisis dengan memperkuat	PROGRAM PENYELENGGARAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase nilai adat, % tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia Kajian dampak bencana terhadap perekonomian di		29.67	29.67	1) Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan dalam mengantisipasi bencana yang dipicu oleh hidrometeorologi sehingga mengakibatkan lemahnya kesiapsiagaan aparat dan masyarakat. 2) Banyak pihak yang memiliki EWS baik pemerintah maupun non pemerintah dengan indikator yang berbeda-beda sehingga sistem peringatan dini bencana di DIY belum terintegrasi dan pengelolaannya belum efektif dan efisien.	1) Menyusun Rencana Kontijensi bencana yang dipicu oleh hidrometeorologi 2) EWS di DIY memerlukan penguatan regulasi dan kelembagaan dalam rangka pengelolaan EWS terintegrasi.	1. Penanganan Bencana COVID-19 Tindak lanjut : a. Memberikan sosialisasi serta edukasi tentang permasalahan COVID-19 kepada pemangku kepentingan dan masyarakat di tingkat kalurahan/kelurahan b. Melaksanakan gerakan kampanye 5 M c. Melaksanakan pemantauan kegiatan masyarakat serta kegiatan lembaga pemerintah/swasta melalui penerbitan surat rekomendasi izin kegiatan d. Melaksanakan pemantauan kondisi zona status wilayah pada tingkatan RT/Kalurahan/Kelurahan melalui data yang masuk dari kabupaten/kota. 2. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Tindak lanjut : a. Melakukan sosialisasi serta edukasi tentang penanggulangan bencana kepada masyarakat di tingkat

No	Ururan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			kesiapsiagaan, respon kedaruratan, dan pemulihan pasca-bencana di semua tingkatan	Kawasan Cagar Budaya DIY Kajian Mitigasi Bencana Bangunan Cagar Budaya Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya (2021) Tersedianya unit kendaraan operasional dukungan penanganan COVID- 19 di DIY	Dokumen	1	1			Kalurahan/Kelurahan di DIY b. Membentuk Kalurahan/Kelurahan tangguh bencana c. Membentuk Satuan Pendidikan Aman Bencana d. Gladi Penanggulangan Bencana e. Memberikan fasilitasi serta koordinasi kepada Forum Pengurangan Risiko Bencana di tingkat DIY dan Kabupaten/Kota f. Koordinasi relawan g. Memberikan fasilitasi alat penanggulangan bencana pada tingkat Kalurahan/Kelurahan di DIY h. Sosialisasi dan pemasangan alat peringatan dini bencana.

6) *Urusan Sosial*

a) *Kondisi Umum*

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Urusan Sosial dalam pembagian kewenangannya merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang harus ditangani bersama. Sasaran utama penanganan permasalahan sosial adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PMKS/PPKS). PMKS/PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Kesulitan, hambatan atau gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kedisabilitas, ketunaan sosial, keterbelakangan atau kondisi perubahan lingkungan yang kurang mendukung.

Permasalahan sosial tersebut membutuhkan penanganan yang sinergi antar *stakeholder* yang ada baik dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, dan keluarga. Pemerintah daerah dalam penanganan permasalahan sosial tidak hanya menangani langsung terhadap PMKS/PPKS, tetapi juga mempunyai tugas dan kewajiban untuk mendorong tumbuh berkembangnya Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/ atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan sebagai penunjang keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial.

Pemda DIY dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial melakukan upaya penanganan melalui program dan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial sesuai dengan target dan realisasi Urusan Sosial tahun 2021

Gambaran kinerja Urusan Sosial pada tahun 2021 dapat dilihat melalui indikator sebagai berikut: Indikator Persentase PMKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dapat hidup mandiri dan berfungsi sosial; dan Indikator Persentase PPKS dan masyarakat sasaran yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mampu mewujudkan nilai-nilai keberintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial.

Tabel 3.95. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Sosial Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dapat hidup mandiri dan berfungsi sosial	%	43,85	43,08	40,91	94,96	44,28	92,38
2.	Persentase PSKS dan masyarakat sasaran yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mampu mewujudkan nilai-nilai keberintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	%	45,35	51,59	69,64	134,99	51,60	134,96

Sumber: Dinsos DIY, 2022

Berdasarkan tabel di atas untuk sasaran Terwujudnya kebutuhan dasar perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan perilaku bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tidak tercapai. Ketercapaian sasaran tersebut hanya terealisasi sebesar 40,91% atau 92,38%, realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar 9,02% jika dibanding tahun 2020. Namun, terhadap target akhir RPJMD realisasi optimis tercapai. Kendala yang dihadapi antara lain: 1) Penerapan Ingub DIY Nomor 17/INTSR/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19), dimana yang berakibat diterapkannya kebijakan *lockdown* bagi PMKS. 2) Penerapan SE Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 14 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), sehingga berlaku proses karantina 14 hari bagi PMKS baru. 3) Untuk anak asuh Balai Rehabilitasi Sosial Pengasuhan Anak (BRSPA) dengan kasus kekerasan dan pelecehan seksual belum dapat dikembalikan kepada keluarga dan harus mendapatkan layanan pengasuhan jangka panjang di BRSPA karena rentan mengalami tindakan kekerasan dari lingkungannya. 4) Program Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Perempuan Penyandang Masalah Sosial dengan indikator kinerja kegiatan warga binaan balai (perempuan penyandang masalah sosial) hanya dapat terealisasi 27 klien dari target 28 klien, karena terdapat 1 klien yang meninggal dunia. 5) Permensos Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus bertindak sebagai pihak yang menerima rujukan untuk anak-anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif dan tidak secara proaktif melakukan rekrutmen anak-anak dalam komunitas yang tidak membutuhkan pengasuhan alternatif, sehingga Balai

Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja saat ini tidak melakukan penjangkauan langsung, hanya menerima anak berhadapan dengan hukum rujukan dari Kejaksaan, Polda, Polres, dan Polsek saja.

Untuk sasaran Terwujudnya peningkatan kemampuan, partisipasi dan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) tercapai. Ketercapaian sasaran tersebut pada tahun 2021 dapat terealisasi 69,64% atau 134,96%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 47,04% dibanding tahun 2020. Untuk target akhir RPJMD diproyeksikan tercapai.

Ketercapaian sasaran tersebut karena adanya kerja sama yang baik antara internal dan *stakeholder* yang terlibat dalam upaya penyelenggaraan kegiatan.

b) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2021

Pada tahun 2021, Urusan Sosial dilaksanakan melalui 7 program, 18 kegiatan, dan 42 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp103.085.207.542,00. Realisasi keuangan sebesar Rp89.699.907.923,00 atau 87,02% dan realisasi fisik mencapai 87,02%. Deviasi fisik disebabkan karena pada sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Sosial, dimana sub kegiatan tersebut terkait penanganan shelter COVID-19 yang dilakukan menyesuaikan kebutuhan pasien COVID-19. Sedangkan deviasi keuangan disebabkan adanya efisiensi dari belanja serta *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan darurat. Selanjutnya rincian capaian kinerja program dan kegiatan tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 3.96. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Sosial Tahun 2021

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	DINAS SOSIAL		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Jumlah PMKS di lapangan tidak bisa diprediksi sehingga menyesuaikan kondisi yang ada	1. Selalu berkoordinasi dengan instansi sosial kab/kota atau terkait, masyarakat dan lembaga non pemerintah dalam penanganan PMKS 2. Proxy Means Test bekerjasama dengan BPS sehingga di harapkan dapat diperoleh gambaran kemiskinan secara riil dengan hasil pemeringkatan tersebut sesuai dengan kondisi di DIY. Aplikasi DTKS Daerah 2021 dalam memilah kategori kemiskinan salah satu	Urusan Wajib a. Urusan Sosial 1) a. Upaya pembuatan aplikasi DTKS Daerah 2021 dengan prioritas untuk pemeringkatan data DTKS yang sudah ditetapkan dengan SK Menteri Sosial menggunakan model dengan BPS sehingga di harapkan dapat diperoleh gambaran kemiskinan secara riil dengan hasil pemeringkatan tersebut sesuai dengan kondisi di DIY. Aplikasi DTKS Daerah 2021 dalam memilah kategori kemiskinan salah satu
				Presentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	Jumlah orang dalam setiap rombongan ziarah wisata tidak bisa diprediksi sebelumnya	Selalu menjalin kerja sama dan koordinasi yang baik dengan instansi sosial kab/kota bersama sama dengan PSKS dalam penanganan PMKS dan mendukung program kegiatan SKPD	pengukurannya mengadopsi angka garis kemiskinan yang dikeluarkan oleh BPS, dengan demikian akan diketahui Data Mikro/BNBA masyarakat sesuai dengan kategori sangat miskin, miskin, hampir miskin, rentan miskin, dan tidak miskin. Harapannya, masyarakat yang menerima bantuan sesuai dengan kondisi ekonominya. b. Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4/INSTR/2020 Tentang Percepatan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, Dinas Sosial DIY mengusulkan pengembangan sistem untuk
				Presentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100			
				Presentase peningkatan kualitas pegawai dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%	100	100			
				Presentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	100			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						
				Dokumen perencanaan RKA-DPA, RKAP-DPPA, ROPK, PK, Renja	dokumen	5	5			

No	Urutan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pengelolaan Website Dinas	kegiatan	1	1			memfasilitasi percepatan
				Dukungan terhadap Pemenuhan	%	100	100			perbaikan data kemiskinan
				Pelayanan Administrasi Perkantoran						(DTKS) agar menghasilkan data
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						yang tepat, akurat, dan bersifat
				Dukungan terhadap Pemenuhan	%	100	100			satu data. 2) Dalam
				Pelayanan Administrasi Perkantoran						penanganan urusan sosial,
				Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah	kegiatan	2	2			Pemerintah Daerah DIY melalui
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Dinas Sosial DIY tidak hanya
				Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan perencanaan	dokumen	1	1			menangani permasalahan
				Dukungan terhadap Pemenuhan	%	100	100			sosial PMKS, namun juga
				Pelayanan Administrasi Perkantoran						terlibat langsung mendukung
				Rekomendasi pelaksanaan kegiatan SKIPD	dokumen	1	1			tumbuh kembangnya PSKS
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						melalui penguatan kapasitas
				Peningkatan Kesejahteraan Bagi Aparatur Pemerintah Daerah	%	100	100			SDM. PSKS sebagai mitra Dinas
				Dokumen Laporan Pengelolaan Gaji ASN	dokumen	12	12			Sosial DIY dan Pemerintah
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						Daerah DIY berperan serta
				Dokumen Laporan Keuangan Tahunan	Dokumen	1	1			untuk menjaga, menciptakan,
				Dukungan terhadap Pemenuhan	%	100	100			dan sebagai penunjang
				Pelayanan Administrasi Keuangan						keberhasilan pembangunan
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						kesejahteraan sosial. Tahun
				Dokumen Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran	Dokumen	13	13			2021 Pemerintah Daerah DIY
				Dukungan terhadap Pemenuhan	%	100	100			melalui Dinas Sosial DIY
				Pelayanan Administrasi Keuangan						mendorong tumbuh kembang
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						PSKS dengan rincian : Jenis
				Pembinaan Pekerja Sosial dan orang		35	35			PSKS Target 2021 Pekerja Sosial
				Penilaian Angka Kredit						Masyarakat (PSM) 45 orang
				Dukungan Terhadap Administrasi	%	100	100			Lembaga Kesejahteraan Sosial
				Kepegawaian Perangkat Daerah						(LKS) 40 orang Karang Taruna
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						100 orang Wahana
										Kesejahteraan Sosial Berbasis
										Masyarakat (WKSMB) 55 orang
										Tenaga Kesejahteraan Sosial
										Kecamatan (TKSK) 78 orang
										Dunia Usaha (CSR) 50 orang
										Penanaman Nilai-Nilai K3S /
										Nasionalisme 1000 orang
										Kesejahteraan Keluarga
										Pahlawan 7 orang Taruna Siaga
										Bencana (TAGANA) 55 orang

No	Ururan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Dukungan Terhadap Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100			Kesetiakawanan Sosial 4400 orang
				Penyediaan Alat Listrik dan Elektronika Bangunan Kantor	Jenis	12	12			
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
				Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	Buah	5	5			
				Peralatan dan Bahan Kebersihan Kendaraan dinas	Jenis	2	2			
				Dukungan Terhadap Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100			
				Bibit Tanaman Hias	paket	1	1			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
				Penggandaan (71760 lembar) ; Jilid (45 buku) ; Barang Cetak (4 jenis)	Jenis	3	3			
				Dukungan Terhadap Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
				Dukungan Terhadap Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100			
				Penyediaan Surat Kabar Lokal, Regional, Nasional dan Majalah	Bulan	12	12			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
				Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah	Tahun	1	1			
				Konsultasi dan Koordinasi Dalam Daerah	Tahun	1	1			
				Dukungan Terhadap Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100			
				Makanan dan Minuman Rapat/Sidang/Tamu	Tahun	1	1			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
				Dukungan Terhadap Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100			
				Pemasangan LAN Internet	paket	1	1			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat						

No	Ururan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Ijin Frekwensi	Tahun	1	1			
				Dukungan Terhadap Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100			
				Penyediaan Materai	lembar	75	75			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
				Langganan Zoom Meeting	Bulan	12	12			
				Dukungan Terhadap Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100			
				Pembayaran Tagihan Rekening Listrik	Tahun	1	1			
				Pembayaran Tagihan Air	m3	2999	2999			
				Pembayaran Tagihan Telepon	Tahun	1	1			
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
				Jasa Keamanan Kantor dan Tempat Kerja	paket	1	1			
				Dukungan Terhadap Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100			
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis	38	38			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
				Dukungan Terhadap Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100			
				Retribusi Sampah	Bulan	12	12			
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	paket	1	1			
				Tertib Administrasi Keuangan, Barang	Bulan	12	12			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
				Dukungan Terhadap Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100			
				Jasa Service Roda 2,3,4,6	Tahun	1	1			
				Penggantian Suku Cadang Roda 2,3,4,6	Unit	24	24			
				Pembayaran Pajak STNK roda 2/3 dan 4/6 Dinas	Unit	75	75			
				Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Roda 2,3,4,6	Tahun	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
				Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor (Pengecatan, Pemeliharaan Sapitank Komunal, Rehab Ruang Isolasi, Pemeliharaan Taman, Perbaikan Partisi Aula, Pembuatan Dapur dan tempat sampah)	paket	1	1			
				Pemeliharaan Instalasi Air Bersih	paket	1	1			
				Dukungan Terhadap Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	99.65			
				Pemeliharaan Air Limbah/Kotor/Penugasan WC Camp Asesment	kali	10	5			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
				Dukungan Terhadap Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100			
				BBM Genzet (1 Tahun) ; Komputer (38 unit) ; Faximili (2 unit) ; Pemeliharaan Genzet (3 unit) ; Pemeliharaan Pompa Air/Jetpump (4 buah) ; Service Mesin Pemotong Rumput (1 unit) ; Pengisian Freon AC (32 unit) ; Perawatan AC (53 unit) ; Laptop (8 unit) ; Printer (10 unit) ; Penggantian Filter Air Tanah (10 buah)	Jenis	11	11			
				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL						
				Persentase PSKS dan masyarakat yang mampu menangani PMKS dan menguatnya nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial dalam masyarakat	%	51.59	69.64			
				Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi						

No	Ururan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Publikasi Informasi kesejahteraan sosial melalui media surat kabar	Kali	39	39			
				Koordinasi dan Pembekalan Pendamping Kegiatan LUT	Orang	4	4			
				Penyuluhan Sosial Tingkat Desa	Orang	2000	2000			
				Kontribusi PSKS dan masyarakat dalam menangani PMKS terhadap Program Pemberdayaan Sosial	%	100	100			
				Penyuluhan Sosial Melalui Media Cetak	Paket	8	8			
				Penyuluhan Sosial di Institusi Pendidikan dan PIE	Orang	0	0			
				Bimtap Pendamping Fasilitasi Homecare	Orang	100	100			
				Penguatan Kapasitas Tim Penyuluh Sosial dan Tim Penyuluh Sosial Masyarakat	Orang	70	70			
				Bimtap Pendamping JSLU	Orang	150	150			
				Workshop Kajian Graha Lansia DIY	Kegiatan	1	1			
				Penyuluhan sosial melalui media elektronik	Kali	17	17			
				Workshop Komplementaritas PKH	Kegiatan	1	1			
				Koordinasi Jejaring Penyuluhan	Orang	80	80			
				Publikasi layanan masyarakat melalui Video dan advetorial online	Kali	2	2			
				Sosialisasi Perda Kesejahteraan Lanjut Usia	Lokasi	5	2			
				Penyuluhan Sosial Melalui Media Peragaan	Lokasi	11	11			
				Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi						
				Peningkatan Kapasitas TKSK dan Honor TKSK	orang	78	78			
				Kontribusi PSKS dan Masyarakat Dalam Menangani PMKS Terhadap Program Pemberdayaan Sosial	%	100	100			
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi						

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pemberdayaan dan Rapat-Rapat Koordinasi PSKS	Kab/Kota	5	5			
				Penumbuhan LKS Lansia Melalui Forum LKS LU DIY	lembaga	5	5			
				Bantuan Operasional Karang Taruna DIY, IPSM DIY, Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Badan Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS, BKKS) dan LK3 Teratai	lembaga	4	4			
				Bantuan Operasional (Hibah) Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Distabilitas	lembaga	13	13			
				Bantuan Operasional Komda Lanjut Usia DIY	lembaga	1	1			
				Kontribusi PSKS dan Masyarakat Dalam Menangani PMKS Terhadap Program Pemberdayaan Sosial	%	100	100			
				Bantuan Operasional Komite Distabilitas DIY	lembaga	1	1			
				PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN						
				Persentase Anak Balita Terlantar, Anak Terlantar, Anak yang Berhadapan Hukum, Anak Jalanan, Anak dengan Kedisabilitas, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Pemulung, Orang Dengan HIV AIDS dan Korban Tindak Kekerasan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, memperoleh bimbingan keterampilan, mandiri dan mampu berinteraksi dengan keluarga dan masyarakat	%	6.27	11.26			
				Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal						

No	Ururan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Terlaksananya koordinasi fasilitasi pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dan Korban Perdagangan Orang	tahun	1	1			
				Dukungan terhadap koordinasi pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dan Korban Perdagangan Orang	%	100	100			
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						
				Persentase Anak Balita Terlantar, Anak Terlantar, Anak yang Berhadapan Hukum, Anak Jalanan, Anak dengan Kedisabilitas, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Pemulung, Orang Dengan HIV AIDS dan Korban Tindak Kekerasan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, memperoleh bimbingan keterampilan, mandiri dan mampu berinteraksi dengan keluarga dan masyarakat	%	6.27	11.26			
				Persentase warga binaan yang terpenuhi kebutuhan dasar dan hak-haknya	%	100	104.67			
				Persentase warga binaan yang mampu hidup normatif dalam pengasuhan keluarga	%	82.5	80			
				Persentase warga binaan yang terpenuhi dan terlindungi hak-haknya, mampu hidup mandiri dan berfungsi sosial	%	27.06	27.06			
				Persentase warga binaan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, terlindungi hak-haknya dan mampu berfungsi sosial dalam pengasuhan keluarga	%	41.93	12.36			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Persentase warga binaan yang memiliki kapasitas untuk mandiri dan berfungsi sosial	%	46.67	45			
				Persentase warga binaan balai yang mampu berfungsi sosial dan hidup mandiri serta kembali ke keluarga / masyarakat	%	14.6	18.2			
				Penyediaan Permakanan						
				Penyediaan Permakanan Bagi Klien SLB	Orang	50	50			
				Penyediaan Permakanan Bagi Klien Disabilitas Melalui LKS	Orang	10	10			
				Dukungan Terhadap Pemenuhan Penyediaan Permakanan Bagi Klien Disabilitas	%	100	100			
				Penyediaan Sandang						
				Penyediaan Sandang Bagi Klien SLB	Orang	50	50			
				Penyediaan Sandang Bagi Klien Disabilitas Melalui LKS	Orang	9	9			
				Dukungan Terhadap Pemenuhan Penyediaan Sandang Bagi Klien Disabilitas	%	100	100			
				Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti						
				Pelayanan Kesehatan Klien SLB	Orang	11	11			
				Dukungan Terhadap Pemenuhan Perbekalan Kesehatan Bagi Klien Disabilitas	%	100	100			
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial						
				Bimbingan Fisik, Mental Spiritual dan Sosial Bagi Klien SLB	Orang	50	50			
				Bimbingan Fisik, Mental Spiritual dan Sosial Bagi Klien Disabilitas Melalui LKS	Orang	8	8			
				Dukungan Terhadap Pemenuhan Bimbingan Fisik, Mental Spiritual dan Sosial Bagi Klien Disabilitas	%	100	100			
				Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar						

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penyediaan Akses Pendidikan Bagi Klien SLB	Orang	50	50			
				Penyediaan Akses Pendidikan Bagi Klien Disabilitas Melalui LKS	Orang	12	12			
				Dukungan Terhadap Pemenuhan Penyediaan Akses Pendidikan Bagi Klien Disabilitas	%	100	100			
				Penyediaan Makanan						
				Penyediaan Kebutuhan Permakanan Bagi ABH Melalui LKSA	Anak	30	30			
				Penyediaan Kebutuhan Permakanan Bagi Anak Terlantar Melalui LKSA	Anak	400	400			
				Penyediaan Kebutuhan Permakanan Bagi AMPK Melalui LKSA	Anak	15	15			
				Dukungan Terhadap Pemenuhan Penyediaan Permakanan Bagi Anak Bermasalah Sosial	%	100	100			
				Penyediaan Kebutuhan Permakanan Bagi ABT Melalui LKSA	Anak	100	100			
				Penyediaan Kebutuhan Permakanan Klien RPS	Anak	13	13			
				Penyediaan Sandang						
				Penyediaan Sandang Bagi AMPK Melalui LKSA	Anak	15	15			
				Penyediaan Sandang Bagi Anak Terlantar Melalui LKSA	Anak	400	400			
				Penyediaan Sandang Bagi ABT Melalui LKSA	Anak	100	100			
				Penyediaan Sandang Klien RPS	Anak	13	13			
				Penyediaan Sandang Bagi ABH Melalui LKSA	Anak	30	30			
				Dukungan Terhadap Pemenuhan Sandang Bagi Anak Bermasalah Sosial	%	100	100			
				Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti						
				Pelayanan Kesehatan Anak Terlantar Melalui LKSA	Anak	400	400			
				Pelayanan Kesehatan Klien RPS	Anak	13	13			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Dukungan Terhadap Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Bagi Anak Bermasalah Sosial	%	100	100			
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial						
				Bimbingan Fisik, Mental Spiritual dan Sosial Bagi Klien RPS	Anak	13	13			
				Bimbingan Fisik, Mental Spiritual dan Sosial Bagi AMPK Melalui LKSA	Anak	15	15			
				Bimbingan Fisik, Mental Spiritual dan Sosial Bagi ABH Melalui LKSA	Anak	30	30			
				Bimbingan Fisik, Mental Spiritual dan Sosial Bagi ABT Melalui LKSA	Anak	100	100			
				Bimbingan Fisik, Mental Spiritual dan Sosial Bagi Anak Terlantar Melalui LKSA	Anak	400	400			
				Dukungan Terhadap Pemenuhan Bimbingan Fisik, Mental Spiritual dan Sosial Bagi Anak Bermasalah Sosial	%	100	100			
				Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar						
				Dukungan Terhadap Pemenuhan Penyediaan Akses Pendidikan Bagi Anak Bermasalah Sosial	%	100	100			
				Penyediaan Akses Pendidikan Bagi ABH Melalui LKSA	Anak	30	30			
				Penyediaan Akses Pendidikan Bagi ABT Melalui LKSA	Anak	100	100			
				Penyediaan Akses Pendidikan Bagi Anak Terlantar Melalui LKSA	Anak	400	400			
				Penyediaan Akses Pendidikan Bagi AMPK Melalui LKSA	Anak	15	15			
				Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga						
				Dukungan Terhadap Kegiatan Penelusuran Keluarga	%	100	100			
				Pelayanan Penelusuran Keluarga	Orang	30	30			
				Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga						
				Pelayanan Reunifikasi Ke Klien RPS	Orang	23	12			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Dukungan Terhadap Kegiatan Reunifikasi Keluarga	%	100	100			
				Penyediaan Permakanan						
				Pemberian Bantuan Jaminan Sosial LUT	org	1000	1000			
				Bantuan Permakanan LUT	org	100	100			
				Lanjut usia terlantar terpenuhi hak-haknya	%	100	100			
				Fasilitasi Lanjut Usia Melalui Home Care	org	700	700			
				Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial						
				Lanjut Usia Terlantar terpenuhi hak-hak dasarnya	%	100	100			
				Bedah Kamar Lanjut Usia	Orang	50	50			
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial						
				Peringatan HLUN dan Bhakti Sosial	Orang	2000	2000			
				Lanjut Usia Terlantar terpenuhi hak-hak dasarnya	%	100	100			
				Pelayanan Taman Werdha	Orang	125	125			
				Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari						
				Fasilitasi Pelayanan LUT Melalui Family Support	%	100	100			
				Fasilitasi Pelayanan LUT Melalui Family Support	Orang	50	50			
				Penyediaan Permakanan						
				Kebutuhan dasar permakanan klien dalam shelter terpenuhi	orang	5	5			
				Dukungan terhadap rehabilitasi sosial Gelandangan, Pengemis, Pemulung dan Orang yang mengalami stigma dan/atau diskriminasi	%	100	100			
				Kebutuhan dasar permakanan klien di camp assessment terpenuhi	orang	150	150			
				Penyediaan Sandang						
				Kebutuhan dasar sandang klien di camp assessment terpenuhi	orang	150	150			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Kebutuhan dasar sandang klien dalam shelter terpenuhi	orang	5	5			
				Dukungan terhadap rehabilitasi sosial Gelandangan, Pengemis, Pemulung dan Orang yang mengalami stigma dan/atau diskriminasi	%	100	100			
				Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses						
				Penyediaan tempat tinggal bagi klien dalam shelter terpenuhi	orang	5	5			
				Penyediaan tempat tinggal bagi klien di camp assessment terpenuhi	orang	150	150			
				Dukungan terhadap rehabilitasi sosial Gelandangan, Pengemis, Pemulung dan Orang yang mengalami stigma dan/atau diskriminasi	%	100	100			
				Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti						
				Dukungan terhadap rehabilitasi sosial Gelandangan, Pengemis, Pemulung dan Orang yang mengalami stigma dan/atau diskriminasi	%	100	100			
				Penyediaan pembekalan kesehatan bagi klien di camp assessment terpenuhi	orang	150	150			
				Penyediaan pembekalan kesehatan bagi klien dalam shelter terpenuhi	orang	5	5			
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial						
				Dukungan terhadap rehabilitasi sosial Gelandangan, Pengemis, Pemulung dan Orang yang mengalami stigma dan/atau diskriminasi	%	100	100			
				Bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial bagi klien di camp assessment terpenuhi	orang	150	150			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bagi klien dalam shelter terpenuhi	orang	5	5			
				Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari						
				Bimbingan psikososial bagi klien dalam shelter terpenuhi	orang	5	5			
				Dukungan terhadap rehabilitasi sosial Gelandangan, Pengemis, Pemulung dan Orang yang mengalami stigma dan/atau diskriminasi	%	100	100			
				Bimbingan kewarganegaraan dan psikososial bagi klien di camp assessment terpenuhi	orang	150	150			
				Pemulangan ke Daerah Asal						
				Dukungan terhadap rehabilitasi sosial Gelandangan, Pengemis, Pemulung dan Orang yang mengalami stigma dan/atau diskriminasi	%	100	100			
				Pemulangan ke daerah asal dan/rujukan ke panti/balai sosial	orang	70	102			
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						
				Persentase fakir miskin yang memperoleh bimbingan dan keterampilan berusaha sehingga pendapatan dan asetnya meningkat	%	1.01	1.67			
				Pengangkatan Anak antar WNI						
				Dukungan Terhadap Kegiatan Pengangkatan Anak Antar WNI	%	100	100			
				Rekomendasi Pengangkatan Anak Antar WNI	Orang	30	116			
				Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal						
				Rekomendasi Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal	Orang	1	1			
				Dukungan Terhadap Kegiatan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Facilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga						
				Bantuan Sosial dan Layanan Lokasi		46	36			
				Dukungan Psikososial bagi Korban COVID-19 di Shelter						
				Penanganan Fakir Miskin tepat sasaran	%	100	78.26			
				Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota						
				UEP BKK Graduasi melalui BKK	Orang	825	823			
				Penanganan Fakir Miskin tepat sasaran	%	100	100			
				Pendampingan dan koordinasi penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai	Kabupaten/Kota	5	5			
				Peningkatan kapasitas pengurus KUBE, LKM, USEP KM, FGD KUBE-LKM	Kabupaten/Kota	5	5			
				Seleksi prestasi pendamping dan pengurus KUBE	Kabupaten/Kota	5	5			
				PKH Graduasi Penerima UEP 2018 mampu melaksanakan fungsi sosial	Orang	100	100			
				Pendampingan dan Koordinasi UEP PKH	Kabupaten/Kota	5	5			
				KUBE Pengembangan	KUBE	60	80			
				Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS	Dokumen	1	1			
				PROGRAM PENANGANAN BENCANA						
				Persentase Lanjut Usia Terlantar, Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	%	67.64	68			
				Penyediaan Permakanan						
				Buffer Stock Tanggap Darurat	Paket	500	500			
				Korban Bencana alam dan sosial						
				Korban bencana terpenuhi hak-haknya	%	100	100			
				Penyediaan Sandang						
				Belanja Keperluan Sandang untuk Kelompok Rentan	Paket	46	46			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Korban bencana terpenuhi hak-haknya	%	100	100			
				Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi						
				Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Lokas	1	1			
				Korban bencana terpenuhi hak-haknya	%	100	100			
				Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan						
				Fasilitasi Perawatan Jenazah Terlantar	Orang	30	13			
				Fasilitasi Orang Terlantar kehabisan bekal untuk melanjutkan perjalanan	Orang	286	206			
				Bantuan Air Bersih untuk Penanggulangan Kekeringan	Tangki`	850	466			
				Korban bencana terpenuhi hak-haknya	%	100	100			
				Pelayanan Dukungan Psikososial						
				Fasilitasi Tenaga Pelopor Perdamaian	Orang	104	104			
				Fasilitasi TAGANA dalam rangka Penanggulangan Bencana	Orang	300	300			
				Korban bencana terpenuhi hak-haknya	%	100	100			
				PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN						
				Persentase PSKS dan masyarakat yang mampu menangani PMKS dan menguatnya nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial dalam masyarakat	%	51.59	69.64			
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi						
				Terfasilitasi Ziarah Rombongan di TMP dari Berbagai Lembaga/Instansi se DIY maupun Luar Daerah	Orang	2400	4843			
				Terwujudnya Standarisasi Pemeliharaan dan Pelayanan Memertahankan TMPN dan MPP.	lokasi	2	2			
				Meningkatnya kerapihan dan keindahan TMP.	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pemberian Penghargaan Bagi Keluarga Pahlawan, Pemberian Gelar Pahlawan dan Penghargaan Satya Lencana Kebaktian.	orang	8	8			
				Fasilitasi Peringatan Hari Besar Nasional dan HKSN	orang	100	100			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	DINAS SOSIAL		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN KEBUDAYAAN	KEISTIMEWAAN	YOGYAKARTA		Jumlah PMKS di lapangan tidak bisa diprediksi sehingga menyesuaikan kondisi yang ada	1. Selalu berkoordinasi dengan instansi sosial kab/kota atau terkait, masyarakat dan lembaga non pemerintah dalam penanganan PMKS 2. Proxy Means Test bekerjasama dengan BPS sehingga di harapkan dapat diperoleh gambaran kemiskinan secara riil dengan hasil pemeringkatan tersebut sesuai dengan kondisi di DIY. Aplikasi DTKS Daerah 2021 dalam memilah kategori kemiskinan salah satu	Urusan Wajib a. Urusan Sosial 1) a. Upaya pembuatan aplikasi DTKS Daerah 2021 dengan prioritas untuk pemeringkatan data DTKS yang sudah ditetapkan dengan SK Menteri Sosial menggunakan model dengan BPS sehingga di harapkan dapat diperoleh gambaran kemiskinan secara riil dengan hasil pemeringkatan tersebut sesuai dengan kondisi di DIY. Aplikasi DTKS Daerah 2021 dalam memilah kategori kemiskinan salah satu
				Persentase PSKS dan masyarakat yang mampu menangani PMKS dan menguatnya nilai-nilai keberintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial dalam masyarakat	%	51.59	69.64	Jumlah orang dalam setiap rombongan ziarah wisata tidak bisa diprediksi sebelumnya	Selalu menjalin kerja sama dan koordinasi yang baik dengan instansi sosial kab/kota bersama-sama dengan PSKS dalam penanganan PMKS dan mendukung program kegiatan SKPD	pengukurannya mengadopsi angka garis kemiskinan yang dikeluarkan oleh BPS, dengan demikian akan diketahui Data Mikro/BNBA masyarakat sesuai dengan kategori sangat miskin, miskin, hampir miskin, rentan miskin, dan tidak miskin. Harapannya, masyarakat yang menerima bantuan sesuai dengan kondisi ekonominya. b. Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4/INSTR/2020 Tentang Percepatan Pemutakhiran Data
				Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan						
				Santunan Anak Terdampak Pandemi COVID-19	anak	1734	1734			
				Rehab Museum Monumen Pahlawan Pancasila	lokasi	1	1			
				Penyusunan Aplikasi DTKS	kegiatan	1	1			

No	Ururan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pemeliharaan Tetenger dan Gapura	lokasi	6	6			Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, Dinas Sosial DIY mengusulkan pengembangan sistem untuk memfasilitasi percepatan perbaikan data kemiskinan (DTKS) agar menghasilkan data yang tepat, akurat, dan bersifat satu data. 2) Dalam penanganan urusan sosial, Pemerintah Daerah DIY melalui Dinas Sosial DIY tidak hanya menangani permasalahan sosial PMKS, namun juga terlibat langsung mendukung tumbuh kembangnya PSKS melalui penguatan kapasitas SDM. PSKS sebagai mitra Dinas Sosial DIY dan Pemerintah Daerah DIY berperan serta untuk menjaga, menciptakan, dan sebagai penunjang keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial. Tahun 2021 Pemerintah Daerah DIY melalui Dinas Sosial DIY mendorong tumbuh kembang PSKS dengan rincian : Jenis PSKS Target 2021 Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) 45 orang Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) 40 orang Karang Taruna 100 orang Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) 55 orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 78 orang Dunia Usaha (CSR) 50 orang
				Penguatan Nilai-nilai Kesetiakawanan Sosial Melalui Restorasi Sosial	lokasi	60	60			
				Dukungan pembinaan dan pengembangan kesejarahan dalam penyelenggaraan keistimewaan	%	100	100			
				Ziarah Wisata Pengenalan Nilai-nilai Kepahlawanan	orang	600	600			
				Olimpiade Pahlawan	orang	60	60			
				Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Lestari Budaya	KUBE	10	10			
				Sosialisasi Perda Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia	lokasi	4	4			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Penanaman Nilai-Nilai K3S / Nasionalisme 1000 orang Kesejahteraan Keluarga Pahlawan 7 orang Taruna Siaga Bencana (TAGANA) 55 orang Kesetiakawanan Sosial 4400 orang
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Gaji dan tunjangan ASN bulan 12 12 Dukungan terhadap administrasi % 100 100 perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan komponen instalasi dan jenis 26 26 elektronika Dukungan terhadap administrasi % 100 100 perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jasa keamanan kantor dan tempat bulan 12 12 kerja Penyediaan alat tulis kantor bulan 12 12 Dukungan terhadap administrasi % 100 100 perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Dukungan terhadap administrasi % 100 100 perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Penyediaan peralatan kebersihan jenis 15 15 dan bahan pembersih Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pembelian isi tabung gas dapur tahung 433 433 Dukungan terhadap administrasi % 100 100 perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jenis	14	14			
				Dukungan terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
				Penyediaan surat kabar lokal dan majalah	bulan	12	12			
				Dukungan terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	%	100	100			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
				Dukungan terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	%	100	100			
				Konsultasi dan koordinasi dalam daerah	tahun	1	1			
				Makanan dan minuman rapat	tahun	1	1			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
				Penyediaan Materai	lembar	90	90			
				Dukungan terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	%	100	100			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
				Dukungan terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	%	100	100			
				Pembayaran tagihan rekening air	bulan	12	12			
				Pembayaran tagihan rekening internet	bulan	12	12			
				Pembayaran tagihan rekening listrik	bulan	12	12			
				Pembayaran tagihan rekening telephone	bulan	12	12			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	lokasi	1	1			
				Tertib administrasi keuangan, barang dan kepegawaian	bulan	12	12			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Dukungan terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	%	100	100			
				Retribusi sampah	bulan	12	12			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
				Pemeliharaan kendaraan dinas dan operasional	tahun	1	1			
				Dukungan terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	%	100	100			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
				Pemeliharaan ringan/sedang dan berat bangunan gedung tempat kerja	lokasi	1	1			
				Dukungan terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	%	100	100			
				pemeliharaan rumah dan gedung kantor	lokasi	1	1			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
				Dukungan terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	%	100	100			
				Pemeliharaan peralatan gedung kantor	tahun	1	1			
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						
				Persentase warga binaan yang terpenuhi dan terlindungi hak-haknya, mampu hidup mandiri dan berfungsi sosial	%	27.06	27.06			
				Penyediaan Permakanan						
				Penyediaan Makanan	orang	185	152			
				Kontribusi Pelayanan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Warga Binaan Balai Terhadap Program Perlindungan dan Rehabilitasi	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penyanggah Disabilitas sebanyak 46 orang yang mampu hidup mandiri dan berfungsi sosial						
				Penyediaan Sandang						
				Kontribusi Pelayanan Sosial Bagi Penyanggah Disabilitas Warga Binaan Balai Terhadap Program Perlindungan dan Rehabilitas Penyanggah Disabilitas sebanyak 46 orang mampu hidup mandiri	%	100	100			
				Penyediaan Sandang	orang	185	185			
				Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses						
				Kontribusi Pelayanan Sosial Bagi Penyanggah Disabilitas Warga Binaan Balai Terhadap Program Perlindungan dan Rehabilitas Penyanggah Disabilitas sebanyak 46 orang mampu hidup mandiri	%	100	100			
				Penyediaan Asrama yang mudah diakses	tahun	1	1			
				Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti						
				Kontribusi Pelayanan Sosial Bagi Penyanggah Disabilitas Warga Binaan Balai Terhadap Program Perlindungan dan Rehabilitas Penyanggah Disabilitas sebanyak 46 orang mampu hidup mandiri	%	100	100			
				Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	orang	185	185			
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial						
				Honor Instruktur	tahun	1	1			
				Pengadaan bahan percontohan	tahun	1	1			
				Terlaksananya kegiatan PBK	orang	18	18			
				Makan minum aktivitas lapangan	kegiatan	6	6			
				Kontribusi Pelayanan Sosial Bagi Penyanggah Disabilitas Warga Binaan Balai Terhadap Program Perlindungan dan Rehabilitas	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penyanggang Disabilitas sebanyak 46 orang mampu hidup mandiri						
				Pengadaan ATK kelas	jenis	9	9			
				Makan minum rapat	kegiatan	4	4			
				Honor narasumber kegiatan	kegiatan	5	3			
				Pengadaan ATK PPKS	jenis	7	7			
				Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas						
				Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Identitas Anak	orang	19	22			
				Kontribusi Pelayanan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Warga Binaan Balai Terhadap Program Perlindungan dan Rehabilitas	%	100	100			
				Penyanggang Disabilitas sebanyak 46 orang mampu hidup mandiri						
				Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar						
				Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	kali	36	36			
				Kontribusi Pelayanan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Warga Binaan Balai Terhadap Program Perlindungan dan Rehabilitas	%	100	100			
				Penyanggang Disabilitas sebanyak 46 orang mampu hidup mandiri						
				Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga						
				Penjajakan Lokasi Calon PPKS	op	84	84			
				Kontribusi Pelayanan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Warga Binaan Balai Terhadap Program Perlindungan dan Rehabilitas	%	100	100			
				Penyanggang Disabilitas sebanyak 46 orang mampu hidup mandiri						
				Penjemputan	op	90	90			
				Penelusuran Keluarga	op	18	18			
				Monitorinh	op	48	48			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Motivasi dan Seleksi Calon PPKS	op	90	90			
				Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga						
				Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	op	12	12			
				Kontribusi Pelayanan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Warga Binaan Balai Terhadap Program Perlindungan dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas sebanyak 46 orang mampu hidup mandiri	%	100	100			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
				Dukungan 100% terhadap administrasi keuangan perangkat daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100	100			
				Gaji ASN	tahun	1	1			
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						
				Seragam kerja harian	buah	8	8			
				Administrasi kepegawaian perangkat daerah terlaksana dengan baik	%	100	100			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
				Dukungan 100% terhadap administrasi umum perangkat daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100	100			
				Penyediaan alat listrik dan elektronik	jenis	14	14			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
				Penyediaan alat perlengkapan	jenis	7	7			
				Penyediaan alat perlengkapan (keamanan)	jenis	3	3			
				Dukungan 100% terhadap administrasi umum perangkat daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100	100			
				Penyediaan alat tulis kantor (pengelolaan arsip)	jenis	12	12			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penyediaan alat tulis kantor (umum)	jenis	37	37			
				Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih (pengelolaan arsip)	jenis	9	9			
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
				Pengisian tabung pemadam kebakaran	tabung	2	2			
				Dukungan 100% terhadap administrasi umum perangkat daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100	100			
				Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kendaraan	jenis	4	4			
				Penyediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	jenis	12	12			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
				Pengisian tabung gas dapur	tabung	180	180			
				Dukungan 100% terhadap administrasi umum perangkat daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100	100			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
				Dukungan 100% terhadap administrasi umum perangkat daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100	100			
				Penyediaan barang cetakan (pengelolaan arsip)	jenis	7	7			
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jenis	6	6			
				Publikasi (leaflet)	lembar	600	600			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
				Penyediaan surat kabar dan majalah lokal	bulan	12	12			
				Dukungan 100% terhadap administrasi umum perangkat daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penyediaan Bahan/Material						
				Penyediaan bibit tanaman	tahun	1	1			
				Dukungan 100% terhadap administrasi umum perangkat daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100	100			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
				Dukungan 100% terhadap administrasi umum perangkat daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100	100			
				Koordinasi dan konsultasi dalam daerah terlaksana dengan baik	op	66	66			
				Konsumsi rapat terpenuhi sesuai kebutuhan	os	672	672			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
				Pengadaan trolley gas	unit	1	1			
				Pengadaan kursi sofa laktasi	unit	1	1			
				Pengadaan almari arsip	unit	2	2			
				Pengadaan oven	unit	1	1			
				Pengadaan printer	unit	2	2			
				Pengadaan termometer	buah	2	2			
				Pengadaan Air Conditioner (AC)	unit	1	1			
				Pengadaan meja dapur/ bakery	buah	2	2			
				Pengadaan rice cooker	buah	3	3			
				Pengadaan mimbar mushola	unit	1	1			
				Pengadaan kulkas	buah	2	2			
				Pengadaan perlengkapan permainan klien/ anak	paket	1	1			
				Pengadaan kursi taman lipat	unit	1	1			
				Pengadaan sekat mushola	unit	1	1			
				Pengadaan jam dinding	buah	10	10			
				Pengadaan dispenser	buah	5	5			
				Dukungan 100% terhadap sarana prasarana aparatur yang	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah						
				Pengadaan kursi taman	unit	3	3			
				Pengadaan kipas angin	unit	6	6			
				Pengadaan UPS	unit	2	2			
				Pengadaan kompor gas	unit	2	2			
				Pengadaan timbangan BB	buah	4	4			
				Pengadaan televisi	unit	2	2			
				Pengadaan networking TPLINK	buah	1	1			
				Pengadaan komputer PC	unit	2	2			
				Pengadaan meja kerja	unit	1	1			
				Pengadaan meja dan kursi	set	0	0			
				Pengadaan tensimeter	buah	2	2			
				Pengadaan sound system	paket	1	1			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
				Dukungan 100% terhadap penyediaan jasa penunjang yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100	100			
				Penyediaan Materai 3000 dan 6000	lembar	200	200			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
				Pembayaran tagihan rekening listrik	titik	4	4			
				Pembayaran tagihan rekening telepon	titik	1	1			
				Dukungan 100% terhadap penyediaan jasa penunjang yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100	100			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
				Dukungan 100% terhadap penyediaan jasa penunjang yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100	100			
				Tertib administrasi keuangan, barang dan kepegawaian	bulan	12	12			
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	lokasi	1	1			

No	Ururan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Jasa keamanan kantor dan tempat kerja	lokasi	1	1			
				Pembayaran retribusi sampah	bulan	12	12			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
				Service/ penggantian suku cadang kendaraan dinas roda 2 dan roda 4	unit	4	4			
				Bahan bakar minyak/gas dan pelumas kendaraan dinas roda 2 dan roda 4	bulan	12	12			
				Pembayaran pajak STNK roda 2 dan roda 4	unit	4	4			
				Dukungan 100% terhadap pemeliharaan sarana prasarana yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100	100			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
				Pemeliharaan instalasi air limbah/kotor	kali	10	10			
				Pemeliharaan gedung dan taman poin manda	paket	1	1			
				Pemeliharaan saluran air minum/bersih	jenis	2	2			
				Perbaikan water torn	paket	1	1			
				Dukungan 100% terhadap pemeliharaan sarana prasarana yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100	100			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
				Terpeliharanya peralatan kantor	jenis	14	14			
				Terpeliharanya perlengkapan kantor	jenis	5	5			
				Dukungan 100% terhadap pemeliharaan sarana prasarana yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100	100			
				Terpeliharanya alat bermesin	jenis	3	3			
				Terpeliharanya soundsystem	unit	2	2			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penyediaan BBM untuk pemotong rumput dan genset	liter	312	312			
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						
				Persentase warga binaan yang memiliki kapasitas untuk mandiri dan berfungsi sosial	%	46.67	45			
				Penyediaan Permakanan						
				Kontribusi 45% Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti (Perempuan PMKS) terhadap Program Rehabilitasi Sosial sebanyak 27 orang Perempuan PMKS yang Tersertifikasi (klien reguler)	%	100	100			
				Tersedianya permakanan	orang	70	70			
				Penyediaan Sandang						
				Kontribusi 45% Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti (Perempuan PMKS) terhadap Program Rehabilitasi Sosial sebanyak 27 orang Perempuan PMKS yang Tersertifikasi (klien reguler)	%	100	100			
				Tersedianya sandang	orang	70	70			
				Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti						
				Tersedianya perbekalan kesehatan	tahun	1	1			
				Kontribusi 45% Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti (Perempuan PMKS) terhadap Program Rehabilitasi Sosial sebanyak 27 orang Perempuan	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				PMKS yang Tersertifikasi (klien reguler)						
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial						
				Kontribusi 45% Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti (Perempuan PMKS) terhadap Program Rehabilitasi Sosial sebanyak 27 orang Perempuan PMKS yang Tersertifikasi (klien reguler)	%	100	100			
				Tersedianya bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	orang	70	70			
				Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari						
				Kontribusi 45% Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti (Perempuan PMKS) terhadap Program Rehabilitasi Sosial sebanyak 27 orang Perempuan PMKS yang Tersertifikasi (klien reguler)	%	100	100			
				Tersedianya bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	orang	70	70			
				Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar						
				Kontribusi 45% Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti (Perempuan PMKS) terhadap Program Rehabilitasi Sosial sebanyak 27 orang Perempuan PMKS yang Tersertifikasi (klien reguler)	%	100	100			
				Tersedianya pemberian bimbingan keterampilan dasar	orang	70	70			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				<p>Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak</p> <p>Kontribusi 45% Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti (Perempuan PMKS) terhadap Program Rehabilitasi Sosial sebanyak 27 orang Perempuan PMKS yang Tersertifikasi (klien reguler)</p> <p>Terfasilitasinya Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak</p> <p>Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar</p> <p>Tersedianya akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar</p> <p>Kontribusi 45% Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti (Perempuan PMKS) terhadap Program Rehabilitasi Sosial sebanyak 27 orang Perempuan PMKS yang Tersertifikasi (klien reguler)</p> <p>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA</p> <p>Kontribusi 45% Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti (Perempuan PMKS) terhadap Program Rehabilitasi Sosial sebanyak 27 orang Perempuan</p>						
						100	100			
					tahun	1	1			
						1	1			
						100	100			
						100	100			

No	Ururan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				PMKS yang Tersertifikasi (klien regular)						
				Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi, dan pembinaan pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	tahun	1	1			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
				Gaji ASN	Tahun	1	1			
				Dukungan 100% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas	%	100	100			
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						
				Dukungan terhadap sarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Belanja Pakaian Kerja Lapangan untuk Non PNS	Stel	16	16			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
				Dukungan 100% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas	%	100	100			
				Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik	Jenis	9	9			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
				Perlengkapan Arsip	Tahun	1	1			
				Perlengkapan Keamanan	Lokasi	2	2			
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis	43	43			
				Dukungan 100% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas	Tahun	100	100			
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
				Dukungan 100% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Jenis	7	7			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
				Pengisian Tabung Gas	Tabung	720	720			
				Dukungan 100% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas	%	100	100			
				Alat-Alat Perlengkapan Dapur	Tahun	1	1			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
				Belanja Cetak Leaflet	Lembar	600	600			
				Dukungan 100% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas	%	100	100			
				Belanja Penggandaan	Bulan	12	12			
				Belanja Cetak	Buku	36	36			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
				Dukungan 100% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas	%	100	100			
				Belanja Surat Kabar/ Majalah	Bulan	12	12			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
				Belanja Makan dan Minum Rapat	Orang/ Kali	548	548			
				Belanja Rapat Evaluasi Permakanan	Orang/ Kali	24	24			
				Dukungan 100% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas	%	100	100			
				Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah	Orang/ Kali	55	55			
				Rapat Pembinaan Pegawai Non PNS	Orang/ Kali	90	90			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
				Dukungan terhadap sarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Pompa Air	Unit	2	2			
				Radio Central	Paket	1	1			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat						

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penyediaan Materai 10.000	Buah	186	186			
				Dukungan 100% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas	%	100	100			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
				Belanja Rekening Air	m3	4615	4615			
				Belanja Rekening Listrik	kwh	71172	71172			
				Belanja Rekening Telepon	Bulan	12	12			
				Dukungan 100% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas	%	100	100			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
				Honorarium Pengelola Kepegawaian	Bulan	12	12			
				Jasa Tenaga Keamanan	Paket	1	1			
				Jasa Tenaga Kebersihan	Paket	1	1			
				Honorarium Pengelola Keuangan	Bulan	12	12			
				Dukungan 100% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas	%	100	100			
				Belanja Retribusi Sampah	Paket	224	224			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
				Belanja Jasa Kir	Bulan	12	12			
				Belanja Surat Tanda Kendaraan Nomor Kendaraan	Bulan	12	12			
				Belanja Jasa Service	Bulan	12	12			
				Dukungan terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	Bulan	12	12			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
				Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Paket	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Dukungan terhadap sarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
				Penyedotan Air Limbah	Kali	27	27			
				Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum / Bersih	Tahun	1	1			
				Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	Tahun	1	1			
				Dukungan terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Tahun	1	1			
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						
				Persentase warga binaan balai yang mampu berfungsi sosial dan hidup mandiri serta kembali ke keluarga / masyarakat	%	14.6	18.2			
				Penyediaan Permakanan						
				Penyedia Makan	Orang	300	300			
				Honorarium Juru Masak	Orang	4	4			
				Kontribusi 14,4% Pelayanan Sosial Bagi Gelandangan, Pengemis, Pemulung, dan Eks Psikotik Warga Binaan Balai Terhadap Program Perlindungan dan Rehabilitasi Gelandangan, Pengemis, Pemulung dan Eks Psikotik sebanyak 10 Orang (Gelandang Pemulung Pengemis yang Mampun)	%	100	100			
				Penyediaan Sandang						
				Alat-Alat Perlengkapan Kebutuhan dasar Klien	Tahun	1	1			
				Belanja Peralatan Kebersihan Klien	Bulan	12	12			

No	Ururan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Kontribusi 14,4% Pelayanan Sosial Bagi Gelandangan, Pengemis, Pemulung, dan Eks Psikotik Warga Binaan Balai Terhadap Program Perlindungan dan Rehabilitasi Gelandangan, Pengemis, Pemulung dan Eks Psikotik sebanyak 10 Orang (Gelandang Pemulung Pengemis yang Mampan)	%	100	100			
				Belanja Pakaian Harian	Tahun	1	1			
				Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti						
				Kontribusi 14,4% Pelayanan Sosial Bagi Gelandangan, Pengemis, Pemulung, dan Eks Psikotik Warga Binaan Balai Terhadap Program Perlindungan dan Rehabilitasi Gelandangan, Pengemis, Pemulung dan Eks Psikotik sebanyak 10 Orang (Gelandang Pemulung Pengemis yang Mampan)	%	100	100			
				Belanja Obat-Obatan	Jenis	57	57			
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial						
				Kontribusi 14,4% Pelayanan Sosial Bagi Gelandangan, Pengemis, Pemulung, dan Eks Psikotik Warga Binaan Balai Terhadap Program Perlindungan dan Rehabilitasi Gelandangan, Pengemis, Pemulung dan Eks Psikotik sebanyak 10 Orang (Gelandang Pemulung Pengemis yang Mampan)	%	100	100			
				Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Orang	300	300			
				Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari						
				Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Orang	17	17			
				Kontribusi 14,4% Pelayanan Sosial Bagi Gelandangan, Pengemis,	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				<p>Pemulung, dan Eks Psikotik Warga Binaan Balai Terhadap Program Perlindungan dan Rehabilitasi Gelandangan, Pengemis, Pemulung dan Eks Psikotik sebanyak 10 Orang (Gelandang Pemulung Pengemis yang Mampan)</p> <p>Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar</p> <p>Bimbingan Ketrampilan Dasar Orang 300 300</p> <p>Kontribusi 14,4% Pelayanan Sosial Bagi Gelandangan, Pengemis, Pemulung, dan Eks Psikotik Warga Binaan Balai Terhadap Program Perlindungan dan Rehabilitasi Gelandangan, Pengemis, Pemulung dan Eks Psikotik sebanyak 10 Orang (Gelandang Pemulung Pengemis yang Mampan) 100 100</p> <p>Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar</p> <p>Foto Copy Pelayanan WBS (Rujukan) Tahun 1 1</p> <p>Perawatan dan Pengobatan Lokal Tahun 1 1</p> <p>Kontribusi 14,4% Pelayanan Sosial Bagi Gelandangan, Pengemis, Pemulung, dan Eks Psikotik Warga Binaan Balai Terhadap Program Perlindungan dan Rehabilitasi Gelandangan, Pengemis, Pemulung dan Eks Psikotik sebanyak 10 Orang (Gelandang Pemulung Pengemis yang Mampan) 100 100</p> <p>Alat-Alat Perlengkapan Kesehatan Tahun 1 1</p> <p>Pemulangan ke Daerah Asal</p> <p>Perjalanan Dinas dalam Daerah Resosialisasi Koordinasi Tahun 1 1</p> <p>Perjalanan Dinas dalam Daerah Home Visit Tahun 1 1</p> <p>Kontribusi 14,4% Pelayanan Sosial Bagi Gelandangan, Pengemis, 100 100</p>						

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pemulung, dan Eks Psikotik Warga Binaan Balai Terhadap Program Perlindungan dan Rehabilitasi Gelandangan, Pengemis, Pemulung dan Eks Psikotik sebanyak 10 Orang (Gelandang Pemulung Pengemis yang Mampan)						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
				Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	12	12			
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						
				Seragam Kerja Harian	buah	38	38			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	jenis	17	17			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
				Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	tabung	7	7			
				Pengisian Tabung Gas (Oksigen & Elpiji 12 kg)	tabung	268	268			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
				Belanja Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	bulan	12	12			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
				Penyediaan Bahan Bacaan Surat Kabar	bulan	12	12			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
				Penyediaan Makan Minum Rapat	ok	884	884			
				Perjalanan Dinas Dalam Daerah	oh	96	96			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
				Pengadaan Toren Air	buah	5	5			
				Pengadaan Printer	unit	3	3			
				Pengadaan Mesin Cuci	buah	1	1			
				Pengadaan Tabung Gas Oksigen	buah	3	3			
				Pengadaan Alat Pendingin (AC dan Kipas Angin)	unit	12	12			

No	Ururan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pengadaan Komputer dan Laptop	unit	6	6			
				Pengadaan CCTV	paket	1	1			
				Pengadaan Pompa Air	buah	3	3			
				Pengadaan Handy Talky (HT)	buah	3	3			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
				Penyediaan Materai Rp10.000	lembar	75	75			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
				Pembayaran Tagihan Listrik	bulan	12	12			
				Pembayaran Tagihan Telepon	bulan	12	12			
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
				Penyediaan Kertas dan Cover	jenis	6	6			
				Penyediaan Alat Rumah Tangga Kantor	jenis	4	4			
				Penyediaan Batu Baterai	buah	3	3			
				Penyediaan Peralatan Kebersihan	jenis	9	9			
				Penyediaan Perabot Kantor	jenis	16	16			
				Penyediaan Flashdisk	buah	4	4			
				Penyediaan ATK	jenis	34	34			
				Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan	bulan	12	12			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
				Pembayaran Honorarium Pengurus Barang	bulan	12	12			
				Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan	bulan	12	12			
				Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan	bulan	12	12			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
				Tersedianya BBM Untuk Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4	bulan	12	12			
				Service Kendaraan Dinas Roda 2	unit	3	3			
				Tersedianya Ban Untuk Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4	buah	10	10			
				Pembayaran Pajak STNK Roda 2 dan Roda 4	unit	5	5			
				Tersedianya Accu Untuk Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4	buah	5	5			
				Service Kendaraan Dinas Roda 4	unit	2	2			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
				Belanja Modal Asrama	paket	1	1			
				Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	paket	1	1			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
				Pemeliharaan Peralatan Alat Kantor dan Rumah Tangga	paket	1	1			
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						
				Persentase warga binaan yang mampu hidup normatif dalam pengasuhan keluarga	%	82.5	80			
				Penyediaan Permakanan						
				Terbayarnya Honor Juru Masak	bulan	12	12			
				Tersedianya Kebutuhan Dasar Permakanan Klien	bulan	12	12			
				Penyediaan Sandang						
				Tersedianya Kebutuhan Dasar Sandang Klien	paket	1	1			
				Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti						
				Kunjungan Tenaga Medis	bulan	12	12			
				Tersedianya Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	bulan	12	12			
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial						
				Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual, & Sosial	bulan	12	12			
				Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari						
				Terbayarnya Honor Pramusal	bulan	12	12			
				Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	bulan	12	12			
				Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar						
				Terlaksananya Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	bulan	12	12			
				Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar						

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Terlaksananya Akses Kelayanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	bulan	12	12			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		0	0			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
				Terbayarnya Gaji ASN dan Nabab	Tahun	1	1			
				Kelancaran administrasi perkantoran terkait penyediaan gaji ASN dan Nabab	%	100	100			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
				Dukungan terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Tersedianya Alat listrik dan elektronik	Jenis	18	18			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
				Dukungan terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Tersedianya Buku Agenda Surat Keluar-Masuk	Buah	34	34			
				Tersedianya Bendera	Buah	2	2			
				Tersedianya ATK	JENIS	46	46			
				Tersedianya Bahan Cetak	JENIS	2	2			
				Tersedianya Kertas dan Cover	Bahan Cetak	3	3			
				Tersedianya Peralatan perlengkapan anak asuh	Paket	1	1			
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
				Tersedianya Pompa Air	Buah	5	5			
				Tersedianya Compressor	Buah	2	2			
				Tersedianya Alat Pendingin/Almari Es	Buah	3	3			
				Tersedianya Alat Pembersih	Buah	4	4			
				Tersedianya Pengisian tabung pemadam kebakaran	Tabung	6	6			
				Tersedianya Pompa Air	Buah	5	5			
				Tersedianya Alat-Alat Rumah Tangga	Jenis	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Dukungan terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Tersedianya Alat dapur	Jenis	5	5			
				Tersedianya Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Jenis	23	23			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
				Dukungan terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Terisinya tabung gas	Tabung	384	384			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
				Tersedianya Penggandaan	Lembar	105950	105950			
				Dukungan terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Tersedianya Bahan Cetak	Jenis	2	2			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
				Tersedianya surat kabar lokal dan Nasional	Lokasi	2	2			
				Dukungan terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
				Dukungan terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Terlaksananya Perjalanan dinas dalam daerah	Op	68	68			
				Tersedianya makan minum rapat	Os	740	740			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
				Kelancaran administrasi perkantoran terkait penyediaan jasa.	%	100	100			
				Terbayarnya tagihan rekening Telpon	Lokasi	2	2			
				Terbayarnya tagihan rekening air	Lokasi	2	2			
				Terbayarnya tagihan rekening listrik	Lokasi	2	2			

No	Ururan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
				Tersedianya Jasa keamanan kantor	Paket	1	1			
				Kelancaran administrasi perkantoran terkait penyediaan jasa.	%	100	100			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
				Terbayarnya honorarium Pengelola Keuangan	Ob	72	72			
				Tersedianya Jasa kebersihan kantor	Paket	1	1			
				Tersedianya Jasa Retribusi sampah	Paket	12	12			
				terbayarnya honorarium pengurus barang pembantu	bulan	12	12			
				Kelancaran administrasi perkantoran terkait penyediaan jasa.	%	100	100			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
				Kebutuhan pemeliharaan rutin kendaraan dinas / operasional, gedung kantor terpenuhi	%	100	100			
				Tersedianya BBM	Liter	19293	20327			
				Tersedianya KIR kendaraan roda 4	Unit	4	4			
				Tersedianya Pelumas mesin solar	Galon	31	31			
				Tersedianya suku cadang kendaraan dinas	Unit	11	11			
				Terbayarnya pajak STNK	Unit	10	10			
				Tersedianya Pelumas mesin bensin	Liter	54	54			
				Tersedianya Service kendaraan	Unit	11	11			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
				Tersedianya Konsultan Perencana	Paket	1	1			
				Kebutuhan pemeliharaan rutin kendaraan dinas / operasional, gedung kantor terpenuhi	%	100	100			
				Tersedianya makan minum rapat	Os	50	50			
				Tersedianya Rehab Pagar dan buat ruang tamu protokol Covid19	Paket	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
				Kebutuhan pemeliharaan rutin kendaraan dinas / operasional, gedung kantor terpenuhi	%	100	100			
				Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jenis	14	14			
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						
				Persentase warga binaan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, terlindungi hak-haknya dan mampu berfungsi sosial dalam pengasuhan keluarga	%	41.93	12.36			
				Pengasuhan						
				Terpenuhinya kebutuhan dasar warga binaan dan terpenuhinya hak-haknya dan mampu berfungsi sosial	%	100	100			
				Tersedianya pengasuhan untuk 125 anak	Paket	1	1			
				Penyediaan Makanan						
				Tersedianya Permakanaan klien	Paket	1	1			
				Terpenuhinya kebutuhan dasar warga binaan dan terpenuhinya hak-haknya dan mampu berfungsi sosial	%	100	100			
				Penyediaan Sandang						
				Terpenuhinya kebutuhan dasar warga binaan dan terpenuhinya hak-haknya dan mampu berfungsi sosial	%	100	100			
				Tersedianya Pakaian khusus klien	Paket	1	1			
				Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti						
				Tersedianya alat dan bahan kebersihan	Paket	1	1			
				Tersedianya obat-obatan	Paket	1	1			
				Terpenuhinya kebutuhan dasar warga binaan dan terpenuhinya hak-haknya dan mampu berfungsi sosial	%	100	100			
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial						

No	Ururan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Terpenuhinya kebutuhan dasar warga binaan dan terpenuhinya hak-haknya danmampu berfungsi sosial	%	100	100			
				Tersedianya tenaga ahli/instruktur/ narasumber	Jpl	840	840			
				Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar						
				Tersedianya Perawatan dan pengobatan lokal	Paket	1	1			
				Terbayarnya honor non PNS	Ob	480	480			
				Terpenuhinya kebutuhan dasar warga binaan dan terpenuhinya hak-haknya danmampu berfungsi sosial	%	100	100			
				Terselenggaranya retribusi	Paket	1	1			
				Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga						
				Terpenuhinya kebutuhan dasar warga binaan dan terpenuhinya hak-haknya dan mampu berfungsi sosial	%	100	100			
				Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Op	9	9			
				Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga						
				Terlaksananya sewa sarana mobilitas darat	Unit	1	1			
				Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	Op	2	2			
				Terpenuhinya kebutuhan dasar warga binaan dan terpenuhinya hak-haknya danmampu berfungsi sosial	%	100	100			
				Terlaksananya perjalanan dinas dalam daelah	Op	24	24			
				Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti						
				Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	Op	6	6			
				Terlaksananya perjalanan dalam daerah	Op	36	36			
				Terpenuhinya kebutuhan dasar warga binaan dan terpenuhinya hak-haknya danmampu berfungsi sosial	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Terlaksananya sewa sarana mobilitas darat	Unit	3	3			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		0	0			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
				Dukungan 66.72 % terhadap persentase terwujudnya administrasi keuangan perangkat daerah dan pencapaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	12	12			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
				Dukungan 0.30 % terhadap persentase terwujudnya administrasi umum perangkat daerah dan pencapaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Penyediaan alat listrik	jenis	14	14			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
				Alat/ Bahan Kegiatan Kantor-	jenis	3	3			
				Alat/Bahan untuk kegiatan kantor lainnya						
				Alat/ Bahan Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	jenis	35	35			
				Alat/ Bahan Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	jenis	2	2			
				Alat/ Bahan Kegiatan Kantor- Kertas Cover	jenis	5	5			
				Dukungan 8.71 % terhadap persentase terwujudnya administrasi umum perangkat daerah dan pencapaian kinerja	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD						
				Perlengkapan Arsip	jenis	2	2			
				Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	bulan	12	12			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
				Penyediaan tabung gas LPG dapur	tabung	678	678			
				Dukungan 2.30 % terhadap persentase terwujudnya administrasi umum perangkat daerah dan pencapaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
				Belanja barang cetakan dan penggandaan	jenis	9	9			
				Dukungan 0.27 % terhadap persentase terwujudnya administrasi umum perangkat daerah dan pencapaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
				Belanja Surat Kabar	bulan	24	24			
				Dukungan 0.09 % terhadap persentase terwujudnya administrasi umum perangkat daerah dan pencapaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Belanja Majalah	bulan	10	10			

No	Ururan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
				Dukungan 0.19 % terhadap % persentase terwujudnya administrasi umum perangkat daerah dan pencapaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD		100	100			
				Rapat-rapat dan koordinasi dalam daerah	bulan	12	12			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
				Belanja Modal Sarana dan Prasarana Kantor	jenis	11	11			
				Dukungan 2.60 % terhadap % persentase terwujudnya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dan pencapaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD		100	100			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
				Dukungan 0.02% terhadap % persentase terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan pencapaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD		100	100			
				Pembelian Materai Rp. 10.000	buah	90	90			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
				Pembayaran tagihan rekening listrik	bulan	12	12			
				Pembayaran tagihan rekening air	bulan	12	12			
				Dukungan 2,7% terhadap % persentase terwujudnya Penyediaan		100	100			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan pencapaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD						
				Pembayaran tagihan rekening telepon	bulan	12	12			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
				Alat/ Bahan Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	jenis	3	3			
				Belanja bahan-bahan lainnya	jenis	6	6			
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	paket	1	1			
				Honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan	bulan	12	12			
				Alat/bahan untuk kegiatan kantor- alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya	jenis	8	8			
				Dukungan 9,46 % terhadap persentase terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan pencapaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Penyediaan Jasa Pengolahan Sampah	bulan	24	24			
				Honorarium penanggungjawaban pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan	bulan	12	12			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
				Dukungan 1,91 % terhadap persentase terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan pencapaian kinerja	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD						
				Penggantian suku cadang kendaraan dinas	jenis	6	6			
				Belanja jasa service kendaraan dinas operasional kantor	unit	12	12			
				Belanja BBM dan minyak pelumas kendaraan dinas	bulan	12	12			
				Pembayaran pajak, bea dan perijinan	unit	12	12			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
				Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Berupa Pemeliharaan Kamar Mandi	paket	5	5			
				Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Berupa Pemeliharaan Gedung Ketrampilan Wisma dan Pagar	paket	1	1			
				Pengolahan air limbah : penyedotan WC	kali	8	8			
				Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Berupa Pemeliharaan Saluran Air Hujan dan Septiktank	paket	0	0			
				Dukungan 4.30 % terhadap persentase terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan pencapaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD						
				Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Berupa Pemeliharaan Aula	paket	0	0			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
				Pemeliharaan sarana dan prasaran kantor	jenis	11	11			
				Dukungan 0,44 % terhadap persentase terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan pencapaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						
				Persentase warga binaan yang terpenuhi kebutuhan dasar dan hak-haknya	%	100	104.67			
				Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas						
				Sewa kendaraan bermotor penumpang	unit	0	0			
				Dukungan 1,10% terhadap persentase terwujudnya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti dan pencapaian kinerja program rehabilitasi sosial yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	0	0			
				Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	orang/kegiatan	0	0			
				Penyediaan Permakanan						
				Pembayaran jasa tenaga juru masak	bulan	12	12			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Bahan permakanan	orang	224	224			
				Dukungan 64,47 % terhadap persentase terwujudnya Rehabilitasi Sosial Dasar lanjut usia Terlantar di Dalam Panti dan pencapaian kinerja program rehabilitasi sosial yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Penyediaan Sandang						
				Dukungan 6.24 % terhadap persentase terwujudnya Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti dan pencapaian kinerja program rehabilitasi sosial yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Penyediaan pakaian harian dan seragam khusus klien	orang	224	224			
				Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial						
				Penyediaan obat-obatan klien	jenis	30	30			
				Penyediaan obat-obatan lainnya berupa rawat jalan klien	bulan	12	12			
				Dukungan 2.64 % terhadap persentase terwujudnya Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti dan pencapaian kinerja program rehabilitasi sosial yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD : 100 %	%	100	100			
				Penyediaan isi tabung gas oksigen	unit	7	7			
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial						
				Honorarium jasa tenaga kesehatan	bulan	12	12			
				Dukungan 5.97 % terhadap persentase terwujudnya Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti dan pencapaian kinerja program rehabilitasi sosial yang	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				<p>mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD</p> <p>Honorarium tenaga ahli, narasumber, dan instruktur ketrampilan</p> <p>Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari</p> <p>Penyediaan alat/bahan untuk kegiatan kantor - perabot kantor</p> <p>Penyediaan cetakan dan penggandaan</p> <p>Penyediaan belanja ATK kegiatan</p> <p>Penyediaan alat/ bahan ketrampilan</p> <p>Penyediaan makanan dan minuman rapat (evaluasi bimbingan, kurikulum pelayanan, petugas operasional, pengasuh)</p> <p>Penyediaan alat/bahan untuk kegiatan kantor - perlengkapan dinas</p> <p>Penyediaan alat/bahan untuk kegiatan kantor - kertas dan cover</p> <p>Penyediaan alat/bahan untuk kegiatan kantor - alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya</p> <p>Dukungan 17.48 % terhadap persentase terwujudnya Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti dan pencapaian kinerja program rehabilitasi sosial yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD</p> <p>Penyediaan alat/ perlengkapan klien</p> <p>Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga</p> <p>Biaya perjalanan dinas dalam kota</p> <p>Dukungan 0.86 % terhadap persentase terwujudnya Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti dan pencapaian kinerja</p>	<p>bulan</p> <p>jenis</p> <p>jenis</p> <p>jenis</p> <p>bulan</p> <p>orang/sidang</p> <p>jenis</p> <p>jenis</p> <p>bulan</p> <p>%</p> <p>bulan</p> <p>orang/hari</p> <p>%</p>	<p>12</p> <p>7</p> <p>3</p> <p>17</p> <p>12</p> <p>612</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>12</p> <p>100</p> <p>12</p> <p>216</p> <p>100</p>	<p>12</p> <p>7</p> <p>3</p> <p>17</p> <p>12</p> <p>612</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>12</p> <p>100</p> <p>12</p> <p>216</p> <p>100</p>			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				program rehabilitasi sosial yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD						
				Biaya perjalanan dinas paket meeting dalam kota	orang/kali	36	36			
				Belanja makanan dan minuman rapat	bulan	12	12			
				Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga						
				Dukungan 0.24 % terhadap persentase terwujudnya Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti dan pencapaian kinerja program rehabilitasi sosial yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Penyediaan makanan dan minuman rapat (dinamika kelompok)	orang/sidang	224	224			
				Pemulasaraan						
				Dukungan 2.10 % terhadap persentase terwujudnya Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti dan pencapaian kinerja program rehabilitasi sosial yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Honorarium jasa tenaga penanganan sosial : petugas makam	orang/kali	96	96			
				Penyediaan perlengkapan pemakaman	orang/kali	35	35			

b. Urusan yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1) *Urusan Tenaga Kerja*

a) *Kondisi Umum*

Ketenagakerjaan DIY pada tahun 2021 masih menghadapi permasalahan terkait dampak gelombang kedua pandemi COVID-19. Meskipun perekonomian DIY berangsur membaik, namun belum sepenuhnya mampu menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan seperti rendahnya pertumbuhan kesempatan kerja, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), merumahkan karyawan, dan pengurangan jam kerja. Menurut data BPS jumlah angkatan kerja di DIY pada Agustus 2021 sebanyak 2.334.955 orang, mengalami kenaikan 4,79% dari tahun 2020, sedangkan Bukan Angkatan Kerja sebanyak 840.832 orang mengalami penurunan 7,05%. Penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 pada Agustus 2021 sebanyak 458.050 orang, mengalami penurunan sebanyak 82.080 orang atau sebesar 15,20% dibandingkan dengan Agustus 2020.

Komposisi angkatan kerja yang terdampak COVID-19 pada Agustus 2021 terdiri dari 22.430 pengangguran, sementara tidak bekerja sebanyak 52.980 orang dan 365.010 penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja. Semua komponen mengalami penurunan dibandingkan Agustus 2020 kecuali komponen sementara tidak bekerja karena COVID-19, mengalami kenaikan sebesar 44,86%. Jika dibandingkan Februari 2021, hampir semua komponen mengalami peningkatan kecuali komponen penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 mengalami penurunan 4,78%. Peningkatan terbesar adalah komponen sementara tidak bekerja karena COVID-19, mengalami kenaikan sebesar 234,81%. Hal ini merupakan dampak dari gelombang kedua pandemi COVID-19.

Jumlah pengangguran terbuka pada tahun 2021 sebesar 106.432 orang, mengalami peningkatan 4,50% dari tahun 2020. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan, tahun 2020 sebesar 4,57% menjadi 4,56% pada tahun 2021. Jumlah penduduk bekerja tahun 2021 sebanyak 2.228.523 orang dengan dominasi tiga lapangan pekerjaan utama yaitu sektor Perdagangan sebesar 21,97%; sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 18,22%; dan sektor Industri Pengolahan sebesar 17,71%. Kondisi tersebut membutuhkan kebijakan yang tepat agar dapat memulihkan pertumbuhan ekonomi sehingga berdampak terhadap pertumbuhan kesempatan kerja dan pengurangan pengangguran.

Pembangunan ketenagakerjaan di DIY tahun 2021 mendapatkan apresiasi dari Kementerian Ketenagakerjaan melalui penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) Tahun 2021 untuk 3 (tiga) katagori: IPK Terbaik Peringkat Ketiga berdasarkan Urusan Ketenagakerjaan Sedang, IPK Terbaik pada Indikator Utama Perencanaan Tenaga Kerja, serta IPK Terbaik pada Indikator Utama Penduduk dan Tenaga Kerja.

Tabel 3.97. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	Realisasi (%)		
1	Jumlah lulusan pelatihan yang ditempatkan	orang	1.584	2.100	2.136	101,71	2625	81,37
2	Jumlah kasus yang diselesaikan diluar pengadilan hubungan industrial	kasus	43	40	51	127,50	50	102

Sumber: Disnakertrans DIY, 2022

Capaian realisasi indikator jumlah lulusan pelatihan yang ditempatkan pada tahun 2021 sebanyak 2.136 orang dari target 2.100 orang atau realisasi capaian sebesar 101,71%. Apabila capaian tahun 2021 dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2022 maka capaiannya sebesar 81,37%. Indikator ini jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 mengalami kenaikan 1,14% (capaian tahun 2020 sebesar 100,57%). Dengan tambahan lulusan pelatihan yang ditempatkan sebanyak 552 orang pada tahun 2021, maka jumlah lulusan pelatihan yang ditempatkan hingga tahun 2021 menjadi 2.136 orang. Keberhasilan capaian ini merupakan salah satu hasil dari strategi optimalisasi penempatan lulusan pelatihan dengan membuka jejaring pasar kerja.

Indikator pada sasaran terwujudnya hubungan industrial yang kondusif untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan pekerja yaitu jumlah kasus yang diselesaikan di luar pengadilan hubungan industrial, pada tahun 2021 tercapai 127,50%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 mengalami penurunan 15,83% (capaian tahun 2020 sebesar 143,33%). Berdasarkan dokumen RPJMD TA 2017-2022, indikator ini pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 40 kasus dan terealisasi 51 kasus sehingga capaian realisasinya sebesar 127,50%. Laju penambahan kasus hubungan industrial pada tahun 2021 sebagai dampak dari pandemi COVID-19 dapat ditekan. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan kinerja Mediator Hubungan Industrial dalam melakukan pembinaan dan dalam menyelesaikan kasus hubungan industrial dengan memanfaatkan Teknologi Informasi (TI) yaitu penyelesaian kasus secara daring maupun luring.

b) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2021

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk Urusan Ketenagakerjaan pada tahun 2021 mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari pendanaan APBD sebesar Rp46.850.839.669,00 dengan mengampu 6 program dan 34 sub kegiatan. Realisasi keuangan sebesar 93,34% dikarenakan adanya efisiensi dan sisa pengadaan, sedangkan realisasi fisik 100%.

Tabel 3.98. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Tenaga Kerja Tahun 2021

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1. Terwujudnya Kesempatan Kerja	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Rendahnya kualitas pendidikan dan ketidaksesuaian antara pendidikan dengan pekerjaan (<i>link and match</i>)	Meningkatkan kualitas dan memperluas bidang pelatihan sesuai kebutuhan pasar kerja dan memperbanyak pelatihan berbasis masyarakat untuk mendorong angkatan kerja bekerja disektor informal karena kesempatan kerja di sektor formal sangat terdampak pandemi COVID-19	a. Urusan Tenaga Kerja 1). Permasalahan ketenagakerjaan adalah multidimensional, sehingga penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) perlu diintervensi secara multi sektor. Dengan dibentuknya Komite Vokasi dan Produktivitas Daerah (KVPD) melalui Surat Keputusan Gubernur No. 30/TIM/2021, pada tahun 2021 dalam proses menyusun <i>link and match</i> dari sisi <i>demand driven</i> yang bermuara pada strategi/rencana aksi baik dari rumpun vokasi maupun produktivitas yang akan dilakukan oleh OPD-OPD pembina sektor, dunia usaha dan lembaga pendidikan tinggi. 2). Untuk menjawab bahwa semestinya angkatan kerja DIY punya kualitas yang bisa bersaing dengan daerah lain serta angkatan kerja DIY tidak berminat untuk kerja diluar DIY, telah dan akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: a). Pada tahun 2021 disusun Grand Desain Pembangunan Karakter Angkatan kerja Istimewa dan Pedoman pelaksanaan sosialisasinya. b). Dimulai pada TW III tahun 2021 akan
			2. Terwujudnya hubungan industrial yang kondusif untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan pekerja	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	Banyak perusahaan yang mengurangi aktivitas usaha karena kebijakan pemerintah di masa pandemi COVID-19	Memberikan program-program kegiatan untuk meringankan beban angkatan kerja terdampak COVID-19 melalui pemberian kerja cepat, pemberian ketrampilan tambahan (<i>reskilling</i>) agar dapat bekerja kembali baik di sektor formal maupun informal	
			3. Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100	Meningkatnya tenaga kerja terdampak COVID-19 baik	Mengoptimalkan pengawasan dan penyelesaian kasus ketenagakerjaan, penyelesaian kasus	

No	Ururan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								dirumahkan maupun di PHK	hubungan industrial dan mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja dengan bekerja sama dengan Diskop UKM	dilakukan sosialisasi pembangunan karakter angkatan kerja istimewa. c). Sosialisasi Pembangunan Karakter Angkatan kerja istimewa akan dilakukan secara berkelanjutan pada tahun-tahun selanjutnya. 3). Terobosan untuk mengurangi dan mengantisipasi dampak COVID-19 sektor ketenagakerjaan: a). Peningkatan kualitas SDM melalui Pelatihan Keterampilan (<i>Upskilling & Reskilling</i>), pemagangan dan sertifikasi kompetensi, agar Angkatan Kerja memiliki kesempatan yang lebih besar untuk masuk ke pasar kerja formal. b). Mengefektifkan perantara kerja untuk mempertemukan pemberi kerja dan pencari kerja, melalui informasi pasar kerja, <i>Job Fair</i> yang dilakukan secara tatap muka dan menggunakan teknologi informasi. c). Perluasan kesempatan kerja dengan Pembentukan Kewirausahaan melalui pembentukan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dan <i>Mobile Training Unit</i> (MTU) dengan kejuruan-kejuruan yang disesuaikan tren saat ini misal design grafis, <i>digital merchandise</i> , <i>digital</i>
				Persentase peningkatan kualitas pegawai dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%	100	100			
				Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	100			
				Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100			
				Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100			
				Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
				Rencana operasional ROPK	Dokumen	1	1			
				Dokumen pelaksanaan anggaran	Dokumen	1	1			
				Dokumen perencanaan renstra dan renja	Dokumen	2	2			
				Sosialisasi program ketenagakerjaan danketransmigrasian	kali	0	0			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
				Penyusunan laporan kinerja	Dokumen	1	1			
				Penyusunan dokumen monitoring dan evaluasi	Dokumen	1	1			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
				Tersedianya gaji ASN	Orang	105	105			
				Tersedianya gaji tenaga bantu	Orang	3	3			
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						
				kinerja pengelola keuangan dalam 1 tahun	Orang	10	10			

No	Ururan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Kinerja pengelola barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Orang	3	3			marketing. d). Optimalisasi sosialisasi dan pendampingan pendaftaran dan pelatihan Kartu Prakerja. e). Pemberian Kerja Cepat melalui Padat Karya.
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						b. Urusan Ketransmigrasian:
				Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Persen	100	100			1). Untuk menggagas kemungkinan kebijakan transmigrasi lokal dengan memanfaatkan lahan SG dan PAG, perlu dipenuhi beberapa kriteria antara lain: a. Harus mendapat persetujuan dari Kemendes PDT dan Transmigrasi, karena dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kemendes PDT dan Transmigrasi (2020-2024) telah ditetapkan 52 kawasan transmigrasi dan tidak menetapkan kawasan Transmigrasi Lokal. b. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian dan Permenakertrans RI Nomor PER.15/MEN/VI/2007,
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						transmigran berhak atas Lahan Pekarangan dan Lahan Usaha dengan Sertifikat Hak Milik. 2). Pada tahun 2021 akan dilakukan penempatan transmigran sebanyak 65 KK. Untuk meminimalisir dampak pandemi COVID-19, pada saat
				Penilaian angka kredit pegawai	Orang	74	74			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
				Komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Unit	10	10			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
				Barang logistik kantor	Jenis	3	3			
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
				Peralatan rumah tangga	Jenis	9	9			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
				Barang cetakan	Jenis	3	3			
				Penggandaan	lembar	33780	33780			
				Penjilidan	Buah	40	40			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
				Perawatan buku	Buku	366	366			
				Langganan surat kabar harian	Jenis	3	3			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
				Konsultasi dan koordinasi dalam daerah dan luar daerah terlaksana dengan baik selama 1 tahun	Tahun	1	1			
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						
				Pemeliharaan arsip	Arsip	7000	7000			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
				Pengadaan Alat Pemadam Api Ringan	Unit	40	40			
				Pengadaan generator set, instalasi dan pemasangan	unit	1	1			

No	Ururan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat						pelatihan dan penampungan akan dilakukan tes Genose dan pada saat pemberangkatan dilakukan Rapid Antigen. 3). Untuk memacu antara kesempatan kerja dan peningkatan kualitas keterampilan akan dilakukan: a). Peningkatan keterampilan melalui pelatihan, pemagangan dan sertifikasi kompetensi. b). Mengefektifkan perantaraan kerja untuk mendorong terjadinya penempatan tenaga kerja Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN). c). Mengupayakan hubungan industrial yang kondusif, hal ini akan memberikan dampak positif terhadap penambahan kesempatan kerja.
				Surat keluar	Surat	600	600			
				Alat tulis kantor	Jenis	26	26			
				Pengiriman dokumen	Surat	400	400			
				Kertas HVS Folio	Rim	12	12			
				Surat masuk	Surat	600	600			
				Kertas HVS Kwarto	Rim	10	10			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
				Pembayaran tagihan listrik, air dan telepon	Bulan	12	12			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
				BBM operasional genset	Liter	181	181			
				Kebersihan gedung kantor	Gedung	2	2			
				Kinerja keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai SPK	orang	16	16			
				Belanja inventarisasi tanah	Paket	1	1			
				Bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan	Bulan	12	12			
				Pembuatan aplikasi e-rusun	Paket	1	1			
				Pembayaran retribusi sampah	Bulan	12	12			
				Surveilence ISO	Sertifikasi	2	2			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
				Biaya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaandinas jabatan	Tahun	1	1			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
				Biaya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaandinas operasional	Tahun	1	1			
				Pemeliharaan Mebel						
				Pemeliharaan mebel	Jenis	5	5			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
				Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	16	16			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
				Pemeliharaan gedung tempat kerja	Paket	1	1			
				DED Rusunawa	Paket	1	1			
				Pemeliharaan gedung tempat tinggal	Paket	1	1			
				PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA						
				Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	100			
				Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro						
				Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	Dokumen	1	1			
				Penyusunan dokumen data ketenagakerjaan	Dokumen	1	1			
				Pemasangan dan costumize sistem informasiketenagakerjaan	Paket	1	1			
				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						
				Jumlah tenaga kerja yang lulus sertifikasi	orang	425	336			
				Jumlah lembaga pelatihan kerja yang terakreditasi	lembaga	87	90			
				Persentase jumlah lulusan pelatihan yang terampil	%	7.61	7.89			
				Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi						
				Pelatihan Aviation Security	orang	20	20			
				Pemagangan Perusahaan Bagi Pencari Kerja	orang	0	0			
				Sertifikasi Uji Kompetensi	orang	140	140			
				Pelatihan Groundstaff	orang	20	20			
				Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja						
				Lembaga pelatihan kerja yang terstandarisasi	Lembaga	85	85			
				Rakor HILSI (Himpunan Lembaga Latihan SeluruhIndonesia)	kali	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL						
				Jumlah perusahaan yang melaksanakan sarana hubungan industrial dan jaminan sosial	perusahaan	1588	1562			
				Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi						
				Sosialisasi Sarana HI	orang	90	90			
				Pemantauan Perusahaan yang melaksanakan sarana HI	Perusahaan	400	400			
				Kajian Hubungan Industrial (karyawan-pemerintah-perusahaan) di Beberapa Pabrik Tekstil dan Rokok diDIY	Dokumen	1	1			
				Peringatan Hari Buruh	orang	400	400			
				Peningkatan pemahaman penyelesaian perselisihan HI	orang	0	0			
				Bimtek Penyusunan Perjanjian Kerja Bersama	orang	90	90			
				Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja sama Tripartit Daerah Provinsi						
				Sidang Lembaga Kerja sama Tripartit	Sidang	6	6			
				Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)						
				Koordinasi Dewan Pengupahan DIY	Kab/Kota	5	5			
				Pemantauan THR dan Penangguhan Upah Minimum	Kab/Kota	5	5			
				Bimtek Struktur Skala Upah	orang	90	90			
				Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Kabupaten/Kota (UMP dan UMK)	SK Gub	2	2			
				Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja						
				Pembinaan kesejahteraan pekerja/buruh	orang	182	182			
				PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN						
				Persentase perusahaan nihil kecelakaan kerja	%	63	64.8			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Jumlah perusahaan yang mempunyai kondisi lingkungan kerja dan kesehatan kerja sesuai standar	perusahaan	488	488			
				Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan						
				Pemantauan perusahaan yang melaksanakan norma K3	Perusahaan	330	330			
				Pemantauan perusahaan yang melaksanakan norma kerja	Perusahaan	330	330			
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1. Terwujudnya Kesempatan Kerja	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				Rendahnya kualitas pendidikan dan ketidaksesuaian antara pendidikan dengan pekerjaan (<i>link and match</i>)	Meningkatkan kualitas dan memperluas bidang pelatihan sesuai kebutuhan pasar kerja dan memperbanyak pelatihan berbasis masyarakat untuk mendorong angkatan kerja disektor informal karena kesempatan kerja di sektor formal sangat terdampak pandemi covid-19	a. Urusan Tenaga Kerja: 1. Permasalahan ketenagakerjaan adalah multidimensional, sehingga penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) akan diintervensi secara multi sektor. Dengan dibentuknya Komite Vokasi dan Produktivitas Daerah (KVPD) melalui Surat Keputusan Gubernur No. 30/TIM/2021, pada tahun 2021 dalam proses menyusun <i>link and match</i> dari sisi <i>demand driven</i> yang bermuara pada strategi/rencana aksi baik dari rumpun vokasi maupun rumpun produktivitas yang akan dilakukan oleh OPD-OPD pembina sektor, dunia usaha dan lembaga pendidikan tinggi. 2. Untuk menjawab bahwa semestinya angkatan kerja DIY punya kualitas yang bisa bersaing dengan daerah lain serta angkatan kerja DIY tidak berminat untuk kerja diluar DIY, telah dan akan
			2. Terwujudnya hubungan industrial yang kondusif untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan pekerja			0	0	Banyak perusahaan yang mengurangi aktivitas usaha karena kebijakan pemerintah di masa pandemi COVID-19	Memberikan program-program kegiatan untuk meringankan beban angkatan kerja terdampak COVID-19 melalui pemberian kerja cepat, pemberian ketrampilan tambahan (<i>reskilling</i>) agar dapat bekerja	

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			3. Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya (2021)				Meningkatnya tenaga kerja terdampak COVID-19 baik dirumahkan maupun di PHK	kembali baik di sektor formal maupun informal Mengoptimalkan pengawasan dan penyelesaian kasus ketenagakerjaan, penyelesaian kasus hubungan industrial dan mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja dengan bekerja sama dengan Dinkop UKM	dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: a. Pada tahun 2021 disusun Grand Desain Pembangunan Karakter Angkatan kerja Istimewa dan Pedoman pelaksanaan sosialisasinya. b. Dimulai pada tahun 2021 akan dilakukan sosialisasi pembangunan karakter angkatan kerja istimewa. c. Sosialisasi Pembangunan Karakter Angkatan kerja Istimewa akan dilakukan secara berkelanjutan pada tahun-tahun selanjutnya. 3. Terobosan untuk mengurangi dan mengantisipasi dampak COVID-19 sektor ketenagakerjaan: a. Peningkatan kualitas SDM melalui Pelatihan Keterampilan (<i>Upskilling & Reskilling</i>), pemagangan dan sertifikasi kompetensi, agar Angkatan Kerja memiliki kesempatan yang lebih besar untuk masuk ke pasar kerja formal. b. Mengefektifkan perantara kerja untuk mempertemukan pemberi kerja dan pencari kerja, melalui informasi pasar kerja, Job Fair yang dilakukan secara tatap muka dan menggunakan teknologi informasi. c. Perluasan kesempatan kerja dengan Pembentukan Kewirausahaan melalui
				Pemantuan kepatuhan prokes ditempat kerja	Perusahaan	60	60			
				Pengembangan Potensi Seni Budaya Komunitas PekerjaIstimewa	Paket	0	0			
				Padat Karya Pengembangan PotensiDesa/Kalurahan/Kelurahan	lokasi	60	60			
				Pelatihan pengolahan makanan hasil laut bagi lulusansiswa SMK kelautan	orang	0	0			
				Pembangunan karakter Angkatan Kerja Istimewa di DIY	Dokumen	1	1			
				Sosialisasi Pembangunan Karakter bagi Angkatan Kerjalstimewa	kali	60	60			
				Fasilitasi sarana prokes bagi pekerja dan keluarganya	Keluarga pekerja	3100	3100			
				Pelatihan kewirausahaan bagi angkatan kerja baru didesa mandiri budaya	orang	60	60			
				Padat Karya Penerapan Tata Nilai Semangat Keyogyakarta	Kalurahan	13	13			
				Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Maritim	orang	0	0			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<p>pembentukan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dan <i>Mobile Training Unit</i> (MTU) dengan kejuruan-kejuruan yang disesuaikan trend saat ini misal design grafis, <i>digital merchandise</i>, <i>digital marketing</i>. d. Optimalisasi sosialisasi dan pendampingan pendaftaran dan pelatihan Kartu. Prakerja. e. Pemberian Kerja Cepat melalui Padat Karya b. Urusan Ketransmigrasian 1. Untuk menggagas kemungkinan kebijakan transmigrasi lokal dengan memanfaatkan lahan SG dan PAG, perlu dipenuhi beberapa kriteria antara lain :</p> <p>a. Harus mendapat persetujuan dari Kemendes PDT dan Transmigrasi, karena dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kemendes PDT dan Transmigrasi (2020 – 2024) telah ditetapkan 52 kawasan transmigrasi dan tidak menetapkan kawasan Transmigrasi Lokal. b. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 15 Tahun 1997 tentang ketransmigrasian dan Permenakertrans RI nomor PER.15/MEN/VI/2007, transmigran berhak atas Lahan Pekarangan dan Lahan Usaha dengan Sertifikat Hak Milik. 2.</p>

No	Ururan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<p>Pada tahun 2021 akan dilakukan penempatan transmigran sebanyak 65 KK. Untuk meminimalisir dampak pandemi COVID-19, pada saat pelatihan dan penampungan akan dilakukan test Genose dan pada saat pemberangkatan dilakukan Rapid Antigen. 3. Untuk memacu antara kesempatan kerja dan peningkatan kualitas ketrampilan akan dilakukan :</p> <p>a. Peningkatan ketrampilan melalui pelatihan, pemagangan dan sertifikasi kompetensi.</p> <p>b. Mengefektifkan perantaraan kerja untuk mendorong terjadinya penempatan tenaga kerja Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN). c. Mengupayakan hubungan industrial yang kondusif, hal ini akan memberikan dampak positif terhadap penambahan kesempatan kerja.</p>

2) *Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*

a) *Kondisi Umum*

Upaya menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak telah dilakukan Pemda DIY antara lain kampanye pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, fasilitasi pusat lembaga layanan, peningkatan kapasitas bagi petugas layanan, dan fasilitasi Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK). Terdapat pula Telepon Sahabat Anak dan Keluarga (TESAGA) yang dapat memberikan layanan konsultasi bagi para korban kekerasan dari jarak jauh. Tidak hanya melalui media telepon, layanan Tesaga juga dikembangkan melalui media sosial dan radio untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas. Layanan ini menjadi salah satu solusi pada kondisi pandemi COVID-19. Terdapat kecenderungan masyarakat lebih memiliki keberanian untuk melaporkan tindak kekerasan yang mereka alami melalui media sosial, sehingga fenomena gunung es para korban kekerasan bisa tereduksi dan lebih menampakkan angka yang mendekati sesungguhnya.

Tolok ukur capaian sasaran “Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak” diukur dengan indikator Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Capaian sasaran tersebut pada tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.99. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Prevalensi Kekerasan terhadap perempuan dan anak	Rasio	0,52	0,46	0,52	86,96	0,45	86,96

Sumber: DP3AP2 DIY, 2022 (data diolah)

Pada tahun 2021 indikator Prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak dari target 0,46 dapat direalisasikan sebesar 0,52 atau dengan persentase capaian 86,96%. Melalui kerja sama lintas sektor berbagai upaya dilakukan untuk menekan angka prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak, diantaranya: 1) Pengembangan jejaring Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) berdasarkan Pergub DIY Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Pergub DIY Nomor 66 Tahun 2012 tentang Forum Perlindungan Korban Kekerasan. 2) Terselenggaranya layanan Pusat Perlindungan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) di tingkat provinsi dan juga terbentuknya UPT PPA di kabupaten/kota. 3) Pengembangan Telekonseling Sahabat Anak dan Keluarga (TESAGA) melalui layanan interaktif dengan Whatsapp, sosialisasi psikologi di blog, pembuatan konten informasi melalui Instagram, Youtube, dan membuka layanan konseling di surat kabar, radio, dan lain-lain. 4) Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi tentang perlindungan perempuan dan anak melalui Radio, Televisi, dan Media Cetak. 5) Meningkatkan kualitas lembaga yang menangani perlindungan perempuan dan anak melalui Pergub DIY Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Pergub DIY Nomor 67 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. 6) Penerapan Perda DIY Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. 7) Mengefektifkan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) DIY sehingga mampu mengembangkan jaringan sampai tingkat kecamatan dan desa. 8) Implementasi Rencana Aksi Daerah Perlindungan Anak Tahun 2020-2022.

Capaian indikator Prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut didukung oleh:

- (1) Pelayanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Forum Perlindungan Korban Kekerasan adalah salah satu bentuk upaya pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang penyelenggaraannya dilakukan secara berjejaring. Agar bisa memberikan pelayanan yang maksimal dan komprehensif, maka diperlukan adanya pertemuan antar anggota forum secara rutin maupun insidental.

Upaya lain dalam menurunkan angka kekerasan adalah Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota. Lembaga-lembaga ini meliputi berbagai Sekolah Ramah Anak, Layanan Kesehatan Ramah Anak, Forum Anak Daerah, dan sebagainya.

Upaya lain dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak adalah berupa telekonseling yang oleh DP3AP2 diwujudkan dalam layanan TESAGA. TESAGA merupakan bentuk penguatan dan inovasi dari DP3AP2 DIY yang berfungsi memberikan layanan telekonseling secara gratis. Anak, perempuan maupun anggota keluarga memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan konsultasi atau sekedar mencurahkan isi hati sehingga diharapkan dapat menemukan solusi permasalahan yang dihadapi.

- (2) Pemenuhan Hak-hak anak. Upaya pemenuhan hak-hak anak dilakukan dengan berbagai aktivitas seperti Pembinaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), Advokasi Pembentukan dan Fasilitasi Forum Anak Daerah, Fasilitasi TESAGA dan Pelatihan Perlindungan Anak.

Meskipun Pemda DIY telah melakukan berbagai upaya dalam rangka menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, namun terdapat beberapa hal yang menjadi tantangan dalam pencapaian target, antara lain: 1) Belum terbangunnya sistem pencegahan yang komprehensif, baik di keluarga, sekolah/ Lembaga Pendidikan, maupun masyarakat; 2) Perkembangan teknologi informasi yang pesat; serta 3) Adanya pandemi COVID-19.

b) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2021

Pada tahun 2021 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.969.766.000,00. Pengalokasian anggaran tersebut dibagi dalam 5 Program, 11 kegiatan dan 20 sub kegiatan. Secara keseluruhan, realisasi keuangannya adalah sejumlah Rp2.776.375.103,00 atau 93,49%, dengan pencapaian fisik sebesar 100%. Selanjutnya, rincian capaian kinerja program dan kegiatan tertuang dalam tabel berikut.

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program /Kegiatan / subkegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	1. Peningkatan kualitas pelayanan perempuan dan anak korban kekerasan terutama di P2TPAKK "RDU" 2. Percepatan penurunan prevalensi pada perempuan dan anak diprioritaskan untuk memperkuat jejaring antar lembaga	Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan program kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan provinsi Terlaksananya aktivitas pencegahan kekerasan terhadap perempuan Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi Pelaksanaan Kampanye Hari Anti Kekerasan terhadap perempuan Penyusunan regulasi terkait dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	%	80	83,56	Triwulan I 1. Adanya wabah COVID-19 yang menghambat penanganan korban kekerasan 2. Ancaman kekerasan melalui TI semakin tinggi, literasi digital masyarakat masih rendah 3. Sistem pencegahan yang komprehensif belum terbangun Triwulan II : Terjadinya pandemi COVID-19 menyebabkan pelayanan tidak optimal. Sosialisasi, Edukasi, dan kegiatan pencegahan terkendala secara teknis maupun dukungan anggaran yang dihapus (Refokusing COVID) Triwulan III : 1. Terjadinya pandemi COVID-19 menyebabkan pelayanan tidak optimal. 2. Sosialisasi, Edukasi, dan kegiatan pencegahan terkendala secara teknis maupun dukungan anggaran yang dihapus (Refokusing COVID) Triwulan IV : 1. Perkembangan teknologi informasi membuat dunia tanpa batas, potensi ancaman kekerasan semakin tinggi 2. Dampak pandemi COVID-19 menyebabkan masyarakat mengalami berbagai permasalahan misalnya kebijakan WFH, SFH,	1. Meningkatkan sosialisasi tentang perlindungan perempuan dan anak ke masyarakat dan sekolah; 2. Melanjutkan sosialisasi anti kekerasan pada perempuan dan anak	a. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Perda 7 tahun 2018 Tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga, maka pada tahun 2021 dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: A. Implementasi Fungsi Keluarga, yang terdiri dari: 1. Pembentukan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK R) 2. Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) 3. Sosialisasi Perlindungan Anak terpadu berbasis Masyarakat (PATBM) 4. Pelatihan Kader Ketahanan Keluarga (Konselor Keluarga) 5. Sosialisasi Fungsi Keluarga

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program /Kegiatan / subkegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Sub kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan keweangan provinsi terlayannya Tahun 1	Tahun	1	1	berkurangnya penghasilan akibat PHK dll sehingga menambah stresor yang bisa memicu munculnya perilaku kekerasan 3. Modus kekerasan mengalami berbagai perubahan yang sering kali sulit diantisipasi pencegahannya 4. Belum terbangun sistem pencegahan yang komperhensif		6. Sosialisasi Kebijakan ketahanan keluarga 7. Advokasi Kebijakan Ketahanan Keluarga 8. Sosialisasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KTPA) 9. Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak 10. Sosialisasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) 11. Pembinaan Sekolah Ramah Anak (SRA) 12. Pembinaan Forum Anak (Tingkat Daerah, Kab/Kota, Kecamatan dan Desa) B. Pembahasan Rapergub “Strategi Pembangunan Ketahanan Keluarga” sebagai tindak lanjut amanat {Perda 7 tahun 2018 Tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga C. Koordinasi terkait penanganan
				Subkegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						
				Fasilitasi Pelayanan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KTPA)/Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Lembaga	1	1			
				Hibah Kepada P2TPAKK Rekso Dyah Utami	lembaga	1	1			
				Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi						
				Subkegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						
				Fasilitasi Forum Perlindungan Korban Kekerasan	Forum	1	1			
				Fasilitasi Gugus tugas TPPO	Forum	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program /Kegiatan / subkegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak/TPPO	kali	2	2			kekerasan dikalangan remaja dengan lintas sektor sebagai berikut: 1. Kepolisian Daerah (POLDA) 2. Kepolisian Resort (POLRES) 3. Balai Pemasarakatan (BAPAS) 4. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) 5. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (DIKPORA) 6. Dinas Sosial (DINSOS) 7. Dinas Kesehatan (DINKES) 8. Pengadilan 9. Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK)
		Peningkatan capaian KLA di DIY melalui peningkatan kapasitas gugus tugas KLA.		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi						Pada tahun 2022 direncanakan akan dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: A. Pembentukan Pojok Konsultasi dan Pembelajaran Keluarga (POKSI PUSPAGA)
				Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi						
				Penyelenggaraan Kali Hari Anak Nasional DIY	Kali	1	1			
				Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi						
				Penyusunan Kajian Ekologi Anak	Dokumen	1	1			
				Penyusunan Peraturan / Kebijakan yang mendukung pemenuhan hak anak dan perlindungan anak	Dokumen	1	1			
				Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi						
				Subkegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi						
				Advokasi pembentukan Forum Anak Daerah	Forum	12	12			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program /Kegiatan / subkegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi						B. Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)
				Monev Pelaksanaan Dokumen KLA di Kab/Kota	Dokumen	5	5			C. Melanjutkan kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2021
				Pembinaan KLA	Gugus tugas	6	6			Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepemilikan Legalitas keluarga pada tahun 2021 melalui:
				Sub kegiatan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						1. Penjangkauan dan pendampingan untuk mendapatkan Akte Kelahiran bagi keluarga yang bermasalah oleh Satgas PPPA
				Pelatihan Orang Perlindungan Anak	Orang	30	30			2. Penguatan Satgas PPPA
				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						3. Koordinasi dengan Biro TAPEM, DINSOS, DUKCAPIL, TSKK untuk percepatan penyelesaian administrasi dokumen kependudukan
				Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						4. Sosialisasi Fungsi Keluarga
				Sub kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan provinsi						
				Terlaksananya aktivitas pencegahan kekerasan terhadap anak	Tahun	1	1			
				Kegiatan Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi						
				Subkegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan provinsi						
				Terlayannya anak yang memerlukan perlindungan khusus	Tahun	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program /Kegiatan / subkegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				yang dirujuk ke P2TPAKK Rekso Dyah Utami						5. Sosialisasi Kebijakan ketahanan keluarga
			1. Pengembangan Sistem, kelembagaan dan pemanfaatan data gender dan anak untuk menunjang pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang responsif gender	Persentase perempuan pengambil keputusan di ranah publik	%	34.42	39.43			6. Advokasi Kebijakan Ketahanan Keluarga Kegiatan-kegiatan tersebut akan dilanjutkan pada tahun 2022
				PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						
				Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi						
			2. Peningkatan perempuan pengambil keputusan di ranah publik diprioritaskan pada penguatan kapasitas perempuan potensial dan penguatan jejaring kemitraan/kerja sama dengan OPD, Lembaga masyarakat, media serta partai politik.	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi						
				Evaluasi implementasi PUG di OPD Pemda DIY	OPD	37	37			
				Subkegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi						
				TOT PPRG di OPD Pemda DIY	OPD	37	37			
			3. Pembentukan Desa Prima Sejahtera baru di fokuskan di daerah tertinggal/miskin dan pendampingan secara berkelanjutan untuk menuju klasifikasi Desa Prima Sejahtera maju	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi						
				Subkegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi						
				Sosialisasi pemahaman gender	Lokasi	7	7			
			4. Penguatan Sistem Data Gender diprioritaskan dengan	Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Lokasi	40	40			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program /Kegiatan / subkegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			penguatan system dan penguatan kelembagaan tim data gender dan anak.	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi Subkegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Hibah desa prima Desa 2 2 Inisiasi desa prima Desa 5 5 Monitoring dan Kali 1 1 Evaluasi Desa Prima Mandiri Pelatihan Angkatan 1 1 Peningkatan Kapasitas Perempuan Potensial dalam Bidang Politik Pembinaan desa Desa 110 110 prima Pendampingan desa Desa 5 5 prima Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi Subkegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi Fasilitasi Organisasi Organisasi 3 3 Perempuan Subkegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi						

3) *Urusan Pangan*

a) *Kondisi Umum*

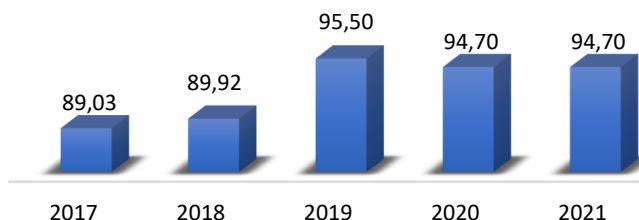
Ketahanan Pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Urusan pangan memiliki dua indikator kinerja sasaran yaitu Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan.

Tabel 3.101. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pangan Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 Terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	Realisasi (%)		
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	94,70	90,82	94,70	104,27	91,12	103,93
2	Persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan	%	41,08	39,19	40,83*	95,82	38,65	94,26

Keterangan: *) Angka prediksi, data belum dirilis oleh BPS

Sumber: DPKP DIY, 2022



Gambar 3.30. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di DIY tahun 2017-2021

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022 (data diolah)

Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan pada tahun-tahun mendatang.

Capaian Skor PPH yang dihitung menggunakan data Susenas BPS selama 2 tahun terakhir tidak mengalami perubahan yaitu sebesar 94,70. Namun meskipun tidak ada peningkatan di tahun 2021, capaian skor PPH di DIY jauh lebih tinggi dari angka nasional yaitu sebesar 86,30. Bahkan jika dibandingkan target akhir RPJMD 2022, capaian skor PPH tahun 2021 sudah melebihi target dengan capaian sebesar 103,93%. Ke depan masih perlu upaya untuk memperbaiki pola konsumsi masyarakat DIY dengan meningkatkan konsumsi pada golongan umbi, buah/biji berminyak, dan kacang-kacangan serta menurunkan konsumsi pada golongan padi-padian.

Tercapainya indikator skor PPH didukung pola konsumsi pangan masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya pangan yang memenuhi kaidah B2SA. Berdasarkan analisis pola konsumsi pangan, masyarakat di DIY perlu didorong dalam peningkatan konsumsi umbi-umbian, sayur dan buah, kacang-kacangan dan buah/biji berminyak serta menurunkan konsumsi padi-padian dan juga menjaga keseimbangan konsumsi gula dan pangan hewani. Hal ini bertujuan agar konsumsi pangan (sumber energi) lebih beragam sehingga kualitas pangan lebih baik.

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Pemda DIY sampai akhir tahun 2021 tersedia sebanyak 275.042 ton. Selama satu tahun tidak ada penyaluran CPPD, baik untuk mengatasi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial, dan keadaan darurat lainnya. Berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 289/KEP/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur DIY Nomor

201/KEP/2018 tentang Jenis dan Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, CPPD DIY seharusnya tersedia sebanyak 322 ton sehingga masih ada kekurangan sekitar 47 ton. Kekurangan ini rencananya akan dipenuhi dengan pengadaan tambahan CPPD pada tahun anggaran 2023.

Distribusi pangan di wilayah DIY didukung oleh keberadaan Pasar Mitra Tani (PMT) yang diharapkan dapat menjaga stabilitas harga sehingga konsumen dapat membeli komoditas pangan hasil produksi petani sesuai harga yang wajar. Dalam masa pandemi PMT melakukan kerja sama dengan market place online seperti Aplikasi Gojek/Goshop dan Aplikasi Titipku dengan memberikan ongkos kirim (ongkir) murah/diskon ongkir jika belanja di PMT.

Di wilayah Kabupaten/Kota, distribusi pangan didukung oleh 228 unit Toko Tani Indonesia (TTI) yang fungsinya sama dengan PMT. Baik PMT dan TTI mendapatkan pasokan bahan pangan pokok dari beberapa gapoktan yang mendapat fasilitasi program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM). Salah satu tujuan PUPM adalah stabilisasi harga tingkat produsen, sehingga petani mendapat harga jual yang baik.

Di sisi pemanfaatan pangan, konsumsi energi masyarakat DIY tercapai 2.147 kkal/kapita/hari dan konsumsi protein sebesar 69 gram/kapita/hari. Capaian ini sudah melebihi standar WNPG yaitu sebesar 2.100 kkal/kapita/hari dan 57 gram/kapita/hari. Keberhasilan ini antara lain didukung oleh pelaksanaan kampanye dan gerakan panganekaragaman konsumsi pangan B2SA serta diversifikasi pangan lokal.

UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan mengamanatkan penanganan keamanan pangan perlu melibatkan lintas sektor yang menangani pangan segar dan

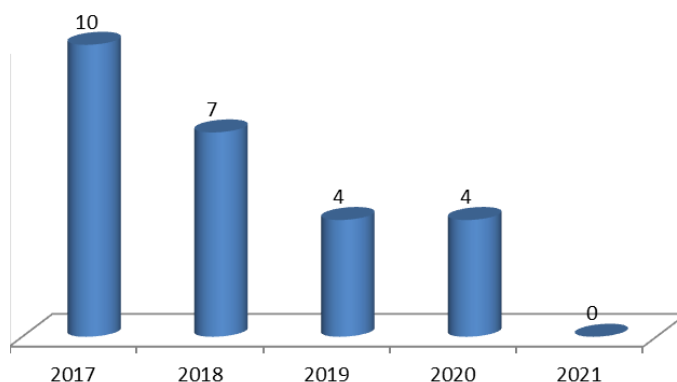
olahan. Sehingga diperlukan Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD) yang bersifat koordinatif sesuai kewenangan masing-masing OPD/instansi mulai dari proses produksi dengan *Good Agriculture Practices* (GAP)/*Good Farming Practices* (GFP), pasca panen dengan *Good Handling Practices* (GHP), pengolahan dengan *Good Manufacturing Practices* (GMP), distribusi dengan *Good Distribution Practices* (GDP) dan *Good Retailing Practices* (GRP). Dengan jejaring ini pangan segar dan olahan dapat sampai di tingkat konsumen dalam kondisi aman dikonsumsi. Adanya JKPD mendukung penyelesaian kasus-kasus pangan yang insidental dan melibatkan rantai pasok pangan dari hulu sampai hilir. Hasil pengawasan dan pengujian *post market* tahun 2021 sebesar 90,12% Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) berupa buah, sayur, dan beras yang beredar di DIY aman dikonsumsi.

Selanjutnya khusus untuk pengawasan *pre market* berupa penjaminan keamanan pangan dan dukungan peningkatan ekspor, PSAT dilaksanakan melalui Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-DIY. Pada tahun 2021 OKKP-D DIY telah menerbitkan 60 ijin edar Produk Domestik (PD) atau Register PSAT dan 1 Sertifikat Prima bagi pelaku usaha PSAT, 18 Sertifikat *Hygiene* Sanitasi untuk 18 unit penanganan PSAT, Perpanjangan Registrasi 1 *Packing House* (PH) dan *Surveillance* ke 15 pelaku PSAT tersertifikasi dan teregistrasi. Selain itu dilakukan juga pembinaan dan pendampingan kelembagaan OKKP-D tingkat Kabupaten/Kota dalam melakukan pelayanan penjaminan keamanan pangan. Hingga saat ini telah terbit 40 Nomor Registrasi Pangan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PDUK) oleh OKKP-D Kabupaten.

Berdasarkan analisis Peta Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) DIY sudah bebas dari Desa Rawan Pangan pada tahun 2021. Tahun 2021 hasil analisis SKPG menunjukkan

masih terdapat 3 desa yang masuk kategori waspada pangan yaitu desa Wirokerten, Jambidan, dan Guwosari di Kabupaten Bantul. Kondisi saat ini disebabkan antara lain karena penambahan jumlah penduduk di masing-masing desa serta alih fungsi lahan pertanian yang cukup tinggi dapat mempengaruhi penurunan produksi sereal.

Sedangkan menurut Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/ Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) hasil analisis dikelompokkan ke 6 prioritas. Prioritas 1-3 dimasukkan kedalam status rentan rawan pangan sedangkan prioritas 4-6 dimasukkan kedalam status tahan pangan. Pada tahun 2021 hasil analisis FSVA DIY menunjukkan terdapat 1 kecamatan masuk prioritas 2 yaitu Kecamatan Mergangsari Kota Yogyakarta dan 4 kecamatan masuk prioritas 3 yaitu Kecamatan Purwosari dan Saptosari (Kabupaten Gunungkidul) serta Kecamatan Kraton dan Wirobrajan (Kota Yogyakarta). Hal ini diindikasikan disebabkan oleh kemiskinan, angka kesakitan cukup tinggi, kurangnya akses terhadap air bersih, serta tingkat pendidikan khususnya perempuan relatif lebih rendah dibanding daerah lain. Lokasi-lokasi tersebut akan menjadi sasaran lintas sektor dalam intervensi kerawanan pangan.



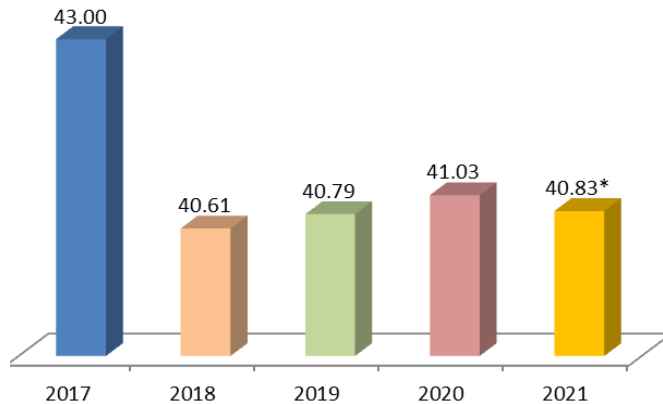
Gambar 3.31. Desa Rawan Pangan di DIY Tahun 2017-2021
Sumber: DPKP DIY, 2022

Meskipun target akhir RPJMD tahun 2022 sudah tercapai, namun berbagai upaya untuk mencegah terjadinya kerawanan pangan masih perlu dilakukan. Hal ini terkait dengan pandemi COVID-19 yang berpengaruh langsung terhadap tingkat kemiskinan sebagai salah satu penyebab utama kerawanan pangan di DIY. Upaya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan usaha ekonomi produktif dilakukan antara lain melalui Desa Mandiri Pangan (Demapan), Lembaga Akses Pangan Masyarakat (LAPM), dan Pengembangan Korporasi Usaha Tani, Pertanian Keluarga, dan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat.

Persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan merupakan indikator kinerja kedua untuk urusan pangan. Pengeluaran per kapita untuk makanan sering dijadikan sebagai ukuran tingkat kesejahteraan atau ketahanan pangan rumah tangga. Suatu rumah tangga diindikasikan berpenghasilan rendah apabila pengeluaran rumah tangga untuk makanan terhadap total pengeluaran lebih besar daripada pengeluaran rumah tangga untuk non makanan terhadap total pengeluaran. Data capaian tahun 2021 belum dirilis oleh BPS sehingga capaiannya menggunakan angka prediksi.

Kondisi ekonomi yang melemah di masa pandemi berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat. Namun demikian capaian tahun 2021 diprediksi lebih baik dibanding tahun 2020 karena kondisi perekonomian yang sudah membaik. Capaiannya diprediksi sebesar 40,83%. Angka ini lebih rendah dari tahun 2020, yakni sebesar 41,08%. Pengeluaran untuk beberapa kelompok makanan mengalami penurunan, namun di sisi lain pengeluaran untuk rokok masih cukup tinggi. Data hasil survei BPS tahun 2021 menunjukkan bahwa rokok bagi masyarakat miskin menjadi pengeluaran terbesar kedua di bawah beras. Pengeluaran untuk membeli rokok lebih tinggi

dibandingkan untuk protein seperti telur, tempe atau ikan sehingga walaupun capaian kinerja tahun 2021 sudah lebih baik namun belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan yakni sebesar 39,19%.



Gambar 3.32. Persentase Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Sebulan Untuk Makanan di DIY tahun 2017-2021

Keterangan: *) Angka prediksi, data belum dirilis oleh BPS

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

b) *Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2021*

Urusan Pangan pada tahun 2021 dilaksanakan melalui 4 program, yaitu Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan dengan 1 sub kegiatan, Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan 4 sub kegiatan, Program Penanganan Kerawanan Pangan dengan 2 sub kegiatan, dan Program Pengawasan Keamanan Pangan dengan 3 sub kegiatan. Total pagu anggaran sebesar Rp1.671.134.250,00 dan terealisasi Rp1.654.251.000,00 atau 98,99%, serta realisasi fisik mencapai 100%. Rincian capaian kinerja program dan sub kegiatan tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 3.102. Capaian Program dan Sub Kegiatan Urusan Pangan Tahun 2021

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1. Peningkatan produksi tanaman dan populasi ternak yang berdampak bagi peningkatan pendapatan petani. 2. Peningkatan daya saing produk pertanian melalui standarisasi produk dan proses, peningkatan rantai pasok, mutu dan keamanan pangan 3. Pengembangan infrastruktur (lahan, air, sarana dan prasarana) 4. Pengembangan kawasan yang berdampak terhadap pendapatan petani. 5. Menumbuhkan sentra-sentra pembibitan ternak lokal 6. Pendampingan dan pengawalan kelompok. 7. Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh, pemantapan kelembagaan penyuluhan, dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan penyuluhan 8. Pemantapan ketersediaan dan kewaspadaan pangan melalui koordinasi lintas sektor 9. Peningkatan cadangan pangan daerah (masyarakat dan pemerintah) 10. Peningkatan diversifikasi/panganekaragaman pangan berbasis pangan lokal 11. Penanganan keamanan pangan, pengawasan pangan beredar,	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN KEMANDIRIAN PANGAN Persentase peningkatan ketersediaan dan konsumsi energi Penyusunan Rencana dan Kebutuhan Infrastruktur Kemandirian Pangan Pergub tindak lanjut Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Kajian Roadmap Pengembangan Panganekaragaman Pangan untuk Mendukung Ketahanan Pangan PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Persentase peningkatan ketersediaan dan konsumsi energi Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan Informasi Data bulan Cadangan Pangan NBM Sementara, NBM Tetap, Prognosa Ketersediaan Pangan, ARAM I	%	0,08	-1.17	Kondisi ekonomi di masyarakat yang belum membaik dapat memicu masyarakat beralih preferensi konsumsi pangannya sehingga pemenuhan pangan yang sesuai kaidah Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) serta tercukupinya kebutuhan energi dan protein sesuai angka anjuran akan menjadi tantangan ke depan. Menurunnya pendapatan masyarakat dan masih tingginya angka kemiskinan di DIY akibat pandemi	Meningkatkan sosialisasi, promosi, dan edukasi panganekaragaman konsumsi pangan B2SA dengan menggunakan berbagai sarana, utamanya melalui media sosial. Meningkatkan kolaborasi lintas sektor dalam upaya menurunkan angka kemiskinan dan mencegah kerawanan pangan di DIY.	Urusan Pangan: 1. Dalam rangka mendorong konsumsi pangan yang memenuhi kaidah Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) telah dilaksanakan kegiatan kampanye, sosialisasi, dan gerakan panganekaragaman konsumsi dengan saran masyarakat, ibu-ibu PKK, Kelompok Wanita Tani (KWT), sekolah-sekolah, pelaku usaha pangan olahan, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dengan tujuan untuk mengurangi konsumsi beras dan terigu dan mengalihkan pada konsumsi sumber karbohidrat lainnya terutama dari bahan pangan lokal serta meningkatkan konsumsi sayur, buah, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. 2. Kegiatan optimasi pemanfaatan pekarangan baik di kawasan perkotaan yang berlahan sempit maupun perdesaan untuk pemenuhan gizi keluarga telah dilaksanakan dengan sasaran prioritas di daerah <i>stunting</i> (Kabupaten Kulon Progo, Bantul, Gunungkidul) dan daerah rawan pangan. Pada saat ini dilaksanakan melalui Budidaya Hortikultura di Lahan Pekarangan, Pekarangan Pangan Lestari (P2L), dan Lumbung Mataraman (dari Dana Keistimewaan). Khusus untuk

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			dan sertifikasi/registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan	Informasi harga komoditas	data	3	3	COVID-19 dapat mengubah proporsi pengeluaran menjadi lebih besar untuk pemenuhan kebutuhan pokoknya, salah satunya untuk belanja makanan.		daerah perkotaan, selain dapat dilaksanakan melalui tiga kegiatan diatas, optimasi pemanfaatan pekarangan dilakukan melalui Bimtek Hidroponik dan Budidaya Pertanian di Lahan Sempit (dari Dana Keistimewaan).
			12. Pengembangan distribusi pangan yang merata dan terjangkau, stabilisasi harga pangan strategis, dan pemantauan distribusi, harga, akses pangan.	pertanian (tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan						
			13. Penurunan jumlah Desa Rawan Pangan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya						3. Pengentasan Desa Rawan Pangan dilaksanakan melalui kolaborasi sinergis dengan para pihak terkait baik di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Desa/Kalurahan. Masing-masing OPD (baik menggunakan dana dari APBD maupun Dana Keistimewaan) maupun Instansi terkait berbagi peran dan memberikan Program/Kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang terjadi di Desa Rawan Pangan sesuai dengan kewenangannya, serta mengintensifkan pendampingan dan pembinaan kepada perangkat desa dan berbagai kelompok/organisasi kemasyarakatan yang ada di desa tersebut dalam rangka pemberdayaan agar pendapatan masyarakat meningkat dan diharapkan jumlah masyarakat miskinnya berkurang. Pemda DIY juga mendorong Pemerintah Desa untuk memanfaatkan Dana Desa dalam menunjang upaya pengentasan Desa Rawan Pangan.
			14. Penyelenggaraan dan pelaksanaan Pusat Perbenihan	Operasional Toko tahun		1	1			
			15. Peningkatan aksesibilitas pangan masyarakat	Tani Indonesia Center (TTIC)						
			16. Pemenuhan kecukupan pangan masyarakat	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)	tahun	1	1			
				Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan						
				Pengembangan usaha pangan masyarakat (PUPM) /TTI	unit	2	2			
				Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal						
				Gerakan Penganekaragaman Pangan	lokasi	33	33			
				PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN						
				Jumlah desa rawan pangan	desa	2	0			
				Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota						
				Laporan ketahanan dan kerentanan pangan	dokumen	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Laporan analisis situasi pangan dan gizi	dokumen	1	1			4. Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD) DIY sudah terbentuk sejak beberapa tahun yang lalu dan sudah melaksanakan kegiatan operasional dengan dipayungi Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY tentang Pembentukan Tim JKPD. Tugas dan fungsinya adalah sebagai tim koordinasi penanganan keamanan pangan di DIY. Ke depan akan disusun Surat Keputusan Gubernur untuk memperkuat dan meningkatkan kinerjanya karena tim ini bekerja lintas sektor dan melibatkan instansi-instansi di luar lingkup Pemda DIY.
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi						5. Penanganan keamanan pangan khususnya Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) di wilayah DIY sudah dilakukan melalui pengawasan dan pembinaan keamanan pangan serta penjaminan mutu dan keamanan pangan melalui proses sertifikasi dan registrasi bagi pelaku usaha PSAT. Di tahap produksi dimulai dari kegiatan budidaya (<i>on farm</i>), Pemda DIY mendorong para petani/pekebun/peternak untuk melaksanakan budidaya mengacu pada Tata Cara Budidaya yang Baik dan Benar, diantaranya dengan mendorong pemanfaatan agen pengendali hayati yang ramah lingkungan serta penggunaan pestisida nabati. Begitu juga dalam kegiatan produksi pangan melalui
				Desa mandiri pangan	desa	6	6			
				Lembaga Akses gapoktan Masyarakat (LAPM)	gapoktan	3	3			
				PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN						
				Persentase peningkatan ketersediaan dan konsumsi energi	%	0,08	0			
				Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi						
				Operasional Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) DIY	tahun	1	1			
				Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						
				Sertifikat dan Register PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan)	dokumen	4	4			
				Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						
				Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan	%	80	80			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<p>penerapan hiegene dan sanitasi yang baik bagi para pelaku usaha pangan. Untuk penanganan keamanan PSAT lintas provinsi, menyesuaikan dengan kewenangan dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kerja sama lintas provinsi untuk pengawasan peredaran PSAT yang aman konsumsi melalui Mitra Praja Utama (MPU). Aturan teknis penjaminan mutu keamanan pangan di DIY sudah ada dalam Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Penjaminan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan, dimana dalam Pergub tersebut sudah memuat materi dari 6 amanat Pergub yang harus disusun sebagai turunan dari Perda 2 Tahun 2014. Keduanya menjadi landasan dalam implementasi penanganan keamanan PSAT di DIY.</p>

4) *Urusan Pertanahan*

a) *Kondisi Umum*

Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, disebutkan bahwa Urusan Pertanahan merupakan salah satu Kewenangan dalam 5 (lima) urusan Keistimewaan dimana penyelenggaraannya didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan pada rakyat. Dalam penyelenggaraan kewenangan pertanahan tersebut, Kasultanan dan Kadipaten dinyatakan sebagai badan hukum. Kasultanan sebagai badan hukum merupakan subjek hak yang mempunyai hak milik atas Tanah Kasultanan. Kadipaten sebagai badan hukum merupakan subjek hak yang mempunyai hak milik atas Tanah Kadipaten. Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten meliputi tanah keprabon dan tanah bukan keprabon yang terdapat di seluruh kabupaten/kota dalam wilayah DIY.

Kasultanan dan Kadipaten berwenang mengelola dan memanfaatkan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten diatur dalam Perdas DIY Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, meliputi : 1) Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, terdiri dari penatausahaan, pemeliharaan dokumen, dan pengawasan. 2) Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, terdiri dari perlindungan, penggunaan, dan pelepasan.

Sebagaimana ketentuan dalam Perdas DIY Nomor 1 Tahun 2017, terhadap Tanah Kasultanan maupun Tanah Kadipaten perlu dilakukan penatausahaan pertanahan. Penatausahaan Tanah Kasultanan merupakan kewenangan Kasultanan dan penatausahaan Tanah Kadipaten merupakan kewenangan

Kadipaten. Penatausahaan pertanahan ini meliputi aspek inventarisasi, identifikasi, verifikasi, pemetaan, dan pendaftaran. Fasilitas yang diberikan: 1) Kegiatan inventarisasi, identifikasi, verifikasi, pemetaan dan pendaftaran tanah. 2) Pengadaan sarana prasarana untuk perawatan dan pemeliharaan dokumen. 3) Penyelenggaraan pemantauan dan penertiban penggunaan Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten yang menyalahi Serat Kekancingan. 4) Penanganan sengketa atas Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten. 5) Penyiapan bahan pertimbangan teknis izin penggunaan tanah.

(1) Kegiatan peremajaan data Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten.

Berkenaan dengan hal diatas, realisasi kinerja urusan pertanahan dalam RPJMD 2017-2022 ditentukan dengan dua indikator kinerja sasaran: (1) persentase penyelenggaraan administrasi pertanahan sesuai regulasi; dan (2) Persentase fasilitas tertib administrasi Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa.

Tabel 3.103. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2020	2021			Target akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase penyelenggaraan administrasi pertanahan sesuai regulasi	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase fasilitas tertib administrasi tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa	%	61,25	73,16	74,11	101,30	88,67	83,58

Sumber: DPTR DIY, 2022

(1) Persentase penyelenggaraan administrasi pertanahan sesuai regulasi

Pada tahun 2021 kinerja urusan pertanahan dengan indikator kinerja sasaran berupa persentase penyelenggaraan administrasi pertanahan sesuai regulasi pada tahun telah sesuai target. Hal ini dapat diukur dari pelayanan terhadap permohonan pengajuan ijin penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum. Terdapat tujuh permohonan yang masuk dan telah ditindaklanjuti dimana seluruhnya telah terbit ijin penetapan lokasinya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.104. Rincian Permohonan Ijin Penetapan Lokasi

No	Uraian	Nomor SK
1	Rencana Pembangunan Jalan Ruas Jalan Hargomulyo-Watugajah di Kab. Gunungkidul (5,66 Ha) dengan Nomor SK Nomor: 100/Kep/2021 tanggal 3 Mei 2021 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Ruas Jalan Hargomulyo - Watugajah Kabupaten Gunungkidul;	Nomor SK Nomor: 100/Kep/2021 tanggal 3 Mei 2021
2	Pembangunan Overpass Flyover JPL 667 Jalur Kereta Api Lintas Yogyakarta-Kutoarjo (0,29 Ha) dengan SK pembentukan Tim Persiapan Nomor : 192/Tim/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Overpass Flyover JPL 667 Jalur Kereta Api Lintas Yogyakarta-Kutoarjo.	Nomor SK : 192/TIM/2021 tanggal 10 Juni 2021
3	Rencana Pengadaan Tanah Ruas Jalan Prambanan - Lemahbang segmen B dengan Nomor SK : 301/KEP/2021 tanggal 4 Agustus 2021	Nomor SK : 301/KEP/2021 tanggal 4 Agustus 2021
4	Penetapan Lokasi pembangunan jalan Cinomati di Kabupaten Bantul (perpanjangan penetapan lokasi)	Nomor SK : 302/KEP/2021 tanggal 4 Oktober 2021
5	Penetapan Lokasi Pembangunan Pengembangan Kampus II Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta di Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul	SK Nomor: 322/Kep/2021
6	Penetapan Lokasi Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir dan Pengaman Pantai Kawasan Yogyakarta International Airport di Kabupaten Kulon Progo	Nomor : 395/KEP/2021 tanggal 13 Desember 2021

No	Uraian	Nomor SK
7	Rencana Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir dan Pengaman Pantai Kawasan Yogyakarta International Airport di Kabupaten Kulon Progo	395/KEP/2021 13 Desember 2021

Sumber: DPTR DIY, 2022

(2) Persentase fasilitasi tertib administrasi tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa

Capaian indikator Persentase fasilitasi tertib administrasi tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa tahun 2021 mencapai target. Realisasi capaian indikator sebesar 74,11% atau 101,30% dari target 73,16%. Dibandingkan dengan tahun 2020, capaian tersebut meningkat 12,86%. Rincian capaian pada tahun 2021, yaitu persentase jumlah Bidang Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa yang didaftarkan untuk dapat dikelola serta dapat dimanfaatkan sebesar 74,11% didukung paling besar dari capaian persentase bidang tanah kasultanan yang didaftarkan sebanyak 13.710 bidang dan tanah desa 1.625 bidang dari target keseluruhan 21.877 bidang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten agar memiliki kepastian hukum. Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sifatnya berkelanjutan. Sampai dengan tahun 2021 telah didaftarkan sebanyak 13.710 bidang dan telah terbit sebanyak 8.952 sertifikat.

Tabel 3.105. Capaian Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

No	Kabupaten/ Kota	Pendaftaran									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Jumlah
1	Yogyakarta	45	166	75	50	70	50	75	100	42	673
2	Bantul	0	171	1367	300	350	359	500	395	230	3672
3	Kulon Progo	0	216	176	240	350	400	400	402	151	2335
4	Gunungkidul	0	54	300	300	250	750	785	500	1000	3939
5	Sleman	0	137	252	250	250	1000	1000	202	0	3118
Jumlah		45	744	2170	1140	1270	2559	2760	1599	1423	13710

Sumber: DPTR DIY, 2022

Tabel 3.106. Capaian Pendaftaran Tanah Desa

No	Kabupaten	Jumlah Bidang	Bidang Sudah Sertipikat	Bidang Belum Sertipikat	Sertipikat Terverifikasi	Penyesuaian Sertifikat
1	Bantul	15,743	2,117	13,626	1,889	287
2	Kulon Progo	4,156	3,649	507	3,649	0
3	Gunungkidul	10,882	3,295	7,587	3,295	544
4	Sleman	19,498	7,007	12,491	7,007	794
Jumlah		50,279	16,068	34,221	16,068	1,625

Sumber : DPTR DIY, 2022

b) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2021

Pada tahun 2021 kegiatan Urusan Pertanahan dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.202.142.466, yang dibagi ke dalam dua Program dan dua kegiatan. Pertama, Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang mencakup sub kegiatan Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Kedua, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan yang meliputi dua kegiatan dan 10 sub kegiatan. Secara keseluruhan belanja dapat direalisasi sebanyak Rp4.683.260.711,00 (90,03%), dengan pencapaian fisik sebesar 97,12%. Selanjutnya rincian capaian kinerja program dan kegiatan tertuang dalam tabel berikut.

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	1. Sinkronisasi regulasi penataan ruang (vertikal dan horisontal) 2. Menyebarluaskan informasi penataan ruang 3. Meningkatkan peran serta aparatur dan masyarakat dalam penataan ruang 4. Mewujudkan pelaksanaan kerja sama penyelenggaraan penataan ruang antar wilayah dan sektoral 5. Mengefektifkan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW 6. Mengembalikan, memperbaiki, menguatkan, dan mengembangkan fungsi satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten 7. Meningkatkan kualitas penataan administrasi pertanahan	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM Persentase pengajuan % permohonan yang ditindaklanjuti sesuai peraturan perundangan Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Bahan Penerbitan dokumen Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN Bidang tanah kasultanan, tanah kadipaten yang sudah didaftarkan di BPN Dokumen tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang dipelihara		100	100	-	Belum adanya persamaan persepsi antara kanwil BPN, Kantah Kabupaten. meskipun kementerian ATR sudah mengeluarkan juknis dan Kanwil BPN sudah menerbitkan SOP namun di tingkat Kabupaten belum melaksanakan juknis dan SOP yang ada. Adapun upaya yang sudah dilakukan sampai dengan triwulan I, yaitu : a. Koordinasi dan konsolidasi dengan Kanwil BPN / Kantah Kabupaten Kota kaitannya dengan penyusunan SOP yang	Perlunya sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat terdampak Percepatan pendaftaran tanah kasultanan dan tanah kadipaten serta penyelesaian permasalahan pertanahan sesuai dengan aturan yang berlaku	1. Urusan Wajib Tindak lanjut yang akan dilakukan: 1. Terkait dengan peningkatan konsistensi dalam implementasi RTRW pada tahun 2021 telah dilaksanakan beberapa aktivitas kegiatan berupa, antara lain : a. Evaluasi keterpaduan indikasi program. b. Publikasi terkait dengan informasi tata ruang yang dikemas melalui talkshow; c. Publikasi terkait dengan informasi tata ruang yang ditayangkan di media massa (media cetak); 2. Kegiatan sosialisasi yang sudah dilakukan pada tahun 2021, yaitu Penyebarluasan informasi dokumen tata ruang (Perdas Nomor 2 Tahun 2017) melalui sosialisasi yang dilaksanakan pada Desa/ Kelurahan di 32 lokasi dengan tujuan untuk meningkatkan

No	Ururan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			8. Mewujudkan penataan dan pemanfaatan tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa sesuai peruntukan	Penurunan ketidaksesuaian penggunaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	bidang	50	50	sebenarnya secara substansi sudah ada dalam Petunjuk Teknis Kementerian ATR/BPN Nomor 4/Juknis-HK.02.01/X/2019 tentang Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Wilayah Provinsi DIY dan Surat		pemahaman tentang regulasi penataan ruang keistimewaan.
			9. Persentase peningkatan Budaya tak benda yang dilestarikan	Bidang tanah desa yang didaftarkan di BPN	bidang	5000	1625	Kementerian ATR/ BPN Nomor : HP.02/1419-34/VII/2020 tentang SOP Pelaksanaan Juknis Menteri		3. Model kegiatan yang disebutkan pada poin 1 dan 2 akan menjadi aktivitas kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun akan datang dengan melibatkan pihak terkait.
				persentase desa yang sudah mempunyai perdes pemanfaatan tanah desa	%	15.31	653.17	ATR/KaBPN Nomor 4/Juknis HK.02.01/X/2019; b. Masih menunggu adanya pejabat pengganti Penghageng Tepas Panitikismo Kraton Ngayogyakarta yang berwenang dalam mengeluarkan rekomendasi surat kekancingan;		
				Persentase pengajuan serah serim yang ditindaklanjuti	%	100	100			
				persentase pelayanan sarana prasarana keistimewaan terhadap pelaksanaan kegiatan keistimewaan urusan pertanahan	%	100	100			
				Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten						
				Cetak dan penyerahan peta batas administrasi wilayah Kelurahan dan Peta Sarana Prasarana Kelurahan di Kota Yogyakarta	Kelurahan	45	45			
				Identifikasi dokumen Keputusan Kepala Daerah DIY tentang pemberian Hak Atas Tanah	keputusan	500	500			
				Dokumen Evaluasi Pendaftaran tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	dokumen	1	1			

No	Urutan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Rekomendasi Pendaftaran Pencatatan Perubahan Sertipikat Tanah Desa	sertipikat	2090	1663			
				Pemeliharaan Dokumen Pertanahan						
				Dokumen Administrasi Pertanahan yang Terawat dan Terpelihara	lembar	10000	10000			
				Inventarisasi Dokumen Pertanahan di Desa	dokumen	1	1			
				Peningkatan Kapasitas Kasultanan dan Kadipaten	Lembaga Pertanahan					
				Pendampingan Pelayanan Operasional Lembaga Pertanahan Kasultanan dan Kadipaten	persen	100	100			
				Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa						
				Hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa di DIY	Dokumen	1	1			
				Dukungan 100 % terhadap 1. Bidang tanah desa yang telah didaftarkan di BPN (5000 bidang); 2. Tersedianya perdes pemanfaatan tanah desa (15,31%); 3. Penerbitan rekomendasi permohonan surat kekancingan yang ditindaklanjuti (100%) 4. Penerbitan rekomendasi dokumen pemanfaatan	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				tanah kasultanan dan kadipaten (100%)						
				Rekomendasi Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan tanah	Dokumen	1	1			
				Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan						
				Hasil pembahasan usulan perubahan tahun n, rencana n+1 dan rencana n+2 urusan pertanahan	Dokumen	3	3			
				Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan						
				Dokumen Kinerja Pelaksanaan Urusan Keistimewaan Pertanahan	Dokumen	3	3			
				Updating Database Sistem Informasi Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan	Dokumen	1	1			
				Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan						
				Pengembangan aplikasi keistimewaan penatausahaan tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa	aplikasi	1	1			
				Data Spasial Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang telah bersertifikat	bidang	4500	4500			
				Dokumen Sinkronisasi Data Pertanahan	dokumen	1	1			
				Pengembangan Sistem Otomasi Pengajuan Rekomendasi Kekancingan	aplikasi	1	1			

No	Ururan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Dokumen Penelusuran data pertanahan	dokumen	1	1			
				Dokumen Profil Penatagunaan Pertanahan di DIY	dokumen	1	1			
				Cetak buku profil penatagunaan pertanahan di DIY	buku	300	300			
				Updating Data Spasial Tanah Kasultanan dan Kadipaten yang telah bersertifikat dalam sistem informasi pertanahan	sistem	1	1			
				Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten						
				Rekomendasi Kepala DPTR Izin Pemanfaatan Tanah Desa	Persen	100	100			
				Rekomendasi Kepala DPTR tentang Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Persen	100	100			
				Sosialisasi Pemanfaatan Tanah SG, PAG dan Tanah Desa	Lokasi	60	60			
				Review Raperdes Pemanfaatan Tanah Desa	Raperdes	100	100			
				Draft Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfatan Tanah Desa	1 Draft	1	1			
				Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa						
				Penanganan permasalahan keberatan dan sengketa dalam hal	%	100	100			

No	Ururan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				pengelolaan dan pemanfaatan Pertanahan						
				Inventarisasi permasalahan tanah desa di 20 Desa	Dokumen	1	1			
				Verifikasi Permohonan Penyelesaian Tukar menukar	%	100	100			
				Dukungan 100 % terhadap 1. Bidang tanah desa yang telah didaftarkan di BPN (5000 bidang); 2. Tersedianya perdes pemanfaatan tanah desa (15,31%); 3. Penerbitan rekomendasi permohonan serat kekancingan yang ditindaklanjuti (100%) 4. Penerbitan rekomendasi dokumen pemanfaatan tanah kasultanan dan kadipaten (100%)	%	100	100			
				Pengadaan Sarana dan Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Pertanahan	Prasarana Pendukung Keistimewaan Urusan					
				Tersedianya sarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan DIY	Scanner	4	4			

5) *Urusan Lingkungan Hidup*

a) *Kondisi Umum*

Isu prioritas pengelolaan lingkungan hidup di DIY merupakan tantangan yang harus dihadapi untuk menuju kondisi lebih baik. Isu prioritas tersebut dilaksanakan melalui pendekatan *brainstorming* atau diskusi antar *stakeholder* dengan mengacu pada Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah tahun 2021, isu prioritas tersebut yaitu: (1) Persampahan, (2) Pencemaran Air, dan (3) Alih Fungsi Lahan.

Isu persampahan mengemuka karena semakin meningkatnya jumlah produksi sampah, khususnya sampah domestik. Salah satunya dapat dilihat dari volume sampah yang masuk ke TPA Piyungan mengalami peningkatan cukup signifikan, yaitu 567,36 ton/hari pada tahun 2020, kemudian meningkat menjadi 705,12 ton/hari pada tahun 2021. Berdasarkan kajian dari CRISIL di tahap OBC, karakteristik sampah di DIY adalah sampah organik sebesar 46% dan sampah anorganik sebesar 54%. Penggunaan plastik, *styrofoam* dan bahan *non biodegradable* lainnya belum terkendali, sampah jenis ini banyak menumpuk di TPA. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah persampahan dengan pengurangan sampah pada hulunya, misal dengan pembinaan terhadap pengelola sampah mandiri seperti bank sampah atau TPS3R. Selain itu juga melakukan optimalisasi fungsi TPA Piyungan dengan skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), harapannya pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi.

Dari isu pencemaran air, beberapa upaya yang dilakukan Pemda DIY dalam mengatasi pencemaran sungai oleh bakteri koli adalah dengan mengidentifikasi sumber pencemar, mengadakan pembuatan jamban terpadu serta penyedotan jamban secara berkala. Hal ini sebagai upaya untuk

meningkatkan kualitas air, juga sebagai bagian dari upaya pemulihan kualitas air. Salah satu kegiatan yang dilakukan bersama dengan masyarakat dalam rangka memperbaiki kualitas sungai dan mengurangi pencemaran adalah dengan gerakan bersih sungai. Dengan gerakan bersih sungai diharapkan masyarakat dapat memiliki kesadaran dan rasa kepedulian untuk turut menjaga sungai di sekitar tempat tinggalnya.

Isu terkait alih fungsi lahan dipicu dari tekanan penduduk (pertumbuhan penduduk sebesar 1,01% di DIY pada tahun 2020). Kondisi saat ini berdasarkan hasil dari analisis yang dilakukan pada tahun 2020, tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang di DIY sebesar 81,02%. Beberapa tindak lanjut yang dilakukan Pemda DIY adalah mengurangi peningkatan konversi lahan terbuka menjadi lahan terbangun dengan memberikan fasilitas sertifikasi lahan khusus sawah, memberikan pupuk organik, memberikan alat-alat pertanian, dan membuat percontohan pertanian modern di tiga kabupaten yaitu Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kulon Progo. Upaya lain yang dilakukan adalah pengendalian melalui dokumen persetujuan lingkungan dimana seluruh pemanfaatan ruang yang dilakukan harus sesuai dengan peruntukannya. Selain itu juga melakukan audit tata ruang dan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang yang bekerjasama dengan berbagai *stakeholders* yang kemudian ditindaklanjuti dengan penegakan hukum berupa pemberian sanksi administrasi hingga sanksi pidana kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran dalam pemanfaatan ruang.

Sesuai dengan amanat dalam RPJMD DIY 2017-2022, kinerja Urusan Lingkungan Hidup dihitung dengan indikator Ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup. Realisasi ketercapaian kinerja Urusan Lingkungan Hidup dapat dilihat dalam tabel di bawah ini

Tabel 3.108. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup	%	93,12	97,02	91,51	94,32	100	91,51

Sumber: DLHK DIY, 2022

Angka Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup dihitung dari perbandingan antara nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun berjalan (N) dengan target nilai IKLH pada tahun terakhir RPJMD dikalikan 100%. Nilai IKLH DIY pada tahun 2021 adalah sebesar 60,53 dan jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD sebesar 66,15 maka ketercapainnya sebesar 91,51%. Ketidaktercapaian IKLH karena faktor penyusunnya baik nilai IKA, IKU, dan IKTL yang tidak tercapai. Realisasi IKA pada tahun 2021 sebesar 35,42, sedangkan targetnya 40,80. Realisasi IKU sebesar 88,57, masih berada dibawah targetnya yaitu 89,07. Untuk IKTL realisasinya sebesar 58,34 yang juga masih berada dibawah target 2021 yaitu 63,05.

Pada tahun 2021, Pemda DIY mendapatkan penghargaan *Green Leadership “Nirwasita Tantra 2020”* Kategori Pemerintah Daerah Provinsi. Penghargaan ini diberikan oleh Kemen LHK RI kepada kepala daerah yang dinilai berhasil merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan berkelanjutan di daerahnya. Hal ini menunjukkan bahwa Pemda DIY berkomitmen untuk terus menjaga keseimbangan 3 pilar pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan lingkungan.

b) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2021

Pada tahun 2021 Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan melalui kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp22.948.943.597,00. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 6 program yang terdiri dari 13 sub kegiatan. Adapun realisasi dari belanja langsung pada tahun 2021 adalah sebesar Rp18.906.341.360,00 atau sebesar 82,38% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Selanjutnya rincian capaian kinerja program dan kegiatan tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 3.109. Capaian Program dan Sub Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2021

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	1. Meningkatkan kualitas lingkungan melalui Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				Kualitas lingkungan sangat dipengaruhi oleh aktivitas manusia yang masih perlu ditingkatkan pola pemikiran dan kesadarannya untuk mengelola lingkungan secara arif dan bijaksana. Disamping itu, faktor alam yang dinamis turut andil mempengaruhi kualitas lingkungan, baik air, udara maupun tutupan lahan.	Koordinasi pada tahap perencanaan yang lebih konkrit, jangka menengah dan jangka pendek.	a. Urusan Lingkungan Hidup 1. Tanggapan Pemerintah tentang pelaksanaan pengelolaan sampah dengan 3 R, sebagai berikut : Sumber Bakteri Koli dalam air sungai antara lain berasal dari air limbah domestik dan dari sampah organik yang dibuang ke sungai. Pada kelompok masyarakat yang masih membuang sampah ke sungai, antara lain disebabkan karena kurangnya kesadaran dan pengetahuan dalam mengelola sampah, tidak tersedianya fasilitas pembuangan sampah, dan cakupan pelayanan sampah yang rendah di daerah tersebut. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi kondisi tersebut antara lain:
			2. Meningkatkan peranserta para pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;	Pelayanan dokumen lingkungan usaha/kegiatan dan Validasi KLHS untuk KRP Kab/Kota	%	100	0	Pemanfaatan fungsi hutan untuk pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pariwisata, dan pendidikan belum optimal	Pembangunan hutan berbasis fungsi ekonomi, fungsi sosial dan fungsi ekologi	a. Sosialisasi pengelolaan sampah terhadap masyarakat, khususnya di kawasan bantaran sungai, daerah dengan tingkat pencemaran tinggi, wilayah dengan fasilitas pengelolaan sampah minim atau cakupan layanan persampahan yang rendah.
			3. Mendorong pemanfaatan lingkungan hidup yang harmoni dengan daya dukung dan daya tampungnya;	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Risiko Lingkungan Hidup						b. Meningkatkan kapasitas masyarakat agar dapat mengelola sampah di level rumah tangga. Setiap rumah tangga diharapkan dapat menekan produksi sampah dengan menerapkan 3R. Sampah organik diolah sendiri di rumah/pekarangan, sampah anorganik dikelola melalui bank sampah, sedangkan sampah tidak laku jual melalui TPS/TPS 3R.
			4. Meningkatkan efektivitas perlindungan sumber daya alam dan fungsi lingkungan;	Dokumen IKPLHD	dokumen	1	0			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan;	Terlaksananya Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis	bulan	12	1			c. Berdasarkan data timbulan sampah di DIY, sebanyak 53,7% adalah sampah organik dengan dominasi timbulan dari rumah tangga. Oleh karena itu, perlu mendorong masyarakat agar mengelola sampah organik dengan pengomposan, baik secara individu maupun melalui lembaga pengelola sampah mandiri
			6. Meningkatkan efektivitas kerja sama antar pemangku kepentingan dalam pengendalian pencemaran udara;	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP						d. Mensosialisasikan kembali TPS 3R sebagai fasilitas pengelolaan sampah yang dapat diakses oleh setiap anggota masyarakat karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui peran TPS 3R.
			7. Meningkatkan efektivitas kerja sama antar pemangku kepentingan dalam pengendalian polusi;	Jumlah sumber pencemar air sungai (point source) yang ditangani di 10 sungai	usaha/kegiatan	237	0			2. Tanggapan Pemerintah terhadap pengelolaan sampah dari hulu adalah sebagai berikut : Idealnya, panghasil sampah sejak dari sumber melakukan upaya pengelolaan sampah, yaitu berupa pengurangan dan penanganan, sehingga sampah yang masuk ke TPA Piyungan hanya residu saja. Akan tetapi, paradigma masyarakat saat ini masih sebatas pada pemindahan sampah. Pemda DIY sangat mendorong Kabupaten/Kota untuk dapat melakukan pengelolaan sampah di sumbernya, khususnya di Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul.
			8. Meningkatkan peran serta para pemangku kepentingan dalam pengendalian perubahan iklim global dan penanggulangan dampak gas rumah kaca;	Jumlah sumber pencemar air sungai (non point source)	lokasi	120	0			Berdasarkan data dalam Sistem Informasi Pengelolaan Ssampah Nasional (SIPSN), terdapat 56 unit TPS 3R di Kabupaten/Kota di DIY, dengan sebaran 21 unit di Kabupaten Sleman, 2 unit di Kota Yogyakarta, 14 unit di
			9. Meningkatkan sinergisitas dan memperjelas pembagian peran para pemangku kepentingan dalam pengendalian pencemaran udara ambient.	Jumlah sumber pencemar udara (point source) yang ditangani di 5 kabupaten/kota	usaha/kegiatan	80	0			
			10. Meningkatkan kualitas lingkungan melalui Program	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut						

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;							Kabupaten Bantul, 9 unit di Kabupaten Kulon Progo, dan 10 unit di Kabupaten Gunungkidul. TPS 3R merupakan tempat untuk mengelola sampah dengan sistem 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) yang menekankan pengelolaan sampah dengan cara mengurangi timbulan sampah (reduce), memilah sampah untuk digunakan kembali atau dijual sebagai barang bekas yang masih dapat dipakai (reuse) dan memproses sampah untuk dapat digunakan kembali sesuai fungsinya (recycle). Fasilitas TPS 3R tersebut dapat digunakan untuk mereduksi sampah sebelum masuk ke TPA. Namun, saat ini banyak TPS3R yang kurang berfungsi optimal. Pada tahun anggaran 2021, DLHK DIY sedang menyusun kajian Evaluasi Pengurangan Sampah dari Pengelolaan Sampah Mandiri, guna mengetahui tingkat efektivitas pemanfaatan TPS 3R eksisting, menganalisis kebutuhan fasilitas TPS 3R di setiap Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan jumlah timbulan sampah dan cakupan layanan, serta menyusun rekomendasi untuk mengoptimalkan kinerja setiap TPS 3R yang sudah, baik secara teknis maupun manajemen pengelolaannya. 3. Tanggapan Pemerintah DIY perlu memperkuat penerbitan ijin AMDAL untuk pendirian hotel, mall dan gedung-gedung lainnya yang dapat mengurangi penurunan fungsi air tanah dan mengurangi daerah resapan air :
			11. Meningkatkan peran serta para pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;	Inventarisasi Sumber Pencemar	paket	1	0			
			12. Mendorong pemanfaatan lingkungan hidup yang harmoni dengan daya dukung dan daya tampungnya;	Kajian Penetapan Kelas Air Sungai di DIY	dokumen	1	0			
			13. Meningkatkan efektivitas perlindungan sumber daya alam dan fungsi lingkungan;	Monitoring dan Evaluasi Jakstrada Pengelolaan Sampah	dokumen	1	0			
			14. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan;	Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Mandiri	angkatan	15	0			
			15. Meningkatkan efektivitas kerja sama antar pemangku kepentingan dalam pengendalian pencemaran air sungai;	Pembinaan Sumber Pencemar (Point Source) terhadap pelaku usaha/kegiatan	usaha/ kegiatan	237	0			
			16. Mengembangkan dan meningkatkan sistem hukum lingkungan untuk	Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Kualitas Air dan udara (Air laut,	dokumen	4	0			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			menjamin terlaksananya supremasi hukum;	air sungai, air tanah, Udara ambien metode pasif)						Tindak lanjut yang akan dilakukan:
			17. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sampah;	Pembinaan dan Pengendalian Pencemaran Air, Udara, dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota di DIY	kab/ kota	5	0			a. Melaksanakan koordinasi dan komunikasi intensif dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, untuk sinkronisasi pelaksanaan penilaian/pemeriksaan dokumen Amdal/UKL-UPL khususnya terkait aspek kesesuaian tata ruang, ketersediaan cadangan air, dan pengolahan air limbah dalam proses penerbitan persetujuan lingkungan.
			18. Peningkatan pembinaan bagi kelompok masyarakat peduli lingkungan.	Pembinaan Pengelolaan Limbah B3	kab/ kota	5	0			b. Menyiapkan Tim Uji Kelayakan Lingkungan untuk menilai dokumen Amdal sesuai dengan kualifikasi keahlian yang dipersyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk tingkat Provinsi maupun Kabupaten Kota.
			19. Meningkatkan kerja sama dan koordinasi lintas perangkat Daerah untuk melaksanakan Program Penambahan Tutupan Vegetasi;	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi						
			20. Meningkatkan aksesibilitas dengan para pemrakarsa kegiatan untuk fasilitasi lahan atau pengembangan tutupan vegetasi dan konservasi lahan.	Roadmap Identifikasi Potensi Pengembangan Balai Laboratorium Lingkungan	dokumen	1	0			c. Melakukan pembekalan Tim Uji Kelayakan Lingkungan melalui Kegiatan Upgrading untuk peningkatan kompetensi dalam melakukan penilaian/pemeriksaan dokumen Amdal/UKL-UPL agar fokus kajian tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
			21. Pembaharuan Sistem Tata Kelola Kehutanan	Pemeliharaan Peralatan Laboratorium lingkungan	unit	9	0			d. Mewajibkan penggunaan air PDAM sebagai sumber utama dan airtanah sebagai cadangan dalam kajian Amdal rencana kegiatan yang berada pada jaringan jalur pipa PDAM.
										e. Mewajibkan recycle (daur ulang) air limbah untuk digunakan

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			22. Mempertahankan keberadaan kawasan hutan	Kalibrasi Peralatan Laboratorium Lingkungan	unit	61	0			flushing toilet atau penyiraman tanaman sebagai upaya pengurangan krisis air.
			23. Pemantapan Kawasan Hutan	Updating Dokumen Laboratorium Terakreditasi	dokumen	4	0			f. Menerima dan mempertimbangkan saran masukan dari masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan kelayakan lingkungan, khususnya terkait dampak atas rencana kegiatan yang akan mempengaruhi kebutuhan esensial mereka seperti air bersih.
			24. Perencanaan Kehutanan yang Komprehensif dan berkesinambungan	Pelayanan Jasa Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan 48 Parameter	LHU	207	49			4. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan terkait dengan pelanggaran pengelolaan sampah menjadi kewenangan Kabupaten/Kota. Penjelasananya terdapat pada :
			25. Peningkatan produktifitas dan nilai tambah sumber daya hutan dan fungsinya	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)						a. Pasal 29 ayat 1 dan 3 Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah bahwa : Setiap orang dilarang :
			26. Optimalisasi Pengelolaan dan pemanfaatan Sumber daya Hutan	Penambahan luas tutupan vegetasi dan lahan terkonservasi (Ha)	hektar	175	0			1) memasukkan sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
			27. Pengembangan Pengelolaan Sumber Daya Hutan yang Berkelanjutan	Persentase Penurunan kerusakan hutan	%	0.1	0			2) mengimpor sampah;
			28. Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan hutan	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati						3) mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
			29. Penguatan Kelembagaan dan SDM Kehutanan	Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Kehati DIY	dokumen	1	0			4) mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
			30. Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan	Rekomendasi Pengelolaan DAS DIY	dokumen	1	0			5) membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
			31. Peningkatan Kontribusi Kehutanan bagi Keberlanjutan Sektor Perekonomian lainnya	Penyusunan Dokumen Rencana Teknis Tahunan Rehabilitasi Hutan	dokumen	1	0			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				dan Lahan DIY Tahun 2023						6) melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
			32. Konservasi Keanekaragaman Hayati	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)						7) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota"
			33. Peningkatan Manfaat Jasa Ekosistem	Konservasi Lahan Pantai melalui Pemeliharaan Tanaman di Pantai Glagah, Kec. Temon, Kab. Kulon Progo	ha	10	0			b. Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah bahwa "Bupati/walikota dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.
			34. Peningkatan Peran Hutan dalam Pemulihan Daya Dukung DAS	Pembinaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan	angkatan	6	0			
			35. Rehabilitasi lahan dan pencegahan bencana alam	Konservasi Daerah Tangkapan Air di Giritirto Purwosari, Gunungkidul	ha	9	0			
			36. Optimalisasi dan Distribusi Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan	Konservasi Daerah Tangkapan Air di Pengasih, Kulon Progo	ha	5	0			
				Penanaman Aren	ha	5	0			
				Pencegahan, Penanggulangan dan Tindak Lanjut Gangguan Keamanan Hutan	BDH	5	0			
				Demplot Tanaman Habitat Kera Ekor Panjang	ha	5	0			
				Penanaman Bambu	ha	6	0			
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati						
				Peningkatan SDM Pengamanan Hutan	angkatan	2	0			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)						
				Tingkat ketaatan usaha/ kegiatan dengan ijin lingkungan dan/atau rekomendasi kelayakan lingkungan dikeluarkan oleh Pemda DIY	%	56.25	0			
				Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH						
				Terlaksananya Penilaian/ Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	bulan	12	1			
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Penilai/ Pemeriksa Dokumen Lingkungan	kab/kota	5	0			
				Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi						
				Berita Acara usaha/ Pengawasan dan kegiatan Pengendalian Ijin Usaha/ Kegiatan		80	0			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH						
				Tindak Lanjut Penegakan Hukum Terhadap Pengaduan	bulan	12	1			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Kasus Pencemaran/ Kerusakan Lingkungan Hidup yang Masuk						
				PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						
				Jumlah penghargaan bidang lingkungan hidup	Penghargaan	3	0			
				Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup						
				Sosialisasi Jogja Hijau kali		5	0			
				Penilaian/ Verifikasi kab/kota		5	0			
				Penghargaan Lingkungan Hidup (Adiwiyata, Proklim)						
				Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Lingkungan Hidup (Adiwiyata, Kalpataru, Proklim, Pengelolaan Sampah Mandiri)	kab/kota	5	2			
				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						
				Jumlah sampah yang dikelola di TPA regional	ton/hari	780	0			
				Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional						
				Kajian Roadmap dokumen Pengurangan Sampah di DIY	dokumen	1	0			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pembuatan Rencana Induk TPA Regional Piyungan	dokumen	1	0			
				Laporan Pengawasan TPA Regional Piyungan	dokumen	1	0			
				Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional						
				Monev Kinerja Pengelolaan Sampah dan Penerimaan Retribusi	dokumen	2	0			
				Merti TPA	kali	1	0			
				Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan Sekitar TPA	lokasi	2	0			
				Operasi dan Pemeliharaan Landfill	Ha	10	0			
				Pemeliharaan Jalan Kawasan TPA	km	1.2	0			
				Operasi dan pemeliharaan Mekanikal Elektrik	paket	1	0			
				Operasi dan Pemeliharaan Jembatan timbang	unit	1	0			
				Hasil Uji Kualitas Udara	jenis	1	0			
				Tenaga Kerja Operasional dan Pemeliharaan TPA	orang	35	35			
				Operasi dan Pemeliharaan Peralatan TPA	paket	1	0			
				Operasi dan pemeliharaan Kolam	unit	1	0			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Air Lindi dan Lingkungan TPA						
				Pengadaan Perlengkapan K3	paket	1	0			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional						
				Panel Otomatis	unit	1	0			
				Genset 100 KvA						
				Dosing Pump	unit	3	0			
				Pompa Pengaduk	unit	2	0			
				Filter (Grease Trap)	unit	1	0			
				Digital water TDS, Temperature, pH meter	unit	1	0			
				Flow Meter	unit	2	0			
				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi						
				Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	100	0			
				Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	0			
				Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100	0			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Tersusunnya Ranwal Renstra OPD 2022 - 2027	dokumen	1	1			
				Tersusunnya Data Statistik LHK 2021	dokumen	1	1			
				Berita Acara Forum Perangkat Daerah	laporan	1	1			
				Tersusunnya ROPK 2022	dokumen	1	1			
				Tersusunnya Renja OPD 2023 dan Renja Perubahan 2022	dokumen	2	1			
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						
				Tersusunnya RKA-P Th 2022 dan DPPA Th 2022	dokumen	2	2			
				Tersusunnya RKA Th 2023 dan DPA Th 2023	dokumen	2	2			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
				Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan	dokumen	12	1			
				Tersusunnya Laporan Tahunan 2021	dokumen	1	1			
				Tersusunnya Dokumen IKLH Tahun 2022	dokumen	1	1			
				Tersusunnya LKjIP 2021	dokumen	1	1			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
				Tersedianya Belanja Gaji Pegawai	tahun	1	0			
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Tersedianya Honor pengelola Keuangan	bulan	12	0			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
				Laporan Keuangan Tahunan Gabungan	dokumen	1	0			
				Laporan Keuangan Tahunan Audited	dokumen	1	0			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						
				Laporan Keuangan Semester	dokumen	2	0			
				Laporan Keuangan Bulanan	dokumen	12	0			
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						
				Tersedianya Honor pengelola Barang	bulan	12	0			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
				Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jenis	12	0			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
				Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor	jenis	46	0			
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
				Tersedianya peralatan rumah tangga	jenis	25	0			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
				Terlaksananya penggandaan/Fotocopy	lembar	128500	1000			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Terlaksananya pengadaan barang cetakan	jenis	13	0			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
				Tersedianya bahan bacaan 2 SKH	bulan	12	1			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
				Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah	bulan	12	0			
				Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi Dalam Daerah	bulan	12	1			
				Tersedianya Makan dan Minum Rapat	bulan	12	1			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
				Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	unit	1	0			
				Pengadaan GPS mapping	unit	1	0			
				Pengadaan PRINTER Officejet	unit	1	0			
				Pengadaan Notebook/ Laptop	unit	2	0			
				Pengadaan Alat fogging	unit	2	0			
				Pengadaan LCD Projector	unit	1	0			
				Pengadaan PRINTER Laserjet	unit	1	0			
				Pengadaan Termogun	buah	5	0			
				Pengadaan Webcam	buah	5	0			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pengadaan Printer	unit	2	0			
				Pengadaan PC/ Komputer	unit	2	0			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
				Pengadaan Almari Arsip	unit	3	0			
				Pengadaan Alat Pendingin/ AC Panasonic	unit	2	0			
				Pengadaan Alat Pendingin/ AC LG	unit	2	0			
				Pengadaan Pannel Kontrol Pompa Balai Benih	unit	1	0			
				Pengadaan Rak Arsip	unit	5	0			
				Pengadaan tangga almunium	unit	1	0			
				Pengadaan Pompa Air	unit	2	0			
				Pengadaan Genset Kantor Induk DLHK DIY	unit	1	0			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
				Tersedianya Materai	lembar	637	0			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
				Terlaksananya Pembayaran Tagihan Sambungan Telepon, Tagihan Rekening Air, Tagihan Rekening Listrik	bulan	12	1			
				Pengadaan akun virtual meeting	akun	4	4			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Tersedianya retribusi dan/atau pajak	tahun	1	0			
				Belanja Jasa Kebersihan	tahun	1	0			
				Tersedianya Pengadaan Jasa Keamanan	tahun	1	0			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
				Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	unit	1	0			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
				Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	unit	103	0			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
				Pemeliharaan PABX 28 Port dan Telepon	unit	2	0			
				Pemeliharaan Telepon	unit	14	0			
				Pemeliharaan Jaringan Internet Laboratorium	paket	1	0			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Lingkungan DLHK - Kantor Wiyoro						
				Pemeliharaan Sound System dan Wireless Induk DLHK	unit	2	0			
				Pemeliharaan Pompa Air	unit	4	0			
				Pemeliharaan Pemotong Rumput Tahura	unit	2	0			
				Pemeliharaan AC	unit	108	0			
				Pemeliharaan Laptop/ Notebook	unit	45	0			
				Pemeliharaan Faksimili	unit	1	0			
				Pemeliharaan Mesin Ketik	unit	9	0			
				Pemeliharaan Jaringan Internet DLHK	paket	2	0			
				Pemeliharaan Filling Kabinet	unit	5	0			
				Pemeliharaan Jaringan Telepon Laboratorium	paket	1	0			
				Lingkungan DLHK - Kantor Wiyoro						
				Pemeliharaan TV LCD	unit	1	0			
				Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	buah	7	0			
				Pemeliharaan Komputer/ PC	unit	60	0			
				pemeliharaan Jaringan Listrik	paket	1	0			
				Pemeliharaan Genset	unit	1	0			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pemeliharaan Pemotongan Rumput Balai Benih	unit	1	0			
				Pemeliharaan Gergaji	unit	4	0			
				Pemeliharaan PABX 20 Port dan Telepon	unit	1	0			
				Pemeliharaan LCD	unit	4	0			
				Pemeliharaan CCTV Induk DLHK	unit	1	0			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
				Pemeliharaan KM/WC BBH	paket	1	0			
				Pemeliharaan Kantor Tahura	paket	1	0			
				Pemeliharaan Gedung DLHK (Pembuatan Pintu Pagar Gedung Laboratorium Lingkungan DLHK)	paket	1	0			
				Pemeliharaan Ruang Bidang P3KLH	paket	1	0			
				Pemeliharaan Septitank Laboratorium Lingkungan DLHK	paket	1	0			
				Pemeliharaan KM/WC Bidang RKA	paket	1	0			
				Pemeliharaan Saluran Air Laboratorium Lingkungan DLHK	paket	1	0			
				Pemeliharaan Rutin Gedung Laboratorium Lingkungan DLHK	paket	1	0			

No	Ururan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pemeliharaan KM/WC Laboratorium Lingkungan DLHK	paket	1	0			
				Pemeliharaan Rutin Gedung DLHK	paket	1	0			

6) *Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil*

a) *Kondisi Umum*

Data kependudukan yang dikelola oleh Pemda DIY melalui Biro Tata Pemerintahan Setda DIY harus dapat dioptimalkan untuk kepentingan publik dan lembaga/instansi lain yang memerlukan dalam rangka percepatan pelayanan publik. Keakuratan data penduduk berbasis NIK tidak bisa bermanfaat secara maksimal jika hanya tersimpan di dalam database. Data tersebut justru harus dimanfaatkan sehingga dapat berkontribusi dalam pembangunan nasional. Selain melakukan perjanjian kerja sama pemanfaatan data kependudukan, data kependudukan juga dapat diakses oleh masyarakat umum melalui website kependudukan.jogjapro.go.id dengan berbagai macam bentuk data kependudukan.

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/III/15242/2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 bagi Masyarakat Rentan dan Masyarakat yang belum memiliki NIK, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, Dinas Dukcapil dan Dinas Kesehatan Kab/Kota berkolaborasi untuk menyelenggarakan pendataan bagi penduduk yang belum ber-NIK agar difasilitasi penerbitan NIK, Kartu Keluarga, dan KTP-el. Sebab NIK dan dokumen kependudukan merupakan syarat wajib yang harus dimiliki setiap penduduk yang mengikuti vaksinasi. Dari hasil kolaborasi, Pemda DIY mendapatkan apresiasi dan penghargaan dari Staf Khusus Presiden atas sinergitas dalam mendukung pelaksanaan percepatan vaksinasi COVID-19 bagi penyandang disabilitas di Provinsi DIY.

Selama 2021 Pemda DIY melalui Biro Tata Pemerintahan Setda DIY berkolaborasi dengan Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota telah melakukan beberapa upaya dalam rangka meningkatkan cakupan perekaman biometrik dan penerbitan KTP-el sekaligus

pemutakhiran data kependudukan. Pertama, menyelenggarakan pelayanan terpadu dengan metode jemput bola dalam rangka percepatan perekaman dan kepemilikan KTP-el yang bertempat di SMAN 1 Wates dan SMKN 1 Pengasih Kabupaten Kulon Progo. Kedua, melakukan jemput bola sisir adminduk pada tingkat kalurahan hingga pedukuhan dengan menysasar masyarakat yang mengalami keterbatasan untuk mengakses layanan administrasi kependudukan. Ketiga, fasilitasi penerbitan dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga dan KTP-el bagi ASN Pemda DIY yang purna tugas. Hal ini dilakukan untuk mendukung pemutakhiran data.

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, Pemda DIY melalui Biro Tata Pemerintahan Setda DIY pada 2021 melaksanakan Rapat Kerja Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Persiapan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dengan mengundang DPRD DIY, KPU DIY, Bawaslu dan Dinas Dukcapil di DIY dengan tujuan untuk mensinergikan data penduduk yang akan digunakan sebagai pemutakhiran DP4 Pemilu.

Sampai dengan Semester II Tahun 2021, jumlah total penduduk DIY berdasarkan database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) di kabupaten/kota sebanyak 3.677.446 orang. Sedangkan jumlah penduduk wajib KTP sebanyak 2.827.079 orang, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1.382.163 orang dan perempuan sebanyak 1.444.916 orang. Dari jumlah penduduk wajib KTP tersebut, sebanyak 2.812.568 atau 99,48% telah melakukan perekaman biometrik dan tercatat di database kependudukan.

Perekaman KTP elektronik pada tahun 2021 sebesar 99,48% yang merupakan perhitungan dari jumlah penduduk wajib KTP yang telah melakukan perekaman (2.812.568 jiwa) dibagi

jumlah total wajib KTP (2.827.301 jiwa). Pencapaian cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun adalah 97,39% yang merupakan perhitungan dari jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 Tahun (875.953) dibagi dengan jumlah penduduk usia 0-18 tahun (899.391), serta untuk penerbitan akta kematian adalah 100% dari perhitungan akta kematian yang terbit dibagi dengan jumlah kematian yang dilaporkan.

Dalam rangka meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA), Pemda DIY melakukan fasilitasi penerbitan akta kelahiran dan KIA bagi anak-anak di panti asuhan dan anak inklusi terutama anak-anak yang tidak diketahui asal-usul dan keluarganya dengan melakukan pendataan, verifikasi dan validasi selanjutnya diterbitkan dokumen kependudukannya. Strategi lain yang dilakukan Pemda DIY adalah melakukan kerja sama pemanfaatan KIA dengan lembaga penyedia layanan publik melalui pemberian insentif bagi anak pemegang KIA lintas Kabupaten/Kota se-DIY. Kerja sama tersebut sudah dirintis sejak 2018 dengan 2 lembaga dan hingga 2021 telah melibatkan partisipasi sebanyak 14 lembaga.

Tabel 3.110. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 Terhadap Target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	Realisasi (%)		
Jumlah instansi lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK	Instansi	10	13	13	100	15	86,67

Sumber: Biro Tapem Setda DIY, 2022

Pada 2021 Pemda DIY melalui Biro Tata Pemerintahan Setda DIY telah memberikan dukungan pemanfaatan data kependudukan kepada OPD di DIY, yaitu Dinsos DIY untuk layanan data kepesertaan jaminan sosial, Disdikpora DIY untuk layanan pendaftaran siswa baru, BKD DIY untuk verifikasi dan validasi data pegawai DIY, dan Diskominfo DIY untuk pendataan persebaran jumlah penduduk yang sudah divaksinasi. Sedangkan dari instansi non-pemerintah yaitu Rumah Sakit Bethesda memanfaatkan data kependudukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pasien.

b) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2021

Pada tahun 2021 Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dilaksanakan dengan alokasi Rp598.721.000,00. Anggaran tersebut untuk membiayai Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dengan 4 program dan 10 sub kegiatan. Secara keseluruhan belanja dapat direalisasikan sebesar Rp502.598.974,00 atau 83,96%, dengan realisasi fisik sebesar 100%.

Tabel 3.111. Capaian Program dan Sub Kegiatan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	BIRO TATA PEMERINTAHAN	1. Harmonisasi hubungan antar pemerintah dalam penyelesaian permasalahan perbatasan antar pemerintah daerah	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				Belum optimalnya hubungan kerja sama yang sinergis dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintah daerah yang lain.	Meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan di Biro Tata Pemerintahan yang responsif melalui koordinasi, sinkronisasi, dan kerja sama antar jenjang pemerintahan.	Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil: 1) KTP-Elektronik bersifat nasional sehingga perekamannya dapat dilakukan dimana saja tanpa perlu pulang ke daerah asal. Seluruh Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota se-Indonesia dapat melakukan perekaman bagi penduduk luar domisili. Biro Tata Pemerintahan berkerjasama dengan Dinas Dukcapil Kab/Kota se DIY telah melaksanakan kegiatan sosialisasi online bertajuk DMM (Dukcapil Menyapa Masyarakat) melalui video conference zoom. Dengan sosialisasi online diharapkan bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat tidak terkecuali penduduk DIY yang berada di luar DIY. Kedepannya akan dilaksanakan DMM dengan tema perekaman KTP-el luar domisili, diharapkan warga masyarakat di luar DIY bisa mengikuti dan mengetahui tatacara perekaman KTP el tanpa perlu pulang ke daerah asal di DIY. 2) Metode pelayanan adminduk di DIY telah memenuhi standarisasi layanan kependudukan yang mudah, efektif dan efisien. Hal ini dapat dilihat dari telah
			2. Meningkatkan respon terhadap setiap perubahan kebijakan dalam proses tata kelola pemerintahan	Jumlah persentase kepemilikan KTP-El, akta kelahiran, dan akta kematian dibagi tiga	%	87,17	98,99	Belum selesainya proses penyusunan data kependudukan yang valid dan up to date (KTP-el), Blangko KTP-el yang harus menunggu dari pemerintah pusat	Meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan di Biro Tata Pemerintahan yang responsif melalui koordinasi, sinkronisasi, dan kerja sama antar jenjang pemerintahan.	
			3. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dalam setiap tingkatan mulai dari tingkat provinsi sampai tingkat desa	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan dalam Satu Provinsi						
			4. Memanfaatkan teknologi informasi dalam upaya meningkatkan kualitas dan kemampuan SDM	Dokumen kependudukan untuk penduduk rentan administrasi kependudukan (Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Orang Terlantar, Kartu Identitas Anak, Akta Kelahiran)	dokumen	50	221			
			5. Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan	Dukungan sebesar 3,08 % terhadap Persentase Kepemilikan Dokumen Penting Administrasi Kependudukan (KTP - el, Akta Kelahiran Anak, Akta Kematian)	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			6. Meningkatkan jumlah instansi/lembaga pengguna data kependudukan untuk kebutuhan verifikasi dan validasi status kependudukan	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan						adanya beberapa kebijakan yang telah diterapkan di DIY seperti diantaranya: a. Pencetakan dokumen adminduk (kecuali KTP dan KIA) tidak lagi menggunakan blangko khusus (security printing) melainkan dapat dicetak sendiri menggunakan kertas HVS A4 80gr sesuai Permendagri Nomor 109 Tahun 2019. b. Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota se DIY telah memiliki berbagai Inovasi pelayanan dalam rangka memudahkan penduduk seperti misalnya model pemaketan dimana penduduk dapat memperoleh beberapa dokumen adminduk dalam sekali pengurusan, bekerjasama dengan instansi/lembaga lain seperti RS dalam proses penerbitan akta lahir, hingga penggunaan media daring dalam pelayanan serta masih ada yang lainnya. c. Dokumen kependudukan yang telah menggunakan TTE (Tanda Tangan Elektronik) seperti KTP-el, KK, Akta Kelahiran, dan Akta Kematian tidak perlu dilegalisir sesuai Permendagri nomor 104 tahun 2019. d. Semua pelayanan adminduk tidak dipungut biaya (gratis). 3) Pemda DIY telah melakukan pemberian akses data kependudukan menggunakan
			7. Mendorong kerja sama antarinstansi/lembaga yang berdampak pada percepatan pelayanan serta perbaikan kualitas data kependudukan	Instansi yang memanfaatkan data kependudukan Dukungan sebesar 3,08 % terhadap Persentase Kepemilikan Dokumen Penting Administrasi Kependudukan (KTP - el, Akta Kelahiran Anak, Akta Kematian)	instansi %	3 100	3 100			
				PROGRAM PENCATATAN SIPIL Jumlah persentase kepemilikan KTP-El, akta kelahiran, dan akta kematian dibagi tiga	%	87,17	98,99			
				Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota KTP-el yang diterbitkan dalam pelayanan terpadu Terselenggaranya Pelayanan Terpadu Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lintas Kab/Kota se-DIY KIA yang diterbitkan dalam pelayanan terpadu Blanko KIA Dukungan sebesar 11,2 % terhadap Persentase Kepemilikan Dokumen Penting Administrasi Kependudukan (KTP - el, Akta Kelahiran Anak, Akta Kematian)	KTP kali KIA keping %	200 2 100 10000 100	214 2 517 10000 100	1. Belum banyak OPD/lembaga yang mengakses data kependudukan untuk keperluan verifikasi dan validasi serta percepatan pelayanan publik 2. Masih banyak OPD/Lembaga yang kurang paham terkait dengan pemanfaatan data kependudukan.		

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Jumlah persentase kepemilikan KTP-El, akta kelahiran, dan akta kematian dibagi tiga	%	87,17	98,99	3. Tingginya gangguan keamanan database dan sistem informasi kependudukan		DWH (Data Wharehouse) terpusat nasional bagi lembaga/instansi pengguna. Untuk menjaga/melindungi data dari gangguan hacker pemberian akses data tersebut di atas dilakukan menggunakan jaringan akses tertutup VPN (Virtual Privat Network) milik Pemda DIY Kerja sama Antar Daerah.
				Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Masyarakat yang memahami Perda No. 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Kartu Identitas Anak	orang	850	850			
				Dukungan sebesar 13,27 % terhadap Persentase Kepemilikan Dokumen Penting Administrasi Kependudukan (KTP - el, Akta Kelahiran Anak, Akta Kematian)	%	100	100			
				Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Lembaga yang dikoordinasi dan bekerjasama dalam Insentif Anak di DIY	lembaga	5	5			
				Dukungan sebesar 13,27 % terhadap Persentase Kepemilikan Dokumen Penting Administrasi Kependudukan (KTP - el, Akta kelahiran Anak, Akta Kematian)	%	100	100			
				Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dukungan sebesar 13,27 % terhadap Persentase Kepemilikan Dokumen Penting Administrasi Kependudukan (KTP - el, Akta kelahiran Anak, Akta Kematian) : 100 %	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Masyarakat yang sadar Adminduk	orang	600	2000			
				Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						
				Laporan Hasil Monitoring dan evaluasi pelayanan Adminduk di kabupaten/kota	dokumen	1	1			
				Dukungan sebesar 61,94 % terhadap Persentase Kepemilikan Dokumen Penting Administrasi Kependudukan (KTP - el, Akta kelahiran Anak, Akta Kematian)	%	100	100			
				BIMBINGAN TEKNIS TERKAIT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDAYAGUNAAN DATA KEPENDUDUKAN						
				Peningkatan Kapasitas Aparatur Adminduk di Kab/kota	orang	0	0			
				Sosialisasi program adminduk melalui media cetak dan elektronik	jenis	0	0			
				Dukungan sebesar 61,94% terhadap Persentase Kepemilikan Dokumen Penting Administrasi Kependudukan (KTP - el, Akta kelahiran Anak, Akta Kematian)	%	0	0			
				Penyediaan blangko KTP-el bagi pelayanan di kab/kota	blangko	0	0			
				Penyebarluasan program pemanfaatan data kependudukan bagi instansi/lembaga penyedia layanan publik	lembaga	0	0			
				Peningkatan pemahaman kebijakan aminduk bagi masyarakat	orang	0	0			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN						
				Jumlah persentase % kepemilikan KTP-El, akta kelahiran, dan akta kematian dibagi tiga		87,17	98,99			
				Penyediaan Data Kependudukan Provinsi						
				Dukungan sebesar 10,48 % terhadap Persentase Kepemilikan Dokumen Penting Administrasi Kependudukan (KTP - el, Akta kelahiran Anak, Akta Kematian)	%	100	100			
				Konten yang dikembangkan dari sistem informasi kependudukan	konten	2	2			
				Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain						
				Profil perkembangan kependudukan	dokumen	1	1			
				Dukungan sebesar 10,48 % terhadap Persentase Kepemilikan Dokumen Penting Administrasi Kependudukan (KTP - el, Akta kelahiran Anak, Akta Kematian)	%	100	100			

7) *Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*

a) *Kondisi Umum*

Pemda DIY menetapkan sasaran kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2021 diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu Jumlah rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan pemberdayaan masyarakat serta Jumlah lembaga kemasyarakatan yang mampu mendorong pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan.

Tabel 3.112. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan pemberdayaan masyarakat	Dokumen	1	4	4	100	4	100
2	Lembaga kemasyarakatan yang mampu mendorong pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan	Lembaga	4	4	4	100	4	100

Sumber: Biro Bermas Setda DIY, 2022

Tahapan dalam pemberdayaan masyarakat diawali dengan menyiapkan bahan perumusan kebijakan berupa kajian strategis tahun 2021. Target dari indikator sasaran Rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan pada tahun 2021 adalah 4 dokumen dan terealisasi 4 dokumen (100%).

Target dari indikator sasaran Lembaga kemasyarakatan yang mampu mendorong pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan pada tahun 2021 adalah 4 lembaga dengan capaian 4 lembaga (100%). Pencapaian indikator kinerja

sasaran dilakukan dengan Fasilitasi dan Pendampingan TP-PKK DIY, Pembinaan terhadap posyandu, LPMD/K serta Pembinaan Bumdes melalui pelatihan bisnis plan dan Manajemen Pengelolaan BUMDes.

Pencapaian indikator kinerja sasaran didorong oleh peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa melalui pendampingan, meningkatkan kapasitas pengurus/pengelola Bumdes dan LPMD/LPMK, PKK dan Posyandu melalui pelatihan, FGD dan sarasehan. Pemberdayaan masyarakat juga dilaksanakan dengan meningkatkan peran Lembaga Kemasyarakatan sesuai dengan prinsip kesetaraan, partisipasi, berkelanjutan, kemandirian dalam mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

Tahun 2021 telah dilakukan pembinaan dan pelatihan bisnis plan dan manajemen pengelolaan BUMDes pada 30 BUMDes di 4 kabupaten, yaitu Bantul, Kulon Progo, Sleman, dan Gunungkidul. Sementara itu untuk Fasilitasi dan pembinaan LPMD/K yang dilakukan melalui kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dalam rangka kegiatan pemberdayaan masyarakat baik dibidang fisik (pembangunan sarana prasarana) maupun non fisik (penyuluhan terkait Pekat, Narkoba, Fanatisme dan pencegahan penyebaran pandemi COVID-19) dilaksanakan di 15 Lokasi Kabupaten /Kota di DIY.

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat juga dilaksanakan melalui Global Gotong Royong (G2R) dan Gerakan Paseduluran Segoro Amarto untuk pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan Global Gotong Royong (G2R) Tetrapeneur dilaksanan dengan beberapa tahapan pelaksanaan kegiatan: Bengkel Kualitas 1, Bengkel Kualitas 2, e-Global Gotong Royong, Ekspose Produk Unggulan,

FGD Bengkel Tetrapeneur, FGD Kelembagaan G2R, G2RT Goes to Embassy dan Kadin, Manajemen BUMDes, Launching Komersialisasi Produk Unggulan G2RT, Penilaian Pasar, Penilaian Rantai serta Seminar G2RT.

Kegiatan Segoro Amarto merupakan salah satu pemberdayaan masyarakat dikhususkan bagi masyarakat yang kurang mampu di wilayah Kota Yogyakarta. Beberapa anggota keluarga dikumpulkan untuk merumuskan kegiatan yang akan dilakukan bersama dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat. Setelah itu dilakukan pelatihan dan praktik yang langsung didampingi oleh para ahli yang berkompeten pada bidang yang telah disepakati oleh masyarakat.

Strategi keberhasilan pencapaian sasaran Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilakukan melalui: 1) Meningkatkan kerja sama Pemda DIY, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah desa, TNI, Pelaku ekonomi, perguruan tinggi serta seluruh pihak yang terlibat dalam penguatan kapasitas dan kemandirian desa. 2) Dukungan terhadap keterlibatan TNI dalam pembangunan desa melalui program Tentara Manunggal Membangun Desa, serta peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat Desa. 3) Peningkatan kapasitas pengelola Bumdes melalui Pelatihan manajemen pengelolaan BUMDes sehingga pengelola BUMDes mampu melaksanakan kegiatan BUMDes mulai dari mencari potensi desa, perencanaan hingga evaluasi kegiatan hasil musyawarah para tokoh masyarakat setempat demi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. 4) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan gerakan pemberdayaan masyarakat yang berasaskan semangat gotong royong masyarakat melalui Gerakan Global Gotong Royong dan Segoro Amarto, mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa, pendapatan masyarakat, dan aset desa.

b) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2021

Pada Tahun 2021 Secara keseluruhan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan melalui program kegiatan dengan alokasi Rp9.330.043.823,00. Pengalokasian anggaran tersebut dibagi dalam 4 Program 9 kegiatan dan 11 Sub kegiatan. Secara keseluruhan belanja langsung dapat direalisasi sebanyak Rp9.152.551.340,00 (98,10%) dengan pencapaian fisik sebesar 100%.

Tabel 3.113. Capaian Program dan Sub Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	KEBUDAYAAN (KEISTIMEWAAN)	BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa melalui KIE dan pendampingan di wilayah prioritas daerah (IPM dan kantong kemiskinan) 2. Percepatan Peningkatan Keberdayaan lembaga masyarakat diprioritaskan pada peningkatan kapasitas pengelola lembaga masyarakat dan Bumdes. 3. Peningkatan cakupan jumlah layanan Bumdes dengan membentuk Bumdes baru dan menyehatkan Bumdes yang telah terbentuk namun kurang aktif. 4. Peningkatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Kegiatan Adat, Seni Tradisi dan Lembaga Budaya Desa/kelurahan model gotong royong Sub kegiatan Pengembangan Kewirausahaan Desa implementasi desa global gotong royong	desa	6	6	1.Lembaga Bumdes belum berperan secara optimal	1.Peningkatan kapasitas pengelola Bumdes sebagai kelembagaan ekonomi desa melalui pelatihan manajemen pengelolaan BUMDes dan membangun jejaring kemitraan sehingga pengelolaan BUMDes dapat lebih optimal	Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, bahwa Badan Usaha Milik Desa merupakan badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa- desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Sehingga akan berdampak pada penurunan angka kemiskinan
					Desa	6	6	2.Pengelolaan lembaga kemasyarakatan desa kurang optimal	2.Meningkatkan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT, RW, PKK, Posyandu, Karang Taruna, LPM) untuk mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga sebagai mitra pemerintah desa/kelurahan dan kalurahan dalam pembangunan	

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	SEKRETARIAT DAERAH		cakupan kerja sama antar Kabupaten/ Kota, Desa/ Kelurahan							
			1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa melalui KIE dan pendampingan di wilayah prioritas daerah (IPM dan kantong kemiskinan)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						Road Map Pengelolaan BUMDesa Tingkat DIY akan dilakukan seiring dengan penambahan pengaturan dari kementerian Desa dan PDTT serta Kementerian Hukum dan HAM.
			2. Percepatan Peningkatan Keberdayaan lembaga masyarakat diprioritaskan pada peningkatan kapasitas pengelola lembaga masyarakat dan Bumdes.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Untuk saat ini telah dilakukan klasifikasi BUMDes berdasar penilaian Pendamping Desa. Dari 392 Kelurahan (55 belum terbentuk, 92 kategori dasar, 157 tumbuh, 34 berkembang, dan 54 maju)
			3. Peningkatan cakupan jumlah layanan Bumdes dengan membentuk Bumdes baru dan menyetatkan	penggunaan dana % yg telah ditetapkan	%	100	100			Telah dilaksanakan pelatihan pengelolaan Bumdes kepada 30 (tigapuluh) Bumdes di DIY, dan pada tahun 2022 akan dilakukan pada 28 BUMdes di DIY
				laporan kinerja Instansi Pemerintah 2020	persen	100	100			Melakukan kerja sama dengan lima unsur kekuatan/Panthelex yaitu pemerintah, akademisi, media, swasta, dan masyarakat untuk berkomitmen
				dokumen renja 2022	dokumen	1	1			
				ROPK 2021	dokumen	1	1			
				DPA 2022	dokumen	1	1			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
				gaji dan tunjangan bulan ASN		12	12			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Bumdes yang telah terbentuk namun kurang aktif.	persentase fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	persen	100	100			menanggulangi kemiskinan di desa
			4. Peningkatan cakupan kerja sama antar Kabupaten/Kota, Desa/Kelurahan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Mendorong peran masyarakat dan lembaga kemasyarakatan untuk menyalurkan aspirasi dalam perencanaan pembangunan melalui Musdes/Muskel
				Filling Cabinet	unit	2	2			Menguatkan sektor usaha Bumdesa dengan melaksanakan pembinaan dan pelatihan Bisnis Plan Bumdesa.
				almari	Unit	3	3			Melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas pengelola Bumdesa
				komputer	unit	5	5			
				printer	unit	3	3			
				Scanner	unit	1	1			
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
				Terpenuhinya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi skpd	bulan	12	12			
				Komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	jenis	7	7			
				alat tulis kantor	jenis	43	43			
				jasa komunikasi online	akun	1	1			
				jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasioal roda 2	unit	2	1			
				barang cetakan	jenis	7	7			
				barang penggandaan	lembar	15000	1500			
				penyediaan jasa surat masuk	surat	2160	2160			
				penyediaan jasa surat keluar	surat	3000	3000			
				penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional roda 4	unit	4	4			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2. Percepatan Peningkatan Keberdayaan lembaga masyarakat diprioritaskan pada peningkatan kapasitas pengelola lembaga masyarakat dan Bumdes.	Bantuan kelembagaan LPMD /LPMK pada lokasi TMMD koordinasi dan sinkronisasi kebijakan sektor PM pengelolaan lembaga bumdes pemantauan dan evaluasi bidang KB KS danpengendalian penduduk	Lokasi	15	15			
			3. Peningkatan cakupan jumlah layanan Bumdes dengan membentuk Bumdes baru dan menyehatkan Bumdes yang telah terbentuk namun kurang aktif.	Implementasi gerakan gotong royong model segoroamarto Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi bidang PP-PA koordinasi dan sinkronisasi bidangKB-KS dan Pengendalian Penduduk	laporan	1	1			
			4. Peningkatan cakupan kerja sama antar Kabupaten/Kota, Desa/Kelurahan	Implementasi gerakan gotong royong model segoroamarto Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi bidang PP-PA koordinasi dan sinkronisasi bidangKB-KS dan Pengendalian Penduduk	laporan	1	1			
				penguatan LPMD , LPMK, TP PKK DIY dan Pokjandalposyandu	laporan	1	1			
				Evaluasi desa /kelurahan melalui lomba desa	desa/kelurahan	6	6			
				bantuan kelembagaan TP PKK DIY	laporan	1	1			
				PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN						
				Rumusan Bahan Pengelolaan	Bahan Kebijakan	4	4			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				kebijakan penguatan sumber daya masyarakat						
				Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah						
				Kajian musdes muskel dan kajian kesiapan DIYmenuju Propinsi inklusi	dokumen	2	2			
				Rumusan kebijakan bidang PP-PA, Bidang KB-KS, dan pengendalian penduduk	dokumen	2	2			

8) *Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*

a) *Kondisi Umum*

Pengendalian penduduk menjadi hal penting, salah satunya melalui Program Keluarga Berencana (KB). Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengatur agar pembangunan Indonesia direncanakan dan dilaksanakan dengan prinsip “Kependudukan sebagai Titik Sentral Kegiatan Pembangunan” dan diupayakan mencapai kondisi Penduduk Tumbuh Seimbang.

Total Fertility Rate (TFR) DIY secara perlahan mengalami kenaikan mulai tahun 2012 sampai tahun 2017 hingga mencapai angka 2,2 sebagaimana hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI). Peningkatan inilah yang disinyalir menjadi penyebab utama terjadinya peningkatan pertumbuhan penduduk di DIY. Pada tahun 2021, angka TFR dengan basis data melalui Survei Kinerja dan Akuntabilitas Program (SKAP) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mencatat angka 1,91.

Pengendalian penduduk di DIY dilaksanakan melalui dua sasaran strategis yaitu Meningkatnya rata-rata usia kawin pertama perempuan dan Meningkatnya keberdayaan keluarga dari balita sampai lansia. Indikator yang dipergunakan untuk sasaran pertama yaitu Umur menikah pertama perempuan, sedangkan untuk sasaran kedua indikator yang dipergunakan adalah Persentase legalitas keluarga (Perkawinan dan Kelahiran). Capaian pada tahun 2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.114. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Umur Menikah Pertama Perempuan	umur	24,61	24,40	25,35	103,89	24,40	103,89
2	Persentase Legalitas Keluarga (Perkawinan dan Kelahiran)	%	97,54	98,00	105,61	107,77	98,00	107,77

Sumber: DP3AP2 DIY, 2022 (data diolah)

Umur Menikah Pertama Perempuan

Sasaran strategis Meningkatnya rata-rata usia kawin pertama perempuan, diukur dengan indikator umur menikah pertama perempuan. Pada tahun 2021 target umur menikah pertama perempuan sebesar 24,40 tahun dengan capaian 25,35 tahun atau dengan persentase capaian 103,89%. Capaian tahun 2021 tersebut sudah mencapai target akhir RPJMD 2017-2022. Upaya selanjutnya yang harus dipertahankan adalah ketercapaian umur ideal menikah pertama perempuan antara 21 sampai dengan 30 tahun. Diharapkan tercapainya usia ideal menikah dapat meningkatkan kualitas keluarga.

Sumber data capaian sasaran diperoleh dari Kemenag DIY kemudian diolah DP3AP2 DIY dan disajikan sebagai berikut.

Tabel 3.115. Rata-Rata Usia Menikah Perempuan

No	Usia Menikah	Jumlah Menikah (F)	Nilai Tengah (n)	F x n	Rata-rata Usia Nikah (Fxn/Jml Menikah)
1	<19	262	19	4.978	19
2	19-21	1.992	20	39.840	20
3	21-30	7.532	25,5	192.066	25,5
4	30+	2.402	30	72.060	30
		12.188		308.944	25,35

Sumber: DP3AP2 DIY, 2022

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan usia perkawinan pertama bagi perempuan diantaranya melalui pendidikan kesehatan reproduksi remaja, sosialisasi program pengendalian penduduk, dan fasilitasi forum penyelenggaraan program kesehatan reproduksi remaja. Selain itu Peningkatan usia perkawinan pertama bagi perempuan dipengaruhi oleh kesadaran pentingnya persiapan pernikahan dari berbagai aspek baik psikologis, ekonomi dan kompromi terhadap situasi yang tengah berlangsung. Hal ini tidak terlepas dari tersusunnya media advokasi bagi remaja tentang kesehatan reproduksi serta adanya koordinasi yang lebih melalui forum. Termasuk terbitnya Pergub Nomor 102 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Program Kesehatan Reproduksi Remaja di DIY.

Capaian indikator Umur menikah pertama perempuan tersebut didukung dari:

- (1) Pembinaan dan pengembangan pengendalian penduduk. Pemda DIY melalui DP3AP2 DIY memiliki kegiatan-kegiatan yang mengintervensi masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di DIY. Data-data mengenai kependudukan memiliki andil dalam perancangan kegiatan-kegiatan tersebut, adanya data yang jelas dan akurat akan mempermudah tercapainya tujuan yang diharapkan. Maka dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Kebijakan Teknis Pengendalian Pertumbuhan Penduduk.
- (2) Pembinaan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Dalam melaksanakan Program Pembinaan Keluarga Berencana terkait dengan penyelenggaraan kesehatan reproduksi remaja, Seksi Keluarga Berencana memiliki regulasi yaitu Pergub Nomor 102 Tahun 2020 tentang Perubahan Pergub Nomor 109 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi Remaja

(KRR). Dalam upaya mengefektifkan koordinasi dan keterpaduan penyelenggaraan KRR Pemda DIY membentuk FP2KRR.

- (3) Persentase Legalitas Keluarga (Perkawinan dan Kelahiran). Sasaran strategis Meningkatnya keberdayaan keluarga dari balita sampai lansia diukur dengan indikator Persentase legalitas keluarga (perkawinan dan kelahiran). Indikator ini pada tahun 2021 ditargetkan 98,00% dan tercapai 105,61%. Berdasarkan capaian tersebut target tahun 2021 memiliki persentase realisasi capaian 107,77%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 97,54% maka capaian tahun 2021 naik 7,61%. Hal ini berarti capaian tahun 2021 telah melebihi target akhir RPJMD sebesar 98%. Namun demikian untuk mempertahankan hasil yang telah dicapai masih diperlukan program dan kegiatan yang mendukung.

Upaya pencapaian target dilakukan melalui peningkatan pemahaman masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan. Harapannya setiap pernikahan yang terjadi selalu sudah mendapatkan buku akte nikah. Selain itu pemenuhan Hak-Hak Anak terutama Hak Sipil Anak sudah menjadi prioritas utama sehingga setiap anak wajib mendapatkan akte kelahiran. Optimalisasi lembaga layanan konseling keluarga juga perlu dimaksimalkan. Saat ini upaya tersebut telah berjalan melalui telekonseling dengan TESAGA DIY. Masyarakat yang mengakses layanan TESAGA mengalami kenaikan baik secara jumlah, jenis, dan macam layanan.

Kendala yang dihadapi dalam mencapai target adalah masih adanya perkawinan yang tidak dilaporkan dan dicatatkan serta kehamilan yang tidak dikehendaki (KTD). Upaya untuk mendorong tercapainya target dilakukan melalui Pembinaan Kabupaten/Kota Layak Anak, serta

menerbitkan Perda DIY Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga serta Pergub Nomor 106 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Capaian indikator persentase legalitas keluarga (perkawinan dan kelahiran) tersebut didukung dari Program Pembinaan Ketahanan Keluarga dan Pengelolaan Bina Keluarga Sejahtera

Ketahanan keluarga adalah pondasi kesejahteraan keluarga, upaya untuk mencapai ketahanan keluarga dimulai dari kepemilikan legalitas keluarga. Sehingga diperlukan sosialisasi yang masif tentang pentingnya ketahanan keluarga.

Untuk menjalankan fungsi serta melakukan aksi yang strategis dan terpadu dalam mendukung pendidikan ketahanan keluarga serta terjadinya perubahan sosial (*social movement*) maka dilaksanakan advokasi Pendidikan ketahanan keluarga. Dalam rangka mewujudkan keluarga yang tangguh serta berketahanan perlu mengoptimalkan implementasi 8 (delapan) fungsi keluarga serta siklus ketahanan keluarga.

b) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2021

Pada tahun 2021 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan melalui kegiatan dengan alokasi Rp1.441.171.250,00. Pengalokasian anggaran tersebut dibagi dalam 4 Program, 7 kegiatan dan 9 Subkegiatan. Secara keseluruhan dapat direalisasi sebanyak Rp1.352.780.326,00 (93,86%), dengan pencapaian fisik sebesar 100%. Selanjutnya rincian capaian kinerja program dan kegiatan tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 3.116. Capaian Program dan Sub Kegiatan Urusan Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Tahun 2021

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program /Kegiatan /Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	Penyusunan kebijakan daerah dalam upaya pengendalian penduduk	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Rata-rata jumlah Rasio anak per keluarga Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk Sub kegiatan Penyerasian Kenijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Koordinasi Kali 2 2 Sub Kegiatan Advokasi dan sosialisasi GDDPK Advokasi dan KIE Kali 5 5 Penduduk yang terlaksana Sosialisasi Juknis Kali 1 1 Kependudukan Penayangan Media kali 6 6 Animasi Presentasi tentang kependudukan		1.17	1.11	1. Era milenial dimana penggunaan Gadget tidak bisa dibatasi sehingga menyebabkan semua informasi masuk dan tidak tersaring, hal-hal buruk mempengaruhi anak 2. Banyaknya pernikahan dini dan kehamilan yang tidak diinginkan 3. Adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan kegiatan dan anggaran di Redesign dan Refocusing 4. Alokasi pembiayaan kegiatan yang terbatas, sehingga sasaran dan jumlah masyarakat yg terpapar pelaksanaan kegiatan tsb juga terbatas 5. Fasilitas, khususnya bahan2 kegiatan/aktivitas pembinaan kegiatan yang terbatas (misalnya : software yg terkini, terupdate, kurikulum pelatihan yg ketinggalan ilmu terkini, juga hardware yg terbatas : bahan/materi sosialisasi dll) 6. SDM pelaksana/petugas yg belum/jarang difasilitasi ilmu2 terkini/up to date, sehingga pentingnya peningkatan kapasitas	Integrasi Program lintas sektor terkait	b. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tindak lanjut terhadap terbitnya Pergub Nomor 102 tahun 2020 tentang penyelenggaraan program kesehatan reproduksi remaja khususnya dalam rangka meningkatkan usia perkawinan pertama bagi perempuan pada tahun 2021 adalah melalui berbagai kegiatan sebagai berikut: 1. Koordinasi Forum Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja (FP2KRR) baik pada level yang strategis maupun teknis karena persoalan Kesehatan reproduksi remaja menyangkut lintas sektor yang cukup kompleks. 2. Sosialisasi Pengendalian Penduduk 3. Advokasi Pengendalian penduduk di Kabupaten / Kota 4. Rakor Pengendalian Penduduk. 5. Pembuatan Video-video pendek Iklan Layanan Masyarakat
			Hanya ada satu Balita dalam satu keluarga	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA Kegiatan Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, KIE Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan lokal Sub kegiatan Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBP melalui Mitra Kerja Sosialisasi Kespro Angkatan 2 2 dimasyarakat						

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program /Kegiatan /Indikator	Satuan	Target	Real-isasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Kegiatan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB Peningkatan Peran serta dan kerja sama organisasi kemasyarakatan dalam pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB Bakti sosial Kali pelayan KB		4	4	SDM/petugas, misal dengan Pelatihan, mengikuti Bimtek dll		6. Bekerjasama dengan LPM UGM melalui KKN Tematik Kesehatan reproduksi di desa-desa lokasi KKN 7. Pembuatan Lagu dengan tema Kesehatan reproduksi dan ditayangkan di media-media sosial
			Pembentukan sistem konseling keluarga yang holistik dan Pengembangan dan penguatan jejaring dalam ketahanan dan kesejahteraan keluarga	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Rasio kekerasan Rasio dalam keluarga PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA Kegiatan Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Sub Kegiatan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Fasilitasi Bina Desa Keluarga Sejahtera Pembinaan dan Desa Pengembangan Bina Keluarga sejahtera Subkegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana Evaluasi Dokumen pendewasaan Usia Perkawinan Subkegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksanaan PIK-R Pendirian PIK R Kelompok Pembinaan PIK R Kelompok Fasilitasi FP2KRR Forum Sub Kegiatan Pengembangan dan Perbanyak Materi Substansi PIK -R, Media Promosi, Alat		0.0013	0.001	1. masih adanya perkawinan dan kelahiran yang tidak didaftarkan; 2. dilakukan Recofusing sebagai dampak adanya Pandemi COVID-19; 3. Alokasi anggaran yang terbatas, sehingga sasaran dan jumlah masyarakat yang menjadi target kegiatan juga terbatas selain itu tidak semua program dan kegiatan terfasilitasi. 4. Keterbatasan kompetensi SDM	Integrasi Program lintas sektor terkait	8. Advokasi dan sosialisasi Kesehatan reproduksi di sekolah-sekolah ramah anak Kegiatan-kegiatan tersebut akan terus dilaksanakan pada tahun 2022. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Perda 7 tahun 2018 Tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga, maka pada tahun 2021 dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: A. Implementasi Fungsi Keluarga, yang terdiri dari: 1. Pembentukan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK R) 2. Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) 3. Sosialisasi Perlindungan Anak terpadu berbasis Masyarakat (PATBM) 4. Pelatihan Kader Ketahanan Keluarga (Konselor Keluarga) 5. Sosialisasi Fungsi Keluarga

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program /Kegiatan /Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Permainan Edukatif Remaj dan Sarana Prasarana lainnya yang dibutuhkan						6. Sosialisasi Kebijakan ketahanan keluarga
				Advokasi/KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	Paket	1	1			7. Advokasi Kebijakan Ketahanan Keluarga
			integratif sesuai dengan rancangan Grand Design Ketahanan Keluarga	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender dan Hak Anak Kewenangan Provinsi						8. Sosialisasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KTPA)
				Sub Kegiatan Advokasi kebijakan dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Perlindungan anak kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota						
				Advokasi Pendidikan Ketahanan Keluarga	Kali	3	3			
				Koordinasi dan sinkronisasi ketahanan keluarga di DIY	Kali	2	2			
				Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya lintas daerah kab/kota						
				Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya lintas daerah kab/kota						
				Subkegiatan Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang wilayah kerjanya lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kab/kota						
				Fasilitasi TeSAGA	Lembaga	1	1			

9) *Urusan Perhubungan*

a) *Kondisi Umum*

Perkembangan serta pembangunan suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh peranan transportasi sebagai urat nadi kehidupan. Penyediaan simpul-simpul transportasi berupa terminal, stasiun, pelabuhan serta bandara akan meningkatkan aksesibilitas wilayah serta meningkatkan mobilitas atau pergerakan masyarakat. Tingginya mobilitas masyarakat tersebut sangat berdampak serta menjadi daya ungkit pada peningkatan perekonomian antar wilayah termasuk DIY.

Berdasarkan Perda DIY Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039 sistem jaringan transportasi terdiri dari sistem jaringan transportasi darat, sistem jaringan transportasi laut dan sistem jaringan transportasi udara. Dalam hal ini Urusan Perhubungan terkonsentrasi pada sistem jaringan transportasi darat. Sistem pengembangan transportasi darat adalah sebagai berikut: 1) Menghubungkan antar pusat kegiatan primer/sekunder. 2) Menghubungkan antar pusat kegiatan primer/sekunder dengan kota di wilayah sekitar.

Guna mewujudkan peningkatan aksesibilitas dan mobilitas perlu adanya dukungan pengembangan sistem jaringan transportasi darat yang meliputi pengembangan sistem jaringan jalan, sistem lalu lintas dan angkutan jalan serta sistem jaringan kereta api. Arah kebijakan yang dilakukan meliputi peningkatan kinerja penyediaan layanan angkutan umum dan tingkat pelayanan jalan dari 43,67% di tahun 2017 menjadi 49,79% di tahun 2022.

Arah kebijakan tersebut mengindikasikan adanya dua variabel tolok ukur, yaitu variabel penyediaan layanan angkutan umum, serta variabel tingkat pelayanan jalan (level of service) dengan target dan capaian pada tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.117. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Kinerja Penyediaan Layanan Angkutan Umum dan Tingkat Pelayanan Jalan	%	49,42	46,17	50,17	108,66	49,79	100,76

Sumber: Dishub DIY, 2022

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja penyediaan layanan angkutan umum dan tingkat pelayanan telah melebihi target, dimana realisasi capaian pada tahun 2021 adalah 50,17%, sedangkan targetnya adalah 46,17% sehingga persentase realisasi terhadap target capaian tahun 2021 adalah 108,66 %. Sedangkan terhadap target akhir RPJMD 2017-2022, realisasi tahun 2021 telah mencapai 100,76%. Ketercapaian target pada tahun 2021 diperoleh melalui penyediaan layanan angkutan umum sebesar 77% dan tingkat pelayanan jalan sebesar 23,34%.

Indikator yang digunakan dalam perhitungan penyediaan layanan angkutan umum didasarkan pada Permenhub Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, serta PM 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek. Dalam peraturan tersebut terdapat 6 sub indikator penilaian, yaitu *Keamanan*,

Keselamatan, Kenyamanan, Keterjangkauan, Kesetaraan, dan Keteraturan.

Nilai capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam penyediaan layanan angkutan umum realisasi tahun 2021 didapatkan dari survei kegiatan Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Angkutan Perkotaan yang telah dilakukan terhadap armada Angkutan Perkotaan di DIY sesuai dengan penilaian 6 sub indikator seperti yang disebutkan di atas, dengan hasil nilai SPM sebesar 54%. Nilai SPM tertinggi pada Angkutan Perkotaan Trans Jogja adalah aspek *keterjangkauan*, disusul dengan aspek *keamanan*, aspek *keselamatan*, aspek *kesetaraan*, aspek *kenyamanan*, dan terakhir adalah aspek *keteraturan*. Nilai terendah pada aspek *keteraturan* ini mengindikasikan beberapa hal yang dapat ditingkatkan dalam pelayanan Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja kepada masyarakat khususnya dalam hal *informasi pelayanan*, *jarak antar bus* yang masih panjang (yang berpengaruh terhadap waktu tunggu penumpang yang cukup lama), serta *supply* armada bus yang dirasa masih kurang oleh masyarakat.

Target penilaian SPM di akhir RPJMD pada tahun 2022 adalah sebesar 52,50%, sedangkan target capaian pada tahun 2021 sebesar 50%. Realisasi capaian kualitas SPM Angkutan Perkotaan pada tahun 2021 telah tercapai sebesar 54%. Artinya target telah tercapai sebelum akhir periode RPJMD. Ketercapaian kualitas standar pelayanan minimal angkutan perkotaan dipengaruhi oleh adanya peningkatan beberapa variabel SPM dengan nilai tertinggi, yaitu *keterjangkauan*, aspek *keamanan*, dan aspek *keselamatan*. Hal ini mengindikasikan bahwa Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja dinilai positif oleh masyarakat dalam hal *tarifnya yang murah dan terjangkau*, *terjamin keamanannya*, serta memiliki nilai *keselamatan* yang cukup tinggi.

Variabel tolok ukur kedua adalah tingkat pelayanan jalan (*level of service*), yang berkaitan dengan sistem jaringan jalan provinsi yang ada di DIY, serta jalan di dalam kawasan prioritas di Kawasan Perkotaan Yogyakarta yaitu Terban, Seturan, Kranggan, serta Godean. Sistem jaringan jalan merupakan satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarki, yang disusun dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan memperhatikan keterhubungan antarkawasan dan/atau dalam kawasan perkotaan, serta perdesaan. Apabila melihat hierarki jalan dengan sistem jaringan jalan menurut wewenang pembinaannya, maka yang termasuk ke dalam jalan provinsi adalah: 1) Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan Ibukota Provinsi dengan Ibukota Kabupaten/Kota; 2) Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan antar Ibukota Kabupaten/Kota; serta 3) Jalan lain yang mempunyai kepentingan strategis terhadap kepentingan provinsi.

Pada aspek tingkat pelayanan jalan (*level of service*) ini, acuan yang digunakan adalah UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan serta PP Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, yang di dalamnya menyebutkan bahwa persyaratan jalan kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 km/jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 meter. Sedangkan persyaratan ruas-ruas jalan yang berada di kawasan prioritas (Terban, Seturan, Kranggan, dan Godean) yang merupakan jalan lokal primer adalah didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 km/jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 meter.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap kinerja pada ruas-ruas jalan tersebut pada tahun 2021 didapat nilai rata-rata kecepatan lalu lintas di jalan provinsi adalah 46,45 km/jam, sedangkan pada kawasan prioritas (Terban, Seturan,

Kranggan, Godean) adalah sebesar 38,81 km/jam. Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa tingkat ketercapaian target layanan jalan (*level of service*) di DIY memenuhi target 100%.

b) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2021

Pada tahun 2021 Urusan Perhubungan dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan dengan alokasi pada DPPA Tahun 2021 sebesar Rp114.672.916.996,00. Pengalokasian anggaran tersebut dibagi dalam 4 program dan 15 sub kegiatan. Secara keseluruhan belanja langsung berdasarkan DPPA tahun 2021 dapat sebanyak Rp111.475.031.813,00 atau 97,00%, dengan pencapaian fisik sebesar 100%.

Tabel 3.118. Capaian Program dan Sub Kegiatan Urusan Perhubungan Tahun 2021

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PERHUBUNGAN	1. Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perlengkapan jalan 2. Penyelenggaraan sosialisasi keselamatan lalu lintas 3. Penyediaan sarana dan prasarana angkutan umum 4. Peningkatan kinerja angkutan umum 5. Peningkatan tertib perizinan angkutan 6. Penyediaan dan peningkatan simpang bersinyal 7. Peningkatan pengawasan dan pengendalian lalu lintas	PROGRAM PENYELENGGARAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG Persentase perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Forum Lalu Lintas SRS Kawasan Strategis Petugas Jogo Margo Dukungan terhadap penataan lalu Lintas di kawasan Harritage City Stiker dan rambu pengarah transportasi pariwisata pada masa pandemik Stiker dan rambu pengarah transportasi pariwisata pada masa pandemik	% bulan orang % unit lembar	18.61 10 72 100 40 12000	27.78 10 72 100 40 12000	Penggunaan badan jalan sebagai tempat parkir kendaraan menyebabkan kapasitas jalan berkurang dan meningkatkan kemacetan lalu lintas	Melaksanakan manajemen lalu lintas khususnya pada kawasan prioritas yaitu melakukan pengendalian dan penertiban kendaraan yang parkir sembarangan dan menyediakan tempat khusus parkir	1. Urusan Wajib 1. Tindak lanjut yang dilaksanakan atas rekomendasi nomor 1) adalah : a. bahwa mulai tahun 2020 Dinas Perhubungan DIY telah melaksanakan beberapa kebijakan (berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Yogyakarta) sebagai berikut : • Pembatasan “penggunaan” kendaraan pribadi di pusat kota melalui penerapan “Pedestrianisasi Malioboro” dan manajemen lalu lintas sistem satu arah di Kawasan Malioboro • pengaturan lalu lintas di sirip-sirip jalan Malioboro dan ruas jalan di sekitar jalan Malioboro • Pengelolaan Parkir di pusat Kota b. Meningkatkan kinerja layanan angkutan umum melalui : • evaluasi kinerja Angkutan Perkotaan dan AKDP • melaksanakan kajian terkait simpul transportasi • melaksanakan kajian Jaringan Transportasi Pariwisata • memberikan subsidi kepada angkutan umum • memperluas jaringan sarana angkutan umum • menambah prasarana angkutan umum antara lain : halte , park and ride • integrasi inter dan antarmoda • aplikasi transjogja 2. Tindak lanjut yang dilaksanakan atas rekomendasi nomor 2) adalah a. Untuk mengantisipasi kemacetan

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pemantauan Penerapan Semi Pedestrian Malioboro	bulan	10	10			lalu lintas yang menuju pusat kota, : • Pada jalan nasional akan dikoordinasikan dengan Kementerian Perhubungan dalam hal ini Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) X wilayah Jateng – DIY. • Pada jalan – jalan propinsi terutama di persimpangan akan mengoptimalkan fungsi APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas) dengan menyesuaikan fase lalu lintas. serta mengendalikan APILL dari Dinas Perhubungan DIY, apabila telah terpasang APILL – ATCS. • Untuk yang berada di jalan perkotaan Yogyakarta akan dikoordinasikan dengan Dishub Kabupaten / Kota serta instansi terkait, baik fungsi APILL dan pengaturan lalu lintas di kawasan perkotaan Yogyakarta. Seperti telah dilakukan penataan kawasan Malioboro dengan penerapan arus lalu lintas Giratori berlawanan arus dan perbaikan desain geometrik Simpang Kleringan. b. Melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dapat diintegrasikan dengan layanan angkutan umum, seperti penerapan sistem satu arah dengan pemberlakuan contra flow khusus untuk angkutan umum (akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Pemerintah Kota Jogja dan Pemerintah Kab). c. Untuk kemacetan lalu lintas menuju obyek wisata yang perlu ditindaklanjuti adalah : • Koordinasi dengan Dishub Kabupaten dan instansi terkait
				Fasilitasi Crew Angkutan Umum Vaksin Tahap 2	orang	1064	963			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<p>melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan lalu lintas terutama pada masa liburan. • Mengusulkan untuk penataan kawasan wisata terpadu di area pariwisata untuk memecah sirkulasi lalu lintas dan penggunaan angkutan umum di dalam kawasan wisata, seperti : lokasi parkir terintegrasi, layanan angkutan wisata di dalam kawasan (angkutan shuttle). d. Penggunaan Teknologi transportasi dalam pengendalian lalu lintas 3. Tindak lanjut yang dilaksanakan atas rekomendasi nomor 3) adalah a. Berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mewujudkan smart integrated parking pusat kota b. Kawasan sumbu filosofis sebagai destinasi wisata di DIY dalam penataan transportasi diprioritaskan pada angkutan tradisional (becak dan andong) c. Melaksanakan kajian jaringan transportasi pariwisata PROGRAM STRATEGIS PEMDA DIY Tindak lanjut yang akan dilakukan: Berkoordinasi dengan kementerian Perhubungan mengingat simpang yang berada di sekitar Bandara, termasuk akses masuk kedalam YIA merupakan jalan nasional Tindak lanjut yang akan dilakukan: 1. Berdasarkan rapat koordinasi dengan pihak terkait mengenai persiapan operasional kereta bandara pada tanggal 2 Juni 2021 disampaikan bahwa kereta api</p>

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										bandara akan dioperasikan mulai tanggal 17 Agustus 2021 masih dalam tahap mobilisasi penumpang dari stasiun Tugu ke Bandara 2. Berkoordinasi lebih dengan PT. KAI dan PT. Angkasa Pura 1 terkait single ticketing handling Tindak lanjut yang akan dilakukan: Berkoordinasi dengan kementerian Perhubungan mengingat simpang yang berada di sekitar Bandara, termasuk akses masuk kedalam YIA merupakan jalan nasional Tindak lanjut yang akan dilakukan: 1. Berdasarkan rapat koordinasi dengan pihak terkait mengenai persiapan operasional kereta bandara pada tanggal 2 Juni 2021 disampaikan bahwa kereta api bandara akan dioperasikan mulai tanggal 17 Agustus 2021 masih dalam tahap mobilisasi penumpang dari stasiun Tugu ke Bandara 2. Berkoordinasi lebih dengan PT. KAI dan PT. Angkasa Pura 1 terkait single ticketing handling Tugas-Tugas Umum Pemerintahan Lainnya yang Dilaksanakan Oleh Daerah Tindak lanjut yang akan dilakukan: Pada tahun anggaran 2022 telah diprogramkan sosialisasi dan edukasi kepada anak sekolah dan masyarakat Tujuan / Masalah Yg Diselesaikan: untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses angkutan umum 3) Adanya regulasi terkait siswa sekolah yang belum berusia 17

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										tahun untuk mengendarai kendaraan bermotor sendiri dan wajib menggunakan layanan transportasi umum Tindak lanjut yang akan dilakukan: Melakukan Sosialisasi dan edukasi untuk para pelajar dari tingkat SD - SMA oleh dinas Perhubungan DIY bekerja sama dengan pihak kepolisian dan Dinas Pendidikan setiap tahun
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	1. Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perlengkapan jalan 2. Penyelenggaraan sosialisasi keselamatan lalu lintas 3. Penyediaan sarana dan prasarana angkutan umum 4. Peningkatan kinerja angkutan umum 5. Peningkatan tertib perizinan angkutan 6. Penyediaan dan peningkatan simpang bersinyal	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah Persentase penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah Persentase sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	% % % %	100 100 100 100	100 100 100 100	Penggunaan badan jalan sebagai tempat parkir kendaraan menyebabkan kapasitas jalan berkurang dan meningkatkan kemacetan lalu lintas	Melaksanakan manajemen lalu lintas khususnya pada kawasan prioritas yaitu melakukan pengendalian dan penertiban kendaraan yang parkir sembarangan dan menyediakan tempat khusus parkir	1. Urusan Wajib 1. Tindak lanjut yang dilaksanakan atas rekomendasi nomor 1) adalah : a. bahwa mulai tahun 2020 Dinas Perhubungan DIY telah melaksanakan beberapa kebijakan (berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Yogyakarta) sebagai berikut : • Pembatasan “penggunaan” kendaraan pribadi di pusat kota melalui penerapan “Pedestrianisasi Malioboro” dan manajemen lalu lintas sistem satu arah di Kawasan Malioboro • pengaturan lalu lintas di sirip-sirip jalan Malioboro dan ruas jalan di sekitar jalan Malioboro • Pengelolaan Parkir di pusat Kota b. Meningkatkan kinerja layanan angkutan umum melalui : • evaluasi kinerja Angkutan Perkotaan dan AKDP • melaksanakan kajian terkait simpul transportasi • melaksanakan kajian Jaringan Transportasi Pariwisata • memberikan subsidi kepada angkutan umum • memperluas jaringan sarana angkutan umum • menambah prasarana angkutan

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			7. Peningkatan pengawasan dan pengendalian lalu lintas	tersedianya ROPK tahun 2021 Tersedianya Dokumen Rencana Kerja (Renja) 2022 tersedianya Rencana Kerja (RENJA) Perubahan 2021 Terlaksananya Forum Perangkat Daerah tersedianya publikasi kepada masyarakat tentang persoalan umum transportasi dan lalu lintas di DIY Dukungan terhadap Perencanaan Penangaaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD RKA 2022 Dukungan terhadap Perencanaan Penangaaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD RKAP 2021 Dukungan terhadap Perencanaan Penangaaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Dukungan terhadap Perencanaan	dokumen dokumen dokumen kali paket % dokumen % dokumen % dokumen % dokumen %	1 1 1 1 1 100 1 100 100 100 1 100 100 100 0	1 1 1 1 1 100 1 100 100 100 1 100 0			umum antara lain : halte , park and ride • integrasi inter dan antarmoda • aplikasi transjogja 2. Tindak lanjut yang dilaksanakan atas rekomendasi nomor 2) adalah a. Untuk mengantisipasi kemacetan lalu lintas yang menuju pusat kota,; • Pada jalan nasional akan dikoordinasikan dengan Kementerian Perhubungan dalam hal ini Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) X wilayah Jateng – DIY. • Pada jalan – jalan propinsi terutama di persimpangan akan mengoptimalkan fungsi APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas) dengan menyesuaikan fase lalu lintas. serta mengendalikan APILL dari Dinas Perhubungan DIY, apabila telah terpasang APILL – ATCS. • Untuk yang berada di jalan perkotaan Yogyakarta akan dikoordinasikan dengan Dishub Kabupaten / Kota serta instansi terkait, baik fungsi APILL dan pengaturan lalu lintas di kawasan perkotaan Yogyakarta. Seperti telah dilakukan penataan kawasan Malioboro dengan penerapan arus lalu lintas Giratori berlawanan arus dan perbaikan desain geometrik Simpang Kleringan. b. Melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dapat diintegrasikan dengan layanan angkutan umum, seperti penerapan sistem satu arah dengan pemberlakuan contra flow khusus untuk angkutan umum (akan

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penenggaraan dan evaluasi kinerja perangkat daerah						dikoordinasikan lebih lanjut dengan Pemerintah Kota Jogja dan Pemerintah Kab). c. Untuk kemacetan lalu lintas menuju obyek wisata yang perlu ditindaklanjuti adalah : • Koordinasi dengan Dishub Kabupaten dan instansi terkait melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk mengurangi kemacetan lalu lintas terutama pada masa liburan. • Mengusulkan untuk penataan kawasan wisata terpadu di area pariwisata untuk memecah sirkulasi lalu lintas dan penggunaan angkutan umum di dalam kawasan wisata, seperti : lokasi parkir terintegrasi, layanan angkutan wisata di dalam kawasan (angkutan shuttle). d. Penggunaan Teknologi transportasi dalam pengendalian lalu lintas 3. Tindak lanjut yang dilaksanakan atas rekomendasi nomor 3) adalah a. Berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mewujudkan smart integrated parking pusat kota b. Kawasan sumbu filosofis sebagai destinasi wisata di DIY dalam penataan transportasi diprioritaskan pada angkutan tradisional (becak dan andong) c. Melaksanakan kajian jaringan transportasi pariwisata PROGRAM STRATEGIS PEMDA DIY Tindak lanjut yang akan dilakukan: Berkoordinasi dengan kementerian Perhubungan mengingat simpang yang berada di sekitar Bandara,
				DPA 2022	dokumen	1	1			
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD						
				Dukungan terhadap %		100	100			
				Perencanaan						
				Penenggaraan dan evaluasi kinerja perangkat daerah						
				DPPA 2021	dokumen	1	1			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
				Dukungan terhadap %		100	100			
				Perencanaan						
				Penenggaraan dan evaluasi kinerja perangkat daerah						
				Tersusunnya LKJIP	dokumen	1	1			
				Tersusunnya LKJ dan LKPJ	dokumen	1	1			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
				Dukungan terhadap %		100	100			
				Perencanaan						
				Penenggaraan dan evaluasi kinerja perangkat daerah						
				Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan	bulan	12	12			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
				Insentif pemungutan tahun kekayaan daerah		1	1			
				Gaji ASN	bulan	12	12			
				Dukungan administrasi keuangan perangkat daerah	%	100	100			
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Honorarium Pengelola Keuangan (9 Orang)	bulan	12	12			termasuk akses masuk kedalam YIA merupakan jalan nasional Tindak lanjut yang akan dilakukan: 1. Berdasarkan rapat koordinasi dengan pihak terkait mengenai persiapan operasional kereta bandara pada tanggal 2 Juni 2021 disampaikan bahwa kereta api bandara akan dioperasikan mulai tanggal 17 Agustus 2021 masih dalam tahap mobilisasi penumpang dari stasiun Tugu ke Bandara 2. Berkoordinasi lebih dengan PT. KAI dan PT. Angkasa Pura 1 terkait single ticketing handling Tindak lanjut yang akan dilakukan: Berkoordinasi dengan kementerian Perhubungan mengingat simpang yang berada di sekitar Bandara, termasuk akses masuk kedalam YIA merupakan jalan nasional Tindak lanjut yang akan dilakukan: 1. Berdasarkan rapat koordinasi dengan pihak terkait mengenai persiapan operasional kereta bandara pada tanggal 2 Juni 2021 disampaikan bahwa kereta api bandara akan dioperasikan mulai tanggal 17 Agustus 2021 masih dalam tahap mobilisasi penumpang dari stasiun Tugu ke Bandara 2. Berkoordinasi lebih dengan PT. KAI dan PT. Angkasa Pura 1 terkait single ticketing handling Tugas-Tugas Umum Pemerintahan Lainnya yang Dilaksanakan Oleh Daerah Tindak
				Tersedianya jasa pintu perlintasan KA	bulan	12	12			
				Honorarium Pengelola Barang (2 orang)	bulan	12	12			
				Dukungan terhadap administrasi keuangan perangkat daerah	%	100	100			
				Tersedianya jasa keamanan kantor/tempat kerja	bulan	12	12			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
				Tersusunnya laporan keuangan tahunan	dokumen	1	1			
				Dukungan terhadap administrasi keuangan perangkat daerah	%	100	100			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						
				tersusunnya laporan keuangan Bulanan	dokumen	12	12			
				tersusunnya laporan keuangan triwulanan	dokumen	4	4			
				tersusunnya laporan keuangan semesteran	dokumen	2	2			
				Dukungan terhadap administrasi keuangan perangkat daerah	%	100	100			
				tersusunnya laporan keuangan Audited	dokumen	1	1			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
				Tersedianya komponen instalasi	jenis	7	7			

No	Ururan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				listrik/penerangan bangunan kantor						<p>lanjut yang akan dilakukan: Pada tahun anggaran 2022 telah diprogramkan sosialisasi dan edukasi kepada anak sekolah dan masyarakat Tujuan / Masalah Yg Diselesaikan: untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses angkutan umum</p> <p>3) Adanya regulasi terkait siswa sekolah yang belum berusia 17 tahun untuk mengendarai kendaraan bermotor sendiri dan wajib menggunakan layanan transportasi umum Tindak lanjut yang akan dilakukan: Melakukan Sosialisasi dan edukasi untuk para pelajar dari tingkat SD - SMA oleh dinas Perhubungan DIY bekerja sama dengan pihak kepolisian dan Dinas Pendidikan setiap tahun</p>
				Dukung administrasi umum perangkat daerah	%	100	100			
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
				Dukung administrasi umum perangkat daerah	%	100	100			
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	jenis	13	13			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
				Tersedianya Barang Penggandaan	jenis	11	11			
				Dukung administrasi umum perangkat daerah	%	100	100			
				Tersedianya Barang Cetak	jenis	12	12			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jenis	4	4			
				Dukung administrasi umum perangkat daerah	%	100	100			
				Penyediaan Bahan/Material						
				Tersedianya bahan material	jenis	4	4			
				Dukung administrasi umum perangkat daerah	%	100	100			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
				Dukung administrasi umum perangkat daerah	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Terlaksanakannya koordinasi	OS	2100	2100			
				Terlaksanakannya koordinasi dan konsultasi luar daerah dan dalam daerah	OP	122	119			
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						
				Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100			
				Terlaksananya Pengelolaan Arsip Statis dan Dinamis SKPD	bulan	12	12			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
				Tersedianya Rumah Genset	paket	1	1			
				Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100			
				Tersedianya CCTV	paket	1	1			
				Terlaksananya Penataan Jaringan Listrik	paket	1	1			
				Tersedianya Genset	unit	1	1			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
				Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100			
				Terlaksananya Pengiriman Surat	bulan	12	12			
				Tersedianya Perangkat Meterai dan Benda Pos	, jenis	3	3			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
				Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12	12			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100			
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
				Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100			
				Terlaksananya kebersihan kantor Dishub (30.624m2)	bulan	12	12			
				Tersedianya Kebutuhan ATK	jenis	31	31			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
				Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100			
				Terpeliharanya dan terlaksananya perizinan kendaraan dinas/operasional	bulan	12	12			
				Kendaraan Roda 4	unit	15	15			
				Kendaraan Roda 2	unit	6	16			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
				Pemeliharaan LAN	bulan	12	12			
				Peralatan Kantor	jenis	5	5			
				Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100			
				Perlengkapan Kantor	jenis	10	10			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
				Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100			
				Jasa Pemeliharaan Kantor Induk	paket	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						
				Persentase penyediaan layanan angkutan umum dalam trayek	%	81.24	84.76			
				Penurunan Rasio Jumlah Kecelakaan	RASIO	0.92	1.79			
				Presentase Penyediaan Layanan Angkutan Umum dalam trayek	%	81.24	84.76			
				Penurunan Rasio Jumlah Kecelakaan	RASIO	0.92	1.79			
				Peningkatan Tertib Perijinan Angkutan Tidak dalam Trayek	%	92	201			
				Penerapan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	%	60	80			
				Penerapan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	%	60	80			
				Penurunan Rasio Jumlah Kecelakaan	RASIO	0.92	1.79			
				Penurunan Rasio Jumlah Kecelakaan	RASIO	0.92	1.79			
				Penurunan Rasio Jumlah Kecelakaan	RASIO	0.92	1.79			
				Penurunan Rasio Jumlah Kecelakaan	RASIO	0.92	1.79			
				Penerapan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	%	60	80			
				Peningkatan Pengendalian Sistem Simpang Bersinyal di Perkotaan Yogyakarta:	%	73.33	53			
				73.33%						
				Penerapan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	%	60	80			
				Penurunan Rasio Jumlah Kecelakaan	RASIO	0.92	1.79			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penumpang yang terlayani pada simpul transportasi dan perparkiran	penumpang per hari	4650	9489			
				kendaraan yang terlayani pada tempat khusus parkir	SRP	830	860			
				Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Jaringan LLAJ Provinsi						
				Penurunan Rasio Jumlah Kecelakaan	rasio	0.92	1.79			
				Terlaksananya Studi Daerah Rawan Kecelakaan di Jalan Provinsi	dokumen	1	1			
				Tersedianya dokumen review kebutuhan fasilitas keselamatan jalan di Ruas Jalan Provinsi	dokumen	1	1			
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi						
				Penurunan Rasio Jumlah Kecelakaan	rasio	0.92	1.79			
				Hibah Pengadaan dan Pemasangan APJ Listrik di Jalan Lingkungan	unit	269	269			
				Hibah Pengadaan dan Pemasangan APJ Listrik Jalan Lingkungan di DIY	unit	65	65			
				Pengadaan dan pemasangan Rambu Lalu lintas di Jalan Provinsi	unit	5	5			
				Hibah Pengadaan dan Pemasangan Warning Light	unit	2	2			
				Hibah Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas	unit	13	13			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Hibah Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikung	unit	62	75			
				Pengadaan dan Pemasangan APJ Listrik di Jalan Provinsi	unit	201	201			
				Pengadaan dan Pemasangan Warning Light di Jalan Provinsi	unit	4	4			
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan						
				Jasa Kebersihan Halte Trans Jogja	tahun	1	1			
				Penurunan Rasio Jumlah Kecelakaan	rasio	0.92	1.79			
				Pemeliharaan Halte 113 unit	tahun	1	1			
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan						
				persentase ketersediaan suku cadang APJ Tenaga Surya sebesar 19.2 %	paket	1	1			
				Ketersediaan Teknisi Perbaikan Perlengkapan Jalan APILL dan APJ sebesar 100%	bulan	12	12			
				persentase ketersediaan suku cadang Rambu sebesar 3.2 %	paket	1	1			
				persentase ketersediaan suku cadang APJ Listrik sebesar 5 %	paket	1	1			
				persentase ketersediaan suku cadang APILL sebesar 20%	paket	1	1			
				persentase EWS terpelihara sebesar 100%	unit	1	1			
				Penurunan Rasio Jumlah Kecelakaan	rasio	0.92	1.79			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penataan Manajemen dan Jaringan Jalan Provinsi						
				terlaksananya pengawasan ketertiban berlalulintas	bulan	12	12			
				Pembangunan ITS (Intelegent transport system)	dokumen	1	1			
				kajian evaluasi kebijakan pengendalian mobilitas pada masa ppkm	dokumen	1	1			
				Pembangunan ITS (Intelegent transport system)	aplikasi	1	1			
				Ketersediaan data kinerja ruas jalan dan simpang di DIY	dokumen	1	1			
				Dukungan pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang diterapkan di jaringan jalan provinsi	%	100	100			
				Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas						
				Jumlah Ketersediaan Operator ATCS	orang	12	12			
				terlaksananya pemeliharaan APILL ATCS 2 Simpang (UIN dan Bantulan)	lokasi	2	2			
				Dukungan pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang diterapkan di jaringan jalan provinsi	%	100	100			
				Terlaksananya pemeliharaan VMS	lokasi	2	2			
				Terlaksananya pemeliharaan APILL ATCS	lokasi	4	4			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi						
				Pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan DIY Tingkat SLTP	peserta	80	80			
				Dukungan pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang diterapkan di jaringan jalan provinsi	%	100	100			
				Sosialisasi keselamatan lalu lintas di Bandara YIA	paket	1	1			
				Safety Driving for millennial untuk SMA	kali	2	2			
				terselenggaranya pemantauan ketertiban lalu lintas di kawasan strategis perkotaan	kawasan	4	4			
				Pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan DIY Tingkat SD	peserta	80	80			
				Kampanye keselamatan lalu lintas	peserta	1000	1000			
				Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ DIY SLTA sederajat.	peserta	80	80			
				Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi						
				Terselenggaranya pemantauan angkutan pada liburan Hari-Hari besar	hari	39	39			
				Dukungan pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang diterapkan di jaringan jalan provinsi	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi						
				Dukungan pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang diterapkan di jaringan jalan provinsi	%	100	100			
				terwujudnya bahan kebijakan bersama mengenai manajemen dan rekayasa lalu lintas	bulan	12	12			
				Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin						
				Surat pertimbangan teknis analisa dampak lalu lintas	dokumen	1	1			
				Dukungan terhadap pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas melalui analisis dampak lalu lintas jalan provinsi	%	100	100			
				persentase surat pertimbangan teknis analisa dampak lalu lintas	%	100	100			
				Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor						
				Jumlah Kendaraan kendaraan		5000	5691			
				Angkutan Barang yang Terperiksa						
				Dukungan penurunan rasio jumlah kecelakaan melalui audit standarisasi kendaraan pengemudi angkutan umum dan angkutan barang	%	100	113.82			
				Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal						
				Dukungan penurunan rasio jumlah kecelakaan melalui audit standarisasi	%	100	110.2			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				kendaraan pengemudi angkutan umum dan angkutan barang						
				Jumlah Kendaraan Angkutan Umum yang Terperiksa	kendaraan	1600	1763			
				Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi						
				Dukungan penurunan rasio jumlah kecelakaan melalui audit standarisasi kendaraan pengemudi angkutan umum dan angkutan barang	%	100	100			
				Terselenggaraanya Pemilihan Abdiyasa Tingkat DIY	orang	15	15			
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						
				Peningkatan penyediaan layanan angkutan umum dalam trayek melalui operasional Trans Jogja	%	100	100			
				Perencanaan Simpul Transportasi DIY	dokumen	1	1			
				Tersedianya hasil perhitungan/appraisal Bus Transjogja 2022	dokumen	1	1			
				Tersusunnya Perhitungan Biaya Operasional Kendaraan Bus Transjogja Tahun 2022	dokumen	1	1			
				Subsidi Penyelenggaraan Trans Jogja 95 armada	tahun	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Publikasi Media Cetak kali Transportasi dan Lalu Lintas di DIY		40	40			
				Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi						
				Rencana Umum Jaringan Trayek AKDP di DIY	dokumen	1	1			
				Peningkatan penyediaan layanan angkutan umum dalam trayek melalui operasional Trans Jogja	%	100	100			
				Studi Transportasi Kawasan Pariwisata DIY	dokumen	1	1			
				Persentase Peningkatan Tertib Perizinan Angkutan Tidak Dalam Trayek	%	15	15			
				Tersedianya Evaluasi dan Pengawasan CCTV Transjogja	laporan	12	12			
				Terselenggaranya Pemantauan dan Pengawasan CCTV Transjogja	bulan	12	12			
				Terselenggaranya Pemantauan dan Pengawasan 95 Bus Trans Jogja yang Beroperasi	bulan	12	12			
				Olah data penumpang transjogja 12Å laporan	laporan	12	12			
				Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi						
				Tersedianya Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Trayek Angkutan Perkotaan	dokumen	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Peningkatan penyediaan layanan angkutan umum dalam trayek melalui penetapan kawasan angkutan perkotaan	%	100	100			
				PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN						
				Penyiapan penyediaan sarana prasarana angkutan perkeretaapian	%	60	75			
				Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian						
				Penyiapan penyediaan sarana prasarana angkutan perkeretaapian	%	60	60			
				Koordinasi dan sinkronisasi Angkutan Barang dan Perkeretaapian di DIY	dokumen	1	1			

10) *Urusan Komunikasi dan Informatika*

a) *Kondisi Umum*

Sebagaimana diamanatkan dalam Pergub DIY No. 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemda DIY mempunyai kewajiban untuk mengumumkan informasi secara berkala mengenai kegiatan, kinerja dan laporan keuangan Badan Publik di lingkup Pemda DIY. Berkenaan dengan ketugasan pelayanan informasi tersebut maka dimanfaatkan beberapa kanal media sosial yang dikelola sebagai saluran informasi, diantaranya: WhatsApp, Instagram (@kominfodiy), Twitter (@kominfodiy), Youtube (Kominfo DIY), dan Facebook *fanspage* (Kominfo DIY). Selain itu publik juga dapat mengakses portal ppid.jogjaprovo.go.id dan menyampaikan aspirasinya berupa keluhan atau masukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik melalui aplikasi E-Lapor DIY. E-Lapor DIY juga telah diintegrasikan dengan Sistem Pengelolaan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) dan *Whistle Blowing System* (WBS). Tahun 2021 keluhan masyarakat atas pelayanan pemda yang tertangani sebesar 88,14% dari 1.121 keluhan. Harapannya aspirasi dari masyarakat ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan DIY.

Pemda DIY juga mengelola layanan informasi berbasis *mobile* yakni Jogja Istimewa, yang di dalamnya berisi informasi tentang Jogja Budaya, Jogja Wisata, Jogja Layanan Publik, Jogja Belajar, Jogja Kuliner, Jogja Info, Jogja Transportasi, Jogja Event, Jogja Galeri, Jogja 360, Jogja Doeloe *Augmented Reality* (AR), dan Jogja *Streaming*. Selain itu layanan aplikasi 'Jogja Istimewa' juga dapat digunakan untuk mengetahui kondisi secara *real time* di berbagai obyek wisata telah dibangun kamera pengawas, yang juga dapat diakses melalui mam.jogjaprovo.go.id. Sebagai bentuk peningkatan pelayanan dan kemudahan bagi pengguna 'Jogja Istimewa Apps' dapat

diakses melalui telepon pintar (*smart phone*). Pada aplikasi ini terdapat fitur pembayaran tiket elektronik (*E-ticket*) pada Museum Sonobudoyo. Perkembangan pandemi COVID-19 telah dibangun berbagai sistem informasi diantaranya corona.jogjaprov.go.id dan ayovaksin.jogjaprov.go.id.

Pemda DIY sudah mempunyai berbagai macam aplikasi/sistem informasi pengelolaan data sebagai sarana dalam proses pengambilan kebijakan. Saat ini aplikasi-aplikasi tersebut dalam proses integrasi agar memudahkan dalam penyajian datanya. Pada akhirnya Pemda DIY membuat suatu sistem informasi eksekutif dalam bentuk *Integrated Development Management Center* (IDMC) yang dirancang untuk membantu pimpinan dalam mengambil kebijakan pembangunan secara cepat berbasis data yang akurat.

Pada tahun 2021 Pemda DIY telah mengintegrasikan 12 urusan ke dalam Sistem Informasi Eksekutif melalui IDMC (idmc.jogjaprov.go.id), antara lain Urusan Kominfo, Urusan Perhubungan, Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (aplikasi Jogja Praja Wibawa), Urusan tata ruang mengintegrasikan spasial Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DIY, Urusan Pertanahan mengintegrasikan luasan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa se-DIY (SI Pertanahan), Urusan Sosial yang mengintegrasikan aplikasi Simnangkis, Urusan Kesehatan, Urusan Pangan, Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Aplikasi SibakulJogja), serta Urusan Tenaga Kerja. IDMC juga mengintegrasikan aplikasi layanan e-Lapor sebagai aplikasi pengaduan pelayanan publik dan informasi *surveillance* yang terkoneksi ke 26 titik CCTV di wilayah DIY.

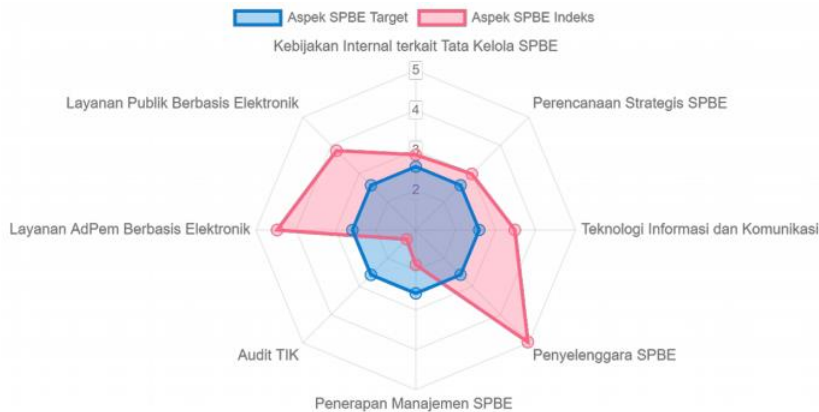
Sesuai amanat Perpres Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pemda DIY telah menerapkan penandatanganan dokumen secara digital atau Tanda Tangan Elektronik (TTE). Percepatan implementasi tanda tangan elektronik dilakukan dengan menerbitkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, TTE tersertifikasi merupakan tanda tangan yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi secara digital dengan menggunakan Sertifikat Elektronik Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Pemda DIY memanfaatkan TTE melalui Sistem Penandatanganan Dokumen Elektronik Pemerintah Daerah DIY (<https://sadewa.jogjaprovo.go.id/>) untuk menandatangani dokumen, hal ini lebih mudah dan menghemat waktu. Hingga akhir tahun 2021 sudah ada 139 orang pejabat di lingkungan Pemda DIY yang menggunakan Sertifikat Elektronik.

Di samping itu, Pemda DIY melakukan pendampingan terhadap aplikasi kenaikan pangkat dan *paperless office* untuk dapat terintegrasi dengan tanda tangan elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Tampilan Aplikasi Sadewa dapat dilihat pada gambar di bawah yang digunakan untuk menandatangani dokumen oleh pimpinan.

Pemda DIY membangun aplikasi E-Office (<https://paperless.jogjaprovo.go.id/>) untuk memudahkan dalam operasional proses bisnis persuratan di instansi dan meminimalisir kontak langsung dengan rekan kerja maupun atasan karena semua proses dilakukan secara elektronik. Aplikasi E-Office telah terintegrasi dengan TTE.

Pelaksanaan Evaluasi SPBE yang dilakukan oleh Kemenpan RB pada tahun 2021, menempatkan Pemda DIY pada peringkat 2 level Pemerintahan Provinsi dengan nilai 3,49 atau berpredikat Baik. Hasil pelaksanaan Evaluasi SPBE menjadi *baseline* kondisi penerapan dengan kesesuaian kriteria dan kondisi yang harus dipenuhi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.



Gambar 3.33. Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2021

Pemanfaatan TIK untuk akselerator pembangunan akan terwujud apabila infrastruktur TIK sebagai lalu lintas data tersedia dengan baik. Pemda DIY telah membangun 260 titik jaringan. Untuk mendukung pendidikan di masa pandemi, seluruh sekolah SMA/K Negeri se DIY telah terkoneksi dengan jaringan yang dimiliki oleh Pemda DIY. Selain itu, untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi melalui penggunaan jaringan internet, telah disediakan 76 titik WiFi gratis diantaranya di kawasan Malioboro dan lokasi wisata tebing Breksi serta 71 titik di lokasi UMKM DIY. Berikut ini dapat disajikan tabel capaian Urusan Komunikasi dan Informasi.

Tabel 3.119. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Komunikasi dan Informasi Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi 2020	2021			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Tar-get	Realisasi	% Realisasi		
Peringkat Keterbukaan Informasi bagi Badan Publik Level Provinsi	Peringkat	9	5	10	50	4	0,25

Sumber: Diskominfo DIY, 2022

Tolok ukur kinerja terdiri dari satu sasaran yaitu Peringkat Keterbukaan Informasi bagi Badan Publik Level Provinsi dengan indikator peringkat keterbukaan informasi badan publik yang dikeluarkan Komisi Informasi Pusat. Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama menargetkan masuk peringkat 5 dalam *cluster informatif*. Berdasarkan nilai skor hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat pada tahun 2021 Pemda DIY berada pada peringkat 10 dengan nilai 91,23 atau berada pada *cluster informatif* untuk Badan Publik kategori Pemerintah Provinsi. Capaian realisasi kinerjanya adalah sebesar 50%. Dibandingkan dengan tahun 2020, terdapat penurunan skor keterbukaan informasi sebesar 2,6 dan tetap berada pada *cluster* tertinggi yaitu *cluster informatif*. Adapun faktor penghambat yang mempengaruhi ketidakcapaian sasaran antara lain: 1) Perubahan sistem peringkat pada keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi Pusat menjadi klasifikasi *clustering*; 2) Adanya pandemi COVID-19 yang membuat persiapan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik terhambat, karena koordinasi yang dilakukan secara online; 3) Visitasi Komisi Informasi Pusat dilakukan secara daring sehingga tidak dapat menilai secara langsung tentang pelayanan keterbukaan informasi oleh Pemda DIY. 4) Tidak adanya masa sanggah dalam penilaian

pemeringkatan keterbukaan badan publik oleh Komisi Informasi Pusat. 5) Tingkat subyektivitas sangat berpengaruh pada setiap indikator penilaian dalam monev Keterbukaan Badan Publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat.

b) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2021

Pada tahun 2021 Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan dengan alokasi Rp33.020.005.276,00. Anggaran bersumber dari APBD sebesar Rp16.415.845.379,00 untuk membiayai Urusan Komunikasi dan Informatika dengan 3 program, 9 kegiatan dan 32 sub kegiatan. Anggaran bersumber pada dana keistimewaan sebesar Rp18.334.401.900,00 untuk membiayai 1 program, 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan. Secara keseluruhan belanja dapat direalisasi sebanyak Rp31.863.405.454,00 atau 96,49%, dengan pencapaian fisik sebesar 100%. Sisa anggaran sebesar Rp964.337.071,00 atau 3,56% antara lain bersumber dari Sisa pengadaan barang dan jasa, Efisiensi belanja perjalanan dinas dan Efisiensi honor narasumber. Selanjutnya rincian capaian kinerja program dan kegiatan tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 3.120. Capaian Program dan Sub Kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2021

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1. Pemberdayaan dan pengembangan: (1) PPID disetiap badan publik; (2) Komunitas masyarakat penggiat Teknologi Informasi 2. Pembuatan dan pengembangan Sistem Informasi Eksekutif (SIE) 3. Pengembangan dan optimalisasi jaringan pemerintah daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Renja, Renja Perubahan, Renstra RKA, RKAP. DPA. DPPA, ROPK, RKT, RKTP Kesepakatan Hasil Forum Perencanaan OPD	Persen	100	100	Perencanaan pengembangan TIK Perangkat Daerah di lingkup Pemda DIY dan belum memedomani Blueprint Pengembangan TIK yang telah disusun	Internalisasi Blueprint Pengembangan TIK di lingkup Pemda DIY dan optimalisasi peran Pengelola TIK di tiap-tiap Perangkat Daerah	Urusan Wajib a. Urusan Komunikasi dan Informatika Tindak lanjut yang akan dilakukan: 1) Sosialisasi dan publikasi berkaitan dengan IDMC akan dilaksanakan dengan mengoptimalkan jejaring dan kanal informasi yang dimiliki oleh Diskominfo DIY. 2) Dalam pemasangan wifi dan CCTV, akan disertai dengan pendampingan penggunaan fasilitas tersebut kepada masyarakat dan pelatihan digital marketing untuk UKM. 3) Akan dilaksanakan Forum Kominfo se-DIY yang diikuti oleh Diskominfo DIY dan Diskominfo Kab/Kota se-DIY.

11) *Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*

a) *Kondisi Umum*

Pandemi COVID-19 hingga tahun 2021 masih mempengaruhi perekonomian masyarakat DIY. PPKM yang masih berlaku menyebabkan aktivitas di Koperasi dan UKM DIY menurun. Untuk mengatasi hal tersebut Pemda DIY melakukan pembinaan dan pendampingan melalui peningkatan aspek Kelembagaan, Usaha Koperasi, Keuangan, Permodalan, dan Manajemen Koperasi. Upaya ini bertujuan agar Koperasi dan UKM dapat kembali meningkatkan kapasitas Koperasi sehingga berdampak pada peningkatan volume usaha / omzet Koperasi.

Sosialisasi akses pembiayaan sebagai sarana penyebaran informasi tentang prosedur untuk mendapatkan akses pembiayaan baik dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dilakukan sebagai salah satu cara pembinaan dan pendampingan. Pemda DIY memberikan hibah barang melalui pasar komunitas ke 10 koperasi. Selain itu, bekerjasama dengan koperasi mebel untuk pengadaan peti mati untuk diserahkan kepada BPBD DIY dan koperasi susu yang diserahkan kepada masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka membantu koperasi untuk meningkatkan omzetnya setelah mengalami penurunan tajam pada triwulan II dan III tahun 2021. Perkembangan omzet koperasi dapat dilihat pada tabel keragaman Koperasi berikut:

Tabel 3.121. Perkembangan Jumlah Koperasi Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Koperasi Aktif	1.782	1.926	1.722	1.758	1.717
2	Koperasi Tidak Aktif	598	63	196	180	271
3	Modal Sendiri (RpJuta)	1.200.158	1.425.918	1.625.568	1.595.511	1.630.287
4	Modal Luar (RpJuta)	2.085.166	2.262.263	2.512.343	2.188.554	2.372.549
5	Volume Usaha (RpJuta)	3.678.342	4.394.362	4.325.218	4.141.871	4.272.359
6	Koperasi Primer	2352	1963	1.890	1.728	1.950
7	Koperasi Sekunder	28	26	28	30	28

Sumber: Diskop dan UKM DIY, 2022

Jumlah koperasi mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut salah satunya didorong oleh adanya sosialisasi mengenai perkoperasian sehingga meningkatkan minat untuk berkoperasi. Kenaikan jumlah koperasi tidak aktif disebabkan oleh kontraksi ekonomi dampak COVID-19 yang menyebabkan kinerja koperasi tidak optimal sehingga tidak dapat melaksanakan RAT selama 2 tahun. Selama kurun waktu 2021, omzet koperasi mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut dikarenakan adanya bantuan hibah berupa uang kepada koperasi dan hibah bahan baku produk untuk kegiatan pasar komunitas dari Pemda DIY melalui Dinas Koperasi dan UKM DIY, serta penurunan level PPKM dari level 4 menjadi level 2 sehingga koperasi dapat beroperasi kembali.

Secara umum jumlah UMKM di DIY dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa perekonomian DIY ditopang oleh UMKM. Namun selama Pandemi COVID-19 terjadi pergeseran skala usaha, dimana jumlah usaha mikro mengalami peningkatan yang signifikan sementara usaha kecil, menengah dan besar justru mengalami penurunan. Berikut ini perkembangan jumlah UMKM menurut skala usaha selama lima tahun terakhir.

Tabel 3.122. Perkembangan Jumlah UMKM Menurut Skala Usaha Tahun 2017-2021

No	Sektor	2017	2018	2019	2020	2021
1	Usaha Mikro	135.799	141.991	143.385	188.033	284.623
2	Usaha Kecil	62.042	64.896	65.533	58.980	16.066
3	Usaha Menengah	37.472	39.196	39.581	30.665	2.110
4	Usaha Besar	12.904	13.498	13.631	10.005	N/A
Jumlah		230.047	238.619	248.217	262.130	302.799

Sumber: Diskop dan UKM DIY, 2022

Peningkatan jumlah usaha mikro dan penurunan usaha kecil, menengah, dan besar disebabkan karena PP Nomor 7 tahun 2021 pasal 35 ayat (3) mengenai kriteria modal usaha UMKM,

sehingga terjadi penyesuaian skala usaha berdasarkan modal yang dimiliki. Selain itu menurunnya ekonomi masyarakat akibat adanya pandemi COVID-19 menyebabkan sebagian UMKM mengurangi jumlah usahanya atau menutup usahanya.

Pemda DIY melalui Dinas Koperasi dan UKM DIY sebagai pembina perkoperasian dan UMKM di DIY memiliki dua Sasaran Strategis dimana realisasi keduanya telah mencapai target yang ditetapkan. Sasaran strategis 1 adalah Meningkatnya kapasitas usaha koperasi dan UMKM terbagi menjadi dua indikator yaitu Omzet Koperasi dan Omzet UKM. Target capaian indikator sasaran Omzet Koperasi tahun 2021 sebesar 4.224.308 Juta Rupiah, sampai dengan bulan Desember 2021 terealisasi 4.272.358 Juta Rupiah. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Persentase realisasi terhadap target mencapai 100,10%. Disisi lain target capaian indikator sasaran Omzet UKM tahun 2021 sebesar 11124 Milyar Rupiah sampai dengan bulan Desember 2021 terealisasi 11152 Milyar Rupiah. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Persentase realisasi terhadap target mencapai 100,25% dan jika dibandingkan dengan target sampai dengan akhir RPJMD, maka Sasaran Strategis 1 diproyeksikan akan berhasil dicapai.

Sasaran strategis 2 adalah Meningkatnya kontribusi wirausaha baru terhadap UMKM dengan indikator Kontribusi jumlah WUB terhadap jumlah UKM. Target capaian indikator sasaran tahun 2021 sebanyak 0,40% sampai dengan akhir Bulan Desember 2021 terealisasi 0,49%. Dengan demikian capaian ini telah mencapai target. Persentase realisasi terhadap target dibandingkan dengan target akhir RPJMD, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai.

Keseluruhan indikator sasaran pada tahun 2021 telah tercapai, namun masih diperlukan perhatian untuk mencapai target

realiasi per tahun sehingga target sampai dengan akhir RPJMD juga dapat tercapai. Selain melakukan pembinaan, inovasi dalam pengembangan bisnis KUMKM juga perlu ditumbuhkan dengan harapan dapat menarik perhatian pasar sehingga dapat menaikkan omzet KUMKM dan menambah minat masyarakat untuk menjadi wirausaha baru.

Tabel 3.123. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Koperasi dan UKM Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2020	2021			Target akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Omzet Koperasi	Rp. Juta	4.142.871	4.224.308	4.272.358	101,14	3.772.250	113,26
2	Omzet UKM	Rp. Milyar	10.964	11.124	11.152	100,25	11.347	98,28
3	Kontribusi jumlah WUB terhadap jumlah UKM	%	0,40	0,40	0,49	122,50	0,40	122,50

Sumber: Diskop dan UKM DIY, 2022

Kesulitan permodalan yang dialami oleh KUMKM ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat melalui LPDB memberikan kemudahan skema permodalan dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), sehingga banyak Koperasi terbantu dalam mendapatkan modal usaha.

Pemda DIY bekerjasama dengan Kementerian Koperasi memberikan vaksinasi kepada UMKM, fasilitasi sertifikasi PIRT dan halal, subsidi kemudahan ongkos kirim atau free-ongkir untuk UMKM yang tergabung dalam Sibakul Markethub, fasilitasi untuk pengenalan produk UMKM secara global, melalui pameran virtual Wirakarya Sibakul Jogja. Penyaluran bantuan produktif bagi UKM juga dilakukan melalui sentra, forkom dan asosiasi di DIY, sehingga UMKM yang telah kehabisan modal usaha dapat memulai kembali usahanya.

Selain itu, selama masa tanggap darurat, UMKM yang terkena dampak COVID-19 diberikan stimulan untuk dapat memasarkan produknya, melalui pemberian bantuan bebas ongkos kirim. UMKM juga diberikan dukungan promosi melalui media *campaign* dan *marketplace* pada fitur Markethub Sibakul Jogja. Hal ini mendorong Wirausaha Baru untuk mendaftar ke sibakul serta mengikuti kampanye markethub agar mendapatkan dukungan kemudahan pemasaran produk. Wirausaha baru yang telah terdaftar pada aplikasi Sibakul Jogja diberikan pelatihan berjenjang yang diarahkan menuju transaksi bisnis digital serta diberikan kesempatan untuk mengikuti pameran virtual sebagai adaptasi terhadap kebiasaan baru.

Capaian Indikator Kontribusi jumlah WUB terhadap jumlah UKM tahun 2021 didukung dari program penumbuhan wirausaha baru melalui kegiatan penumbuhan Desa Preneur yang bertujuan untuk mengembangkan kewirausahaan berbasis potensi ekonomi dan desa budaya.

b) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2021

Pada tahun 2021 Urusan Koperasi dan UKM dilaksanakan melalui kegiatan dengan alokasi Rp57.379.305.400,00. Pengalokasian anggaran tersebut dibagi dalam 8 Program, 16 kegiatan dan 33 sub kegiatan. Secara keseluruhan belanja langsung dapat direalisasi sebanyak Rp54.542.165.341,00 dengan pencapaian fisik sebesar 100%. Meskipun pelaksanaan kegiatan di masa pandemi harus sesuai dengan protokol kesehatan dan mengikuti kebijakan pembatasan pelaksanaan kegiatan, kinerja fisik dapat mencapai 100%. Hal ini didukung oleh kerja sama lintas sektoral dengan beberapa *stakeholder* dan Lembaga pembina UMKM lainnya, diantaranya Bank Indonesia, BPOM, LIPI serta komunitas-komunitas yang mendampingi UMKM.

Tabel 3.124. Capaian Program dan Sub Kegiatan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	URUSAN UMUM	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	1. Peningkatan kapasitas kinerja dan daya saing Koperasi dan UMKM perlu dioptimalkan	PROGRAM PENUNJANG DAERAH PROVINSI	URUSAN	PEMERINTAHAN		1. Perbandingan jumlah pendamping dengan jumlah binaan KUKM yang besar dengan luasan wilayah dan topografi yang beranekaragam	1. Penerapan teknologi digital melalui Sibakul JOGJA dalam pelaksanaan pendampingan KUKM Sehingga cakupan area pendampingan luas dan lebih mudah untuk di akses 2. Kerja sama dengan Pentahelix	a. Layanan SIBAKUL dilakukan pada seluruh wilayah DIY. Adapun untuk mengoptimalkan layanan pada wilayah perbatasan sudah dilakukan strategi sebagai berikut : (1) melakukan sosialisasi sibakul dalam desain sarasehan sibakul pada wilayah-wilayah perbatasan yang memiliki status desa budaya, seperti di Semin, Nglipar, Ngawen, dan Gedangsari; (2) mendorong keterjangkauan aksesibilitas jaringan internet pada wilayah desa preneur di kawasan perbatasan, seperti yang sudah dilakukan pada Desa Pagerharjo Samigaluh, dan (3) menerapkan intervensi desa preneur pada wilayah desa-desa perbatasan secara berkelanjutan, serta (4) menggandeng mitra jasa transportasi yang memiliki akses keterjangkauan hingga pada kawasan perbatasan, seperti PT Pos dalam rangka mendorong markethub free ongkir bisa dinikmati oleh UMKM pada wilayah perbatasan.
			2. Mengembangkan kemitraan pelaku KUKM dengan perbankan, BUMN dan usaha swasta lainnya.	Program 01-06	%	100	0	1. Pandemi COVID-19 masih belum menurun trendnya, dan status tanggap darurat hingga akhir 2020 masih belum dicabut	-perlu koordinasi dengan dinas kab/kota serta stokeholder yang ada sehingga hasil yang didapat akan maksimal dalam penciptaan WUB.	
			3. Pengembangan Enterprenurship pelaku UMKM dilakukan melalui diklat, pendampingan dan fasilitasi untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dan ketimpangan wilayah.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku Roadmap pengembangan Sibakul Bringharjo Forum Perencanaan OPD Podcast Sosialisasi Pengembangan Koperasi dan UKM Dukungan 2,38% terhadap presentase peningkatan Pengembangan Sistem	Dokumen	1	1	2. Kondisi ekonomi daerah masih belum pulih 3. Sektor strategis masih belum pulih (wisata dan pendidikan)		b. Kebijakan dalam meningkatkan manajemen koperasi dan UMKM selama masa pandemic ini mengalami penyesuaian. Banyaknya koperasi dan UMKM yang lesu atau
					Dokumen	1	1			
					Kali	1	1			
					Paket	11	11			
					%	100	100			

No	Ururan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD						tertekan usahanya, menyebabkan Pemerintah Daerah melakukan langkah-langkah strategis dengan menjalankan prioritas kebijakan :
				Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						1) Mendorong skema yang memperkuat peningkatan daya beli masyarakat, seperti : pengembangan ruang pemasaran melalui markethub free ongkir, pelaksanaan pameran KUMKM secara virtual
				Laporan Kinerja Instansi A Pemerintahan (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)		82	82			2) Pemberian stimulus ekonomi bagi KUMKM, melalui : membantu akses fasilitasi BPUM bagi usaha mikro, keringanan pembayaran bunga bagi KUMKM, pembebasan pajak bagi KUMKM, kemudahan mendapat sertifikasi kualitas produk (halal, pirt, dsb)
				Dukungan 2,38% terhadap presentase peningkatan Pengembangan Sistem laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Bulan	12	12			3) Penerapan protokol kesehatan yang ketat bagi KUMKM, melalui sosialisasi, pembagian masker, fasilitasi tempat cuci tangan pada destinasi strategis, himbauan secara berkelanjutan melalui media, dan survey lokasi produksi pada UMKM mitra markethub
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4) Penumbuhan literasi digital bagi KUMKM, melalui berbagai sosialisasi, pelatihan, fasilitasi QRIS, pengenalan markethub, even virtual, RAT online
				Realisasi penggunaan % dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan		100	100			5) Pemulihan sektor pariwisata secara bertahap
				Dukungan 2,38% terhadap presentase peningkatan Pengembangan Sistem laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				asa		
				Ketersediaan gaji ASN	Orang	41	41			
				Ketersediaan gaji non ASN	Orang	17	17			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Dukungan terhadap presentase peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			melalui edukasi bagi pelaku wisata dan KUMKM pendukungnya
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						6) Memperkuat jejaring kemitraan, seperti pelaksanaan kegiatan atau even yang melibatkan KUMKM secara lintas binaan, penumbuhan market bisnis secara kemitraan, dan kolaborasi pendampingan CSR bersama
				Bukti pembayaran honorarium pengelola kepegawaian	Orang	0	0			7) Peningkatan SDM Koperasi baik pengelola, pengurus, pengawas maupun Dewan Pengawas Syariah melalui pendidikan dan pelatihan.
				Bukti pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang	Orang	10	10			8) Penyuluhan dan pendampingan pada koperasi melalui tenaga penyuluh dan pendamping
				Dukungan terhadap presentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	1	1			9) Gerakan memasyarakatkan Koperasi melalui sosialisasi perkoperasian pada masyarakat umum maupun melalui program talkshow perkoperasian.
				Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						c. Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan dana bergulir, Kementerian Koperasi dan UKM membentuk Lembaga Pengelola Dana Bergilir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) yang bertugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir untuk pembiayaan KUMKM antara lain
				Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	%	3	3			
				Dukungan terhadap presentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penyediaan komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						berupa pinjaman dan bentuk pembiayaan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan KUMKM. Sesuai dengan SK Menteri Keuangan Nomor KEP-292/MK.5/2006 Tanggal 28 Desember 2006 LPDB-KUMKM ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (PPK-BLU). Dengan dibentuknya LPDB-KUMKM diharapkan pengelolaan dana bergulir dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan dan menghasilkan manfaat berkelanjutan atas penyaluran dana bergulir kepada koperasi dan UMKM. Instruksi Menteri Koperasi dan UKM RI Tahun 2020 bahwa penyaluran dana bergulir dari LPDB hanya melalui Koperasi. Kebijakan ini diharapkan pendanaan LPDB akan bisa menjangkau lebih banyak koperasi dengan biaya yang lebih murah dan dengan akses yang lebih mudah, serta berdampak pada kemajuan koperasi. Realisasi penyaluran dana bergulir LPDB Tahun 2020 sebesar Rp. 1,9 Triliun dari target sebesar Rp. 1,85 Triliun yang telah disalurkan kepada 114 koperasi dengan skema pembiayaan reguler dengan
				Penyediaan Komponen Instalansi Listrik	Jenis	10	10			
				Dukungan 8.97% terhadap presentase pemenuhan pelayanan Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
				Penyediaan peralatan rumah tangga	Jenis	15	15			
				Dukungan 8.97% terhadap presentase pemenuhan pelayanan Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
				Barang Cetak	Jenis	10	10			
				Penggandaan	Lembar	110802	110802			
				Dukungan 8.97% terhadap presentase pemenuhan pelayanan Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan						
				Surat kabar	Jenis	2	2			
				Dukungan 8.97% terhadap presentase pemenuhan pelayanan Administrasi	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD						bunga 6%. LPDB juga telah merealisasikan dana bergulir sebesar Rp. 1 Triliun yang telah disalurkan kepada 63 mitra koperasi dengan skema Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan bunga 3%. Pada tahun 2021 ditargetkan penyaluran dana bergulir sebesar Rp. 2 Triliun, dengan fokus kepada koperasi terutama sektor riil. Selain dana bergulir reguler, LPDB juga masih menyalurkan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Terhadap upaya untuk sinergi LPDB dengan sumber pembiayaan yang ada di pemerintah daerah provinsi, kabupaten/ kota dapat dilaksanakan terutama berkaitan dengan pemberian rekomendasi koperasi yang akan mendapatkan pembiayaan dana bergulir. Adanya kewenangan pembinaan koperasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota terutama dalam hal penilaian kesehatan koperasi serta pemeringkatan koperasi menjadi tahapan strategis dalam rangka merekomendasikan koperasi untuk mendapatkan pembiayaan. Upaya ini diperkuat dengan peran provinsi, kabupaten/kota dalam pendampingan penyusunan proposal, termasuk monitoring
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
				Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Pulau Jawa	Bulan	12	12			
				Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Luar Pulau Jawa	Bulan	12	12			
				Makan dan minum sidang	OS	2275	2275			
				Perjalanan Dinas dalam Daerah	Bulan	12	12			
				Dukungan 8.97% terhadap presentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						
				Pengelolaan arsip dinamis	Jenis	3	3			
				Dukungan 8.97% terhadap presentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD						
				Pengembangan dan Pemeliharaan Website	Kali	1	1			
				Dukungan 8.97% terhadap presentase	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Pengadaan Mebel Pengadaan Mebel Dukungan 6.22% terhadap persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Pengadaan peralatan dan mesin lainnya Pengadaan peralatan Pengadaan komputer Dukungan 6.22% terhadap persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya Pengadaan perlengkapan kantor Pengadaan alat studio Dukungan 6.22% terhadap persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Penyediaan Jasa surat menyurat Surat Keluar	Jenis % Jenis Jenis % Jenis Jenis % Surat	4 100 4 3 4 100 4 4 100 4000	4 95 4 3 4 100 4 4000			dan evaluasi dalam pemanfaatan dana berikut pengembalian oleh koperasi dalam rangka perputaran. Dikaitkan sinergi penyediaan dana bergulir yang ada di masing-masing pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten/kota dapat dilakukan pengaturan ketika pengajuan proposal oleh koperasi nilainya tidak terlalu besar bagian yang diarahkan pada sumber pendanaan yang bersumber dari dana pemerintah provinsi, kabupaten/kota mengingat ketersediaan dana yang relatif kecil selama ini. Sementara untuk proposal koperasi dengan jumlah besar menjadi bagian yang diarahkan pada pembiayaan dana bergulir yang bersumber dari LPDB-KUMKM.

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Surat Masuk	surat	3000	3000			
				Alat tulis kantor	Jenis	40	40			
				Dukungan 8.28% terhadap persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100				
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
				Pembayaran listrik 2951 KWH	Bulan	12	12			
				Pembayaran Telepon 3 sambungan	Bulan	12	12			
				Dukungan 8.28% terhadap persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
				Penyediaan Retribusi Sampah	Bulan	12				
				Penyedia Jasa Kebersihan Perkantoran	Bulan	12				
				Jasa Keamanan Kantor	Bulan	12				
				Dukungan 8.28% terhadap persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kendaraan dinas jabatan roda 4 terpelihara sesuai RKPMD Bukti pembayaran Pajak STNK Kendaraan Dinas Jabatan roda 4 Dukungan 6.13% terhadap persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Jenis	1	1			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Bukti pembayaran pajak STNK Kendaraan Dinas Operasional roda 4 dan roda 2 Kendaraan Dinas Operasional roda 4 dan roda 2 Dukungan 6.13% terhadap persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Jenis	2	2			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya Pemeliharaan peralatan kantor	Jenis	6	6			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Dukungan 6.13% terhadap persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD						
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya						
				Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jenis	6	6			
				Dukungan 6.13% terhadap persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
				Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jenis	6	6			
				Dukungan 6.13% terhadap persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
2	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	1. Peningkatan kapasitas kinerja dan daya saing Koperasi dan UMKM perlu dioptimalkan 2. Bantuan hibah barang melalui pasar komunitas	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya kepada Anggota dan Masyarakat Ekspose Pembinaan Pendampingan penyaluran hibah koperasi terdampak	Kali Koperasi	4 115	4 115	1. Koperasi riil mengalami kesulitan dalam hal pemasaran produk 2. Untuk Koperasi simpan pinjam tidak banyak mengalami	Adanya sinergi antara pemerintah dan anggota koperasi secara bersama-sama untuk mengatasi keterpurukan ekonomi akibat pandemi covid-19 melalui bantuan pemerintah berupa	

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			kepada Koperasi	10 PPKM darurat level 4 akibat pandemic COVID-19				kenaikan omzet karena adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan tidak penambahan anggota baru	fasilitasi pelatihan dan pendampingan, bantuan hibah barang melalui pasar komunitas, pameran, LPDB, KUR pada Koperasi	
				Jumlah Koperasi yang naik peringkat	Koperasi	15	15	3. Beberapa koperasi tidak memberikan pinjaman baru pada anggota hanya mengelola pinjaman yang sudah ada		
				Jumlah Koperasi berprestasi	Koperasi	15	15	4. Banyak pinjaman anggota yang mengalami kemacetan karena usaha tidak berjalan akibat terdampak COVID-19		
				Podcast Sosialisasi Perkoperasian	Paket	12	12			
				Video Profile 4 Koperasi Inspiring DIY	Paket	1	1			
				Dukungan sebesar 10% (1.008juta rupiah) terhadap peningkatan nilai omzet koperasi riil dari tahun 2020 ke 2021 (10.080 juta rupiah) semua 2.046.177 juta rupiah menjadi 2.056.257 juta rupiah	%	100	100			
				Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Mengukur tingkat kesehatan Koperasi						
				Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatannya	Koperasi	80	80			
				Dukungan sebesar 10% (1.008juta rupiah) terhadap peningkatan nilai omzet koperasi riil dari tahun 2020 ke 2021 (10.080 juta rupiah) semua 2.046.177 juta rupiah menjadi 2.056.257 juta rupiah						
				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN						

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi						
				Pelatihan Manajemen Keuangan Koperasi Tahap Dasar	Orang	25	25			
				Diklat Kelembagaan dan SDM Koperasi	Orang	25	25			
				Diklat Studi Kelayakan Usaha	Orang	60	60			
				Diklat Peningkatan Kapasitas SDM Bagi Pendamping Diklat	Orang	25	25			
				Diklat Modernisasi Koperasi Melalui Digitalisasi Sistem	Orang	25	25			
				Diklat Sertifikasi Juru Buku	Orang	60	60			
				Diklat RA dan LPJ Koperasi	Orang	60	60			
				Diklat Penerapan Pelayanan Prima Koperasi	Orang	25	25			
				Diklat Sertifikasi Manajer /Ka. Cabang Koperasi Syariah	Orang	30	30			
				Diklat Pengelolaan Organisasi dan Manajemen Koperasi	Orang	25	25			
				Diklat Penyusunan Bisnis Plan Koperasi	Orang	25	30			
				Diklat Auditing Koperasi Syariah	Orang	30	30			
				Diklat Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi	Orang	50	50			
				Diklat Manajemen Risiko	Orang	60	60			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Diklat Digitalisasi Manajemen Keuangan	Orang	25	25			
				Diklat Digital Marketing bagi Koperasi Sektor Riil	Orang	30	30			
				Diklat Sertifikasi Dewa Pengawas Syariah Koperasi	Orang	30	30			
				Diklat Pengelolaan Keuangan Akses Pembiayaan Koperasi	Orang	50	50			
				Aplikasi Sistem Manajemen Koperasi	Orang	1	1			
				Pelatihan Manajemen Keuangan Koperasi Tahap Menengah	Orang	25	25			
				Diklat Manajemen Keuangan dan Akuntansi bagi Koperasi Syariah						
				Diklat Pelayanan Digital untuk Anggota Koperasi						
				Pelatihan Manajemen Keuangan Koperasi Tahap Lanjutan						
				Diklat Sertifikasi Analisis Pinjaman / Pembiayaan						
				Dukungan sebesar 10% (1.008 juta rupiah) terhadap peningkatan nilai omzet koperasi riil dari tahun 2020 ke 2021 (10.080 juta rupiah) semula 2.046.177 juta rupiah menjadi 2.056.257 juta rupiah	%	100	100			
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI						

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				<p>Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha</p> <p>Kumpul Koperasi Pasca Pandemi</p> <p>Peningkatan omzet Koperasi yang mengikuti pameran produk koperasi (Harkopnas)</p> <p>Jumlah Media Publikasi Perkoperasian</p> <p>Kemitraan Koperasi Sektor Riil dengan Hotel/RS/Retail</p> <p>Talkshow Perkoperasian</p> <p>Kontrak Pembiayaan yang dihasilkan dari Kemitraan Koperasi dan Lembaga Pembiayaan</p> <p>Sosialisasi Perkoperasian</p> <p>Podcast Sosialisasi Pembiayaan Koperasi</p> <p>Pelayanan Dekopin terhadap fungsi dan aspirasi gerakan koperasi</p> <p>Dukungan sebesar 60% (6.048 juta rupiah) terhadap peningkatan nilai omzet koperasi riil dari tahun 2020 ke 2021 (10.080 juta rupiah) semua 2.046.177 juta rupiah</p>	<p>Paket</p> <p>Rupiah</p> <p>Media</p> <p>Koperasi</p> <p>Kali</p> <p>Koperasi</p> <p>Akt</p> <p>Paket</p> <p>Tahun</p> <p>%</p>	<p>1</p> <p>0</p> <p>3</p> <p>0</p> <p>4</p> <p>35</p> <p>32</p> <p>7</p> <p>0</p> <p>100</p>	<p>1</p> <p>0</p> <p>3</p> <p>0</p> <p>4</p> <p>35</p> <p>32</p> <p>7</p> <p>0</p> <p>100</p>			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pengembangan SiBakul UKM yang meliputi : Data profil usaha dan kelastering kondisi usaha, akses MarkethUB dan Galeri Pasar Kota Gede YIA, Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan dan Konsultasi online	menjadi 2.056.257 juta rupiah PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan Jumlah UKM yang terfasilitasi melalui pemasaran online Terlaksananya pengembangan sistem aplikasi tata kelola KUKM Teroadu (Sibakul Jogja) UKM yang meningkat kemampuan dalam mengakses pembiayaan Kontrak Pembiayaan yang dihasilkan dari kemitraan UKM dan Lembaga Pembiayaan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan bagi WUB Podcast Sosialisasi Kewirausahaan Jumlah Wirausaha yang dilayani dalam konsultasi bisnis Jumlah Peserta pendampingan desa preneur tahap 2 di 6 desa meningkat kemampuan di bidang	UKM Aplikasi UKM Kontrak Angkatan Paket UKM Orang	350 1 160 80 26 7 600 360	350 1 160 80 26 7 600 360			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				manajemen, produksi, pemasaran dan desain produk						
				Podcast Sosialisasi Pembiayaan UKM	Paket	5	5			
				Kajian Pengembangan Produksi Mie Lokal sebagai penggerak sector UKM Kuliner di Kabupaten Bantul	Dokumen	1	1			
				Sosialisasi Kewirausahaan	Angkatan	10	10			
				Jumlah wirausaha Kabupaten Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul, dan Kota Yogyakarta yang tertangani akibat dampak pandemic COVID-19	Orang	300	300			
				Profil Video dan Iklan Produk SIBAKUL (7 UKM Pilihan)	Paket	1	1			
				Dukungan sebesar 50% terhadap terwujudnya peningkatan jumlah Wirausaha baru dari tahun 2020 ke 2021 (sebesar 180 WUB semula 899 WUB menjadi 1079 WUB)	%	100	100			
			1. Pembelian Hibah Barang kepada 12 Kelompok Penerima Desa Prenuer	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi						
			2. Pengembangan sistem aplikasi tata	Sosialisasi dan Sertifikasi Halal Pameran Virtual	Akt	16	16			
					Paket	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			kelola KUKM terpadu (Sibakul Jogja)	Jumlah UKM yang meningkat pengetahuannya	Orang	100	100			
			3. Subsidi ongkos kirim penjualan produk UKM melalui marketplace	mengenai merek dan branding produk serta mendapat fasilitasi merek						
			4. Pengembangan Enterprenurship pelaku UMKM dilakukan melalui diklat, pendampingan dan fasilitasi untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dan ketimpangan wilayah.	Jumlah UKM yang terfasilitasi pemasarannya melalui Galeri YIA	UKM	350	350			
				Peningkatan Pemahaman UKM terhadap SNI	Akt	1	1			
				Pelatihan Peningkatan Kapasitas Usaha bagi UKM	Angkatan	12	12			
				Pemasaran Produk UKM	Kali	1	1			
				Jumlah kontrak kerja sama yang dihasilkan dari kemitraan antara UKM dengan retail/toko modern/hotel/usaha menengah dan besar	Kontrak	4	4			
				Sosialisasi dan sertifikasi PIRT	Akt	16	16			
				Peningkatan omzet UKM peserta pameran produk UKM di DIY	%	5	5			
				Podcast Sosialisasi UKM	Paket	12	12			
				Jumlah Produk UKM yang tersertifikasi halal	Halal	90	90			
				Jumlah Produk UKM yang tersertifikasi MD	UKM	20	20			
				Peningkatan omzet UKM di Galeri Smesco	UKM	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pembuatan video profil UKM	Paket	16	16			
				Sosialisasi Sertifikasi Produk UKM Melalui Media Elektronik	Video	3	3			
				Kajian Identifikasi dan Strategi Pengembangan Ekonomi dan UMKM di Wilayah Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman	Dokumen	1	1			
				Dukungan 100% (2.626 juta rupiah) terhadap peningkatan Nilai omzet UKM sebesar 5% (4.376 juta rupiah) dari tahun 2020 ke 2021 semula 87.516 rupiah menjadi 91.892 juta rupiah	%	100	100			
			1. Bantuan Produktif bagi UMKM melalui Sentra, Forkom, dan Asosiasi di DIY	PROGRAM PENYELENGGARAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah Pengembangan eks Indra	Dokumen	1	1	Banyak UMKM yang belum menguasai literasi digital sehingga belum siap bersaing dipasar global	1. Fasilitasi dan dukungan pendampingan dengan skema <i>coaching</i> , pelatihan kelas dan mentoring yang diberikan kepada UKM mitra sibakul berperan serta dalam penumbuhan semangat kewirausahaan sehingga jumlah UMKM DIY mengalami peningkatan.	
			2. Sertifikasi halal	Kajian penyusunan dokumen Andalalin	Paket	1	1			
			3. Pemberdayaan Koperasi Mebel	Trading House UKM Kreatif dan Plaza Budaya Yogyakarta	Paket	1	1			
			4. Pemberdayaan Koperasi Susu	Kajian Penyusunan DOKumen UKL-UPL Trading House UKM Kreatif & Plaza Budaya Yogyakarta	Paket	1	1			
				DED Interior Eks Indra	Paket	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Appraisal Pengadaan Tanah Pengembangan Eks Indra	ukm	0	50		2. Penumbuhan semangat kewirausahaan di desa-desa preneur dengan skeman G2R, K45PAK, Blanko dan Giriloji	
				Kajian Pengelolaan Lembaga Sentra UMKM Sumbu Filosofis Terpadu (UPTD Diskop UKM DIY)	Paket	1	1			
				Appraisal Pengadaan lahan dan Bangunan Matahari	Paket	1	1			
				DED Trading House UKM Kreatif dan Plaza Budaya Jogjakarta	Paket	1	1			
				Pengadaan Mobil Operasional	Unit	1	1			
				Appraisal Sewa Matahari	Dokumen	1	1			
				Pemeliharaan dan Pengamanan eks Bangunan Mutiara	Tahun	1	1			
				Fisik Interior Eks Indra	Paket	1	1			
				Mendukung pencapaian persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan	%	100	100			
				Pengembangan Kewirausahaan Desa						
				Bantuan Produktif bagi UMKM melalui Sentra, Forkom dan Asosiasi di DIY	UMKM	5725	5725			
				Jaringan Internet untuk PLUT Istimewa	Lokasi	1	1			
				Percepatan Pemasaran produk KUMKM	Produk	1500	1500			
				Sosialisasi Kewirausahaan	Lokasi	5	5			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Peningkatan kualitas UMKM Jamu	Jenis UMKM	1	1			
				Belanja modal G-nose	Unit	1	1			
				Publikasi, Promosi dan Pemasaran	Desa	25	25			
				Kajian identifikasi Embrio Desa Prener Tahun 2021	Paket	1	1			
				Sarasehan UMKM	Kali	60	60			
				DED Co Working Space KUMKM	Dokumen	1	1			
				Video Potret Geliat Nilai-Nilai Kearifan Lokal Kultur UMKM Legendaris dan Unik khas JOGJA (Wilayah dataran dan perbukitan)	Paket	2	2			
				Branding produk lokasi	Paket	1	1			
				Video Jelajah Sibakul	Video	1	1			
				Sertifikasi Halal	Angkatan	15	15			
				Pengangkutan Mesin Pengalengan Produk UKM	Perangkat	1	1			
				Fasilitasi Produk Desa Prener K45PAK tahap pengembangan	Desa	5	5			
				Biaya pengiriman airfreight (Luar Negeri)	Kg	3000	2993			
				Buku Konsep Desa Prenur dengan Pendekatan G2RT	Paket	1	1			
				Klinik Koperasi	Koperasi	20	20			
				Pemberdayaan Koperasi Meubel	Peti	100	100			
				Masterplan Mandiri Budaya	Desa Paket	3	3			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penguatan Produk Lokal Istimewa	Paket	1	1			
				Gebyar UKM Kangen Jogja	Event	1	1			
				Penumbuhan Desa Preuner	Desa	8	8			
				Rencana Induk Kewirausahaan Daerah	Dokumen	1	1			
				Kajian identifikasi Potensi Desa Preneur pada Kawasan Perkotaan DIY	Paket	1	1			
				Pendampingan desa mandiri budaya pada tahan desa preneur penumbuhan	Desa	10	10			
				Rembug Desa Usaha Gotong Royong	Paket	3	3			
				Grebeg Koperasi Istimewa	Event	1	1			
				Iklan Media Sosial	Paket	1	1			
				Bimtek fasilitasi sertifikasi PIRT	Kali	36	36			
				Identifikasi Desa Mandiri Budaya pada tahap Desa Preneur Embrio model pendampingan Bisnis Lokal Unggulan	Desa	6	6			
				Pasar Komunitas Sibakul Jogja Berbasis Produk Lokal untuk Pemulihan Ekonomi Dampak COVID-19	Koperasi	10	10			
				Buletin SIBAKUL Jogja	Edisi	1	1			
				Bantuan Ongkos Kirim UMKM	Bulan	6	6			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Cetak Buku Profil Desa Preneur Tahap Penumbuhan	Eks	100	100			
				Vaksinasi untuk Koperasi dan UMKM dan Ekosistemnya	Dosis	40000	40000			
				Sumbang Swara Radio Blusuk Kampung Jajah Desa Milang Kori	Kali	25	25			
				Branding UMKM Lokal & Khas ala Desa Preneur melalui Video Kreatif	Paket	1	1			
				Cetak Buletin SIBAKUL Jogja	Eksemplar	500	500			
				Pemberdayaan Koperasi SUsu	Koperasi	4	4			
				DED Galery Budaya Mataram	Paket	1	1			
				Pendampingan Desa Mandiri Budaya pada tahap desa Preneur Maju	Desa	5	5			
				Koperasi Modern	Koperasi	30	30			
				Pendampingan Desa Mandiri Budaya pada tahap desa Preneur (tahap Pengembangan)	Desa	10	10			
				Dukungan 0.9% terhadap jumlah desa mandiri budaya						

12) Urusan Penanaman Modal

a) Kondisi Umum

Investasi sering juga disebut penanaman modal atau pembentukan modal. Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang modal atau perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi mempunyai dua peran penting yaitu untuk membuka lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Tahun 2021 menjadi masa yang penting bagi pemerintah untuk dapat memantapkan berbagai reformasi kebijakan dalam melaksanakan transformasi ekonomi menuju pertumbuhan berkelanjutan. Investasi menjadi kunci dalam upaya penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan pengurangan kemiskinan. Salah satu peran investasi pemerintah adalah dapat mendorong perekonomian di daerah melalui skema investasi langsung maupun menarik sektor swasta untuk bersama membangun daerah.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang akan berdampak pada penciptaan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus untuk mengurangi kemiskinan, maka salah satu kebijakan yang penting adalah meningkatkan nilai realisasi investasi baik melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Berkenaan dengan hal tersebut, dalam rangka menarik para investor, diperlukan perbaikan lingkungan bisnis. Faktor utama yang mempengaruhi lingkungan bisnis adalah: produktivitas tenaga kerja, perekonomian daerah, infrastruktur fisik, kondisi sosial politik, dan institusi. Guna menarik investasi ke daerah, Pemda mempunyai kewajiban untuk menggali segala potensi yang ada di daerahnya. Pemda

harus mempertemukan antara keinginan investor dan keinginan daerah. Bagi investor daya tarik ini tidak hanya berupa *sumber daya alam saja yang ada di daerah*, tetapi juga variabel yang mendukungnya, seperti regulasi daerah, sumber daya manusia dan sebagainya.

Kinerja investasi di DIY pada tahun 2021 masih menunjukkan capaian yang positif. Pertumbuhan nilai realisasi investasi di DIY mencapai 3,078 triliun rupiah meningkat 10,46% dari tahun 2020 dengan komposisi PMDN sebesar 2,761 triliun rupiah dan PMA sebesar 0,317 triliun rupiah. Pertumbuhan investasi utamanya dipicu masih berlangsungnya Proyek Strategis Nasional (PSN) penunjang bandara, yakni pembangunan tol Jogja-Solo, Jogja-Bawen, dan pembangunan proyek-proyek multiyear yang terus dilaksanakan, seperti pembangunan jembatan dan jalan pada Jalan Jalur Lintas Selatan. Selain itu didukung pula dengan peningkatan investasi non bangunan. Pada lapangan usaha Informasi dan komunikasi, pertumbuhan terutama terjadi seiring dengan pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) dalam rangka jaringan baru dan juga investasi bisnis *digital telecommunications*.

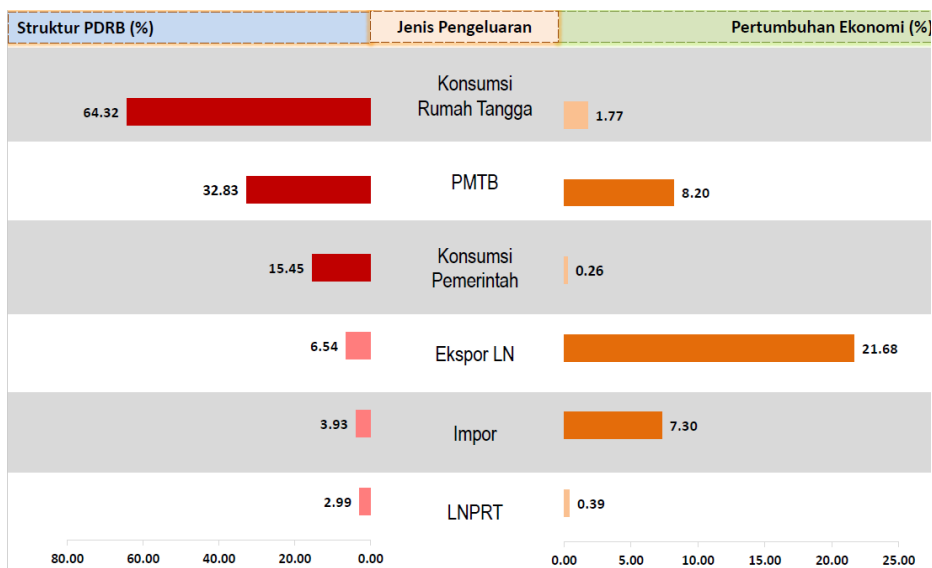
Investasi di DIY dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Pada tahun 2017 sebelum di bangunnya Bandara Baru Yogyakarta *International Airport* (YIA) pertumbuhan investasi di DIY berkisar di angka 0,776 triliun rupiah. Namun pada tahun 2018 dan 2019 mengalami lonjakan yang tinggi dengan dimulainya pembangunan Bandara YIA di Kulon Progo. Selama 2 tahun tersebut nilai investasi tercatat sekitar 12 triliun rupiah. Pada tahun 2020 dan 2021 tercatat nilai realisasi investasi di DIY di angka 2,823 triliun rupiah dan 3,078 triliun rupiah, meningkat rata-rata 10% dari tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.125. Perkembangan Investasi di DIY 2017 – 2021

Tahun	Investasi PMDN (Rp000)	Investasi PMA (Rp000)	Total Investasi (Rp000)	Growth (Rp000)	Investation Growth (%)
s.d 2017	4.817.449 .093	8.036.525 .281	12.853.974 .374	776.312 .710	6,42
s.d 2018	10.949.163 .293	9.126.508 .081	20.075.671 .374	7.221.697 .000	56,18
s.d 2019	17.248.001 .993	9.345.955 .081	26.594.057 .074	6.518.385 .700	32,47
s.d 2020	19.931.447 .693	9.485.961 .961	29.417.439 .654	2.823.382 .580	10,62
s.d 2021	22.692.648 .193	9.803.584 .430	32.496.232 .623	3.078.892 .969	10,46

Sumber: DPPM DIY, 2022

Perekonomian DIY selama 2021 tumbuh sebesar 5,53% (*c-to-c*). Kondisi ini lebih baik jika dibandingkan tahun sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 2,68% (*c-to-c*). Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha jasa lainnya dan hanya dua lapangan usaha yang mengalami kontraksi. Sementara dari sisi pengeluaran, semua komponen tumbuh positif, kecuali net ekspor antar daerah. Struktur ekonomi DIY tahun 2021 didominasi oleh lapangan usaha industri pengolahan, informasi dan komunikasi, serta konstruksi. Sementara dari sisi pengeluaran, pengeluaran konsumsi rumah tangga masih mendominasi dengan kontribusi 64,32%, disusul oleh pembentukan modal tetap bruto 32,83%, dan pengeluaran konsumsi pemerintah 15,45%.

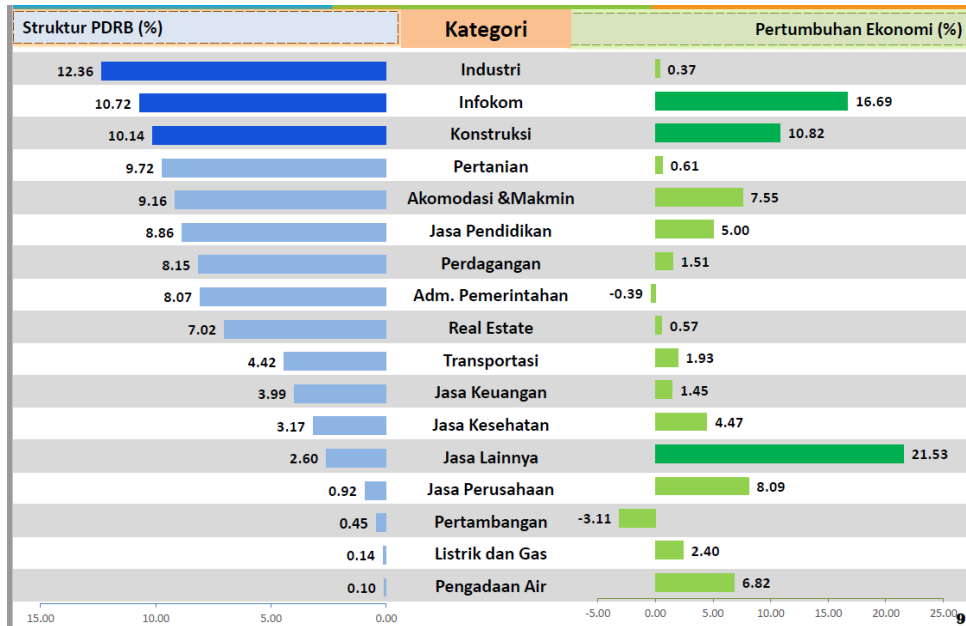


Gambar 3.34. Pangsa dan Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran, 2021 (c-to-c)
 Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Berdasarkan lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi DIY ditopang oleh lapangan usaha informasi dan komunikasi (infokom) serta konstruksi. Lapangan usaha infokom menjadi tulang punggung penopang ekonomi DIY selaras dengan adaptasi digital masyarakat Yogyakarta yang relatif tinggi di tengah perkembangan ekonomi digital yang kian pesat. Selama pandemi lapangan usaha infokom memiliki peran penting sebagai penghubung aktivitas sosial antar manusia, sehingga mampu menjaga produktivitas kerja maupun aktivitas sehari-hari. Akselerasi lapangan usaha konstruksi sejalan dengan peningkatan investasi PSN maupun Proyek Strategis Daerah. Keberadaan proyek strategis ini penting untuk membuka lapangan pekerjaan, sehingga mampu mempercepat upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat DIY.

Secara umum sepanjang 2021, beberapa lapangan usaha yang terdampak pandemi telah mampu pulih. Beberapa lapangan usaha seperti jasa keuangan, jasa lainnya, maupun lapangan usaha listrik, air, dan gas menunjukkan akselerasi pemulihan

serta mampu tumbuh melampaui level sebelum pandemi. Sektor jasa mengalami pemulihan lebih cepat sejalan dengan mobilitas manusia yang terus mengalami peningkatan.



Gambar 3.35. Struktur PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha, 2021 (c-to-c)

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Persebaran Investasi DIY

Sebaran investasi di DIY sampai dengan tahun 2017 didominasi di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta, namun di tahun 2018 dan 2019 dengan adanya pembangunan bandara baru YIA di Kabupaten Kulon Progo membawa perubahan pada peta sebaran investasi di DIY. Kabupaten Kulon Progo sampai dengan tahun 2021 menduduki urutan pertama dalam jumlah akumulasi investasi disusul Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Sedangkan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul perlu mengejar wilayah lainnya dengan melihat potensi investasi daerah. Perkembangan investasi kabupaten/kota di DIY ditunjukkan pada tabel berikut.

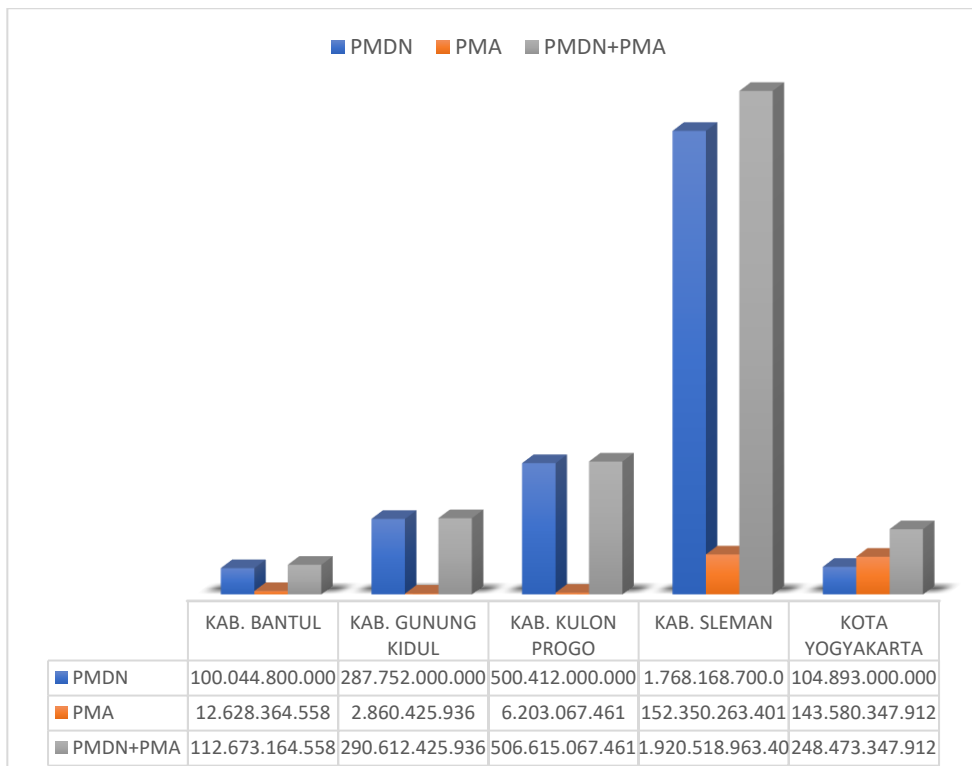
Tabel 3.126. Perkembangan Investasi Kabupaten/Kota di DIY 2017 - 2021 (Rp Juta)

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Bantul	929.537	1.078.588	1.209.467	1.266.968	1.333.084
Sleman	5.198.931	6.716.164	7.618.557	8.242.760	10.179.039
Gunungkidul	255.746	270.751	349.159	381.065	660.851
Kulon Progo	1.193.302	5.771.863	10.640.748	12.507.288	13.024.557
Yogyakarta	5.276.458	6.238.304	6.776.025	7.019.257	7.298.699
Jumlah	12.853.974	20.075.670	26.593.956	29.417.340	32.496.232

Sumber: DPPM DIY, 2022

Kabupaten Sleman pada tahun 2021 menyumbang nilai investasi PMDN tertinggi sebesar 1,768,168 juta rupiah disusul Kabupaten Kulon Progo sebesar 500,412 juta rupiah. Proyek Strategis Nasional masih mempunyai peran besar terhadap nilai PMDN di kedua wilayah tersebut. Kontribusinya berasal dari pengembangan kawasan *aerocity* dan *aerotropolis* di Kabupaten Kulon Progo serta rencana pembangunan jalan tol di wilayah Kabupaten Sleman. Untuk tiga Kabupaten/Kota lainnya tercatat nilai PMDN di Kabupaten Gunungkidul sebesar 287.752 juta rupiah, Kota Yogyakarta sebesar 104.893 juta rupiah, dan Kabupaten Bantul sebesar 100.044 juta rupiah.

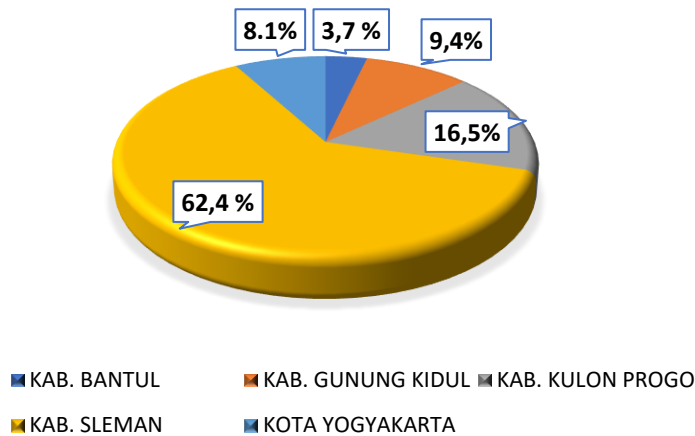
Nilai investasi PMA pada tahun 2021, Kabupaten Sleman menempati posisi teratas penyumbang realisasi investasi terbesar dengan nilai realisasi investasi sebesar 152.350 juta rupiah. Diikuti Kota Yogyakarta sebesar 143.580 juta rupiah, Kabupaten Bantul 12.628 juta rupiah, Kabupaten Kulon Progo sebesar 6.203 juta rupiah, dan Kabupaten Gunungkidul sebesar 2.860 juta rupiah. Dilihat dari sebaran investasi PMA, investor asing masih memilih Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta sebagai tujuan utama investasinya.



Gambar 3.36. Realisasi Investasi Tahun 2021 (Tambahan Investasi) berdasarkan Kabupaten/Kota (Rp)

Sumber: DPPM DIY, 2022

Persentase sebaran realisasi investasi tahun 2021 di masing-masing Kabupaten/Kota juga dapat dilihat dari gambar di bawah. Untuk tahun 2021 Kabupaten Sleman menguasai 62,40% realisasi investasi di DIY diikuti Kabupaten Kulon Progo 16,50%, Kabupaten Gunungkidul 9,40%, Kota Yogyakarta 8,10% dan Kabupaten Bantul 3,70%.



Gambar 3.37. Persentase Realisasi Investasi Tahun 2021 (Tambahan Investasi) berdasarkan Kabupaten/Kota

Sumber: DPPM DIY, 2022

Target dan Realisasi Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2020-2021

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Persediaan merupakan faktor penting dalam mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. PMTB dan perubahan persediaan terbentuk akibat dari adanya kegiatan investasi. Sebagian dari investasi itulah yang dibelanjakan untuk membeli barang modal dan persediaan yang akan digunakan dalam kegiatan produksi atau proses produksi. Dengan melakukan investasi, berarti kapasitas produksi juga meningkat yang pada gilirannya akan meningkatkan output. Pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. PMTB merupakan investasi fisik yang menunjukkan penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi.

Tabel 3.127. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian 2021 terhadap Target Akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Nilai PMTB dalam PDRB DIY	Juta rupiah	44.329.520	42.664.788	49.021.449	114,90	44.798.028	109,42
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86,68	85	87,54	102,99	86	100,7

Sumber: DPPM DIY, 2022

Pada tahun 2021 Nilai PMTB dalam PDRB DIY ADHB tercatat sebesar 49.021.449 juta rupiah. Nilai PMTB tersebut sudah melampaui target tahun 2021 sebesar 42.664.788 juta rupiah atau 114,90%. Capaian realisasi nilai PMTB di tahun 2021 terhadap target akhir RPJMD (2022) sebesar 44.798.028 juta rupiah adalah 109,42%. Seiring dengan membaiknya situasi pandemi COVID-19 di semester dua tahun 2021, mendorong pergerakan perekonomian di DIY yang terlihat dari nilai PMTB di tahun 2021 bisa melebihi target serta melampaui target akhir RPJMD di tahun 2022.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas dan mutu pelayanan bagi masyarakat. Survei IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis kebutuhan masyarakat.

Upaya menjalankan ketugasan pelayanan perizinan secara terpadu terus dilakukan dengan cara meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan publik yang prima. Tujuannya adalah memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat, mempersingkat proses pelayanan, mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, serta mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

Pada tahun 2021, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan perizinan secara terpadu sebesar 87,54 (Nilai A, sangat baik) melebihi target yang ditetapkan sebesar 85. Kepercayaan masyarakat ini didukung oleh semakin baiknya sistem pelayanan perizinan yang disiapkan dengan sistem perizinan terintegrasi secara elektronik melalui aplikasi Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) dan perizinan non berusaha yang menjadi kewenangan daerah dengan aplikasi SiCantik *Cloud* yang terus dikembangkan. Capaian ini juga didukung oleh SDM yang kompeten, sarana dan prasarana penunjang yang memadai.

b) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2021

Urusan penanaman modal pada tahun 2021 didukung dengan 5 program utama yang terdiri dari 6 kegiatan dan 9 sub kegiatan dengan total pagu anggaran belanja langsung sebesar Rp12.461.271.483,00 dan menjadi Rp11.741.649.555,00 setelah adanya perubahan anggaran. Penyerapan anggaran belanja langsung sebesar Rp11.154.975.685,60 atau 95,00% dari total anggaran yang dialokasikan.

Selanjutnya rincian capaian kinerja program dan kegiatan tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 3.128. Capaian Program dan Sub Kegiatan Urusan Penanaman Modal Tahun 2021

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	URUSAN PENANAMAN MODAL	DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL	1. Meningkatkan daya tarik penanaman modal dengan Pemberian insentif dan fasilitasi investasi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Pertumbuhan nilai realisasi investasi PMA & PMDN tahun n Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi Pertumbuhan nilai realisasi investasi PMA & PMDN tahun n	Juta rupiah	1038356	3078892	1. Penyebaran investasi antar Kabupaten/Kota yang belum merata, mimimnya proyek investasi yang "Ready to Offer", serta easy of doing business (EoDB) masih rendah	1. Strategi penumbuhan pusat kegiatan ekonomi di wilayah Gunungkidul, Kulon Progo dan Bantul dengan mempertimbangkan potensi ekonomi lokal dan mengeksplorasi potensi baru.	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN a. Urusan Penanaman Modal 1. Usaha peningkatkan daya tarik penanaman modal di DIY dengan car menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi
			2. Mempercepat realisasi penanaman modal melalui kegiatan proaktif	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi Studi Pengembangan dokumen	1	1	1	2. perizinan dan non perizinan terkendala dengan belum maksimalnya pemanfaatan aplikasi OSS RBA untuk percepatan pelayanan izin dan non izin, diantaranya adalah belum semua Kab/Kota di DIY memiliki RDTR dikarenakan RDTR ini harus ditetapkan dengan Perda. Akibatnya daerah belum mempunyai instrumen sebagai pengendalian izin yang dimohonkan	2. Metode promosi baru perlu dimunculkan serta komitmen untuk terus mendampingi investor perlu diperkuat	2. masyarakat dan swasta di bidang pariwisata. Program dan strategi DPPM DIY dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi masyarakat dan swasta di bidang pariwisata rangka mencapai peningkatan modal di area tersebut. Dengan melihat karakter perekonomian DIY yang secara alamiah menempatkan sebagai
			3. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan / hambatan dalam pelaksanaan penanaman modal (Aftercare Investor	Kajian Potensi Investasi di 3 Kabupaten/Kota (Sleman, Gunungkidul, Kota Yogyakarta) Forum Pemetaan	dokumen	3	3	3. Pandemi COVID-19 yang masih berlanjut membuat	3. Kerja bersama seluruh stakeholder di DIY yang berkaitan dengan Penanaman Modal untuk melakukan konsolidasi potensi yang merupakan kunci efektivitas promosi Investasi di DIY. Dengan bekerja bersama menentukan area potensi dan peluang dengan fokus di masing-masing wilayah	3. masyarakat dan swasta di bidang pariwisata. Program dan strategi DPPM DIY dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi masyarakat dan swasta di bidang pariwisata rangka mencapai peningkatan modal di area tersebut. Dengan melihat karakter perekonomian DIY yang secara alamiah menempatkan sebagai
			4. Menciptakan regulasi dan upaya lain dalam kerangka pengembangan iklim investasi dan peningkatan level Ease of Doing Business untuk mengantisipasi perubahan yang ada (terkait era Revolusi Industri 4.0 dan	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Nilai Rencana Investasi tahun n Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provin Nilai Rencana Investasi tahun n Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi Forum jejaring promosi dan informasi investasi DIY Rakernis Kerja sama Luar Negeri Forum Kemitraan UMKM dengan investor dan dunia usaha Fasilitasi Mitra Kerja sama Luar Negeri	Juta rupiah kali kemitraan mitra	1492353 1 2 2 5 3	7090053.1 1 2 2 5 3		4. Mengoptimalkan aplikasi OSS RBA	4. masyarakat dan swasta di bidang pariwisata. Program dan strategi DPPM DIY dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi masyarakat dan swasta di bidang pariwisata rangka mencapai peningkatan modal di area tersebut. Dengan melihat karakter perekonomian DIY yang secara alamiah menempatkan sebagai

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			pemulihan pandemi COVID-19).	Publikasi TV/Talkshow	kali	16	16	beberapa perusahaan yang ada cukup kesulitan bahkan untuk mempertahankan bisnisnya yang menjadi permasalahan kompleks bagi investor yang telah berinvestasi di DIY	dengan terdapat regulasi dan kondisi riil tata ruang / Percepatan pembentukan Perkada RDTR Kab/Kota yang difasilitasi Pusat sehingga akan mempercepat penyempurnaan OSS Dengan adanya fitur ini	melibatkan pengusaha dan tenaga kerja dari DIY adalah dengan cara memberikan anjuran dan himbauan untuk menggunakan sumber daya lokal sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Upaya ini juga diperkuat dengan memunculkan kriteria 'penggunaan tenaga kerja lokal' sebagai kriteria dalam penilaian/assessment dalam memberikan insentif dan kemudahan penanaman modal bagi pengusaha Upaya pendataan tenaga kerja asal DIY yang terserap pada proyek-proyek besar yang berlokasi di DIY dengan cara koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi DIY terkait isu ini sehingga sebelum proyek-proyek tersebut dilaksanakan, isu-isu seperti ini sudah terantisipasi secara baik. Upaya dalam Pemerataan penanaman modal di kabupaten/kota agar lepas merata dengan
			5. Peningkatan ketepatan, kecepatan, dan kelancaran pelayanan ijin dan non ijin mencapai 100%	Video Promosi Investasi Hospitality	vdideo dokumen mitra	2 1 1	2 1 1			
			6. Mempercepat penyelesaian pengaduan perizinan dan kemudahan pelayanan perizinan bagi masyarakat	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Presentase Waktu Penyelesaian Layanan Perizinan terhadap SOP	persen	99	99			
			7. Peningkatan iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Presentase Waktu Penyelesaian Layanan Perizinan terhadap SOP	persen	99	99			
			8. pengembangan investasi yang berbasis pada karakteristik wilayah	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Terlayannya permohonan perizinan perekonomian dan infrastruktur dan konsultasi/pendampingan	bulan	12	12			
				Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Presentase Waktu Penyelesaian Layanan Perizinan terhadap SOP	persen	99	99			
				Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Terlayannya permohonan perizinan SDA dan Kesra dan konsultasi/pendampingan	bulan	12	12			
				Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan dokumen						

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Sosialisasi Perizinan dan Non Perizinan di 5 Kab/Kota	kali	40	40			melakukan kajian terkait Penyusunan Potensi Investasi Siap Jual di sekitar (calon) trase Jalan Prambanan-Gading. Locus ini dipilih karena memiliki nilai strategis dalam respon DIY menyiapkan bangkitan ekonomi sebagai dampak dari Pembangunan Jalan Tol Yogya Solo dan pengembangan kawasan ITMP BYP yang ada di Kawasan Prambanan Boko serta area sekitarnya.
				Terselesaikannya Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan	pengaduan	5	10			
				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL						
				Pertumbuhan nilai realisasi investasi PMA & PMDN tahun n	Juta rupiah	1038356	3078892			
				Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi						
				Pertumbuhan nilai realisasi investasi PMA & PMDN tahun n	Juta rupiah	1038356	3078892			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal						
				Pemantauan LKPM Perusahaan PMDN dan UKM DIY	proyek	28	86			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal						
				Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal	kali	5	5			
				Bimtek OSS	kali	5	5			
				Bimtek LKPM	kali	4	4			
				Sosialisasi Kemitraan Usaha	kali	5	5			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal						
				Pengawasan Perusahaan PMDN dan UKM	proyekk	28	50			
				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL						
				Waktu Penyelesaian Izin Usaha	hari	2	2			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				<p>Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi</p> <p>Waktu Penyelesaian Izin hari</p> <p>Usaha</p> <p>Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</p> <p>Dokumen SOP Izin dan non dokumen</p> <p>izin Video</p> <p>Pengisian Platform si Izin</p> <p>Cantik Cloud</p> <p>Iklan Layanan Masyarakat</p>		2	2			
						1	1			
						73	73			
						3	3			

13) *Urusan Kepemudaan dan Olahraga*

a) *Kondisi Umum*

Di tengah pandemi COVID-19, antusiasme para pemuda di DIY untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan kepemudaan ternyata masih cukup tinggi, dibuktikan dengan keikutsertaan mereka dalam berbagai pelatihan terutama pelatihan kewirausahaan. Seluruh kegiatan kepemudaan dapat dijalankan dengan dengan sistem bauran sehingga dapat meminimalisir pengumpulan massa selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Diharapkan pelaksanaan kegiatan kepemudaan, khususnya pelatihan kewirausahaan bagi pemuda yang berada di daerah kantong kemiskinan, dapat mendorong para pemuda mengembangkan potensi daerahnya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di bidang olahraga, pembinaan prestasi atlet pelajar masih menjadi salah satu target utama Pemda DIY. Walaupun penyelenggaraan kompetisi olahraga di tahun 2021 masih dibatasi akibat pandemi COVID-19, pembinaan calon atlet pelajar tetap dilakukan guna memperoleh bibit-bibit atlet berprestasi DIY. Pembinaan berkesinambungan diharapkan dapat mempersiapkan atlet pelajar DIY untuk berlaga pada kompetisi regional maupun nasional pada tahun berikutnya.

Target kinerja beserta capaian Pemda DIY Urusan Pemuda dan Olahraga dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.129. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase peningkatan pemuda yang	%	10,02	11,50	11,58	100,70	11,80	98,14

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022
				Target	Realisasi	% Realisasi		
	berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan							
2	Prestasi Cabang Olahraga	Peringkat	N/A	Peringkat 2 POPWIL	N/A	N/A	Peringkat 8 POPNAS	N/A

Sumber: Disdikpora DIY, 2022

Pada tahun 2021 capaian indikator Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan telah mencapai target yang ditetapkan, yaitu 11,58% dari target 11,50%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2020 terdapat peningkatan 1,56%. Capaian tahun 2021 ini masih terdapat selisih 0,22% dibanding target akhir RPJMD. Tercapainya target indikator Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan didukung oleh penyelenggaraan kegiatan-kegiatan kepemudaan, antara lain pengembangan kewirausahaan dan seleksi Paskibraka. Sasaran kegiatan pengembangan kewirausahaan terutama ditujukan untuk pemuda pada wilayah kantong kemiskinan di Kapanewon Kokap dan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo. Harapannya kegiatan kepemudaan dapat membantu para pemuda mempromosikan objek wisata dan hasil industri di daerahnya.

Pada kinerja urusan olahraga dengan indikator prestasi cabang olahraga, ditargetkan pada kompetisi olahraga 2021 mencapai peringkat 2 POPWIL. Namun demikian, kompetisi olahraga pelajar tingkat regional maupun nasional pada tahun 2021 belum dapat diselenggarakan sesuai Surat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora RI selaku Ketua Umum PP. BAPOPSI, Nomor RO.00.01/04.19.1/D.IV-2/IV/2021

perihal Penundaan POPNAS XVI Tahun 2021 karena adanya PPKM akibat pandemi COVID-19. Sehingga tidak ada capaian kinerja untuk indikator Prestasi cabang olahraga di tahun 2021.

b) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2021

Alokasi anggaran untuk Urusan Kepemudaan dan Olah Raga tahun 2021 adalah sebesar Rp68.896.928.575,00. Anggaran tersebut dibagi dalam 3 program, 8 kegiatan, dan 18 sub kegiatan. Realisasi keuangan tahun 2021 sebesar Rp66.737.593.120,00 atau dengan persentase capaian 96,91% dan realisasi fisik mencapai 99,64%. Deviasi fisik disebabkan tidak tersalurkannya hibah lembaga untuk KNPI DIY. Hibah kepada KNPI DIY tahun 2021 tidak disalurkan karena belum adanya kepastian hukum terhadap status organisasi KNPI DIY yang mengalami dualisme kepengurusan. Sedangkan deviasi keuangan berasal dari efisiensi anggaran belanja rutin, efisiensi kegiatan pelatihan kewirausahaan, seleksi dan pembinaan paskibraka, serta pembinaan atlet berbakat. Rincian capaian kinerja program dan kegiatan tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 3.130. Capaian Program dan Sub Kegiatan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAH RAGA	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Gaji dan tunjangan tahun 1 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Komponen jenis 11 11 Listrik/penerangan bangunan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan kantor jenis 5 5 sesuai dengan RKBMD Alat Tulis Kantor jenis 47 47 Perlengkapan untuk jenis 8 8 sarana kearsipan Peralatan kantor sesuai jenis 3 3 dengan RKBMD Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Peralatan kebersihan dan jenis 23 23 bahan pembersih Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jilid buah 250 250 Penggandaan lembar 46000 46000 Barang cetakan jenis 8 0 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Langganan surat tahun 1 1 kabar/majalah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan rapat-rapat tahun 1 1 koordinasi Konsultasi dan tahun 1 1 Koordinasi Dalam dan Luar Daerah				- Keterbatasan modal usaha dan keterampilan wirausaha, berkembangnya perilaku-perilaku negatif remaja di masyarakat - Adanya pandemi COVID-19 yang membatasi kegiatan kepemudaan dan kewirausahaan dalam skala besar - Berkurangnya kualitas dan kuantitas pembinaan akibat pandemi serta kurangnya sarana pelatihan - Masih terbatasnya fleksibilitas dukungan anggaran untuk mengikutsertakan atlet dalam kejuaraan maupun kejurmas <i>single event</i> , karena lokasi dan waktu pelaksanaan baru ditentukan oleh kementerian pada tahun berjalan - Penyelenggaraan pelatihan sebagai persiapan atlet untuk berlaga di ajang kompetisi olahraga, walaupun dilaksanakan secara bauran di masa pandemi. Penyelenggaraan latihan ini juga didukung oleh penyempurnaan dan pemeliharaan sarana olahraga - Permohonan dukungan anggaran yang mencukupi untuk memfasilitasi pengiriman atlet baik untuk uji tanding maupun mengikuti kejuaraan <i>single event</i>	- Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan dan seleksi kegiatan pemuda - Penyelenggaraan latihan rutin yang berkesinambungan sebagai persiapan atlet untuk berlaga di ajang kompetisi olahraga, walaupun dilaksanakan secara bauran di masa pandemi. Penyelenggaraan latihan ini juga didukung oleh penyempurnaan dan pemeliharaan sarana olahraga - Permohonan dukungan anggaran yang mencukupi untuk memfasilitasi pengiriman atlet baik untuk uji tanding maupun mengikuti kejuaraan <i>single event</i>	b. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Tindak lanjut yang akan dilakukan: 1) Kesejahteraan atlet dan pelatih merupakan salah satu faktor yang diutamakan dalam pengelolaan anggaran KONI yang berasal dari hibah Gubernur DIY. Pada tahun 2021, KONI menganggarkan Rp4.390.000.000,00 untuk insentif atlet dan Rp2.360.000.000,00 untuk insentif pelatih yang mengikuti Puslatda dalam rangka persiapan PON XX di Papua. Di samping itu, KONI masih menganggarkan uang saku bagi para atlet yang akan mengikuti Puslatnas maupun kejuaraan di level nasional dan internasional sebesar Rp1.967.500.000,00. Pemda DIY juga turut mengupayakan adanya pemberian penghargaan prestasi bagi para atlet dan pelatih apabila berhasil meraih kejuaraan pada berbagai kejuaraan multievent baik di tingkat daerah, nasional, maupun internasional mengingat pada tahun 2021 berbagai kejuaraan sudah kembali dilaksanakan. 2) Belum tercapainya target indikator Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						pada tahun 2020 utamanya adalah karena banyaknya kegiatan yang dibatalkan akibat pandemi COVID-19. Pembatalan terutama untuk kegiatan kepemudaan yang sifatnya berjenjang dan dikoordinir langsung oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, penyelenggaraan kegiatan sangat bergantung kepada kebijakan dan anggaran pemerintah pusat. Pada tahun 2021, Pemda DIY memfasilitasi penyelenggaraan Pelatihan Keterampilan Pemasaran Online untuk 59 kelompok wirausaha, Pelatihan kewirausahaan untuk pemuda di wilayah kantong kemiskinan sebanyak 20 kelompok pemuda, Sosialisasi Kepemudaan untuk 7 kelompok pemuda, lomba Sentra Kewirausahaan Pemuda (SKP) dengan target pembinaan pemenang untuk 6 kelompok wirausaha, serta Seleksi dan Pelatihan Paskibraka dengan target peserta 80 siswa. Adapun alokasi anggaran seluruh kegiatan kepemudaan di tahun 2021 adalah sebesar Rp3.388.992.000,00. Pada tahun 2022, Pemda DIY merencanakan alokasi anggaran sebesar Rp4.494.254.500,00 untuk penyelenggaraan Pelatihan Keterampilan Pemasaran Online, Pelatihan kewirausahaan pemuda di wilayah kantong kemiskinan,
				Pembayaran rekening telepon, air, listrik dan kawat/faksimil/internet	tahun	1	1			
				Jasa pengolahan sampah	tahun	1	1			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
				Jasa keamanan	tahun	1	1			
				Honor pengelola barang	orang	2	2			
				Honor Pengelola Keuangan	orang	9	9			
				Jasa kebersihan	tahun	1	1			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
				Pajak Kendaraan	unit	9	9			
				BBM	tahun	1	1			
				Pemeliharaan kendaraan Dinas	tahun	1	1			
				KIR	unit	2	2			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
				Pemeliharaan gedung kantor	tahun	1	1			
				Pemeliharaan prasarana dan Olahraga	unit	8	8			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
				Pemeliharaan jaringan Pos dan telemonikasi	tahun	1	1			
				Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	tahun	1	1			
				Pemeliharaan Alat-alat berat	tahun	1	1			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
				Perangko, meterai dan benda pos lainnya	jenis	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN						
			Meningkatkan kualitas pemuda dengan membangun sikap mandiri secara sosial dan ekonomi dengan mampu berwirausaha, dan menciptakan lapangan kerja	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi						
				Sentra Kewirausahaan Pemuda (SKP)	SKP	6	6			
				Sosialisasi Pemuda	kali	22	22			
				Pelatihan kewirausahaan Pemuda kantong kemiskinan	kelompok	20	20			
				Pelatihan Keterampilan / Kewirausahaan Pemuda	Kelompok	59	59			
			Meningkatkan karakter pemuda melalui pendidikan kebangsaan, kemandirian, berbudaya dan cinta tanah air	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera						
				Seleksi dan Pelatihan Paskibraka DIY dan Nasional	siswa	80	80			
				Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi						
				Bantuan Kelembagaan Organisasi Pemuda	lembaga	2	1			
			Meningkatkan kualitas dan prestasi atlet dengan mengikutsertakan dalam kompetensi olahraga yang berskala nasional dan internasional	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN						
				Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi						
				Pembinaan Atlet Berbakat (PAB)	orang	250	250			
				Pemberian Penghargaan Prestasi Gubernur	Kegiatan	1	1			
				Pengembangan Organisasi Keolahragaan						
				Bantuan Kelembagaan Organisasi Olahraga	lembaga	2	2			
										lomba Sentra Kewirausahaan Pemuda (SKP), Seleksi dan Pelatihan Paskibraka, fasilitasi penyelenggaraan seleksi dan pengiriman Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN), dan pelatihan Pemuda Kader Anti Narkoba DIY. Terkait dengan pandemi COVID-19 yang belum berakhir pada tahun 2021, penyelenggaraan kegiatan kepemudaan yang banyak membutuhkan praktik lapangan akan dibagi dalam beberapa sesi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
										Tugas-Tugas Umum Pemerintahan Lainnya yang Dilaksanakan Oleh Daerah a. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tindak lanjut: Dalam rangka PON XX di Papua bulan Oktober 2021, KONI DIY telah melakukan persiapan sejak tahun 2020. Pada bulan Januari s.d. Maret 2020, Puslatda telah dilakukan secara intensif. Dengan adanya pandemi COVID-19, pola pelatihan kemudian diubah menjadi pelatihan mandiri selama bulan April s.d. Desember 2020. Untuk dapat melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelatihan mandiri atlet, KONI DIY melaksanakan bimbingan teknis bagi para pelatih guna merumuskan sistem evaluasi

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<p>latihan mandiri dan mengukur kemajuan atlet. Mulai bulan Januari 2021, KONI DIY kembali menerapkan periodisasi khusus untuk persiapan PON XX, yaitu tahap persiapan pada bulan Januari s.d. April 2021, tahap prakompetisi bulan April s.d. Agustus 2021, tahap evaluasi pada bulan Agustus s.d. September 2021, dan tahap kompetisi di bulan Oktober 2021. Pada tahap persiapan di awal tahun 2021, pelatihan kembali dilakukan secara intensif dengan protokol kesehatan yang ketat. Selain mengharuskan seluruh personil yang terlibat untuk melakukan tes swab secara berkala, pelatihan juga dilaksanakan secara tertutup dengan hanya dihadiri oleh atlet dan pelatih guna menghindari kontak fisik dengan banyak orang. Utamanya pada cabang olahraga beregu seperti voli pasir dan polo air, KONI DIY menetapkan penjagaan protokol kesehatan yang lebih ketat karena kontak fisik lebih banyak terjadi saat latihan berlangsung. Untuk memastikan penyelenggaraan latihan berjalan sesuai dengan protokol kesehatan dan memberikan hasil semaksimal mungkin, KONI DIY membentuk Tim Satgas yang beranggotakan 8 orang untuk melakukan pemantauan dan evaluasi rutin di</p>

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<p>setiap cabang olahraga yang turut serta dalam Puslatda. Di tahap prakompetisi yang dimulai di bulan April 2021, Pengda mulai melakukan ujicoba atau latihan tanding dengan atlet dari provinsi lain. Ujicoba ini dilakukan secara mandiri oleh masing-masing Pengda dengan jadwal yang sudah ditentukan dan dilaksanakan baik di dalam maupun luar DIY. Sesuai rencana, evaluasi akan dilakukan pada bulan Agustus s.d. September untuk meninjau kembali kesiapan para atlet mengikuti PON XX. Diharapkan dari hasil evaluasi, perbaikan dapat dilakukan sehingga para atlet DIY meraih prestasi yang maksimal pada PON XX. KONI DIY berharap periodisasi yang diterapkan untuk menghadapi PON XX melalui Puslatda 2021 ini dapat menjadi awal pembentukan pola pembinaan olahraga prestasi di DIY, mengingat dalam menghadapi kompetisi dibutuhkan persiapan jangka panjang dari atlet maupun pelatih pembina.</p>

14) Urusan Statistik

a) Kondisi Umum

Pemda DIY melalui Balai Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah sebagai Unit Pelaksana Teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY melaksanakan program dan kegiatan Urusan Statistik. Hal ini sesuai dengan ketentuan Perdais DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pergub DIY Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Pergub DIY Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam penyelenggaraan Urusan Statistik di lingkup pemerintah, telah terbit Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Kebijakan mengenai Satu Data Indonesia tersebut dilatarbelakangi oleh kebutuhan pemerintah atas data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan di Indonesia. Kebutuhan pemerintah atas data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan yang diamanatkan dalam kebijakan Satu Data Indonesia merupakan terobosan penting untuk mewujudkan perbaikan tata kelola data.

Perpres tersebut menjadi pondasi bagi pelaksanaan tata kelola data di instansi pusat maupun daerah untuk menghasilkan data yang berkualitas. Kebijakan Satu Data Indonesia harapannya dapat memberikan acuan pelaksanaan dan

pedoman bagi pemangku kepentingan, mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan daerah. Sehingga dapat mendorong keterbukaan dan transparansi data, serta mendukung Sistem Statistik Nasional (SSN).

Kebijakan Satu Data Indonesia di DIY ditindaklanjuti dengan Pergub DIY Nomor 3 Tahun 2020 tentang Satu Data Pembangunan Daerah (DIY). Tujuannya adalah mewujudkan data pembangunan daerah yang akurat, mutakhir, lengkap, akuntabel, serta digunakan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah baik oleh Masyarakat umum, Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi statistik tersebut Pemda DIY melalui UPT Balai Penelitian, Pengembangan, dan Statistik Daerah DIY telah memiliki *tool* dalam pengelolaan data berupa Aplikasi Dataku untuk data statistik (non spasial) dan Aplikasi Geoportal untuk data spasial, serta mengembangkan pengelolaan data dan informasi menjadi lebih baik. Pemda DIY melalui UPT BPPSD DIY sebagai unit yang melaksanakan Urusan Statistik telah melakukan beberapa hal sebagai berikut: 1) Menyusun *Standard Operating Procedure* (SOP) Aplikasi Dataku Nomor 557/11996 tanggal 15 Juni Tahun 2021 dan SOP Aplikasi Geoportal Nomor 557/11998 tentang Pengumpulan Data, Verifikasi dan Validasi Data, Penambahan elemen data, Penghapusan elemen data dan Integrasi Data. 2) Menyusun Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2021 dan 2022 sebagai acuan penyelenggaraan Satu Data Pembangunan Daerah DIY, telah ditetapkan dalam Forum Satu Data Indonesia DIY dengan Berita Acara Nomor 050/07080 tanggal 26 Oktober 2021. 3) Menyusun Daftar Data Pembangunan Daerah dan Data Prioritas yang digunakan sebagai dasar perencanaan dan

penganggaran pembangunan daerah, telah ditetapkan dalam Forum Satu Data Indonesia DIY dengan Berita Acara Nomor 050/07080 tanggal 26 Oktober 2021. 4) Memberikan kemudahan dalam pemanfaatan data dan informasi yang lebih optimal oleh Perangkat Daerah di DIY, instansi vertikal di DIY, dan kabupaten/kota dengan meng-*update* Aplikasi Dataku yang lebih *user friendly* dan menambah beberapa fitur yang memudahkan dalam pengelolaan data untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah. 5) Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama baik dengan OPD Pemda DIY, instansi vertikal di daerah, kabupaten/kota maupun stakeholders penyedia data lainnya. 6) Mendorong dan mengkoordinasikan pengembangan simpul jaringan di kabupaten/kota se DIY, sehingga saat ini DIY merupakan provinsi pertama yang seluruh simpul jaringan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota telah aktif, operasional dan terintegrasi. 7) Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan data dan informasi geospasial dan non geospasial dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah, dalam rangka mewujudkan Satu Data Indonesia.

Kinerja Urusan Statistik Tahun 2021 diukur dengan dua indikator yaitu: 1) Persentase pemenuhan kebutuhan data dan analisis dalam perencanaan pembangunan daerah; dan 2) Tingkat Kepuasan Pelanggan. Target dan realisasi kinerja Urusan Statistik secara rinci disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.131. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Statistik Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase pemenuhan kebutuhan data dan analisis dalam Perencanaan Pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100
2	Tingkat Kepuasan pelanggan	%	83,31	71	84,77	119,39	72	117,73

Sumber: Bappeda DIY, 2022

Realisasi kinerja Urusan Statistik pada Persentase pemenuhan kebutuhan data dan analisis dalam perencanaan pembangunan daerah telah sesuai target sebesar 100% (4.481 elemen data terisi seluruhnya) pada Aplikasi Jogja Dataku. Beberapa analisis yang telah disusun yaitu: 1) Dokumen Analisis ICOR Sektoral DIY sebagai bahan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan; 2) Dokumen Analisis Makro Ekonomi DIY sebagai bahan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan; 3) Penyediaan Data Statistik Sektoral Perencanaan dan Pengendalian; 4) Penyediaan Data Statistik Geospasial Perencanaan dan Pengendalian; 5) Dokumen Metadata Statistik Daerah; serta 6) Dokumen Proyeksi Data.

Realisasi kinerja pada Tingkat kepuasan pelanggan tahun 2021 dengan target sebesar 71% terealisasi 84,77%. Pelaksanaan survei tingkat kepuasan pelanggan mengacu Pergub DIY Nomor 32 Tahun 2019. Indikator penilaian kepuasan masyarakat terdiri dari sembilan unsur yaitu persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, sarana prasarana, penanganan pengaduan, serta saran dan masukan.

Nilai hasil survei kepuasan masyarakat pada tiga layanan BPPSD DIY meliputi: 1) layanan data dan informasi spasial dan non spasial *online* berupa Sistem Informasi Pengelolaan Data Pembangunan Daerah (*Update* dan verifikasi data statistik pada aplikasi Jogja Dataku) serta Sistem Informasi Geospasial (*Update* dan verifikasi data geospasial pada aplikasi Geoportal); 2) layanan data dan informasi spasial dan nonspasial *offline* berupa penerbitan buku-buku analisis antara lain Analisis ICOR DIY, Analisis Makro Ekonomi, Penyusunan Metadata Statistik Daerah, Penyediaan Data Statistik Sektor Perencanaan dan Pengendalian, Penyediaan Data Geospasial Perencanaan dan Pengendalian, Fasilitas Satu Data Indonesia berupa Bimtek Proyeksi Data dan Dokumen Proyeksi Data, serta 3) layanan pengaduan.

Kepuasan pelanggan yang capaiannya rendah adalah unsur sarana prasarana dengan nilai 75,94 (kategori Baik dengan peringkat 9). Nilai unsur pelayanan sarana prasarana belum maksimal karena keterbatasan sarana prasarana yang harus disediakan, seperti: fasilitas untuk difabel, ketersediaan perangkat keras dan perangkat lunak yang terbatas, yaitu belum tersedianya laboratorium pemetaan untuk pengelolaan data geospasial berupa *software* dan *hardware* yang memadai.

b) *Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2021*

Pada tahun 2021 Urusan Statistik dilaksanakan melalui 2 program, 5 kegiatan dan 9 sub kegiatan. Alokasi anggaran tersebut sebesar Rp2.154.843.591,00 dapat direalisasikan sebanyak Rp2.015.771.303,00 atau 93,55%, dengan pencapaian fisik sebesar 100%. Berikut rincian capaian program dan sub kegiatan Urusan Statistik.

Tabel 3.132. Capaian Program dan Sub Kegiatan Urusan Statistik Tahun 2021

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	URUSAN UMUM	BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN STATISTIK DAERAH	1. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda, baik Ketersediaan data dan informasi, ketersediaan sistem aplikasi dalam rangka proses penyusunan perencanaan dan anggaran (jogjaplan) dan Monev (Sungguh) serta office management, maupun ketersediaan informasi untuk publik melalui web Bappeda. 2. Penguatan fasilitas terhadap aktivitas perencanaan dan peneliti dalam menciptakan konsep dan desain perencanaan pembangunan dan alternatif kebijakan. 3. Meningkatkan kerja sama dengan akademisi sebagai tenaga ahli/konsultan guna meningkatkan kualitas perencanaan dan monev	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Presentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN BPPSD DIY Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Terlaksanannya pengelolaan keuangan Terlaksanannya pengelolaan barang Pelayanan administrasi perkantoran dan penatausahaan keuangan Dukungan 100% terhadap Presentase Terwujudnya Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD 100% Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pengadaan Printer Pengadaan Perekam Suara Pengadaan UPS Pengadaan komputer PC Pengadaan thermometer infrared Pengadaan Meja Kerja Pengadaan Kursi Kerja Pengadaan LCD/Viewer	persen Bulan Bulan Bulan Bulan %	100 12 12 12 100	100 12 12 12 100	1) Tata kelola penyelenggaraan data statistik belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI), bahwa SDI harus dilakukan berdasarkan prinsip sbb: a. Data yang dihasilkan harus memenuhi Standar Data b. Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memiliki Metadata c. Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas data d. Data yang dihasilkan oleh produsen data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk. 2) Penyediaan dan diseminasi data statistik belum optimal.	1) Penyesuaian tata kelola penyelenggaraan data pembangunan daerah dengan kebijakan Pemerintah Pusat, utamanya terkait prinsip-prinsip Satu Data Indonesia. Kode Referensi dan Standar data masih menunggu ditetapkan oleh Pusat, sedangkan Metadata dan Interoperabilitas data sedang diupayakan untuk dipenuhi. 2) Meminimalisir perbedaan data statistik sektoral yang dipublikasikan, dengan melakukan: a. Integrasi antar aplikasi pengolah dan diseminasi data dilingkup pemerintahan.	NIHIL

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<p>pembangunan. Meningkatkan kapasitas perencanaan dalam pengembangan tools atau instrument untuk melakukan pemantauan dan evaluasi.</p> <p>5. Meningkatkan Kualitas dan efektivitas proses bisnis perencanaan pembangunan dengan memperkuat SOP Perencanaan serta mempertajam perumusan indikator pembangunan.</p> <p>6. Meningkatkan kualitas dan efektivitas proses bisnis movev serta kontrol terhadap capaian indikator.</p> <p>7. Meningkatkan intensitas koordinasi dengan forum CSR dalam mendukung pembiayaan pembangunan.</p> <p>8. Membangun link antar sistem yang ada di internal Bappeda DIY dan dengan sistem informasi diluar</p>	<p>4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan makan dan minuman rapat Laporan hasil koordinasi dan konsultasi luar daerah (Jawa) Laporan hasil koordinasi dan konsultasi luar daerah (luar Jawa) Laporan hasil koordinasi dan konsultasi dalam daerah</p> <p>5. Dukungan 50% terhadap Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi perkantoran Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Surat Kali Menyurat: Pengiriman Dokumen Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor: Pembersihan Kantor BPPSD DIY Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan: Barang Cetakan Pembayaran Tagihan Rekening Telepon Pengelolaan Arsip Dinamis: Penataan Arsip Penyediaan Jasa Surat Menyurat: Benda Pos (Materai) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Bahan Pembersih :</p>	<p>Os</p> <p>Bulan</p> <p>Bulan</p> <p>Bulan</p> <p>%</p> <p>Kali</p> <p>Bulan</p> <p>Unit</p> <p>Jenis</p> <p>Bulan</p> <p>Box</p> <p>Buah</p> <p>Jenis</p>	<p>528</p> <p>12</p> <p>12</p> <p>12</p> <p>100</p> <p>10</p> <p>12</p> <p>1</p> <p>6</p> <p>12</p> <p>20</p> <p>236</p> <p>13</p>	<p>528</p> <p>12</p> <p>12</p> <p>12</p> <p>100</p> <p>10</p> <p>12</p> <p>1</p> <p>6</p> <p>12</p> <p>20</p> <p>236</p> <p>13</p>	<p>a. Terdapat perbedaan data statistik sektoral yang dipublikasikan karena adanya beberapa aplikasi pengolahan data di pemerintahan</p> <p>b. Petugas entry data untuk aplikasi Jogja Dataku berbeda dengan petugas entry pada aplikasi pengolahan data lain, sehingga dapat menimbulkan perbedaan terhadap data yang diisikan pada elemen data yang sama.</p> <p>c. Adanya inkonsistensi data di level provinsi dan kabupaten/kota yang disebabkan perbedaan satuan dan klasifikasi dalam pengumpulan data di kabupaten/kota</p> <p>3) Perbedaan waktu antara penyediaan dan kebutuhan data perencanaan. Ketidaktersediaan data statistik yang dibutuhkan terjadi ketika beberapa data yang bersumber dari</p>	<p>b. Penyelarasan standar data antara level provinsi dan kabupaten/kota a.</p> <p>3) Penyelarasan peraturan dan kebijakan pada instansi penyedia data dengan instansi perencanaan, dengan meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan BPS Provinsi DIY dalam rangka penyalarsan ketersediaan data dan rilis data perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah dengan tatakala perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.</p> <p>4) Mengoptimalkan pengelolaan dan</p>	

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			perencanaan program tematik/program strategis bersama yang konsisten dan terukur.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Dukungan 50% Terhadap Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% PROGRAM PENGEMBANGAN STATISTIK DAERAH	unit	1	1	geospasial, serta arti pentingnya pemanfaatan data geospasial terutama dalam proses perencanaan program dan kegiatan pembangunan.	serta arti pentingnya pemanfaatan data geospasial dalam proses perencanaan program dan kegiatan pembangunan	
2	STATISTIK	BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN STATISTIK DAERAH		PresentasePemenuhanKebutuhan data danAnalisisdalamPerencanaan Pembangunan Daerah	persen	100	100			
				Tingkat KepuasanPelanggan	persen	71	84,77			
				DokumenAnalisisMakroEkonomi DIY sebagaibahanpenyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan	dokumen	1	1	5) Pengelolaan data/informasi geospasial belum memiliki fasilitas berupa sarana prasarana yang menunjang pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan JIGD, diantaranya belum tersedianya sarana prasarana berupa ruang studio pemetaan beserta kelengkapannya berupa hardware dan software untuk pengolahan, pengelolaan, dan penyebaran data geospasial.	5) Penyesuaian tata kelola penyelenggaraan data geospasial sebagai pengelola simpul jaringan pemerintah daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN), dengan mengupayakan penyediaan SDM dan sarana prasarana yang memadai.	
				Penyediaan Data Statistik Sektoral Perencanaan dan Pengendalian	dokumen	1	1			
				DokumenAnalisis ICOR Sektoral DIY sebagai bahan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan	dokumen	1	1			
				Penyediaan Data Geospasial Perencanaan dan Pengendalian	dokumen	1	1			
				Penyusunan Metadata Statistik Daerah	dokumen	1	1			
				Update Aplikasi Jogja Dataku	aplikasi	1	1			
				Update dan Verifikasi Data Statistik	paket	1	1	6) Rendahnya literasi geospasial pada SDM di lingkungan Pemda DIY secara keseluruhan terutama meliputi kualitas	6) Mengupayakan setiap OPD seyogyanya tersedia personil yang memiliki literasi memadai	
				Update dan Verifikasi Data Geospasial	paket	1	1			
				Facilitasi Satu Data Indonesia a)	kali	2	2			
				Bimtek Proyeksi Data						

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fasilitas i Satu Dat				Fasilitasi Satu Data Indonesia b) Dokumen Proyeksi Data Dukungan 100 % terhadap persentase pemenuhan kebutuhan data dan analisis dalam perencanaan sebesar 100% dan tingkat kepuasan pelanggan sebesar 71% .	dokumen	1	1	data dan standarisasi data geospasial. Data geospasial yang di produksi di masing masing OPD di lingkungan Pemerintah Daerah DIY sebagian besar belum terstandar, dalam hal referensi koordinat spasial, jenis penyajian visual simbol data, dan kesetaraan satuan unit data atribut.	dalam hal pengelolaan data geospasial, meskipun tidak harus semuanya dalam tahapan advance, karena dalam setiap tusi opd pasti mengandung data yang memiliki referensi spasial, dan hal tersebut wajib dikelola dengan optimal agar perencanaan dan pengambilan keputusan menjadi lebih tepat lokus dan tepat guna. Selain itu, Integrasi data geospasial (standarisasi data) agar berbagai data geospasial mengacu pada referensi yang sama, memiliki kesetaraan unit data atribut atau level data atribut yang jelas, dan standar simbolisasi penyajian.	

15) Urusan Persandian

a) Kondisi Umum

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 65 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2019, Bidang Keamanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keamanan informasi dan persandian.

Secara umum, pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi di Pemda DIY bertujuan untuk: a. menciptakan harmonisasi dalam melaksanakan Persandian untuk pengamanan informasi antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah; b. meningkatkan komitmen, efektivitas, dan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan Persandian untuk pengamanan informasi; dan c. memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menetapkan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah. Pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi di Pemda DIY, meliputi penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di lingkungan Pemda DIY dan melakukan pembinaan penyelenggaraan persandian ke kabupaten/kota se-DIY, dalam hal ini Pemda DIY sebagai wakil pemerintah pusat. Di samping itu, dalam rangka penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Persandian dilaksanakan sebagai upaya untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas berita atau dokumen pemerintah merupakan hal penting dalam era serba teknologi informasi saat ini. Modernisasi pemerintahan bergantung atas dukungan penggunaan teknologi informasi di segala aspek mulai dari administrasi perkantoran (*e-office*), perencanaan (*e-*

planning), keuangan (*e-budgetting*), dan fungsi pemerintahan lainnya.

Selama tahun 2021, telah dikirimkan personil untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan Pusdiklat BSSN seperti sertifikasi *EC-Council Certified Incident Handler* (ECIH), sertifikasi *EC-Council Certified Ethical Hacker* (CEH), pelatihan Kamsiber Pimpinan, dan pelatihan pengelolaan SOC. Selain itu, Tim JogjaprovCSIRT juga mengikuti *cyber security drill test sector* pemerintah yang merupakan kegiatan simulasi penanganan insiden siber yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada *stakeholder* dalam rangka penanganan insiden keamanan siber di lingkungannya.

Dalam melaksanakan kegiatan pengamanan persandian dan keamanan informasi seperti pengamanan sinyal pada *event* strategis pimpinan, kunjungan pejabat tinggi, sterilisasi ruang kerja dan ruang rapat pimpinan di Pemda DIY dan Kabupaten/Kota, dan pengamanan komunikasi VIP (Gub dan Wagub), Bidang Keamanan Informasi dan Persandian difasilitasi peralatan-peralatan persandian. Perangkat Pendukung Keamanan Informasi dan Persandian yang ada mayoritas adalah barang pinjam pakai dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Secara umum pelaksanaan Urusan Persandian di Pemda DIY pada Tahun 2021 sebagai berikut:

- (1) Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dan Komunikasi Pemda DIY
 - (a) Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi, dengan tujuan tercapainya sertifikasi ISO 27001 *Data Center* Pemda DIY.

Terkait penerapan dan audit keamanan informasi, Dinas Kominfo DIY berkoordinasi dengan BSSN melakukan Penilaian Maturitas Keamanan Siber dengan ruang lingkup aspek tata kelola, identifikasi, proteksi, deteksi, respon. Hasil penilaian Maturitas Keamanan Siber yaitu 4,4 pada level Kematangan tingkat IV atau *Managed*.

- (b) Penetapan Kebijakan Pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi Pemerintah Daerah Provinsi.

Melalui indikator kegiatan pertama berupa tersedianya dokumen laporan pengujian keamanan informasi. Penyusunan Laporan Insiden Keamanan Informasi yaitu kegiatan pelaporan terkait pengelolaan insiden yang berisi langkah-langkah yang harus diambil apabila terjadi insiden pada website Pemda DIY, yang dimulai dari tahap persiapan sampai dengan tahap pembuatan laporan dari pelaporan insiden, pencatatan, dan penanganan insiden yang terjadi pada sistem informasi di lingkungan Pemda DIY.

Sedangkan indikator kedua berupa tersedianya dokumen laporan pengujian keamanan informasi. Salah satu ancaman keamanan siber adalah melalui celah keamanan dalam aplikasi. Saat ini, terdapat lebih dari 200 aplikasi yang dikelola oleh Pemda DIY. Beberapa aplikasi merupakan aplikasi yang termasuk dalam kategori risiko tinggi.

- (c) Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi

Dengan indikator pertama adalah Email Pemerintah Daerah yang terpelihara. Kegiatan ini berdasarkan pada Pengembangan *e-government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.

Pemanfaatan email ini akan dijadikan sebagai identitas bagi setiap ASN di Pemda DIY yang melekat pada masing-masing individu ASN di Pemda DIY. Pada tahun 2021 pemeliharaan email dengan jumlah akun mencapai 12.590 akun pengguna dapat tercapai 100%.

Sedangkan indikator kegiatan kedua adalah: Ketersediaan akses Datacenter SLA dengan Menyediakan akses layanan *Data Center* Pemda DIY dengan melakukan perawatan dan pengelolaan *Data Center (DC)* dan *Disaster Recovery Center (DRC)* Pemda DIY serta menjamin kerahasiaan, integritas, akuntabilitas dan ketersediaan informasi yang ada dalam DC dan DRC Pemda DIY sepanjang tahun 2021. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan *Service Level Agreement (SLA)* terhadap Layanan *Data Center* Pemda DIY sebesar 99,5 % dalam 1 Tahun atau 362 Hari dan pada Tahun anggaran 2021 dapat tercapai 100%.

- (2) Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Antar Perangkat Daerah Provinsi Dengan Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi. Adapun indikator kegiatannya sebagai berikut:

- (a) Jaringan telepon PABX yang terpelihara: adalah kegiatan untuk Pengelolaan telepon berbasis Voip untuk instansi di lingkungan Pemda DIY sebagai salah satu jaring komunikasi sandi internal Pemda DIY yang tersebar di 32 perangkat daerah dan titik terkoneksi sejumlah 783 ekstensi baik berupa Operator Console, Telepon Digital maupun analog. Pada tahun 2021 kegiatan ini dapat terlaksana 100%.
- (b) Jumlah Layanan Pemda yang sudah menggunakan tanda tangan digital merupakan kegiatan untuk melakukan penerbitan sertifikat elektronik bagi pejabat di lingkungan Pemda DIY dan keperluan integrasi sistem elektronik. Dalam hal kebijakan teknis, Dinas Komunikasi dan Informatika menginisiasi disusunnya Pergub DIY Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (c) Rekomendasi FORKOMSANDA merupakan kegiatan rutin berupa pertemuan bagi pengelola persandian di lingkungan Pemda DIY dan Kabupaten/Kota se-DIY, unsur TNI POLRI dan penggiat keamanan informasi.
- (d) Ruang Kerja yang teramankan merupakan kegiatan *Counter Surveillance* (Pengamanan Ruangan) ruang kerja dan ruang rapat Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati se-DIY, Sekda DIY, Asisten Setda DIY, serta Sekda dan Asisten Kabupaten/Kota se-DIY serta Perangkat Daerah di lingkungan Pemda DIY dalam rangka meminimalisir adanya kebocoran informasi pimpinan.
- (e) *Upgrade* dan relokasi PABX merupakan kegiatan untuk meningkatkan layanan telekomunikasi berbasis VOIP di Pemda DIY. Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2021

b) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2021

Pada tahun 2021 Urusan Persandian dengan 1 program, 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp1.847.495.000,00. Secara keseluruhan belanja dapat direalisasi sebanyak Rp1.730.242.000,00 atau 89,24%, dengan pencapaian fisik sebesar 100%.

Tabel 3.133. Capaian Program dan Sub Kegiatan Urusan Persandian Tahun 2021

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1. Pemberdayaan dan pengembangan: (1) PPID disetiap badan publik; (2) Komunitas masyarakat penggiat Teknologi Informasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Persentase Kecepatan Informasi Sandi Kepada Pimpinan dan Informasi Persuratan di Lingkungan Pemda DIY	Persen	100	100	NIHIL	NIHIL	b. Urusan Persandian Tindak lanjut yang akan dilakukan: 1) Pelatihan Teknis Keamanan Siber bagi Pimpinan yang diselenggarakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (pendaftaran bagi eselon III dan Eselon IV; 2) Pelatihan dan Sertifikasi <i>EC-Council Certified Ethical Hacker</i> (ECIH) yang diselenggarakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara; 3) Pelatihan dan Sertifikasi <i>Certified Ethical Hacker</i> (CEH) yang diselenggarakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara; 4) Pelatihan Teknis Pengelolaan CSIRT oleh Badan Siber dan Sandi Negara bagi petugas pelaksana JOGJAPROVCSIRT; 5) Pelatihan Teknis <i>Penetration Testing</i> bagi anggota JOGJAPROVCSIRT yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika DIY;
			2. Pembuatan dan pengembangan Sistem Informasi Eksekutif (SIE)	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi						
			3. Pengembangan dan optimalisasi jaringan pemerintah daerah	Dukungan terhadap kecepatan informasi sandi kepada pimpinan dan informasi persuratan di lingkungan Pemda DIY	%	0	0			
				Sertifikat ISO 27001 Datacenter	Sertifikat	0	0			
				Pemasangan SSL	Domain	1	1			

16) *Urusan Kebudayaan*

a) *Kondisi Umum*

Kebudayaan merupakan salah satu urusan yang diamanatkan dalam UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan diperkuat dengan Visi DIY yaitu “Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Pusat Budaya, dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”. Hal ini memberikan konsekuensi Urusan Kebudayaan menjadi sangat strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan DIY.

Kinerja Urusan Kebudayaan diukur berdasarkan empat indikator capaian sasaran yakni: 1) Jumlah budaya benda yang dikelola dan dilestarikan. 2) Meningkatnya kinerja pengembangan nilai sejarah, warisan budaya, dan museum. 3) Peningkatan penyelenggaraan even budaya tingkat provinsi, nasional, internasional di Taman Budaya. dan 4) Peningkatan Kinerja pengembangan Seni Budaya DIY.

Tabel 3.134. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2020-2021, serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Jumlah budaya benda yang dikelola dan dilestarikan	buah	700	718	763	106,27	768	99,35
2.	Meningkatnya kinerja pengembangan nilai sejarah, warisan budaya dan museum	%	8,56	6,89	6,94	100,73	7,40	93,78
3.	Peningkatan penyelenggaraan even budaya tingkat provinsi, nasional,	%	7,96	10,29	10,36	100,68	12,79	81,00

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
4.	internasional di Taman Budaya Peningkatan kinerja pengembangan seni budaya DIY	%	6,11	4,6	5,18	112,61	4,75	109,05

Sumber: Disbud DIY, 2022

(1) Jumlah budaya benda yang dikelola dan dilestarikan

Indikator Jumlah budaya benda yang dikelola dan dilestarikan dilaksanakan melalui 3 sub kegiatan, yaitu: (1) Sub Kegiatan Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya; (2) Sub Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya; dan (3) sub Kegiatan Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia.

Capaian Pengelolaan dan Pelestarian budaya benda dilaksanakan melalui berbagai kegiatan yang terdapat pada sub Kegiatan antara lain Inventarisasi Dokumentasi, Pemberian Legalitas Warisan Budaya dan Cagar Budaya (WBCB), Penelitian WBCB, Rehabilitasi dan Revitalisasi WBCB, serta Perawatan WBCB. Pengelolaan dan pelestarian budaya benda difokuskan pada situs, bangunan dan kawasan yang mendukung pengusulan Yogyakarta sebagai Warisan Dunia.

Capaian indikator Jumlah budaya benda yang dikelola dan dilestarikan pada Tahun 2021 secara keseluruhan mencapai 763 dari target sebesar 718 Benda Budaya atau tercapai sebesar 106,27%. Capaian tersebut terdiri dari struktur 1 buah, Situs 11 buah, Benda Cagar Budaya 373 buah, Bangunan Cagar Budaya 376 buah dan Kawasan Cagar Budaya sebanyak 2 buah.

Tabel 3.135. Budaya Benda yang Dikelola dan Dilestarikan pada Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah
1	Struktur	1
2	Situs	11
3	Benda Cagar Budaya	373
4	Bangunan Cagar Budaya	376
5	Kawasan cagar budaya	2
Jumlah		763

Sumber: Disbud DIY, 2022

- (2) Meningkatnya kinerja pengembangan nilai sejarah, warisan budaya dan museum

Indikator Kinerja Pengembangan nilai sejarah, warisan budaya dan museum dilaksanakan melalui 3 sub kegiatan, yaitu: 1) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan; 2) Sub Kegiatan Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra; serta 3) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman.

Capaian indikator kinerja Pengembangan nilai sejarah, warisan budaya dan museum pada tahun 2021 sebesar 6,94% dari target sebesar 6,89% dengan persentase capaian sebesar 100,73%. Peningkatan kinerja pengembangan nilai sejarah, warisan budaya dan museum diperoleh dari berbagai sub kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 antara lain Sub Kegiatan Sejarah dengan beberapa kegiatan yang telah dilakukan yakni penelitian terhadap Sejarah Lokal DIY, pelaksanaan peringatan Peristiwa Bersejarah, Cerdas Cermat Sejarah dan Pembinaan Komunitas Sejarah.

Sedangkan pada Sub Kegiatan Bahasa dan Sastra beberapa kegiatan atau even telah dilaksanakan, antara lain Kompetisi Bahasa dan Sastra yang terdiri dari 9 Jenis Lomba (Kompetisi Sengkalan/Alih Manuskrip, Kompetisi Penulisan Serat/Novel, Kompetisi Macapat, Kompetisi

maca geguritan, Kompetisi Sesorah, Kompetisi Pranatacara, Kompetisi Standup Comedy Basa Jawa, Kompetisi Alih Aksara dan Kompetisi Cerkak), Pergelaran karya Bahasa dan Sastra (Macapat), Revitalisasi sastra lisan Benda dan Tak Benda, pengembangan kethoprak kekinian dan pengembangan sandiwara radio bahasa jawa.

Pada Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman aktivitas yang telah dilaksanakan adalah Pelaksanaan Rehab Museum pada Museum Pleret yaitu pada Gedung A dan B. Selain itu kegiatan yang dilakukan pada tahun 2021 adalah pelaksanaa event-even permuseuman seperti Gebyar Museum Sejarah Purbakala Pleret, Wajib Kunjung Museum, Lomba Cerdas Cermat Museum, Pemilihan Duta Museum dan Registrasi Museum. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan tersebut berkontribusi besar terhadap capaian kinerja pengembangan nilai sejarah, warisan budaya dan museum pada tahun 2021.

Tabel 3.136. Pengembangan Nilai Sejarah, Warisan Budaya, dan Museum pada Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah
1	Komunitas Sejarah	3
2	Peristiwa Sejarah	10
3	Event Bahasa	20
4	Naskah Kuno dan Karya Bahasa	8
5	Museum Rehab	1
6	Registrasi Museum	5
7	Event Museum dan Sejarah	13
Jumlah		60

Sumber: Disbud DIY, 2022

- (3) Peningkatan Penyelenggaraan Event Budaya Tingkat Provinsi, Nasional, Internasional Di Taman Budaya

Indikator Peningkatan Penyelenggaraan Event Budaya Tingkat Provinsi, Nasional, Internasional di Taman Budaya pada tahun 2021 mencapai 10,36% dari target 10,29% dengan persentase capaian sebesar 100,68%. Capaian tersebut terdiri dari 2 event skala internasional, 7 event skala nasional, 17 event skala provinsi. Penyelenggaraan Event di Taman Budaya selalu menerapkan protokol kesehatan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19.

Event Internasional yaitu Pameran Seni Rupa "DERAP" dan Pameran Lukisan Dasa Warna Ekspresi Cat Air 2021. Sementara itu, untuk event Nasional terdiri dari Pameran Seni Rupa *Andrawina Art Exhibition*, Bincang-Bincang Sastra, Panggung Budaya, Musik Orkes/Karawitan/LA *Nostra Voce*, Konser Musik Daring, Pentas Ketoprak Tobong dan Pentas Budaya Jogja *Cross Culture*.

Kemudian pada event Provinsi terdiri dari *New Comers*, *Home Concert* Angkatan 2018, Pengambilan Video Pagelaran Tari, Pentas Amal Wayang Tari Rorojongrang, Pentas Besar Teater Jubah Macan, *Symphony From Hell*, Pentas Kolaborasi, Pentas Nyawiji #6, Pentas Sanggar Sastra, Tapping Wayang Cinema, Pentas Climen #3, Pentas Teater Puncak SMA N 1 Wonosari, Rekaman Audio Swingayogya, Rekaman Video dan Audio, Pengambilan Video Lomba Tari Kreasi "Jagad Raya Ragam Nusantara, *Tapping* Konser SKSO #4, Pengambilan video Pertunjukan Teater Kami Bercerita.

Tabel 3.137. Penyelenggaraan *Event* Taman Budaya DIY pada Tahun 2021

No	Klasifikasi <i>Event</i>	Jumlah <i>Event</i>
1	Internasional	2
2	Nasional	7
3	Provinsi	17
Jumlah		26

Sumber: Disbud DIY, 2022

(4) Peningkatan Kinerja pengembangan Seni Budaya DIY

Capaian indikator kinerja Pengembangan seni di DIY pada tahun 2021 tercapai sebesar 5,18% dari target sebesar 4,60% dengan persentase capaian sebesar 112,61%. Capaian pada tahun 2021 diperoleh dari pelaksanaan Sub Kegiatan yang memiliki objek kinerja seperti Upacara Adat, Upacara Tradisi, Organisasi Seni Rupa, Organisasi Seni Pertunjukan, Organisasi Perfilman, Lembaga Budaya, Lembaga Pendidikan Budaya, dan Organisasi Kepercayaan.

Upaya pencapaian kinerja pengembangan seni budaya melalui pemerataan akses masyarakat terhadap sarana prasarana budaya dan peningkatan kemampuan penyelenggaraan *event* budaya masih terus dilanjutkan. Agar ekosistem kebudayaan khususnya terkait dengan penyelenggaraan *event* budaya digunakan teknologi informasi sebagai alternatif pelaksanaan *event* yang semula dilaksanakan secara luring.

Tabel 3.138. Pengembangan Kinerja Seni di DIY pada Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah
1	Upacara Adat	61
2	Upacara Tradisi	6
3	Organisasi seni pertunjukan	235
4	Organisasi perfilman	13
5	lembaga budaya	4
6	Organisasi kepercayaan	34
JUMLAH		353

Sumber: Disbud DIY, 2022

Event-event besar yang selama ini menjadi ikon unggulan agenda budaya DIY dilaksanakan secara daring dan luring terbatas dalam rangka beradaptasi dengan pandemi. Gelar Budaya Yogyakarta, Festival Kebudayaan Yogyakarta, Festival Kethoprak, dan Festival-Festival berjenjang lainnya dilaksanakan secara daring.

b) Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2021

Pada tahun 2021 Urusan Kebudayaan dilaksanakan melalui 2 program dan 55 sub kegiatan terdiri dari belanja APBD dan dana keistimewaan. Nilai pagu total sebesar Rp290.348.239.204,00. Realisasi anggaran sebesar Rp272.997.833.443,00 atau 94% dan realisasi fisik mencapai 99,89%.

Tabel 3.139. Capaian Program dan Sub Kegiatan Urusan Kebudayaan Tahun 2021

Urusan Pemerintahan 2	OPD 3	Kebijakan 4	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator 5	Satuan 6	Target 7	Realisasi 8	Permasalahan 9	Upaya Mengatasi Permasalahan 10	Tindak lanjut rekomendasi DPRD 11
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	DINAS KEBUDAYAAN	1. Menumbuh kembangkan kesadaran multi stakeholder pembangunan budaya benda dan tak benda. 3. Memperkuat lembaga pelestari budaya dan mengembangkan budaya di Kawasan Cagar Budaya, Saujana Budaya, Desa dan Kelurahan Budaya	PROGRAM PENUNJANG PROVINSI Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Bulan 12 12 Perencanaan dan Data Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Penyusunan RKA - SKPD Dokumen 1 1 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Penyusunan Dokumen Dokumen 1 1 Perubahan RKA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD penyusunan DPA - SKPD Dokumen 1 1 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Penyusunan Dokumen Dokumen 1 1 Perubahan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan LKJIP, LPPD, Dokumen 7 7 RB, LKPI, LKPD, PUG ,IKM Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Bulan 12 12 Kinerja Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan Tahun 1 1 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Penyelenggaraan Bulan 12 12 Administrasi Keuangan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			1. Masih adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat karena Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta, berdampak pada penyelenggaraan event seni budaya di DIY dan kegiatan lainnya yang bersifat tatap muka seperti sosialisasi, pembinaan, sarasehan, workshop dan lain-lain. 2. Ketentuan pengadaan barang/jasa khususnya konstruksi untuk cagar budaya disamakan dengan konstruksi yang bersifat umum (tidak mensyaratkan tenaga ahli di bidang cagar budaya). Hal ini menyebabkan penawaran menjadi rendah dan kinerja pemenang tender	Pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial dalam pelaksanaan kegiatan. Event seni budaya dan kegiatan tatap muka lainnya dilaksanakan dengan cara daring (tapping dan live streaming) atau luring terbatas di gedung-gedung pemerintah. Publikasi dilaksanakan melalui kanal youtube dan instagram Dinas Kebudayaan karena subscriernya sudah cukup banyak 2. Pengendalian Kontrak yang ketat	Urusan Wajib Tindak lanjut yang akan dilakukan: 1) Tindaklanjuti atas rekomendasi Internalisasi spirit keistimewaan: a. Internalisasi spirit keistimewaan ditahun 2021 dan 2022 telah direncanakan dan akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga berupa: 1) Kegiatan dengan sasaran untuk Tenaga Pendidik adalah: a) Internalisasi nilai-nilai Pendidikan berbasis budaya dengan sasaran tenaga pendidik untuk jenjang SD, SMP, SMA, SMK dan SLB; b) Penyelarasan kurikulum Bahasa jawa untuk SD, SMP, SMA dan SMK yang ada di DIY. 2) Kegiatan dengan sasaran untuk peserta didik: a) Kegiatan festival budaya Pendidikan khusus merupakan ajang pameran dan unjuk seni atas spirit keistimewaan peserta didik SLB; b) Gerakan seniman masuk sekolah untuk memberikan bimbingan kebudayaan bagi peserta didik sesuai minat sekolahnya; c) Gladi kaweruh merupakan perlombaan

Urutan Pemerintahan 2	OPD 3	Kebijakan 4	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator 5	Satuan 6	Target 7	Realisasi 8	Permasalahan 9	Upaya Mengatasi Permasalahan 10	Tindak lanjut rekomendasi DPRD 11
			Penatausahaan Keuangan SKPD	Bulan	12	12	menjadi kurang optimal		untuk melihat pemahaman dan pengetahuan mengenai kebudayaan DIY; d) Ngudar Kaweruh Tembang merupakan bedah makna dan filosofi tembang jawa yang tentunya berkonteks untuk internalisasi spirit keistimewaan; 2) Tindaklanjutan atas rekomendasi atas pelaksanaan even: Dinas kebudayaan DIY sejak tahun 2020 maupun tahun 2021 telah memulai menyelenggarakan even kebudayaan secara model hybrid (perpaduan antara luring dan daring) dengan mengedepankan protocol Kesehatan. Dengan model ini dilaksanakan dengan mengundang peserta dan atau penonton secara langsung dengan jumlah sesuai dengan ketentuan adaptasi kebiasaan baru. Program Strategis Tindak lanjut yang akan dilakukan: 1) Pengawasan Taman Budaya di DIY mengacu pada Peraturan Gubernur nomor 85 tahun 2019 tentang pengelolaan dana keistimewaan dan Peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan dengan
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						
			Penyelenggaraan Akuntansi SKPD	bulan	12	12			
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
			Laporan Anggaran	Realisasi Dokumen	1	1			
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						
			Penyusunan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan Dokumen	1	1			
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						
			Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan Semesteran	bulan	12	12			
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						
			Laporan Prognosis	Dokumen	1	1			
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						
			Penatausahaan BMD SKPD	Bulan	12	12			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
			Pembelian Instalasi Listrik	Komponen Jenis	15	15			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
			Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	22	22			
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
			Penggandaan	Lembar	14000	14000			
			Penyediaan Cetakan	Barang jenis	10	10			
			Penyediaan Bahan/Material						
			Penyediaan Alat Tulis	jenis	47	47			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
			Konsultasi dan Koordinasi dalam dan Luar Daerah terlaksana dengan baik	bulan	12	12			

Urutan Pemerintahan 2	OPD 3	Kebijakan 4	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator 5	Satuan 6	Target 7	Realisasi 8	Permasalahan 9	Upaya Mengatasi Permasalahan 10	Tindak lanjut rekomendasi DPRD 11
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						
			Penatausahaan arsip bulan Dinamis		12	12			demikian pengelolaan, pengawasan dan pemeliharaan dapat dilakukan secara terkoordinasi secara berkala dengan mekanisme yang sudah diatur didalam ketentuan tersebut; 2) Pemilihan taman budaya telah dilaksanakan dengan didahului melakukan kajian studi pendahuluan/ Fisibility Study (FS)/ semacamnya dalam rangka untuk menentukan lokasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, pertahanan dan keterkaitan dengan aspek social ekonomi lainnya. 3) Pemanfaatan Taman Budaya dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat telah dimulai sejak tahun 2020 dengan adanya even budaya, pementasan, pameran dan festival yang diselenggarakan ditaman budaya. Ditahun 2021 dan 2022 aktivitas ini akan tetap berkesinambungan, sehingga pemanfaatan taman budaya dalam rangka pemajuan kebudayaan akan tetap berlangsung. 4) Pengadaan tanah untuk Taman Budaya sudah dilaksanakan, dimana dalam pelaksanaannya telah dilakukan berdasarkan kajian baik melalui forum-forum
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						
			Pembayaran Domain dan Hosting	Bulan	12	12			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
			meterai dan Perangko	Jenis	2	2			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
			Pembayaran retribusi sampah, telepon, listrik dan surat kabar	Bulan	12	12			
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
			Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan	Bulan	12	12			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
			Pembayaran Kir, Pajak dan Pemeliharaan Kendaraan	Unit	17	17			
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
			Pemeliharaan Peralatan	Jenis	11	11			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
			Pemeliharaan Gedung	Kompleks	3	3			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA						
			URUSAN KEBUDAYAAN						
			persentase cagar budaya dan Warisan Budaya yang dilestarikan	Persen	14.18	34			
			Jumlah sumber sejarah yang direvitalisasi	Tema	13	13			
			Jumlah karya bahasa dan sastra yang dilestarikan	Karya	12	14			
			Rasio kunjungan museum dibanding kunjungan ke ODTW lain	Rasio	0.65	0.8			
			Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana	Unit	25	25			

Ururan Pemerintahan 2	OPD 3	Kebijakan 4	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator 5	Satuan 6	Target 7	Realisasi 8	Permasalahan 9	Upaya Mengatasi Permasalahan 10	Tindak lanjut rekomendasi DPRD 11
			realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	Persen	99.08	100			koordinasi, FGD, maupun konsultasi dengan berbagai pihak. Sehingga pembangunan taman budaya sudah sampai pada tahapan untuk pembangunan kontruksi atau untuk pengadaan fasilitas pendukung.
			Realisasi jumlah kerja sama dengan mitra budaya	Kerja sama	30	30			
			Persentase lembaga adat dan pelestari budaya yang maju	Persen	2	2			
			Jumlah Desa Mandiri Budaya	Desa Budaya	15	18			
			Persentase even budaya tingkat provinsi, nasional, internasional yang diselenggarakan di Taman Budaya Yogyakarta	Persen	10.29	10.29			
			Indeks kepuasan pengunjung Museum Sonobudoyo	Indeks	0.8	3.3			
			Persentase Nilai Adat, Tradisi dan Seni yang Sudah Direvitalisasi	Persen	29.67	31.71			
			Persentase Benda Koleksi Museum (BKM) yang dinventarisasi dan didokumentasi dibanding seluruh koleksi	Persen	80.16	365.08			
			Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan						
			Kajian Sejarah Lokal DIY	Dokumen	5	5			
			Lawatan sejarah	Even	3	3			
			Peringatan Peristiwa Bersejarah	Even	3	3			
			Jambore Kesejarahan	Even	1	1			
			Roadshow Kesejarahan	Even	1	1			
			Seminar Nasional	Even	1	1			
			Internalisasi Kesejarahan	Even	1	1			
			Cerdas Cermat Sejarah	Even	1	1			
			Pembinaan Komunitas Sejarah	Komunitas	3	3			

Ururan Pemerintahan 2	OPD 3	Kebijakan 4	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator 5	Satuan 6	Target 7	Realisasi 8	Permasalahan 9	Upaya Mengatasi Permasalahan 10	Tindak lanjut rekomendasi DPRD 11
			BKK desa arsitektur budaya Mataram Islam	Kelurahan	1	1			
			Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra						
			Kompetisi Bahasa dan Sastra	Jenis Lomba	9	9			
			Pergelaran karya Bahasa dan Sastra	kali Macapat	22	22			
			Promosi dan Publikasi Bahasa dan Sastra	Jenis Terbitan	2	2			
			Temu Karya Sastra	orang	150	150			
			Buku Sastra Budaya	Judul	3	3			
			Revitalisasi sastra Lisan Benda dan Tak Benda	Dokumen	6	6			
			Pengembangan Kethoprak Kekinian	Naskah	20	20			
			Pengembangan Sandiwara Radio Bahasa Jawa	Naskah	20	20			
			Festival Sastra Yogyakarta (FSY)	Even	1	1			
			Pengembangan Naskah Kuno	Aplikasi	2	2			
			Kongres Aksara Jawa	Even	1	1			
			Webinar kesatria winaya	Kali	4	4			
			Pemberdayaan Pelaku Seni Budaya QRIS	Even	1	1			
			Edukasi dan Promosi Digitalisasi Aksara Jawa	Even	2	2			
			Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman						
			Gebyar Museum Sejarah Purbakala Pleret	Even	1	1			
			Registrasi Koleksi Museum	Museum	5	5			
			Pendampingan Edukator Museum	Museum	17	17			
			Review Masterplan dan Appraisal	Dokumen	2	2			
			Pengadaan Tanah Kotagede	Bidang	1	1			

Urutan Pemerintahan 2	OPD 3	Kebijakan 4	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator 5	Satuan 6	Target 7	Realisasi 8	Permasalahan 9	Upaya Mengatasi Permasalahan 10	Tindak lanjut rekomendasi DPRD 11
			Wajib Kunjung Museum	Peserta	5760	4649			
			Lomba Cerdas Cermat Museum	Event	1	1			
			Kajian Permuseuman	Dokumen	9	9			
			Rapat Kerja Permuseuman	Dokumen	2	2			
			Pemilihan Duta Museum	Duta Museum	38	38			
			Jumpa Sahabat Museum	Kali	32	32			
			Pelatihan SDM Permuseuman	Kali	1	1			
			Jogja Museum Expo	Even	2	2			
			Fasilitasi Museum	Museum	36	31			
			Buletin Permuseuman	Penerbitan	4	4			
			Pengadaan tanah tahap II Museum Pleret	Bidang	4	4			
			Pembangunan museum Pleret	Bangunan	2	2			
			Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya						
			Inventarisasi dan CB		50	60			
			Dokumentasi WBCB						
			Pemberian Legalitas WBCB	WBCB	100	273			
			Pembinaan Pelestarian WBCB	Kali	1	1			
			Penelitian WBCB	Bangunan/Situs/Kawas	6	6			
			Pengelolaan WBCB	Badan Pengelola	1	1			
			Publikasi Pelestarian WBCB	Dokumen	3	3			
			Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya						
			Rehabilitasi WBCB	WBCB	1	1			
			Perawatan WBCB	Bangunan	11	11			
			Revitalisasi Situs dan Kawasan WBCB	Kawasan WBCB	2	2			
			Pengawasan WBCB	Dokumen	1	1			
			Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia						
			Mendukung pencapaian persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan	persen	100	100			

Urutan Pemerintahan 2	OPD 3	Kebijakan 4	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator 5	Satuan 6	Target 7	Realisasi 8	Permasalahan 9	Upaya Mengatasi Permasalahan 10	Tindak lanjut rekomendasi DPRD 11
			Publikasi dan Promosi Nominasi Warisan Budaya Dunia	Publikasi	54	54			
			Penyiapan Yogyakarta sebagai Nominasi Warisan Budaya Dunia	event	5	5			
			Perencanaan Yogyakarta Warisan Dunia	Paket	7	7			
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya						
			Sarpras Perkantoran	Jenis	31	31			
			Pemeliharaan	Jenis	5	5			
			Vaksin COVID-19 untuk Pelaku Seni Budaya	orang	10000	10000			
			Pengadaan Alat Genose	Unit	3	3			
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya						
			Gamelan Besi	set	65	65			
			Pakaian seni	Set	4	4			
			Alat Seni	Set	4	4			
			Packaging gamelan	Set	3	3			
			Penyusunan spesifikasi pengadaan perlengkapan kesenian	Dokumen	1	1			
			Pengadaan Hibah Gamelan Kuningan	Set	3	3			
			Pengadaan Hibah Gamelan Perunggu	Set	2	2			
			Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan						
			Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen	1	1			
			Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan						
			Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keistimewaan Urusan Kebudayaan TW I ,II,III ,IV	Dokumen	4	4			
			Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya						

Urutan Pemerintahan 2	OPD 3	Kebijakan 4	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator 5	Satuan 6	Target 7	Realisasi 8	Permasalahan 9	Upaya Mengatasi Permasalahan 10	Tindak lanjut rekomendasi DPRD 11
			Pameran Seni Instalasi Sampah Bawuran	event	1	1			
			Penguatan Organisasi . Kemitraan	Lembaga Kali	8 1	8 1			
			Jogjakarta Royal Orchestra	Even	1	1			
			Film Monolog	Film	1	1			
			Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya						
			Pendampingan Desa Budaya 5 Aspek	Pendamping Desa Buda	112	112			
			Peningkatan SDM	pelatihan untuk desa	3	3			
			Sarpras Desa Budaya (Gamelan Perunggu)	Set	8	8			
			Sarpras Desa Budaya (Pakaian Pengrawit)	Paket	30	30			
			Sarpras Desa Budaya (Balai Budaya)	Balai Budaya	3	3			
			Gelar Potensi (Even Kab, Even Bandara, Even Pentas Seni Desa Budaya)	Even	70	70			
			Akreditasi Desa Budaya	Kali	1	1			
			Fasilitasi Upacara Adat	Even Upacara Aadat	56	54			
			Buletin Desa Budaya	Edisi	2	2			
			Pengembangan Desa Mandiri Budaya	Desa Mandiri Budaya	10	10			
			Masterplan Desa Mandiri Budaya	Dokumen	3	3			
			Pembinaan Lembaga Penggiat Seni						
			Lomba Lukis DIY Kyoto	Even	1	1			
			Workshop dan Lomba Komik	Kali	3	3			
			Moekti	SLB DIY	2	2			
			ARTJOG	Even	1	2			
			Jogja Street Sculpture Project	Even	1	1			
			Pekan Seni Grafis Yogyakarta	Even	1	1			

Urusan Pemerintahan 2	OPD 3	Kebijakan 4	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator 5	Satuan 6	Target 7	Realisasi 8	Permasalahan 9	Upaya Mengatasi Permasalahan 10	Tindak lanjut rekomendasi DPRD 11
			Audisi dan Pengiriman GBN	Even	1	1			
			Pekan Budaya Tionghoa	Even	1	1			
			Pembuatan Film	Film	10	10			
			Pemutaran Film di Desa / Kelurahan dan Bioskop Jum'at	Kali	20	20			
			Workshop seni	Kali	12	12			
			JAFF, FFD, FFPJ	Kali	3	3			
			Pemberdayaan Pelaku Seni Budaya QRIS	Kali	1	1			
			Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya						
			Terlaksananya Pengiriman Tim Kesenian DIY	Negara	1	1			
			Penghargaan Seniman dan Budayawan						
			Penghargaan untuk 6 kategori yakni Pelestari dan atau Pelaku Seni, Pelestari dan/atau Pelaku Adat Tradisi, Pelestari dan/atau Pelaku Warisan Budaya dan Cagar Budaya, Budayawan (Pemikir, Pemerhati, Pengamat, Analisis Sosial Budaya), Kreator (Pelopor dan/atau Pencipta Karya), Maestro Budaya,	Orang	24	24			
			Gelar Karya penerima penghargaan seniman dan budayawan	Even	1	1			
			Penghargaan Kategori Lainnya	Orang	10	10			
			Festival Kebudayaan Yogyakarta						
			Pentas Seni	Even	1	1			
			Pameran	Even	3	1			
			Pawai	Even	1	1			

Ururan Pemerintahan 2	OPD 3	Kebijakan 4	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator 5	Satuan 6	Target 7	Realisasi 8	Permasalahan 9	Upaya Mengatasi Permasalahan 10	Tindak lanjut rekomendasi DPRD 11
			Pasar Seni	Even	1	1			
			PKN	Even	1	1			
			Gelar Budaya Yogyakarta						
			Gelar Budaya Catur Sagatra.	Even	1	1			
			Festival Berjenjang DIY (karawitan, Langencarito, Sendratari, Ketoprak, Teater)	Event	5	5			
			Jogja Gamelan Festival.	Even	1	1			
			Pekan Budaya Diffabel.	Even	1	1			
			Pembinaan Tari	Sanggar	10	10			
			Publikasi Seni dan Budaya Daerah						
			Publikasi Budaya media televisi (a. Ketoprak televisi 20 kali b. Kunci bawuk 12 kali c. Citra Jogja 6 kali d. Sanja Desa Budaya 1 Kali e. Iklan layanan Masyarakat 10 kali)	Kali	49	49			
			Publikasi Budaya Media Radio	Spot	28	28			
			Publikasi Budaya Media cetak (4 Jenis Media Cetak)	Kali	48	48			
			Publikasi Budaya media sosial (a. Dialog Budaya sowan seniman 8 kali b. Live streaming 50 kali c. . serial wayang cinema 15 kali d. Vlog warisan Budaya 15 kali e. Ketoprak daring 20 kali)	Kali	108	108			
			Muhibah Budaya	Kali	1	1			
			Dialog Budaya JOGJA SEMESTA	Kali	10	10			
			Workshop Pengelolaan Media Sosial.	Kali	1	1			

Urutan Pemerintahan 2	OPD 3	Kebijakan 4	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator 5	Satuan 6	Target 7	Realisasi 8	Permasalahan 9	Upaya Mengatasi Permasalahan 10	Tindak lanjut rekomendasi DPRD 11
			Pengembangan aplikasi website Data Budaya	Paket	1	1			
			Perayaan Hari Keistimewaan.	Paket	1	1			
			Launching Agenda Budaya	Paket	1	1			
			Pemberdayaan Pelaku Seni Budaya QRIS	Kali (50 Seniman)	1	1			
			Among Rasa Kabudayan	Kali	2	2			
			Kajian Kerangka Data Kebudayaan	Dokumen kajian	1	1			
			Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi						
			Puncak Ritual Wayang Kulit Kapatihan	Even	1	1			
			Sarasehan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa	Kali	4	4			
			Festival Upacara Adat	Even	1	4			
			Fasilitasi Puncak Ritual Masyarakat dan Kelompok Penghayat	Kali	20	20			
			Lomba Pranata Adicara dan Tata Rias-Busana Pengantin Gaya Yogyakarta	Even	1	1			
			Cetak buku dan buletin penghayat, adat dan tradisi (1. Buku 325 Eksmplar 2. buletin penghayat 2 edisi @150 Eksmplar)	Eksemplar	625	625			
			Pemilihan nominasi Bidang Kepercayaan tingkat provinsi.	Even	1	1			
			Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat						
			Pentas wayang klasik di Sasono Hinggil YK (Pentas	Kali	10	10			

Urutan Pemerintahan 2	OPD 3	Kebijakan 4	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator 5	Satuan 6	Target 7	Realisasi 8	Permasalahan 9	Upaya Mengatasi Permasalahan 10	Tindak lanjut rekomendasi DPRD 11
			Pembinaan Wayang Gagrak Yogyakarta)						
			Pentas representasi pembinaan pedalangan (Pentas Pembinaan Wayang Gagrak Yogyakarta)	Kali	10	10			
			Pentas pengembangan pedalangan (Pentas Pembinaan Wayang Gagrak Yogyakarta)	Kali	9	9			
			Wayang Wong Gagrak Yogyakarta (Pentas Pembinaan Wayang Gagrak Yogyakarta)	Kab/Kota	5	5			
			Workshop dan Pentas Singkat (Pembinaan Pedalangan)	Kali	10	10			
			Sarasehan Pedalangan (Pembinaan Pedalangan)	Kali	3	3			
			Seleksi dalang anak dan remaja tingkat DIY dan pengiriman tingkat nasional (Pembinaan Pedalangan)	Even	2	2			
			Sosialisasi Tata Nilai (Pemeliharaan dan Pengembangan Tata Nilai DIY)	Kab/Kota	5	5			
			Pelatihan tata nilai budaya DIY (Pemeliharaan dan Pengembangan Tata Nilai DIY)	Kab/Kota	5	5			
			Pencatatan, inventarisasi, dan penetapan (Warisan Budaya Tak Benda)	Dokumen	1	1			

Urusan Pemerintahan 2	OPD 3	Kebijakan 4	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator 5	Satuan 6	Target 7	Realisasi 8	Permasalahan 9	Upaya Mengatasi Permasalahan 10	Tindak lanjut rekomendasi DPRD 11
			Perayaan WBTB DIY (Warisan Budaya Tak Benda)	Even	1	1			
			Perayaan Hari Wayang Dunia (Warisan Budaya Tak Benda)	Even	1	1			
			Pengembangan Wayang dan Keris (Warisan Budaya Tak Benda)	Dokumen	1	1			
			Penguatan Dewan Kebudayaan DIY	Tahun	1	1			
			Pemberdayaan Pelaku Seni Budaya QRIS	Even (50 Seniman)	1	1			
			Aplikasi Pengelolaan Kebudayaan	Aplikasi	1	1			
			Selendang Sutera						
			Seminar Budaya	Kali	4	4			
			Gelar Budaya Etnis	Even	1	1			
			Jelajah Budaya	Kali	3	3			
			Penyelenggaraan Even Penggiat Seni						
			Pentas Seni Budaya	Kelompok	148	116			
			Pembinaan Sanggar	Kelompok	60	28			
			Penguatan Lembaga Pelestari Budaya						
			Dukungan Pelestarian Budaya di Kraton dan Pura	Tahun	1	1			
			Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi						
			Dukungan Pembantu Pelestari Lembaga Warisan Budaya	Tahun	1	1			
			Dukungan Prosesi Labuhan	Even	2	2			
			Festival Bregodo	Even	2	2			
			Mubeng Beteng	Kali	1	1			
			Penerimaan Gunungan Garebeg	Even	3	3			

17) *Urusan Perpustakaan*

a) *Kondisi Umum*

Menurut UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Sistem Perpustakaan, disebutkan bahwa perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan /atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka. Perpustakaan setingkat Provinsi salah satu kewajibannya adalah menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan.

Dalam penyelenggaraan Urusan Perpustakaan, Pemda DIY melalui Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) DIY berpedoman pada RPJMD 2017-2022 yang salah satu sasaran strategis perangkat daerahnya adalah Meningkatnya jumlah pemustaka ke perpustakaan. Kinerja sasaran Meningkatnya jumlah pemustaka ke perpustakaan diukur dengan indikator Persentase peningkatan jumlah pemustaka ke perpustakaan dengan target tahun 2021 sebesar 26%.

Pada tahun 2021 terdapat 892.446 pemustaka yang mengakses layanan perpustakaan. Sedangkan, jumlah penduduk usia potensial DIY (usia 5-65 tahun) menurut proyeksi BPS pada tahun 2021 sebesar 3.399.700. Sehingga Persentase kenaikan jumlah pemustaka ke perpustakaan pada tahun 2021 terealisasi sebesar 26,25% atau terealisasi 100,96%. Capaian tersebut jika dibandingkan target akhir RPJMD 2017-2022 sebesar 27%, maka pada tahun 2021 telah tercapai 97,22%. Rincian capaian Urusan Perpustakaan disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.140. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase peningkatan jumlah pemustaka ke perpustakaan	%	25,83	26	26,25	100,96	27	97,22

Sumber: DPAD DIY, 2022

Sumber data diolah dari statistik pengunjung yang direkap dari hasil pengunjung perpustakaan selama tahun 2021, baik kunjungan fisik maupun virtual. Kunjungan fisik berasal dari:

- (1) Layanan Perpustakaan Menetap, yang meliputi: a) Kunjungan di unit Grhatama Pustaka (GTP); b) Kunjungan di unit *Jogja Library Center* (JLC); dan c) Kunjungan di unit Rumah Belajar Modern (RBM)
- (2) Layanan Perpustakaan Ekstensi, yang meliputi: a) Kunjungan dari Layanan Pojok Baca; b) Kunjungan dari Layanan Perpustakaan Keliling; dan c) Jumlah Layanan *Delivery Order* (Pemustaka Istimewa)

Sementara itu data Kunjungan virtual berasal dari website DPAD DIY (dpad.jogjaprovo.go.id), website *Jogja Library for All*, Website *Center of Excellence* (COE), dan aplikasi *iJogja*.

Inovasi yang dilakukan Pemda DIY melalui DPAD DIY pada saat pandemi adalah dengan mengembangkan rintisan aplikasi pembinaan perpustakaan untuk memudahkan upaya proses pembinaan dan juga akreditasi perpustakaan. Aplikasi yang dikembangkan dinamakan *sibinakawan* yang dapat diakses di <http://sibinakawan.jogjaprovo.go.id>.

Pemda DIY melalui DPAD DIY berinovasi dengan me-launching aplikasi *Si Yokca*. *Si Yokca* adalah akronim dari *Ayok Membaca!* yang merupakan ajakan kepada masyarakat untuk lebih gemar

membaca. Aplikasi ini dikelola oleh Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY dalam rangka memberi kemudahan akses bahan bacaan. Setiap anggota perpustakaan dapat menemukan buku-buku terbaru dan juga unggulan. Aplikasi ini dilengkapi dengan kartu anggota digital yang memberikan kemudahan untuk mengakses layanan perpustakaan tanpa perlu mencetak kartu anggota. Bagi yang mengajukan permohonan surat keterangan bebas pustaka, dengan *Si Yokca* ini menjadi lebih mudah dan cepat.

Selama pandemi, jumlah kunjungan virtual ke perpustakaan secara umum meningkat. Tercatat selama tahun 2021 terdapat 843.492 pemustaka yang mengakses layanan virtual perpustakaan. Hal ini meningkat cukup pesat dari tahun 2020 yang hanya terdapat 716.730 pemustaka yang mengakses layanan virtual ini.

b) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2021

Pada tahun 2021 Urusan Perpustakaan dilaksanakan melalui kegiatan dengan alokasi Rp3.722.932.600,00. Pengalokasian anggaran tersebut terbagi dalam 3 program, 13 kegiatan, dan 40 sub kegiatan yang didanai oleh APBD. Sedangkan, yang didanai oleh Dana Keistimewaan (Danais) yaitu 1 program, 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan. serta, satu sub kegiatan yang didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK). Secara keseluruhan belanja langsung dapat direalisasi sebanyak Rp3.290.087.530,00 (88,37%), dengan pencapaian fisik sebesar 100%. Selanjutnya rincian capaian kinerja program dan kegiatan tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 3.141. Capaian Program dan Sub Kegiatan Urusan Perpustakaan Tahun 2021

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	URUSAN PERPUSTAKAAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	1. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan 2. Melakukan Fasilitas Penatausahaan, pemeliharaan Dokumen dan Pengawasan Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Kegiatan Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton dan Kadipaten Subkegiatan Pengelolaan Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya Bedah Naskah - naskah Kuno Koleksi Langka DPAD DIY Fumigasi Layanan m3 DPAD dan Perpustakaan Kadipaten Pakualaman Kotak Pelindung Surat kabar Langka Library Tour untuk Pelajar di Grhatama Pustaka dan Lomba Literasi Budaya Jawa Pengembangan desa Literasi Berbasis Inklusi Sosial Pengolahan Bahan eksemplar Pustaka Koleksi Perpustakaan Kraton Perawatan Bahan eksemplar Pustaka Layanan Deposit DPAD DIY dan Kadipaten Pakualaman				- Adanya pandemi COVID-19 membuat layanan perpustakaan harus mengaplikasikan protokol Kesehatan seperti pembatasan pengunjung dan juga menjaga jarak antar pengunjung layanan perpustakaan di GTP, JLC Malioboro dan RBM. - Penguoptimalan layanan virtual perpustakaan sehingga dapat mengatasi keterbatasan pengunjung fisik yang terdampak oleh pandemi COVID-19. - Inovasi layanan perpustakaan ekstensi yang berupa silang layan peminjaman buku pada program Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja Library for All (Sepatu Jolifa) - Lauching Aplikasi Si Yokca untuk Para pemustaka istimewa yang ingin meminjam buku	- Penguoptimalan layanan virtual perpustakaan sehingga dapat mengatasi keterbatasan pengunjung fisik yang terdampak oleh pandemi COVID-19. - Inovasi layanan perpustakaan ekstensi yang berupa silang layan peminjaman buku pada program Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja Library for All (Sepatu Jolifa) - Lauching Aplikasi Si Yokca untuk Para pemustaka istimewa yang ingin meminjam buku	a. Urusan Perpustakaan 1. Untuk rekomendasi pada point 1 DPAD DIY akan melakukan tindak lanjut sebagai berikut: A. Pelaksanaan program/kegiatan dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan di DIY melalui: a. Menindaklanjuti amanah Perda Penyelenggaraan Perpustakaan No. 1 Tahun 2021 dengan menerbitkan 5 Pergub di bidang teknis pelaksanaan penyelenggaraan perpustakaan yang akan diselesaikan hingga tahun 2023. b. Melaksanakan kajian penelusuran naskah kuno milik Kraton dan Pakualaman, yang sewaktu era penjajahan berpindah di Negara Belanda dan Negara Inggris c. Melaksanakan proses Akreditasi Perpustakaan bagi perpustakaan khusus, umum dan sekolah yang belum terstandar sesuai amanah UU No.43 Tahun 2007 pasal... d. Pembinaan dan pengembangan gerakan literasi di semua segmen dan pengembangan inklusi sosial masyarakat e. Pengembangan digital jadi proses penyelenggaraan perpustakaan dengan segmen masyarakat sebagai pemustaka f. Mendorong perbaikan sarana prasarana penunjang penyelenggara perpustakaan di DIY dan mendorong pengembangan jejaring sosial penyelenggaraan perpustakaan dengan stakeholder

No	Ururan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Termitt Control DPAD dan Perpustakaan Kadipaten Pakualaman Kotak Pelindung Naskah Kuno Kasultanan Yogyakarta	m2	1620	800			B. Pencermatan dan kajian peranan perpustakaan dalam peningkatan kualitas pendidikan DIY Sebagai perpustakaan umum penyelenggaraan perpustakaan diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial ekonomi.
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Renja, Renja dokumen Perubahan, Renstra		3	3			Amanat tersebut berdampak pada beragamnya jenis koleksi dan layanan yang harus disediakan oleh DPAD DIY termasuk dengan mempertimbangkan dan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Layanan perpustakaan menyasar seluruh lapisan masyarakat baik masyarakat sebagai pelajar/mahasiswa, pekerja, masyarakat umum, masyarakat berkebutuhan khusus termasuk masyarakat yang sedang menjalani proses hukuman (narapidana).
				Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Forum OPD/Raker kali Penyusunan Program Kegiatan Perpustakaan dan Kearsipan		1	1			Mengukur kemanfaatan, peranan perpustakaan dalam peningkatan kualitas pendidikan DIY dalam bentuk sebuah kajian menuntut kerja sama dan dukungan banyak pihak, lintas organisasi perangkat daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, instansi pemerintah daerah maupun instansi pusat termasuk organisasi/komunitas.
				Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD RKA, RKAP, DPA, dokumen DPPA		4	4			Sebagai langkah awal penyusunan kajian, di tahun 2021 akan dilakukan koordinasi
				Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Kinerja laporan Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, dan IKU)		1	1			

No	Urutan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Laporan Tahunan Dinas	laporan	1	1			<p>lintas perangkat daerah/ stakeholder untuk mendapatkan masukan terkait gambaran umum, parameter, teknis pelaksanaan dan lainnya. Berikutnya di tahun 2022 akan dilakukan proses penyusunan kajian melalui berbagai tahapan sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah. Time line rencana kajian sebagai berikut:</p> <p>No Bulan Tahapan Output</p> <p>1. Juni-Juli 2021 Koordinasi lintas sektor Penyamaan persepsi, gambaran umum, metode dan teknis pelaksanaan</p> <p>2. Agustus 2021 Penyusunan RAB kajian mempertimbangkan metode PBJ RAB kajian</p> <p>3. Januari 2022 Persiapan penyusunan kajian Penyiapan proses PBJ</p> <p>4. Februari-April 2022 Pelaksanaan kajian oleh penyedia jasa Dokumen kajian</p> <p>2. Untuk rekomendasi nomor 2 DPAD DIY akan melakukan tindak lanjut sebagai berikut:</p> <p>a. Peran perpustakaan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di DIY</p> <p>☐ Peningkatan jumlah perpustakaan yang sesuai standar nasional, melalui pembinaan perpustakaan oleh DPAD DIY sebanyak 43% pada tahun 2020. Dari tahun 2011 sampai dengan 2019 perpustakaan yang memenuhi standar hanya 274 perpustakaan dan di tahun 2020 menjadi 393.</p>
				Laporan Tahunan (LPPD, LKPJ)	laporan	2	2			
				Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
				Realisasi penggunaan dana kegiatan sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan selama 1 tahun	Program Kegiatan	5	5			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
				Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
				Tersedianya bulan persediaan gaji pegawai	bulan	12	12			
				Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						
				Surveilance ISO	dokumen	1	1			
				Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
				Laporan keuangan tahunan	laporan	1	1			
				Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD						
				Laporan Fungsional	laporan	12	12			
				Subkegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						
				Laporan Semesteran/prognosis	laporan	1	1			
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
				Subkegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						
				Penilaian kredit arsiparis	angka kali	2	2			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penilaian angka kredit pustakawan	kali	2	2			<p>☑ Persentase pelajar dan mahasiswa yang memanfaatkan koleksi perpustakaan sebesar 90% dari keanggotaan sampai dengan triwulan I Tahun 2021.</p> <p>☑ kerja sama JLA (Jogja Library for All) sebanyak 39 Anggota perpustakaan dan 82% keanggotaan tersebut (32 anggota) berasal dari dunia pendidikan</p> <p>☑ Pemberian layanan perpustakaan keliling kepada perpustakaan sekolah melalui kerja sama dengan Singapore International Foundation yaitu pemberian layanan keliling dan sarana prasarana</p> <p>b. Optimalisasi layanan virtual/daring. Kegiatan layanan dilakukan melalui daring antara lain:</p> <p>☑ Layanan Peminjaman Online</p> <p>☑ Layanan Bebas Pustaka Online</p> <p>☑ Layanan Pendaftaran Anggota Online</p> <p>☑ Layanan Penelusuran Informasi Online</p> <p>☑ Pembuatan Konten konten secara virtual (pengenalan layanan anak, read aloud, review buku, mendongeng, koleksi langka, paket buku, RBM, JLC, dll)</p> <p>☑ Peningkatan Kreatifitas secara virtual</p> <p>☑ Bedah Naskah secara virtual</p> <p>☑ Telaah Pustaka secara virtual</p> <p>☑ Layanan iJogja</p> <p>☑ Layanan Pemustaka Istimewa</p> <p>☑ Webinar Kepustakawanan</p> <p>☑ Lomba Lomba online</p> <p>☑ Giveaway (hadiah)</p> <p>☑ Akses media:</p>
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah						
				Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
				Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jenis	23	23			
				Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
				Alat tulis kantor	jenis	52	52			
				Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
				Alat kebersihan dan bahan pembersih	jenis	13	13			
				Peralatan Rumah Tangga	jenis	4	4			
				Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
				Barang cetakan	jenis	10	10			
				Penggandaan	jenis	105000	105000			
				Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan						
				Langganan surat kabar dan majalah	jenis	2	2			
				Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
				Konsultasi dan koordinasi dalam daerah terlaksana dengan baik	tahun	1	0			
				Konsultasi dan koordinasi dalam Jawa terlaksana dengan baik	tahun	1	1			
				Konsultasi dan koordinasi luar Jawa	tahun	1	0			

No	Ururan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				terlaksana dengan baik						1 Youtube : Balai Yanpus DPAD DIY
				Makanan dan minuman rapat tersedia sesuai kebutuhan	tahun	1	1			2 Instagram : balaiyanpus_dpaddiy
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						3 Facebook : balaiyanpus_dpaddiy
				Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						4 Twitter : balaiyanpus_diy
				Pengadaan interior paket depo arsip		1	1			5 Tik Tok : balaiyanpus
				Pengadaan peralatan sesuai RKBMD	jenis	2	1			6 Aplikasi : iJogja.id
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah						7 Website : dpad.jogjaprov.go.id
				Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						balaiyanpus.jogjaprov.go.id
				Pengiriman dokumen	kg	50	50			dpad.jogjaprov.go.id/coe
				Perangko, materai dan benda pos	jenis	3	3			jogjalib.com
				Surat keluar	surat	4500	4500			
				Surat masuk	surat	1850	1850			
				Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
				Keamanan Gedung Kantor	bulan	12	12			
				Kebersihan gedung kantor	bulan	12	12			
				Pembayaran tagihan telepon, listrik dan internet	bulan	12	12			
				Pengelolaan barang sesuai peraturan perundangan yang berlaku	tahun	1	1			

No	Ururan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pengelolaan kepegawaian sesuai peraturan perundangan yang berlaku	tahun	1	1			
				Pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku	tahun	1	1			
				Bukti pembayaran retribusi sampah	bulan	12	12			
				Pengelolaan perencanaan program sesuai peraturan perundangan yang berlaku	tahun	1	1			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
				Bukti pembayaran pajak kendaraan/STNK roda 2	unit	7	7			
				Bukti pembayaran pajak kendaraan/STNK roda 4	unit	18	18			
				Bukti pembayaran pajak kendaraan/STNK roda 6	unit	1	1			
				Kendaraan dinas roda 2 sesuai	unit	7	7			

No	Ururan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				RKPBMD terpelihara						
				Kendaraan dinas roda 4 sesuai	unit	18	18			
				RKPBMD terpelihara						
				Kendaraan dinas roda 6 sesuai	unit	1	1			
				RKPBMD terpelihara						
				Subkegiatan Pemeliharaan Mebel						
				Pemeliharaan berkala meubelair sesuai RKPBMD	jenis	3	3			
				Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
				Pemeliharaan Gedung Kantor sesuai RKPBMD (Gedung Depo Arsip)	lokasi	1	1			
				Rehabilitasi Minaret	paket	1	1			
				Pemeliharaan Gedung Kantor sesuai RKPBMD 3 lokasi (Unit Malioboro, RBM Sewon, GTP)	lokasi	3	3			
				Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
				Pemeliharaan berkala peralatan gedung kantor sesuai RKPBMD	jenis	13	12			
				Pemeliharaan berkala perlengkapan	jenis	19	19			

No	Urutan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				gedung kantor sesuai RKPBM						
				PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN						
				Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi						
				Subkegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik (DAK Fisik)						
				Pengadaan Server unit		4	4			
				Subkegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Subkegiatan Perpustakaan Elektronik						
				Layanan Delivery transaksi Order		150	150			
				Layanan Sepatu Jolifa silang pinjam		2	2			
				Subkegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan						
				Akreditasi perpustakaan		15	0			
				Pengembangan aplikasi akreditasi perpustakaan		1	1			
				Workshop Akreditasi		2	2			
				Subkegiatan Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi						
				Bimtek Perpustakaan		3	1			
				Subkegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						
				Layanan Keliling		18	18			
				Layanan Menetap		3	3			
				Pojok Baca		10	10			
				Peningkatan Kreativitas		12	6			

No	Ururan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Telaah Pustaka kali		6	3			
				Budaya Jawa						
				Subkegiatan Pengembangan Perpustakaan Deposit						
				Pengolahan E- eksemplar		500	500			
				Deposit						
				Subkegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka						
				Pengadaan E-Book	judul	500	500			
				Pengolahan bahan	eksemplar	4000	4000			
				Pustaka						
				Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi						
				Subkegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat						
				Bedah buku	kali	60	75			
				Forum	kali	1	1			
				Perpustakaan						
				Workshop Karya	kali	1	0			
				Tulis						
				Subkegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca						
				Lomba Minat Baca	kali	1	0			
				PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO						
				Kegiatan Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi						
				Subkegiatan Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam						
				Bahan Pustaka KCKR	eksemplar	2000	2000			
				Pemantauan	penerbit	100	100			
				Penerbit dan						
				Pengusaha						
				Rekaman						
				Kegiatan Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah						
				Subkegiatan Penerbitan Katalog Induk Daerah						

No	Ururan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penyusunan Katalog Induk Daerah	terbitan	1	1			
				Subkegiatan Penerbitan Bibliografi Daerah						
				Penyusunan Accessionlist	terbitan	1	1			
				Penyusunan Bibliografi Daerah	terbitan	4	4			
				Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi						
				Subkegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno						
				Termite control	m2	420	420			
				Subkegiatan Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan						
				Alih Bahasa Asing- Indonesia	lembar	100	100			
				Alih Bahasa Jawa- Latin	lembar	500	500			
				Alih Media	lembar	10000	10000			
				Kegiatan Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi						
				Subkegiatan Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara						
				Penelusuran dan Abstraksi Budaya Timur	lokasi	8	5			

18) Urusan Kearsipan

a) Kondisi Umum

Sejalan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang semakin demokratis, maka arsip semakin memiliki peran strategis ketika dikaitkan dengan penerapan prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang mengedepankan aspek transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. Lembaga negara dan badan-badan pemerintahan sebagai alat utama dalam mewujudkan cita-cita bangsa, senantiasa memerlukan arsip dalam setiap langkah kehidupannya. Arsip merupakan tulang punggung bagi manajemen pemerintahan.

Dalam urusan kearsipan, Pemda DIY melalui Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) DIY berupaya melaksanakan sasaran strategis yang tercantum di dalam RPJMD 2017-2022 yaitu meningkatnya pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi. Tolok ukur capaian sasaran meningkatnya pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi diukur dengan indikator Peningkatan arsip yang dimanfaatkan.

Hingga akhir tahun 2021, dalam urusan kearsipan telah terealisasi 7.589 berkas arsip yang telah dimanfaatkan. Total arsip yang dimanfaatkan pada tahun 2021 tersebut berasal dari pemanfaatan arsip DPAD DIY, arsip kraton, arsip puro pakualaman, arsip digital (media akses, Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN), dan Sistem Informasi Kearsipan Statis (SIKS), yang disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.142. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Peningkatan arsip yang dimanfaatkan	Berkas	6.890	7.300	7.589	103,96	7.500	101,18

Sumber: DPAD DIY, 2022

Berdasarkan tabel di atas, ketercapaian peningkatan arsip yang dimanfaatkan tahun 2021 terealisasi sebanyak 7.589 berkas, atau 103.96% dari target yang ditetapkan. Dibandingkan realisasi tahun 2020 sebanyak 6.890 berkas, terdapat peningkatan 699 berkas. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD, sasaran telah melampaui target.

Faktor yang mendorong capaian kinerja tahun 2021 karena mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat/lembaga dalam menyerahkan arsip ke DPAD DIY selaku Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Provinsi. Hal ini didukung oleh beberapa hal antara lain: 1) Sosialisasi yang terus digalakkan melalui kegiatan promosi dan sosialisasi kearsipan yang dilakukan melalui pameran arsip, penerapan SIKS dan juga adanya Gerakan Masyarakat Sadar Arsip, dan 2) Pengoptimalan layanan virtual layanan kearsipan melalui sarana digital sehingga dapat mengatasi keterbatasan pengunjung fisik yang terdampak oleh pandemi COVID-19.

Pada tahun 2021, Pemda DIY melalui DPAD DIY mengembangkan aplikasi pembinaan kearsipan yang dinamakan Kinarya (<https://kinarya.jogjaprovo.go.id/>). Pengembangan aplikasi ini merupakan upaya untuk memudahkan proses pembinaan kearsipan di 86 OPD dan UPTD Pemda DIY. Adanya sistem aplikasi ini juga merupakan amanat Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dalam rangka Reformasi Birokrasi. Aplikasi Kinarya ini juga sudah mengintegrasikan instrumen pembinaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan membantu pengolahan data, penilaian pengelolaan kearsipan dan juga validasi data. Hasil akhir yang diperoleh adalah pembuatan profil pemeringkatan nilai pelaksanaan pengelolaan kearsipan instansi menjadi lebih efektif dan efisien.

Selain itu, sejumlah pameran juga sudah dilaksanakan oleh DPAD DIY. Pameran Kearsipan telah mulai dilaksanakan bulan Oktober dan berlangsung sampai dengan Desember. Materi pameran dilakukan perubahan setiap bulan sekali. Terdapat 3 tema pameran, yakni Peran Pemuda Yogyakarta Untuk Indonesia, Memaknai Catatan Jejak-Jejak Sejarah Yogyakarta dan Menggali Prestasi dan Nilai Budaya Dari Arsip dan Naskah Yogyakarta.

Pada tahun 2021, Pemda DIY melalui DPAD DIY juga telah menyelesaikan pembangunan Diorama kearsipan yang merupakan karya inovasi berdasar arsip yang direncanakan dalam rupa diorama. Diorama ini merupakan wahana informasi kesejarahan dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan Sejarah DIY sejak masa Panembahan Senopati sampai dengan era Keistimewaan DIY.

Selain menggelar pameran, Pemda DIY melalui DPAD DIY juga mengoptimalkan layanan arsip melalui sarana digital, salah satunya yakni SIKS. Jenis layanan ini berupaya dioptimalkan untuk menanggulangi dampak dari Pandemi COVID-19 yang juga berpengaruh terhadap layanan kearsipan di DPAD DIY. Melalui SIKS, pengguna dapat mengakses arsip tanpa perlu berkunjung langsung ke DPAD DIY. Pengguna bisa mencari arsip berdasarkan tema melalui guide arsip tematik. Terdapat

setidaknya 41.266 arsip yang bisa diakses pengguna melalui SIKS tersebut.

Tabel 3.143. Jumlah Pemanfaatan Arsip Tahun 2021

Statistik Jumlah Pemanfaatan Arsip	Jumlah
a. Jumlah pemanfaatan arsip DPAD DIY	408
b. Jumlah pemanfaatan arsip Kraton	64
c. Jumlah pemanfaatan arsip Puro Pakualaman	73
d. Jumlah pemanfaatan arsip Digital (Media Akses)	962
e. Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN)	762
f. Sistem Informasi Kearsipan Statis (SIKS)	5.320
JUMLAH	7.589

Sumber: DPAD DIY, 2022

b) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2021

Pada tahun 2021 Urusan Kearsipan dilaksanakan melalui kegiatan dengan alokasi anggaran Rp 20.440.681.100,00 Pengalokasian anggaran tersebut dibagi dalam 1 Program, 3 Kegiatan, dan 5 Sub kegiatan yang didanai oleh APBD. Sedangkan, yang didanai oleh Dana Keistimewaan (Danais) yaitu 1 Program, 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan. Secara keseluruhan terealisasi sebesar Rp 20.207.028.478,00 (98,86%), dengan pencapaian fisik sebesar 100%. Selanjutnya rincian capaian kinerja program dan kegiatan tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 3.144. Capaian Program dan Sub Kegiatan Urusan Kearsipan Tahun 2021

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	1. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan 2. Melakukan Fasilitas Penatausahaan, pemeliharaan Dokumen dan Pengawasan Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Kegiatan Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton dan Kadipaten Subkegiatan Pengelolaan Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten Akuisisi Arsip Tema Sebelum Tahun 1950 dan Arsip tentang Yogyakarta Cetak manuskrip hasil akuisisi dari British Library Fasilitasi Restorasi Perawatan Mandiri Launching dan Sosialisasi Naskah Sumber Arsip Pameran Kearsipan Pembangunan Diorama Kearsipan Pengolahan arsip tekstual Kraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman Perawatan dokumen arsip Puro Pakualaman dan JPU dengan Restorasi dan alih tulisan arsip Kraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman	Tema Buku lembar Tema kali unit berkas lembar	2 34 750 2 1 1 1000 2000	3 34 750 0 1 1 1000 2000	- Pandemi Corona Virus 19 berdampak pada layanan arsip yang harus membatasi layanannya. - Masyarakat maupun OPD, LKD dan Sekolah Belum semua mempunyai kesadaran dalam pengelolaan Arsip - Proses pengawasan kearsipan sebagai salah satu pendukung dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan juga penguatan tata laksana pengukuran kinerja kearsipan masih memiliki banyak kendala terutama di saat pandemi dimana masih diperlukan kunjungan dan assessment ke masing-masing OPD	- Pengoptimalan layanan virtual layanan kearsipan melalui sarana digital sehingga dapat mengatasi keterbatasan pengunjung fisik yang terdampak oleh pandemi covid-19. - Melakukan publikasi, promosi, dan sosialisasi yang dilaksanakan melalui Pameran arsip, penerapan SIKS dan juga adanya Gerakan Masyarakat Sadar Arsip sehingga target kinerja tahun 2021 dapat dicapai dengan baik	Urusan Kearsipan 1. Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan sebagai berikut : A. Penyusunan Pergub DIY Menindaklanjuti amanat Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 dengan menyusun menyusun Pergub yang saat ini belum ada sebagai berikut: a) Pergub tentang Layanan Jasa Kearsipan (Tahun 2021 Penyusunan Daftar Inventaris Masalah). b) Pergub tentang Arsip Statis (Tahun 2021 Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur). c) Pergub tentang Fasilitasi penyelenggaraan kearsipan kasultanan dan kadipaten (masih dalam proses identifikasi dan koordinasi). Merevisi Pergub yang sudah ada tetapi belum selaras/ tidak sesuai dengan dinamika yang ada sebagai berikut: a) Pergub tentang Tata Naskah Dinas (Tahun 2021) b) Pergub tentang Kode Klasifikasi (Tahun 2022) c) Pergub tentang SKKAAD (Tahun 2021) d) Pergub tentang JRA (Belum direncanakan) B. Digitalisasi Arsip 1. Tindak lanjut

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				dari Aksara Jawa ke Huruf Latin						a. Melanjutkan program digitalisasi arsip statis dalam rangka layanan dan pelestarian arsip dengan cara alih media arsip dalam bentuk digital (Sudah dilaksanakan setiap tahun;)
				PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP						b. Melanjutkan pengembangan program jaringan layanan kearsipan melalui Sistem Informasi Kearsipan Statis (SIKS), Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN), maupun media akses (Sudah dilaksanakan setiap tahun;)
				Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi						c. Mengembangkan jaringan informasi kearsipan yang terintegrasi dengan jaringan perpustakaan dan sumber informasi lain (Tahun 2021 dalam bentuk Proposal/ Term of Reference);
				Subkegiatan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis						d. Mengembangkan aplikasi kearsipan dalam penyelenggaraan kearsipan (Tahun 2021 menyusun aplikasi pengawasan kearsipan dan Penyusunan Pergub tentang Tata Naskah Dinas Elektronik).
				Aplikasi pengawasan kearsipan	paket	1	1			C. Sosialisasi Kearsipan
				Pembinaan dan Pengawasan Internal Kearsipan OPD-UPTD	instansi	86	86			1. Tindak lanjut
				Subkegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis						a. Mengembangkan kegiatan sosialisasi kearsipan melalui pameran arsip (Tahun 2021 diselenggarakan 6 kali pameran);
				Penataan arsip dinamis dan Penyusutan arsip yang sudah masuk masa retensi	Daftar arsip	1	1			
				Pengolahan arsip inaktif	berkas	1000	1000			
				Penilaian dan Penyusutan Arsip	berkas	12000	12000			
				Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi						
				Subkegiatan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis						
				Alih Media Arsip Foto	foto	500	500			
				Alih Media Arsip Tekstual	data	15000	15000			
				Naskah Sumber Arsip	tema	1	500 foto			
				Pengolahan arsip Statis	berkas	1000	1000			

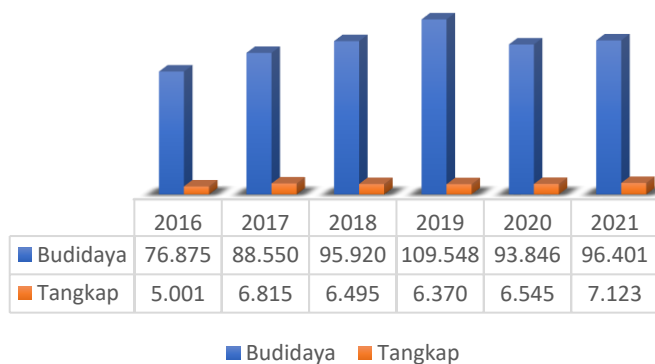
No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Perawatan mandiri arsip DPAD	lembar	500	500			b. Merencanakan kegiatan sosialisasi kearsipan untuk masyarakat dan generasi muda dalam bentuk lomba apresiasi kearsipan bagi siswa SMA/ SMK (bercerita sejarah berbasis kearsipan); c. Sosialisasi diorama kearsipan (Tahun 2022).
				Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi						
				Subkegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN						
				Entri data SIKS dan JIKN	berkas	8625	8625			
				Pemasyarakatan arsip melalui publikasi	kegiatan	1	0			
				Pengembangan software layanan	paket	1	0			
				Subkegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi						
				Layanan arsip statis	orang	500	500			

2. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

a. Urusan Kelautan dan Perikanan

1) *Kondisi Umum*

Produksi perikanan di DIY masih didominasi oleh produksi perikanan budidaya. Meskipun produksi perikanan tangkap mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun hanya menyumbang 6,8% dari total produksi perikanan. Mengingat potensi besar laut selatan yang belum dapat dimanfaatkan secara optimal dan selaras dengan tema RPJMD 2017-2022 “Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja” pengembangan budaya bahari masih sangat perlu diperkuat. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap perlu dilakukan dalam rangka pengembangan budaya bahari agar dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat yang ada di pesisir DIY.



Gambar 3.38. Produksi Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap di DIY Tahun 2016-2021

Sumber: Dislautkan DIY, 2022

Berdasarkan indikator kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan dapat dilihat bahwa produksi perikanan tangkap tahun 2020 sebesar 6.545 ton meningkat menjadi 7.123 ton pada tahun 2021. Sedangkan produksi perikanan budidaya tahun 2020 sebesar

93.846 ton meningkat menjadi 96.401 ton pada tahun 2021. Perbandingan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap pada tahun 2021 adalah 13:1.

Rendahnya produksi perikanan tangkap jika dibanding produksi perikanan budidaya disebabkan pelabuhan yang bisa didarati oleh kapal-kapal besar hanya PPP Sadeng sedangkan TPI lainnya hanya bisa didarati kapal PMT/kapal jukung. Harapannya dengan dibangunnya Pelabuhan Perikanan Gesing pada tahun 2022 dan segera beroperasinya Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto dapat meningkatkan produksi perikanan tangkap di pesisir DIY.

Tabel di bawah menjabarkan indikator kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan pada tahun 2021 sesuai RPJMD 2017-2022 dan capaiannya.

Tabel 3.145. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Nilai sub sektor perikanan dalam PDRB DIY (ADHK)	juta rupiah	318.529	328.611	345.870	100	331.897	104,21
2	Peningkatan status kawasan konservasi	%	30	80	80	100	100	80,00

Sumber: Dislautkan DIY, 2022

Nilai sub sektor perikanan dalam PDRB (ADHK) pada tahun 2021 menurut BPS sebesar 345.870 juta rupiah. Nilai PDRB ini meningkat dibanding realisasi tahun 2020 sebesar 318.529 rupiah. Ketercapaian Nilai PDRB didukung oleh meningkatnya produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya sebesar 103.524 ton. Peningkatan produksi juga didorong oleh inovasi dari pembudidaya, seperti pemasaran secara online, penerapan teknologi perikanan budidaya (sibudi kucir, mina padi, ugadi dan bioflok) serta

dukungan sarana prasarana. Ketercapaian sektor perikanan dalam PDRB sangat didukung oleh komoditas dengan nilai ekonomis tinggi seperti ikan layur, tuna, lobster dan bawal. Keempat komoditas tersebut dipasarkan keluar daerah bahkan diekspor.

Indikator kedua di Urusan Kelautan dan Perikanan adalah Peningkatan status kawasan konservasi. Ketercapaian indikator ini pada tahun 2021 sebesar 80% dengan disusunnya kajian rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi di wilayah Bantul serta telah diusulkan ke KKP terkait dengan Keputusan Menteri untuk menetapkan kawasan konservasi di DIY. Peningkatan status kawasan konservasi juga didukung oleh kegiatan restocking sumber daya kelautan dan perikanan, pelatihan penggiat konservasi mangrove, dan pelatihan penggiat konservasi penyu.

2) *Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2021*

Pada tahun 2021 Urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan dengan alokasi dana Rp66.762.350.562,00. Pengalokasian anggaran tersebut dibagi dalam 8 Program, 20 kegiatan dan 44 sub kegiatan. Secara keseluruhan anggaran belanja dapat direalisasi sebanyak Rp64.353.795.015,00 atau 96,39%, dengan pencapaian fisik sebesar 100%. Selanjutnya rincian capaian kinerja program dan kegiatan tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 3.146. Capaian Program dan Sub Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2021

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Urusan Pemerintahan Pilihan	DKP DIY		3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL						
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi						
				3.25.02.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Dokumen	1	1	Tindak ada kendala sehingga target dapat dicapai	ditingkatkan untuk tahun 2022	
				3.25.02.1.01.02 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Ekor	867.000	867.000	Tindak ada kendala sehingga target dapat dicapai	ditingkatkan untuk tahun 2022	
				3.25.02.1.01.03 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Orang	175	175	Tindak ada kendala sehingga target dapat dicapai	ditingkatkan untuk tahun 2022	
					Orang	50	50			
				3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP						
				3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil						
				3.25.03.1.01.01 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Tahun	1	1	Tindak ada kendala sehingga target dapat dicapai	ditingkatkan untuk tahun 2022	Ketersediaan BBM sangat mempengaruhi aktivitas nelayan untuk melaut. Saat ini di PPP Sadeng sudah memiliki Sub Penyalur BBM Subsidi di dua tempat yakni di Desa Pucung dan di PPP Sadeng. Selain itu, dalam upaya mengadaptasi dari budaya agraris menjadi budaya maritim bagi nelayan di DIY serta melakukan pendampingan terhadap nelayan, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY memiliki solusi yakni : -Dilakukan pelatihan untuk peningkatan kemampuan nelayan. -Melakukan kaderisasi nelayan baru guna meningkatkan jumlah nelayan di DIY. -Menjalin kerja sama yang baik dengan KSOP Cilacap untuk mempermudah perizinan bagi nelayan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<p>-Dengan adanya Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam maka diharapkan Dinas Kelautan dan Perikanan DIY mampu mewadahi pemberian insentif dan asuransi untuk nelayan.</p> <p>Saat ini sudah ada ada review DED Pelabuhan perikanan Tanjung Adikarto tahun 2016 di mana ada beberapa alternatif untuk penyelesaian nya yaitu dengan penambahan panjang breakwater pada sisi timur dan sisi barat kemudian berdasarkan hasil koordinasi dengan Kemenkomaritim bahwa penyelesaian pembangunan Tanjung Adikarto akan ada kajian secara terintegrasi dengan Bandara YIA yang akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat, sehingga dapat negatif dari penyelesaian Pelabuhan Tanjung Adikarto dapat diminimalisir dan fungsi pelabuhan perikanan dapat beroperasi secara optimal.</p> <p>Selain melalui pendanaan APBN, juga dilakukan skema pendanaan KPBU atau kerja sama pemerintah dengan badan usaha di mana saat ini sedang proses penyatuan aset dari beberapa apa kementerian dan Pemda sehingga apabila sudah disatukan asetnya baru bisa didanai oleh Bappenas untuk pengadaan OBC (Outline Business Case) dan FBC (Final Business Case).</p>
5				3.25.03.1.01.02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Kelompok	4	4	Tindak ada kendala sehingga target dapat dicapai	ditingkatkan untuk tahun 2022	<p>Ketersediaan BBM sangat mempengaruhi aktivitas nelayan untuk melaut. Saat ini di PPP Sadeng sudah memiliki Sub Penyalur BBM Subsidi di dua tempat yakni di Desa Pucung dan di PPP Sadeng. Selain itu, dalam upaya mengadaptasi dari budaya agraris menjadi budaya maritim bagi nelayan di DIY serta melakukan pendampingan terhadap nelayan, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY memiliki solusi yakni :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Dilakukan pelatihan untuk peningkatan kemampuan nelayan. -Melakukan kaderisasi nelayan baru guna meningkatkan jumlah nelayan di DIY.

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<p>-Menjalin kerja sama yang baik dengan KSOP Cilacap untuk mempermudah perizinan bagi nelayan di DIY.</p> <p>-Dengan adanya Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam maka diharapkan Dinas Kelautan dan Perikanan DIY mampu mewadahi pemberian insentif dan asuransi untuk nelayan.</p> <p>Saat ini sudah ada ada review DED Pelabuhan perikanan Tanjung Adikarto tahun 2016 di mana ada beberapa alternatif untuk penyelesaian nya yaitu dengan penambahan panjang Breakwater pada sisi timur dan sisi barat kemudian berdasarkan hasil koordinasi dengan kemenkomaritim bahwa penyelesaian pembangunan Tanjung Adikarto akan ada kajian secara terintegrasi dengan Bandara YIA yang akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat, sehingga dapat negatif dari penyelesaian Pelabuhan Tanjung Adikarto dapat diminimalisir dan fungsi pelabuhan perikanan dapat beroperasi secara optimal.</p> <p>Selain melalui pendanaan APBN, juga dilakukan skema pendanaan KPBU atau kerja sama pemerintah dengan badan usaha di mana saat ini sedang proses penyatuan aset dari beberapa apa kementerian dan Pemerintah Daerah sehingga apabila sudah disatukan asetnya baru bisa didanai oleh Bappenas untuk pengadaan OBC (Outline Business Case) dan FBC (Final Business Case).</p>
6				<p>3.25.03.1.02 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</p> <p>3.25.03.1.02.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap</p>	<p>Orang</p> <p>Orang</p> <p>Ton</p>	<p>90</p> <p>10</p> <p>48</p>	<p>90</p> <p>10</p> <p>48</p>	<p>Tindak ada kendala sehingga target dapat dicapai</p>	<p>ditingkatkan untuk tahun 2022</p>	<p>Ketersediaan BBM sangat mempengaruhi aktivitas nelayan untuk melaut. Saat ini di PPP Sadeng sudah memiliki Sub Penyalur BBM Subsidi di dua tempat yakni di Desa Pucung dan di PPP Sadeng. Selain itu, dalam upaya mengadaptasi dari budaya agraris menjadi budaya maritim bagi nelayan di DIY serta melakukan pendampingan terhadap nelayan, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY memiliki solusi yakni :</p>

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<p>-Dilakukan pelatihan untuk peningkatan kemampuan nelayan.</p> <p>-Melakukan kaderisasi nelayan baru guna meningkatkan jumlah nelayan di DIY.</p> <p>-Menjalin kerja sama yang baik dengan KSOP Cilacap untuk mempermudah perizinan bagi nelayan di DIY.</p> <p>-Dengan adanya Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam maka diharapkan Dinas Kelautan dan Perikanan DIY mampu mewujudkan pemberian insentif dan asuransi untuk nelayan.</p> <p>Saat ini sudah ada ada review DED Pelabuhan perikanan Tanjung Adikarto tahun 2016 di mana ada beberapa alternatif untuk penyelesaian nya yaitu dengan penambahan panjang breakwater pada sisi timur dan sisi barat kemudian berdasarkan hasil koordinasi dengan kemenkomaritim bahwa penyelesaian pembangunan Tanjung Adikarto akan ada kajian secara terintegrasi dengan Bandara YIA yang akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat, sehingga dapat negatif dari penyelesaian Pelabuhan Tanjung Adikarto dapat diminimalisir dan fungsi pelabuhan perikanan dapat beroperasi secara optimal.</p> <p>Selain melalui pendanaan APBN, juga dilakukan skema pendanaan KPBU atau kerja sama pemerintah dengan badan usaha di mana saat ini sedang proses penyatuan aset dari beberapa apa kementerian dan Pemerintah Daerah sehingga apabila sudah disatukan asetnya baru bisa didanai oleh Bappenas untuk pengadaan OBC (Outline Business Case) dan FBC (Final Business Case).</p>
				3.25.03.1.03 Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT						
7				3.25.03.1.03.02 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Kapal Dokumen	8 2	8 2	Tindak ada kendala sehingga target dapat dicapai	ditingkatkan untuk tahun 2022	Ketersediaan BBM sangat mempengaruhi aktivitas nelayan untuk melaut. Saat ini di PPP Sadeng sudah memiliki Sub Penyalur BBM Subsidi di dua tempat yakni di Desa Pucung dan di PPP Sadeng. Selain itu, dalam upaya mengadaptasi dari budaya agraris menjadi

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<p>budaya maritim bagi nelayan di DIY serta melakukan pendampingan terhadap nelayan, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY memiliki solusi yakni :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Dilakukan pelatihan untuk peningkatan kemampuan nelayan. -Melakukan kaderisasi nelayan baru guna meningkatkan jumlah nelayan di DIY. -Menjalin kerja sama yang baik dengan KSOP Cilacap untuk mempermudah perizinan bagi nelayan di Daerah Istimewa Yogyakarta. -Dengan adanya Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam maka diharapkan Dinas Kelautan dan Perikanan DIY mampu mawadahi pemberian insentif dan asuransi untuk nelayan. <p>Saat ini sudah ada ada review DED Pelabuhan perikanan Tanjung Adikarto tahun 2016 di mana ada beberapa alternatif untuk penyelesaian nya yaitu dengan penambahan panjang Breakwater pada sisi timur dan sisi barat kemudian berdasarkan hasil koordinasi dengan kemenkomaritim bahwa penyelesaian pembangunan Tanjung Adikarto akan ada kajian secara terintegrasi dengan Bandara YIA yang akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat, sehingga dapat negatif dari penyelesaian Pelabuhan Tanjung Adikarto dapat diminimalisir dan fungsi pelabuhan perikanan dapat beroperasi secara optimal.</p> <p>Selain melalui pendanaan APBN, juga dilakukan skema pendanaan KPBU atau kerja sama pemerintah dengan badan usaha di mana saat ini sedang proses penyatuan aset dari beberapa apa kementerian dan Pemerintah Daerah sehingga apabila sudah disatukan asetnya baru bisa didanai oleh Bappenas untuk pengadaan OBC (<i>Outline Business Case</i>) dan FBC (<i>Final Business Case</i>).</p>
				3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi						

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8				3.25.03.1.06.02 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Paket M2	1 1100	1 1100	Tindak ada kendala sehingga target dapat dicapai	ditingkatkan untuk tahun 2022	<p>Ketersediaan BBM sangat mempengaruhi aktivitas nelayan untuk melaut. Saat ini di PPP Sadeng sudah memiliki Sub Penyalur BBM Subsidi di dua tempat yakni di Desa Pucung dan di PPP Sadeng. Selain itu, dalam upaya mengadaptasi dari budaya agraris menjadi budaya maritim bagi nelayan di DIY serta melakukan pendampingan terhadap nelayan, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY memiliki solusi yakni :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Dilakukan pelatihan untuk peningkatan kemampuan nelayan. -Melakukan kaderisasi nelayan baru guna meningkatkan jumlah nelayan di DIY. -Menjalin kerja sama yang baik dengan KSOP Cilacap untuk mempermudah perizinan bagi nelayan di Daerah Istimewa Yogyakarta. -Dengan adanya Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam maka diharapkan Dinas Kelautan dan Perikanan DIY mampu mewadahi pemberian insentif dan asuransi untuk nelayan. <p>Saat ini sudah ada ada review DED Pelabuhan perikanan Tanjung Adikarto tahun 2016 di mana ada beberapa alternatif untuk penyelesaian nya yaitu dengan penambahan panjang Breakwater pada sisi timur dan sisi barat kemudian berdasarkan hasil koordinasi dengan kemenkomaritim bahwa penyelesaian pembangunan Tanjung Adikarto akan ada kajian secara terintegrasi dengan Bandara YIA yang akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat, sehingga dapat negatif dari penyelesaian Pelabuhan Tanjung Adikarto dapat diminimalisir dan fungsi pelabuhan perikanan dapat beroperasi secara optimal.</p> <p>Selain melalui pendanaan APBN, juga dilakukan skema pendanaan KPBU atau kerja sama pemerintah dengan badan usaha di mana saat ini sedang proses penyatuan aset dari beberapa apa kementerian dan Pemerintah Daerah sehingga apabila sudah disatukan asetnya baru</p>

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9				3.25.03.1.06.03 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Orang	60	60	Tindak ada kendala sehingga target dapat dicapai	ditingkatkan untuk tahun 2022	<p>bisa didanai oleh Bappenas untuk pengadaan OBC (Outline Business Case) dan FBC (Final Business Case).</p> <p>Ketersediaan BBM sangat mempengaruhi aktivitas nelayan untuk melaut. Saat ini di PPP Sadeng sudah memiliki Sub Penyalur BBM Subsidi di dua tempat yakni di Desa Pucung dan di PPP Sadeng. Selain itu, dalam upaya mengadaptasi dari budaya agraris menjadi budaya maritim bagi nelayan di DIY serta melakukan pendampingan terhadap nelayan, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY memiliki solusi yakni :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Dilakukan pelatihan untuk peningkatan kemampuan nelayan. -Melakukan kaderisasi nelayan baru guna meningkatkan jumlah nelayan di DIY. -Menjalin kerja sama yang baik dengan KSOP Cilacap untuk mempermudah perizinan bagi nelayan di Daerah Istimewa Yogyakarta. -Dengan adanya Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam maka diharapkan Dinas Kelautan dan Perikanan DIY mampu mewadahi pemberian insentif dan asuransi untuk nelayan. <p>Saat ini sudah ada ada review DED Pelabuhan perikanan Tanjung Adikarto tahun 2016 di mana ada beberapa alternatif untuk penyelesaian nya yaitu dengan penambahan panjang Breakwater pada sisi timur dan sisi barat kemudian berdasarkan hasil koordinasi dengan kemenkomaritim bahwa penyelesaian pembangunan Tanjung Adikarto akan ada kajian secara terintegrasi dengan Bandara YIA yang akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat, sehingga dapat negatif dari penyelesaian Pelabuhan Tanjung Adikarto dapat diminimalisir dan fungsi pelabuhan perikanan dapat beroperasi secara optimal.</p> <p>Selain melalui pendanaan APBN, juga dilakukan skema pendanaan KPBU atau kerja sama pemerintah dengan badan usaha di mana saat ini sedang proses penyatuan</p>

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										aset dari beberapa apa kementerian dan Pemerintah Daerah sehingga apabila sudah disatukan asetnya baru bisa didanai oleh Bappenas untuk pengadaan OBC (Outline Business Case) dan FBC (Final Business Case).
				3.25.03.1.09 Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT						
10				3.25.03.1.09.01 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Buku kapal perikanan	1	1	Tindak ada kendala sehingga target dapat dicapai	ditingkatkan untuk tahun 2022	
				3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut						
11				3.25.04.1.05.03 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Paket	1	1	Tindak ada kendala sehingga target dapat dicapai	ditingkatkan untuk tahun 2022	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY memiliki Program dan Kegiatan yang salah satunya yakni Pelatihan dan Hibah bagi para pembudidaya ikan. Hal tersebut berdampak kepada peningkatan pendapatan individu dari semua anggota kelompok penerima hibah. Dampak lainnya yakni meningkatnya kapasitas individu anggota kelompok yang akan bermanfaat secara berkelanjutan untuk kegiatan budidaya perikanan bagi anggota kelompok tersebut. Terkait dengan mahalnnya harga pakan dan benih maka Dinas Kelautan dan Perikanan DIY memiliki solusi yakni : -Dilakukan pelatihan dan hibah terkait pakan mandiri yang sudah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan DIY. Dengan pelatihan tersebut maka diharapkan pembudidaya ikan dapat menghemat cost pakan yang merupakan komponen tertinggi dari usaha perikanan budidaya. -Meningkatkan kapasitas pembudidaya ikan untuk menggunakan pakan mandiri berbasis lokal serta dilakukan kunjungan lapangan terhadap pembudidaya yang sudah melakukan budidaya dengan pakan mandiri. -Mempertemukan stakeholder terkait dalam usaha perikanan budidaya. Dengan adanya pertemuan antara stakeholder maka diharapkan akan terjadinya

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<p>pertukaran ilmu, memperlancar distribusi, serta membuka peluang pemasaran komoditas budidaya.</p> <p>-Terkait dengan ketersediaan benih dan induk unggul bersertifikat, saat ini Dinas Kelautan Perikanan DIY melalui UPTD BPTPB sudah mengembangkan berbagai strain unggul baik komoditas air tawar, payau, dan laut yakni "Ikan Nilasa", "Ikan Najawa", "Tawes Jois", dan yang akan segera rilis yakni ikan Galah "Sijawa" yang saat ini sedang dalam proses rilis oleh KKP. Dengan pengembangan induk unggul diharapkan mampu mensupport pembudidaya ikan di Yogyakarta pada khususnya.</p> <p>-Selain hal tersebut kerja sama dengan instansi lain juga merupakan salah satu usaha yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan DIY untuk menyediakan benih unggul di DIY, saat ini Dinas Kelautan dan Perikanan DIY sudah menjalin kerja sama terkait dengan Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi, Balai Penelitian Pemuliaan Ikan (BPPI) Sukamandi, Universitas Gajah Mada dan pihak lainnya. Kerja sama yang dilakukan yakni terkait dengan pengembangan broodstock center.</p> <p>-Terkait dengan insentif terhadap pelaku usaha perikanan saat ini Pemda DIY dan DPR tengah menyusun Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Hal tersebut dapat dijadikan dasar untuk membuat program/kegiatan untuk melindungi usaha serta memberikan insentif bagi pelaku usaha perikanan.</p>
12				3.25.04.1.05.05 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Ekor Kg Paket Buah	29.303.977 8030 3 2		Tindak ada kendala sehingga target dapat dicapai	ditingkatkan untuk tahun 2022	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY memiliki Program dan Kegiatan yang salah satunya yakni Pelatihan dan Hibah bagi para pembudidaya ikan. Hal tersebut berdampak kepada peningkatan pendapatan individu dari semua anggota kelompok penerima hibah. Dampak lainnya yakni meningkatnya kapasitas individu anggota kelompok yang akan bermanfaat secara berkelanjutan untuk kegiatan budidaya perikanan bagi anggota kelompok tersebut. Terkait dengan mahalnnya harga

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<p>pakan dan benih maka Dinas Kelautan dan Perikanan DIY memiliki solusi yakni :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Dilakukan pelatihan dan hibah terkait pakan mandiri yang sudah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan DIY. Dengan pelatihan tersebut maka diharapkan pembudidaya ikan dapat menghemat cost pakan yang merupakan komponen tertinggi dari usaha perikanan budidaya. -Meningkatkan kapasitas pembudidaya ikan untuk menggunakan pakan mandiri berbasis lokal serta dilakukan kunjungan lapangan terhadap pembudidaya yang sudah melakukan budidaya dengan pakan mandiri. -Mempertemukan stakeholder terkait dalam usaha perikanan budidaya. Dengan adanya pertemuan antara stakeholder maka diharapkan akan terjadinya pertukaran ilmu, memperlancar distribusi, serta membuka peluang pemasaran komoditas budidaya. -Terkait dengan ketersediaan benih dan induk unggul bersertifikat, saat ini Dinas Kelautan Perikanan DIY melalui UPTD BPTPB sudah mengembangkan berbagai strain unggul baik komoditas air tawar, payau, dan laut yakni "Ikan Nilasa", "Ikan Najawa", "Tawes Jois", dan yang akan segera rilis yakni ikan Galah "Sijawa" yang saat ini sedang dalam proses rilis oleh KKP. Dengan pengembangan induk unggul diharapkan mampu mensupport pembudidaya ikan di Yogyakarta pada khususnya. -Selain hal tersebut kerja sama dengan instansi lain juga merupakan salah satu usaha yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan DIY untuk menyediakan benih unggul di DIY, saat ini Dinas Kelautan dan Perikanan DIY sudah menjalin kerja sama terkait dengan Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi, Balai Penelitian Pemuliaan Ikan (BPPI) Sukamandi, Universitas Gajah Mada dan pihak lainnya. Kerja sama yang dilakukan yakni terkait dengan pengembangan broodstock center.

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13				3.25.04.1.05.06 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Sampel	350	350	Tindak ada kendala sehingga target dapat dicapai	ditingkatkan untuk tahun 2022	<p>-Terkait dengan insentif terhadap pelaku usaha perikanan saat ini Pemda DIY dan DPR tengah menyusun Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Hal tersebut dapat dijadikan dasar untuk membuat program/kegiatan untuk melindungi usaha serta memberikan insentif bagi pelaku usaha perikanan.</p> <p>Dinas Kelautan dan Perikanan DIY memiliki Program dan Kegiatan yang salah satunya yakni Pelatihan dan Hibah bagi para pembudidaya ikan. Hal tersebut berdampak kepada peningkatan pendapatan individu dari semua anggota kelompok penerima hibah. Dampak lainnya yakni meningkatnya kapasitas individu anggota kelompok yang akan bermanfaat secara berkelanjutan untuk kegiatan budidaya perikanan bagi anggota kelompok tersebut. Terkait dengan mahalnnya harga pakan dan benih maka Dinas Kelautan dan Perikanan DIY memiliki solusi yakni :</p> <p>-Dilakukan pelatihan dan hibah terkait pakan mandiri yang sudah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan DIY. Dengan pelatihan tersebut maka diharapkan pembudidaya ikan dapat menghemat cost pakan yang merupakan komponen tertinggi dari usaha perikanan budidaya.</p> <p>-Meningkatkan kapasitas pembudidaya ikan untuk menggunakan pakan mandiri berbasis lokal serta dilakukan kunjungan lapangan terhadap pembudidaya yang sudah melakukan budidaya dengan pakan mandiri.</p> <p>-Mempertemukan stakeholder terkait dalam usaha perikanan budidaya. Dengan adanya pertemuan antara stakeholder maka diharapkan akan terjadinya pertukaran ilmu, memperlancar distribusi, serta membuka peluang pemasaran komoditas budidaya.</p> <p>-Terkait dengan ketersediaan benih dan induk unggul bersertifikat, saat ini Dinas Kelautan Perikanan DIY melalui UPTD BPTPB sudah mengembangkan berbagai strain unggul baik komoditas air tawar, payau, dan laut yakni "Ikan Nilasa", "Ikan Najawa", "Tawes Jois", dan</p>

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<p>yang akan segera rilis yakni ikan Galah "Sijawa" yang saat ini sedang dalam proses rilis oleh KKP. Dengan pengembangan induk unggul diharapkan mampu mensupport pembudidaya ikan di Yogyakarta pada khususnya.</p> <p>-Selain hal tersebut kerja sama dengan instansi lain juga merupakan salah satu usaha yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan DIY untuk menyediakan benih unggul di DIY, saat ini Dinas Kelautan dan Perikanan DIY sudah menjalin kerja sama terkait dengan Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi, Balai Penelitian Pemuliaan Ikan (BPPI) Sukamandi, Universitas Gajah Mada dan pihak lainnya. Kerja sama yang dilakukan yakni terkait dengan pengembangan broodstock center.</p> <p>-Terkait dengan insentif terhadap pelaku usaha perikanan saat ini Pemda DIY dan DPR tengah menyusun Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Hal tersebut dapat dijadikan dasar untuk membuat program/kegiatan untuk melindungi usaha serta memberikan insentif bagi pelaku usaha perikanan.</p>
14				3.25.04.1.05.08 Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen Lokasi Dokumen Desa Ton	2 2 1 3 100	2 2 1 3 100	Tindak ada kendala sehingga target dapat dicapai	ditingkatkan untuk tahun 2022	<p>Dinas Kelautan dan Perikanan DIY memiliki Program dan Kegiatan yang salah satunya yakni Pelatihan dan Hibah bagi para pembudidaya ikan. Hal tersebut berdampak kepada peningkatan pendapatan individu dari semua anggota kelompok penerima hibah. Dampak lainnya yakni meningkatnya kapasitas individu anggota kelompok yang akan bermanfaat secara berkelanjutan untuk kegiatan budidaya perikanan bagi anggota kelompok tersebut. Terkait dengan mahalnnya harga pakan dan benih maka Dinas Kelautan dan Perikanan DIY memiliki solusi yakni :</p> <p>-Dilakukan pelatihan dan hibah terkait pakan mandiri yang sudah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan DIY. Dengan pelatihan tersebut maka diharapkan pembudidaya ikan dapat menghemat cost</p>

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<p>pakan yang merupakan komponen tertinggi dari usaha perikanan budidaya.</p> <p>-Meningkatkan kapasitas pembudidaya ikan untuk menggunakan pakan mandiri berbasis lokal serta dilakukan kunjungan lapangan terhadap pembudidaya yang sudah melakukan budidaya dengan pakan mandiri.</p> <p>-Mempertemukan stakeholder terkait dalam usaha perikanan budidaya. Dengan adanya pertemuan antara stakeholder maka diharapkan akan terjadinya pertukaran ilmu, memperlancar distribusi, serta membuka peluang pemasaran komoditas budidaya.</p> <p>-Terkait dengan ketersediaan benih dan induk unggul bersertifikat, saat ini Dinas Kelautan Perikanan DIY melalui UPTD BPTPB sudah mengembangkan berbagai strain unggul baik komoditas air tawar, payau, dan laut yakni "Ikan Nilasa", "Ikan Najawa", "Tawes Jois", dan yang akan segera rilis yakni ikan Galah "Sijawa" yang saat ini sedang dalam proses rilis oleh KKP. Dengan pengembangan induk unggul diharapkan mampu mensupport pembudidaya ikan di Yogyakarta pada khususnya.</p> <p>-Selain hal tersebut kerja sama dengan instansi lain juga merupakan salah satu usaha yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan DIY untuk menyediakan benih unggul di DIY, saat ini Dinas Kelautan dan Perikanan DIY sudah menjalin kerja sama terkait dengan Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi, Balai Penelitian Pemuliaan Ikan (BPPI) Sukamandi, Universitas Gajah Mada dan pihak lainnya. Kerja sama yang dilakukan yakni terkait dengan pengembangan broodstock center.</p> <p>-Terkait dengan insentif terhadap pelaku usaha perikanan saat ini Pemda DIY dan DPR tengah menyusun Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Hal tersebut dapat dijadikan dasar untuk membuat program/kegiatan untuk melindungi usaha serta memberikan insentif bagi pelaku usaha perikanan.</p>

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15				3.25.04.1.05.09 Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	UPR Unit	2 15	2 15	Tidak ada kendala sehingga target dapat dicapai	ditingkatkan untuk tahun 2022	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY memiliki Program dan Kegiatan yang salah satunya yakni Pelatihan dan Hibah bagi para pembudidaya ikan. Hal tersebut berdampak kepada peningkatan pendapatan individu dari semua anggota kelompok penerima hibah. Dampak lainnya yakni meningkatnya kapasitas individu anggota kelompok yang akan bermanfaat secara berkelanjutan untuk kegiatan budidaya perikanan bagi anggota kelompok tersebut. Terkait dengan mahalnnya harga pakan dan benih maka Dinas Kelautan dan Perikanan DIY memiliki solusi yakni : -Dilakukan pelatihan dan hibah terkait pakan mandiri yang sudah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan DIY. Dengan pelatihan tersebut maka diharapkan pembudidaya ikan dapat menghemat cost pakan yang merupakan komponen tertinggi dari usaha perikanan budidaya. -Meningkatkan kapasitas pembudidaya ikan untuk menggunakan pakan mandiri berbasis lokal serta dilakukan kunjungan lapangan terhadap pembudidaya yang sudah melakukan budidaya dengan pakan mandiri. -Mempertemukan stakeholder terkait dalam usaha perikanan budidaya. Dengan adanya pertemuan antara stakeholder maka diharapkan akan terjadinya pertukaran ilmu, memperlancar distribusi, serta membuka peluang pemasaran komoditas budidaya. -Terkait dengan ketersediaan benih dan induk unggul bersertifikat, saat ini Dinas Kelautan Perikanan DIY melalui UPTD BPTPB sudah mengembangkan berbagai strain unggul baik komoditas air tawar, payau, dan laut yakni "Ikan Nilasa", "Ikan Najawa", "Tawes Jois", dan yang akan segera rilis yakni ikan Galah "Sijawa" yang saat ini sedang dalam proses rilis oleh KKP. Dengan pengembangan induk unggul diharapkan mampu mensupport pembudidaya ikan di Yogyakarta pada khususnya. -Selain hal tersebut kerja sama dengan instansi lain juga merupakan salah satu usaha yang dilakukan Dinas

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Kelautan dan Perikanan DIY untuk menyediakan benih unggul di DIY, saat ini Dinas Kelautan dan Perikanan DIY sudah menjalin kerja sama terkait dengan Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi, Balai Penelitian Pemuliaan Ikan (BPPI) Sukamandi, Universitas Gajah Mada dan pihak lainnya. Kerja sama yang dilakukan yakni terkait dengan pengembangan broodstock center. -Terkait dengan insentif terhadap pelaku usaha perikanan saat ini Pemda DIY dan DPR tengah menyusun Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Hal tersebut dapat dijadikan dasar untuk membuat program/kegiatan untuk melindungi usaha serta memberikan insentif bagi pelaku usaha perikanan.
				3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN						
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil						
16				3.25.05.1.01.02 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Hari	12	12	Tindak ada kendala sehingga target dapat dicapai	ditingkatkan untuk tahun 2022	
				3.25.05.1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						
17				3.25.05.1.02.01 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya	Hari	17	17	Tindak ada kendala sehingga target dapat dicapai	ditingkatkan untuk tahun 2022	

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18				3.25.05.1.02.03 Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	%	78	78	Tindak ada kendala sehingga target dapat dicapai	ditingkatkan untuk tahun 2022	
				3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN						
				3.25.06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						
19				3.25.06.1.01.03 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Orang	1675	1675	Tindak ada kendala sehingga target dapat dicapai	ditingkatkan untuk tahun 2022	Telah dilakukan pendampingan dan fasilitasi akses pemasaran hasil perikanan oleh Dinas kelautan dan Perikanan DIY berupa: -Kegiatan pasar mina sebagai sarana pemasaran produk hasil perikanan agar dapat meningkatkan omzet dan pendapatan pelaku usaha perikanan dan kelautan di DIY -Fasilitasi kegiatan Temu Kemitraan antar pelaku usaha perikanan dan kelautan di DIY sehingga didapatkan perjanjian kerja sama wirausaha. -Inisiasi surat edaran tentang himbauan untuk melakukan pembelian produk pangan lokal DIY (termasuk produk hasil perikanan) melalui Forum TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah).
				3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar						
20				3.25.06.1.02.01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Ton %	7,2 78	7,2 78	Tindak ada kendala sehingga target dapat dicapai	ditingkatkan untuk tahun 2022	Telah dilakukan pendampingan dan fasilitasi akses pemasaran hasil perikanan oleh Dinas kelautan dan Perikanan DIY berupa: -Kegiatan pasar mina sebagai sarana pemasaran produk hasil perikanan agar dapat meningkatkan omzet dan pendapatan pelaku usaha perikanan dan kelautan di DIY -Fasilitasi kegiatan Temu Kemitraan antar pelaku usaha perikanan dan kelautan di DIY sehingga didapatkan perjanjian kerja sama wirausaha. -Inisiasi surat edaran tentang himbauan untuk melakukan pembelian produk pangan lokal DIY

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21				3.25.06.1.02.02 Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Orang	3390	3390	Tindak ada kendala sehingga target dapat dicapai	ditingkatkan untuk tahun 2022	(termasuk produk hasil perikanan) melalui Forum TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah). Telah dilakukan pendampingan dan fasilitasi akses pemasaran hasil perikanan oleh Dinas kelautan dan Perikanan DIY berupa: -Kegiatan pasar mina sebagai sarana pemasaran produk hasil perikanan agar dapat meningkatkan omzet dan pendapatan pelaku usaha perikanan dan kelautan di DIY -Fasilitasi kegiatan Temu Kemitraan antar pelaku usaha perikanan dan kelautan di DIY sehingga didapatkan perjanjian kerja sama wirausaha. -Inisiasi surat edaran tentang himbauan untuk melakukan pembelian produk pangan lokal DIY (termasuk produk hasil perikanan) melalui Forum TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah).
				3.25.06.1.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						
22				3.25.06.1.03.02 Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen Kali %	1 1 90	1 1 90	Tindak ada kendala sehingga target dapat dicapai	ditingkatkan untuk tahun 2022	Telah dilakukan pendampingan dan fasilitasi akses pemasaran hasil perikanan oleh Dinas kelautan dan Perikanan DIY berupa: -Kegiatan pasar mina sebagai sarana pemasaran produk hasil perikanan agar dapat meningkatkan omzet dan pendapatan pelaku usaha perikanan dan kelautan di DIY -Fasilitasi kegiatan Temu Kemitraan antar pelaku usaha perikanan dan kelautan di DIY sehingga didapatkan perjanjian kerja sama wirausaha. -Inisiasi surat edaran tentang himbauan untuk melakukan pembelian produk pangan lokal DIY (termasuk produk hasil perikanan) melalui Forum TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah).

b. Urusan Pariwisata

1) *Kondisi Umum*

Sektor pariwisata adalah salah satu sektor yang terdampak paling awal akibat pandemi COVID-19, mengingat salah satu instrumen yang digunakan untuk menekan kenaikan jumlah kasus adalah dengan membatasi mobilitas manusia. Pada masa ini batas-batas antarnegara diperketat, bahkan ditutup sama sekali. Mobilitas yang diijinkan untuk melintas hanyalah yang sifatnya 'esensial'. Pariwisata, tentu saja tidak termasuk dalam kategori 'esensial' tersebut.

Tahun 2021 beberapa pelaku industri pariwisata tidak mampu mempertahankan kegiatan usahanya, sehingga berganti usaha di luar sektor pariwisata. Dampak pandemi COVID-19 sangat terasa bagi pelaku industri dengan skala usaha kecil, hal tersebut terlihat dari penurunan jumlah Hotel Non Bintang (data BPS PROVINSI DIY, 2021) jika dibandingkan pada tahun 2020. Tingkat okupansi yang rendah sejak tahun 2020 hingga 2021 menyebabkan beberapa usaha hotel non bintang tutup.

Tabel 3.147. Perkembangan Hotel dan Akomodasi Lain Per Kab/Kota di DIY Tahun 2020-2021

Kabupaten/Kota	Hotel Bintang		Hotel Non Bintang		Jumlah Total	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Kulon Progo	-	1	36	35	36	36
Bantul	3	3	384	344	387	347
Gunungkidul	2	2	193	159	195	161
Sleman	65	65	715	587	780	652
Yogyakarta	102	101	623	536	725	637
Jumlah	172	172	1.951	1.661	2.123	1.833

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Pada tahun 2021, jumlah kunjungan wisatawan mencapai 4.294.725 wisatawan, yang terdiri dari wisatawan nusantara 4.279.985 orang dan wisatawan mancanegara 14.740 orang. Peningkatan aktivitas wisata yang cukup drastis terjadi pada bulan September sampai dengan Desember. Peningkatan jumlah

wisatawan didukung oleh penurunan jumlah kasus aktif harian COVID-19. Upaya penanganan pandemi COVID-19 telah dilakukan oleh Pemda DIY melalui penyelenggaraan vaksinasi secara masif, bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, TNI, Polri, serta pihak-pihak terkait lainnya. Upaya ini telah dapat menurunkan kasus COVID-19 sehingga memberikan kepercayaan kepada wisatawan untuk berkunjung ke DIY. Hal ini terlihat dari jumlah 54% kunjungan wisatawan di tahun 2021 berasal dari empat bulan terakhir, yaitu bulan September hingga Desember.

PDRB tahun 2021 untuk jenis lapangan usaha akomodasi dan makan minum (atas dasar harga konstan tahun 2010) mengalami peningkatan yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan tahun 2020. Pada tahun 2021 lapangan usaha akomodasi dan makan minum mencapai 9.131.091 (Juta Rupiah) meningkat sebesar 641.386 (Juta Rupiah) bila dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 8.489.706 (Juta Rupiah). Pencapaian PDRB lapangan usaha akomodasi dan makan minum diraih pada masa triwulan IV dan pencapaian yang terendah adalah pada triwulan III tahun 2021.

Peningkatan PDRB ini sejalan dengan jumlah kunjungan wisatawan dengan peraihan tertinggi pada triwulan IV dan yang terendah pada triwulan III. Kondisi tersebut merupakan dampak meningkat kasus harian COVID-19 dengan varian Delta atau B.1.617.2 pada saat bulan Juli-Agustus 2021. Kajian Analisa Belanja Wisatawan sebagai sumber data capaian kinerja meningkatnya jumlah belanja di tahun 2021 mencapai Rp2.206.566,00, meningkat jika dibandingkan dengan capaian 2020 yaitu Rp1.215.000,00.

Tabel 3.148. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2020	Target	2021		Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
					Realisasi	% Realisasi		
1	Nilai sektor akomodasi dan	Juta rupiah	8.489 .706	11.073 .149	9.131 .091	82,46	11.737 .538	77,79

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
	makan minum dalam PDRB DIY						.	
2	Meningkatnya jumlah belanja wisatawan	rupiah	1.215.000	8.498.797	2.206.566	25,96	8.830.595	24,99

Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2022 (data diolah)

2) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2021

Pada tahun 2021 Urusan Pariwisata dilaksanakan melalui 5 Program dan 14 kegiatan, serta terdiri dari 38 Sub kegiatan dengan total anggaran Rp37.339.761.132,00. Anggaran tersebut dialokasikan untuk anggaran Belanja Operasi sebesar Rp36.425.477.132,00 dan Belanja Modal sebesar Rp914.284.000,00. Rincian sumber dana berasal dari APBD sebesar Rp10.793.442.750,00 dan sumber Dana Keistimewaan sebesar Rp21.249.950.500,00.

Secara keseluruhan realisasi keuangan sebesar Rp33.492.035.119,00 (89,70%), yang terdiri dari belanja operasi dengan realisasi sebesar Rp32.725.125.544,00 (89,84%) dan realisasi belanja modal sebesar Rp766.909.575,00 (83,88%). Realisasi fisik tahun 2021 adalah 99,35%, dikarenakan beberapa kegiatan di-refocusing dan pembatalan kegiatan akibat pandemi COVID-19. Selanjutnya rincian capaian kinerja program dan kegiatan tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 3.149. Capaian Program dan Sub Kegiatan Urusan Pariwisata Tahun 2021

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	URUSAN UMUM	DINAS PARIWISATA	A. Dalam Pengembangan daya tarik pariwisata meliputi: 1. Diversifikasi dan kreatifitas produk wisata lokal 2. Pengembangan daya tarik wisata malam 3. Meningkatkan kualitas produk wisata agar bertaraf internasional B. Dalam pengembangan aksesibilitas: 1. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung akses pariwisata di destinasi wisata 2. Koordinasi dengan stakeholder terkait Peningkatan akses yang handal ke lokasi-lokasi daya tarik wisata unggulan DIY. C. dalam pengembangan amenitas meliputi: 1. Peningkatan standar layanan fasilitas pendukung wisata di destinasi wisata	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku Forum Perencanaan OPD Bukti pembayaran honorarium perencanaan program Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian Kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) Realisasi penggunaan anggaran dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Ketersediaan Gaji ASN Ketersediaan Gaji Tenaga Bantu Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Bukti pembayaran honorarium pengurus barang :	dokumen kali Orang/bulan Nilai LKJIP % orang orang Orang/bulan	5 1 3 82 100% 50 24 2	5 1 3 81 100% 51 25 2	1. Kegiatan yang dilaksanakan oaleh Dinas Pariwisata DIY sangat tergantung dari mobilitas wisatawan dan menurunnya kasus COVID-19 2. Kegiatan pada TW I belum optimal dilaksanakan, karena kasus COVID-9 cukup meningkat tajam dikarenakan aktivitas liburan akhir tahun yang menjadi pemicu peningkatan kasus COVID-19. 3. Pada TW III kasus COVID-19 yang disebabkan oleh varian Delta meningkat sangat signifikan, sehingga pemerintah Pusat memberlakukan PPKM Darurat yang memaksa banyak pelaksanaan kegiatan tertunda.	1. Koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Paniradyo terkait dengan pergeseran kegiatan yang tertunda karena meningkatnya kasus COVID-19. 2. Melakukan komunikasi secara intens dengan berbagai pihak terkait, terutama dengan kelompok, Lembaga dan desa wisata dsb, agar dapat mempersiapkan perubahan kegiatan 3. TW IV kasus COVID-19 sangat rendah, sehingga mayoritas kegiatan dapat segera dilaksanakan. Lebih dari 50% kegiatan Dais dilaksanakan pada Triwulan IV	L) Mengembalikan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wancanegara seperti capaian pada tahun 2019 harus terus dilakukan. Memperhatikan situasi yang berkembang selama tahun 2020 sampai dengan Quartal kedua 2021 ini, untuk mengembalikan jumlah kunjungan wisatawan seperti pada tahun 2019 (sebelum mewabahnya COVID-19) akan sangat tergantung dengan kebijakan Pemerintah Pusat, khususnya yang terkait dengan penanganan COVID-19. Apabila wabah belum bisa dikendalikan dan pergerakan masyarakat masih dibatasi, jumlah kunjungan wisatawan di DIY sangat sulit untuk bisa kembali seperti tahun 2019. Menurut Organisasi Pariwisata Dunia (UNTWO) pariwisata dunia baru akan pulih

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2. Peningkatan kapasitas dan kualitas amenitas di destinasi wisata 3. Koordinasi dengan Stakeholder terkait Pengembangan tourism hub sebagai simpul kontrol dan distribusi pergerakan kunjungan wisata D. Pengembangan Pasar dan Promosi Pariwisata DIY meliputi: 1. Melakukan analisis pengembangan pasar pariwisata yang mendukung pembangunan pariwisata DIY 2. Intensifikasi promosi pariwisata secara online (melalui media digital) dan offline (melalui pameran, pembuatan bahan promosi dll) 3. Pengembangan konten promosi wisata tematik DIY 4. Pelaksanaan promosi pariwisata dalam dan luar negeri 5. Pengembangan pengembangan travel pattern dan paket wisata serta	Bukti pembayaran honorarium pengurus barang Bukti pembayaran honorarium pengelola keuangan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Realisasi sesuai tahun dengan anggaran kas yang telah ditetapkan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Komponen instalasi jenis listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Peralatan Rumah Tangga jenis Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penggandaan lembar Barang cetakan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Majalah dan Surat Kabar Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan konsultasi Dinas Pariwisata dalam Jawa terlaksanan dengan baik Koordinasi dan konsultasi Dinas Pariwisata luar Jawa terlaksanan dengan baik	Orang/bulan	6	7			pada tahun 2022. Beberapa studi juga menunjukkan bahwa sektor pariwisata membutuhkan waktu sekitar 5 tahun untuk kembali ke keadaan normal pasca pandemi ini. Pada tahun 2021 jumlah wisatawan yang datang di DIY adalah sebesar 4.294.725 orang, yang terdiri dari 4.279.985 orang adalah wisatawan nusantara dan 14.740 orang adalah wisatawan mancanegara. Langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain: - Menyiapkan industri pariwisata yang berstandar CHSE - Menyiapkan SDM pariwisata yang berdaya saing global - Penguatan Koordinasi, integrasi dan sinergi antar pemangku kepentingan lintas sektor - Kerja sama CSR dengan BUMN/BUMD,

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			manajemen atraksi daya tarik wisata yang kompetitif 6. Pengelolaan pelaksanaan pelayanan informasi pariwisata E.Pengembangan Citra Pariwisata (brand development tourism): 1. Penguatan dan Pengembangan citra branding destinasi wisata DIY 2. Brand awareness/campaign di media digital dan non digital untuk promosi destinasi wisata DIY F. Standarisasi Usaha Pariwisata meliputi: 1. Penyusunan standar usaha penyelenggaraan usaha jasa pariwisata 2. Standarisasi usaha pariwisata dalam mendukung daya saing produk dan destinasi wisata DIY. 3. pelaksanaan bimbingan teknis standar internasional usaha pariwisata 4. Pembinaan usaha berbasis potensi lokal pendukung wisata	Pembayaran rapat daring berbayar/payed online meeting Makan dan minuman rapat tersedia sesuai kebutuhan Koordinasi dan konsultasi Dinas Pariwisata dalam daerah terlaksanan dengan baik Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Pengelolaan arsip dinamis SKPD Penyusutan Arsip arsip Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Pengembangan dan pengelolaan website visitingjogja.com 1 tahun, dengan pengunjung website sebanyak 2.200 org/hari Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan jenis Komputer/ Laptop (2 pc, 4 laptop) & Pengadaan meja & kursi Pengunjung/Tamu Penyediaan Jasa Surat Menyurat Surat Masuk surat Trophy set Pengiriman dokumen Alat tulis kantor jenis	bulan orang tahun tahun arsip pengunjung jenis surat set dokumen jenis	3 4000 1 1 1 10000 497459 4 3055 6 27 58	3 4000 1 1 1 10000 520000 4 15000 6 27 58			maupun swasta di DIY - Event pariwisata masih tetap dapat dilaksanakan walaupun secara hybrid (virtual event). - Mendorong destinasi wisata dan desa wisata untuk aktif dalam pemanfaatan platform digital - wisata khusus <i>Travel Corridor Arrangement</i> untuk wisata domestik 2) Perlu dukungan Pemerintah Daerah untuk pengembangan wisata yang dirintis kelompok masyarakat atau desa. Pariwisata termasuk dalam sektor yang diharapkan dapat menunjang laju pemerataan di bidang ekonomi melalui berbagai aspek yang terkandung didalamnya seperti penyerapan tenaga kerja, penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan turut andil dalam

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			G.Penguatan organisasi kepariwisataan dan SDM Pariwisata meliputi: 1. Penguatan Organisasi Kepariwisata dan SDM Pariwisata dalam mendukung tata kelola kepariwisataan yang budaya saing dan berkelanjutan 2. Penguatan Koordinasi, integrasi dan sinergi antar pemangku kepentingan (lintas sektor dan lintas wilayah). 3. Sertifikasi SDM bidang Pariwisata	Surat Keluar Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pembayaran tagihan rekening telepon 6 sambungan : 12 bulan dari 12 bulan Pembayaran tagihan rekening listrik 6.000 kwh : 12 bulan dari 12 bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jasa keamanan kantor/tempat kerja : 12 bulan dari 12 bulan Jasa Kebersihan Kantor : 12 bulan dari 12 bulan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kendaraan dinas jabatan roda 4 terpelihara sesuai RKPM Bukti Pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas jabatan roda 4 yang tepat waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Bukti Pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas / operasional roda 2 dan 4 yang tepat	surat bulan bulan bulan bulan bulan bulan unit roda 4 unit roda 4 unit	8366 12 12 12 12 12 1 1 11	27500 12 12 12 12 1 1 11			pengentasan kemiskinan (<i>Pro Poor Tourism</i>). Oleh karena itu Pemerintah Daerah sangat mendukung pengembangan destinasi wisata yang dirintis oleh kelompok masyarakat atau desa. Mengoptimalkan peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai mitra kerja pemerintah dalam rangka mengembangkan sebuah destinasi wisata dengan tetap mengutamakan sustainable tourism. Konsep <i>Community Based Tourism</i> (CBT) dalam pengembangan pariwisata telah dilakukan oleh Pemda DIY dengan melakukan berbagai program kegiatan pendukung, seperti fasilitasi sarana prasarannya . Hal lain yang dilakukan Dinas Pariwisata selama ini yakni melakukan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas SDM dan kelebagaannya

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				waktu : 11 unit dari 11 unit						secara terarah dan terukur. Untuk memberikan pelatihan dasar, peningkatan ketrampilan dan pengujian kompetensi (sertifikasi) dalam hal <i>skill and knowledge</i>
				Kendaraan dinas operasional roda 2 dan roda 4 terpelihara sesuai RKPM : 11 unit dari 11 unit	unit	11	11			
				Jasa KIR : 2 kali dari 2 kali	kali	2	2			
				Pemeliharaan Mebel						3) Pemanfaatan Bandara NYIA bagi dunia pariwisata di DIY
				Mebeleur terpelihara : 2 Jenis dari 2 Jenis	jenis	2	2			Bandara merupakan salah satu pintu masuk ke suatu kawasan untuk berbagai tujuan, termasuk berwisata. Terkait Bandara YIA yang sudah beroperasi secara penuh, tentunya diharapkan akan menjadi pintu masuk wisatawan ke DIY melebihi Bandara Adisucipto mengingat kapasitasnya yang jauh lebih besar. Beberapa hal yang dapat dilakukan:
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						- Adanya <i>Tourist Information Center</i> (TIC) di terminal kedatangan
				Peralatan gedung kantor terpelihara	jenis	8	8			- Menyiapkan SDM lokal khususnya masyarakat Kulon Progo dan DIY
				Perlengkapan gedung kantor terpelihara	jenis	3	3			- Destinasi wisata perlu disiapkan agar
				Mesin Generator (Genset)	unit	3	3			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
				Pemeliharaan Jaringan Listrik dan jaringan Komputer	Paket	1	1			
				Pemeliharaan Gedung Kantor & Taman	Paket	1	1			
				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA						
				jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara tahun n	orang	7.289.849	4.294.725			
				Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi						
				Publikasi TV / Talkshow	Kali	4	4			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Kajian Pengelolaan Wisata Komunitas di Gunung Kidul	paket	1	1			menjadi pilihan utama wisatawan yang datang melalui bandara YIA.
				Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi						
				Masterplan Desa Wisata Klayar, Kedungpoh, Nglipar, Gunungkidul :	Dokumen	1	1			- Rekomendasi Pemda kepada Kementerian Perhubungan RI untuk membuat kebijakan terkait penambahan frekuensi penerbangan domestik dan luar negeri
				DED Sub Kawasan Wanawisata Budaya Mataram, Dlingo, Bantul	dokumen	3	3			
				DED Pengembangan Wisata Ngemplak - Ngaglik Sleman	Dokumen	1	1			
				DED I Desa Gayamharjo, Prambanan, Sleman	Dokumen	1	1			1) Pembangunan Obyek wisata di DIY harus lebih baik dan unggul dari Jawa Tengah
				DED Pengembangan Kampung Wisata Kota Yogyakarta	Dokumen	1	1			Pemda DIY (Dinas Pariwisata DIY) telah berupaya untuk mendorong Kabupaten/Kota untuk membangun destinasi wisata yang menarik dan juga memberikan dukungan berupa fasilitasi sarprasnya, agar dapat bersaing dengan wilayah lainnya, dalam hal ini yang terdekat dengan Jawa Tengah. Saat ini juga banyak pihak swasta/investor yang secara masif membuat destinasi wisata baru di
				Masterplan di Wonokerto, Turi, Sleman	Dokumen	1	1			
				Feasibility Study Pantai Wediombo, Jepitu, Girisubo, Gunungkidul	Dokumen	1	1			
				DED Pengembangan Wisata Kawasan Imogiri	Dokumen	1	1			
				Feasibility Study Pengembangan Potensi wisata Kawasan Tegalrejo	Dokumen	1	1			
				Feasibility Study Pengembangan Potensi wisata	Dokumen	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Kawasan Gondokusuman						Yogyakarta dengan sasaran wisatawan milenial (anak muda), yang bersifat instragamable. Namun keberadaan destinasi wisata baru ini pun seharusnya tetap diawasi baik dari segi dampak lingkungan yang ditimbulkan, juga bagaimana proses ijinnya. Tidak dapat dipungkiri destinasi wisata baru ini juga menjadi magnet baru wisatawan.
				DED I Desa Wisata Gamplong, Moyudan, Sleman	Dokumen	1	1			
				DED I Sambirejo, Prambanan, Sleman	Dokumen	1	1			
				Masterplan Desa Guwosari, Pajangan, Bantul	Dokumen	1	1			
				DED Pengembangan Wisata Kawasan Dlingo - Piyungan Bantul	Dokumen	1	1			
				DED Pengembangan Wisata Kawasan Samigaluh - Girimulyo Kulon Progo	Dokumen	1	1			
				Masterplan di Kab Sleman	Dokumen	1	1			
				Feasibility Study Bukit Turgo, Purwobinangun, Pakem, Sleman	Dokumen	1	1			
				DED Pengembangan Wisata Kecamatan Semin, Gunungkidul	Dokumen	1	1			
				DED I Desa Wisata Sempu, Wonokerto, Turi, Sleman	Dokumen	1	1			
				Feasibility Study Potensi Wisata Jati Larangan - Taman Sengon, Guwosari, Pajangan, Bantul	Dokumen	1	1			
				Monitoring dan PARIWISATA Provinsi	Evaluasi	Pengelolaan	Destinasi			4 (empat) komponen yang harus dimiliki oleh sebuah objek wisata, yaitu: <i>attraction, accessibility, amenity</i> dan <i>ancillary</i> . DIY dengan topografi yang tidak begitu luas wilayahnya, komponen 4 A tersebut di atas telah diusahakan untuk dipenuhi. Akibat topografi yang tidak begitu luas ini, penyebaran wisatawan di area Joglosemar menjadi salah satu alternatif agar daya dukung dan daya tampung wisatawan (<i>caring capacity</i>) tetap

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Monitoring dan dokumen Evaluasi di 12 Destinasi Pariwisata		1	1			terjaga. Namun bagaimana strategi DIY untuk menciptakan produk wisata yang mempunyai daya saing dan keunggulan, sehingga nantinya akan mampu menyedot belanja wisatawan. Misal: wisatawan bisa berwisata ke Borobudur, namun tetap menginap dan berbelanja di Jogja. Kerja sama lintas sektor terus dilakukan untuk dapat mendukung pembangunan obyek wisata di DIY yang lebih dapat berdaya saing dengan Jawa Tengah. Masukan-masukan dari pelaku pariwisata langsung yang selanjutnya akan ditindaklanjuti baik oleh Pemda DIY maupun pemerintah Kabupaten/Kota.
				Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata						
				Jumlah UJP yang meningkatkan kemampuannya setelah mengikuti Bimbingan Teknis	UJP	6	6			
				Jumlah UJP yang diawasi pada tahun 2021	UJP	7	7			
				Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata						
				Publikasi TV / Kali Talkshow		4	4			
				Jumlah Usaha Jasa Pariwisata yang tersertifikasi pada tahun 2021 : 3 UJP dari 3 UJP	UJP	3	3			
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	DINAS PARIWISATA	A. Dalam Pengembangan daya tarik pariwisata meliputi: 1. Diversifikasi dan kreatifitas produk wisata lokal 2. Pengembangan daya tarik wisata malam 3. Meningkatkan kualitas produk wisata agar bertaraf internasional B. Dalam pengembangan aksesibilitas:	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara tahun n Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Penambahan jumlah follower media sosial dinas pariwisata (instagram, facebook, twitter, youtube channel) Pembuatan Konten promosi multimedia (media cetak, media elektronik/digital, media sosial) di TIC (DAK Non Fisik)	orang followers paket	7.289.849 15000 1	4.294.725 26370 1	Kegiatan yang dilaksanakan oaleh Dinas Pariwisata DIY sangat tergantung dari mobilitas wisatawan dan menurunnya kasus COVID-19 Kegiatan pada TW I belum dapat optimal dilaksanakan, karena kasus COVID-9 cukup meningkat tajam dikarenakan aktivitas liburan	1. Koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Paniradyo terkait dengan pergeseran kegiatan yang tertunda karena meningkatnya kasus COVID-19. 2. Melakukan komunikasi secara intens dengan berbagai pihak terkait, terutama dengan kelompok, Lembaga dan desa wisata dsb, agar dapat	

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung akses pariwisata di destinasi wisata	Jumlah 8 jenis bahan promosi pariwisata (baliho, spanduk, x-banner, peta wisata, booklet, brosur	eksemplar	9118	9118	akhir tahun yang menjadi pemicu peningkatan kasus COVID-19.	mempersiapkan perubahan kegiatan	
			2. Koordinasi dengan stakeholder terkait Peningkatan akses konektivitas yang handal ke lokasi-lokasi daya tarik wisata unggulan DIY.	kuliner, tabloid pariwisata,CD pariwisata) yang didistribusikan dan menjadi acuan kunjungan wisatawan				Pada TW III kasus COVID-19 yang disebabkan oleh varian Delta meningkat sangat signifikan, sehingga pemerintah Pusat memberlakukan PPKM Darurat yang memaksa banyak pelaksanaan kegiatan tertunda.	3. TW IV kasus COVID-19 sangat rendah, sehingga mayoritas kegiatan dapat segera dilaksanakan. Lebih dari 50% kegiatan Dais dilaksanakan pada Triwulan IV	
			C.dalam pengembangan amenities meliputi:	TIS (Sistem Informasi Pariwisata) (DAK Non Fisik) : 1 Paket dari 1 Paket	Paket	1	1			
			1. Peningkatan standar layanan fasilitas pendukung wisata di destinasi wisata	Jumlah wisatawan yang menggunakan jasa Pelayanan	orang	600	912			
			2. Peningkatan kapasitas dan kualitas amenities di destinasi wisata	Informasi Wisata di 4 lokasi (TIS di Bandara dan Stasiun, TIC di Malioboro dan Bali)						
			3. Koordinasi dengan Stakeholder terkait Pengembangan tourism hub sebagai simpul kontrol dan distribusi pergerakan kunjungan wisata	Pembuatan Peta Wisata (DAK Non Fisik)	eksemplar	900	900			
			D.Pengembangan Pasar dan Promosi Pariwisata DIY meliputi:	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri						
			1.Melakukan analisis pengembangan pasar pariwisata yang mendukung	Jumlah ulasan destinasi wisata dalam Familiarization dari jurnalis, asosiasi pariwisata luar negeri luar negeri dan media	ulasan	30	11			
				Jumlah kontrak bisnis	Transaksi bisnis	50	135			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			pembangunan pariwisata DIY 2. Intensifikasi promosi pariwisata secara online (melalui media digital) dan offline (melalui pameran, pembuatan bahan promosi dll) 3. Pengembangan konten promosi wisata tematik DIY 4. Pelaksanaan promosi pariwisata dalam dan luar negeri 5. Pengembangan pengembangan travel pattern dan paket wisata serta manajemen atraksi daya tarik wisata yang kompetitif 6. Pengelolaan pelaksanaan pelayanan informasi pariwisata E. Pengembangan Citra Pariwisata (brand development tourism): 1. Penguatan dan Pengembangan citra branding destinasi wisata DIY 2. Brand awareness/campaign di media digital dan non digital untuk promosi destinasi	dihasilkan dari Jogja International Travel Mart : 135 transaksi bisnis dari 50 transaksi bisnis Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri Penyusunan Profil Dokumen & Industri Pariwisata aplikasi DIY Analisa Belanja Wisatawan Dokumen Statistik Pariwisata Video Promosi Wisata Edukasi Video Tematik: 2 kampung wisata di DIY Publikasi TV / kali Talkshow Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri luran EATOF tahun PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Peningkatan kapasitas kelembagaan pelaku pariwisata Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan Pelatihan digitilisasi orang : branding, pemasaran dan penjualan pada desa wisata, homestay, kuliner, souvenir,						
						1	1			
						1	1			
						2	2			
						2	2			
						4	4			
						1	1			
						21.36	7.9			
						40	40			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			wisata DIY F. Standarisasi Usaha Pariwisata meliputi: 1. Penyusunan standar usaha penyelenggaraan usaha jasa pariwisata 2. Standarisasi usaha pariwisata dalam mendukung daya saing produk dan destinasi wisata DIY. 3. pelaksanaan teknis standar internasional usaha pariwisata 4. Pembinaan usaha berbasis potensi lokal pendukung wisata G.Penguatan organisasi kepariwisataan dan SDM Pariwisata meliputi: 1. Penguatan Organisasi kepariwisataan dan SDM Pariwisata dalam mendukung tata kelola kepariwisataan yang bedaya saing dan berkelanjutan 2. Penguatan Koordinasi, integrasi dan sinergi antar pemangku kepentingan (lintas	fotografi (DAK Non Fisik) Pelatihan pengelolaan usaha homestay/pondok wisata (DAK Non Fisik) Pelatihan pengelolaan usaha homestay/pondok wisata (DAK Non Fisik) Pelatihan pengelolaan desa wisata (DAK Non Fisik) Pelatihan dan Kemitraan kelembagaan Pelaku Pariwisata Jumlah desa wisata yang dibina agar naik kelas pada tahun 202	orang	40	40			
				Peningkatan Peran serta masyarakat dalam Pengembangan kemitraan Pariwisata						
				Sosialisasi Perda	kali	16	16			
				Pramuwisata						
				Jumlah Forum Komunikasi Lintas Sektor	kali	4	4			
				Jumlah kemitraan yang dilakukan antara desa wisata dengan Hotel	kemitraan	5	5			

No	Ururan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			sektor dan lintas wilayah).	Sosialisasi Pergub Desa Wisata	kali	16	16			
			3. Sertifikasi SDM bidang Pariwisata	Publikasi TV / Talkshow	kali	4	4			
				Sosialisasi Sadar Wisata	kali	18	18			
				Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata						
				Sertifikasi SDM Pariwisata	orang	200	200			
				Pelatihan Pemandu Wisata Budaya (Cagar Budaya : Museum) (DAK Non Fisik)	orang	40	40			
				Pelatihan Peningkatan Inovasi dan Higienis Sajian Kuliner Di Destinasi Pariwisata (DAK Non Fisik)	orang	40	40			
				Pelatihan Pemandu Wisata Alam (Trekking) (DAK Non Fisik)	orang	40	40			
3	KEBUDAYAAAN (KEISTIMEWAAN)	DINAS PARIWISATA	A. Dalam Pengembangan daya tarik pariwisata meliputi: 1. Diversifikasi dan kreatifitas produk wisata lokal 2. Pengembangan daya tarik wisata malam 3. Meningkatkan kualitas produk wisata	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN . YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	dokumen	1	1	Kegiatan yang dilaksanakan oaleh Dinas Pariwisata DIY sangat tergantung dari mobilitas wisatawan dan menurunnya kasus COVID-19	1. Koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Paniradyo terkait dengan pergeseran kegiatan yang tertunda karena meningkatnya kasus COVID-19.	
				Kajian Pemanfaatan Eks Hotel Mutiara 2	tahun	1	1	2. Kegiatan pada TW I belum optimal dilaksanakan,		
				Terlaksananya Pengelolaan eks Hotel Mutiara Bagian selatan						
				Belanja Modal	unit	1	1			
				Pengadaan Mobil						
				Pengembangan Atraksi Wisata Budaya						

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			agar bertaraf internasional B.Dalam pengembangan aksesibilitas: 1. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung akses pariwisata di destinasi wisata 2. Koordinasi dengan stakeholder terkait Peningkatan akses yang handal ke lokasi-lokasi daya tarik wisata unggulan C.dalam pengembangan amenities meliputi: 1. Peningkatan standar layanan fasilitas pendukung wisata di destinasi wisata 2. Peningkatan kapasitas dan kualitas amenities di destinasi wisata 3. Koordinasi dengan Stakeholder terkait Pengembangan tourism hub sebagai simpul kontrol dan distribusi pergerakan kunjungan wisata D.Pengembangan Pasar dan Promosi	Event Skala Internasional (Jogja Batik Carnival, Jogja International Street Performance, Jogja International Heritage Walk, Asia Tri Jogja) : 4 Event dari 4 Event Event Skala Nasional (Royal Mataram Festival, Ngayogjazz, Jogja Tourism Day, Keroncong Kotagede, Jogja Forum Festival) Event Skala Lokal (Atraksi wisata budaya di kawasan strategis, Pentas Kesenian di TIC Malioboro TIC Stasiun dan TIC Bandara, Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta, Sapa Aruh Pranatan Anyar Plesiran Jogja, Festival Andong, Keroncong Plesiran Forest.) Fasilitasi Travel Corridor Pemilihan Dimas Diajeng Management event Atraksi Kesenian Dubai Expo 2021	eevent event event event kegiatan event tahun event event	4 5 6 1 1 1 70 1	4 5 6 1 1 1 70 1	karena kasus COVID-9 cukup meningkat tajam dikarenakan aktivitas liburan akhir tahun yang menjadi pemicu peningkatan kasus COVID-19. 3. Pada TW III kasus COVID-19 yang disebabkan oleh varian Delta meningkat sangat signifikan, sehingga pemerintah Pusat memberlakukan PPKM Darurat yang memaksa banyak pelaksanaan kegiatan tertunda.	2. Melakukan komunikasi secara intens dengan berbagai pihak terkait, terutama dengan kelompok, Lembaga dan desa wisata dsb, agar dapat mempersiapkan perubahan kegiatan 3. TW IV kasus COVID-19 sangat rendah, sehingga mayoritas kegiatan dapat segera dilaksanakan. Lebih dari 50% kegiatan Dais dilaksanakan pada Triwulan IV	

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pariwisata DIY meliputi:	Bakti Saka Pariwisata	kegiatan	5	5			
				Peningkatan Lembaga Wisata Budaya						
			1. Melakukan analisis pengembangan pasar pariwisata yang mendukung pembangunan pariwisata DIY	Aplikasi Layanan e-sertifikasi Terpadu	aplikasi	1	1			
				Sertifikasi Tour Planner	orang	30	30			
				Materplan Desa Mandiri Budaya	dokumen	3	3			
			2. Intensifikasi promosi pariwisata secara online (melalui media digital) dan offline (melalui pameran, pembuatan bahan promosi dll)	Bantuan peralatan untuk menunjang isoman	kegiatan	1	1			
				Fasilitasi Vaksinasi Covid -19 untuk pelaku wisata di destinasi wisata	orang	5000	4146			
			3. Pengembangan konten promosi wisata tematik DIY	Pelatihan dan Sertifikasi Pemandu Sejarah	orang	30	30			
			4. Pelaksanaan promosi pariwisata dalam dan luar negeri	Promosi Pariwisata melalui media elektronik	kali	60	60			
			5. Pengembangan pengembangan travel pattern dan paket wisata serta manajemen atraksi daya tarik wisata yang kompetitif	Kajian Wisata Budaya Religi	dokumen	1	1			
				Pembuatan konten digital promosi "Kangen Jogja"	konten	5	5			
			6. Pengelolaan pelaksanaan pelayanan informasi pariwisata	Pemberian Bantuan kepada Pokdarwis terdampak PPKM Darurat COVID-19 di DIY	pokdarwis	177	169			
			E.Pengembangan Citra Pariwisata (brand development tourism):	Pembuatan Konten ILM Dispar DIY sektor pariwisata "bersemi di saat pandemi"	video	10	10			
			1. Penguatan dan Pengembangan citra	Sosialisasi Pranatan Anyar di Desa Wisata	lokasi	5	5			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			branding destinasi wisata DIY	Pendampingan SDM dan Lembaga Wisata	orang	150	150			
			2. Brand awareness/campaign di media digital dan non digital untuk promosi destinasi wisata DIY	Budaya di calon Desa Mandiri Budaya (Tahap Pengembangan)	orang	3000	2673			
			F. Standarisasi Usaha Pariwisata meliputi:	Fasilitasi Vaksinasi Covid -19 untuk pelaku industri wisata	orang	9	9			
			1. Penyusunan standar usaha penyelenggaraan usaha jasa pariwisata	Belanja Modal Peralatan Konten Kreatif dan Liputan Pengembangan website profil Dinas Pariwisata DIY	jenis	1	1			
			2. Standarisasi usaha pariwisata dalam mendukung daya saing produk dan destinasi wisata DIY.							
			3. pelaksanaan bimbingan teknis standar internasional usaha pariwisata							
			4. Pembinaan usaha berbasis potensi lokal pendukung wisata							
			G.Penguatan organisasi kepariwisataan dan SDM Pariwisata meliputi:							
			1. Penguatan Organisasi Kepariwisata dan SDM Pariwisata dalam mendukung tata kelola kepariwisataan yang bedaya saing dan berkelanjutan							

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2. Penguatan Koordinasi, integrasi dan sinergi antar pemangku kepentingan (lintas sektor dan lintas wilayah). 3. Sertifikasi SDM bidang Pariwisata							

c. Urusan Pertanian

1) Kondisi Umum

Capaian nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam PDRB tahun 2021 berdasarkan DIY Dalam Angka 2022 yang dirilis oleh BPS PROVINSI DIY menunjukkan capaian nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dalam PDRB berdasarkan harga konstan (dalam juta rupiah) tercapai sebesar 7.496.829 atau 103,33% dari target tahun 2021. Dibandingkan tahun 2020, capaian nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam PDRB tahun 2021 meningkat sebesar 0,44% dan sektor pertanian berkontribusi sebesar 6,99% terhadap capaian total PDRB DIY berdasarkan harga konstan.

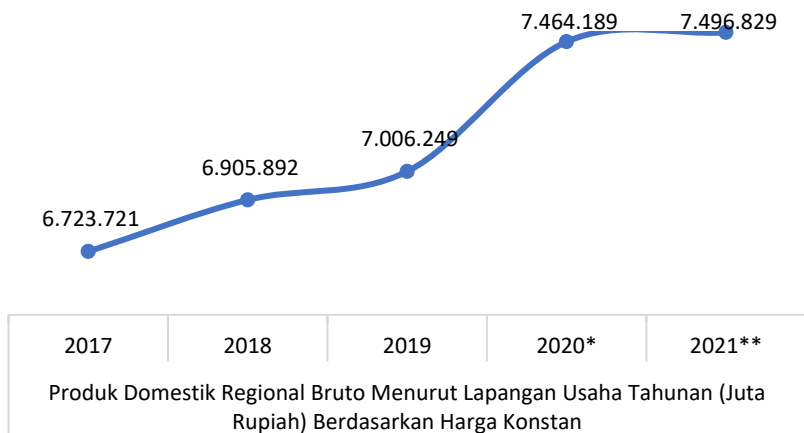
Kinerja sasaran meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dengan indikator nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dalam PDRB (Juta Rupiah) pada tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.150. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2020*	2021			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam PDRB tahun (Sumber BPS)	Juta Rupiah	7.464 .189*	7.255 .205	7.496 .829**	103,33	7.327 .757	102,31

Keterangan: *) Angka Sementara; **) Angka sangat sementara

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022



Gambar 3.39. Nilai Sub sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Jasa Pertanian dan Perburuan dalam PDRB DIY Tahun 2017-2021**
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Gambar di atas menunjukkan pencapaian PDRB tahun 2021 sebesar 7.496.829 juta rupiah atau 103,33% dari target tahun 2021. Capaian tahun 2020 sebesar 7.464.189 juta rupiah dan jika dibandingkan dengan capaian PDRB tahun 2021 yaitu sebesar 100,44% atau nilai pertumbuhan antar tahunnya sebesar 0,44%. Pertumbuhan PDRB yang positif menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki potensi dan kemampuan dalam pengembangan sektor perekonomian dan pengolahan sumber daya yang ada.

Tabel 3.151. PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahunan Berdasarkan Harga Konstan 2010 (Juta Rupiah) series 2017-2021

No	Komoditas	PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahunan Berdasarkan Harga Konstan 2010 (Juta Rupiah)				
		2017	2018	2019	2020*	2021**
1. Pertanian		6.723.851	6.905.892	7.006.249	7.464.189	7.496.829
a.	Tanaman Pangan	2.895.314	2.950.946	2.940.429	3.233.401	3.073.421
b.	Tanaman Hortikultura	1.974.731	2.021.184	2.084.243	2.209.320	2.304.182
c.	Tanaman Perkebunan	210.219	218.349	232.059	251.243	218.252
d.	Peternakan	1.643.587	1.715.413	1.749.517	1.770.224	1.900.975
PDRB DIY		1.073.314	92.300.24	98.024.01	104.485.45	101.683.52
			4	4	9	0
Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB DIY (%)		2,765	7,28	7,05	6,71	7,34

Keterangan: *) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Penurunan nilai PDRB tahun 2021 pada sub sektor tanaman pangan sebesar 4,95% dipengaruhi oleh penurunan produksi. Begitupun sebaliknya, peningkatan nilai PDRB pada sub sektor hortikultura dipengaruhi oleh peningkatan produksi. Subsektor perkebunan mengalami peningkatan produksi 6,98%, namun nilai PDRB mengalami penurunan sebesar 13,13% dibanding tahun 2020, karena peningkatan produksi hanya terjadi pada komoditas yang memiliki nilai ekonomis rendah seperti komoditas kelapa. Subsektor peternakan mengalami penurunan populasi total sebesar 0,44%, namun nilai PDRB mengalami peningkatan sebesar 7,39% karena pada ternak yang memiliki nilai ekonomis tinggi seperti sapi potong, kambing, dan domba terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Pertumbuhan positif nilai PDRB sektor pertanian pada masa pandemi tentu memberikan harapan akan kelangsungan produksi pangan di DIY karena pertanian masih memberikan peluang yang menjanjikan.

Tabel 3.152. Produksi Tanaman Pangan di DIY Tahun 2020-2021

No	Komoditas	Produksi (ton)	
		2020	2021*
1	Padi	848.140	855.355
2	Jagung	369.347	362.525
3	Kedelai	7.969	8.482
4	Kacang Tanah	75.119	84.846
5	Kacang Hijau	531	451
6	Ubi Kayu	1.073.314	1.000.444
7	Ubi Jalar	2.765	2.209
8	Sorghum	0	0

Keterangan: *) Angka sementara

Sumber: DPKP DIY, 2022

Berdasarkan tabel di atas, diketahui komoditas yang berkontribusi paling dominan terhadap produksi tanaman pangan adalah ubi kayu, padi, jagung, kacang tanah, dan kedelai. Komoditas ubi kayu merupakan penyumbang terbesar produksi tanaman pangan di DIY tahun 2021 sebesar 43,23%, disusul dengan komoditas padi sebesar 36,96%, dan komoditas jagung sebesar 15,66%.

Total produksi tanaman pangan tahun 2021 sebesar 2.314.312 ton, mengalami penurunan sebesar 62.873 ton (-2,64%) dari tahun 2020. Komoditas yang mengalami penurunan meliputi jagung, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar. Penurunan produksi jagung dikarenakan tidak sempurnanya pembungaan dan pengisian biji pada tongkol akibat kondisi iklim tahun 2021 sehingga menyebabkan produktivitas jagung menurun. Komoditas ubi kayu, kacang hijau dan ubi jalar mengalami penurunan disebabkan petani beralih ke komoditas lain yang mempunyai nilai jual yang lebih tinggi.

Produksi padi, kedelai, dan kacang tanah mengalami peningkatan dibanding tahun 2020, karena adanya pengembangan kawasan padi dan kedelai disertai penyediaan benih unggul yang bersertifikat, penyediaan sarana prasarana yang mendukung peningkatan produksi serta pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan antisipasi dampak perubahan iklim sedini mungkin.

Pada tahun 2021 produksi hortikultura di DIY mencapai 424.046 ton atau 105,71% dibanding target sebesar 401.150 ton. Apabila produksi hortikultura tersebut dibandingkan dengan produksi tahun 2020 terdapat kenaikan sebesar 3,09% atau 411.340 ton. Komoditas sayuran strategis yang mengalami kenaikan adalah bawang merah dan cabai rawit. Produksi bawang merah pada tahun 2021 naik sangat signifikan sebesar 29.809 ton atau 58,47% dibandingkan produksi bawang merah tahun 2020 sebesar 18.811 ton. Produksi cabai rawit meningkat dari 15.052 ton menjadi 15.933 ton di tahun 2021 atau naik 5,85% dibanding tahun 2020. Kenaikan produksi bawang merah dan cabai rawit ini disebabkan antara lain harga bawang merah dan cabai rawit cukup bagus. Untuk cabai besar di DIY pada tahun 2021 dengan produksi 38.378 ton mengalami penurunan sebesar 13,80% dibandingkan dengan produksi cabai besar pada tahun 2020 sebesar 44.521 ton. Produksi cabai besar mengalami penurunan karena perubahan iklim yang

ekstrim dan fluktuasi harga untuk komoditas cabai besar yang sangat dinamis. Pada saat harga murah petani enggan melakukan perawatan tanaman cabainya, sehingga produksinya rendah.

Produksi buah-buahan pada tahun 2021 di DIY meningkat 5,05% dengan total produksi buah sebesar 281.983 ton dibandingkan produksi tahun 2020 sebesar 127.776 ton. Komoditas buah unggulan yang mengalami kenaikan adalah Salak, Mangga dan Pisang. Produksi salak pada tahun 2021 sebesar 57.296 ton, meningkat 4,20% dibandingkan produksi pada tahun 2020 sebesar 54.996 ton. Produksi mangga sebesar 33.456 ton pada tahun 2021, naik 15,40% dibandingkan produksi pada tahun 2020 sebesar 28.985 ton. Sedangkan produksi pisang pada tahun 2021 sebesar 68.257 ton, mengalami kenaikan 2,30% dibandingkan produksi pada tahun 2020 sebesar 66.730 ton.

Komoditas buah-buahan utama lainnya yakni semangka dan melon produksinya menurun dibanding tahun sebelumnya. Penurunan produksi terjadi di Kabupaten Sleman, Kulon Progo dan Gunungkidul, sedangkan di Kabupaten Bantul mengalami kenaikan. Sebagian besar petani semangka dan melon menggunakan sistem sewa lahan dan modal untuk budidaya kedua komoditas ini cukup tinggi sehingga kondisi permintaan pasar yang masih belum stabil di masa pandemi ini menurunkan minat para petani untuk berbudidaya.

Produksi tanaman biofarmaka di DIY secara total pada tahun 2021 sebesar 16.333 ton, mengalami kenaikan 7,82% dibandingkan produksi biofarmaka pada tahun 2020 sebesar 15.148 ton. Komoditas unggulan untuk biofarmaka yaitu jahe dan kunyit produksinya juga mengalami kenaikan. Produksi jahe tahun 2021 sebesar 5.121 ton, naik 13,00% dibandingkan produksi tahun 2020 sebesar 4.532 ton. Demikian juga produksi kunyit pada tahun 2021 sebesar 3.374 ton, naik 9,40% dibandingkan produksi pada tahun 2020 sebesar 3.085 ton. Kenaikan produksi biofarmaka ini didorong

harga komoditas biofarmaka yang cukup baik yang disebabkan kebutuhan biofarmaka pada era Pandemi COVID-19 cukup tinggi, sehingga mendorong petani untuk memproduksi biofarmaka secara intensif.

Tabel 3.153. Produksi Hortikultura di DIY Tahun 2020-2021

No	Komoditas	Satuan	Produksi	
			2020	2021*
1	Cabai besar	Ton	44.521	38.378
2	Cabai rawit	Ton	15.052	15.933
3	Bawang merah	Ton	18.811	29.809
4	Mangga	Ton	29.833	33.456
5	Durian	Ton	6.771	9.258
6	Pisang	Ton	66.730	68.207
7	Salak	Ton	54.996	57.290
8	Pepaya	Ton	13.995	14.653
9	Semangka	Ton	8.909	5.184
10	Melon	Ton	22.230	14.550
11.	Jahe	Ton	4.532	5.121
12.	Kunyit	Ton	3.085	3.374

Keterangan: *) Angka sementara

Sumber: DPKP DIY, 2022

Populasi peternakan di DIY pada tahun 2021 sebanyak 15.163.088 ekor atau 603.277 Animal Unit (AU), turun jika dibanding dengan populasi tahun 2020 sebanyak 15.627.817 ekor atau 605.946 AU. Rincian populasi peternakan tahun 2020 dan 2021 di DIY disajikan pada table berikut ini.

Tabel 3.154. Populasi Ternak di DIY Tahun 2020-2021

No	Komoditas	Populasi Ternak			
		2020 (ekor)	2020 (AU)	2021* (ekor)	2021 (AU)
1	Sapi Potong	309.259	235.037	317.425	240.787
2	Sapi Perah	3.520	2.675	3.469	2.674
3	Kuda	1.842	1.271	1.747	1.205
4	Kerbau	488	444	478	435
5	Babi	11.725	2.345	10.750	2.150
6	Kambing	416.400	45.804	440.748	47.385
7	Domba	148.191	19.265	149.231	19.400
8	Ayam buras	3.496.119	69.922	3.445.735	68.915
9	Ayam Ras Petelur	4.618.205	92.364	3.614.663	72.293
10	Ayam Ras Pedaging	6.184.378	123.688	6.733.162	134.663

No	Komoditas	Populasi Ternak			
		2020 (ekor)	2020 (AU)	2021* (ekor)	2021 (AU)
11	Itik	437.690	13.131	445.680	13.370
	TOTAL	15.627.817	605.946	15.163.088	603.277

Keterangan: *) Angka sementara

Sumber: DPKP DIY, 2022

Populasi sapi potong mengalami peningkatan sebesar 8.166 ekor atau 6,64%. Peningkatan ini didukung adanya program hibah ternak untuk mendukung perbibitan berjalan dengan baik dan program optimalisasi reproduksi yang meningkatkan jumlah kelahiran sapi.

Terdapat komoditas strategis peternakan yang mengalami penurunan populasi pada tahun 2021 dibanding tahun sebelumnya, sebagai berikut. Penurunan populasi sapi perah disebabkan oleh menurunnya minat generasi muda untuk beternak sapi perah serta keterbatasan lahan Hijauan Makanan Ternak (HMT), yang menyebabkan para peternak menjual sebagian ternaknya. Penurunan populasi kerbau disebabkan minat budidaya yang turun dan populasi pejantan lebih banyak sehingga angka kelahiran kecil. Penurunan populasi kuda disebabkan pemotongan ternak tanpa diimbangi penambahan populasi. Angka populasi babi juga mengalami penurunan karena di tahun 2021 banyak peternak babi khususnya di Kota Yogyakarta beralih profesi ke beternak sapi. Sedangkan populasi kambing dan domba mengalami peningkatan masing-masing sejumlah 24.348 ekor (5,85%) dan 1.040 ekor (0,70%). Peningkatan ini didorong oleh tumbuhnya minat generasi muda untuk beternak kambing dan domba.

Penurunan populasi ayam ras petelur diakibatkan turunnya harga telur ayam ras sampai Rp 16.000/kg pada bulan September-Oktober, sedangkan harga jagung naik sampai 6.500/kg sehingga menyebabkan sebagian peternak mengurangi populasi ternaknya. Harga jagung naik disebabkan produksi jagung turun, pada tahun 2020 sebesar 369.347 ton menjadi 362.525 ton di tahun 2021. Populasi ayam ras pedaging mengalami kenaikan sebesar 548.784 ekor atau 8,87 % karena peternak melihat adanya potensi pasar

sebagai salah satu komoditas untuk Program Keluarga Harapan (PKH). Beternak ayam ras pedaging dan itik cukup menguntungkan sehingga minat untuk beternak juga meningkat.

Perkebunan mengalami peningkatan produksi pada beberapa komoditas unggulan seperti tebu yang meningkat 4,10%, kakao 5,12%, cengkeh 4,21%, tembakau rakyat 12,10%, mete 11,16%, dan teh 2,37%. Sementara komoditas kopi mengalami penurunan 0,45% dan kelapa turun 3,28%. Penurunan produksi kopi disebabkan kondisi tanaman yang sudah tua sehingga produktivitasnya menurun, juga dikarenakan kurang intensifnya pemeliharaan di tingkat pekebun. Sementara itu, produksi kelapa turun karena banyak tanaman yang direhabilitasi sehingga tanaman belum berproduksi.

Tabel 3.155. Produksi Komoditas Perkebunan DIY Tahun 2020-2021**

No	Komoditas	Produksi (Ton)			Wujud Produksi
		2020	2021**	% Pertumbuhan	
1	Kelapa	48.375,90	46.788,00	-3,28	kopra
2	Tebu	11.035,49	11.488,06	4,10	gula hablur
3	Kakao	1.893,99	1.990,88	5,12	biji kering
4	Cengkeh	724,34	754,82	4,21	bunga kering
5	Tembakau Rakyat	744,47	834,56	12,10	daun kering
6	Kopi	514,09	511,79	-0,45	biji kering
7	Jambu Mete	262,75	292,06	11,16	biji kering
8	The	220,26	225,48	2,37	daun kering

Keterangan: ** Angka Sangat Sementara

Sumber: DPKP DIY, 2022

2) Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2021

Urusan Pertanian pada tahun 2021 dilaksanakan melalui 6 Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, dan Program Penyuluhan Pertanian. Pagu anggaran sebesar Rp83.324.275.550,00. Realisasi keuangan

sebesar Rp76.940.909.168,00 atau sebesar 92,34% dari target yang ditetapkan dengan realisasi fisik 100% karena ada sisa lelang dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Rincian capaian kinerja program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.156. Capaian Program dan Sub Kegiatan Urusan Pertanian Tahun 2021

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1. Peningkatan produksi tanaman dan populasi ternak yang berdampak bagi peningkatan pendapatan petani. 2. Peningkatan daya saing produk pertanian melalui standarisasi produk dan proses, peningkatan rantai pasok, mutu dan keamanan pangan 3. Pengembangan infrastruktur (lahan, air, sarana dan prasarana) 4. Pengembangan kawasan yang berdampak terhadap pendapatan petani. 5. Menumbuhkan sentra-sentra pembibitan ternak lokal 6. Pendampingan dan pengawalan kelompok. 7. Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh, pemantapan kelembagaan penyuluhan, dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan penyuluhan 8. Pemantapan ketersediaan dan kewaspadaan pangan melalui koordinasi lintas sektor 9. Peningkatan cadangan pangan daerah (masyarakat dan pemerintah) 10. Peningkatan diversifikasi/penganeekaragaman pangan berbasis pangan lokal	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Persentase benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan bersertifikat yang terdistribusi Produksi tanaman pangan Persentase bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi Produksi perkebunan Populasi peternakan Jumlah sertifikasi benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pesticida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian Pengembangan pengolahan pupuk organik Fasilitasi sarpras dan PPHP komoditas tembakau Uji coba kartu tani untuk penyaluran pupuk bersubsidi	% Ton % Ton Animal Unit Hektar kelompok kelompok lokasi	89 2313255 96 69153 626885 800 14 3 17	89.08.00 2314312 100 69181.13 603278 802.03.00 14 3 17	1. Produksi tanaman pangan tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 karena penurunan produksi ubi kayu yang cukup signifikan dari 1.073.314 ton menjadi 864.209 ton 2. Data produksi hortikultura belum seluruhnya masuk dari Kabupaten/ Kota sehingga sebagian data menggunakan angka prediksi	Melakukan pengawalan produksi secara intensif, mitigasi dan penanganan Dampak Perubahan Iklim secara tepat, pengamatan serta pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan secara terpadu, antisipasi munculnya Penyakit Hewan Menular Strategis, meningkatkan ketepatan waktu pendataan statistik pertanian, pemantauan harga komoditas pertanian secara kontinyu dan melakukan koordinasi dengan para pihak terkait jika terjadi gelombang	Urusan Pertanian: 1. Pemda DIY melaksanakan amanat dalam Perda Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dengan menerbitkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 126 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Peraturan ini akan disosialisasikan dan mulai diimplementasikan dengan melibatkan peran serta para pihak terkait. 2. Penumbuhan petani milenial sudah mulai dilaksanakan melalui pembentukan dan pelantikan kepengurusan Asosiasi Petani

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			11. Penanganan keamanan pangan, pengawasan pangan beredar, dan sertifikasi/registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan	Sarana pertanian yang dapat dipenuhi	unit	131	131		harga pada komoditas pertanian.	Milenial DIY. Sampai dengan tahun 2021 telah terjaring 1.000 orang petani milenial yang telah bergabung dalam Asosiasi Petani Milenial DIY.
			12. Pengembangan distribusi pangan yang merata dan terjangkau, stabilisasi harga pangan strategis, dan pemantauan distribusi, harga, akses pangan.	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi Tersedianya pakan ternak	kelompok	12	12			3. Dalam mendukung pelaksanaan Perda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di DIY, Pemda DIY melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan telah memberikan fasilitasi kepada petani berupa bibit, alat dan mesin pertanian (alsintan), perbaikan saluran irigasi, asuransi usaha tani/ternak, pengendalian hama dan penyakit, pengembangan benih/bibit unggul, serta pengembangan SDM Pertanian.
			13. Penurunan jumlah Desa Rawan Pangan	Penambahan populasi ternak domba (18 ekor x 23 kelompok)	ekor	414	414			
			14. Penyelenggaraan dan pelaksanaan Pusat Perbenihan	Penambahan populasi ternak unggas (800 Ekor x 21 Kelompok)	ekor	16800	16800			
			15. Peningkatan aksesibilitas pangan masyarakat	Penambahan populasi ternak sapi perah (7 Ekor x 1 Kelompok)	ekor	7	7			
			16. Pemenuhan kecukupan pangan masyarakat	Penambahan populasi ternak sapi potong (6 Ekor x 84 Kelompok)	ekor	504	504			
				Penambahan populasi ternak kambing (16 ekor x 90 kelompok)	ekor	1440	1408			
				Kajian Pengembangan Kawasan Ternak Terpadu di Desa Balecatur, Gamping, Sleman	dokumen	1	1			
				Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih						4. Menerbitkan Peraturan Daerah DIY Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa
				Luas areal yang Ha mengajukan		430	469.82			

No	Ururan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				sertifikasi untukTanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan						Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Peraturan ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan peraturan turunannya yang juga akan ditindaklanjuti di masing-masing Kabupaten/Kota. Ke depan koordinasi dan sinkronisasi dengan Kabupaten/Kota maupun para pihak terkait dalam upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan akan terus ditingkatkan 5. Pemda DIY melaksanakan pengawasan tata kelola pupuk subsidi. Tahapan pengalokasian pupuk bersubsidi dimulai dari usulan oleh petani ke penyuluh setempat, kemudian diinput datanya ke aplikasi e-RDKK. Penebusan Pupuk Bersubsidi didorong
				Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura						
				Produksi Benih Batang		3000	3450			
				Tanaman Buah						
				Produksi Benih Kg		35	35			
				Tomat						
				Produksi Benih Kg		35	36.56.00			
				Cabai						
				Rehab kubung hortikultura unit Ngipiksari	Paket	1	1			
				Rekomendasi Produsen dan Pegedar Benih Hortikultura	Rekomendasi	5	7			
				Produksi Benih Batang		10	20			
				Anggur						
				Instalasi penyiraman kebun buah naga	Paket	0	1			
				UnitTambak						
				Produksi Benih Batang		1200	3665			
				Tanaman Hias						
				Produksi Benih Batang		1000	5200			
				Strawberry						
				Produksi Benih Botol		4300	4504			
				Jamur Edibel						
				Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan						
				Produksi Benih Kg		700	700			
				Kacang Tanah						

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Produksi Benih Kedelai	Kg	1800	2110			menggunakan Kartu Tani agar bantuan subsidi pupuk dapat tepat sasaran. Pemda DIY dalam hal ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY berkoordinasi dengan BRI untuk mencetak kartu tani dan kemudian dilakukan sosialisasi di setiap kabupaten tentang tata cara penggunaan kartu tani dan cara pennebusan pupuk bersubsidi. Terkait pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi, Pemda DIY dalam hal ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY berkoordinasi dengan Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) agar prinsip 6 tepat (tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu) bisa terpenuhi. Pemda DIY juga membentuk Tim Pengawasan Pupuk
				Produksi Benih Padi Operasional Jogja Benih	Kg	76200	77245			
				Produksi Benih Kacang Hijau	Kg	700	700			
				Rekomendasi Produsen dan Pengedar Benih/Bibit Tanaman Pangan	Rekomendasi	13	19			
				Dukungan terhadap capaian Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persen	06.27	06.27			
				Produksi Benih Jagung	Kg	2500	2525			
				Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan						
				Rekomendasi Produsen dan Pengedar Benih Tanaman Perkebunan	Rekomendasi	1	2			
				Produksi Benih Kelapa	Batang	2500	2501			
				Produksi Benih Kakao	Batang	5000	5001			
				Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi						
				Semen Beku (dosis) yang sesuai SNI	dosis	24000	25324			
				Dukungan terhadap capaian Program	persen	13.41	12.29			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian						dan Pestisida untuk membantu Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida dalam melakukan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penyimpanan serta penggunaan pupuk dan pestisida.
				Produksi HMT rata-rata setahun untuk ternak di UPTD	kg/tahun	825000	928202			
				Produksi bibit ternak (ekor) bersertifikat SKLB (Surat Keterangan Layak Bibit)	ekor	50	64			
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						
				Produksi hortikultura	Ton	401150	402259			
				Produksi tanaman pangan	Ton	2313255	2385221			
				Produksi perkebunan	Ton	69153	69181.13			
				Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian						
				Kajian Pemetaan Potensi Kesuburan Tanah dan Kesesuaian Lahan Berbasis GIS untuk Komoditas Tanaman Pangan pada Lahan Tanaman Pangan Berkelanjutan	dokumen	1	1			6. Pengembangan pertanian menggunakan Dana Keistimewaan sudah dilaksanakan oleh Pemda DIY melalui kegiatan Pengembangan Lumbung Mataraman, didalamnya terdapat berbagai aktivitas seperti pengembangan lumbung pangan berbasis keluarga dan desa, budidaya hortikultura di lahan surjan, budidaya tanaman pangan sistem sabuk gunung, dan pengembangan pertanian di lahan sempit. Ke depan akan terus dilaksanakan dan ditambah
				Kajian Kualitas Tanah dalam Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan di Zona Inti Kawasan	dokumen	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Lahan Tanaman Pangan Berkelanjutan						berbagai aktivitas lain yang lebih variatif.
				Kajian Peranan Kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dalam Operasi dan Pemeliharaan di Jaringan Irigasi Tersier dalam Mendukung Luas Tambah Tanam Bidang Tanaman Pangan	dokumen	1	1			
				Kajian Feasibility Study Daya Saing dan Agro Industri Kopi di DIY	dokumen	1	1			
				Kajian Agroklimatologi dan Irigasi Teknis di Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	dokumen	1	1			
				Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian						
				Doksistu penerapan jaminan mutu komoditas hortikultura	dokumen	1	1			
				Penerapan sistem pertanian organik (komoditas padi)	kelompok	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pengutuhan tegakan tanaman kakao	ha	6	6			
				Budidaya tanaman tembakau sesuai GAP (6 klp, 9 kali @ 25 org)	ha	24	24			
				Bimtek pengolahan pasca panen perkebunan	kelompok	1	3			
				Luas lahan yang produktivitasnya meningkat (Pendampingan PTT ubikayu sebanyak 4 unitx 15 ha)	ha	0	0			
				Jumlah Kebun yang teregistrasi dan Surveillance (salak, cabe, srikaya, bawang merah, dan buah naga)	sertifikat	200	200			
				Bimtek Pasca Panen/Pengolahan Komoditas Perkebunan	lokasi	16	16			
				Kelembagaan Petani Tembakau	kelompok	4	4			
				Bimtek Pasca Panen/Pengolahan Komoditas Hortikultura	lokasi	16	16			
				Bimtek Pertanian Organik	lokasi	16	16			
				Temu kemitraaan pelaku usaha hortikultura	orang	25	25			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Kajian Model Bisnis Sosial Sektor Pertanian Pasca Pandemi	dokumen	1	1			
				SL PPHP Komoditas Tembakau	orang	50	60			
				Luas lahan yang diusahakan untuk budidaya hortikultura (cabe, aneka sayuran, tanaman buah, anggrek, biofarmaka, dan stroberi)	ha	98	98			
				Temu kemitraan pelaku usaha perkebunan	orang	0	0			
				Penerapan Standar Mutu Hasil Perkebunan	kelompok	2	2			
				Pemeliharaan tanaman perkebunan (kakao, kopi, teh)	ha	07.05	07.05			
				Budidaya Tanaman Perkebunan 3 komoditas (nilam, cengkeh, kelapa)	ha	15	15			
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani						
				Sarana prasarana rehab jalan usaha tani	unit	26	26			
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani						

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Sarana prasarana rehab jaringan irigasi tersier	hektar	375	375			
				Pengelolaan lahan dan air	komoditas	0	0			
				Sarana prasarana irigasi	hektar	35	35			
				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER						
				Populasi peternakan	Animal Unit	626885	603278			
				Persentase bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi	%	96	100			
				Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis						
				Fasilitasi obat hewan dan vaksin	botol	500	500			
				Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Penyakit Zoonosis	lokasi	16	16			
				Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan						
				Terjaminnya daging hewan qurban yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH)	wilayah	5	5			
				Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi						
				Pengamanan hewan ternak melalui Pos Lalu Lintas Ternak (PLLT)	lokasi	7	7			
				Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)						

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Meningkatnya kompetensi pengelola hewan qurban	orang	50	50			
				Jumlah sertifikat yang dihasilkan pada pelaksanaan audit NKV terhadap unit usaha produk asal hewan yang telah memenuhi persyaratan	sertifikat	1	1			
				Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner						
				Hasil uji penyakit sampel hewan	sampel	7500	7600			
				Hasil Uji sampel produk asal hewan	sampel	450	450			
				Terpeliharanya Status Akreditasi Laboratorium	ruang lingkup	4	4			
				Dukungan terhadap capaian Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	persen	53.56.00	51.33.00			
				PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN						
				Persentase pertanaman aman dari serangan OPT dan DPI	%	95	96.42.00			
				Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan						

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Berfungsinya laboratorium LPMT	tahun	1	1			
				Berfungsinya laboratorium LPHPT	tahun	1	1			
				Rekomendasi tingkat residu pada produk	rekomendasi	85	90			
				Laporan pengawasan peredaran penggunaan pestisida di tingkat petani	dokumen	1	1			
				Gerakan pengendalian OPT tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan : padi 2560 ha, jagung 60 ha, kedelai 25 ha, salak 25 ha, cabe 10 ha, bawang merah 5 ha, perkebunan 50 ha	tahun	1	1			
				Pengendalian hama terpadu komoditas tembakau dengan sistem sekolah lapang	ha	20	20			
				Tersedianya agens hayati (untuk TPH dan perkebunan)	jenis	10	10			
				Dokumen data, informasi peramalan serangan OPT dan	kecamatan	67	67			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				DPI sebagai dasar rekomendasi						
				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						
				Tingkat pengetahuan dan ketrampilan SDM pertanian	-	75	75			
				Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN						
				Pelatihan angkatan		0	0			
				Pengolahan Hasil Peternakan						
				Pelatihan Agribisnis Itik	angkatan	0	0			
				Pelatihan Agribisnis Ayam Buras	angkatan	0	0			
				Pelatihan Agribisnis Biofarmaka	angkatan	0	0			
				Pelatihan Agribisnis Pisang	angkatan	0	0			
				Pelatihan Agribisnis Hortikultura	angkatan	1	1			
				Temu Tugas Penyuluh	kali	1	1			
				Pelatihan Agribisnis Kakao	angkatan	0	0			
				Pelatihan Agribisnis Padi Sehat	angkatan	1	1			
				Pelatihan Agribisnis Kopi	angkatan	0	0			
				Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian						
				Rehab fisik JATP	paket	1	1			
				Kunjungan kerja Gubernur DIY	kali	1	1			
				Programa penyuluhan	dokumen	1	1			
				Operasional JATP	tahun	1	1			

No	Ururan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani						
				Young Agripreneur Petani Milenial	lokasi	16	16			
				Forum Agropreneur Penyuluh dengan Petani Milenial	kab/kota	5	5			
				Data Penilaian Kelas Kemampuan Kelompok	dokumen	1	1			

d. Urusan Kehutanan

1) *Kondisi Umum*

Pasca implementasi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, dan Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, telah terjadi pergeseran paradigma (*paradigm shifting*) pemanfaatan hutan berbasis multiusaha kehutanan, melalui pemanfaatan/ pemungutan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan pemanfaatan kawasan.

Salah satu indikator yang bisa digunakan dalam penilaian kinerja sektor kehutanan adalah nilai sub sektor kehutanan dalam PDRB. Hal ini juga menjadi indikator kinerja urusan kehutanan di DIY sesuai dengan amanah dalam RPJMD 2017-2022. Target dan realisasi kinerja Urusan Kehutanan pada tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.157. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kehutanan Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Nilai subsektor kehutanan dalam PDRB DIY	juta	955 .424,80	756 .975	994 .779*	131,42	764 .545	130,11

Sumber: DLHK DIY, 2022 (angka proyeksi)

Angka realisasi ini masih bersifat sangat sementara karena hanya dijustifikasi berdasarkan hasil proyeksi. Hal tersebut disebabkan belum dirilisnya angka resmi dari BPS terkait angka PDRB sub sektor kehutanan.

Berdasarkan hasil proyeksi yang dilakukan, maka realisasi PDRB sub sektor kehutanan berada pada angka 994.779 juta. Realisasi ini sudah melampaui target tahun 2021 sebesar 756.975 juta atau

dengan persentase capaian 131,42%. serta angka realisasi tahun 2021 ini juga telah melampaui target akhir periode RPJMD yaitu 764.545 juta atau 130,11% yang dapat berkontribusi 6,82% terhadap capaian angka PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

Capaian tersebut meningkat sebesar 4,12% jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 955.420 juta. Peningkatan ini relevan dengan capaian kinerja usaha kehutanan terhadap perekonomian secara nasional pada tahun 2021, dimana pada kuartal ketiga usaha kehutanan memberikan pertumbuhan sebesar 0,17%. Sehingga peningkatan tersebut juga dapat memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi nasional triwulan III sebesar 3,51%. Beberapa usaha kehutanan yang ada di DIY dapat dilihat dalam tabel di bawah.

Tabel 3.158. Angka produksi kehutanan 2020-2021

No.	Uraian	Volume	
		2020	2021
1.	Produksi kayu bulat (m³)	71.335,54	97.986,34
a.	Kayu Bulat Hutan Negara	2.249,84	2.566,26
b.	Kayu Bulat Hutan Rakyat	69.085,70	95.420,08
2.	Produksi kayu olahan (m³)	26.715,31	10.488,1
a.	Kayu Gergajian/ <i>Swan Timber</i> (m ³)	3.931,62	2.982,38
b.	Kayu lapis/ <i>plywood</i> (m ³)	4.956,46	495,90
c.	<i>Veneer</i> (m ³)	1.211,98	1.316,30
d.	<i>Barecore</i> (m ³)	16.493,30	5.290,19
e.	<i>Blockboard</i> (m ³)	121,95	403,33
3.	Produksi hasil hutan non kayu		
a.	Minyak kayu putih (liter)	40.353	42.317
b.	Bambu (batang)	477.493	477.493
4.	Jasa Lingkungan (Rp)	409.761.125	1.043.337.375
a.	Pengelolaan Hutan Mangunan	403.917.625	1.037.791.000
b.	Pengelolaan Hutan Produksi Klayar Kenet	1.580.750	580.625
c.	Pengelolaan Hutan Produksi Ngingrong Mulo	4.262.750	4.849.500
d.	Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Bibal	n/a	116.250

Sumber: DLHK DIY, 2022

Pada tahun 2021 peningkatan produksi kayu bulat cukup signifikan jika dibanding tahun 2020 dengan selisih produksi mencapai 26.650,8 m3. Peningkatan ini terjadi karena kebutuhan pasar kayu juga meningkat seiring mulai bangkitnya perekonomian di DIY dimana sebelumnya terpuruk karena pandemi COVID-19. Namun pada produksi kayu olahan tahun 2021 justru mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2020. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kayu DIY lebih banyak yang terjual dalam bentuk log dibandingkan olahan.

Sementara itu pada hasil hutan non kayu, DIY memiliki hutan kayu putih dengan jumlah produksi daun 4.559 ton pada tahun 2021. Jumlah daun tersebut selanjutnya diolah dan menghasilkan minyak kayu putih sebanyak 42.317 liter. Angka realisasi ini meningkat jika dibandingkan dengan angka realisasi tahun 2020 sebesar 40.353 liter. DIY termasuk tiga besar daerah yang berkontribusi terhadap total produksi minyak kayu putih secara nasional.

2) *Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2021*

Pada tahun 2021, Urusan Kehutanan melaksanakan 3 program dan 12 sub kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp13.260.120.300,00. Realisasi anggaran untuk Urusan Kehutanan sebesar Rp12.054.798.574,00 atau 90,91% dan realisasi fisik mencapai 100%. Secara terinci, capaian kinerja program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.159. Capaian Program dan Sub Kegiatan Urusan Kehutanan Tahun 2021

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	1. Meningkatkan kualitas lingkungan melalui Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup; 2. Meningkatkan peran serta para pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; 3. Mendorong pemanfaatan lingkungan hidup yang harmoni dengan daya dukung dan daya tampungnya; 4. Meningkatkan efektivitas perlindungan sumber daya alam dan fungsi lingkungan; 5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan; 6. Meningkatkan efektivitas kerja sama antar pemangku kepentingan dalam pengendalian pencemaran udara;	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN Persentase kawasan hutan tertata Persentase peningkatan jumlah usaha kehutanan yang memiliki sertifikat Produksi bibit tanaman bersertifikat yang ditanam Rasio pemanfaatan sumber daya hutan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	% % Batang Rasio	92.32 2 350000 86.66	0 0 0 0	Kualitas lingkungan sangat dipengaruhi oleh aktivitas manusia yang masih perlu ditingkatkan pola pemikiran dan kesadarannya untuk mengelola lingkungan secara arif dan bijaksana. Disamping itu, faktor alam yang dinamis turut andil mempengaruhi kualitas lingkungan, baik air, udara maupun tutupan lahan. Pemanfaatan fungsi hutan untuk pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pariwisata, dan pendidikan belum optimal	Koordinasi pada tahap perencanaan yang lebih konkrit, jangka menengah dan jangka pendek. Pembangunan hutan berbasis fungsi ekonomi, fungsi sosial dan fungsi ekologi	b. Urusan Kehutanan 1. Produk primer hasil hutan berupa kayu sebagai hasil dari suatu proses pengelolaan atau budidaya tanaman kehutanan merupakan suatu produk yang dari waktu ke waktu mengalami fluktuasi permintaan pasar baik dari segi volume maupun jenis kayu yang menjadi demand dari pasar. Kondisi tersebut sangat mempengaruhi dari sistem atau pola pengelolaan tanaman kehutanan untuk mengantisipasi dari kebutuhan pasar industri per kayu baik untuk memenuhi kebutuhan DIY maupun di luar DIY. Hasil hutan kayu ditinjau dari asal usulnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu pertama hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan atau lebih dikenal hutan negara (status hutan produksi) dan kedua hasil hutan kayu yang berasal dari lahan milik atau lebih dikenal dengan hutan rakyat. Untuk mengantisipasi kebutuhan industri kayu di masa mendatang perlu dilakukan optimalisasi pengelolaan tanaman kehutanan dalam aspek hasil hutan kayu dengan memperhatikan perspektif lingkungan dalam arti menjaga keseimbangan antara luasan, volume dan kebutuhan pasar akan produksi kayu dengan potensi luasan dan daur ekonomi kayu itu sendiri. Upaya – upaya yang dapat dilakukan kedepan antara lain sebagai berikut : a. Pengelolaan hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan negara :

No	Ururan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			7. Meningkatkan efektivitas kerja sama antar pemangku kepentingan dalam pengendalian polusi;	Bimbingan Teknis Penatausahaan Hasil Hutan Kayu	orang	60	0			1) Masa Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPH Yogyakarta sebagai UPTD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY periode 2014 – 2023 akan segera berakhir dimana sebagai upaya untuk mensikapi dalam upaya mencapai pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berperspektif lingkungan maka ada Tahun 2022 diusulkan kegiatan Penyusunan Data Base Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung sebagai bahan penyusunan RPHJP KPH Yogyakarta periode 2024 – 2033 dan sebagai rangkaian prosesnya maka pada Tahun 2023 diusulkan kegiatan penyusunan RPHJP KPH Yogyakarta Tahun 2024 – 2033. Dimana didalam dokumen RPHJP Tahun 2024 – 2033 diupayakan untuk menuangkan sistem pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung yang mensinergikan antara kebijakan rencana pembangunan nasional, rencana kehutanan tingkat nasional, rpjmd, rencana kehutanan tingkat provinsi dengan potensi kawasan hutan produksi dan hutan lindung DIY sebagai upaya untuk melaksanakan pengelolaan hutan yang menjaga keseimbangan fungsi lingkungan, sosial budaya dan ekonomi secara berkelanjutan.
			8. Meningkatkan peran serta para pemangku kepentingan dalam pengendalian perubahan iklim global dan penanggulangan dampak gas rumah kaca;	Monitoring dan evaluasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu di Kawasan Hutan Produksi	laporan	1	0			
			9. Meningkatkan sinergisitas dan memperjelas pembagian peran para pemangku kepentingan dalam pengendalian pencemaran udara ambient.	Monitoring dan evaluasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di Kawasan Hutan Produksi	laporan	1	0			
			10. Meningkatkan kualitas lingkungan melalui Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan						
			11. Meningkatkan peranserta para pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;	Pemantauan Batas Kawasan Hutan di BDH Karangmojo (153 km)	dokumen	1	0			
										2) Di dalam pengelolaan produk hasil hutan kayu yang akan dituangkan dalam RPHJP KPH Yogyakarta akan dilaksanakan dengan membangun sistem pengelolaan menggunakan pola daur ekonomi kayu yang berdasarkan keseimbangan antara luasan penanaman,

No	Ururan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			12. Mendorong pemanfaatan lingkungan hidup yang harmoni dengan daya dukung dan daya tampungnya;	Monitoring Evaluasi Pemanfaatan Hutan di BDH Paliyan	dokumen	1	0			<p>luasan potensi produksi, volume dan kebutuhan pasar akan produksi kayu dengan potensi luasan dan daur ekonomi kayu dimana dalam operasionalnya dapat dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme swakelola dengan pembiayaan APBD DIY maupun mekanisme kerja sama.</p> <p>3) Selanjutnya dari RPHJP KPH Yogyakarta terkait dengan pola penanaman, pola daur produksi dituangkan ke dalam Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPd) setiap tahun pada periode 2024 – 2033.</p> <p>b. Pengelolaan hasil hutan kayu yang berasal dari lahan milik atau hutan rakyat :</p> <p>1) Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Rakyat yang mempertimbangkan pola rehabilitasi lahan dalam hal ini penanaman dan jenis tanaman, pola produksi, daur ekonomi dan kebutuhan industri kayu dengan potensi luas lahan milik yang dapat difungsikan sebagai subjek hasil hutan kayu secara berkelanjutan.</p> <p>2) Pendampingan masyarakat pengelola hutan rakyat dari aspek kelola lembaga, kelola budidaya dan kelola usaha dengan optimalisasi peran penyuluh kehutanan baik dari segi kualitas maupun kuantitas</p> <p>3) Penyiapan masyarakat pengelola hutan rakyat ke arah sertifikasi penatausahaan hasil hutan untuk</p>
			13. Meningkatkan efektivitas perlindungan sumber daya alam dan fungsi lingkungan;	Penyelesaian Permasalahan Tenurial	bulan	12	1			
			14. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan;	Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan di BDH Kulon Progo-Bantul	Km	27	0			
			15. Meningkatkan efektivitas kerja sama antar pemangku kepentingan dalam pengendalian pencemaran air sungai;	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya						
			16. Mengembangkan dan meningkatkan sistem hukum lingkungan untuk menjamin terlaksananya supremasi hukum;	Inventarisasi Potensi HHBK	dokumen	1	0			
			17. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sampah;	Pengawasan pengolahan HHBK	laporan	1	0			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			18. Peningkatan pembinaan bagi kelompok masyarakat peduli lingkungan.	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi						menciptakan nilai tambah dari hasil hutan kayu
			19. Meningkatkan kerja sama dan koordinasi lintas perangkat Daerah untuk melaksanakan Program Penambahan Tutupan Vegetasi;	Monitoring dan Evaluasi Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu	laporan	1	0			4) Pendampingan dan pembinaan industri kayu untuk peningkatan kapasitas industri kayu di DIY agar menjadi industri bersertifikat dan membangun jejaring pemasaran hasil hutan kayu lanjutan yang bernilai tambah baik antar daerah maupun ekspor yang bersinergi dengan masyarakat kelompok hutan rakyat sebagai penghasil produk kayu.
			20. Meningkatkan aksesibilitas dengan para pemrakarsa kegiatan untuk fasilitasi lahan atau pengembangan tutupan vegetasi dan konservasi lahan.	Penyusunan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri dengan Kapasitas Produksi	dokumen	1	0			2. Upaya pendampingan pada kelompok pengelola hutan rakyat dilakukan dengan cara, sebagai berikut :
			21. Pembaharuan Sistem Tata Kelola Kehutanan	Bimbingan Teknis Sertifikasi Legalitas Kayu	orang	30	0			a. Mengintensifkan kunjungan penyuluh kehutanan ke KTH untuk melakukan pendampingan terutama pada KTH yang berbasis usaha hasil hutan kayu dan non kayu (kayu bulat, madu, daun, bambu), dimana hasil hutan tersebut secara langsung dihitung menjadi komponen PDRB sektor kehutanan. Peningkatan intensitas kunjungan penyuluh diharapkan dapat mendorong KTH lebih optimal dalam mengelola hutan sehingga produktivitas hasil hutan meningkat.
			22. Mempertahankan keberadaan kawasan hutan	Pembinaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi	IPHHK	28	12			b. Fasilitasi KTH yang berbasis usaha kayu dan non kayu, yang menjadi komponen penyusun PDRB Kehutanan, baik berupa peningkatan kapasitas kelembagaan, bantuan sarana prasarana produksi, maupun fasilitasi pemasaran produk (misal : pameran).
			23. Pemantapan Kawasan Hutan	Pengembangan Aplikasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Rakyat	aplikasi	1	0			c. Sosialisasi penanaman hutan rakyat dengan jenis tanaman yang
			24. Perencanaan Kehutanan yang	Sertifikasi Sumber Benih						

No	Ururan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Komprehensif dan berkesinambungan							mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi (misal sonokeling, pohon hias seperti pule, kamboja).
			25. Peningkatan produktifitas dan nilai tambah sumber daya hutan dan fungsinya	Pemeliharaan Sumber Benih Unggul Kayu Putih	unit	1	0			d. Sosialisasi dan pendampingan dalam rangka diversifikasi usaha kehutanan hasil hutan non kayu yang mendukung PDRB kehutanan seperti budidaya anggrek hutan/anggrek spesies, budidaya burung, budidaya satwa (rusa,kijang), budidaya ikan (arwana).
			26. Optimalisasi Pengelolaan dan pemanfaatan Sumber daya Hutan	Penilaian Kelayakan Calon Sumber Benih Tanaman Kehutanan	lokasi	4	0			
			27. Pengembangan Pengelolaan Sumber Daya Hutan yang Berkelanjutan	Sertifikasi Mutu Bibit						3. Sejarah pengelolaan hutan di DIY memiliki keistimewaan tersendiri dimana memiliki sejarah yang cukup panjang dalam pengelolaannya mulai era penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, kemerdekaan sampai saat ini dimana pengelolaannya dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dan operasional pengelolaannya dilaksanakan oleh UPTD Balai KPH Yogyakarta. Berdasarkan pada kebijakan pengelolaan hutan di Jawa dan Madura, Jawatan Kehutanan membentuk Perum Perhutani berdasarkan PP 30 /1963, dimana untuk Bagian Daerah Hutan Surakarta menjadi salah satu Bagian Hutan di Wilayah Perum Perhutani, dan Bagian Hutan Yogyakarta tidak termasuk dan pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DIY (Hal ini berkaitan dengan kedudukan Keraton Yogyakarta dan Keistimewaan Yogyakarta, UU Nomor 3/1955). Kondisi inilah yang membedakan pengelolaan hutan
			28. Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan hutan	Penilaian Kelayakan Bibit/ Benih yang sesuai dengan Standar Mutu	batang	350000	0			
			29. Penguatan Kelembagaan dan SDM Kehutanan	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit						
			30. Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan	Tersedianya Bibit Tanaman Kehutanan	batang	350000	0			
			31. Peningkatan Kontribusi Kehutanan bagi Keberlanjutan Sektor Perekonomian lainnya	Pembinaan dan Pengaawalan Pengada/ Pengedar Benih dan/ atau Bibit Tanaman Kehutanan	orang	20	0			

No	Ururan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			32. Konservasi Keanekaragaman Hayati	Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Kehutanan	kab	4	0			<p>di Daerah Istimewa Yogyakarta yang hingga saat ini Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang mengelola kawasan hutan negara.</p> <p>Salah satu keistimewaan DIY sebagaimana UU No. 13 Tahun 2012 yaitu sistem kelembagaan pemerintahan, pertanahan dan tata ruang maka optimalisasi dana keistimewaan dapat diupayakan untuk mendukung program kegiatan sebagai berikut :</p> <p>a. Optmalisasi struktur kelembagaan pengelolaan hutan baik di tingkat manajemen operasional (Balai KPH Yogyakarta) maupun operasional tingkat tapak yang meliputi Kabupaten Gunungkidul, Bantul dan Kulon Progo(5 Bagian Daerah Hutan dan 24 Resort Pengelolaan Hutan) terutama untuk rekrutmen personil dalam upaya pemenuhan rasio antara luasan kawasan hutan dengan ketersediaan personil utamanya di tingkat tapak.</p> <p>b. Penetapan cagar budaya untuk beberapa sarana prasarana yang merupakan peninggalan sejarah dalam kelembagaan pengelolaan hutan seperti beberapa bangunan Bagian Daerah Hutan, Resort Pengelolaan Hutan dan atau bangunan peristirahatan Wisma Erlangga Kaliurang, Sleman</p> <p>c. Kegiatan konservasi tanaman terutama pada kawasan hutan lindung dengan jenis tanaman yang memiliki nilai konservasi namun juga dapat bermanfaat</p>
			33. Peningkatan Manfaat Jasa Ekosistem	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Benih Tanaman Kehutanan	lokasi	4	0			
			34. Peningkatan Peran Hutan dalam Pemulihan Daya Dukung DAS	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA						
			35. Rehabilitasi lahan dan pencegahan bencana alam	persentase hutan konservasi terkelola	%	77.09	0			
			36. Optimalisasi dan Distribusi Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA						
				Pengamanan kawasan	bulan	12	1			
				Pembersihan lahan bawah tegakan	ha	2	0			
				Pembuatan sekat bakar	ha	2	0			
				Pemeliharaan tegakan rawan bencana	pohon	10	0			
				Penyelamatan anakan alam	batang	1000	0			
				Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi						
				Pembinaan dan pendampingan peran serta masyarakat	kali	7	0			

No	Ururan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				dalam pengelolaan Tahura						bagi masyarakat sekitar hutan dari segi hasil hutan bukan kayunya, sosial budaya masyarakat sekitar hutan dan ekonomi yang menjadi ciri khas tertentu masyarakat sekitar hutan.
				Laporan RKL RPL Tahura	dokumen	2	0			
				Penyediaan pakan, perawatan kesehatan satwa koleksi	bulan	12	1			d. Kegiatan reboisasi tanaman dengan jenis – jenis tanaman yang menjadi ciri khas DIY pada kawasan hutan dalam upaya untuk mempertahankan jenis tanaman endemik DIY baik di kawasan hutan produksi maupun hutan lindung.
				PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN						e. Optimalisasi peran kelompok tani hutan dari aspek kelembagaan sebagai kearifan lokal masyarakat sekitar hutan yang sangat bergantung kepada keberadaan hutan untuk menopang kebutuhan hidup melalui peningkatan kapasitas kelola lembaga, kelola kawasan/budidaya dan kelola usaha.
				Persentase kawasan hutan tertata	%	92.32	0			f. Penyelesaian status dan tata batas kawasan hutan yang belum tertata dengan bersinergi dengan pihak terkait agar pengelolaan hutan dapat terlaksana secara optimal sebagai wujud keistimewaan DIY dalam pengelolaan hutan
				Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan						
				Programa Penyuluhan Kehutanan	dokumen	1	0			
				Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan						
				Sarana dan Prasarana Alat Ekonomi Produktif (DAK)	Kelompok	5	0			
				Peningkatan Kelas KTH	KTH	4	0			
				Pembinaan dan Pendampingan KTH	KTH	45	0			

e. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

1) *Kondisi Umum*

Peningkatan pelayanan publik melalui pembinaan, penataan perizinan, peningkatan pengawasan dan pengendalian berdasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran kinerja yang tercantum dalam RPJMD 2017-2022, tetap merupakan fokus dalam pelaksanaan program dalam rangka pelaksanaan kewenangan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral pada sub urusan geologi, air tanah, mineral dan batubara, energi baru terbarukan serta ketenagalistrikan sesuai dalam UU Nomor 23 Tahun 2014.

Dalam rangka mendukung peningkatan pelayanan tersebut diatas, terutama dalam mendukung peningkatan tata kelola dan upaya konservasi air tanah, telah disusun Keputusan Gubernur DIY Nomor 102 Tahun 2021 tentang Penetapan Harga Air Baku untuk Air Tanah Tahun 2021. Sedangkan upaya peningkatan tata kelola pertambangan, telah disusun Keputusan Gubernur Nomor 369/KEP/2021 tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara itu, dengan belum adanya kepastian kewenangan Provinsi untuk sub urusan pertambangan, menyebabkan pelaksanaan pelayanan sub urusan pertambangan didasarkan pada transisi pengalihan kewenangan ke pusat yang masih meninggalkan kewenangan provinsi yang tidak dikelola Pemerintah Pusat. Hal tersebut disebabkan belum diterbitkannya Perpres terkait pendelegasian sebagian kewenangan pengelolaan pertambangan ke provinsi sesuai amanat UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sesuai dengan RPJMD 2017 – 2022, sasaran utama Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Meningkatnya Rumah Tangga Berakses Listrik dan Meningkatnya Kesesuaian Izin Pengusahaan Air

Tanah dan Pertambangan Terhadap Rencana Tata Ruang, yang dituangkan dalam dua indikator sebagai berikut:

Tabel 3.160. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Tar-get	Realisasi	% Realisasi		
1	Presentase Rumah Tangga berakses listrik	%	99,99	99,70	99,99	100,29	100	99,99
2	Kesesuaian izin perusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang	izin	79	93	93	100	115	80,87

Sumber: DPUPESDM DIY, 2022

Indikator persentase rumah tangga berakses listrik dihitung berdasarkan Rasio Elektrifikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM RI. Sampai dengan akhir tahun 2021 Rasio Elektrifikasi DIY mencapai 99,99% atau melampaui target (100,29%) yang telah ditetapkan di tahun 2021 sebesar 99,70%. Upaya yang dilakukan tidak hanya berfokus pada meningkatkan dan mempertahankan capaian rasio elektrifikasi namun juga berupaya meningkatkan kualitas keselamatan ketenagalistrikan bagi rumah tangga miskin (subsidi) yang masih menikmati listrik dengan cara menyalur dan tidak sesuai dengan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan. Dalam rentang waktu tahun 2017 sampai dengan akhir tahun 2021 telah terdapat peningkatan sejumlah 11.955 rumah tangga miskin yang telah menikmati listrik sesuai dengan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan melalui mekanisme subsidi. Selain itu untuk sektor energi, Pemda DIY terus berupaya mempertahankan porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam bauran energi melalui pemeliharaan pembangkit-pembangkit EBT eksisting yang dimiliki Daerah.

Dalam hal perumusan kebijakan strategi pengelolaan energi, DIY perlu memberikan penekanan lebih pada kebijakan konservasi energi sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya EBT yang ada. Bila ditinjau dari parameter Bauran Energi, persentase porsi pemanfaatan EBT dalam Bauran Energi DIY masih kecil. Penggunaan Bahan Bakar Nabati (BBN) sebagai campuran Biosolar merupakan penyumbang terbesar dari persentase porsi EBT dalam Bauran Energi DIY. Adapun capaian porsi EBT dalam bauran energi di DIY terdapat 2 (dua) versi penghitungan yaitu 1) Versi Perhitungan Total, yaitu memperhitungkan total konsumsi energi termasuk listrik. Berdasarkan perhitungan versi ini porsi EBT dalam bauran energi di DIY tahun 2021 adalah sebesar 3,66% dan 2) Versi *Worksheet* DEN untuk khusus DIY, yaitu tidak memperhitungkan konsumsi listrik, karena DIY tidak memiliki pembangkit listrik utama. Berdasarkan perhitungan versi ini porsi EBT dalam bauran energi di DIY tahun 2021 adalah sebesar 6,23%.

Terkait Program Pengelolaan Air Tanah dan Program Pengelolaan Pertambangan yang merupakan pelaksanaan dari indikator Kesesuaian izin air tanah dan pertambangan terhadap tata ruang, dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan izin air tanah dan pertambangan. Hal tersebut dilakukan agar pelaksanaan izin air tanah dan pertambangan dikelola secara baik dan benar dengan tetap menjaga konservasi sumber daya mineral dan lingkungan. Dalam hal pelayanan pemberian rekomendasi teknis izin air tanah, dilakukan sesuai dengan arahan zona konservasi air tanah. Sedangkan pemberian rekomendasi teknis izin pertambangan dilakukan sesuai dengan kawasan peruntukkan pertambangan sebagai landasan bagi kegiatan pertambangan.

Sampai dengan tahun 2021 telah dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh izin yang terdiri dari 173 izin usaha pertambangan (74 Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan 99 Izin Usaha Pertambangan (IUP)) dan 296 izin air tanah. Berdasarkan upaya tersebut telah terverifikasi sejumlah 33 Izin

Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) dan 60 izin air tanah yang memiliki kinerja baik dan benar. Sehingga capaian kesesuaian izin air tanah dan pertambangan sebesar 93 izin atau 100% dari target tahun 2021.

2) *Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2021*

Pada tahun 2021 Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral dilaksanakan melalui 4 program, 6 kegiatan dan 8 sub kegiatan dengan alokasi Rp7.192.516.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp5.286.716.285,00 atau 73,50%, dan pencapaian fisik sebesar 100%.

Tabel 3.161. Capaian Program dan Sub Kegiatan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2021

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	1. Peningkatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan khususnya di perdesaan dan daerah terpencil/terisolir dengan didukung pemanfaatan energi baru terbarukan serta konservasi energi 2. Melakukan pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap izin usaha pertambangan terhadap rencana tata ruang	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN Penambahan jumlah rumah tangga yang menikmati listrik Penambahan izin ketenagalistrikan sesuai ketentuan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Pengadaan Instalasi dan Sambungan Listrik Rumah Tangga Verifikasi Rumah Tangga belum Berlistrik (5000 RT) Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitasnya dalam Daerah Provinsi Pengaturan dan Pembinaan Pelaksanaan Perijinan Ketenagalistrikan di 4 Kab dan 1 Kota Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi Dukungan pengelolaan perizinan ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan melalui Penatausahaan Izin Operasi untuk mendukung Penambahan izin	RT izin izin SR Dokumen Laporan 4	11848 60 1225 1 1 1 100	11955 60 766 1 1 1 100	1. Masih kurangnya pemanfaatan EBT 2. Belum intensifnya pengawasan ijin usaha pertambangan 3. Perbedaan cara mengukur rasio elektrifikasi antara Pemda DIY dengan PLN	1. Dilakukan kajian lebih mendalam terkait kemungkinan dan kelayakan pengembangan potensi EBT dari berbagai sumber (bio massa, angin, ombak dan lainnya) 2. BP3ESDM sampai dengan Tahun 2021 telah melaksanakan fungsi pejabat pengawas dalam hal aspek pengusahaan. Pengawasan dan pengendalian usaha Pertambangan pada 173 titik lokasi izin usaha pertambangan dengan metode pengawasan <i>onsite</i> , melakukan penilaian pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik melalui aplikasi SIPBANG, melakukan pencatatan dan penghitungan volume produksi serta melaksanakan sosialisasi kepada semua pemegang izin, stakeholder terkait dan masyarakat. 3. Koordinasi antara Pemda DIY dengan PLN dalam penentuan rasio elektrifikasi	1. DIY adalah merupakan provinsi pengimpor energi karena tidak memiliki sumber daya energi berbasis fosil. DIY mendapatkan suplai energi dari luar provinsi untuk memenuhi seluruh kebutuhan energi finalnya (listrik, bahan bakar minyak, dan bahan bakar gas). Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) yang dimiliki DIY juga relatif terbatas. Oleh karenanya dalam hal perumusan kebijakan strategi pengelolaan energinya, DIY perlu memberikan penekanan lebih pada kebijakan konservasi energi dan sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya EBT yang ada, guna mendukung pencapaian yang ada dalam Perda DIY Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah. Sebagai salah satu upaya pembangunan sektor EBT, Pemda DIY kedepannya akan mendukung kebijakan Pemerintah Pusat yang saat

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ketenagalistrikan sesuai ketentuan						ini mendorong adanya akselerasi dalam pemanfaatan PLTS rooftop (atap) <i>on grid</i> mengingat regulasi teknis dan kemudahan yang ditawarkan sangat potensial untuk dikembangkan tidak hanya dilakukan Pemda namun juga sektor swasta, industri dan masyarakat serta didukung penuh oleh PLN. Selain itu potensi-potensi EBT lain (biomassa, angin, ombak dan lainnya) yang dapat dikembangkan akan secara bertahap dilakukan kajian lebih mendalam terkait kemungkinan dan kelayakan pengembangan potensi tersebut.
				Pengelolaan Aplikasi E-Pengawasan dan E-Pelaporan Perizinan Ketenagalistrikan BP3ESDM DIY	aplikasi	1	1			2. Sesuai UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Perizinan usaha pertambangan termasuk pembinaan dan pengawasannya menjadi kewenangan pusat. Telah diusulkan Tim Pengawasan Terintegrasi Kegiatan Usaha Pertambangan yang melibatkan OPD pemberi rekomendasi dan aparat pengawas. Telah
				Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Ketenagalistrikan Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul	laporan	1	1			
				Pengawasan dan Pengendalian Energi Baru Terbarukan Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul	laporan	1	1			
				Pengawasan dan pengendalian Energi Baru Terbarukan Wilayah Bantul dan Kulon Progo	laporan	1	1			
				Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Ketenagalistrikan Wilayah Bantul dan Kulon Progo	laporan	1	1			
				PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN						
				Bangunan/gedung pemerintah, komersial dan industri yang telah diaudit energi	Unit	92	62			
				Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi						

No	Ururan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Rehabilitasi dan Perawatan PLTH Pantai Baru, Kab.Bantul	paket	1	1			<p>dilaksanakan fungsi pejabat pengawas dalam hal aspek pengusahaan. Pengawasan dan pengendalian usaha Pertambangan pada 173 titik lokasi izin usaha pertambangan dengan metode pengawasan onsite, melakukan penilaian pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik melalui aplikasi SIPBANG, melakukan pencatatan dan penghitungan volume produksi serta melaksanakan sosialisasi kepada semua pemegang izin, stakeholder terkait dan masyarakat.</p> <p>3. Sampai dengan tahun akhir tahun 2016, terdapat perbedaan konsep penentuan Rasio Elektrifikasi antara Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dengan Pemda DIY. Perbedaan tersebut terletak pada rumusan perhitungan Rasio Elektrifikasi. Rumusan awal yang digunakan adalah Jumlah Rumah Tangga Pelanggan PLN dibagi Jumlah Rumah Tangga Total di DIY. Hal tersebut dianggap Pemda DIY tidak mencerminkan kondisi kelistrikan di lapangan. Sehingga pada akhir tahun</p>
				Rehabilitasi dan Perawatan PLTMH Minggir, Kab.Sleman	paket	1	1			
				PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN						
				Cakupan penyediaan air bersih di daerah sulit air	dusun	79	112			
				Rerata penurunan muka air tanah terhadap ketebalan akuifer	%	20	20			
				Penambahan jumlah izin air tanah yang sesuai dengan ketentuan	Izin	60	60			
				Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah						
				Dukungan data fluktuasi air tanah melalui penetapan zona konservasi air tanah pada CAT untuk mendukung pengendalian Rerata penurunan muka air tanah terhadap ketebalan akuifer <20%	%	100	100			
				Monitoring dan Evaluasi Fluktuasi Air Tanah	Laporan	1	1			
				Rekomendasi Teknis Izin Penggunaan Air Tanah di 4 Kabupaten dan 1 Kota	Laporan	1	1			
				Pembinaan Pelaksanaan Penggunaan Air Tanah	Laporan	1	1			
				Perbaikan/ Pemeliharaan AWLR dan sumur pantau air tanah dalam	Paket	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Potensi Peruntukan Pemanfaatan Air Tanah Non Karst di Kabupaten Gunungkidul	Dokumen	1	1			2016, Pemda DIY mengusulkan perubahan rumusan perhitungan Rasio Elektrifikasi yaitu menjadi Jumlah Rumah Tangga yang Menikmati Listrik dibagi Jumlah Rumah Tangga Total. Data jumlah rumah tangga yang menikmati listrik yang dimaksud adalah merupakan jumlah rumah tangga yang telah menikmati listrik baik sebagai pelanggan PLN maupun non pelanggan PLN. Berdasarkan usulan dan kesepakatan yang dicapai oleh Pemda DIY dan PT PLN pada akhir tahun 2016 yang tertuang dalam MoM tertanggal 30 November 2016 tersebut, diusulkan ke Pusat untuk dijadikan rumusan perhitungan Rasio Elektrifikasi secara nasional. Pada akhir tahun 2017, rumusan perhitungan Rasio Elektrifikasi di DIY telah disesuaikan dengan usulan yang diajukan dan dijadikan acuan rumusan perhitungan Rasio Elektrifikasi secara nasional sampai dengan saat ini
				Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah						
				Dukungan pengelolaan perizinan air tanah melalui Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah untuk mendukung Penambahan jumlah izin air tanah yang sesuai dengan ketentuan	%	100	100			
				Pendataan dan Pencatatan Volume Air Tanah untuk Penghitungan NPA Wilayah Bantul dan Kulon Progo	Laporan	1	1			
				Pendataan dan Pencatatan volume air tanah untuk Penghitungan NPA Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul	Laporan	1	1			
				Pendataan Pengguna Air Tanah Belum Berizin Wilayah Bantul dan Kulon Progo	Dokumen	1	1			
				Pendataan Pengguna Air Tanah Belum Berizin Wilayah Sleman,	Dokumen	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Yogyakarta, dan Gunungkidul Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Air Tanah Wilayah Bantul dan Kulon Progo Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Air Tanah Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul Pengelolaan Aplikasi E- Pengawasan dan E- Pelaporan Perizinan Air Tanah BP3ESDM DIY Workshop Perizinan Air Tanah	Laporan	1	1			
				Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Air Tanah Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul Pengelolaan Aplikasi E- Pengawasan dan E- Pelaporan Perizinan Air Tanah BP3ESDM DIY Workshop Perizinan Air Tanah	Laporan	1	1			
				Pengelolaan Aplikasi E- Pengawasan dan E- Pelaporan Perizinan Air Tanah BP3ESDM DIY Workshop Perizinan Air Tanah	Aplikasi	1	1			
				Workshop Perizinan Air Tanah	Kali	1	1			
				PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA						
				Persentase Pengusahaan Kawasan Peruntukan Pertambangan	%	7,7	7,78			
				Penambahan jumlah izin usaha pertambangan yang baik dan benar	Izin	33	33			
				Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat						
				Dukungan sebesar 100 % terhadap Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral pada 7,7 % pengusahaan Kawasan	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Peruntukan Pertambangan						
				Pembinaan Pelaksanaan Usaha Pertambangan	Laporan	1	1			
				Penyusunan Dokumen lingkungan untuk kegiatan Pertambangan Rakyat di Kabupaten Kulon Progo	Dokumen	1	1			
				Penyusunan Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca Tambang untuk kegiatan Pertambangan Rakyat di Kabupaten Bantul	Dokumen	1	1			
				Penyusunan Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan di DIY	Dokumen	1	1			
				Rekomendasi Teknis/Persetujuan Izin Usaha Pertambangan	Laporan	1	1			
				Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat						
				Dukungan pengelolaan perizinan pertambangan melalui Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat untuk mendukung	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penambahan jumlah izin usaha pertambangan yang baik dan benar						
				Identifikasi Penambangan Tanpa Izin Wilayah Gunungkidul	Dokumen	1	1			
				Pendataan dan Penghitungan Volume Produksi Usaha Pertambangan Wilayah Bantul & Kulon Progo	Laporan	1	1			
				Pendataan dan Penghitungan Volume Produksi Usaha Pertambangan Wilayah Sleman dan Gunungkidul	Laporan	1	1			
				Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pertambangan Wilayah Bantul dan Kulon Progo	Laporan	1	1			
				Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pertambangan Wilayah Sleman dan Gunungkidul	Laporan	1	1			
				Pengelolaan Aplikasi E-Pengawasan dan E-Pelaporan Perizinan Pertambangan BP3ESDM DIY	Aplikasi	1	1			
				Sosialisasi Penggunaan Aplikasi E-Pengawasan dan E-Pelaporan Perizinan Pertambangan BP3ESDM DIY	Kegiatan	4	6			
				Workshop Perizinan Pertambangan	Kali	1	1			

f. Urusan Perdagangan

1) Kondisi Umum

Pertumbuhan ekonomi DIY didukung oleh berbagai sektor diantaranya sektor perdagangan. Walaupun sempat terpuruk akibat pandemi COVID-19, namun di tahun 2021, sektor ini sudah menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi sektor ini sebesar 1,51% di tahun 2021. Pertumbuhan ini, didukung pertumbuhan ekspor DIY. Nilai ekspor DIY di tahun 2021 sebesar US\$ 539,96 Juta atau naik sebesar 29,45% dibanding tahun sebelumnya.

Pakaian jadi tekstil, benang, mebel kayu, sarung tangan kulit, dan papan kemas adalah komoditas utama ekspor DIY yang diekspor ke negara-negara tujuan ekspor terutama Amerika Serikat, Korea Selatan, Australia, Jerman, dan Jepang. Tabel di bawah ini adalah perkembangan ekspor DIY dalam lima tahun terakhir.

Tabel 3.162. Perkembangan Ekspor DIY Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Volume (Juta kg)	59,24	53,57	64,17	103,51	132,51
Nilai (Juta US \$)	296,61	338,02	370,22	417,12	539,96
Komoditas	78	88	94	104	75
Negara	112	114	113	111	110
Eksportir	314	360	400	373	330

Sumber: Disperindag DIY, 2022

Berikut tabel target dan realisasi kinerja Urusan Perdagangan tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD.

Tabel 3.163. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Nilai sektor perdagangan dalam PDRB DIY tahun n (atas dasar harga konstan)	Juta Rupiah	8.253 .025	9.403 .163	8.379 .070	89,11	9.873 .321	84,87

Sumber: Disperindag DIY, 2022

Secara umum kinerja sektor perdagangan di tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, kinerja sektor ini hanya tercapai sebesar 89,11% pada tahun 2021. Hal ini dikarenakan adanya penurunan aktivitas perdagangan dalam negeri akibat pandemi COVID-19.

2) *Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2021*

Pada tahun 2021 Urusan Perdagangan dilaksanakan melalui 4 program dan 9 sub kegiatan, dengan total pagu anggaran sebesar Rp2.023.937.750,00. Anggaran tersebut dapat direalisasi sebanyak Rp1.800.517.150,00 atau 89,00%, dengan pencapaian fisik sebesar 100%. Selanjutnya rincian capaian kinerja program dan kegiatan tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 3.164. Capaian Program dan Sub Kegiatan Urusan Perdagangan Tahun 2021

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1. Peningkatan penggunaan produk lokal, pengelolaan persaingan usaha serta pengembangan pemasaran	PROGRAM PERIZINAN PERUSAHAAN	DAN	PENDAFTARAN		1. Menurunnya omzet selama pandemi corona mengakibatkan melemahnya modal usaha pelaku usaha sektor industri. Proses promosi dan pemasaran produk pelaku usaha sektor industri tidak dapat dilaksanakan karena biaya promosi dan pemasaran tidak dapat dipenuhi.	Fasilitasi promosi dan pemasaran bagi pelaku usaha sektor industri baik secara online maupun konvensional	a. Urusan Perdagangan Tindak lanjut yang akan dilakukan: 1) Peningkatan penjualan produk-produk DIY ke pasar luar negeri dilakukan pemerintah daerah DIY melalui berbagai kegiatan, diantaranya pelatihan manajemen dan prosedur ekspor. Eksportir pemula mendapatkan pelatihan mengenai manajemen dan prosedur ekspor yang diselenggarakan Pemda DIY. Disamping itu, Pemda DIY juga melayani konsultasi dan penerbitan Surat Keterangan Asal yang dibutuhkan oleh eksportir untuk mendapatkan preferensi tarif dan kuota ekspor ke negara tujuan ekspor. 2) Pemda DIY memfasilitasi UMKM yang memenuhi kriteria tertentu untuk memanfaatkan Gerai UMKM di Bandara NYIA dalam rangka pengembangan usahanya. Hal ini didukung juga dengan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas produk yang dipasarkan, serta fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk. 3) Pameran baik virtual maupun konvensional yang diantaranya memamerkan komoditas baru dan mengundang calon buyer dari negara tujuan ekspor baru
			2. Peningkatan kelancaran distribusi, stabilisasi harga	nilai ekspor perdagangan luar negeri tahun n	Juta US\$	321.06	521.04	1. Kelangkaan dan kenaikan harga bahan baku terutama bahan baku impor, misalnya: China sebagai pemasok bahan baku bagi Industri DIY mengalami pembatasan ekspor sehingga produsen DIY kesulitan bahan baku. Hal ini mengakibatkan terhambatnya proses produksi pelaku usaha sektor industri yang tergantung pada bahan baku impor. 2. Menurunnya omzet selama pandemi corona mengakibatkan melemahnya modal usaha pelaku usaha sektor industri. Proses produksi sebagian IKM tidak dapat dilakukan karena biaya produksi (bahan baku,	Bantuan peralatan produksi, Fasilitas konsultasi pelayanan impor bahan baku, Peningkatan kemampuan IKM dan IKMpemula melalui pelatihan IKM	
			3. Memperkuat dan memperluas perdagangan internasional dengan pengembangan kinerja perdagangan luar negeri dan fasilitasi ekspor	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA						
			4. Penciptaan wira usaha baru melalui pelatihan, diklat, maupun fasilitasi usaha	Jumlah SKA yang diterbitkan	SKA	10000	21170			
			5. Pengembangan teknologi industri yang mendukung proses produksi secara kuantitas	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING						

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			maupun kualitas serta pengembangan industri yang berwawasan lingkungan (Green Sektor)					tenaga kerja, energi) tidak dapat dipenuhi.		merupakan langkah yang akan dilakukan Pemda DIY dalam rangka meningkatkan jumlah volume penjualan, komoditas, dan tujuan negara pembeli barang produk dari DIY. 4) Meningkatnya pengguna internet tentu membuka pasar baru bagi produk-produk DIY. Pemda DIY telah melaksanakan berbagai upaya agar pelaku usaha DIY dapat mengakses pasar online tersebut, diantaranya pelatihan pemasaran online bagi pelaku usaha di DIY serta pengembangan aplikasi pemasaran online JOGJAPLAZA. 5) Perbaikan sarana prasarana pasar tradisional dilakukan dengan mendorong pemerintah kabupaten kota untuk mengusulkan kegiatan perbaikan pasar tradisional ke pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) b. Urusan Perindustrian Tindak lanjut yang akan dilakukan: 1) Peningkatan kembali aktivitas produksi dilakukan melalui peningkatan pemanfaatan teknologi produksi, peningkatan keterampilan, dan peningkatan perlindungan hak kekayaan intelektual. Peningkatan pemanfaatan teknologi dilakukan melalui bantuan
			6. Pengembangan aspek SDM, produksi, desain, dan pemasaran produk kreatif	Persentase Jumlah Barang Jasa yang Tidak Sesuai dengan Standard	%	5.5	1.125			
			7. Pengembangan aspek SDM, produksi, desain, dan pemasaran produk industri	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota						
			8. Koordinasi dan fasilitasi penyediaan kawasan industri untuk IKM	Stabilnya harga bahan pokok yang dipantau	%	5	5			
				Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						
				Fluktuasi harga beras dibawah batas toleransi	%	3	3			
				Fluktuasi harga bahan pokok menjelang HBKN dibawah batas toleransi	%	5	5			
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR						
				Nilai ekspor perdagangan luar negeri tahun n	Juta US\$	321.06	521.04			
				Pameran Dagang Internasional/Nasional						
				Peningkatan omzet UKM peserta Pameran Produk Unggulan Skala Ekspor sebanyak 4 Pameran (Pameran JIFFINA, Pameran IFEX,	US\$	175000	87500			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pameran Inacraft, TEI dengan komoditas : Pameran INACRAFT : Kerajinan Batik, Kerajinan kayu, Kerajina Kulit (tas,dompet, sabuk, sepatu), Kerajinan Perak, Pameran JIFFINA : Mebel Kayu, Home Deco, Kerajinan Rotan. Pameran IFEX : Mebel Kayu, Kerajinan Kayu, TEI: Mebel, Home Deco, Kerajinan, Fashion (semula 313,6 Ribu US\$ menjadi 488,6 Ribu US\$)						peralatan produksi baik melalui sekema hibah maupun pinjam pakai. Peningkatan keterampilan pelaku usaha sector industri kecil menengah dilakukan melalui berbagai pelatihan dan pendampingan. Perlindungan hak kekayaan intelektual dilakukan melalui fasilitasi sertifikasi kekayaan intelektual. 2) Program pembinaan kepada IKM selalu ditingkatkan walaupun tetap mempertimbangkan sumber daya yang ada. Peningkatan dilakukan dari sisi volume maupun fase pembinaan. IKM yang telah mengikuti pelatihan, memiliki kesempatan untuk mengikuti pembinaan fase selanjutnya seperti fasilitasi peralatan, fasilitasi sertifikasi HKI, dan fasilitasi pemasaran. 3) Pemda DIY selalu berusaha meningkatkan manajemen IKM. Hal ini dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan. Berbagai cabang manajemen menjadi materi pelatihan dan pendampingan ini, diantaranya manajemen produksi, manajemen pemasaran, dan manajemen usaha IKM. 4) Penumbuhan kerja sama IKM dengan industri besar dilakukan melalui temu bisnis. 5) Pemda
				Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor Jumlah peserta pelatihan Ekspertir baru yang meningkat kemampuannya	Orang	60	60			
				Operasional Pokja KADIN	Tahun	1	1			
				PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN umlah barang jasa yang tidak sesuai standar dibagi jumlah barang dan jasa yang diawasi (x 100%)	%	5.5	2.1			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen terlayannya penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK	Sengketa	26	481			
				Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen						

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Jumlah barang yang diawasi Pengawasan barang beredar, barang berbahaya dan jasa serta tertib niaga	Barang	750	785			DIY selalui membuka ruang kerja sama dengan berbagai kampus dalam rangka fasilitasi peningkatan teknologi kepada pelaku IKM
				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI						
				Jumlah omzet usaha pelaku perdagangan yang dibina	Milyar Rupiah	2.25	2.475			
				Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi						
				Jumlah peserta bimtek pemasaran online yang meningkat kemampuannya	Orang	160	120			
				Jumlah peserta Sekolah Pasar yang meningkat kemampuannya (2 akt x 25 orang)	Orang	50	50			
				Peningkatan omzet peserta Pameran (Pameran Dekranas, Pameran Jakarta Fair, Pameran Tetap) semula Rp. 1.187 Juta Menjadi Rp. 1.302 Juta	Juta Rupiah	115	6.3			
				Jumlah peserta bimtek pelaku usaha sektor perdagangan yang meningkat kemampuannya	Orang	80	80			
				Jumlah peserta bimtek PKL yang meningkat kemampuannya (9 akt x 20 orang)	Orang	160	160			

No	Ururan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan						
				Pengembangan layanan Aplikasi pemasaran online melalui Aplikasi Jogjaplaza	Aplikasi	1	1			

g. Urusan Perindustrian

1) Kondisi Umum

Industri pengolahan memiliki kontribusi terbesar dalam struktur PDRB DIY, dengan kontribusi mencapai 13,36% di tahun 2021. Laju pertumbuhannya di tahun 2021 mencapai 0,37%. Pertumbuhan ini didorong pertumbuhan pada Industri Pengolahan Tembakau, Industri Tekstil dan Pakaian Jadi, Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki, Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional, Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik, Industri Barang Galian bukan Logam, serta Industri Furnitur.

Tabel 3.165. Perkembangan PDRB Industri Pengolahan 2017 - 2021

Sub Sektor	2017	2018	2019	2020	2021
Industri Makanan dan Minuman	6.505.523,40	6.954.983,10	7.508.502,40	7.163.558,80	6.966.042,50
Industri Pengolahan Tembakau	489.335,70	514.937,10	523.804,60	567.978,80	631.428,80
Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	1.274.075,80	1.348.910,60	1.439.852,50	1.372.243,50	1.494.396,30
Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	323.933,90	307.907,20	305.131,30	251.673,80	256.987,70
Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	198.305,10	209.431,90	209.621,10	198.957,70	187.173,90
Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	278.534,70	287.372,30	307.555,50	296.474,70	283.779,00
Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	152.557,20	154.825,80	157.737,70	174.644,00	175.133,20
Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	254.141,50	253.462,10	256.768,10	249.830,90	268.043,30
Industri Barang Galian bukan Logam	360.404,30	373.123,90	369.065,30	318.837,10	332.928,30
Industri Barang Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik, dan Peralatan Listrik	799.598,50	770.480,60	785.492,20	792.349,70	806.190,50
Industri Mesin dan Perlengkapan	465.140,10	476.242,60	471.570,00	417.445,60	411.897,30
Industri Alat Angkutan	2.610,90	2.703,00	2.770,60	2.787,10	2.428,20
Industri Furnitur	503.683,80	545.914,70	566.496,20	542.971,70	584.490,80
Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	271.117,60	286.560,50	296.359,60	274.361,00	269.436,80
Jumlah	11.878.962,40	12.486.855,40	13.200.727,10	12.624.114,40	12.670.356,70

Sumber: BPS PROVINSI DIY, 2022

Secara umum kinerja sektor industri di tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, jika dibandingkan dengan target tahun 2021, kinerja sektor ini hanya tercapai sebesar 92,70% dan 89,13% terhadap target akhir RPJMD.

Hal ini dikarenakan adanya penurunan aktivitas ekonomi akibat pandemi COVID-19.

Tabel 3.166. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Nilai sektor industri pengolahan dalam PDRB DIY tahun (Atas dasar harga konstan)	Juta Rupiah	12.624 .114	13.668 .856	12.670 .357	92,70	14.215 .611	89,13%

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022 (data diolah)

2) Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2021

Urusan Perindustrian dilaksanakan Pemda DIY dengan anggaran belanja sebesar Rp42.478.380.853,00 dengan realisasi sebesar Rp39.707.842.915,00 atau 93%. Anggaran belanja ini terdiri dari tiga Program utama yaitu Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, Program Pengendalian Izin Usaha Industri, Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, serta Program Perencanaan dan Pembangunan Industri. Sedangkan realisasi fisiknya sebesar 100%.

Tabel 3.167. Capaian Program dan Sub Kegiatan Urusan Perindustrian Tahun 2021

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1. Peningkatan penggunaan produk lokal, pengelolaan persaingan usaha serta pengembangan pemasaran	PROGRAM PENYELENGGARAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				1. Menurunnya omzet selama pandemi corona mengakibatkan modal usahanya pelaku usaha sektor industri. Proses promosi dan pemasaran produk pelaku usaha sektor industri tidak dapat dilaksanakan karena biaya promosi dan pemasaran tidak dapat dipenuhi.	Fasilitasi promosi dan pemasaran bagi pelaku usaha sektor industri baik secara online maupun konvensional	a. Urusan Perdagangan Tindak lanjut yang akan dilakukan: 1) Peningkatan penjualan produk-produk DIY ke pasar luar negeri dilakukan pemerintah daerah DIY melalui berbagai kegiatan, diantaranya pelatihan manajemen dan prosedur ekspor. Eksportir pemula mendapatkan pelatihan mengenai manajemen dan prosedur ekspor yang diselenggarakan Pemda DIY. Disamping itu, Pemda DIY juga melayani konsultasi dan penerbitan Surat Keterangan Asal yang dibutuhkan oleh eksportir untuk mendapatkan preferensi tarif dan kuota ekspor ke negara tujuan ekspor. 2) Pemda DIY memfasilitasi UMKM yang memenuhi kriteria tertentu untuk memanfaatkan Gerai UMKM di Bandara NYIA dalam rangka pengembangan usahanya. Hal ini didukung juga dengan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas produk yang dipasarkan, serta fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk. 3) Pameran baik virtual maupun konvensional yang diantaranya
			2. Peningkatan kelancaran distribusi, stabilisasi harga	Persentase Peningkatan % Budaya Tak Benda yang Dilestarikan		16.82	16.8	1. Kelangkaan dan kenaikan harga bahan baku terutama bahan baku impor, misalnya: China sebagai pemasok bahan baku bagi Industri DIY mengalami pembatasan ekspor sehingga produsen DIY kesulitan bahan baku. Hal ini mengakibatkan terhambatnya proses produksi pelaku usaha sektor industri yang tergantung pada bahan baku impor. 2. Menurunnya omzet selama pandemi corona mengakibatkan modal usahanya pelaku usaha sektor industri. Proses produksi sebagian IKM	Bantuan peralatan produksi, Fasilitas konsultasi pelayanan impor bahan baku, Peningkatan kemampuan IKM dan IKMpemula melalui pelatihan IKM	
			3. Memperkuat dan memperluas perdagangan internasional dengan pengembangan kinerja perdagangan luar negeri dan fasilitasi ekspor	Pengembangan Industri Kreatif						
			4. Penciptaan wira usaha baru melalui pelatihan, diklat, maupun fasilitasi usaha	Jogja Batik Biennale	Event	1	1			
			5. Pengembangan teknologi industri yang mendukung proses produksi	Pengembangan layanan HKI dan Co Branding On TheSpot	Event	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			secara kuantitas maupun kualitas serta pengembangan industri yang berwawasan lingkungan (Green Sektor)					tidak dapat dilakukan karena biaya produksi (bahan baku, tenaga kerja, energi) tidak dapat dipenuhi.		memamerkan komoditas baru dan mengundang calon buyer dari negara tujuan ekspor baru merupakan langkah yang akan dilakukan Pemda DIY dalam rangka meningkatkan jumlah volume penjualan, komoditas, dan tujuan negara pembeli barang produk dari DIY. 4) Meningkatnya pengguna internet tentu membuka pasar baru bagi produk-produk DIY. Pemda DIY telah melaksanakan berbagai upaya agar pelaku usaha DIY dapat mengakses pasar online tersebut, diantaranya pelatihan pemasaran online bagi pelaku usaha di DIY serta pengembangan aplikasi pemasaran online JOGJAPLAZA. 5) Perbaikan sarana prasarana pasar tradisional dilakukan dengan mendorong pemerintah kabupaten kota untuk mengusulkan kegiatan perbaikan pasar tradisional ke pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) b. Urusan Perindustrian Tindak lanjut yang akan dilakukan: 1) Peningkatan kembali aktivitas produksi dilakukan melalui peningkatan pemanfaatan teknologi produksi,
			6. Pengembangan aspek SDM, produksi, desain, dan pemasaran produk kreatif	Fasilitasi Pendaftaran HKI (12 Hak Cipta, 6 Merek Kolektif, 2 Paten)	HKI	20	20			
			7. Pengembangan aspek SDM, produksi, desain, dan pemasaran produk industri	Edukasi dan Advokasi HKI	Angkatan	66	66			
			8. Kordinasi dan fasilitasi penyediaan kawasan industri untuk IKM	Pelatihan Produksi Gamelan Seminar Peningkatan Pengelolaan IKM Produk Khas Jogja Dubai Expo	Orang Kali	40 16	40 16			
				Pembangunan Workshop Gamelan	Unit	1	1			
				Lauching IG Batik Nitik	Event	1	1			
				Pembuatan Direktori Kotagede (Perajin Perak)	Kegiatan	1	1			
				Produksi Gamelan Slendro	Perangkat	5	5			
				Standardisasi dan Sertifikasi Produk Biofarmaka	IKM	10	10			
				Pembuatan Profil dan Web Base	IKM	6	6			
				Pembuatan Molding Gamelan Pelok	Mold	42	42			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pameran Seni Kriya	IKM	50	50			<p>peningkatan keterampilan, dan peningkatan perlindungan hak kekayaan intelektual. Peningkatan pemanfaatan teknologi dilakukan melalui bantuan peralatan produksi baik melalui sekema hibah maupun pinjam pakai. Peningkatan keterampilan pelaku usaha sector industri kecil menengah dilakukan melalui berbagai pelatihan dan pendampingan. Perlindungan hak kekayaan intelektual dilakukan melalui fasilitasi sertifikasi kekayaan intelektual. 2) Program pembinaan kepada IKM selalu ditingkatkan walaupun tetap mempertimbangkan sumber daya yang ada. Peningkatan dilakukan dari sisi volume maupun fase pembinaan. IKM yang telah mengikuti pelatihan, memiliki kesempatan untuk mengikuti pembinaan fase selanjutnya seperti fasilitasi peralatan, fasilitasi sertifikasi HKI, dan fasilitasi pemasaran. 3) Pemda DIY selalu berusaha meningkatkan manajemen IKM. Hal ini dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan. Berbagai cabang manajemen menjadi materi pelatihan dan</p>

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator		Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
											pendampingan ini, diantaranya manajemen produksi, manajemen pemasaran, dan manajemen usaha IKM. 4) Penumbuhan kerja sama IKM dengan industri besar dilakukan melalui temu bisnis. 5) Pemda DIY selalui membuka ruang kerja sama dengan berbagai kampus dalam rangka fasilitasi peningkatan teknologi kepada pelaku IKM
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1. Peningkatan penggunaan produk lokal, pengelolaan persaingan usaha serta pengembangan pemasaran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					1. Menurunnya omzet selama pandemi corona mengakibatkan modal usaha pelaku usaha sektor industri. Proses promosi dan pemasaran produk pelaku usaha sektor industri tidak dapat dilaksanakan karena biaya promosi dan pemasaran tidak dapat dipenuhi.	Fasilitasi promosi dan pemasaran bagi pelaku usaha sektor industri baik secara online maupun konvensional	a. Urusan Perdagangan Tindak lanjut yang akan dilakukan: 1) Peningkatan penjualan produk-produk DIY ke pasar luar negeri dilakukan pemerintah daerah DIY melalui berbagai kegiatan, diantaranya pelatihan manajemen dan prosedur ekspor. Eksportir pemula mendapatkan pelatihan mengenai manajemen dan prosedur ekspor yang diselenggarakan Pemda DIY. Disamping itu, Pemda DIY juga melayanai konsultasi dan penerbitan Surat Keterangan Asal yang dibutuhkan oleh eksportir untuk mendapatkan preferensi tarif dan kuota ekspor ke negara tujuan ekspor. 2) Pemda DIY memfasilitasi UMKM yang memenuhi kriteria tertentu untuk memanfaatkan Gerai
			2. Peningkatan kelancaran distribusi, stabilisasi harga	Persentase Pelayanan Perkantoran	Pemenuhan Administrasi	%	100	100	1. Kelangkaan dan kenaikan harga bahan baku terutama bahan baku impor, misalnya: China sebagai pemasok bahan baku bagi Industri DIY mengalami pembatasan ekspor sehingga produsen DIY kesulitan bahan baku. Hal ini mengakibatkan terambatnya proses	Bantuan peralatan produksi, Fasilitas konsultasi pelayanan impor bahan baku, Peningkatan kemampuan IKM dan IKMpemula	
			3. Memperkuat dan memperluas perdagangan internasional dengan pengembangan kinerja perdagangan luar	Persentase Pengembangan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Sistem	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			negeri dan fasilitasi ekspor					produksi pelaku usaha sektor industri yang tergantung pada bahan baku impor. 2. Menurunnya omzet selama pandemi corona mengakibatkan melemahnya modal usaha pelaku usaha sektor industri. Proses produksi sebagian IKM tidak dapat dilakukan karena biaya produksi (bahan baku, tenaga kerja, energi) tidak dapat dipenuhi.	melalui pelatihan IKM	UMKM di Bandara NYIA dalam rangka pengembangan usahanya. Hal ini didukung juga dengan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas produk yang dipasarkan, serta fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk. 3) Pameran baik virtual maupun konvensional yang diantaranya memamerkan komoditas baru dan mengundang calon buyer dari negara tujuan ekspor baru merupakan langkah yang akan dilakukan Pemda DIY dalam rangka meningkatkan jumlah volume penjualan, komoditas, dan tujuan negara pembeli barang produk dari DIY. 4) Meningkatnya pengguna internet tentu membuka pasar baru bagi produk-produk DIY. Pemda DIY telah melaksanakan berbagai upaya agar pelaku usaha DIY dapat mengakses pasar online tersebut, diantaranya pelatihan pemasaran online bagi pelaku usaha di DIY serta pengembangan aplikasi pemasaran online JOGIAPLAZA. 5) Perbaikan sarana prasarana pasar
			4. Penciptaan wira usaha baru melalui pelatihan, diklat, maupun fasilitasi usaha	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100			
			5. Pengembangan teknologi industri yang mendukung proses produksi secara kuantitas maupun kualitas serta pengembangan industri yang berwawasan lingkungan (Green Sektor)	Persentase peningkatan kualitas pegawai dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%	100	0			
			6. Pengembangan aspek SDM, produksi, desain, dan pemasaran produk kreatif	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
			7. Pengembangan aspek SDM, produksi, desain, dan pemasaran produk industri	Forum Perencanaan OPD	kali	1	1			
			8. Kordinasi dan fasilitasi penyediaan kawasan industri untuk IKM	ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku Publikasi di media cetak Tersedianya Jaringan Intranet/Internet	Dokumen kali OPD	1 13 1	1 13 1			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Data Informasi Perencanaan yang lengkap, akurat, dan terkini	%	100	100			tradisional dilakukan dengan mendorong pemerintah kabupaten kota untuk mengusulkan kegiatan perbaikan pasar tradisional ke pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) b. Urusan Perindustrian Tindak lanjut yang akan dilakukan: 1) Peningkatan kembali aktivitas produksi dilakukan melalui peningkatan pemanfaatan teknologi produksi, peningkatan keterampilan, dan peningkatan perlindungan hak kekayaan intelektual. Peningkatan pemanfaatan teknologi dilakukan melalui bantuan peralatan produksi baik melalui sekema hibah maupun pinjam pakai. Peningkatan keterampilan pelaku usaha sector industri kecil menengah dilakukan melalui berbagai pelatihan dan pendampingan. Perlindungan hak kekayaan intelektual dilakukan melalui fasilitasi sertifikasi kekayaan intelektual. 2) Program pembinaan kepada IKM selalu ditingkatkan walaupun tetap mempertimbangkan sumber daya yang ada. Peningkatan dilakukan dari sisi volume
				Koordinasi dan Penyusunan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan					
				Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang pencapaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)	Poin	81	86.35			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
				Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggarankas yang telah ditetapkan 9 program 26 kegiatan	%	100	100			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
				Tersedianya Gaji ASN	Orang	78	78			
				Tersedianya Gaji Tenaga Bantu Daerah	Orang	9	9			
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						
				Bukti pembayaran honorarium pengelola keuangan	Orang Bulan	12	12			
				Bukti Pembayaran Honorarium pengelola barang 5 Orang Bulan	Orang Bulan	5	5			
				Koordinasi dan Penyusunan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan					
				Deviasi Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 9 program 26 kegiatan dalam laporan keuangan SKPD	%	5	5			
				Penyediaan Komponen Bangunan Kantor	Instalasi Listrik/Penerangan					

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Komponen instalasi listrik/penerangan	jenis	15	15			maupun fase pembinaan. IKM yang telah mengikuti pelatihan, memiliki kesempatan untuk mengikuti pembinaan fase selanjutnya seperti fasilitasi peralatan, fasilitasi sertifikasi HKI, dan fasilitasi pemasaran. 3) Pemda DIY selalu berusaha meningkatkan manajemen IKM. Hal ini dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan. Berbagai cabang manajemen menjadi materi pelatihan dan pendampingan ini, diantaranya manajemen produksi, manajemen pemasaran, dan manajemen usaha IKM. 4) Penumbuhan kerja sama IKM dengan industri besar dilakukan melalui temu bisnis. 5) Pemda DIY selalu membuka ruang kerja sama dengan berbagai kampus dalam rangka fasilitasi peningkatan teknologi kepada pelaku IKM
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
				Pengisian tabung pemadam kebakaran	tabung	12	12			
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
				Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	jenis	28	28			
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						
				Penggandaan	lembar	120000	120000			
				Barang cetakan	jenis	15	15			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
				Surat Kabar	jenis	2	2			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
				Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Bulan	12	12			
				Makan dan minum sidang	OS	5779	3458			
				Perjalanan Dinas Luar Daerah	Bulan	12	12			
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						
				Bukti pembayaran jasa pengelolaan arsip	Bulan	12	12			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
				Pengadaan Komputer	jenis	2	2			
				Pengadaan Peralatan	jenis	3	3			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
				Pengadaan Perlengkapan	jenis	2	2			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
				Surat Masuk	Surat	3000	2102			
				Alat Tulis Kantor	jenis	62	62			
				Surat Keluar	Surat	8000	8315			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
				Pembayaran rekening listrik	tagihan	12	12			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pembayaran tagihan rekening telepon	Bulan	12	12			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
				Bukti pembayaran jasa keamanan kantor	Bulan	12	12			
				Kebersihan gedung kantor	Bulan	12	12			
				Bukti pembayaran retribusi sampah	Bulan	12	12			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
				Bukti pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas jabatan	Unit	1	1			
				Kendaraan dinas/operasional terpelihara sesuai RKP BMD	Unit	1	1			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
				Bukti pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 4 dan roda 2 tepat waktu	Unit	17	17			
				Kendaraan dinas/operasional terpelihara sesuai RKP BMD	jenis	2	2			
				Pemeliharaan Mebel						
				Mebeleur terpelihara	jenis	1	1			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
				Peralatan gedung kantor terpelihara	jenis	8	6			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
				Bangunan gedung dan tempat kerja terpelihara	jenis	3	2			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
				Perlengkapan gedung kantor terpelihara	jenis	6	6			
				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Jumlah HAKI yang terdaftar	Unit	150	272			
				jumlah produk Alat Teknologi Tepat Guna (ATG) yang dimanfaatkan	ATG	27	39			
				Nilai Produksi IKM	Juta rupiah	6444746	13503514			
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri						
				Jumlah pelaku usaha sektor industri dan perdaganganyang berkonsultasi	Orang	90	90			
				Laporan hasil Kajian Sentra Destinasi Oleh - Oleh dan Souvenir Wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta	Laporan	1	1			
				Jumlah peserta Sosialisasi HKI dan sertifikasi pendaftaran merk (16 akt x 25 orang)	Orang	400	400			
				Jumlah peserta Pelatihan IKM Pemula Limbah Bambu,IKM Pemula Limbah Kayu, Mebel Kayu, Mebel Bambu,IKM Pemula Olahan Umbi Umbian, IKM Pemula Olahan Roti, IKM Pemula Olahan Ikan yang meningkat keterampilannya (8 akt x 20 orang)	Orang	160	160			
				Jumlah peserta Pendampingan IKM Animasi di Kab.Sleman yang mengaplikasikan materi sesuai pelatihan	Orang	20	20			
				Jumlah peserta Pelatihan IKM Agro yang meningkat	Orang	1220	1220			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				keterampilannya (61 akt x 20 orang)						
				Jumlah peserta Pendampingan IKM Garam	Kelompok	2	2			
				Jumlah peserta Pelatihan IKM Pande Besi di Kabupaten Bantul yang meningkat keterampilannya (1akt x 20 orang)	Orang	20	20			
				Jumlah peserta Pendampingan IKM Sandang di Kab.Bantul yang mengaplikasikan materi sesuai pelatihan	IKM	30	30			
				Jumlah peserta Pelatihan IKM Animasi di Kab. Sleman yang meningkat keterampilannya	IKM	20	20			
				Jumlah peserta Sosialisasi Perda dan Pergub RPI yang meningkat pemahamannya (16 akt x 25 orang)	Orang	400	400			
				Jumlah peserta Pelatihan IKM Logam, Sandang, dan Aneka yang meningkat keterampilannya (38 akt x 20orang)	Orang	760	760			
				Jumlah peserta Pelatihan IKM Pakaian Jadi, kulit,kerajinan di Kab. Bantul, Kota Yogyakarta dan Gunungkidul yang meningkat keterampilannya (3 aktx 20 orang)	Orang	60	60			
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta Masyarakat						

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Jumlah IKM Agro peserta temu kemitraan yang bermitra dengan toko/retail	IKM	40	40			
				Peningkatan Omzet IKM setelah Test Pasar dengan komoditas Agro semula Rp. 220,8 Juta menjadi Rp.230,8 Juta	Juta Rupiah	10	10			
				Jumlah desain/rancangan produk baru (perangkat lunak/aplikasi) dari lomba	Aplikasi	6	5			
				Sosialisasi HKI	Kali	4	0			
				Jumlah pelaku usaha sektor industri dan perdagangan yang mendapat sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (Merk sebanyak 90 IKM dan Co Branding sebanyak 30 IKM)	IKM	120	110			
				Jumlah Produk IKM yang tersertifikasi halal	IKM	30	30			
				Operasional Dekranas	Tahun	1	1			
				Peningkatan Omzet IKM setelah Test Pasar dengan komoditas: Komponen Otomotif, alat rumah tangga, produk kulit dan Fashion semula Rp. 1.050 Juta menjadi Rp. 1.175 Juta)	Juta Rupiah	125	0			
				PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI						
				Peningkatan pengetahuan peserta sosialisasi SIINAS	Orang	400	525			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi						

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Jumlah peserta Sosialisasi SIINAS yang meningkat pemahamannya	Orang	400	525			

h. Urusan Ketrasmigrasian

1) *Kondisi Umum*

Perubahan paradigma dalam pembangunan transmigrasi merupakan adaptasi untuk menyesuaikan perkembangan, yaitu adanya revitalisasi kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru menuju transmigrasi di era digital 4.0. Revitalisasi kawasan transmigrasi ini selain untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran, juga harus berdampak positif untuk wilayah sekitar kawasan transmigrasi. Perubahan paradigma ini harus dibarengi dengan penyiapan calon transmigran yang lebih berkualitas dengan dibekali pelatihan berbasis kompetensi. Harapannya calon transmigran mampu membangun kawasan transmigrasi menjadi daerah yang lebih produktif, berdaya saing, maju dan menjadi lumbung-lumbung pangan guna menyelesaikan Program Ketahanan Pangan Nasional (*Food Estate*).

Tabel di bawah ini menggambarkan jumlah pemberangkatan transmigran ke luar Pulau Jawa selama lima tahun terakhir.

Tabel 3.168. Jumlah Pemberangkatan Transmigran ke Luar Jawa dari DIY tahun 2017-2021

No	Tahun	Jumlah (KK)
1	2017	48
2	2018	36
3	2019	50
4	2020	0
5	2021	10

Sumber: *Disnakertrans DIY, 2022*

Seperti pada tabel di atas, pengiriman transmigran pada kurun waktu 2017 sampai dengan 2019 cenderung fluktuatif. Pengiriman tahun 2018 mengalami penurunan jika dibanding tahun 2017 dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan, hal ini dikarenakan kebijakan penempatan transmigran menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Demikian juga untuk tahun 2020, kebijakan Pemerintah Pusat menghentikan sementara penempatan

transmigran dampak dari pandemi COVID-19. Pada tahun 2021 penempatan transmigran dibuka kembali dan Pemda DIY memberangkatkan/menempatkan sebanyak 10 KK. Sehingga selama kurun waktu 2017 – 2021 Pemda DIY telah memberangkatkan transmigran sebanyak 144 KK.

RPJMD Tahun 2017-2022 mengamanatkan Urusan Ketransmigrasian untuk mendukung sasaran Terwujudnya kesempatan kerja. Strategi perluasan kesempatan kerja dilakukan melalui peningkatan kualitas penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja, dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan transmigrasi. Strategi ini mampu merealisasikan indikator Jumlah kesempatan kerja pada tahun 2021 sebesar 2.228.523 orang atau dengan persentase capaian 105,88%.

Tabel 3.169. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Ketransmigrasian Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Jumlah kesempatan kerja	orang	2.126.316	2.104.824	2.228.523	105,88	2.149.001	103,70

Sumber: Disnakertrans DIY, 2022

Jumlah kesempatan kerja adalah jumlah angkatan kerja yang bekerja. Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan oleh BPS pada Agustus 2021 Jumlah kesempatan kerja terealisasi sebanyak 2.228.523 orang atau tercapai 105,88% dibanding target 2.104.824 orang. Ketercapaian Jumlah kesempatan kerja ini didukung oleh strategi perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja yang mampu mengatasi permasalahan menurunnya kesempatan kerja di sektor formal. Tenaga kerja terdampak COVID-19 dan angkatan kerja baru yang tertahan, mendapatkan pembekalan keterampilan sehingga mampu bekerja di sektor informal/berwirausaha. Sedangkan pelaksanaan strategi peningkatan kualitas penyelenggaraan transmigrasi telah

menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat yaitu membekali keterampilan calon transmigran melalui pelatihan berbasis kompetensi.

2) *Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2021*

Pada tahun 2021, Urusan Ketransmigrasian masuk dalam Program Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi dengan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp4.385.272.000,00 untuk melaksanakan 2 (dua) program dan 6 (enam) sub kegiatan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp3.709.145.900,00 (84,58%) dikarenakan adanya efisiensi anggaran dan sisa pengadaan barang/jasa. Sedangkan realisasi fisik program tersebut dapat tercapai sebesar 100%. Dari anggaran sebesar Rp4.385.272.000,00, yang dialokasikan untuk kegiatan transmigrasi adalah sebesar Rp445.231.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp376.317.300,00 (84,52%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Berikut tabel rincian capaian program dan sub kegiatan di tahun 2021.

Tabel 3.170. Capaian Program dan Sub Kegiatan Urusan Ketransmigrasian Tahun 2021

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1. Terwujudnya Kesempatan Kerja	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI				Rendahnya kualitas pendidikan dan ketidaksesuaian antara pendidikan dengan pekerjaan (<i>link and match</i>)	Meningkatkan kualitas dan memperluas bidang pelatihan sesuai kebutuhan pasar kerja dan memperbanyak pelatihan berbasis masyarakat untuk mendorong angkatan kerja bekerja di sektor informal karena kesempatan kerja di sisi deman driven yang bermuara pada sektor formal sangat terdampak pandemi COVID-19	a. Urusan Tenaga Kerja 1. Permasalahan ketenagakerjaan adalah multidimensional, sehingga penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) akan diintervensi secara multi sektor. Dengan dibentuknya Komite Vokasi dan Produktivitas Daerah (KVPD) melalui Surat Keputusan Gubernur No. 30/TIM/2021, pada tahun 2021 dalam proses menyusun link and match dari strategi/rencana aksi baik dari rumpun vokasi maupun rumpun produktivitas yang akan dilakukan oleh OPD-OPD
			2. Terwujudnya hubungan industrial yang kondusif untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan pekerja	Jumlah penempatan tenaga kerja, perluasan kerja dan penempatan transmigrasi	orang	10915	13755	Banyak perusahaan yang mengurangi aktivitas usaha karena kebijakan pemerintah di masa pandemi COVID-19	Memberikan program-program kegiatan untuk meringankan beban angkatan kerja terdampak COVID-19 melalui pemberian kerja cepat, pemberian ketrampilan tambahan agar dapat bekerja kembali baik di sektor formal maupun informal	pembina sektor, dunia usaha dan lembaga pendidikan tinggi. 2. Untuk menjawab bahwa semestinya angkatan kerja DIY punya kualitas yang bisa bersaing dengan daerah lain serta angkatan kerja DIY tidak berminat untuk kerja diluar DIY, telah dan akan dilakukan langkah-langkah sbb : a. Pada tahun 2021 disusun Grand Desain Pembangunan Karakter Angkatan kerja Istimewa dan Pedoman pelaksanaan sosialisasinya. b. Dimulai pada TW III tahun 2021 akan dilakukan sosialisasi pembangunan karakter angkatan kerja istimewa. c. Sosialisasi Pembangunan Karakter Angkatan kerja Istimewa akan dilakukan secara berkelanjutan pada tahun-tahun selanjutnya. 3. Terobosan untuk mengurangi dan mengantisipasi dampak COVID-19 sektor ketenagakerjaan : a. Peningkatan kualitas SDM melalui Pelatihan
			3. Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Penyelenggaraan Transmigrasi PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Jumlah penempatan tenaga kerja, perluasan kerja	KK	10	10	Meningkatnya tenaga kerja terdampak covid-19 baik dirumahkan maupun di PHK	Mengoptimalkan pengawasan dan penyelesaian kasus ketenagakerjaan, penyelesaian kasus hubungan industrial dan mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja dengan bekerja sama dengan Dinkop UKM	
				Jumlah penempatan tenaga kerja, perluasan kerja	orang	10915	13755			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				dan penempatan transmigrasi						Keterampilan (<i>Upskilling & Reskilling</i>), pemagangan dan sertifikasi kompetensi, agar Angkatan Kerja memiliki kesempatan yang lebih besar untuk masuk ke pasar kerja formal b. Mengefektifkan perantara kerja untuk mempertemukan pemberi kerja dan pencari kerja, melalui informasi pasar kerja, <i>Job Fair</i> yang dilakukan secara tatap muka dan menggunakan teknologi informasi. c. Perluasan kesempatan kerja dengan Pembentukan Kewirausahaan melalui pembentukan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dan <i>Mobile Training Unit</i> (MTU) dengan kejuruan-kejuruan yang disesuaikan trend saat ini misal design grafis, <i>digital merchandise</i> , <i>digital marketing</i> d. Optimalisasi sosialisasi dan pendampingan pendaftaran dan pelatihan Kartu Prakerja. e. Pemberian Kerja Cepat melalui Padat Karya
				Jumlah penempatan tenaga kerja, perluasan kerja dan penempatan transmigrasi	orang	10915	13755			
				Perluasan Kesempatan Kerja						
				Pembekalan kewirausahaan Tenaga Kerja Mandiri	orang	300	300			
				Padat Karya Infrastruktur	lokasi	110	110			
				Pembekalan Kewirausahaan bagi angkatan kerjakhusus	orang	40	40			
				Pengawasan dan Pengendalian LPTKS						
				Sosialisasi bagi perusahaan pengguna TKA dan penyandang disabilitas	Perusahaan	100	100			
				Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online						
				Pemutakhiran updating Informasi pasar kerja	Bulan	12	12			
				Job Fair/Bursa Kerja						
				Penyelenggaraan bursa kerja	kali	0	0			
				Bimtek Petugas Bursa Kerja	orang	130	130			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)						2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 15 Tahun 1997 tentang ketrasmigrasian dan Permenakertrans RI nomor PER.15/MEN/VI/2007, transmigran berhak atas Lahan Pekarangan dan Lahan Usaha dengan Sertifikat Hak Milik. 2. Pada tahun 2021 akan dilakukan penempatan transmigran sebanyak 65 KK. Untuk meminimalisir dampak pandemi COVID-19, pada saat pelatihan dan penampungan akan dilakukan tes Genose dan pada saat pemberangkatan dilakukan Rapid Antigen. 3. Untuk memacu antara kesempatan kerja dan peningkatan kualitas ketrampilan akan dilakukan : a. Peningkatan ketrampilan melalui pelatihan, pemagangan dan sertifikasi kompetensi. b. Mengefektifkan perantara kerja untuk mendorong terjadinya penempatan tenaga kerja Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN). c. Mengupayakan hubungan industrial yang kondusif, hal ini akan memberikan dampak positif terhadap penambahan kesempatan kerja.
				Pembinaan	Lembaga	10	10			
				Pencegahan PMI Unprosedural						

3. PENUNJANG URUSAN

a. Perencanaan Pembangunan

1) *Kondisi Umum*

Berdasarkan RPJMD 2017-2022, sasaran penunjang urusan perencanaan pembangunan yaitu “Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas”. Capaian keberhasilan kinerja sasaran tersebut diukur dengan indikator kinerja sasaran yaitu persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah, dengan target kinerja sasaran yang ditetapkan pada tahun 2021 sebesar 85%. Capaian kinerja sasaran tahun 2021 disajikan pada table berikut :

Tabel 3.171. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah	%	79,39	85	80	94,12	85,50	93,57

Sumber: Bappeda DIY, 2022

Kinerja sasaran penunjang urusan perencanaan pembangunan Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas dengan indikator persentase ketercapaian sasaran pembangunan dihitung dari jumlah indikator sasaran perangkat daerah yang tercapai dibagi indikator sasaran RPJMD dikalikan 100%. Pada tahun 2021, dari 80 indikator sasaran Perangkat Daerah, sasaran yang mencapai target sebanyak 64 indikator, sehingga dari target indikator sasaran sebesar 85%, terealisasi sebesar 80%, atau persentase ketercapaian sasaran sebesar 94,12%. Hal ini disebabkan masih adanya pandemi COVID-19, yang masih berdampak pada capaian sasaran perangkat daerah, yang

mengakibatkan kinerja sasaran penunjang urusan perencanaan juga tidak tercapai.

2) *Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2021*

Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan dengan sasaran Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas, pada tahun 2021 dilaksanakan melalui 3 Program, 10 kegiatan dan 27 sub kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp20.019.741.309,00. Realisasi anggaran sebesar Rp18.901.033.303,00 atau 94,41%, sedangkan kinerja fisik mencapai 100%. Rincian capaian kinerja program dan sub kegiatan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.172. Capaian Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2021

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PERENCANAAN	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1. Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda, baik Ketersediaan data dan informasi, ketersediaan sistem aplikasi dalam rangka proses penyusunan perencanaan dan anggaran (jogjaplan) dan Monev (Sungguh) serta office management, maupun ketersediaan informasi untuk publik melalui media web bappeda	PROGRAM PENUNJANG URUSAN DAERAH PROVINSI Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	persen	100	100	1. Kondisi sosial, politik dan karakter SDM yang berbeda sehingga proses sinkronisasi terhadap perencanaan pembangunan menjadi sangat kompleks; 2. Proses pengendalian pembangunan adalah sebuah proses yang kompleks (bagaimana desain prosesnya, desain kertas kerja sebagai tool untuk mengukur atau menilai sustansi pengendalian,	1. Untuk sasaran Renstra periode selanjutnya (Renstra Tahun 2022-2027) perumusannya agar tidak tergantung pada capaian kinerja Perangkat Daerah ; 2. Melakukan koordinasi internal dengan melibatkan semua komponen SDM Bappeda DIY dalam menyusun perencanaan dan penetapan kinerja tahunan; 3. Mengusahakan untuk menyesuaikan pedoman penyusunan penetapan kinerja yang dijabarkan ke; dalam triwulan jika memungkinkan	I. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Dalam Perubahan APBD 1. (tidak perlu ditanggapi karena sudah sesuai) 2. Pemda DIY akan terus berupaya mengatasi COVID-19 dengan terus fokus meningkatkan pelaksanaan vaksinasi dan melakukan kerja sama melalui forum sosialisasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan awareness COVID-19. Upaya vaksinasi telah dilakukan secara intensif dan akan ditingkatkan pada 2021 direncanakan booster pada tahun 2022 untuk meningkatkan imunitas warga DIY. Kajian terkait Covid juga sedang dilakukan dengan pendekatan Germas, sehingga didapatkan rekomendasi akademisi terkait metode mengatasi COVID-19. Untuk pendataan warga miskin, melalui OPD bidang Sosial jg akan dilakukan pengamatan ulang terhadap data kemiskinan DTKS dengan aplikasi khusus yang akan menjadi metode filter

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Renja Perangkat Daerah 2022	dokumen	1	1	penjunjang) sehingga hasil pengendalian tidak sulit sekali untuk mencerminkan informasi yang ideal		terhadap data sehingga lebih sesuai dengan kondisi riil.
			3.Meningkatkan kerja sama dengan akademisi sebagai tenaga ahli/konsultan guna meningkatkan kualitas perencanaan dan movev pembangunan	RKA-P 2021 Forum Perangkat Daerah	dokumen dokumen	1 1	1 1	3. Adanya pandemi covid -19 yang terutama berdampak pada pelaksanaan program dan	4. Menyajikan pelaporan kinerja secara lengkap sesuai dengan pedoman yang berlaku (informasi terkait dengan capaian kinerja);	Dalam upaya memutus rantai penyebaran COVID-19, Dinas Kesehatan DIY melaksanakan koordinasi dengan BPBD di dalam tugas penangan COVID-19 di DIY.
			4. Meningkatkan kapasitas perencanaan dalam. pengembangan tools atau instrument untuk melakukan pemantauan dan evaluasi	Pengembangan sistem informasi internal Renja Perangkat Daerah Perubahan 2021	dokumen dokumen	1 1	1 1		5. Meningkatkan evaluasi internal Bappeda DIY secara rutin	Koordinasi juga dilakukan secara rutin dengan DinasKesehatan Kabupaten/ Kota di DIY dan dengan Pemerintah Pusat (Kementerian Kesehatan). Hal yang dikoordinasikan meliputi update data kasus COVID-19 di DIY, evaluasi penerapan protokol kesehatan dan 3T (testing, tracing, treatment), strategi penanganan COVID-19, serta pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di DIY.
			5.Meningkatkan kualitas dan efektivitas proses bisnis perencanaan pembangunan dengan memperkuat SOP Perencanaan serta mempertajam perumusan indikator pembangunan	RKA 2022 ROPK Perangkat Daerah Perubahan 2021 ROPK Perangkat Daerah 2021 DPA-P 2021	dokumen dokumen dokumen dokumen	1 1 1 1	1 1 1 1			Pada triwulan I dan awal triwulan II tahun 2021, Pemda DIY melalui Dinas Kesehatan DIY telah dilaksanakan vaksinasi massal tahap 1 dan 2 dengan sasaran petugas publik, guru, lansia, pelaku UKM, dan pekerja perfilman. Selain dilaksanakan oleh Pemda DIY, pelaksanaan vaksinasi
			6.Meningkatkan kualitas dan efektivitas	DPA 2022	dokumen	1	1	4. Adanya perubahan asumsi makro ekonomi		

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			proses bisnis monev serta kontrol terhadap capaian indikator pembangunan,					yang telah disepakati pada APBD Tahun 2021 terhadap kemampuan fiskal daerah		massal juga dilaksanakan oleh kabupaten/ kota di DIY. Pemda DIY bekerjasama dengan pemerintah pusat (Kementerian Kesehatan RI) dalam pemenuhan SDM kesehatan terkait penanganan COVID-19 di DIY
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5. Adanya perubahan kebijakan perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90		Sharing Pemda DIY untuk pemenuhan akomodasi, transportasi, dan konsumsi. Upaya-upaya promotif juga dilakukan untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat tentang COVID-19 dan PHBS
			7.Meningkatkan intensitas koordinasi dengan forum CSR dalam mendukung pembiayaan pembangunan	LKJIP Perangkat Daerah Tahun 2020	dokumen	1	1			
			8. Membangun link antar sistem informasi yang ada di internal Bappeda DIY dan dengan sistem informasi di luar Bappeda DIY yang terkait	Bahan LKJ dan LKPJ Perangkat Daerah Tahun 2020	dokumen	2	2			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
				Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev)	dokumen	12	12			
				Bappeda bulanan						
				Dokumen Laporan Monev Bappeda Tahunan	dokumen	1	1			
			9. Menjamin infrastruktur jaringan dan komputer berjalan optimal dan termaintain secara berkelanjutan	Dokumen Laporan Timbal Balik Triwulan I-IV	dokumen	4	4	Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98		Pandemi ini telah memunculkan juga inovasi strategi komunikasi yang lebih baik berbasis teknologi sehingga edukasi kepada masyarakat terkait kebersihan dan kesehatan diri dann lingkungan dapat dilakukan secara efektif dan efisien melalui upaya peningkatan literasi untuk perbaikan perilaku. Menggalakkan gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) dengan menekankan pada upaya perubahan gaya hidup sehat
			10. Menyempurnakan mekanisme forum trilateral desk dengan kabupaten/kota yang menghasilkan perencanaan program tematik/ program strategis bersama yang konsisten dan terukur	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah, yang menyebabkan perlunya dilakukan penyesuaian di daerah		
				Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Bappeda DIY	bulan	12	12			
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				6. Belum optimalnya penyajian data statistik daerah yang terdiri dari		
				Terlaksananya pengelolaan barang	bulan	12	12			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Terlaksananya pengelolaan keuangan	bulan	12	12	data geospasial dan non geospasial sebagai input perencanaan pembangunan		di masyarakat melalui sebuah gerakan yang bertujuan untuk memasyarakatkan budaya hidup sehat serta meninggalkan kebiasaan dan perilaku masyarakat yang kurang sehat.
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD						Penerapan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19 dengan salah satunya melakukan sosialisasi gerakan 3M yaitu mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Selain itu terbentuknya Forum Sosialisasi Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan guna mengintegrasikan pesan-pesan mengenai COVID-19 yang akan disampaikan pada masyarakat, sehingga sumber daya yang digunakan menjadi lebih efisien dan terjangkau penyebaran informasinya menjadi lebih luas. Telesurvey tanggapan masyarakat terhadap COVID-19 juga merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana sikap dan harapan masyarakat dalam penanganan COVID-19.
				Laporan Keuangan Semester	dokumen	2	2			
				Laporan Keuangan bulanan	dokumen	12	12			
				Laporan Keuangan Tahunan Gabungan Audited	dokumen	1	1	7. Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan untuk perumusan kebijakan perencanaan pembangunan		
				Laporan Keuangan Tahunan Gabungan	dokumen	1	1			
			11. Meningkatkan sistem aplikasi yang dimiliki mampu menampilkan informasi secara akurat guna memperkuat proses perencanaan berbasis bukti dan data	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pengadaan printer	unit	7	7	8. Capaian Kinerja Bappeda sangat dipengaruhi oleh capaian kinerja Perangkat Daerah		
			12. Pengembangan sistem aplikasi yang dimiliki (Jogjaplan, Monev Sengguh, SINTAL, JOGJA DATAKU, dll) sesuai dengan kebutuhan.	Pengadaan rak arsip Pengadaan komputer PC Pengadaan Komputer Tablet Pengadaan mesin faksimili Pengadaan LCD/Viewer Pengadaan komputer notebook	unit unit unit unit unit unit	10 6 1 1 1 5	10 6 1 1 1 5			
			13. Menyempurnakan mekanisme forum trilateral desk dengan kabupaten/kota yang menghasilkan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan hasil koordinasi dan konsultasi luar Daerah (Jawa) Laporan hasil koordinasi dan konsultasi dalam Daerah	bulan bulan	12 12	12 12			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			perencanaan program tematik /program strategis bersama yang konsisten dan terukur	<p>Fasilitasi kegiatan pejabat fungsional tertentu : Penerbitan Journal</p> <p>Tersedianya makan dan minuman rapat</p> <p>Laporan hasil koordinasi dan konsultasi luar Daerah (Luar Jawa)</p> <p>Fasilitasi kegiatan pejabat fungsional tertentu :- Pelaksanaan workshop/ rapat kerja</p> <p>Fasilitasi kegiatan pejabat fungsional tertentu : Penilaian Angka Kredit</p> <p>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>Penyediaan Jasa surat menyurat : Surat masuk</p> <p>Penyediaan Jasa surat menyurat : Surat keluar</p> <p>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan:</p> <p>Penggandaan suratsurat/dokumen lainnya</p> <p>Tersedianya akun zoom meeting (8 akun)</p> <p>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor</p> <p>Pengelolaan Arsip Dinamis SKPD: Penilaian dan Penyusutan Arsip</p> <p>Tersedianya jasa keamanan</p> <p>Pembayaran tagihan rekening telepon</p>	<p>kali</p> <p>orang/kali</p> <p>bulan</p> <p>kali</p> <p>kali</p> <p>surat</p> <p>surat</p> <p>lembar</p> <p>bulan</p> <p>jenis</p> <p>boks</p> <p>paket</p> <p>bulan</p>	<p>1</p> <p>2.520</p> <p>12</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>5.500</p> <p>5.000</p> <p>32.000</p> <p>10</p> <p>7</p> <p>150</p> <p>1</p> <p>12</p>	<p>1</p> <p>2.520</p> <p>12</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>4.658</p> <p>8.658</p> <p>31.946</p> <p>10</p> <p>7</p> <p>150</p> <p>1</p> <p>12</p>			<p>Pemahaman masyarakat terhadap protokol kesehatan COVID-19 sudah cukup baik, 93,36% responden selalu menggunakan masker, 80,43% responden selalu cuci tangan pakai sabun, 66,52% responden tidak berkerumun.</p> <p>Selanjutnya melakukan sinkronisasi tematik pembangunan DIY tahun 2022 tentang “Tindak Lanjut/Antisipasi Pembangunan Kesehatan dan Sosial Masyarakat Dampak Pandemi COVID-19” antara Pemda DIY dengan kabupaten/kota di DIY. Dukungan kabupaten/kota terkait tematik tersebut antara lain: vaksinasi, insentif nakes, penyediaan shelter, penyediaan BMHP, pendampingan dan permukiman di Desa Siaga Bencana</p> <p>3. Meskipun secara tahunan perekonomian DIY mengalami kontraksi hingga negatif 2,6 persen, namun data menunjukkan ekonomi DIY menunjukkan ke arah perbaikan.</p>

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pengelolaan Arsip Dinamis SKPD : Penataan Arsip	boks	150	150			<p>Triwulan 1/2021 ekonomi DIY tumbuh positif, 6,14 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk mendorong pemulihan ekonomi, belanja pemerintah difokuskan untuk kegiatan yang bisa memberikan stimulus pada perekonomian lokal. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah melibatkan lebih banyak lagi pelaku UMKM dalam proses pengadaan barang/jasa untuk kegiatan pemerintah daerah. Melalui belanja pada UMKM, diharapkan perputaran ekonomi dapat dinikmati oleh masyarakat lokal. Selain itu, promosi terhadap produk lokal juga dilakukan agar pembelanjaan masyarakat di DIY pada produk-produk ini bisa meningkat mengingat persentase terbesar ditopang oleh komponen konsumsi rumah tangga.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) Permendagri Nomor 20 Tahun 2020, Belanja Tidak Terduga yang tidak mencukupi untuk penanganan Covid - 19 dapat</p>
				Penyediaan peralatan rumah tangga dan bahan pembersih	jenis	17	17			
				Surat kabar	Jenis	4	4			
				Penyediaan Jasa surat menyurat : benda pos (materai)	buah	500	500			
				Penyediaan Jasa surat menyurat : Pengiriman dokumen	kali	100	80			
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan: Barang cetakan	jenis	7	7			
				Penyediaan Alat Tulis Kantor: Alat tulis kantor	jenis	49	49			
				Penyediaan Jasa Kebersihan kantor: Pembersihan kantor Bappeda DIY	bulan	12	12			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional: Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional roda 4	unit	11	11			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
				Kendaraan dinas/operasional terpelihara : 1. Kendaraan dinas roda 4	unit	11	11			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
				Pemeliharaan Filling cabinet	buah	6	6			
				Pemeliharaan AC floor standing	unit	4	4			
				Pemeliharaan Printer	unit	8	8			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pemeliharaan Tabung pemadam kebakaran	buah	6	6			<p>dicukupi dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun perekonomian di DIY anggaran berjalan. Menindaklanjuti permendagri tersebut, hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan dilakukan pergeseran ke anggaran Belanja Tidak Terduga yang digunakan untuk penanganan COVID-19. Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2020, untuk Penanganan Kesehatan, Penanganan Dampak Ekonomi dan Penyediaan Jaring Pengamanan Sosial/ Social Safety Net.</p> <p>Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui keistimewaan DIY, salah satu program terobosan pemberdayaan dan peningkatan perekonomian masyarakat di kalurahan, pada tahun 2021 dilaksanakan BKK kalurahan yang mendukung program prioritas gubernur salah satunya Desa Mandiri Budaya.</p>
				Pemeliharaan Sound system	unit	1	1			
				Pemeliharaan Almari	buah	6	6			
				Pemeliharaan Faksimile	unit	2	1			
				Pemeliharaan Generator set	unit	1	1			
				Pemeliharaan LCD proyektor	unit	4	4			
				Pemeliharaan meja kerja	unit	9	9			
				Pemeliharaan kursi kerja	unit	10	10			
				Pemeliharaan Jaringan komputer & internet	paket	1	1			
				Pemeliharaan Komputer PC	unit	30	30			
				Pemeliharaan Meja kursi tamu	set	1	1			
				Pemeliharaan CCTV	unit	1	1			
				Pemeliharaan Komputer note book	unit	5	5			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<p>Sepuluh Desa mandiri budaya yang disasar pada tahun 2021 ini memiliki potensi dan karakteristik masing masing, yakni 3 desa budaya, 3 desa wisata, 3 desa preneur dan 1 desa prima. Kedepan harapannya akan semakin banyak kalurahan di DIY yang mampu melihat dan mengembangkan potensi-potensi perekonomian di wilayahnya masing masing dan bisa didukung melalui kegiatan desa mandiri budaya, desa maritim, desa rintisan mandiri budaya . serta predikat kalurahan lainnya yang tujuan akhirnya mewujudkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat. Desa mandiri budaya merupakan pembangunan yang berpusat pada pemberdayaan desa secara terpadu, lintas sektoral, lintas pemangku kepentingan.</p> <p>Desa mandiri budaya merupakan perpaduan antara pelestarian budaya, pengembangan wisata, peningkatan peran serta perempuan dalam perekonomian serta pengembangan wirausaha masyarakat desa.</p>

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<p>4. Pemda DIY selalu mendorong peran masyarakat dan swasta dalam pembangunan di DIY. Salah satu kebijakan pembangunan di DIY adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui program-program pemberdayaan masyarakat.</p> <p>Program-program pemberdayaan masyarakat tersebut, akan memicu terjadinya proses penumbuhan dan perkembangan kekuatan masyarakat untuk ikut terlibat dalam berbagai aspek pembangunan. Peran aktif masyarakat diharapkan mampu untuk mengatasi permasalahan pembangunan serta mampu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, sehingga kebijakan diarahkan untuk memberikan dorongan, peluang, kesempatan, dan perlindungan agar masyarakat dalam berbagai aspek dapat meningkatkan kemampuan dan mengaktualisasikan diri atau berpartisipasi melalui berbagai aktivitas dan</p>

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pemeliharaan AC split	unit	35	35			dengan desain program/kegiatan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat.
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						II. Kolaborasi Pemerintah Daerah DIY dengan Badan Usaha Swasta telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah No .6 Tahun 2016 tentang Penyelenggraan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TSLP) dimana perusahaan yang berbadan hukum memiliki tanggungjawab sosial lingkungan. Dari amanat Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur No. 23 tahun 2018 tentang pembentukan TSLP, terbentuk Forum TSLP DIY/CSR Center DIY pertama yang dilantik pada tahun 2018.
				Gedung kantor terpelihara	unit	2	2			III. Forum TSLP/CSR Center bertujuan untuk mewadahi kolaborasi antara swasta (korprasi di DIY) dengan Pemda DIY dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam men merupakan salah satu sumber dana yang bersifat panjang sehingga dapat membantu ingkatakan ekonomi atau peningkatan
				PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						
				Persentase perencanaan yang berkualitas	%	100	100			
				Persentase perencanaan yang tepat waktu sesuai peraturan perundang an yang berlaku	%	100	100			
				Persentase capaian kegiatan SKPD	%	91	98.9			
				Persentase evaluasi hasil dokumen perencanaan tepat waktu sesuai regulasi yang berlaku	%	100	100			
				Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD						
				Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Tahun 2022 yang berisi mengenai ProgramPrioritas/tematik, lintas sektoral, lintas kewilayahan dan pusat daerah	dokumen	1	1			
				Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Tahun 2023 yang berisi mengenai Program Prioritas/tematik, lintas sektoral, lintas kewilayahan dan pusat daerah	dokumen	1	1			
				Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi						

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Background Study Sebagai Bahan Rancangan Teknokratis RPJMD DIY Tahun 2022-2027: 2. Isu Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan an Jangka Menengah	dokumen	1	1			social. TSLP/CSR Pemda yang memiliki anggaran terbatas tiap tahunnya dalam
				Fasilitasi Penyusunan Renstra	dokumen	1	1			IV. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
				Dokumen RKPD 2022 sbg dasar penyusunan KUA PPA	dokumen	1	1			V. Dalam menjalin kolaborasi yang lebih maksimal maka pada Tahun 2021 ada pembaharuan Peraturan Gubernur dari yang lama ke Peraturan Gubernur No.11 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan pelaksanaan perturan daerah DIY No.6 tahun 2016 tentang penyelenggraan TSLP
				Fasilitasi Penyusunan Renja	dokumen	1	1			Perubahan Peraturan Gubernur ini sebagai petunjuk teknis dalam menjalin kolaborasi yang besinergi antara program kegiatan Pemda DIY dengan Forum TSLP/CSR Center.
				Dokumen RKPDP 2021 sebagai dasar penyusunan KUPA PPASP	dokumen	1	1			VI. Pergub memuat detail sistematika kolaborasi serta tugas dan fungsi Pemda Forum TSLP/CSR Center, agar kedepannya kolaborasi Pemda DIY dan Forum TSLP/CSR Center lebih efektif dan efisien.
				Background Study Sebagai Bahan Rancangan Teknokratis RPJMD DIY Tahun 2022-2027 : 1. Dokumen Kajian Background Study RPJMD DIY 2022-2027	dokumen	1	1			VII. Peran dan kerja sama BUMD terhadap pendapatan daerah pada tahun 2020
				Pengembangan Aplikasi Perencanaan (Jogjaplan)	aplikasi	1	1			
				Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi						
				Laporan Kinerja APBN TW IV Tahun 2020 dan TW I-III 2021	laporan	4	4			
				Penyerahan DIPA APBN Tahun 2022	kegiatan	1	1			
				Sosialisasi Peraturan Gubernur tentang Pengendalian dan Evaluasi	kegiatan	1	1			
				Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah						
				Laporan evaluasi Kebijakan Perencanaan Tahunan	dokumen	1	1			
				Laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan an daerah TW IV/	dokumen	4	4			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Tahun 2020 (1dokumen) dan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah TW I-III 2021 (3dokumen)						memberikan kontribusi positif.
				Laporan evaluasi Hasil RKPDIY : - Semester 2 Tahun 2020 - Semester 1 Tahun 2021	dokumen	2	2			Pandemi COVID-19 berdampak pada seluruh sektor bisnis, namun demikian target pendapatan BUMD DIY dapat terpenuhi.
				Dokumen LKPJ Gubernur Tahun 2020 sesuai dengan PP 13 Tahun 2019	dokumen	1	1			Hal ini menunjukkan kinerja perusahaan BUMD DIY yang cukup stabil dalam menghadapi tantangan pada tahun 2020.
				Laporan evaluasi Hasil Renstra OPD DIY Tahun 2020	dokumen	1	1			Kegiatan investasi memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi DIY.
				Dokumen Evaluasi Hasil RPJPD 2005-2025	dokumen	1	1			Kegiatan investasi yang dilakukan oleh swasta maupun mengalami peningkatan
				Laporan evaluasi Hasil Program Pemda Tahun 2020	dokumen	1	1			Kontribusi PMTB dalam PDRB DIY meningkat dari 30,4% pada tahun 2016 menjadi 35,14% pada tahun 2019. Harus diakui bahwa pandemi COVID-19 membuat kegiatan investasi banyak yang tertunda.
				Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Gubernur Tahun 2021 Sesuai dengan Permenpan No 53 Tahun 2014	dokumen	1	1			Untuk mendorong kemudahan investasi dan berusaha bagi badan usaha maupun masyarakat, Pemda DIY senantiasa meningkatkan pelayanan perijinan dalam PTSP, memberikan pendampingan dan edukasi bagi masyarakat
				Laporan evaluasi hasil RPJMD DIY Tahun 2020	dokumen	1	1			
				Laporan evaluasi Hasil Renja OPD DIY Tahun 2020 dan 2021	dokumen	2	2			
				Update aplikasi Sengguh	aplikasi	1	1			
				Dokumen Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Kab/Kota Tahun 2020	dokumen	1	1			
				Dokumen LKJ Pemda DIY Tahun 2020 Sesuai dengan Permenpan No 53 Tahun 2014	dokumen	1	1			
				Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota						
				Laporan Evaluasi Hasil RKPDIY Kab/Kota	dokumen	2	2			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Laporan Evaluasi Hasil RPJMD Kab/Kota Tahun 2020	dokumen	1	1			mengenai prosedur perijinan berusaha dan melakukan pengawasan dan pemantauan realisasi investasi. Melalui Pergub Rencana Umum Penanaman Modal, arah kebijakan penanaman modal diantaranya adalah sebagai berikut:
				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						a. Perbaikan Iklim Penanaman Modal, masyarakat secara umum
				Persentase ketercapaian program pembangunan an Bidang Pemerintahan	%	91,55	82,4			b. Persebaran Penanaman Modal,
				Persentase ketercapaian program pembangunan an Bidang Sosial Budaya	%	92,41	75,71			c. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi, Kebudayaan dan Pariwisata, Pendidikan, dan Ekonomi Kreatif
				Persentase ketercapaian program pembangunan an Bidang Perekonomian	%	89,13	82,61			d. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment)
				Persentase ketercapaian program pembangunan an Bidang Sarana Prasarana	%	85,71	76,71			e. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						f. Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal; dan
				Dokumen bahan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan an Bidang Pemerintahan Sub Bidang Pemerintahan Umum sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD Tahun 2022, serta Perubahan RKPD Tahun 2021	dokumen	1	1			g. Promosi Penanaman Modal
				Dokumen bahan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan an Bidang Pemerintahan Sub Bidang Administrasi Publik Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD Tahun 2022, serta Perubahan RKPD Tahun 2021	dokumen	1	1			A. Pendapatan dan Belanja Daerah Tindak lanjut yang akan dilakukan:

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Dokumen bahan perencanaan Tahun 2023 Bidang Pemerintahan Subbidang Pemerintahan Umum	dokumen	1	1			<p>1. Terkait penurunan pendapatan di Tahun 2020 merupakan dampak dari pandemi covid-19 yang mengakibatkan perekonomian global mengalami penurunan termasuk Indonesia khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta. Inovasi telah dilakukan dengan memberikan kemudahan pelayanan kepada wajib pajak melalui e-samsat (pembayaran dengan melalui ATM Bank BPD dan pengesahan melalui e-posti), penambahan titik layanan melalui Samsat Desa, pembayaran melalui Gopay, pengembangan pembayaran dengan Bank Nasional selain BPD sesuai Kesepakatan Bersama antara Tim Pembina Samsat DIY dengan PT. Bank Pembangunan Daerah DIY</p> <p>selaku agregator Nomor : KEP/06/2021, Nomor : 973/01530/AP, Nomor: KEP/36/III/2021, Nomor : 0145A/OM/0004. Pelayanan pembayaran pajak daerah selain di kantor Samsat, masih berjalan sampai saat</p>
				Dokumen bahan perencanaan Tahun 2023 Bidang Pemerintahan Subbidang Administrasi Publik	dokumen	1	1			
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan						
				Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Bidang Pemerintahan Sub Bidang Pemerintahan Umum Tahun 2020	dokumen	1	1			
				Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Bidang Pemerintahan Sub Bidang Administrasi Publik Tahun 2020	dokumen	1	1			
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						
				Dokumen bahan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bidang Pembangunan	dokumen	1	1			
				Dokumen bahan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan an Bidang Pembangunan an Manusia Subbidang SDM sebagai bahan masukan Penyusunan RKPD Tahun 2022, serta Perubahan RKPD tahun 2021	dokumen	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Dokumen bahan perencanaan tahun 2023 Bidang Pembangunan Manusia Subbidang SDM	dokumen	1	1			ini. Jumlah pelayanan melalui Samsat Desa saat ini tersebar di 12 kalurahan di seluruh DIY . Namun dikarenakan wabah COVID-19 yang saat ini masih belum mereda, mengakibatkan pendapatan mengalami penurunan, karena. beberapa kali pelayanan ditutup akibatadanya klaster covid di beberapa kalurahan
				Dokumen bahan perencanaan tahun 2023 Bidang Pembangunan Manusia Subbidang Kesejahteraan Rakyat	dokumen	1	1			2.Berkaitan dengan pengembangan berbagai langkah dan tindakan yang dapat dilakukan dalam memperbaiki kinerja usaha BUMD dalam rangka peningkatan penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dengan tindakan-tindakan yang sifatnya strategis yaitu yang dapat dilakukan dengan langkah atau tindakan memperbaiki kinerja perusahaan, diantaranya
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia						Mengatasi kelemahan internal yang diantaranya melalui penetapan kembali Core business, memperbaiki sistem manajemen organisasi; serta melakukan kordinasi intensif dalam
				Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Bidang Pembangunan Manusia Subbidang SDM tahun 2020	dokumen	1	1			
				Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Bidang Pembangunan Manusia Subbidang Kesejahteraan Rakyat tahun 2020	dokumen	1	1			
				Dokumen Monev TPB DIY	dokumen	1	1			
				Dokumen evaluasi Penanggulangan Kemiskinan DIY	dokumen	1	1			
				Pengembangan aplikasi sistem informasi Penanggulangan Kemiskinan	aplikasi	1	1			
				Dokumen Rencana Sinkronisasi Program/ Kegiatan CSR/TSLP dan Pemda	dokumen	1	1			
				Dokumen evaluasi CSR/TSLP	dokumen	1	1			
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD						

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Dokumen Bahan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bidang Perekonomi an Subbidang Pertanian dan Kelautan Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD Tahun 2022, serta Perubahan RKPD Tahun 2021	dokumen	1	1			proses problem solving kendala2 yang dihadapi BUMD.
				Dokumen Bahan Perencanaan Tahun 2023 Bidang Perekonomi an Subbidang Dunia Usaha	dokumen	1	1			3. Pemda memandang penting peran UMKM dalam pembangunan perekonomian daerah. Dalam kerangka pemulihan ekonomi akibat dampak Pandemi, baik pada tahun 2021 maupun rencana tahun 2022, Pemda akan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pemberdayaan UMKM yang mencakup kegiatan pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM dan Usaha, kegiatan pendampingan dan layanan konsultasi bisnis, kegiatan kemitraan UMKM dengan lembaga pembiayaan, kegiatan promosi produk UMKM hingga pada kegiatan pemberian stimulus ongkos kirim. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan dengan dukungan sistem pendataan Koperasi & UMKM yang terintegrasi dalam SIBAKUL.
				Kajian Penyusunan RAD PG DIY	dokumen	1	1			
				Dokumen Bahan Perencanaan Tahun 2023 Bidang Perekonomi an Subbidang Pertanian dan Kelautan	dokumen	1	1			
				Dokumen Bahan Perencanaan dan PengendalianPembangunan Bidang Perekonomi an Subbidang Dunia Usaha Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD Tahun 2022,serta Perubahan RKPD Tahun 2021	dokumen	1	1			II. Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Daerah A . Ketercapaian Indikator Kinerja Utama (Iku) Pemerintah Daerah
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian						
				Dokumen Evaluasi capaian program OPD mitra Bidang Perekonomi an subbidang Dunia Usaha Tahun 2020	dokumen	1	1			
				Dokumen hasil Monev RAD Pangan dan Gizi 2015 - 2019	dokumen	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Dokumen Evaluasi capaian program OPD mitra Bidang Perekonomian subbidang Pertanian dan Kelautan Tahun 2020	dokumen	1	1			Tindak lanjut yang akan dilakukan: 1) Tingkat kemiskinan dan kesenjangan pendapatan serta kesenjangan wilayah masih menjadi isu besar dalam pembangunan di DIY. Capaian dari indikator-indikator tersebut memang belum seperti yang diharapkan. Adapun pertumbuhan ekonomi DIY sebelum tahun 2020 tercatat cukup baik, namun dengan adanya pandemi covid-19 menyebabkan pertumbuhan ekonomi DIY Tahun 2020 tidak mencapai target. Demikian juga dengan beberapa target kinerja yang lain. Pada tahun 2020 telah dirancang program/kegiatan untuk dapat mengatasi permasalahan pembangunan di DIY, namun kemudian harus dilakukan realokasi untuk penanganan pandemi covid-19. Hal ini kemudian berdampak pada pencapaian target kinerja baik kinerja jangka pendek (tahun 2020) maupun target jangka menengah (RPJMD). Beberapa target pembangunan tidak dapat
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPd)						
				Dokumen bahan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bidang Sarana Prasarana Subbidang Perhubungan Infrastruktur Wilayah dan ESDM Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPd Tahun 2022, serta Perubahan RKPd Tahun 2021	dokumen	1	1			
				Dokumen bahan perencanaan 2023 Bidang Sarana Prasarana Subbidang Perhubungan, Infrastruktur Wilayah dan ESDM	dokumen	1	1			
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur						
				Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Bidang Sarana Prasarana Subbidang Perhubungan, Infrastruktur Wilayah dan ESDM Tahun 2020	dokumen	1	1			
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)						

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Dokumen bahan Perencanaan dan Pengendalian 1 dokumen Pembangunan Bidang Sarana Prasarana Subbidang Pertanahan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD Tahun 2022, serta Perubahan RKPD Tahun 2021	dokumen	1	1			dicapai karena sumber daya (input) yang pencapaian target dimaksud kemudian dialihkan untuk penanganan covid-19. seharusnya digunakan untuk Perencanaan pembangunan dalam RKPD tahun 2021 dan 2022 telah merespon hasil evaluasi pencapaian kinerja sampai tahun 2020 tersebut. Selain memprioritaskan terhadap pemulihan dan/atau antisipasi dampak dari pandemi covid-19, Pemda DIY juga memprioritaskan terhadap pencapaian kinerja RPJMD. Hal ini tercermin dalam tema dan prioritas pembangunan pada RKPD Tahun 2021 dan 2022 sebagai berikut: Tema dan Prioritas dalam RKPD Tahun 2021: Tema RKPD DIY Tahun 2021 yaitu; “Penguatan SDM Unggul dan Percepatan Pemulihan Sosial Ekonomi Masyarakat DIY”. Adapun prioritas pembangunan tahun 2021: 1. Pembangunan Manusia unggul 2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan 3. Penguatan Infrastruktur Strategis
				Dokumen bahan perencanaan 2023 Bidang Sarana Prasarana Subbidang Pertanahan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Kehutanan	dokumen	1	1			
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan						
				Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Bidang Sarana Prasarana Subbidang Pertanahan, Tata Ruang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020	dokumen	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<p>4. Pendukung Prioritas Pembangunan Tema dan Prioritas dalam RKPD Tahun 2022: Tema Pembangunan dalam RKPD DIY Tahun 2022 yaitu “Pengembangan SDM Unggul dan Sektor Strategis untuk Pemulihan Sosial Ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta” Adapun fokus tematik tahun 2022 meliputi: (1) Mengatasi ketimpangan wilayah; (2) Mengatasi Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan; dan (3) Tindak Lanjut/Antisipasi Pembangunan Kesehatan dan Sosial Masyarakat Dampak Pandemic COVID-19. Prioritas Pembangunan Tahun 2022: 1. Pemberdayaan SDM yang berkualitas (sehat, berpendidikan, dan mampu secara ekonomi); 2. Peningkatan Infrastruktur layanan dasar yang mendukung pertumbuhan ekonomi; 3. Peningkatan sektor-sektor unggulan dan potensial; 4. Mewujudkan Pembangunan yang merata, selaras dan lestari;</p>

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<p>5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Prioritas pembangunan dan fokus tematik menjadi acuan dalam desain program/ kegiatan tahun 2021 dan 2022 yang diarahkan pada pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan</p> <p>Selanjutnya, jika dilihat mendetail dari IPM angka harapan hidup DIY meningkat dari tahun 2019 74,92 sedangkan tahun 2020 sebanyak 74,99.</p> <p>4. Harapan Lama Sekolah juga meningkat dari 9.38 ke 9,55 namun dari sisi pengeluaran perkapita mengalami penurunan dari 14,394,00 ke 14,015,00. Pemda melalui Bidang Sosbud DIY telah memetakan analisa kapanewon (kecamatan) yang</p> <p>5. memiliki daerah-daerah rendah IPM dan juga didukung dengan data IPD dan Keluarga Miskin dari data DTKS, pada tahun 2021 di Gunungkidul yakni Saptosari, Playen, Gedangsari, Nglipar, Ponjong, Tepus, dan Karangmojo. Sedangkan di Kulon Progo yakni Samigaluh, Kokap, Pengasih,</p>

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<p>Sentolo. Harapannya dengan analisa pemetaan lokus ini dapatdikawal dengan intervensi program-prorgam OPD Pemda DIY dan Kabupaten untuk memfokuskan di daerah-daerah yang memiliki IPM yang rendah sehingga Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo dapat meningkat nantinya dari sisi IPM</p> <p>6. menurunnya Keluarga Miskin dari data DTKS. Selain kapanewon prioritas di atas juga akan dipetakan potensi dan masalahnya di kapanewon-kapanewon lain melalui monitoring dan evaluasi tahunan sehingga dapat diharapkan akan terus di monitoring dan di evaluasi target-target tahunan IPM.</p> <p>3) Untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan kesenjangan antar daerah strategi yang perlu dilakukan adalah mengakselerasi pertumbuhan pendapatan masyarakat golongan penapatan rendah da n peningkatan fasilitas-fasilitas di daerah yang tertinggal. Pemerintah Daerah DIY telah melakukan :</p>

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<ul style="list-style-type: none"> • kegiatan pemberdayaan ekonomi untuk kelompok berpendapatan rendah diantaranya melalui pelatihan dan promosi untuk IKM/UKM, kegiatan padat karya infrastruktur, pembinaan desa wisata dan penumbuhan kewirausahaan di perdesaan. • dengan dana BKK Jambanisasi di 4 Kabupaten, namun secara volume akan menitikberatkan Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo. Juga BKK PKH Graduasi oleh Dinas Sosial. <p>Pada tahun 2022 Pemda DIY juga akan memberikan bantuan alat-alat kesehatan di RSUD Saptosari sebagai bagian dari pengurangan kesenjangan di daerah yang tertinggal. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kegiatan perekonomian juga diarahkan untuk menyentuh lokasi kantong kemiskinan. Seperti G2R, pelatihan BUMDES di Biro Bina Bermas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY menindaklanjuti dengan: <p>(1) konsolidasi untuk ketahanan ekonomi dan</p>

No	Ururan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<p>sosial budaya, termasuk dengan desa tangguh kesbang,</p> <p>(2) bersama Dinas Sosial DIY untuk program restorasi sosial berupa asistensi dan kampanye gotong-royong dan harmoni sosial (bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental / GNRM, pada Gerakan Indonesia Bersatu),</p> <p>(3) konsolidasi potensi harmoni dan kolaborasi masyarakat basis komunitas melalui Jaga Warga (yang dilanjutkan pengelolaan oleh Satpol PP mulai 2021 ini),</p> <p>(4) Penanganan Konflik Sosial (PKS) melalui rencana aksi terpadu lintas-perangkat daerah dan bekerjasama dengan instansi vertikal serta Kab/Kota se-DIY.</p> <p>PRGRAM STRATEGIS PEMDA</p> <p>A. Penanggulangan Kemiskinan</p> <p>Tindak lanjut yang akan dilakukan:</p> <p>1. Selama ini pengukuran kemiskinan dilakukan oleh BPS sesuai standar yang mereka lakukan melalui pengukuran garis kemiskinan. Namun pengukuran ini perlu dibedah lebih lanjut agar pengukuran dapat sejalan</p>

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<p>dengan program-program yang dilakukan oleh Pemda DIY.</p> <p>Pemda dalam rangka intervensi, memerlukan basis data yang menyentuh sampai level mikro di masyarakat. Sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah DIY Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan, dibentuk Sekretariat Pemberdayaan Masyarakat (Sebermas) berdasarkan pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 103 Tahun 2020, yang telah diperbaharui dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 118 tahun 2021. Sebermas mempunyai tugas membantu Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), membedah pengukuran kemiskinan bersama BPS sebagai narasumber utama dengan dibantu bidang sektoral Bappeda DIY dan OPD-OPD DIY dan Kabupaten/Kota untuk menyelaraskan pengukuran kemiskinan di DIY. Sebermas juga telah membuat analisis kemiskinan daerah hingga tingkat kapanewon (kecamatan) sebagai salah satu cara mengatasi daerah-</p>

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<p>daerah rawan kemiskinan tingkat kecamatan.</p> <p>2. Pemda DIY melalui Sekretariat Pemberdayaan Masyarakat (Sebermas) yang membantu TKPKD melakukan data tunggal dan pengklasteran kategori kemiskinan agar memudahkan dalam intervensi dan monitoring kegiatan dan program-program kemiskinan. Langkah pertama sudah dilakukan melalui intervensi dan monitoring program - program kemiskinan pada OPD-OPD Pemda DIY dan Kabupaten/Kota melalui Desk Tri Wulanan Bidang Pengendalian Bappeda DIY dengan surat penagihan melalui Surat Wakil Gubernur Nomor 456/7087 tentang Inventarisasi Program Penggulangan Kemiskinan dalam rangka Pengelompokan program kegiatan penanggulangan kemiskinan</p> <p>3.Data tunggal dan pengklasteran sebagai data kendali kemiskinan akan mencakup kegiatan dan program-program kemiskinan akan di sinergikan bersama OPD-OPD Pemda DIY dan</p>

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<p>Kabupaten/Kota yang memegang kegiatan teknis di lapangan sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing</p> <p>4. Peran multisektor yang dilibatkan dalam pelaksanaan SDGs (Sustainable Development Goals) termasuk didalamnya Non Government baik LSM maupun Akademisi dalam kegiatan Pemantauan dan Evaluasi RAD SDGs.</p> <p>Pemda memfasilitasi Forum CSR atau TSLP tingkat Provinsi untuk mengorganisir CSR di tingkat Pemda agar dapat bersama-sama menyelesaikan kemiskinan di DIY, yang didukung dengan Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan (Simnangkis) yang merupakan instrumen untuk memantau kondisi kemiskinan DIY, yang selanjutnya menjadi bahan pengambilan keputusan multipihak terkait kemiskinan.</p>

b. Perencanaan Pembangunan Urusan Keistimewaan

1) *Kondisi Umum*

Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan DIY dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang telah direncanakan guna mendukung capaian pembangunan. Hal ini merupakan bentuk implementasi Pasal 42 UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mengamanatkan bahwa dana yang digunakan untuk penyelenggaraan keistimewaan, dibahas dan ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan usulan Pemda DIY. Artinya, pendanaan itu harus direncanakan terlebih dahulu dalam bentuk program dan kegiatan serta selaras dengan cita-cita pembangunan di DIY.

Terdapat 5 kewenangan Keistimewaan DIY sebagaimana termuat di dalam UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY yaitu, Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan Pemerintah Daerah, Kebudayaan, Pertanahan dan Tata Ruang. Kelima kewenangan istimewa tersebut diharapkan menjadi pemantik dan energi tambahan bagi Pemda DIY untuk mewujudkan peradaban Yogyakarta yang lebih baik sebagaimana amanat Pasal 5 ayat 1 UU Nomor 13 Tahun 2012, yang mengamanatkan pengaturan Keistimewaan DIY bertujuan untuk: (1) mewujudkan pemerintahan yang demokratis; (2) mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat; (3) mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhinneka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); (4) menciptakan pemerintahan yang baik; dan (5) melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.

Pemda DIY melaksanakan perencanaan pembangunan Urusan Keistimewaan melalui Paniradya Kaistimewan sebagaimana termuat dalam Perdais DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang

Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan Pergub DIY Nomor 51 Tahun 2018, Paniradya Kaistimewan mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan urusan keistimewaan, perencanaan, dan pengendalian urusan keistimewaan serta pengkoordinasian administrasi urusan keistimewaan.

Pada Tahun 2021, DIY mendapatkan alokasi anggaran Dana Keistimewaan sebesar Rp1.320.000.000.000,00. Pelaksanaan program dan kegiatan dana Keistimewaan sesuai dengan amanat Permenkeu Nomor 15/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 5 Maret 2020.

Berikut capaian kinerja Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Urusan Keistimewaan di DIY Tahun 2021:

Tabel 3.173. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Urusan Keistimewaan Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Rerata persentase capaian kinerja fisik dan keuangan program-program Urusan Keistimewaan	%	98,005	98,10	97,23	99,11	98,20	99,01
2	Meningkatnya kualitas pelayanan sekretariat kepada Parampara Praja	%	87	76	87	114,47	78	111,54
3	Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien	%	90	81,50	94,80	116,30	83	114,22

Sumber: Paniradya Kaistimewan DIY, 2022

a) *Rerata persentase capaian kinerja fisik dan keuangan program-program urusan keistimewaan*

Sasaran kinerja program-program Urusan Keistimewaan yaitu “Meningkatnya kualitas implementasi Urusan Keistimewaan”, pada tahun 2021 tercapai sebesar 97,23% atau 99,11% dari target yang ditetapkan sebesar 98,10%. Data diolah dari capaian kinerja fisik dan capaian keuangan program-program urusan keistimewaan yang dilaksanakan oleh PA/KPA danais. Hasil penghitungan total capaian kinerja diperoleh data sebagai berikut.

Tabel 3.174. Pengukuran Capaian Fisik dan Keuangan Dana Keistimewaan Tahun 2021

No	Urusan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s.d Tahap III/Akhir (Rp.)	Keuangan (%)	Fisik (%)
1	Kelembagaan	33.350.957.463,00	29.585.454.527,00	88,71	99,73
2	Kebudayaan	755.597.150.733,00	705.857.660.705,84	93,42	99,57
3	Pertanahan	21.934.476.726,00	18.434.647.364,50	84,04	94,51
4	Tata Ruang	509.117.415.078	505.480.967.919,71	99,29	99,92
TOTAL		1.320.000.000.000	1.259.358.730.517,05	95,41	99,05
RERATA				97,23	

Sumber: Paniradya Kaistimewan DIY, 2022

Secara keseluruhan, realisasi keuangan program Keistimewaan Urusan Kelembagaan, Kebudayaan, Pertanahan, dan Tata Ruang sebesar 95,41%. Adapun realisasi fisik program Keistimewaan Urusan Kelembagaan, Kebudayaan, Pertanahan, dan Tata Ruang sebesar 99,05%. Perhitungan rerata capaian keuangan dan fisik yang didapatkan sebesar 97,23%. Apabila dipersentasekan, ketercapaian tersebut sebesar 99,11% dari target yang telah ditetapkan yaitu 98,10%.

Secara umum, kondisi pandemi COVID-19 masih menjadi kendala dalam pelaksanaan program keistimewaan, terlebih dengan adanya penerapan kebijakan PPKM. Seperti halnya kegiatan mengumpulkan massa, perjalanan dinas dan

sebagainya tidak dapat dilakukan sehingga menjadi efisiensi pada realisasi keuangan.

Urusan Pertanahan menjadi urusan dengan capaian keuangan dan fisik yang terendah. Hal ini salah satunya disebabkan belum optimalnya capaian pelaksanaan Sub Kegiatan Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten karena adanya kebijakan PPKM. Sehingga operasional Kantor Pertanahan terkait pendaftaran tanah mengalami hambatan, termasuk pendaftaran sertifikat Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang telah diajukan oleh DPTR setempat.

Selain itu terdapat kendala teknis seperti bidang tanah yang terjadi *overlap* sehingga harus dilakukan *plotting* ulang sebagaimana terjadi di Kabupaten Bantul. serta belum adanya payung hukum dan petunjuk teknis yang jelas terkait tanah yang berstatus RVO/RVE, HGB dan Hak Pakai, sehingga tanah yang mempunyai status tersebut tidak dapat dilanjutkan pemrosesannya.

Pelaksanaan pendaftaran pencatatan perubahan sertifikat Tanah Desa di beberapa kabupaten seperti Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman juga mengalami kendala teknis seperti luasan tanah yang berbeda dengan nilai yang tercantum pada sertifikat, tanah desa yang tumpang tindih dengan tanah hak milik warga, serta pemrosesan Berita Acara dan pemindaian sertifikat yang memakan waktu lama. Tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan fisik ini tentunya berdampak pada pencapaian realisasi keuangan yang tidak maksimal dan Sisa Lebih Pagu Anggaran (SiLPA) yang relatif besar.

b) Meningkatnya kualitas pelayanan sekretariat kepada Parampara Praja

Sasaran kinerja “Terfasilitasinya Kinerja Parampara Praja” yang menunjukkan kualitas pelayanan Pemda DIY kepada

Parampara Praja. Pada tahun 2021 tercapai sebesar 87% atau 114,57% dari target sebesar 76%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengukuran pencapaian kinerja Pemda DIY dalam memfasilitasi Parampara Praja antara lain: 1) Kepuasan dukungan tim asistensi, yaitu penyediaan data-data pendukung dan analisis yang nantinya digunakan sebagai masukan bagi anggota Parampara Praja dalam menyusun rekomendasi kepada Gubernur; 2) Kepuasan dukungan Paniradya, yaitu dukungan Paniradya Kaistimewan DIY kepada anggota Parampara Praja dalam hal penjadwalan kegiatan, hubungan dengan para pemangku kepentingan, penyediaan materi-materi referensi, hingga memfasilitasi dan mengakomodasi perjalanan dinas bagi Parampara Praja; 3) Kepuasan sarana prasarana, yaitu dukungan Paniradya Kaistimewan DIY dalam fasilitasi sarana prasarana seperti komputer dan kendaraan; 4) Kepercayaan terhadap pelayanan Paniradya, yaitu persepsi anggota Parampara Praja terhadap pelayanan yang diberikan Paniradya Kaistimewan DIY.

Hasil penghitungan sub indikator di atas diperoleh melalui:

Tabel 3.175. Pengukuran Capaian Sasaran

Sub-Indikator	Hasil Penilaian	Rata-Rata Nilai
a. Kepuasan dukungan Tim Asistensi	88,33%	87,00%
b. Kepuasan terhadap dukungan Paniradya	88,00%	
c. Kepuasan sarana prasarana	81,67%	
d. Kepuasan terhadap pelayanan Paniradya	90,00%	

Sumber: Paniradya Kaistimewan DIY, 2022

Data di atas diperoleh dari hasil kuesioner internal yang dibagikan Paniradya Kaistimewan DIY kepada anggota Parampara Praja. Kuesioner dilakukan di Triwulan IV sehingga anggota Parampara Praja dapat menilai kinerja kesekretariatan dari triwulan I hingga IV.

c) *Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien*

Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien menunjukkan terwujudnya kelembagaan perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah sebesar 94,80% atau 116,31% dari target yang ditetapkan sebesar 81,50%. Sumber data diolah dari hasil evaluasi kelembagaan perangkat daerah yang merupakan penghitungan komposit dari 3 sub indikator antara lain: 1) Hasil evaluasi kelembagaan perangkat daerah; 2) Hasil evaluasi pelaksanaan Budaya Pemerintahan Satriya pada 37 OPD; 3) Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada 37 OPD.

Hasil penghitungan komposit dari 3 sub indikator di atas diperoleh capaian sebagai berikut.

Tabel 3.176. Pengukuran Capaian Sasaran

No	Indikator	Nilai
1.	Persentase kelembagaan perangkat daerah pelaksana keistimewaan yang proporsional	100%
2.	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN Pemda DIY	84,40%
3.	Persentase jumlah OPD yang telah melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik	100%
RERATA		94,80%

Sumber: Paniradya Kaistimewan, 2022

2) *Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2021*

Pada tahun 2021 Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Urusan Keistimewaan dilaksanakan dengan alokasi sebesar Rp1.320.000.000,00. Pengalokasian anggaran tersebut dibagi dalam 26 kegiatan dan 118 sub kegiatan. Secara keseluruhan belanja langsung dapat terealisasi sebesar Rp1.259.358.730.517,05 atau 95,41%, dengan pencapaian fisik mencapai 99,06%. Selanjutnya rincian capaian kinerja program tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 3.177. Capaian Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Urusan Keistimewaan Tahun 2021

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	URUSAN UMUM	PANIRADYA KAISTIMEWAN	1. Penyusunan kebijakan umum urusan keistimewaan 2. Pengoordinasian perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan 3. Peningkatan Pelayanan Parampara Praja 4. Peningkatan Hubungan Dengan Semua Stakeholder	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen perencanaan SKPD TA.2022 dokumen 6 6 dan Perubahan TA.2021 Forum Perencanaan OPD BA 1 1 Renja, Renja Perubahan, Renstra dokumen 3 3 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan nilai Nilai Nilai (LKJIP) yang capaian kerjanya sesuai dengan dokumen LKJIP A LKJIP A perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) Realisasi capaian fisik dan keuangan persen 100 100 sesuai tahapan ROPK Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN bulan 12 12 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD Administrasi perkantoran yang bulan 12 12 terselesaikan dengan baik dan tepat waktu Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan Keuangan Akhir Tahun dokumen 1 1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Dokumen laporan bulanan dan dokumen dokumen 14 14 semesteran Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Laporan Prognosis dokumen 1 1 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah						TINDAK LANJUT PENGELOLAAN BELANJA DAERAH : Perencanaan urusan keistimewaan sudah tercantum di dalam dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD) dan dokumen perencanaan tahunan (RKPD) sesuai amanat dalam peraturan perundangan. Urusan keistimewaan sebenarnya juga telah mendapatkan porsi tersendiri dalam penyajiannya di dokumen perencanaan. Selanjutnya, RPJMD DIY Tahun 2017-2022 juga telah mencantumkan bagan alur (cascade) urusan keistimewaan sehingga akan terlihat dengan jelas dukungan terhadap sasaran pembangunan daerah. Namun demikian apabila diperlukan, pada masa mendatang penjelasan mengenai urusan keistimewaan akan kami cantumkan dalam kebijakan belanja daerah.

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
				Komponen peralatan listrik dan penerangan bangunan kantor	jenis	1	1			
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
				Peralatan Rumah Tangga	jenis	4	4			
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
				Barang Cetak	jenis	11	11			
				Penggandaan	lembar	20.000	20.000			
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
				Buku/Kepustakaan (Hukum/Sosial/Budaya/Pertanahan/Tata Ruang/Sejarah/Umum)	tahun	1	1			
				Bukti Pembayaran Langganan Surat Kabar Harian	jenis	2	2			
				Bukti Pembayaran Langganan Majalah	jenis	2	2			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
				Laporan dan rencana tindak lanjut hasil konsultasi dan koordinasi	bulan	12	12			
				Laporan dan rencana tindak lanjut hasil rapat koordinasi	bulan	12	12			
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
				Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
				Peralatan kantor sesuai RKBMD	jenis	5	5			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
				Alat Tulis Kantor	jenis	21	21			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional tepat waktu roda empat	unit	9	9			
				Kendaraan dinas/operasional roda dua yang dipelihara sesuai RKPBM	unit	7	7			
				Kendaraan dinas/operasional roda empat yang dipelihara sesuai RKPBM	unit	9	9			
				Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional tepat waktu roda dua	unit	7	7			
2	KELEMBAGAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (KEISTIMEWAAN)	PANIRADYA KAISTIMEWAN	1. Penyusunan kebijakan umum urusan keistimewaan 2. Pengoordinasian perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan 3. Peningkatan Pelayanan Parampara Praja 4. Peningkatan Hubungan Dengan Semua Stakeholder	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Presentase urusan Keistimewaan yang berkualitas Persentase pencapaian sasaran rencana jangka menengah daerah dengan realisasi tahunan urusan keistimewaan Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Aplikasi perencanaan program dan kegiatan keistimewaan Kajian Arah Kebijakan Strategis Keistimewaan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tahun 2021 Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tahun 2022 Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tahun 2023 Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan keistimewaan Kegiatan Peningkatan Pelayanan Parampara Praja	persen persen aplikasi Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen	100 72 1 1 2 2 1	100 87,18 1 1 2 2 1	1. Pemanfaatan dana keistimewaan dituntut untuk dapat menyelesaikan permasalahan pembangunan di DIY seperti kemiskinan dan ketimpangan wilayah, sedangkan sulit mencari benang merah yang langsung berdampak pada pengentasan kemiskinan dan penurunan angka pengangguran 2. Belum semua kalangan mengetahui informasi mengenai keistimewaan	1. Memperkuat kerja sama silang OPD serta memperkuat program dan kegiatan yang arahnya mendukung pemberdayaan masyarakat/desa pada penyebarnya informasi keistimewaan melalui berbagai media (Media Cetak, Media Online, Televisi, Radio, Media Luar Ruang). Selain itu, membuat logo Dana Keistimewaan yang dipasang pada seluruh kegiatan/acara/aktivitas yang didanai oleh dana keistimewaan 3. Optimalisasi dalam penggunaan teknologi dan sarana prasarana pendukung. Komunikasi dan koordinasi tatap muka dialihkan menggunakan media	TINDAK LANJUT PENYELENGGARAAN URUSAN KEISTIMEWAAN A. Urusan Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY telah membentuk Dinas Kelautan dan Perikanan DIY sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 61 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan, yang terdiri dari: Bidang Perikanan Budidaya Bidang Perikanan Tangkap Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pengawasan

No	Urutan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Indeks Kepuasan layanan kepada Prampara Praja	Skor	76	87	dan hasil-hasil pembangunan keistimewaan yang dilaksanakan pemerintah, sedangkan harapan masyarakat terhadap capaian tujuan keistimewaaan untuk kesejahteraan masyarakat sangat besar	sosial seperti Zoom dan Whatsapp. Selain itu, menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan program keistimewaan tetapi tetap dengan mengantisipasi penyebaran COVID-19	Untuk optimalisasi urusan bidang kelautan dan perikanan agar berjalan secara efektif dan mendekatkan pada pelayanan masyarakat dibentuk UPT Pelabuhan Perikanan Pantai sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kelautan dan Perikanan, yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan serta keselamatan operasional kapal perikanan untuk meningkatkan nilai produksi ikan yang masuk melalui pelabuhan/tempat pelelangan ikan. Dalam rangka memaksimalkan peran dan fungsinya dilakukan review tugas dan fungsi melalui koordinasi bersama
				Penyusunan Rekomendasi Urusan Keistimewaan						
				Bahan Rekomendasi kepada Parampara Praja	dokumen	21	21			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewaan						
				Camera crane	unit	1	1			
				Drone	unit	1	1			
				Camera flash	unit	1	1			
				Kamera	unit	4	4			
				Conference camera	unit	3	0			
				Printer	unit	9	9			
				Bahan Rekomendasi Kepada Parampara Praja	%	100	100			
				Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara				3. Terjadinya pandemi COVID-19 mempengaruhi seluruh lini kegiatan pemerintahan, termasuk dalam penyelenggaraan urusan Keistimewaan DIY		
				Persentase capaian program urusan keistimewaan urusan kelembagaan dan tata cara yang berkualitas	persen	90	100			
				Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara						
				Draft Perubahan Pergub Penugasan Urusan Keistimewaan	Draft rapergup	1	1			
				Kajian penataan kelembagaan asli daerah	kajian	1	1			
				Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara tahun 2021	Dokumen	1	1			
				Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara tahun 2022	Dokumen	1	1			
				Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara tahun 2023	Dokumen	1	1			
				Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara						

No	Ururan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Dokumen Hasil Monitoring dan evaluasi tahapan pelaksanaan program/kegiatan Keistimewaan urusan Kelembagaan dan Tata Cara	Dokumen	4	4			dengan Perangkat Daerah terkait untuk mempertegas kembali kesesuaian tugas dan fungsi dengan indikator capaian dalam RPJMD.
				Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kebudayaan						Meningkatkan intensitas koordinasi dengan lembaga di Kabupaten/Kota telah dilakukan monitoring secara berkala (bulanan) terhadap seluruh perangkat atau lembaga di Kabupaten/Kota yang mampu program/kegiatan yang bersumber dari Dana keistimewaan.
				Persentase capaian program urusan keistimewaan urusan kebudayaan yang berkualitas	persen	85	95,45			Koordinasi dan monitoring melalui daring, kunjungan lapangan, forum Pemda DIY-Kab/Kota dan didukung oleh Sistem Informasi Pengendalian Keistimewaan (kenes.jogjaprovo.go.id).
				Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Program dan Kegiatan					B. Urusan Kebudayaan Peningkatan kolaborasi antara Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY dan Dinas Kebudayaan sudah dilaksanakan untuk meningkatkan realisasi
				Kajian grand design Desa Mandiri Budaya DIY	laporan	1	1			
				Rencana program dan kegiatan keistimewaan urusan kebudayaan tahun 2021	Dokumen	1	1			
				Rencana program dan kegiatan keistimewaan urusan kebudayaan tahun 2022	Dokumen	1	1			
				Rencana program dan kegiatan keistimewaan urusan kebudayaan tahun 2023	Dokumen	1	1			
				Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan						
				Hasil monev pelaksanaan program atau kegiatan keistimewaan urusan kebudayaan tahun 2021	dokumen	4	4			
				Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang						
				Persentase capaian program urusan keistimewaan urusan pertanahan dan tata ruang yang berkualitas	persen	90	87,5			
				Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang	Program dan Kegiatan					
				Dokumen rencana program dan kegiatan keistimewaan urusan pertanahan tahun 2021	Dokumen	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Dokumen rencana program dan kegiatan keistimewaan urusan pertanahan tahun 2022	Dokumen	1	1			dan spirit keistimewaan yang dapat terlihat pada insan milenial melalui pendidikan. Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan pada kegiatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY secara langsung antara lain : pembinaan muatan lokal, pengetahuan tentang budaya dan kesenian (Gladhi Kawruh, Ngudar Kawruh Tembang, Festival Budaya Pendidikan Khusus, Audisi Duta Seni Pelajar Nusantara (DSPN), pembentukan sekolah berbasis budaya, peningkatan sarana prasana budaya, pembentukan lab seni, aktivitas seniman masuk sekolah, dan pelaksanaan Akademi Komunitas. Selain itu juga terdapat beberapa kegiatan pengembangan kebudayaan melalui pendidikan yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Kebudayaan antara lain : kongres aksara jawa, pengkajian
				Dokumen rencana program dan kegiatan keistimewaan urusan pertanahan tahun 2023	Dokumen	1	1			
				Dokumen rencana program dan kegiatan keistimewaan urusan Tata Ruang tahun 2021	Dokumen	1	1			
				Dokumen rencana program dan kegiatan keistimewaan urusan Tata Ruang tahun 2022	Dokumen	1	1			
				Dokumen rencana program dan kegiatan keistimewaan urusan Tata Ruang tahun 2023	Dokumen	1	1			
				Kajian Optimalisasi pemanfaatan tanah desa	Dokumen	1	1			
				Kajian Pengembangan Sektor Produktif yang mendukung SRS di Pantai Selatan DIY dalam menyongsong Abad Samudera Hindia	Dokumen	1	1			
				Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan						
				Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan urusan pertanahan	Dokumen	4	4			
				Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan urusan tata ruang	Dokumen	4	4			
				Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan						
				Persentase Efektivitas Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	Persen	95	95			
				Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan						
				Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Lembaga Pelaksana Keistimewaan	Dokumen	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Buku Infografis Pelaksanaan Program/Kegiatan Keistimewaan Tahun Anggaran 2020	eksemplar	35	35			kesejarahan, workshop pembelajaran terkait kesenian budaya serta pelaksanaan selendang sutra yang menasar pada mahasiswa dengan latar belakang etnis yang ada di DIY. Urusan Kebudayaan juga diampu oleh beberapa dinas seperti pertanian, perdagangan, pariwisata, koperasi, kelautan dan lain-lainnya sehingga multi sector yang terlibat didalam urusan kebudayaan. Sehingga pelibatan stakeholder sebagaimana yang Pemerintah, Budayawan, Tokoh Masyarakat, Cendekiawan, Alim Ulama, Pemuda, Pelajar, Mahasiswa telah terlibat aktif dalam pemajuan kebudayaan di DIY. Dengan aktivitas-aktivitas tersebut diharapkan sinkronisasi antara urusan Pendidikan dengan kebudayaan akan tercapai. Memaksimalkan sosialisasi kebudayaan kepada peserta didik
				Laporan Hasil Forum Desentralisasi Asimetris Tahun 2021	laporan	100	100			
				Konten Informasi Keistimewaan DIY yang Terpublikasikan kepada Masyarakat	Media	5	5			
				Grand Desain Keistimewaan	Dokumen	1	1			
				Kegiatan Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kelembagaan						
				Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewaan						
				Handy Cam	unit	1	1			
				Headset	unit	2	2			
				Jaringan Internet	paket	1	1			
				Kamera	unit	1	1			
				Kartu Memory	unit	4	4			
				Laptop	unit	2	2			
				Lightning Set	unit	1	1			
				Microphone	unit	8	8			
				Mixer Video	unit	1	1			
				Monopod	unit	2	2			
				Pemindahan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	paket	1	1			
				Tablet 11 inch	unit	9	9			
				Taman	paket	1	1			
				Televisi	unit	1	1			
				Teralis	paket	1	1			
				Tersedianya alat studio lainnya	paket	1	1			
				Tersedianya peralatan kantor mebelair	paket	1	1			

No	Ururan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										(siswa dan mahasiswa) melalui <i>youtube</i> dengan kolaborasi bersama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY dapat dilakukan dengan membuat muatan youtube khusus terkait pendidikan. Pemanfaatan media <i>online</i> dengan platform Youtube telah dilakukan oleh OPD pengampu dana keistimewaan urusan kebudayaan dengan mengetengahkan informasi, edukasi, atraksi pementasan dan tontonan bagi khalayak umum. Hal ini dilakukan baik dengan cara live streaming (siaran langsung) atau dengan metode tapping (rekaman/siaran tunda). Pemanfaatan platform You tube ini menjadi salah satu cara untuk menyebarluaskan informasi mengenai kebudayaan, pemajuan kebudayaan DIY serta hasil pemanfaatan dana keistimewaan itu sendiri. Sebagai pelengkap channel youtube Dinas Kebudayaan dengan

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<p>judul tasteofjogja memiliki 20 ribu subscribe dan Paniradya kaistimewan memiliki 51 ribu subscribe hal ini menunjukkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelestarian budaya di plattform Youtube telah mendapatkan respon positif dari publik. Disamping you tube juga memanfaatkan media social lainnya seperti Instagram, yang juga sama-sama aktif dalam penyabarluasan informasi tentang pelestarian budaya. Pengembangan taman budaya untuk mensosialisasikan kebudayaan DIY sudah dilaksanakan baik di provinsi dengan Taman Budaya Yogyakarta (TBY) dan kabupaten/kota dengan Taman Budaya di masing-masing kabupaten/kota yang sudah dibangun dan akan dibangun. Pada Taman Budaya yang sudah dibangun (TBY dan Taman Budaya Kulon Progo), kegiatan rutin terkait kebudayaan sudah dilaksanakan dan</p>

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<p>menjadi kegiatan rutin. Keberadaan taman budaya lebih dari sekedar identitas, melainkan pusat aktivitas kebudayaan untuk mendukung aktivitas kebudayaan dalam rangka melindungi, melestarikan, merevitalisasi, mengembangkan, dan menumbuh-kembangkan kebudayaan pada skala luas . Pembangunan Taman Budaya kabupaten/kota yang sudah dilakukan pada tahun 2020 : Pembangunan taman budaya Gunung Kidul berupa Pembangunan Fisik Taman Budaya Gunungkidul Tahap III (multiyears tahun ke 2) yaitu pembangunan amnities taman budaya, Joglo, pembangunan masjid dan penyelesain bangunan.</p> <p>Pembangunan taman budaya Sleman berupa pembebasan tanah dengan dengan jumlah bidang 21 bidang (22.869m2).</p> <p>Pembangunan Taman</p>

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<p>Budaya Bantul berupa membuat Kajian Studi Kelayakan Pembangunan Taman Budaya Kabupaten Bantul selain itu untuk pengadaan lahan yang akan dilakukan di tahun 2021 juga dilakukan appraisal tanah di yang berlokasi Kapanewon Pajangan.</p> <p>Pada tahun 2021 dilaksanakan pengembangan taman budaya kabupaten/kota, antara lain: Pembangunan Taman Budaya Gunung Kidul sudah akan selesai 100% pada tahun 2021. Pembangunan Taman Budaya Sleman yaitu sayembara dan penyusunan DED Taman Budaya Sleman dan penambahan 1 bidang tanah seluas 2.395m2 untuk pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Publik. Pembangunan Taman Budaya Bantul berupa pengadaan lahan, UKLUPL, Andalalin, dan Appraisal Lahan jalan di lokasi TBB yang belum ada dalam Appraisal Tahun 2020. Pembangunan Taman</p>

No	Ururan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<p>Budaya Kota Yogyakarta Review DED dan Adendum AMDAL yang berlokasi di kawasan Embung Giwangan.</p> <p>Merencanakan dan melaksanakan sosialisasi kebudayaan DIY dengan media virtual, seperti halnya Perencanaan Virtual Museum. Kajian pengembangan virtual museum di DIY sudah dilaksanakan pada tahun 2020. Selanjutnya juga dapat dikembangkan virtual museum di museum kabupaten/kota. Selain itu, kegiatan kebudayaan yang lain juga dapat dilakukan dengan virtual sebagai sarana pemanfaatan teknologi digital yang semakin berkembang pesat. Peningkatan dan pengembangan kegiatan kebudayaan berbasis teknologi sangat diperlukan untuk kemajuan kebudayaan di DIY.</p> <p>C. Urusan Pertanahan 1. Penataan tanah kasultanan dan tanah kadipaten terus</p>

No	Ururan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<p>dilakukan dan merupakan kegiatan dengan serapan anggaran paling besar di urusan pertanahan untuk kegiatan penatausahaan pertanahan. Sosialisasi tentang Perdas Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten agar Tanah Kasultanan dan Kadipaten yang belum dimanfaatkan dapat digunakan oleh masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan, sudah dilakukan sejak tahun 2021 di DPTR DIY, pada tahun 2022 ini kegiatan tersebut masih ada, dan dipereencanaan Tahun Anggran 2023 sudah masuk di draft berita acara yang dikirimkan ke Kementerian Pusat 2. Kegiatan Dana keistimewaaan, didalam urusan pertanahan hanya merencanakan dan mengevaluasi pemanfaatan tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah kalurahan, sehingga</p>

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<p>pada proses memaksimalkan pemanfaatan tanah dan bangunan akan kami upayakan di tiga aspek tersebut. Pada tahun 2022, kami sedang mengidentifikasi beberapa tanah kalurahan yang bisa dioptimalkan untuk membantu pengentasan kemiskinan.</p> <p>D. Urusan Tata Ruang</p> <p>1. Melakukan tatanan baru urusan tata ruang, dilakukan melalui kebijakan struktur ruang dengan konservasi dan perlindungan tata ruang keistimewaan, serta kebijakan pola ruang dengan pengembangan tata ruang keistimewaan.</p> <p>2. Melakukan pengendalian penataan ruang yang bertujuan untuk mewujudkan keharmonisan antara alam dan lingkungan buatan, serta antara manusia dan lingkungan itu sendiri (alam dan buatan), sehingga tercipta keseimbangan.</p> <p>3. Melakukan revitalisasi pemanfaatan ruang</p>

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<p>satuan ruang strategis sumbu filosofi dengan memperhatikan eksistensi sumbu filosofi yang sarat makna dalam memahami keberadaan Kraton Yogyakarta sebagai warisan leluhur, menjangkau Tugu Pal Putih hingga Panggung Krapyak, mempertimbangkan aspek transportasi serta menggalakkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dari sisi historis, sosial budaya maupun pariwisata.</p>

c. Administrasi Keuangan Daerah

1) Kondisi Umum

esuai RPJMD DIY, Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY mendukung pencapaian sasaran Pemda DIY, yaitu meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan dengan indikator sasaran Opini BPK. Untuk mencapai sasaran Pemda maka perlu didukung dengan pelaksanaan program strategis yaitu program sinergitas tata kelola pemerintahan dengan indikator kemampuan keuangan daerah dan optimalisasi aset-aset Pemda DIY. Selaras dengan hal tersebut, maka sasaran yang hendak dicapai adalah: 1) Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, dengan indikator yang akan dicapai yaitu transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan; dan 2) Optimalisasi Aset-aset Pemda DIY, dengan indikator yang akan dicapai yaitu optimalisasi aset pengelola barang milik daerah.

Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari sasaran strategis tersebut seperti tabel berikut.

Tabel 3.178. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Administrasi Keuangan Daerah Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	%	100	100	100	100	100	100
2	Optimalisasi Aset-aset Pengelola BMD	Rp	3.069 .093 .332	6.704 .805 .116	5.239 .098 .025	78,14	6.967 .568 .518	75,18

Sumber: BPKA DIY, 2022

Pada indikator kinerja Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dihitung secara kualitatif. Capaian indikator pertama sebesar 100% berasal dari capaian meningkatnya PAD (bobot kualitatif sebesar 20%), APBD yang tepat dan akurat (bobot

kualitatif sebesar 20%), laporan keuangan daerah yang akuntabel (bobot kualitatif sebesar 20%), penatausahaan keuangan daerah yang akurat (bobot kualitatif sebesar 20%) dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah yang konsisten (bobot kualitatif sebesar 20%). Jika dibandingkan dengan tahun 2020, capaian tahun 2021 telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Indikator kinerja sasaran transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan didukung oleh Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Selanjutnya untuk indikator kinerja Optimalisasi Aset-aset Pengelola Barang Milik Daerah berasal dari nilai rupiah proyeksi Optimalisasi Aset-aset Pengelola Barang Milik Daerah dan didukung oleh kinerja Program Pengelolaan Barang Milik Daerah. Target capaian indikator sasaran tahun 2021 sebanyak Rp6.704.805.116,00 sampai dengan akhir Bulan Desember 2021 terealisasi Rp5.239.098.025,00. Dengan demikian capaian ini tidak sesuai target. Persentase realisasi terhadap target mencapai 78,14%. Namun jika dibandingkan dengan capaian target tahun 2020 sebesar Rp3.069.093.332,00 terjadi peningkatan sebesar Rp2.170.004.693,00.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaktercapaian target optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah yaitu: 1) Terjadinya pandemi COVID-19 di tahun 2021 menyebabkan adanya penyewa BMD yang mengakhiri kontrak dikarenakan adanya kebijakan pemerintah daerah tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat; 2) Penyewa BMD mengajukan keringanan sewa dan jangka waktu sewa; serta 3) Adanya hasil penilaian dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah (sewa) yang relatif tinggi, sehingga kurang terjangkau oleh masyarakat umum.

2) *Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2021*

Pada tahun 2021 Penunjang Urusan Administrasi Keuangan Daerah didukung oleh anggaran sebesar Rp1.527.363.558.582,00 untuk

melaksanakan 4 program, 14 kegiatan dan 65 sub kegiatan. Realisasi belanja dari anggaran tersebut sebesar Rp1.460.669.833.009,71 atau 95,63% dan realisasi fisik mencapai 100%. Dari sisi penyerapan anggaran terdapat deviasi karena: 1) Sisa hasil lelang pengadaan barang dan jasa (selisih harga kontrak dengan pagu anggaran); 2) Efisiensi honorarium dan belanja perjalanan dinas narasumber pusat, karena pelaksanaan sosialisasi diselenggarakan secara *online*; dan 3) Penyesuaian pelaksanaan kegiatan selama masa pandemi COVID-19, sehingga mempengaruhi penyerapan anggaran pada belanja makan-minum rapat (pengurangan jumlah peserta rapat yang hadir secara fisik sebagai bentuk penerapan protokol kesehatan).

Berikut disampaikan rincian capaian kinerja program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 3.179. Capaian Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Administrasi Keuangan Daerah Tahun 2021

NO	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KEUANGAN	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	1. Optimalisasi potensi pendapatan daerah dan peningkatan kualitas belanja daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				Dinamika perubahan kebijakan terkait pengelolaan anggaran belanja dan pendapatan	Meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan, belanja dan aset berbasis akrual secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Pendapatan Belanja Daerah Terkait penurunan pendapatan di Tahun 2020 merupakan dampak dari pandemi COVID-19 yang mengakibatkan
			2. Peningkatan efektivitas pengelolaan aset daerah melalui pemanfaatan dan kerja sama pihak ketiga	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100	2. Penilai Pemerintah di Pemda DIY belum tersedia sehingga masih menggunakan konsultan jasa penilai independen dimana memerlukan anggaran yang tidak sedikit, dan akan menyulitkan Pemda DIY apabila Penilaian Kembali Barang Milik Daerah diberlakukan	Melaksanakan inventarisasi barang milik daerah agar dapat mengidentifikasi asset-aset idle, melaksanakan Road Map Pemanfaatan Barang Milik Daerah, serta melaksanakan kajian terhadap aset idle untuk memperoleh anallisis kegunaan terbaik dan tertinggi (<i>highest best use</i> / HBU) sebelum dilaksanakan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	perekonomian global mengalami penurunan termasuk Indonesia khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta. Inovasi telah dilakukan dengan memberikan kemudahan pelayanan kepada wajib pajak melalui; e-samsat (pembayaran melalui ATM Bank BPD dan pengesahan melalui e-posti), penambahan titik layanan melalui Samsat Desa, pembayaran melalui Gopay, pengembangan pembayaran dengan Bank Nasional selain BPD sesuai Kesepakatan Bersama antara Tim Pembina Samsat DIY dengan PT. Bank Pembangunan Daerah DIY selaku agregator Nomor : KEP/06/2021, Nomor : 973/01530/AP, Nomor :
			3. Peningkatan pendapatan daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
			4. Peningkatan pelayanan pajak dan non pajak kepada masyarakat	Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	100			
			5. Ketepatan waktu dan keakuratan pengelolaan keuangan daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			

NO	Ururan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			6. Peningkatan peran optimalisasi barang milik daerah sebagai salah satu kontributor peningkatan PAD	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			KEP/36/III/2021, Nomor : 0145A/OM/0004 Pembiayaan Daerah Sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) Permendagri Nomor 20 Tahun 2020, Belanja Tidak Terduga yang tidak mencukupi untuk penanganan Covid - 19 dapat dicukupi dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam anggaran berjalan. Menindaklanjuti permendagri tersebut, anggaran penyertaan modal kepada PT BPD DIY dilakukan pergeseran ke anggaran Belanja Tidak Terduga yang digunakan untuk penanganan COVID-19. Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2020, untuk Penanganan Kesehatan, Penanganan Dampak Ekonomi dan Penyediaan Jaring Pengamanan Sosial/ Social Safety Net Pengelolaan Barang
			7. Penyusunan SOP Pengelolaan Barang Milik Daerah supaya tata kerja sesuai dengan sistem dan prosedur serta monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan barang milik daerah dapat dilaksanakan	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	%	100	100			
				Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	%	100	100			
				Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	%	100	100			
				Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran	%	100	100			

NO	Ururan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				tugas dan fungsi Perangkat Daerah						Daerah - Bahwa tahun 2022 bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKA DIY menganggarkan pengembangan sistem informasi pengelolaan Barang Milik Daerah yang terintegrasi untuk lebih mudah dan memberikan manfaat lebih terhadap pendapatan daerah yang sah terutama dalam mengoptimalkan pendapatan dari sektor aset. - Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan prinsip optimalisasi daya guna dan hasil guna serta meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. - Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Bandara YIA - Rencana
				Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	%	100	100			
				Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
				Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan Perubahan (ROPK P) Tahun 2021	dokumen	1	1			
				Dukungan 100% terhadap penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100			
				Kesepakatan Forum Perencanaan OPD	BA	1	1			
				Rencana Kerja (Renja) Perubahan OPD Tahun 2021	dokumen	1	1			
				Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2022	dokumen	1	1			

NO	Ururan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK) Tahun 2021	dokumen	1	1			pada tahun 2022 akan dilakukan appraisal sewa outlet bagi UMKM di kawasan Bandara YIA untuk penentuan PAD 2023, dikarenakan pandemi COVID-19 yang mengakibatkan kontraksi yang cukup signifikan bagi UMKM maka rencana tersebut yang semula dilakukan pada tahun 2022 harus diundur dan akan dimulai pada tahun 2023. - Proses appraisal dilakukan secara paralel dengan evaluasi pelaksanaan.
				Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2022	dokumen	1	1			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						
				Dokumen RKA Perubahan SKPD	dokumen	1	1			
				Dukungan 100% terhadap penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100			
				Dokumen RKA SKPD	dokumen	1	1			
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						
				Dokumen DPPA SKPD	dokumen	1	1			
				Dukungan 100% terhadap penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100			
				Dokumen DPA SKPD	dokumen	1	1			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
				Laporan monev bulanan	dokumen	12	12			
				Perjanjian Knerja Perangkat Daerah	dokumen	1	1			
				LKjIP Perangkat Daerah	dokumen	1	1			
				Dukungan 100% terhadap penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
				Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	bulan	12	12			
				Dukungan 100% terhadap penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100			
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						

NO	Ururan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Terbayarnya honor pengelola barang	bulan	12	12			
				Terbayarnya honor pengelola keuangan	bulan	12	12			
				Dukungan 100% terhadap penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100			
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
				Dukungan 100% terhadap penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100			
				Dokumen SPP/SPM diterima dan dinyatakan lengkap dan sah	dokumen	8.000	9.434			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
				Laporan keuangan akhir tahun	dokumen	1	1			
				Dukungan 100% terhadap penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD						
				Dukungan 100% terhadap penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100			
				Laporan bulanan	bulan	12	12			
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						
				Laporan prognosis	dokumen	1	1			
				Dukungan 100% terhadap penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100			
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						

NO	Ururan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Terbitnya polis asuransi BMD untuk bangunan gedung dan kendaraan roda 4 keatas	jenis	4	4			
				Rumah dinas yang siap dioperasikan	unit	4	4			
				Pensertifikatan bidang tanah BMD	dokumen	7	7			
				Hasil penagihan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi	rupiah	424.512.806	3.500.000			
				Dukungan 100% terhadap penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100			
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						
				Laporan semesteran BMD bulan Juli dan Maret	laporan	2	2			
				Dukungan 100% terhadap penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
				Komponen/instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jenis	14	14			
				Dukungan 100% terhadap penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
				Pengisian tabung pemadam kebakaran	bulan	12	12			
				Dukungan 100% terhadap penunjang	%	100	100			

NO	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				urusan pemerintah daerah						
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
				Tersedianya peralatan jenis		24	24			
				kebersihan dan bahan pembersih						
				Dukungan 100% % terhadap penunjang urusan pemerintah daerah		100	100			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
				Barang cetakan jenis		13	13			
				Dukungan 100% % terhadap penunjang urusan pemerintah daerah		100	100			
				Penggandaan lembar		584.610	584.610			
				Jilid buku		610	610			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
				Dukungan 100% % terhadap penunjang urusan pemerintah daerah		100	100			
				Bukti pembayaran langganan surat kabar harian dan tabloid sebanyak 2 jenis	bulan	12	12			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu						
				Tamu kantor terlayani dengan baik	orang/kali	1.110	1.110			
				Dukungan 100% % terhadap penunjang urusan pemerintah daerah		100	100			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
				Laporan rencana tindak lanjut koordinasi	laporan	12	12			

NO	Ururan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Laporan rencana tindak lanjut hasil konsultasi	laporan	12	12			
				Dukungan 100% terhadap penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100			
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						
				Arsip dinamis terpelihara	m3	299	299			
				Dukungan 100% terhadap penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
				Dukungan 100% terhadap penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100			
				Peralatan kantor sesuai RKBMD	jenis	9	9			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
				Materai	buah	900	900			
				Dukungan 100% terhadap penunjang urusan pemerintah daerah	%	96	100			
				Alat tulis kantor	jenis	72	72			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
				Bukti pembayaran langganan internet	bulan	12	12			
				Bukti pembayaran tagihan rekening listrik	bulan	12	12			
				Dukungan 100% terhadap penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100			

NO	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Bukti pembayaran tagihan rekening air	bulan	12	12			
				Bukti pembayaran tagihan rekening telepon	bulan	12	12			
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
				Bukti sewa sarana mobilitas darat	unit	14	14			
				Bukti sewa tanaman	paket	1	1			
				Bukti sewa peralatan sanitasi	paket	1	1			
				Dukungan terhadap urusan daerah	100% penunjang pemerintah	%	100	100		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
				Jasa keamanan kantor	bulan	12	12			
				Dukungan terhadap urusan daerah	100% penunjang pemerintah	%	100	100		
				Keamanan terjaga	kantor	bulan	12	12		
				Jasa Kebersihan kantor	bulan	12	12			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
				Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas jabatan	unit	1	1			
				Dukungan terhadap urusan daerah	100% penunjang pemerintah	%	100	100		
				Kendaraan jabatan terpelihara sesuai RKBM	dinas yang sesuai	bulan	12	12		

NO	Ururan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
				Bukti pembayaran pajak STNK kendaraan bermotor roda 2	unit	2	2			
				Bukti pembayaran pajak STNK kendaraan bermotor roda 4	unit	11	11			
				Dukungan terhadap penunjang urusan pemerintah daerah	100% %	100	100			
				Kendaraan dinas/ operasional roda 4 yang dipelihara sesuai RKPBM	unit	11	11			
				Kendaraan dinas/ operasional roda 2 yang dipelihara sesuai RKPBM	unit	2	2			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
				Peralatan jaringan yang dipelihara sesuai RKBMD	jenis	1	1			
				Dukungan terhadap penunjang urusan pemerintah daerah	100% %	100	100			
				Peralatan kantor yang dipelihara sesuai RKBMD	jenis	9	9			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
				Depo yang dipelihara sesuai RKPBM	unit	1	1			
				Gudang terpelihara sesuai RKBMD	unit	2	2			

NO	Ururan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Dukungan 100% terhadap penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100			
				Gedung kantor yang unit dipelihara sesuai RKPBM	unit	2	2			
				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						
				Kesesuaian program dan kegiatan antara KUA PPAS dan RAPBD	%	100	100			
				Ketepatan dalam penyusunan RAPBD dan RPAPBD	%	100	100			
				Keakuratan dalam penatausahaan keuangan daerah	%	100	100			
				Persentase kinerja pembinaan pengelolaan keuangan daerah	%	100	100			
				Ketepatan Waktu penyampaian dan Kelengkapan Laporan Keuangan sesuai SAP (tepat waktu 60%, lengkap 40%, tidak tepat waktu 30%, tidak lengkap 20%)	%	100	100			
				Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS						
				KUA PPAS Tahun N+1	dokumen	1	1			
				Dukungan 100% terhadap penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100			
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS						
				KUPA PPASP Tahun N	dokumen	1	1			

NO	Ururan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Dukungan 100% terhadap penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100			
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD						
				Dukungan 100% terhadap penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100			
				Verifikasi RKA SKPD sebagai acuan penyusunan RAPBD tahun N+1	OPD	33	33			
				Verifikasi RKAP SKPD sebagai acuan penyusunan RPAPBD tahun N	OPD	33	33			
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD						
				DPPA SKPD disyahkan paling lambat 15 hari kerja setelah perubahan APBD tahun N ditetapkan sesuai dengan Perda Perubahan APBD Tahun N	dokumen DPPA	33	33			
				DPA SKPD disyahkan paling lambat 15 hari kerja setelah APBD Tahun N+1 ditetapkan sesuai dengan Perda APBD Tahun N+1	dokumen DPA	33	33			
				SPD PA/KPA diterbitkan dalam 3 hari kerja sesuai dengan DPPA SKPD Tahun N yang telah disyahkan	dokumen SPD	156	156			

NO	Ururan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				SPD PA/KPA diterbitkan dalam 3 hari kerja sesuai dengan DPA SKPD paling lambat hari kerja terakhir sebelum triwulan tersebut dimulai	dokumen SPD	314	314			
				Dukungan 100% terhadap penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100			
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD						
				Pergub Penjabaran APBD Tahun N+1 ditetapkan paling lambat bulan Desember Tahun N yang sesuai dengan dokumen perencanaan KUA/PPAS dan peraturan perundangan yang berlaku	dokumen	1	1			
				Dukungan 100% terhadap penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100			
				Perda APBD Tahun N+1 ditetapkan paling lambat bulan Desember Tahun N yang sesuai dengan dokumen perencanaan KUA/PPAS dan peraturan perundangan yang berlaku	dokumen	1	1			
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD						

NO	Ururan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Dukungan 100% terhadap penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100			
				Perda Perubahan APBD tahun N yang ditetapkan paling lambat minggu ketiga bulan Oktober tahun N yang sesuai dengan dokumen perencanaan KUPA PPASP dan peraturan perundangan yang berlaku	dokumen	1	1			
				Pergub Penjabaran Perubahan APBD tahun N yang ditetapkan paling lambat minggu ketiga bulan Oktober tahun N yang sesuai dengan dokumen perencanaan KUPA PPASP dan peraturan perundangan yang berlaku	dokumen	1	1			
				Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran						
				Pembinaan pengelolaan keuangan daerah kelompok sasaran pengelola keuangan BLUD	BLUD	7	7			
				Keputusan Gubernur tentang penetapan penerima Hibah Bansos	keputusan	6	6			
				Keputusan Gubernur tentang penetapan KPA Dana Dekon (sesuai jumlah DIPA)	keputusan	17	15			

NO	Ururan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan peraturan tentang Pengelolaan keuangan Daerah (PMK dan permendagri)	peraturan	1	1			
				Keputusan Gubernur tentang penetapan bendahara dan KPA BOS	keputusan	2	2			
				Raperda Pokok-pokok Pengelolaan keuangan Daerah	dokumen	1	1			
				Dukungan 100% terhadap penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100			
				Keputusan Gubernur tentang penetapan bendaharadan KPA/KPB APBD	keputusan	2	2			
				Naskah akademik Perda Pokok-Pokok Pengelolaan keuangan Daerah	dokumen	1	1			
				Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota						
				Hasil evaluasi paling lambat 15 hari kerja setelah Raperda APBD Kab/Kota tahun n+1 diterima secara lengkap berdasarkan Permendagri tentang	kepgub	5	5			

NO	Ururan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pedoman penyusunan APBD Tahun n+1						
				Dukungan 100% terhadap penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100			
				Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota						
				Hasil evaluasi paling lambat 15 hari kerja setelah Raperda RAPBD Kab/Kota tahun n diterima secara lengkap berdasarkan Permendagri tentang Pedoman penyusunan APBD Tahun n	kegub	5	5			
				Dukungan 100% terhadap penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100			
				Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota						
				Hasil evaluasi paling lambat 15 hari kerja setelah Raperda Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota tahun n-1 diterima secara lengkap	kegub	5	5			
				Dukungan 100% terhadap penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100			

NO	Ururan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah						
				Laporan Keuangan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	dokumen	2	2			
				Dukungan 100% terhadap penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)						
				Dukungan 100% terhadap penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100			
				Berita Acara Rekonsiliasi dengan PT Taspen dan BPJS Kesehatan	dokumen	6	6			
				Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait						
				Dukungan 100% terhadap penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100			
				Penerbitan SP2D Belanja Langsung, Belanja tidak langsung gaji, belanja tidak langsung non gaji seluruh PA dan KPA pemda DIY	dokumen	8.000	9.434			
				Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran						

NO	Ururan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Dukungan 100% terhadap penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100			
				Laporan pelaksanaan anggaran semesteran dan prognosis SKPD Tahun n selesai bulan Juli tahun n	dokumen	1	1			
				Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah						
				Dukungan 100% terhadap penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100			
				Laporan Keuangan Unaudited	dokumen	1	1			
				Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi						
				Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun n-1 disampaikan paling lambat bulan Juni tahun n sesuai dengan Perda APBD	dokumen	1	1			
				Dukungan 100% terhadap penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100			
				Rapergub Pertanggungjawaban APBD Tahun n-1 disampaikan paling lambat bulan Juni tahun	dokumen	1	1			

NO	Ururan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				n sesuai dengan Perda APBD						
				Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD						
				Laporan tindak lanjut dilaksanakan 60 hari setelah LHP BPK diterima	laporan	1	1			
				Dukungan 100% terhadap penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100			
				Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah						
				Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	sistem	1	1			
				Dukungan 100% terhadap penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100			
				Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi						
				Dukungan 100% terhadap penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100			
				Sumber daya manusia yang handal dan kompeten dalam pelaporan dan pertanggungjawaban	orang	150	150			
				Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan						
				Dukungan 100% terhadap penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100			

NO	Ururan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Belanja bantuan keuangan	tahun	1	1			
				Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak						
				Dukungan 100% % terhadap penunjang urusan pemerintah daerah		100	100			
				Belanja tidak terduga	tahun	1	1			
				Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi						
				Belanja bagi hasil	dokumen	1	1			
				Dukungan 100% % terhadap penunjang urusan pemerintah daerah		100	100			
				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						
				Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dikelola sesuai prosedur	%	100	100			
				Jumlah potensi barang Milik Daerah yang didayagunakan	%	85,71	85,71			
				Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah						
				Dukungan 100% % terhadap penunjang urusan pemerintah daerah		100	100			
				Rencana kebutuhan barang milik daerah menjadi pedoman penyusunan RKA	dokumen	1	1			
				Penilaian Barang Milik Daerah						
				Laporan penilaian BMD dalam rangka pemanfaatan BMD untuk memperoleh nilai-nilai wajar yang sesuai dengan bentuk	dokumen	6	6			

NO	Ururan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				pemanfaatan barang milik daerah						
				Laporan penilaian BMD dalam rangka potensi aset BMD	dokumen HBU	1	1			
				Dukungan 100% terhadap penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100			
				Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah						
				Bangunan gedung unit kantor terjual dan gedung terhapus sesuai keputusan Gubernur		5	4			
				Kendaraan dinas terjual dan terhapus sesuai dengan keputusan Gubernur	unit/R2	10	34			
				Kendaraan dinas terjual dan terhapus sesuai dengan keputusan Gubernur	unit/R4	5	10			
				Hasil survey harga barang/jasa sebagai penunjang penyusunan SHBJ 2023	dokumen	1	1			
				Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah						
				Dukungan 100% terhadap penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100			
				Evaluasi pemanfaatan BMD untuk lebih berdayaguna dan berhasil guna terhadap	dokumen kajian	10	10			

NO	Ururan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				BMD yang akan dimanfaatkan						
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						
				Persentase Kontribusi Pendapatan Pajak, Retribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan , PAD Lain yang Sah Terhadap pendapatan	%	58,08	52,07			
				Kenaikan Pajak daerah KPPD DIY di Kota Yogyakarta	Rp	33.886.438.542	7.196.341.385			
				Kenaikan Pajak daerah KPPD DIY di Kabupaten Bantul	Rp	35.033.162.653	0			
				Kenaikan Pajak daerah KPPD Kabupaten Gunungkidul	Rp	11.028.178.432	0			
				Kenaikan Pajak Daerah KPPD DIY di Kabupaten Sleman	Rp	69.836.655.988	0			
				Kenaikan Pajak Daerah KPPD DIY di Kabupaten Kulon Progo	Rp	11.557.445.990	0			
				Persentase Kontribusi Pendapatan Pajak, Retribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan , PAD Lain yang Sah Terhadap pendapatan	%	58,08	52,07			
				Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah						
				Dukungan 100% terhadap penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100			
				PAD	rupiah	1.840.534.901.958	1.891.088.291.460			

NO	Ururan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Lain-lain PAD yang sah	rupiah	64.682.870.865	67.673.064.931			
				Laporan dana transfer	dokumen	7	7			
				Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	rupiah	93.923.341.444	96.291.722.881			
				Pajak Daerah	rupiah	1.647.560.774.548	1.688.443.391.223			
				Retribusi Daerah	rupiah	34.367.915.101	38.680.112.425			
				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.						
				Hasil penyusunan perencanaan target pendapatan daerah dari PAD	rupiah	1.840.534.901.958	1.891.088.291.460			
				Hasil penyusunan perencanaan target pendapatan daerah dari dana transfer	rupiah	3.805.715.311.123	3.794.855.660.531			
				Dukungan 100% terhadap penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100			
				Pergub NKB dan pergub perubahan tarif retribusi daerah	dokumen	2	2			
				Hasil penyusunan perencanaan target pendapatan daerah dari pendapatan hibah	rupiah	7.576.500.000	7.179.410.233			
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah						
				Sosialisasi pergub NKB	kegiatan	1	1			
				Publikasi kebijakan pajak dan retribusi daerah	bulan	12	12			
				Sosialisasi pajak daerah	kali	12	12			
				Penyuluhan pajak daerah	kali	3	3			
				Dukungan 100% terhadap penunjang	%	100	100			

NO	Ururan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				urusan pemerintah daerah						
				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah						
				Dana bergulir BUKP (Rekening Pembiayaan)	%	100	100			
				Nilai NPL BUKP	%	20,66	19,45			
				Dana pembinaan BUKP Tahun 2020	rupiah	333.866.967	333.866.967			
				Dukungan 100% terhadap penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100			
				Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Laporan tahunan BUKP tahun buku N-1	keputusan	1	1			
				Sistem Informasi Kepegawaian BUKP (Modul kenaikan gaji berkala)	paket	1	1			
				Penyertaan modal pada PT Bank BPD DIY (Rp145.000.000.000 kekurangan tahun 2019, Rp121.040.000.000 kekurangan tahun 2020 dan Rp244.667.000.000) sesuai Perda untuk 2021 (Rekening Pembiayaan)	rupiah	510.707.000.000	112.500.000.000			
				Deviden BUKP Tahun buku 2020 yang diterima pada Tahun 2021	rupiah	89.948.853.516,22	89.948.853.516			
				Keputusan Kepala BPKA tentang Pengesahan	keputusan	1	1			

NO	Ururan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				RKAT BUKP tahun buku 2021 berdasarkan SE Pedoman Penyusunan RKAT N+1 selambat-lambatnya akhir Nopember						
				Keputusan Gubernur tentang pembagian laba bersih BUKP tahun N-1	keputusan	1	1			
				Jasa Produksi BUKP Tahun 2020	rupiah	250.400.225,25	250.400.225			
				Deviden BUKP Tahun 2020 yang diterimakan pada Tahun 2021	rupiah	6.385.055.910,53	6.385.055.910			

d. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

1) *Kepegawaian*

a) *Kondisi Umum*

Salah satu aspek mendasar dalam reformasi birokrasi adalah Sumber Daya Aparatur. Terbitnya UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi pembaharuan dalam manajemen sumber daya aparatur. Tujuannya adalah untuk membangun aparat sipil negara yang memiliki integritas, profesional dan netral serta bebas dari intervensi politik, juga bebas dari praktik KKN, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. Sistem merit menjadi kunci dalam pembaharuan manajemen sumber daya aparatur. Sistem ini merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi.

Pada Tahun 2020, Pemda DIY mendapatkan predikat sangat baik dalam penerapan sistem merit. Hal ini tentu saja harus dipertahankan dan ditingkatkan sebagai aspek yang mendukung sasaran Pemda DIY di tahun 2025 yaitu terselenggarakannya pemerintahan yang profesional, demokratis, transparan, akuntabel, dan berlandaskan supremasi hukum.

Penyederhanaan birokrasi menjadi salah satu prioritas kerja Presiden RI. Sebagai tindak lanjut dari penyederhanaan birokrasi ini adalah telah dilakukannya penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional di lingkungan Pemda DIY. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Permenpan RB RI Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional. Kebijakan penyetaraan jabatan ini dimaksudkan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya

peningkatan efektivitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik.

Dalam lingkup Sumber Daya Manusia Aparatur, Pemda DIY melalui Badan Kepegawaian Daerah DIY terus melakukan upaya perbaikan atau reformasi birokrasi dalam rangka pelaksanaan manajemen ASN yang lebih baik, sebagai berikut.

(1) *Perencanaan dan Pengadaan Pegawai*

Perencanaan kepegawaian menjadi langkah prioritas untuk mewujudkan penyediaan ASN yang berkualitas, profesional, dan penempatan yang sesuai dengan keahliannya (*the right man on the right place*). Hasil analisis beban kerja dan analisis jabatan disandingkan dengan *bezetting* pegawai dan pegawai yang akan pensiun, PNS yang meninggal dunia serta PNS mutasi untuk mengetahui proyeksi kebutuhan pegawai tahunan dan atau lima tahunan.

Rekrutmen Pegawai merupakan proses yang krusial dan kritis. Krusial artinya rekrutmen pegawai memiliki implikasi *high cost economy* dan merupakan investasi besar bagi satuan organisasi/negara termasuk Pemda DIY. Dampak langsung dari kompetensi sumber daya masyarakat terletak pada kinerja dan produktifitas pemerintah dalam melayani masyarakat dan menjalankan roda pemerintahan.

Pelaksanaan seleksi CPNS dilaksanakan secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan dengan mengedepankan prinsip objektif, transparan, kompetitif, bebas KKN, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya. Proses seleksi terdiri dari tiga tahap meliputi seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang.

Computer Assisted Test (CAT) adalah suatu metode seleksi dengan alat bantu komputer untuk mendapatkan standar minimal kompetensi dasar bagi pelamar CPNS. Sistem ini sangat mudah digunakan dan *adaptable*.

Seleksi CPNS bertujuan untuk mendapatkan calon aparatur yang berkualitas. Tujuannya adalah untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat, serta motivasi nasionalisme dan kebangsaan. Lebih jauh, proses tersebut akan membentuk karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab serta memperkuat profesionalisme dan kompetensi bidang PNS yang bersangkutan.

(2) *Rightsizing*

Prinsip dalam *Rightsizing* yaitu “menempatkan orang yang tepat dalam jabatan yang tepat”. Prinsip ini memerlukan alat yang dapat mengenali kompetensi PNS dan untuk menetapkan standar kompetensi jabatan. Penempatan dan distribusi PNS (jabatan fungsional tertentu dan umum) akan lebih mempertimbangkan hasil pemetaan jabatan dan formasi (sesuai kebutuhan dan keahlian yang dimiliki), sedangkan untuk penataan dan penempatan dalam jabatan struktural mempertimbangkan rekomendasi *Assessment Center* dengan tanpa mengabaikan hak-hak PNS sesuai dengan nilai-nilai demokratis, transparansi, dan keadilan.

Sesuai dengan amanat Permenpan RB RI Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional, Pemda DIY sudah melakukan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Penyetaraan ini dilakukan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi untuk

mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan prinsip “menempatkan orang yang tepat dalam jabatan yang tepat”.

(3) Implementasi Merit System

Pada tahun 2020, Pemda DIY mendapatkan predikat “sangat baik” dalam penerapan Sistem Merit setelah dilakukan penilaian oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Penilaian ini meliputi 8 (delapan) aspek yaitu a) perencanaan kebutuhan; b) pengadaan; c) pengembangan karier; d) promosi dan mutasi; e) manajemen kinerja; f) penggajian, penghargaan dan disiplin; g) perlindungan dan pelayanan; serta h) sistem informasi.

Predikat “sangat baik” pada penilaian Sistem Merit Pemda DIY Tahun 2020 diperoleh dengan nilai 342 dengan indeks 0,83. Meningkat dari tahun 2019 Pemda DIY mendapat nilai 313,50 dengan indeks 0,78. Hal ini harus dipertahankan dan ditingkatkan sebagai aspek yang mendukung sasaran Pemda DIY di tahun 2025 yaitu terselenggarakannya pemerintahan yang profesional, demokratis, transparan, akuntabel, dan berlandaskan supremasi hukum.

(4) Peningkatan Kompetensi ASN

Peningkatan kompetensi perlu dilakukan pada tingkat instansi maupun nasional untuk memenuhi kebutuhan kompetensi ASN dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karir.

Peningkatan kompetensi ASN dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) maupun non diklat, yaitu diklat teknis/fungsional, Pendidikan formal maupun

non formal, atau Pendidikan lainnya yang berkaitan dengan perubahan pola pikir, moral, dan perilaku SDM aparatur. Pemda DIY mengupayakan sistem penciptaan PNS professional, kompeten, dan berkinerja baik melalui pemberdayaan jabatan fungsional tertentu. Sistem ini mengandung dua proses, yaitu: 1) memasukkan pemerintah dalam jabatan fungsional; dan 2) memasukkan jabatan fungsional dalam pemerintah. Proses pertama diartikan bahwa pemerintah daerah mendukung pengembangan jabatan fungsional tertentu berupa formasi jabatan dan ketersediaan dana untuk pengembangan profesi baik melalui diklat, penelitian, dan observasi. Proses kedua diartikan bahwa pejabat fungsional (tingkat ahli) dilibatkan secara langsung dalam proses pengambilan kebijakan. Proses kedua akan berjalan dengan baik jika proses pertama dilakukan secara jujur dan profesional. Artinya, dukungan pemerintah daerah tidak dimaksudkan untuk mengurangi peran dan aspirasi pejabat fungsional.

(5) Peningkatan Kesejahteraan

Peningkatan kesejahteraan ASN dimaksudkan untuk memupuk rasa disiplin dan loyalitas ASN kepada negara dan bangsa. Kesejahteraan ASN di lingkungan Pemda DIY ditingkatkan dengan pemberian tunjangan tambahan penghasilan sesuai dengan prestasi kerja berdasarkan pada kinerja individu dan instansi. Pemberian tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan penilaian kinerja merupakan wujud penghargaan atau reward bagi ASN sesuai dengan kinerjanya. Pemda DIY mengatur tentang pemberian tunjangan tambahan penghasilan ini melalui Pergub DIY Nomor 112 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai.

(6) *Peningkatan Kualitas Layanan melalui penerapan ISO 9001-2015*

Perbaikan kinerja pelayanan di bidang kepegawaian secara berkelanjutan akan mendorong terciptanya iklim kondusif bagi kegiatan penyelenggaraan pelayanan manajemen aparatur yang pada akhirnya akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Perbaikan kinerja pelayanan juga akan berdampak pada tumbuhnya kepercayaan (*trust*) dan legitimasi terhadap Pemerintah.

Peningkatan mutu layanan kepada ASN dan masyarakat dapat dilakukan dengan membangun Sistem Manajemen Mutu berstandar mutu internasional yakni ISO 9001 versi 2015. Pembangunan Sistem Manajemen Mutu dimaksudkan untuk memberikan pelayanan prima kepada *user*, kejelasan prosedur, tata kerja, serta dokumentasi arsip. Tujuan pembangunan Sistem Manajemen Mutu ini antara lain: 1) Untuk menetapkan Sistem Manajemen Mutu instansi, tanggung jawab masing-masing personil serta memberikan prosedur umum bagi layanan yang berkaitan dengan sistem mutu; 2) Sebagai bentuk komitmen untuk memelihara mutu, menyerahkan produk, mengendalikan mutu, melakukan perbaikan secara berkelanjutan, serta menyelenggarakan pelayanan berorientasi pada kepuasan pelanggan; 3) Memonitor kekurangan dalam penyelenggaraan layanan dan sebagai bahan tindak lanjut perbaikan; 4) Memastikan bahwa seluruh personil memiliki pemahaman terhadap persyaratan dan tanggung jawab layanan; dan 5) Memberikan pedoman dalam bertindak dan mengambil keputusan.

(7) *Penguatan Peran Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai sebagai penyelenggara Assessment Center*

Assessment Center adalah suatu metode untuk memprediksi perilaku melalui beberapa simulasi oleh beberapa penilai untuk mengukur kemampuan seseorang dalam menangani tanggung jawab di masa mendatang dengan menggunakan kriteria kesuksesan dalam jabatan tersebut.

Kehadiran Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai di Pemda DIY diharapkan mampu berperan secara optimal untuk mengidentifikasi kompetensi pegawai khususnya di lingkungan Pemda DIY yang diharapkan dapat diaplikasikan untuk kebutuhan promosi, pelatihan dan pengembangan, maupun perencanaan SDM organisasi sehingga dapat membangun karakter pegawai dan pejabat di Pemda DIY yang profesional, bersih, dan melayani.

Tabel 3.180. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sub Urusan Kepegawaian Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase kualitas manajemen SDM aparatur	%	88,41	83,00	90,95	109,85	85,00	104,01

Sumber: BKD DIY, 2022

Realisasi capaian indikator kinerja Persentase pemenuhan kebutuhan dengan kompetensi aparatur Tahun 2020 sebesar 90,95% dari target 83%, atau sebesar 109,85%.

Berbagai cara dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan, diantaranya dengan melakukan seleksi Tenaga Bantu atau Naban. Seleksi ini dilakukan dapat memenuhi kebutuhan pegawai yang menurun tiap tahun karena purna tugas. Pegawai yang

memasuki masa purna tugas pada tahun 2021 sebanyak 817 dari yang direncanakan 700 pegawai.

Pada tahun 2021 diselenggarakan seleksi ASN Pemda DIY dengan formasi CPNS 56 orang, PPPK Non-Guru 26 orang, dan PPPK Guru 184 orang. Seleksi administrasi sudah dilakukan terhadap 4.234 orang pelamar dengan hasil 1.419 orang pelamar lolos tahap selanjutnya. Seluruh tahapan seleksi sampai pengumuman akhir sudah selesai dilakukan pada Tahun 2021, dengan keterisian formasi CPNS 56 orang, PPPK Non-Guru 19 orang, dan PPPK Guru 184 orang. Pengangkatan kembali Naban dan seleksi Naban Tahun 2021 juga sudah dilaksanakan.

b) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2021

Pada tahun 2021 Penunjang Urusan Sub Urusan Kepegawaian dilaksanakan melalui kegiatan dengan alokasi Rp31.053.890.479,00. Pengalokasian anggaran tersebut dibagi dalam 3 program, 11 kegiatan, dan 40 sub kegiatan. Secara keseluruhan belanja dapat direalisasi sebanyak Rp28.162.354.731,00 atau 90,69%, dengan pencapaian fisik sebesar 100%. Beberapa program kegiatan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan PPKM. Selanjutnya rincian capaian kinerja program dan kegiatan tertuang dalam tabel berikut.

[illegible]

No	Ururan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			yang terintegrasi dan berbasis kompetensi	Jumlah ASN Mutasi yang Memahami Keistimewaan DIY	orang	60	60			Terkait peningkatan kompetensi SDM Tenaga Teknis (Tanaga Bantu) telah dilaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk Tenaga Bantu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah DIY melalui BKD DIY. Reformasi Birokrasi 1) Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 dijelaskan bahwa mekanisme pengisian jabatan yang dilakukan secara seleksi terbuka adalah pada Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) atau dalam hal ini disebut Eselon II. Sedangkan untuk pengisian jabatan administrator dan jabatan pengawas (Eselon III dan IV) mekanisme pengisiannya dilakukan melalui penetapan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) setelah mendapat pertimbangan dari tim penilai kinerja pada instansi pemerintah.
2	KEPEGAWAIAN	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1. Mengembangkan sistem talent pool untuk menuju merit system pengelolaan kepegawaian 2. Mengembangkan potensi aparatur agar lebih kompetensi dan memiliki daya bersaing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung	persen	100	100	Belum tersedianya juknis yang jelas dalam pengelolaan PPPK yang saat ini sudah ada di daerah	Percepatan sistem merit sesuai dengan arahan KASN, Penusunan Formasi dalam rangka pemenuhan pegawai sudah dikirimkan ke Kemenpan dan saat ini masih menunggu keputusan dari	Penunjang Urusan 1) Sesuai Pasal 25 dan Pasal 26 Peraturan Gubernur DIY Nomor 106 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Tenaga Bantu, bahwa jaminan Kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian kerja diberikan kepada Tenaga kerja sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional. Jaminan

No	Ururan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				kelancaran tugas dan fungsi SKPD					Kemenpan, Keputusan P3K juga masih menunggu keputusan dari Kemenpan	Hari Tua dan Pensiun belum diatur dalam Peraturan Gubernur tersebut. Perlu kami sampaikan bahwa besaran iuran kepesertaan Jaminan Hari Tua sebesar 5,7% dari gaji (3,7% dari Pemerintah Daerah dan 2% dari Tenaga Bantu), sedangkan besaran iuran Pensiun sebesar 3 % dari gaji (2% dari Pemerintah Daerah dan 1% dari Tenaga Bantu). Terhadap kedua Program Jaminan tersebut perlu kebijakan lebih lanjut terkait dengan penambahan subsidi gaji sebesar 5,7% dan pemotongan gaji Tenaga Bantu sebesar 3% untuk sejumlah 3.462 Tenaga Bantu. 2) Pengembangan kompetensi untuk tenaga bantu di lingkungan Pemerintah Daerah DIY berdasarkan pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 106 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Tenaga Bantu. Terkait peningkatan kompetensi SDM Tenaga Teknis (Tenaga Bantu) telah dilaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk Tenaga Bantu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah DIY melalui BKD DIY. Reformasi Birokrasi 1) Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
			3. Perencanaan pegawai	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	persen	100	100			
			4. Perbaikan sistem rekrutmen pegawai	Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	persen	100	100			
			5. Rightsizing	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
			6. Pelaksanaan sistem seleksi terbuka	Dokumen Perencanaan OPD Tahun Anggaran 2022 dan Perubahan Tahun Anggaran 2021	dokumen	10	10			
			7. Profesionalisme PNS	Kesepakatan Hasil Forum Perencanaan OPD	BA	1	1			
			8. Penguatan jabatan fungsional	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
			9. Mewujudkan layanan kepegawaian secara less paper	Realisasi Capaian Fisik dan Keuangan sesuai Tahapan ROPK	laporan	12	12			
			10. Penerapan manajemen kinerja	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang Capaian Kinerjanya sesuai dengan Dokumen Perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) (Nilai LKjIP A)	laporan	1	1			
			11. Meningkatkan mutu layanan dengan pelayanan kepegawaian terpadu berdasarkan data kepegawaian yang terintegrasi dan berbasis kompetensi	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Administrasi Perkantoran yang Terselenggarakan dengan Baik dan Tepat Waktu	Tahun	1	1			

No	Ururan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						<p>Nomor 17 tahun 2020 dijelaskan bahwa mekanisme pengisian jabatan yang dilakukan secara seleksi terbuka adalah pada Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) atau dalam hal ini disebut Eselon II. Sedangkan untuk pengisian jabatan administrator dan jabatan pengawas (Eselon III dan IV) mekanisme pengisiannya dilakukan melalui penetapan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) setelah mendapat pertimbangan dari tim penilai kinerja pada instansi pemerintah.</p>
				Laporan Keuangan sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran, Dokumen Perencanaan Anggaran dan Dapat Memberikan Informasi Keuangan bagi Pengguna Informasi (laporan keuangan tahunan)	laporan	1	1			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD						
				Laporan Keuangan sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran, Dokumen Perencanaan Anggaran dan Dapat Memberikan Informasi Keuangan bagi Pengguna Informasi (laporan keuangan bulanan/prognosis))	Laporan	13	13			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
				Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	jenis	25	25			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
				Peralatan Kantor sesuai RKBMD	jenis	11	11			
				Perlengkapan Kantor sesuai RKBMD	jenis	4	4			
				Tabung Pemadam Kebakaran yang Terisi	tabung	0	0			
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
				Alat Kebersihan	jenis	19	19			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
				Dokumen Hasil Cetak	jenis	20	20			

No	Ururan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Dokumen Hasil Penggandaan	lbr	57900	51404			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
				Bukti Pembayaran Langganan Surat Kabar/Harian/Majalah dan Buku	bulan	12	12			
				Penyediaan Bahan/Material						
				Alat Tulis Kantor	jenis	65	65			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
				Laporan dan Rencana Tindak lanjut Hasil Konsultasidan Koordinasi	tahun	1	1			
				Laporan dan Rencana Tindak lanjut Hasil RapatKoordinasi dan Tamu	tahun	1	1			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
				Arsip Dinamis SKPD yang Terkelola	bidang	6	6			
				Bukti Pembayaran Pengiriman Dokumen	tahun	1	1			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
				Bukti Pembayaran Perijinan Frekwensi Radio	tahun	1	1			
				Bukti Pembayaran Tagihan Listrik, Telepon dan Air	tahun	1	1			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
				Kendaraan Dinas/Operasional Roda Empat 7 unit yang terpelihara sesuai RKPBM	tahun	1	1			
				Kendaraan Dinas/Operasional Roda Dua 4 unit yang terpelihara sesuai RKPBM	tahun	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
				Bukti Pembayaran bulan		12	12			
				Pajak/STNK Kendaraan roda dua 4unit dan roda empat 7 unit						
				Pemeliharaan Mebel						
				Mebeleur sesuai RKPBM	tahun	0	0			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
				Peralatan Kantor sesuai RKBMD	tahun	1	1			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
				Gedung Kantor yang Terpelihara sesuai RKPBM	tahun	1	1			
				Fumigasi Ruang Arsip	ruang	2	2			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
				Keamanan Kantor yang Terjaga dengan Baik	tahun	1	1			
				Kebersihan Kantor yang Terjaga dengan Baik	tahun	1	1			
				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						
				Persentase Pegawai sesuai Kebutuhan Pegawai (Formasi dan Bezzeting)	persen	83	88,56			
				Persentase Pegawai Perangkat Daerah dengan Data Kepegawaian Terintegrasi, Valid, dan Update	persen	91,30	92,85			
				Persentase pemenuhan kompetensi pegawai	persen	83	93,35			
				Persentase SK kepegawaian yang terselesaikan tepat waktu	persen	92	97,30			
				Nilai survei kepuasan dari pelayanan kepegawaian	nilai	80	88,84			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Persentase kompetensi individu yang terpetakan	persen	49,76	45,09			
				Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN						
				Proyeksi Kebutuhan dokumen Pegawai		1	1			
				Formasi Pegawai Tahunan dokumen		1	1			
				Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK						
				Aplikasi Si Seksi (CAT) paket		1	1			
				Pegawai Rekrutmen Sesuai Formasi orang		3500	3684			
				Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian						
				Jumlah Pegawai Pensiun orang		700	817			
				Akurat dan Tepat Waktu						
				Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian						
				Laporan data monev laporan kepegawaian Pemda DIY /Kab/Kota		12	12			
				Aplikasi Layanan Kepegawaian (Portal Aplikasi Kepegawaian Berbasis Mobile Application, Sistem Informasi Presensi Mobile bagi Non PNS /Tenaga Bantu)	aplikasi	2	2			
				ID Card PNS Pemda DIY	ID Card	800	800			
				Perangkat Komputer berupa Printer ID Card	unit	1	1			
				Mesin Presensi Terpelihara dengan Baik	mesin	150	150			
				Pengelolaan Data Kepegawaian						
				Dokumen Perorangan/ Sinkronisasi Letak Dokumen Fisikdan Elektronik	paket	1	1			
				Kartu Identitas (Karis/ Karsu dan Karpeg)	kartu	300	699			
				Survei Kepuasan Masyarakat	laporan	1	1			

No	Ururan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Sosialisasi Dokumen Elektronik	orang	240	240			
				Sertifikasi Layanan Mutu	sertifikat	1	1			
				Pengembangan Aplikasi Arsip dan Buku Tamu	aplikasi	2	2			
				Tata Kelola Dokumen Kepegawaian Perorangan dan Kolektif	SK	350	404			
				Pengelolaan Mutasi ASN						
				SK Mutasi dan Rotasi Jabatan Pelaksana	SK	200	291			
				Kajian Manajemen ASN	dokumen	1	1			
				SK Pengangkatan Aparatur (mutasi) PNS	SK	75	59			
				Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN						
				Jumlah PNS yang Naik Pangkat Akurat dan TepatWaktu	orang	900	1146			
				Pengelolaan Promosi ASN						
				SK Pengangkatan Pengisian Jabatan Administrator (eslIII) , Pengawas (esl IV dan V) dan Kepala Sekolah	SK	150	295			
				Pengangkatan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi	SK	2	21			
				Pengelolaan Assessment Center						
				Perjanjian kerja sama pengukuran kompetensi	PKS	8	14			
				Kesesuaian kompetensi SDM dalam jabatan profil kompetensi dalam DIY	orang	320	317			
				Kabupaten/Kota DIY yang terkoordinir dalam kerja sama pengukuran	kabupaten/kota	0	0			
				Kesesuaian kompetensi SDM dalam jabatan profil kompetensi luar DIY	orang	202	225			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Laporan Survey Kepuasan Masyarakat dan Evaluasi Kemitraan	laporan	2	2			
				Aparatur yang mengikuti bimbingan konseling pribadi	orang	10	30			
				Kesesuaian kompetensi SDM dalam jabatan profil potensi dalam DIY	orang	200	204			
				SDM Assessor dan Non Assessor yang berkompeten dengan diklat, pelatihan dan bimtek selama 1 tahun	orang	20	46			
				Kemitraan kerja sama Pengukuran	orang	0	0			
				Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN						
				Ijin Dinas Luar Negeri	surat	5	14			
				ASN Peserta Ujian Dinas	orang	260	340			
				Laporan Rencana Pengembangan Kompetensi (AKD)	laporan	1	1			
				Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN						
				ASN yang Mendapat Beasiswa Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Ikatan Dinas (Beasiswa S3 : 2 orang, S2 : 45 orang, S1:98 orang, D4: 110 Orang)	tahun	1	1			
				Koordinasi dan Kerja sama Pelaksanaan Diklat						
				Surat Perintah Tugas Pelatihan Kepemimpinann dan Teknis/ Fungsional yang Dikirim ke Diklat (Pelatihan PKN Tk. II : 5 orang, PKP : 15 orang, T/F : 182 orang, Pelatihan PKA : 10 orang, Bimtek Nabab : 1.390 orang)	tahun	1	1			
				Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN						

No	Ururan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ASN yang paham akan proses Sertifikasi Kompetensi	orang	30	30			
				Pejabat Fungsional DIY yang tersertifikasi kompetensi	orang	30	40			
				Pembinaan Jabatan Fungsional ASN						
				SK Pengangkatan Pengisian SK Jabatan Fungsional		100	447			
				Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						
				Jumlah ASN yang Paham tentang Penilaian TPP	orang	250	250			
				Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai						
				ASN yang Terseleksi untuk Mengikuti MTQ Tk.Nasional (Tilawah, Tartil, Dakwah & Hifdzil)	cabang lomba	0	0			
				ASN yang Terseleksi untuk Mengikuti Lomba olahraga dalamPORNAS KORPRI XVI (cabang Bola Voli)	cabang olahraga	0	0			
				Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai						
				Pegawai yang Menerima Satya Lancana Karyasatya	orang	450	418			
				PNS dan Nabab yang Terfasilitasi JKK/JKM	orang	5	25			
				Pembinaan Disiplin ASN						
				PNS yang paham pengisian LHKPN	orang	120	120			
				Penetapan hukum pegawai dan pejabat negara	surat	180	186			
				PNS yang paham tentang peraturan kepegawaian	orang	50	50			
				Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN						
				Terselesaikannya kasus pelanggaran disiplin PNS	kasus	14	15			

2) Pendidikan dan Pelatihan

a) Kondisi Umum

Paradigma dalam pengelolaan pengembangan aparatur menuntut adanya pengembangan kompetensi, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pengembangan kompetensi ini salah satunya dilakukan melalui pelatihan.

Upaya meningkatkan kapasitas dan kompetensi ASN tahun 2021 dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan sebanyak 19 angkatan yang terdiri dari Diklat Penjenjangan (Pelatihan Dasar CPNS sebanyak 7 angkatan, Diklat Kepemimpinan Tingkat II/Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk II sebanyak 1 angkatan, Diklat Kepemimpinan Tingkat III/Pelatihan Kepemimpinan Administrator sebanyak 2 angkatan, Diklat Kepemimpinan Tingkat IV/Pelatihan Kepemimpinan Pengawas) sebanyak 4 angkatan, Diklat Teknis sebanyak 4 angkatan, dan Diklat Fungsional sebanyak 1 angkatan. Target dan realisasi kinerja Sub Urusan Pendidikan dan Pelatihan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.182. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sub Urusan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Nilai Akreditasi Badan Diklat	Skor/angka	91	92	91	98,91	93	97,80

Sumber: Bandiklat DIY, 2022

Realisasi capaian indikator kinerja Akreditasi Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY pada tahun 2021 ini adalah sebesar 98,91%. Dari target skor akreditasi 92 pada tahun 2021 tercapai skor sebesar 91. Perbandingan antara capaian nilai akreditasi Badan

Pendidikan dan Pelatihan DIY antara tahun 2020 dan tahun 2021 adalah sama dari skor sebelumnya pada tahun 2020 juga sebesar 91. Sedangkan persentase capaian dibandingkan dengan target akhir RPJMD adalah sebesar 97,80% dari target skor 93 pada tahun 2022.

Nilai akreditasi Badan Pendidikan dan Pelatihan diperoleh dari proses reakreditasi terakhir yang dilakukan pada tahun 2017 yang lalu. Dari proses reakreditasi yang dilakukan tersebut, Badan Pendidikan dan Pelatihan berhasil mendapat akreditasi A dengan skor 91 dan berlaku selama 5 tahun ke depan. Pada tahun 2020 sesuai Perkal Nomor 25 Tahun 2015, Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY sebenarnya sudah harus dilakukan reakreditasi kembali untuk Diklat Prajabatan Golongan I dan II dikarenakan pada saat reakreditasi terakhir pada tahun 2017, Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY mendapatkan nilai B untuk Diklat Prajabatan Golongan I dan II tersebut sehingga masa berlaku akreditasinya hanya selama 3 tahun atau habis pada tahun 2020. Namun sesuai dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil yang sudah tidak mengklasifikasikan Pelatihan Dasar CPNS per golongan dan kemudian juga diperkuat dengan surat dari LAN RI Nomor 1946/D.3/PDP.09 tanggal 12 Mei 2020 yang menyebut berdasarkan peraturan terkait pelaksanaan akreditasi bahwa masa berlaku akreditasi Pelatihan Dasar CPNS Golongan I dan II untuk Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY dapat mengikuti masa berlaku akreditasi Pelatihan Dasar CPNS Golongan III yang berakhir bulan November 2022, maka reakreditasi Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY untuk Pelatihan Dasar CPNS tidak dilakukan pada tahun 2020. Secara otomatis skor akreditasi Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY untuk Diklat Kepemimpinan Tingkat III/Pelatihan Kepemimpinan Administrator, Diklat Kepemimpinan Tingkat

IV/Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, dan Pelatihan Dasar CPNS tetap memakai skor reakreditasi pada tahun 2017 sebelumnya dan baru akan dilakukan reakreditasi pada tahun 2022 mendatang.

b) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2021

Pada tahun 2021 jumlah anggaran Penunjang Urusan Sub Urusan Pendidikan dan Pelatihan melalui dana APBD berjumlah Rp22.460.697.634,00 yang terdiri dari belanja operasi sejumlah Rp21.931.630.414,00 dan belanja modal sejumlah Rp529.067.220,00. Jumlah program yang didanai melalui APBD yang dilaksanakan meliputi 3 program, 9 kegiatan dan 25 sub kegiatan. Capaian kinerja anggaran belanja untuk tahun 2021 sejumlah 73,10%. Dari total anggaran sejumlah Rp22.460.697.634,00 terealisasi Rp16.417.734.145,00. Rendahnya realisasi anggaran tersebut masih dipengaruhi oleh adanya dampak pandemi COVID-19. Sebagian besar pembelajaran diklat dilakukan secara daring sehingga banyak efisiensi anggaran untuk pelaksanaan diklat. Sedangkan realisasi kinerja fisik kegiatan untuk tahun 2021 sebesar 100%.

Tabel 3.183. Capaian Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1. Penyelenggaraan diklat yang berkualitas 2. Penyusunan kurikulum diklat dan pelaksanaan penelitian kediklatan 3. Mengembangkan jejaring kediklatan antar daerah/lembaga	PROGRAM PENYELENGGARAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kelembagaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Persen Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewaan PC All In One Peralatan Jaringan Internet LCD Projector Webcam Speaker Kamera Video Rehabilitasi Ruang Studio Tripod Background Smart TV Lampu Studio Mic Clip On Laptop Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan Penyelenggaraan Diklat Persen Keistimewaan bagi Aparatur Jumlah peserta diklat Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Keistimewaan (IWAK) Jumlah Peserta Diklat Tata Naskah dan Busana Jawa	Unit Paket Unit Unit Unit Unit Paket Unit Unit Unit Unit Set Unit	2 1 2 5 1 1 1 2 1 3 2 4	2 1 2 5 1 1 1 2 1 3 2 4	Adanya kebijakan penyederhanaan Birokrasi melalui pengalihan jabatan structural ke fungsional memunculkan kebutuhan pengembangan kompetensi melalui pelatihan untuk jabatan fungsional serta masih adanya pandemi COVID-19 yang berdampak pada upaya peningkatan kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan di Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY.	Melakukan kajian dan pengembangan kurikulum untuk mengakomodir pelaksanaan pelatihan fungsional dalam rangka mendukung penyederhanaan birokrasi serta pengembangan kurikulum berbasis pembelajaran jarak jauh (<i>smart learning</i>) dengan memanfaatkan teknologi informasi	NIHIL
2	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1. Penyelenggaraan diklat yang berkualitas 2. Penyusunan kurikulum diklat dan pelaksanaan penelitian kediklatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kesepakatan Hasil Forum Perencanaan OPD	Orang Orang Persen Berita Acara	60 30 100 1	60 30 100 1			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Laporan prognosis realisasi anggaran sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran, dokumen perencanaan anggaran dan dapat memberikan informasi keuangan bagi pengguna informasi : 1 Dokumen Laporan	Dokumen	1	1			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah						
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persen	100	100			
				Komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan	Jenis	19	19			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persen	100	100			
				Peralatan kantor sesuai RKBM	Jenis	5	5			
				Alat - Alat perlengkapan	Jenis	6	6			
				ATK	Jenis	20	20			
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persen	100	100			
				Tabung Pemadam Kebakaran yang terisi	Tabung	5	5			
				Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Jenis	19	19			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persen	100	100			
				Barang Cetak	Jenis	9	9			
				Dokumen hasil penggandaan	Tahun	1	1			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persen	100	100			
				Karya Tulis	Laporan	1	1			
				Laporan dan Rencana Tindak Lanjut Hasil Konsultasi dan Koordinasi	Tahun	1	1			
				Laporan dan Rencana Tindak Lanjut Hasil Rapat Koordinasi	Tahun	1	1			
				Laporan Pembinaan Angka Kredit	Laporan	1	1			
				SDM Aparatur yang Meningkatkan Kapasitasnya	Tahun	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persen	100	100			
				Bukti pembayaran pengiriman dokumen	Tahun	1	1			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persen	100	100			
				Bukti pembayaran telpon, listrik, air, dan TV	Tahun	1	1			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persen	100	100			
				Kebersihan Kantor yang Terjaga dengan Baik	Tahun	1	1			
				Administrasi perkantoran yang terselesaikan dengan baik dan tepat waktu	Tahun	1	1			
				Retribusi sampah	Tahun	1	1			
				Keamanan Kantor yang Terjaga dengan Baik	Tahun	1	1			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persen	100	100			
				Kendaraan dinas operasional roda 4 yang terpelihara sesuai RKBMD	Unit	7	7			
				Bukti pembayaran pajak/ STNK kendaraan roda 2 dan roda 4	Unit	13	13			
				Kendaraan dinas operasional roda 2 yang terpelihara sesuai RKBMD	Unit	6	6			
				Bukti Pembayaran pajak/ STNK/KIR kendaraan dinas/ operasional Roda 4	Unit	1	1			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persen	100	100			
				Gedung Kantor yang Terpelihara sesuai RKBMD	Bulan	12	12			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persen	100	100			
				Peralatan kantor yang terpelihara sesuai RKPBMMD	Jenis	14	14			
3	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1. Penyelenggaraan diklat yang berkualitas 2. Penyusunan kurikulum diklat dan pelaksanaan penelitian kediklatan 3. Mengembangkan jejaring kediklatan antar daerah/lembaga	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan (Kurikulum dan Modul) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat Teknologi Informasi dan Komunikasi Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat Manajemen Media Informasi Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat Penyuluh Anti Korupsi Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja sama, Pengembangan	Persen Kurikulum /Modul Persen Orang Orang Orang Persen	100 2 100 30 30 60 100	100 2 100 30 30 60 100			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional Laporan Hasil Penelitian dan Laporan Hasil Kajian Sertifikat ISO 9001 – 2015 Laporan Audit Eksternal ISO 9001 - 2015 Laporan Penjaminan Mutu Diklat Laporan Hasil Evaluasi Pasca Diklat Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar Buletin Diklat Bahan Pustaka yang terpelihara Pelaksanaan Kerja sama Antar Lembaga Hasil Rapat Kerja Monitoring Diklat Kemitraan Tk Regional Laporan Monitoring Diklat Kemitraan Mentor yang memahami peran dan tugas dalam memberikan pendampingan peserta diklat kepemimpinan/Latsar Hasil Kesepakatan Diklat Kemitraan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah CPNS yang mengikuti Pelatihan Dasar sebanyak 7 Angkatan	Laporan Sertifikat Laporan Laporan Laporan Laporan Persen Edisi Buku Persen Rekomendasi Laporan Orang Berita Acara Persen Orang	2 1 1 1 4 100 4 12.730 100 1 1 40 5 100 280	2 1 1 1 4 100 4 12.730 100 1 1 40 5 100 280			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Jumlah peserta yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat IV sebanyak 4 Angkatan	Orang	160	160			
				Jumlah peserta yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat II sebanyak 1 angkatan	Orang	60	60			
				Jumlah peserta yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat III sebanyak 2 Angkatan	Orang	80	80			
				Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan SosioKultural sebanyak 1 angkatan	Orang	30	30			

e. Sekretariat Daerah

1) *Tata Pemerintahan*

a) *Kondisi Umum*

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) DIY Tahun 2021 telah disampaikan kepada Presiden melalui Kemendagri dengan Surat Gubernur DIY Nomor 120/6226 Tanggal 29 Maret 2021 Perihal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) DIY Tahun 2021. Selain itu juga telah disusun Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) DIY Tahun 2021 dan telah dipublikasikan kepada masyarakat melalui media massa maupun media *online*.

Menindaklanjuti PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM dan Peraturan dari Kementerian Teknis/Sektoral, Pemda DIY juga telah melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi, pendampingan, dan pelaporan penerapan Standar Pelayanan Minimal 6 (enam) bidang urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yaitu Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat serta Bidang Sosial. Laporan SPM Tahun 2020 telah disampaikan kepada Mendagri melalui Dirjen Bina Pembangunan Daerah dengan Surat Gubernur DIY Nomor 120/4097 Tanggal 1 Maret 2021 Perihal Penyampaian Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2020.

Koordinasi, monitoring dan evaluasi juga dilakukan dengan pihak-pihak terkait dalam rangka fasilitasi penyelesaian permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah khususnya terkait tindak lanjut pengalihan Sarana dan Prasarana serta Dokumen yang berkaitan dengan kewenangan

berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Permasalahan penyelenggaraan pemerintahan yang telah difasilitasi penyelesaiannya, yaitu: 1) Pengalihan Aset Jalan yang Mengalami Perubahan Status 2) Pengalihan Aset TMP Bhakti Pertiwi dan Museum AURI Gunungkidul 3) Permohonan Izin Pengalihan Status UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Bantul menjadi UPTP Kemenaker, 4) Pengalihan Aset Pasar Ikan Hias dan Sub Raiser, 5) Pengalihan Aset Pelabuhan Tanjung Adikarto dan Ruas Jalan.

Berkaitan dengan hal tersebut Pemda DIY telah menerbitkan 4 Berita Acara Serah Terima (BAST) Pengalihan Aset, 3 Berita Acara Verifikasi Aset dan 3 rekomendasi penyelesaian permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk dapat ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait di Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Pusat.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 9 Desember 2020 di Kabupaten Gunungkidul, Sleman dan Bantul secara umum berjalan tertib, aman dan lancar. Kontestan Pilkada di 3 kabupaten dapat menerima hasil perolehan suara dan tidak mengajukan sengketa perselisihan ke Mahkamah Konstitusi.

Bupati dan Wakil Bupati Bantul, Gunungkidul dan Sleman Masa Jabatan Tahun 2016-2021 akan berakhir pada 17 Februari 2021, pada awal bulan Februari administrasi pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih hasil Pilkada Tahun 2020 masih berproses di Kemendagri. Untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang masa jabatannya berakhir pada Februari 2021 dan tidak ada sengketa perselisihan hasil Pilkada 2020 di Mahkamah Konstitusi, maka berdasarkan surat Mendagri Nomor 120/738/OTDA tanggal 3 Februari 2021 Hal Penugasan Pelaksana Harian Kepala Daerah, Gubernur DIY menunjuk

Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul, Sleman dan Gunungkidul sebagai pelaksana harian Bupati untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati sampai dengan dilantiknya Bupati/Wakil Bupati terpilih.

Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU pada pasal 164 ayat (1), Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilantik oleh Gubernur di ibukota Provinsi. Menindaklanjuti UU tersebut, Pemda DIY melaksanakan agenda penting yaitu Pelantikan Bupati Bantul, Bupati Sleman dan Bupati Gunungkidul oleh Gubernur yang dilaksanakan di Bangsal Kepatihan Yogyakarta pada tanggal 26 Februari 2021. Berikut daftar Bupati dan Wakil Bupati Bantul, Sleman dan Gunungkidul yang dilantik sesuai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-269 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Kabupaten di DIY:

Tabel 3.184. Nama Bupati dan wakil Bupati yang dilantik 26 Februari Tahun 2021

No.	Nama	Jabatan	Kabupaten
1.	Dra. Hj. Kustini Sri Purnomo	Bupati	Sleman
	Danang Maharsa, S.E.	Wakil Bupati	
2.	H. Abdul Halim Muslih	Bupati	Bantul
	Joko B. Purnomo	Wakil Bupati	
3.	Sunaryanta	Bupati	Gunungkidul
	Heri Susanto, S.Kom., M.Si.	Wakil Bupati	

Sumber: Kepmendagri Nomor 131.34-269 Tahun 2021, 2022

Sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 140 ayat (3), dan pasal 144 ayat (4) disebutkan bahwa Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan peresmian pemberhentian dan penggantian

Anggota DPRD Provinsi setelah mendapat usulan dari Pimpinan DPRD. Pada tahun 2021 Pemda DIY telah melaksanakan fasilitasi usulan peresmian Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD DIY atas nama Wahyu Pradana Ade Putra, S.Psi. dari PDI-Perjuangan yang meninggal dunia dan digantikan oleh Kuntarti Puspandari, S.Pd. Setelah melalui serangkaian proses administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.34-4692 tahun 2021 tanggal 3 November tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRD DIY dan Kepmendagri Nomor 161.34-4963 Tahun 2021 Tanggal 3 November 2021 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD DIY.

Tabel 3.185. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Tata Pemerintahan Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama yang direspon dengan kebijakan	%	113,85	100	121,5	121,5	100	121,5

Sumber: Biro Tapem Setda DIY, 2022

Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Tata Pemerintahan memiliki indikator kinerja sasaran “Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama yang direspon dengan kebijakan”. Dengan formulasi perhitungan jumlah dinamika penyelenggaraan

otonomi daerah, pemerintahan umum, dan kerja sama yang direspon dengan kebijakan tahun berjalan dibagi jumlah dinamika penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, dan kerja sama yang sudah teridentifikasi dikali 100%.

Realisasi yang cukup besar disebabkan oleh adanya SE atas arahan pimpinan kepada Biro Tata Pemerintahan untuk merespon dan memfasilitasi berbagai bentuk kerja sama baik pemerintah maupun swasta.

b) *Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2021*

Pada tahun 2021 Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Tata Pemerintahan dilaksanakan dengan alokasi Rp11.279.978.549,00 dan pada tahapan perubahan anggaran bertambah menjadi Rp14.813.086.071,00 (bertambah sebesar Rp3.533.107.522,00). Penambahan anggaran yang cukup besar tersebut merupakan hasil dari arahan kebijakan Pemda DIY dalam *refocusing* dan realokasi anggaran untuk tanggap darurat bencana non alam COVID-19. Pemda DIY melalui Biro Tata Pemerintahan Setda DIY mendapat tambahan anggaran dari dana keistimewaan untuk melaksanakan fasilitasi vaksinasi COVID-19 di kalurahan/kelurahan di DIY. Pengalokasian anggaran tersebut dibagi dalam 8 program dan 17 kegiatan dan 38 sub kegiatan. Secara keseluruhan belanja dapat direalisasi sebanyak Rp11.293.249.244,00 (76,24%), dengan pencapaian fisik sebesar 100%. Sisa anggaran sebesar Rp3.519.836.827,00 atau 23,76% antara lain bersumber dari Sisa pelaksanaan sebagai tuan rumah Mitra Praja Utama (MPU) yang rencananya akan dilaksanakan secara luring namun berubah secara daring karena situasi dan kondisi yang belum memungkinkan karena adanya virus COVID-19, pengadaan barang dan jasa (efisiensi) dan terdapat belanja yang tidak dapat terealisasi dikarenakan pembatasan pertemuan secara tatap muka lainnya.

Tabel 3.186. Capaian Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Tata Pemerintahan Tahun 2021

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	BIRO TATA PEMERINTAHAN	1. Harmonisasi hubungan antar pemerintah dalam penyelesaian permasalahan perbatasan antar pemerintah daerah 2. Meningkatkan respon terhadap setiap perubahan kebijakan dalam proses tata kelola pemerintahan 3. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dalam setiap tingkatan mulai dari tingkat provinsi sampai tingkat desa 4. Memanfaatkan teknologi informasi dalam upaya meningkatkan kualitas dan kemampuan SDM 5. Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan 6. Meningkatkan jumlah intansi/lembaga pengguna data kependudukan untuk kebutuhan verifikasi dan validasi status kependudukan 7. Mendorong kerja sama antarinstitusi/ lembaga yang berdampak pada percepatan pelayanan serta perbaikan kualitas data kependudukan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN KEBUDAYAAN Pengadaan Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan Laporan Hasil Pelaksanaan dokumen Penanda Keistimewaan Dukungan sebesar 100% terhadap persentase capaian program urusan kelembagaan dan tata cara yang berkualitas				NIHIL	NIHIL	NIHIL
3	SEKRETARIAT DAERAH	BIRO TATA PEMERINTAHAN	1. Harmonisasi hubungan antar pemerintah dalam penyelesaian permasalahan perbatasan antar pemerintah daerah 2. Meningkatkan respon terhadap setiap perubahan kebijakan dalam proses tata kelola pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Persentase desa tertinggal yang memiliki pengelolaan keuangan yang baik	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			3. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dalam setiap tingkatan mulai dari tingkat provinsi sampai tingkat desa	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
			4. Memanfaatkan teknologi informasi dalam upaya meningkatkan kualitas dan kemampuan SDM	Kesepakatan hasil Forum Perangkat Daerah	Berita Acara	1	1			
			5. Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan	Dukungan sebesar 88,61% terhadap Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	%	100	100			
			6. Meningkatkan jumlah instansi/lembaga pengguna data kependudukan untuk kebutuhan verifikasi dan validasi status kependudukan	Dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	10	12			
			7. Mendorong kerja sama antarinstansi/lembaga yang berdampak pada percepatan pelayanan serta perbaikan kualitas data kependudukan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						
				Dukungan sebesar 61,94 % terhadap Persentase Kepemilikan Dokumen Penting Administrasi Kependudukan (KTP - el, Akta kelahiran Anak, Akta Kematian)	%	100	100			
				Dokumen RKA DAK bidang adminduk	dokumen	1	1			
				Aparatur yang meningkat kapasitasnya dalam perencanaan dan penganggaran DAK bidang adminduk	orang	60	60			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
				Dukungan sebesar 61,94 % terhadap Persentase Kepemilikan Dokumen Penting Administrasi Kependudukan (KTP - el, Akta kelahiran Anak, Akta Kematian)	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Laporan penyelenggaraan adminduk	dokumen	12	12			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
				Nilai LKJP Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	poin	86	86			
				Realisasi capaian fisik dan keuangan sesuai tahapan ROPK	%	100	100			
				Dukungan sebesar 88,61% terhadap Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	%	100	100			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
				Pembayaran gaji ASN Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	tahun	1	1			
				Dukungan sebesar 3,87% terhadap Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	%	100	100			
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						
				Dukungan sebesar 3,87% terhadap Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	%	100	100			
				Administrasi pe Kantoran yang terselesaikan dengan baik dan tepat waktu	bulan	12	12			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
				Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	laporan	1	1			
				Dukungan sebesar 3,87% terhadap Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						
				Dukungan sebesar 3,87% terhadap Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD		100	100			
				Dokumen Laporan Bulanan dan Dokumen Laporan Semesteran	laporan	14	14			
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						
				Dukungan sebesar 3,87% terhadap Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD		100	100			
				Dokumen Laporan Prognosis	laporan	1	1			
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						
				Dukungan sebesar 100% terhadap persentase peningkatan kualitas pegawai dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		71	71			
				Sosialisasi program adminduk melalui media cetak dan elektronik	jenis	3	3			
				Peningkatan pemahaman kebijakan aminduk bagi masyarakat	orang	90	90			
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						
				Dukungan sebesar 100% terhadap persentase peningkatan kualitas pegawai dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		29	29			
				Peningkatan Kapastitas Aparatur Adminduk di Kab/kota	orang	130	130			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jenis	8	8			
				Dukungan sebesar 9,74% terhadap Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	%	100	100			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
				Alat Tulis Kantor	jenis	34	34			
				Dukungan sebesar 9,74% terhadap Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	%	100	100			
				Tabung pemadam kebakaran yang terisi	tabung	11	11			
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
				Dukungan sebesar 9,74% terhadap Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	%	100	100			
				Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	jenis	15	15			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
				Dokumen Hasil Penggandaan	lembar	50000	50000			
				Dukungan sebesar 9,74% terhadap Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	%	100	100			
				Barang Cetak	unit	13	13			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
				Dukungan sebesar 9,74% terhadap Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD						
				Laporan tindak lanjut hasil rapat koordinasi	bulan	12	12			
				Laporan dan Rencana Tindak Lanjut Hasil Konsultasi dan Koordinasi	bulan	12	12			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
				Peralatan Kantor sesuai RKBMD	jenis	3	3			
				Perlengkapan Kantor sesuai RKBMD	jenis	1	1			
				Dukungan sebesar 39,02% terhadap Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	%	53.69	53.69			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
				Peralatan Kantor sesuai RKBMD	jenis	3	3			
				Dukungan sebesar 39,02% terhadap Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	%	46.3	46.3			
				Perlengkapan Kantor sesuai RKBMD	jenis	1	1			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
				Dukungan sebesar 9,74% terhadap Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	%	100	100			
				Jasa Surat-Menyurat	jenis	3	3			
				Penyediaan blangko KTP-el bagi pelayanan di kab/kota	blangko	150000	150000			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Kendaraan dinas operasional roda 2 yang terpelihara sesuai RKBMD	unit	7	7			
				Dukungan sebesar 14,63% terhadap Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	%	100	100			
				Kendaraan dinas operasional roda 4 yang terpelihara sesuai RKBMD	unit	5	5			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
				Dukungan sebesar 14,63% terhadap Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	%	100	100			
				Peralatan kantor yang terpelihara sesuai RKBMD	bulan	12	12			
				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH						
				Persentase desa tertinggal yang memiliki pengelolaan keuangan yang baik	%	100	100			
				Penyelenggaraan rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah dan kerja sama	%	100	100			
				Persentase rumusan bahan kebijakan pemerintahan umum dan penataan wilayah	%	100	225			
				Fasilitasi Penataan Wilayah						
				Laporan Penyelarasan Pembangunan di Wilayah Perbatasan	laporan	1	1			
				Dukungan sebesar 100% terhadap Persentase rumusan bahan kebijakan pemerintahan umum dan penataan wilayah	%	100	100			
				Toponimi unsur warisan budaya	dokumen	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Database pilar batas untuk pengelolaan tanda batas wilayah	dokumen	1	1			
				Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten/Kota di DIY	dokumen	1	1			
				Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan						
				Laporan Standar Pelayanan Minimal 6 bidang SPM	laporan	1	1			
				Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	laporan	1	1			
				Rekomendasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	rekomendasi	1	10			
				Dukungan sebesar 22,5 % Terhadap Persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah dan kerja sama	%	100	100			
				Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan						
				Laporan Hasil Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di DIY	laporan	1	1			
				Laporan Desa yang terdampangi dalam penyusunan dokumen administrasi perencanaan responsif	laporan	1	1			
				Laporan pengesahan, pengangkatan dan pelantikan Bupati-Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada	laporan	1	1			
				Laporan Kecamatan dengan aparaturnya yang terbina sebagai pembina teknis pemerintah desa (PTPD)	laporan	1	1			
				Berkas usulan pemberhentian, pengangkatan anggota DPRD SK pergantian antar waktu	usulan/draf	3	3			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Laporan Hasil Pemantauan Pengelolaan Dana Desa di DIY	laporan	1	1			
				Dukungan sebesar 22,5 % Terhadap Persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah dan kerja sama	%	100	100			
				Fasilitasi Kerja sama antar Pemerintah						
				Dukungan sebesar 77,5 % terhadap Persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah dan kerja sama :	%	100	100			
				100 %						
				Laporan Penyelenggaraan Forum Mitra Praja Utama di DIY	laporan	1	1			
				Naskah Perjanjian Kerja sama Dalam Negeri	Naskah Perjanjian	5	5			
				Surat Keputusan Bersama (SKB)nGubernur Anggota FKD-MPU	SKB	2	2			
				Fasilitasi Kerja sama Badan Usaha/Swasta						
				Dukungan sebesar 77,5 % terhadap Persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah dan kerja sama	%	0	0			
				Rekomendasi Hasil Monev Kerja sama Dalam Negeri	rekomendasi	0	0			
				PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN						
				Pelaksanaan Kelembagaan Asli						
				Kajian Pemberdayaan Desa sebagai basis Keistimewaan DIY yang terintegrasi	dokumen	1	1			
				Dukungan sebesar 100% terhadap persentase capaian program urusan keistimewaan urusan kelembagaan dan tata cara yang berkualitas	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pembangunan Sistem Informasi Kalurahan	aplikasi	1	1			
				Hasil Analisa Pembangunan Sistem Informasi Kalurahan	dokumen	1	1			
				Percepatan vaksinasi covid-19	vaksin	50000	60000			
				Laporan Hasil koodinasi, Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Kelembagaan Kalurahan dan Kapanewon/ Kemantren	laporan	1	1			
				Kajian Standar Bangunan dan Arsitektur Pemerintahan Kalurahan	dokumen	1	1			
				Peningkatan Kapasitas SDM Desa berbasis Keistimewaan DIY	kalurahan	392	392			

2) *Fasilitasi Perundang-undangan dan Hukum*

a) *Kondisi Umum*

Konsekuensi dari ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan asas otonomi dan tugas pembantuan. Sebagai tindaklanjut dari kewenangan yang diamanatkan dalam pasal tersebut, masing-masing level daerah mempunyai hak untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain.

Pelaksanaan penyusunan produk hukum daerah harus direncanakan sesuai dengan kewenangan daerah sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di masing-masing wilayah tersebut. Selain itu, produk hukum daerah harus mengakomodir perkembangan masyarakat dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat agar pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat dapat optimal.

Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut, Pemda DIY melalui Biro Hukum Setda DIY berdasarkan Pergub DIY Nomor 136 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang peraturan perundang-undangan dan pengawasan produk hukum kabupaten/kota untuk meningkatkan persentase rancangan produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

Pada tahun 2021, target dan realiasi kinerja Penunjang Urusan Fasilitasi Perundang-undangan dan Hukum dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.187. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitasi Perundang-undangan dan Hukum Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase jumlah produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan Informasi produk hukum yang baik	%	100	100	100	100	100	100

Sumber: Biro Hukum Setda DIY, 2022

Kegiatan Fasilitasi Peraturan Perundang-undangan adalah melaksanakan pembentukan Raperda, Raperdais, Pergub, Kepgub, dan Ingub. Dalam rangka mewujudkan produk hukum yang implementatif dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum, serta mendukung percepatan reformasi birokrasi perlu pengaturan tahapan proses penyusunan produk hukum sesuai urutan masuk dan skala prioritas perencanaan hukum. Tahapan dalam proses pembentukan Perda dan Perdais dibagi dalam lima tahap yaitu proses pembahasan, penyusunan rancangan peraturan daerah, penjangkaran aspirasi masyarakat, evaluasi-klarifikasi-konsultasi, serta publikasi rancangan peraturan perundang-undangan di media cetak.

Berdasarkan Keputusan DPRD DIY Nomor 50/K/DPRD/2020 tentang Propemperda DIY Tahun 2021 terdapat 9 rancangan peraturan daerah yang menjadi target pembahasan diluar rancangan peraturan daerah kumulatif terbuka tahun 2021.

Dalam perkembangannya, terdapat perubahan terhadap jumlah target dan judul rancangan peraturan daerah yaitu menjadi 8 rancangan peraturan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Nomor 49/K/DPRD/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD DIY Nomor 50/K/DPRD/2020 tentang Propemperda DIY Tahun 2021.

Tabel 3.188. Kegiatan pembahasan Raperda menjadi Perda oleh Pemda DIY pada Tahun 2021

Kegiatan	Target	Realisasi	Keterangan
Pembahasan Raperda	8 Rancangan Peraturan Daerah	Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam Raperda tentang Pengendalian Penduduk Raperda tentang Penanggulangan COVID-19 Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Raperda tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	Dalam proses permohonan fasilitasi Kementerian Dalam Negeri

Sumber: Biro Hukum Setda DIY, 2022

Pada tahun 2021, Pemda DIY melalui Biro Hukum Setda DIY telah menyusun sebanyak 110 Pergub dan 344 Kepgub. Pemda DIY juga melakukan pengawasan atas Produk Hukum Pemerintah Kabupaten/Kota bertujuan untuk mewujudkan Produk Hukum dalam satu kesatuan sistem hukum nasional yang sinkron dan harmonis. Pengawasan dilakukan dengan memberikan konsultasi, fasilitasi dan evaluasi pada produk hukum Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal tersebut

dilaksanakan agar pelaksanaan Pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan standar dan kebijakan Pemerintah. Pada tahun 2021, target kinerja yang ditetapkan untuk Kegiatan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota sebanyak 50 produk hukum dengan capaian realisasi 100%.

Dalam rangka penyebarluasan informasi serta produk hukum daerah, Pemda DIY melaksanakan kegiatan Penyebarluasan Produk Hukum dan Digitalisasi Produk Hukum sebagai berikut:

1) Pelaksanaan sosialisasi Perdais Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Kadipaten beserta aturan pelaksanaannya di lima kabupaten/kota se-DIY. 2) Mengunggah 521 produk hukum ke dalam website JDIH berupa 6 Perda, 101 Pergub, dan 414 Kepgub dan 3) Penyampaian Lembaran Daerah dan Buku Informasi Peraturan Perundang-undangan sebanyak 2.200 buku ke kabupaten/kota sampai ke tingkat pedukuhan.

Pemda DIY dalam penyelenggaraan pemerintahan tak luput dari konsekuensi akan adanya keberatan dari masyarakat yang memungkinkan adanya gugatan ataupun tuntutan di Pengadilan baik Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) maupun Pengadilan Negeri. Demikian juga tidak menutup kemungkinan Pemda DIY menjadi penggugat apabila kepentingannya telah dirugikan oleh Badan Hukum Perdata ataupun orang pribadi/masyarakat. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 65 menyebutkan bahwa Gubernur mempunyai tugas dan wewenang mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut diatur dalam Pergub DIY Nomor 136 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Biro Hukum Setda DIY mempunyai fungsi salah satunya menyiapkan bantuan

hukum dalam rangka menyelesaikan permasalahan hukum dan memberikan pelayanan hukum bagi aparatur. Pemda DIY melaksanakan Kegiatan Penyelesaian Permasalahan Hukum dengan realisasi penyelesaian permasalahan hukum litigasi sebanyak 6 kasus sebagai berikut:

- (1) Perkara Perdata Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Register Perkara Nomor 164/Pdt.G/2020/PN.Smn antara Sumiyati, dkk sebagai Penggugat melawan Gubernur DIY sebagai Tergugat III. Obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah Hak Milik Adat Letter C 199/Kledokan, Persil 68 Klas C. IV seluas 1.100 m² yang terletak di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Perkara ini telah diputus pada tanggal 9 Februari 2021 dengan amar putusan yang menyatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).
- (2) Perkara Tata Usaha Negara dengan Register Perkara Nomor 12/G/2019/PTUN.YK Jo. 89/B/2020/PT.TUN.SBY Jo. 462 K/TUN/2020 antara Winarno sebagai Penggugat melawan Pemerintah Desa Wedomartani sebagai Tergugat II. Obyek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Pakai Nomor 25/Wedomartani, Surat Ukur 05859/2005, Luas 19.733 m² yang terletak di Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, DIY, tanggal 6 Desember 2005 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 12 Juni 2006 atas nama Pemerintah Desa Wedomartani. Perkara ini telah diputus pada tanggal 22 Maret 2021 dengan amar putusan yang menyatakan bahwa menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 89/B/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 3 Juni 2020, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Yogyakarta dengan Putusan Nomor 12/G/2019/PTUN.YK, tanggal 12 Februari 2020, sehingga amar menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

- (3) Perkara Perdata Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Register Perkara Nomor 89/Pdt.G/2021/PN/Smn antara Gunadi, DKK sebagai Penggugat melawan Pemerintah Kalurahan Caturtunggal sebagai Tergugat I. Obyek sengketa dalam perkara ini adalah tanah yang tercatat dalam Buku C Desa Caturtunggal No. 221/Kledokan, Persil Nomor 74 S.IV seluas 1.530 m². Perkara ini telah diputus pada tanggal 5 November 2021 dengan amar putusan yang menyatakan bahwa mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian. Bahwa sebagaian yang dikabulkan tersebut adalah:

- (a) Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris anak almarhum Kemis Als Widjo Utomo dan
- (b) Menyatakan sebagai hukum bahwa Tanah sengketa yang berupa Tanah Pekarangan terletak di Kledokan, Kalurahan (dahulu) Desa Caturtunggal, Kapanewon (dahulu Kecamatan) Depok, Kabupaten Sleman, tercatat C Nomor 221/Kledokan, Persil Nomor 74. S.IV luas 1.530 m², atas nama Kemis, dengan batas – batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara: Tanah/Bangunan Ruko Pak Ronggo;
 - Sebelah Selatan: Tanah Pak Amat Khabid;
 - Sebelah Barat: Tanah/Bangunan rumah Drg. Gio;
 - Sebelah Timur: Jalan Baladewa.

Adalah merupakan tanah Harta warisan almarhum Kemis Als Widjo Utomo, yang masih utuh dan belum

dibagi waris yang menjadi hak dan bagian Para Penggugat;

- Menyatakan sebagai hukum bahwa penguasaan atas tanah sengketa oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III adalah tidak syah menurut hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan sebagai hukum bahwa pendirian bangunan di sebagian tanah sengketa oleh Tergugat I tanpa seijin Para Penggugat adalah tanpa dasar dan merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan sebagai hukum bahwa pendirian bangunan (teras) disebagian tanah sengketa oleh Tergugat III tanpa seijin Para Penggugat adalah tanpa dasar dan merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan sebagai hukum bahwa Buku Pepriksaan Nomor 182/68 Tanggal 16 September 1968 yang dibuat oleh Tergugat I dimana tercatat bahwa tanah persil 70 klas D.I seluas 260 m², dan persil 74 klas S.IV seluas 1.530 m² diwaris kepada B. Widjoutomo al. Tumirah adalah tidak syah dan batal demi hukum dengan segala akibatnya;
- Menyatakan sebagai hukum bahwa Buku Pepriksan nomor 183/68 tanggal 16 september 1968 bab Liyeran yang dibuat oleh Tergugat I dimana tercatat B. Widjoutomo al. Tumirah menjual tanah – tanah tersebut kepada Tri Wahono Adiwidjoyo adalah tidak syah dan batal demi hukum dengan segala akibatnya;
- Menyatakan sebagai hukum bahwa pengklaiman Tergugat I atas tanah sengketa

sebagai tanah Kas Desa Caturtunggal adalah tidak berdasar;

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan Tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari segala beban dan syarat apapun dan apabila perlu dengan bantuan Alat Negara/Polisi berdasarkan Kekuasaan Kehakiman;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

(c) Perkara Tata Usaha Negara dengan Register Perkara Nomor 20/G/2020/PTUN.Yk objek sengketa Keputusan Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY Nomor 545/01835/Pz/2020, tanggal 30 Januari 2020 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan komoditas pasir dan batu atas nama CV.Mitra Bangkit Sejahtera". Perkara ini telah diputus pada tanggal 4 Februari 2021 dengan amar putusan yang menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat tidak diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Terhadap perkara ini dilakukan upaya hukum Banding dengan Register Perkara Nomor 94/B/2021/PT.TUN.SBY yang telah diputus pada tanggal 14 April 2021 dengan amar putusan yang menyatakan bahwa menerima permohonan banding dari Pembanding/Para Penggugat dan menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 20/G/2020/PTUN.Yk tanggal 18 Februari 2021 yang dimohonkan banding. Terhadap upaya hukum Banding atas perkara ini dilakukan Kasasi dengan Register Perkara Nomor 351 K/TUN/2021

yang telah diputus pada tanggal 9 September 2021 dengan amar putusan yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung menolak permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. RUKIMAN, 2. NGATIMAN, 3. BAGIYO.

- (d) Perkara Tata Usaha Negara dengan Register Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.YK objek sengketa Kepgub DIY Nomor 319/KEP/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 yang diputus pada tanggal 27 Juli 2021 dengan amar putusan yang menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima (*niet onvankelijk verklaard*).
- (e) Perkara Perbuatan Melawan Hukum pada tingkat Kasasi dengan Register Perkara Nomor 739K/Pdt/2021 Objek sengketa yang terletak di Tunjung Nomor 2, RT 086, RW 021, Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, DIY. Perkara ini telah diputus pada tanggal 21 April 2021 dengan amar putusan yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung RI Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi HJ. SETIOWATI, SETIONOEGROHO, IR., SETYO NUSANTORO, SE dan SETIO AGUS SAMAPTO, SH tersebut.

b) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2021

Pada tahun 2021 pelaksanaan Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitasi Perundang-undangan dan Hukum dilaksanakan melalui kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp10.679.293.135,00. Pengalokasian anggaran tersebut dibagi dalam 4 program, 9 kegiatan dan 29 sub kegiatan. Secara keseluruhan belanja dapat direalisasi sebanyak Rp10.271.744.839,00 atau 96,18%, dengan pencapaian fisik sebesar 100%.

Tabel 3.189. Capaian Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Fasilitas Perundang-undangan dan Hukum Tahun 2021

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	URUSAN UMUM	BIRO HUKUM	1. Menyelaraskan program legislasi daerah peraturan daerah dan program legislasi daerah peraturan gubernur dengan arah pembangunan daerah melalui penguatan pada aspek pembinaan hukum daerah dalam fungsi perencanaan hukum dan evaluasi keberlakuan produk hukum daerah	PROGRAM PENUNJANG DAERAH PROVINSI	URUSAN	PEMERINTAHAN		Materi muatan dalam rancangan produk hukum dari OPD Pengusul masih memerlukan penyempurnaan sehingga membutuhkan waktu lebih lama dalam melakukan harmonisasi dan sinkronisasi	Mengadakan forum koordinasi dalam penyusunan produk hukum dengan OPD Pengusul	Lembaga Ombudsman Daerah (LOD). Bersama ini kami sampaikan bahwa Lembaga Ombudsman DIY (LO DIY) dibentuk berdasarkan Pergub Nomor 69 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pergub tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta. LO DIY merupakan Lembaga Non Struktural yang independen, sehingga Pemda DIY tidak bisa mencampuri kewenangan LO DIY tersebut. Biro Hukum Setda DIY hanya berperan sebagai pengampu anggaran Lembaga Ombudsman DIY.
			2. Menerapkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan mengedepankan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan produk hukum daerah	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	Persen	100	100	Adanya Pandemi COVID-19 dimana ada pembatasan pertemuan sehingga berdampak mundurnya penyusunan dan pembahasan rancangan produk hukum	Menerapkan protokol kesehatan secara baik dalam setiap ketugasan antara lain pemanfaatan <i>Zoom meeting</i> dalam melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait yang melibatkan perancang peraturan perundang-undangan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) DIY pada saat harmonisasi dan sinkronisasi rancangan Produk hukum daerah sehingga tercapainya target yang telah ditetapkan.	
			3. Melaksanakan harmonisasi produk hukum daerah secara tepat waktu dengan memanfaatkan teknologi informasi	SUBKEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH						
			4. Memanfaatkan analisis kebijakan dalam perumusan dan penyusunan produk hukum daerah	RENSTRA	Dokumen	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			5. Mengikutsertakan pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan dalam diklat penyusunan peraturan perundang-undangan guna meningkatkan kompetensi	RENJA	Dokumen	1	1			
			6. Mengikutsertakan pejabat fungsional analis kebijakan dalam diklat analisis kebijakan guna meningkatkan kompetensi	RENJA Perubahan	Dokumen	1	1			
			7. Peningkatan dan efektivitas pelaksanaan bantuan hukum untuk masyarakat miskin	Forum Perencanaan OPD	Berita Acara	1	1			
			8. Menggunakan teknologi informasi dalam layanan informasi produk hukum							
			9. Peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia bagi masyarakat melalui rencana aksi nasional hak asasi manusia							
			10. Mengikutsertakan pegawai dalam diklat bantuan hukum guna meningkatkan kompetensi	SUBKEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD						
				RKA-SKPD	Dokumen	1	1			
				SUBKEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD						

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				RKAP-SKPD	Dokumen	1	1			
				SUBKEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN DPA-SKPD						
				DPA-SKPD	Dokumen	1	1			
				SUBKEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN DPA-SKPD						
				DPPA-SKPD	Dokumen	1	1			
				SUBKEGIATAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH						
				Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) yang capaian kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)	LKJIP A	1	1			
				Realisasi Capaian Fisik dan Keuangan sesuai tahapan ROPK	Persen	100	100			
				SUBKEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN						
				Tersedianya gaji dan tunjangan AS dan Non ASN	Bulan	12	12			
				SUBKEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD						
				Laporan keuangan akhir tahun	Dokumen	1	1			
				SUBKEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD						
				Dokumen laporan bulanan dan laporan semesteran	Dokumen	14	14			
				Dokumen Prognosis	Dokumen	1	1			
				SUBKEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR						
				Komponen peralatan listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis	2	2			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				SUBKEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR						
				Alat Tulis Kantor	Jenis	49	49			
				Langganan Aplikasi Video Conference	Bulan	12	12			
				SUBKEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA						
				Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Jenis	9	9			
				SUBKEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN						
				Arsip Dokumen Hukum	Dokumen Hukum	2	2			
				Barang Cetakan	Jenis	13	13			
				Penggandaan	Lembar	25000	25000			
				SUBKEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN						
				Bukti Pembayaran	Bulan	12	12			
				Langganan Surat Kabar Harian 2 Jenis						
				SUBKEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD						
				Laporan dan rencana tindak lanjut hasil konsultasi dan koordinasi	Bulan	12	12			
				Laporan dan rencana tindak lanjut hasil rapat koordinasi	Bulan	12	12			
				SUBKEGIATAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT						
				Pengiriman Surat/Paket	Bulan	12	12			
				SUBKEGIATAN PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR						
				Peralatan Kantor sesuai RKBMD	Jenis	3	3			
				Perlengkapan Kantor sesuai RKBMD	Jenis	2	2			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				SUBKEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR						
				Administrasi perkantoran yang terselesaikan dengan baik dan tepat waktu	Bulan	12	12			
				SUBKEGIATAN PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA						
				Fumigasi ruang perpustakaan 360 m2	Kali	2	2			
				Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara sesuai RKPBM	Jenis	5	5			
				Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara sesuai RKPBM	Jenis	2	2			
				SUBKEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN						
				Bukti Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2	Unit	2	2			
				Bukti Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4	Unit	3	3			
				Kendaraan dinas/operasional roda 2 (dua) yang dipelihara sesuai RKPBM	Unit	2	2			
				Kendaraan dinas/operasional roda 4 (empat) yang dipelihara sesuai RKPBM	Unit	3	3			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	KELEMBAGAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (KEISTIMEWAAN)	BIRO HUKUM		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Sasaran: Meningkatkan kualitas produk hukum Kabupaten/Kota di DIY Indikator Kinerja: Persentase kewenangan, substansi materi, dan legal drafting produk hukum kabupaten/kota yang telah sesuai dengan pedoman penyusunan produk hukum Daerah SUBKEGIATAN PENGAWASAN RANCANGAN PRODUK HUKUM DAN PRODUK HUKUM KABUPATEN/KOTA TINDAKLANJUT PELAKSANAAN KEWENANGAN KEISTIMEWAAN Kajian Rancangan Produk Hukum Kabupaten/kota terkait tindak lanjut pelaksanaan kewenangan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Rekomendasi terhadap hasil monitoring dan evaluasi produk hukum tindak lanjut pelaksanaan kewenangan keistimewaan DIY	Persen	100	100			
				Kajian Rancangan Produk Hukum Kabupaten/kota terkait tindak lanjut pelaksanaan kewenangan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Kajian	10	10			
				Rekomendasi terhadap hasil monitoring dan evaluasi produk hukum tindak lanjut pelaksanaan kewenangan keistimewaan DIY	Rekomendasi	10	10			
3	PERTANAHAN (KEISTIMEWAAN)	BIRO HUKUM		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN Sasaran : Meningkatkan jumlah desa yang sudah mempunyai perdes	Persen	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				<p>pemanfaatan tanah desa</p> <p>Indikator Kinerja :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presentase desa yang sudah mempunyai perdes pemanfaatan tanah desa; - presentase pengajuan permohonan serat kekancingan yang ditindaklanjuti. <p>SUBKEGIATAN PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA PERTANAHAN TANAH KASULTANAN, TANAH KADIPATEN, DAN TANAH DESA</p> <p>Penyelesaian Keberatan Putusan 1 1</p> <p>dan Sengketa Pertanahan, Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa (Litigasi)</p>						
4	SEKRETARIAT DAERAH	BIRO HUKUM		<p>PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM</p> <p>Sasaran: Meningkatkan kualitas rancangan produk hukum daerah</p> <p>Indikator Kinerja: Persentase rancangan produk hukum yang berkualitas</p> <p>SUBKEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM PENGATURAN</p> <p>Rancangan Peraturan Gubernur Rancangan 20 20</p> <p>Rancangan Peraturan Daerah Rancangan 6 6</p>	Persen	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				SUBKEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM PENETAPAN						
				Rancangan Keputusan Gubernur	Rancangan	50	50			
				PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM						
				Sasaran: Meningkatnya kualitas produk hukum Kabupaten/Kota di DIY	Persen	100	100			
				Indikator Kinerja: Persentase kewenangan,substansi materi, dan legal drafting produk hukum kabupaten/kota yang telah sesuai dengan pedoman penyusunan produk hukum daerah						
				SUBKEGIATAN FASILITASI DAN EVALUASI PRODUK HUKUM KABUPATEN/KOTA						
				Nomor Register	Nomor Register	30	30			
				Rancangan Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi	Keputusan Gubernur	5	5			
				Rekomendasi Fasilitasi Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota	Rancangan Produk	30	30			
				Rekomendasi Hasil Konsultasi Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten / Kota	Rancangan	35	35			
				PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM						
				Sasaran: Meningkatnya kualitas layanan	Persen	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				informasi produk hukum						
				Indikator Kinerja: Persentase produk hukum daerah yang terpublikasikan						
				SUBKEGIATAN PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAN NASKAH HUKUM LAINNYA						
				Buku informasi peraturan perundang-undangan	Buku	1100	1100			
				Buku lembaran daerah dan berita daerah	Buku	1100	1100			
				Produk hukum yang diunggah (upload) ke dalam website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Produk Hukum	260	260			
				Rakor Pembinaan JDIH Tahun 2021	Laporan	1	1			
				PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM						
				Sasaran: Meningkatkan kualitas bantuan dan layanan hukum	Persen	100	100			
				Indikator Kinerja : Persentase bantuan dan layanan hukum						
				SUBKEGIATAN FASILITASI PENYELESAIAN MASALAH NON LITIGASI DAN HAM						
				Laporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	Laporan	1	1			
				Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian dan Pengangkatan	Keputusan Gubernur	3	3			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD						
				Keputusan Gubernur tentang Izin pemanfaatan Tanah Desa	Keputusan Gubernur	50	50			
				Laporan Hasil Penyelesaian Penanganan Kasus Perdata, Tata Usaha Negara, dan Pendampingan Hukum 2020	Laporan	1	1			
				Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja LO DIY	Laporan	1	1			
				Rekomendasi penanganan pengaduan tata kelola usaha beretika dan perbaikan pelayanan public	Rekomendasi	100	100			
				SUBKEGIATAN FASILITASI PENYELESAIAN MASALAH						
				Putusan permasalahan hukum litigasi	Putusan	1	1			

3) *Fasilitasi Perekonomian dan SDA*

a) *Kondisi Umum*

Isu strategis pembangunan bidang perekonomian menjadi bagian penting di dalam perencanaan pembangunan. Isu strategis tersebut meliputi beberapa sektor pembangunan, sektor industri dan perdagangan, akses keuangan daerah, koperasi dan UMKM, tenaga kerja dan transmigrasi, pariwisata, pertanian dan ketahanan pangan, serta kelautan dan perikanan.

DIY memiliki potensi sumber daya alam namun luas lahannya terbatas sehingga perlu dikelola sedemikian rupa untuk mencukupi kebutuhan hidup masyarakat. Tantangan terberat saat ini adalah tingginya ketimpangan wilayah dan ketimpangan pendapatan serta masih tingginya angka kemiskinan di DIY. Kondisi ini memerlukan langkah konkrit untuk upaya percepatan pembangunan perekonomian di DIY.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran Pemda DIY, meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan dan menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah, Fasilitasi Perekonomian dan SDA dilaksanakan sebagai upaya mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Selain itu juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di bidang dunia usaha dan pengelolaan sumber daya perekonomian. Peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut dapat terwujud.

Untuk mengukur kinerja urusan Fasilitasi Perekonomian dan SDA digunakan indikator Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam perencanaan tahun $n+1$.

Tabel 3.190. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitas Perekonomian dan SDA Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam perencanaan tahun n+1	%	105	95	100	105,26	100	100

Sumber: Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY, 2022

Capaian kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitas Perekonomian dan SDA tahun 2021, terealisasi sebesar 100% dari target 95% atau dengan persentase capaian sebesar 105,26%. Angka tersebut diperoleh dari lima dokumen kebijakan yang ditindaklanjuti. Lima dokumen tersebut yaitu Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah, Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Wilayah, Rekomendasi kebijakan pengembangan ekonomi daerah, Rekomendasi Kebijakan Perlindungan Sumber Daya Alam Berkelanjutan, dan Rekomendasi *Green Economic*.

Sebagai fasilitasi perekonomian dan SDA salah satu upaya yang dilakukan terkait pengendalian inflasi. Upaya ini dilakukan melalui inisiasi dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Fasilitasi Perekonomian dan SDA selaku sekretariat TPID selalu berupaya berinovasi dalam kegiatan pengendalian inflasi daerah. Hal ini terbukti dengan dicapainya penghargaan berupa TPID Provinsi Berkinerja Terbaik Wilayah Jawa-Bali yang diadakan oleh Kemenko Perekonomian RI tahun 2021.

Upaya yang dilakukan TPID DIY dalam rangka menjaga kestabilan produksi dan pasokan komoditi pangan, meningkatkan produktivitas dan kestabilan harga komoditi pangan, memudahkan pengawasan distribusi pangan dari produsen sampai ke konsumen, dan menyediakan Sistem Informasi Tata Niaga Pangan yang akurat. Telah ditetapkan Pergub DIY Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Tata Niaga Pangan Lokal, sebagai regulasi berkaitan dengan produktivitas, pola distribusi, jumlah pasokan dan harga di DIY sebagai instrumen sistem peringatan dini dalam pengendalian inflasi.

Pengendalian inflasi juga memerlukan adanya pengawasan iklim persaingan usaha yang sehat. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemda DIY menginisiasi adanya kerja sama dengan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) untuk bersama-sama menciptakan iklim persaingan usaha melalui pengawasan secara terintegrasi.

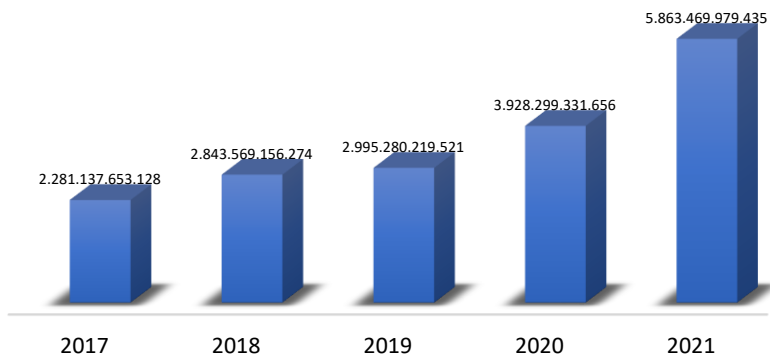
Berkaitan dengan pandemi COVID-19 inklusi keuangan penting untuk mencapai tujuan makro sekaligus menjawab tantangan dalam menghadapi dampak pandemi yang telah berpengaruh pada sektor ekonomi. Perlambatan aktivitas ekonomi juga berimbas pada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat, terutama kalangan pelaku usaha informal, ultra mikro, mikro dan kecil. Untuk itu, inklusi keuangan ini sangat membutuhkan sinergitas program pemerintah, lembaga jasa keuangan, swasta, dan masyarakat.

Untuk mengupayakan inklusi perekonomian dibentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sebagai forum koordinasi antar instansi dan *stakeholders* yang bertujuan meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

Beberapa program kerja TPAKD Tahun 2021, antara lain: 1) Program Unggulan *Business Matching* melalui Optimalisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Destinasi Prioritas Pariwisata DIY; 2) Program Tematik “Optimalisasi Produk dan Layanan Keuangan” dengan Program Kredit Pembiayaan Melawan Rentenir melalui Penyaluran Kredit Pembangunan Ekonomi Daerah “PEDE” PT Bank BPD DIY; 3) Program Tematik “Penguatan Infrastruktur dan Akses Keuangan” dengan Program Digitalisasi KUR; serta 4) Program Tematik “Peningkatan Literasi Keuangan” dengan Program Lingkup Sekolah Berbudaya Menabung dan Wirausaha (Lilah Dana & Usaha).

Untuk peningkatan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM dioptimalkan melalui pelaksanaan program KUR. Selanjutnya juga ditindaklanjuti dengan penyusunan website KUR Jogja (kurjogja.id) untuk mempercepat proses pengajuan KUR dan meminimalisir interaksi sosial dalam masa pandemi COVID-19 TPAKD DIY juga akan memberi hibah kepada Pemda DIY pada Tahun 2022.

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Masyarakat kini lebih mengenal KUR dan kemudahannya. Suku bunga KUR yang terus menurun dan adanya subsidi bunga dari Pemerintah Pusat lebih menarik masyarakat dan meringankan beban Lembaga Jasa Keuangan Penyalur KUR. Capaian penyaluran KUR di DIY selalu melebihi target penyaluran yang ditetapkan oleh Lembaga Jasa Keuangan berdasarkan alokasi anggaran Lembaga Jasa Keuangan Pusat.



Gambar 3.40. Penyaluran KUR Tahun 2017-2021
 Sumber: SIKP Kemenkeu RI, 2022

Penyaluran KUR dominan di Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Sektor Pertanian, Sektor Industri Pengolahan, Sektor Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan, dan perorangan lainnya serta Sektor akomodasi makan dan minum.

Capaian penyaluran KUR Sektor Produksi DIY tahun 2021 sebesar 59,60% lebih rendah dari capaian sektor produksi tahun 2020, namun dengan nominal capaian yang lebih tinggi yakni Rp3.497.918.104.969,00 pada 100.120 debitur. Capaian penyaluran KUR Sektor Produksi DIY tahun 2020 sebesar Rp2.672.868.058.013,00 atau 62,30% dari total penyaluran KUR bagi 86.403 debitur.

Dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan daya saing daerah, Pemda DIY menginisiasi kesepakatan bersama dengan PT Ekonomi Sirkular Indonesia terkait pengembangan kewirausahaan manajemen (pemasaran) produk berlebih bagi pelaku usaha di DIY (khususnya) dan untuk meningkatkan perekonomian daerah DIY.

Program Prioritas telah ditetapkan dengan Kepgub DIY Nomor 163/KEP/2017 tentang Program Prioritas Pembangunan, di mana saat ini sebagian telah selesai pembangunannya sehingga ditetapkan Kepgub DIY Nomor 353/KEP/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 163/KEP/2017 tentang Program Prioritas Pembangunan yang terdiri dari Program Pembangunan Infrastruktur Prioritas, Program Penataan/ Pengembangan Kawasan Prioritas, dan Program Strategis Lainnya yang Diprioritaskan.

Program Desa/Kalurahan Mandiri Budaya merupakan program yang telah dicanangkan dalam Perda DIY Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY. Hal tersebut tertuang pada Program Pembangunan Daerah dengan berdasar pada arah kebijakan dan program strategis, dimana Desa/Kalurahan Mandiri Budaya merupakan prioritas pembangunan DIY dengan target pada capaian kinerja program terdapat 5 Desa/Kalurahan Mandiri Budaya pada tahun 2019 dan sampai tahun 2022 ditargetkan tercapai sebanyak 20 Desa/Kalurahan Mandiri Budaya.

Pada tahun 2020, Pemda DIY melalui Kepgub DIY Nomor 364/KEP/2020 tentang Penetapan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2020 telah menetapkan 10 Desa/kalurahan sebagai Desa/kalurahan Mandiri Budaya dan pada tahun 2021 telah ditetapkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 383/KEP/2021 tentang Penetapan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya 2021 yang menetapkan 18 Desa/kalurahan sebagai Desa/kalurahan Mandiri Budaya. Selain itu di tahun 2021 juga dilakukan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Desa Mandiri Budaya dengan ringkasan sebagai berikut: 1) Lokasi memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kinerja Desa Mandiri Budaya, 2) Keberadaan tokoh penggerak

budaya berpengaruh kepada profesionalitas aktivitas Desa Mandiri Budaya, 3) Beberapa Desa/Kalurahan telah mampu mengaitkan antara seni, budaya, *entrepreneurship* hingga pemberdayaan, utamanya pemberdayaan perempuan, 4) Belum semua Desa/Kalurahan yang memanfaatkan teknologi digital

Salah satu kebijakan perlindungan sumber daya perekonomian yang disusun adalah *roadmap* pengembangan usaha garam rakyat yang dilakukan dalam upaya mengembangkan alternatif usaha rakyat dalam rangka melindungi penghidupan masyarakat, terutama masyarakat di daerah pesisir. Pengembangan usaha garam rakyat melibatkan lintas sektor dan dukungan dari berbagai pihak.

Di samping hal di atas, terdapat amanat sebagai hasil dari pemetaan tugas oleh Kementerian Dalam Negeri dalam hubungannya dengan pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau secara lintas sektor dan lintas administrasi pemerintahan (lingkup provinsi dan lingkup kabupaten/kota). Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau secara umum meliputi Kegiatan Kesejahteraan Masyarakat, Kegiatan di bidang Kesehatan, serta Penegakan Hukum. Alokasi anggaran yang disediakan oleh pemerintah pusat merupakan implikasi dari kontribusi cukai tembakau yang disetor oleh pemerintah daerah ke pemerintah pusat.

b) *Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2021*

Pada tahun 2021 Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitas Perekonomian dan SDA dilaksanakan dengan alokasi Rp3.618.136.000,00. Pengalokasian anggaran tersebut dibagi dalam 2 program dan 9 kegiatan. Secara keseluruhan belanja langsung dapat direalisasi sebanyak Rp3.202.127.164,00 atau 88,50%, dengan pencapaian fisik sebesar 100%.

Tabel 3.191. Capaian Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Fasilitas Perekonomian dan SDA Tahun 2021

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	SEKRETARIAT DAERAH	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Merumuskan kebijakan perekonomian dan pengelolaan sumber daya alam hayati untuk kesejahteraan masyarakat	<p>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</p> <p>Rumusan kebijakan perlindungan sumber daya perekonomian yang menjadi dasar kebijakan teknokratis dalam dokumen perencanaan</p> <p>Rumusan kebijakan stabilitas perekonomian daerah yang menjadi dasar kebijakan teknokratis dalam dokumen perencanaan</p> <p>Rumusan kebijakan rekayasa pertumbuhan perekonomian berkeadilan yang menjadi dasar kebijakan teknokratis dalam dokumen perencanaan</p> <p>Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro</p> <p>Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah</p> <p>Kajian Pemulihan Sektor Perekonomian Terdampak COVID-19</p> <p>Rekomendasi Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan</p> <p>Kajian Pengembangan Ekonomi Kreatif dalam Percepatan Pembangunan Wilayah</p> <p>Rekomendasi Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan</p>	%	30	30	<p>– Penyesuaian terhadap dinamika perekonomian yang berkembang cepat memerlukan koordinasi yang cepat pula antar mitra di setiap sektor.</p> <p>– Kondisi pandemi COVID menyebabkan keterbatasan pelaksanaan kegiatan regulasi yang terkait</p>	Koordinasi dan sinkronisasi dengan mitra di setiap sektor yang diampu dengan lebih intensif. Dalam kondisi pandemi COVID kegiatan tetap dilaksanakan dengan metode daring	NIHIL

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pengembangan Ekonomi Daerah						
				Pengembangan Sistem Informasi Ketahanan Pangan	aplikasi	1	1			
				Pendukung Pengendalian Inflasi						
				Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro						
				Kajian Pembentukan Pusat Grosir Pangan	dokumen	1	1			
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan						
				Kajian Pengelolaan Pertanian Tanaman Pangan Berbasis Pada Sosial Budaya dan Kearifan Lokal Pada Masyarakat Kawasan Pesisir Pantai Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul	dokumen	1	1			
				Valuasi Jasa Lingkungan Sektor Utama Pendukung Percepatan Pemulihan Ekonomi	dokumen	1	1			
				Laporan Monitoring dan Evaluasi Ekonomi Hijau di DIY	dokumen	1	1			
				Laporan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Perlindungan Sumber Daya Alam Berkelanjutan	dokumen	1	1			
				Kajian Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di DIY	dokumen	1	1			
				Monev pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai tembakau	dokumen	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Kajian Pemetaan Sektor Produksi dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi	dokumen	1	1			
				Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha						
				Laporan Kinerja KUR	dokumen	1	1			
				Roadmap Penumbuhan dan Pengembangan Ekonomi Wilayah melalui Optimalisasi Sumber Daya Desa	dokumen	1	1			

4) *Fasilitasi Kesra*

a) *Kondisi Umum*

Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat di DIY dilaksanakan dengan penyusunan bahan kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan kebijakan pada aspek kesehatan, sumber daya manusia dan bina mental, serta melalui fasilitasi kehidupan beragama. Tahun 2021, rumusan bahan kebijakan disusun melalui kegiatan kajian, yang menjadi bagian dari respon terhadap pandemi COVID-19 yang telah berlangsung sejak 2020. Kajian dilaksanakan dengan mengambil empat tema dari sektor kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, pendidikan dan kepemudaan. Sementara itu, kegiatan koordinasi kebijakan difokuskan pada pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), harmonisasi kehidupan beragama dan pengelolaan museum serta kegiatan monev yang dilakukan pada proses revitalisasi budaya tak benda.

Pemda DIY melalui Biro Bina Mental Spiritual Setda DY menginisiasi kajian kebijakan yang diharapkan dapat menjadi *evidence based* dalam rekomendasi dan penyusunan kebijakan dalam kesiapan pelayanan kesehatan di masa pemulihan pasca COVID-19. Hal tersebut bertujuan memberikan gambaran situasi kesiapsiagaan fasilitas pelayanan kesehatan dalam menghadapi pandemi dan analisa gap serta sebagai rekomendasi pada saat pasca pandemi.

Kajian ini telah dapat mengidentifikasi beberapa indikator yang perlu diintervensi untuk meningkatkan kesiapan layanan kesehatan di DIY dalam menghadapi pandemi. Di tingkat rumah sakit, dari 12 indikator kesiapan yang dirilis WHO, 3 indikator dipastikan sudah memenuhi standar kesiapan (nilai >80%) yaitu: Identifikasi dan diagnosis yang cepat; Pencegahan dan pengendalian infeksi; dan Kesiambungan layanan

dukungan penting. Sementara itu, 6 indikator mendekati siap dan sedikit perlu ditingkatkan (nilai 70-79%) yaitu: Komunikasi risiko dan keterlibatan masyarakat; Sumber Daya Manusia (SDM); Kepemimpinan dan manajemen SDM; Menejemen pasien; Menejemen pengawasan dan informasi; serta Adminisrasi keuangan dan keberlangsungan bisnis. Sementara itu, ada 3 indikator perlu segera dlakukan pembenahan (nilai <69%) yaitu indikator Kesehatan kerja, kesehatan mental dan bantuan psikososial; Koordinasi dan komunikasi; serta Kapasitas lonjakan.

Di tingkat puskesmas, dari 5 indikator, 1 indikator sudah menunjukkan kesiapan yaitu indikator Pencegahan dan Pengendalian infeksi. Sedangkan, 4 indikator masih perlu peningkatan, yaitu: Tim bencana dan kapasitas lonjakan; Komunikasi risiko; Layanan esensial; serta Peringatan dini pelaporan dan pemantaun informasi.

Pemda DIY melalui Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY menginisiasi kajian Optimalisasi Germas untuk Peningkatan Pengetahuan Masyarakat dalam Menghadapi Pandemi COVID-19, bertujuan memberikan gambaran kebijakan-kebijakan terkait Germas yang sudah ada, menganalisa potensi kontribusi Germas dalam pengendalian COVID-19, dan merumuskan strategi optimalisasinya melalui peningkatan literasi kesehatan masyarakat.

Di sektor pendidikan, perlu perhatian khusus terkait sistem pembelajaran tatap muka yang terdampak pembatasan sosial. Pemda DIY melalui Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY menginisiasi Kajian Pengembangan Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi Pasca Bencana. Kajian ini dimaksudkan untuk menyediakan peta berbagai kebutuhan terkait, baik kebijakan maupun teknis-operasional, masalah, inovasi dan peluang sebagai bahan rekomendasi kebijakan pengembangan

Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi Pasca Bencana, Pendoman Pendidikan Aman Bencana Pada Satuan Pendidikan, serta pedoman pembelajaran dari rumah. Hasil kajian kemudian dituangkan dalam Pergub DIY.

Sejak tahun 2018, DIY menjadi salah satu acuan untuk melihat dampak dari bonus demografi, dikarenakan DIY memiliki struktur penduduk yang khas pada rasio angkatan muda. Sektor ekonomi kreatif yang berkembang cukup pesat diharapkan dapat menjadi salah satu solusi pemberdayaan pemuda di DIY. Di tahun 2021 dilakukan kajian pemetaan potensi dan ekosistem pengembangan ekonomi kreatif pemuda di DIY, sebagai bagian dari upaya menekan tingkat ketergantungan.

Pembangunan Mental Spiritual melalui pendekatan keagamaan dilakukan dengan sasaran utama meningkatnya iman dan taqwa yang tercermin dalam pengamalan nilai-nilai agama dalam perilaku bermasyarakat. Bersinergi dengan Kementerian Agama, Pemda DIY melalui Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY mengambil peran sebagai katalisator melalui koordinasi, pembinaan maupun fasilitasi lembaga/organisasi keagamaan di masyarakat yang merupakan aktor utama pembangunan kehidupan beragama.

Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitasi Kesra dapat disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 3.192. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitasi Kesra Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Tar-get	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase rumusan bahan kebijakan yang	%	100	92	97,50	105,98	100	97,50

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
	menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bina mental spiritual							

Sumber: Biro Bintel Setda DIY, 2022

Pada tahun 2021 capaian indikator Persentase rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bina mental spiritual sebesar 97,50% atau 105,98% dari target 92%. Capaian tersebut menurun 2,50% dibanding tahun 2020, kemudian jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD terealisasi 97,50%.

Ketercapaian indikator tersebut didapat dari target 5 rumusan bahan kebijakan penguatan dan pengelolaan bina mental spiritual terealisasi menjadi 6 kebijakan. Kebijakan yang dihasilkan sebagai berikut.

- (1) Pergub DIY Nomor 103 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Lestari Tahun 2021-2025.
- (2) Pergub DIY Nomor 110 Tahun 2021 tentang Pedoman Pendidikan Aman Bencana Pada Satuan Pendidikan.
- (3) Kepgub DIY Nomor 82/KEP/2021 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2021 – 2026.
- (4) Kepgub DIY Nomor 236 / TIM / 2021 tentang Pembentukan Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat.
- (5) SE Gubernur DIY Nomor 451 /SE/7113/2021 tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadan 1442 H Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

- (6) SE Pemda DIY Nomor 36/SE/VI/2021 tentang Pembatalan Proses Seleksi Petugas Haji Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1442/2021M.

Sementara pada ketercapaian fasilitasi kehidupan beragama diukur dengan pelaksanaan seluruh bentuk fasilitasi yang ditargetkan. Dari target 4 macam fasilitasi, terealisasi 3 macam fasilitasi. Pada satu macam fasilitasi tidak dapat terlaksana yaitu kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ibadah haji. Hal tersebut disebabkan adanya kebijakan pembatalan keberangkatan Jamaah Haji oleh Menteri Agama, sehingga fasilitasi berhenti pada proses seleksi Petugas Haji Daerah. Bentuk fasilitasi kehidupan beragama yang dilaksanakan, yaitu: 1) Pembinaan Mental Rohani Agama; 2) Fasilitasi Festival Keagamaan; dan 3) Fasilitasi Hibah Keagamaan.

b) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2021

Pada tahun 2021 Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitasi Kesra dilaksanakan melalui 2 program, 9 kegiatan, dan 23 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp22.882.815.522,00. Realisasi fisik yang dicapai sebesar 99,81% dan realisasi keuangan sebesar Rp20.233.139.638,00 atau 88,42%. Deviasi fisik tersebut disebabkan faktor eksternal, yaitu pembatalan keberangkatan jamaah haji oleh Kementerian Agama dengan alasan pandemi COVID-19. Rincian program dan kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.193. Capaian Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Fasilitas Kesra Tahun 2021

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	SEKRETARIAT DAERAH	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL	1. Meningkatkan persentase rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100	1. Adanya migrasi sistem dari SIPKD yang sudah familier ke SIPD yang masih dalam proses pengembangan;	1. Selalu mengikuti perkembangan terkini terkait pengembangan sistem SIPD dan dan berkoordinasi dengan TAPD serta pihak-pihak lain yang terkait;	NIHIL
			2. Meningkatkan persentase kelompok masyarakat dan lembaga keagamaan yang terlayani	Administrasi keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	% %	100 100	100 100	2. Pembatasan sosial akibat adanya pandemi COVID-19 menyebabkan kegiatan-kegiatan fasilitasi dan pembinaan keagamaan yang bersifat pengumpulan masa sulit dilaksanakan;	2. Menggunakan sarana pertemuan secara daring, live streaming, maupun acara pembinaan mental secara tidak langsung (<i>recorded</i>) yang disiarkan melalui media TV maupun media sosial lainnya;	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
				Jumlah kegiatan Forum OPD kegiatan DPA 2022	kegiatan dokumen	1	1			
				Renja, Renja Perubahan, Renstra	dokumen	1	3	3. Kebijakan dari pusat sering kali berubah secara tiba-tiba sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan di daerah;	3. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait, terutama perwakilan instansi pusat yang ada di DIY dalam mengantisipasi perubahan kebijakan dari pusat;	
				ROPK 2021	dokumen	1	1			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
				Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	Skor A	1	1			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
				Tersedianya anggaran gaji tahun untuk ASN		1	1	4. Penerima hibah keagamaan khususnya hibah rumah ibadah mengalami kenaikan yang signifikan dibanding tahun sebelumnya (2020 sebanyak 287 penerima) sehingga menambah beban kerja pelaksana teknis.	4. Penambahan personil 2 orang tenaga bantu yang khusus menangani kegiatan hibah keagamaan dan mengembangkan Sistem Informasi Penyaluran Hibah (SIMBAH).	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
				Dokumen Laporan keuangan akhir tahun	dokumen	1	1			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD						
				Dokumen Semesteran	dokumen	2	2			
				Dokumen Laporan bulanan	dokumen	12	12			
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Dokumen Laporan prognos Semester II	dokumen	1	1			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
				Pembelian peralatan listrik dan elektronika	jenis	8	8			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
				Jumlah pembelian ATK	jenis	38	38			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
				Penggandaan	lembar	50000	50000			
				Barang cetakan	jenis	4	4			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
				Pembelian referensi/Peraturan Perundang-undangan	buku jenis	6	6			
				Pembayaran langganan surat kabar dan majalah	tahun	1	1			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
				Konsultasi dan Koordinasi Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY dalam Jawa terlaksana dengan baik	tahun	1	1			
				Konsultasi dan Koordinasi Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY dalam daerah terlaksana dengan baik	tahun	1	1			
				Konsultasi dan Koordinasi Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY luar Jawa terlaksana dengan baik	tahun	1	1			
				Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	tahun	1	1			
				Pengadaan Mebel						
				Pengadaan Mebel	jenis	1	1			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
				Pengadaan Perlengkapan Kantor	jenis	3	3			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pengadaan Peralatan jenis Komputer		2	2			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
				Pengadaan Interior Gedung paket		1	1			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
				Surat Masuk surat		2160	1100			
				Surat Keluar surat		5500	2204			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
				Kinerja Pengelola Keuangan 9 orang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	tahun	1	1			
				Kinerja Pengelola Barang 2 orang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	tahun	1	1			
				Kinerja pengemudi 1 orang	tahun	1	1			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
				Kendaraan dinas/operasional sesuai RKPBMMD terpelihara	unit	6	6			
				Jumlah perizinan kendaraan	unit	6	6			
				Pemeliharaan Mebel						
				Pemeliharaan mebel	jenis	2	2			
				Sewa tanaman hias	tahun	1	1			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
				Perlengkapan gedung kantor sesuai RKPBMMD terpelihara	jenis	8	8			
				PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT						
				Bahan rumusan kebijakan bina mental dan sarana keagamaan yang ditindaklanjuti	dokumen	2	4			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Terlayannya lembaga keagamaan 5 agama	layanan	4	3			
				Rumusan bahan pengelolaan dan penguatan kebijakan kesehatan yang ditindaklanjuti	dokumen	2	2			
				Rumusan bahan pengelolaan dan penguatan kebijakan sumber daya manusia yang ditindaklanjuti	dokumen	2	2			
				Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual						
				Jumlah Lembaga/organisasi Keagamaan penerima hibah	lembaga/organisasi	8	8			
				Jumlah Tempat Ibadah penerima hibah	tempat ibadah	510	505			
				Jumlah SK tim Petugas Haji Daerah	dokumen	1	1			
				Jumlah kegiatan pembinaan mental spiritual	kali	32	25			
				Golongan perlombaan STQ Daerah yang dilombakan	golongan	20	20			
				Jumlah peringatan hari besar keagamaan	kali	8	7			
				Kategori lomba PESPARANI Nasional yang diikuti	kategori	11	11			
				Jumlah Laporan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kehidupan beragama	dokumen	1	1			
				Jumlah kategori perlombaan Pesparawi Daerah yang dilombakan	kategori	12	12			
				Golongan perlombaan STQ Nasional yang diikuti	golongan	20	20			
				Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan						

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Arsip Inaktif dari instansi lingkungan Pemerintah Daerah DIY	dokumen	0	0			
				Kajian Pengembangan Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi Pasca Bencana	dokumen	1	1			
				Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan						
				Kajian Kebijakan Kesiapan Pelayanan Kesehatan Dalam Masa Pemulihan Pasca COVID-19	dokumen	1	1			
				Kajian Kebijakan Optimalisasi Germas dalam rangka peningkatan pengetahuan masyarakat menghadapi Wabah/Pandemi	dokumen	1	1			
				Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesehatan Masyarakat	dokumen	1	1			
				Jumlah laporan Pelaksanaan GERMAS	dokumen	1	1			
				Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan	dokumen	1	1			
				Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Kesehatan Masyarakat	dokumen	1	1			
				Jumlah layanan Posbindu PTM SATRIYA	kali	12	12			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Kesehatan	dokumen	0	0			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata						
				Jumlah Laporan Penyusunan Strategi Peningkatan Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Potensi Desa/Kelurahan Budaya	dokumen	0	0			
				Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemajuan, Pengelolaan dan Pengembangan Museum di DIY	dokumen	1	1			
				Kajian Pemetaan Potensi dan Ekosistem Ekonomi Kreatif Pemuda di DIY	dokumen	1	1			
				Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Pembinaan Prestasi Olahraga	dokumen	0	0			
				Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Desa/Kelurahan Budaya	dokumen	0	0			
				Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Peningkatan Reaktualisasi dan Revitalisasi NilaiNilai Budaya, Adat-Istiadat, Bahasa, Seni dan Tradisi Luhur	dokumen	1	1			

5) Kelembagaan dan Tata Laksana

a) Kondisi Umum

Pemda DIY telah melaksanakan program dan kegiatan yang menghasilkan regulasi, kebijakan, fasilitasi, dan evaluasi kebijakan penataan organisasi, guna mendorong proses reformasi birokrasi secara signifikan untuk mewujudkan tercapainya misi tata kelola pemerintahan yang baik serta merespon tuntutan reformasi birokrasi. Pemda DIY menindaklanjuti Perdas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui: (1) Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah; (2) Peraturan Gubernur tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kelurahan; dan (3) Peraturan Gubernur tentang Penugasan Urusan Keistimewaan, maka penataan kelembagaan Pemda DIY telah berjalan sesuai dengan arah yang direncanakan.

Pada tahun 2021 telah disusun pedoman mengenai Lembaga Non Struktural (LNS). Pedoman dimaksud menjadi acuan pembentukan, perubahan dan pembubaran LNS pada beberapa perangkat daerah pemda DIY serta acuan dalam menata, merencanakan kebutuhan penganggaran dan sinkronisasi tugas dan fungsi dengan perangkat daerah. Keberadaan Lembaga Non Struktural (LNS) sebagai lembaga independen yang dibentuk dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah.

Pemda DIY telah menyusun dokumen reviu analisis jabatan, dokumen reviu analisis beban kerja, dan dokumen standar kompetensi jabatan dengan ruang lingkup seluruh OPD di lingkungan Pemda DIY yang terkait bidang manajemen SDM aparatur. Dokumen tersebut merupakan salah satu pedoman

dalam penataan SDM aparatur sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Hasil monev dimaksud digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan kelembagaan perangkat daerah yang telah ada sekarang, dan sebagai bahan pertimbangan dalam penataan kelembagaan di masa yang akan datang.

Pada aspek budaya kerja, salah satu ranah penting perubahan reformasi birokrasi Pemda DIY adalah perubahan *mindset* (pola pikir) dan *culture set* (budaya kerja). Pembangunan aparatur yang berkarakter telah dilaksanakan secara berkelanjutan melalui penanaman nilai-nilai luhur budaya SATRIYA (Selaras, Akal budi luhur, Teladan, Rela melayani, Inovatif, Yakin dan Percaya diri dan Ahli–Profesional). Budaya SATRIYA diinternalisasikan melalui nilai-nilai budaya pemerintahan pada aparatur di lingkungan Pemda DIY dengan pembentukan kelompok budaya pemerintahan pada setiap Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis, pelatihan/pendampingan penyusunan rencana aksi (*action plan*) implementasi budaya pemerintahan, kompetisi antar kelompok budaya pemerintahan, serta monitoring dan evaluasi implementasi budaya pemerintahan pada semua Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis menjadi strategi dan upaya penting pembentukan karakter istimewa ASN Pemda DIY.

Dari hasil monitoring dan evaluasi budaya pemerintahan SATRIYA tahun 2021, intensitas penerapan budaya SATRIYA di seluruh OPD dan UPT Pemda DIY termasuk dalam kategori Baik yang berdampak pada perbaikan lingkungan fisik instansi, lingkungan sosial, peningkatan tata kelola pemerintahan dari aspek akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik.

Salah satu langkah yang ditempuh dalam meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur oleh setiap unit pelayanan Pemda DIY antara lain: kewajiban bagi setiap penyelenggara untuk menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan pada setiap jenis pelayanan yang diberikan, baik yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) maupun proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*). Pada tahun 2021 pelaksanaan survei kepuasan masyarakat yang dilakukan Pemda DIY terhadap 95 unit penyelenggara pelayanan publik dengan jumlah responden sebanyak 22.766 responden dan diperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) rata-rata sebesar 84,73 dengan mutu pelayanan B atau dikategorikan Baik.

Tabel 3.194. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Kelembagaan dan Tata Laksana Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien	%	80,50	81,50	81,50	100	83	98
2	Jumlah instansi penyelenggara pelayanan publik pada zona hijau	unit	84	23	95	413,04	31	413,04

Sumber: Biro Organisasi Setda DIY, 2022

Capaian indikator kinerja Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien pada tahun 2021 terealisasi sebesar 81,50% dari target 81,50% atau dengan persentase capaian sebesar 100%. Faktor pendukung keberhasilan capaian indikator tersebut yakni ketersediaan dukungan regulasi dari Pemerintah Pusat yang memberikan cukup keleluasaan kepada Pemda DIY untuk

menata kelembagaan Perangkat Daerah sebagai salah satu kewenangan dalam urusan keistimewaan.

Capaian indikator kinerja Jumlah instansi penyelenggara pelayanan publik pada zona hijau juga melampaui target, dari target 23 unit tercapai sebanyak 95 unit atau dengan persentase capaian sebesar 413,04%. Beberapa faktor pendukung keberhasilan capaian indikator tersebut yaitu: (1) Peran aktif penyelenggara pelayanan untuk memenuhi indikator kepatuhan terhadap UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; (2) Dilaksanakannya pendampingan pemenuhan indikator kepatuhan terhadap UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan monitoring secara intensif; serta (3) Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang terus dioptimalkan antara lain dengan selalu dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap peraturan gubernur yang menjadi tindak lanjut Peraturan Daerah Pelayanan Publik, yaitu Pergub Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan serta Pergub Nomor 68 Tahun 2016 yang telah diubah menjadi Pergub Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat. Selain itu juga terus didorong gerakan “*One Agency One Innovation*” dengan dikeluarkannya Pergub Nomor 44 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Inovasi Pelayanan Publik.

b) *Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2021*

Pada tahun 2021 pelaksanaan Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Kelembagaan dan Tata Laksana dilaksanakan dengan alokasi Rp3.031.542.400,00. Pengalokasian anggaran tersebut dibagi dalam 5 program dan 17 sub kegiatan. Secara keseluruhan belanja langsung dapat direalisasi sebanyak Rp2.614.740.262,00 atau 86,25%, dengan pencapaian fisik sebesar 100%.

Tabel 3.195. Capaian Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Kelembagaan dan Tata Laksana Tahun 2021

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan / Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	URUSAN UMUM	BIRO ORGANISASI	1. Melaksanakan perumusan kebijakan kelembagaan dan tatalaksana pemerintah daerah	PROGRAM PENUNJANG DAERAH PROVINSI	URUSAN	PEMERINTAHAN		Perubahan regulasi dari Pusat	1) Meningkatkan intensitas komunikasi, informasi, advokasi, pendampingan, monitoring dan evaluasi terhadap upaya-upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan kepada Perangkat Daerah maupun Pemerintah Pusat. 2) Penguatan kelompok budaya pemerintahan dan agen perubahan di masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah DIY.	urusan Kelembagaan: 1) Dengan ditetapkannya Perdas DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, sejak Tahun 2019 sampai dengan saat ini telah dilaksanakan evaluasi implementasi Perdas dimaksud dengan melakukan sinkronisasi tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan indikator kinerja pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY tahun 2017-2022 untuk meminimalisir terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Desain kelembagaan disusun dengan setiap struktur mengampu minimal 1 (satu) program sehingga program yang sama tidak mungkin diampu beberapa struktur, artinya overlap dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dihindari. Setiap struktur yang dibentuk telah mengakomodir fungsi koordinasi sesuai dengan masing-masing urusan. 2) Dalam Perdas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, telah ditetapkan Dinas Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan
			2. Melaksanakan perumusan kebijakan evaluasi jabatan dan pengembangan kinerja jabatan	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah Persentase sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah Persentase penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran	% % %	100 100 100	100 100 100	Situasi pandemi COVID-19 yang mengubah pola interaksi internal birokrasi, pola interaksi masyarakat maupun pola interaksi antara birokrasi dan masyarakat	Memberikan fasilitasi yang optimal kepada unit pelayanan publik Pemda DIY sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan / Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				tugas dan fungsi Perangkat Daerah						dan perikanan. Khusus tentang kelautan diampu oleh 3 (tiga) Bidang, yaitu Bidang Perikanan Tangkap, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, dan Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pengawasan serta 1 (satu) UPT Pelabuhan Perikanan Pantai, yang diatur dilebih lanjut dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 61 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
			3. Meningkatkan implementasi budaya pemerintahan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
			4. Mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dukungan 0,29% terhadap Terwujudnya Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	%	100	100			
			5. Melaksanakan perumusan kebijakan dan monitoring evaluasi pelayanan publik	BA Forum Perencanaan OPD, Renja, Renja Perubahan, Renstra Perubahan	Dokumen	4	4			
			6. Melaksanakan perumusan kebijakan dan monitoring evaluasi standarisasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						
				DPA	Dokumen	1	1			
				Dukungan 0,29% terhadap Terwujudnya Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	%	100	100			
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD						
				Dukungan 0,29% terhadap Terwujudnya Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	%	100	100			
				DPPA	Dokumen	3	1			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan / Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Dukungan 0,29% terhadap Terwujudnya Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	%	100	100			
				Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, dan IKU)	Dokumen	1	1			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
				Realisasi capaian fisik dan keuangan sesuai tahapan ROPK	%	100	100			
				Dukungan 0,29% terhadap Terwujudnya Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	%	100	100			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
				Tersedianya Gaji dan tahun Tunjangan ASN		1	1			
				Dukungan 99,71% terhadap Terwujudnya Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran dan Fungsi SKPD	%	100	100			
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						
				Dukungan 99,71% terhadap Terwujudnya Penatausahaan Keuangan	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan / Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran dan Fungsi SKPD						
				Administrasi perkantoran yang terselesaikan dengan baik dan tepat waktu	Bulan	12	12			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
				Dukungan 99,71% % terhadap Terwujudnya Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran dan Fungsi SKPD		100	100			
				Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen	1	1			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						
				Laporan Keuangan Bulanan	Dokumen	12	12			
				Dukungan 99,71% % terhadap Terwujudnya Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran dan Fungsi SKPD		100	100			
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						
				Dukungan 99,71% % terhadap Terwujudnya Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran dan Fungsi SKPD		100	100			

No	Ururan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan / Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Laporan Realisasi Semester Pertama dan Prognosis 6 (Enam) Bulan Berikutnya	Dokumen	1	1			
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						
				Dukungan 0,24% terhadap persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	10	10			
				Laporan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)	Dokumen	1	1			
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						
				Dukungan 0,24% terhadap persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100			
				Laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	Dokumen	4	4			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
				Mesin Ketik	unit	4	4			
				Faximile	unit	1	1			
				PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN						
				Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis	5	5			
				Dukungan 95,69% terhadap persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
				Tabung Pemadam Kebakaran yang Terisi	Tabung	2	0			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan / Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Alat Tulis Kantor	Jenis	31	31			
				Dukungan 95,69% terhadap persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	81.95			
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
				Dukungan 95,69% terhadap persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100			
				Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Jenis	14	14			
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						
				Barang Cetakan	Jenis	6	6			
				Dokumen hasil penggandaan	Lembar	22800	22620			
				Dukungan 95,69% terhadap persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
				Surat Kabar Harian	Bulan	12	12			
				Dukungan 95,69% terhadap persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
				Laporan dan Rencana Tindak Lanjut Hasil Konsultasi dan Koordinasi	Bulan	12	12			
				Laporan dan Rencana Tindak Lanjut Hasil Rapat Koordinasi	Bulan	12	12			
				Dukungan 95,69% terhadap persentase	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan / Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Materi Informasi yang % Sesuai dengan Data Profil dan Informasi Biro Organisasi yang Lengkap dan Terkini Dukungan 95,69% % terhadap persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Dukungan 37,77% % terhadap persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Peralatan Kantor Sesuai Jenis RKBMD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dukungan 4,31% terhadap % persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Bukti pembayaran Paket pengiriman dokumen Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Bukti Pembayaran Bulan Langganan Aplikasi Rapat dalam Jaringan Dukungan 4,31% terhadap % persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						

No	Ururan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan / Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Bukti Pembayaran Sewa tanaman hias	Bulan	12	11			
				Dukungan 4,31% terhadap persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
				Dukungan terhadap persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana	%	100	100			
				Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara sesuai RKBMD	Unit	1	1			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
				Dukungan terhadap persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana	%	100	100			
				Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Terpelihara sesuai RKBMD	Unit	7	7			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
				Dukungan terhadap persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana	%	100	100			
				Perlengkapan kantor yang terpelihara sesuai RKBMD	Jenis	8	8			
2	KELEMBAGAAN DAERAH ISTIMEWA	BIRO ORGANISASI	1. Melaksanakan perumusan kebijakan kelembagaan dan	PROGRAM PENATAAN KETATALAKSANAAN	KELEMBAGAAN	DAN		Perubahan regulasi dari Pusat	1) Meningkatkan intensitas komunikasi, advokasi,	urusan Kelembagaan 1) Dengan ditetapkannya Perdais DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan / Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	YOGYAKARTA (KEISTIMEWAAN)		tatalaksana pemerintah daerah						pendampingan, monitoring dan evaluasi terhadap upaya-upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan kepada Perangkat Daerah maupun Pemerintah Pusat. Daerah (RPJMD) DIY tahun 2017-2022 untuk meminimalisir kelompok budaya terjadinya tumpang tindih dalam pemerintahan dan agen perubahan di masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah DIY.	Daerah Istimewa Yogyakarta, sejak Tahun 2019 sampai dengan saat ini telah dilaksanakan evaluasi implementasi Perda dis dimaksud dengan melakukan sinkronisasi tugas dan fungsi Perangkat Daerah kinerja pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY tahun 2017-2022 untuk meminimalisir terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Desain kelembagaan disusun dengan setiap struktur mengampu minimal 1 (satu) program sehingga program yang sama tidak mungkin diampu beberapa struktur, artinya overlap dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dihindari. Setiap struktur yang dibentuk telah mengakomodir fungsi koordinasi sesuai dengan masing-masing urusan. 2) Dalam Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, telah ditetapkan Dinas Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan. Khusus tentang kelautan diampu oleh 3 (tiga) Bidang, yaitu Bidang Perikanan Tangkap, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, dan
			2. Melaksanakan perumusan kebijakan evaluasi jabatan dan pengembangan kinerja jabatan	Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang proporsional	%	87.05	87.05	Situasi pandemi COVID-19 yang mengubah pola interaksi internal birokrasi, pola interaksi masyarakat maupun pola interaksi antara birokrasi dan masyarakat	Memberikan fasilitasi yang optimal kepada unit pelayanan publik Pemda DIY sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	
			3. Meningkatkan implementasi budaya pemerintahan	Perumusan Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah						
			4. Mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dukungan 100% terhadap persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional	%	100	100			
			5. Melaksanakan perumusan kebijakan dan monitoring evaluasi pelayanan publik	Kajian kelembagaan perangkat daerah Pemerintah Daerah DIY	Dokumen	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan / Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			6. Melaksanakan perumusan kebijakan dan monitoring evaluasi standarisasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Laporan Evaluasi Lembaga Non Struktural Regulasi Kelembagaan Perangkat Daerah dan UPT Pembinaan dan Pengendalian Kelembagaan Kabupaten/Kota Pemetaan Kelembagaan Kab/Kota Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota Dukungan 100% terhadap persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional Perumusan kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan Tersusunnya Dokumen Standar Kompetensi Jabatan Tersusunnya Dokumen Kualifikasi Jabatan Tersusunnya Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Tersusunnya Dokumen Evaluasi Jabatan Dukungan 100% terhadap persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan Dukungan 100% terhadap persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional Data Usulan Program Kegiatan Urusan Kelembagaan Tahun 2022	Laporan Rapergub Dokumen Rekomendasi % dokumen Dokumen Dokumen Dokumen % dokumen dokumen	1 25 2 5 100 1 1 1 1 100 100 1 1	1 25 2 5 100 1 1 1 1 100 100 1 1			Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pengawasan serta 1 (satu) UPT Pelabuhan Perikanan Pantai, yang diatur dilebih lanjut dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 61 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan.

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan / Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Laporan Monitoring dan Evaluasi Urusan Kelembagaan Tahun 2021	dokumen	1	1			
				Data Usulan Program Kegiatan Urusan Kelembagaan Tahun 2023	Dokumen	1	1			
				PROGRAM PENINGKATAN BUDAYA PEMERINTAHAN						
				Tingkat Penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta	%	78	84.04.00			
				Implementasi Budaya Pemerintahan DIY						
				Reviu Peraturan Gubernur tentang Budaya Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta	Rapergub	1	1			
				Pemenang Kompetisi Kelompok Budaya Pemerintahan	KBP	10	10			
				Rencana Aksi (Action Plan) Tahunan Budaya Pemerintahan	Dokumen	1	1			
				Laporan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Budaya Pemerintahan	Dokumen	1	1			
				Agen Perubahan yang meningkat kapasitasnya	Agen	213	213			
				Dukungan 100% terhadap tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN Pemda DIY	%	100	100			
3	SEKRETARIAT DAERAH	BIRO ORGANISASI	1. Melaksanakan perumusan kebijakan kelembagaan dan tatalaksana pemerintah daerah	PROGRAM PENINGKATAN REFORMASI BIROKRASI Jumlah Inovasi Pelayanan Publik sesuai Kriteria Nasional	PENYELENGGARAAN Inovasi	1	1	Perubahan regulasi dari Pusat	1) Meningkatkan intensitas komunikasi, advokasi, pendampingan, dan monitoring dan evaluasi terhadap	urusan Kelembagaan 1) Dengan ditetapkannya Perdas DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, sejak Tahun 2019 sampai dengan saat ini telah dilaksanakan evaluasi

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan / Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									upaya-upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan kepada Perangkat Daerah maupun Pemerintah Pusat. Daerah (RPJMD) DIY tahun 2017-2022) Penguatan kelompok budaya pemerintahan dan agen perubahan di masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah	implementasi Perda dis dimaksud dengan melakukan sinkronisasi tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan indikator kinerja pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY tahun 2017-2022 untuk meminimalisir terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Desain kelembagaan disusun dengan setiap struktur di lingkungan Pemerintah Daerah mengampu minimal 1 (satu) program sehingga program yang sama tidak mungkin diampu beberapa struktur, artinya overlap dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dihindari. Setiap struktur yang dibentuk telah mengakomodir fungsi koordinasi sesuai dengan masing-masing urusan. 2) Dalam Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, telah ditetapkan Dinas Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan. Khusus tentang kelautan diampu oleh 3 (tiga) Bidang, yaitu Bidang Perikanan Tangkap, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, dan Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pengawasan serta 1 (satu) UPT Pelabuhan Perikanan Pantai, yang diatur lebih lanjut dengan
			2. Melaksanakan perumusan kebijakan evaluasi jabatan dan pengembangan kinerja jabatan	Persentase jumlah OPD yang telah melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik. Catatan : indikator baik adalah minimal melaksanakan 5 area perubahan reformasi birokrasi	%	76	81	Situasi pandemi COVID-19 yang mengubah pola interaksi internal birokrasi, pola interaksi masyarakat maupun pola interaksi antara birokrasi dan masyarakat	Memberikan fasilitasi yang optimal kepada unit pelayanan publik Pemda DIY sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	
			3. Meningkatkan implementasi budaya pemerintahan	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi						
			4. Mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi (8 area perubahan) pada 37 OPD	Laporan	1	1			
			5. Melaksanakan perumusan kebijakan dan monitoring evaluasi pelayanan publik	Dukungan 100% terhadap persentase jumlah OPD yang telah melaksanakan Reformasi Birokrasi (8 area perubahan) pada 37 OPD	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan / Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			6. Melaksanakan perumusan kebijakan dan monitoring evaluasi standarisasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Berita Acara serah terima LKjIP dan PK Dokumen LKjIP dan PK Dukungan 100% terhadap persentase jumlah OPD yang telah melaksanakan Reformasi Birokrasi (8 area perubahan) pada 37 OPD Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan Rapergub Pemberian Dana Operasional, Tunjangan Reses, Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Kesejahteraan berupa Tunjangan Perumahan, Belanja Rumah Tangga, Tunjangan Transportasi dan Uang Pembelian Pakaian Dinas dan Atribut Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD Rapergub SB Rapergub SHBJ Dukungan 100% terhadap persentase jumlah OPD yang telah melaksanakan Reformasi Birokrasi (8 area perubahan) pada 37 OPD Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik Rekomendasi hasil Monev Survei Kepuasan Masyarakat Jumlah Inovasi yang Diikutsertakan dalam Kompetisi Inovasi	Laporan Dokumen % Rapergub Rapergub % inovasi	1 37 100 0 1 1 100 95 10	1 37 100 0 1 1 100 95 11		Peraturan Gubernur DIY Nomor 61 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan.	

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan / Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pelayanan Publik yang diselenggarakan Kementerian PAN dan RB RI						
				Rekomendasi Monev Kepatuhan Standar Pelayanan	Unit yanlik	95	95			
				Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang dibina (sesuai Pergub Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Inovasi)	Inovasi	15	17			
				Dukungan 100% terhadap persentase jumlah OPD yang telah melaksanakan Reformasi Birokrasi (8 area perubahan) pada 37 OPD	%	100	100			

6) *Fasilitasi Administrasi Pembangunan*

a) *Kondisi Umum*

Sesuai Pergub DIY Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, mengampu tugas melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis bidang pengembangan infrastruktur wilayah dan pembiayaan pembangunan serta pengadaan barang dan jasa. Sasaran Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY adalah Meningkatnya Kualitas Rumusan Kebijakan Bidang Infrastruktur Daerah dan Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah yang diukur melalui indikator kinerja yaitu Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi di bidang infrastruktur daerah dan pembiayaan pembangunan non pemerintah yang ditindaklanjuti.

Tabel 3.196. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitasi Administrasi Pembangunan Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi di bidang infrastruktur daerah dan pembiayaan pembangunan non pemerintah yang ditindaklanjuti	%	72,22	80	80,77	100,96	80	100,96

Sumber: Biro PIWP2 Setda DIY, 2022

Capaian terhadap indikator tersebut pada tahun 2021 mencapai 80,77% dari target yang ditetapkan sebesar 80% atau dengan persentase capaian sebesar 100,96%. Angka tersebut diperoleh dari 26 rumusan kebijakan yang ditindaklanjuti menjadi 21 kebijakan.

Dari rumusan-rumusan kebijakan tersebut, telah ditindaklanjuti menjadi 21 dokumen kebijakan pada tahun 2018-2021, yaitu: 1) Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 2026 K/40/MEM/2018 tentang Penetapan Kawasan Cagar Alam Geologi DIY; 2) Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 367/KEP/2018 tentang Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah di Bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni Tahun 2017-2022; 3) SE Gubernur DIY Nomor 691/6927/SE/IV/2020 tentang Penerbitan Perizinan Air Tanah (NPA) Paska Diundangkannya UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air; 4) Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 546/ 16990 / SE/ XXII/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Upaya Pelestarian, Pengelolaan dan Pengembangan Penyangga Kawasan Cagar Alam Geologi Daerah Istimewa Yogyakarta; 5) Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 490 / 17558 tanggal 30 Desember 2019 tentang Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; 6) Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 650/17560/ SE/XXII/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kawasan Perkotaan; 7) Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 / 17658 tanggal 31 Desember 2019 tentang Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; 8) Surat Edaran Gubernur Nomor 18430/SE/XXII/2020 tentang Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Pada Masa

Pandemi COVID-19 di DIY; 9) Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12/18977/SE/XXII/2020 tentang Kerja sama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) Dalam Penyediaan Infrastruktur; 10) Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 490 / 11628 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Sistem Aplikasi Nawasis dalam Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Perumahan, Air Minum dan Sanitasi Tahun 2020-2024 di DIY; 11) Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 490/14413 tahun 2020 tentang Pelibatan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) atau Sebutan Lainnya Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta; 12) Peraturan Gubernur DIY Nomor 50 Tahun 2020 tentang Dewan Penelitian dan Pengembangan; 13) Surat Keputusan Gubernur Nomor 347/KEP/2020 tentang Susunan Pengurus Dewan Penelitian dan Pengembangan Masa Bakti 2020-2023; 14) Ingub No.39/INSTR/2021 tgl 15 Des 2021 tentang Pelaksanaan Proyek Program Prioritas Pembangunan DIY Dengan Skema Kerja sama Pemerintah Dengan Badan Usaha; 15) Surat Edaran Nomor No. 119/24892 DIY Sekda DIY tentang Intensifikasi Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah Dalam Penyediaan Infrastruktur (Program Pengembangan/Penataan Kawasan Prioritas); 16) Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 490/24370 tahun 2021 tentang Percepatan Pencapaian Target Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Bidang Infrastruktur di Daerah Istimewa Yogyakarta; 17) SE Gubernur No. 490/24797 tentang Percepatan Pencapaian Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Melalui Kemitraan Multipihak Dengan Pemangku Kepentingan Non Pemerintah Di Daerah Istimewa Yogyakarta; 18) SE Gubernur Nomor 12/01394 tanggal 1 Juni 2021 tentang Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi di DIY; 19) Surat

Edaran Gubernur Nomor 553/19094 tentang Pengembangan Infrastruktur Wilayah pada Kawasan Hinterland Yogyakarta International Airport (YIA); 20) Surat Edaran Gubernur Nomor 616/24374 tentang Penguatan Konservasi Air Tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta; 21) Surat Edaran Gubernur Nomor 12/24733 tanggal 28 Desember 2021 tentang Peningkatan Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Indikator kinerja Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi di bidang infrastruktur daerah dan pembiayaan pembangunan non pemerintah yang ditindaklanjuti, merupakan hasil dari pelaksanaan program-program pendukung sasaran strategis sebagai berikut.

(1) Program Kebijakan Administrasi Pembangunan

Program Kebijakan Administrasi Pembangunan mengampu 2 Kegiatan yaitu

Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah. Program dan Kegiatan ini diampu oleh 3 Bagian yaitu Bagian Pengelolaan kebijakan Infrastruktur Daerah, Bagian Pengelolaan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan dan Bagian Pengelolaan Kebijakan Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah.

Dalam Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah terdapat satu Sub kegiatan yaitu Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah. Pada tahun 2021 sub kegiatan ini menghasilkan beberapa kebijakan yang ditindaklanjuti menjadi Surat Edaran.

Sedangkan dalam Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah terdapat satu Subkegiatan yaitu Sub kegiatan Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah yang juga menghasilkan beberapa kebijakan yang ditindaklanjuti menjadi Surat Edaran.

(2) *Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa*

Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, mengampu tiga kegiatan yaitu: Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa; Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa; serta Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik.

Melalui Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa sebanyak 614 paket pengadaan OPD Pemda DIY yang dilimpahkan ke BLP telah diselesaikan, baik yang proses pemilihan penyedia dilakukan melalui mekanisme tender, seleksi, maupun pengadaan barang jasa yang dikecualikan. Selain itu, melalui Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa telah dikembangkan 2 komoditas katalog elektronik lokal yaitu pengadaan jasa kebersihan kantor dan pengadaan jasa keamanan kantor sebagai upaya implementasi strategi pengadaan. Agar pengadaan barang dan jasa dapat berjalan lebih efektif dan efisien komoditas dalam katalog elektronik lokal akan diperbanyak. Pada tahun 2021 juga telah dilakukan sosialisasi serta pendampingan kepada OPD Pemda DIY untuk dapat melakukan transaksi Makanan dan Minuman Rapat serta Alat Tulis Kantor melalui kanal Bela Pengadaan.

Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan melalui pembinaan pelaku pengadaan (PA/KPA, PPK, Pokja Pemilihan, Pejabat Pengadaan, dan Pelaku Usaha/Penyedia), serta dilakukan pembinaan atau

monitoring evaluasi terhadap capaian Kematangan UKPBJ Kabupaten/Kota di DIY. Pembinaan pelaku pengadaan dilaksanakan melalui sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa, Rapat Koordinasi, serta Layanan Konsultasi dan Advokasi.

Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), dilaksanakan menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik. Jenis layanan pada kegiatan ini antara lain pendaftaran akun pelaku pengadaan, pelayanan keluhan penggunaan sistem, tata cara penggunaan sistem, dan lain-lain. Layanan LPSE dilaksanakan setiap hari kerja di Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa. Selain melakukan pelayanan, pada kegiatan ini juga dilakukan pengembangan website UKPBJ sebagai optimalisasi monitoring evaluasi proses pengadaan barang/jasa dari tahap perencanaan sampai dengan serah terima pekerjaan. Harapannya data proses pengadaan barang/jasa dapat ditarik dan dilakukan pemantauan sehingga proses pengadaan dapat berjalan sesuai prinsip-prinsip pengadaan.

b) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2021

Pada tahun 2021 Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitasi Administrasi Pembangunan dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp10.892.916.979,00. Pengalokasian anggaran tersebut dibagi dalam 4 Program, 11 Kegiatan dan 21 Sub kegiatan. Secara keseluruhan belanja langsung dapat direalisasi sebanyak Rp10.427.090.390,00 atau 95,72%, dengan pencapaian fisik sebesar 100%.

Tabel 3.197. Capaian Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Fasilitas Administrasi Pembangunan Tahun 2021

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	1. Peningkatan kualitas kebijakan pembangunan infrastruktur daerah, pembangunan berkelanjutan dan pembiayaan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 3. Peningkatan kualitas kelembagaan pengadaan barang dan jasa menuju Center of Excellence.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia Laporan Monev Pengelolaan dokumen Geoheritage DIY Desain dan inventarisasi Kebutuhan Penanda Geoheritage DIY Kajian Pengembangan Geoheritage DIY Film Dokumenter Geoheritage DIY untuk 20 (duapuluh) Situs Geoheritage			1 1 1 1	Adanya dinamika di lapangan yang mempengaruhi lingkup kebijakan yang disusun	peningkatan informasi dan koordinasi antar bagian terkait aturan yg diberlakukan sehingga menyamakan persepsi	NIHIL
2	SEKRETARIAT DAERAH	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	1. Peningkatan kualitas kebijakan pembangunan infrastruktur daerah, pembangunan berkelanjutan dan pembiayaan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 2. Peningkatan penggunaan aplikasi informasi digital yang tepat guna dalam mendukung perumusan kebijakan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Adanya dinamika di lapangan yang mempengaruhi lingkup kebijakan yang disusun	peningkatan informasi dan koordinasi antar bagian terkait aturan yg diberlakukan sehingga menyamakan persepsi	
				Tersusunnya RKA-P dan DPA-P	dokumen	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			3. Peningkatan kualitas kelembagaan pengadaan barang dan jasa menuju Center of Excellence.	Pengembangan Sistem Informasi Tersusunnya RKA dan DPA Tersusunnya Renja Biro PIWP2 Tersusunnya ROPK Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya LKJIP Tersusunnya Konsep LKPJ dan LPPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi BiroPIWP2 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Terlaksananya pembayaran pengelolaan keuangan (12bulan, 11 orang) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan Tersedianya Laporan Keuangan Triwulan Tersedianya Laporan Keuangan Semester Tersedianya Laporan Keuangan Tahunan Gabungan Tersedianya Laporan keuangan tahunan audited Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terlaksananya pengadaan peralatan dan perengkapgedung kantor Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Konsultasi dan Koordinasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan	aplikasi dokumen dokumen dokumen laporan laporan dokumen tahun bulan bulan laporan laporan laporan laporan laporan jenis tahun	1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 12 4 2 1 1 1 4 1	1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 12 4 2 1 1 1 4 1			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pembangunan dalam Jawa terlaksana dengan baik (Eselon II, 1 orang 8 kali - Eselon III/Golongan IV, 1 kali - Eselon IV, 1 kali - Golongan III, 2 kali)						
				Tersedianya makan dan minuman rapat 1 tahun	OS	1000	684			
				Konsultasi dan Koordinasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Luar Jawa terlaksana dengan baik (Eselon II, 1 orang 1 kali - Eselon III/Golongan IV, 1 kali - Eselon IV, 1 kali - Golongan III, 0 kali)	tahun	1	1			
				Konsultasi dan Koordinasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan dalam daerah terlaksana dengan baik (Eselon III/Golongan IV, 7 kali - Eselon IV, 13 kali - Golongan III, 27 kali)	tahun	1	1			
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
				Terlaksananya Pengelolaan Surat Keluar	Surat	2500	14047			
				Tersedianya Surat kabar, Majalah dan Buku Perpustakaan	Jenis	3	3			
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor	Jenis	14	14			
				Terlaksananya Penggandaan/Fotokopi	Lembar	36512	36512			
				Terlaksananya Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 (2unit) Roda 4 (5 Unit))	Unit	7	7			
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis	5	4			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Terlaksananya Pengelolaan Surat Masuk	Surat	2500	2339			
				Tersedianya Alat Tulis Kantor	Jenis	27	24			
				Belanja Langganan Web Conference/Zoom Meeting	Bulan	12	12			
				Tersedianya Barang Cetak	Jenis	10	6			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
				Terpeliharanya Kendaraan dinas/operasional (2 unit kendaraan roda dua dan 5 unit kendaraan roda empat)	Unit	7	7			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
				Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Jenis	3	3			
				Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Jenis	12	6			
				PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA						
				Persentase Paket Pengadaan Barang dan Jasa yang terselesaikan	%	100	100			
				Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa						
				Terselenggaranya Pelayanan pengadaan barang/jasa terintegrasi	bulan	12	12			
				Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa						
				Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi pengadaan barang/jasa	laporan	5	5			
				Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik						
				Terlaksananya pelayanan pengadaan secara elektronik	bulan	12	12			
				Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa						
				Pengembangan Website UKPBJ	paket	1	1			
				Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa						
				Rakor UKPBJ (dokumen roadmap kematangan UKPBJ se Provinsi DIY)	Kali	1	1			
				Terlaksananya Pendampingan ISO 9001	Dokumen	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Pengadaan Barang dan Jasa			Teknis			
				Terlaksananya pelayanan konsultasi PBJ dan Advokasi	Bulan	12	12			
				Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa	Kali	2	2			
				PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN						
				Persentase rumusan bahan kebijakan pembiayaan pembangunan non pemerintah yang ditindaklanjuti	%	65	71,43			
				Persentase Rumusan bahan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang ditindaklanjuti	%	80	85,07			
				Persentase rumusan bahan kebijakan infrastruktur daerah yang ditindaklanjuti	%	80	83,03			
				Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah						
				Dokumen Laporan Fasilitas KPBU	Dokumen	1	1			
				Monev Kebijakan Pengembangan Perumahan MBR di DIY	Dokumen	1	1			
				Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Implementasi kebijakan Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah	Dokumen	1	1			
				Evaluasi Capaian Indikator Pemda dibandingkan dengan target SDGs	Dokumen	1	1			
				Dokumen Kajian Evaluasi Implementasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Persepsi Masyarakat terhadap kualitas Layanan Infrastruktur di DIY	Dokumen	1	1			
				Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah						
				Dokumen Pemetaan (Mapping) Pemangku Kepentingan TPB Non Pemerintah	Dokumen	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Dokumen Rumusan Kebijakan Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah	Dokumen	1	1			
				Kajian Pengembangan Infrastruktur kawasan Prambanan - Tawang - Gading DIY	Dokumen	1	1			

7) *Fasilitasi Umum, Kehumasan dan Protokol*

a) *Kondisi Umum*

Pemda DIY dalam menjalankan tugas dan fungsi urusan penunjang sekretariat daerah bidang fasilitasi umum, kehumasan, dan protokol diemban oleh Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY. Pada fasilitasi umum, terdapat fungsi biro yang cukup strategis yaitu pembinaan dan penyelenggaraan kearsipan Sekretariat Daerah. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, telah dibangun dan dikembangkan sebuah aplikasi berbasis elektronik yaitu Sistem Administrasi Perkantoran Daerah (Sisminkada). Aplikasi Sisminkada telah diterapkan bukan hanya di lingkup sekretariat daerah melainkan di seluruh OPD di lingkup Pemda DIY dan sangat membantu dalam hal tata kelola persuratan dan arsip. Pada tahun 2021, melalui Subbagian Tata Persuratan dan Arsip telah dilaksanakan pemeliharaan aplikasi Sisminkada demi mengoptimalkan aplikasi dan meningkatkan keamanan data.

Pada bidang fasilitasi kehumasan, terdapat peran dan tugas penyusunan dan penyebarluasan berita/informasi kegiatan Pemda DIY. Untuk itu, program dan kegiatan yang dijalankan terfokus pada penyusunan konten-konten berita dan informasi yang dipublikasikan melalui portal www.jogjaprovo.go.id, melalui media sosial yang dikelola oleh Biro Umum, Humas dan Protokol dan juga melalui media-media masa berupa surat kabar, radio dan televisi. Selama pandemi COVID-19, Pemda DIY melalui Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY menjadi bagian dari Satgas Penanganan COVID-19 DIY yang bertugas melakukan publikasi laporan harian dan publikasi informasi kebijakan terkait penanganan COVID-19.

Pada bidang fasilitasi protokol dan kerumahtanggaan, melaksanakan pelayanan kepada pimpinan dalam acara-acara kedinasan, pertemuan, rapat-rapat dan dalam penerimaan kunjungan tamu. Karena ketugasan yang sangat dinamis dan tergantung pada agenda pimpinan dan kunjungan tamu maka program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Protokol dan Bagian Rumah Tangga sebagian besar merupakan kegiatan yang bersifat penyediaan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Selama pandemi, acara-acara pimpinan maupun penerimaan kunjungan tamu tetap diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tertuang dalam SE Gubernur Nomor 40/SE/VI/2021 tentang Prosedur Penerimaan Kunjungan Tamu di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Tata Normal Baru.

Tabel 3.198. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitasi Umum, Kehumasan dan Protokol Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Nilai rerata pimpinan dan tamu terhadap layanan keprotokolan, kerumahtanggaan, dan persandian serta persuratan	%	90,91	88	93,50	106,25	88	106,25
2	Skor indeks kepuasan masyarakat terhadap informasi Pemerintah Daerah	Skor indeks	93,99	86	88,83	103,28	88	100,94

Sumber: Biro UHP Setda DIY, 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target indikator Nilai rerata pimpinan dan tamu terhadap layanan keprotokolan, kerumahtanggaan, dan persandian serta persuratan untuk tahun 2021 ditetapkan sebesar 88% dan terealisasi sebesar 93,50%, mengalami kenaikan 2,59% dibandingkan capaian tahun 2020. Pada tahun 2021 target indikator Skor indeks kepuasan masyarakat terhadap informasi Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar 86 dan terealisasi 88,83, capaian tersebut mengalami penurunan 5,16 dibandingkan tahun 2020.

Faktor-faktor yang mendorong tercapainya indikator sasaran pada tahun 2021 diantaranya adalah adanya dukungan anggaran, koordinasi yang baik pada setiap acara/pertemuan/penerimaan kunjungan tamu, evaluasi pasca acara, serta untuk bidang kehumasan adanya kegiatan analisis media manajemen sebagai upaya untuk menganalisa pemberitaan yang sedang marak dan berkembang di masyarakat sekaligus mendeteksi pemberitaan-pemberitaan yang menyimpang/*hoaks*. Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan berita/infomasi.

b) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2021

Pada tahun 2021, Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitasi Umum, Kehumasan dan Protokol mengampu 2 program dengan 10 kegiatan dan 35 sub kegiatan. Total pagu anggaran yang bersumber dari pendanaan APBD sebesar Rp43.216.791.716,00 dengan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp40.646.525.775,00 atau 94,05%. Sementara itu, untuk realisasi fisik tercapai sesuai target 100%. Capaian program dan sub kegiatan tahun 2021 tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 3.199. Capaian Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Fasilitas Administrasi Umum, Kehumasan dan Protokol Tahun 2021

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	-	PROGRAM PENYELENGGARAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Tanah Suryatmajan m2 191 191 Masterplan Komplek dokumen 1 1 Kepatihan yang telah direview Gedung kantor unit 1 1 Appraisal tanah dokumen 1 1 Suryatmajan Gedung kantor yang telah direhabilitasi m2 452 452 Sertifikat Tanah dokumen 1 1 Suryatmajan				-	-	NIHIL
2	SEKRETARIAT DAERAH	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	1. Penguatan fungsi dan fasilitasi layanan kerumahtanggaan yang profesional 2. Penguatan fungsi dan fasilitasi layanan keprotokolan yang profesional 3. Penguatan fungsi dan fasilitasi layanan kehumasan yang profesional	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Skor dari indeks kepuasan pelayanan kerumahtanggaan terhadap pimpinan dan tamu skor 84 88,48 Skor dari indeks kepuasan pelayanan protokol terhadap pimpinan dan tamu skor 84 90,03 Peningkatan jumlah pengakses informasi Pemda Terwujud nya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 295.214 1.110.615 Terwujudnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD % 100 100 % 100 100				- Adanya pandemi COVID-19 mengakibatkan adanya penyesuaian-penyesuaian protokoler dalam pelayanan pimpinan terutama dalam penerapan protokol kesehatan - Adanya keterbukaan informasi yang berasal dari sumber dan data yang tidak valid atau dapat dipertanggungjawabkan	- Inisiasi terbitnya SE Gubernur tentang Prosedur Penerimaan Kunjungan Tamu di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Tatanan Normal Baru - Peningkatan dalam manajemen waktu dan personil yang bertugas dalam pelayanan tamu dan pimpinan - Analisis media manajemen sebagai upaya untuk menganalisa pemberitaan yang sedang marak dan berkembang di masyarakat sekaligus mendeteksi pemberitaan-pemberitaan yang menyimpang/hoaks. Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan	

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100		sebagai bahan penyusunan berita/infomasi	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
				Dokumen Renstra, Renja, Renja Perubahan, ROPK, RKT, RKT P	dokumen	6	6			
				Kesepakatan hasil Forum Perencanaan OPD	berita acara	1	1			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						
				Dokumen RKA-SKPD	dokumen	1	1			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						
				Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	1	1			
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						
				Dokumen DPA-SKPD	dokumen	1	1			
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD						
				Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	1	1			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
				Realisasi capaian fisik & keuangan sesuai tahapan ROPK	%	100	100			
				Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)	Nilai LKJIP A	1	1			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
				Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN		1	1			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Laporan keuangan akhir tahun dengan realisasi penggunaan anggaran, dokumen perencanaan anggaran dan dapat memberikan informasi keuangan bagi pengguna informasi	dokumen	1	1			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						
				Laporan keuangan bulanan sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran, dokumen perencanaan anggaran dan dapat memberikan informasi keuangan bagi pengguna informasi	dokumen	12	12			
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						
				Laporan keuangan prognosis dengan realisasi penggunaan anggaran, dokumen perencanaan anggaran dan dapat memberikan informasi keuangan bagi pengguna informasi	dokumen	1	1			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
				Komponen peralatan listrik dan penerangan bangunan kantor	jenis	20	20			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
				Alat-alat / perlengkapan	jenis	7	7			
				Pengisian tabung pemadam kebakaran	tabung	9	9			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Bukti pembayaran pengisian tabung gas 12 kg	kali	46	46			
				Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	jenis	5	5			
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						
				Cetak kalender	jenis	1	1			
				Penggandaan	lembar	77500	77500			
				Cetakan umum	jenis	27	27			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
				Surat kabar harian 3 jenis	bulan	12	12			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu						
				Pelayanan kerumahtanggaan penerimaan tamu Pemda	bulan	12	12			
				Pelayanan kerumahtanggaan kepada Pimpinan: Gubernur, Wagub, Sekda, Staf Ahli Gub, Asisten Sekda	bulan	12	12			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
				Pelayanan keprotokolan untuk koordinasi persiapan kunjungan Pejabat Negara dan memandu kegiatan KDH/WKDH di dalam daerah dan luar daerah	bulan	12	12			
				Laporan dan rencana tindak lanjut hasil rapat koordinasi	bulan	12	12			
				Pelayanan kehumasan untuk koordinasi/ peliputan/dokumentasi kegiatan KDH/WKDH di dalam daerah dan luar daerah	bulan	12	12			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Laporan dan rencana tindak lanjut hasil konsultasi dan koordinasi	bulan	12	12			
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						
				arsip inaktif terjaga dengan baik	tahun	1	1			
				Pemeliharaan software Sisminkada	bulan	12	12			
				Update system	aplikasi	0	0			
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
				Kendaraan dinas jabatan Sedan	unit	1	1			
				Kendaraan dinas jabatan Jeep	unit	1	1			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
				Peralatan sesuai RKBMD	jenis	11	11			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
				Perlengkapan sesuai RKBMD	jenis	5	5			
				Perlengkapan rumah dinas sesuai RKBMD	jenis	5	5			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
				Pengiriman dokumen	tahun	1	1			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
				Bukti pembayaran rekening air, telepon dan listrik	bulan	12	12			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
				Administrasi perkantoran yang terselesaikan dengan baik dan tepat waktu	bulan	12	12			
				Keamanan kantor terjaga dengan baik	bulan	12	12			
				Kebersihan kantor terjaga dengan baik	bulan	12	12			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Alat tulis kantor	jenis	58	58			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
				Kendaraan dinas jabatan roda 4	unit	12	12			
				Alat kebersihan dan bahan pembersih kendaraan	jenis	10	10			
				Bukti pembayaran pajak kendaraan dinas jabatan	unit	12	12			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
				Retribusi parkir	tahun	1	1			
				Kendaraan dinas / operasional roda 2	unit	29	29			
				Alat kebersihan dan bahan pembersih kendaraan	jenis	11	11			
				Pengecatan kendaraan	tahun	1	1			
				Pembayaran KIR kendaraan dinas / operasional	unit	3	3			
				Kendaraan tidak bermotor (sepeda roda dua)	unit	10	10			
				Kendaraan dinas / operasional roda 4	unit	29	29			
				Kendaraan dinas / operasional roda 6	unit	2	2			
				Bukti pembayaran pajak kendaraan dinas operasional	unit	61	61			
				Kelengkapan kendaraan	jenis	7	7			
				Kendaraan dinas / operasional roda 3	unit	1	1			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
				Taman Komplek Kepatihan yang terpelihara	m persegi	9750	9750			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Gedung tempat kerja yang dipelihara sesuai RKPBM	bulan	12	12			
				Rumah Dinas yang telah direhabilitasi	unit	1	1			
				Pagar Kepatihan yang terpelihara	m persegi	3266	3266			
				Gedung bersejarah yang dipelihara sesuai RKPBU	bulan	12	12			
				Rumah jabatan yang terpelihara sesuai dengan RKPBM	bulan	12	12			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
				Meubelair yang dipelihara sesuai dengan RKPBM	bulan	12	12			
				Peralatan gedung kantor yang dipelihara sesuai dengan RKPBM	bulan	12	12			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
				Pemeliharaan Instalasi air limbah/kotor	m3	53	53			
				Aquarium air laut dan air tawar yang dipelihara sesuai RKPBM	bulan	12	12			
				Pemeliharaan instalasi air minum/bersih	m3	533	533			
				Pemeliharaan jaringan listrik	bulan	12	12			
				BBM untuk operasional genset	tahun	1	1			
				Perlengkapan gedung kantor yang dipelihara sesuai dengan RKPBM	bulan	12	12			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Terbayarnya gaji Gubernur dan Wakil Gubernur	tahun	1	1			
				Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						
				Tesedianya dana penunjang operasional KDHWKDH	tahun	1	1			
				Fasilitasi Komunikasi Pimpinan						
				Laporan kegiatan kemitraan Pemda DIY dgn Media Massa	laporan	0	0			
				Laporan kegiatan Forum Literasi Medsos bagi ASN	laporan	0	0			
				Laporan Analisis Media Management (IMM)	laporan	40	40			
				Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan						
				Buku kerja	eksemplar	700	700			
				Grafis	kali	24	24			
				Buku foto KDH & WKDH	buah	0	0			
				Laporan Kegiatan FGD	laporan	9	9			
				Penyusunan Narasi Tunggal						
				Informasi yang tersebarluaskan melalui 4 jenis media	bulan	12	12			
				Rilis	kali	24	24			
				Pemberitaan Pers Tour	kali	0	0			
				Lomba pembuatan video dan grafis	Pemenang Kategori	2	2			
				Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara						
				Pelaksanaan Upacara Bendera Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan yang Berlaku	upacara	12	12			
				Pelaksanaan Upacara Bukan Upacara Bendera atau Acara Lainnya Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan yang Berlaku	kali	51	51			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pengelolaan Hubungan Keprotokolan						
				Pelayanan Kepro-tokolan	bulan	12	12			
				Penerimaan Tamu Pemda DIY						
				Pelayanan Kepro-tokolan Kepada Pimpinan :	bulan	12	12			
				Gubernur, Wagub , Sekda, Staf Ahli Gub, Asisten Sekda						

8) *Fasilitasi Pemerintahan*

a) *Kondisi Umum*

Pemda DIY dalam hal penyediaan fasilitasi pemerintahan di Jakarta melaksanakan pelayanan kendaraan dan penginapan melalui Badan Penghubung Daerah yang selama tahun 2021 terselenggara dengan baik. Menyikapi adanya pandemi COVID-19 pelayanan kendaraan dan penginapan diterapkan dengan protokol Kesehatan yang ketat. Hal tersebut dapat terealisasi dengan didukung sarana prasarana seperti disinfektan, *hand sanitizer*, dan sabun cuci tangan.

Meski pandemi masih berlangsung, pada tahun 2021 banyak dilaksanakan kerja sama lintas sektor dengan berbagai pemangku kepentingan terkait. Salah satunya adalah promosi seni dapat terlaksana di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta sebagai bentuk kerja sama dengan PT. Angkasa Pura II. Dimulai dari pelaksanaan Pawai Bregodo Prajurit Kraton, pelaksanaan Parade Batik Jogja Menari pada peringatan Hari Batik Nasional, dan Pawai Peringatan Hari Ibu, semuanya mendapat sambutan hangat dari penumpang di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta.

Tabel 3.200. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitasi Pemerintahan Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2021	2020			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Peningkatan kualitas layanan Kantor Perwakilan Daerah	%	88,50	89	92,31	103,72	90	102,57

Sumber: *Banhubda DIY, 2022*

Indikator kinerja sasaran Peningkatan kualitas layanan kantor perwakilan daerah diukur dari responden yang mendapatkan pelayanan penginapan dan kendaraan dinas selama tahun 2021. Capaian indikator sasaran tahun 2021 sebesar 92,31% mencapai target yang ditetapkan yaitu 89%. Capaian tahun 2021 lebih tinggi dari capaian tahun 2020 sebesar 88,50%. Ketercapaian indikator tersebut didukung oleh beberapa faktor yaitu: Kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait semakin baik; Adanya perbaikan fasilitas pelayanan berupa *up grade* kamar penginapan Griya Jogja; dan Adanya konsistensi penerapan protokol kesehatan pada fasilitas pelayanan yang diberikan.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2021 memberikan optimisme bahwa target indikator kinerja sasaran sesuai target akhir RPJMD di tahun 2022 sebesar 90% dapat terealisasi. Dukungan jejaring lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan membuat kegiatan dapat berjalan dengan baik. SDM baru yang berasal dari CPNS melengkapi personil pelaksanaan kegiatan menggantikan beberapa pegawai yang pensiun maupun mutasi.

b) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2021

Pada tahun 2021 Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitas Pemerintahan dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp8.835.335.247,00. Pengalokasian anggaran tersebut dibagi dalam 3 program, 9 kegiatan dan 30 sub kegiatan. Secara keseluruhan belanja dapat direalisasi sebanyak Rp8.419.862.845,00 atau 95,30%, dengan realisasi fisik sebesar 98,77%. Selanjutnya rincian capaian kinerja program dan sub kegiatan tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 3.201. Capaian Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Fasilitas Pemerintahan Tahun 2021

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KEBUDAYAAN (KEISTIMEWAAN)	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	1. Optimalisasi potensi pendapatan daerah dan peningkatan kualitas belanja daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase peningkatan Budaya tak benda yang dilestarikan	%	16,82	16,82	Status PPKM di DKI Jakarta yang berkepanjangan dan masih tingginya penambahan jumlah pasien positif harian COVID-19 di DKI Jakarta sehingga	1. menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendagri, KPCCPEN, dan Pemda DKI.	NIHIL
			2. Peningkatan efektivitas pengelolaan aset daerah melalui pemanfaatan dan kerja sama pihak ketiga	Kegiatan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Mendukung Pencapaian Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	%	100	100	perlu untuk terus memperbarui informasi aturan PPKM, hal-hal yang dibolehkan dan dilarang serta beradaptasi dengan aturan tersebut baik terkait SDM, sarana prasarana, maupun mobilitas	2. meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan Pemda DKI, manajemen TMII, dan stake holder pelaksanaan kegiatan kesenian di TMII dan di Jabodetabek	
				Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Pemeliharaan Gedung Adat	jenis	3	3			
				Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Dukungan kegiatan Gelar Seni Budaya Daerah terhadap program Pembinaan dan Pengembangan Adat dan Seni sebesar 89,22%	%	100	100			
				Subkegiatan Gelar Seni Budaya Daerah	Campursari	Event	6	6			
					Diklat Karawitan	Event	9	8			
					Diklat Karawitan Masyarakat Ikatan Gunung Kidul	Event	7	7			
					Diklat Karawitan PWJ	Event	3	3			
					Diklat Ketoprak	Event	9	8			
					Diklat Tari	Event	9	8			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Drama Tari Golek Menak	Event	1	1			
					Ekspresi Seni Tradisi Joget Mataram	Event	2	2			
					Ekspresi Seni Tradisi Karawitan	Event	2	2			
					Ekspresi Seni Tradisi Malam Sukrokasih	Event	10	8			
					Evaluasi Belajar Diklat	Event	1	1			
					Ketoprak	Event	3	3			
					Ketoprak Luar TMII	Event	1	1			
					Lomba Tari Jabodetabek	Event	3	3			
					Pangkur Jenggleng	Event	1	1			
					Pementasan Tari Luar TMII	Event	1	1			
					Upacara Bergada Prajurit Kraton Yogyakarta	Event	5	5			
					Wayang Kulit Dalang Senior	Event	6	6			
					Workshop karawitan Internasional	Event	1	1			
2	URUSAN UMUM	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	1. Optimalisasi potensi pendapatan daerah dan peningkatan kualitas belanja daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	Status PPKM di DKI Jakarta yang berkepanjangan dan masih tingginya penambahan jumlah pasien positif harian COVID-19 di DKI Jakarta sehingga	1. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi <i>remote computing</i> untuk dapat meningkatkan kualitas bekerja secara daring	

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2. Peningkatan efektivitas pengelolaan aset daerah melalui pemanfaatan dan kerja sama pihak ketiga	KEGIATAN Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dukungan 0,96 % terhadap persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	perlu untuk terus memperbarui informasi aturan PPKM, hal-hal yang dibolehkan dan dilarang serta beradaptasi dengan aturan tersebut baik terkait SDM, sarana prasarana, maupun mobilitas	(Work From Home / WFH) 2. mengoptimalkan email kantor sebagai sarana pengiriman dokumen. 3. merutinkan pertemuan daring	
				SUBKEGIATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Renja, Renja Perubahan, Renstra, ROPK, RKT, PK Laporan Hasil Forum OPD	dokumen	6	6			
				SUBKEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RKA-SKPD	dokumen	1	1			
				SUBKEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	RKAP-SKPD	dokumen	1	1			
				SUBKEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPA-SKPD	dokumen	1	1			
				SUBKEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DPPA-SKPD	dokumen	1	1			
				SUBKEGIATAN Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)	Nilai LKjIP	80	80			
				KEGIATAN Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dukungan 0,42 % terhadap persentase pemenuhan	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					penunjang urusan pemerintahan daerah						
				SUBKEGIATAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN	tahun					
				SUBKEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen laporan keuangan akhir tahun	dokumen	1	1			
				SUBKEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen laporan bulanan dan dokumen laporan semesteran	dokumen	14	14			
				SUBKEGIATAN Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen laporan prognosis	dokumen	1	1			
				KEGIATAN Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dukungan 98,62 % terhadap persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100			
				SUBKEGIATAN Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen peralatan listrik dan penerangan kantor	jenis	8	8			
				SUBKEGIATAN Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	jenis	43	43			
				SUBKEGIATAN Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan Materi yang digandakan	jenis lembar	10 31.888	10 31.888			
				SUBKEGIATAN Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Surat kabar 2 jenis	bulan	12	12			
					Laporan dan rencana	bulan	12	12			

No	Ururan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				SUBKEGIATAN Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	tindaklanjuti hasil rapat koordinasi dan rencana tindaklanjuti hasil konsultasi dan koordinasi	bulan	12	12			
				KEGIATAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dukungan 0,60 % terhadap persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	100			
				SUBKEGIATAN Pengadaan Mebel	Perlengkapan kantor sesuai RKBMD	jenis	1	1			
				KEGIATAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dukungan 18,01 % terhadap persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	100			
				SUBKEGIATAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bukti Pengiriman	bulan	12	12			
				SUBKEGIATAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bukti pembayaran air 2 sambungan	bulan	12	12			
					Bukti pembayaran internet 2 jaringan	bulan	12	12			
					Bukti pembayaran listrik 14.038 kwh	bulan	12	12			
					Bukti pembayaran telepon 5 saluran	bulan	12	12			
				SUBKEGIATAN Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat-alat/perlengkapan kantor	jenis	5	5			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Bukti pembayaran pengisian tabung gas	kali	6	6			
				SUBKEGIATAN Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Administrasi perkantoran yang terselesaikan dengan baik dan tepat waktu	bulan	12	12			
					Bukti pembayaran retribusi kebersihan kantor	bulan	12	12			
					Gedung kantor seluas 7.292,5 m2 yang terpelihara kebersihannya	bulan	12	12			
				KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dukungan 7,40 % terhadap persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	100			
				SUBKEGIATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bukti Pembayaran KIR kendaraan dinas operasional yang tepat waktu	unit	1	1			
					Bukti pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas operasional yang tepat waktu	unit	11	11			
					Kendaraan dinas/operasional roda 2 yang dipelihara sesuai RKPBM	unit	2	2			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Kendaraan dinas/operasional roda 2 yang dipelihara sesuai RKPBMMD	unit	9	9			
				SUBKEGIATAN Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor yang dipelihara sesuai RKPBMMD	unit	3	3			
				SUBKEGIATAN Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara sesuai RKPBMMD	jenis	3	3			
					Peralatan gedung kantor yang dipelihara sesuai RKPBMMD	jenis	6	6			
3	SEKRETARIAT DAERAH	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	1. Optimalisasi potensi pendapatan daerah dan peningkatan kualitas belanja daerah 2. Peningkatan efektivitas pengelolaan aset daerah melalui pemanfaatan dan kerja sama pihak ketiga	PROGRAM PEGHUBUNG PELAYANAN KEGIATAN Pelaksanaan Pelayanan Penghubung SUBKEGIATAN Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Layanan Tamu Kantor Perwakilan Daerah Dukungan terhadap persentase pemenuhan layanan penghubung Indeks tamu yang memberikan apresiasi terhadap pelayanan	angka indeks 100 % angka indeks	87 100 87	89,78 100 89,09	Status PPKM di DKI Jakarta yang berkepanjangan dan masih tingginya penambahan jumlah pasien positif harian COVID-19 di DKI Jakarta sehingga perlu untuk terus memperbarui informasi aturan PPKM, hal-hal yang dibolehkan dan dilarang serta beradaptasi dengan aturan tersebut baik terkait SDM, sarana prasarana, maupun mobilitas	1. Penerapan prokes pada pelayanan dan kendaraan dengan memenuhi kebutuhan sarpras dan SDM yang tereduksi 2. Menjalin kerja sama dengan mitra-mitra baru dalam pengembangan potensi dan promosi kebudayaan	

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				SUBKEGIATAN Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Kesepakatan Bersama dengan masyarakat DIY di Jakarta	kesepakatan	2	2			
				SUBKEGIATAN Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Kesepakatan bersama dengan Banhubda se Indonesia	kesepakatan	1	1			
				SUBKEGIATAN Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Indeks ketertarikan sampel audience promosi seni dan budaya daerah terhadap DIY	angka indeks	88	88,64			
				SUBKEGIATAN Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya	Indeks kepuasan mitra yang terfasilitasi promosi melalui Pekan Raya Indonesia dan Pameran Diaspora	angka indeks	87	96,25			

f. Pengawasan

1) *Kondisi Umum*

Pada penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2021 pengawasan dilaksanakan secara komprehensif mengacu pada Kepgub DIY Nomor 371/KEP/2020 Tahun 2020 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2021.

Kegiatan pengawasan dinilai mampu menyelaraskan tata kelola dengan risiko organisasi yang timbul, ditunjukkan dengan pelaksanaan pemetaan risiko yang digunakan sebagai faktor risiko untuk perencanaan pengawasan. Peningkatan kompetensi SDM APIP, anggaran pengawasan dan sarana prasarana akan sangat mendukung tercapainya tujuan pengawasan.

Capaian kinerja Inspektorat DIY tahun 2021 dalam mewujudkan sasaran strategis yaitu Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Internal, diukur melalui satu indikator kinerja utama yaitu Presentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksaan yang dimaksud adalah hasil pengawasan dari BPK RI Perwakilan DIY, Inspektur Jendral Kemendagri RI dan pengawasan internal oleh Inspektorat DIY. Dalam mencapai sasaran tersebut didukung melalui beberapa kegiatan, yaitu: 1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah; 2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah; 3) Reviu Laporan Kinerja; 4) Reviu Laporan Keuangan; 5) Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/ Kota; 6) Kerja sama Pengawasan Internal; 7) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI dan TLHP Aparat Pengawas intern Pemerintah (APIP); 8) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara; 9) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu; 11) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan; 12) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan; 13) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah; 14) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan

Penilaian Reformasi Birokrasi; 15) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Inspektorat DIY mempunyai peran yang sangat penting dalam mendukung tujuan Pemda DIY untuk mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan sasaran strategis terselenggaranya pengawasan, kebijakan, pendampingan dan asistensi dengan indikator kinerja utama Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Ketercapaiannya didapatkan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI Perwakilan DIY, Inspektur Jenderal Kemendagri RI, dan pemeriksaan internal Inspektorat DIY. Adapun obyek pemeriksaan baik di Pemda DIY maupun Kabupaten/Kota selama tahun 2021 disajikan sebagai berikut:

a) *Pemeriksaan BPK RI Perwakilan DIY*

Pada 2021, BPK RI Perwakilan DIY menerbitkan 4 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterima oleh Pemda DIY, yaitu: 1) LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020 Nomor 10B/LHP/XVIII.YOG/04/2021; 2) LHP atas Efektivitas atas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Membangun Destinasi Pariwisata Pada Pemda DIY Tahun Anggaran 2018-2020 Nomor 10D/LHP/XVIII.YOG/04/2021; 3) Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun 2021 Pada Pemda DIY Nomor 25A/LHP/XVIII.YOG/12/2021; 4) Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja sama Industri dan Dunia Kerja dalam Rangka Mewujudkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing TA 2020 dan Semester I 2021 pada Pemda DIY Nomor 26/LHP/VIII.YOG/2021.

Atas hasil pemeriksaan tersebut, Pemda DIY telah menindaklanjuti secara keseluruhan. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI tertuang dalam surat BPK RI Perwakilan DIY Nomor 109/S/XVIII.YOG/08/2021 tanggal 13

Agustus 2021. Perihal Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Semester I tahun 2021 sebesar 86,46%. Adapun rincian akumulasi penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan (TLHP) BPK sejak Tahun 2002 sampai dengan Semester I Tahun 2021 sebagai mana tabel berikut:

Tabel 3.202. Rekapitulasi Hasil Pemantauan TLHP BPK RI Tahun 2002 s.d. Semester I Tahun 2021 Pada Pemda DIY

Uraian	Jumlah	Nilai Keuangan (Rp)	Keterangan
LHP Terbit	52	-	
Temuan	559	87.120.234.703	
Rekomendasi	1108	81.616.776.150	
Tindak Lanjut Atas Rekomendasi			
Sesuai	958	68.113.694.564	86,46%
Belum Sesuai	145	13.296.126.177	13,09%
Belum Tindak Lanjut	4	119.021.045	0,36%
Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan Sah	1	87.934.363	0,09%

Sumber: Surat BPK RI No. 109/S/XVIII.YOG/08/2021, 2022

Kekurangan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI sebagaimana dalam rincian tersebut telah ditindaklanjuti dalam semester II tahun 2021. Akan tetapi sampai dengan 31 Desember 2021 belum ada risalah semester II tahun 2021 yang diterbitkan, sehingga masih belum ada data capaian terbaru di 2021.

Adapun kendala yang dihadapi dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dapat disampaikan sebagai berikut: 1) Adanya peralihan sistem tindak lanjut dari pembahasan secara manual dokumen ke Sistem Informasi Pemantauan Tindaklanjuti hasil pemeriksaan (SIPTL) BPK RI masih menyisakan beberapa perbedaan data yang perlu dikonsolidasikan; 2) Proses berjenjang di internal BPK RI sebagai faktor eksternal yang berpengaruh terhadap kecepatan proses penyelesaian rekomendasi temuan BPK; 3) Temuan dan rekomendasi yang berupa kebijakan/peraturan

membutuhkan waktu penyusunan sehingga tindak lanjut harus menunggu hasil kebijakan/peraturan dimaksud; 4) Rekomendasi berupa penyelesaian kerugian yang terkait dengan mantan anggota legislatif, dimana dalam proses penagihan mengalami kesulitan dikarenakan kondisi ekonomi yang bersangkutan /ahli waris; 5) Kerugian daerah yang melibatkan pihak ke-3 terkendala karena kondisi pandemi COVID-19 menyebabkan pendapatan dunia usaha menurun drastis sehingga penyelesaian kerugian daerah terhambat.

b) Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri

Hasil pemeriksaan Itjen Kemendagri yang tertuang dalam laporan hasil pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Nomor 700/184-LHP/IJ tanggal 16 September 2021 memuat 6 temuan dengan 7 rekomendasi untuk ditindaklanjuti. Berdasarkan risalah pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan Itjen Kemendagri pada Pemda DIY tanggal 9 Desember 2021 dinyatakan bahwa seluruh tindaklanjut yang diunggah melalui aplikasi siwasiat.kemendagri.go.id (SIWASIAT) telah sesuai dengan rekomendasi yang diberikan.

Secara umum penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Itjen Kemendagri tidak mengalami kendala. Penyampaian dokumen tindak lanjut bisa dilakukan setiap saat melalui aplikasi SIWASIAT, dan respon cepat dari tim pembahas Itjen Kemendagri juga menjadi faktor pendorong penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.

c) Pemeriksaan Inspektorat DIY

Inspektorat DIY selaku APIP Internal tahun 2021 telah melaksanakan pemeriksaan reguler operasional sebanyak 150 pemeriksaan. Pemeriksaan reguler dilaksanakan pada obyek pemeriksaan (obrik) di lingkungan Pemda DIY meliputi OPD,

UPTD, SMAN/SMKN, dan BUKP. Sementara pada Pemda Kabupaten/Kota se-DIY dilaksanakan pada OPD sesuai usulan yang disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) tahun 2020.

Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat DIY pada tahun 2021 selain pemeriksaan operasional reguler meliputi: 1) Pemeriksaan Dengan tujuan Tertentu (PDTT) meliputi reuiu dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, reuiu Dana Alokasi Khusus (DAK), reuiu LPPD, dan lainnya; 2) Pemeriksaan Kinerja pada 16 OPD yang dinilai memiliki risiko tinggi dan mempertimbangkan jumlah Tim Pemeriksa dan waktu pemeriksaan; 3) Probit Audit berdasarkan ketugasan mandatory MCP KPK minimal 5 proyek strategis; 4) *Stock dan Cash Opname* pada akhir Tahun Anggaran secara serentak pada OPD/UPTD di lingkungan Pemda DIY atas kondisi akhir pengelolaan keuangan dan persediaan barang; 5) Pengawasan akhir masa jabatan Bupati pada Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, dan Pemerintah Kabupaten Sleman; 6) Pendampingan penyusunan LK OPD, pendampingan SPIP di 37 OPD; serta 7) Pengawasan lainnya yang merupakan *mandatory* dari peraturan yang berlaku.

Kinerja sasaran Penunjang Urusan Pengawasan pada tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.203. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Pengawasan Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian 2021 terhadap target RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	%	93,13	88	94,35	107,20	90	104,83

Sumber: Inspektorat DIY, 2022

Pada indikator Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan tahun 2021 tercapai 94,35% dengan persentase realisasi terhadap target sebesar 107,20%. Realisasi kinerja sasaran mengalami kenaikan sebesar 1,22% dibandingkan capaian tahun 2020 yang sebesar 93,13%, selanjutnya jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD kondisi tahun 2021 telah melebihi target. Ketercapaian kinerja didukung oleh berjalannya fungsi konsultatif dan peran Inspektorat DIY sebagai mitra bagi Perangkat Daerah maupun *stakeholder* lainnya dengan membuka ruang komunikasi yang lebih terbuka melalui diskusi dan *sharing* dengan semangat mengawal tujuan pembangunan Pemda DIY; komitmen dan integritas personil Inspektorat DIY untuk mau dan mampu meningkatkan kinerja dan kemampuan sesuai dengan regulasi terkini; serta koordinasi intensif dengan *stakeholder* baik internal maupun eksternal Pemda DIY dalam melaksanakan ketugasan dan pencapaian tujuan kinerja Inspektorat maupun Pemda DIY.

2) *Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2021*

Anggaran Penunjang Urusan Pengawasan pada tahun 2021 sebesar Rp39.734.364.969,00 yang terdiri dari 3 program dan 43 sub kegiatan. Realisasi keuangan sebesar Rp37.200.195.479,00 atau 93,62%, serta realisasi fisik telah terealisasi 100%.

Tabel 3.204. Capaian Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Pengawasan Tahun 2021

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	INSPEKTORAT DAERAH	INSPEKTORAT	1. Melakukan Pengawasan dan Pengendalian Intern	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya dokumen tahunan (tahun n+1 dan perubahan tahun n) dan lima tahunan OPD Laporan Hasil Forum OPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Tersusunnya dokumen RKA tahun n+1 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Tersusunnya dokumen RKA Perubahan tahun n Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Tersusunnya dokumen DPA tahun n+1 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Tersusunnya dokumen DPA Perubahan tahun n	%	100	100	<ul style="list-style-type: none"> Bertambahnya jumlah ketugasan mandatory pusat yang dilimpahkan ke Inspektorat DIY menuntut penyesuaian besar baik dalam hal metode maupun teknis pengawasan. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Kementerian Teknis pada Pemda DIY belum dikoordinasikan secara terpadu dengan Inspektorat di daerah sehingga pengawasan kementerian teknis belum terpantau sepenuhnya oleh Inspektorat DIY. Kondisi dinamis dimana fokus pemeriksaan yang selalu berganti dalam pemeriksaan yang dilaksanakan baik oleh BPK maupun APIP, merupakan hal yang tidak dapat diprediksi, sehingga penguatan pengetahuan dari sisi sumber daya manusia pemeriksa menjadi sangat penting. untuk dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi OPD. Terjadi kondisi <i>Force majeure</i> pandemi COVID-19. Perubahan nomenklatur kelembagaan. Rekomendasi tindak lanjut yang tidak mudah diinterpretasikan bentuk konkrit tindak lanjutnya. 	<ul style="list-style-type: none"> komunikasi lebih intensif terhadap stakeholder terkait (Itjen Kemendagri, Itjen Kementerian Teknis, BPKP, Inspektorat Kabupaten/Kota)) dalam rangka konsolidasi dan penyusunan perencanaan pengawasan kedepannya; mengikutsertakan unsur dalam pendidikan, pelatihan, atau sertifikasi keahlian yang terakreditasi oleh badan akreditasi terkait dalam rangka peningkatan kapasitas SDM Inspektorat DIY; pembinaan dan pengawalan pada OPD untuk membangun sistem pengendalian internal yang lebih baik dengan mengedepankan analisis manajemen risiko dan faktor risiko pada setiap masing-masing manajemen OPD. Sehingga diharapkan OPD mampu melakukan self diagnostic assessment untuk mengantisipasi risiko dalam pelaksanaan program kegiatan. Koordinasi dengan BPK RI Perwakilan DIY untuk dapat mempercepat proses penilaian atas tindak lanjut yang telah disampaikan oleh Pemda DIY melalui Inspektorat. Optimalisasi TIK dalam pelaksanaan tugas pengawasan. 	NIHIL

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Kinerja dokumen 1 1 Instansi Pemerintahan (LKJIP)				<ul style="list-style-type: none"> Transisi sistem informasi yg belum sempurna, serta proses pemberian status yang tidak dapat dipastikan waktunya oleh BPK. 		
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Realisasi capaian fisik % 100 100 dan keuangan sesuai tahapan ROPK						
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tersedianya tahun 1 1 pemenuhan gaji dan tunjangan ASN						
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersusunnya laporan keuangan tahunan OPD	laporan	1	1			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan keuangan dokumen 12 12 sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran, dokumen perencanaan anggaran						
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Tersusunnya LRA sem 1 dan Laporan Prognosis semester berikutnya	laporan	1	1			
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Aparatur yang orang 15 15 meningkat						

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				kemampuannya melalui diklat						
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						
				Daftar Penilaian Angka Kredit 2 periode dalam 1 tahun	orang	75	75			
				Aparat pengawasan yang meningkatkan kemampuannya melalui Bimtek	angkatan	6	6			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
				Komponen peralatan listrik dan bangunan kantor	jenis	6	6			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
				Tabung pemadam kebakaran	buah	3	3			
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						
				Barang cetakan	jenis	12	12			
				Jumlah materi yang digandakan	lembar	71360	71360			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
				Bukti pembayaran bulan		12	12			
				Langganan surat kabar/majalah						
				Penyediaan Bahan/Material						
				Alat tulis kantor	jenis	17	17			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
				Laporan dan rencana tindak lanjut hasil rapat koordinasi	bulan	12	12			
				Laporan dan rencana tindak lanjut hasil	bulan	12	12			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				konsultasi dan koordinasi Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Tertatanya arsip aktif bulan 12 12 dan inaktif di SKPD Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Tersusunnya modul modul 1 1 integrasi data kepegawaian Tersusunnya modul modul 0 0 integrasi SPT Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Alat Studio jenis 1 1 sesuai RKBMD Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Gedung tempat kerja % 100 100 Tahap II Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pembelian Materai lembar 271 271 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Bukti pembayaran bulan 12 12 rekening telepon 5 sambungan, rekening listrik 500 Kwh, rekening air 10 m3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Gedung kantor seluas bulan 12 12 1.838,38 m2 yang terpelihara kebersihannya Pelayanan umum bulan 12 12 kantor yang terselesaikan dengan baik dan tepat waktu						

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Bukti Pembayaran unit 4 4 Pajak/STNK kend dinas/operasional roda 2 Kendaraan unit 4 4 dinas/operasional roda 2 yang dipelihara sesuai RKPBMMD Bukti Pembayaran unit 13 13 Pajak/STNK kend dinas/operasional roda 4 Kendaraan unit 13 13 dinas/operasional roda 4 yang dipelihara sesuai RKPBMMD Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Perlengkapan Gedung jenis 2 2 Kantor yang dipelihara sesuai RKPBMMD Peralatan gedung jenis 7 7 kantor yang dipelihara sesuai RKPBMMD PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Persentase Kinerja % 88 94.35 Perangkat Daerah Pemerintahan, Sosial Budaya, Perekonomian serta Sarana dan Prasarana Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Laporan Hasil LHP 16 16 Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah						

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah						
				Laporan Cash Opname dan Stock Opname SKPD	laporan	37	37			
				Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah	LHP	137	137			
				Reviu Laporan Kinerja						
				Laporan Evaluasi Kinerja OPD	LHE	37	37			
				Laporan Review Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah DIY	laporan	1	1			
				Laporan Review Dokumen Perencanaan SKPD DIY sebelum tanggal persetujuan RAPBD Tahun 2022	laporan	37	37			
				Laporan Hasil Pendampingan dan Penyusunan Manajemen Risiko OPD	laporan	37	37			
				Laporan Evaluasi LKJIP Pemerintah Daerah DIY	LHE	1	1			
				Reviu Laporan Keuangan						
				Laporan Review Laporan Keuangan Pemda DIY	laporan	1	1			
				Laporan Pendampingan	laporan	37	37			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penyusunan Laporan Keuangan SKPD						
				Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota						
				Laporan Hasil Pemeriksaan Umum/Teknis Pemerintah Kab/Kota	LHP	16	16			
				Laporan EKPPD Kab/kota	laporan	5	5			
				Kerja sama Pengawasan Internal						
				Laporan Telaah sejawat antar Inspektorat Provinsi	laporan	1	1			
				Laporan telaah sejawat kabupaten/kota	laporan	1	1			
				Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP						
				Laporan hasil monitoring dan tindaklanjut temuan pemeriksaan	laporan	2	2			
				Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah						
				Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	LHP	4	4			
				Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu						
				Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	LHP	116	116			
				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI						
				Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan, Sosial	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Budaya, Perekonomian serta Sarana dan Prasarana						
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan						
				Keputusan Gubernur yang mengesahkan PKPT tahun 2022	SK	1	1			
				Laporan Gelar Pengawasan Daerah	Laporan	1	1			
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan						
				Laporan Pemutakhiran Tindakan Hasil Pengawasan	Laporan	2	2			
				Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah						
				Laporan pendampingan dan asistensi	Laporan	4	4			
				Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi						
				Laporan Hasil Pelaksanaan PMPRB DIY Tahun 2020	Laporan	1	1			
				Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi						
				Laporan triwulanan atas perkembangan pelaksanaan tugas Saberpungli tepat waktu	Laporan	4	4			
				Laporan monitoring dan evaluasi aksi Daerah	Laporan	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pencegahan, Pemberantasan Korupsi						
				Laporan hasil pengendalian Gratifikasi Pemerintah Daerah	Laporan	1	1			
				Laporan tindak lanjut perjanjian APIP dan APH	Laporan	1	1			
				Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas						
				Laporan Survey Penilaian Integritas	Laporan	0	0			

g. Penelitian dan Pengembangan

1) *Kondisi Umum*

Pemda DIY dalam pelaksanaan penunjang urusan kelitbangan dilaksanakan melalui Balai Penelitian, Pengembangan, dan Statistik Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BPPSD Bappeda DIY). BPPSD merupakan Unit Pengelola Teknis (UPT) yang dibentuk berdasarkan ketentuan Perdas DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pergub DIY Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Pergub DIY Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. UPT BPPSD mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, dan statistik sektoral untuk meningkatkan persentase rumusan bahan kebijakan penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti dan persentase pemenuhan kebutuhan data dan analisis dalam perencanaan pembangunan daerah.

Tabel 3.205. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase hasil kelitbangan yang terpilih untuk mendukung pembangunan daerah	%	72,02	90	94,03	104,48	100	94,03

Sumber: BPPSD DIY, 2022

Kinerja program Penelitian dan Pembangunan Daerah dihitung melalui indikator persentase hasil kelitbangan yang terpilih untuk mendukung pembangunan daerah. Perhitungan indikator ini berdasarkan jumlah rekomendasi hasil kegiatan kelitbangan terpilih yang dijadikan sebagai bahan rumusan perencanaan dibagi jumlah total rekomendasi hasil kegiatan kelitbangan di DIY dikalikan 100%. Pada tahun 2021 terdapat 63 rekomendasi terpilih dari keseluruhan sejumlah 67 rekomendasi yang relevan dengan isu strategis dan permasalahan pembangunan yang tercantum dalam RPJMD DIY 2017-2022. 63 rekomendasi terpilih tersebut terdiri dari urusan perencanaan sejumlah 15, perumahan dan kawasan permukiman sejumlah 8, pekerjaan umum dan penataan ruang sejumlah 2, ketenagakerjaan sejumlah 4, pariwisata sejumlah 7, energi dan SDM sejumlah 9, kominfo sejumlah 6, kebudayaan sejumlah 3, pangan sejumlah 9.

Proses pemilihan rekomendasi yang akan digunakan sebagai referensi untuk perencanaan melalui beberapa tahapan yaitu: 1) Pemilihan hasil penelitian yang relevan dengan isu maupun permasalahan pembangunan di DIY; 2) Pemilihan rekomendasi dari penelitian terpilih berdasarkan urusan; dan 3) Penapisan rekomendasi dari penelitian terpilih dengan mendasarkan pada arah kebijakan yang terdapat pada RPJMD 2017-2022.

Sebagai bentuk upaya agar hasil kelitbangan selaras dengan dokumen perencanaan, penyusunan rencana kegiatan kelitbangan perlu memedomani Rencana Induk Kelitbangan (RIK) yang telah disusun. Selain itu perlu koordinasi dengan para pemangku kepentingan sejak dari penyusunan perencanaan. Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian kinerja urusan penelitian dan pengembangan mengalami peningkatan sebesar 22,01 persen dibandingkan capaian tahun 2020. Hal ini berarti bahwa rekomendasi dari hasil penelitian yang dilakukan sudah semakin selaras dengan perencanaan pembangunan daerah.

2) *Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2021*

Pada tahun 2021 Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan melalui Program Penelitian dan Pembangunan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp374.811.770,00 yang terdiri dari tiga kegiatan, yaitu Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan, serta Pengembangan Inovasi dan Teknologi. Secara keseluruhan realisasi fisik mencapai 100%, sedangkan realisasi keuangan sebesar 73,37%. Belum optimalnya realisasi keuangan disebabkan penyelenggaraan pertemuan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dilaksanakan secara daring dikarenakan masih dalam situasi pandemi COVID-19. Selain hal tersebut, dikarenakan karena menyesuaikan dengan aturan pembatasan aktivitas dan perjalanan pada saat PPKM yang berakibat kurangnya maksimalnya kegiatan pengambilan data penelitian di lapangan.

Tabel 3.206. Capaian Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN STATISTIK DAERAH	Penguatan fasilitasi terhadap aktivitas perencanaan dan peneliti dalam menciptakan konsep dan desain perencanaan pembangunan dan alternatif kebijakan	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Persentase Hasil kelitbangan yang terpilih untuk mendukung pembangunan daerah Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan Dukungan terhadap persentase hasil kelitbangan yang terpilih untuk mendukung pembangunan daerah sebesar 90% Dokumen Rencana Induk Kelitbangan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Dukungan terhadap persentase hasil kelitbangan yang terpilih untuk mendukung pembangunan daerah sebesar 90% Dokumen Hasil Penelitian Pengembangan Inovasi dan Teknologi Dukungan terhadap persentase hasil kelitbangan yang terpilih untuk	Persen	90	94,03	Persentase jumlah rekomendasi dari hasil penelitian yang relevan dengan isu strategis dan permasalahan pembangunan di DIY dari tahun ke tahun semakin meningkat. Namun, masih terdapat hasil penelitian yang belum selaras dengan arah kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, sehingga rekomendasi hasil penelitian belum dapat sepenuhnya digunakan sebagai referensi dalam proses perencanaan pembangunan daerah.	Menyusun rencana kegiatan kelitbangan mengacu pada dokumen Rencana Induk Kelitbangan yang disusun sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan daerah, serta meningkatkan koordinasi yang melibatkan stakeholder terkait kelitbangan.	NIHIL

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				mendukung pembangunan daerah sebesar 90%						
				Rekomendasi hasil penelitian Tahun 2021	dokumen	1	1			
				Inventarisasi Hasil Penelitian Tahun 2021	dokumen	1	1			
				Laporan Monitoring Evaluasi Kelitbang	dokumen	1	1			
				Sistem Informasi Penelitian dan Pengembangan	aplikasi	1	1			
				Identifikasi bahan kebijakan kelitbang	dokumen	1	1			
				Publikasi prosiding ilmiah	dokumen	1	1			

h. Sekretaris Dewan

1) *Kondisi Umum*

Berdasarkan Perdas DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 54 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sekretariat DPRD DIY memiliki Fungsi sebagai: 1) penyusunan program kerja Sekretariat DPRD; 2) penyelenggaraan administrasi kesekretariatan; 3) penyelenggaraan administrasi keuangan; 4) penyiapan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; 5) penyelenggaraan persidangan dan penyiapan bahan risalah rapat DPRD; 6) fasilitasi pelaksanaan pembentukan produk hukum, dokumentasi dan penyebarluasan produk hukum, serta pengkajian dan pengawasan; 7) fasilitasi alat kelengkapan DPRD; 8) fasilitasi penetapan dan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur; 9) penyelenggaraan administrasi Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD; 10) fasilitasi pelantikan pimpinan dan anggota DPRD; 11) pelaksanaan hubungan masyarakat, data dan teknologi informasi, keprotokolan dan pelayanan aspirasi masyarakat; 12) pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD; dan 13) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

DPRD DIY periode 2019 – 2024 terdiri dari 7 fraksi (Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKS, Fraksi Amanat Nasional, Fraksi Gerindra, Fraksi PKB, Fraksi Golkar dan Fraksi Nasdem PSI Persatuan Demokrat). Jumlah Anggota DPRD seluruhnya 55 orang, untuk menjalankan tugas dan fungsinya terdapat 7 alat kelengkapan Dewan, baik yang bersifat tetap maupun tidak tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang secara administrasi dilayani oleh Sekretariat DPRD dalam melaksanakan fungsi-fungsinya.

Berdasarkan RPJMD DIY Tahun 2017-2022 dan Renstra organisasi perangkat daerah, serta hasil pemetaan program dan kegiatan menurut Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dikuatkan dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Sekretariat DPRD DY tahun 2021 mengampu 2 program yang terdiri dari 15 kegiatan dan 48 Subkegiatan, untuk merealisasikan target kinerja yang telah ditentukan oleh dokumen perencanaan pembangunan tersebut.

Tabel 3.207. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sekretaris Dewan Tahun 2020-2021 serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap informasi DPRD (bobot 50%); dan Skor Kepuasan layanan Pimpinan dan Anggota DPRD	%	101,08	87,00	87,90	101,03	90,00	97,66
2	Persentase agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	%	130,76	96,50	131,96	136,74	96,50	136,74

Sumber: Sekretariat DPRD DIY, 2022

Pada indikator kinerja sasaran Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu dihitung dengan rata-rata capaian : Bahan Acara yang selesai dengan fasilitasi Sekretariat DPRD sesuai program kerja DPRD sebesar 144,44% (diperoleh dari jumlah bahan acara yang terselesaikan yaitu 39 dibagi dengan bahan acara yang direncanakan sebanyak 27 bahan acara) pada tahun 2021 dan

Persentase Produk Hukum Daerah dan DPRD yang selesai tepat waktu dengan capaian sebesar 119,48% (diperoleh dari jumlah produk hukum yang selesai tepat waktu pada tahun 2021 sebanyak 184 produk hukum dibagi produk hukum yang direncanakan sebanyak 154 produk hukum sehingga capaian kinerjanya sebesar 131,96%. Jika dibandingkan target akhir RPJMD 2022, capaian pada tahun 2021 sebesar 136,74%. Capaian tersebut dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 yang sebesar 130,76% mengalami kenaikan 1,20%.

Kemudian pada indikator kinerja sasaran Skor Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap informasi DPRD (bobot 50%) sebesar 88,63% dan Skor Kepuasan layanan Pimpinan dan Anggota DPRD (bobot 50%) sebesar 87,18%, sehingga rata-rata realisasi kinerja sebesar 87,90% atau persentase capaian 101,03% dari target 87% pada tahun 2021. Capaian tahun 2021 ini jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 yang sebesar 85,92%, berarti terdapat kenaikan. Namun jika dibandingkan dengan target RPJMD 2022 sebesar 90% masih perlu upaya lebih baik untuk meningkatkan kinerja di tahun 2022.

2) *Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2021*

Alokasi anggaran Penunjang Urusan Sekretaris Dewan pada tahun 2021 sebesar Rp113.530.437.821,00. Pengalokasian anggaran tersebut dibagi dalam 2 program, 15 kegiatan dan 48 sub kegiatan. Secara keseluruhan, realisasi belanja mencapai Rp94.528.891.366,00 (83,26%), dengan capaian fisik sebesar 99,05%.

Dari sisi penyerapan anggaran, terdapat deviasi sebesar 16,69%. Hal ini disebabkan karena: 1) Sisa hasil lelang pengadaan barang dan jasa; 2) Penyesuaian pelaksanaan kegiatan selama masa pandemi COVID-19, sehingga mempengaruhi penyerapan anggaran pada: Belanja makan-minum rapat (pengurangan jumlah peserta rapat yang hadir secara fisik sebagai bentuk penerapan protokol

kesehatan)/penggunaan Zoom meeting, Pelaksanaan perjalanan, terdapat beberapa komponen anggaran yang tidak terserap maksimal, Pelaksanaan sub kegiatan Medical chek up Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD DIY hanya diikuti oleh 45 anggota DPRD DIY dari 55 Anggota DPRD dan Pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD DIY terlaksana 5 kali dari 6 kali yang direncanakan, karena untuk bimbingan teknis dalam daerah tidak mendapat ijin dari BPSDM Kemendagri.

Berikut disampaikan rincian capaian kinerja program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah.

Tabel 3.208. Capaian Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Sekretaris Dewan Tahun 2021

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD	1. Melaksanakan validasi inventarisasi aset, SDM dan Sarana Prasarana	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Merebaknya COVID-19 varian delta di tahun 2021 menyebabkan dilakukan <i>recofusing</i> anggaran dan penundaan beberapa kegiatan-kegiatan DPRD DIY	Mengoptimalkan teknologi informasi dan teknologi komunikasi dalam melaksanakan rapat-rapat, dengan zoom meeting dan melaksanakan koordinasi dengan media sosial.	NIHIL
			2. Melaksanakan Standar akuntansi Pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku dan berdasarkan ASB (SBK-SBU) dan SHBJ dengan mengembangkan kajian perencanaan, Monitoring dan evaluasi.	Persentase penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	%	100	99,58	Pembahasan Raperda-Raperda Non Kebijakan Anggaran tidak sampai pada persetujuan bersama dikarenakan masih menunggu hasil Fasilitas Kemendagri.	Melakukan koordinasi intensif secara internal Sekretariat DPRD DIY, dan eksternal dengan OPD/instansi terkait, dalam rangka fasilitasi pelayanan pada DPRD DIY.	
			3. Meningkatkan koordinasi, kerja sama dan kemitraan dengan DPRD dan Stakeholder.	Persentase sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	%	100	100	Kegiatan-kegiatan Alat Kelengkapan DPRD yang sudah ditetapkan dalam RKT DPRD DIY selalu berubah menyesuaikan kesiapan bahan/materi yang ada dan anggaran.	Reviu jadwal Badan Musyawarah setiap bulan menyesuaikan bahan/materi dan anggaran.	
			4. Semua Fasilitas kegiatan Alat Kelengkapan DPRD harus berdasarkan SOP atau Juklak dan Juknis.	Presentase ketercapaian fisik program Administrasi Perkantoran	%	100	100	Pengajuan program dan kegiatan menyesuaikan	Penyusunan KAK pelaksanaan program dan kegiatan lebih detil berdasarkan	
			5. Melaksanakan Fasilitas Produk Hukum, Pengembangan kebijakan dan kajian kebijakan serta peningkatan mutu dan kualitas tenaga ahli/narasumber/kelompok pakar.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
			6. Meningkatkan fasilitasi penyelenggaraan rapat, pembuatan risalah dan mendokumentasi hasil kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD.	Renja, Renja Perubahan dan Renstra	Dokumen	3	3			
			7. Meningkatkan ketersediaan layanan informasi dan	Laporan Kesepakatan Hasil Forum OPD	Dokumen	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Infrastruktur data base dengan meningkatkan peran serta admin dalam layanan informasi melalui IT.					dengan dokumen perencanaan pembangunan yaitu RPJMD DIY Tahun 2017-2022 dan peraturan perundangan yang ada perlu tetap memperhatikan kebutuhan pimpinan dan anggota DPRD serta aspirasi masyarakat.		
			8. Pengembangan keputakaan, dengan memaksimalkan asset yang ada.	Fungsi dengan RKA, RKAP, DPA, DPPA, ROPK, PK	Dokumen	6	6			
			9. Menyelenggarakan dan mengirimkan peserta pendidikan dan pelatihan pegawai.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
				Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)	%	80	83,85			
				Realisasi Capaian Fisik dan Keuangan sesuai Tahapan ROPK	%	100	91,41			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
				Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Tahun	1	1			
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						
				Administrasi perkantoran yang terselesaikan dengan baik dan tepat waktu	Bulan	12	12			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
				Laporan keuangan akhir tahun sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran, dokumen perencanaan anggaran dan dapat memberikan informasi keuangan bagi pengguna informasi	Dokumen	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						
				Laporan prognosis	Dokumen	1	1			
				Laporan semesteran keuangan	Dokumen	1	1			
				Laporan keuangan bulanan	Dokumen	12	12			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
				Komponen peralatan listrik dan penerangan kantor	Jenis	10	10			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
				Bahan kelengkapan penanggulangan covid	Jenis	17	17			
				Pembelian bendera	Pkt	1	1			
				Pengisian tabung gas dan pemadam kebakaran	Tahun	1	1			
				Alat Tulis Kantor	Jenis	27	27			
				Jumlah dokumen yang terkirim tepat waktu	Pkt	5	5			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
				Barang cetakan	Jenis	14	14			
				Jumlah materi yang digandakan	Materi/bahan	4	4			
				Jasa pengelola arsip 8 orang	bulan	12	12			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
				Laporan dan rencana tindak lanjut hasil rapat koordinasi	Bulan	12	12			
				Laporan dan rencana tindak lanjut hasil konsultasi dan koordinasi	Bulan	12	12			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Peralatan kantor sesuai RKBMD	Jenis	5	5			
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
				Kajian AMDAL pembangunan gedung baru DPRD DIY	Laporan/dokumen	0	0			
				Tersusunnya dokumen DED pembangunan gedung baru DPRD DIY	Laporan/dokumen	0	0			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
				Bukti pembayaran langganan Kawat/ Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Bulan	9	9			
				Bukti pembayaran rekening telepon sebanyak 6 sambungan yang dibayarkan tepat waktu	Bulan	12	12			
				Bukti pembayaran rekening air 1 sat sambungan sebanyak 300m3 yang dibayarkan tepat waktu	Bulan	12	12			
				Bukti pembayaran SMS gateway untuk 1 nomor telephone yang dibayarkan tepat waktu	Bulan	12	12			
				Bukti pembayaran rekening listrik 2 sat sambungan 375 Kwh (197.500 VA & 147.000 VA) yang dibayarkan tepat waktu	Bulan	12	12			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Mobil Jabatan yang dipelihara sesuai RKPBMMD	Unit	5	5			
				Bukti pembayaran pajak/STNK/KIR kendaraan dinas/Jabatan	Unit	5	5			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
				Bukti pembayaran pajak/STNK/KIR kendaraan dinas/operasional	Unit	28	28			
				Kendaraan dinas/operasional roda 2 yang dipelihara sesuai RKPBMMD	Unit	12	12			
				Kendaraan dinas/operasional roda 4 yang dipelihara sesuai RKPBMMD	Unit	16	16			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
				Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara sesuai RKPBMMD	Jenis	5	5			
				Peralatan gedung kantor yang dipelihara sesuai RKPBMMD	Jenis	2	2			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
				Gedung kantor yang dipelihara sesuai RKPBMMD	m2	6750	6750			
				Gedung kantor seluas 333.470 m2 yang terpelihara kebersihannya	Bulan	12	12			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Bukti pembayaran retribusi sampah perkotaan yang dibayarkan tepat waktu	Bulan	12	12			
				Keamanan kantor terjaga dengan baik oleh 25 orang	Bulan	12	12			
				Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD						
				Terbayarnya gaji DPRD	Tahun	1	1			
				Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD						
				Penyediaan pakaian sesuai PP 18/2017 bagi pimpinan dan anggota DPRD	Pakaian dinas	305	305			
				Penyediaan pakaian sesuai PP 18/2017 bagi pimpinan dan anggota DPRD	Pakaian khas	55	55			
				Pelaksanaan Medical Check Up DPRD						
				Bukti pembayaran GCU pimpinan dan anggota DPRD	Orang	55	45			
				Layanan klinik kesehatan di kantor DPRD DIY	Bulan	12	12			
				Fasilitasi Fraksi DPRD						
				Rekomendasi Fraksi	Rekomendasi	84	112			
				Pemandangan Umum Fraksi	PU	84	77			
				Pendapat Akhir Fraksi	PA	84	35			
				Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD						
				Rapur DPRD yang terselenggara	Kali rapur	6	6			
				Laporan tindak lanjut delegasi ke Pemerintah Pusat	laporan	2	2			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						
				Persentase Bahan Acara yang selesai dengan Fasilitas Sekretariat DPRD DIY sesuai dengan program kerja DPRD DIY	%	96,50	144,44			
				Persentase Produk Hukum Daerah dan DPRD yang Diselesaikan Tepat Waktu	%	98,00	119,48			
				Persentase layanan aspirasi masyarakat, aksesibilitas informasi publik dan keprotokoleraan	%	87,00	87,90			
				Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah						
				Rekomendasi Kelayakan Raperda untuk dibahas sesuai dengan Propemperda	Rekomendasi	9	9			
				Pembahasan Rancangan Perda						
				Rancangan produk hukum yang dibahas	Bahan Acara	16	16			
				Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan						
				Kajian Kebijakan untuk penguatan fungsi dewan di Alat kelengkapan dewan	Dokumen kajian	4	4			
				bahan bacaan untuk mendukung tugas fungsi DPRD	Tahun	1	1			
				Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik						
				Penjelasan/Keterangan dan/atau						

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Draft Rakepwan/Raperwan dan Rakepim	Draft	154	184			
				Draft Raperda/Raperdais inisiatif DPRD DIY dan naskah akademiknya	Draft Raperda dan NA	6	6			
				Pembahasan KUA dan PPAS						
				Nota kesepakatan bersama KUA - PPAS 2022	Bahan Acara	1	1			
				Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS						
				Nota kesepakatan bersama KUPA & PPASP 2021	Bahan Acara	1	1			
				Pembahasan APBD						
				Persetujuan bersama Raperda APBD 2022	Bahan Acara	1	1			
				Pembahasan Perubahan APBD						
				Persetujuan bersama Raperda APBD Perubahan TA 2021	Bahan Acara	1	1			
				Pembahasan Laporan Semester						
				Laporan pembahasan komisi dengan mitra kerja	Bahan Acara	1	1			
				Pembahasan Pertanggungjawaban APBD						
				Persetujuan bersama Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020	Bahan Acara	1	1			
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum						
				Rekomendasi bahan pengawasan produk hukum yang sedang berjalan	Kajian	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur						
				Rekomendasi bahan pengawasan produk hukum yang sedang berjalan	Kajian	1	1			
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat						
				Rekomendasi bahan pengawasan produk hukum yang sedang berjalan	Kajian	1	1			
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian						
				Rekomendasi bahan pengawasan produk hukum yang sedang berjalan	Kajian	1	1			
				Bimbingan Teknis DPRD						
				Bimbingan teknis yang diikuti pimpinan dan anggota DPRD	Kali	6	5			
				Publikasi dan Dokumentasi Dewan						
				Peraturan perundangan sebagai dasar penyusunan produk hukum daerah yang disosialisasikan	Peraturan	1	1			
				Perda yang disosialisasikan	Perda	10	10			
				Layanan data PPID	Jenis	3	3			
				Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli						
				Laporan hasil kerja kelompok pakar dan tim ahli yang dibutuhkan AKD	Laporan	18	18			
				Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi						
				Laporan hasil kerja TAF	Laporan Bulanan	12	12			
				Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat						

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Kemitraan wartawan	Kegiatan	4	4			
				Publikasi kinerja DPRD pada 10 jenis media	share konten	3000	3132			
				Audiensi/dengar pendapat DPRD dengan masyarakat	Laporan	11	11			
				Sarasehan dan gathering	kegiatan	3	3			
				Penyusunan Program Kerja DPRD						
				Program kerja DPRD dan perubahannya	Dokumen	2	2			
				Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD						
				Keputusan DPRD tentang pokok-pokok pikiran DPRD	Dokumen	1	1			
				Pengembangan aplikasi e-pokir	dokumen	1	1			
				Pelaksanaan Reses						
				Penyelenggaraan reses	Laporan	3	3			
				Pengawasan Kode Etik DPRD						
				Laporan dan rekomendasi tindaklanjut hasil kerja Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD	Laporan	3	3			
				Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD						
				Laporan dan rencana tindak lanjut hasil kunker ke LN	Laporan	0	0			
				Pelayanan keprotokolan kepada pimpinan DPRD	Bulan	12	12			
				Laporan dan rencana tindaklanjut hasil kerja komisi	laporan	3	3			
				Penyusunan Laporan Kinerja DPRD						
				Laporan kinerja dan hasil kerja DPRD	Dokumen	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD						
				Tingkat kepuasan tamu DPRD yang terlayani	%	70	87,90			
				Laporan dan rekomendasi kegiatan pimpinan	Laporan	12	12			

E. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

Pada tahun 2021, Pemda DIY mengambil beberapa kebijakan strategis sebagai upaya dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan di DIY.

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	Penyerapan dan Pemanfaatan Komoditas Pangan Lokal	SE Sekretaris Daerah DIY nomor 510/3074 tanggal 17 Februari 2021 tentang Penyerapan dan Pemanfaatan Komoditas Pangan Lokal	<ul style="list-style-type: none"> a. Menghimbau ASN dan Karyawan BUMD di Pemda DIY untuk dapat melakukan penyerapan dan pemanfaatan komoditas pangan lokal dengan harga wajar terutama saat terjadi kelebihan hasil produksi yang mengakibatkan harga anjlok b. Gerakan 'Angkringan Inflasi' Aparatur Sipil Negara Keren Peduli Pengendalian Inflasi c. Komoditas pangan lokal yang dimaksud sesuai yang tertuang pada Peraturan Gubernur DIY nomor 71 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Tata Niaga Pangan Lokal. d. Penyerapan dan pemanfaatan komoditas pangan lokal dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga yang mengelola pangan.
2	Pendataan, Pengembangan Sistem Ekonomi Hub (Pusat) dan Pengembangan Sektor Riil Perekonomian DIY	Rencana Kerja antara Pemerintah Daerah DIY dan Bank Indonesia tentang Pendataan, Pengembangan Sistem Ekonomi Hub (Pusat) dan Pengembangan Sektor Riil Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 119/19386 --- 23/54/Yk/Srt.P/B tanggal 22 September 2021.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan UMKM DIY b. Pengembangan ekonomi syariah DIY c. Pengembangan ekonomi digital DIY d. Pengembangan ekonomi keuangan DIY e. Pengembangan ekonomi kreatif DIY f. Pertukaran data dan informasi sektor utama DIY untuk kepentingan penelitian maupun sistem pendataan g. Penyusunan kajian dalam rangka pengembangan sektor ekonomi utama DIY h. Pemantauan dan pengendalian pasokan bahan pokok dan harga komoditas di DIY dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas TPID DIY i. Penyelenggaraan survei, seminar, konsinyering, rakorda, HLM, dan FGD j. Sinergi program dan kegiatan untuk mewujudkan Sistem Ekonomi Hub (Pusat)
3	Implementasi Program Beras ASN	Surat Sekretaris Daerah DIY nomor 529/19449 tanggal 22 September 2021 perihal Implementasi Program Beras ASN	<ul style="list-style-type: none"> a. Implementasi penyerapan komoditas pangan lokal yaitu beras oleh seluruh ASN di Lingkungan Pemda DIY b. Penyerapan beras melalui gapoktan untuk membantu menyerap beras petani DIY
4	Kerja sama Pengembangan Kewirausahaan Manajemen Produk Berlebih	Kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah DIY dan PT Ekonomi Sirkular Indonesia Nomor 119/22583/2021 -- - 001/MOU/DIY/1/2021 tanggal 16 November 2021 tentang Kerja sama Pengembangan Kewirausahaan	Pengembangan kewirausahaan manajemen (pemasaran) Produk Berlebih bagi pelaku usaha di DIY (khususnya) dan untuk meningkatkan perekonomian daerah DIY

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
5	Mendorong Percepatan Pemulihan Industri Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta	Manajemen Produk Berlebih untuk Meningkatkan Perekonomian Daerah di DIY Surat Edaran Gubernur DIY Nomor 23/SE/IV/2021 Tanggal 30 April 2021 kepada Bupati/Walikota se DIY, Kepala Instansi Vertikal, Kepala OPD Pemda DIY tentang Gerakan Berwisata Aman dan Sehat dalam Upaya Mendorong Percepatan Pemulihan Industri Pariwisata DIY	Dalam rangka membangkitkan dan menggerakkan ekonomi daerah yang terdampak akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dilakukan upaya untuk mendorong kelangsungan usaha industri pariwisata dengan membantu para pelaku usaha di sektor pariwisata, IKM dan UMKM melalui upaya sebagai berikut: a. Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai dan karyawan untuk dapat berwisata aman dan sehat ke destinasi wisata lokal di DIY; b. Kegiatan rapat-rapat dinas, pertemuan dan seminar dapat dilaksanakan di hotel dan restoran/rumah makan c. Mengajak semua pihak untuk mendukung penerapan prokes berbasis CHSE Sebagai pedoman dalam rangka koordinasi terpadu pelaksanaan GERMAS di DIY
6	Penerapan RAD GERMAS di Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur DIY Nomor 103 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Lestari Tahun 2021 – 2025.	Sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Aman Bencana Pada Satuan Pendidikan
7	Penerapan kebiasaan baru dalam pembelajaran pada satuan Pendidikan	Peraturan Gubernur DIY Nomor 110 tahun 2021 tentang Pedoman Pendidikan Aman Bencana Pada Satuan Pendidikan	Sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Aman Bencana Pada Satuan Pendidikan
8	Penanganan dan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat	SK Gubernur DIY Nomor 236 / TIM / 2021 tentang Pembentukan Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat.	Meningkatkan kerja sama lintas sektoral yang berdaya guna dan berhasil guna serta dapat mengatasi masalah yang dihadapi dalam upaya pembinaan kesehatan jiwa masyarakat termasuk rehabilitasi orang dengan gangguan jiwa/orang dengan disabilitas psikososial, gelandangan psikotik, dan kasus pemasangan
9	Pedoman Pembangunan Ketahanan Keluarga	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembangunan ketahanan keluarga	Mewujudkan keluarga tangguh melalui upaya pembangunan ketahanan Keluarga berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengaturan meliputi aspek:
10	Standar Harga Barang dan Jasa Daerah Tahun Anggaran 2021	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah Tahun Anggaran 2021	Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatur tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah Tahun Anggaran 2021
11	Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2021 Tentang kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	Kualifikasi jabatan digunakan sebagai pedoman dalam manajemen ASN berdasarkan sistem merit meliputi penyusunan formasi, rekrutmen Calon PNS, pengangkatan PNS, pengembangan karir PNS, penilaian kinerja PNS, pemberian tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan penghasilan atau tunjangan perbaikan penghasilan PNS, mutasi PNS, rotasi PNS dan promosi PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi
12	Pedoman kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman kelembagaan Urusan	Menyelaraskan tugas dan fungsi koordinator perencanaan dan pengendalian, pengawasan, dan penegakan pelaksanaan sebagian urusan Keistimewaan dan nomenklatur serta tugas dan fungsi perangkat daerah dalam melaksanakan penugasan sebagian urusan Keistimewaan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
		Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan	
13	Ingub No.39/INSTR/2021 tgl 15 Des 2021 tentang Pelaksanaan Proyek Program Prioritas Pembangunan DIY Dengan Skema Kerja sama Pemerintah Dengan Badan Usaha	Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2015 tentang Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur	Mendorong OPD yang memiliki proyek KPBU di DIY untuk dapat melaksanakan dan mengoptimalkan kondisi fisik dan lingkungan proyek selama proses KPBU berjalan
14	Surat Edaran Nomor No. 119/24892 DIY Sekda DIY tentang Intensifikasi Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah Dalam Penyediaan Infrastruktur (Program Pengembangan/Penataan Kawasan Prioritas)	Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2015 tentang Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur	Mendorong Kabupaten yang wilayahnya terdapat program prioritas DIY untuk dapat mengembangkan program prioritas sesuai dengan kewenangannya melalui pembiayaan pembangunan non pemerintah
15	Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 490/24370 tahun 2021 tentang Percepatan Pencapaian Target Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Bidang Infrastruktur di Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur DIY Nomor 86 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018-2022	Upaya peningkatan capaian target indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada indikator a) air limbah; b) persampahan; c) bangunan/gedung pemerintah, komersial dan industri yang diaudit energi; d) kawasan konservasi perairan; e) luas tutupan vegetasi dan lahan terkonservasi; dan, f) sistem peringatan dini yang terintegrasi.
16	SE Gubernur No. 490/24797 tentang Percepatan Pencapaian Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Melalui Kemitraan Multipihak Dengan Pemangku Kepentingan Non Pemerintah Di Daerah Istimewa Yogyakarta	1. Perpres No. 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, 2. Pergub DIY No. 86 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Pergub DIY No. 34 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018-2022	Upaya percepatan pemenuhan target TPB di DIY diperlukan akselerasi dan optimalisasi seluruh sumber daya dengan melibatkan segenap Pemangku Kepentingan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) melalui Kemitraan Multipihak di antara Pelaku TPB yang terdiri atas unsur Pemerintah, Parlemen, Akademisi, dan Pakar terkait TPB, Organisasi Masyarakat Sipil, Media, Bisnis dan Filantropi
17	SE Gubernur Nomor 12/01394 tanggal 1 Juni 2021 tentang Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi di DIY	- Instruksi Presiden No. 2 th 2021	SE Gubernur Nomor 12/01394 tanggal 1 Juni 2021 tentang Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi di DIY
18	Surat Edaran Gubernur Nomor 553/19094 tentang Pengembangan Infrastruktur Wilayah pada Kawasan Hinterland Yogyakarta International Airport (YIA)	Berdasarkan kajian "Kajian Penyiapan Pengembangan Infrastruktur pada Kawasan Hinterland NYIA"	Perlu dilakukan kajian terkait dampak pembangunan di wilayah sekitar bandara (hinterland) sehingga dapat memberikan arahan terkait pengembangan kawasan di lokasi tsb
19	Surat Edaran Gubernur Nomor 616/24374 tentang Penguatan Konservasi Air Tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta	-Berdasarkan kajian "Studi Kelola Embung dan Telaga Desa"	Surat Edaran Gubernur Nomor 616/24374 tentang Penguatan Konservasi Air Tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta
20	Surat Edaran Gubernur Nomor 12/24733 tanggal 28 Desember 2021 tentang Peningkatan Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman DIY Tahun 2019-2039	1. Pemerintah Kabupaten/Kota untuk: a. Melaksanakan percepatan penyusunan regulasi mengenai Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) berdasarkan pada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota masing-masing.

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
			<ul style="list-style-type: none"> b. Melaksanakan identifikasi dan pemetaan lahan yang akan dimanfaatkan sebagai persediaan lahan (land banking) bagi pembangunan perumahan MBR. c. Menyediakan data mengenai jumlah penduduk yang tergolong sebagai Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan kapasitas penyediaan perumahan bagi MBR. d. Melaksanakan optimalisasi perizinan, pemantauan, dan pengawasan terhadap pengembang yang melaksanakan pembangunan perumahan MBR dengan berpedoman pada regulasi serta perencanaan tata ruang. e. Mengupayakan alternatif pendanaan dari sektor filantropi maupun non-pemerintah guna memfasilitasi penyediaan bantuan Prasarana Sarana Umum (PSU) pembangunan perumahan MBR. <ol style="list-style-type: none"> 2. Perangkat Daerah yang menangani perencanaan dan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta agar melaksanakan identifikasi kebutuhan lahan dan perencanaan pemetaan wilayah persediaan lahan pembangunan perumahan bagi MBR. 3. Perangkat Daerah yang menangani perumahan dan permukiman di Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan pengembangan sistem informasi berbasis teknologi sebagai upaya integrasi data pengelolaan perumahan bagi MBR berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. 4. Perangkat Daerah yang menangani perizinan dan pengawasan di Daerah Istimewa Yogyakarta agar melakukan optimalisasi perizinan, pemantauan, dan pengawasan pembangunan perumahan MBR di DIY.
21	Penerapan Protokol Kesehatan dalam Penerimaan Tamu	Surat Edaran Gubernur DIY Nomor 40/SE/VI/2021	Sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan penerimaan tamu di Pemda DIY dalam tatanan normal baru dengan penerapan protokol kesehatan
22	Tambahan Penghasilan Pegawai ASN	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai	Memberikan keterangan lebih jelas tentang bobot serta ketentuan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kelas jabatan.
23	Pengukuran Kompetensi Pegawai	Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 419/KEP/2021 Tentang Pelaksana Kegiatan Pengukuran Kompetensi Pegawai Pada Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021	Menetapkan Pelaksana kegiatan pengukuran kompetensi pegawai sehingga tercipta pelaksanaan uji kompetensi yang efektif dan efisien.
24	Sistem Informasi Kepegawaian	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2021 Tentang Orkestrasi Pengelolaan Manajemen Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan manajemen kepegawaian yang akurat, terintegrasi, real time, dan berkualitas.
25	Pengembangan Kompetensi ASN	Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62/KEP/2021 Tentang Penetapan Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022	Menetapkan pedoman dalam penyusunan kebutuhan dan perencanaan pengembangan kompetensi.

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
26	Pembentukan Pengelola Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta	Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 39/KEP/2021	Mengubah Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 241/KEP/2014 dan menetapkan pengelola Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta yang baru
27	Penetapan penerima hibah berupa barang kepada koperasi dalam kegiatan pasar komunitas Sistem Informasi Pembinaan Koperasi dan Pelaku Usaha (Sibakul) Jogja berbasis produk lokal untuk pemulihan ekonomi dampak COVID-19 di DIY	KepGub DIY Nomor 361/Kep/2021 mengenai Penetapan penerima hibah berupa barang kepada koperasi dalam kegiatan pasar komunitas Sistem Informasi Pembinaan Koperasi dan Pelaku Usaha (Sibakul) Jogja berbasis produk lokal untuk pemulihan ekonomi dampak COVID-19 di DIY	Sehubungan dengan diterapkannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berimbas pada lesunya perekonomian wilayah DIY. Untuk itu, diperlukan langkah masif dalam rangka pemulihan ekonomi dampak COVID-19 khususnya pada aktivitas usaha bidang koperasi dan usaha kecil menengah dengan cara memberikan hibah berupa barang kepada koperasi.
28	Perubahan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2021	Penyesuaian Perda dengan perkembangan peraturan perundang-undangan: <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah - Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039 dan kebutuhan daerah
29	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 126 Tahun 2021	Sebagai pedoman dalam rangka membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim
30	Jenis dan Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) DIY sebesar 322 ton beras	Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 289/KEP/2021	Memperbarui target cadangan pangan pemerintah daerah menyesuaikan perkembangan jumlah penduduk dan konsumsi beras di DIY
31	Penyusunan Grand Design Keistimewaan DIY Tahun 2022 - 2042	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang Grand Design Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042	Kerangka pelaksanaan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta jangka panjang sebagai haluan dan pedoman dalam perumusan kebijakan.
32	Penetapan Desa/ Kalurahan Mandiri Budaya	Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 383/KEP/2021 tentang Penetapan Desa/ Kalurahan Desa Mandiri Budaya	Penetapan daftar Desa/Kelurahan Mandiri Budaya sebagai tindak lanjut atas target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2017-2022.
33	Pedoman kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 Tentang pedoman kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan	Sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan dalam menyusun kelembagaan, perubahan ini menyangkut pembentukan UPT Taman Budaya serta keterlibatan Bappeda, Satpol PP dan Inspektorat terkait dana keistimewaan (perencanaan, pengendalian dan pengawasan)
34	Penugasan Pengelolaan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi TransJogja dengan Sistem Buy The Service Kepada PT. Anindya Mitra Internasional	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 127 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja Dengan Sistem <i>Buy The Service</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan Penugasan Kepada PT. AMI dalam menyelenggarakan Angkutan Perkotaan Bersubsidi dengan Sistem Buy The Service 2. Memberikan Pelayanan Sistem Angkutan umum perkotaan bersubsidi Trans Jogja bagi masyarakat sesuai dengan SPM 3. Mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, mudah, nyaman, terjangkau dan berkualitas serta terpadu

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
			dengan moda angkutan lain untuk mendorong peningkatan perekonomian daerah: dan
35	Subsidi Angkutan Perkotaan Trans Jogja		<p>4. Memberikan kepastian pedoman perhitungan subsidi angkutan umum dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas</p> <p>1. Memberikan Pedoman bagi pemerintah daerah dalam memberikan subsidi Kepada PT. AMI untuk mengelola angkutan perkotaan Bersubsidi Trans Jogja dengan Sistem BTS (Buy The Service)</p> <p>2. Tertib administrasi dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan subsidi</p>
36	Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Bandar Udara Internasional Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2021	Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan Bandar Udara dan sekitarnya merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pemanfaatan ruang yang tertib, aman, dan nyaman serta memberikan jaminan keamanan dan keselamatan penerbangan
37	Optimalisasi Kepesertaan dan Kepatuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Peraturan Gubernur DIY No. 99 Tahun 2021	Merupakan regulasi yang menjamin pemenuhan hak pekerja DIY untuk memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan, diperlukan optimalisasi kepesertaan dan peningkatan kepatuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan guna memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh pekerja.
38	Pembentukan Komite Vokasi dan Produktivitas Daerah (KVPD) DIY	Keputusan Gubernur DIY No. 30/TIM/2021	Merupakan komite yang beranggotakan dari unsur pemerintah, industri, profesional dan akademisi yang mempunyai ketugasan untuk melakukan pelayanan produktivitas di tingkat provinsi melalui promosi, peningkatan, pengukuran dan pemeliharaan produktivitas serta mengupayakan adanya link and match antara pelatihan vokasi dengan kebutuhan industri guna peningkatan keterserapan angkatan kerja di pasar kerja.
39	Pembentukan Tim Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan DIY	Keputusan Gubernur DIY No. 176/TIM/2021	Tim Unit Layanan Disabilitas dibentuk dalam rangka untuk penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas penyandang disabilitas dimulai dari perencanaan, pemberian informasi kepada pihak-pihak terkait tentang rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja dan pengembangan karier yang adil tanpa diskriminasi, pendampingan kepada tenaga kerja disabilitas dan pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja disabilitas.
40	Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemda DIY	Pergub Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	Untuk melakukan percepatan implementasi Sertifikat Elektronik khususnya penggunaan Tanda Tangan Elektronik di lingkungan Pemda DIY, Pemda DIY melalui Dinas Komunikasi dan Informatika DIY telah Menyusun Peraturan Gubernur DIY Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
41	Penerapan <i>Corporate University</i> (Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi ASN Terintegrasi) <i>Corporate University</i> (Corpu) adalah sistem, entitas dan strategi pengembangan kompetensi sumber daya manusia Aparatur yang mengedepankan penggunaan teknologi informasi untuk	<p>1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (3) bahwa setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam</p>	<p>1. Memenuhi hak dan kesempatan ASN dalam mengembangkan kompetensinya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku dengan mewujudkan strategi pengembangan kompetensi berbasis Teknologi Informasi yang aksesibel dan fleksibel;</p> <p>2. Menyelenggarakan pengembangan kompetensi ASN secara terintegrasi untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan perubahan sikap dan perilaku</p>

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
	meningkatkan fleksibilitas dan aksesibilitas dalam rangka mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan serta mengubah sikap perilaku.	<p>pengembangan kompetensi, dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi PNS yang bersangkutan; dan Ayat (4) Pengembangan kompetensi bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Pasal 39 Ayat (1) Dalam rangka pengembangan kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas, PPPK diberikan kesempatan untuk pengayaan pengetahuan; dan Pasal 40 Ayat (1) Pelaksanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun masa perjanjian kerja.</p> <p>3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021-2024</p>	<p>dalam upaya mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, serta keselarasan antara pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;</p> <p>3. Mendorong terwujudnya organisasi pembelajar di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.</p> <p>Oleh karena itu, ketentuan yang berkaitan dengan <i>Corporate University</i> saat ini dalam tahap proses Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Terintegrasi Pemerintah Daerah DIY (<i>Corporate University</i>).</p>
42	Kebijakan Pengetatan secara terbatas kegiatan Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta	Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1/INSTR/2021 tentang Kebijakan Pengetatan secara terbatas Kegiatan Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta	Kebijakan Pengetatan secara terbatas kegiatan Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta
43	Perpanjangan Pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Pengendalian Penyebaran <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19)	Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4/INSTR/2021 tentang Perpanjangan Pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Pengendalian Penyebaran <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19)	Perpanjangan Pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Pengendalian Penyebaran <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19)
44	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Pengendalian Penyebaran <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19)	Instruksi Gubernur DIY Nomor 5/INSTR/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Pengendalian Penyebaran <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19)	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Pengendalian Penyebaran <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19)
45	Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Pengendalian Penyebaran <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19)	Instruksi Gubernur DIY Nomor 6/INSTR/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Pengendalian Penyebaran <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19)	Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Pengendalian Penyebaran <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19)

[illegible]

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
55	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta	Instruksi Gubernur DIY Nomor 23/INSTR/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta
56	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta	Instruksi Gubernur DIY Nomor 24/INSTR/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta
57	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta	Instruksi Gubernur DIY Nomor 25/INSTR/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta
58	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Corona Virus Disease 2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta	Instruksi Gubernur DIY Nomor 26/INSTR/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Corona Virus Disease 2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Corona Virus Disease 2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta
59	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Corona Virus Disease 2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta	Instruksi Gubernur DIY Nomor 27/INSTR/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Corona Virus Disease 2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Corona Virus Disease 2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta
60	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Corona Virus Disease 2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta	Instruksi Gubernur DIY Nomor 28/INSTR/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Corona Virus Disease 2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Corona Virus Disease 2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta
61	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Corona Virus Disease 2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta	Instruksi Gubernur DIY Nomor 29/INSTR/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Corona Virus Disease 2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Corona Virus Disease 2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta
62	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta	Instruksi Gubernur DIY Nomor 34/INSTR/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta
63	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta	Instruksi Gubernur DIY Nomor 35/INSTR/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta
64	Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 di Daerah Istimewa Yogyakarta	Instruksi Gubernur DIY Nomor 37/INSTR/2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 di Daerah Istimewa Yogyakarta	Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 di Daerah Istimewa Yogyakarta
65	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta	Instruksi Gubernur DIY Nomor 38/INSTR/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta
66	Penundaan Sementara Kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)	Instruksi Gubernur DIY Nomor 39/SE/VI/2021 tentang Penundaan Sementara Kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)	Penundaan Sementara Kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
67	Penetapan Perpanjangan Kesepuluh Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID -19)	Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45/KEP/2021 tentang Penetapan Perpanjangan Kesepuluh Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID -19)	Penetapan Perpanjangan Kesepuluh Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID -19)
68	Upaya Perlindungan Masyarakat	Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7/KEP/2021 Tentang Pengangkatan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat <i>Rescue</i> Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021	a) Membantu dalam pencarian, pertolongan dan penyelamatan korban. b) Membantu penanggulangan bencana; c) Melakukan penanganan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di wilayah pantai dan obyek wisata;
69	Upaya Perlindungan Masyarakat	Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021	a) Membantu penanggulangan bencana; b) Memelihara dan melakukan penanganan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; c) Membantu kegiatan sosial kemasyarakatan; d) Membantu dalam pencarian, pertolongan dan penyelamatan korban.
70	Upaya percepatan penanganan dampak corona Virus Disease 2019 (COVID-19)	Peraturan Gubernur DIY Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019	Menerapkan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam rangka pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019
71	Upaya percepatan penanganan dampak corona Virus Disease 2019 (COVID-19)	Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 293/KEP/2021 tentang Penetapan Koordinator Penyaluran dan Penerima Bantuan Bahan Makanan Pokok bagi masyarakat terdampak Corona Virus Disease 2019 Di Kelurahan se-Daerah Istimewa Yogyakarta	Melakukan cleansing data terhadap daftar koordinator penyaluran bantuan bahan makanan pokok dan daftar calon penerima bantuan bahan makanan pokok
72	Upaya percepatan penanganan dampak corona Virus Disease 2019 (COVID-19)	Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 294/KEP/2021 Tentang Pemberian Hibah Sarana Kesehatan Bagi Kelompok Jaga Warga Untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Kelurahan Se-Daerah Istimewa Yogyakarta	Memberikan hibah sarana kesehatan bagi kelompok Jaga Warga untuk pencegahan dan penanganan dampak pandemi COVID-19 di seluruh Kelurahan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai upaya percepatan penanganan dampak pandemi COVID-19
73	Upaya percepatan penanganan dampak corona Virus Disease 2019 (COVID-19)	Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 319/KEP/2021 Tentang Penetapan Koordinator Penyaluran Bantuan Sosial Bahan Makanan Pokok Bagi Masyarakat Pelaku Seni dan Budaya yang Terdampak Corona Virus Disease 2019 Di Daerah Istimewa Yogyakarta	Melaksanakan penyaluran bantuan sosial berupa bahan makanan pokok bagi masyarakat pelaku seni dan budaya yang terdampak COVID di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, guna meringankan beban masyarakat pelaku seni dan budaya.
74	Pembentukan Tim Kebutuhan Oksigen Daerah Istimewa Yogyakarta	Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 204/TIM/2021	Sebagai pedoman dalam rangka memenuhi kebutuhan oksigen untuk rumah sakit di Daerah Istimewa Yogyakarta maka diperlukan langkah cepat, tepat, focus, terpadu dan sinergis antar instansi/lembaga di Daerah Istimewa Yogyakarta guna membantu Satuan Tugas Penanganan COVID-19
75	Penetapan Rumah Sakit Lapangan/Darurat Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah Istimewa Yogyakarta	Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 219/KEP/2021	Sebagai pedoman dalam rangka mendekatkan pelayanan pengobatan dan pengawasan terhadap pasien positif terinfeksi COVID-19 sehubungan meningkatnya

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
76	Pemanfaatan Aplikasi Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Sistem Informasi Data Ketersediaan Tempat Tidur untuk Rujukan Pasien Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)	Surat Edaran Nomor 10/SE/II/2021	jumlah pasien yang mengakibatkan rumah sakit rujukan di DIY tidak mampu menampung positif terinfeksi COVID-19 Sebagai dasar untuk mewajibkan Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas dan Klinik agar memanfaatkan aplikasi SPGDT sebagai sistem informasi data ketersediaan tempat tidur untuk rujukan pasien COVID-19 di DIY
77	Penetapan Standar Pelayanan Minimal Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2021	Sebagai pedoman Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya menjamin dan meningkatkan kualitas pelayanan dasar kepada publik di bidang pelayanan kesehatan
78	Penetapan Relawan Tenaga Bidang Kesehatan dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)	Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 172/KEP/2021	Sebagai pedoman dalam melaksanakan proses rekrutmen dan penugasan relawan tenaga bidang kesehatan guna mendukung penanganan Corona Virus Disease 2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta
79	Pembentukan Komite Daerah Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Komda KIPi) Daerah Istimewa Yogyakarta	Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 27/KEP/2021	Sebagai pedoman dalam membentuk Komda KIPi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melaksanakan ketentuan pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi
80	Pembentukan Tim Kebutuhan Oksigen Daerah Istimewa Yogyakarta	Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 204/TIM/2021	Sebagai pedoman dalam rangka memenuhi kebutuhan oksigen untuk rumah sakit di Daerah Istimewa Yogyakarta maka diperlukan langkah cepat, tepat, focus, terpadu dan sinergis antar instansi/lembaga di Daerah Istimewa Yogyakarta guna membantu Satuan Tugas Penanganan COVID-19
81	Pengaturan mengenai Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
82	Pemanfaatan Bagian – Bagian Jalan Provinsi khususnya pada penanaman dan penebangan pohon serta pembuatan jalan masuk.	Perda no 6 tahun 2017 tentang penggunaan dan pemanfaatan bagian - bagian jalan provinsi	Tata cara penanaman pohon, Penebangan Pohon, dan pembuatan jalan masuk pada bagian – bagian jalan provinsi (Pergub nomor 50 tahun 2021)
83	1. Mengatur pembinaan dan pengawasan pelaksanaan RP3KP DIY terhadap: a. Pemerintah Kabupaten/ Kota. b. setiap orang; dan c. Perangkat Daerah pelaksana RP3KP DIY. 2. Pengaturan bentuk, kriteria, dan prosedur insentif dan disinsentif.	- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman - Perda DIY Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039	Tata Cara Pembinaan, Pengawasan, Pemberian Insentif dan Disinsentif Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pergub DIY Nomor 13 Tahun 2021)
84	Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 114 tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021	Peraturan Gubernur DIY nomor 29 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 114 tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021	Penyesuaian Anggaran atas Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 17/PMK.07/2021 tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya
85	Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 114 tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021	Peraturan Gubernur DIY nomor 49 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Daerah Istimewa	Penyesuaian anggaran terhadap Berita Acara Penilaian Kelayakan Usulan Perubahan Pertama Program dan Kegiatan Dana Keistimewaan TA 2021, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
		Yogyakarta Nomor 114 tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021	Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan TA 2021 dan Surat Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 906/3017/Keuda tanggal 28 April 2021 perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping) Kalsifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah Terkait DAK Non Fisik Bidang Kesehatan dan DAK Non Fisik BOP PAUD dan BOP Pendidikan Kesetaraan TA 2021
86	Perubahan Ketiga Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 114 tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021	Peraturan Gubernur DIY nomor 69 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 114 tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021	Penyesuaian anggaran atas terbitnya Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 17 tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Percepatan pelauran Bantuan Sosial dan/ atau jaring Pengaman Sosial yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah dan Berita Acara tentang Perubahan Program dan kegiatan Dana Keistimewaan DIY TA 2021
87	Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021	Penyesuaian Penjabaran APBD atas Perda DIY nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan APBD TA 2021
88	Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 111 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021	Penyesuaian Anggaran atas Keputusan Gubernur DIY nomor 385/KEP/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 329/KEP/2021 tentang Standarisasi dan Indeks Besar Penghargaan Prestasi bagi Atlet dan pelatih Pekan Olahraga Nasional dan Pekan Paralimpik Nasional tahun 2021
89	Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 124 tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022	Pedoman Bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022
90	Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020	Upaya pemulihan ekonomi dan meringankan beban masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta karena dampak Pandemi Covid - 19
100	Tata Cara Hibah dan Bantuan Sosial.	Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Hibah dan Bantuan Sosial.	Menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.
101	Perubahan atas Peraturan Gubernur DIY Nomor 113 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.	Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur DIY Nomor 113 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.	Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 113 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
102	Pedoman Pelaksanaan Barang dan Jasa BUMD.	Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang dan Jasa BUMD.	Melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah.
103	Pedoman bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kalurahan.	Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pedoman bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kalurahan.	<ol style="list-style-type: none"> Penetapan dasar hukum dalam rangka percepatan pembangunan Kalurahan dan pemberdayaan masyarakat, melalui mekanisme bantuan keuangan kepada Pemerintah Kalurahan. Dalam rangka penguatan keistimewaan perlu dilakukan perubahan terhadap nomenklatur desa sehingga Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa perlu disesuaikan.
104	Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 114 tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021	Peraturan Gubernur DIY nomor 29 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 114 tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021	Penyesuaian Anggaran atas Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 17/PMK.07/2021 tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya
105	Mengimplementasikan Pasal 3 Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa pembangunan Desa berdasarkan pada 3 asas sebagai fondasi yaitu asas partisipasi, kesetaraan dan pemberdayaan. Salah satu kewajiban Kepala Desa yang tertuang dalam pasal 26 ayat 4 (e) yaitu melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender, mendukung penyelenggaraan pembangunan desa yang responsive gender	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Pelindungan Anak Tahun 2020 – 2022	<ol style="list-style-type: none"> Mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam kehidupan keluarga, berbangsa dan bernegara Mewujudkan pemenuhan hak anak serta melindungi perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang Mewujudkan keluarga yang Tangguh dan sejahtera
106	Mengimplementasikan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Anak (lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2018 nomor 2, tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2) dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6)	Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 348/Kep/2021 Tentang Penetapan Percontohan Kalurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak Tahun 2021	<ol style="list-style-type: none"> optimalisasi sinergi antar OPD dan lembaga dalam Pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak Menjadikan Desa /kalurahan ramah perempuan dan peduli anak melalui sinergi antar OPD /lembaga
107	Pembentukan Forum Komunikasi dan Konsultasi ekspor Impor Daerah Istimewa Yogyakarta -	Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 140/KEP/2021 Tentang Pembentukan Forum Komunikasi dan Konsultasi ekspor Impor Daerah Istimewa Yogyakarta	Untuk mewujudkan sinergitas antar lembaga / instansi dalam rangka peningkatan ekspor DIY

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
108	Peraturan Gubernur Tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 Tahun	Sebagai Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam memberikan layanan penggunaan Arsip Dinamis agar terwujud layanan arsip secara cepat, tepat dan aman
109	Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Fungsi Keuangan	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2021	Sebagai Pedoman dalam Penyusunan Arsip yang berkaitan dengan keuangan
110	Peraturan Gubernur 2021 Tentang Pengelolaan Arsip Dinamis	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2021	Sebagai pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah
111	Peraturan Gubernur 2021 Tentang Pengelolaan Arsip Statis	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 101 Tahun 2021	Sebagai Pedoman untuk mengelola Arsip Statis meliputi : 1. Akusisi Arsip Statis 2. Pengolahan Arsip Statis 3. Preservasi Arsip Statis 4. Akses dan Layanan Arsip Statis
112	Peraturan Daerah DIY Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan	Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2021	Peraturan Daerah Penyelenggaraan Perpustakaan bertujuan untuk : 1. Menyediakan pelayanan Perpustakaan kepada Masyarakat secara cepat dan tepat 2. Mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah 3. Melaksanakan pembudayaan kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan
113	Kesejahteraan Lanjut Usia	Peraturan Daerah DIY nomor 3 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia	Dalam rangka memberikan arah dan pedoman bagi semua pihak di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia, yang menjadi payung hukum bersama.
114	Perlindungan dan Pemenuhan hak Disabilitas	Perda No 4 tahun 2012 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dengan dilakukan review menjadi Raperda Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, saat ini masih dalam tahapan evaluasi dari Kemendagri	Dalam rangka memberikan arah dan pedoman bagi semua pihak di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyelenggaraan perlindungan, pemenuhan hak disabilitas yang menjadi payung hukum bersama.
115	Integrasi data	Peraturan Gubernur DIY nomor 108 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen Validasi Unggul Berbasis Digital dengan Rumah Data Sejahtera Masyarakat Jogja	Dalam rangka untuk mengintegrasikan data sehingga dapat diperoleh data yang akurat tepat sasaran dan tepat manfaat
116	Pemberian ijin terhadap penggunaan Kawasan hutan	Keputusan Gubernur DIY nomor 206/KEP/2021 tentang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan pada Kawasan Hutan Produksi Resort Pemangkuan Hutan Candi dan RPH Kenet, BDH Karangmojo, KPH Yogyakarta, Kabupaten Gunungkidul	Ijin penggunaan kawasan hutan seluas 1.237 Ha diberikan untuk pembangunan jalan kabupaten dalam rangka peningkatan akses perekonomian
117	Pemberian ijin terhadap penggunaan Kawasan hutan	Keputusan Gubernur DIY nomor 376/KEP/2021 tentang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan pada Kawasan Hutan Lindung Resort Pemangkuan Hutan Mangunan, BDH Kulon Progo-Bantul, KPH Yogyakarta, Kabupaten Bantul	Ijin penggunaan kawasan hutan seluas 1.066 Ha diberikan untuk pembangunan jalan kabupaten dalam rangka peningkatan akses perekonomian

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum			Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
118	Penetapan status cagar budaya	Nama Cagar Budaya	Nomor Gubernur	SK	Sebagai landasan hukum dan pedoman (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta penganggaran) untuk pelestarian (pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan) dan pengelolaannya.
		Masjid Gedhe Mataram Kotagede	Keputusan Gubernur Nomor 29/KEP/2021	DIY	
		Kawasan Cagar Budaya Imogiri	Keputusan Gubernur Nomor 42/KEP/2021	DIY	
		Makam Raja-raja di Mataram Kotagede	Keputusan Gubernur Nomor 26/KEP/2021	DIY	
		Jembatan Gantung Bantar	Keputusan Gubernur Nomor 171/KEP/2021	DIY	
		Bangunan "Toko UD. Liong" Jl. Lor Pasar Beringharjo No. 21 Yogyakarta	Keputusan Gubernur Nomor 191/KEP/2021	DIY	
		Rumah Jl Ketandan Lor 58	Keputusan Gubernur Nomor 192/KEP/2021	DIY	
		Rumah Jl Ketandan Kidul 9	Keputusan Gubernur Nomor 193/KEP/2021	DIY	
		Rumah Jl Ketandan Kidul 17	Keputusan Gubernur Nomor 194/KEP/2021	DIY	
		Bangunan "Toko 41" Jl. Lor Pasar Beringharjo No. 41 Yogyakarta	Keputusan Gubernur Nomor 195/KEP/2021	DIY	
		Selokan Mataram	Keputusan Gubernur	DIY	

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum		Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
			Nomor 231/KEP/2021	
		Kawasan Cagar Budaya Kaliurang Yogyakarta	Keputusan Gubernur DIY Nomor 313/KEP/2021	
		Jalan Rukunan Kotagede	Keputusan Gubernur DIY Nomor 309/KEP/2021	
		Watu Gilang Kotagede	Keputusan Gubernur DIY Nomor 315/KEP/2021	
		Kawasan Kota Wates Lama	Keputusan Gubernur DIY Nomor 311/KEP/2021	
		Masjid Gedhe Mataram Kotagede	Keputusan Gubernur DIY Nomor 312/KEP/2021	

F. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN 2020

1. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Dalam Perubahan APBD

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Langkah Pemda DIY untuk melakukan perubahan Sasaran, Tema dan Prioritas pembangunan yang diakibatkan adanya Pandemi COVID-19 dapat dipahami dan perlu diapresiasi sebagai bentuk respon cepat Pemda DIY dalam menghadapi kejadian luar biasa yang berdampak pada kondisi kesehatan dan perekonomian masyarakat.	Pemda DIY akan terus berupaya mengatasi COVID-19 dengan terus fokus meningkatkan pelaksanaan vaksinasi dan melakukan kerja sama melalui forum sosialisasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan awareness COVID-19. Upaya vaksinasi telah dilakukan secara intensif dan akan ditingkatkan pada 2021 dan direncanakan booster pada tahun 2022 untuk meningkatkan imunitas warga DIY. Kajian terkait Covid jg sedang dilakukan dengan pendekatan Germas, sehingga didapatkan masukan rekomendasi akademisi terkait metode mengatasi COVID-19. Untuk pendataan warga miskin, melalui OPD bidang Sosial juga akan dilakukan pengamatan ulang terhadap data kemiskinan DTKS dengan aplikasi khusus yang akan menjadi metode filter terhadap data sehingga lebih sesuai dengan kondisi riil.	Upaya penanganan covid-19 dengan melakukan koordinasi untuk deteksi dini, Pelaksanaan vaksinasi, Penyediaan SDM kesehatan Kegiatan-kegiatan promotif, Sinkronisasi tematik COVID-19, kajian dengan pendekatan germas, dan pengamatan ulang data DTKS dg aplikasi khusus
2	Namun demikian upaya Pemerintah DIY tersebut belum membuahkan hasil yang optimal dari sisi kesehatan mengingat masih banyaknya penularan COVID-19 sampai pada akhir tahun 2020. Kondisi ini membutuhkan kerja yang lebih ekstra lagi bagi Pemda DIY untuk menangani Pandemi COVID-19 pada tahun 2021 ini.	Dalam upaya memutus rantai penyebaran COVID-19, Dinas Kesehatan DIY melaksanakan koordinasi dengan BPBD di dalam tugasannya sebagai satuan tugas penanganan COVID-19 di DIY. Koordinasi juga dilakukan secara rutin dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di DIY dan dengan Pemerintah Pusat (Kementerian Kesehatan). Hal yang dikoordinasikan meliputi update data kasus Covid-10 di DIY, evaluasi penerapan protokol kesehatan dan 3T (<i>testing, tracing, treatment</i>), strategi penanganan COVID-19, serta pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di DIY. Pada triwulan I dan awal triwulan II tahun 2021, Pemda DIY melalui Dinas Kesehatan DIY telah dilaksanakan vaksinasi massal tahap 1 dan 2 dengan sasaran petugas publik, guru, lansia, pelaku UKM, dan pekerja perfilman. Selain dilaksanakan oleh Pemda DIY, pelaksanaan vaksinasi massal juga dilaksanakan oleh kabupaten/kota di DIY. Pemda DIY bekerjasama dengan pemerintah pusat (Kementerian Kesehatan RI) dalam pemenuhan SDM kesehatan terkait penanganan COVID-19 di DIY. SDM kesehatan tersebut ditempatkan di RS yang menangani COVID-19. Sharing Pemda DIY untuk pemenuhan akomodasi, transportasi, dan konsumsi. Upaya-upaya promotif juga dilakukan untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat tentang COVID-19 dan PHBS. Pandemi ini telah memunculkan juga inovasi strategi komunikasi yang lebih baik berbasis teknologi sehingga edukasi kepada masyarakat terkait kebersihan dan	

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<p>kesehatan diri dan lingkungan dapat dilakukan secara efektif dan efisien melalui upaya peningkatan literasi untuk perbaikan perilaku.</p> <p>Menggalakkan gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) dengan menekankan pada upaya perubahan gaya hidup sehat di masyarakat melalui sebuah gerakan yang bertujuan untuk memasyarakatkan budaya hidup sehat serta meninggalkan kebiasaan dan perilaku masyarakat yang kurang sehat. Penerapan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19 dengan salah satunya melakukan sosialisasi gerakan 3M yaitu mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak.</p> <p>Selain itu terbentuknya Forum Sosialisasi Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan guna mengintegrasikan pesan-pesan mengenai COVID-19 yang akan disampaikan pada masyarakat, sehingga sumber daya yang digunakan menjadi lebih efisien dan jangkauan penyebaran informasinya menjadi lebih luas. Telesurvey tanggapan masyarakat terhadap COVID-19 juga merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana sikap dan harapan masyarakat dalam penanganan COVID-19. Pemahaman masyarakat terhadap protokol kesehatan COVID-19 sudah cukup baik, 93,36% responden selalu menggunakan masker, 80,43% responden selalu cuci tangan pakai sabun, 66,52% responden tidak berkerumun.</p> <p>Selanjutnya melakukan sinkronisasi tematik pembangunan DIY tahun 2022 tentang "Tindak Lanjut/Antisipasi Pembangunan Kesehatan dan Sosial Masyarakat Dampak Pandemi COVID-19" antara Pemda DIY dengan kabupaten/kota di DIY.</p> <p>Dukungan kabupaten/kota terkait tematik tersebut antara lain: vaksinasi, insentif nakes, penyediaan shelter, penyediaan BMHP, pendampingan dan permaknaan di Desa Siaga Bencana.</p>	
3	Langkah <i>efisiensi dan refocusing</i> anggaran yang dilakukan belum memiliki dampak signifikan dari sisi ekonomi. Pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan kemampuan keuangan pemerintah. Akibat adanya pandemi ini, perekonomian DIY mengalami kontraksi hingga mencapai 2,6% pada tahun 2020 dari angka pertumbuhan 6,6% di tahun 2019 lalu. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian untuk perencanaan program kedepan terutama dalam upaya penguatan ekonomi masyarakat akibat dampak Pandemi COVID-19 dengan tetap memperhatikan protokol pencegahan penularan virus.	<p>Meskipun secara tahunan perekonomian DIY mengalami kontraksi hingga negatif 2,6 persen, namun data menunjukkan ekonomi DIY menunjukan ke arah perbaikan. Triwulan 1/2021 ekonomi DIY tumbuh positif, 6,14 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk mendorong pemulihan ekonomi, belanja pemerintah difokuskan untuk kegiatan yang bisa memberikan stimulus pada perekonomian lokal. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah melibatkan lebih banyak lagi pelaku UMKM dalam proses pengadaan barang/jasa untuk kegiatan pemerintah daerah. Melalui belanja pada UMKM, diharapkan perputaran ekonomi dapat dinikmati oleh masyarakat lokal. Selain itu, promosi terhadap produk lokal juga dilakukan agar pembelanjaan masyarakat di DIY pada produk-produk ini bisa meningkat mengingat persentase terbesar perekonomian di DIY ditopang oleh komponen konsumsi rumah tangga</p>	Salah satu upaya untuk mendorong pemulihan ekonomi, dengan menfokuskan belanja pemerintah untuk kegiatan yang bisa memberikan stimulus pada perekonomian lokal, dengan melibatkan lebih banyak lagi pelaku UMKM

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<p>Sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) Permendagri Nomor 20 Tahun 2020, Belanja Tidak Terduga yang tidak mencukupi untuk penanganan Covid - 19 dapat dicukupi dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan. Menindaklanjuti permendagri tersebut, hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan dilakukan pergeseran ke anggaran Belanja Tidak Terduga yang digunakan untuk penanganan COVID-19. Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2020, untuk Penanganan Kesehatan, Penanganan Dampak Ekonomi dan Penyediaan Jaring Pengamanan Sosial/ Social Safety Net.</p> <p>Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui keistimewaan DIY, salah satu program terobosan pemberdayaan dan peningkatan perekonomian masyarakat di kalurahan, pada tahun 2021 dilaksanakan BKK kalurahan yang mendukung program prioritas gubernur salah satunya Desa Mandiri Budaya. 10 Desa mandiri budaya yang disasar pada tahun 2021 ini memiliki potensi dan karakteristik masing masing, yakni 3 desa budaya, 3 desa wisata, 3 desa preneur dan 1 desa prima. Kedepan harapannya akan semakin banyak kalurahan di DIY yang mampu melihat dan mengembangkan potensi2 perekonomian diwilayahnya masing masing dan bisa didukung melalui kegiatan desa mandiri budaya, desa maritim, desa rintisan mandiri budaya serta predikat kalurahan lainnya yang tujuan akhirnya mewujudkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat. Desa mandiri budaya merupakan pembangunan yang berpusat pada pemberdayaan desa secara terpadu, lintas sektoral, lintas pemangku kepentingan. Desa mandiri budaya merupakan perpaduan antara pelestarian budaya, pengembangan wisata, peningkatan peranserta perempuan dalam perekonomian serta pengembangan wirausaha masyarakat desa.</p>	
4	<p>Kontribusi Belanja APBD Pemda DIY pada 2020 dalam Perekonomian Daerah (PDRB DIY) sebesar 5,76% (adapun data tahun 2019 5,72%). Sedangkan Kontribusi Belanja APBD seluruh Pemda se-DIY pada 2020 dalam Perekonomian Daerah (PDRB DIY) sebesar 16,50%. Fakta ini menunjukkan bahwa untuk mendorong perekonomian DIY sangat diperlukan kolaborasi dan kerja sama yang lebih ekstra dengan pihak lain yaitu BUMD, Badan Usaha Swasta dan UMKM. Data tersebut menunjukkan bahwa sektor swasta dan masyarakat sebagai kontributor utama pergerakan dan pertumbuhan ekonomi lokal DIY. Kondisi tersebut dapat dinilai positif karena sumbangsih swasta dan masyarakat, dan oleh karenanya peran Pemerintah Daerah DIY sebagai fasilitator pertumbuhan ekonomi masyarakat perlu untuk terus dikuatkan.</p>	<p>Pemda DIY selalu mendorong peran masyarakat dan swasta dalam pembangunan di DIY. Salah satu kebijakan pembangunan di DIY adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui program-program pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat tersebut, akan memicu terjadinya proses penumbuhan dan perkembangan kekuatan masyarakat untuk ikut terlibat dalam berbagai aspek pembangunan. Peran aktif masyarakat diharapkan mampu untuk mengatasi permasalahan pembangunan serta mampu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, sehingga kebijakan diarahkan untuk memberikan dorongan, peluang, kesempatan, dan perlindungan agar masyarakat dapat meningkatkan kemampuan dan mengaktualisasikan diri atau berpartisipasi melalui berbagai aktivitas dan dengan desain program/kegiatan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat</p> <p>Kolaborasi Pemerintah Daerah DIY dengan Badan Usaha Swasta telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah No.6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TSLP) dimana perusahaan yang berbadan hukum memiliki tanggungjawab sosial lingkungan. Dari amanat</p>	<p>Peningkatan peran serta pemerintah, masyarakat dan swasta dalam mendorong pemulihan perekonomian DIY</p>

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<p>Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur No. 23 tahun 2018 tentang pembentukan TSLP terbentuk Forum TSLP DIY/CSR Center DIY pertama yang dilantik pada tahun 2018. Forum TSLP/CSR Center bertujuan untuk mewadahi kolaborasi antara swasta (korporasi di DIY) dengan Pemda DIY dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam meningkatkan ekonomi atau peningkatan social. TSLP/CSR merupakan salah satu sumber dana yang bersifat panjang sehingga dapat membantu Pemda yang memiliki anggaran terbatas tiap tahunnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalin kolaborasi yang lebih maksimal maka pada Tahun 2021 ada pembaharuan Peraturan Gubernur dari yang lama ke Peraturan Gubernur No.11 tahun 2021 tentang Peraturan pelaksanaan pelaksanaan peraturan daerah DIY No.6 tahun 2016 tentang penyelenggaraan TSLP. Perubahan Peraturan Gubernur ini sebagai petunjuk teknis dalam menjalin kolaborasi yang besinergi antara program kegiatan Pemda DIY dengan Forum TSLP/CSR Center. Pergub memuat detail sistematika kolaborasi serta tugas dan fungsi Pemda Forum TSLP/CSR Center, agar kedepannya kolaborasi Pemda DIY dan Forum TSLP/CSR Center lebih efektif dan efisien.</p> <p>Peran dan kerja sama BUMD terhadap pendapatan daerah pada tahun 2020 memberikan kontribusi positif. pandemi COVID-19 berdampak pada seluruh sektor bisnis, namun demikian target pendapatan BUMD DIY dapat terpenuhi. Hal ini menunjukkan kinerja perusahaan BUMD DIY yang cukup stabil dalam menghadapi tantangan pada tahun 2020.</p> <p>Kegiatan investasi memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi DIY. Kegiatan investasi yang dilakukan oleh swasta maupun masyarakat secara umum mengalami peningkatan. Kontribusi PMTB dalam PDRB DIY meningkat dari 30,4% pada tahun 2016 menjadi 35,14% pada tahun 2019. Harus diakui bahwa pandemi COVID-19 membuat kegiatan investasi banyak yang tertunda. Untuk mendorong kemudahan investasi dan berusaha bagi badan usaha maupun masyarakat, Pemda DIY senantiasa meningkatkan pelayanan perijinan dalam PTSP, memberikan pendampingan dan edukasi bagi masyarakat mengenai prosedur perijinan berusaha dan melakukan pengawasan dan pemantauan realisasi investasi. Melalui Pergub Rencana Umum Penanaman Modal, arah kebijakan penanaman modal diantaranya adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perbaikan Iklim Penanaman Modal, Persebaran Penanaman Modal, Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi, Kebudayaan dan Pariwisata, Pendidikan, dan Ekonomi Kreatif Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment) Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM); 	

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		f. Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal; dan g. Promosi Penanaman Modal	

a. Pendapatan dan Belanja Daerah

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Terkait penurunan Pendapatan Daerah, Pemda DIY perlu meningkatkan inovasi-inovasi sumber-sumber pendapatan daerah, khususnya intensifikasi Pajak Daerah dengan memberikan kemudahan pelayanan serta meningkatkan pendataan wajib pajak terutama bagi wajib pajak yang seharusnya terkena pajak progresif kendaraan bermotor. (bidang pemerintahan dan BPKA)	Terkait penurunan pendapatan di Tahun 2020 merupakan dampak dari pandemi covid-19 yang mengakibatkan perekonomian global mengalami penurunan termasuk Indonesia khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta. Inovasi telah dilakukan dengan memberikan kemudahan pelayanan kepada wajib pajak melalui; e-samsat (pembayaran melalui ATM Bank BPD dan pengesahan melalui e-posti), penambahan titik layanan melalui Samsat Desa, pembayaran melalui Gopay, pengembangan pembayaran dengan Bank Nasional selain BPD sesuai Kesepakatan Bersama antara Tim Pembina Samsat DIY dengan PT. Bank Pembangunan Daerah DIY selaku agregator Nomor : KEP/06/2021, Nomor : 973/01530/AP, Nomor: KEP/36/III/2021, Nomor : 0145A/OM/0004. Pelayanan pembayaran pajak daerah selain di kantor Samsat, masih berjalan sampai saat ini. Jumlah pelayanan melalui Samsat Desa saat ini tersebar di 12 kalurahan di seluruh DIY. Namun dikarenakan wabah covid-19 yang saat ini masih belum mereda, mengakibatkan pendapatan mengalami penurunan, karena beberapa kali pelayanan ditutup akibat adanya kluster covid di beberapa kalurahan.	Melalui upaya-upaya inovasi yang telah dilakukan khususnya dalam penerimaan Pajak Kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan harapan akan meningkatkan pendapatan Daerah. Karena Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan kontribusi terbesar terhadap Penerimaan Asli Daerah.
2	Pemda DIY perlu menggenjot kinerja Penerimaan Daerah selain dari Pajak Kendaraan Bermotor terutama dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang masih menempati urutan kedua Persentase Pendapatan Daerah dengan kesenjangan cukup tinggi dibandingkan dengan Penerimaan Daerah dari Pajak Daerah. (bidang pemerintahan dan BPKA)	Berkaitan dengan pengembangan berbagai langkah dan tindakan yang dapat dilakukan dalam memperbaiki kinerja usaha BUMD dalam rangka peningkatan penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dengan tindakan-tindakan yang sifatnya strategis yaitu yang dapat dilakukan dengan langkah atau tindakan memperbaiki kinerja perusahaan, diantaranya dengan Mengatasi kelemahan internal yang diantaranya melalui penetapan kembali core business, „memperbaiki sistem manajemen organisasi; serta melakukan kordinasi intensif dalam proses problem solving kendala2 yang dihadapi BUMD	Peningkatan kinerja usaha BUMD untuk meningkatkan pendapatan Daerah
3	Berkenaan dengan capaian indikator kinerja yang tidak optimal dalam masa pandemi, selain dilakukan evaluasi perencanaan yang komprehensif baik dari aspek sasaran, program, dan kegiatan, perlu dipertimbangkan agar belanja pemda DIY dikaitkan dengan langkah penguatan dan peningkatan ekonomi masyarakat dengan melibatkan	Pemda memandang penting peran UMKM dalam pembangunan perekonomian daerah. Dalam kerangka pemulihan ekonomi akibat dampak Pandemi, baik pada tahun 2021 maupun rencana tahun 2022, Pemda akan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pemberdayaan UMKM yang mencakup kegiatan pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM dan Usaha, kegiatan pendampingan dan layanan konsultasi bisnis, kegiatan kemitraan UMKM dengan lembaga	Upaya pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi covid-19 melalui kegiatan-kegiatan pemberdayaan UMKM.

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	para pelaku usaha terutama UMKM. (bidang perekonomian)	pembiayaan, kegiatan promosi produk UMKM hingga pada kegiatan pemberian stimulus ongkos kirim. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan dengan dukungan sistem pendataan Koperasi & UMKM yang terintegrasi dalam SIBAKUL.	

b. Pembiayaan Daerah

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Pengeluaran Pembiayaan dilakukan penyesuaian yang terdiri dari penyertaan modal kepada PT Bank BPD DIY, PD Air Bersih, Asuransi Bangun Askrida dan pemberian dana bergulir kepada BUKP. Penyertaan modal kepada PT BPD DIY pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dirasionalisasi sebesar Rp61,040 Milyar. Rasionalisasi terhadap penyertaan modal dilakukan untuk percepatan penanganan COVID-19 sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2020. Perlu dijelaskan lebih rinci terkait penyertaan modal yang dilakukan terkait percepatan penanganan COVID-19 berikut dampak dan efisiensi alokasi dana.	Sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) Permendagri Nomor 20 Tahun 2020, Belanja Tidak Terduga yang tidak mencukupi untuk penanganan Covid - 19 dapat dicukupi dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan. Menindaklanjuti permendagri tersebut, anggaran penyertaan modal kepada PT BPD DIY dilakukan pergeseran ke anggaran Belanja Tidak Terduga yang digunakan untuk penanganan COVID-19. Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2020, untuk Penanganan Kesehatan, Penanganan Dampak Ekonomi dan Penyediaan Jaring Pengamanan Sosial/ Social Safety Net.	Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2020, untuk Penanganan Kesehatan, Penanganan Dampak Ekonomi dan Penyediaan Jaring Pengamanan Sosial/ Social Safety Net Pengelolaan Barang Daerah

c. Pengelolaan Aset yang Dipisahkan

d. Pengelolaan BARANG MILIK DAERAH

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Pada Tahun 2020, Pemda DIY menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Modul Aset untuk Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap dan Aset Lainnya, sedangkan untuk Barang Milik Daerah berupa Persediaan menggunakan Aplikasi Persediaan. Kedua aplikasi ini telah disesuaikan dengan ketentuan mengenai kodefikasi barang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun	Bahwa tahun 2022 bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKA DIY menganggarkan pengembangan sistem informasi pengelolaan Barang Milik Daerah yang terintegrasi untuk lebih mudah dan memberikan manfaat lebih terhadap pendapatan daerah yang sah terutama dalam mengoptimalkan pendapatan dari sektor aset.	Penatausahaan Barang Milik Daerah untuk lebih spesifik maka dikembangkan sistem aset tetap dan sistem persediaan berbasis web agar lebih mendapatkan data maksimal sebagai contoh data spasial yang spesifik Untuk pemanfaatan oleh pihak lain dalam hal ini sewa perhitungan menggunakan pihak ke tiga untuk penilaian (appraisal independen) sehingga harga nya sesuai nilai

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah, Peraturan Gubernur DIY Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah, dan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah. Harapam kedepan, pengelolaan barang milik daerah ini harus mampu memberikan sumbangsih pada lain-lain pendapatan daerah yang sah.	Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan prinsip optimalisasi daya guna dan hasil guna serta meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	pasar dari aset pemerintah daerah dan mempertimbangkan best high use, yaitu melakukan pemeriksaan terkait harga terbaik yang akan diperoleh sebagai pendapatan dari sebuah aset

2. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

a. KETERCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH DAERAH

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Dari capaian IKU diatas, dapat disimpulkan bahwa indikator yang belum tercapai justru indikator yang menyangkut substansi pembangunan yaitu yang terkait dengan kesejahteraan rakyat antara lain IPM, Indeks Gini, Presentase Angka Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan IKLH. Hal tersebut perlu mendapat perhatian untuk menjadi catatan kedepan agar capaian-capaian pembangunan harus menitikberatkan pada indikator-indikator yang terkait dengan kesejahteraan rakyat, sehingga manfaat pembangunan dapat terealisasi sesuai dengan tujuannya. (bidang perencanaan)	Tingkat kemiskinan dan kesenjangan pendapatan serta kesenjangan wilayah masih menjadi isu besar dalam pembangunan di DIY. Capaian dari indikator-indikator tersebut memang belum seperti yang diharapkan. Adapun pertumbuhan ekonomi DIY sebelum tahun 2020 tercatat cukup baik, namun dengan adanya pandemi covid-19 menyebabkan pertumbuhan ekonomi DIY Tahun 2020 tidak mencapai target. Demikian juga dengan beberapa target kinerja yang lain. Pada tahun 2020 telah dirancang program/kegiatan untuk dapat mengatasi permasalahan pembangunan di DIY, namun kemudian harus dilakukan realokasi untuk penanganan pandemi covid-19. Hal ini kemudian berdampak pada pencapaian target kinerja baik kinerja jangka pendek (tahun 2020) maupun target jangka menengah (RPJMD). Beberapa target pembangunan tidak dapat dicapai karena sumber daya (input) yang seharusnya digunakan untuk pencapaian target dimaksud kemudian dialihkan untuk penanganan covid-19. Perencanaan pembangunan dalam RKPD tahun 2021 dan 2022 telah merespon hasil evaluasi pencapaian kinerja sampai tahun 2020 tersebut. Selain memprioritaskan terhadap pemulihan dan/atauantisipasi dampak dari pandemi covid-19, Pemda DIY juga memprioritaskan terhadap pencapaian kinerja RPJMD. Hal ini tercermin dalam tema dan prioritas pembangunan pada RKPD Tahun 2021 dan 2022 sebagai berikut: Tema dan Prioritas dalam RKPD Tahun 2021: Tema RKPD DIY Tahun 2021 yaitu; “Penguatan SDM Unggul dan Percepatan Pemulihan Sosial Ekonomi Masyarakat DIY”. Adapun prioritas pembangunan tahun 2021: 1. Pembangunan Manusia unggul 2. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Target pembangunan dapat tercapai sesuai dengan rencana

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<p>3. Penguatan Infrastruktur Strategis</p> <p>4. Pendukung Prioritas Pembangunan</p> <p>Tema dan Prioritas dalam RKPD Tahun 2022:</p> <p>Tema Pembangunan dalam RKPD DIY Tahun 2022 yaitu “Pengembangan SDM Unggul dan Sektor Strategis untuk Pemulihan Sosial Ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta” adapun fokus tematik tahun 2022 meliputi : (1) Mengatasi ketimpangan wilayah; (2) Mengatasi Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan; dan (3) Tindak Lanjut/Antisipasi Pembangunan Kesehatan dan Sosial Masyarakat Dampak Pandemic COVID-19.</p> <p>Prioritas Pembangunan Tahun 2022:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan SDM yang berkualitas (sehat, berpendidikan, dan mampu secara ekonomi); 2. Peningkatan Infrastruktur layanan dasar yang mendukung pertumbuhan ekonomi; 3. Peningkatan sektor-sektor unggulan dan potensial; 4. Mewujudkan Pembangunan yang merata, selaras dan lestari; 5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. <p>Prioritas pembangunan dan fokus tematik menjadi acuan dalam desain program/kegiatan tahun 2021 dan 2022 yang diarahkan pada pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan</p>	
2	<p>Capaian pembangunan manusia DIY sampai dengan tahun 2020 berada pada level 79,97 dan berada dalam kategori “IPM Tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$). Meskipun sedikit menurun dibanding tahun 2019. Walaupun cukup tinggi, namun IPM DIY masih belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 81,08. Hal ini perlu mendapatkan perhatian lebih kedepan untuk dapat ditingkatkan serta memperhatikan kondisi kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul yang angka IPM-nya masih berada dibawah angka IPM DIY. (bidang sosbud)</p>	<p>Perbandingan Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2019-2020 Kabupaten Bantul tetap berada di angka 80,01, Kabupaten Sleman turun dari 83,85 ke 83,84, Kabupaten Gunungkidul naik dari 69,96 ke 69,98, Kabupaten Kulon Progo naik dari 74,44 ke 74,46 dan Kota Yogyakarta turun dari 86,65 ke 86,61 jika di rata-rata Indeks Pembangunan Manusia DIY turun 0,03 dari tahun sebelumnya. Namun, jika dilihat Kabupaten Gunungkidul memiliki IPM terendah dan Kulon Progo menjadi terendah kedua, meskipun demikian tren kenaikan justru terjadi di Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo. Selanjutnya, jika dilihat mendetail dari IPM angka harapan hidup DIY meningkat dari tahun 2019 74,92 sedangkan tahun 2020 sebanyak 74,99. Harapan Lama Sekolah juga meningkat dari 9,38 ke 9,55 namun dari sisi pengeluaran perkapita mengalami penurunan dari 14,394,00 ke 14,015,00. Pemda melalui Bidang Sosbud DIY telah memetakan analisa kapanewon (kecamatan) yang memiliki daerah-daerah rendah IPM dan juga didukung dengan data IPD dan Keluarga Miskin dari data DTKS, pada tahun 2021 di Gunungkidul yakni Saptosari, Playen, Gedangsari, Nglipar, Ponjong, Tepus, dan Karangmojo. Sedangkan di Kulon Progo yakni Samigaluh, Kokap, Pengasih, Sentolo. Harapannya dengan analisa pemetaan lokus ini dapat dikawal dengan intervensi program-prorgam OPD Pemda DIY dan Kabupaten untuk memfokuskan di daerah-daerah yang memiliki IPM yang rendah</p>	Upaya meningkatkan Capaian IPM di Kab /Kota di DIY

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		sehingga Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo dapat meningkat nantinya dari sisi IPM dan menurunnya Keluarga Miskin dari data DTKS. Selain kapanewon prioritas di atas juga akan dipetakan potensi dan masalahnya di kapanewon-kapanewon lain melalui monitoring dan evaluasi tahunan sehingga dapat diharapkan akan terus di monitoring dan di evaluasi target-target tahunan IPM.	
3	Indeks Gini DIY tahun 2020 mencapai angka 0,437 hal ini tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu 0,3776, bahkan lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 yaitu 0,4280. Perlu upaya yang lebih terukur guna menurunkan indeks gini sebagai langkah mengurangi kesenjangan pendapatan antar warga masyarakat serta mengurangi potensi munculnya persoalan-persoalan sosial lanjutan. (bidang sosbud, perekonomian dan pemerintahan)	<p>Untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan kesenjangan antar daerah strategi yang perlu dilakukan adalah mengakselerasi pertumbuhan pendapatan masyarakat golongan penapatan rendah dan peningkatan fasilitas-fasilitas di daerah yang. Pemerintah Daerah DIY telah melakukan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • kegiatan pemberdayaan ekonomi untuk kelompok berpendapatan rendah diantaranya melalui pelatihan dan promosi untuk IKM/UKM, kegiatan padat karya infrastruktur, pembinaan desa wisata dan penumbuhan kewirausahaan di perdesaan. • dengan dana BKK Jambanisasi di 4 Kabupaten, namun secara volume akan menitikberatkan Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo. Juga BKK PKH Graduasi oleh Dinas Sosial. Pada tahun 2022 Pemda DIY juga akan memberikan bantuan alat-alat kesehatan di RSUD Saptosari sebagai bagian dari pengurangan kesenjangan di daerah yang tertinggal. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kegiatan perekonomian juga diarahkan untuk menyentuh lokasi kantong kemiskinan. Seperti G2R, pelatihan BUMDES di Biro Bina Bermas. <p>Pemda DIY melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY menindaklanjuti dengan: (1) konsolidasi untuk ketahanan ekonomi dan sosial budaya, termasuk dengan desa tangguh kesbang, (2) bersama Dinas Sosial DIY untuk program restorasi sosial berupa asistensi dan kampanye gotong-royong dan harmoni sosial (bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental / GNRM, pada Gerakan Indonesia Bersatu), (3) konsolidasi potensi harmoni dan kolaborasi masyarakat basis komunitas melalui Jaga Warga (yang dilanjutkan pengelolaan oleh Satpol PP mulai 2021 ini), (4) Penanganan Konflik Sosial (PKS) melalui rencana aksi terpadu lintas-perangkat daerah dan bekerjasama dengan instansi vertikal serta Kab/kota se-DIY</p>	Upaya mengurangi kesenjangan/ Ketimpangan di DIY

b. URUSAN WAJIB

1) URUSAN TERKAIT DENGAN PELAYANAN DASAR

a) URUSAN PENDIDIKAN

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Keberadaan lembaga nonformal seperti PKBM dan SKB di DIY telah banyak membantu penduduk yang mengalami kendala dalam mengikuti pendidikan formal untuk tetap memperoleh pendidikan melalui jalur nonformal. PKBM dan SKB sebagai lembaga pendidikan kesetaraan tidak hanya fokus untuk memberikan pendidikan bagi penduduk yang putus sekolah, namun juga memberikan alternatif pembelajaran yang berbeda bagi penduduk usia sekolah yang tidak menempuh jalur pendidikan formal.	Memperoleh pendidikan yang bermutu merupakan hak setiap warga negara sesuai ketentuan Undang-Undang. Dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 26 ayat (1), disebutkan bahwa Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Sesuai ketentuan tersebut, pendidikan nonformal dapat menjadi alternatif bagi warga negara yang karena kondisi tertentu tidak dapat mengikuti pendidikan formal. Dengan demikian, hak untuk mendapatkan pendidikan tetap terpenuhi walaupun tidak melalui jalur pendidikan formal. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan pendidikan nonformal menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga Pemda DIY di tahun 2021 hanya menyelenggarakan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di DIY terkait pendataan partisipasi pendidikan nonformal karena partisipasi peserta didik pendidikan nonformal mendukung capaian Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni Pendidikan di DIY.	Pada tahun 2021 sinkronisasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di DIY terkait pendataan pendidikan nonformal terus dilakukan oleh Pemda DIY, baik melalui koordinasi pengumpulan data di masing-masing kabupaten/kota maupun pemutakhiran data pada Data Pokok Pendidikan. Pemutakhiran Data Pokok Pendidikan ini menjadi dasar pembuatan Profil Pendidikan 2021.
2	Pemberian insentif bagi PTK baik itu GTT/PTT/GTY/PTY perlu terus di berikan sebagai wujud penghargaan kepada mereka yang telah berperan dalam penyelenggaraan Pendidikan di DIY sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.	Sebagai kelanjutan dari penyaluran insentif pada tahun 2020, pada tahun 2021 dianggarkan pemberian insentif kepada 1.351 pendidik dan tenaga kependidikan yang terdiri dari GTY dan PTY SMA dan SMK Swasta, GTY dan PTY SLB, serta guru inklusi sebesar Rp8.872.800.000,00. Pemberian insentif ini juga akan dilanjutkan di tahun 2022 dengan rencana anggaran sebesar Rp8.403.000.000,00 kepada 1.275 PTK sebagai bentuk penghargaan atas upaya para PTK memajukan pendidikan DIY. Pemberian insentif tetap berpedoman kepada persyaratan yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Insentif Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.	Sampai dengan bulan Mei 2021 telah disalurkan insentif kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang terdiri dari GTY dan PTY SMA dan SMK Swasta, GTY dan PTY SLB, serta guru inklusi sebesar Rp2.899.600.000,00 dan akan dilanjutkan sepanjang tahun 2021 sesuai Keputusan Gubernur DIY Nomor 89/KEP/2021 tanggal 14 April 2021 tentang Penerima Insentif Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tahun 2021. Penyaluran terakhir pada bulan Desember 2021 diberikan kepada 295 GTT, PTT, dan guru inklusif serta 934 GTY dan PTY SMA dan SMK Swasta di DIY. Total penyaluran insentif sepanjang tahun 2021 adalah Rp8.398.100.000,00.
3	Ketersediaan tenaga pendidik di DIY tentunya perlu didukung oleh kompetensi yang memadai. Sesuai ketentuan UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, guru wajib memiliki kualifikasi akademik yang	Pemenuhan kompetensi pendidik merupakan syarat mutlak bagi pencapaian standar mutu pendidik yang dipersyaratkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Guna mendukung pemenuhan kompetensi ini Pemda DIY di tahun 2021 tetap memberikan kemudahan akses bagi para guru yang akan	Sesuai dengan jadwal penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan yang telah ditentukan oleh Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), pada tahun 2021 PPG Dalam Jabatan akan dilaksanakan dalam 4

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Kualifikasi akademik ini menjadi salah satu persyaratan minimum dalam pemenuhan standar mutu pendidik pada satuan pendidikan. Sepanjang tahun 2020, Pemda DIY tetap mendukung pemenuhan standar kualifikasi pendidik melalui pemberian akses bagi para guru yang akan menempuh studi lanjut	<p>melaksanakan studi lanjut maupun yang mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) dengan dukungan pembiayaan dari Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK). Sesuai instruksi dari Ditjen GTK, di tahun 2021 Pemerintah Daerah Provinsi diminta untuk mengkoordinasikan kesiapan peserta dan melakukan monitoring penyelenggaraan kegiatan PPG. Seiring dengan penetapan persyaratan kualifikasi pendidikan minimum bagi para calon pendidik, peningkatan kompetensi melalui Pendidikan Profesi Guru juga menjadi salah satu tolok ukur kualitas pendidik yang akan meningkatkan mutu satuan pendidikan.</p> <p>Untuk tahun anggaran 2022, dukungan Pemda DIY terhadap peningkatan kompetensi pendidik direncanakan melalui kegiatan penyediaan biaya Pendidikan Profesi Guru (PPG) jenjang pendidikan menengah dan khusus dengan target jumlah guru yang dapat mengikuti pendidikan profesi tersebut sebanyak 100 guru. Alokasi anggaran yang direncanakan sebesar Rp750.000.000,00. Diharapkan melalui pendidikan profesi ini para guru bisa meningkatkan kompetensi sekaligus mendapatkan pengakuan atas kualifikasi yang dimiliki.</p>	angkatan, yaitu pada rentang waktu bulan Maret s.d. Juli 2021, April s.d. Agustus 2021, Juni s.d. Oktober 2021, dan Agustus s.d. Desember 2021. Pemda DIY telah mengkoordinasikan kesiapan peserta dan melakukan monitoring terhadap para peserta PPG Dalam Jabatan Angkatan 1 dan 2. Koordinasi dengan para peserta dilakukan secara daring untuk memastikan persiapan peserta dalam mengikuti tahapan PPG sesuai ketentuan Ditjen GTK. Sampai dengan bulan Desember 2021 telah dilaksanakan monitoring penyelenggaraan PPG Dalam Jabatan Angkatan 1 sampai dengan 4 dan seluruhnya telah dapat diikuti peserta sasaran dengan baik.
4	Pemberian beasiswa kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu perlu terus dipertahankan bahkan ditingkatkan, agar tidak terjadi putus sekolah dan sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan prestasi mereka. Termasuk bagi mereka yang menempuh Pendidikan di perguruan tinggi, pemberian beasiswa tetap di pertahankan. Hal ini untuk memberi kesempatan mahasiswa dari keluarga kurang mampu dapat lulus menjadi sarjana. Pada tahun 2020 telah dilaksanakan pemberian beasiswa Kartu Cerdas untuk 13.400 siswa SMA dan SMK di DIY dengan total anggaran sebesar Rp20.100.000.000,00. Diharapkan pada tahun 2021 dapat direncanakan jumlah penerima beasiswa Kartu Cerdas sebanyak 13.400 siswa. Beasiswa ini diharapkan mampu mengurangi beban ekonomi orangtua siswa dari keluarga kurang mampu sehingga siswa dapat menyelesaikan pendidikan di jenjang pendidikan menengah.	<p>Sebagai bentuk keberlanjutan dukungan terhadap pemenuhan biaya pendidikan siswa dari keluarga kurang mampu di tahun 2020, pada tahun 2021 telah dianggarkan pemberian beasiswa Kartu Cerdas untuk 13.400 siswa SMA dan SMK di DIY dengan total anggaran sebesar Rp20.100.000.000,00. Dengan adanya bantuan pembiayaan ini, diharapkan para siswa jenjang pendidikan menengah yang berlatar belakang dari keluarga kurang mampu dapat menuntaskan pendidikannya. Pemberian beasiswa Kartu Cerdas juga direncanakan untuk berlanjut di tahun 2022 dengan target sasaran 15.000 siswa SMA dan SMK di DIY dengan alokasi anggaran Rp22.500.000.000,00.</p> <p>Sama halnya dengan tahun 2020, pembiayaan di jenjang pendidikan tinggi pada tahun 2021 untuk calon mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu masih diarahkan pada pemanfaatan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah). KIP-Kuliah adalah salah satu upaya yang dilakukan Kemendikbud untuk membantu para lulusan pendidikan menengah berprestasi namun memiliki keterbatasan ekonomi untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi. Informasi lebih lengkap mengenai bantuan pembiayaan di jenjang pendidikan tinggi bisa diperoleh melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi DIY yang membawahi Perguruan Tinggi di DIY.</p>	Beasiswa Kartu Cerdas tahap pertama untuk 6.700 siswa SMA dan SMK di DIY sebesar Rp10.050.000.000,00 telah diluncurkan pada triwulan ke-2 tahun 2021. Beasiswa Kartu Cerdas tahap dua direncanakan akan disalurkan pada triwulan ke-4 tahun 2021 dan telah disalurkan pada bulan November 2021. Total penyaluran beasiswa kartu Cerdas pada tahun 2021 adalah Rp20.100.000.000,00.
5	Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan tahapan regulasi yang sulit untuk dicermati dan dipelajari oleh masyarakat pada umumnya karena terjadi	Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) selalu mengacu kepada regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Pada tahun 2021, regulasi PPDB mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1	Di tahun 2021 PPDB jenjang pendidikan menengah dan khusus di DIY akan mengacu pada regulasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	<p>perubahan hal prinsip pada setiap tahun ajaran. Pemaknaan pungutan yang dilakukan sekolah juga masih menjadi permasalahan yang masih terulang di beberapa sekolah. Oleh karena itu, perlu adanya pencerminan dengan sesama sekolah-sekolah yang menggunakan label/nama internasional dalam hal pelaksanaan pembelajaran, etika dan pembiayaan pendidikan agar tidak terjadi ketimpangan dan kesenjangan pendidikan khususnya di sekolah swasta antara yang peserta didik mampu dan yang tidak mampu.</p>	<p>Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Dengan demikian, penyelenggaraan PPDB DIY tahun 2021 akan berpedoman kepada Permendikbud tersebut dan Peraturan Gubernur DIY mengenai PPDB tahun 2021.</p> <p>Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dalam pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; - Peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan - Pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. <p>Sejalan dengan Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pendanaan Pendidikan pasal 11 menyebutkan bahwa Pengelola satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dalam pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan yang dikelolanya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membebaskan atau meringankan biaya pendidikan bagi peserta didik yang tidak/kurang mampu; - Dapat menarik pungutan biaya satuan pendidikan kepada peserta didik atau orang tua/wali peserta didik; - Dapat menerima bantuan dana pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan - Dapat menerima sumbangan dana pendidikan dari orang tua/wali peserta didik, masyarakat atau pihak lain secara sukarela dan tidak mengikat. <p>Mengacu kepada Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah di atas, satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, terlepas dari kebijakan pengelolaan sekolah oleh yayasan, wajib mengikuti ketentuan untuk membebaskan atau memberikan keringanan biaya pendidikan kepada peserta didik yang kurang/tidak mampu. Terkait dengan penggunaan label internasional dalam pelaksanaan pembelajaran, etika dan pembiayaan pendidikan oleh satuan pendidikan, salah satu faktor yang mempengaruhi adalah adanya tantangan eksternal yang dihadapi satuan pendidikan antara lain kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan perkembangan pendidikan di tingkat internasional. Penggunaan</p>	<p>Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan dengan beberapa penyesuaian dan diturunkan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Tahun Pelajaran 2021/2022.</p> <p>Terkait dengan pungutan pada satuan-satuan pendidikan, pada tahun 2021 Pemda DIY mengacu kepada Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pendanaan Pendidikan pasal 17 yang menyatakan bahwa Pungutan biaya pendidikan pada satuan pendidikan dari peserta didik, orang tua/wali peserta didik dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Didasarkan pada perencanaan investasi dan/atau operasi yang jelas yang dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan; - Perencanaan investasi dan/atau operasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan; - Dimusyawarahkan melalui rapat Komite; - Dimasukkan dalam anggaran tahunan satuan pendidikan; - Disimpan dalam rekening atas nama satuan pendidikan; - Dibukukan secara khusus, terpisah dari dana sumber lain; dan - Paling kurang 20% (dua puluh persen) digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan di luar belanja personalia. <p>Pemda DIY juga mengacu kepada Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah pasal 11 ayat (4) yang menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah melakukan pengendalian kepada SMA dan SMK negeri dan swasta terkait dengan beban biaya pendidikan dari orang</p>

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<p>label internasional ini diharapkan selaras dengan upaya satuan pendidikan menghadapi berbagai tantangan global sekaligus menjaga komitmen pemberian layanan pendidikan yang berkualitas kepada masyarakat tanpa adanya diskriminasi sosial ekonomi.</p> <p>Terkait dengan pembiayaan pendidikan, asumsi kebutuhan biaya operasional tanpa adanya pandemi COVID-19 di jenjang pendidikan menengah DIY tahun 2020 untuk SMA adalah Rp4.950.000,00 - Rp5.150.000,00 per siswa per tahun bergantung pada jurusan yang dipilih sedangkan untuk SMK adalah Rp6.432.000,00 - Rp8.472.000,00 per siswa per tahun bergantung kepada kompetensi keahlian yang dipilih. Dukungan untuk pembiayaan ini diperoleh dari BOSNAS, BOSDA, dan pembiayaan dari masyarakat. Dana BOSNAS di tahun 2021 sebesar rata-rata Rp1.572.000,00 per siswa per tahun untuk SMA dan Rp1.676.000,00 per siswa per tahun untuk SMK. Dengan asumsi kondisi tanpa pandemi, dukungan BOSDA adalah sebesar Rp2.600.000,00 per siswa per tahun untuk SMK Negeri, Rp2.100.000,00 per siswa per tahun untuk SMK Negeri, Rp400.000,00 - Rp600.000,00 per siswa per tahun untuk SMA Swasta, dan Rp550.000,00 - Rp800.000,00 per siswa per tahun untuk SMK Swasta. Dari perbandingan antara kebutuhan dan dukungan pembiayaan, untuk mencukupi pembiayaan operasional SMA Negeri masih dibutuhkan Rp1.278.000,00 - Rp1.478.000,00 per siswa per tahun sedangkan untuk SMK Negeri masih dibutuhkan Rp2.156.000,00 - Rp4.196.000,00 per siswa per tahun. Untuk mencukupi kebutuhan operasional SMA Swasta, masih diperlukan rata-rata Rp2.978.000,00 per siswa per tahun dan untuk SMK Swasta masih dibutuhkan Rp4.206.000,00 - 5.996.000,00 per siswa per tahun. Dengan demikian diharapkan adanya dukungan masyarakat untuk memenuhi biaya operasional satuan pendidikan menengah demi mewujudkan pendidikan yang berkualitas di DIY.</p>	<p>tua/wali/keluarga siswa melalui mekanisme penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah. Berdasarkan kedua Peraturan Daerah tersebut, di tahun 2021 Pemda DIY juga tetap berupaya melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap realisasi anggaran satuan pendidikan menengah guna memastikan anggaran tersebut dimanfaatkan secara tepat untuk pemberian akses pendidikan yang layak dan bermutu kepada masyarakat. Pada akhir tahun 2021 dilakukan kajian kebutuhan unit cost untuk SMA dan SMK di DIY. Diharapkan hasil kajian ini dapat menjadi dasar penyusunan draf Peraturan Gubernur satuan biaya pendidikan untuk SMA dan SMK negeri maupun swasta di DIY.</p>
6	<p>Kesetaraan untuk menikmati pendidikan bagi masyarakat adalah hal yang wajib dan penting. Tujuan utama pasti siswa akan ke sekolah-sekolah favorit/negeri. Sekolah-sekolah swasta yang ada di DIY akhirnya menjadi alternatif bagi peserta didik yang justru banyak dari kalangan keluarga tidak mampu/miskin. Hambatan-hambatan yang terjadi disekolah swasta adalah jauh dari rumah, SPP yang sering nunggak berimbas peserta didik kerap dipanggil BP, dan lain-lain. Menjadikan konsentrasi belajar mengajar jadi turun dan hilang. Sedangkan menurut Pemda DIY anggaran untuk sekolah swasta kira-kira hanya 4 milyar. Pemerintah DIY</p>	<p>Dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pendanaan Pendidikan pasal 6 ayat (2) disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat membantu pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Pada pasal 11 disebutkan pula bahwa Pengelola satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dalam pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan yang dikelolanya dapat menerima bantuan dana pendidikan dari Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah ini sejalan dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah pasal 8 yang menyebutkan bahwa:</p>	<p>Pemda DIY berupaya tetap menjamin kesetaraan dalam memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas bagi para peserta didik tanpa membedakan kondisi ekonomi, baik di satuan pendidikan menengah negeri maupun swasta. Untuk satuan pendidikan menengah swasta, pada tahun 2021 Pemda DIY melakukan pencairan BOSDA pada triwulan 4 guna membantu penyelenggaraan operasional sekolah/madrasah swasta. Total pencairan BOSDA Swasta adalah Rp15.559.080.000,00. Beasiswa Kartu Cerdas tahap pertama juga telah dicairkan pada triwulan kedua sebesar Rp10.050.000.000,00 bagi 6.700 siswa kurang mampu baik di satuan pendidikan negeri dan swasta. Pada triwulan ke-4</p>

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	<p>harus melakukan upaya untuk bisa membantu peserta didik agar mereka dapat menikmati proses belajar mengajar dengan baik. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)/Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa) dan Penyediaan Beasiswa Pendidikan Menengah untuk siswa dari keluarga tidak mampu seyogyanya terus dievaluasi agar dilapangan berjalan dengan lancar. Terlebih pada masa Pandemi COVID-19 yang belum tahu kapan selesainya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah Daerah memberikan bantuan biaya pendidikan kepada siswa SMA dan SMK dari masyarakat miskin/kurang mampu dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah. - Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk beasiswa. - Siswa dari masyarakat miskin/kurang mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima bantuan biaya pendidikan dengan syarat memiliki dan dapat menunjukkan dokumen resmi dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, atau instansi pemerintahan lainnya yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan benar-benar miskin/tidak mampu. - Sekolah melaksanakan pendataan siswa yang miskin/kurang mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mengusulkan bantuan pendidikan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas. <p>Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemda DIY pada tahun 2021 berkomitmen untuk tetap memberikan dukungan terhadap satuan-satuan pendidikan menengah swasta melalui penyaluran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan beasiswa pendidikan menengah bagi peserta didik kurang mampu, baik di satuan pendidikan negeri maupun swasta. Pada tahun 2021 selain menganggarkan BOSDA sebesar Rp22.220.115.000,00 untuk satuan-satuan pendidikan menengah swasta, Pemda DIY menganggarkan pula Beasiswa Kartu Cerdas sebesar Rp20.100.000.000,00 bagi 13.400 siswa kurang mampu dan Beasiswa Jaminan Kelangsungan Pendidikan bagi 225 orang sebesar Rp900.000.000,00. Beasiswa Jaminan Kelangsungan Pendidikan ini ditujukan bagi para peserta didik SMA dan SMK yang sudah lulus namun belum bisa melakukan pengambilan ijazah karena masih terhambat dalam penyelesaian administrasi sekolah.</p> <p>Di tahun 2022 Pemda DIY merencanakan alokasi BOSDA sebesar Rp37.033.525.000,00, Beasiswa Kartu Cerdas untuk 15.000 siswa SMA dan SMK dengan alokasi anggaran Rp22.500.000.000,00, dan Beasiswa Jaminan Kelangsungan Pendidikan bagi 225 orang sebesar Rp900.000.000,00. Diharapkan melalui bantuan operasional dan beasiswa ini, kebutuhan operasional satuan pendidikan swasta dan kebutuhan personal siswa untuk pembelajaran dapat terpenuhi secara layak. Pemda DIY juga terus melakukan pemantauan dan evaluasi berkala untuk penyaluran dan pemanfaatan bantuan operasional serta beasiswa pendidikan menengah guna memastikan seluruhnya direalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku.</p>	<p>beasiswa Kartu Cerdas Tahap 2 telah diluncurkan sebesar Rp10.500.000.000,00 sehingga total pencairan adalah sebesar Rp20.100.000.000,00 untuk 13.400 siswa kurang mampu. Beasiswa Jaminan Kelangsungan Pendidikan sebesar Rp900.000.000,00 untuk 225 siswa lulusan dicairkan pada triwulan keempat tahun 2021 guna memberikan bantuan kepada para peserta didik pendidikan menengah yang sudah lulus namun masih memiliki kewajiban administratif yang belum terselesaikan. Diharapkan ketiga bantuan ini dapat mendukung penyelenggaraan pendidikan yang nondiskriminatif dan berkualitas di DIY serta meringankan beban biaya pendidikan bagi para orangtua/wali siswa yang kurang mampu.</p>

b) URUSAN KESEHATAN

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	<p>Kondisi kesehatan di DIY sudah relatif lebih baik dengan meningkatnya pelayanan kesehatan yang ditandai dengan akses masyarakat yang semakin tinggi, seperti :</p> <p>a. Akreditasi layanan kesehatan, dari 76 Rumah Sakit di wilayah DIY terdapat 39 Rumah Sakit terakreditasi utama dan paripurna, 121 Puskesmas di DIY semua telah terakreditasi; b. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Grhasia dalam hal pelayanan kesehatan jiwa paripurna, narkotika, psikotropika; dan c. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan paru dan saluran pernafasan. Semoga ini dapat dipertahankan dalam masa transisi Pandemi COVID-19 sebagai antisipasi bagi warga yang terkena dampak.</p>	<p>Dinas Kesehatan DIY berkomitmen tinggi untuk selalu meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di DIY. Dalam masa Pandemi COVID-19 ini Dinas Kesehatan DIY telah melakukan banyak hal untuk mewujudkan komitmen tersebut, sebagai untuk mempertahankan kondisi pelayanan kesehatan yang sudah baik, antara lain sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi secara daring tentang komitmen menjaga mutu fasilitas pelayanan kesehatan baik Rumah Sakit, Puskesmas dan Klinik di seluruh DIY. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Februari 2021 dengan peserta penanggungjawab mutu Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Tim Mutu Rumah Sakit, Puskesmas dan Klinik. - Pengiriman Komitmen menjaga mutu Rumah Sakit, Puskesmas dan Klinik dengan dokumen surat pernyataan menjaga mutu dan diteruskan kepada Kementerian Kesehatan bagi seluruh Rumah Sakit, Klinik dan Puskesmas. Pengiriman dokumen dikirimkan melalui email : may3subdit@gmail.com - Koordinasi Mutu Akreditasi Pelayanan Dasar pada tanggal 22 Februari 2021. Kegiatan ini khusus dilaksanakan untuk Kabupaten Kulon Progo, selanjutnya akan dilakukan untuk Kabupaten/Kota lainnya. - Sosialisasi Indikator Mutu Rumah Sakit di masa Pandemi COVID-19 di DIY pada tanggal 22 Maret 2021. Selama masa Pandemi COVID-19 Rumah Sakit akan menyampaikan laporan kesiapan di masa Pandemi COVID-19 secara online melalui web : http://103.74.143.45/ubm/ - Webinar Bimtek Pelaksanaan Mutu Akreditasi Klinik Pratama tanggal 23 Maret 2021. Kegiatan ini untuk mereview kembali tentang pentingnya menjaga mutu bagi Klinik Pratama selama belum ada kegiatan survey akreditasi. Kegiatan ini mengundang narasumber dari Kementerian Kesehatan. - Rapat Koordinasi Pernyataan Komitmen Mutu Fasyankes tanggal 26 Maret 2021. Kegiatan ini dilakukan dengan penanggungjawab mutu Dinkes Kabupaten/Kota dalam rangka menjaga mutu Fasyankes di DIY. - Webinar Bimtek Pelaksanaan Mutu Akreditasi Klinik Pratama 22 April 2021. Kegiatan ini untuk mereview kembali tentang pentingnya menjaga mutu bagi Klinik Pratama selama belum ada kegiatan survey akreditasi. Kegiatan ini mengundang nara sumber dari Klinik yang sudah menerapkan mutu dengan baik dan terakreditasi paripurna. - Melakukan pendampingan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Puskesmas untuk melakukan penyesuaian pelayanan dalam masa Pandemi COVID-19 melalui Sosialisasi Petunjuk Teknis Pelayanan Puskesmas pada Masa Pandemi COVID-19. 	<p>Meskipun sedang berada pada masa Pandemi COVID-19, Dinas Kesehatan DIY melakukan berbagai strategi agar dapat tetap melayani masyarakat dengan baik, serta mampu menanggulangi dan mencegah penyebaran COVID-19. Sehingga semakin mengurangi masyarakat yang dapat terdampak COVID-19.</p>

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pendampingan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Puskesmas dalam hal pemanfaatan SISROUTE sebagai alat komunikasi rujukan antar Fasyankes. - Kerja sama dengan FK KMK UGM, RSUP DR. Sardjito dan Dinas Kominfo DIY dalam melakukan bridging aplikasi RS Online dan aplikasi SPGDT untuk mempermudah Fasyankes melihat ketersediaan tempat tidur untuk merujuk pasien. - Mendorong terbitnya Surat Edaran Gubernur DIY No. 10/SE/II/2021 tentang Pemanfaatan Aplikasi Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) sebagai Sistem Informasi Data Ketersediaan Tempat Tidur untuk Rujukan Pasien Corona Virus Disease-19. - Melakukan pendampingan pemanfaatan SISROUTE ke Puskesmas. - Bersama AHS FKMK UGM mewujudkan sistem rujukan maternal neonatal untuk menurunkan AKI dan AKB. - Melakukan sosialisasi registrasi Klinik sebagai syarat hak akses penggunaan SISROUTE. - Melakukan pertemuan reviu PHCDP Puskesmas sebagai salah satu upaya peningkatan layanan kesiapsiagaan bencana di masa Pandemi COVID-19. - Melakukan pendampingan pada praktek mandiri bidan (PMB) melalui sosialisasi juknis pelayanan di tempat mandiri bidan pada masa Pandemi COVID-19. - Memasukkan keaktifan penggunaan SISROUTE oleh RS sebagai salah satu syarat perpanjangan PKS dengan BPJS. - Melakukan pembinaan melalui visitasi perizinan Rumah Sakit. - Memantau setiap hari keaktifan update data ketersediaan tempat tidur Rumah Sakit. - Mendorong pemenuhan jaringan internet untuk mendukung pelayanan kesehatan melalui fasilitasi koordinasi dengan Bakti Kominfo. - Mendorong akses pelayanan spesialis untuk mengurangi angka rujukan non spesialis melalui fasilitasi usulan pemenuhan sarpras dan pembiayaan telemedicine. 	
2	Perlu dukungan yang nyata dan serius untuk menemukan dan mengobati penyakit menular terutama TB untuk mencapai tujuan zero TB ditahun 2030. Adanya pandemi COVID-19 ditahun 2020 harus memberi pelajaran berharga pada kita bahwa penyakit menular seperti TB dan HIV AIDS perlu ditangani secara serius agar tidak terjadi penularan.	<p>Masalah TB:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk menuju eliminasi TB 2030 ada dua hal pokok yang harus didukung semua sektor : - Pasif : skrinning TBC terhadap semua pengunjung fasilitas kesehatan - Aktif : skrinning TBC terhadap semua orang yang kontak dengan pasien di masyarakat (kontak investigasi) maupun skrinning TBC terhadap semua orang tanpa kecuali 	<p>Skrinning secara pasif maupun aktif ini diharapkan mampu menginvestigasi orang yang memungkinkan dapat tertular TBC</p> <p>Meningkatkan pencegahan TBC kepada semua orang dan semua kelompok umur sehingga mengurangi kemungkinan untuk terjangkit TBC.</p>

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<p>- Mencegah semua orang yang belum sakit TBC tetapi berisiko sakit TBC agar dalam perjalanan alamiahnya tidak menjadi sakit TBC dengan cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan cakupan imunisasi BCG • Memberikan pengobatan pencegahan TBC (TPT : Tuberculosis Prevention Treatment) kepada semua orang dan semua kelompok umur yang kontak dengan pasien TBC terkonfirmasi bakteriologis (kuman TB positif) tetapi tidak terbukti sakit TBC. <p>Diluar dua hal pokok tersebut, upaya lintas sektoral adalah dukungan dalam hal :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan status gizi masyarakat - Perbaikan kualitas rumah tempat tinggal menuju rumah sehat <p>Masalah HIV</p> <p>Penanggulangan HIV dan AIDS tidak hanya merupakan tugas pemerintahan atau pelaku kesehatan saja. Tetapi juga merupakan tugas seluruh masyarakat. Dalam penanggulangan HIV dan AIDS masyarakat secara mandiri dapat :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan promosi penanggulangan HIV dan AIDS melalui komunikasi, informasi, dan edukasi; dan/atau - Melakukan rehabilitasi sosial kepada ODHA, OHIDHA dan populasi kunci sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 Perda DIY No. 12 Tahun 2010 sesuai dengan kemampuannya <p>Dinas Kesehatan DIY juga sudah menyiapkan Peer Educator HIV bagi Kelompok Disabilitas, dikarenakan sudah terdata 24 Difabel dengan HIV positif. Maka Dinas Kesehatan DIY perlu penguatan ke kelompok Disabilitas mengenai masalah HIV dan AIDS ini. Dinas Kesehatan DIY juga akan meningkatkan penyebaran informasi HIV melalui pembuatan media yang sesuai dengan disabilitas mereka. Selain itu di media sosial juga dilakukan penguatan, untuk kontennya Dinas Kesehatan DIY berikan kepada Dinas Kominfo.</p>	<p>Lintas sektoral dapat saling bekerjasama dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.</p>
3	<p>Berbagai upaya untuk menekan prevalensi penyakit tidak menular terus digalakan. Kampanye hidup sehat seperti Germas perlu terus menerus di lakukan. Pandemi COVID-19 mendorong secara massif masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kesehatan diri dan lingkungan. Hal yang positif dan hal itu perlu terus di pertahankan. Jangan hanya sesaat ketika terjadi pandemi semata.</p>	<p>Pandemi ini telah memunculkan juga inovasi strategi komunikasi yang lebih baik berbasis teknologi sehingga edukasi kepada masyarakat terkait kebersihan dan kesehatan diri dan lingkungan dapat dilakukan secara efektif dan efisien melalui upaya peningkatan literasi untuk perbaikan perilaku.</p> <p>Menggalakan gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) dengan menekankan pada upaya perubahan gaya hidup sehat di masyarakat melalui sebuah gerakan yang bertujuan untuk memasyarakatkan budaya hidup sehat</p>	

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<p>serta meninggalkan kebiasaan dan perilaku masyarakat yang kurang sehat. Penerapan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19 dengan salah satunya melakukan sosialisasi gerakan 3M yaitu mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak.</p> <p>Selain itu terbentuknya Forum Sosialisasi Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan guna mengintegrasikan pesan-pesan mengenai COVID-19 yang akan disampaikan pada masyarakat, sehingga sumber daya yang digunakan menjadi lebih efisien dan jangkauan penyebaran informasinya menjadi lebih luas. Telesurvey tanggapan masyarakat terhadap COVID-19 juga merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana sikap dan harapan masyarakat dalam penanganan COVID-19. Pemahaman masyarakat terhadap protokol kesehatan COVID-19 sudah cukup baik, 93,36% responden selalu menggunakan masker, 80,43% responden selalu cuci tangan pakai sabun, 66,52% responden tidak berkerumun.</p>	

c) URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

(1) SUB URUSAN PENATAAN RUANG

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Perlu peningkatan jumlah penduduk yang mengakses sanitasi dengan kemudahan pelayanan sanitasi serta pendidikan dan pendampingan terhadap proses pembuatan sistem sanitasi dan instalasi Pengelolaan Air Limbah. Perlu sosialisasi yang massif ke masyarakat bahwa Sanitasi, Pengelolaan Air Limbah, Sampah dan Drainase merupakan hal penting yang sangat terkait dengan peningkatan kualitas lingkungan terutama di kawasan pemukiman	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mengoptimalkan pelaksanaan pengelolaan sampah di bagian hulu dengan pelaksanaan pengelolaan sampah di TPS 3R dan Bank Sampah serta pelaksanaan pembangunan TPST di Kabupaten/Kota sebagai upaya dalam pengurangan sampah yang akan diangkut ke TPA. 2) Pelaksanaan penyelenggaraan SPAM Regional Kamijoro dan SPAM Regional Banyusoco sebagai bentuk meningkatkan akses air minum kepada masyarakat di DIY serta pelaksanaan optimalisasi perbaikan jaringan PDAM untuk mengurangi tingkat kehilangan air akibat kebocoran pipa. Selain itu, pelaksanaan bantuan hibah pipa dan aksesorisnya kepada kelompok masyarakat pengelola SPAM Perdesaan yang tergabung dalam forum PAMMASKARTA merupakan salah satu bentuk peningkatan akses air minum ke masyarakat yang daerahnya sulit dijangkau oleh PDAM. 3) Tahun 2021 telah dianggarkan melalui dana Keistimewaan untuk kegiatan pembentukan kelembagaan dan juga operasional kelembagaan yang berfungsi untuk memfasilitasi dan mewadahi peran serta masyarakat petani yang tergabung dalam P3A/IP3A/ 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan pengoptimalan pelaksanaan pengelolaan sampah di bagian hulu merupakan salah satu solusi dalam pengurangan sampah yang akan dibawa ke TPA Piyungan b. Pelaksanaan penyelenggaraan SPAM baik SPAM Regional, SPAM IKK, maupun SPAM Perdesaan merupakan bentuk peningkatan pelayanan akses air minum kepada masyarakat di DIY. c. Meningkatkan kinerja dari petugas operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan peningkatan keaktifan masyarakat petani melalui P3A/IP3A/GP3A karena pada saat ini ada beberapa daerah irigasi yang belum memiliki P3A/IP3A/GP3A d. Memperjelas pembagian kewenangan pengelolaan Drainase antara kewenangan pusat, provinsi, kabupaten dan kota agar dapat mewujudkan pengelolaan drainase yang ramah lingkungan dan juga menuntaskan genangan yang selalu terjadi.
2	Pola penanganan sampah harus dilaksanakan dengan mengurangi volume sampah per tahunnya dengan cara memassifkan pengurangan sampah 22 sejak dari hulu yaitu dari rumah tangga. Untuk itu perlu ditingkatkan program pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat dengan Bank Sampah yang menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) serta menambah titik-titik TPS3R yang dapat menjadi penyangkutan sampah sebelum masuk ke TPA Piyungan. Penerapan Prinsip 3R dalam pengelolaan sampah juga dapat memberikan insentif pendapatan bagi		

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	para pengelola sampah 3R. Selain itu, perlu diadakan Pemanfaatan Teknologi Pengolahan sampah berskala kecil yang dapat ditempatkan diTPS3R sebelum kemudian diolah di TPA Piyungan yang menggunakan teknologi berskala lebih besar.	GP3A maupun petugas operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi baik sarana dan prasarannya serta komisi irigasi untuk dapat menjaga dan melestarikan fungsi lahan daerah irigasi agar tetap dapat berfungsi dengan semestinya	e. Pemeliharaan jalan merupakan salah satu aspek yang penting dalam menjaga kemantapan jalan. Tiga pilar antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam sistem Penyelenggaraan Jalan harus berjalan seimbang dan seirama. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan khususnya dalam pemeliharaan jalan sangat diperlukan khususnya terkait informasi kerusakan jalan. Pemerintah dan swasta (penyedia jasa) bisa langsung merespon apabila ada kerusakan jalan yang bisa membahayakan pengguna jalan.
3.	Drainase juga menjadi bagian dari peningkatan kualitas lingkungan yang terkait dengan Sanitasi dan Sampah. Dengan sistem drainase yang baik maka limbah air masyarakat dapat terkelola dengan baik sehingga tidak menimbulkan dampak negatif berupa genangan terutama di kawasan perkotaan dan kawasan padat penduduk. Kiranya, perlu dilakukan evaluasi sistem drainase di DIY sebelum menimbulkan dampak yang lebih besar	4) Selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 akan melakukan koordinasi antar instansi untuk menentukan dan menetapkan status kepegawaian Sumber Daya Manusia petugas pengelola irigasi. 5) Pada Tahun 2022 akan dilakukan Pembangunan Saluran Drainase Ngestiharjo (Tahap2) untuk menuntaskan pekerjaan konstruksi yang masih belum selesai dan juga akan tetap dilakukan Pemeliharaan pada saluran yang sudah terbangun yaitu di Saluran Drainase di MM UGM dan di Desa Ngestiharjo, Kasihan, Bantul agar tetap dapat berfungsi secara maksimal.	f. Konektivitas antar daerah dengan potensi ekonomi dan daerah perbatasan bisa terwujud dengan ada nya Peningkatan dan pembangunan jalan baru. Prioritas pembangunan diarahkan kepada 2 wilayah yang mempunyai aspek tersebut.
4	Dengan adanya pembangunan SPAM Kartamantul yang mendapatkan pendanaan dari APBN dan telah dibentuknya Perusahaan Daerah Air Minum Tirtatama Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Perda No. 5 Tahun 2020 sebagai pengelolanya berikut Penyertaan modal melalui Perda No. 10 tahun 2020 diharapkan dapat memberikan peningkatan akses masyarakat terhadap air minum yang cukup signifikan	6) Pada tahun 2022 akan dilaksanakan penyusunan Roadmap Kewenangan Drainase guna memperjelas kewenangan pengelolaan drainase di DIY 7) Pemerintah DIY membuat sistem pemeliharaan jalan yang dapat melibatkan partisipasi masyarakat dengan mengedepankan prinsip respon cepat (<i>fast respon</i>) 8) Dengan sistim Kontraktual dengan Penyedia Jasa, Pemerintah Daerah DIY dalam pemeliharaan fungsi jalan secara administrasi bisa dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya.	g. Peningkatan pembinaan dan pengawasan Pemerintah DIY terhadap pelaku jasa konstruksi.
5	Upaya pemerintah DIY untuk meningkatkan luas fungsional lahan daerah irigasi dengan melakukan rehabilitasi jaringan-jaringan irigasi patut diapresiasi namun yang juga perlu mendapatkan perhatian adalah sumber daya manusia pengelola jaringan irigasi antara lain tenaga-tenaga operasional lapangan yang dapat menjaga dan melestarikan fungsi lahan daerah irigasi agar tetap dapat berfungsi dengan semestinya. Selain itu partisipasi masyarakat pengguna jaringan irigasi perlu ditingkatkan untuk turut serta memelihara fungsi irigasi tersebut. Untuk itu perlu memperkuat payung hukum sebagai bentuk dukungan pemda DIY terhadap tenaga-tenaga operasional di lapangan dengan memperhatikan aspek sosial dan budaya terutama terkait agenda Keistimewaan DIY	9) Konektivitas antar daerah yang memiliki potensi perekonomian yang prospektif dan juga di daerah perbatasan dengan provinsi lain ditingkatkan kemantapan ruas jalan baik itu dengan Peningkatan Jalan atau Pembangunan Jalan Baru. 10) Akan diselenggarakan pembekalan dan sertifikasi keahlian konstruksi bagi 453 orang; 11) Pengelolaan aplikasi, media komunikasi, dan penyediaan informasi penyelenggaraan konstruksi melalui layanan KLINIK KONSTRUKSI, dan SIPJAKI; 12) Pengendalian mutu pekerjaan konstruksi sekaligus pembinaan bagi pelaksana pekerjaan melalui layanan pengujian teknis yang terstandardisasi (Terakreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017);	
6	Selain pembangunan jalan, aspek yang tak kalah penting adalah pemeliharaan fungsi jalan yang mengalami kerusakan yang dapat mengganggu akses masyarakat atas jalan tersebut yang terkadang dapat menimbulkan kecelakaan. Oleh karena itu, Pemerintah DIY perlu membuat sistem pemeliharaan jalan yang dapat	13) Publik diharapkan dapat terus berpartisipasi aktif mengawal tahapan pembangunan baik secara langsung maupun melalui media komunikasi yang telah tersedia, yaitu melalui Call Centre 0852 0033 0000;	

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	melibatkan partisipasi masyarakat dengan mengedepankan prinsip respon cepat (fast respon) dan didukung oleh Teknologi Informasi dan Media Sosial		
7	Perlu menjadi perhatian adalah konektivitas antar daerah yang memiliki potensi perekonomian yang prospektif namun terkendala masalah jalan seperti daerah sentra pertanian, daerah tujuan wisata dan juga wilayah perbatasan. Dengan munculnya ikon ikon pariwisata yang baru bermunculan masih terkendala dengan luasan dan kualitas jalan yang 24 menimbulkan kemacetan seperti di daerah jalan ke arah Gunungkidul dan daerah lainnya.		
8	Dengan akan dibangunnya jalan Tol Yogyakarta Bawen dan Yogyakarta-Solo perlu perhatian pemerintah DIY dalam hal pembebasan lahan sehingga tidak merugikan warga terdampak dan justru dapat memberikan keuntungan bagi mereka serta daerah-daerah sekitar. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan untuk mengusulkan tambahan rest area yang dapat menampung usaha bidang ekonomi warga sekitarnya		
9	Upaya pembinaan dan pengawasan Pemerintah DIY terhadap pelaku jasa konstruksi perlu ditingkatkan dan perlu dipertimbangkan untuk melibatkan publik dalam memberikan informasi yang terverifikasi atas profesionalitas pelaku jasa konstruksi sehingga dapat meningkatkan profesionalitas penyelenggaraan jasa konstruksi yang berdampak pada peningkatan kualitas pekerjaan yang dilaksanakan		
10	Perlu peningkatan konsistensi dalam implementasi RTRW, dan sosialisasi yang massif ke masyarakat luas tentang pentingnya RTRW Provinsi dan Penataan Ruang Strategis Keistimewaan bagi pembangunan yang memperhatikan aspek ekonomi, sosial budaya, dan Lingkungan Hidup	<p>Terkait dengan peningkatan konsistensi dalam implementasi RTRW pada tahun 2021 telah dilaksanakan beberapa aktivitas kegiatan berupa, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi keterpaduan indikasi program. - Publikasi terkait dengan informasi tata ruang yang dikemas melalui talkshow; - Publikasi terkait dengan informasi tata ruang yang ditayangkan di media massa (media cetak); <p>Kegiatan sosialisasi yang sudah dilakukan pada tahun 2021, yaitu Penyeberluasan informasi dokumen tata ruang (Perdais Nomor 2 Tahun 2017) melalui sosialisasi yang dilaksanakan pada Desa/ Kelurahan di 4 Satuan Ruang Strategis dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang regulasi penataan ruang keistimewaan.</p>	Meningkatkan pemahaman kepada masyarakat tentang regulasi penataan ruang baik secara umum maupun dalam cakupan satuan ruang strategis (SRS) khususnya terkait dengan Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DIY dan Perdais Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, sehingga diharapkan kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat ketercapaiannya

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		Model kegiatan yang disebutkan pada poin 1 dan 2 akan menjadi aktivitas kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun akan datang dengan melibatkan pihak terkait	

d) URUSAN KENTENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Peningkatan Operasi Yustisi dan Non Yustisi untuk menertibkan reklame tidak berijin atau yang melanggar PERDA, penertiban penambangan liar, penertiban pedagang miras, mengawasi pelaksanaan PTKM.	Pemerintah Daerah DIY pada Tahun Anggaran 2021 memiliki program kegiatan penanganan terhadap pelanggaran Perda & Perkada melalui operasi Yustisi dan Non Yustisi sebanyak 86 kali. Khusus untuk operasi pelanggaran reklame, penambangan liar dan operasi minuman beralkohol sebanyak 47 kali, sedangkan untuk operasi pelanggaran Perda dan Perkada yang lainnya sebanyak 39 kali.	Tujuan diadakannya operasi baik Yustisi maupun Non Yustisi Perda dan Perkada di DIY adalah untuk memberikan efek jera kepada para pelanggar serta mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat
2	Membangun budaya tertib di masyarakat melalui berbagai media sosialisasi maupun internalisasi nilai-nilai ketertiban.	Dalam rangka membangun budaya tertib di masyarakat, Pemda DIY pada Tahun Anggaran 2021 memiliki program kegiatan sosialisasi Perda dan Perkada sebanyak 15 kali dengan target sebanyak 750 warga masyarakat. Selain hal tersebut Pemda DIY juga melakukan internalisasi nilai-nilai ketertiban melalui Kader Penegak Perda dan Perkada sebanyak 5 kelompok Kader	
3	Penanganan Penyakit Masyarakat dengan menegakkan aturan tindak pidana ringan kepada warga masyarakat yang melanggar sebagaimana yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah.	Penanganan penyakit masyarakat yang meliputi Prostitusi dan minuman beralkohol Pemda DIY sampai dengan bulan Mei 2021 telah melakukan operasi tipiring sebanyak 14 kali	

e) URUSAN SOSIAL

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Segara menyelesaikan masalah pendataan jumlah orang miskin, sehingga pemerintah baik provinsi maupun kabupaten dan desa mempunyai data yang sama (terkonsolidasi). Sehingga tidak timbul masalah setiap kali ada peristiwa penting pemerintahan. Validasi data keluarga miskin yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).	Dalam rangka untuk memperoleh data kemiskinan yang lebih valid dan update maka Dinas Sosial DIY bekerjasama dengan BPS Provinsi DIY, OPD DIY dan Dinas Sosial Kab/Kota sudah membuat system Manunggal Raharja pada akhir tahun 2021 dengan tujuan untuk : melakukan integrasi dan identifikasi data, melakukan perhitungan untuk menentukan tingkat kesejahteraan social dengan menggunakan formula Proxy Mean Test (PMT) berdasarkan nilai koefisien dan garis kemiskinan yang dikeluarkan oleh BPS, memetakan data penerima bantuan sosial yang bermasalah serta merekomendasikan kepada Kabupaten/Kota terkait permasalahan data tersebut untuk dilakukan verifikasi dan validasi ulang terkait data tersebut. Sumber data yang diolah adalah Data DTKS, data penerima program, data PPKS.	Adanya kesepakatan bersama antara Dinas Sosial DIY dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota untuk berkoordinasi melakukan perbaikan data Bantuan Sosial dan data DTKS sehingga menjadikan data yang tepat, akurat, dan bersifat satu data.

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
2	Dalam penanganan permasalahan sosial pemerintah daerah, kami berharap tidak hanya menangani langsung permasalahan sosial terhadap PMKS, tetapi juga mempunyai tugas dan kewajiban untuk mendorong tumbuh kembangnya Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Dimana PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/ atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan sebagai penunjang keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial.	Dinas Sosial DIY telah mendorong kepada Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PPKS) untuk selalu berperan menangani masalah sosial yang ada diantaranya dengan memberikan bantuan hibah untuk operasional bagi PSKS : Karang Taruna, Lembaga Kesejahteraan Sosial(LKS) yang menangani anak, disabilitas, Anak yang berhadapan dengan hukum, Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3). Bantuan sosial di LKS Lanjut Usia, ABH, Anak Terlantar dan anak Balita Terlantar untuk memberikan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS binaanya. Pemberian tali asih kepada TKSK dan Tagana. Peran PSKS juga dilibatkan dalam pendampingan program/kegiatan, maupun pemebrrian bantuan sosial.	PSKS dapat membantu langsung menangani dan mencegah timbulnya serta berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lingkungan sekitarnya.

2) URUSAN YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

a) URUSAN URUSAN TENAGA KERJA

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	DPRD DIY mendorong agar jumlah TPT terus dapat diturunkan dengan meningkatkan berbagai upaya memberi akses kepada Angkatan kerja yang ada baik dalam bentuk pelatihan, bursa tenaga kerja maupun usaha-usaha lainnya.	Permasalahan ketenagakerjaan adalah multidimensional, sehingga penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) akan diintervensi secara multi sektor. Dengan dibentuknya Komite Vokasi dan Produktivitas Daerah (KVPD) melalui Surat Keputusan Gubernur No. 30/TIM/2021, pada tahun 2021 dalam proses menyusun link and match dari sisi demand driven yang bermuara pada strategi/rencana aksi baik dari rumpun vokasi maupun rumpun produktivitas yang akan dilakukan oleh OPD-OPD pembina sektor, dunia usaha dan lembaga pendidikan tinggi.	Mempersempit kesenjangan “link and match” antara kualifikasi yang dimiliki oleh angkatan kerja dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh pasar kerja/dunia kerja
2	Berdasarkan data Angkatan kerja yang masih berstatus penganggur di peroleh data bahwa tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DIY pada Agustus 2020 sebesar 4,57%, mengalami peningkatan 1,39 %poin dibanding TPT Agustus 2019 (3,18%). Penduduk bekerja DIY sebanyak 2.126.000 orang, berkurang 48.000 orang dari Agustus 2019. Dengan profil demikian, potensi Angkatan kerja DIY semestinya punya kualitas yang bias bersaing dengan daerah lainnya. Adanya pendapat yang mengatakan bahwa Angkatan kerja DIY tidak berminat untuk kerja diluar DIY perlu cek kebenarannya. Jika benar demikian perlu dicarikan jalan keluarnya, mengingat bahwa kesempatan kerja di DIY terbatas.	Untuk menjawab bahwa “semestinya angkatan kerja DIY punya kualitas yang bisa bersaing dengan daerah lain serta angkatan kerja DIY tidak berminat untuk kerja diluar DIY”, telah dan akan dilakukan langkah-langkah sbb : - Pada tahun 2021 disusun Grand Desain Pembangunan Karakter Angkatan kerja Istimewa dan Pedoman pelaksanaan sosialisasinya. - Dimulai pada TW III tahun 2021 akan dilakukan sosialisasi pembangunan karakter angkatan kerja istimewa. - Sosialisasi Pembangunan Karakter Angkatan kerja Istimewa akan dilakukan secara berkelanjutan pada tahun-tahun selanjutnya.	Merubah mindset angkatan kerja agar memiliki karakter Angkatan Kerja Istimewa yaitu memiliki kompetensi dan daya juang yang baik serta tetap memegang teguh semangat ke Ngayogyakarta
3	Permasalahan ketenagakerjaan DIY pada tahun 2020 semakin kompleks dengan adanya Pandemi COVID-19. Kondisi ekonomi yang memburuk memaksa banyak pelaku usaha melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), merumahkan karyawan dan mengurangi jam kerja. Menurut data dari	Terobosan untuk mengurangi dan mengantisipasi dampak COVID-19 sektor ketenagakerjaan :	Menyiapkan SDM DIY siap memasuki pasar kerja baik di sektor formal maupun di sektor informal

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	BPS terdapat 540.120 orang penduduk DIY yang terdampak COVID-19, terdiri dari pengangguran (3.370 orang), Bukan angkatan kerja (22.830 orang), Sementara tidak kerja (36.570 orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja (448.350 orang). Mohon kepada Pemda DIY dapat membuat terobosan baru untuk mengantisipasi hal tersebut diatas agar tidak menjadi sisi negative yang berkepanjangan.	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas SDM melalui Pelatihan Keterampilan (Upskilling & Reskilling), pemagangan dan sertifikasi kompetensi, agar Angkatan Kerja memiliki kesempatan yang lebih besar untuk masuk ke pasar kerja formal - Mengefektifkan perantara kerja untuk mempertemukan pemberi kerja dan pencari kerja, melalui informasi pasar kerja, Job Fair yang dilakukan secara tatap muka dan menggunakan teknologi informasi. - Perluasan kesempatan kerja dengan Pembentukan Kewirausahaan melalui pembentukan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dan Mobile Training Unit (MTU) dengan kejuruan-kejuruan yang disesuaikan trend saat ini misal design grafis, digital merchandise, digital marketing. - Optimalisasi sosialisasi dan pendampingan pendaftaran dan pelatihan Kartu Prakerja. - Pemberian Kerja Cepat melalui Padat Karya 	

b) URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Optimalisasi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga, dalam pencegahan pernikahan usia dini, kehamilan yang tidak direncanakan, dan perilaku kekerasan dikalangan remaja.	<p>Implementasi Fungsi Keluarga, yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK R) - Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) - Sosialisasi Perlindungan Anak terpadu berbasis Masyarakat (PATBM) - Pelatihan Kader Ketahanan Keluarga (Konselor Keluarga) - Sosialisasi Fungsi Keluarga - Sosialisasi Kebijakan ketahanan keluarga - Advokasi Kebijakan Ketahanan Keluarga - Sosialisasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KTPA) - Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak - Sosialisasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) - Pembinaan Sekolah Ramah Anak (SRA) - Pembinaan Forum Anak (Tingkat Daerah, Kab/Kota, Kecamatan dan Desa) <p>Pembahasan Rapergub “Strategi Pembangunan Ketahanan Keluarga” sebagai tindak lanjut amanat {Perda 7 tahun 2018 Tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga</p>	Optimalisasi pelaksanaan Perda 7 tahun 2018 Tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan pendidikan ketahanan keluarga.

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		Koordinasi terkait penanganan kekerasan dikalangan remaja dengan lintas sektor sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Kepolisian Daerah (POLDA) - Kepolisian Resort (POLRES) - Balai Pemasyarakatan (BAPAS) - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (DIKPORA) - Dinas Sosial (DINSOS) - Dinas Kesehatan (DINKES) - Pengadilan - Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK). Pada tahun 2022 direncanakan akan dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan Pojok Konsultasi dan Pembelajaran Keluarga (POKSI PUSPAGA) • Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) • Melanjutkan kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2021 	
2	Perlunya upaya yang lebih progresif guna peningkatan kepemilikan legalitas keluarga sebagai usaha mewujudkan ketahanan keluarga. Hal ini karena tahun 2020 belum mencapai sebagaimana target, bahkan menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya.	Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepemilikan Legalitas keluarga pada tahun 2021 melalui: <ul style="list-style-type: none"> - Penjangkauan dan pendampingan untuk mendapatkan Akte Kelahiran bagi keluarga yang bermasalah oleh Satgas PPPA - Penguatan Satgas PPPA - Koordinasi dengan Biro TAPEM, DINSOS, DUKCAPIL, TSKS untuk percepatan penyelesaian administrasi dokumen kependudukan - Sosialisasi Fungsi Keluarga - Sosialisasi Kebijakan ketahanan keluarga - Advokasi Kebijakan Ketahanan Keluarga 	

c) URUSAN PANGAN

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Terwujudnya ketahanan pangan perlu didorong melalui ketersediaan pangan, distribusi pangan, pemanfaatan pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan Aman (B2SA) melalui kegiatan edukasi, sosialisasi, promosi, kampanye yang berkesinambungan	Dalam rangka mendorong konsumsi pangan yang memenuhi kaidah Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) telah dilaksanakan kegiatan kampanye, sosialisasi, dan gerakan panganekaragaman konsumsi dengan sararan masyarakat, ibu-ibu PKK, Kelompok Wanita Tani (KWT), sekolah-	Terwujudnya ketahanan pangan melalui pencapaian target Skor Pola Pangan Harapan dengan mengurangi konsumsi kelompok pangan yang berlebih dan

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	dengan target dan sasaran yang jelas dan terukur agar memberikan dampak yang jelas terhadap tercapainya target persentase pengeluaran per kapita sebulan untuk pangan di akhir RPJMD 2022.	sekolah, pelaku usaha pangan olahan, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dengan tujuan untuk mengurangi konsumsi beras dan terigu dan mengalihkan pada konsumsi sumber karbohidrat lainnya terutama dari bahan pangan lokal serta meningkatkan konsumsi sayur, buah, kacang-kacangan, dan umbi-umbian.	meningkatkan konsumsi kelompok pangan yang masih kurang menuju skor yang ideal.
2	Perlunya optimasi pemanfaatan pekarangan baik di kawasan perkotaan yang berlahan sempit maupun perdesaan untuk pemenuhan gizi keluarga. Dengan pemanfaatan lahan pekarangan tentunya dapat mengurangi pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan sehingga kesejahteraan rumah tangga akan pangan semakin meningkat. Kegiatan ini harus dilakukan dengan target dan sasaran yang jelas, terukur serta berkesinambungan agar memberikan dampak yang jelas sehingga pencapaian persentase pengeluaran per kapita sebulan untuk pangan di akhir RPJMD 2022 dapat tercapai..	Kegiatan optimasi pemanfaatan pekarangan baik di kawasan perkotaan yang berlahan sempit maupun perdesaan untuk pemenuhan gizi keluarga telah dilaksanakan dengan sasaran prioritas di daerah stunting (Kabupaten Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul) dan daerah rawan pangan. Pada saat ini dilaksanakan melalui Budidaya Hortikultura di Lahan Pekarangan, Pekarangan Pangan Lestari (P2L), dan Lumbung Mataraman (dari Dana Keistimewaan). Khusus untuk daerah perkotaan, selain dapat dilaksanakan melalui tiga kegiatan diatas, optimasi pemanfaatan pekarangan dilakukan melalui Bimtek Hidroponik dan Budidaya Pertanian di Lahan Sempit (dari Dana Keistimewaan).	Kegiatan optimasi pemanfaatan pekarangan baik di kawasan perkotaan yang berlahan sempit maupun perdesaan bertujuan untuk pemenuhan gizi keluarga dan meningkatkan pendapatan masyarakat
3	Program dan kegiatan pengentasan Desa Rawan Pangan perlu lebih dioptimalkan. Terbukti dengan masih adanya 4 Desa Rawan Pangan DIY dari 2018-2020. Adanya Desa Rawan Pangan disebabkan oleh rendahnya aksesibilitas, terbatasnya ketersediaan dan pemanfaatan pangan karena faktor kemiskinan, kondisi geografis, dan kurangnya pengetahuan masyarakat. Penyelesaian terhadap berbagai penyebab di atas harus segera dilakukan secara tuntas, dan mestinya menjadi prioritas utama pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan. Program pengentasan desa rawan pangan harus dilakukan dengan sinergitas dan kolaborasi antar stakeholder baik di tingkat DIY, Kabupaten dan desa. Optimasi Pemanfaatan Dana Desa dan Dana Keistimewaan dalam pengentasan desa rawan pangan di DIY perlu dilakukan agar di akhir RPJMD 2022 tidak ada desa rawan pangan lagi.	Pengentasan Desa Rawan Pangan dilaksanakan melalui kolaborasi sinergis dengan para pihak terkait baik di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Desa/Kalurahan. Masing-masing OPD (baik menggunakan dana dari APBD maupun Dana Keistimewaan) maupun Instansi terkait berbagi peran dan memberikan Program/Kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang terjadi di Desa Rawan Pangan sesuai dengan kewenangannya, serta mengintensifkan pendampingan dan pembinaan kepada perangkat desa dan berbagai kelompok/organisasi kemasyarakatan yang ada di desa tersebut dalam rangka pemberdayaan agar pendapatan masyarakat meningkat dan diharapkan jumlah masyarakat miskinnya berkurang. Pemerintah Daerah DIY juga mendorong Pemerintah Desa untuk memanfaatkan Dana Desa dalam menunjang upaya pengentasan Desa Rawan Pangan	JKPD (Jejaring Keamanan Pangan Daerah) bertujuan untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai tim koordinasi penanganan keamanan pangan di DIY.
4	Perlunya segera disusun Pergub tentang Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD). Agar tim JKPD dapat meningkatkan kerjanya dengan semakin memperluas wilayah pengawasan produksi dan peredaran pangan	Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta sudah terbentuk sejak beberapa tahun yang lalu dan sudah melaksanakan kegiatan operasional dengan dipayungi Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY tentang Pembentukan Tim JKPD. Tugas dan fungsinya adalah sebagai tim koordinasi penanganan keamanan pangan di DIY. Ke depan akan disusun Surat Keputusan Gubernur untuk memperkuat dan meningkatkan kinerjanya karena tim ini bekerja lintas sektor dan melibatkan instansi-instansi diluar lingkup Pemerintah Daerah DIY.	Kolaborasi sinergis lintas sektor dalam rangka pemberdayaan masyarakat di desa rawan pangan bertujuan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian di desa sehingga mampu mengurangi kerawanan pangan dan jumlah penduduk miskin yang menjadi indikator penentuan desa rawan pangan. Dengan demikian diharapkan dari tahun ke tahun jumlah desa rawan pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta semakin berkurang.
5	Masih banyak produksi pangan yang beredar di masyarakat yang tidak terjamin mutu dan keamanannya. Untuk dapat bertindak lebih jauh, diperlukan aturan teknis terkait dengan penjaminan	Penanganan keamanan pangan khususnya Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) di wilayah DIY sudah dilakukan melalui pengawasan dan pembinaan keamanan pangan serta penjaminan mutu dan keamanan	Penanganan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan di wilayah DIY melalui pembinaan pelaku usaha, pengawasan di tingkat produksi maupun di tingkat

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	mutu keamanan pangan dalam bentuk Pergub. Perda 2/2014 tentang Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan memberikan 6 (enam) mandat dibentuknya Pergub, 2 (dua) tahun sejak Perda diundangkan pada 27 Februari 2014, yaitu Pergub terkait dengan (a) Asal Usul PSAT, (b) Sertifikasi PSAT, (c) Pendaftaran Sertifikasi Mutu, (d) Penyimpanan Penjaminan Mutu PSAT, (e) Fasilitasi Penjaminan Pemasaran dan (f) Pembinaan PSAT	pangan melalui proses sertifikasi dan registrasi bagi pelaku usaha PSAT. Di tahap produksi dimulai dari kegiatan budidaya (on farm), Pemda DIY mendorong para petani/pekebun/peternak untuk melaksanakan budidaya mengacu pada Tata Cara Budidaya yang Baik dan Benar, diantaranya dengan mendorong pemanfaatan agens pengendali hayati yang ramah lingkungan serta penggunaan pestisida nabati. Begitu juga dalam kegiatan produksi pangan melalui penerapan hiegene dan sanitasi yang baik bagi para pelaku usaha pangan. Untuk penanganan keamanan PSAT lintas provinsi, menyesuaikan dengan kewenangan dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kerja sama lintas provinsi untuk pengawasan peredaran PSAT yang aman konsumsi melalui Mitra Praja Utama (MPU). Aturan teknis penjaminan mutu keamanan pangan di DIY sudah ada dalam Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Penjaminan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan, dimana dalam Pergub tersebut sudah memuat materi dari 6 amanat Pergub yang harus disusun sebagai turunan dari Perda 2 Tahun 2014. Keduanya menjadi landasan dalam implementasi penanganan keamanan PSAT di DIY	pemasaran, sertifikasi, dan registrasi PSAT dalam rangka menjamin keamanan pangan yang diproduksi dan/atau beredar di wilayah DIY.

d) URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Walaupun Pemerintah Pusat sudah menggunakan paradigma pengelolaan sampah partisipatif dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) namun, pola pengelolaan sampah partisipatif harus dilaksanakan secara sistematis, terstruktur dan massif dibarengi dengan sosialisasi yang masif ke masyarakat tentang pentingnya penanganan sampah sejak dini dari hulu yaitu rumah tangga. Dengan pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat, maka akan mengurangi volume sampah yang dibuang di sungai yang mengakibatkan tingginya kandungan Bakteri Koli	Tanggapan Pemerintah tentang pelaksanaan pengelolaan sampah dengan 3 R, sebagai berikut : Sumber Bakteri Koli dalam air sungai antara lain berasal dari air limbah domestik dan dari sampah organik yang dibuang ke sungai. Pada kelompok masyarakat yang masih membuang sampah ke sungai, antara lain disebabkan karena kurangnya kesadaran dan pengetahuan dalam mengelola sampah, tidak tersedianya fasilitas pembuangan sampah, dan cakupan pelayanan sampah yang rendah di daerah tersebut. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi kondisi tersebut antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi pengelolaan sampah terhadap masyarakat, khususnya di kawasan bantaran sungai, daerah dengan tingkat pencemaran tinggi, wilayah dengan fasilitas pengelolaan sampah minim atau cakupan layanan persampahan yang rendah. - Meningkatkan kapasitas masyarakat agar dapat mengelola sampah di level rumah tangga. Setiap rumah tangga diharapkan dapat menekan produksi sampah dengan menerapkan 3R. Sampah organik diolah sendiri di 	Mengoptimalkan keberadaan lembaga pengelola sampah mandiri dan mendukung keberlanjutannya, misalnya bank sampah, sodaqoh sampah, TPS3R, dll.

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<p>rumah/pekarangan, sampah anorganik dikelola melalui bank sampah, sedangkan sampah tidak laku jual melalui TPS/TPS 3R.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan data timbulan sampah di DIY, sebanyak 53,7% adalah sampah organik dengan dominasi timbulan dari rumah tangga. Oleh karena itu, perlu mendorong masyarakat agar mengelola sampah organik dengan pengomposan, baik secara individu maupun melalui lembaga pengelola sampah mandiri - Mensosialisasikan kembali TPS 3R sebagai fasilitas pengelolaan sampah yang dapat diakses oleh setiap anggota masyarakat karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui peran TPS 3R. 	
2	<p>Pengelolaan Sampah harus memanfaatkan teknologi mutakhir untuk diubah menjadi energi yang ditempatkan di TPST Piyungan yang kini mendapatkan dana APBN dan pengelolaannya menggunakan skema KPBU. Selain itu perlu dipertimbangkan pula pemanfaatan teknologi pengelolaan sampah yang lebih kecil skalanya dan diterapkan sebelum sampah masuk ke TPST Piyungan sehingga dapat mengurangi volume sampah di TPST Piyungan. Pemanfaatan teknologi pengolahan sampah yang berskala kecil menjadi lebih realistis karena relatif membutuhkan lahan yang tidak terlalu luas dan sarana-prasarana yang tidak banyak</p>	<p>Tanggapan Pemerintah terhadap pengelolaan sampah dari hulu adalah sebagai berikut : Idealnya, panghasil sampah sejak dari sumber melakukan upaya pengelolaan sampah, yaitu berupa pengurangan dan penanganan, sehingga sampah yang masuk ke TPA Piyungan hanya residu saja. Akan tetapi, paradigma masyarakat saat ini masih sebatas pada pemindahan sampah. Pemda DIY sangat mendorong Kabupaten/Kota untuk dapat melakukan pengelolaan sampah di sumbernya, khususnya di Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul.</p> <p>Berdasarkan data dalam Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), terdapat 56 unit TPS 3R di Kabupaten/Kota di DIY, dengan sebaran 21 unit di Kabupaten Sleman, 2 unit di Kota Yogyakarta, 14 unit di Kabupaten Bantul, 9 unit di Kabupaten Kulon Progo, dan 10 unit di Kabupaten Gunungkidul. TPS 3R merupakan tempat untuk mengelola sampah dengan sistem 3R (<i>Reduce, Reuse</i> dan <i>Recycle</i>) yang menekankan pengelolaan sampah dengan cara mengurangi timbulan sampah (<i>reduce</i>), memilah sampah untuk digunakan kembali atau dijual sebagai barang bekas yang masih dapat dipakai (<i>reuse</i>) dan memproses sampah untuk dapat digunakan kembali sesuai fungsinya (<i>recycle</i>).</p> <p>Fasilitas TPS 3R tersebut dapat digunakan untuk mereduksi sampah sebelum masuk ke TPA. Namun, saat ini banyak TPS3R yang kurang berfungsi optimal. Pada tahun anggaran 2021, DLHK DIY sedang menyusun kajian Evaluasi Pengurangan Sampah dari Pengelolaan Sampah Mandiri, guna mengetahui tingkat efektivitas pemanfaatan TPS 3R eksisting, menganalisis kebutuhan fasilitas TPS 3R di setiap Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan jumlah timbulan sampah dan cakupan layanan, serta menyusun rekomendasi untuk mengoptimalkan kinerja setiap TPS 3R yang sudah, baik secara teknis maupun manajemen pengelolaannya.</p>	<p>Penggunaan teknologi pereduksi sampah di sumber sampah, prinsipnya dapat diterapkan sepanjang tidak menimbulkan sumber pencemaran baru, seperti emisi udara atau dampak lingkungan lainnya.</p>
3	<p>Pemerintah DIY perlu memperkuat penerbitan ijin AMDAL untuk pendirian hotel, mall dan gedung-gedung lainnya yang dapat mengurangi penurunan fungsi air tanah dan mengurangi daerah resapan air.</p>	<p>Tanggapan Pemerintah DIY perlu memperkuat penerbitan ijin AMDAL untuk pendirian hotel, mall dan gedung-gedung lainnya yang dapat mengurangi penurunan fungsi air tanah dan mengurangi daerah resapan air :</p> <p>Tindak lanjut yang akan dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan koordinasi dan komunikasi intensif dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, untuk sinkronisasi pelaksanaan 	<p>Prosedur penerbitan Persetujuan Lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta hasil kajian dokumen khususnya aspek tata ruang, potensi sumber daya air, dan</p>

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<p>penilaian/pemeriksaan dokumen Amdal/UKL-UPL khususnya terkait aspek kesesuaian tata ruang, ketersediaan cadangan air, dan pengolahan air limbah dalam proses penerbitan persetujuan lingkungan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan Tim Uji Kelayakan Lingkungan untuk menilai dokumen Amdal sesuai dengan kualifikasi keahlian yang dipersyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk tingkat Provinsi maupun Kabupaten Kota. - Melakukan pembekalan Tim Uji Kelayakan Lingkungan melalui Kegiatan Upgrading untuk peningkatan kompetensi dalam melakukan penilaian/pemeriksaan dokumen Amdal/UKL-UPL agar fokus kajian tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. - Mewajibkan penggunaan air PDAM sebagai sumber utama dan airtanah sebagai cadangan dalam kajian Amdal rencana kegiatan yang berada pada jaringan jalur pipa PDAM. - Mewajibkan <i>recycle</i> (daur ulang) air limbah untuk digunakan <i>flushing toilet</i> atau penyiraman tanaman sebagai upaya pengurangan krisis air. - Menerima dan mempertimbangkan saran masukan dari masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan kelayakan lingkungan, khususnya terkait dampak atas rencana kegiatan yang akan mempengaruhi kebutuhan esensial mereka seperti air bersih. 	<p>pengolahan air limbah secara ilmiah dapat diterima.</p>
4	<p>Perlu dipertimbangkan untuk mempertegas penegakan hukum lingkungan terutama pada larangan membuang sampah tidak pada tempatnya yang tujuan utamanya sebagai pembudayaan masyarakat untuk sadar dan peduli terhadap lingkungan hidup.</p>	<p>Bahwa sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan terkait dengan pelanggaran pengelolaan sampah menjadi kewenangan Kabupaten/Kota. Penjelasannya terdapat pada :</p> <p>a. Pasal 29 ayat 1 dan 3 Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah bahwa :</p> <p>Setiap orang dilarang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) memasukkan sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2) mengimpor sampah; 3) mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun; 4) mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; 5) membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan; 6) melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. 	<p>DLHK DIY akan melakukan koordinasi dengan Satpol PP, DLH Kabupaten/Kota dan Sekber Kartamantul Cq. Balai Pengelolaan Sampah DLHK DIY.</p>

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<p>7) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota”</p> <p>b. Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah bahwa “Bupati/walikota dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.</p>	

e) URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Perlu upaya strategis agar wajib KTP yang tidak berada di DIY akibat belajar atau pekerjaan bisa melakukan rekam biometrik.	KTP-Elektronik bersifat nasional sehingga perekamannya dapat dilakukan dimana saja tanpa perlu pulang ke daerah asal. Seluruh Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota se-Indonesia dapat melakukan perekaman bagi penduduk luar domisili. Biro Tata Pemerintahan bekerjasama dengan Dinas Dukcapil Kab/Kota se DIY telah melaksanakan kegiatan sosialisasi online bertajuk DMM (Dukcapil Menyapa Masyarakat) melalui video conference zoom. Dengan sosialisasi online diharapkan bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat tidak terkecuali penduduk DIY yang berada di luar DIY. Kedepannya akan dilaksanakan DMM dengan tema perekaman KTP-el luar domisili, diharapkan warga masyarakat di luar DIY bisa mengikuti dan mengetahui tatacara perekaman KTP el tanpa perlu pulang ke daerah asal di DIY.	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dan Dinas Dukcapil Kab/Kota se DIY senantiasa berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dalam penerbitan Dokumen Adminduk, hal tersebut tidak terlepas dari banyaknya inovasi yang sudah dilakukan dan juga koordinasi dan kerja sama yang terjalin dengan baik, tidak hanya antara Biro Tata Pemerintahan dengan Dinas Dukcapil Kab/Kota tetapi juga dengan Ditjen Kependudukan Kemendagri. Kualitas layanan Dukcapil Kab/Kota se DIY tercermin dari angka rata-rata perekaman KTP-el, Kepemilikan AktaKelahiran dan Kartu Identitas Anak yang selalu lebih tinggi diatas rata-rata nasional. Diharapkan tidak ditemukan lagi permasalahan dalam rangka pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, sehingga hasil yang dicapai akan selaras dengan semboyan yang selalu digaungkan oleh Bapak Ditjen Dukcapil kemendagri, yaitu “Pelayanan yang membahagiakan masyarakat”.
2	Standardisasi layanan kependudukan yang mudah. Murah, efektif dan efisien	<p>Metode pelayanan adminduk di DIY telah memenuhi standardisasi layanan kependudukan yang mudah, murah, efektif dan efisien. Hal ini dapat dilihat dari telah adanya beberapa kebijakan yang telah diterapkan di DIY seperti diantaranya:</p> <p>a. Pencetakan dokumen adminduk (kecuali KTP dan KIA) tidak lagi menggunakan blangko khusus (security printing) melainkan dapat dicetak sendiri menggunakan kertas HVS A4 80gr sesuai Permendagri Nomor 109 Tahun 2019.</p> <p>b. Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota se DIY telah memiliki berbagai Inovasi pelayanan dalam rangka memudahkan penduduk seperti misalnya model pemaketan dimana penduduk dapat memperoleh beberapa dokumen adminduk dalam sekali pengurusan, bekerjasama dengan instansi/lembaga lain seperti RS dalam proses penerbitan akta lahir, hingga penggunaan media daring dalam pelayanan serta masih ada yang lainnya.</p> <p>c. Dokumen kependudukan yang telah menggunakan TTE (Tanda Tangan Elektronik) seperti KTP-el, KK, Akta Kelahiran, dan Akta Kematian tidak perlu dilegalisir sesuai Permendagri nomor 104 tahun 2019.</p> <p>d. Semua pelayanan adminduk tidak dipungut biaya (gratis).</p>	

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
3	Membangun data tunggal kependudukan dan membuat program yang melindungi data digital kependudukan aman dari gangguan hacker.	Pemda DIY telah melakukan pemberian akses data kependudukan menggunakan DWH (Data Warehouse) terpusat nasional bagi lembaga/instansi pengguna. Untuk menjaga/melindungi data dari gangguan hacker pemberian akses data tersebut di atas dilakukan menggunakan jaringan akses tertutup VPN (Virtual Privat Network) milik Pemda DIY	

f) URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Melakukan kajian pengaruh BUMDES terhadap penurunan angka kemiskinan di Kalurahan/Kelurahan.	Menyusun kajian pengaruh Bumdesa terhadap penurunan angka kemiskinan dikalurahan bekerjasama dengan stakeholder terkait	Badan Usaha Milik Desa melakukan kegiatan mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Sehingga akan berdampak pada penurunan angka kemiskinan desa.
2	Membuat roadmap dalam bentuk renstra penanggulangan kemiskinan melalui BUMDES.	Melakukan pemetaan dan pendataan Bumdesa di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai dasar penyusunan Roadmap. Road Map Pengelolaan BUMDesa Tingkat DIY akan dilakukan seiring dengan penambahan pengaturan dari kementerian Desa dan PDTT serta Kementerian Hukum dan HAM. Desain Road Map Pengelolaan BUMDesa Tingkat DIY diantaranya berisi indikator penilaian perkembangan BUM Des, pengembangan dan pembinaan BUMdesa baik aspek umum maupun teknis	Desa memiliki panduan program/kegiatan apa saja yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai usaha mengurangi angka kemiskinan di desa.
3	Membuat kategori BUMDES berdasarkan tata kelola dengan mengacu kontribusi BUMDES dalam pendapatan asli desa dan penanggulangan kemiskinan.	Menyusun kategori Bumdesa mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2021 tentang pendaftaran, pendataan dan pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan /atau Jasa Badan usaha Milik Desa/Badan Usaha/ Badan Usaha Milik Desa Bersama. Untuk saat ini telah dilakukan klasifikasi BUMDes berdasar penilaian Pendamping Desa. Dari 392 Kalurahan (55 belum terbentuk, 92 kategori dasar, 157 tumbuh, 34 berkembang, dan 54 maju	Pendataan dan pemetaan Bumdesa yang selama ini dilakukan pendamping desa mengalami hambatan, sehingga akan ditempuh melalui jalur birokrasi guna mendapat data yang lebih akurat.
4	Facilitasi pelatihan SDM dan sarana prasarana pendukung (sumber daya BUMDES).	Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan pengelolaan Bumdesa kepada 10 (sepuluh) Bumdesa Binaan	Pengelola Bumdesa dapat meningkatkan kapasitasnya sehingga pengelolaan Bumdesa dapat lebih baik yang berdampak pada perkembangan perekonomian desa
5	Membangun kesamaan pandang antar stake holder desa agar kemiskinan menjadi prioritas yang harus ditangani desa. Untuk itu dapat dilakukan dengan bekerja sama Perusahaan Swasta atau Perguruan Tinggi.	Melakukan kerja sama dengan lima unsur kekuatan/Panthelex yaitu pemerintah, akademisi, media, swasta, dan masyarakat untuk berkomitmen menanggulangi kemiskinan di desa	Terdapat kesamaan pandang dalam upaya penanggulangan kemiskinan di desa.

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
6	Membuat RPJMDes dan RPJPDDes dalam aksi penanggulangan kemiskinan	Mendorong peran masyarakat dan lembaga kemasyarakatan untuk menyalurkan aspirasi dalam perencanaan pembangunan melalui Musdes/Muskel	Rencana aksi penanganan kemiskinan terumuskan dalam agenda musdes/muskel
7	Menjadikan BUMDes sebagai sarana untuk meningkatkan Kesejahteraan warga	Menguatkan sektor usaha Bumdesa dengan melaksanakan pembinaan dan pelatihan Bisnis Plan Bumdesa	Pengelola Bumdesa dapat meningkatkan kapasitasnya sehingga pengelolaan Bumdesa dapat lebih baik sehingga ekonomi desa dapat berkembang.
8	Peningkatan SDM stake holder yang terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan.	Melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas pengelola Bumdesa	Pengelola Bumdesa dapat meningkatkan kapasitasnya sehingga Bumdesa dapat lebih berkembang yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat

g) URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Terbitnya Pergub No. 102 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan program kesehatan reproduksi remaja di DIY. Upaya lain yang dilakukan untuk meningkatkan usia perkawinan pertama bagi perempuan diantaranya melalui sosial pendidikan kesehatan reproduksi remaja, sosialisasi program pengendalian penduduk, dan fasilitasi forum penyelenggaraan program kesehatan reproduksi remaja.	<p>Tindak lanjut terhadap terbitnya Pergub Nomor 102 tahun 2020 tentang penyelenggaraan program kesehatan reproduksi remaja khususnya dalam rangka meningkatkan usia perkawinan pertama bagi perempuan pada tahun 2021 adalah melalui berbagai kegiatan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Forum Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja (FP2KRR) baik pada level yang strategis maupun teknis karena persoalan Kesehatan reproduksi remaja menyangkut lintas sektor yang cukup kompleks. - Sosialisasi Pengendalian Penduduk - Advokasi Pengendalian penduduk di Kabupaten / Kota - Rakor Pengendalian Penduduk. - Pembuatan Video-video pendek Iklan Layanan Masyarakat - Bekerjasama dengan LPM UGM melalui KKN Tematik Kesehatan reproduksi di desa-desa lokasi KKN - Pembuatan Lagu dengan tema Kesehatan reproduksi dan ditayangkan di media-media sosial - Advokasi dan sosialisasi Kesehatan reproduksi di sekolah-sekolah ramah anak 	Tindak lanjut diatas diharapkan dapat mengatasi masalah yang mengancam ketahanan keluarga seperti kehamilan tidak dikehendaki, pernikahan dini, legalitas hukum keluarga dan kurangnya edukasi kesehatan reproduksi bagi anak dan orangtua yang pada gilirannya akan berdampak pada penurunan angka penyakit menular seksual
2	Optimalisasi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga, dalam pencegahan pernikahan usia dini, kehamilan yang tidak direncanakan, dan perilaku kekerasan dikalangan remaja.	<p>Kegiatan-kegiatan tersebut akan terus dilaksanakan pada tahun 2022. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Perda 7 tahun 2018 Tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga, maka pada tahun 2021 dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:</p> <p>Implementasi Fungsi Keluarga, yang terdiri dari:</p>	

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK R) - Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) - Sosialisasi Perlindungan Anak terpadu berbasis Masyarakat (PATBM) - Pelatihan Kader Ketahanan Keluarga (Konselor Keluarga) - Sosialisasi Fungsi Keluarga - Sosialisasi Kebijakan ketahanan keluarga - Advokasi Kebijakan Ketahanan Keluarga - Sosialisasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KTPA) - Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak - Sosialisasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) - Pembinaan Sekolah Ramah Anak (SRA) - Pembinaan Forum Anak (Tingkat Daerah, Kab/Kota, Kecamatan dan Desa) <p>Pembahasan Rapergub “Strategi Pembangunan Ketahanan Keluarga” sebagai tindak lanjut amanat {Perda 7 tahun 2018 Tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga</p> <p>Koordinasi terkait penanganan kekerasan dikalangan remaja dengan lintas sektor sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepolisian Daerah (POLDA) - Kepolisian Resort (POLRES) - Balai Pemasyarakatan (BAPAS) - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (DIKPORA) - Dinas Sosial (DINSOS) - Dinas Kesehatan (DINKES) - Pengadilan - Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK). Pada tahun 2022 direncanakan akan dilaksanakan kegiatan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan Pojok Konsultasi dan Pembelajaran Keluarga (POKSI PUSPAGA) • Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) • Melanjutkan kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2021 	
3	Perlunya upaya yang lebih progresif guna peningkatan kepemilikan legalitas keluarga sebagai usaha mewujudkan ketahanan keluarga. Hal	Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepemilikan legalitas keluarga pada tahun 2021 melalui:	

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	ini karena tahun 2020 belum mencapai sebagaimana target, bahkan menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya.	<ul style="list-style-type: none"> - Penjangkauan dan pendampingan untuk mendapatkan Akte Kelahiran bagi keluarga yang bermasalah oleh Satgas PPPA - Penguatan Satgas PPPA - Koordinasi dengan Biro TAPEM, DINSOS, DUKCAPIL, TKS untuk percepatan penyelesaian administrasi dokumen kependudukan - Sosialisasi Fungsi Keluarga - Sosialisasi Kebijakan ketahanan keluarga - Advokasi Kebijakan Ketahanan Keluarga 	

h) URUSAN PERHUBUNGAN

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan jaringan transportasi publik sehingga Penanganan masalah transportasi yang sudah semakin padat terutama di masa liburan tidak hanya sebatas rekayasa lalu lintas.	<p>Tindak lanjut telah dilaksanakan adalah :</p> <p>a. bahwa mulai tahun 2020 Dinas Perhubungan DIY telah melaksanakan beberapa kebijakan (berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Yogyakarta) sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembatasan “penggunaan” kendaraan pribadi di pusat kota melalui penerapan “Pedestrianisasi Malioboro” dan manajemen lalu lintas sistem satu arah di Kawasan Malioboro • pengaturan lalu lintas di sirip-sirip jalan Malioboro dan ruas jalan di sekitar jalan Malioboro • Pengelolaan Parkir di pusat Kota <p>b. Meningkatkan kinerja layanan angkutan umum melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • evaluasi kinerja Angkutan Perkotaan dan AKDP • melaksanakan kajian terkait simpul transportasi • melaksanakan kajian Jaringan Transportasi Pariwisata • memberikan subsidi kepada angkutan umum • memperluas jaringan sarana angkutan umum • menambah prasarana angkutan umum antara lain: halte , park and ride • integrasi inter dan antarmoda • aplikasi transjogja 	<p>Terwujudnya transportasi yang berkelanjutan dengan memprioritaskan :</p> <p>a. penggunaan angkutan umum, angkutan tradisional dan angkutan rendah emisi</p> <p>b. pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas Kawasan</p> <p>c. penggunaan teknologi transportasi dalam pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan umum</p>
2	Kemacetan di DIY semakin meningkat terutama di jalan-jalan menuju objek wisata, jalur utama ke pusat kota pada jam kerja dan jam sekolah (berangkat-pulang) oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap	<p>Tindak lanjut yang telah dilaksanakan adalah</p> <p>a. Untuk mengantisipasi kemacetan lalu lintas yang menuju pusat kota,;</p>	

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	berbagai aspek yang menyebabkan kemacetan jalan sebelum masalah kemacetan menjadi sulit terurai di kemudian hari.	<ul style="list-style-type: none"> Pada jalan nasional berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dalam hal ini Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) X wilayah Jateng – DIY. Pada jalan – jalan propinsi terutama di persimpangan dengan mengoptimalkan fungsi APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas) dengan menyesuaikan fase lalu lintas. serta mengendalikan APILL dari Dinas Perhubungan DIY, apabila telah terpasang APILL – ATCS. Untuk yang berada di jalan perkotaan Yogyakarta berkoordinasi dengan Dishub Kabupaten / Kota serta instansi terkait, mengoptimalkan fungsi APILL dan pengaturan lalu lintas di kawasan perkotaan Yogyakarta (contoh : telah dilakukan penataan kawasan Malioboro dengan penerapan arus lalu lintas Giratori berlawanan arus dan perbaikan desain geometrik Simpang Kleringan). 	
3	Pemerintah DIY agar melakukan inovasi terkait aspek budaya transportasi masyarakat sehingga dapat beralih ke transportasi publik dalam mobilitas keseharian dan mobilitas ke tempat-tempat wisata di DIY. Kolaborasi dengan para pelaku wisata khususnya yang juga menyediakan paket wisata sekaligus jasa transportasinya sangat diperlukan agar tercipta kondisi pariwisata yang lebih menarik dan nyaman.	<p>Berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Yogyakarta dan PT. KAI serta instansi terkait lainnya dalam melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dapat diintegrasikan dengan layanan angkutan umum, seperti penerapan sistem satu arah dengan pemberlakuan <i>contra flow</i> khusus untuk angkutan umum</p> <p>Penggunaan Teknologi transportasi dalam pengendalian lalu lintas</p> <p>Tindak lanjut yang dilaksanakan adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> Berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mewujudkan smart integrated parking pusat kota Kawasan sumbu filosofis sebagai destinasi wisata di DIY dalam penataan transportasi diprioritaskan pada angkutan tradisional (becak dan andong) Melaksanakan kajian jaringan transportasi pariwisata 	

i) URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Perlunya sosialisasi dan edukasi masyarakat terkait IDMC	Sosialisasi dan publikasi berkaitan dengan IDMC akan dilaksanakan dengan mengoptimalkan jejaring dan kanal informasi yang dimiliki oleh Diskominfo DIY.	Selama ini masyarakat luas belum banyak yang mengetahui bahwa IDMC merupakan media yang dibangun oleh Pemda DIY untuk mempublikasikan data dan informasi tentang perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh OPD se-Pemda DIY, Dashboard ini dapat diakses oleh masyarakat/publik. Dengan melakukan sosialisasi dan publikasi yang lebih luas tentang keberadaan IDMC diharapkan selain masyarakat semakin banyak yang mengakses informasi yang ada didalam IDMC, juga diharapkan ada feedback dari publik kepada Pemda DIY berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan daerah dan pelayanan publik

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
2	Bantuan wifi dan CCTV perlu diimbangi dengan pendampingan masyarakat agar bantuan tersebut tepat penggunaan dan sesuai peruntukannya.	Dalam pemasangan wifi dan CCTV, akan disertai dengan pendampingan penggunaan fasilitas tersebut kepada masyarakat dan pelatihan digital marketing untuk UKM.	Adanya internet di lingkungan masyarakat dapat mendukung kesejahteraan masyarakat berupa peningkatan kelancaran arus informasi dalam bidang pendidikan, pemerintahan, pengembangan ekonomi, dan ilmu-ilmu praktis lain yang berguna untuk perkembangan pertanian, pertukangan, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Hal ini dapat berdampak agar masyarakat mampu bersaing dengan masyarakat lainnya. Penggunaan CCTV di masyarakat juga berguna dalam rangka upaya peningkatan kewaspadaan dan keamanan warga terutama di masa pandemi ini yang membuat situasi sosial dan ekonomi masyarakat menjadi lebih rentan.
3	Integrasi sistem Smart Provinsi dengan Smart Kabupaten/Kota dalam pelayanan publik.	Akan dilaksanakan Forum Kominfo se-DIY yang diikuti oleh Diskominfo DIY dan Diskominfo Kab/Kota se-DIY.	Forum Kominfo se-DIY diharapkan akan menjadi media untuk mempertemukan visi dan misi dalam kerangka mewujudkan konsep Jogja Smart Province dengan dukungan smart city /smart regency yang dilaksanakan oleh Pemda Kab/Kota masing-masing, sesuai dengan PKS antara Pemda DIY dengan Pemda Kab/Kota se-DIY tentang Pengembangan Smart City/Smart Regency untuk mewujudkan Jogja Smart Province. Selanjutnya problem koordinasi dan sinergi diharapkan akan dapat diselesaikan secara bertahap sesuai dengan issue yang menjadi concern bersama, misalkan tentang integrasi system informasi atau berbagi pakai data

j) URUSAN KOPRASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	UMKM sebagai penyumbang PDRB DIY Mohon dijelaskan dalam perangkaan	<p>Keberadaan UMKM dilihat dari jumlahnya di Daerah Istimewa Yogyakarta sangat besar dalam struktur perekonomian daerah. Namun sebagian besar, skala usahanya relatif masih kecil / skala usaha mikro. Pada masa pandemi COVID-19, menunjukkan sebagian besar UKM mengalami stagnasi usaha (data BI Perwakilan DIY, 2020) sehingga proses produksi tertekan dan pemasaran mengalami kelesuan. Kondisi inilah yang menyebabkan adanya kontraksi pertumbuhan ekonomi daerah hingga minus selama empat triwulan dalam tahun 2020.</p> <p>Namun upaya pemulihan ekonomi yang seiring dengan penerapan protokol kesehatan melalui kampanye adaptasi kebiasaan baru, mengakibatkan UMKM harus melakukan terobosan dalam menjalankan bisnisnya, terutama dengan mengembangkan ekosistem <i>e-commerce</i>. Bahkan Pemerintah Daerah memberikan sejumlah stimulan agar UMKM dapat memulai aktivitas dengan pola adaptif, seperti : pemasaran <i>online</i> dan transaksi digital. Bahkan stimulan bebas ongkos kirim dalam pemasaran <i>online</i> mampu mendongkrak perekonomian sebanyak 7 kali lipat dari nilai ongkos kirim yang terserap. Alhasil selama triwulan III dan IV pada tahun 2020, laju kontraksi ekonomi daerah bisa ditekan dan terus membaik.</p>	<p>Permasalahan UMKM yang perlu diselesaikan yaitu antara lain :</p> <p>Dampak COVID-19 bagi UMKM masih menyisakan masalah, antara lain di dalam pemasarannya. Aktivitas produksi masih berjalan tetapi terkendala kesulitan di dalam memasarkan atau menjual hasil produksinya sehingga perlu terobosan dalam memberikan pembelajaran kepada UMKM tentang pentingnya digitalisasi di dalam melakukan penjualan sehingga layanan menjadi lebih luas.</p> <p>Perlu nya pemahaman arti pentingnya meningkatkan value terhadap produk dan meningkatkan daya saing sehingga jangkauan pasar kurang luas juga menghambat penjualan. Produk makanan agar dapat beredar secara luas maka perlu jaminan keamanan pangan yaitu melalui fasilitasi perijinan edar produk olahan pangan dilingkup industri rumah tangga juga ketetapan Halal</p>

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
2	Pemanfaatan program Si Bakul agar terus dipertahankan sampai wilayah perbatasan DIY	<p>rogram Sibakul Jogja yang salah satu fasilitas didalamnya adalah Layanan Markethub <i>Free Ongkir</i> terus dikembangkan jangkauan layanannya baik dari sisi area penjemputan produk UMKM maupun area pengantarannya. Sejak dikembangkan mulai awal pandemi covid-19 di bulan Mei 2020, telah berkembang dari awalnya hanya melayani pengiriman produk di wilayah perkotaan DIY saja. Bahkan transaksi pada wilayah yang padat penduduk seperti pada area Kota Yogyakarta, Sleman, dan Bantul; sangatlah massif.</p> <p>Meskipun demikian, skema transaksi diharapkan juga menjangkau pada sentra-sentra UMKM yang tersebar pada wilayah pegunungan atau wilayah perbatasan, sebagaimana banyak ditemui pada kawasan Gunungkidul dan Kulon Progo. Pengembangan transaksi <i>online</i> pada dua wilayah tersebut sangat tergantung pada koneksitas internet dan dukungan layanan antar yang memadai, sehingga pada tahun 2021 diharapkan layanan sibakul atau markethub bebas ongkos kirim, sudah bisa menjangkau wilayah pegunungan atau wilayah perbatasan atau bahkan wilayah luar DIY</p>	<p>Masalah yang diselesaikan dengan Program SiBakul antara lain kesulitan pemasaran produk UMKM binaan yang terdampak pandemi covid-19, minimnya jaringan penjualan yang dimiliki oleh UMKM sehingga memerlukan media promosi secara online agar menjangkau pasar yang lebih luas terutama di wilayah DIY. Untuk program <i>free ongkir</i> dapat menyelesaikan permasalahan penurunan omzet UMKM di masa pandemi, lebih menarik minat konsumen karena diberikan fasilitas <i>free ongkir</i> yang dapat menjangkau seluruh area pengiriman di DIY dan subsidi ongkir untuk area luar DIY. Dengan adanya <i>free ongkir</i> kapasitas order meningkat sehingga produksi UMKM berkelanjutan dan meningkatkan omzet UMKM</p>
3	Meningkatkan manajemen koperasi dan UMKM	<p>Peningkatan kapasitas manajemen UMKM terus dilakukan agar UMKM mampu berdiri secara mandiri, kreatif, inovatif menghadapi dampak COVID-19 yang belum berakhir ini. Beberapa hal yang sudah dilakukan dalam rangka untuk mendorong manajemen kelembagaan usaha juga peningkatan kapasitas SDM KUMKM yaitu melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan dan Pelatihan yang terkonsep melalui standarisasi kurikulum dalam sibakul, seperti : Pelatihan Desain Kemasan, Pelatihan Digital Marketing, Pelatihan Peningkatan Kualitas Mutu Produk, Pelatihan Merk Branding, Pelatihan On Boarding bagi UKM siap pengadaan, Pelatihan SNI - Kemitraan usaha dengan swasta, pengusaha, Toko modern, Perhotelan, BUMD/BUMD, maupun CSR. - Promosi dan pemasaran melalui Pameran baik <i>online</i> maupun <i>offline</i> serta virtual, melalui Galeri Pasar Kotagede YIA Kulon Progo, Galeri SMESCO Kementerian Koperasi dan UKM, Galeri PLUT Dinas Koperasi dan UKM DIY. - Peningkatan kualitas mutu produk melalui Sosialisasi, Bimtek dan Fasilitasinya perijinan, yaitu Perijinan SPP – PIRT, Sertifikat Halal, Sertifikat Ijin Edar MD Kaleng dan Non Kaleng - Peningkatan manajemen perkoperasian melalui sejumlah terobosan, seperti : (1) Pelayanan digital untuk anggota koperasi, (2) Modernisasi Koperasi Melalui Digitalisasi Sistem Manajemen Koperasi, dan (3) Sertifikasi Manajer / Ka. Cabang Koperasi Syariah 	<p>Penyelesaian masalah ini bertujuan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas koperasi dari berbagai aspek diantaranya : Manajemen, Kelembagaan, Inovasi usaha dan Pelayanan Anggota. - Memperkuat pengelolaan koperasi sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pengelolaan. - Meningkatkan kemampuan SDM koperasi dengan beberapa sertifikasi dengan harapan kinerja koperasi menjadi optimal. - Meningkatkan kapasitas koperasi sehingga terwujud koperasi modern yang berkualitas

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
4	Mohon bantuan modal bagi koperasi di DIY bisa dilakukan	Dalam upaya meningkatkan Permodalan Koperasi maupun UMKM, Pemerintah Daerah DIY telah melakukan strategi kemitraan Koperasi maupun UMKM dengan lembaga Keuangan Bank dan Non Bank. Melalui pola ini diharapkan Koperasi maupun UMKM dapat menjalin kemitraan dalam bentuk akses permodalan ke Bank maupun Non Bank dengan lebih mudah. Dengan demikian kebutuhan modal untuk pengembangan usaha Koperasi dan UMKM dapat terpenuhi. Adapun pola dengan pemberian subsidi bunga dari Pemerintah sehingga KUMKM dapat pinjaman dengan bunga lebih murah daripada bunga komersil diantaranya adalah KUR dan pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Daerah. Disamping itu saat ini sedang dalam proses penyusunan Juknis Pemberian Dana bergulir dengan mengacu pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Bergulir, serta Juknis Dana Bergulir LPDB sebagai referensi untuk menyiapkan kegiatan di tahun tahun mendatang.	Upaya sebagai penyelesaian masalah kebutuhan permodalan baik pada Koperasi maupun UKM adalah adanya tindak lanjut konsultasi/pendampingan bagi Koperasi dan UKM yang akan mengakses permodalan baik ke Perbankan maupun non-bank. Konsultasi dan Pendampingan dilakukan pada hari ke dua kegiatan Sosialisasi. Konsultasi dilakukan untuk mengetahui persyaratan dengan jelas serta mengkonsultasikan permasalahan spesifik ada pada masing-masing koperasi maupun UKM
5	Mohon dilakukan studi akademik pendirian Lembaga penjamin permodalan seperti LPDB di Kementerian Koperasi dan UMKM, dengan harapan penguatan modal dari dana APBD Pemerintah DIY dan , APBD Kabupaten/kota bisa dilakukan.	Terhadap usulan studi akademik pendirian lembaga penjamin permodalan seperti LPDB di Kementerian Koperasi UKM sudah pernah dilakukan, merujuk pada hasil “Penyusunan Model Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan UKM di DI Yogyakarta” yang dilaksanakan oleh Bappeda DIY Tahun 2010. Adapun rekomendasi dari penyusunan model pengelolaan dana bergulir Koperasi dan UKM khususnya berkaitan dengan keberadaan kelembagaan penjamin permodalan diantaranya : “Untuk melaksanakan berbagai proses dan mekanisme pengelolaan dana bergulir akan lebih baik jika dilakukan oleh sebuah lembaga khusus di tingkat provinsi yang mempunyai peran sebagai lembaga payung pengelolaan dana bergulir”. Oleh karena itu diperlukan sebuah lembaga khusus yang akan mengelola hal-hal seperti diatas. Adapun tindak lanjut terhadap rekomendasi dikaitkan dengan hasil Penyusunan Model Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan UKM di DI Yogyakarta, Pemda DIY melaksanakan perguliran untuk penguatan modal bagi koperasi dengan sumber dana dari APBD DIY dengan mekanisme mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Bergulir. Mekanisme perguliran dengan penempatan anggaran perguliran di instansi BKAD dan rekomendasi menyaluran dilakukan oleh OPD Teknis/Dinas Koperasi UKM kepada koperasi binaan, sesuai dengan ketentuan yang ada. Pelaksanaan program dana bergulir berlangsung sampai dengan dilaksanakan moratorium program Tahun 2018. Pada Tahun 2020 Dinas Koperasi UKM DIY, sebenarnya akan melaksanakan program dana perguliran kembali, seiring dengan terbitnya Pergub Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata cara Pengelolaan Dana Bergulir. Namun dengan adanya pandemi COVID-19,	Solusi terkait usulan untuk dilaksanakannya studi akademik pendirian lembaga penjamin permodalan seperti LPDB di Kementerian Koperasi UKM, maka penjelasannya adalah bahwa penelitian/ studi akademik tersebut sudah pernah dilaksanakan oleh Bappeda DIY Tahun 2010 dalam judul “Penyusunan Model Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan UKM di DI Yogyakarta

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		telah dilakukan refocusing dana yang difokuskan untuk pemulihan kesehatan dalam rangka pengendalian pandemi.	

k) URUSAN PENANAMAN MODAL

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Usaha peningkatan daya tarik penanaman modal di DIY harus dilakukan	<p>Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Indonesia Attractiveness Award Tahun 2019 mendapatkan penghargaan kategori platinum untuk kategori provinsi. Penghargaan platinum ini diberikan kepada daerah yang unggul di bidang pariwisata, investasi, infrastruktur, dan pelayanan publik. Attractiveness award yang dianugerahkan kepada DIY diberikan untuk kategori kemajuan sektor pariwisata yang telah diraih provinsi ini.</p> <p>Penghargaan ini relevan dengan karakteristik perekonomian DIY yang secara umum memiliki ketergantungan yang sangat besar dalam sektor pariwisata. Secara eksplisit, data Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menunjukkan enam besar penyumbang ekonomi terbesar DIY adalah sektor industri, pertanian, informasi dan komunikasi, konstruksi, jasa pendidikan, serta akomodasi dan makan minum. Tapi ternyata hampir semua sektor itu tidak lepas dari pengaruh industri pariwisata. Di sektor industri manufaktur sebagai penyumbang pendapatan terbesar misalnya, komposisi terbesarnya ditempati oleh industri makanan dan minuman yang pendapatannya sangat tergantung pada pariwisata. Misalnya industri makanan oleh-oleh seperti bakpia, yang penjualannya sangat bergantung pada jumlah wisatawan yang datang ke Jogja. Begitu juga dengan industri kerajinan yang juga menyumbang pendapatan cukup besar, pasar utamanya tetap wisatawan.</p> <p>Sektor pertanian yang pada kuartal IV 2020 mengalami pertumbuhan positif sebesar 4,19 persen pun tetap tidak lepas dari pengaruh pariwisata. Pertanian hortikultura seperti buah dan sayur menjadi pemasok kebutuhan hotel dan restoran di Jogja. Namun karena hotel dan restoran banyak yang tutup, produk pertanian banyak yang tidak terserap. Pendapatan dari sektor pendidikan sekilas terlihat hanya berasal dari uang SPP saja, tapi lebih jauh dari itu, sektor pendidikan juga terkait erat dengan pariwisata. Misalnya ketika musim wisuda, biasanya keluarga yang datang akan sekaligus berwisata, berbeda dengan jika kampus berada di kota lain yang bukan kota wisata seperti Jogja. Sebagian besar keluarga juga akan menginap di hotel ketika datang ke acara wisuda. Pendapatan dari sektor ini juga cukup besar, jika satu kampus mengadakan wisuda empat kali</p>	<p>Tereksposnya sektor-sektor genuine yang membentuk PDRB DIY dalam kajian-kajian dan studi pengembangan penanaman modal.</p> <p>DIY tidak memiliki lahan yang layak untuk terus memaksakan diri pada project-project investasi yang sifatnya <i>hard industries</i> dan <i>mass product</i>. Untuk mengatasi ini, DPPM DIY mulai menggali potensi-potensi investasi yang sifatnya <i>“impact investing”</i> dan melibatkan masyarakat. Potensi ini sangat besar di sektor pertanian, pariwisata dan perikanan serta <i>social startup</i>.</p>

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<p>dalam setahun, maka dengan jumlah kampus 136 artinya ada 544 acara wisuda di Jogja selama setahun.</p> <p>Begitu juga dengan sektor konstruksi, pembangunan terbesar sektor konstruksi juga bertujuan untuk mendukung sektor pariwisata. Misalnya pembangunan jalan untuk mempermudah akses ke lokasi wisata, pembangunan hotel dan resort, juga pembangunan obyek-obyek pariwisata itu sendiri. Apabila dilihat dari hilir, perekonomian Jogja memang sangat diwarnai dengan sektor-sektor yang berkaitan erat dengan pariwisata seperti transportasi, hotel dan restoran, serta akomodasi. Artinya secara umum wajah perekonomian DIY memang tidak lepas dilepaskan dari sektor pariwisata. Akan tetapi pandemic COVID-19 membuat sektor ini menjadi yang paling terpukul. Imbas terpuruknya sektor pariwisata kemudian menjalar ke sektor-sektor lain yang menopang perekonomian DIY yang paling genuine.</p> <p>Data pada kuartal IV 2020 masih ada beberapa sektor yang pertumbuhannya masih positif seperti informasi dan komunikasi, jasa pendidikan, real estate atau perumahan, serta jasa kesehatan. Namun permasalahan yang muncul adalah sektor-sektor itu walaupun tumbuh tapi ternyata bukan penyerap tenaga kerja yang terbesar. Sektor pariwisata yang sangat terpuruk, seperti hotel, restoran, dan industri oleh-oleh, justru menyerap lebih banyak tenaga kerja.</p> <p>Untuk saat ini, sektor yang relatif aman adalah pertanian, serapan tenaga kerjanya relatif banyak meski pertumbuhannya tidak terlalu besar. Meski tidak lepas dari pengaruh pariwisata, tapi sektor pertanian masih lepas bertahan dengan mengganti komoditas tanam yang memang dibutuhkan di saat pandemi. Kendati demikian, pertumbuhan ekonomi Jogja masih jauh dibandingkan dengan sebelum pandemi. Pada 2019, PDRB DIY menyentuh angka Rp 141,4 triliun, sedangkan pada 2020 hanya sebesar Rp 13,83 triliun. Hal itu tidak lepas dari melekatnya industri pariwisata ke hampir semua sektor pendapatan DIY.</p> <p>Dengan melihat karakter perekonomian DIY yang secara alamiah menempatkan pariwisata sebagai cornerstone perekonomian DIY, maka tindak lanjut yang dapat dilaksanakan oleh DPPM DIY untuk menjawab isu ini adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi masyarakat dan swasta di bidang pariwisata. Program dan strategi DPPM DIY dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi masyarakat dan swasta di bidang pariwisata rangka mencapai peningkatan realisasi penanaman modal di area tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut ;</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan pelayanan perizinan untuk investasi di kawasan-kawasan yang menjadi bagian dari Destinasi Super Prioritas (Borobudur-Yogyakarta-Prambanan) yang ada di wilayah DIY 	

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<ul style="list-style-type: none"> b. Penyediaan informasi peluang investasi kawasan pariwisata yang menjadi bagian dari Destinasi Super Prioritas (Borobudur-Yogyakarta-Prambanan) yang ada di wilayah DIY. c. Meningkatkan promosi investasi untuk Key Tourism Area (khususnya DSP Borobudur Yogyakarta Prambanan); d. Meningkatkan sinergi promosi penanaman modal di bidang pariwisata dengan sektor terkait. e. Menginventarisasi sektor-sektor yang genuine sebagai pembentuk PDRB DIY untuk dijadikan landasan pemilihan sektor prioritas yang akan dikaji lebih mendalam dalam format IPRO agar dapat menambah portofolio project investasi siap jual yang ada di DIY 	
2	Agar Proyek-proyek besar di DIY seperti bandara, pembangunan jalan tol, pembagunan jalan kereta bandara melibatkan pengusaha dan tenaga kerja dari DIY.	<p>Sebagai informasi, dalam rangka mendukung program Pemerintah dalam penyediaan infrastruktur jalan tol di wilayah selatan Pulau Jawa maka dibentuklah PT. Jogjasolo Marga Makmur (PT. JMM) yang merupakan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) konsorsium dari empat Perusahaan yaitu PT. Daya Mulia Turangga (DMT) - PT. Gama Group - PT. Jasa Marga (Persero) Tbk dan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI).</p> <p>PT. Jogjasolo Marga Makmur telah memenangkan tender investasi perusahaan, dan menandatangani kontrak perjanjian perusahaan jalan tol untuk ruas Solo - Yogyakarta - YIA Kulon Progo, dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) pada tanggal 9 September 2020. Jalan tol ruas Solo - Yogyakarta - YIA Kulon Progo sendiri merupakan salah satu Proyek Strategi Nasional (PSN) berdasarkan Perpres Nomor 3 Tahun 2016, Perpres Nomor 56 Tahun 2018 dan perubahan terakhir Perpres Nomor 109 Tahun 2020.</p> <p>Terwujudnya Jalan tol ruas Solo - Yogyakarta - YIA Kulon Progo ini dianggap sangat penting karena menghubungkan dua kota budaya yaitu Surakarta dan Yogyakarta dan merupakan hub yang sangat strategis di Jawa bagian selatan. Selain itu proyek ini menjadi perhatian tinggi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah karena dianggap sangat strategis sebagai salah satu solusi efisiensi mobilitas dan distribusi di wilayah selatan Pulau Jawa. Proyek-proyek besar seperti Bandara YIA, Pembangunan Jalan Tol dan Pembangunan Jalan Kereta merupakan salah satu solusi efisiensi mobilitas dan distribusi di wilayah selatan Pulau Jawa.</p> <p>Terkait dengan penggunaan tenaga kerja dari DIY dalam perusahaan tersebut, DPPM DIY selalu memberikan anjuran dan himbauan untuk menggunakan sumber daya lokal sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Upaya ini juga diperkuat dengan memunculkan kriteria 'penggunaan tenaga kerja lokal' sebagai</p>	<p>Pemerataan penanaman modal di kabupaten/kota</p> <p>Isu pemerataan ini menjadi sangat <i>critical</i> dalam penanaman modal di DIY karena konsentrasi penanaman modal di DIY masih ada di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Kulon Progo mengalami lonjakan yang luar biasa pada saat pembangunan YIA namun realisasi penanaman modal tersebut kembali menurun setelah project selesai. Jebakan realisasi penanaman modal untuk sektor-sektor yang tidak secara genuine dibentuk oleh masyarakat DIY menjadi sebuah fenomena yang harus kita cermati bersama. Hal ini menjadi penting karena sektor yang secara genuine bukan milik masyarakat DIY akan menimbulkan efek yang tidak terlalu besar bagi warga asli DIY namun memberikan sumbangan statistik yang sangat besar pada PDRB.</p> <p>DPPM DIY memiliki tanggungjawab moral untuk meng-address isu ini melalui pengembangan di sektor-sektor penanaman modal yang genuine, tidak berorientasi pada <i>hard industries</i> dan melibatkan banyak elemen masyarakat. Salah satu jenis investasi yang sedang akan dikembangkan adalah <i>impact investing</i> dimana Kementerian Investasi /BKPM RI dalam beberapa tahun terakhir sangat mendorong daerah untuk menggarap sektor ini sebagai alternatif potensi investasi yang sifatnya mainstream.</p>

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
3	Mohon pendataan tenaga kerja asal DIY yang terserap pada proyek-proyek besar yang berlokasi di DIY.	<p>kriteria dalam penilaian/assessment dalam memberikan insentif dan kemudahan penanaman modal bagi pengusaha.</p> <p>Sebagai informasi, catatan mengenai jumlah tenaga kerja yang terserap dalam sebuah proyek dapat didapatkan di dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang dipersyaratkan oleh Kementerian Investasi ada untuk setiap perusahaan yang melakukan aktivitas penanaman modal di DIY. Namun demikian informasi ini tidak sampai detail asal daerah seperti yang direkomendasikan. Dalam hal ini ke depan harus ada koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi DIY terkait isu ini sehingga sebelum proyek-proyek tersebut dilaksanakan, isu-isu seperti ini sudah terantisipasi secara baik.</p>	
4	Pemerataan penanaman modal di kabupaten/kota agar lepas merata.	<p>DPPM DIY melalui seksi Pengembangan Penanaman Modal telah menjadikan isu pemerataan penanaman modal antar kabupaten dan kota sebagai dasar penentuan tema kajian /locus sehingga diharapkan tidak hanya membuat studi pada locus-locus di kabupaten yang secara realisasi penanaman modalnya sudah bagus (e.g : Sleman dan Kota Yogyakarta). Pada tahun 2021, Kajian yang akan dilaksanakan adalah Penyusunan Potensi Investasi Siap Jual di sekitar (calon) trase Jalan Prambanan-Gading.</p> <p>Locus ini dipilih karena memiliki nilai strategis dalam respon DIY menyiapkan bangkitan ekonomi sebagai dampak dari Pembangunan Jalan Tol Yogya Solo dan pengembangan kawasan ITMP BYP yang ada di Kawasan Prambanan Boko serta area sekitarnya. Proyek ini diharapkan memberikan dampak besar terhadap peningkatan ekonomi melalui peningkatan konektivitas antar wilayah, terutama yang digunakan sebagai jalur logistik, pariwisata, jalan akses ke pelabuhan dan bandara serta penghematan Biaya Operasional Kendaraan (BOK) & nilai waktu tempuh.</p> <p>Bersamaan dengan dibukanya akses tol Yogya-Solo yang secara trase serta exitnya dekat dengan kawasan Candi Prambanan Boko dan sekitarnya, maka momentum ini harus kita ambil melalui pengembangan konsep pengembangan kawasan Candi Prambanan-Boko dan sekitarnya berupa pengembangan jaringan destinasi pariwisata.</p> <p>Jaringan destinasi disini adalah gabungan beberapa titik destinasi aktivitas. Candi Prambanan Boko akan menjadi generator utama yang nantinya diharapkan dapat memicu dan memberikan bangkitan ekonomi dalam bidang tourism kawasan ke "greater area" disekitarnya. Konsep jaringan ini memiliki sifat dekonsentrasi, bermula dari sebuah titik kemudian terus menyebar dan membentuk konsentrasi-konsentrasi baru yang memberikan manfaat keekonomian lebih besar pada masyarakat dan area sekitarnya tanpa meninggalkan aspek-aspek budaya yang menjadi fondasinya.</p>	<p>Tereksposnya sektor-sektor genuine yang membentuk PDRB DIY dalam kajian-kajian dan studi pengembangan penanaman modal.</p> <p>DIY tidak memiliki lahan yang layak untuk terus memaksakan diri pada project-project investasi yang sifatnya hard industries dan mass product. Untuk mengatasi ini, DPPM DIY mulai menggali potensi-potensi investasi yang sifatnya "impact investing" dan melibatkan masyarakat. Potensi ini sangat besar di sektor pertanian, pariwisata dan perikanan serta social startup.</p> <p>Pemerataan penanaman modal di kabupaten/kota. Isu pemerataan ini menjadi sangat critical dalam penanaman modal di DIY karena konsentrasi penanaman modal di DIY masih ada di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Kulon Progo mengalami lonjakan yang luar biasa pada saat pembangunan YIA namun realisasi penanaman modal tersebut kembali menurun setelah project selesai. Jebakan realisasi penanaman modal untuk sektor-sektor yang tidak secara genuine dibentuk oleh masyarakat DIY menjadi sebuah fenomena yang harus kita cermati bersama. Hal ini menjadi penting karena sektor yang secara genuine bukan milik masyarakat DIY akan menimbulkan efek yang tidak terlalu besar bagi warga asli DIY namun memberikan sumbangan statistik yang sangat besar pada PDRB.</p> <p>DPPM DIY memiliki tanggungjawab moral untuk meng-address isu ini melalui pengembangan di sektor-sektor penanaman modal yang genuine, tidak berorientasi pada hard industries dan melibatkan banyak elemen masyarakat. Salah satu jenis</p>

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<p>Konsep pengembangan jaringan destinasi beberapa aktivitas di kawasan Candi Prambanan Boko dan area sekitarnya ini sangat in line dan mendukung program pembangunan jalan tembus Prambanan-Gunungkidul. Berdasarkan informasi terbaru yang diperoleh dari Dinas Tata Ruang DIY, saat ini sudah direncanakan pembangunan jalan tembus trase Prambanan - Lemah Abang - Patuk - Gedangsari – Gading yang sudah masuk ke dalam RTRW DIY. Pembangunan konektivitas ini akan memiliki dampak yang sangat signifikan untuk memberikan multiplier effect ekonomi kepada Kabupaten Gunungkidul. Dengan demikian, penyiapan berbagai potensi investasi di locus Prambanan Boko sangat tepat untuk dilakukan karena memiliki kesinambungan dengan rencana pembangunan regional DIY.</p> <p>Jalan penghubung Prambanan-Gading dalam konsep pemikiran ini menjadi sangat strategis karena luberan ekonomi yang terjadi di Sleman timur melalui exit tol dan ITMP BYP dapat mencapai Gunungkidul sisi utara yang saat ini menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Gunungkidul untuk mengimbangi sisi selatan yang sudah terbangun dengan baik secara alami melalui wisata pantai.</p>	investasi yang sedang akan dikembangkan adalah impact investing dimana Kementerian Investasi /BKPM RI dalam beberapa tahun terakhir sangat mendorong daerah untuk menggarap sektor ini sebagai alternatif potensi investasi yang sifatnya mainstream.

I) URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	KONI dimohon memperhatikan kesejahteraan atlet dan pelatih. Antara lain dengan menaikkan bonus bagi atlet yang berprestasi. Sudah banyak atlet dan pelatih DIY yang pindah daerah karena tawaran bonus yang lebih besar dan menjanjikan pekerjaan tetap	Kesejahteraan atlet dan pelatih merupakan salah satu faktor yang diutamakan dalam pengelolaan anggaran KONI yang berasal dari hibah Gubernur DIY. Pada tahun 2021, KONI mengalokasikan Rp4.390.000.000,00 untuk insentif atlet dan Rp2.360.000.000,00 untuk insentif pelatih yang mengikuti Puslatda dalam rangka persiapan PON XX di Papua. Di samping itu, KONI masih mengalokasikan uang saku bagi para atlet yang akan mengikuti Puslatnas maupun kejuaraan di level nasional dan internasional sebesar Rp1.967.500.000,00. Pemda DIY juga turut mengupayakan adanya pemberian penghargaan prestasi bagi para atlet dan pelatih apabila berhasil meraih kejuaraan pada berbagai kejuaraan multievent baik di tingkat daerah, nasional, maupun internasional mengingat pada tahun 2021 berbagai kejuaraan sudah kembali dilaksanakan.	Pada tahun 2021 KONI sudah merealisasikan insentif dan bantuan untuk penyelenggaraan ujicoba bagi para atlet dan pelatih yang mengikuti Puslatda untuk persiapan PON XX. Puslatda sudah dilakukan intensif sejak bulan Januari 2021 dan diikuti dengan tahap prakompetisi atau penyelenggaraan ujicoba oleh tiap Pengda mulai bulan April 2021. Pada tahap prakompetisi ini setiap Pengda mulai melakukan latihan tanding dengan atlet dari provinsi lain sehingga sering dilakukan pengiriman atlet ke luar daerah. KONI juga selalu memberikan fasilitasi bagi penyelenggaraan pelatihan yang dirasa perlu diselenggarakan di luar DIY karena keterbatasan sarana olahraga.
2	Kami melihat Capaian indikator Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan pada tahun 2020 belum dapat mencapai target yang ditetapkan, yaitu tercapai 10,02% dari target 10,90%. Dibandingkan dengan capaian pada tahun 2019 tidak terdapat peningkatan di tahun 2020 dan masih	Belum tercapainya target indikator Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan pada tahun 2020 utamanya adalah karena banyaknya kegiatan yang dibatalkan akibat pandemi COVID-19, terutama untuk kegiatan kepemudaan yang sifatnya berjenjang dan dikoordinir langsung oleh Kementerian Pemuda	Pada tahun 2021 di bulan April telah diselenggarakan seleksi Paskibraka dan akan dilanjutkan dengan pelatihan di bulan Juni. Untuk kegiatan pelatihan dan lomba kewirausahaan pemuda akan mulai dilaksanakan pada triwulan 3 sehingga semester pertama tahun 2021

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	terdapat selisih 1,78% antara capaian tahun 2020 dengan target akhir RPJMD. Pada tahun 2020 terdapat beberapa kendala yang dialami dalam penyelenggaraan kegiatan kepemudaan, antara lain:	<p>dan Olahraga, penyelenggaraan kegiatan sangat bergantung kepada kebijakan dan anggaran pemerintah pusat.</p> <p>Pada tahun 2021, Pemda DIY memfasilitasi penyelenggaraan Pelatihan Keterampilan Pemasaran Online untuk 59 kelompok wirausaha, Pelatihan kewirausahaan untuk pemuda di wilayah kantong kemiskinan sebanyak 20 kelompok pemuda, Sosialisasi Kepemudaan untuk 7 kelompok pemuda, lomba Sentra Kewirausahaan Pemuda (SKP) dengan target pembinaan pemenang untuk 6 kelompok wirausaha, serta Seleksi dan Pelatihan Paskibraka dengan target peserta 80 siswa. Adapun alokasi anggaran seluruh kegiatan kepemudaan di tahun 2021 adalah sebesar Rp3.668.243.000,00.</p> <p>Pada tahun 2022, Pemda DIY merencanakan alokasi anggaran sebesar Rp6.616.200.000,00 untuk penyelenggaraan Pelatihan Keterampilan Pemasaran Online, Pelatihan kewirausahaan pemuda di wilayah kantong kemiskinan, lomba Sentra Kewirausahaan Pemuda (SKP), Seleksi dan Pelatihan Paskibraka, fasilitasi penyelenggaraan seleksi dan pengiriman Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN), Jambore Pemuda Daerah (JPD), dan pelatihan Pemuda Kader Anti Narkoba DIY.</p> <p>Terkait dengan pandemi COVID-19 yang belum berakhir pada tahun 2021, penyelenggaraan kegiatan kepemudaan yang banyak membutuhkan praktik lapangan akan dibagi dalam beberapa sesi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat</p>	<p>ini digunakan untuk memastikan persiapan lokasi dan menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan sesuai protokol kesehatan. Dengan demikian walaupun dibutuhkan praktik lapangan maupun kunjungan pada penyelenggaraan lomba Sentra Kewirausahaan Pemuda, protokol kesehatan tetap dapat diterapkan dengan ketat.</p>
3	Keterbatasan penyelenggaraan kegiatan kepemudaan secara tatap muka akibat pandemi COVID-19.	Pada tahun 2021, Pemda DIY memfasilitasi penyelenggaraan Pelatihan Keterampilan Pemasaran Online untuk 59 kelompok wirausaha,	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan dan seleksi kegiatan pemuda
4	Pembatalan kegiatan yang penyelenggaraannya dikoordinir oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, misalnya Pertukaran Pemuda Indonesia Korea (PPIKor) sesuai surat dari Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor PP.04.01/3.23.1/D-II.5/III/2020 Tanggal 23 Maret 2020.	<p>Pelatihan kewirausahaan untuk pemuda di wilayah kantong kemiskinan sebanyak 20 kelompok pemuda, Sosialisasi Kepemudaan untuk 7 kelompok pemuda, lomba Sentra Kewirausahaan Pemuda (SKP) dengan target pembinaan pemenang untuk 6 kelompok wirausaha, serta Seleksi dan Pelatihan Paskibraka dengan target peserta 80 siswa. Adapun alokasi anggaran seluruh kegiatan kepemudaan di tahun 2021 adalah sebesar Rp3.388.992.000,00. Pada tahun 2022, Pemda DIY merencanakan alokasi anggaran sebesar Rp4.494.254.500,00 untuk penyelenggaraan Pelatihan Keterampilan Pemasaran Online, Pelatihan kewirausahaan pemuda di wilayah kantong kemiskinan, lomba Sentra Kewirausahaan Pemuda (SKP), Seleksi dan Pelatihan Paskibraka, fasilitasi penyelenggaraan seleksi dan pengiriman Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN), dan pelatihan Pemuda Kader Anti Narkoba DIY.</p> <p>Terkait dengan pandemi COVID-19 yang belum berakhir pada tahun 2021, penyelenggaraan kegiatan kepemudaan yang banyak membutuhkan praktik lapangan akan dibagi dalam beberapa sesi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.</p>	

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
5	Keterbatasan pelaksanaan pelatihan kewirausahaan maupun workshop kepemudaan yang melibatkan banyak peserta dan praktik intensif di lapangan. Akibatnya, kegiatan lebih banyak dilaksanakan dalam forum alumni kegiatan tahun sebelumnya secara daring maupun tatap muka sangat terbatas	Pada tahun 2021, Pemda DIY memfasilitasi penyelenggaraan Pelatihan Keterampilan Pemasaran Online untuk 59 kelompok wirausaha, Pelatihan kewirausahaan untuk pemuda di wilayah kantong kemiskinan sebanyak 20 kelompok pemuda, Sosialisasi Kepemudaan untuk 7 kelompok pemuda, lomba Sentra Kewirausahaan Pemuda (SKP) dengan target pembinaan pemenang untuk 6 kelompok wirausaha, serta Seleksi dan Pelatihan Paskibraka dengan target peserta 80 siswa. Adapun alokasi anggaran seluruh kegiatan kepemudaan di tahun 2021 adalah sebesar Rp3.388.992.000,00. Pada tahun 2022, Pemda DIY merencanakan alokasi anggaran sebesar Rp4.494.254.500,00 untuk penyelenggaraan Pelatihan Keterampilan Pemasaran Online, Pelatihan kewirausahaan pemuda di wilayah kantong kemiskinan, lomba Sentra Kewirausahaan Pemuda (SKP), Seleksi dan Pelatihan Paskibraka, fasilitasi penyelenggaraan seleksi dan pengiriman Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN), dan pelatihan Pemuda Kader Anti Narkoba DIY. Terkait dengan pandemi COVID-19 yang belum berakhir pada tahun 2021, penyelenggaraan kegiatan kepemudaan yang banyak membutuhkan praktik lapangan akan dibagi dalam beberapa sesi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan dan seleksi kegiatan pemuda
6	Kami memberikan semangat bahwa di tahun 2021 ini awal kebangkitan olah raga dan pemuda di DIY dapat sinergi agar beberapa kendala diatas dapat segera teratasi dengan baik meski dengan segala keterbatasan dan melakukan Proses yang ketat.	Tindak lanjut: Dalam rangka PON XX di Papua bulan Oktober 2021, KONI DIY telah melakukan persiapan sejak tahun 2020. Pada bulan Januari s.d. Maret 2020, Puslatda telah dilakukan secara intensif. Dengan adanya pandemi COVID-19, pola pelatihan kemudian diubah menjadi pelatihan mandiri selama bulan April s.d. Desember 2020. Untuk dapat melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelatihan mandiri atlet, KONI DIY melaksanakan bimbingan teknis bagi para pelatih guna merumuskan sistem evaluasi latihan mandiri dan mengukur kemajuan atlet. Mulai bulan Januari 2021, KONI DIY kembali menerapkan periodisasi khusus untuk persiapan PON XX, yaitu tahap persiapan pada bulan Januari s.d. April 2021, tahap prakompetisi bulan April s.d. Agustus 2021, tahap evaluasi pada bulan Agustus s.d. September 2021, dan tahap kompetisi di bulan Oktober 2021. Pada tahap persiapan di awal tahun 2021, pelatihan kembali dilakukan secara intensif dengan protokol kesehatan yang ketat. Selain mengharuskan seluruh personil yang terlibat untuk melakukan tes swab secara berkala, pelatihan juga dilaksanakan secara tertutup dengan hanya dihadiri oleh atlet dan pelatih guna menghindari kontak fisik dengan banyak orang. Utamanya pada cabang olahraga beregu seperti voli pasir dan polo air, KONI DIY menetapkan penjagaan protokol kesehatan yang lebih ketat karena kontak fisik lebih banyak terjadi saat latihan berlangsung. Untuk memastikan penyelenggaraan latihan berjalan sesuai dengan protokol kesehatan dan memberikan	Penyelenggaraan latihan rutin yang berkesinambungan sebagai persiapan atlet untuk berlaga di ajang kompetisi olahraga, walaupun dilaksanakan secara bauran di masa pandemi. Penyelenggaraan latihan ini juga didukung oleh penyempurnaan dan pemeliharaan sarana olahraga

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		hasil semaksimal mungkin, KONI DIY membentuk Tim Satgas yang beranggotakan 8 orang untuk melakukan pemantauan dan evaluasi rutin di setiap cabang olahraga yang turut serta dalam Puslatda. Di tahap prakompetisi yang dimulai di bulan April 2021, Pengda mulai melakukan ujicoba atau latihan tanding dengan atlet dari provinsi lain. Ujicoba ini dilakukan secara mandiri oleh masing-masing Pengda dengan jadwal yang sudah ditentukan dan dilaksanakan baik di dalam maupun luar DIY. Sesuai rencana, evaluasi akan dilakukan pada bulan Agustus s.d. September untuk meninjau kembali kesiapan para atlet mengikuti PON XX. Diharapkan dari hasil evaluasi, perbaikan dapat dilakukan sehingga para atlet DIY meraih prestasi yang maksimal pada PON XX. KONI DIY berharap periodisasi yang diterapkan untuk menghadapi PON XX melalui Puslatda 2021 ini dapat menjadi awal pembentukan pola pembinaan olahraga prestasi di DIY, mengingat dalam menghadapi kompetisi dibutuhkan persiapan jangka panjang dari atlet maupun pelatih pembina.	

m) URUSAN PERSANDIAN

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Peningkatan SDM persandian.	<p>Pelatihan Teknis Keamanan Siber bagi Pimpinan yang diselenggarakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (pendaftaran bagi eselon III dan Eselon IV;</p> <p>Pelatihan dan Sertifikasi EC-Council Certified Ethical Hacker (ECIH) yang diselenggarakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara;</p> <p>Pelatihan dan Sertifikasi Certified Ethical Hacker (CEH) yang diselenggarakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara;</p> <p>Pelatihan Teknis Pengelolaan CSIRT oleh Badan Siber dan Sandi Negara bagi petugas pelaksana</p> <p>Pelatihan Teknis Penetration Testing bagi anggota JOGJAPROVCSIRT yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika DIY</p> <p>Mengikuti webinar SANDIKAMIMANIA #11 – Building Awareness By Collaborating Among Stakeholder Of Cyber Incident Response And Management In The Regional Government yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat;</p>	<p>Upaya peningkatan kompetensi personil yang bekerja di bidang Keamanan Informasi dan Persandian meliputi pejabat struktural dan pelaksana melalui pengiriman personil untuk mengikuti pendidikan teknis yang diselenggarakan oleh instansi pusat, daerah, maupun pihak ke-3;</p> <p>Memberikan pengetahuan kepada penyelenggara persandian di lingkungan Pemda DIY dan Kabupaten/Kota se-DIY;</p> <p>Mempersiapkan personil penyelenggara Keamanan Informasi dan Persandian supaya mampu mengimplementasikan Teknik Pengamanan Informasi/Persandian dalam upaya mengamankan informasi yang ada di lingkungan Pemda DIY, baik melalui Teknik/metode pengamanan ataupun sistem informasi/aplikasi yang ada di Pemda DIY.</p>

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<p>Training Enterprise Network design and Hands-On oleh Dinas Komunikasi dan Informatika DIY dengan Cumscope Ruckus dengan materi Pengelolaan Jaringan Local Area Network</p> <p>Sosialisasi Keamanan Informasi bagi penyelenggara Keamanan Informasi dan Persandian di Pemda DIY dengan materi Sertifikat Elektronik untuk perlindungan data;</p> <p>Sosialisasi tentang pentingnya Penetration Testing terhadap aplikasi/sistem informasi yang digunakan di lingkungan Pemda DIY dan Kabupaten/Kota untuk meminimalisir kerawanan terhadap informasi.</p>	

n) URUSAN KEBUDAYAAN

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Pemda DIY hendaknya berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan DIY untuk memasukan materi kebudayaan dalam kurikulum pendidikan di DIY, agar keterpaduan spirit Keistimewaan itu betul-betul nyata dan menyatu, sejak usia dini hingga Lansia, sejak Paud hingga Perguruan Tinggi.	<p>Tindaklanjut atas rekomendasi Internalisasi spirit keistimewaan: Internalisasi spirit keistimewaan tahun 2021 dan 2022 telah direncanakan dan akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan dengan sasaran untuk Tenaga Pendidik adalah: Internalisasi nilai-nilai Pendidikan berbasis budaya dengan sasaran tenaga pendidik untuk jenjang SD, SMP, SMA, SMK dan SLB; - Penyelarasan kurikulum Bahasa Jawa untuk SD, SMP, SMA dan SMK yang ada di DIY. <p>Kegiatan dengan sasaran untuk peserta didik:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan festival budaya Pendidikan khusus merupakan ajang pameran dan unjuk seni atas spirit keistimewaan peserta didik SLB; - Gerakan seniman masuk sekolah untuk memberikan bimbingan kebudayaan bagi peserta didik sesuai minat sekolahnya; - Gladi kaweruh merupakan perlombaan untuk melihat pemahaman dan pengetahuan mengenai kebudayaan DIY; - Ngudhar Kaweruh Tembang merupakan bedah makna dan filosofi tembang Jawa yang tentunya berkonteks untuk internalisasi spirit keistimewaan; 	Spirit Keistimewaan dapat disampaikan ke masyarakat melalui jalur Pendidikan sesuai kewenangan Kabupaten-Kota dan DIY.

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
2	Pada tahun 2020 pengembangan di arahkan untuk pemerataan akses masyarakat akan sarana prasarana budaya dan peningkatan kemampuan penyelenggaraan even budaya. Penyelenggaraan even budaya di masa pandemi mengalami banyak perubahan Konsep. Perubahan tersebut mengadaptasi dengan protokol kesehatan dalam rangka mengurangi penyebaran Penyakit COVID-19. Perubahan konsep tersebut menjadikan beberapa penyelenggaraan kegiatan yang awalnya berbentuk penyelenggaraan secara langsung kini diubah menjadi menjadi penyelenggaraan Even Budaya secara daring melalui akun Youtube milik Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan). Secara bertahap kami merekomendasikan di tahun 2021 secara perlahan dapat secara fisik dengan proses yang ketat dengan tujuan kedepan penyelenggaraan budaya di DIY dapat secara perlahan normal kembali.	Tindaklanjut atas rekomendasi atas pelaksanaan even: Dinas kebudayaan DIY sejak tahun 2020 maupun tahun 2021 telah memulai menyelenggarakan even kebudayaan secara model hybrid (perpaduan antara luring dan daring) dengan mengedepankan protokol Kesehatan. Dengan model ini dilaksanakan dengan mengundang peserta dan atau penonton secara langsung dengan jumlah sesuai dengan ketentuan adaptasi kebiasaan baru.	Masyarakat dapat mengakses fasilitas seni budaya untuk masyarakat melalui media publikasi Dinas Kebudayaan DIY. Penyelenggaraan kegiatan diatur dengan proses yang ketat dengan jumlah pelaku seni terbatas.

o) URUSAN PERPUSTAKAAN

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	DPRD DIY merekomendasikan kepada Pemda DIY untuk melakukan pencermatan dan kajian secara mendalam peranan perpustakaan dalam peningkatan kualitas Pendidikan di DIY. Perlu dibangun sinergi lintas OPD dalam mengukur dimensi kemanfaatan tersebut.	<p>Untuk rekomendasi pada point 1 DPAD DIY akan melakukan tindaklanjut sebagai berikut: Pelaksanaan program/kegiatan dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan di DIY melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menindaklanjuti amanah Perda Penyelenggaraan Perpustakaan No. 1 Tahun 2021 dengan menerbitkan 5 Pergub di bidang teknis pelaksanaan penyelenggaraan perpustakaan yang akan diselesaikan hingga tahun 2023. - Melaksanakan kajian penelusuran naskah kuno milik Kraton dan Pakualaman, yang sewaktu era penjajahan berpindah di Negara Belanda dan Negara Inggris - Melaksanakan proses Akreditasi Perpustakaan bagi perpustakaan khusus, umum dan sekolah yang belum terstandar sesuai amanah UU No.43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan - Pembinaan dan pengembangan gerakan literasi di semua segmen dan pengembangan inklusi sosial masyarakat - Pengembangan digital jadi proses penyelenggaraan perpustakaan dengan segmen masyarakat sebagai pemustaka - Mendorong perbaikan sarana prasarana penunjang penyelenggara perpustakaan di DIY dan mendorong pengembangan jejaring sosial penyelenggaraan perpustakaan dengan stakeholder <p>Pencermatan dan kajian peranan perpustakaan dalam peningkatan kualitas pendidikan DIY</p> <p>Sebagai perpustakaan umum penyelenggaraan perpustakaan diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial ekonomi.</p>	<p>Tujuan / Masalah Yg Diselesaikan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberi kepastian hukum bagi penyelenggara perpustakaan dan penyiapan aturan teknis dalam penyelenggaraan perpustakaan - Mensukseskan program perpustakaan dalam pelaksanaan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar pada terstandarnya penyelenggaraan perpustakaan di wilayah DIY - Pelestarian budaya Jawa yang adiluhung sebagai keistimewaan DIY - Meningkatkan budaya literasi masyarakat Yogyakarta - Penyelenggaraan perpustakaan di DIY sesuai tantangan perkembangan zaman era Revolusi Industri 4.0 - Tersedianya dokumen kajian peranan perpustakaan dalam peningkatan kualitas pendidikan DIY

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<p>Amanat tersebut berdampak pada beragamnya jenis koleksi dan layanan yang harus disediakan oleh DPAD DIY termasuk dengan mempertimbangkan dan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Layanan perpustakaan menasar seluruh lapisan masyarakat baik masyarakat sebagai pelajar/mahasiswa, pekerja, masyarakat umum, masyarakat berkebutuhan khusus termasuk masyarakat yang sedang menjalani proses hukuman (narapidana).</p> <p>Mengukur kemanfaatan, peranan perpustakaan dalam peningkatan kualitas pendidikan DIY dalam bentuk sebuah kajian menuntut kerja sama dan dukungan banyak pihak, lintas organisasi perangkat daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, instansi pemerintah daerah maupun instansi pusat termasuk organisasi/komunitas.</p>	
2	<p>Peningkatan drastis kunjungan pemustaka secara virtual sebanyak 716.730 orang selama tahun 2020, bisa menjadi titik tolak yang sangat bagus untuk pengembangan akses kemudahan kepada masyarakat dalam memanfaatkan layanan Perpustakaan DIY. Oleh karena itu, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah perlu didorong untuk terus melakukan inovasi pelayanan.</p>	<p>Untuk rekomendasi nomor 2 DPAD DIY akan melakukan tindaklanjut sebagai berikut:</p> <p>Peran perpustakaan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di DIY:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan jumlah perpustakaan yang sesuai standar nasional, melalui pembinaan perpustakaan oleh DPAD DIY sebanyak 43% pada tahun 2020. Dari tahun 2011 sampai dengan 2019 perpustakaan yang memenuhi standar hanya 274 perpustakaan dan di tahun 2020 menjadi 393. - Persentase pelajar dan mahasiswa yang memanfaatkan koleksi perpustakaan sebesar 90% dari keanggotaan sampai dengan triwulan I Tahun 2021. - Kerja sama JLA (Jogja Library for All) sebanyak 39 Anggota perpustakaan dan 82% keanggotaan tersebut (32 anggota) berasal dari dunia pendidikan - Pemberian layanan perpustakaan keliling kepada perpustakaan sekolah melalui kerja sama dengan Singapore International Foundation yaitu pemberian layanan keliling dan sarana prasarana <p>Optimalisasi layanan virtual/daring. Kegiatan layanan dilakukan melalui daring antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Layanan Peminjaman Online - Layanan Bebas Pustaka Online - Layanan Pendaftaran Anggota Online - Layanan Penelusuran Informasi Online - Pembuatan Konten konten secara virtual (pengenalan layanan anak, read aloud, review buku, mendongeng, koleksi langka, paket buku, RBM, JLC, dll) - Peningkatan Kreatifitas secara virtual - Bedah Naskah secara virtual - Telaah Pustaka secara virtual - Layanan iJogja - Layanan Pemustaka Istimewa - Webinar Kepustakawanan - Lomba Lomba online 	<p>Rencana tindaklanjut pada point 2 untuk mencapai tujuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memudahkan penyebaran informasi di masa pandemi - Pemenuhan kebutuhan informasi bagi masyarakat DIY

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<ul style="list-style-type: none"> - Giveaway (hadiah) - Akses media: <ul style="list-style-type: none"> • Youtube : Balai Yanpus DPAD DIY • Instagram : balaiyanpus_dpaddiy • Facebook : balaiyanpus_dpaddiy • Twitter : : balaiyanpus_diy • Tik Tok : : balaiyanpus • Aplikasi : iJogja.id • Website : <ul style="list-style-type: none"> - dpad.jogjaprov.go.id - balaiyanpus.jogjaprov.go.id - dpad.jogjaprov.go.id/coe - jogjalib.com 	

p) URUSAN KEARSIPAN

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Menjadi rekomendasi Panitia Khusus, penyelenggaraan kearsipan di DIY untuk merujuk pada dua produk hukum, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan dan juga melaksanakan Perda Nomor 5/2018.	<p>Rencana tindakan lanjut yang akan dilaksanakan sebagai berikut :</p> <p>Penyusunan Peraturan Gubernur DIY. Menindaklanjuti amanat Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 dengan menyusun menyusun peraturan Gubernur yang saat ini belum ada sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Gubernur tentang Layanan Jasa Kearsipan (Tahun 2021 Penyusunan Daftar Inventaris Masalah). - Peraturan Gubernur tentang Arsip Statis (Tahun 2021 Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur). - Peraturan Gubernur tentang Fasilitas penyelenggaraan kearsipan kasultanan dan kadipaten (masih dalam proses identifikasi dan koordinasi). - Merevisi Peraturan Gubernur yang sudah ada tetapi belum selaras/ tidak sesuai dengan dinamika yang ada sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Gubernur tentang Tata Naskah Dinas (Tahun 2021) • Peraturan Gubernur tentang Kode Klasifikasi (Tahun 2022) • Peraturan Gubernur tentang SKKAAD (Tahun 2021) • Peraturan Gubernur tentang JRA (Belum direncanakan) <p>Digitalisasi Arsip Tindak lanjut</p>	<p>Tujuan/ Masalah yang diselesaikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi amanat Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan. - Memberikan arah dan pedoman teknis dalam penyelenggaraan kearsipan; - Memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan kearsipan. <p>Tujuan/ Masalah yang diselesaikan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modernisasi dalam pengelolaan arsip dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; - Menjawab tantangan jaman dengan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi; - Optimalisasi dalam penyelenggaraan layanan arsip - Upaya melestarikan dan menyelamatkan arsip sebagai sumber informasi primer. <p>Tujuan/ Masalah yang diselesaikan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menumbuhkan budaya sadar arsip bagi masyarakat; - Menanamkan budaya tertib arsip bagi generasi muda; - Meningkatkan apresiasi kearsipan dengan mengenalkan arsip dalam bentuk visualisasi. <p>Sosialisasi Kearsipan</p>

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<ul style="list-style-type: none"> - Melanjutkan program digitalisasi arsip statis dalam rangka layanan dan pelestarian arsip dengan cara alih media arsip dalam bentuk digital (Sudah dilaksanakan setiap tahun); - Melanjutkan pengembangan program jaringan layanan kearsipan melalui Sistem Informasi Kearsipan Statis (SIKS), Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN), maupun media akses (Sudah dilaksanakan setiap tahun); - Mengembangkan jaringan informasi kearsipan yang terintegrasi dengan jaringan perpustakaan dan sumber informasi lain (Tahun 2021 dalam bentuk Proposal/ Term of Reference); - Mengembangkan aplikasi kearsipan dalam penyelenggaraan kearsipan (Tahun 2021 menyusun aplikasi pengawasan kearsipan dan Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Tata Naskah DInas Elektronik). <p>Sosialisasi Kearsipan</p> <p>Tindaklanjuti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan kegiatan sosialisasi kearsipan melalui pameran arsip (Tahun 2021 diselenggarakan 6 kali pameran); - Merencanakan kegiatan sosialisasi kearsipan untuk masyarakat dan generasi muda dalam bentuk lomba apresiasi kearsipan bagi siswa SMA/ SMK (bercerita sejarah berbasis kearsipan); - Sosialisasi diorama kearsipan (Tahun 2022). 	<p>Tindaklanjuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan kegiatan sosialisasi kearsipan melalui pameran arsip (Tahun 2021 diselenggarakan 6 kali pameran); - Merencanakan kegiatan sosialisasi kearsipan untuk masyarakat dan generasi muda dalam bentuk lomba apresiasi kearsipan bagi siswa SMA/ SMK (bercerita sejarah berbasis kearsipan); <p>Sosialisasi diorama kearsipan (Tahun 2022).</p>

c. URUSAN PEMERINTAH PILIHAN

1) URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Perlunya pendampingan dan fasilitasi akses pemasaran perikanan budidaya maupun perikanan tangkap agar terserap di pasar selama pandemi COVID-19 yang saat ini masih berlangsung, sehingga produksi perikanan di DIY akan meningkat selama Pandemi COVID-19.	Telah dilakukan pendampingan dan fasilitasi akses pemasaran hasil perikanan oleh Dinas kelautan dan Perikanan DIY berupa:	Ketersediaan sarana produksi perikanan budidaya seperti benih/ induk, dan pakan yang memadai baik dari segi kualitas dan kuantitas akan menjamin peningkatan produksi perikanan budidaya. Selain itu peningkatan kapasitas pembudidaya ikan akan membuat proses budidaya menjadi lebih produktif serta meminimalisir biaya dengan penggunaan pakan mandiri. Dukungan terhadap penyediaan sarana seperti BBM, asuransi, insentif/fasilitasi dan pelatihan kemampuan bagi nelayan akan membuat produksi sektor perikanan tangkap meningkat. Sehingga produksi yang tinggi dan diimbangi dengan jaringan pemasaran yang luas akan
2	Rendahnya PDRB sektor perikanan disebabkan karena tingginya biaya produksi akibat terus meningkatnya harga pakan ikan. Mahalnya operasional melaut menjadi faktor yang menyebabkan menurunnya pendapatan nelayan dan pembudaya perikanan. Untuk mengatasi hal tersebut di atas, maka OPD terkait diminta untuk bersungguh-sungguh	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan pasar mina sebagai sarana pemasaran produk hasil perikanan agar dapat meningkatkan omzet dan pendapatan pelaku usaha perikanan dan kelautan di DIY - Fasilitasi kegiatan Temu Kemitraan antar pelaku usaha perikanan dan kelautan di DIY sehingga didapatkan perjanjian kerja sama wirausaha. - Inisiasi surat edaran tentang himbauan untuk melakukan pembelian produk pangan lokal DIY (termasuk produk hasil perikanan) melalui Forum TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) 	

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	memberikan solDusi, baik masalah pakan maupun bibit ikan, insentif bagi nelayan. Program-program yang dilakukan diharapkan berkesinambungan, tepat sasaran dan terukur sehingga memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan PDRB sektor perikanan di DIY. Para pembudidaya difasilitasi secara optimal untuk dapat membuat pakan sendiri dari bahan baku lokal yang murah dan terjangkau. Demikian juga untuk masalah bibit ikan yang berkualitas baik, diupayakan agar dapat dilakukan di wilayah DIY.	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY memiliki Program dan Kegiatan yang salah satunya yakni Pelatihan dan Hibah bagi para pembudidaya ikan. Hal tersebut berdampak kepada peningkatan pendapatan individu dari semua anggota kelompok penerima hibah. Dampak lainnya yakni meningkatnya kapasitas individu anggota kelompok yang akan bermanfaat secara berkelanjutan untuk kegiatan budidaya perikanan bagi anggota kelompok tersebut. Terkait dengan mahalnya harga pakan dan benih maka Dinas Kelautan dan Perikanan DIY memiliki solusi yakni :	meningkatkan PDRB Subsektor Perikanan yang berdampak kepada kesejahteraan masyarakat Yogyakarta.
3	Para nelayan yang menggantungkan hidupnya pada penangkapan ikan di laut sangat ditentukan oleh cuaca, biaya tinggi dalam melaut karena kesulitan terhadap akses BBM, advokasi pemerintah DIY dalam mendampingi nelayan terkait regulasi perijinan kapal, revitalisasi infrastruktur yang ada. Nelayan perlu terus diberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mereka. Insentif atas nelayan lokal perlu menjadi perhatian, sebagai upaya dalam mengadaptasi dari budaya agraris menjadi budaya maritim bagi nelayan di DIY. Termasuk kemampuan untuk mengelola dan mengoperasikan kapal-kapal ikan besar serta membantu kemudahan dalam perijinan kapal.	<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan pelatihan dan hibah terkait pakan mandiri yang sudah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan DIY. Dengan pelatihan tersebut maka diharapkan pembudidaya ikan dapat menghemat cost pakan yang merupakan komponen tertinggi dari usaha perikanan budidaya. - Meningkatkan kapasitas pembudidaya ikan untuk menggunakan pakan mandiri berbasis lokal serta dilakukan kunjungan lapangan terhadap pembudidaya yang sudah melakukan budidaya dengan pakan mandiri. - Mempertemukan stakeholder terkait dalam usaha perikanan budidaya. Dengan adanya pertemuan antara stakeholder maka diharapkan akan terjadinya pertukaran ilmu, memperlancar distribusi, serta membuka peluang pemasaran komoditas budidaya. - Terkait dengan ketersediaan benih dan induk unggul bersertifikat, saat ini Dinas Kelautan Perikanan DIY melalui UPTD BPTPB sudah mengembangkan berbagai strain unggul baik komoditas air tawar, payau, dan laut yakni "Ikan Nilasa", "Ikan Najawa", "Tawes Jois", dan yang akan segera rilis yakni ikan Galah "Sijawa" yang saat ini sedang dalam proses rilis oleh KKP. Dengan pengembangan induk unggul diharapkan mampu mensupport pembudidaya ikan di Yogyakarta pada khususnya. 	
4	Perlunya me-redisaign Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto agar bisa segera dimanfaatkan sehingga tidak menjadi proyek mangkrak, mengingat banyak permasalahan terkait dengan konstruksi Pembangunan Pelabuhan Tanjung Adi Karto. Perlunya dibuat tata kala (tenggat waktu) terkait keberlangsungan pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto sehingga jelas target yang akan dicapai dengan proses pembangunan Pelabuhan Adi Karto tersebut. Optimalisasi pembangunan Pelabuhan Perikanan Pelabuhan Gesing perlu segera diwujudkan untuk mendorong peningkatan produksi perikanan di DIY.		
5	Perlunya optimalisasi penggunaan Dana Keistimewaan untuk urusan perikanan dan kelautan untuk mewujudkan visi Gubernur DIY pada RPJMD 2017-2022 dalam menyongsong abad Samudera Hindia.	Selain hal tersebut kerja sama dengan instansi lain juga merupakan salah satu usaha yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan DIY untuk menyediakan benih unggul di DIY, saat ini Dinas Kelautan dan Perikanan DIY sudah menjalin kerja sama terkait dengan Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi, Balai Penelitian Pemuliaan Ikan (BPPI) Sukamandi, Universitas Gajah Mada dan pihak lainnya. Kerja sama yang dilakukan yakni terkait dengan pengembangan broodstock center.	

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<p>Terkait dengan insentif terhadap nelayan saat ini Pemda DIY dan DPR tengah menyusun Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Hal tersebut dapat dijadikan dasar untuk membuat program/kegiatan untuk melindungi usaha serta memberikan insentif bagi pelaku usaha perikanan</p> <p>Ketersediaan BBM sangat mempengaruhi aktivitas nelayan untuk melaut. Saat ini di PPP Sadeng sudah memiliki Sub Penyalur BBM Subsidi di dua tempat yakni di Desa Pucung dan di PPP Sadeng. Selain itu, dalam upaya mengadaptasi dari budaya agraris menjadi budaya maritim bagi nelayan di DIY serta melakukan pendampingan terhadap nelayan, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY memiliki solusi yakni :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan pelatihan untuk peningkatan kemampuan nelayan. - Melakukan kaderisasi nelayan baru guna meningkatkan jumlah nelayan di DIY. - Menjalin kerja sama yang baik dengan KSOP Cilacap untuk mempermudah perizinan bagi nelayan di Daerah Istimewa Yogyakarta. - Dengan adanya Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam maka diharapkan Dinas Kelautan dan Perikanan DIY mampu mewadahi pemberian insentif dan asuransi untuk nelayan. <p>Saat ini sudah ada review DED Pelabuhan perikanan Tanjung Adikarto tahun 2016 di mana ada beberapa alternatif untuk penyelesaian nya yaitu dengan penambahan panjang <i>Breakwater</i> pada sisi timur dan sisi barat kemudian berdasarkan hasil koordinasi dengan kemenkomaritim bahwa penyelesaian pembangunan Tanjung Adikarto akan kajian secara terintegrasi dengan Bandara NYIA yang akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat, sehingga dapat negatifikasi dari penyelesaian Pelabuhan Tanjung Adikarto dapat diminimalisir dan fungsi pelabuhan perikanan dapat beroperasi secara optimal.</p> <p>Selain melalui pendanaan APBN, juga dilakukan melalui skema pendanaan KPBU atau kerja sama pemerintah dengan badan usaha di mana saat ini sedang proses penyatuan aset dari beberapa apa kementerian dan Pemerintah Daerah sehingga apabila sudah disatukan asetnya baru bisa didanai oleh Bappenas untuk</p>	

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<p>pengadaan OBC (<i>Outline Business Case</i>) dan FBC (<i>Final Business Case</i>).</p> <p>Kegiatan-kegiatan yang ada di dana keistimewaan dilaksanakan dalam rangka mendukung Visi Gubernur pada RPJMD 2017-2022 dimana dinas kelautan dan perikanan ikut serta mensejahterakan masyarakat pesisir dan meningkatkan jiwa kebaharian. Dinas Kelautan dan Perikanan DIY menggunakan Dana Keistimewaan pada 2021 dan tahun 2022 yang peruntukannya untuk kelengkapan dokumen pengembangan PPI Gesing (amdal, DED), pengadaan tanah PPI Gesing, konsultan pengawas PPI Gesing, dan konstruksi PPI Gesing. Selain itu terdapat kegiatan lain seperti gerakan cinta laut, desa maritim dan pembangunan pasar ikan cangkkringan.</p>	

2) URUSAN PARIWISATA

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Mengembalikan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wancanegara seperti capaian pada tahun 2019 harus terus dilakukan.	<p>Memperhatikan situasi yang berkembang selama tahun 2020 sampai dengan Quartal kedua 2021 ini, untuk mengembalikan jumlah kunjungan wisatawan seperti pada tahun 2019 (sebelum mewabahnya covid-19) akan sangat tergantung dengan kebijakan Pemerintah Pusat, khususnya yang terkait dengan penanganan covid-19. Apabila wabah belum bisa dikendalikan dan pergerakan masyarakat masih dibatasi, jumlah kunjungan wisatawan di DIY sangat sulit untuk bisa kembali seperti tahun 2019. Menurut Organisasi Pariwisata Dunia (UNTWO) pariwisata dunia baru akan pulih pada tahun 2022. Beberapa studi juga menunjukkan bahwa sektor pariwisata membutuhkan waktu sekitar 5 tahun untuk kembali ke keadaan normal pasca pandemi ini. Namun pariwisata sebagai salah satu pilar pembangunan DIY tidak bisa dibiarkan mati.</p> <p>Kebijakan Pemerintah Pusat melalui yang mengatur perjalanan orang dalam negeri dalam masa pandemi COVID-19 termasuk aturan pengetatan perjalanan, Kebijakan Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Maret 2021 dan juga Kebijakan larangan mudik sangat mempengaruhi jumlah wisatawan yang berkunjung ke DIY.</p> <p>Akibat adanya pandemi global COVID-19, Indonesia mengalami lack of trust dari wisatawan mancanegara maupun domestik, dan yang sudah dilaksanakan Pemda DIY (Dinas Pariwisata DIY) saat ini adalah usaha meningkatkan kepercayaan terhadap wisatawan, dengan menerapkan New Normal pariwisata DIY sesuai protokol Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability (CHSE).</p> <p>Pandemi mengubah tren pariwisata dari mass tourism ke sustainable tourism. Preferensi traveling customized, personalized, localized, dan smaller in size untuk mengurangi transit dan</p>	Mengembalikan jumlah wisatawan seperti kondisi tahun 2019, belum bisa dilakukan dalam kurun waktu 2-3 tahun ini, dikarenakan kondisi pandemi global COVID-19 masih belum mereda. Upaya pemulihan membutuhkan waktu.

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<p>contactless. Perubahan paradigma pariwisata secara global pada era baru, dimana paradigma pariwisata berubah dari mass tourism menjadi quality tourism, yang fokus pendekatannya tidak pada jumlah kunjungan saja, akan tetapi pada jumlah belanja wisatawan, keberlangsungan kawasan wisatanya, dan faktor keselamatan dalam berwisata. Singkatnya, kepariwisataan yang berorientasi pada kualitas harus digarap dengan serius tanpa mengesampingkan kuantitas sehingga walaupun jumlah kunjungan wisatawan belum bisa kembali seperti tahun 2019, namun diharapkan jumlah belanja wisatawan bisa kembali meningkat sehingga manfaatnya untuk masyarakat tetap tinggi, dengan tentunya tetap memperhatikan keberlangsungan ekosistem sehingga tetap terjaga dan terjaminnya keselamatan wisatawan. yang perlu disiapkan DIY saat ini adalah bagaimana menumbuhkan “trust” (kepercayaan) masyarakat khususnya calon wisatawan baik wisatawan nusantara maupun mancanegara. Langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyiapkan industri pariwisata yang berstandar CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability), termasuk di dalamnya destinasi wisata DIY sudah menyiapkan diri dengan Pranatan Anyar Plesiran Jogja (Pariwisata DIY Era New Normal). Menyiapkan SDM pariwisata yang berdaya saing global dengan pendampingan, pelatihan dan sertifikasi. Dilakukan dengan pendanaan APBD, Danais maupun APBN, dengan target sasaran SDM pelaku wisata di 5 Kabupaten/Kota. Penguatan Koordinasi, integrasi dan sinergi antar pemangku kepentingan lintas sektor dan lintas wilayah yang bersifat Hexahelix dengan kolaborasi 6 (Enam Unsur) unsur subjek atau stakeholder pariwisata, yaitu: Academician (Akademisi), Business (Bisnis), Community (Komunitas), Government (Pemerintah), Media (Publikasi Media), dan Corporate Social Responsibility (CSR). yang sudah dilakukan antara lain dengan melakukan Forum Lintas Sektor, dengan forum ini salah satu output yang akan dihasilkan adalah adanya kerja sama untuk One Hotel One Desa Wisata, dan pada Maret 2021 telah ditetapkan SK Kepala Dinas Pariwisata DIY Nomor: 188/01583 tentang Penetapan Desa/Kampung Wisata Sebagai Mitra dari Hotel dan Perguruan Tinggi dalam Rangka Pengembangan Kemitraan Kepariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam SK tersebut terdapat 5 hotel dan 5 desa wisata yang akan bermitra dalam kurun waktu 3 tahun (2021-2024). Program ini akan berlanjut di tahun berikutnya dan akan melibatkan juga Perguruan Tinggi. <p>Untuk tetap mendukung hidupnya akomodasi hotel DIY, dimana reservasi libur lebaran minim, Dinas Pariwisata DIY menghimbau ASN DIY menginap di hotel saat libur lebaran kemarin. Ketua PHRI DIY, Deddy Pranowo Eryono mengatakan reservasi hotel selama libur lebaran Kamis (13/5/2021) - Kamis (20/5/3032) rata-rata di DIY saat diangka 0,8%. Lebaran tahun kemarin di angka sekitar 20%. Kebijakan penyekatan-penyekatan mudik ini sangat berpengaruh terhadap okupansi hotel selama lebaran kemarin.</p> <ol style="list-style-type: none"> Kerja sama CSR dengan BUMN/BUMD, maupun swasta di DIY. Kerja sama dengan BI dalam pembuatan Aplikasi Visiting Jogja, yang merupakan aplikasi pendataan kunjungan wisatawan di destinasi wisata dengan melakukan reservasi secara online dan pihak pemerintah dapat mendapatkan data real time mengenai jumlah kunjungan kategori usia, 	

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<p>asal daerah, pendapatan masing-masing destinasi sebagai data yang bisa diperoleh secara real time yang merupakan data akurat untuk menentukan strategi pengembangan pariwisata kedepan; SOP Pranatan Anyar Plesiran Jogja, BI men-support untuk cetak buku; BI juga membantu dalam pengelolaan cokelat dan glamp camp di Nglanggeran; membantu promosi kopi Menoreh melalui event kopi di Ambarrukmo Plaza.</p> <p>Kerja sama dengan BPD DIY: QRIS (Pembayaran non-tunai di Destinasi Wisata), Metode baru pembayaran tiket masuk destinasi wisata secara non tunai/cashless. Hal ini untuk mengurangi kontak fisik atau transfer virus COVID-19 melalui media uang; Memberikan bantuan fasilitasi perlengkapan dan peralatan kopi Natadamar di Mangunan.</p> <p>e. Walaupun dalam masa pandemi COVID-19, namun event-event pariwisata masih tetap dapat dilaksanakan walaupun secara hybrid (virtual event). Keberadaan event secara hybrid dengan kemasan yang menarik ini diharapkan akan menggugah minat wisatawan untuk dapat berkunjung ke DIY saat pandemi ini berlalu, dan akan tetap menghidupkan perekonomian para pekerja event.</p> <p>f. Mendorong destinasi wisata dan desa wisata untuk aktif dalam pemanfaatan platform digital (media sosial, seperti: instagram, fb, dll) sebagai sarana digital marketing dan pembuatan konten kreatif sebagai sarana edukasi yang efektif untuk menarik kepercayaan wisatawan. Platform digital tersebut dimanfaatkan untuk memberikan informasi terkait destinasi wisata DIY. Konten virtual tour yang menarik bisa menjadi daya ungkit untuk menarik wisatawan berkunjung ke DIY dalam masa pandemi ini, saat wisatawan belum dapat mengunjungi destinasi wisata secara langsung. Nantinya dengan virtual tour ini diharapkan berlanjut dengan adanya wisata fisik saat pandemi sudah berlalu, calon wisatawan sudah mempunyai gambaran destinasi mana saja yang akan mereka kunjungi.</p> <p>g. Rencana penerapan 25 paket wisata khusus Travel Corridor Arrangement untuk wisata domestik yang merupakan kerja sama dengan 10 provinsi anggota MPU (Mitra Praja Utama).</p>	
2	Perlu dukungan Pemerintah Daerah untuk pengembangan wisata yang dirintis kelompok masyarakat atau desa	<p>Dukungan Pemerintah Daerah untuk pengembangan wisata yang dirintis kelompok masyarakat atau desa.</p> <p>Pariwisata termasuk dalam sektor yang diharapkan dapat menunjang laju pemerataan di bidang ekonomi melalui berbagai aspek yang terkandung didalamnya seperti penyerapan tenaga kerja, penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan turut andil dalam pengentasan kemiskinan (Pro Pour Tourism).</p> <p>Oleh karena itu Pemerintah Daerah sangat mendukung pengembangan destinasi wisata yang dirintis oleh kelompok masyarakat atau desa. Mengoptimalkan peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai mitra kerja pemerintah dalam rangka mengembangkan sebuah destinasi wisata dengan tetap mengutamakan sustainable tourism.</p> <p>Konsep Community Based Tourism (CBT) dalam pengembangan pariwisata telah dilakukan oleh Pemda DIY dengan melakukan berbagai program kegiatan pendukung, seperti fasilitasi sarana prasarannya .</p>	Pemda DIY dalam hal ini Dinas Pariwisata DIY sangat mendukung pengembangan destinasi wisata yang dirintis oleh kelompok masyarakat atau desa. Konsep Community Based Tourism (CBT) telah diterapkan beberapa waktu dalam pengembangan pariwisata DIY.

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
3	Pemanfaatan Bandara NYIA bagi dunia pariwisata di DIY.	<p>Hal lain yang dilakukan Dinas Pariwisata selama ini yakni melakukan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaannya secara terarah dan terukur. Untuk memberikan pelatihan dasar, peningkatan ketrampilan dan pengujian kompetensi (sertifikasi) dalam hal skill and knowledge.</p> <p>Pemanfaatan Bandara YIA bagi dunia pariwisata di DIY.</p> <p>Bandara merupakan salah satu pintu masuk ke suatu kawasan untuk berbagai tujuan, termasuk berwisata. Terkait Bandara YIA yang sudah beroperasi secara penuh, tentunya diharapkan akan menjadi pintu masuk wisatawan ke DIY melebihi Bandara Adisucipto mengingat kapasitasnya yang jauh lebih besar. Langkah-langkahnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> Adanya Tourist Information Center (TIC) di terminal kedatangan yang merupakan pusat informasi pariwisata DIY, sebagai referensi bagi wisatawan yang berkunjung ke DIY dalam memutuskan aktivitas mereka selama di DIY. Hal ini terutama ditujukan kepada wisatawan yang berkunjung secara mandiri (individual guess), tidak melalui travel agent. Menyiapkan SDM lokal khususnya masyarakat Kulon Progo dan DIY pada umumnya, agar mampu bersaing menjadi tenaga kerja industri pariwisata khususnya di kawasan bandara YIA. Mengingat locus bandara berada di perbatasan DIY-Jateng, maka destinasi wisata perlu disiapkan agar menjadi pilihan utama wisatawan yang datang melalui bandara YIA ini, mengingat Jawa Tengah menjadi pesaing. Rekomendasi Pemda untuk membuat kebijakan terkait penambahan frekuensi penerbangan domestik dan luar negeri. Ketersediaan rute penerbangan langsung merupakan salah satu hal yang dipertimbangkan oleh calon wisatawan untuk mengunjungi suatu destinasi. 	<p>Kerja sama lintas sektor dilakukan untuk dapat mendukung pembangunan obyek wisata di DIY agar lebih berdaya saing dari Jawa Tengah, dan menciptakan strategi agar wisatawan banyak berbelanja di DIY, serta program ITMP BYP yang akan mengembangkan kawasan Borobudur, Yogyakarta dan Prambanan dengan area hampir di semua Kabupaten/Kota di DIY.</p>
4	Pembangunan Obyek wisata di DIY harus lebih baik dan unggul dari Jawa Tengah	<p>Pembangunan Obyek wisata di DIY harus lebih baik dan unggul dari Jawa Tengah</p> <p>Persaingan wisata antar wilayah di Indonesia semakin ketat, setiap daerah berlomba untuk membangun banyak destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi wisatawan.</p> <p>Kehadiran Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) juga dinilai mampu mendongkrak kinerja sektor pariwisata daerah Jawa Tengah khususnya, Purworejo.</p> <p>Pemda DIY (Dinas Pariwisata DIY) telah berupaya untuk mendorong Kabupaten/Kota untuk membangun destinasi wisata yang menarik dan juga memberikan dukungan berupa fasilitas sarprasnya, agar dapat bersaing dengan wilayah lainnya, dalam hal ini yang terdekat dengan Jawa Tengah. Saat ini juga banyak pihak swasta/investor yang secara massive membuat destinasi wisata baru di Yogyakarta dengan sasaran wisatawan milenial (anak muda), yang bersifat instagrameable. Namun keberadaan destinasi wisata baru ini pun seharusnya tetap diawasi baik dari segi dampak lingkungan yang ditimbulkan, juga bagaimana proses ijinnya. Tidak dapat dipungkiri destinasi wisata baru ini juga menjadi magnet baru wisatawan.</p> <p>4 (empat) komponen yang harus dimiliki oleh sebuah objek wisata, yaitu: attraction, accessibility, amenity dan ancilliary. DIY dengan topografi yang tidak begitu luas wilayahnya, komponen 4 A tersebut di atas telah diusahakan untuk dipenuhi. Akibat topografi yang tidak begitu luas ini, penyebaran wisatawan di area Joglosemar menjadi salah satu alternatif agar daya dukung dan</p>	<p>Kerja sama lintas sektor dilakukan untuk dapat mendukung pembangunan obyek wisata di DIY agar lebih berdaya saing dari Jawa Tengah, dan menciptakan strategi agar wisatawan banyak berbelanja di DIY, serta program ITMP BYP yang akan mengembangkan kawasan Borobudur, Yogyakarta dan Prambanan dengan area hampir di semua Kabupaten/Kota di DIY.</p>

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<p>daya tampung wisatawan (caring capacity) tetap terjaga. Namun bagaimana strategi DIY untuk menciptakan produk wisata yang mempunyai daya saing dan keunggulan, sehingga nantinya akan mampu menyedot belanja wisatawan. Misalnya: wisatawan bisa berwisata ke Borobudur, namun tetap menginap dan berbelanja di Jogja. Kerja sama lintas sektor terus dilakukan untuk dapat mendukung pembangunan obyek wisata di DIY yang lebih dapat berdaya saing dengan Jawa Tengah. Masukan-masukan dari pelaku pariwisata langsung yang selanjutnya akan ditindaklanjuti baik oleh Pemda DIY maupun pemerintah Kabupaten/Kota.</p> <p>Selain hal di atas, adanya rencana pengembangan pariwisata di kawasan Destinasi Super Prioritas (DSP) Borobudur dengan Program Integrated Tourism Master Plan (ITMP) Borobudur-Yogyakarta-Prambanan yang sampai saat ini masih dalam proses perbaikan. Hal tersebut akan mengembangkan kawasan Borobudur, Yogyakarta dan Prambanan dengan area hampir di semua Kabupaten/Kota di DIY.</p>	

3) URUSAN PERTANIAN

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Perlunya peningkatan kesejahteraan petani di DIY dengan optimalisasi pelaksanaan Perda DIY No. 11/2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dengan program-program yang berkesinambungan, terukur, jelas target dan sasarannya serta waktunya, sehingga petani DIY sejahtera	Pemerintah Daerah DIY melaksanakan amanat dalam Perda Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dengan menerbitkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 126 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Peraturan ini akan disosialisasikan dan mulai diimplementasikan dengan melibatkan peran serta para pihak terkait.	Mendukung pelaksanaan Perda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani di DIY.
2	Perlunya insentif generasi muda yang masuk dalam sektor pertanian, sehingga anak-anak muda akan tertarik bekerja di sektor pertanian. Program-program pemberdayaan petani milenial perlu dirancang dengan memperhatikan target dan sasaran yang jelas dan dilakukan secara berkesinambungan dengan sinergi dan kolaborasi dengan stakeholder lain.	Penumbuhan petani milenial sudah mulai dilaksanakan melalui pembentukan dan pelantikan kepengurusan Asosiasi Petani Milenial DIY. Sampai dengan tahun 2021 telah terjaring 1.000 orang petani milenial yang telah bergabung dalam Asosiasi Petani Milenial DIY.	Mendukung pelaksanaan Perda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan di DIY untuk mengurangi laju alih fungsi lahan.
3	Perlunya optimalisasi dan sinergi antar pemerintah DIY dengan Kabupaten terkait dengan Pelaksanaan Perda tentang Perlindungan Lahan Pertanian berkelanjutan dalam mengurangi laju alih fungsi lahan di DIY.	Dalam mendukung pelaksanaan Perda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di DIY, Pemerintah Daerah DIY melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan telah memberikan fasilitasi kepada petani berupa bibit, alat dan mesin pertanian (alsintan), perbaikan saluran irigasi, asuransi usaha tani/ternak, pengendalian hama dan penyakit, pengembangan benih/bibit unggul, serta pengembangan SDM Pertanian.	Penyusunan peta usulan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di masing-masing Kabupaten, yang selanjutnya dapat disampaikan kepada semua masyarakat untuk diketahui dan dipatuhi.
4	Pemda DIY dan Pemerintah Kabupaten perlu menyusun peta usulan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang kemudian terinformasikan dengan baik kepada masyarakat.	Menerbitkan Peraturan Daerah DIY Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Peraturan ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan peraturan turunannya yang juga akan ditindaklanjuti di masing-	Peta LP2B yang saat ini sedang disusun di masing-masing Kabupaten menjadi pegangan dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian.

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		masing Kabupaten/Kota. Ke depan koordinasi dan sinkronisasi dengan Kabupaten/Kota maupun para pihak terkait dalam upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan akan terus ditingkatkan.	
5	Perlunya diatur tata kelola pupuk bersubsidi bagi petani baik di tingkat regulator, fasilitator maupun petani agar penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat petani menjadi efektif dan efisien.	Pemerintah Daerah DIY melaksanakan pengawalan tata kelola pupuk subsidi. Tahapan pengalokasian pupuk bersubsidi dimulai dari usulan oleh petani ke penyuluh setempat, kemudian diinput datanya ke aplikasi e-RDKK. Penebusan Pupuk Bersubsidi didorong menggunakan Kartu Tani agar bantuan subsidi pupuk dapat tepat sasaran. Pemerintah Daerah DIY, dalam hal ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY berkoordinasi dengan BRI untuk mencetak kartu tani dan kemudian dilakukan sosialisasi di setiap kabupaten tentang tata cara penggunaan kartu tani dan cara penebusan pupuk bersubsidi. Terkait pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi Pemerintah Daerah DIY, dalam hal ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY berkoordinasi dengan Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) agar prinsip 6 tepat (tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu) bisa terpenuhi. Pemerintah Daerah DIY juga membentuk Tim Pengawasan Pupuk dan Pestisida untuk membantu Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida dalam melakukan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penyimpanan serta penggunaan pupuk dan pestisida	Pengawalan tata kelola pupuk bersubsidi lebih baik sehingga pupuk subsidi dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan.
6	Perlunya pemanfaatan Dana Keistimewaan dalam urusan pertanian	Pengembangan pertanian menggunakan Dana Keistimewaan sudah dilaksanakan oleh Pemda DIY melalui kegiatan Pengembangan Lumbung Mataraman, didalamnya terdapat berbagai aktivitas seperti pengembangan lumbung pangan berbasis keluarga dan desa, budidaya hortikultura di lahan surjan, budidaya tanaman pangan sistem sabuk gunung, dan pengembangan pertanian di lahan sempit. Ke depan akan terus dilaksanakan dan ditambah berbagai aktivitas lain yang lebih variatif.	Optimasi Dana Keistimewaan dalam mendukung pengembangan sektor pertanian di DIY

4) URUSAN KEHUTANAN

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Banyak produk primer kayu yang dihasilkan tentunya perlu disegera dilakukan penanaman pohon kembali (reforestasi). Optimalisasi pelaksanaan pengelolaan hutan yang berperspektif lingkungan.	Produk primer hasil hutan berupa kayu sebagai hasil dari suatu proses pengelolaan atau budidaya tanaman kehutanan merupakan suatu produk yang dari waktu ke waktu mengalami fluktuasi permintaan pasar baik dari segi volume maupun jenis kayu yang menjadi demand dari pasar. Kondisi tersebut sangat mempengaruhi dari sistem atau pola pengelolaan tanaman kehutanan untuk mengantisipasi dari kebutuhan pasar industri per kayu yang baik untuk memenuhi kebutuhan DIY maupun di luar DIY. Hasil hutan kayu ditinjau dari asal usulnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu pertama hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan atau lebih dikenal hutan negara (status hutan produksi) dan kedua hasil hutan kayu yang berasal dari lahan milik atau lebih dikenal dengan hutan rakyat. Untuk mengantisipasi kebutuhan industri kayu di masa mendatang perlu dilakukan optimalisasi pengelolaan tanaman kehutanan dalam aspek hasil hutan kayu dengan memperhatikan perspektif lingkungan dalam arti menjaga keseimbangan antara luasan,	Pengelolaan hutan yang menjamin keseimbangan antara lingkungan, sosial budaya dan ekonomi secara berkelanjutan melalui sinergitas antar pihak maupun sektoral dengan tujuan keadilan distribusi manfaat kepada para pihak yang berkesinambungan.

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<p>volume dan kebutuhan pasar akan produksi kayu dengan potensi luasan dan daur ekonomi kayu itu sendiri. Upaya – upaya yang dapat dilakukan kedepan antara lain sebagai berikut :</p> <p>a. Pengelolaan hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan negara :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Masa Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPH Yogyakarta sebagai UPTD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY periode 2014 – 2023 akan segera berakhir dimana sebagai upaya untuk mensikapi dalam upaya mencapai pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berperspektif lingkungan maka ada Tahun 2022 diusulkan kegiatan Penyusunan Data Base Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung sebagai bahan penyusunan RPHJP KPH Yogyakarta periode 2024 – 2033 dan sebagai rangkaian prosesnya maka pada Tahun 2023 diusulkan kegiatan penyusunan RPHJP KPH Yogyakarta Tahun 2024 – 2033. Dimana didalam dokumen RPHJP Tahun 2024 – 2033 diupayakan untuk menuangkan sistem pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung yang mensinergikan antara kebijakan rencana pembangunan nasional, rencana kehutanan tingkat nasional, rpjmd, rencana kehutanan tingkat provinsi dengan potensi kawasan hutan produksi dan hutan lindung DIY sebagai upaya untuk melaksanakan pengelolaan hutan yang menjaga keseimbangan fungsi lingkungan, sosial budaya dan ekonomi secara berkelanjutan. 2) Di dalam pengelolaan produk hasil hutan kayu yang akan dituangkan dalam RPHJP KPH Yogyakarta akan dilaksanakan dengan membangun sistem pengelolaan menggunakan pola daur ekonomi kayu yang berdasarkan keseimbangan antara luasan penanaman, luasan potensi produksi, volume dan kebutuhan pasar akan produksi kayu dengan potensi luasan dan daur ekonomi kayu dimana dalam operasionalnya dapat dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme swakelola dengan pembiayaan APBD DIY maupun mekanisme kerja sama. 3) Selanjutnya dari RPHJP KPH Yogyakarta terkait dengan pola penanaman, pola daur produksi dituangkan ke dalam Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPd) setiap tahun pada periode 2024 – 2033. <p>b. Pengelolaan hasil hutan kayu yang berasal dari lahan milik atau hutan rakyat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Rakyat yang mempertimbangkan pola rehabilitasi lahan dalam hal ini penanaman dan jenis tanaman, pola produksi, daur ekonomi dan kebutuhan industri kayu dengan potensi luas lahan milik yang dapat difungsikan sebagai subjek hasil hutan kayu secara berkelanjutan. 2) Pendampingan masyarakat pengelola hutan rakyat dari aspek kelola lembaga, kelola budidaya dan kelola usaha dengan optimalisasi peran penyuluh kehutanan baik dai segi kualitas maupun kuantitas 3) Penyiapan masyarakat pengelola hutan rakyat ke arah sertifikasi penatausahaan hasil hutan untuk menciptakan nilai tambah dari hasil hutan kayu 4) Pendampingan dan pembinaan industri kayu untuk peningkatan kapasitas industri kayu di DIY agar menjadi industri bersertifikat dan membangun jejaring pemasaran 	

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
2	Perlunya pendampingan kepada kelompok pengelola hutan rakyat dalam terus melakukan pelebagaan hutan rakyat, selalu mempunyai perpektif untuk menjaga lingkungan, mendorong kelompok hutan rakyat untuk terus menjalin sinergi sehingga saling mendorong melakukan sertifikasi penatausahaan hasil hutan.	<p>hasil hutan kayu lanjutan yang bernilai tambah baik antar daerah maupun ekspor yang bersinergi dengan masyarakat kelompok hutan rakyat sebagai penghasil produk kayu.</p> <p>Upaya pendampingan pada kelompok pengelola hutan rakyat dilakukan dengan cara, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengintensifkan kunjungan penyuluh kehutanan ke KTH untuk melakukan pendampingan terutama pada KTH yang berbasis usaha hasil hutan kayu dan non kayu (kayu bulat, madu, daun, bambu), dimana hasil hutan tersebut secara langsung dihitung menjadi komponen PDRB sektor kehutanan. Peningkatan intensitas kunjungan penyuluh diharapkan dapat mendorong KTH lebih optimal dalam mengelola hutan sehingga produktivitas hasil hutan meningkat. Fasilitasi KTH yang berbasis usaha kayu dan non kayu, yang menjadi komponen penyusun PDRB Kehutanan, baik berupa peningkatan kapasitas kelembagaan, bantuan sarana prasarana produksi, maupun fasilitasi pemasaran produk (missal : pameran). Sosialisasi penanaman hutan rakyat dengan jenis tanaman yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi (misal sonokeling, pohon hias seperti pule, kamboja). Sosialisasi dan pendampingan dalam rangka diversifikasi usaha kehutanan hasil hutan non kayu yang mendukung PDRB kehutanan seperti budidaya anggrek hutan/anggrek spesies, budidaya burung, budidaya satwa (rusa,kijang), budidaya ikan (arwana). 	
3	Optimalisasi pemanfaatan dana keistimewaan dalam pengelolaan hutan lestari.	<p>Sejarah pengelolaan hutan di DIY memiliki keistimewaan tersendiri dimana memiliki sejarah yang cukup panjang dalam pengelolaannya mulai era penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, kemerdekaan sampai saat ini dimana pengelolaannya dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dan operasional pengelolaannya dilaksanakan oleh UPTD Balai KPH Yogyakarta. Berdasarkan pada kebijakan pengelolaan hutan di Jawa dan Madura, Jawatan Kehutanan membentuk Perum Perhutani berdasarkan PP 30 /1963, dimana untuk Bagian Daerah Hutan Surakarta menjadi salah satu Bagian Hutan di Wilayah Perum Perhutani, dan Bagian Hutan Yogyakarta tidak termasuk dan pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DIY (Hal ini berkaitan dengan kedudukan Keraton Yogyakarta dan Keistimewaan Yogyakarta, UU Nomor 3/1955). Kondisi inilah yang membedakan pengelolaan hutan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang hingga saat ini Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang mengelola kawasan hutan negara.</p> <p>Salah satu keistimewaan DIY sebagaimana UU No. 13 Tahun 2012 yaitu sistem kelembagaan pemerintahan, pertanahan dan tata ruang maka optimalisasi dana keistimewaan dapat diupayakan untuk mendukung program kegiatan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Optmalisasi struktur kelembagaan pengelolaan hutan baik di tingkat manajemen operasional (Balai KPH Yogyakarta) maupun operasional tingkat tapak yang meliputi Kabupaten Gunungkidul, Bantul dan Kulon Progo (5 Bagian Daerah Hutan dan 24 Resort Pengelolaan Hutan) terutama untuk rekrutmen personil dalam upaya 	

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<p>memenuhi rasio antara luasan kawasan hutan dengan ketersediaan personil utamanya di tingkat tapak.</p> <p>b. Penetapan cagar budaya untuk beberapa sarana prasarana yang merupakan peninggalan sejarah dalam kelembagaan pengelolaan hutan seperti beberapa bangunan Bagian Daerah Hutan, Resort Pengelolaan Hutan dan atau bangunan peristirahatan Wisma Erlangga Kaliurang, Sleman</p> <p>c. Kegiatan konservasi tanaman terutama pada kawasan hutan lindung dengan jenis tanaman yang memiliki nilai konservasi namun juga dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar hutan dari segi hasil hutan bukan kayunya, sosial budaya masyarakat sekitar hutan dan ekonomi yang menjadi ciri khas tertentu masyarakat sekitar hutan.</p> <p>d. Kegiatan reboisasi tanaman dengan jenis – jenis tanaman yang menjadi ciri khas DIY pada kawasan hutan dalam upaya untuk mempertahankan jenis tanaman endemik DIY baik di kawasan hutan produksi maupun hutan lindung.</p> <p>e. Optimalisasi peran kelompok tani hutan dari aspek kelembagaan sebagai kearifan lokal masyarakat sekitar hutan yang sangat bergantung kepada keberadaan hutan untuk menopang kebutuhan hidup melalui peningkatan kapasitas kelola lembaga, kelola kawasan/budidaya dan kelola usaha.</p> <p>f. Penyelesaian status dan tata batas kawasan hutan yang belum tertata dengan bersinergi dengan pihak terkait agar pengelolaan hutan dapat terlaksana secara optimal sebagai wujud keistimewaan DIY dalam pengelolaan hutan</p>	

5) URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Dalam laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur DIY, tidak dijelaskan mengenai program EBT sebagai penunjang ketersediaan energi. Kedepan, energi baru terbarukan sangat penting guna mengantisipasi habisnya energi fosil. Oleh karena itu inovasi-inovasi untuk menciptakan EBT sangat mendesak untuk dilaksanakan sesuai dengan potensi daerah misalnya air, bioenergi dan lain sebagainya.	<p>Sebagai daerah yang tidak mempunyai sumber daya energi konvensional sekaligus tidak mempunyai sumber daya EBT yang signifikan, DIY menekankan langkah konservasi energi (penghematan energi) sebagai strategi utama dalam pengelolaan energinya dan mengoptimalkan sumber daya EBT yang ada. Melalui Program Pengelolaan energi terbarukan:</p> <p>Pada tahun 2021 dilaksanakan rehabilitasi/perawatan Pembangkit Listrik Tenaga Hibrid (PLTH) Pantai Baru Kabupaten Bantul dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Minggir Kabupaten Sleman.</p> <p>Pada tahun 2022 direncanakan audit energi terhadap 30 gedung pemerintah/komersial/industri, pemeliharaan PLTH Pantai Baru Kabupaten Bantul dan Penyusunan evaluasi pemanfaatan energi baru terbarukan di DIY.</p>	<p>a. Tujuan dari pelaksanaan program pengelolaan energi terbarukan adalah mengoptimalkan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan yang ada di D.I. Yogyakarta untuk mendukung ketahanan energi</p> <p>b. Telah disetujui laporan pelaksanaan RKAB sebanyak 17 IUP Operasi Produksi dari 118 IUP OP sampai 10 Desember 2020, sisanya diserahkan ke pusat untuk persetujuannya sesuai UU Nomor 3 Tahun 2020.</p> <p>c. Telah disetujui kegiatan penyusunan dokumen lingkungan untuk kegiatan</p>

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
2	Perlunya pengawasan intensif terhadap izin usaha pertambangan yang ada di wilayah DIY baik untuk tambang pasir maupun karst agar tidak merusak lingkungan hidup. Perlu Ketegasan Pemerintah DIY dalam program pengembalian fungsi lahan pasca tambang	<p>Sesuai Pasal 104 Perda DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan dinyatakan bahwa pengawasan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dilakukan secara terintegrasi oleh BBWSSO (untuk wilayah sungai), Inspektur Tambang, OPD ESDM, OPD Lingkungan sesuai kewenangan, dan OPD Tata Ruang sesuai kewenangan. Sehubungan dengan itu untuk mengintensifkan pengawasan kegiatan usaha pertambangan dan pengembalian fungsi lahan pasca tambang, melalui Program Pengelolaan Mineral dan Batubara akan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi pelaksanaan RKAB Pemegang IUP tahun 2020. - Rapat-rapat koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan lintas sektor. - Mendorong penerbitan IPR dengan memfasilitasi penyusunan dokumen lingkungan untuk kegiatan pertambangan rakyat di Kabupaten Kulon Progo. - Menyusun rencana reklamasi dan paska tambang untuk kegiatan pertambangan rakyat di Kabupaten Bantul. - Pemberian sanksi administrasi kepada pemegang IUP/IPR terhadap pelanggaran ketentuan izin. - Pencairan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca Tambang setelah memenuhi syarat : <ul style="list-style-type: none"> a. Hasil penilaian laporan pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang mencapai keberhasilan 100%. b. Penyerahan lahan reklamasi dan lahan pasca tambang telah disetujui. 	<p>pertambangan rakyat di Kabupaten Kulon Progo dan kegiatan penyusunan rencana reklamasi dan paska tambang untuk kegiatan pertambangan rakyat di Kabupaten Bantul pada APBD DIY Tahun 2021.</p> <p>d. Telah disetujui laporan pelaksanaan reklamasi dan paska tambang oleh IUP Operasi Produksi Atas nama Ngadimin serta pencairan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambangnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>e. Berkaitan dengan Rasio Elektrifikasi pengadaan instalasi dan sambungan listrik rumah tangga bertujuan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dan meningkatkan keselamatan ketenagalistrikan terutama untuk rumah tangga tidak mampu yang belum berlangganan listrik PLN.</p>
3	Dalam RPJMD 2017 – 2022 disebutkan masih terdapat perbedaan cara mengukur rasio elektrifikasi antara Pemda DIY dengan PLN, untuk itu perlu segera dilakukan penyamaan persepsi tentang cara mengukur Rasio Elektrifikasi yang dapat memotret fakta lapangan pemakaian listrik warga masyarakat sebelum akhir RPJMD 2022 sehingga kedepan tidak ada lagi data yang berbeda antara Pemda DIY dengan PLN	Telah dilakukan koordinasi terkait cara melakukan perhitungan rasio elektrifikasi antara Pemda DIY dengan PLN. Telah disepakati cara perhitungan rasio elektrifikasi yaitu: jumlah rumah tangga yang menikmati listrik (baik yang berlangganan PLN maupun non PLN) dibagi jumlah rumah tangga total. Capaian rasio elektrifikasi DIY sudah mencapai angka 99,99%. Bantuan social pengadaan instalasi dan sambungan listrik rumah tangga kepada keluarga tidak mampu bertujuan untuk meningkatkan kualitas keselamatan ketenagalistrikan bagi rumah tangga yang menikmati listrik tetapi masih menyalur (belum berlangganan listrik PLN)	

6) URUSAN PERDAGANGAN

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Peningkatan manajemen pelaku perdagangan di DIY sehingga bisa melakukan penjualan ke luar dari DIY maupun melakukan ekspor	Peningkatan penjualan produk-produk DIY ke pasar luar negeri dilakukan pemerintah daerah DIY melalui berbagai kegiatan, diantaranya pelatihan manajemen dan prosedur ekspor. Eksportir pemula mendapatkan pelatihan mengenai manajemen dan prosedur ekspor yang diselenggarakan Pemda DIY. Disamping itu, Pemda DIY juga melayani konsultasi dan penerbitan Surat Keterangan Asal yang dibutuhkan oleh eksportir untuk mendapatkan preferensi tarif dan kuota ekspor ke negara tujuan ekspor.	Beberapa tindak lanjut diatas diharapkan dapat mendukung peningkatan perdagangan DIY baik dalam negeri maupun luar negeri DIY
2	Fasilitasi Pemerintah Daerah DIY dalam Memanfaatkan peluang perdagangan internasional melalui NYIA	Pemda DIY memfasilitasi UMKM yang memenuhi kriteria tertentu untuk memanfaatkan Gerai UMKM di Bandara NYIA dalam rangka pengembangan usahanya. Hal ini didukung juga dengan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas produk yang dipasarkan, serta fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk.	
3	Peningkatan jumlah volume penjualan, komoditas, dan tujuan negara pembeli barang produk dari DIY	Pameran baik virtual maupun konvensional yang diantaranya memamerkan komoditas baru dan mengundang calon buyer dari negara tujuan ekspor baru merupakan langkah yang akan dilakukan Pemda DIY dalam rangka meningkatkan jumlah volume penjualan, komoditas, dan tujuan negara pembeli barang produk dari DIY.	
4	Pemerintah Daerah harus meningkatkan sarana perdagangan online di DIY berupa sarana pusat media industri online atau pengembangan aplikasi sehingga nilai perdagangan DIY meningkat.	Meningkatnya pengguna internet tentu membuka pasar baru bagi produk-produk DIY. Pemda DIY telah melaksanakan berbagai upaya agar pelaku usaha DIY dapat mengakses pasar online tersebut, diantaranya pelatihan pemasaran online bagi pelaku usaha di DIY serta pengembangan aplikasi pemasaran online JOGJAPLAZA	
5	Perbaikan sarana dan manajemen pasar tradisional agar memiliki sarana dan manajemen seperti toko modern/mall.	Perbaikan sarana prasarana pasar tradisional dilakukan dengan mendorong pemerintah kabupaten kota untuk mengusulkan kegiatan perbaikan pasar tradisional ke pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)	

7) URUSAN PERINDUSTRIAN

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Pemulihan dampak COVID-19 pada dunia industri pengolahan dan IKM di DIY	Peningkatan kembali aktivitas produksi dilakukan melalui peningkatan pemanfaatan teknologi produksi, peningkatan keterampilan, dan peningkatan perlindungan hak kekayaan intelektual. Peningkatan pemanfaatan teknologi dilakukan melalui bantuan peralatan produksi baik melalui hibah maupun pinjam pakai. Peningkatan keterampilan pelaku usaha sector industri kecil menengah dilakukan melalui berbagai pelatihan dan pendampingan. Perlindungan hak kekayaan intelektual dilakukan melalui fasilitasi sertifikasi kekayaan intelektual.	Peningkatan kembali kinerja sector industri Kecil Menengah DIY yang pernah mengalami penurunan akibat pandemic COVID-19 industri kecil dan menengah di DIY.
2	Program pembinaan bagi pelaku IKM harus ditingkatkan	Program pembinaan kepada IKM selalu ditingkatkan walaupun tetap mempertimbangkan sumber daya yang ada. Peningkatan dilakukan dari sisi volume maupun fase pembinaan. IKM yang telah mengikuti pelatihan, memiliki kesempatan untuk mengikuti pembinaan fase selanjutnya seperti fasilitasi peralatan, fasilitasi sertifikasi HKI, dan fasilitasi pemasaran.	
3	Peningkatan dan pendampingan manajemen IKM.	Pemda DIY selalu berusaha meningkatkan manajemen IKM. Hal ini dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan. Berbagai cabang manajemen menjadi materi pelatihan dan pendampingan ini, diantaranya manajemen produksi, manajemen pemasaran, dan manajemen usaha IKM.	

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
4	Fasilitasi Pemda DIY untuk menumbuhkan kerja sama IKM dengan industri besar.	Penumbuhan kerja sama IKM dengan industri besar dilakukan melalui temu bisnis.	
5	Memberikan fasilitasi peningkatan teknologi dari Kampus kepada pelaku IKM	Pemda DIY selalu membuka ruang kerja sama dengan berbagai kampus dalam rangka fasilitasi peningkatan teknologi kepada pelaku IKM	

8) URUSAN KETRANSMIGRASIAN

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Sehubungan dengan masih berlangsungnya wabah pandemi COVID-19 yang belum kita ketahui kapan berakhirnya, maka sangat mungkin pada tahun 2021 ini Pemerintah Pusat masih menerapkan kebijakn untuk tidak menempatkan transmigran sebagai upaya memutus mata rantai penularan dan peersebaran COVID-19. Menghadapi situasi yang tidak kita inginkan tersebut, maka perlu bagi Pemerintah DIY untuk menggagas secara serius kemungkinan menerapkan kebijakan transmigrasi local dengan memanfaatkan lahan-lahan yang merupakan Sultan Ground dan PA Ground sebagaimana amanat UU Nomnor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY.	Untuk menggagas kemungkinan kebijakan transmigrasi lokal dengan memanfaatkan lahan SG dan PAG, perlu dipenuhi beberapa kriteria antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - Harus mendapat persetujuan dari Kemendes PDT dan Transmigrasi, karena dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kemendes PDT dan Transmigrasi (2020 – 2024) telah ditetapkan 52 kawasan transmigrasi dan tidak menetapkan kawasan Transmigrasi Lokal. - Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 15 Tahun 1997 tentang ketransmigrasian dan Permenakertrans RI nomor PER.15/MEN/VI/2007, transmigran berhak atas Lahan Pekarangan dan Lahan Usaha dengan Sertifikat Hak Milik. 	Penempatan transmigran dapat menjawab permasalahan masyarakat yang menginginkan perbaikan kesejahteraan dengan mengikuti program transmigrasi dan mendapatkan hak berupa Lahan Pekarangan dan Lahan Usaha. Menyiapkan Angkatan Kerja DIY agar lebih kompetitif untuk mengisi Kesempatan kerja yang ada baik di DIY maupun di luar DIY.
2	Transmigran yang merupakan dan Tenaga Kerja yang telah siang dan terlatih dengan bekal ketrampilan yang tertunda dampak COVID-19 kami berharap mendapatkan jalan keluarnya dengan tamnahan pembekalan ketrampilan sehingga mampu bergeser bekerja di sektor informal. Sedangkan pelaksanaan strategi peningkatan kualitas penyelenggaraan transmigrasi dapat berkolaborasi dengan menyesuaikan kebijakan Pemerintah Pusat, dimana pada tahun 2020 tidak melakukan pengiriman transmigrasi. Selanjutnya apakah Pemda DIY melalui program transmigrasi berikutnya di tahun 2021 sudah siap melaksanakan transmigrasi tentunya dengan segala risiko yang dihadapi dalam situasi Pandemi saat ini.	Pada tahun 2021 akan dilakukan penempatan transmigran sebanyak 65 KK. Untuk meminimalisir dampak pandemi COVID-19, pada saat pelatihan dan penampungan akan dilakukan test Genose dan pada saat pemberangkatan dilakukan Rapid Antigen.	
3	Pada tabel capaian dan target diatas Urusan ketransmigrasian sesuai RPJMD Tahun 2017-2022 mendukung sasaran terwujudnya kesempatan kerja, yang dilaksanakan melalui 2 (dua) strategi yaitu perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan kualitas penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja, dan meningkatkan kualitas	Untuk memacu antara kesempatan kerja dan peningkatan kualitas ketrampilan akan dilakukan : <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan ketrampilan melalui pelatihan, pemagangan dan sertifikasi kompetensi. 	

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	penyelenggaraan transmigrasi. Indikator yang digunakan adalah jumlah kesempatan kerja dengan capaian pada tahun 2020 sebesar 2.126.316 orang atau capaian realisasi sebesar 103,12%. Semoga ini awal yang baik di situasi Pandemi dan berharap dapat dipacu antara kesempatan kerja dan peningkatan kualitas ketrampilan.	<ul style="list-style-type: none"> - Mengefektifkan perantara kerja untuk mendorong terjadinya penempatan tenaga kerja Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN). - Mengupayakan hubungan industrial yang kondusif, hal ini akan memberikan dampak positif terhadap penambahan kesempatan kerja. 	

d. PENUNJANG URUSAN

1) PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN URUSAN KEISTIMEWAAN

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Perlu ditingkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan Perencanaan Pembangunan urusan Keistimewaan sehingga perencanaan pembangunan yang dihasilkan dapat sinkron dengan kebutuhan riil masyarakat DIY.	Kualitas pasrtisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan perencanaan urusan keistimewaan sudah meningkat. Forum forum yang melibatkan masyarakat tingkat bawah semakin ditingkatnya volumenya. Forum Keistimewaan, Forum OPD pengampu Urusan Keistimewaan melibatkan masyarakat, lembaga non pemerintah. Musyawarah Perencanaan Pembangunan dengan tema program dan kegiatan keistimewaan sudah mulai dilaksanakan, sehingga terdapat keterlibatan kelompok dan anggota masyarakat di Kalurahan. Materi perencanaan Urusan Keistimewaan selalu menjadi materi khusus dalam internalisasi keistimewaan.	Peningkatan kapasitas pengelolaan urusan keistimewaan. Meningkatnya kualitas pelaksanaan pembangunan urusan keistimewaan Penyebarluasan informasi pembangunan keistimewaan
2	Perlu ditingkatkan sosialisasi tahapan perencanaan pembangunan dan Perencanaan Pembangunan 65 urusan Keistimewaan sehingga menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan. Di era digital ini, perlu digunakan model-model sosialisasi yang adaptif dengan teknologi informasi dan media sosial.	Tahapan-tahapan perencanaan urusan keistimewaan sudah disosialisasikan melalui berbagai saluran, baik langsung maupun media social. Disamping OPD-OPD pengampu keistimewaan melakukan sosialisasi tentang program sesuai tupoksi mereka, juga melibatkan Paniradya Kaistimewan untuk mensosialisasikan tahapan-tahapan perencanaan pembangunan urusan keistimewaan. Materi perencanaan Urusan Keistimewaan selalu menjadi materi khusus dalam internalisasi keistimewaan.	Peningkatan kapasitas pengelolaan urusan keistimewaan. Meningkatnya kualitas pelaksanaan pembangunan urusan keistimewaan Penyebarluasan informasi pembangunan keistimewaan

2) KEPEGAWAIAN DAERAH

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Fasilitasi tenaga teknis dengan pemberian jaminan kesehatan dan Jamkesmas (kecelakaan kerja, Kematian, Tunjangan Hari Tua, Pensiun) hal ini sesuai dengan UU Ketenagakerjaan.	Sesuai Pasal 25 dan Pasal 26 Peraturan Gubernur DIY Nomor 106 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Tenaga Bantu, bahwa jaminan Kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian kerja diberikan kepada Tenaga Bantu sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional. Jaminan Hari Tua dan Pensiun belum diatur dalam Peraturan Gubernur tersebut. Perlu kami sampaikan bahwa besaran iuran kepesertaan Jaminan Hari Tua sebesar 5,7% dari gaji (3,7% dari Pemerintah Daerah dan 2% dari Tenaga Bantu), sedangkan besaran iuran Pensiun sebesar 3 % dari gaji (2% dari Pemerintah Daerah dan 1% dari Tenaga Bantu). Terhadap kedua Program Jaminan tersebut perlu kebijakan lebih lanjut terkait dengan penambahan subsidi gaji sebesar 5,7% dan pemotongan gaji Tenaga Bantu sebesar 3% untuk sejumlah 3.462 Tenaga Bantu.	Fasilitasi tenaga teknis dengan pemberian jaminan kesehatan dan Jamkesmas (kecelakaan kerja, Kematian, Tunjangan Hari Tua, Pensiun) sesuai dengan UU Ketenagakerjaan.
2	Peningkatan SDM tenaga teknis.	Pengembangan kompetensi untuk tenaga bantu di lingkungan Pemerintah Daerah DIY berdasarkan pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 106 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Tenaga Bantu. Terkait peningkatan kompetensi SDM Tenaga Teknis (Tenaga Bantu) telah dilaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk Tenaga Bantu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah DIY melalui BKD DIY.	

3) URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Pendidikan dan pelatihan perlu dilakukan secara berjenjang. Tujuan penjenjangan selain untuk meningkatkan pengetahuan dan promosi jabatan juga punya tujuan lain yaitu para ASN mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan tata kelola pemerintahan yang selalu berkembang	Sesuai Peraturan Gubernur DIY Nomor 78 Tahun 2018 yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Gubernur DIY Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan. Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY mempunyai tugas menjadi fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan, sesuai dengan ketugasan yang diberikan tersebut, Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY menyelenggarakan bentuk-bentuk Pendidikan dan Pelatihan untuk aparatur, baik Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan Fungsional, maupun Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (Pelatihan Kepemimpinan Pengawas), Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III (Pelatihan Kepemimpinan Administrator), Diklat Pengkaderan Jabatan Administrator serta Diklat Pengkaderan Jabatan Pengawas. Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY akan menyelenggarakan Diklat Kepemimpinan Tingkat II (Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II) secara mandiri pada tahun 2021.	Peningkatan kapasitas SDM tenaga kediklatan maupun penyelenggara melalui pelatihan, pendidikan melalui tugas belajar dan ijin belajar, serta peningkatan kapasitas tenaga pengajar/Widyaiswara.

3. CAPAIAN KINERJA URUSAN TUGAS PEMBANTUAN

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Perlu ditingkatkan koordinasi dan komunikasi Pemda DIY dengan Kementerian terkait dalam perencanaan alokasi tugas perbantuan agar kedepan bantuan benih dapat disesuaikan dengan permintaan/kebutuhan petani serta memperhatikan kaidah pemberian bantuan agar dapat memenuhi kriteria tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat lokasi/tempat.	Meningkatkan konsultasi Pemda DIY ke Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Pertanian terkait perencanaan alokasi tugas pembantuan agar kedepan bantuan benih dapat disesuaikan dengan permintaan/kebutuhan petani serta memperhatikan kaidah pemberian bantuan agar dapat memenuhi kriteria tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat lokasi/tempat	Program/kegiatan beserta bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan petani di daerah dan memenuhi kriteria tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat lokasi/tempat.
2	Perlu peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian Lapangan dalam rangka peningkatan pendampingan petani untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim	Pemda DIY melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan telah mendorong pemanfaatan agens pengendali hayati yang ramah lingkungan, pemanfaatan bahan-bahan hayati atau pestisida nabati, pemanfaatan/pembuatan rumah burung hantu untuk pengendalian hama tikus pada tanaman padi. Terkait dengan dampak perubahan iklim, telah dilaksanakan sistem peringatan dini tentang prakiraan serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan prakiraan curah hujan baik di Musim Kemarau (MK) dan Musim Penghujan (MH). Kegiatan penanganan dampak perubahan iklim dilaksanakan juga melalui fasilitasi peminjaman pompa air kepada para petani yang membutuhkan. Penyuluh berperan dengan mengadakan kegiatan pendampingan petani untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim dalam bentuk Sekolah Lapang (SL). Selain itu, dilakukan pula upaya percepatan penyampaian informasi prakiraan curah hujan bulanan dari Stasiun BMKG DIY ke masing-masing Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), untuk diteruskan ke kelompok-kelompok tani yang ada di wilayah binaannya.	Pedoman umum dan Juklak/Juknis kegiatan tersedia dari awal sehingga usulan kegiatan oleh daerah sesuai dengan kebutuhan serta potensi di lapangan dan dapat direalisasikan sepenuhnya. Mengoptimalkan peran Penyuluh Pertanian Lapangan dan Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dalam rangka pendampingan petani untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim.

4. PENYELENGGARAAN URUSAN KEISTIMEWAAN

a. URUSAN KELEMBAGAAN

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Dalam rangka mewujudkan visi “Menyongsong Abad Samudra Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”, penting kiranya Pemerintah Daerah DIY telah membentuk bidang kelautan untuk memaksimalkan peran dan fungsinya	Pemerintah Daerah DIY telah membentuk Dinas Kelautan dan Perikanan DIY sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 61 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan, yang terdiri dari: 1. Bidang Perikanan Budidaya 2. Bidang Perikanan Tangkap 3. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 4. Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pengawasan	Berdasarkan pertimbangan dan penyesuaian dengan keputusan DPRD DIY nomor 28/K/DPRD/2021 tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020, Urusan Kelembagaan telah menyelesaikan masalah, diantaranya: A. permasalahan lapangan terkait perikanan budidaya, perikanan tangkap, dan akses pasar, urusan kelembagaan telah melakukan pendampingan dan fasilitasi dalam pembentukan Dinas Kelautan dan Perikanan DIY sesuai Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2018 yang sinkronisasinya sesuai

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		Untuk optimalisasi urusan bidang kelautan dan perikanan agar berjalan secara efektif dan mendekatkan pada pelayanan masyarakat dibentuk UPT Pelabuhan Perikanan Pantai sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kelautan dan Perikanan, yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan serta keselamatan operasional kapal perikanan untuk meningkatkan nilai produksi ikan yang masuk melalui pelabuhan/tempat pelelangan ikan. Dalam rangka memaksimalkan peran dan fungsinya dilakukan review tugas dan fungsi melalui koordinasi bersama dengan Perangkat Daerah terkait untuk mempertegas kembali kesesuaian tugas dan fungsi dengan indikator capaian dalam RPJMD.	permasalahan lapangan untuk penguatan urusan kelembagaan melalui 4 pembagian tugas dan fungsinya, yaitu: bidang perikanan budidaya, perikanan tangkap, pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan, dan kelautan, pesisir dan pengawasan agar Dinas Kelautan dan Perikanan DIY lebih fokus melaksanakan tugas dan fungsinya menyelesaikan masalah di lapangan.
2	Meningkatkan intensitas koordinasi dengan lembaga di tingkat kabupaten agar capaian maksimal dan juga monitoring secara berkala. Selaras dengan mandat Peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2018 bahwa Pemda DIY bertugas melakukan monitoring pelaksanaan urusan keistimewaan.	Meningkatkan intensitas koordinasi dengan lembaga di Kabupaten/Kota telah dilakukan monitoring secara berkala (bulanan) terhadap seluruh perangkat atau lembaga di Kabupaten/Kota yang mengampu program/kegiatan yang bersumber dari Dana keistimewaan. Koordinasi dan monitoring melalui daring, kunjungan lapangan, forum Pemda DIY- Kab/Kota dan didukung oleh Sistem Informasi Pengendalian Keistimewaan (kenes.jogjaprovo.go.id).	B. permasalahan kebutuhan pelayanan umum kepada masyarakat pesisir dan nelayan, urusan kelembagaan memfasilitasi pembentukan unsur pelaksana teknis (UPT) Pelabuhan Perikanan Pantai sesuai Pergub nomor 97 tahun 2018, salah satu fungsinya untuk memfasilitasi masyarakat pesisir agar dimudahkan dalam pemanfaatan sumber daya ikan dan keselamatan operasional kapal. C. permasalahan dalam pemberian solusi di bidang kelautan dan perikanan serta indikator capaian dalam RPJMD, urusan kelembagaan melakukan fasilitasi review tugas dan fungsi dengan OPD terkait agar mempertegas tugas dan fungsinya. D. Permasalahan optimisasi Dana Keistimewaan, urusan kelembagaan melakukan intensitas koordinasi dan monitoring (melalui pertemuan daring, kunjungan lapangan, forum pemda DIY- Kabupaten/Kota, serta dukungan Sistem Informasi Pengendalian Keistimewaan/Website: kenes.jogjaprovo.go.id)

b. URUSAN KEBUDAYAAN

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Pemda DIY hendaknya meningkatkan kolaborasi antara Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY dan Dinas Kebudayaan DIY agar capaian realisasi lebih maksimal, selain itu agar output kebudayaan dengan spirit keistimewaan dapat terlihat pada insan milenial melalui pendidikan.	Peningkatan kolaborasi antara Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY dan Dinas Kebudayaan sudah dilaksanakan untuk meningkatkan realisasi dan spirit keistimewaan yang dapat terlihat pada insan milenial melalui pendidikan. Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan pada kegiatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY secara langsung antara lain : pembinaan muatan lokal, pengetahuan tentang budaya dan kesenian (Gladhi Kawruh, Ngudar Kawruh Tembang, Festival Budaya Pendidikan Khusus, Audisi Duta Seni Pelajar Nusantara (DSPN), pembentukan sekolah berbasis budaya, peningkatan sarana prasana budaya, pembentukan lab seni, aktivitas seniman masuk sekolah, dan pelaksanaan Akademi Komunitas. Selain itu juga terdapat beberapa kegiatan pengembangan kebudayaan melalui pendidikan yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Kebudayaan antara lain : kongres aksara jawa, pengkajian kesejarahan, workshop pembelajaran terkait kesenian budaya serta pelaksanaan selendang sutra yang menyasar pada mahasiswa dengan latar	Peningkatan perekonomian dan kesejahteraan melalui Urusan Kebudayaan dengan kerja sama <i>multi sector</i> . Peningkatan perekonomian dan kesejahteraan ini juga sebagai upaya pemulihan ekonomi karena adanya dampak pandemic COVID-19. Beberapa sektor pemulihan ekonomi yang sudah di ampu oleh Urusan Kebudayaan antara lain : industri dan perdagangan, pertanian, perikanan dan kelautan, pariwisata, ketenagakerjaan, koperasi dan UKM.

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		belakang etnis yang ada di DIY. Urusan Kebudayaan juga diampu oleh beberapa dinas seperti pertanian, perdagangan, pariwisata, koperasi, kelautan dan lain-lainnya sehingga <i>multi sector</i> yang terlibat didalam urusan kebudayaan. Sehingga pelibatan <i>stakeholder</i> sebagaimana yang Pemerintah, Budayawan, Tokoh Masyarakat, Cendekiawan, Alim Ulama, Pemuda, Pelajar, Mahasiswa telah terlibat aktif dalam pemajuan kebudayaan di DIY. Dengan aktivitas-aktivitas tersebut diharapkan sinkronisasi antara urusan Pendidikan dengan kebudayaan akan tercapai.	
2	Memaksimalkan sosialisasi kebudayaan melalui youtube dengan kolaborasi bersama Dinas Pendidikan untuk sosialisasi kepada peserta didik (siswa dan mahasiswa).	Memaksimalkan sosialisasi kebudayaan kepada peserta didik (siswa dan mahasiswa) melalui youtube dengan kolaborasi bersama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY dapat dilakukan dengan membuat muatan youtube khusus terkait pendidikan. Pemanfaatan media online dengan platform Youtube telah dilakukan oleh OPD pengampu dana keistimewaan urusan kebudayaan dengan mengetengahkan informasi, edukasi, atraksi pementasan dan tontonan bagi khalayak umum. Hal ini dilakukan baik dengan cara live streaming (siaran langsung) atau dengan metode tapping (rekaman/siaran tunda). Pemanfaatan platform You tube ini menjadi salah satu cara untuk menyebarkan informasi mengenai kebudayaan, pemajuan kebudayaan DIY serta hasil pemanfaatan dana keistimewaan itu sendiri. Sebagai pelengkap channel youtube Dinas Kebudayaan dengan judul "tasteofjogja" memiliki 20 ribu subscribe dan channel youtube Paniradya Kaistimewan memiliki 51 ribu subscribe hal ini menunjukkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelestarian budaya di platform Youtube telah mendapatkan respon positif dari publik. Disamping youtube, juga memanfaatkan media sosial lainnya seperti Instagram, yang juga sama-sama aktif dalam penyebaran informasi tentang pelestarian budaya.	Pengembangan dan pelestarian kebudayaan Yogyakarta
3	Memaksimalkan taman budaya untuk mensosialisasikan kebudayaan DIY.	Pengembangan taman budaya untuk mensosialisasikan kebudayaan DIY sudah dilaksanakan baik di provinsi dengan Taman Budaya Yogyakarta (TBY) dan kabupaten/kota dengan Taman Budaya di masing-masing kabupaten/kota yang sudah dibangun dan akan dibangun. Pada Taman Budaya yang sudah dibangun (TBY dan Taman Budaya Kulon Progo), kegiatan rutin terkait kebudayaan sudah dilaksanakan dan menjadi kegiatan rutin. Keberadaan taman budaya lebih dari sekadar identitas, melainkan pusat aktivitas kebudayaan untuk mendukung aktivitas kebudayaan dalam rangka melindungi, melestarikan, merevitalisasi, mengembangkan, dan menumbuh- kembangkan kebudayaan pada skala luas. Pembangunan Taman Budaya kabupaten/kota yang sudah dilakukan pada tahun 2020 : a. Pembangunan taman budaya Gunung Kidul berupa Pembangunan Fisik Taman Budaya Gunungkidul Tahap III (multiyears tahun ke 2) yaitu pembangunan amnities taman budaya, Joglo, pembangunan masjid dan penyelesain bangunan.	Sosialisasi dan penyebaran informasi serta peningkatan kesadaran dan rasa memiliki masyarakat terhadap kebudayaan Yogyakarta.

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<ul style="list-style-type: none"> b. Pembangunan taman budaya Sleman berupa pembebasan tanah dengan dengan jumlah bidang 21 bidang (22.869m2). c. Pembangunan Taman Budaya Bantul berupa membuat Kajian Studi Kelayakan Pembangunan Taman Budaya Kabupaten Bantul selain itu untuk pengadaan lahan yang akan dilakukan di tahun 2021 juga dilakukan appraisal tanah di yang berlokasi Kapanewon Pajangan. Pada tahun 2021 dilaksanakan pengembangan taman budaya kabupaten/kota, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan Taman Budaya Gunung Kidul sudah akan selesai 100% pada tahun 2021. b. Pembangunan Taman Budaya Sleman yaitu sayembara dan penyusunan DED Taman Budaya Sleman dan penambahan 1 bidang tanah seluas 2.395m2 untuk pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Publik. c. Pembangunan Taman Budaya Bantul berupa pengadaan lahan, UKLUPL, Andalalin, dan Appraisal Lahan jalan di lokasi TBB yang belum ada dalam Appraisal Tahun 2020. d. Pembangunan Taman Budaya Kota Yogyakarta Review DED dan Adendum AMDAL yang berlokasi di kawasan Embung Giwangan. 	
4	Merencanakan dan melaksanakan sosialisasi kebudayaan DIY dengan media virtual, seperti halnya Perencanaan Virtual Museum.	Merencanakan dan melaksanakan sosialisasi kebudayaan DIY dengan media virtual, seperti halnya Perencanaan Virtual Museum. Kajian pengembangan virtual museum di DIY sudah dilaksanakan pada tahun 2020. Selanjutnya juga dapat dikembangkan virtual museum di museum kabupaten/kota. Selain itu, kegiatan kebudayaan yang lain juga dapat dilakukan dengan virtual sebagai sarana pemanfaatan teknologi digital yang semakin berkembang pesat. Peningkatan dan pengembangan kegiatan kebudayaan berbasis teknologi sangat diperlukan untuk kemajuan kebudayaan di DIY.	

c. URUSAN PERTANAHAN

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Selaras amanat UU Nomor 13 Tahun 2012, maka Pemda DIY haruslah melakukan penataan tentang Pertanahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di DIY guna memberikan sumbangsih maksimal bagi kemajuan dan kesejahteraan Masyarakat DIY. Maksimalisasi sosialisasi tentang Perdas Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten agar Tanah Kasultanan dan Kadipaten yang belum dimanfaatkan dapat digunakan oleh masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan.	Penataan tanah kasultanan dan tanah kadipaten terus dilakukan dan merupakan kegiatan dengan serapan anggaran paling besar di urusan pertanahan untuk kegiatan penatausahaan pertanahan. Sosialisasi tentang Perdas Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten agar Tanah Kasultanan dan Kadipaten yang belum dimanfaatkan dapat digunakan oleh masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan, sudah dilakukan sejak tahun 2021 di DPTR DIY, pada tahun 2022 ini kegiatan tersebut masih ada, dan dipereencanaan Tahun Anggran	Terselesaikannya penatausahaan tanah kasultanan tanah kadipaten dan tanah kalurahan di DIY

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
2	Maksimalisasi pemanfaatan lahan (tanah dan bangunan) yang dimiliki oleh Pemda DIY.	2023 sudah masuk di draft berita acara yang dikirimkan ke Kementerian Pusat Kegiatan Dana keistimewaaan, didalam urusan pertanahan hanya merencanakan dan mengevaluasi pemanfaatan tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah kalurahan, sehingga pada proses memaksimalkan pemanfaatan tanah dan bangunan akan kami upayakan di tiga aspek tersebut. Pada tahun 2022, kami sedang mengidentifikasi beberapa tanah kalurahan yang bisa dioptimalkan untuk membantu pengentasan kemiskinan.	Tersampainya mekanisme dan cara pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan TAnah Kadipaten dan Tanah kaluran, serta regulasi yang digunakan sebagai dasar pemanfaatan tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah kalurahan Optimalisasi pemanfaatan tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah kalurahan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat di DIY

d. URUSAN TATA RUANG

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Pemda DIY dalam melakukan Urusan tata ruang, sedapat mungkin memberikan tatanan baru, dimana ruang yang ada itu dapat memberikan ruang ekspresi bagi nilai-nilai Keistimewaan Yogyakarta. Agar identitas Keistimewaan Yogyakarta benar-benar 74 terbaca oleh masyarakat DIY maupun dari luar DIY. Selain itu penting dilakukan pengendalian dalam hal pemanfaatan tata ruang di DIY.	Melakukan tatanan baru urusan tata ruang, dilakukan melalui kebijakan struktur ruang dengan konservasi dan perlindungan tata ruang keistimewaan, serta kebijakan pola ruang dengan pengembangan tata ruang keistimewaan.	Mengembalikan struktur ruang keistimewaan yang sudah tidak sesuai kepada bentuk aslinya dan dilakukan pengembangannya untuk dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, misalnya dimanfaatkan untuk kebudayaan, pariwisata, pendidikan dan penelitian, serta melakukan penataan pola ruang bagi pengembangan ekonomi produktif yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berperan aktif menjaga keberlangsungan tata ruang keistimewaan, misalnya dengan penataan beberapa kawasan menjadi pusat – pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat.
2	Penyelenggaraan penataan ruang hendaknya bertujuan untuk mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan. Memperhatikan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang, serta memperhatikan RTH.	Melakukan pengendalian penataan ruang yang bertujuan untuk mewujudkan keharmonisan antara alam dan lingkungan buatan, serta antara manusia dan lingkungan itu sendiri (alam dan buatan), sehingga tercipta keseimbangan.	Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah / menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan, serta mewujudkan keseimbangan antara kepentingan ekologi, sosial dan ekonomi, juga menjalankan secara konsisten penataan ruang berwawasan lingkungan (penataan ruang yang menggunakan kriteria mutu lingkungan hidup). Dengan demikian dapat diwujudkan suatu wilayah yang dapat terus berkembang secara sosial, ekonomi maupun budaya, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan sesuai dengan tata ruang keistimewaan yang direncanakan

5. PROGRAM STRATEGIS DIY

a. PENANGANAN COVID-19

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Berkenaan dengan kenaikan kasus positif, telah dilaksanakan pembatasan aktivitas/kegiatan sampai dengan skala mikro, penegakan hukum dan protokol Kesehatan, sosialisasi kepada masyarakat, pelibatan intensif stakeholder untuk terlibat dan intensifikasi koordinasi Gugus Tugas Provinsi dan Gugus Tugas Kab/ Kota untuk mencegah kolapsnya sistem Kesehatan di DIY serta penguatan bagi Gugus Tugas Penanganan COVID-19 ditingkat Kampung/dusun/RW untuk mendukung PPKM Mikro.	Dalam rangka untuk mengoptimalkan Perda Ketahanan Keluarga di semua pemangku kepentingan dilakukan sosialisasi fungsi keluarga secara masif dan terus menerus. Sasaran sosialisasi ini juga semua lapisan masyarakat dan lembaga terkait. Pada tahun 2021 direncanakan melakukan sosialisasi fungsi keluarga sebanyak 40 kali.	Masalah utama yang harus di selesaikan adalah penyadaran dan pemahaman masyarakat terkait dengan ketahanan keluarga. setelah memahami di laksanakan dan diterapkan dalam kehidupan sehari hari.
2	Optimalisasi pelaksanaan Perda 7/2018 tentang Pembangunan ketahanan keluarga dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait.	Pada Tahun 2021 telah dirancang untuk penyusunan Pergub Pelaksanaan Perda No 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga. Pergub ini mencakup amanat yang di cantumkan dalam perda tersebut. Pada Tahun 2018 telah di susun juga Pergub tentang Revitalisasi Fungsi keluarga	
3	Percepatan pembuatan dan pelaksanaan Pergub atas mandat Perda 7/2018 tentang Pembangunan Ketahanan keluarga, yaitu <ul style="list-style-type: none"> - Pergub tentang Fungsi keluarga - Pergub tentang Indeks ketahanan Keluarga - Pergub tentang Rencana strategis Pembangunan Keluarga - Pergub tentang Konselor Ketahanan Keluarga - Pergub tentang Forum Koordinasi Ketahanan Keluarga 		
4	Memperbanyak Test Swab bagi masyarakat terutama di sentra-sentra potensi kerumunan masyarakat.		

b. JOGJA SMART PROVINCE

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Pemda DIY perlu mensinergikan, jika perlu dilakukan proses integrasi dengan program serupa yang dimiliki oleh Kabupaten/Kota Se-DIY. Ketidaksinkronan dan banyaknya platform digital yang beredar dimasyarakat dapat menimbulkan potensi kebingungan sehingga mengarah ke apatisme. Teknologi informasi seharusnya justru mempermudah urusan pelayanan publik dan bukan sebaliknya.	Akan dilaksanakan koordinasi yang lebih intensif untuk melakukan identifikasi kebutuhan/ kepentingan/ permasalahan yang beririsan antar daerah dan potensi untuk mendorong optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi secara terintegrasi;	Integrasi system informasi diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta mendorong partisipasi publik yang lebih baik;
2	Perlu dilakukan assesment akses masyarakat terhadap paltoform digital yang merupakan bagian pelayanan publik dari Jogja smart Province agar dapat memperluas kemanfaatan.	Implementasi amanat Pergub 2 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Tehnologi Informasi dan Komunikasi akan lebih ditingkatkan seiring dengan kesadaran dan komitmen OPD untuk mematuhi;	Selain meningkatkan publikasi dan sosialisasi berkaitan dengan aplikasi layanan publik yang diselenggarakan oleh Pemda DIY agar masyarakat semakin banyak yang menggunakannya, perlu pula dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap rekomendasi investasi TIK yang diberikan oleh Diskominfo DIY kepada OPD yang akan melakukan investasi TIK. Proses koordinasi pra penyusunan rekomendasi menjadi momentum untuk memberikan masukan kepada OPD agar memberikan

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
3	Dunia startup di DIY memiliki potensi yang tinggi untuk dapat ditingkatkan sebagai pendorong perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di era digital ini.	Akan diselenggarakan Kebun Inovasi Start Up Academy.	akses yang lebih luas kepada masyarakat/ stakeholdernya terhadap aplikasi layanan publik yang dimiliki atau yang akan dibangun; Kebun Inovasi Start Up Academy merupakan salah satu inisiatif Diskominfo DIY untuk mendorong partisipasi pegiat digital di DIY dalam memberikan solusi berbasis TIK atas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh DIY. Konsep Kebun Inovasi ini agak berbeda dengan model start up academy yang lain, karena peserta dapat melakukan problem shopping dengan mencermati Rencana Aksi Jogja Smart Province 2018-2023 sebagaimana Pergub DIY Nomor 46 Tahun 2019.

c. REFORMASI BIROKRASI

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	DPRD memberikan dorongan kepada Gubernur DIY untuk terus menyelaraskan reformasi birokrasi dengan langkah-langkah meritokrasi dalam pengisian jabatan struktural. Pengisian jabatan struktural dengan metode seleksi/lelang terbuka yang baru sebatas pada jabatan Eselon II, perlu terus dikembangkan pada Eselon III dan IV.	<p>Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 dijelaskan bahwa mekanisme pengisian jabatan yang dilakukan secara seleksi terbuka adalah pada Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) atau dalam hal ini disebut Eselon II. Sedangkan untuk pengisian jabatan administrator dan jabatan pengawas (Eselon III dan IV) mekanisme pengisiannya dilakukan melalui penetapan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) setelah mendapat pertimbangan dari tim penilai kinerja pada instansi pemerintah.</p> <p>Pelaksanaan Reformasi Birokrasi level Perangkat Daerah telah dilakukan setiap tahun dan tercermin dalam upaya perbaikan tata Kelola pemerintahan Perangkat Daerah. Upaya peningkatan masih sangat dibutuhkan untuk meraih hasil yang maksimal.</p> <p>Hasil evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maupun hasil evaluasi secara internal oleh Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi pijakan untuk menentukan strategi percepatan lebih lanjut. Strategi percepatan yang dilaksanakan mulai tahun 2020 meliputi: 1) Penyesuaian Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah DIY dengan Road Map Nasional 2020 – 2024; 2) Peningkatan intensitas kolaborasi 7 (tujuh) OPD Pengampu 8 Area Perubahan, meliputi: Inspektorat, Bappeda, BPKA, BKD, Badan Diklat, Dinas Kominfo dan Biro Organisasi sehingga terbangun platform yang sama dalam melakukan pembinaan Area Perubahan kepada seluruh OPD; 3) Penguatan Tim Reformasi Birokrasi OPD dengan meningkatkan intensitas komunikasi, informasi dan edukasi oleh OPD Pengampu Area Perubahan; dan 4) Mengintegrasikan isu-isu reformasi birokrasi pada 8 Area Perubahan dengan upaya-upaya pembinaan internal yang sudah dilakukan secara rutin oleh semua Pimpinan OPD, sehingga setiap upaya pembinaan internal OPD selalu berkaitan dengan isu-isu reformasi birokrasi.</p> <p>Berkaitan dengan Pengisian Jabatan dengan metode seleksi terbuka, sesuai Permenpan Nomor 15 th 2019 tentang pengisian jabatan secara terbuka di instansi pemerintah metode seleksi terbuka</p>	Menyelaraskan reformasi birokrasi dengan langkah-langkah meritokrasi dalam pengisian jabatan struktural

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		diberlakukan untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (Eselon I dan Eselon II). Sedangkan untuk Jabatan Eselon III dan Eselon IV sesuai PP 11 th 2017 tentang manajemen PNS menggunakan metode penilaian kinerja melalui Tim Penilai Kinerja PNS (Baperjakat).	

d. PELABUHAN TANJUNG ADIKARTA

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan												
1	Penyusunan <i>Feasibility Study</i> (FS) oleh para ahli yang ditunjuk Kemenkomarves dalam waktu 3 bulan agar dikawal Pemerintah Daerah DIY sehingga tujuan pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto bisa dilanjutkan dan berhasil menjadi Pelabuhan yang bisa didarati kapal nelayan sesuai tujuan awal pembangunan Pelabuhan.	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY (DKP DIY) berkomitmen untuk mengawal kegiatan penyusunan feasibility study Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto dengan memfasilitasi kegiatan tersebut diantaranya yang telah berjalan selama ini yaitu : a. Memfasilitasi dan mendampingi ke lapangan pada kunjungan kerja dari Kemenko Marves (12 Maret 2021) yang mana memberikan hasil untuk dilakukan pengkajian ulang Pelabuhan Tanjung Adikarto dalam waktu 3 bulan, b. Memfasilitasi dan mendampingi ke lapangan pada pengambilan sampel pasir besi di kawasan Pelabuhan Tanjung Adikarto (15 Maret 2021) oleh Prof. Yohanes Surya sebanyak 2 truk untuk dilakukan penelitian karakteristik dan potensi pasir, c. Memfasilitasi dan mendampingi ke lapangan pada pengambilan sampel pasir di Pelabuhan Tanjung Adikarto sebanyak 2 truk dalam rangka uji coba pengolahan industri (2 April 2021), d. Memfasilitasi dan mendampingi ke lapangan pada kegiatan kunjungan kerja DPR RI Komisi IV yang didampingi KKP terkait penyelesaian dan pengelolaan pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto (11 April 2021) e. Memfasilitasi dengan penyediaan data pada kegiatan rapat pembahasan rencana pengelolaan Pelabuhan Tanjung Adikarto dengan KKP, hasil rapat KKP akan melakukan audiensi dengan Tim Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan DIY (TP5 DIY), Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, Dinas Kelautan dan Perikanan Kulon Progo terkait pengelolaan dan penyelesaian pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto, f. Memfasilitasi dan mendampingi ke lapangan pada kegiatan uji petik tim evaluasi karakteristik pasir di Pelabuhan Tanjung Adikarto oleh Badan Geologi Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi Kementerian ESDM.	Alternatif pemanfaatan Pelabuhan Tanjung Adikarto yaitu dalam bentuk pemanfaatan aset (sarana/prasarana) yang ada di kawasan pelabuhan.												
2	Mohon data biaya pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto dengan tahun dan biaya dari tahun dimulainya sampai tahun terakhir.														
3	Perlunya road map dan tata kala yang jelas terkait pembangunan Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto apabila akan dilanjutkan sebagai pengungkit sektor perikanan dan kelautan untuk mewujudkan visi “Menyongsong Abad Samudra Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”.														
4	Apabila pembangunan Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto tidak feasible untuk dilanjutkan pembangunannya perlu dilakukan alternatif alih pemanfaatan Pelabuhan Tanjung Adikarto untuk kepentingan yang lain, seperti kepentingan pariwisata, sehingga tidak berlarut-larut karena anggaran yang dikeluarkan sudah sangat banyak.	Data biaya pembangunan PP Tanjung Adikarto <table><tr><th>No</th><th>Instansi</th><th>Realisasi Anggaran</th></tr><tr><td>1</td><td>Dinas Perhubungan (APBN Kemenhub-nilai perolehan)</td><td>1.396.120.500,-</td></tr><tr><td>2</td><td>BBWSO (nilai perolehan)</td><td>233.062.632.780,-</td></tr><tr><td>3</td><td>APBD DKP DIY (nilai perolehan)</td><td>112.580.983.428,-</td></tr></table>	No	Instansi	Realisasi Anggaran	1	Dinas Perhubungan (APBN Kemenhub-nilai perolehan)	1.396.120.500,-	2	BBWSO (nilai perolehan)	233.062.632.780,-	3	APBD DKP DIY (nilai perolehan)	112.580.983.428,-	
No	Instansi	Realisasi Anggaran													
1	Dinas Perhubungan (APBN Kemenhub-nilai perolehan)	1.396.120.500,-													
2	BBWSO (nilai perolehan)	233.062.632.780,-													
3	APBD DKP DIY (nilai perolehan)	112.580.983.428,-													

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut		Tujuan/Masalah yang diselesaikan	
		4	APBN DKP DIY (per 20 Desember 2018 dari Simak BMN) nilai saat ini	7.930.249.486,-	
		5	APBD Kulon Progo (nilai perolehan)	10.363.140.257,-	
			JUMLAH TOTAL	365.334.126.451,-	
Memanfaatkan sarana dan prasarana yang telah terbangun di kawasan Pelabuhan Tanjung Adikarto menjadi pusat kegiatan pelatihan sentral perikanan (tangkap, budidaya, dan pengolahan) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.					

e. JOGJA AGRO PARK

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Perlu sosialisasi keberadaan JAP kepada masyarakat luas terutama yang memiliki keminatan dan kemampuan dibidang entrepreneurship agar dapat berpartisipasi dalam pengelolaan JAP.	Pemerintah Daerah DIY sedang menyiapkan konsep Managemen Profesional untuk pengelolaan Jogja Agro Park (JAP). Saat ini terus dilakukan optimasi operasionalisasi JAP, antara lain melalui sosialisasi keberadaan JAP, peningkatan kewirausahaan, dan rebranding JAP.	Pengelolaan JAP yang lebih efektif dan efisien dengan membentuk struktur organisasi pengelola JAP profesional, melibatkan tenaga ahli non ASN yang kompeten dibidang agribisnis, agrowisata, dan eduwisata.
2	Perlu dilakukan rebranding terhadap pengelolaan JAP sehingga menjadi awarnes masyarakat DIY tentang keberadaan JAP.	Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat mempercepat terwujudnya JAP sebagai pusat pembelajaran, penumbuhkembangan wirausahawan agribisnis, lembaga pelatihan pertanian, dan wahana wisata pendidikan berbasis pertanian.	
3	Pengelolaan Jogja Agro Park mohon segera ditetapkan agar pengembangan ke depan bisa lebih dioptimalkan.		

f. YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Facilitasi UMKM DIY bisa memiliki outlet dikawasan bandara agar biaya terjangkau pelaku UMKM.	Rencana pada tahun 2022 akan dilakukan appraisal sewa outlet bagi UMKM di kawasan Bandara YIA untuk penentuan PAD 2023, dikarenakan pandemi COVID-19 yang mengakibatkan kontraksi yang cukup signifikan bagi UMKM maka rencana tersebut yang semula dilakukan pada tahun 2022 harus diundur dan akan dimulai pada tahun 2023. Galeri Pasar Kotagede YIA Kulon Progo dibangun sejak awal berdiri pada tanggal 28 Agustus 2020 mempunyai maksud dan tujuan, antara lain yaitu :	Meningkatkan pendapatan dari pajak kuliner yang ada di galeri untuk Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan sosialisasi pajak yg dilakukan oleh BPKA kepada seluruh tenant yang ada di YIA termasuk tenant di galeri pasar kotagede YIA Kulon Progo. Meningkatkan promosi produk UMKM local berkualitas

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<ul style="list-style-type: none"> - Membantu UMKM di dalam mempromosikan produknya agar jangkauannya lebih luas - Meningkatkan omzet UMKM yang sudah dikurasi terlebih dahulu - Meningkatkan daya saing produk UMKM lokal unggulan <p>Upaya – upaya yang dilakukan untuk memenuhi tujuan tersebut karena sejak pembukaan galeri UMUM, wabah pandemi covid muncul sehingga dari target awal penjualan yang di harapkan akhirnya belum bisa terpenuhi. Tahun 2020 merupakan Tahun <i>Soft Opening</i>, sedangkan tahun 2021 ini diharapkan sebagai Tahun Penumbuhan dimana UMKM mendapatkan subsidi penuh, biaya utilitas, SDM dan sewa. Adapun pada tahun 2022 dicanangkan sebagai Tahun Pemantapan dengan harapan pandemi covid sudah mereda seiring dengan diberikannya vaksin, dan situasi penerbangan dapat normal kembali, sehingga jumlah penumpang meningkat dengan harapan pengunjung galeri yang membeli produk UMKM juga meningkat. Sedangkan Tahun 2023 diprediksi sebagai Tahun Kemandirian dengan harapan UMKM yang sudah bergabung dalam wadah Koperasi diberi fasilitas pembiayaan atau pinjaman bunga lunak untuk operasional galeri</p> <p>Pembinaan dan pendampingan terhadap UMKM yang sudah tergabung dalam Pasar Kotagede YIA terus di lakukan baik melalui Pelatihan – pelatihan, perbaikan desain kemasan, Fasilitas Halal, Fasilitas Ijin Edar, Fasilitas Merk, Pemasaran Produk secara Online, dsb</p> <p>Melakukan sinergi lintas sector maupun lintas kewenangan dengan Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan dalam rangka untuk pengenalan Galeri Pasar Kotagede YIA kepada pengunjung sekaligus penumpang maskapai.</p> <p>Menjalin kemitraan dengan maskapai penerbangan</p>	<p>Membantu penjualan UMKM di masa pandemi COVID-19</p> <p>Memperkenalkan kepada wisatawan baik lokal maupun internasional produk – produk UMKM unggulan Daerah Istimewa Yogyakarta</p>
2	Peningkatan pendapatan Asli Daerah dari Bandara NYIA untuk Pemda DIY dan Kabupaten Kulon Progo.	Proses appraisal dilakukan secara paralel dengan evaluasi pelaksanaan.	
3	Berpindahnya lalu lintas penerbangan komersil dari Bandara Adi Sucipto ke Bandara Yogyakarta International Airport, berdampak pada pola pergerakan lalu lintas kendaraan yang semula kearah timur menjadi kearah barat. Hal ini berdampak terhadap tingkat pelayanan lalu lintas di sekitar jaringan jalan Bandara Yogyakarta International Airport. Adanya beberapa titik persimpangan yang belum dikendalikan dengan APILL disekitar Bandara tersebut berpotensi adanya konflik lalu lintas, beban lalu lintas yang	Berkoordinasi dengan kementerian Perhubungan mengingat simpang yang berada di sekitar Bandara, termasuk akses masuk kedalam YIA merupakan jalan nasional	Menangani konflik lalu lintas pada simpang di sekitar bandara YIA

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	semakin tinggi akibat mobilisasi menuju bandara tersebut menyebabkan tingginya potensi konflik lalu lintas di sekitar simpang yang berada di sekitar Bandara, termasuk akses masuk kedalam YIA. Mohon sekiranya dapat ditindaklanjuti		
4	Kurang efektifnya perpindahan antar moda (moda kereta api ke bus). Pada saat ini mobilisasi menuju Bandara Yogyakarta Internasional Aripport dapat menggunakan jalur darat dan rel, untuk jalur darat sudah tersedia Angkutan Kota Dalam Provinsi, untuk jalur rel saat ini masih menggunakan jalur eksisting dengan pemberhentian terakhir di Stasiun Wojo kemudian dilanjutkan dengan <i>shuttle</i> menggunakan armada Damri. Adanya perpindahan antar moda ini berdampak pada tingginya biaya dan waktu perjalanan karena belum adanya integrasi dokumen dalam hal ini adalah ticketing, sehingga mobilisasi menggunakan kereta api masih kurang efektif dan efisien	Berdasarkan rapat koordinasi dengan pihak terkait mengenai persiapan operasional kereta bandara pada tanggal 2 Juni 2021 disampaikan bahwa kereta api bandara akan dioperasikan mulai tanggal 17 Agustus 2021 masih dalam tahap mobilisasi penumpang dari stasiun Tugu ke Bandara Berkoordinasi lebih dengan PT. KAI dan PT. Angkasa Pura 1 terkait single ticketing handling	Memberikan kemudahan bagi penumpang untuk menggunakan angkutan kereta api menuju bandara YIA
5	Simpang yang berada disekitar Bandara Yogyakarta International Airport perlu direkayasa dengan menggunakan APILL yang bertujuan untuk mengurangi konflik lalu lintas yang berada di simpang dengan memperhatikan beban lalu lintas dari setiap arahnya. Terkendalinya simpang dengan APILL bertujuan juga untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas, lalu lintas dari setiap arah diatur sesuai dengan fasenya	Berkoordinasi dengan kementerian Perhubungan mengingat simpang yang berada di sekitar Bandara, termasuk akses masuk kedalam YIA merupakan jalan nasional	Menangani konflik lalu lintas pada simpang di sekitar bandara YIA
6	Kendala mobilisasi ke Bandara Yogyakarta International Airport menggunakan moda Kereta Api dapat terselesaikan bila trase Kereta Api Ke Stasiun Bandara telah selesai dibangun, hal ini akan mengilangkan proses perpindahan dari Kereta ke Shuttle sehingga dapat memangkas waktu perjalanan. integrasi dokumen antarmoda dari kereta api ke bandara berupa integrasi tiket akan memudahkan para pelaku perjalanan yang menggunakan pesawat, kegiatan <i>check in boarding pass</i> dapat dilakukan stasiun kereta keberangkatan sehingga aktivitas <i>check in</i> penumpang pesawat tidak perlu dilakukan di area terminal keberangkatan Bandara	Berdasarkan rapat koordinasi dengan pihak terkait mengenai persiapan operasional kereta bandara pada tanggal 2 Juni 2021 disampaikan bahwa kereta api bandara akan dioperasikan mulai tanggal 17 Agustus 2021 masih dalam tahap mobilisasi penumpang dari stasiun Tugu ke Bandara Berkoordinasi lebih dengan PT. KAI dan PT. Angkasa Pura 1 terkait single ticketing handling	Memberikan kemudahan bagi penumpang untuk menggunakan angkutan kereta api menuju bandara YIA
7	Perlunya ditinjau ulang dan terarah Masterplan Aerotropolis yang sudah disusun pada tahun 2019 harus direview ulang untuk menyesuaikan dengan akses menuju tol Yogyakarta- Kulon Progo serta rencana akses jalan menuju Bedah Menoreh. Pada tahun 2019 telah dilakukan pembangunan terminal VIP YIA Tahap I berupa pondasi dan kolom struktur yang akan dilanjutkan bangunan diatasnya pada tahap II dan tahap III. Pada kolom struktur tersebut terdapat besi tulangan terbuka yang rawan	Aerotropolis : Perlu dilakukan review Masterplan Aerotropolis pasca ditetapkannya ruas Jalan Tol Yogyakarta – Kulon Progo serta rencana akses jalan menuju Bedah Menoreh. Pembangunan Terminal VIP YIA : Pembangunan Terminal VIP YIA hendaknya dapat segera terealisasi mengingat kolom struktur pada bangunan tersebut terdapat besi tulangan terbuka yang rawan korosi serta lokasi site berada di tepi pantai dan biaya pembangunan dapat diusulkan melalui Dana Keistimewaan (DAIS) Tahun Anggaran 2022.	Aerotropolis : Tujuan dilakukannya review Masterplan Aerotropolis yaitu agar Dokumen Masterplan lebih terupdate lagi terhadap perkembangan rencana akses jalan menuju tol Yogyakarta- Kulon Progo serta akses jalan menuju Bedah Menoreh. Pembangunan Terminal VIP YIA : Tujuan dari segera terealisasinya pembangunan terminal VIP YIA ini

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	korosi mengingat lokasi site berada di tepi pantai, kiranya proses pembangunan terminal VIP YIA ini dapat segera terealisasi		adalah agar pondasi dan kolom struktur yang akan dilanjutkan bangunan diatasnya itu tidak lama ter bengkalai, dan besi tulangan terbuka yang rawan korosi itu dapat segera tertutup dengan adanya pembangunan kolom struktur di atasnya.

g. PENATAAN KAWASAN SUMBU FILOSOFIS

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Penataan Kawasan Sumbu Filosofi kedepan harus menjangkau Panggung Krapyak sehingga ketiga titik tersebut mendapatkan atensi masyarakat untuk berkunjung baik dari sisi pariwisata maupun kegiatan ilmiah sosial budaya.	Melakukan revitalisasi pemanfaatan ruang satuan ruang strategis sumbu filosofi dengan memperhatikan eksistensi sumbu filosofi yang sarat makna dalam memahami keberadaan Kraton Yogyakarta sebagai warisan leluhur, menjangkau Tugu Pal Putih hingga Panggung Krapyak, mempertimbangkan aspek transportasi serta menggalakkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dari sisi historis, sosial budaya maupun pariwisata.	Merevitalisasi kawasan sumbu filosofi agar pertumbuhan kota dan dinamika perekonomian perkotaan yang masif tidak mengaburkan makna sumbu filosofi pada perspektif masa kini dan masa mendatang, mengingat : pelestarian keberadaan simbol - simbol yang menjadi bagian dari sumbu filosofi merupakan bagian dari tanggung jawab sejarah keistimewaan DIY; keberadaan sumbu filosofi sebagai pusat kebudayaan yang terus hidup; mengurai problematika dinamika perkotaan yang terkesan tidak nyaman, semrawut, macet, kumuh, dan kotor; menata dan mengelola SDM yang memiliki kepentingan dalam kawasan sumbu filosofi agar memiliki rasa kepemilikan secara berkelanjutan.
2	Perlu dipertimbangkan dari aspek transportasi mengingat salah satu Dampak dari terpusatnya penataan Kawasan Sumbu Filosofi Kraton, Malioboro dan Tugu Pal Putih adalah kemacetan yang semakin tinggi.		
3	Perlu sosialisasi yang lebih massif dan adaptif dengan perkembangan jaman terkait agenda Penataan Kawasan Sumbu Filosofi sehingga dapat memberikan dampak cukup signifikan bagi masyarakat baik dari sisi edukasi kesejarahan, social budaya maupun pariwisata.		
4	Pemda DIY agar menindaklanjuti Temuan BPK terkait pengadaan Hotel Mutiara I dan II dengan menyusun rencana pemanfaatannya secara detail. Mangkraknya pemanfaatan Hotel Mutiara I dan II sebagaimana rencana awal pembelian, tentu menyebabkan pemborosan anggaran daerah. Dalam hal diperlukan langkah lebih lanjut, maka dapat dilakukan pemeriksaan khusus oleh BPK RI. DPRD DIY juga meminta 87 kepada Gubernur, rencana detail pemanfaatan eks Hotel Mutiara I dan II dapat dipaparkan di DPRD DIY mengingat nilai strategis untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya pelaku UMKM. DPRD DIY berharap agar Rekomendasi ini ditindaklanjuti secara komprehensif, sehingga tidak terjadi peristiwa yang sama pada masa yang akan datang.		
5	Penataan Kawasan sumbu filosofi dari tugu pal putih hingga panggung krapyak hendaknya diimbangi dengan edukasi masyarakat dan peningkatan kapasitas masyarakat agar masyarakat lebih hander beni (rasa memiliki) terhadap warisan sumbu filosofi		
6	Pengembangan arsitektur dari Gading hingga ke Panggung Krapyak hendaknya mulai disosialisasikan		
7	Eks Bioskop Indra mohon segera diselesaikan dan dipastikan agar bisa segera melakukan relokasi PKL.		

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
8	Perawatan kawasan Alun-Alun Utara sebagai bagian dari sumbu filosofis hendaknya dioptimalkan dan siapa penanggungjawabnya, mengingat untuk merapikan tanaman di alun-alun utara yang rumputnya sudah lebat belum juga dirapikan. Demikian juga dengan sisa material penutupan jalan Pojok Beteng Barat selatan, yang mana sisa material sangat mengganggu keindahan Beteng Kraton.		

h. PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN LINTAS SELATAN

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Kendala di lapangan yang terjadi pada proses pensertifikatan Tanah JJLS setelah pembebasan Tanah JJLS yang dilakukan oleh Tim 9 pada proses pembebasan lahan awalnya belum tersedia Peta Pembebasan Tanah sebagai syarat untuk pensertifikatan dan juga lama waktu tunggu dari penerimaan berkas sampai terbitnya SPS tiap tahapan pensertifikatan perlu adanya koordinasi antar instansi.	Koordinasi yang intensif antar instansi yang terlibat dalam pembuatan dan penerbitan sertifikat tanah agar tepat waktu dalam penerbitan sertifikat. Kecermatan dalam perencanaan, pembebasan lahan serta dalam pembangunan konstruksi nya sangat diperlukan. Potensi – potensi masalah baru yang akan timbul dan pengalaman dari yang lalu perlu diidentifikasi sehingga ke depan dalam proses pembangunan JJLS berikutnya bisa diantisipasi.	Pembangunan JJLS sebagai poros utama yang membentang dari ujung barat di Congot (Kabupaten Kulon Progo) yang berbatasan dengan Kabupaten Purworejo (Jawa Tengah) dan berakhir di ujung timur pada Desa Duwet (Kabupaten Gunungkidul) yang berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah) menjadi pemicu (trigger) bagi pusat-pusat pertumbuhan baru (new emerging growth center) di kawasan selatan, sekaligus menjadi penyeimbang pertumbuhan ekonomi wilayah dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. koordinasi dan sinergitas yang baik antar Lintas sektor dalam rangka percepatan pembangunan JJLS wajib dilakukan. Baik itu dalam sisi Perencanaan, Pembebasan lahan, Penerbitan Sertifikat hingga ke pembanguna konstruksi.
2	Kebutuhan pembebasan lahan untuk JJLS sangat besar, sehingga proses pembebasan dan pembangunan konstruksinya memerlukan perencanaan yang cermat dengan tahapan yang berkelanjutan. Pembebasan lahan di Desa Kemadang dimana masih terdapat warga yang tidak sepakat dengan nilai ganti rugi dan mengajukan keberatan.		
3	Mengingat pentingnya pembangunan Jaringan Jalan Lintas Selatan maka diperlukan langkah-langkah taktis sebagai upaya percepatan pembangunan.		
4	Perlu penjabaran lebih detail mengenai rencana pembangunan JJLS, mengingat JJLS sebagai poros utama yang membentang dari ujung barat di Congot (Kabupaten Kulon Progo) yang berbatasan dengan Kabupaten Purworejo (Jawa Tengah) dan berakhir di ujung timur pada Desa Duwet (Kabupaten Gunungkidul) yang berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah).		

i. PEMBANGUNAN TAMAN BUDAYA SE DIY

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Pemda DIY hendaknya membangun system pengelolaan, pengawasan dan pemeliharaan Taman Budaya se-DIY.	Pengawasan Taman Budaya di DIY mengacu pada Peraturan Gubernur nomor 85 tahun 2019 tentang pengelolaan dana keistimewaan dan Peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan dengan demikian pengelolaan, pengawasan dan pemeliharaan dapat dilakukan secara terkoordinasi secara berkala dengan mekanisme yang sudah diatur didalam ketentuan tersebut;	Pengoptimalan pemanfaatan taman budaya yang sudah terbangun dan proses pembangunan taman budaya.
2	Pemda DIY hendaknya memperhatikan kajian terkait lokasi dan juga luas lahan yang tersedia mengingat sulitnya pembebasan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Taman Budaya.	Pemilihan taman budaya telah dilaksanakan dengan didahului melakukan kajian studi pendahuluan/Fisibility Study (FS)/semacamnya dalam rangka untuk menentukan lokasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, pertanahan dan keterkaitan dengan aspek social ekonomi lainnya	
3	Pemanfaatan Taman Budaya sebagai identitas dan pusat aktivitas kebudayaan tentunya tidak dapat terlaksana tanpa peran serta masyarakat, untuk itu Pemda DIY perlu melakukan pelibatan peran masyarakat baik selaku pengunjung maupun pengisi aktivitas kebudayaan.	Pemanfaatan Taman Budaya dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat telah dimulai sejak tahun 2020 dengan adanya even budaya, pementasan, pameran dan festival yang diselenggarakan ditaman budaya. Ditahun 2021 dan 2022 aktivitas ini akan tetap berkesinambungan, sehingga pemanfaatan taman budaya dalam rangka pemajuan kebudayaan akan tetap berlangsung.	
4	Permasalahan dalam Taman Budaya adalah pengadaan tanah yang memenuhi standar kebutuhan taman budaya, apakah memungkinkan bangunan taman budaya dibangun dengan luasan yang lebih kecil, mengingat kesulitan pengadaan tanahnya.	Pengadaan tanah untuk Taman Budaya sudah dilaksanakan, dimana dalam pelaksanaannya telah dilakukan berdasarkan kajian baik melalui forum-forum koordinasi, FGD, maupun konsultasi dengan berbagai pihak. Sehingga pembangunan taman budaya sudah sampai pada tahapan untuk pembangunan konstruksi atau untuk pengadaan fasilitas pendukung.	

j. PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT BERTARAF INTERNASIONAL RSUD WATES

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Jika kekurangan alat medis, sarana prasarana dan SDM belum juga segera terpenuhi, maka perlu dipertimbangkan untuk merubah status RSUD Wates dari RS Tipe B menjadi RS Tipe C agar keberadaan RSUD Wates dapat segera dinikmati kemanafaatannya bagi masyarakat sekitar.	<p>Pengembangan RSUD Wates untuk mewujudkan sebuah rumah sakit pendidikan dan pusat rujukan yang unggul menuju pelayanan berstandar internasional didukung dengan pembangunan fasilitas Gedung Medik Terpadu, Gedung Rawat Inap, Asrama dan Apartemen melalui anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemda DIY tahun 2018 – 2020 sebagian besar telah dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan.</p> <p>a. Gedung Medik Terpadu Lantai I telah dimanfaatkan untuk pelayanan Intalasi Gawat Darurat (IGD), Rawat Jalan (Poliklinik), Pendaftaran, Laboratorium, Radiologi, Farmasi dan Kassa. Lantai II dimanfaatkan untuk pelayanan Rawat Jalan (Poliklinik), Ruang Bersalin dan Kamar Operasi IGD. Lantai III telah dimanfaatkan untuk pelayanan Ruang Intensif, Instalasi Bedah Sentral (IBS).</p> <p>b. Gedung Rawat Inap belum semua dimanfaatkan secara optimal. Ruang rawat inap VIP dan VVIP di lantai III Gedung Rawat Inap baru belum diperasioanakan, dikarenakan belum adanya alat Kesehatan dan SDM. Efek rujukan berjenjang dan masa pandemi berdampak pada jumlah pasien RSUD Wates yang cenderung menurun, sehingga Ruang rawat inap VIP dan VVIP belum</p>	<p>Tujuan:</p> <p>Anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemda DIY tahun 2018 – 2020 untuk pembangunan dan pengembangan RSUD Wates dapat mendukung upaya RSUD Wates menjadi rumah sakit dengan pelayanan berstandar Internasional.</p>

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<p>dikembangkan/dioperasionalkan. Gedung lama Ruang Rawat Inap Isolasi penerima Alat Kesehatan dengan dana BKK dan Hibah.</p> <p>c. Gedung Asrama Mahasiswa mempunyai 32 kamar lengkap dengan kamar mandi dalam, AC dan Televisi serta dapat menampung mahasiswa maksimal sejumlah 128 orang/per kamar 4 orang. Direncanakan telah dapat menampung mahasiswa yang melakukan praktek klinis di RSUD Wates.</p> <p>Namun demikian Asrama Mahasiswa yang telah selesai pembangunannya dan siap ditempati terdampak pandemi COVID-19. Semua institusi pendidikan yang bekerjasama dengan RSUD Wates menarik Mahasiswa dan melakukan pembelajaran dengan secara on line/Daring (Dalam Jaringan) sehingga praktis Asrama Mahasiswa belum dapat digunakan.</p> <p>Pada masa Pandemi COVID-19 Asrama Mahasiswa sementara digunakan untuk Rumah Singgah Teratai (RST) sebagai Tempat untuk Isolasi bagi Pasien COVID-19 yang OTG (Orang Tanpa Gejala) dan untuk mess sementara bagi TNI dan POLRI dalam rangka tugas pendampingan tenaga kesehatan di Kulon Progo. Sampai dengan asrama saat belum digunakan untuk mahasiswa praktik karena sewaktu-waktu masih akan digunakan sebagai tempat isolasi/shelter.</p> <p>d. Gedung Apartemen memiliki 8 ruang tipe 36 dengan 1 kamar dan 4 tipe 45 dengan 2 kamar sehingga total kamar tersedia ada 16 kamar. Perencanaan awal peruntukan Gedung Apartemen untuk penginapan bagi keluarga Pasien apabila menunggu keluarga yang di rawat di RSUD Wates dan atau untuk tempat tinggal sementara bagi dokter spesialis atau sub spesialis yang harus siaga di RSUD Wates. Saat ini sementara dipakai sebagai kamar untuk Residen (Program Pendidikan Dokter Spesialis-PPDS) bagi Residen Patologi Klinik, Residen Anak, Residen Bedah Saraf, Residen Bedah Orthopedi, Residen Ilmu Penyakit Dalam, dan Residen Ilmu Penyakit Saraf.</p> <p>e. Pemanfaatan ini sifatnya sementara apabila situasi dan kondisi semakin membaik atau pandemi COVID-19 selesai maka gedung-gedung tersebut akan berfungsi sebagaimana mestinya.</p> <p>f. Pengadaan Alat Kesehatan/Kedokteran dengan dana Bantuan Keuangan Khusus dan hibah telah ditempatkan pada ruangan dan penerima manfaat. Diantaranya ESWL (<i>Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy</i>) alat pemecah batu ginjal telah dimanfaatkan untuk pelayanan.</p> <p>RSUD Wates merupakan RS tipe B Pendidikan. Pembangunan dan pengembangan RSUD Wates dengan dukungan BKK dan hibah dari Pemda DIY mulai dapat dirasakan masyarakat Kulon Progo khususnya, dan masyarakat umum diluar Kulon Progo, serta sebagian berasal dari luar DIY baik pasien umum maupun maternal dan perinatal. Selama pandemi, sebagaimana yang dialami rumah sakit lainnya, BOR (<i>Bed Occupation Rate</i>) atau angka keterisian tempat tidur di tahun 2021 relatif masih rendah yaitu 27,15%. Adapun LOS (<i>Average Length of Stay</i>) atau angka rata-rata lamanya pasien dirawat adalah 3,57 hari.</p> <p>Pembangunan dan pengembangan RSUD Wates mendukung keberadaan dan beroperasionalnya Bandara Yogyakarta International Airport (YIA). Dukungan RSUD Wates berupa layanan preventif maupun promotif. Diantaranya adalah kegiatan vaksinasi massal COVID-19 untuk karyawan YIA dan</p>	

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		elayanan Kir Kesehatan karyawan YIA. Layanan kegawatdaruratan bedah dan jantung mulai dari penjemputan menggunakan ambulans yang dilengkapi alat terstandar, sarana prasarana <i>Emergency</i> dan penanganan kegawatdaruratan dan perawatan intensif. Selain itu disiapkan pula Pelayanan Mini ICU di Bandara YIA untuk melayani kedatangan pejabat publik apabila terjadi kegawatdaruratan.	

k. REVITALISASI TPA PIYUNGAN

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Program pembangunan Revitalisasi TPA Piyungan harus segera diselesaikan agar tidak menimbulkan permasalahan sampah dalam waktu dekat.	1) Melakukan pembebasan lahan pada tahun anggaran 2021 dan 2022 untuk pengembangan TPA Piyungan yang direncanakan menggunakan teknologi pengolahan sampah dengan skema pembiayaan KPBU 2) Mengoptimalkan pelaksanaan pengelolaan sampah di bagian hulu dengan pelaksanaan pengelolaan sampah di TPS 3R dan Bank Sampah serta pelaksanaan pembangunan TPST di Kabupaten/Kota 3) Atas tindak lanjut temuan BPK akan dilaksanakan kajian evaluasi teknis penataan sel sampah di TPA Piyungan pada tahun anggaran 2022	Pelaksanaan pengoptimalan pelaksanaan pengelolaan sampah di bagian hulu merupakan salah satu solusi dalam pengurangan sampah yang akan dibawa ke TPA Piyungan. Sedangkan pelaksanaan penataan sampah serta perbaikan prasarana yang ada bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan ke masyarakat sekitar akibat pengelolaan sampah di TPA dan harapannya dengan menggunakan skema pembiayaan dan pengelolaan KPBU dapat mengurangi dampak lingkungan dan dampak sosial di masyarakat serta menyelesaikan pengelolaan sampah domestik di DIY.
2	Pemanfaatan teknologi mutakhir dengan skema KPBU harus dapat segera teralisasi mengingat pentingnya semakin meningkatnya volume Sampah		
3	TPA Piyungan harus dikelola secara integratif dengan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan terkoneksi dengan TPS 3R agar memangkas permasalahan sampah dari hulu.		
4	Penambahan titik-titik pemrosesan akhir sampah di Kabupaten/Kota penyuplai sampah ke TPA Piyungan tentunya dengan memperhatikan ketersediaan lahan di wilayah tersebut.		
5	Perlunya roadmap pengelolaan sampah di DIY.		
6	Perlunya dilakukan kajian yang cepat tentang teknologi pengelolaan sampah yang lebih efektif dan efisien, apakah teknologi RDF (<i>Refused Derived Fuel</i>) atau Incenerator, mengingat kapasitas daya tampung TPST Piyungan telah melebihi daya tampung dari yang seharusnya.		
7	Perlunya tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi BPK terkait dengan konstruksi pembangunan tanggul di TPST Piyungan		
8	Hasil LHP BPK tahun 2020 menemukan adanya permasalahan pada konstruksi pembangunan tanggul yang tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Untuk itu DPRD merekomendasikan kepada Gubernur untuk segera melakukan langkah-langkah terukur guna menyelesaikan temuan LHP BPK tersebut. Bilamana diperlukan maka dapat dilanjutkan dengan 94 pemeriksaan khusus oleh BPK RI. DPRD DIY berharap agar Rekomendasi ini ditindaklanjuti secara komprehensif, sehingga tidak terjadi peristiwa yang sama pada masa yang akan datang		

I. PENANGGULANGAN KEMISKINAN

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Perlu adanya kesamaan pandang antara BPS dengan Pemda DIY, Pemkot/Pemkab se-DIY terkait skoring dalam penilaian kemiskinan.	Selama ini pengukuran kemiskinan dilakukan oleh BPS sesuai standar yang mereka lakukan melalui pengukuran garis kemiskinan. Namun pengukuran ini perlu dibedah lebih lanjut agar pengukuran dapat sejalan dengan program-program yang dilakukan oleh Pemda DIY. Pemda dalam rangka intervensi, memerlukan basis data yang menyentuh sampai level mikro di masyarakat. Sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah DIY Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan, dibentuk Sekretariat Pemberdayaan Masyarakat (Sebermas) berdasarkan pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 103 Tahun 2020, yang telah diperbaharui dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 118 tahun 2021. Sebermas mempunyai tugas membantu Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), membedah pengukuran kemiskinan bersama BPS sebagai narasumber utama dengan dibantu bidang sektoral Bappeda DIY dan OPD-OPD DIY dan Kabupaten/Kota untuk menyelaraskan pengukuran kemiskinan di DIY. Sebermas juga telah membuat analisis kemiskinan daerah hingga tingkat kapanewon (kecamatan) sebagai salah satu cara mengatasi daerah-daerah rawan kemiskinan tingkat kecamatan.	Data kemiskinan, inventarisasi program penanggulangan kemiskinan, dan pelibatan lintas sektor untuk penanggulangan kemiskinan.
2	Perlu adanya data tunggal dan pengklasteran kategori kemiskinan agar memudahkan dalam intervensi program pemerintah daerah	Pemda DIY melalui Sekretariat Pemberdayaan Masyarakat (Sebermas) yang membantu TKPKD melakukan data tunggal dan pengklasteran kategori kemiskinan agar memudahkan dalam intervensi dan monitoring kegiatan dan program-program kemiskinan. Langkah pertama sudah dilakukan melalui intervensi dan monitoring program-program kemiskinan pada OPD-OPD Pemda DIY dan Kabupaten/Kota melalui Desk Tri Wulanan Bidang Pengendalian-Bappeda DIY dengan surat penagihan melalui Surat Wakil Gubernur Nomor 456/7087 tentang Inventarisasi Program Penggulangan Kemiskinan dalam rangka Pengelompokan program kegiatan penanggulangan kemiskinan.	
3	Kemiskinan hanya bisa diselesaikan dengan sinergitas antar Organisasi Perangkat Daerah yang bersinergi sesuai peran dan fungsinya masing-masing.	Data tunggal dan pengklasteran sebagai data kendali kemiskinan akan mencakup kegiatan dan program-program kemiskinan akan di sinergikan bersama OPD-OPD Pemda DIY dan Kabupaten/Kota yang memegang kegiatan teknis di lapangan sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.	
4	Kerja sama antara pemangku kepentingan dengan perguruan tinggi, pihak swasta, komunitas (masyarakat peduli) dan lembaga masyarakat dalam program menekan angka kemiskinan di DIY.	Peran multisektor yang dilibatkan dalam pelaksanaan SDGs (Sustainable Development Goals) termasuk didalamnya Non Government baik LSM maupun Akademisi dalam kegiatan Pemantauan dan Evaluasi RAD SDGs. Pemda memfasilitasi Forum CSR atau TSLP tingkat Provinsi untuk mengorganisir CSR di tingkat Pemda agar dapat bersama-sama menyelesaikan kemiskinan di DIY, yang didukung dengan Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan (Simnangkis) yang merupakan instrumen untuk memantau kondisi kemiskinan DIY, yang selanjutnya menjadi bahan pengambilan keputusan multistakeholder terkait kemiskinan.	

6. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

a. KERJA SAMA ANTARDAERAH

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Peningkatan kerja sama dalam membangun jaringan pariwisata, jaringan transportasi yang menyatu dengan Provinsi Jateng dalam optimalisasi pemanfaatan Bandara YIA.	Peningkatan kerja sama dalam membangun jaringan pariwisata jaringan transportasi yang menyatu dengan Provinsi Jateng dalam optimalisasi pemanfaatan Bandara YIA. Baru-baru ini telah ditandatangani kesepakatan bersama dengan 10 Provinsi anggota FKD-MPU termasuk Jawa Tengah terkait pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang akan segera ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja sama Penyelenggaraan Travel Coridor yang mempunyai maksud untuk mendorong pemulihan ekonomi melalui sector pariwisata dan ekonomi kreatif dengan mengupayakan perjalanan wisata yang aman, sehat, dan terkendali, dengan melibatkan seluruh sector yang mendukung industri pariwisata.	Dengan adanya Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Travel Coridor nantinya diharapkan di masa pandemic ini dapat: <ul style="list-style-type: none"> - Bersama-sama mengembangkan keseluruhan jasa dan produk pariwisata yang bersertifikasi <i>Cleanliness/Kebersihan, Health/Kesehatan, Safety/Keamanan, dan Environment Sustainability/Kelestarian Lingkungan (CHSE)</i>; - Mendorong sarana transportasi bersertifikat <i>Cleanliness/Kebersihan, Health/Kesehatan, Safety/Keamanan, dan Environment Sustainability/Kelestarian Lingkungan (CHSE)</i>;

b. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Peningkatan koordinasi masalah keamanan, ketertiban, dan ketentraman hendaknya dilakukan setiap tahun dan pencapaian kesepakatan agenda program dan kegiatan, khususnya beberapa tindakan untuk pencegahan dini terhadap aktivitas yang mengganggu keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat	Koordinasi menjadi hal yang mutlak dilakukan dalam rangka peningkatan koordinasi masalah keamanan, ketertiban, dan ketentraman di Daerah Istimewa Yogyakarta. Koordinasi antar instansi yang terlibat dalam Forkopimda DIY akan difasilitasi melalui rapat-rapat koordinasi yang diselenggarakan menjelang momentum-momentum tertentu yang membutuhkan kesiapan dan koordinasi antar berbagai pemangku kepentingan. Rapat-rapat koordinasi dimaksud antara lain: rapat koordinasi menjelang hari Raya Idul Fitri, Hari Buruh, Hari Natal dan Tahun Baru, Pemilihan Umum, dan lain sebagainya. Selain adanya penguatan sisi koordinasi, dilaksanakan pula kegiatan dalam rangka pencegahan dini terhadap aktivitas yang mengganggu keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat, antara lain: Pemantauan Orang Asing (POA), pembinaan dan penguatan kapasitas organisasi kemasyarakatan, Penanganan Konflik Sosial, Update Data Perubahan Sosial dan Potensi Konflik, pemantauan perkembangan politik di DIY dan penguatan forum-forum kemitraan seperti Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Pembauran Kebangsaan, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan forum-forum lainnya.	Terlaksananya upaya pencegahan dini terhadap aktivitas yang mengganggu keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat.

c. PEMBINAAN BATAS DAERAH

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Tata batas kesepakatan antar daerah penting diupayakan untuk menjadi pedoman masyarakat dalam melakukan tata batas daerah, khususnya untuk pemerintahan desa yang berbatasan dan kepentingan penduduknya. Pemerintah daerah perlu mempertegas batas daerah dan mengimplementasikannya pada peta geospasial desa untuk kepentingan pemerintah desa yang berbatasan	<p>Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sepakat melaksanakan Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Pilar Batas Daerah antara Provinsi Jawa Tengah dengan Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Perjanjian Kerja sama Nomor : 120.13/002221 dan Nomor : 2/PERJ/SEKDA/II/2014 tanggal 11 Februari 2014. Dalam perjanjian kerja sama tersebut, mulai tahun anggaran (TA) 2015, Pemerintah Daerah DIY berkewajiban melaksanakan kegiatan pembangunan dan/atau pemeliharaan pilar batas daerah di sisi barat Gunung Merapi; dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkewajiban melaksanakan kegiatan pembangunan dan/atau pemeliharaan pilar batas daerah sisi timur Gunung Merapi. Kesepakatan ini dilanjutkan kembali dengan Perjanjian Kerja sama Nomor : 002/PKS/II/2019 dan Nomor : 125.5/013/2019 Tentang Pengelolaan Batas Daerah Antara Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>Dalam rangka pemeliharaan pilar batas tersebut, Pemerintah Daerah DIY telah melaksanakan penyusunan database pilar batas daerah di Perbatasan DIY- Provinsi Jawa Tengah, database pilar melakukan identifikasi pilar batas daerah berupa (deskripsi posisi pilar dengan lingkungan sekitar, posisi koordinat, kondisi fisik pilar, dan penggambaran dalam peta koridor batas desa).</p> <p>Database pilar batas di perbatasanab DIY-Provinsi Jateng pada TA 2019 dilaksanakan di Kalurahan Banjarharjo, Kapanewon Kalibawang, TA 2020 tidak dilaksanakan karena kebijakan <i>refocusing</i> anggaran dan TA 2021 dilaksanakan di Kalurahan Banyurejo, Pondokrejo, Lumbungrejo, dan Merdikorejo Kapanewon Tempel Kabupaten Sleman DIY. Untuk TA 2022 direncanakan di wilayah Kalurahan Merdikorejo Kapanewon Tempel dan Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo.</p>	Tujuan dari database pilar batas ini adalah untuk mengetahui kondisi fisik pilar batas daerah apakah masih dalam kondisi baik, rusak /rusak berat bahkan hilang. Hasil dari database ini ditindaklanjuti dengan pemeliharaan pilar batas untuk pilar yang rusak/rusak berat dan penggantian pilar jika pilar tersebut hilang.

d. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Membangun manajemen bencana yang lebih maju dengan berbasis teknologi informasi.	Tindak lanjut : a. Memberikan sosialisasi serta edukasi tentang permasalahan COVID-19 kepada pemangku	Tujuan : Meningkatkan kapasitas aparaturnya serta masyarakat dalam upaya menanggulangi bencana COVID-19 di tingkat RT/Kalurahan/Kelurahan di DIY.
2	Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana berbasis keluarga.		

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
3	Menyiapkan program peningkatan kapasitas dan sarana prasarana kebencanaan yang sesuai dengan geografis dan kebutuhan masyarakat.	kepentingan dan masyarakat di tingkat kalurahan/kelurahan	Tujuan : Meningkatkan kapasitas masyarakat di tingkat Kalurahan/Kelurahan dalam upaya penanggulangan bencana serta meningkatkan kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten/Kota se-DIY.
4	Sinergitas fasilitasi relawan bencana baik antar instansi dalam provinsi maupun dengan kabupaten/kota agar efektif dan efisien tidak tumpang tindih.	b. Melaksanakan gerakan kampanye 5 M c. Melaksanakan pemantauan kegiatan masyarakat serta kegiatan lembaga pemerintah/swasta melalui penerbitan surat rekomendasi izin kegiatan d. Melaksanakan pemantauan kondisi zona status wilayah pada tingkatan RT/Kalurahan/Kelurahan melalui data yang masuk dari kabupaten/kota. Tindak lanjut : a. Melakukan sosialisasi serta edukasi tentang penanggulangan bencana kepada masyarakat di tingkat Kalurahan/Kelurahan di DIY b. Membentuk Kalurahan/Kelurahan tangguh bencana c. Membentuk Satuan Pendidikan Aman Bencana d. Gladi Penanggulangan Bencana e. Memberikan fasilitasi serta koordinasi kepada Forum Pengurangan Risiko Bencana di tingkat DIY dan Kabupaten/Kota f. Koordinasi relawan g. Memberikan fasilitasi alat penanggulangan bencana pada tingkat Kalurahan/Kelurahan di DIY h. Sosialisasi dan pemasangan alat peringatan dini bencana.	

e. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Perlu adanya inovasi kegiatan P4GN tidak hanya berupa sosialisasi, edukasi, seminar namun bisa dilakukan melalui kegiatan outbound dan penguatan lembaga masyarakat yang bergerak dalam gerakan cegah berantas narkoba.	Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) selain dilakukan melalui upaya sosialisasi, edukasi dan seminar, juga akan dilaksanakan melalui penguatan lembaga masyarakat yang bergerak dalam gerakan cegah berantas narkoba. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY selaku koordinator tim P4GN DIY melibatkan beragam lembaga masyarakat yang bergerak dalam gerakan cegah berantas narkoba antara lain Grannat DIY, Jogja Care House, IPWL Elkana, Satgas Anti Narkoba beragam universitas, dan beragam yayasan yang bergerak di bidang rehabilitasi narkoba di DIY sebagai bagian aktif dalam tim dan berperan serta dalam upaya pemecahan berbagai permasalahan terkait narkoba di DIY.	Peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba di DIY dan penurunan skor aspek hak-hak politik pada Indeks Demokrasi Indonesia DIY.

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
2	Melakukan pendekatan dan komunikasi dengan para pemangku kebijakan dalam upaya menaikkan nilai IDI di DIY	Berkaitan dengan turunnya Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dari 80,82 menjadi 80,67 atau turun 0,15 poin yang diakibatkan penurunan dalam aspek hak-hak politik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY akan melakukan pendekatan dan komunikasi dengan para pemangku kebijakan dalam upaya menaikkan IDI di DIY. Adapun permasalahan terkait rendahnya persentase jumlah anggota perempuan DPRD provinsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan berkomunikasi dengan partai politik dan Sekretariat DPRD DIY. Terkait permasalahan minimnya upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, Dinas Komunikasi dan Informatika DIY untuk menyampaikan informasi APBD pada kanal-kanal website pemerintah dan media sosial lainnya.	

7. TUGAS-TUGAS UMUM PEMERINTAHAN LAINNYA YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH

a. KOMISI PENANGGULANGAN AIDS DAERAH (KPAD) DIY

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Belum optimalnya pelaksanaan rekomendasi dalam LKPJ 2019 sehingga ke depan perlu penajaman kegiatan yang mampu mengatasi pertumbuhan ODHA di kalangan difabel dan orang dengan gangguan jiwa.	<p>Dikarenakan permasalahan ODHA difabel dan ODHA gangguan jiwa merupakan kasus baru, sehingga media edukasi bagi mereka masih belum tersedia, sehingga perlu adanya integrasi program yang akan disediakan bagi ODHA difabel dan ODHA gangguan jiwa termasuk salah satunya edukasi HIV.</p> <p>Langkah-langkah yang sudah dan akan dilakukan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pendalaman permasalahan dengan pendekatan pada kelompok difabel Perencanaan program dan kegiatan bersama yang terintegrasi dengan LSM disabilitas Melakukan koordinasi dengan bidang pendidikan, agar info HIV terintegrasi dalam mata pelajaran di SLB <p>Kegiatan yang belum di lakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyediakan media informasi mengenai HIV sesuai dengan disabilitasnya Pelatihan fasilitator HIV bagi perwakilan komunitas disabilitas <p>Penguatan jejaring dalam Kespro, HIV, dan kekerasan seksual bagi disabilitas</p>	<p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan informasi dan edukasi mengenai HIV dan AIDS kepada difabel dan ODGJ <p>Menekan angka difabel dan ODGJ yang terjangkau HIV dan AIDS</p>

b. PALANG MERAH INDONESIA (PMI) DIY

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	<p>Palang Merah Indonesia (PMI) sebagai penyelenggara kepalangmerahan di Indonesia, merupakan mitra strategis Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kemanusiaan. PMI menjadi instrumen penting bukan saja hanya dalam kegiatan kemanusiaan pada saat darurat bencana dan musibah, namun PMI juga menjalankan kerja kemanusiaan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Terlebih pada saat pandemi COVID-19 ini, PMI memiliki kesempatan lebih untuk memberikan edukasi dan pendampingan psiko-sosial maupun pelayanan donor darah konvalesen serta kegiatan donor darah pada umumnya. Kebutuhan darah masyarakat yang setiap harinya, seringkali mengalami kendala oleh karena keterbatasan jaminan biaya dari BPJS Kesehatan. Sehingga kebutuhan darah yang besar, seringkali harus menjadi tanggungan pribadi pasien.</p> <p>a. Menjadikan PMI sebagai lokomotif dalam pendidikan kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat melalui program kerja sama antara OPD dengan PMI.</p> <p>b. Penyelenggaraan kepalangmerahan yang dilaksanakan oleh PMI DIY maupun PMI Cabang perlu untuk terus mendapatkan penguatan secara kelembagaan maupun bantuan pendanaan untuk operasi kemanusiaan. Hal ini sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan yang mengharuskan terbangunnya organisasi PMI yang kokoh dan inovatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan kedaruratan dan pelayanan kebutuhan darah masyarakat.</p> <p>c. Perlunya dipikirkan kebijakan Pemerintah DIY untuk memberikan dukungan pembiayaan dalam pemenuhan kebutuhan darah masyarakat. Sehingga dapat dikembangkan program darah gratis bagi warga masyarakat DIY yang membutuhkan. Program ini terintegrasi seluruh wilayah DIY tanpa kecuali.</p>	<p>Dinas Kesehatan DIY sangat mengapresiasi keberadaan PMI sebagai salah satu organisasi masyarakat yang banyak bergerak di bidang kesehatan. Beberapa hal yang telah dilakukan Dinas Kesehatan DIY kaitannya dengan kegiatan PMI adalah :</p> <p>a. Selalu menggandeng PMI dalam koordinasi pelaksanaan pelayanan darah di DIY</p> <p>b. Melakukan pembinaan UDD PMI melalui kegiatan visitasi perizinan UDD</p> <p>c. Melakukan koordinasi dengan PMI untuk meningkatkan pelayanan darah di DIY</p> <p>d. Melakukan koordinasi dengan PMI untuk pemenuhan kebutuhan SDM pada acara-acara tertentu yang membutuhkan layanan kesiapsiagaan gawat darurat</p> <p>Menganggarkan dana hibah PMI sebesar Rp 500.000.000,00 di tahun 2021</p>	<p>Tujuan :</p> <p>a. Kebutuhan darah masyarakat yang sering kali mengalami kendala karena keterbatasan jaminan biaya dapat teratasi</p> <p>b. Meningkatnya pelayanan darah oleh PMI di DIY</p> <p>PMI dapat selalu membantu dalam layanan kesiapsiagaan gawat darurat</p>

c. TIM PENGGERAK PEMBINA KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP PKK)

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	<p>Pemerintah Daerah melalui Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat perlu untuk mengoptimalkan kegiatan PKK dalam isu-isu pembangunan yang membutuhkan kerja keras semua pihak secara bersamaan, khususnya berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.</p>	<p>Peran Tim Penggerak PKK DIY dalam memberikan kontribusi terhadap penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah melaksanakan 10 Program Pokok PKK (yang terdiri dari : Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Gotong Royong, Pendidikan dan ketrampilan, Pangan, Sandang, Tata laksana Perumahan, Kesehatan, Pengembangan berkoperasi, Kelestarian lingkungan, Perencanaan sehat) dengan berbagai kegiatan yang ada Tim Penggerak PKK akan memberikan dukungan pada peningkatan ketahanan mental masyarakat, peningkatan ketahanan ekonomi, peningkatan ketahanan pangan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, yang semuanya didukung dengan tertib administrasi PKK.</p> <p>Pada tahun 2021 dilaksanakan : Kegiatan Penguatan kesehatan mental spiritual dalam kerahanan keluarga</p>	<p>Pengurangan angka kemiskinan dengan peningkatan kesejahteraan keluarga melalui 10 program pokok PKK.</p>

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<p>Tujuan : edukasi masyarakat dalam menanggulangi berbagai kasus prostitusi anak, KDRT, bunuh diri (terutama di kabupaten Gunungkidul). Sasaran : masyarakat luas sebanyak 100 orang (5 angkatan)</p> <p>Bimbingan usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K PKK). Tujuan : memberikan bimbingan dalam pengembangan potensi bahan baku, pengolahan/ produksi, pengemasan dan pemasaran, melalui pemberian bantuan modal usaha kepada kelompok terpilih (UP2K-PKK). Sasaran : 25 kelompok UP2K-PKK.</p> <p>Bimbingan pemanfaatan pekarangan (HATINYA = Halaman Asri Teratur Indah dan Nyaman) PKK. Tujuan : Bimbingan ketahanan pangan kepada keluarga dengan mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan untuk menanam sayuran, buah2an, peternakan dan perikanan. Sasaran : pemberian bantuan berupa : <ul style="list-style-type: none"> - Pemberian ember dan bibit ikan sebanyak 150 KK. - Pemberian bibit tanaman (cabe, tomat, terong, sawi, bayam, kangkung, dll) sebanyak 300 KK. </p> <p>Pencegahan dan Penanganan Stunting. Tujuan : menindak lanjuti Pergub 92/2020 tentang RAD PPS 2020-2024, dengan membuat : <ul style="list-style-type: none"> - Buku panduan dengan judul "Peran PKK dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting di DIY". - Pemberian infantometer (alat ukur tinggi badan) Sasaran : <ul style="list-style-type: none"> - Buku Panduan sebanyak 260 buah buku - 120 Infantometer pada Posyandu </p> <p>Penyebarluasan gerakan genthongisasi Tujuan : mengedukasi masyarakat untuk membiasakan cuci tangan (taat protokol kesehatan) dengan memberikan bantuan genthong. Sasaran : 250 buah genthong untuk 250 KK.</p> <p>Pembangunan ketahanan keluarga di Desa Mandiri Budaya. Tujuan : mengedukasi masyarakat terhadap 5 dimensi ketahanan keluarga (1. Landasan legalitas, keutuhan keluarga dan kemitraan gender, 2. Ketahanan fisik. 3. Ketahanan ekonomi 4. Ketahanan sosial psikologi. 5.ketahanan sosial budaya.) dengan membuat buku panduan judul "Peran PKK dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di Desa Mandiri Budaya". Sasaran : sebanyak 260 buah buku.</p>	

d. KOMISI INFORMASI DIY

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Pemerintah Daerah perlu untuk terus mengoptimalkan peran dan kiprah Komisi Informasi DIY guna menjamin 101 terpenuhinya hak-hak warga masyarakat terhadap kemudahan akses dalam memperoleh informasi.	<p>Komisi Informasi Daerah DIY, sebagai lembaga yang bertugas mengawal UU 14 Tahun 2008 melakukan kegiatan – kegiatan yang menjamin terpenuhinya hak – hak masyarakat/Publik akan informasi dan mendorong badan publik untuk melaksanakan kewajiban menyediakan, memberi dan menerbitkan informasi publik (pasal 7).</p> <p>Kegiatan – kegiatan yang akan dilakukan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penyelesaian sengketa informasi dengan mediasi dan adjudikasi nonlitigasi dengan target 6 sengketa selesai; 2. Menyusun sistem informasi penyelesaian sengketa informasi dengan e-PSI; 3. Penguatan kelembagaan di tingkat provinsi, dan kab/kota dengan bimbingan teknis bagi PPID dan mengoptimalkan forum – forum PPID; 4. Penguatan kelembagaan dengan peningkatan kapasitas PPID di tingkat Kapanewon /kemantren; 5. Penguatan kelembagaan di tingkat Kalurahan / Desa dan Kelurahan dengan mendorong terbentuknya PPID desa/kalurahan dan Peraturan Kalurahan (Perkal) tentang standard layanan informasi (SLIP) desa/kalurahan; 6. Penguatan kelembagaan dengan melakukan Perjanjian Kerja sama dengan mitra, seperti KPU DIY, Bawaslu DIY, UNISA Yogyakarta, BPSDMP Yogyakarta, LOD DIY dan KOTAKU Jogja pada tahun 2020; 7. Melakukan sosialisasi keterbukaan informasi ditingkat basis (Desa/Kalurahan) sebanyak 6 kali; 8. Melakukan sosialisasi keterbukaan informasi di sekolah; 9. Sosialisasi lewat berbagai media, misal Radio, TV, Koran/media cetak, buletin, dan Media sosial; 10. Melakukan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi terhadap badan publik di DIY; 11. Membuat sistem informasi monev badan publik dengan e monev; 12. Bekerjasama dengan Komisi Informasi Pusat melakukan pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di DIY; 13. Sebagai langkah awal untuk memastikan pelaksanaan UU KIP di desa,tahun 2021 bekerjasama dengan KI Pusat membagdakan kegiatan Pemberian Apresiasi Desa dan akan dilakukan setiap tahun. 	<p>Dari beberapa kegiatan yang direncanakan tersebut, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelesaian sengketa Informasi Publik sejumlah 7 sengketa; - Bekerjasama dengan Pemerintah daerah Kabupaten melakukan sosialisasi Slip Desa; - Melakukan edukasi keterbukaan Informasi kepada masyarakat terkait informasi pandemic COVID-19; - Melakukan advokasi pada badan publik untuk memberikan informasi berkaitan dengan penanganan COVID-19; - Menjalin kerja sama dengan lembaga strategis untuk penguatan keterbukaan informasi publik di DIY; - Melakukan Monitoring dan evaluasi badan publik di DIY; - Menyusun database peringkat kepatuhan badan publik dalam menjalankan UU KIP.

e. TRANS JOGJA

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Perlunya edukasi ke masyarakat pentingnya naik transportasi umum (gerakan masyarakat cinta bus).	Pada tahun anggaran 2022 telah diprogramkan sosialisasi dan edukasi kepada anak sekolah dan masyarakat	Untuk menumbuhkan minat anak sekolah dan masyarakat menggunakan angkutan umum di wilayah DIY

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
			Untuk menurunkan tingkat kecelakaan pada anak sekolah dan masyarakat
2	Mengembangkan route yang mengintegrasikan antar jalur menuju fasilitas pendidikan (sekolah), rumah sakit, pasar dan fasilitas publik lainnya guna memudahkan akses yang efektif (waktu) dan efisien (biaya).	Telah dilakukan evaluasi rute pada tahun 2021 dalam proses perubahan peraturan gubernur tentang rute transjogja	untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses angkutan umum
3	Adanya regulasi terkait siswa sekolah yang belum berusia 17 tahun untuk mengendarai kendaraan bermotor sendiri dan wajib menggunakan layanan transportasi umum	Melakukan Sosialisasi dan edukasi untuk para pelajar dari tingkat SD - SMA oleh dinas Perhubungan DIY bekerja sama dengan pihak kepolisian dan Dinas Pendidikan setiap tahun	Untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas dan menumbuhkan etika berlalu lintas serta menurunkan angka kecelakaan lalu lintas di DIY dengan rentang umur dibawah 17 tahun

f. LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH (LOD) DIY

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Mendorong LOD melakukan pengawasan terhadap kinerja pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah, khususnya terkait dengan pelayanan dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi.	<p>Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY) tetap fokus terhadap komitmen menjadi lembaga pengawasan yang mumpuni dan kekinian. Pemaknaan mumpuni adalah dalam melaksanakan tugas serta kewenangan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memahami apa yang harus dilakukan dan kejernihan hati serta pemikiran sehingga dapat terhindar dari konflik kepentingan. Sedangkan pemaknaan kekinian adalah mengaplikasikan perkembangan teknologi digital guna mendukung kelancaran dalam melaksanakan tugas, dengan tetap memperhatikan validasi informasi yang diterima. Komitmen yang diharapkan dibangun diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membangun jejaring koordinasi serta sinergitas dengan berbagai pihak dinilai penting guna menunjang kinerja LO DIY dalam melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan. Seluruh kegiatan penanganan yang dilakukan oleh LO DIY diharapkan tidak hanya menyelesaikan kasus per kasus saja melainkan mampu memberikan kontribusi pada perbaikan pelayanan publik yang ada baik di DIY; - Perlunya up-grading kompetensi ASN melalui program-program <i>capacity building</i> sehingga akan mendorong munculnya inovasi-inovasi dalam sektor pelayanan publik; - Pentingnya memperhatikan pelayanan publik terhadap kelompok rentan, yaitu penyandang disabilitas, lansia, perempuan dan anak-anak. Mereka ini juga warga negara yang mempunyai kedudukan dan perlindungan hukum yang sama. Konsep ramah disabilitas jangan hanya sekedar lip service atau sekedar menggugurkan kewajiban; 	<p>A. Pendidikan.</p> <p>Metode daring dengan menggunakan aplikasi inter koneksi dinilai menjadi cara yang aman dan nyaman guna melaksanakan aktivitas KBM dan Perkuliahan. Walaupun ada keluhan aspek tata nilai dan karakter pendidikan yang terkendala karena tidak ada otoritas langsung antara Guru/Dosen dengan Peserta Didik/Mahasiswa. Kondisi ini bisa dimaklumi dan perlu dicari model pembelajaran berbasis karakter dengan menggunakan media daring. Metode daring ini sudah berjalan dengan baik sebagai alternatif metode pembelajaran dalam masa pandemi. Justru ada tantangan bahwa karena dampak dari pandemi mengakibatkan relasi sosial menjadi berkurang maka di DIY perlu ada peningkatan mutu pembelajaran khususnya untuk Perguruan Tinggi sehingga DIY tetap menjadi pilihan pendidikan karena kualitas dan pembiayaan yang kompetitif. Sehingga calon mahasiswa tidak perlu secara terus menerus bertempat tinggal di DIY namun tetap bisa menjadi mahasiswa di perguruan tinggi yang berada di DIY;</p> <p>LO DIY beserta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY dan OPD serta kelembagaan terkait telah membangun sinergitas guna memberikan dukungan bagi adaptasi sistem pembelajaran pada masa pandemi. Termasuk LO DIY beserta Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Daerah Istimewa Yogyakarta pernah melaksanakan diskusi yang melibatkan banyak kalangan baik pemangku kebijakan</p>

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<ul style="list-style-type: none"> - Transformasi digital di sektor layanan publik adalah keniscayaan, hal ini harus dibarengi dengan literasi internet dan juga kesiapan sarana prasarananya sambil juga mempertimbangkan keamanan data; - Mendorong organisasi perangkat daerah untuk meningkatkan transparansi informasi publik <p>Menindaklanjuti komitmen tersebut, bidang pelayanan dasar yang menjadi perhatian khusus dari LO DIY, diantaranya:</p> <p>A. Pendidikan.</p> <p>Program pembelajaran dan sistem perkuliahan yang dilaksanakan dengan metode <i>daring</i> dijadikan program alternatif pembelajaran dan perkuliahan dalam masa tanggap darurat, sehingga pemerintah daerah beserta OPD terkait perlu untuk melakukan penilaian guna mengambil keputusan terkait dengan waktu pelaksanaannya;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Satuan Pendidikan dan Perguruan Tinggi untuk memastikan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) serta Perkuliahan di tempat tinggal masing-masing dapat terlaksana dengan baik dan tidak menimbulkan beban pengeluaran yang berlebihan bagi masing-masing peserta didik serta kalangan mahasiswa; - Satuan Pendidikan dan Perguruan Tinggi membangun komunikasi dengan Orang Tua wali siswa sebagai bentuk tanggungjawab moral serta membuat program pemantauan kegiatan belajar di tempat tinggal masing-masing; - Bagi Setiap Satuan Pendidikan dan Perguruan Tinggi yang belum membuat tata kelola Protokol Kesehatan tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) agar membuat sebagai program yang berkelanjutan dan sifatnya wajib dilaksanakan; - Mengusulkan kepada pemerintah daerah beserta jajaran terkait untuk membuat program khusus guna memantau aktivitas sosial bagi peserta didik dan mahasiswa supaya tetap menjaga PHBS, melaksanakan jaga jarak sosial (<i>social distancing</i>) dan membatasi aktivitas sosial. Hal ini dapat diakses oleh orang tua wali siswa dan wali mahasiswa guna menciptakan kepercayaan dan rasa aman sehingga tidak kehilangan kepercayaan dengan kualitas pendidikan di DIY; - Membangun koordinasi teknis lintas kewenangan. Melaksanakan koordinasi teknis dan membangun komunikasi yang baik dengan jajaran dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul, Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo, Dewan 	<p>dan pemerhati pendidikan guna menyongsong adaptasi kebiasaan baru khususnya di perguruan tinggi. Maka dalam hal ini kebijakan pemerintah yang berpihak pada eksistensi DIY sebagai Kota Pendidikan sangatlah penting dan menentukan. Termasuk peran serta dari masyarakat luas guna mendukung kebijakan tersebut dengan kearifan lokal yang baik dan bertanggungjawab menjadi energi yang akan membawa kemajuan.</p> <p>B. Kesehatan.</p> <p>LO DIY memberikan edukasi tentang Protokol Kesehatan, <i>Social Distancing</i>, <i>Physical Distancing</i> dan 4M kepada masyarakat melalui program kerja yang dilaksanakan. Pada Tahun 2020 LO DIY melakukan penataan ulang dalam orientasi program kerja yang memasukkan unsur edukasi Pandemi COVID-19 kedalam materi utama yang disampaikan. Sekaligus LO DIY aktif melakukan sosialisasi hal-ikhwal tentang Pandemi COVID-19 di media sosial yang dimiliki oleh LO DIY;</p> <p>LO DIY melakukan pendampingan kepada pasien di sebuah rumah sakit umum yang kebetulan mengalami permasalahan perbedaan pendapat terkait pembiayaan layanan medis bagi pasien yang diduga <i>suspect</i> COVID-19.</p> <p>C. Pemberdayaan Ekonomi.</p> <p>Mendorong adanya ide, inovasi dan strategi pasar dalam menghadapi kondisi krisis akibat Pandemi COVID-19 sehingga sektor UMKM dan Pelaku Usaha tetap mampu bertahan dan berkelanjutan. Dalam hal ini perlu ada gotong royong antara Pemerintah Daerah melalui OPD terkait bersama asosiasi pengusaha serta komunitas pelaku usaha untuk <i>saiyek saeko kapti</i> keluar dari bayang-bayang krisis ekonomi;</p> <p>Memastikan Pemerintah Daerah memberikan edukasi melalui media digital dan papan iklan layanan masyarakat di beberapa titik wilayah atas 2 (dua) hal yaitu : 1). PHBS dan jaga jarak sosial (<i>social distancing</i>) dan 2). Komitmen pemerintah dalam menghadapi Pandemi COVID-19 terkait aspek ekonomi sosial kemasyarakatan.</p>

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<p>Pendidikan DIY, Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta, Dewan Pendidikan Kabupaten Bantul, Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman, Dewan Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, Dewan Pendidikan Kabupaten Kulon Progo, Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas DIY, Lembaga Swadaya Masyarakat yang konsentrasi pada issue Pendidikan, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY, Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama DIY, media massa online, radio, surat kabar dengan tema utama menjaga kualitas pendidikan di DIY seiring dengan situasi Pandemi COVID-19;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Di Tahun 2020 terjadi perubahan model pembelajaran yang sangat teknis yang dilaksanakan baik di tingkat SMK, SMA, MA, SMP, MTS, SD, MI, TK, PAUD termasuk di Perguruan Tinggi yaitu dengan sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Faktanya kurikulum dan akademik belum siap menghadapi model PJJ tersebut. Muncul permasalahan dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada level tertentu secara tematik, artinya 8 SNP tersebut tidak semua bermasalah namun ada beberapa bagian yang mengalami permasalahan sebagai dampak logis adanya Pandemi COVID-19. Mencermati pelaksanaan kurikulum darurat/khusus disetiap satuan pendidikan dan memastikan PJJ tetap terlaksana dengan optimal. Termasuk melakukan inventarisasi permasalahan yang secara mendasar menjadi penghambat pelaksanaan PJJ; - Pendanaan pendidikan. Menindaklanjuti keluhan dari orang tua wali peserta didik sekaligus dari pihak sekolah mengenai pendanaan pendidikan. Bahwa ada sebagian dari orang tua wali yang menilai bahwa karena sistem pembelajaran dengan PJJ maka berakibat permohonan untuk melakukan perhitungan ulang komponen pendanaan. Bahkan ada sekolah swasta yang mengalami masalah liquiditas anggaran karena pendanaan pendidikan pendidikan yang bersumber dari orang tua wali peserta didik mengalami keterlambahan bahkan tidak ada realisasi pembayaran sesuai ketentuan. <p>B. Kesehatan.</p> <p>Dinas Kesehatan DIY perlu menyusun aturan tata kelola mengenai paket informasi prosedur layanan tes COVID-19 dan layanan kesehatan terhadap Orang Dalam Pengawasan, Pasien Dalam Pengawasan dan Pasien Positif COVID-19;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyampaikan usulan kepada rumah sakit agar membuat protokol layanan medis guna pencegahan penularan COVID-19 khususnya untuk masyarakat umum yang datang berobat ke rumah sakit. Melakukan 	

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<p>perbedaan layanan medis, sarana medis dan petugas medis bagi masyarakat umum dan pasien terindikasi COVID-19;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kesehatan DIY perlu memberikan jaminan ketersediaan alat kesehatan khususnya masker, cairan/bahan disinfektan dan <i>hand sanitizer</i> untuk masyarakat DIY. Hal ini menyangkut aspek regulasi dan skala prioritas dalam masa Pandemi COVID-19; - Mengusulkan adanya jaminan perlindungan pelayanan kesehatan yang memadai bagi kelompok rentan (difabel, ibu hamil dan manula); - Mengusulkan sentralisasi terhadap rumah sakit yang khusus menangani Pasien COVID-19, sehingga suplai alat kesehatan (alkes), APD, Tenaga Medis, sterilisasi kawasan, dukungan logistik, informasi dan regulasi bisa lebih terfokus; <p>C. Pemberdayaan Ekonomi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengusulkan adanya paket kebijakan terhadap sektor usaha mikro terkait jaminan hidup, jaminan kewajiban perbankan dan bantuan permodalan; - Memastikan Pasar Tradisional tetap beroperasi; - Memastikan kegiatan distribusi dan suplai bahan kebutuhan pokok tetap terjamin ketersediaannya; - Memastikan adanya sterilisasi lingkungan pasar tradisional secara berkala dan menyediakan fasilitas sanitasi dan sterilisasi di setiap Pasar Tradisional; - Memastikan adanya program penataan lingkungan pasar tradisional terutama jalur lalu lintas orang serta menentukan pintu masuk dan pintu keluar demi keselamatan bersama; - Memastikan pasar tradisional sebagai obyek vital daerah sehingga ada standar pengamanan dari Polri dan/atau TNI; - Memastikan kualitas pemahaman kepada seluruh pedagang, pengunjung dan pengelola pasar tradisional terkait Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); - Memastikan kestabilan harga bahan kebutuhan pokok dan melakukan operasi pasar bila diperlukan; - Memastikan tidak adanya <i>Panic Buying</i> / membeli kebutuhan pokok melebihi batas kewajaran. 	

g. KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI)

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Persiapan atlet DIY melalui pelaksanaan Puslatda perlu untuk terus dioptimalkan dengan penyelenggaraan latihan dan ujicoba yang terukur. DPRD mendorong kepada KONI DIY untuk mampu memanfaatkan waktu persiapan sebaik mungkin, disaat daerah lain mengalami kesulitan yang sama karena wabah pandemi COVID-19. Dengan kata lain, penyelenggaraan Puslatda PON XX Papua, dimanfaatkan sekaligus untuk mencari pola umum pembinaan olahraga prestasi di DIY yang lebih cemerlang pada masa depan.	<p>Dalam rangka PON XX di Papua bulan Oktober 2021, KONI DIY telah melakukan persiapan sejak tahun 2020. Pada bulan Januari s.d. Maret 2020, Puslatda telah dilakukan secara intensif. Dengan adanya pandemi COVID-19, pola pelatihan kemudian diubah menjadi pelatihan mandiri selama bulan April s.d. Desember 2020. Untuk dapat melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelatihan mandiri atlet, KONI DIY melaksanakan bimbingan teknis bagi para pelatih guna merumuskan sistem evaluasi latihan mandiri dan mengukur kemajuan atlet.</p> <p>Mulai bulan Januari 2021, KONI DIY kembali menerapkan periodisasi khusus untuk persiapan PON XX, yaitu tahap persiapan pada bulan Januari s.d. April 2021, tahap prakompetisi bulan April s.d. Agustus 2021, tahap evaluasi pada bulan Agustus s.d. September 2021, dan tahap kompetisi di bulan Oktober 2021.</p> <p>Pada tahap persiapan di awal tahun 2021, pelatihan kembali dilakukan secara intensif dengan protokol kesehatan yang ketat. Selain mengharuskan seluruh personil yang terlibat untuk melakukan tes swab secara berkala, pelatihan juga dilaksanakan secara tertutup dengan hanya dihadiri oleh atlet dan pelatih guna menghindari kontak fisik dengan banyak orang. Utamanya pada cabang olahraga beregu seperti voli pasir dan polo air, KONI DIY menetapkan penjagaan protokol kesehatan yang lebih ketat karena kontak fisik lebih banyak terjadi saat latihan berlangsung. Untuk memastikan penyelenggaraan latihan berjalan sesuai dengan protokol kesehatan dan memberikan hasil semaksimal mungkin, KONI DIY membentuk Tim Satgas yang beranggotakan 8 orang untuk melakukan pemantauan dan evaluasi rutin di setiap cabang olahraga yang turut serta dalam Puslatda.</p> <p>Di tahap prakompetisi yang dimulai di bulan April 2021, Pengda mulai melakukan ujicoba atau latihan tanding dengan atlet dari provinsi lain. Ujicoba ini dilakukan secara mandiri oleh masing-masing Pengda dengan jadwal yang sudah ditentukan dan dilaksanakan baik di dalam maupun luar DIY.</p>	Sampai dengan bulan Mei 2021 KONI DIY telah menyelenggarakan Puslatda sebagai persiapan pengiriman kontingen di ajang PON XX Oktober 2021 mendatang. Selain pelatihan rutin, ujicoba juga telah dilakukan beberapa Pengda baik dengan mengirimkan atlet ke luar daerah maupun sebagai tuan rumah ujicoba dengan menerima kontingen dari provinsi lain untuk melakukan latihan tanding. Pengiriman atlet untuk ujicoba ke luar daerah telah dilakukan pada cabang olahraga panahan, balap motor, aeromodeling, dan menembak. Sedangkan pada cabang olahraga pencak silat, DIY sebagai tuan rumah telah melakukan ujicoba dengan kontingen dari DKI Jakarta dan Jawa Barat.

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<p>Sesuai rencana, evaluasi akan dilakukan pada bulan Agustus s.d. September untuk meninjau kembali kesiapan para atlet mengikuti PON XX. Diharapkan dari hasil evaluasi, perbaikan dapat dilakukan sehingga para atlet DIY meraih prestasi yang maksimal pada PON XX.</p> <p>KONI DIY berharap periodisasi yang diterapkan untuk menghadapi PON XX melalui Puslatda 2021 ini dapat menjadi awal pembentukan pola pembinaan olahraga prestasi di DIY, mengingat dalam menghadapi kompetisi dibutuhkan persiapan jangka panjang dari atlet maupun pelatih pembina.</p>	

h. KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DIY

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	KPUD harus terus memperbaharui DPT secara berkala, karena selalu bermasalah setiap pelaksanaan Pemilu. Karena setiap momen pemilihan pasti terjadi peningkatan DPT dari pemilih pemula	Penguatan koordinasi dan komunikasi dengan penyelenggara Pemilu, dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah DIY dan Badan Pengawas Pemilihan Umum DIY. Permasalahan terkait updating data DPT dan penguatan komunikasi dengan partai politik akan disampaikan dan menjadi tema dalam rapat-rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY.	Perlunya penguatan koordinasi antara Pemerintah Daerah DIY dengan penyelenggara Pemilihan Umum khususnya dalam menghadapi permasalahan updating data DPT pemilu dan urgensi pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan tentang penyelenggara pemilu, khususnya untuk pemilih pemula.
2	KPUD harus selalu menjalin komunikasi dan koordinasi secara berkala dengan partai politik. Tidak hanya dilakukan saat menjelang atau pasca Pemilu	Pelibatan KPU DIY dalam kegiatan sosialisasi kepemiluan yang ditujukan kepada berbagai elemen dalam masyarakat, khususnya pada generasi muda (pelajar/ mahasiswa) sebagai pemilih pemula yang perlu dikuatkan kapasitasnya dalam menghadapi perhelatan Pemilihan Umum.	
3	Sosialisasi dan pelatihan tentang penyelenggara pemilu, khususnya untuk pemilih pemula		

i. BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) DIY

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Untuk mengurangi pelanggaran disetiap agenda pemilu hendaknya Bawaslu bersama KPU turut memberikan pendidikan politik, khususnya bagi warga DIY terutama terkait bidang pengawasan.	Pelibatan Bawaslu DIY dalam kegiatan sosialisasi kepemiluan yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY sebagai narasumber untuk memberikan paparan terkait pelibatan masyarakat khususnya pemilih pemula dalam upaya pengawasan pemilihan umum.	Upaya minimalisasi kasus pelanggaran pemilu, khususnya pelanggaran pidana pemilu dan permasalahan lain seperti kertas suara rusak, pelanggaran APK, netralitas ASN dan lain sebagainya.
2	Memberikan edukasi dan pelatihan di bidang pengawasan kepada pemilih pemula		

j. PENANGANAN COVID-19

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Berkenaan dengan kenaikan kasus positif, telah dilaksanakan pembatasan aktivitas/kegiatan sampai dengan skala mikro, penegakan hukum dan protokol Kesehatan, sosialisasi kepada masyarakat, pelibatan intensif stakeholder untuk terlibat dan intensifikasi koordinasi Gugus Tugas Provinsi dan Gugus Tugas Kab/Kota untuk mencegah kolapsnya sistem Kesehatan di DIY serta penguatan bagi Gugus Tugas Penanganan COVID-19 ditingkat Kampung/dusun/RW untuk mendukung PPKM Mikro.	1. Dalam rangka untuk mengoptimalkan Perda Ketahanan Keluarga di semua pemangku kepentingan dilakukan sosialisasi fungsi keluarga secara masif dan terus menerus. Sasaran sosialisasi ini juga semua lapisan masyarakat dan lembaga terkait. Pada tahun 2021 direncanakan melakukan sosialisasi fungsi keluarga sebanyak 40 kali.	Masalah utama yang harus di selesaikan adalah penyadaran dan pemahaman masyarakat terkait dengan ketahanan keluarga. setelah memahami di laksanakan dan diterapkan dalam kehidupan sehari hari
2	Optimalisasi pelaksanaan Perda 7/2018 tentang Pembangunan ketahanan keluarga dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait	2. Pada Tahun 2021 telah dirancang untk penyusunan Pergub Pelaksanaan Perda No 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga. Pergub ini mencakup amanat yang di cantumkan dalam perda tersebut. Pada Tahun 2018 telah di susun juga Pergub tentang Revitalisasi Fungsi keluarga	
3	Percepatan pembuatan dan pelaksanaan Pergub atas mandat Perda 7/2018 tentang Pembangunan Ketahanan keluarga, yaitu Pergub tentang Fungsi keluarga Pergub tentang Indeks ketahanan Keluarga Pergub tentang Rencana strategis Pembangunan Keluarga Pergub tentang Konselor Ketahanan Keluarga Pergub tentang Forum Koordinasi Ketahanan Keluarga		
4	Memperbanyak Test Swab bagi masyarakat terutama di sentra-sentra potensi kerumunan masyarakat		

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN TUGAS PEMBANTUAN

1. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY sebagai pelaksana Tugas Pembantuan dari Kementerian Pertanian pada tahun anggaran 2021 memiliki 5 (lima) Satuan Kerja (Satker) yang terdiri dari:

Tabel 4.1. Rekapitulasi Satker Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Penerima DIPA Tugas Pembantuan Tahun 2021

No	Kementerian/ Lembaga	No. DIPA	Satuan Kerja	Pagu Anggaran
1	Kementerian Pertanian	SP DIPA- 018.03.4.049087/2021	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	17.874.612.000
2	Kementerian Pertanian	SP DIPA- 018.04.4.049088/2021	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	6.032.994.000
3	Kementerian Pertanian	SP DIPA- 018.05.4.049089/2021	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. D.I. Yogyakarta	1.730.136.000
4	Kementerian Pertanian	SP DIPA- 018.06.4.049090/2021	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	8.125.557.000
5	Kementerian Pertanian	SP DIPA- 018.08.4.049094/2021	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	17.280.387.000

Sumber : DPKP DIY, 2022

Adapun rincian pelaksanaan pada masing-masing satuan kerja adalah sebagai berikut.

a. Satker Tanaman Pangan (049087)

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	1.349.170.000	1.326.083.000	98,29	100

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)
Kegiatan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	1.349.170.000	1.326.083.800	98,29	100
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	14.871.783.000	14.537.784.598	91,60	100
Kegiatan Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tanaman Pangan	11.166.497.000	9.984.966.360	89,42	100
Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Tanaman Pangan	1.536.950.000	1.529.150.388	99,49	100
Kegiatan Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan	3.168.336.000	3.023.667.850	94,43	100
Program Dukungan Manajemen	653.659.000	629.167.731	96,25	100
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	653.659.000	629.167.731	96,25	100

Sumber: DPKP DIY, 2022

b. Satker Hortikultura (049088)

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	775.750.000	723.909.860	93,32	100
Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	775.750.000	723.909.860	93,32	100
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	5.077.244.000	4.777.704.330	94,10	100
Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	1.325.000.000	1.220.272.150	92,10	100
Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Hortikultura	3.752.244.000	3.557.432.180	94,81	100
Program Dukungan Manajemen	180.000.000	179.462.000	99,70	100
Kegiatan Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	180.000.000	179.462.000	99,70	100

Sumber: DPKP DIY, 2022

c. Satker Perkebunan (049089)

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	1.555.606.000	1.546.499.232	99,41	100

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)
Kegiatan Penguatan Perlindungan Perkebunan	812.066.000	805.230.397	99,16	100
Kegiatan Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah	80.500.000	80.500.000	100	100
Kegiatan Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	457.700.000	452.824.168	99,59	100
Kegiatan Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan	208.340.000	207.944.667	99,81	100
Program Dukungan Manajemen	174.530.000	174.523.280	100	100
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	174.530.000	174.523.280	100	100

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2022

d. Satker Peternakan dan Kesehatan Hewan (049090)

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	495.550.000	488.323.900	98,54	100
Kegiatan Pengembangan Pengelohan dan Pemasaran Hasil Ternak	495.550.000	488.323.900	98,49	100
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	7.475.928.000	7.363.003.070	98,49	100
Kegiatan Peningkatan Produksi Pakan Ternak	74.500.000	70.147.000	94,16	100
Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	209.500.000	202.780.700	96,79	100
Kegiatan Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak	6.640.238.000	6.574.740.100	99,01	100
Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	551.690.000	515.335.270	93,41	100
Program Dukungan Manajemen	154.079.000	154.075.750	100	100
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	154.079.000	154.075.750	100	100

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2022

e. Satker Sarana dan Sarana Pertanian (049094)

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	16.477.347.000	16.170.570.000	98,14	100
Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	6.935.000.000	6.933.648.000	99,98	100
Kegiatan Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian	7.993.880.000	7.701.867.000	96,35	100
Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	110.000.000	103.950.000	94,50	100
Kegiatan Fasilitas Pupuk dan Pestisida	1.424.450.000	1.417.088.000	99,48	100
Kegiatan Fasilitas Pembiayaan Pertanian	14.017.000	14.017.000	100	100
Program Dukungan Manajemen	803.040.000	788.617.280	98,20	100
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	803.040.000	788.617.280	98,20	100

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2022

f. Permasalahan dan Solusi

1) *Pemasalahan*

- Adanya *refocusing* dan rasionalisasi anggaran saat kegiatan sudah dilaksanakan.
- Perubahan Petunjuk Teknis (Juknis) saat kegiatan sudah berlangsung menyebabkan alokasi anggaran tidak dapat terserap seluruhnya.
- Pedoman yang dikeluarkan oleh Pusat pada awalnya mensyaratkan penerima bantuan pemerintah tidak boleh yang pernah menerima bantuan pada 3 (tiga) tahun sebelumnya sehingga realisasi bantuan pemerintah sempat tertunda karena perlu dilakukan verifikasi ulang terhadap Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) yang semula sudah ditetapkan namun belum mengacu pada ketentuan tersebut.

- d) Pembangunan embung pada Kegiatan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim tidak sesuai dengan Juknis yang seharusnya volume 250 m³, anggaran yang tersedia hanya dapat digunakan untuk membangun embung dengan volume 180 m³.
- e) Kegiatan pengembangan bawang merah yang baru muncul saat DIPA Revisi kedua pada bulan April 2021 oleh Pusat untuk penyediaan benih pada awalnya dimasukkan di rekening Belanja Bahan Persediaan Barang Dalam Proses dengan harapan produksi benih untuk keperluan tersebut dapat dipenuhi oleh Balai Benih namun Balai Benih tidak dapat memproduksi benih *True Seed Shallots* (TSS) sehingga perlu dilakukan revisi ke rekening Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda yang menjadi kewenangan Pusat. Hal ini memerlukan proses yang cukup lama sehingga ketika revisi turun masa tanam bawang merah sudah lewat/terlambat (sudah memasuki musim penghujan) dan menyebabkan pertanaman terserang OPT lalat. Hal ini mengakibatkan produksi tidak sesuai dengan target.

2) *Solusi*

- a) Pelaksanaan kegiatan selanjutnya menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia dan target baru yang ditetapkan.
- b) Memberikan masukan ke Pusat untuk menyusun dan menetapkan Juknis sebelum pelaksanaan kegiatan serta tidak melakukan perubahan Juknis di tengah jalan.
- c) Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pusat sejak tahap perencanaan sehingga kriteria penerima bantuan dapat diketahui sejak awal dan penetapan CPCL menjadi tepat, sesuai dengan yang diharapkan.
- d) Melakukan konsultasi ke Pusat terkait permasalahan volume pekerjaan pembangunan embung yang tidak sesuai dengan Juknis. Pusat memberikan arahan untuk berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY agar kegiatan tetap dapat direalisasikan sesuai

kondisi yang ada di daerah, selanjutnya rekomendasi tersebut dikirimkan ke Pusat dan mendapatkan persetujuan.

- e) Lebih intensif melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat.

B. PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN TUGAS PEMBANTUAN

1. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral

Pada tahun 2021, Pemda DIY melalui Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY melaksanakan 2 tugas pembantuan di Bidang Sumber Daya Air dan Drainase sebagai Satuan Kerja Tugas Pembantuan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi serta di Bidang Bina Marga sebagai Satuan Kerja Tugas Pembantuan Preservasi Jalan Nasional.

Bidang Sumber Daya Air dan Drainase sebagai Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi merupakan kewenangan Pusat berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 14 /PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi. Terdapat dua Jaringan Irigasi di wilayah DIY yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yaitu Jaringan Irigasi Van Der Wijck (luas 5.159 ha) dan Jaringan Irigasi Kalibawang (7.152 ha) dengan total luasan lebih dari 3.000 ha.

Tugas Pembantuan pada Bidang Bina Marga tercantum pada Perjanjian Kinerja TA 2021 Dinas PUP dan ESDM DIY berupa kegiatan Preservasi pada Jalan Nasional Ruas Yogyakarta-Wonosari-Duwet. Lingkup kegiatan yang dilaksanakan meliputi kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan sepanjang 74,51 km, Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan 29,44 km, Penanganan Drainase, Trotoar dan Fasilitas Keselamatan Jalan 2,98 km, Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan 0,02 km, Preservasi Rutin Jalan 684,6 m dan Preservasi Jembatan 136,2 m. Dalam rangka mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pelaksanaan kegiatan penanganan drainase berupa pembersihan dan revitalisasi saluran melibatkan masyarakat sekitar melalui program padat karya.

a. Program Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya

Program dan kegiatan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY, dilakukan melalui Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, dan Bidang Bina Marga sebagai berikut.

1) Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, meliputi:

- a) Melaksanakan Operasi dan Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi kewenangan Pusat;
- b) Melaksanakan Penyusunan Pelaporan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi kewenangan pusat;
- c) Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi.

2) Bidang Bina Marga, meliputi:

- a) Penyelenggaraan administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan terhadap seluruh kegiatan di lingkungan OPD Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Program Penyelenggaraan Jalan (TP) Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b) Koordinasi keterpaduan terhadap kesiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi sebagai suatu kesatuan gerak dan langkah untuk mencapai sasaran pembangunan fisik dan fungsional OPD Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Program Penyelenggaraan Jalan (TP) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka Kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional.

Tabel 4.2. Tabel Pagu Anggaran Tugas Pembantuan Dinas PUPESDM DIY Tahun 2021

No	Direktorat Jenderal	Pagu Anggaran
1	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	6.028.905.000,00
2	Direktorat Jenderal Bina Marga	17.620.594.000,00
Jumlah		23.649.499.000,00

Sumber: Dinas PUPESDM, 2022

3) *Pengelolaan Sumber Daya Air*

Tugas Pembantuan Bidang Sumber daya Air bertujuan untuk mendukung Program Ketahanan Sumber Daya Air khususnya kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana. Pelaksanaan kegiatannya adalah untuk mengoperasikan, menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar dapat berfungsi dengan baik serta mempertahankan kelestariannya melalui kegiatan pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi, perawatan, perbaikan, pencegahan serta pengamanan.

Anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui Direktorat Bina OP Irigasi dan Rawa, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk kegiatan ini adalah dengan pagu awal sebesar Rp6.146.456.000,00 dan pada tanggal 23 November 2021 mengalami revisi karena adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat tentang *Refocusing* atau pemotongan anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 sehingga pagu anggaran berubah menjadi Rp6.028.905.000,- atau berkurang sebesar Rp117.551.000,00 terutama di akun rekening perjalanan dinas.

Total realisasi anggaran di Satker Dinas PUPESDM DIY pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 5.959.375.198,00 atau 98,85% yang dialokasikan pada DIPA APBN (Rupiah Murni) Satuan Kerja Dinas PUPESDM DIY Tahun Anggaran 2021.

Tabel 4.3. Capaian Pelaksanaan Program/Kegiatan Tugas Pembantuan Program Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2021

No	Program/Kegiatan/KRO/RO/Paket	Sasaran	Pagu	Realisasi		
			Total *)	Keuangan Rp. *)	%	Fisik %
	(049136) SKPD TP-OP DPUPESDM DIY		6.028 .905	5.959 .375	98,85	100
	(033.06.FC) Program Ketahanan Sumber Daya Air		5.760 .001	5.757 .803	99,96	100

No	Program/Kegiatan/KRO/RO/Paket	Sasaran	Pagu Total *)	Realisasi		
				Keuangan Rp. *)	%	Fisik %
	(5300) Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana		5.760 .001	5.757 .803	99,96	100
	(5300.CDR) OM Prasarana Jaringan Sumber Daya Air		5.760 .001	5.757 .803	99,96	100
	<i>(5300.CDR.001) Irigasi yang dioperasikan dan dipelihara</i>	<i>12.311 ha</i>	<i>5.760 .001</i>	<i>5.757 .803</i>	<i>99,96</i>	<i>100</i>
1	Operasi Rutin Jaringan Irigasi Van Der Wijck	5.159 ha	1.032 .387	1.032 .387	100	100
2	Operasi Rutin Jaringan Irigasi Kalibawang	7.152 ha	1.825 .815	1.825 .647	99,99	100
3	Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi Van Der Wijck	0,16 Km	754 .868	754 .859	100	100
4	Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi Kalibawang	0,20 Km	700 .399	699 .507	99,87	100
5	Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Van Der Wijck	45,41 Km	724 .071	724 .060	100	100
6	Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Kalibawang	125,89 Km	686 .221	685 .341	99,87	100
7	Penyusunan Pelaporan Sistem Manajemen Operasi dan Pemeliharaan Irigasi (SMOPI) Jaringan Irigasi Van Der Wijck	1 Lap	18 .120	18 .120	100	100
8	Penyusunan Pelaporan Sistem Manajemen Operasi dan Pemeliharaan Irigasi (SMOPI) Jaringan Irigasi Kalibawang	1 Lap	18 .120	17 .880	98,68	100
	033.06.WA Program Dukungan Manajemen	1 Layanan	268 .904	201 .571	74,96	100
	2421 Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air	1 Layanan	268 .904	201 .571	74,96	100
	2421.EAH Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1 Layanan	268 .904	201 .571	74,96	100
	<i>(5300.EAH.970) Layanan Dukungan Manajemen Satker</i>	<i>1 Layanan</i>	<i>268 .904</i>	<i>201 .571</i>	<i>74,96</i>	<i>100</i>
9	Administrasi Kegiatan	1 Layanan	259 .662	192 .329	74,07	100
10	Sistem Pelaporan Secara Elektronik (e-Monitoring)	28 Lap	9.242	9 .242	100	100

*(dalam ribuan)

Sumber: Dinas PUPESDM, 2022

4) Program Pengelolaan Penyelenggaraan Jalan

Tugas pembantuan penyelenggaraan jalan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan jalan yang bersifat lintas kabupaten/kota.

Tabel 4.4. Lokasi Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan di DIY Tahun 2021

No	Nomor Ruas Jalan	Nama Ruas Jalan	Lokasi				Panjang Perkerasan (km)	
1	008	Jalan Yogyakarta–Piyungan	KM	5	-	KM	13	8
				,100			,901	,880
2	009	Jalan Piyungan–Bts. Kab. Gn. Kidul	KM	13	-	KM	17	4
				,860			,860	,000
3	010	Jalan Bts. Kab. Bantul–Gading	KM	17	-	KM	29	12,79
				,550			,070	
4	011	Jalan Gading–Gledag	KM	30	-	KM	35	5,31
				,820			,720	
5	012	Jalan Gledag-Wonosari	KM	35	-	KM	44	8
				,820			,510	,640
6	013	Jalan Lingkar Selatan Wonosari	KM	36	-	KM	42	5
				,800			,570	,770
7	014	Jalan Bts. Kota Wonosari–Ngeposari	KM	39	-	KM	66	27,03
		–Pacucak–Bedoyo–Duwet		,720			,280	
8	014 11 K	Jalan Sugiyopranoto (Wonosari)	KM	39	-	KM	40	1
				,070			,510	,470
		JUMLAH						74
								,510

Sumber : Dinas PUPESDM DIY,2021

Tabel 4.5. Lokasi Kegiatan Preservasi Jembatan di DIY Tahun 2021

No	Nomor Jembatan	Nama Jembatan	Lokasi				Panjang Jembatan (m)
1	26.009.003.A	Jembatan Tambalan II A	Ruas Jalan	Piyungan–Bts	Kab.		25,70
			Gunungkidul				
2	26.010.003.0	Jembatan Irung Petruk	Ruas Jalan	Bts. Kab. Bantul - Gading			110,5
JUMLAH							136,2

Sumber : Dinas PUPESDM DIY,2021

Tabel 4.6. Lokasi Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan di DIY Tahun 2021

No	Nama Jembatan	Lokasi Ruas Jalan	Panjang (m)
1	Jembatan Ketandan	Yogyakarta–Piyungan	11,10
2	Jembatan Sekarsuli	Yogyakarta–Piyungan	46,20
3	Jembatan Kuning	Yogyakarta–Piyungan	14,15
4	Jembatan Buntung	Yogyakarta–Piyungan	16,40
5	Jembatan Panasan	Yogyakarta–Piyungan	61,40
6	Jembatan Gawe II	Piyungan-Bts. Kab Gunungkidul	31,10
7	Jembatan Gawe I	Piyungan-Bts. Kab Gunungkidul	41,20
8	Jembatan Tambalan I	Piyungan-Bts. KabGunungKidul	23,00
9	Jembatan Tambalan II B	Piyungan-Bts. KabGunungKidul	22,00
10	Jembatan Duren	Bts. KabBantul Gading	21,20
11	Jembatan PentungBaru	Bts. KabBantul–Gading	76,70
12	Jembatan Karangsari	Bts. KabBantul–Gading	6,88

No	Nama Jembatan	Lokasi Ruas Jalan	Panjang (m)
13	Jembatan Saradan	Bts. KabBantul–Gading	12,70
14	Jembatan Dadap	Bts. KabBantul–Gading	7,20
15	Jembatan Suru	Bts. KabBantul–Gading	14,00
16	Jembatan Salak	Bts. KabBantul–Gading	10,00
17	Jembatan Bunder	Bts. KabBantul–Gading	61,10
18	Jembatan BunderBaru	Bts. KabBantul–Gading	50,50
19	Jembatan Kepil	Gading–Gledag	8,50
20	Jembatan Logandeng II	Gading–Gledag	6,00
21	Jembatan Logandeng III	Gading–Gledag	11,00
22	Jembatan Kemorosari	Gledag–Wonosari	6,50
23	Jembatan Kajor	Gledag–Wonosari	7,00
24	Jembatan Grogol I	Gledag–Wonosari	7,40
25	Jembatan Mokol II	Gledag–Wonosari	10,00
26	Jembatan Pancuran	Lingkar Selatan Wonosari	40,40
27	Jembatan Jirak A	Bts. Kota Wonosari–Ngeposari–Pacucak	30,50
28	Jembatan Jirak B	Bts. Kota Wonosari–Ngeposari–Pacucak	30,80
JUMLAH			684,6

Sumber : Dinas PUPESDM DIY,2021

Tabel 4.7. Target dan Realisasi Kegiatan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Jalan di DIY TA 2021

No	Kegiatan/Paket	Pagu DIPA (Rp 000,-)	Realisasi Keuangan (Rp 000,-)	(%)	Realisasi Fisik (%)
1	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan	10.083.365	10.083.362	100,00	100
2	Rekonstruksi Pemeliharaan Rutin Jalan (PEN)	767.450	731.672	95,33	100
3	Penanganan Drainase, Trotoar dan Fasilitas Keselamatan Jalan	3.801.900	3.770.844	99,18	100
4	Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan (PEN)	153.928	153.308	99,60	100
5	Preservasi Rutin Jembatan	642.382	642.381	100,00	100
6	Preservasi Jembatan	1.368.903	1.368.901	100,00	100
7	Layanan Dukungan Manajemen Satker	802.666	786.334	97,97	100
JUMLAH		17.620.594	17.536.800	99,52	100

Sumber : Dinas PUPESDM DIY,2021

Tabel 4.8. Cakupan Perjanjian Kinerja TP Kegiatan Penyelenggaraan Jalan TA 2021

Uraian	Target				Realisasi				Tingkat Capaian (%)
	Jalan Efektif (KM)	Fungsional (KM)	Efektif Jembatan (M)	Jembatan (M)	Jalan Efektif (KM)	Fungsional (KM)	Efektif Jembatan (M)	Jembatan (M)	
Cakupan TP	-	74,51	136,2	684,6	-	74,51	136,2	684,6	100,00

Sumber : Dinas PUPESDM DIY,2021

Pada tahun 2021 dilakukan pengukuran Kinerja dengan indikator yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga. Pengukuran Kinerja merupakan suatu proses penilaian yang sistematis dan bertahap untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi dari masing-masing Instansi Pemerintah. Proses pengukuran Kinerja Satker Dinas PUP dan ESDM DIY dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator Kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam proses pengukuran Kinerja dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian Kinerja kegiatan pada masing-masing program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi.

Pengukuran Indikator Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi Kinerja dengan target yang dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja pelaksanaan APBN tahun berjalan. Pengukuran indikator kinerja di Satker Dinas PUPESDM DIY Tahun 2021 dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Tabel 4.9. Pengukuran Kinerja Satker Dinas PUPESDM DIY Tahun 2021

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target		Realisasi		%
1	Meningkatnya Pelayanan Jalan Nasional	Indikator Kinerja Output					
		Pemeliharaan Rutin Jalan	74,51	KM	74,51	KM	100
		Pemeliharaan Rutin Jalan	29,44	KM	1,0	KM	100
		Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	0,02	M	0,02	M	100
		Pemeliharaan Rutin Jembatan	684,6	M	684,6	M	100
		Preservasi Jembatan	136,2	M	136,2	KM	100
		Penanganan Drainase, Trotoar dan Fasilitas Keselamatan Jalan (PEN)	2,98	KM	2,98	KM	100
		Layanan Dukungan Manajemen Satker	1,00	Layanan	1,00	Layanan	100

Sumber : Dinas PUPESDM DIY, 2021

Satker Dinas PUPESDM DIY mendapat alokasi anggaran tugas pembantuan sebesar Rp.17.620.594.000,00. Berdasarkan laporan data SAI realisasi keuangan secara total sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.17.536.800.000,00 dengan persentase 99,52 %. Secara keseluruhan penerapan system akuntabilitas Kinerja tugas pembantuan penyelenggaraan bidang jalan pada tahun 2021 telah berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

PENYELENGGARAAN URUSAN KEISTIMEWAAN DIY

A. URUSAN KELEMBAGAAN

1. Kondisi Umum

Urusan Kelembagaan Pemda DIY merupakan Kewenangan keistimewaan dalam melaksanakan pengorganisasian yang diselenggarakan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan masyarakat yang berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli.

Dalam perspektif keistimewaan ini, kelembagaan di DIY dibentuk berdasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat, yaitu dengan cara memperkuat relasi antara provinsi dengan kabupaten/kota yang tidak hanya sekedar struktur di provinsi tetapi juga pola hubungannya dengan kabupaten/kota sehingga koordinasi dan integrasi bisa berjalan optimal, yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja pembangunan daerah. Bentuk kelembagaan DIY ini bisa menjadi keunggulan komparatif DIY dibanding daerah otonomi lain.

Agar dapat menyentuh langsung pelayanannya ke masyarakat, kemudian diberikan penugasan urusan keistimewaan DIY kepada Kabupaten/Kota sampai Kalurahan/Kelurahan yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah, kecamatan maupun desa, dengan mendasarkan Pergub DIY Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan Penugasan tersebut diantaranya dengan latar belakang sebagai berikut: a) Keistimewaan DIY didasarkan pada sejarah dan hak asal-usul DIY; b) Keistimewaan DIY sudah dan masih tetap hidup, diterima dan menjadi milik seluruh masyarakat DIY; c) Substansi keistimewaan DIY tidak hanya dalam pengisian jabatan Gubernur/Wakil Gubernur, melainkan

mencakup kelembagaan, pertanahan, tata ruang dan kebudayaan; d) Ruang lingkup penyelenggaraan dan tujuan keistimewaan DIY meliputi seluruh masyarakat DIY yang ada di Kabupaten/Kota, Kapanewon/Kemantren hingga Kalurahan/Kelurahan.

Penerapan keistimewaan di Kapanewon, Kemantren dan Kalurahan tersebut berdasarkan pada Pergub DIY Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan yang ruang lingkupnya mengatur mengenai kedudukan dan kewenangan kalurahan, penataan kalurahan, penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, musyawarah kalurahan, kerja sama kalurahan, pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, serta nilai-nilai sosial budaya masyarakat, dan pembinaan serta pengawasan kalurahan. Sosialisasi menjadi bagian penting untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen seluruh *stakeholder* dalam mengawal keistimewaan.

Pelaksanaan kewenangan keistimewaan DIY tidak lepas dari kebutuhan akan regulasi atau produk hukum yang disusun oleh kabupaten/kota di DIY. Regulasi tersebut berbentuk Peraturan maupun Keputusan. Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota meliputi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Rancangan Peraturan Bupati/Walikota, dan Rancangan Peraturan Bersama Bupati/Walikota se DIY.

Perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap rancangan produk hukum Kabupaten/Kota untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum Kabupaten/Kota dalam satu kesatuan sistem hukum nasional agar pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan standar dan kebijakan Pemerintah. Pembinaan dan pengawasan tersebut diatur dalam Pergub DIY Nomor 110 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota di DIY. Mekanisme pembinaan dan pengawasan adalah dengan melakukan proses pemberian arahan, bimbingan, supervisi dan asistensi.

Budaya Pemerintahan telah ditetapkan dalam Pergub DIY Nomor 72 Tahun 2008 tentang Budaya Pemerintahan SATRIYA di DIY. Budaya Pemerintahan SATRIYA ditetapkan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, norma hukum, serta bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Budaya Pemerintahan SATRIYA menjadi *spirit* Pemda DIY dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY dalam menjalankan fungsi regulasi, fasilitasi dan pelayanan kepada masyarakat yang dilandasi ajaran moral *sawiji, greget, sengguh ora mingkuh* dan dengan semangat *golong gilig*. Setiap tahun dilakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui intensitas penerapan budaya SATRIYA pada perangkat daerah yang dibagi ke dalam tujuh indikator, yaitu : (1) tingkat pemahaman pegawai tentang Budaya pemerintahan SATRIYA; (2) tingkat pemahaman pegawai tentang rencana aksi; (3) intensitas peran agen perubahan; (4) intensitas peran kelompok Budaya Pemerintahan SATRIYA; (5) intensitas sosialisasi/internalisasi/ pembinaan oleh pimpinan; (6) tingkat partisipasi pegawai dalam pelaksanaan rencana aksi; serta (7) intensitas upaya monitoring dan evaluasi implementasi.

2. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021

Urusan kelembagaan pemerintah daerah diampu oleh 28 OPD dari lingkungan Pemda DIY dan Pemkot/Pemkab di DIY. Pelaksanaan urusan diampu dalam 1 Program, 9 kegiatan, dan 42 sub kegiatan dengan pagu sebesar Rp33.350.957.463,00. Persentase realisasi fisik sampai dengan tahap Akhir pada urusan kelembagaan pemerintah daerah sebesar 99,73% terhadap target satu tahun. Sedangkan realisasi keuangan sampai dengan tahap Akhir 2021 sebesar Rp29.585.454.527,00 (setara 88,71% terhadap target satu tahun).

Tabel 5.1. Realisasi Keuangan Program dan Kegiatan Urusan Kelembagaan Tahun Anggaran 2021

NO	URAIAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)
			Rp	%	
	KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH	33.350.957.463	29.585.454.527	88,71	99,73
	<i>KOTA YOGYAKARTA</i>	<i>51.613.900</i>	<i>48.503.050</i>	<i>93,97</i>	<i>100,00</i>
1	Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta	51.613.900	48.503.050	93,97	100,00
	<i>KABUPATEN BANTUL</i>	<i>2.527.056.350</i>	<i>2.442.210.150</i>	<i>96,64</i>	<i>100,00</i>
1	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul	276.019.000	272.252.000	98,64	100,00
2	Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul	280.000.000	255.047.500	91,09	100,00
3	BAPPEDA Setda Kabupaten Bantul	223.320.000	222.697.000	99,72	100,00
4	BKAD Setda Kabupaten Bantul	222.874.600	202.089.100	90,67	100,00
5	BKPP Setda Kabupaten Bantul	198.364.500	188.212.800	94,88	100,00
6	Bagian Administrasi Pemerintah Desa Setda Kabupaten Bantul	957.082.000	943.215.500	98,55	100,00
7	DPPKBPM	217.349.750	206.849.750	95,17	100,00
8	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	152.046.500	151.846.500	99,87	100,00
	<i>KABUPATEN KULON PROGO</i>	<i>2.022.107.300</i>	<i>1.956.183.280</i>	<i>96,74</i>	<i>100,00</i>
1	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kulon Progo	622.940.000	598.574.000	96,09	100,00
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan KB Setda Kabupaten Kulon Progo	1.149.514.800	1.125.542.280	97,91	100,00
3	BKPP Setda Kabupaten Kulon Progo	138.565.500	134.547.500	97,10	100,00
4	Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo	111.087.000	97.519.500	87,79	100,00
	<i>KABUPATEN GUNUNGKIDUL</i>	<i>1.741.551.600</i>	<i>1.583.149.931</i>	<i>90,90</i>	<i>95,79</i>
1	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Gunungkidul	549.815.000	539.432.616	98,11	100,00
2	DP3AKBPM Setda Kabupaten Gunungkidul	691.955.600	685.590.715	99,08	100,00
3	Bagian Hukum Setda Kabupaten Gunungkidul	110.047.000	95.770.600	87,03	100,00
4	BAPPEDA Setda Kabupaten Gunungkidul	96.786.000	95.736.000	98,92	100,00
5	BKPPD (UPT Balai Diklat Pegawai) Setda Kabupaten Gunungkidul	292.948.000	166.620.000	56,88	75,00
	<i>KABUPATEN SLEMAN</i>	<i>803.212.293</i>	<i>736.398.918</i>	<i>91,68</i>	<i>100,00</i>

NO	URAIAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)
			Rp	%	
1	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sleman	206.224.000	174.317.950	84,53	100,00
2	Bagian Hukum Setda Kabupaten Sleman	62.300.000	39.430.300	63,29	100,00
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sleman	339.131.383	339.131.383	100,00	100,00
4	BKPP Kabupaten Sleman	195.556.910	183.519.285	93,84	100,00
	PEMDA DIY	26.205.416.020	22.819.009.198	87,08	99,93
1	BIRO ORGANISASI SETDA DIY	3.031.542.400	2.614.740.262	86,25	100,00
2	BIRO HUKUM	540.277.000	521.709.026	96,56	100,00
3	BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY	4.692.406.000	3.164.023.135	67,43	100,00
4	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.596.311.220	1.386.599.900	86,86	98,93
5	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	330.076.000	282.035.050	85,45	100,00
6	PANIRADYA KAISTIMEWAN	16.014.803.400	14.849.901.825	92,73	100,00

Sumber: Paniradya Kaistimewan, 2022

Kinerja urusan kelembagaan:

- Penataan kelembagaan asli DIY hingga kabupaten/kota pada 392 kalurahan/ 47 kelurahan, 14 kemantren/ 64 kapanewon, Paniradya Kaistimewan, Parampara Praja, Kundha Kabudayan, Kundha Niti Mandala, sarta Tata Sasana pada DIY/4 kabupaten/ 1 kota;
- Implementasi budaya pemerintahan SATRIYA: 4 kabupaten/ 1 kota;
- Penyebarluasan informasi keistimewaan melalui 5 media (Media Cetak, Media Online, Televisi, Radio, Media Luar Ruang). Akun *Youtube* Paniradya Kaistimewan memiliki 64,5 ribu *subscriber*, akun *Youtube Taste of Jogja* memiliki 27,6 ribu *subscriber*, akun *Youtube Humas* memiliki Jogja 16 ribu *subscriber*;
- Internalisasi Keistimewaan di DIY, 4 kabupaten/1 kota;
- Sosialisasi kelembagaan asli daerah pada 582 orang;
- Peningkatan kapasitas SDM desa pada 392 kalurahan;
- Peraturan tindak lanjut keistimewaan antara lain:
 - Pergub DIY No. 131 Tahun 2018 yang mengatur Penugasan Urusan Keistimewaan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan struktur kelembagaan, tugas dan fungsi Pemerintah

Kabupaten/Kota serta Pemerintah Desa dalam hal penyelenggaraan urusan keistimewaan.

- 2) Pergub DIY No. 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, sebagaimana telah di ubah dengan Pergub DIY No. 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Pergub DIY Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan sebagai pedoman kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan dalam melaksanakan penugasan urusan Keistimewaan dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli di DIY.
- 3) Pergub DIY Nomor 2 tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan.
- 4) Pergub DIY No. 131 Tahun 2018 yang mengatur Penugasan Urusan Keistimewaan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan struktur kelembagaan, tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten/Kota serta Pemerintah Desa dalam hal penyelenggaraan urusan keistimewaan.
- 5) Pergub DIY No. 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan sebagai pedoman kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan dalam melaksanakan penugasan urusan Keistimewaan dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli di DIY.

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Pada kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan yang diampu oleh Biro Tata Pemerintahan Setda DIY tidak terserap dengan optimal karena percepatan vaksinasi COVID-19

- 2) Kegiatan Diklat Internalisasi Keistimewaan di BANDIKLAT DIY dan BKPPD Kabupaten Gunungkidul tidak tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.

Faktor penghambat pelaksanaan Diklat Internalisasi Keistimewaan dari Bandiklat DIY:

- 1) Efisiensi belanja pakaian adat daerah karena harga di pasaran lebih rendah daripada di DPA
- 2) Adanya perpanjangan PPKM maka untuk belanja makanan dan minuman di tempat kegiatan/ aktivitas lapangan, belanja sewa bus dan akomodasi lokasi tidak dilakukan dengan kunjungan ke lokasi tetapi narasumber yang datang ke Bandiklat DIY
- 3) Perjalanan dinas narasumber pusat tidak digunakan karena untuk penyampaian materi dilaksanakan secara daring
- 4) Honorarium disesuaikan dengan SHBJ karena terkait honorarium intern hanya diberikan 50%.

Faktor penghambat pelaksanaan Diklat Internalisasi Keistimewaan dari BKPPD Kabupaten Gunungkidul adalah Diklat angkatan III tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu dan ketersediaan narasumber.

b. Solusi

- 1) Perlu menjadi catatan agar pelaksanaan kegiatan vaksinasi ke depan (jika diperlukan) dapat dilaksanakan oleh OPD yang menangani urusan kesehatan dan/atau dikoordinasikan secara terpusat oleh OPD yang menangani urusan kesehatan.
- 2) Perlu adanya persiapan yang lebih matang dalam penyusunan jadwal pelaksanaan dan peserta diklat, memaksimalkan sarana pendukung kegiatan sudah tersedia, serta koordinasi dengan pihak terkait dilaksanakan dengan baik dalam hal koordinasi pembelanjaan kebutuhan diklat, koordinasi ketersediaan narasumber diklat, koordinasi kesiapan kondisi peserta, waktu dan tempat, serta koordinasi skema pencegahan persebaran COVID-19.

B. URUSAN KEBUDAYAAN

1. Kondisi Umum

Dalam urusan keistimewaan, bidang kebudayaan adalah urusan yang paling 'vital'. Hal ini mengingat urgensi Undang Undang Keistimewaan sendiri lebih banyak diberikan penjelasan dari aspek kebudayaan dan juga alasan peran kesejarahan DIY. Dalam hal keistimewaan, kebudayaan DIY seringkali disederhanakan bahwa rohnya ada di Kasultanan Ngayogyakarta dan Kadipaten Pakualaman. Bahkan, kebudayaan harus dimasukkan dalam konteks pembangunan kesejahteraan secara menyeluruh mulai dari aktivitas ekonomi, pangan, dan penguatan praktik dari nilai-nilai filosofis.

Sebagaimana amanat Undang Undang Keistimewaan bahwa kewenangan kebudayaan merupakan kewenangan yang diselenggarakan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar di masyarakat DIY.

Penyelenggaraan kewenangan dalam urusan kebudayaan diwujudkan melalui kebijakan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan. Pelaksanaan urusan kebudayaan harus berkoordinasi dengan Kasultanan dan Kadipaten, Pemerintah Kabupaten/kota, Pemerintah Desa/kelurahan, Perguruan Tinggi dan Masyarakat. Mekanisme pengelolaan keuangan Dana Keistimewaan di Kabupaten/Kota dengan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan dan hibah bagi Kasultanan dan Kadipaten.

Salah satu upaya menyinergikan dan menyelaraskan aktivitas pembangunan di desa maka dibentuklah Desa/Kalurahan Mandiri Budaya. Desa/Kalurahan Mandiri Budaya adalah desa/kalurahan mahardika, berdaulat, berintegritas, dan inovatif dalam menghidupi dan mengaktualisasikan nilai-nilai kaistimewan melalui pendayagunaan segenap kekayaan sumber daya dan kebudayaan yang dimilikinya dengan melibatkan partisipasi aktif warga dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan kelestarian semesta ciptaan, kesejahteraan, dan ketenteraman warga dalam ke-*bhinneka-tunggal*-ikaan. Daftar Desa yang menjadi

Desa/Kalurahan Mandiri Budaya ditetapkan melalui Pergub DIY Nomor 383/KEP/2021 tentang Penetapan Desa/ Kalurahan Desa Mandiri Budaya. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Desa/Kalurahan Mandiri Budaya sendiri didanai menggunakan BKK Dana Keistimewaan dengan dasar Pergub DIY No. 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan BKK Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan dan Pergub DIY No. 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Pergub DIY No.100 Tahun 2020 ttg Pedoman Pelaksanaan BKK Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan.

2. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021

Urusan ini merupakan urusan yang dominan dari segi jumlah program/kegiatan. Urusan kebudayaan terdiri dari 1 program, 10 kegiatan, dan 51 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp755.597.150.733,00. Adapun pengampu urusan Kebudayaan sebanyak 26 OPD Pemda DIY dan 28 OPD Pemkab/Pemkot di DIY. Persentase realisasi fisik sampai dengan tahap akhir telah mencapai 98,57% terhadap target satu tahun. Sedangkan realisasi keuangan sampai dengan tahap akhir sebesar Rp705.857.660.705,84 atau sebesar 93,42%.

Tabel 5.2. Realisasi Keuangan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan Tahun Anggaran 2021

NO	URAIAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)
			Rp	%	
KEBUDAYAAN		755.597.150.733	705.857.660.705,84	93,42	98,57
KOTA YOGYAKARTA		30.128.799.295	28.237.021.176,88	93,72	100,00
1	Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta	24.543.849.295	23.143.876.127	94,30	100,00
2	Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta	2.084.950.000	2.063.881.710	98,99	100,00
3	Dinas PU Kota Yogyakarta	3.500.000.000	3.029.263.340	86,55	100,00
KABUPATEN BANTUL		43.587.131.099	41.247.327.474,54	94,63	99,95
1	Dinas Kebudayaan	40.050.650.819	37.841.608.320	94,48	99,97
2	Dinas Kesehatan	1.765.000.000	1.761.270.574	99,79	100,00
3	Dinas Pariwisata	199.326.500	194.986.500	97,82	100,00
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	469.517.000	469.501.900	100,00	100,00
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	288.636.780	286.057.941	99,11	100,00
6	Dinas Sosial dan P3A	314.000.000	299.775.750	95,47	98,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	500.000.000	394.126.490	78,83	100,00

NO	URAIAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)
			Rp	%	
	KABUPATEN KULON PROGO	39.232.907.187	37.328.340.034	95,15	99,56
1	Dinas Kebudayaan	24.259.870.758	23.138.273.522	95,38	100,00
2	Dinas Pariwisata	12.888.754.929	12.403.667.631	96,24	100,00
3	Dinas Sosial dan P3A	335.940.000	176.541.200	52,55	70,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	939.793.500	907.362.350	96,55	100,00
5	Dinas Kesehatan	111.600.000	101.543.691	90,99	95,62
6	BPBD	696.948.000	600.951.640	86,23	90,59
	KABUPATEN GUNUNGKIDUL	40.958.033.000	38.436.947.960,20	93,84	99,98
1	Dinas Kebudayaan	39.530.368.000	37.113.994.397	93,89	99,98
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	119.560.000	105.990.000	88,65	100,00
3	Dinas Pariwisata	43.450.000	34.880.000	80,28	100,00
4	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	249.200.000	248.566.480	99,75	100,00
5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	143.455.000	143.455.000	100,00	100,00
6	Dinas Kesehatan	872.000.000	790.062.083	90,60	100,00
	KABUPATEN SLEMAN	17.554.994.504	17.333.692.853	98,74	100,00
1	Dinas PUPKP	949.966.000	933.793.950	98,30	100,00
2	Dinas Kebudayaan	14.053.051.635	13.898.882.165	98,90	100,00
3	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan	252.065.000	249.417.780	98,95	100,00
4	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	298.785.000	291.084.910	97,42	100,00
5	Dinas Pariwisata	1.131.036.869	1.127.534.048	99,69	100,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	870.090.000	832.980.000	95,73	100,00
	PEMDA DIY	503.343.540.648	472.252.783.686	93,82	99,79
1	DINAS KEBUDAYAAN DIY	273.473.840.304	256.600.698.767	93,83	99,96
2	BIRO TATA PEMERINTAHAN	364.827.500	265.310.000	72,72	100,00
3	TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA	10.118.856.000	9.655.568.107	95,42	100,00
4	MUSEUM SONOBUDOYO YOGYAKARTA	26.894.622.365	24.454.355.774	90,93	99,94
5	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	11.736.159.500	10.075.691.608	85,85	96,32
6	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	18.334.401.900	17.964.384.302	97,98	100,00
7	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	15.148.691.425	14.345.234.497	94,70	100,00
8	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	2.246.300.000	2.169.880.800	96,60	95,18
9	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.231.191.000	845.760.080	68,69	100,00
10	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	20.587.823.600	20.306.572.066	98,63	100,00
11	DINAS PARIWISATA DIY	21.249.950.500	18.398.962.851	86,58	99,18
12	DINAS KESEHATAN	1.035.261.800	716.639.020	69,22	100,00
13	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN	2.971.521.000	2.749.661.234	92,53	100,00

NO	URAIAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)
			Rp	%	
	ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK				
14	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	31.989.994.441	30.927.629.324	96,68	100,00
15	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	3.385.191.063	3.365.432.209	99,42	100,00
16	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	30.452.873.500	30.220.871.467	99,24	100,00
17	DINAS SOSIAL	5.914.647.000	5.730.099.665	96,88	100,00
18	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY	534.818.250	522.700.250	97,73	100,00
19	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	3.679.767.000	3.429.348.728	93,19	100,00
20	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.211.805.000	1.641.136.941	74,20	89,33
21	BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	225.053.000	224.702.900	99,84	100,00
22	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	5.107.595.800	4.898.532.225	95,91	100,00
23	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	14.035.307.600	12.371.199.267	88,14	100,00
24	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	109.464.000	107.483.324	98,19	100,00
25	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SDA	53.710.000	53.334.000	99,30	100,00
26	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG DIY	249.867.100	211.594.280	84,68	100,00
	BKK KALURAHAN DAN BTT COVID	80.791.745.000	71.021.547.521	87,91	88,24
1	BKK KALURAHAN - DESA BALAI BUDAYA	4.635.600.000	4.567.362.256	98,53	100,00
2	BKK KALURAHAN - DESA MANDIRI BUDAYA	10.000.000.000	9.863.235.126	98,63	100,00
3	BKK KALURAHAN - ARSITEKTUR	1.500.000.000	1.500.000.000	100,00	100,00
4	BKK KALURAHAN - DESA BAHARI	3.000.000.000	2.551.154.000	85,04	85,04
5	BKK KALURAHAN-PADAT KARYA	3.035.000.000	2.974.638.375	98,01	100,00
6	BKK KALURAHAN - PAPAN PENANDA KEISTIMEWAAN	5.651.145.000	5.651.145.000	100,00	100,00
7	BKK KALURAHAN-COVID (JAGAWARGA)	22.570.000.000	20.961.644.964	92,87	92,87
8	BTT -COVID	30.400.000.000	22.952.367.800	75,50	75,50

Sumber: Paniradya Kaistimewan (2022)

a. BKK Kalurahan dan Belanja Tidak Terduga COVID-19

Dalam rangka melaksanakan amanat Pergub DIY Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan BKK Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan, yang diperbaharui dengan Pergub DIY Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Pergub DIY Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan BKK Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan, Dana Keistimewaan diberikan langsung kepada Kalurahan dengan mekanisme BKK. Pemberian BKK kepada kalurahan bertujuan untuk melaksanakan Program Strategis Gubernur didasarkan pada potensi dan kebutuhan masing-masing Kalurahan. Bentuk BKK yang disalurkan adalah sebagai berikut:

1) *BKK Kalurahan - Desa Balai Budaya*

Alokasi Dana Keistimewaan berupa pembangunan Balai Budaya kepada 3 Kalurahan yaitu 1.) Kalurahan Girikerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman; 2.) Kalurahan Panggunharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, dan 3.) Kalurahan Sendangagung, Kapanewon Minggir, Kabupaten Sleman. Pembangunan Balai Budaya masuk dalam tolok ukur kinerja sub kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya yang diampu oleh Dinas Kebudayaan DIY. Dengan Pagu sebesar Rp4.635.600.000,00, realisasi keuangan dari kegiatan pembangunan Balai Budaya ini telah mencapai Rp4.567.362.256,00 atau sebesar 98,53%. Sedangkan untuk realisasi fisik, pembangunan Balai Budaya sudah selesai dengan capaian 100%.

2) *BKK Kalurahan - Desa Mandiri Budaya*

Alokasi Dana Keistimewaan untuk Pengembangan Desa Mandiri Budaya diberikan untuk 10 Kalurahan dengan rincian Kalurahan Bejiharjo Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul, Kalurahan Putat Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul, Kalurahan Desa Sabdodadi Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul, Kalurahan Jatimulyo Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo, Kalurahan Pagerharjo Kapanewon Samigaluh Kabupaten Kulon Progo, Kalurahan Bangunkerto Kapanewon Turi Kabupaten Sleman,

Kalurahan Girikerto Kapanewon Turi Kabupaten Sleman, Kalurahan Margodadi Kapanewon Seyegan Kabupaten Sleman, Kalurahan Pandowoharjo Kapanewon Sleman Kabupaten Sleman, dan Kalurahan Wedomartani Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman. Pengembangan Desa Mandiri Budaya masuk dalam tolok ukur kinerja sub kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya yang diampu oleh Dinas Kebudayaan DIY. Dengan pagu sebesar Rp10.000.000.000,00, realisasi keuangan dari kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Budaya ini telah mencapai Rp9.863.235.126,00 atau sebesar 98,63%. Sedangkan untuk realisasi fisik, Pengembangan Desa Mandiri Budaya sudah selesai dengan capaian 100%.

3) BKK Kalurahan - Arsitektur

Alokasi Dana Keistimewaan untuk BKK desa Arsitektur Budaya Mataram Islam diberikan kepada 1 Kalurahan yaitu Kalurahan Pleret, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul. BKK desa Arsitektur Budaya Mataram Islam masuk dalam tolok ukur kinerja Sub-Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan yang diampu oleh Dinas Kebudayaan DIY. Dengan pagu sebesar Rp1.500.000.000,00, realisasi keuangan telah mencapai Rp1.500.000.000,00 atau telah terserap 100%. Sedangkan untuk realisasi fisik, sudah selesai dengan capaian 100%.

4) BKK Kalurahan - Desa Maritim

Alokasi Dana Keistimewaan untuk Desa Maritim diberikan kepada 5 kalurahan dengan rincian 1.) Kalurahan Bugel, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo dengan komoditas andalan berupa garam; 2.) Kalurahan Gading Sari, Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul dengan komoditas andalan Ikan Gurami; 3.) Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul dengan komoditas andalan berupa Ikan Laut dan Bawang Merah; 4.) Kalurahan Ngestirejo, Kapanewon Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul dengan komoditas andalan Rumput Laut; dan 5.)

Kalurahan Kemadang, Kapanewon Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul dengan komoditas andalan Garam. Desa Bahari masuk dalam tolok ukur kinerja Sub-Kegiatan Pengembangan Budaya Bahari yang diampu oleh Dinas Kelautan dan Perikanan DIY. Dengan pagu sebesar Rp3.000.000.000,00, realisasi keuangan telah mencapai Rp2.551.154.000,00 atau sebesar 85,04%. Sedangkan untuk realisasi fisik, sudah selesai dengan capaian 85,04%.

5) BKK Kalurahan - Padat Karya Penetapan Tata Nilai Semangat Ke-Yogyakarta-an

Alokasi Dana Keistimewaan untuk Kegiatan Padat Karya Penetapan Tata Nilai Semangat Ke-Yogyakartaan diberikan kepada 13 kalurahan dengan rincian:

- a) Kalurahan Banjarsari, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo;
- b) Kalurahan Banyusoco, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul;
- c) Kalurahan Gerbosari, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo;
- d) Kalurahan Girisuko, Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunungkidul;
- e) Kalurahan Jepitu, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul;
- f) Kalurahan Jerukwudel, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul;
- g) Kalurahan Kebonharjo, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo;
- h) Kalurahan Natah, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul;
- i) Kalurahan Ngargosari, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo;
- j) Kalurahan Pleret, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo;

- k) Kalurahan Ngestirejo, Kapanewon Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul;
- l) Kalurahan Kemiri, Kapanewon Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul;
- m) Kalurahan Giripeni Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo.

Padat Karya Penetapan Tata Nilai Semangat Ke-Yogyakartaan masuk dalam tolok ukur kinerja sub-Kegiatan Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya yang diampu oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY. Dengan pagu sebesar Rp3.035.000.000,00, realisasi keuangan dari kegiatan ini telah mencapai Rp2.974.638.375,00 atau sebesar 98,01%. Sedangkan untuk realisasi fisik sudah selesai dengan capaian 100%.

6) BKK Kalurahan - Papan Nama Keistimewaan

Alokasi Dana Keistimewaan untuk Papan Nama Keistimewaan diberikan kepada 90 Kalurahan dengan rincian 22 kalurahan di Kabupaten Kulon Progo, 20 kalurahan di Kabupaten Bantul, 28 kalurahan di Kabupaten Gunungkidul, dan 20 kalurahan di Kabupaten Sleman. Papan nama Keistimewaan masuk dalam tolok ukur kinerja sub-Kegiatan Pengadaan Sarana Publikasi dan penanda Keistimewaan yang diampu oleh Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. Dengan pagu sebesar Rp5.651.145.000,00, realisasi keuangan dari kegiatan Papan Nama Keistimewaan ini telah mencapai Rp5.651.145.000,00 atau sebesar 100%. Sedangkan untuk realisasi fisik, Papan Nama Keistimewaan sudah selesai dengan capaian 100%.

7) BKK Kalurahan – COVID-19 (Jagawarga)

Alokasi Dana Keistimewaan untuk Penanganan COVID-19 Jagawarga diberikan kepada 391 kalurahan di DIY. Penanganan COVID-19 Jagawarga masuk dalam tolok ukur kinerja sub kegiatan Pembinaan Jaga Warga yang diampu oleh Satuan Polisi Pamong Praja DIY. Dengan pagu sebesar Rp22.570.000.000,00, realisasi

keuangan telah mencapai Rp20.961.644.964,00 atau sebesar 92,87%. Sedangkan untuk realisasi fisik, sudah selesai dengan capaian 92,87%.

b. BTT COVID-19

Dana Keistimewaan untuk Belanja Tidak Terduga (BTT) COVID-19 dialokasikan sebesar Rp30.400.000.000,00. Sampai dengan 31 Desember 2021 sudah terserap atau terealisasi sebesar Rp22.952.367.800,00 atau sebesar 75,50%.

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Kegiatan fasilitasi berupa fasilitasi upacara adat penyelenggaraan acara penggiat seni, fasilitasi vaksinasi COVID-19 untuk pelaku pariwisata, dan pemberian bantuan kepada Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) tidak dapat terlaksana sesuai target. Beberapa alasan yang menyebabkan hal tersebut antara lain:

- 1) Target fasilitasi penyelenggaraan kegiatan penggiat seni tidak tercapai 100% karena jumlah proposal yang masuk berkurang akibat adanya kebijakan PPKM.;
- 2) Tidak ada proposal yang masuk karena terdapat kebijakan PPKM;
- 3) Pemberian bantuan untuk Pokdarwis tidak tercapai 100% karena terdapat beberapa Pokdarwis yang tidak memiliki SK Pokdarwis, tidak mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota setempat serta terdapat duplikasi data.;
- 4) Target vaksin COVID-19 di destinasi wisata tidak dapat tercapai karena berdasarkan fakta lapangan banyak peserta yang tidak hadir. Selain itu, beberapa peserta vaksin tidak dapat divaksin dikarenakan kondisi kesehatannya.

b. Solusi

- 1) Perlu adanya perbaikan mekanisme pelaksanaan kegiatan untuk fasilitasi penyelenggaraan kegiatan penggiat seni pada tahun selanjutnya agar output dapat tercapai maksimal
- 2) Komunikasi dan koordinasi yang intens agar tidak terjadi miskomunikasi hal teknis di lapangan
- 3) SOP vaksinasi di masing-masing kabupaten berbeda sehingga diperlukan penyesuaian agar acara dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat dilayani dengan baik.

C. URUSAN PERTANAHAN

1. Kondisi Umum

Urusan Pertanahan dalam UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY mengatur penyelenggaraan kewenangan pertanahan atas kepemilikan tanah keprabon dan bukan keprabon yang menjadi hak milik Kasultanan dan Kadipaten, sebagai badan hukum yang diakui Undang-Undang. Kasultanan dan Kadipaten memiliki kewenangan dalam mengelola dan memanfaatkan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten untuk tujuan sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Kewenangan DIY dalam Urusan Pertanahan sesuai dengan Perdas Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten meliputi: (a) kegiatan inventarisasi, identifikasi, verifikasi, pemetaan dan pendaftaran tanah; (b) pengadaan sarana prasarana untuk perawatan dan pemeliharaan dokumen; (c) penyelenggaraan pemantauan dan penertiban penggunaan Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten yang menyalahi Serat Kekancingan; (d) penanganan sengketa atas Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten; (e) penyiapan bahan pertimbangan teknis izin penggunaan tanah; dan (f) kegiatan peremajaan data Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten.

Dalam upaya memberikan jaminan kepastian hukum dan jaminan perlindungan hukum bagi pengguna tanah Kasultanan dan Kadipaten baik oleh Kasultanan dan Kadipaten itu sendiri maupun instansi atau masyarakat, maka dilaksanakan proses pendaftaran keberadaan tanah Kasultanan dan Kadipaten.

Pemda DIY memiliki peran untuk memfasilitasi proses pendaftaran tanah Kasultanan dan Kadipaten berupa:

- a. Penatausahaan, pemeliharaan, pelestarian, pelepasan, pengawasan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten; serta
- b. Memfasilitasi pembentukan regulasi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

2. Program dan Kegiatan Tahun 2021

Urusan Pertanahan terdiri dari 1 program, 3 kegiatan, dan 10 sub kegiatan dengan pagu sebesar Rp21.934.476.726,00. Urusan Pertanahan diampu oleh 2 OPD Pemda DIY dan 7 OPD Pemkab/Pemkot. Persentase realisasi fisik urusan pertanahan sampai dengan tahap akhir 2021 telah mencapai 94,51% terhadap target satu tahun. Sedangkan realisasi keuangan sampai dengan tahap akhir sebesar Rp18.434.647.364,50 atau sebesar 84,05%.

Tabel 5.3. Realisasi Keuangan Program dan Kegiatan Urusan Pertanahan Tahun Anggaran 2021

NO	URAIAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)
			Rp	%	
	PERTANAHAN	21.934.476.726	18.434.647.364,50	84,04%	94,51
	KOTA YOGYAKARTA	486.038.000	421.827.000	86,79	87,18
1	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta	486.038.000	421.827.000	86,79	87,18
	KABUPATEN BANTUL	3.517.317.428	3.051.582.195	86,76	96,41
1	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	3.517.317.428	3.051.582.195	86,76	96,41
	KABUPATEN KULON PROGO	2.283.952.800	1.941.417.730	85,00	100,00
1	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo	1.883.952.800	1.558.220.980	82,71	100,00
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Kulon Progo	400.000.000	383.196.750	95,80	100,00

NO	URAIAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)
			Rp	%	
	KABUPATEN GUNUNGKIDUL	6.058.749.000	5.517.727.440	91,07	98,13
1	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul	5.601.776.000	5.081.494.440	90,71	97,97
2	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Gunungkidul	456.973.000	436.233.000	95,46	100,00
	KABUPATEN SLEMAN	4.067.515.032	2.511.771.388,50	61,75	79,06
1	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman	4.067.515.032	2.511.771.389	61,75	79,06
	PEMDA DIY	5.520.904.466	4.990.321.611	90,39	99,10
1	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG DIY	5.167.742.466	4.646.780.711	89,92	99,04
2	BIRO HUKUM SETDA DIY	353.162.000	343.540.900	97,28	100,00

Sumber: Paniradya Kaistimewan (2022)

Kinerja urusan Pertanahan, antara lain a) Pendaftaran SG PAG tahun 2021 Sejumlah 1.450 bidang; b) Terbit Perdes Pemanfaatan Tanah Desa tahun 2021 392 Perdes; c) Penyesuaian /pencatatan perubahan sertifikat tanah desa Tahun 2021 Sejumlah 1.475 bidang; d) Pembuatan patok tanah desa tahun 2021 sejumlah 17.700; e) Pemasangan patok tanah desa tahun 2021 sejumlah 2.679 bidang; f) Penegasan batas desa tahun 2021 sejumlah 24 desa, g) Terbit izin Gubernur pemanfaatan tanah desa tahun 2021 sejumlah 167 izin; h) Terbit izin pengelolaan tanah kas desa tahun 2021 sejumlah 42 izin.

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Target capaian urusan pertanahan mitra OPD pengampu Dais terkendala pada BPN/Kantah tidak bisa optimal memberikan pelayanan karena adanya *lockdown* pandemi COVID-19
- 2) Terdapat TUK yang tidak dapat terealisasi dengan maksimal yaitu berkaitan dengan pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten pada tahun 2021 dari target 1.852 bidang hanya terealisasi 1.450 bidang atau tercapai sebesar 78.29%. Keadaan ini disebabkan adanya PPKM sehingga loket pendaftaran di BPN/Kantah sempat ditutup pada bulan Mei hingga September 2021. Hal ini menyebabkan berkas pendaftaran baru dapat diproses

menjelang akhir tahun. Sedangkan proses pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadiupaten memakan waktu yang cukup lama sehingga tidak dapat mengakomodasi seluruh berkas pendaftaran yang telah masuk. Selain itu, BPN/Kantah juga memiliki target pendaftaran dari Kementerian ATR/BPN.

b. Solusi

- 1) Koordinasi secara intensif dengan mitra OPD pengampu dais di kab/kota dan BPN/Kantah terkait kesanggupan dalam pencapaian target capaian di tahun 2021.
- 2) Perlunya kesepakatan dan penyusunan peta jalan pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

D. URUSAN TATA RUANG

1. Kondisi Umum

Berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Pemerintah Daerah provinsi melakukan pembinaan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan Masyarakat. Salah satu bentuk pembinaan Pemerintah Daerah provinsi yaitu dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.

Tujuan Penataan Ruang DIY pada Perda RTRW DIY Tahun 2019-2039 adalah mewujudkan DIY sebagai pusat pendidikan, budaya, dan daerah tujuan wisata terkemuka berkelas dunia dengan mengedepankan keterpaduan pembangunan antar sektor berbasis mitigasi bencana, keistimewaan tata ruang DIY, dan lingkungan melalui penataan ruang yang berkualitas dan berkelanjutan. Pemanfaatan Ruang diarahkan untuk mendorong implementasi pengembangan kawasan, seperti rencana pembangunan fasilitas pada kawasan strategis provinsi maupun pada kawasan-kawasan yang sesuai dengan kebijakan keistimewaan akan dilakukan revitalisasi dalam rangka memperkuat karakter wilayah (kawasan cagar budaya dan kawasan

pendukungnya) serta satuan ruang strategis kasultanan dan satuan ruang strategis kadipaten. Satuan Ruang Strategis pada Tanah Keprabon meliputi: 1) Keraton, 2) Makam raja-raja Mataram di Imogiri, 3) Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak, 4) Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede, 5) Masjid Pathok Nagoro, 6) Gunung Merapi, dan 7) Pantai Samas-Parangtritis. Satuan Ruang Strategis Kasultanan pada Tanah Bukan Keprabon meliputi: 1) Kerto–Pleret, 2) Kota Baru, 3) Candi Prambanan–Candi Ijo, 4) Sokoliman, 5) Perbukitan Menoreh, 6) Karst Gunungsewu, dan 7) Pantai Selatan Gunungkidul. Satuan Ruang Strategis Kadipaten pada Tanah Keprabon meliputi: 1) Puro Pakualaman, dan 2) Makam Girigondo. Satuan Ruang Strategis Kadipaten pada Tanah Bukan Keprabon meliputi 1) Pusat Kota Wates dan 2) Pantai Selatan Kulon Progo. Pengendalian Pemanfaatan Ruang mendorong/koordinasi sampai tingkat kabupaten/kota untuk melegalkan perangkat pengendalian seperti Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) dan mekanisme perizinan pemanfaatan ruang daerah, insentif dan disinsentif serta inovasi implementasi pengendalian pemanfaatan ruang.

Berdasarkan Perdais DIY No. 1 Tahun 2013 pasal 54 ayat (1) diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang termasuk Tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten serta kawasan satuan satuan ruang lain yang memiliki nilai keistimewaan. Pasal 54 ayat (2) menegaskan bahwa Kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal Penataan Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi penetapan kerangka umum kebijakan Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten meliputi :

- a. Kebijakan pengembangan struktur ruang; dan
- b. Kebijakan pengembangan pola ruang.

2. Progam dan Kegiatan Tahun 2021

Urusan tata ruang terdiri dari 1 program, 4 kegiatan, dan 15 sub kegiatan yang dibiayai dengan pagu sebesar Rp509.117.415.078,00. Urusan Tata Ruang diampu oleh 6 OPD Pemda DIY dan 7 OPD Pemkab/Pemkot. Persentase realisasi fisik urusan tata ruang sampai dengan tahap akhir telah

mencapai 99,92% terhadap target satu tahun. Sedangkan realisasi keuangan sampai dengan tahap akhir mencapai Rp505.480.967.919,71 atau sebesar 99,29%.

Tabel 5.4. Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik Urusan Tata Ruang Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2021

NO	URAIAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN		REALISASI
			Rp	%	FISIK (%)
TATA RUANG		509.117.415.078	505.480.967.919,71	99,29	99,92
KOTA YOGYAKARTA		41.489.743.000	41.314.777.777,71	99,58	100,00
1	DINAS PUPKP KOTA YOGYAKARTA	41.239.743.000	41.088.571.498	99,63	100,00
2	DINAS PERHUBUNGAN KOTA YOGYAKARTA	250.000.000	226.206.280	90,48	100,00
KABUPATEN BANTUL		245.431.500	245.431.500	100,00	100,00
1	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN BANTUL	245.431.500	245.431.500	100,00	100,00
KABUPATEN KULON PROGO		545.590.500	514.289.864	94,26	100,00
1	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN KULON PROGO	94.691.500	94.691.500	100,00	100,00
2	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KULON PROGO	450.899.000	419.598.364	93,06	100,00
KABUPATEN GUNUNGKIDUL		579.926.000	470.184.200	81,08	98,34
1	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL	579.926.000	470.184.200	81,08	98,34
KABUPATEN SLEMAN		198.137.933.270	195.930.949.039	98,89	100,00
1	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN SLEMAN	198.137.933.270	195.930.949.039	98,89	100,00
PEMDA DIY		268.118.790.808	267.005.335.539	99,58	99,84
1	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG DIY	5.401.345.258	5.131.006.176	94,99	100,00
2	PANIRADYA KAISTIMEWAN	120.000.000	118.730.000	98,94	100,00
3	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL SETDA DIY	10.239.743.465	10.202.081.946	99,63	100,00
4	DINAS PERHUBUNGAN DIY	2.928.247.008	2.897.949.307	98,97	99,26
5	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	249.230.662.577	248.480.491.854	99,70	99,84
6	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	198.792.500	175.076.256	88,07	100,00

NO	URAIAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)
			Rp	%	
	JUMLAH	1.320.000.000.000	1.259.358.730.517,05	95,41	99,03

Kinerja urusan Tata Ruang, antara lain:

- a. Pembebasan Tanah JJLS Segmen Garongan – Congot sepanjang 53.709 m²;
- b. Pembangunan Ruas Jalan dan Jembatan Tawang-Ngalang Segmen I dan Segmen V, total Panjang 3,375 Km;
- c. Penataan pedestrian jalan KH.Ahmad Dahlan, seluas 1.750 m²;
- d. Penataan pedestrian kawasan Kotabaru, seluas 5.500 m²;
- e. Pembebasan lahan Prambanan – Lemahbang seluas 189.281 m²;
- f. Pembangunan Jalan Ruas Dawung (Barongan) - Makam Imogiri (1,65 KM);
- g. Pembangunan Gedung kantor Paniradya 1 unit;
- h. Pembelian tanah Suryatmajan seluas 191 m²;
- i. Penyusunan Materi Teknis Strategi Pengembangan Wilayah 7 SRS (Gunung Merapi, Sokoliman, Girigondo, Kerto Pleret, Imogiri, Pantai Selatan Gunungkidul dan Pantai Selatan Kulon Progo)

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Terdapat satu TUK yang tidak tercapai yaitu Penyediaan Lahan Untuk Pembangunan Jalan Tawang-Ngalang seluas 19 m². Hal ini dikarenakan proses konsinyasi yang belum mendapatkan keputusan pengadilan.

b. Solusi

Selanjutnya kegiatan ini akan dikoordinasikan dan dilaksanakan kembali dengan menggunakan APBD Kabupaten Gunungkidul.

PROGRAM STRATEGIS DIY

A. PENANGANAN COVID-19

1. Latar Belakang

Upaya untuk menghadapi dan beradaptasi dengan pandemi COVID-19 dilakukan dalam berbagai bentuk. Pemda DIY sebagai institusi yang bertanggungjawab melakukan pelayanan publik telah mengupayakan beberapa kebijakan yang bertujuan menangani pandemi COVID-19. Salah satunya telah diterbitkan Surat Instruksi Gubernur DIY Nomor 2/Instr./2020 tanggal 3 Maret 2020 tentang peningkatan kewaspadaan terhadap risiko penularan infeksi COVID-19 untuk menjadi dasar penanganan epidemi COVID-19 di wilayah DIY. Selain dalam bentuk instruksi, upaya untuk membangun kesadaran dan solidaritas masyarakat juga dilakukan melalui *Sapa Aruh* yang dilakukan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono XI. Dalam *Sapa Aruh* ini Gubernur DIY mengajak dan menghimbau masyarakat untuk bergotong royong dan mengedepankan kembali kearifan lokal, seperti *guyub-rukun*, *grapyak-semanak*, *sumedulur*, *legawa*, ikhlas dan mandiri dalam melaksanakan prokes 5M, dalam membangun solidaritas untuk menangani pandemi. Kearifan lokal yang telah ada di masyarakat sebagaimana disampaikan dalam *Sapa Aruh* merupakan modal sosial penting dalam upaya penanganan pandemi.

Pada tingkat operasional, penanganan bencana COVID-19 di DIY meliputi dua Tahapan Rencana Operasi berdasarkan Kepgub DIY Nomor 64/KEP/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kemudian diubah menggunakan Kepgub DIY Nomor 78/Kep/2020 Tanggal 8 April 2020 tentang Perubahan SK Gub Nomor 64/Kep/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanganan COVID-19. Dengan adanya Kepgub tersebut ditindaklanjuti dengan adanya Kebijakan Status Tanggap Darurat Bencana COVID-19. Kebijakan ini telah dilakukan

sebanyak sembilan belas (19) kali perpanjangan, berawal dari Bulan Maret tahun 2020 hingga Desember 2021.

Penanganan selama masa tanggap darurat yaitu mulai Maret 2021 sampai dengan berakhirnya pelaksanaan tahun anggaran 2021 dengan membentuk Sekretariat Pos Komando Terpadu, Bidang Logistik serta membentuk Pos Dukungan Operasi Gugus Tugas COVID-19 DIY (Posduk DIY) yang berada di bawah Sekretariat Satgas COVID-19 DIY. Pelayanan yang dilakukan oleh Posduk DIY meliputi, 1) *Hotline* COVID-19; 2) Penanganan Jenazah Dengan Protokol Kesehatan dan Dekontaminasi; 4) Asistensi; dan 5) Pos Kesehatan.

Hingga tanggal 28 Desember 2021 atau 21 bulan berlangsungnya pandemi COVID-19 DIY, data Dinkes DIY tercatat sudah ada 156.986 jiwa terkonfirmasi positif COVID-19. Total kasus sembuh telah mencapai 151.588 kasus, dengan persentase kesembuhan mencapai 96,56%. Jumlah kasus kematian mencapai 5.268 kasus. Selama perjalanan penyebaran virus COVID-19 di DIY, puncak tertinggi kasus terkonfirmasi COVID-19 terjadi pada pertengahan Bulan Juni 2021 hingga Bulan Juli 2021. Data Dinkes DIY menunjukkan jika rekor penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 terjadi pada 13 Juli 2021 mencapai 2.731 kasus.

Pada masa peningkatan kasus COVID-19 di DIY, Pemda DIY mengumumkan data hasil uji *Whole Genome Sequencing* (WGS) SARS-COV-2 yang dilakukan Laboratorium WGS Pokja Genetik FKMK UGM dengan 25 sampel mengindikasikan bahwa 20 orang telah terpapar COVID-19 varian Delta yang pertama kali ditemukan di India. Varian ini dilaporkan memiliki tingkat penularan yang lebih cepat daripada varian-varian sebelumnya. Disisi lain data Kementerian Kesehatan melalui Laporan Harian COVID-19 Ketahanan Kesehatan dalam Menjalani Tatanan Hidup Baru menyatakan bahwa DIY telah memasuki tahap keempat penyebaran COVID-19 atau disebut dengan *Fase Community Transmission* yang artinya >150 kasus per 100 ribu populasi penduduk. *Community Transmission* (CT) adalah kondisi virus COVID-19 yang sudah menyebar luas dan tidak bisa lagi dilacak dari mana sumber penularannya.

Sebagai upaya untuk menangani kondisi tersebut, Pemda DIY mulai menerapkan kebijakan yang ketat dalam membatasi berbagai aktivitas yang dilakukan masyarakat melalui Pemberlakuan Pengetatan Kegiatan Masyarakat atau lebih dikenal dengan istilah PPKM Darurat. Sesuai dengan instruksi dari Pemerintah Pusat yang menyatakan bahwa PPKM Darurat diberlakukan untuk wilayah seluruh Pulau Jawa - Bali. Penerapan kebijakan PPKM Darurat memang didasarkan pada data nasional, khususnya tentang sebaran kasus jumlah kematian di wilayah Jawa - Bali masih terus mengalami peningkatan. Kebijakan PPKM Darurat mulai diberlakukan pada 3 - 20 Juli 2021 dan diatur lebih lanjut dalam Instruksi Gubernur No.17/INSTR/2021. Selama PPKM Darurat, aktivitas masyarakat dibatasi secara ketat, baik mobilitas perjalanan antar kota dan provinsi maupun kegiatan di berbagai sektor non esensial dengan memberlakukan 100% *Work From Home*, kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring/*online*, kegiatan makan/minum hanya *take away*, fasilitas umum ditutup sementara.

Setelah berakhirnya masa PPKM Darurat pada 20 Juli 2021, Pemerintah kembali memperpanjang kebijakan tersebut hingga 2 Agustus 2021 berdasarkan instruksi dari Inmendagri No 22/2021 dan Siaran Pers oleh Presiden pada 25 Juli 2021. Pada saat itu, kebijakan yang dianjurkan oleh pemerintah pusat telah mengubah kebijakan PPKM Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali menjadi PPKM level 4 yang artinya untuk kasus meninggal terdapat lebih dari 5 kasus per 100.000 penduduk perminggu (level situasi pandemi disesuaikan dengan wilayah masing-masing). Kebijakan dengan istilah PPKM level 4 diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No.27/2021 tentang PPKM Level 4, 3, dan 2 COVID-19 di Wilayah Jawa dan Bali. Peraturan level yang diterapkan saat ini didasarkan rekomendasi WHO soal situasi yang didasarkan pada laju penularan, kasus konfirmasi, perawatan, kematian, kluster kasus, transmisi, dan lainnya. WHO menyatakan bahwa ada 7 klasifikasi level situasi yang tercantum dalam dokumen *Interim Guidance*. Ketujuh level tersebut antara lain *No cases*, *Imported/Sporadic cases*, *Cluster of cases*, *Community-CT1*, *Community-CT2*, *Community-CT3*, dan *Community1CT4*.

Satu bulan selanjutnya, kondisi ini mulai mengalami penurunan secara signifikan dan stabil, tepatnya di Bulan September 2021. Penurunan kasus COVID-19 merupakan salah satu indikator Pemda DIY mampu menekan angka penyebaran COVID-19, sehingga Pemerintah Pusat menurunkan level penerapan PPKM di DIY dari level 4 menjadi level 3 yang berlaku sejak 7 September 2021. Selama masa perpanjangan PPKM level 3 ini ternyata tren kasus positif di DIY kembali mengalami penurunan yang signifikan, sehingga pada 19 Oktober 2021 Pemda DIY kembali mengeluarkan Instruksi Gubernur yang menyatakan bahwa penerapan PPKM di DIY turun menjadi level 2 yang diatur dalam Instruksi Gubernur DIY Nomor 31/INSTR/2021 dengan masa berlaku dari 19 Oktober hingga 01 November 2021. Lebih lanjut WHO juga menyatakan bahwa untuk Provinsi DIY mengalami penurunan level transmisi penularan komunitas dari CT2 menjadi CT1 yang artinya DIY mampu menunjukkan pada setiap 100.000 populasi terdapat kurang dari 20 orang terinfeksi dalam satu minggu, sedangkan CT2 terdapat 20-50 orang terinfeksi dalam satu minggu. Upaya Penanganan COVID-19 dilakukan oleh beberapa OPD Pemda DIY antara lain BPBD, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan.

2. Upaya Penanganan COVID-19 oleh BPBD

Satgas COVID-19 DIY melalui Posduk DIY telah melayani masyarakat melalui empat aspek utama, yaitu 1) Layanan *Hotline* COVID-19; 2) Penanganan Jenazah Dengan Protokol Kesehatan dan Layanan Dekontaminasi; 3) Asistensi; dan 4) Pos Kesehatan. Kinerja posduk adalah sebagai berikut:

a. Layanan Hotline

Hotline atau disebut dengan *callcenter* COVID-19 merupakan salah satu media yang digunakan untuk memberikan informasi maupun situasi dan kondisi yang berkaitan dengan COVID-19 di DIY. Berdasarkan jumlah panggilan hotline COVID-19 selama 2 tahun terdapat 3890 penelpon dan menunjukkan adanya sebuah tren pengguna telepon yang fluktuatif. Peningkatan terjadi di awal mula COVID-19 masuk DIY yaitu bulan Maret 2021. Kemudian meningkat lagi di puncak pandemi gelombang pertama pertama di bulan November - Desember 2020 dan kembali meningkat di puncak gelombang kedua di bulan Juni – Juli 2021.

b. Penanganan Jenazah dan Dekontaminasi

Penanganan jenazah merupakan salah satu kegiatan yang perlu diperhatikan dalam penanggulan virus COVID-19, karena kontak penularan tidak hanya terjadi pada pasien hidup namun pada jenazah pasien terkonfirmasi maupun yang terpapar COVID-19. Pasien yang meninggal dalam kondisi tersebut memerlukan protokol khusus dalam penanganannya, bahkan petugas yang melakukan proses pengurusan jenazah (saat dimandikan, pemasangan kain kafan, hingga pengantaran dan pemakaman) memiliki potensi terpapar. Selama melaksanakan kegiatan, personil dilengkapi dengan Alat Pelindung Diri (APD) berdasarkan Standar Operasi Prosedur (SOP), seperti memakai baju hazmat, memakai masker dan sarung tangan maupun sepatu boot.

- 1) Penanganan Jenazah selama 2 tahun di masa pandemi COVID-19 tercatat sebanyak 7.280 pemakaman untuk dimakamkan dengan prosedur tetap (protap) atau secara protokol kesehatan.
- 2) Dekontaminasi
 - a) Armada dan Personil
Kegiatan pelayanan dekontaminasi yang dilakukan oleh posduk sebanyak 4.441 kegiatan dengan terdiri dari 5.892 armada dan 12.398 personil.
 - b) Bangunan dan Lingkungan
Kegiatan pelayanan penyemprotan disinfektan dilakukan oleh Posduk sejak tanggal 26 Maret hingga 31 Desember 2021, dimana pengguna manfaat disinfektan terdiri dari Rumah Sakit Rujukan dan Rumah Sakit Non Rujukan, Puskesmas, Perkantoran, Pertokoan, Fasilitas umum, lingkungan atau pemukiman penduduk dan rumah hunian yang pernah dihuni oleh pasien yang terpapar virus COVID-19. Zona Penyemprotan Desinfektan mencatat laporan selama periode 26 Maret hingga 31 Desember sebanyak 375 aktivitas penyemprotan.

c. Asistensi dan Peran Masyarakat

Asistensi merupakan kegiatan yang dilakukan dalam upaya edukasi untuk aktif terbentuknya Satgas Kapanewon/Kemantren untuk mendukung Satgas Kalurahan/Kelurahan. Pelaksanaan asistensi dilakukan pada bulan Agustus 2021. Selama pelaksanaan asistensi dapat dipetakan berbagai masalah dan juga potensi di masing-masing wilayah Kabupaten/Kota yang dipengaruhi oleh karakteristik wilayah, fasilitas Kesehatan yang ada, dan sumber daya di masing-masing wilayah Kabupaten/Kota. Berdasarkan hasil pemetaan tersebut disusun Buku Saku Pendampingan Satgas COVID-19 Kalurahan/Kelurahan di DIY. Buku saku ini dibuat untuk memberikan pengetahuan dan panduan teknis pemulasaran dan pemakaman, dan alur pelaporan pasien isoman meninggal dunia. Oleh karenanya melalui buku saku ini diharapkan satgas kalurahan/kelurahan lebih siap dalam penanganan COVID-19 di tingkat kalurahan/kelurahan.

Salah satu elemen Satgas COVID-19 di tingkat pedukuhan yaitu Jaga warga. Sesuai dengan Pergub DIY Nomor 28 tahun 2021 tentang Kelompok Jaga Warga. Keberadaan kelompok Jaga warga memiliki peran aktif dalam penanganan COVID-19 di level kalurahan ke bawah sampai padukuhan maupun RW dan RT. Dengan adanya kelompok Jaga Warga, koordinasi menjadi lebih mudah dilakukan, sehingga penanganan COVID-19 menjadi lebih optimal.

d. Pos Kesehatan

Kegiatan Posduk selama pandemi COVID-19 memerlukan dukungan dari pelayanan kesehatan untuk dapat memberikan bahan rujukan oleh *safety officer* dalam menugaskan personil, khususnya saat dilapangan. Untuk memastikan kesiapan personil dalam melaksanakan tugas di lapangan, pemeriksaan kesehatan dilakukan setiap hari disertai pemberian suplemen dan vitamin bagi personil Posduk maupun karyawan BPBD DIY. Posko kesehatan akan melaporkan hasil pemeriksaan berkala dan merekomendasikan apabila diperlukan

tindakan lebih lanjut. Layanan yang disediakan oleh Pos Kesehatan antara lain:

e. Pemeriksaan Swab dan Polymerase Chain Reaction test (PCR)

Tes Swab dan PCR menjadi prioritas untuk dilakukan bagi para petugas dalam rangka menjamin keamanan bagi masyarakat yang dilayani. Pemeriksaan ini menjadi bahan rujukan oleh *safety officer* untuk mengambil langkah lebih lanjut apabila terdapat personil yang terpapar virus COVID-19 dan harus melaksanakan karantina.

f. Rujukan dan Karantina

- 1) Rujukan Kesehatan diberikan dari pos kesehatan BPBD DIY ke fasilitas kesehatan lebih lanjut (Puskesmas/Rumah Sakit) apabila membutuhkan penanganan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan hematologi dan foto *rontgen thorax*. Dalam hal ini rumah sakit yang ditunjuk adalah RS Dr. Soetarto Yogyakarta.
- 2) Karantina dilakukan khusus bagi personil yang terindikasi sesuai dengan protokol COVID-19. Tempat karantina yang dipakai berada di Komplek Wisma Balai Diklat Depdagri Baciro Yogyakarta untuk petugas yang mengambil alat Rapid Test dan Reagen dari Jakarta, sedangkan untuk petugas dan relawan yang terpapar Virus COVID-19 melakukan karantina di rumah masing-masing.

g. Pemeriksaan Gula Darah, Kolesterol, dan Asam Urat

Pemeriksaan medis berupa tes darah untuk mengukur kadar gula (glukosa) dan jumlah total zat lemak (kolesterol dan trigliserida) dalam darah dilakukan berkala setiap sebulan sekali.

h. Pengelolaan Obat dan Alat Kesehatan,

Pengadaan obat dan alat kesehatan berasal dari bantuan pemerintah dan bantuan dari donatur swasta atau pribadi. Setiap bantuan dari pemerintah maupun swasta/pribadi akan dilakukan pencatatan di pusat

sistem pencatatan bantuan di BPBD DIY sehingga setiap bantuan tidak bisa langsung melalui pos kesehatan.

- i. **Promosi Kesehatan Bagi Seluruh Petugas dan Pegawai BPBD DIY melalui media Whatsapp Poskes dengan Nomor 0821-3446-1685.**

Kegiatan berupa promosi kesehatan melalui broadcast WA grup ataupun personal.

- j. **Pelayanan Pertolongan Pertama dan Pelayanan Protokol Kesehatan.**

Poskes juga melakukan pelayanan pertolongan pertama dan pelayanan protokol kesehatan pada acara-acara yang diselenggarakan pemda DIY ataupun pelayan PPGD disekitaran lingkungan BPBD DIY sesuai permintaan. Pada pelayanan ini poskes dilengkapi dengan armada ambulan COVID-19 Bantuan TWC Prambanan.

- k. **Edukasi**

Keberhasilan penanganan COVID-19 menuntut peran aktif masyarakat. Mengingat pandemi virus COVID-19 adalah bencana baru, maka pengetahuan masyarakat tentang bahaya dan cara pencegahannya masih minim, dan perlu upaya lebih lanjut untuk memberdayakan masyarakat. Salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat dalam melakukan kesiapsiagaan bencana pandemi yaitu melalui sosialisasi dan aktivasi Desa Kampung Tangguh Bencana. Berbagai upaya yang sudah dilakukan sebagai berikut: 1) Sosialisasi menggunakan mobil informasi dengan keliling jalan protokol, masuk desa/ Kampung. 2) Membuat konten video, poster bergambar/ yang disebarakan melalui jaringan media sosial untuk sarana desiminasi informasi tentang COVID-19. 3) Pendampingan dan Penyusun panduan Desa Kampung Tangguh Covid (Deskatavid) dalam bentuk buku dan disebarakan melalui Jaringan Perangkat desa, FPRB dan komunitas relawan se-DIY. 4) Menyusun Buku Pedoman Kegiatan Masyarakat Dalam Penanganan COVID-19 dan disebarakan melalui Jaringan Perangkat desa, FPRB dan komunitas

relawan se-DIY. 5) Pembagian Buku Saku Pendampingan Satgas COVID-19 Kelurahan/Kelurahan.

I. Lembaga yang Terlibat

Lembaga yang terkait dalam kegiatan Posduk COVID-19 DIY di periode tahun 2021 didominasi dari lembaga BPBD DIY yaitu sebesar 31%. Hal ini berbeda dari tahun sebelumnya, dikarenakan pada tahun 2021 pelaksanaan operasional pelayanan posko dukungan lebih terorganisir dan dapat dilaksanakan oleh BPBD DIY dan relawan-relawan di DIY. Jumlah keseluruhan petugas juga berkurang sebanyak 270 petugas dari tahun sebelumnya.

Selain itu, juga terbentuk Gerakan solidaritas dan kemanusiaan yang muncul di masyarakat. Gerakan-gerakan ini sangat membantu penanganan pandemi. Beberapa layanan yang diberikan oleh Gerakan masyarakat ini seperti pemberian paket bantuan untuk isoman, penyediaan sarana prasarana COVID-19 misal penyediaan layanan *ambulance* gratis, bantuan APD untuk tenaga kesehatan, layanan *telemedicine* gratis, layanan pertukaran informasi terkait bantuan ataupun sebaliknya kebutuhan bantuan untuk penanganan pasien terkonfirmasi positif, hingga tenaga pemulasaraan jenazah dan lain-lain.

3. Upaya Penanganan COVID-19 oleh Dinsos

Sebagai salah satu upaya penanganan COVID-19, Pemda DIY melalui Dinas Sosial DIY memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan pembentukan *shelter*/tempat isolasi bagi masyarakat yang terkena COVID-19. Upaya yang dilakukan adalah memberikan fasilitas kesehatan kepada masyarakat/penyintas yang sedang melaksanakan isolasi di *shelter*. Berikut ini beberapa lokasi shelter yang disiapkan di kabupaten/kota di DIY:

a. Kota Yogyakarta

Tabel 6.1. Lokasi Shelter di Kota Yogyakarta

No	Nama Shelter	Kapanewon/Alamat
1.	Shelter BBPPKS 1 Yogyakarta Tahap 1	Umbulharjo
2	Shelter BBPPKS 1 Yogyakarta Tahap 2	Umbulharjo
3.	Shelter BBPPKS 2 Yogyakarta Tahap 1	Umbulharjo

No	Nama Shelter	Kapanewon/Alamat
4	Shelter BBPPKS 2 Yogyakarta Tahap 2	Umbulharjo
5.	Shelter BPTT "Dama Prasetyo" Dinas Sosial DIY	Danurejan
6.	Shelter Karantina Kontingen Atlit PON DIY	Umbulharjo
7.	Shelter Hotel Lynn Peparnas Kontingen DIY 1	Hotel Lynn Jogokaryan YK
8.	Shelter Hotel Lynn Peparnas Kontingen DIY 2	Hotel Lynn Jogokaryan YK
9.	Shelter Hotel Lynn Peparnas Kontingen DIY 3	Hotel Lynn Jogokaryan YK
10.	Shelter BBPPKS-DISSOS DIY Karantina Kontingen PWN DIY	Umbulharjo

b. Kabupaten Bantul

Tabel 6.2. Lokasi Shelter di Kabupaten Bantul

No	Nama Shelter	Kapanewon
1.	Shelter Tangguh Sumbermulyo	Bambanglipuro
2.	Shelter Tangguh Sumbermulyo Tahap 2	Bambanglipuro
3.	Shelter Bregas Sidomulyo	Bambanglipuro
4.	Shelter Bregas Sidomulyo Tahap 2	Bambanglipuro
5.	Shelter Trengginas Mulyodadi	Bambanglipuro
6.	Shelter Bersama Sapdodadi	Sapdodadi
7.	Shelter Panuwun Waras Patalan	Jetis
8.	Shelter SMK 2 Sewon	Sewon
9.	Shelter SMK 2 Sewon Tahap 2	Sewon
10.	Shelter Wira Sehat Wirokerten	Banguntapan
11.	Shelter SMK Kelautan	Sanden
12.	Shelter SMK Kelautan Tahap 2	Sanden
13.	Shelter SMK Kelautan Tahap 3	Sanden
14.	Shelter Wukirsari	Imogiri
15.	Shelter Wukirsari Tahap 2	Imogiri
16.	Shelter Enggal Waras Bawuran	Pleret

c. Kabupaten Sleman

Tabel 6.3. Lokasi Shelter di Kabupaten Sleman

No	Nama Shelter	Kapanewon
1.	Shelter Taman Martani	Kalasan
2.	Shelter Taman Martani Tahap 2	Kalasan
3.	Shelter Purwomartani	Kalasan
4.	Shelter Bangunkerto	Turi
5.	Shelter Merdikorejo	Tempel
6.	Shelter Pondokrejo	Tempel
7.	Shelter Sidoluhur	Godean
8.	Shelter Brayut Wukirsari	Cangkringan

d. Kabupaten Gunungkidul

Tabel 6.4. Lokasi Shelter di Kabupaten Gunungkidul

No	Nama Shelter	Kapanewon
1.	Shelter Petir	Rongkop
2.	Shelter Wanagama	Playen

Masyarakat positif COVID-19 yang menjalankan isolasi di *shelter* selama 14 hari wajib melaksanakan aturan yang telah diterapkan di masing-masing shelter. Pembiayaan dibebankan melalui Dana Insentif Daerah (DID) DIY Tahun 2021 dengan total anggaran sebesar Rp7.495.356.000,00

4. Upaya Penanganan COVID-19 oleh Dinas Kesehatan

Program/ kegiatan yang dilakukan Pemda DIY melalui Dinas Kesehatan DIY terkait pelaksanaan vaksinasi COVID-19 antara lain:

- Percepatan pemberian vaksinasi COVID-19 bagi lansia dan masyarakat
- Pelaksanaan vaksinasi dosis ke-3 (*booster*) bagi tenaga kesehatan
- Percepatan vaksinasi bagi anak usia 12 tahun s.d. 18 tahun

Untuk mempercepat capaian target penerima vaksinasi, Dinkes DIY telah melakukan inovasi-inovasi antara lain: (1) membentuk tim percepatan vaksinasi yang terpadu, dan (2) membuat aplikasi ayovaksin.jogjaprov.go.id untuk pendaftaran vaksinasi COVID-19.

Tabel 6.5. Progres vaksinasi di DIY per 31 Desember 2021

Kelompok Sasaran	Dosis 1	Dosis 2	Dosis 3
Tenaga Kesehatan (sasaran 33.779)	168,64%	164,64%	111,13%
	56.997	55.645	37.561
Pelayanan Publik (sasaran 334.754)	196,81%	186,26%	
	658.8928	623.500	
Lanjut Usia (sasaran 472.852)	81,81%	71,07%	
	386.860	336.078	
Umum (sasaran 1.726.698)	80,43%	71,49%	
	1.338.740	1.234.432	
Remaja (sasaran 311.596)	111,99%	102,43%	
	348.962	319.168	
Anak (6-11 th) (sasaran 301.580)	29,13%		
	87.855		

Sumber: Dinkes DIY, 2022

Selain percepatan vaksinasi, pelayanan yang diberikan oleh Pemda DIY dalam rangka penanggulangan wabah/bencana COVID-19 di DIY adalah menetapkan 4 rumah sakit rujukan COVID-19 berdasarkan SK Menteri Kesehatan dan 24 rumah sakit berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 162/KEP/2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61/KEP/2020 Tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu. Berikut ini adalah layanan rumah sakit rujukan COVID-19 yang ada di wilayah DIY:

Tabel 6.6. Daftar Rumah Sakit Rujukan COVID-19 di DIY (Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/169/2020)

No	Nama Rumah Sakit
1	RSUP Dr Sardjito
2	RSUD Kota Yogyakarta
3	RSUD Panembahan Senopati Bantul
4	RSUD Wates

Sumber: Dinkes DIY, 2022

Tabel 6.7. Daftar Rumah Sakit Rujukan COVID-19 di DIY (Berdasarkan KepGub DIY Nomor 162/KEP/2021)

No	Kabupaten	Nama Rumah Sakit
1	Kabupaten Bantul	RSPAU Dr. S. Hardjolukito; RS Santa Elizabeth; RS PKU Muhammadiyah Bantul
2	Kabupaten Sleman	RSUD Sleman; RSUD Prambanan; RS JIH; RS Panti Rini; RS Jiwa Grhasia; RS Sakinah Idaman; RS PKU Muhammadiyah Gamping; RS Bhayangkara Polda DIY; RSA UGM; RS Hermina; RS Islam PDHI Kalasan; RS Panti Nugoho
3	Kabupaten Gunungkidul	RSUD Wonosari; RSU Panti Rahayu
4	Kabupaten Kulon Progo	RS Nyi Ageng Serang
5	Kota Yogyakarta	RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta; RS DKT dr. Soetarto; RS Panti Rapih; RS Bethesda; RS Pratama; RS Siloam

Sumber: Dinkes DIY, 2022

5. Upaya Penanganan COVID-19 oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Pemda DIY Satpol PP sesuai tugas dan fungsinya dalam penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Daerah Istimewa, Peraturan Gubernur, dan kebijakan daerah lainnya melalui operasi yustisi dan non yustisi; berkontribusi dalam

penegakan protokol kesehatan. Sebagaimana diketahui, kondisi COVID-19 yang masih fluktuatif dan adanya pemberlakuan PPKM yang dimaksudkan untuk membatasi kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa membutuhkan pengawasan, khususnya untuk DIY yang tergantung pada sektor pariwisata. Selama tahun 2021 Satpol PP telah berperan aktif dalam melakukan penegakan protokol Kesehatan. Beberapa upaya yang dilakukan Pemda DIY melalui Satpol PP antara lain: Patroli pengawasan PPKM di DIY, supervisi PPKM, layanan pengaduan masyarakat, dan lain-lain. Adapun tindakan yang telah dilakukan petugas dalam rangka menegakkan protokol Kesehatan: memberikan himbauan penerapan prokes ketat, memberikan teguran dan arahan pada beberapa unit usaha yang melakukan pelanggaran prokes, memberikan himbauan agar membatasi jumlah pengunjung pada beberapa warung, restoran atau tempat usaha lain yang disinyalir melebihi kapasitas sesuai ketentuan PPKM.

6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Kasus positif COVID-19 masih meningkat karena kurangnya kesadaran untuk menaati protokol Kesehatan di sebagian lapisan masyarakat
- 2) Kurangnya jumlah ketersediaan *shelter* yang disebabkan tingginya kasus konfirmasi positif pada puncak pandemi
- 3) Pada puncak pandemi penanganan jenazah seringkali menghadapi kesulitan mendapatkan peti jenazah maupun proses pemulasaraan untuk jenazah yang terkonfirmasi positif.
- 4) Sempat terjadi kelangkaan oksigen pada saat puncak pandemi.
- 5) Tidak semua armada angkutan umum/pariwisata memahami dan mengetahui kebijakan di DIY dengan adanya SK Gubernur Nomor 443/Kep/2021 tentang Pengendalian Perjalanan Orang dengan kendaraan umum dan pariwisata yang memasuki wilayah DIY.
- 6) Kurangnya rambu petunjuk tambahan terkait pengarah perjalanan kendaraan umum/pariwisata masuk wilayah DIY harus melalui simpul Pos Pemeriksaan.

b. Solusi

- 1) Koordinasi dan Pengawasan secara intensif Gugus Tugas terhadap implementasi Pergub DIY Nomor 77 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan
- 2) Penyiapan hotel Mutiara sebagai *shelter* isolasi, munculnya gerakan-gerakan solidaritas masyarakat untuk membantu pemenuhan kebutuhan pasien terkonfirmasi positif.
- 3) Menindaklanjuti hal ini pemerintah telah mengupayakan untuk ketersediaan peti jenazah secara gratis dengan kerja sama oleh beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat maupun BNPB. Posduk DIY juga menerima Hibah Barang Milik Negara berupa Mobil Ambulan dan paket pemulasaran Jenazah dari BNPB.
- 4) Selain bersinergi dengan berbagai pihak dan masyarakat luas, Pemda DIY melalui BPTTG membuat rumah oksigen untuk melayani kebutuhan oksigen. Posduk DIY juga menerima berbagai bantuan, seperti Tabung Oksigen dan *Flow meter* dari KADIN INDONESIA.
- 5) Selalu melakukan sosialisasi serta penegakan peraturan dan penerapan prokes serta penguatan media publikasi dan peran media sosial.
- 6) Pemanfaatan media rambu portabel, rambu darurat atau *banner* informasi pengarah di titik simpang pada jalur lintasan utama dan alternatif.

B. JOGJA SMART PROVINCE

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dalam berbagai bidang memicu perubahan-perubahan besar yang bersifat masif dan global. Di satu sisi, pembangunan berbasis inovasi teknologi menghasilkan kemajuan-kemajuan penting yang meningkatkan kualitas hidup manusia, tapi pada saat yang sama, muncul pula eksese-eksese negatif yang kompleks. Terlepas dari kedua dampak tersebut, disadari bahwa kesadaran global tentang pembangunan sebagai upaya menuju kemajuan umat manusia terakselerasi dengan cepat dalam dua

dekade terakhir ini. Peningkatan tren ini ditunjukkan oleh bertambahnya fokus-fokus pembangunan global yang disepakati. Jika dalam *Millenium Development Goals* (MDGs) yang diinisiasi pada tahun 2000 ada 8 fokus pembangunan, maka dalam *Sustainable Development Goals* (SDG's) yang diluncurkan pada tahun 2015 terdapat 17 fokus. Pertambahan fokus ini menunjukkan meluasnya perhatian global terhadap isu-isu penting yang dihadapi umat manusia.

Pada saat yang sama, kemajuan teknologi memunculkan konektivitas yang sangat tinggi. Rantai nilai (*value chain*) yang terbangun menjadi bertambah kompleks dengan semakin banyaknya pelaku dan semakin rumitnya relasi antar pelaku. Seiring dengan itu, konektivitas juga menyebabkan problem menjadi saling terkait dan mempengaruhi. Problem juga bersifat multi sektoral dan multi *stakeholder*. Peningkatan kompleksitas permasalahan memaksa manusia untuk mencari pendekatan baru dalam menjalankan pembangunan, karena pendekatan tradisional yang bersifat sektoral dan berperilaku tunggal (*single actor*) tidak lagi mampu berfungsi dengan baik.

Dalam kajian-kajian literatur, persoalan pembangunan yang sangat kompleks tidak lagi bisa diselesaikan dengan pendekatan konvensional. Diperlukan pendekatan kontemporer untuk menyelesaikan problem-problem tersebut. Dalam beberapa literatur terkini, pendekatan smart *city/region* dapat memenuhi harapan tersebut. Boyd & Cohen (2013) mendefinisikan *Smart City* atau kota cerdas sebagai berikut.

“Sebuah pendekatan yang luas, terintegrasi dalam meningkatkan efisiensi pengoperasian sebuah kota, meningkatkan kualitas hidup penduduknya, dan menumbuhkan ekonomi daerahnya”

Definisi tersebut secara implisit menganut pendekatan komprehensif dalam memaknai persoalan kota dan mencari solusinya. Lebih lanjut, tujuan akhir dari pembangunan kota adalah untuk menumbuhkan ekonomi dalam rangka meningkatkan kualitas hidup warganya. Cohen membagi area pembangunan dalam *Smart City* ke dalam 6 domain: ekonomi (*economy*), lingkungan (*environment*), tata kelola (*governance*), kehidupan warga (*living*), mobilitas

penduduk (*mobilitas*), dan manusia (*people*). Pada akhirnya, kata “*smart*” sendiri mengindikasikan cara-cara baru dan inovatif yang didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Pemerintah DIY mengadopsi konsep *Smart City/Region* dan menyesuaikannya menjadi *smart province*. Orientasi kepada warga dan masyarakat, pendekatan komprehensif, dan cara inovatif berbasis TIK menjadi landasan untuk mengembangkan solusi-solusi bagi berbagai persoalan kompleks yang dihadapi oleh DIY. Dalam pandangan ini, konsep *Smart Province* diposisikan sebagai akselerator bagi arah, strategi, dan program-program pembangunan yang telah ditetapkan di RPJMD DIY 2017-2022. Sebagai akselerator artinya konsep *smart province* yang diterapkan harus mengacu pada spesifikasi RPJMD DIY 2017-2022, serta mampu menjadi pendorong yang kuat dalam mencapai tujuan dan sasaran pada RPJMD secara lebih cerdas (*smart*).

2. Progres sampai dengan Akhir Tahun 2021

Peraturan Gubernur DIY Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Rencana Aksi Daerah Jogja Smart Province Tahun 2019-2023 terdapat 407 solusi indikatif dalam Jogja Smart Province dengan masing-masing domain terdiri dari *Smart Governance* 306 solusi indikatif, *Smart Society* 46 solusi indikatif, *Smart Environment* 28 solusi indikatif, *Smart Culture* 15 solusi indikatif, dan *Smart Living* 12 solusi indikatif. Sampai tahun 2021 capaian solusi indikatif dalam Jogja Smart Province yaitu, 266 tercapai, 34 tercapai sebagian dan 107 belum tercapai. Dapat diketahui bahwa pencapaian terbanyak rencana aksi Jogja Smart Province di Provinsi DIY ada pada dimensi *Smart Governance*. Hal ini dikarenakan solusi indikatif yang ada pada dimensi *smart governance* memiliki irisan dengan *mandatory* indikator dari Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik yang setiap tahunnya dievaluasi oleh Kemenpan-RB sehingga memacu Pemda DIY untuk mengimplementasikan solusi indikatif tersebut. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa tata kelola pemerintah di Pemda DIY dalam mengendalikan pelayanan, birokrasi dan kebijakan sudah terlaksana dengan baik. Inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu juga telah

terlihat manfaatnya dalam mendukung penyelesaian isu - isu strategis pada *Jogja Smart Province*.



Gambar 6.1. Pencapaian Dimensi *Jogja Smart Province*
 Sumber: Diskominfo DIY, 2022

Jogja Smart Province menitikberatkan aspek perubahan pada 3 pilar utama yaitu struktur (sumber daya manusia, pembiayaan dan pengadaan), suprastruktur (kelembagaan, kebijakan dan proses kerja) dan infrastruktur (perangkat keras, perangkat lunak, dan data) digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dan isu strategis pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa Suprastruktur memiliki jumlah solusi indikatif terbanyak dibandingkan dengan elemen yang lain. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya bahwa elemen suprastruktur berkaitan dengan kebijakan, kelembagaan, dan tata laksana pengembangan *Jogja Smart Province* menjadikan elemen Suprastruktur memiliki solusi indikatif terbanyak dibandingkan dengan elemen yang lain. Hal ini dikarenakan dalam pengembangan *Jogja Smart Province* hadirnya kebijakan, kematangan suatu kelembagaan, dan kematangan tata laksana pengembangan *Jogja Smart Province* menjadi yang paling penting dan menjadi penggerak utama dalam keberhasilan *Jogja Smart Province*. Rencana aksi JSP tahun ke 2 diperlukan langkah awal yang harus ditetapkan pemerintah adalah menyakinkan bahwa

elemen suprastruktur harus sudah tercapai lebih dulu sebelumnya agar Jogja Smart Province dapat berkembang dengan baik dan tepat sasaran.

3. Permasalahan dan Solusi

Masa pandemi COVID-19 menjadi tantangan tersendiri untuk tetap terlaksananya sejumlah kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan COVID-19 beberapa kegiatan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan kegiatan *Jogja Smart Province* untuk tahun 2021 mengalami dampaknya. Terkait dengan adanya solusi indikatif yang kurang relevan maka dilakukan penyesuaian masterplan JSP sehingga lebih relevan dan mudah dipahami OPD.

Hasil observasi terkait implementasi rencana aksi *Jogja Smart Province* menunjukkan masih dibutuhkan perbaikan terhadap program dan pelaksanaan solusi indikatif seperti :

- a. Perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap masterplan JSP sehingga kontekstual dengan isu terkini, terutama terkait dengan SPBE Nasional dan kebijakan-kebijakan lain yang menyertai.
- b. Perlu dilakukan penyempurnaan terhadap solusi indikatif yang dirasa kurang relevan dengan perkembangan dari masa ke masa, dan bisa dipahami dengan lebih mudah oleh OPD penanggung jawab.
- c. Perlu dilakukan pemetaan pencapaian renaksi yang berbasis solusi indikatif terkait kontribusinya terhadap program dan kegiatan di dalam dokumen

C. REFORMASI BIROKRASI

1. Latar Belakang

Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan salah satu tujuan prioritas RPJMD DIY Tahun 2017-2022, sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Sampai dengan akhir RPJMD capaian tata kelola pemerintahan yang baik ditargetkan mencapai

Indeks Reformasi Birokrasi A (Memuaskan). Indeks Reformasi Birokrasi A mencerminkan birokrasi yang semakin memenuhi karakteristik organisasi berbasis kinerja bersih dan bebas dari KKN, akuntabel, serta profesional melayani. Oleh karena itu, pada seluruh perangkat daerah dilakukan penguatan delapan area perubahan yang meliputi manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan manajemen SDM aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

2. Progres sampai dengan Akhir Tahun 2021

Berdasarkan Indeks Reformasi Birokrasi yang diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2021, terdapat peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Pemda DIY dari tahun 2019 sebesar 80,02 pada kategori “A” menjadi 81,08 pada tahun 2020; pada kategori “A”, sekaligus telah memenuhi target akhir RPJMD. Sampai dengan Laporan ini disusun, Kementerian PAN dan RB RI belum menerbitkan Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2021. Capaian Indeks reformasi Birokrasi pemerintah Daerah DIY sebagaimana tabel berikut.

Tabel 6.8. Komponen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB) pada tahun 2020

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai 2020
I	Komponen Pengungkit		
1	Pemenuhan	20,00	16,87
2	Hasil Antara Area Perubahan	10,00	7,33
3	Reform	30,00	20,90
	Total Komponen Hasil	60,00	45,10
II	Komponen Hasil		
1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	14,00	9,31
2	Kualitas Pelayanan Publik	6,00	8,39
3	Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	7,00	9,33
4	Kinerja Organisasi	3,00	8,39
	Total Komponen Hasil	40,00	35,98
	Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)	100,00	81,08

Sumber: Kemenpan-RB, 2020

Terdapat tujuh unsur yang dinilai sebagai hasil antara dari capaian indeks RB di atas. Berdasarkan hasil evaluasi di tahun 2020, hasil indeks antara dari masing-masing instansi *leading sector* adalah sebagai berikut:

Tabel 6.9. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Birokrasi Tahun 2020

No	Hasil Antara	Nilai	Sumber Data
1	Kualitas Pengelolaan Arsip	89,39 (Memuaskan)	Arsip Nasional RI
2	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	50,00 (Kurang)	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI
3	Merit Sistem	324,00 (sangat baik)	Komisi Aparatur Sipil Negara
4	ASN Profesional	70,20 (Rendah)	Badan Kepegawaian Negara
5	Maturitas SPIP	3,11 (Terdefinisi)	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
6	Kapabilitas APIP	3,00 (Integrated)	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
7	Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	95,65 (Zona Hijau)	Ombudsman Republik Indonesia

Sumber: Biro Organisasi SETDA DIY, 2022

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemda DIY Tahun 2021 diatur menggunakan Pergub DIY Nomor 94 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 – 2024. Kebijakan implementasi Reformasi Birokrasi merupakan kebijakan yang bersifat adaptif, kolaboratif, sistemik dan partisipatif sebagaimana tercermin dalam *Road Map*. Beberapa agenda tahun 2021 antara lain penyederhanaan birokrasi, penyederhanaan regulasi/kebijakan, percepatan transformasi digital serta pengembangan *Corporate University*.

Terdapat 8 area Perubahan Reformasi Birokrasi Pemda DIY dengan capaian:

Tabel 6.10. Capaian 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi DIY

No	Area Perubahan	Capaian
1	Manajemen Perubahan	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi melalui <i>co reform space</i> Forum Agen Perubahan Pengukuran Dampak Budaya Satriya terhadap Tata Kelola Integrasi Agen Perubahan Budaya Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah DIY dan Tim Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
2	Deregulasi Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> Penataan Peraturan Perundangan

No	Area Perubahan	Capaian
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Rebuild “biro hukum” to be advocacy body</i> ▪ Harmonisasi Peraturan ▪ Sistem Informasi Produk Hukum ▪ Tindak lanjut UU Cipta kerja
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penataan kelembagaan berdasar <i>Performance Based Organization</i> ▪ Penyederhanaan birokrasi pada 231 jabatan, 9 eselon III dan 222 eselon IV ▪ Analisa beban kerja semua Perangkat Daerah dan Analisa kompetensi jabatan
4	Penataan Tatalaksana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Digitalisasi tata kelola pemerintahan (Perencanaan, Penganggaran, Monitoring, Pelaporan) – <i>JogjaPlan</i> ▪ Digitalisasi pelayanan publik- <i>Jogja Pass</i>, <i>EPosti</i>, <i>Jogja Library For All</i> (Jolifa), <i>Jogja Belajar Class</i>, <i>e-Lapor</i> ▪ ASB berbasis program/Proses Bisnis ▪ <i>Jogja Smart Province</i>, Tanda Tangan Elektronik ▪ SOP internal OPD ▪ PBJ berbasis <i>e-procurement</i>
5	Penataan Sistem MSDM Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Optimalisasi <i>Assessment Center</i> ▪ Penilaian ASN melalui <i>talent pool</i> ▪ BKN Awards Tahun 2017 , 2019 2020, 2021. ▪ KASN Award Tahun 2018 ▪ <i>Coorporate University</i> ▪ Apresiasi ketepatan waktu input Anjab ABK aplikasi SIMONA (Kemendagri) ▪ Penilaian Penerapan <i>Merit System</i> dengan hasil baik pada tahun 2018, 2020 sangat baik ▪ Penilaian kinerja diturunkan s.d. individu (Pergub 104/2016) ▪ E-SIMPEG ▪ E-SKP
6	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lintas SEKTOR ▪ <i>Refocusing</i> Program kegiatan ▪ Perencanaan berbasis kinerja ▪ <i>e-Budgeting</i> ▪ Penganggaran berbasis kinerja (<i>Jogjaplan</i>, <i>Jogjakendali</i>) ▪ e-evaluasi (Sungguh & e-LKPJ) ▪ DATA-KU ▪ <i>Decision Support System</i> (DSS)
7	Penguatan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zero kasus Tipikor ▪ 100 % Wajib Lapor LHKPN ▪ Kapabilitas APIP level 3 ▪ Maturitas SPIP 3,752 ▪ EWASDA
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TOP 99 dan TOP 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2021 ▪ <i>5 outstanding achievement of public service 2020</i> ▪ Kepuasan Masyarakat ▪ Forum Konsultasi Publik ▪ SIPP

Sumber: Biro Organisasi DIY (2021)

Pemda DIY pada tahun 2021 mendapat tambahan 4 (empat) unit kerja yang mendapatkan Penghargaan Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan 1 (satu) unit kerja pelayanan berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Perkembangan unit kerja pelayanan yang telah meraih Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) adalah sebagai berikut:

Tabel 6.11. Unit Kerja Pelayanan Predikat WBK/WBBM

No	Unit Kerja	Predikat	Tahun
1	Balai laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan DIY	WBK dan WBBM	2016 dan 2021
2	RS paru Respira Dinas Kesehatan DIY	WBK	2017
3	Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial Dinas Kesehatan DIY	WBK	2020
4	Balai Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan DIY	WBK	2020
5	Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman	WBK	2020
6	Badan Kepegawain Daerah DIY	WBK	2021
7	Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kota Yogyakarta	WBK	2021
8	Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Kulon Progo	WBK	2021
9	Balai Layanan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Arsip DIY	WBK	2021

Sumber: Biro Organisasi SETDA DIY, 2022

Pelaksanaan reformasi birokrasi terus dilakukan secara bertahap, terukur, lintas sektor melibatkan peran aktif OPD *leading sector* area perubahan secara berkelanjutan. Meskipun dalam situasi pandemi, upaya koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi oleh Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah DIY terhadap 37 OPD tetap intensif dilakukan. Upaya yang dilakukan antara lain pendampingan penyusunan rencana aksi Reformasi Birokrasi, pendampingan pengusulan Unit Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), serta layanan konsultasi dan pendampingan reformasi birokrasi. Pada akhir tahun 2021 telah dilaksanakan evaluasi capaian indeks reformasi birokrasi OPD dengan metode sebagai berikut:

- a. Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (bobot 20%) merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- b. Evaluasi Aspek *Reform* Perangkat Daerah (bobot 80%) diperoleh melalui pendalaman aspek-aspek perubahan yang sudah dilakukan.

Perkembangan Hasil Evaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel 6.12. Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

No.	Kategori	Nilai/Angka	Predikat	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	AA	>90 – 100	Istimewa		
2.	A	>80 – 90	Sangat Baik	20	22
3.	BB	>70 – 80	Baik	13	15
4.	B	>60 – 70	Cukup Baik	4	
5.	CC	>50 – 60	Cukup		
6.	C	>30 – 50	Buruk		
7.	D	0 – 30	Sangat Buruk		
Total				37	37

Sumber: Biro Organisasi SETDA DIY, 2022

Hasil evaluasi Tahun 2021 menunjukkan terdapat 22 Perangkat Daerah berkategori A (Sangat Baik), dan 15 Perangkat Daerah berkategori BB (Baik), 7 Perangkat Daerah berkategori B (Cukup Baik).

3. Permasalahan dan Solusi

Terdapat beberapa permasalahan yang masih memerlukan penanganan lebih lanjut antara lain:

- a. Kapasitas Tim Reformasi Birokrasi OPD dalam menggerakkan reformasi birokrasi belum merata
- b. Masih terdapat pelaksanaan reformasi birokrasi yang belum substantif menyentuh permasalahan kinerja OPD.

Terhadap beberapa permasalahan tersebut di atas, dilakukan langkah-langkah penyelesaian sebagai berikut:

- a. Melaksanakan reviu *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah DIY sehingga lebih adaptif, kolaboratif, sistemik dan partisipatif,

sebagaimana telah ditetapkan dalam Pergub DIY Nomor 94 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 – 2024.

- b. Meningkatkan intensitas koordinasi Tim Refromasi Birokrasi Pemda DIY.
- c. Meningkatkan intensitas pendampingan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan zona integritas kepada perangkat daerah.

D. PELABUHAN TANJUNG ADIKARTA

1. Latar Belakang

Tema visi RPJMD DIY tahun 2017-2022 yaitu Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja yang selaras dengan visi Gubernur DIY tahun 2017-2022. Diharapkan dengan adanya pembangunan dan operasional Tanjung Adikarta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat wilayah selatan. Pelabuhan ditargetkan dapat melayani nelayan dari seluruh DIY yang jumlahnya mencapai 3.643 orang pada tahun 2021 (*One Data KKP*, 2021). Berdasarkan SK Gubernur DIY No. 163/KEP/2017 tanggal 23 Agustus 2017 tentang Program Prioritas Pembangunan, Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarta merupakan salah satu infrastruktur yang menjadi prioritas untuk segera diselesaikan pembangunannya. Pelabuhan ini terletak di Kalurahan Karangwuni, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo.

Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarta bermula dari pra studi kelayakan 19 titik pendaratan ikan di DIY pada tahun 2000 selanjutnya disusun kajian studi kelayakan pelabuhan Tanjung Adikarta pada tahun 2001. Mulai tahun 2002 hingga 2005 disusun masterplan, DED, dan Amdal untuk proses pembangunan pelabuhan Tanjung Adikarta. Pembangunan awal pelabuhan dilaksanakan tahun 2006 dan dilakukan secara bertahap hingga tahun 2016. Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarta didesain untuk dapat memuat 400 kapal dengan 5.000 nelayan setiap tahun dengan produksi tangkapan sebesar 27.400 ton/tahun atau senilai 276 Miliar/tahun (Kamiso dkk, 2005).



Gambar 6.2. Tampak Atas Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarta
Sumber: Dislautkan DIY, 2022



Gambar 6.3. Fasilitas di Pelabuhan Tanjung Adikarta
Sumber : Dislautkan DIY, 2022

2. Progres sampai dengan Akhir Tahun 2021

Fasilitas fisik yang sudah dibangun sampai dengan tahun 2021 meliputi: Fasilitas darat (fasilitas fungsional dan penunjang) seperti kantor pelabuhan, kantor syahbandar, bengkel, gedung pelelangan ikan, gedung serbaguna, gedung ikan segar, masjid, depot perbekalan, doking kapal, pagar keliling, jalan lingkungan, pos jaga, dan perumahan karyawan; Fasilitas pokok untuk rantai pelabuhan dan dinding kolam.

Saat ini sudah ada ada review DED Pelabuhan perikanan Tanjung Adikarta tahun 2016 di mana ada beberapa alternatif untuk penyelesaiannya dengan penambahan panjang breakwater pada sisi timur dan sisi barat. Kemudian berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) bahwa penyelesaian pembangunan Tanjung Adikarta akan dikaji secara terintegrasi dengan Bandara YIA yang akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Harapannya kendala penyelesaian Pelabuhan Tanjung Adikarta dapat diminimalisir dan fungsi pelabuhan perikanan dapat beroperasi secara optimal. Pada 12 Maret 2021 sebagai tindak lanjut pertemuan Menkomarves, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perhubungan, dan Gubernur DIY, akan mengkaji ulang Pelabuhan Tanjung Adikarta secara terintegrasi dengan Bandara YIA.

Pendanaan Tanjung Adikarta berasal dari APBN dan skema pendanaan Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Saat ini sedang dilakukan proses penyatuan aset dari beberapa kementerian dan Pemerintah Daerah sehingga apabila aset sudah disatukan, maka pengadaan OBC (*Outline Business Case*) dan FBC (*Final Business Case*) akan dapat didanai oleh Bappenas.

Berdasarkan hasil kajian manajemen sedimentasi terdapat dua rekomendasi penyelesaian pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarta yaitu optimalisasi fasilitas perairan melalui kegiatan pengerukan dan optimalisasi fasilitas darat melalui penataan kawasan. Kegiatan pengerukan dilakukan rutin setiap tahun untuk mengatasi sedimentasi di alur masuk pelabuhan. Namun demikian pembuangan hasil kerokan masih perlu dikaji lebih lanjut. Sedangkan untuk penataan kawasan terdapat beberapa alternatif yang meliputi pembersihan lahan, perubahan siteplan, serta relokasi fasilitas.

3. Permasalahan dan Solusi

Saat ini Pelabuhan Tanjung Adikarta belum dapat digunakan karena kapal nelayan baik Perahu Motor Tempel (PMT) maupun sekoci tidak dapat masuk ke kolam pelabuhan. Hal ini disebabkan sedimentasi yang terjadi di pintu masuk alur pelabuhan. Sedimentasi tersebut terbentuk karena kondisi arus laut di pantai selatan yang dinamis sehingga sedimen pasir yang dibawa oleh

arus sungai bertemu dengan sedimen pasir yang berada di muara sungai. Sedimentasi juga terbentuk karena konstruksi *breakwater* masih belum memenuhi standar. Panjang *breakwater* sisi barat idealnya 350 m namun baru terbangun 250 m dan panjang *breakwater* sisi timur idealnya 390 m namun baru terbangun 220 m.

Untuk penyelesaian pembangunan *breakwater* dan fasilitas lainnya Pemda DIY telah mengupayakan beberapa alternatif antara lain :

- a. Melakukan percepatan proses pembiayaan pembangunan melalui skema KPBU, dalam hal ini Pemda DIY secara aktif berkoordinasi dengan Bappenas untuk dapat melanjutkan ke proses *Outline Bussines Case* (OBC) dan *Final Bussines Case* (FBC).
- b. Pembiayaan melalui APBN

Aset milik Kementerian PUPR di bawah Balai Besar Wilayah Serayu Opak (BBWSO) dengan nilai perolehan sebesar Rp233.062.632.780,- masih dalam tahap revaluasi nilai BMN (penilaian kembali) oleh Kementerian Keuangan yang nantinya akan disatukan menjadi aset Pemda DIY. Sedangkan aset milik Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dengan nilai perolehan sebesar Rp1.396.120.500,- saat ini sudah rusak dan belum ada tindak lanjut dari Kemenhub.

E. JOGJA AGRO PARK

1. Latar Belakang

Pembangunan *Jogja Agro Park* (JAP) dirancang untuk dapat menjadi kawasan percontohan pengembangan pertanian yang diharapkan berfungsi sebagai pusat inkubator pertanian terpadu. Sebagai pusat inkubator terpadu, JAP akan menjadi percontohan dari hulu ke hilir, mulai dari pembenihan/pembibitan sampai dengan pemasaran. Harapannya JAP dapat menjadi unit pembelajaran agribisnis dan lembaga pelatihan percontohan. Dalam mendukung fungsinya sebagai pusat inkubator pertanian, pusat pembelajaran dan pusat penumbuhan petani muda/milenial, JAP telah difasilitasi dengan beberapa sarana dan prasarana diantaranya: bangunan

kantor, area kandang (sapi, kambing, ayam, kelinci dan ikan), *green house*, gudang produksi dan alsintan, restoran, kolam ikan, kolam rekreasi, *landscape*, taman buah, biofarmaka, sayuran, dan taman bunga. Dengan berbagai fasilitas tersebut, JAP diharapkan dapat menumbuhkan berkembang wirausahawan agribisnis dan menjadi salah satu destinasi wisata pendidikan berbasis pertanian, serta mendukung tingkat kunjungan wisatawan di DIY pasca pembangunan bandara Yogyakarta Internasional Airport (YIA).

Pembangunan JAP merupakan program prioritas Gubernur DIY berdasarkan Kepgub DIY Nomor 353/KEP/2021 tentang Perubahan Atas Kepgub DIY Nomor 163/KEP/2017 tentang Program Prioritas Pembangunan. Pembangunan JAP dilakukan melalui peningkatan kualitas fisik bangunan dan lingkungan kawasan, yang diharapkan dapat menjawab permasalahan sektor pertanian di DIY. Beberapa permasalahan yang dihadapi sektor pertanian di DIY antara lain berkurangnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan, pendapatan petani yang relatif rendah, serta keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM pertanian.

Saat ini JAP mulai mendapat banyak kunjungan dari berbagai instansi dan pihak akademisi dari luar daerah, magang/PKL dari mahasiswa dan pelajar sekolah kejuruan pertanian disekitar DIY. Dari sisi produk pertanian dan peternakan yang mulai dihasilkan JAP, juga potensial dikembangkan meskipun pemasarannya masih terbatas di Pasar Tani DIY setiap hari Jumat. Produk hasil pertanian JAP merupakan produk berkualitas sebagai hasil dari budidaya sehat/ramah lingkungan yang mengarah pada budidaya organik dan konsep *zero waste*. Dengan potensi ini pengembangan JAP sebagai tempat agroeduwisata pertanian memerlukan perhatian khusus.

2. Progress Sampai dengan Tahun 2021

Operasional JAP dibiayai dengan APBD DIY Tahun Anggaran 2021 dengan pagu anggaran sebesar Rp3.178.949.200,-. Anggaran tersebut digunakan untuk rehab fisik JAP, dan operasional JAP. Operasional JAP meliputi pemeliharaan ternak, ikan, dan tanaman dengan rincian: ayam KUB 282 ekor, sapi PO 20 ekor, kambing PE 51 ekor, kelinci 45 ekor (*netherland dwarf* dan *dutch*), ikan nila, serta berbagai macam tanaman sayuran, tanaman

biofarmaka dan tanaman buah. Beberapa komoditas pertanian, peternakan, maupun perikanan menghasilkan produk-produk turunan yang dapat dijual kepada masyarakat umum seperti sayuran, biofarmaka, telur ayam, ikan konsumsi, dan anakan ternak. Hasil penjualan tersebut menjadi PAD bagi DIY.

Pada tahun 2021 JAP melakukan beberapa inovasi, seperti: bentuk pemasangan instalasi air untuk pengkabutan di *green house*, Aplikasi *Smart Farming* (sistem penyiraman otomatis yang terkoneksi dengan cctv dan internet), serta pemasaran hasil pertanian JAP di Pasar Tani DIY.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam mendukung pengelolaan JAP dari *on farm* sampai dengan *off farm* terkait dengan keterbatasan SDM, sarana prasarana yang sesuai dengan perkembangan teknologi, keterbatasan anggaran operasional, dan mekanisme pengelolaan aset dan BMD yang belum optimal. Beberapa area budidaya di kawasan JAP masih belum sesuai standar teknis, seperti: kurangnya drainase pembuangan air, sirkulasi/kelembaban udara area *green house*, belum adanya UPPO, belum adanya area penyemaian benih, bangsal pascapanen, serta unit pengolahan hasil pertanian. Beberapa bagian bangunan mulai mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan. Fasilitas umum seperti unit pengelolaan sampah, toilet, mushola, dan tanaman perindang masih belum tersedia. Hal ini memerlukan beberapa perbaikan dan pemeliharaan bangunan serta pengadaan sarana prasarana penunjang lainnya.

Solusi yang perlu dilakukan antara lain: 1) mereviu rencana pengembangan JAP sebagai pusat inkubator pertanian dan pusat pembelajaran dengan menyesuaikan konteks saat ini; dan 2) pemenuhan kebutuhan SDM untuk tenaga pendamping teknis pada tahun 2022 yang berjumlah 2 orang yaitu Pendamping Teknis Inkubator Agribisnis dan Pendamping Teknis Inkubator Edukasi Agrowisata.

F. BANDARA YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT

1. Latar Belakang

Bandara YIA merupakan bandara baru yang berada di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, DIY. Bandara ini memiliki peran yang cukup signifikan dalam mewujudkan konektivitas udara serta mendorong pertumbuhan wilayah DIY serta Pulau Jawa bagian selatan. Proses pembangunan Bandara YIA dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan bandara baru yang mampu memenuhi kebutuhan pengguna jasa bandara di DIY dan sekitarnya.

Secara bertahap Bandara YIA mulai beroperasi dengan diterbitkannya sertifikat Bandar Udara Bandara YIA dengan Nomor 149/SBU-DBU/IV/2019 oleh Direktorat Jenderal Bandar Udara (DJBU) Kementerian Perhubungan RI pada tanggal 26 April 2019. Selanjutnya pada tanggal 6 Mei 2019 bandara ini dibuka untuk operasional terbatas (*minimum operation*), kemudian pada 29 Maret 2020 beroperasi secara penuh (*full operation*). Akhirnya pada 28 Agustus 2020 Bandara YIA telah diresmikan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia.

Pasca beroperasi penuh pada tanggal 29 Maret 2020, seluruh penerbangan domestik dan internasional di Bandara Adisucipto Yogyakarta dipindahkan ke Bandara YIA. Perpindahan operasional penerbangan ini diiringi dengan dukungan aksesibilitas, seperti kesiapan moda transportasi yang membawa penumpang masuk dan keluar Bandara YIA.

Bandara YIA dilengkapi dengan fasilitas antara lain: terminal penumpang tiga lantai seluas 219.000 m² berkapasitas 20 juta penumpang per tahun, landas pacu (*runway*) sepanjang 3.250 x 45 m dengan *shoulder* (bahu *runway*) 15 m di setiap sisi. Spesifikasi *runway* ini mampu didarati pesawat berbadan besar seperti Boeing 777-300 dan Airbus A380. Adapun fasilitas Penyelamatan Kecelakaan Pesawat dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) di YIA masuk ke dalam Kategori 8. Bandara ini dilengkapi 5 unit *fixed bridge* dan apron seluas 371.205 meter persegi berkapasitas 22 *parking stand*. Luas terminal kargo YIA

adalah 12.000 m² dengan kapasitas 40.300 ton per tahun. Gedung parkir tiga lantai dengan luas area 137.280 m² mampu menampung ribuan kendaraan.

Sebagaimana Perpres Nomor 98 tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Bandar Udara Baru di Kabupaten Kulon Progo, bahwa Gubernur DIY sesuai kewenangannya memberikan dukungan yang diperlukan dalam pembangunan dan pengoperasian Bandara YIA.

Pada tahun 2021 pelayanan penumpang di Bandara YIA masih dilakukan dengan protokol kesehatan untuk menekan laju penyebaran COVID-19. Pemerintah menetapkan kebijakan Nasional dengan melakukan pembatasan mobilitas dan persyaratan melakukan perjalanan melalui moda transportasi udara. Pada masa pandemi COVID-19, Bandara YIA telah melayani penerbangan sebanyak 11.722 penerbangan per tahun dengan jumlah penumpang sebanyak 1.407.941 orang dan jumlah kargo sebanyak 6.803.188 kg. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, jumlah penerbangan yang dilayani mengalami penurunan sebesar 0,26 %, tetapi jumlah penumpang yang dilayani meningkat sebesar 17,43 %, sedangkan jumlah kargo yang dilayani juga meningkat sebanyak 0,82 %.

Tabel 6.13. Lalu Lintas Penerbangan di Bandara YIA Tahun 2020 - 2021

No	Lalu Lintas	Tahun 2020	Tahun 2021	Persentase
1	Pesawat (unit)	11.753	11.722	-0,26 %
2	Penumpang (orang)	1.198.962	1.407.941	17,43 %
3	Cargo (kg)	6.744.588	6.803.188	0,82 %

Sumber : Otoritas Bandar Udara Wilayah III Kemenhub Tahun 2021

2. Progres sampai dengan Tahun 2021

Kewenangan Pemda DIY dalam mendukung pembangunan YIA salah satunya dilakukan dengan menyusun *Master Plan* Kawasan pendukung Bandara (Aerotropolis), membangun infrastruktur pendukung seperti akses jalan, aksesibilitas Bandara YIA berbasis darat (angkutan jalan), aksesibilitas YIA berbasis rel (kereta api), pembangunan *VVIP Room* dan Pembangunan SPAM Regional Kamijoro.

Berikut ini adalah progres sampai dengan tahun 2021:

a. Aerotropolis

Aerotropolis dipersiapkan untuk pengembangan kawasan sekitar Bandara YIA. Di dalamnya sudah direncanakan dengan memperhatikan aspek seperti sosial-ekonomi, integrasi spasial, urban desain, kebijakan pemerintah, dan manajemen operasional. Sampai dengan Tahun 2021, persiapan perwujudan Aerotropolis terus dilakukan, termasuk dengan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas.

Dukungan aksesibilitas sangat penting karena saat ini Bandara YIA melayani penerbangan domestik dan internasional. Wujud dukungan tersebut yaitu dengan rencana pembangunan jalan tol Yogyakarta – Kulon Progo yang terintegrasi dengan ruas tol Trans Jawa. Jalan tol Yogyakarta – Kulon Progo ini akan terhubung langsung dengan Bandara YIA dengan simpang susun yang berada di sebelah utara jalan nasional Yogyakarta – Purworejo. Simpang susun ini selain menjadi akses langsung ke Bandara YIA, diharapkan juga menjadi akses utama pada kawasan Aerotropolis. Masterplan Aerotropolis yang telah disusun pada tahun 2019 perlu disesuaikan dengan trase jalan tol yang ditetapkan.



Gambar 6.4. Rencana TRASE JALAN TOL PADA KAWASAN SEKITAR Bandara YIA
Sumber : DPUP-ESDM DIY

b. Akses Jalan

Dalam rangka mendukung akses jalan Bandara YIA, pada tahun 2021 telah dilakukan peningkatan ruas jalan Brosot – Toyan sepanjang 2 km. Untuk menunjang aksesibilitas Bandara YIA ke Candi Borobudur, telah dilakukan peningkatan jalan Sermo – Klepu dan peningkatan jalan Klepu - Siluwok, sebagai jalan akses Bedah Menoreh menuju Bandara YIA.

c. Layanan Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Menuju Bandara YIA

Salah satu upaya Pemda DIY dalam mendukung dan memudahkan mobilisasi masyarakat menuju Bandara YIA yaitu berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat menyediakan layanan angkutan umum baik berbasis jalan ataupun rel. Adapun layanan angkutan berbasis jalan meliputi layanan Angkutan Dalam Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan layanan bus DAMRI menuju Bandara YIA yang merupakan penugasan dari Pemerintah Pusat. Layanan AKDP yang melayani mobilitas ke Bandara YIA meliputi :

- 1) Trayek Palbapang – Bandara YIA;
- 2) Trayek Bandara YIA – Gamping – Ring Road Barat – Terminal Jombor – Komplek Pemda Sleman - Sleman City Hall.

d. Layanan Angkutan Umum Berbasis Rel Menuju Bandara YIA

Selain layanan angkutan umum berbasis jalan, Pemda DIY dan Pemerintah Pusat memberikan layanan angkutan umum berbasis rel yaitu layanan Kereta Api Bandara yang telah beroperasi mulai 1 September 2021. Layanan kereta api bandara dapat diakses pada 2 stasiun yaitu stasiun Yogyakarta dan Stasiun Wates sebanyak 10 trip layanan.

Operasional kereta api bandara untuk relasi Yogyakarta –Bandara YIA dimulai pada pukul 05.00 WIB dan yang terakhir adalah 18.00 WIB sedangkan untuk relasi sebaliknya dimulai pada pukul 06.11 WIB dan terakhir 19.15 WIB. Layanan angkutan kereta bandara merupakan salah

satu bentuk program Pemda DIY dalam mewujudkan integrasi antar moda dari moda udara ke moda darat terutama berbasis rel.

e. VVIP Room

Terminal VIP merupakan salah satu standar fasilitas bandara YIA. Fasilitas tersebut berfungsi sebagai tempat transit bagi para tamu VVIP dan VIP. Rencana pengembangan terminal VIP tercantum pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1164 Tahun 2013 Tanggal 11 November 2013. Berikut ini beberapa rencana pengembangan terminal VIP Bandara YIA:

- 1) Tahun 2022 akan dilakukan Review DED Pembangunan *VIP Room* Bandara YIA.
- 2) Konstruksi Gedung Terminal VIP YIA direncanakan akan menjadi prioritas untuk diselesaikan pada tahun anggaran 2023. Biaya pelaksanaan pekerjaan pada Kegiatan Dana Keistimewaan (DAIS) DIY melalui Program Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten, dan Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo.

f. SPAM Regional Kamijoro

Pembangunan SPAM Regional Kamijoro direncanakan akan melayani Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo termasuk Bandara YIA dengan kapasitas produksi sebesar 475 liter/detik. Pembangunan SPAM regional Kamijoro dilakukan melalui skema pembiayaan Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Pembagian air curah dari SPAM Regional Kamijoro ke Kabupaten Kulon Progo yaitu sebesar 286 liter/detik dan 189 liter/detik ke Kabupaten Bantul.

Sedangkan bangunan *intake* dengan kapasitas 500 liter/detik telah dibangun oleh Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) di Bendung Kamijoro yang telah diresmikan pada tahun 2019. Untuk unit produksi sampai dengan *reservoir* pembagi masing-masing kabupaten direncanakan akan dibangun dan dioperasikan oleh Badan Usaha Pelaksana.

Hingga tahun anggaran 2021, Pemda DIY telah mengadakan lahan untuk satu *reservoir* di Kabupaten Bantul. Sedangkan, kebutuhan lahan untuk satu *reservoir* di Kabupaten Bantul, rumah *booster* di Kabupaten Bantul, dan jalur pipa di Kabupaten Kulon Progo direncanakan akan diadakan lahannya pada Tahun Anggaran 2022.

Untuk saat ini Bandara YIA sudah dilayani oleh PDAM Kab. Kulon Progo dengan sistem yang ada di IPA Sapon sebesar 14 liter/detik. Sedangkan kebutuhan air Bandara YIA saat penumpang mencapai ultimate adalah sebesar 60 liter/detik.

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Rencana akses menuju tol Yogyakarta-Kulon Progo serta rencana akses jalan menuju bedah Menoreh belum dituangkan ke dalam *masterplan* Aerotropolis.
- 2) Pada kolom struktur konstruksi terminal VIP terdapat besi tulangan terbuka yang rawan korosi mengingat lokasi karena *site* berada di tepi pantai.
- 3) Belum adanya kesepakatan tarif air curah pada masing-masing PDAM baik Kabupaten Kulon Progo maupun Kabupaten Bantul.
- 4) Masih adanya kecelakaan di sekitar ruas jalan Bandara YIA (Jalan Karang Nongko/batas Prov. JATENG – Toyan) yaitu sebesar 1,92 kejadian/km.
- 5) Layanan angkutan umum langsung dari Kabupaten Gunungkidul menuju Bandara YIA saat ini belum tersedia.
- 6) Adanya aktivitas Angkutan Sewa Khusus (ASK) yang sering parkir di badan jalan menyebabkan terhambatnya akses keluar masuk bandara.

b. Solusi

- 1) Melakukan review akses tol Yogyakarta-Kulon Progo dan rencana akses jalan bedah Menoreh agar dapat dituangkan ke dalam *Masterplan* Aerotropolis.

- 2) Percepatan proses pembangunan terminal VIP bandara YIA agar besi tulangan terbuka pada kolom struktur konstruksi dapat segera diantisipasi.
- 3) Pemda DIY mengajukan *addendum* waktu dan penambahan ruang lingkup kajian di hilir serta *business plan* untuk kedua PDAM *offtaker* kepada Kementerian Keuangan sebagai penyedia fasilitas penyiapan proyek dan pelaksanaan transaksi Proyek KPBU SPAM Regional Kamijoro dan terus melaksanakan koordinasi dengan masing-masing Pemerintah Kabupaten serta *stakeholder* lainnya untuk penyelesaian permasalahan tersebut.
- 4) Melakukan manajemen rekayasa lalu lintas melalui *Area Traffic Control System* (ATCS) dan *Intelligent Transportation System* (ITS) untuk mengurangi kemacetan dan tundaan kendaraan di simpang bersinyal pada jalan akses Bandara YIA. Melakukan sosialisasi keselamatan lalu lintas dan penegakan hukum lalu lintas bersama instansi terkait di sekitar Bandara YIA.
- 5) Menyediakan layanan angkutan umum antarmoda dari Kabupaten Gunungkidul menuju Bandara YIA guna mengurangi volume lalu lintas kendaraan bermotor pribadi. Menambah Jam Operasional Keberangkatan Kereta Bandara dengan menyesuaikan lalu lintas penerbangan pada Bandara YIA. Mengoptimalkan Stasiun Maguwo sebagai *transfer point* ke Bandara YIA.
- 6) Penyusunan studi kelayakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo mengenai *transit point* bagi penumpang AKAP dan AKDP diruas Jalan Nasional. *Transit point* ini memiliki status tanah kas desa dan mendorong BUMDES untuk optimalisasi tanah tersebut sebagai *transit point* untuk layanan AKAP, AKDP dan ASK. Penyediaan layanan *shuttle* yang menghubungkan *transit point* menuju ke terminal keberangkatan.

G. PENATAAN KAWASAN SUMBU FILOSOFI

1. Latar Belakang

Kawasan Sumbu Filosofi merepresentasikan mahakarya jenius kreatif Pangeran Mangkubumi sebagai Sri Sultan Hamengku Buwono I dalam merencanakan dan mendirikan ibu kota Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat pada abad ke-18. Tata kota dengan penanda kawasan berupa poros lurus dari selatan ke utara yang menghubungkan Panggung Krapyak – Kraton – Tugu, dirancang untuk mewujudkan pemikiran Jawa secara material tentang siklus hidup manusia dan kehidupan harmonis di dunia. Konsep dasar, yang secara nyata diwujudkan dalam bentuk fisik penanda kawasan tersebut, telah dibentuk sepanjang sejarah Jawa sejak sebelum abad ke-1 Masehi, melalui interaksi jangka panjang dan pertukaran nilai, kepercayaan, dan gagasan manusia, termasuk ajaran Animisme, Hindu, Buddha dan Islam.

Letak Kraton dan kota tersebut sengaja dipilih oleh Pangeran Mangkubumi agar sesuai dengan kepercayaan kosmologis Jawa, ibu kota kerajaan dianggap sebagai miniatur alam semesta (makro kosmos), mengikuti konsep Hindu-Budha tentang Ketuhanan. Gunung Meru (pusat alam semesta fisik, metafisik, dan spiritual). Penanda sumbu filosofi Yogyakarta disusun sepanjang garis lurus arah selatan-utara mengikuti tradisi Hindu-Buddha kuno di belahan bumi selatan. Penempatan penanda tersebut merupakan perwujudan material yang luar biasa dari pemikiran filosofis masyarakat Jawa tentang kehidupan manusia, khususnya siklus kehidupan (*Sangkan Paraning Dumadi*) dan kehidupan harmonis yang ideal (*Hamemayu Hayuning Bawana*) dan menyatunya rakyat dengan rajanya (*Manunggaling Kawulo lan Gusti*). Semua penanda dari Panggung Krapyak di selatan hingga Kraton di tengah dan Tugu di utara mewakili perjalanan filosofis siklus kehidupan manusia sejak awal konsepsi kehidupan, kelahiran, kedewasaan, hingga penyatuan kembali jiwa dengan Sang Pencipta.

Kraton sebagai bagian utama dari Sumbu Filosofi dihubungkan melalui ritual dan makna sakral, dengan Panggung Krapyak dan Tugu. Posisi, tata letak, dan desain monumen, istana kerajaan, dijiwai dengan makna simbolis dan, bersama dengan tradisi yang hidup, memberikan bukti tentang kerajaan dan

peradaban Jawa dengan hierarki sosial dan struktur kekuasaan yang ketat. Upacara, ritual, dan hukum adat serta sistem pengelolaan yang terkait dengan warisan budaya baik benda maupun takbenda dipelihara oleh Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat sejak berdirinya Kasultanan dan masih dilaksanakan hingga saat ini, tidak hanya oleh Keraton tetapi juga masyarakat luas di Yogyakarta.

Berdasarkan hal tersebut, maka Yogyakarta ditetapkan sebagai *City of Philosophy*. Dengan penetapan ini diharapkan upaya melestarikan nilai luhur yang dapat diwariskan kepada masyarakat Yogyakarta, bangsa Indonesia dan dunia. Untuk mewujudkan Yogyakarta sebagai *City of Philosophy* salah satunya dengan menjadikan Yogyakarta sebagai Warisan Budaya Dunia (*World Heritage*). Yogyakarta memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh *The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) menjadi Kota Warisan Dunia. Nilai-nilai yang menjadi kriteria *Outstanding Universal Value* diantaranya adalah :

- a. Merupakan mahakarya serta kreativitas manusia yang mencerminkan perencanaan pusat kota dengan menggambarkan siklus hidup manusia, mulai dari awal kehidupan sampai dengan kembali ke Tuhan.
- b. Perencanaan pusat kota yang dirancang berdasarkan filosofi Jawa yang merupakan produk dari interaksi budaya yang panjang antara budaya asli dan peradaban lainnya terutama Hindu dan Islam.
- c. Komponen utama dari Yogyakarta sebagai Kota Sejarah secara nyata adalah dengan mewujudkan kosmologi Jawa dan kepercayaan tradisional mengenai sifat-sifat kehidupan manusia, diantaranya sangkan paraning dumadi, manunggaling kawula Gusti dan *hamemayu hayuning bawana*.
- d. Sebagai Kota Sejarah, secara langsung atau nyata terkait dengan peristiwa atau tradisi yang berlaku, dengan gagasan dan atau keyakinan, dengan karya seni dan sastra yang memiliki nilai penting keyogyakartaan

Ketiga Filosofi tersebut menjadi dasar yang kuat berlandaskan sistem religi, kebudayaan, sosial dan interaksi antar ketiga sistem. DIY juga memiliki aspek keunggulan khas dari sisi kebudayaan yang sudah diakui secara nasional dan tercantum dalam Undang-Undang Keistimewaan DIY.

2. Progres Sampai Dengan Tahun 2021

Penataan Kawasan Sumbu Filosofi, sampai dengan tahun 2021 disampaikan sebagai berikut:

a. Penyusunan Naskah, Studi, Kajian dan Sosialisasi yang sudah dilaksanakan:

1) Penyusunan Naskah Yogyakarta Warisan Budaya Dunia

Penyusunan Naskah Nominasi (*Dossier*) dilaksanakan sejak tahun 2017 setelah usulan Pemda DIY dengan tema nilai penting sumbu filosofi (*Historical City Centre of Yogyakarta*) masuk dalam daftar *tentative list* UNESCO. Kawasan Sumbu Filosofi menjadi satu kesatuan nilai penting dengan Kompleks Makam raja di Imogiri, sehingga dua Kawasan ini selanjutnya menjadi satu kesatuan nilai penting yang tidak terpisahkan sebagai area yang dinominasikan, dengan tema : *The Cosmological Axis of Yogyakarta and Its Historic Landmarks*. Area nominasi ini termasuk dalam kategori lanskap kota bersejarah yang memiliki signifikansi lokal, regional, nasional, dan internasional. Naskah nominasi ini terus berproses, setelah *World Heritage Centre* UNESCO mengirim review untuk menjadi bahan perbaikan naskah. Perbaikan naskah nominasi hasil review terakhir dari UNESCO sudah terkirim kembali ke WHC.

2) Penyusunan Naskah *Management Plan* Yogyakarta Warisan Budaya Dunia

Sumbu Filosofi sebagai bagian dari area yang dinominasikan menjadi warisan dunia UNESCO, memerlukan persyaratan kedua setelah Naskah Nominasi, yaitu Naskah/Dokumen Rencana Pengelolaan (*Management Plan*). Kedua naskah/dokumen tersebut merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak dapat dipisahkan.

Secara khusus, Naskah Rencana Pengelolaan (*Management Plan*) area nominasi warisan dunia merupakan dokumen panduan utama untuk pengelolaan cagar budaya. Dokumen ini mengidentifikasi nilai-nilai warisan-atau signifikansi - suatu tempat termasuk *Outstanding Universal Value (OUV)*, kebijakan pelestarian yang akan diterapkan untuk melindungi nilai penting dalam menghadapi perubahan, dan strategi yang akan digunakan dalam menjalankan kebijakan tersebut.

3) **Penyusunan Peta Kawasan Nominasi Yogyakarta Warisan Budaya Dunia**

Salah satu proses dalam pengajuan kawasan Sumbu Filosofi sebagai *World Heritage* (Warisan Dunia) diperlukan penyajian data dasar berupa peta. Peta kawasan Sumbu Filosofi menunjukkan batas-batas, unsur-unsur, dan atribut secara lengkap dan detil yang menjelaskan sejarah dan hubungan spasial pada kawasan nominasi warisan dunia yang diusulkan.

4) **Kajian Lansekap Kota Bersejarah**

Kota Yogyakarta yang dibangun beralaskan konsep filosofi tinggi menjadi sarat dengan makna filosofi. Nilai penting Kawasan Sumbu Filosofi juga terkait dengan keberadaan kawasan-kawasan cagar budaya lain yang berada di DIY. Terutama penanda-penanda bangunan dan situs yang tersebar di sepanjang Sumbu Filosofi memiliki nilai penting historis, arkeologis, arsitektural, estetis yang harus bermanfaat bagi kepentingan pendidikan, pariwisata dan kebudayaan.

Pemda DIY bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengusulkan Kota Yogyakarta yang memiliki nilai filosofis tinggi ini untuk menjadi salah satu Kota Warisan Budaya Dunia oleh UNESCO. Sejak ditetapkannya Yogyakarta sebagai *Tentative List* Warisan Budaya Dunia oleh UNESCO, segala upaya telah dikerahkan agar mampu mewujudkan Yogyakarta sebagai

Warisan Budaya Dunia. Upaya ini dilakukan tidak semata-mata demi pengakuan sebagai Warisan Dunia dari UNESCO akan tetapi yang lebih penting adalah demi pelestarian cagar budaya dan nilai budaya yang ada.

Untuk menjaga keberlangsungan pelestarian ini diperlukan pendekatan *Historic Urban Landscape* ke dalam perencanaan dan strategi pembangunan ke depan. Historic Urban Landscape sendiri menurut UNESCO (2011) merupakan kawasan perkotaan yang dipahami sebagai hasil dari lapisan sejarah nilai dan atribut budaya serta alam, melampaui pengertian “pusat bersejarah” atau “ansambel” untuk memasukkan konteks perkotaan yang lebih luas beserta latar geografisnya. Artinya dengan pendekatan ini, kita memahami kawasan cagar budaya tidak sebatas pada pelestarian fisik, akan tetapi juga pelestarian lingkungan, *intangible heritage*, keragaman budaya, sosial ekonomi dan keberlangsungan komunitas lokal.

5) Studi Kesiapan Yogyakarta Menuju Warisan Budaya Dunia

Upaya menyiapkan Yogyakarta sebagai warisan budaya dunia, baik dari sisi substansi materi pengusulan, maupun pengampu dan pelaksana yaitu pemerintah dan penerima manfaat dalam hal ini masyarakatnya, diperlukan data dan informasi tentang kesiapannya dalam merespon kegiatan ini. Situasi dan kondisi terkini dengan keberadaan kawasan cagar budaya, atribut di dalam area nominasi beserta segala nilai, makna dan filosofi yang terkandung di dalamnya memerlukan kesiapan dalam menyamakan persepsi dan pendapat di semua *stakeholders*. Informasi dan pemahaman yang tepat, serta bentuk pemanfaatan dan kemanfaatan yang akan diterima oleh masyarakat, akan diketahui melalui studi kesiapan ini. Hasil rekomendasi dari studi ini menjadi bahan penting untuk pertimbangan pengambilan kebijakan tahapan proses kegiatan pengusulan Yogyakarta menjadi warisan budaya dunia. Hal ini juga dibarengi dengan upaya mendiseminasi pengelola yang akan

melakukan tahapan-tahapan tersebut, yaitu Dinas Kebudayaan DIY, c.q. UPTD Balai Pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofi, melalui Studi Kesiapan Yogyakarta menuju Warisan Budaya Dunia.

6) Studi *Branding* Balai Pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofi

Branding Sumbu Filosofi diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat yang berada di kawasan sumbu filosofi khususnya dan masyarakat DIY pada umumnya mengenai Yogyakarta Sebagai Warisan Budaya Dunia. Pengertian *branding* menurut Wikipedia adalah proses penciptaan atau peninggalan tanda jejak tertentu di benak dan hati konsumen melalui berbagai cara yang memberikan dampak bagi kehidupan konsumen tersebut. Konsumen ini merupakan masyarakat di wilayah Kawasan Sumbu Filosofi sehingga mereka mengetahui secara detail tentang sumbu filosofi yang di usulkan Sebagai Warisan Budaya Dunia.

7) Sosialisasi Yogyakarta Warisan Budaya Dunia

Upaya dukungan untuk pengusulan Yogyakarta sebagai warisan dunia ke UNESCO, merupakan salah satu bagian penting dari keseluruhan upaya penyiapan Yogyakarta Menuju Warisan Dunia. Sosialisasi pengenalan terhadap penanda-penanda di kawasan sumbu filosofi beserta makna, nilai penting dan urgensi pengajuan, merupakan langkah strategis untuk mendukung pengusulan Yogyakarta Warisan Dunia.

Diharapkan masyarakat Yogyakarta dan masyarakat yang berada di Kawasan Sumbu Filosofi mampu berperan serta dalam pengusulan Yogyakarta Warisan Dunia. Peran masyarakat tersebut, terutama dalam upaya mempertahankan citra kawasan dan dukungan positif pada saat pengajuan mencapai tahapan visitasi dan penilaian oleh UNESCO. Pada akhirnya, Masyarakat Yogyakarta yang sudah mengetahui dan memahami tentang pengusulan Yogyakarta sebagai Warisan Dunia akan terkondisi ketika tim UNESCO akan mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang sejauh mana peran

serta masyarakat dalam mendukung pengusulan tersebut. Hal tersebut sangat mendukung untuk kelancaran dan kesuksesan pengusulan.

8) Penyelenggaraan Pendampingan Pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofi

Penyelenggaraan pendampingan pengelolaan kawasan sumbu filosofi ini merupakan kegiatan seminar dan konsinyering lintas OPD di wilayah Pemda DIY, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul (OPD yang terkait dengan wilayah Kawasan Sumbu Filosofi) untuk mereview dan menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi terhadap progress Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan DIY yang terkait dengan Rencana Induk Terintegrasi di kawasan Sumbu Filosofi.

Pendampingan secara substantif dilakukan oleh Kemendikbudristek dalam hal materi usulan yang akan disampaikan ke *World Heritage Council* (WHC).

9) Publikasi dan Promosi Kawasan Sumbu Filosofi

Merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofi dengan memanfaatkan media cetak, elektronik, radio, dan televisi untuk menginformasikan tentang Kawasan Sumbu Filosofi yang berada di antara Panggung Krapyak-Kraton-Tugu Pal Putih sebagai mahakarya Hamengku Buwono 1 untuk diajukan menjadi Warisan Budaya Dunia di UNESCO. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat tidak hanya mengenai atribut fisik akan tetapi juga makna dan nilai filosofis yang ada pada kawasan ini.

10) Pengelolaan Sumbu Filosofi *Heritage Track*

Pada tahun 2021, kegiatan *heritage track* bertujuan untuk membuat panduan tentang rute perjalanan wisata terutama di Kawasan Sumbu Filosofi. Di Kawasan Sumbu Filosofi sangat banyak

ditemukan tempat-tempat yang bisa mendukung pariwisata Yogyakarta, baik wisata budaya, wisata alam, wisata gastronomi, wisata belanja dan lain-lain.

Kegiatan ini membuat suatu rangkaian rute baik ditempuh dengan kendaraan umum, kendaraan pribadi, sepeda maupun jalan kaki. untuk mempermudah memahami tempat-tempat wisata tersebut perlu di bantu oleh pemandu yang berkompeten, sehingga dilakukan rekrutmen dan pembekalan pemandu *Heritage Track*, *forum grup discussion* untuk penentuan rute, simulasi, dan evaluasi.

11) Penataan dan Pembangunan Berbagai Sarana Pendukung (DPU)

Bangunan tempat relokasi PKL di Eks. Bioskop Indra ini merupakan salah satu bagian dari konsep penataan PKL di JL. Malioboro yang terintegrasi dengan galeri UMKM di Eks. Hotel Mutiara. Konsep penataan PKL ini menjadi bagian komitmen antara Pemda DIY, Pemerintah Kota dan pelaku usaha untuk mewujudkan Kawasan Malioboro menjadi salah satu destinasi wisata budaya.

Rencana pemindahan pedagang kaki lima (PKL) dilakukan bersama antara Pemda DIY melalui Dinas Koperasi dan UKM DIY dan Pemkot Yogyakarta. Untuk Tempat Relokasi PKL di Eks Bioskop Indra disiapkan penataannya oleh Dinas Koperasi dan UKM DIY dengan melakukan penataan los-lok kios dan penataan terhadap listrik pada bangunan A (Area Kering) dan untuk Gedung B, C, dan D (Area Kuliner) dilakukan pemasangan lampu dan keran air. Gedung Tempat Relokasi PKL di Eks Bioskop Indra, rencananya akan diresmikan pada Januari 2022 dengan nama Teras Malioboro 1. Selanjutnya Pemkot Yogyakarta melakukan penataan untuk area di eks. Dinas Pariwisata DIY (berada di samping utara Gedung DPRD DIY) dengan membangun bangunan sementara untuk para pedagang, yang kemudian disebut Teras Malioboro 2.

12) Toilet Titik Nol

Toilet Titik Nol pada kawasan Sumbu Filosofis bertujuan untuk menjaga keberlangsungan pelayanan publik di Kawasan Malioboro dan untuk menjaga kenyamanan pengunjung. Dalam rangka mengelola dan memelihara fasilitas tersebut dilaksanakan Kegiatan Jasa Pengelolaan dan Pemeliharaan Toilet Titik Nol dengan realisasi anggaran sebesar Rp439.520.220,- dan kegiatan Pemeliharaan Toilet Titik Nol realisasi anggaran sebesar Rp54.530.000,- pada tahun anggaran 2021. Fasilitas publik Toilet Titik Nol ini diantaranya memiliki beberapa ruang 12 kubikal toilet wanita (6 kloset duduk dan 6 kloset jongkok), 6 kubikal toilet pria dan 10 urinoir, 1 toilet difabel, dan 1 ruang laktasi serta lift khusus difabel. Selain itu toilet tersebut dilengkapi dengan sistem IPAL *Redox Advanced Oxydation Process*, AC, Alarm, Tata Suara dan CCTV. Dalam masa pandemi COVID-19 terdapat penyesuaian pelayanan Toilet Titik Nol, diantaranya terkait jam operasional karena penurunan jumlah pengunjung dibanding tahun sebelumnya dan, penyesuaian kebutuhan operasional berkaitan dengan protokol kesehatan (tissue, *handsanitizer*, pengukuran suhu tubuh, penggunaan masker, dsb).

Dalam pengelolaan Toilet Titik Nol saat ini telah dilakukan perbaikan pada kerusakan pintu masuk, serta pemeliharaan rutin penggantian lampu, pemeliharaan CCTV dan penggantian televisi monitor CCTV yang rusak, pemeliharaan *sound system*, pemeliharaan *fire alarm*, *smoke detector* dan pengisian ulang APAR, pemeliharaan AC dan pemeliharaan peralatan air bersih dan penyediaan *handsanitizer* otomatis, dengan harapan meningkatkan kenyamanan pengguna toilet.

b. Rehabilitasi Pedestrian Malioboro

Demonstrasi pada tanggal 8 Oktober 2020 di seputaran Gedung DPRD DIY, menyebabkan kerusakan fasilitas umum *street furniture* dan fasilitas umum lain yang tersedia. Menindaklanjuti hal tersebut telah

dilakukan pendataan terhadap kerusakan-kerusakan yang ada di Malioboro pada tahun 2020 dan Rehabilitasi Pedestrian Malioboro dilakukan pada tahun 2021. Fasilitas yang diperbaiki meliputi tempat sampah, kayu kursi sandaran, krat tanaman, lantai andesit, *bollard*, dan pohon asem. Perbaikan fasilitas dilakukan untuk menjaga pedestrian Malioboro sebagai ruang terbuka yang memenuhi kenyamanan, keselamatan dan kemudahan.

c. Pemeliharaan Bangunan Cirebon dan Cendrawasih

Bangunan Cirebon dan Cendrawasih merupakan bangunan cagar budaya yang terletak di muka depan atau sisi timur Tempat Relokasi PKL di Eks Bioskop Indra. Dalam rencana pemanfaatan gedung tempat relokasi PKL di Eks Bioskop Indra pada tahun 2022, diperlukan bangunan untuk pengelola dalam melaksanakan aktivitas harian. Sehingga untuk dapat dipergunakan, Gedung Cirebon dan Cendrawasih yang saat ini dimiliki oleh Pemda DIY perlu diperbaiki. Pekerjaan renovasi yang dilakukan berupa pengecatan dinding dan ornament bangunan serta perbaikan lainnya yang dibutuhkan sehingga layak dan nyaman untuk digunakan.

d. Dokumen Perencanaan dan *Appraisal* Pengadaan Tanah Akses Penghubung Tempat Parkir Beskalan dan Eks Bioskop Indra

Pada tahun 2021 ini dilaksanakan pekerjaan Dokumen Perencanaan dan *Appraisal* Pengadaan Tanah Akses Penghubung Tempat Parkir Beskalan dan Eks Bioskop Indra. Pekerjaan ini bertujuan mempermudah akses sirkulasi dari tempat parkir yang sudah disediakan oleh Pemda DIY di Parkir Beskalan serta mampu meningkatkan aktivitas perekonomian di bangunan Eks Bioskop Indra.

e. Penataan dan Pengendalian Lalu Lintas di Kawasan Semi Pedestrian Malioboro

Pemantauan Penerapan Semi Pedestrian Malioboro merupakan bagian dari pengawasan dan pengendalian lalu lintas di Kawasan Sumbu Filosofi. Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan melalui

mekanisme penegakan hukum maupun tindakan persuasif yang didukung oleh Petugas Jogo Margo sebanyak 72 orang.

Menindaklanjuti rapat koordinasi forum lalu lintas sumbu filosofi, pada tahun 2021 telah diadakan kegiatan penegakan hukum lalu lintas di kawasan sumbu filosofis melalui operasi non yustisi yang melibatkan unsur terkait yaitu Kepolisian, Dinas Perhubungan, Polisi Pamong Praja dengan hasil ditemukan 81 pelanggaran dan kepada pelanggar diberikan tindakan Tilang dan Surat Peringatan. Secara rinci jumlah pelanggaran tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 6.14. Hasil Penegakan Hukum Lalu Lintas di Kawasan Sumbu Filosofi

PELANGGARAN				
Parkir	Rambu/Marka	Contra Flow	Teknis	Jumlah
34	16	21	0	81

Sumber : Dinas Perhubungan DIY, 2021

Selain melakukan penegakan hukum tersebut diatas, dilaksanakan juga kegiatan pengawasan ketertiban lalu lintas di kawasan sumbu filosofi. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh petugas Jogo Margo di sepanjang Kawasan Sumbu Filosofi. Pengawasan ketertiban lalu lintas Kawasan Sumbu Filosofi Tahun 2021 ditemukan 116 pelanggaran yang terdiri dari 82 pelanggar roda 2 dan 34 pelanggar roda 4. Penindakan yang dilakukan berupa Teguran Persuasif.

Mengacu studi Perencanaan Penataan Transportasi Kawasan Malioboro (2014) dan menindaklanjuti uji coba manajemen dan rekayasa lalu lintas yang telah dilaksanakan pada tahun 2020, maka pada tahun 2021 telah dilaksanakan penerapan manajemen rekayasa lalu lintas yaitu :

- 1) Penerapan Giratori di luar kawasan Malioboro secara permanen pada kurun waktu 24 jam;
- 2) Pemberlakuan Semi Pedestrian Jalan Malioboro selama kurun waktu 3 jam yaitu mulai pukul 18.00 sd 21.00 WIB;
- 3) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada simpang Kleringan, dilaksanakan bekerjasama dengan Pemerintah Kota Yogyakarta serta pihak terkait lainnya.

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Masih kurangnya informasi dan *missperception* di masyarakat tentang program pengusulan Yogyakarta sebagai warisan budaya dunia.
- 2) Belum optimalnya koordinasi lintas OPD (Pemda DIY dan Pemkot) dalam pengelolaan kawasan sumbu filosofi
- 3) Belum optimalnya sumber daya pengelola nominasi kawasan warisan budaya dunia
- 4) Dengan adanya rencana pemindahan pedagang kaki lima dari selasar pertokoan Malioboro, maka wajah toko akan terlihat dan dimungkinkan akan ada kekosongan pada sepanjang selasar Malioboro.
- 5) Persiapan sumbu filosofi sebagai Warisan Budaya Dunia memerlukan dukungan infrastruktur sarana dan prasarana kawasan seperti penataan aktivitas wisata, pengelolaan jalur sirkulasi (giratori) dan infrastruktur kawasan lainnya.

b. Solusi

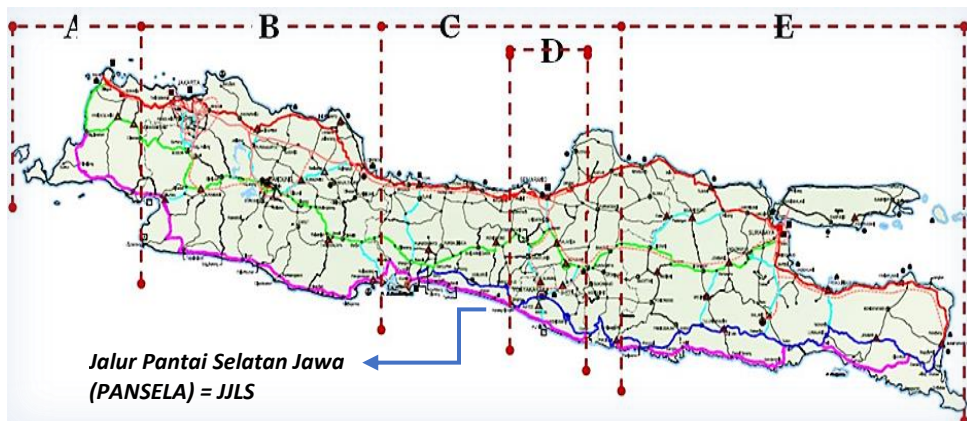
- 1) Meningkatkan kapasitas pengetahuan dan informasi tentang Kawasan Sumbu Filosofi dan pengelolaannya, kepada semua *stakeholder* yang terkait dan masyarakat umum. Peningkatan ini dilakukan secara terstruktur dalam berbagai bentuk kreatifitas dan media.
- 2) Meningkatkan peran Balai Pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofi, Dinas Kebudayaan DIY selaku UPT yang memiliki fungsi koordinasi dan sinergi pengelolaan di Kawasan Sumbu Filosofi. Pembentukan tim pengambil kebijakan pengelolaan sampai tim teknis antar pemerintah daerah/Kabupaten/Kota.
- 3) Peningkatan kapasitas SDM Pengelola kawasan warisan dunia melalui kerja sama kementrian dan lembaga yang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam pelatihan-pelatihan, Bimtek dan bentuk lainnya.

- 4) Perlu adanya rencana penataan wajah Malioboro terutama pada fasad pertokoan untuk memberi kenyamanan dan keamanan pengunjung saat melintasi Malioboro.
- 5) Kesiapan dukungan sarana prasarana tersebut memerlukan sinergi dan harmonisasi antar OPD di lingkungan Pemda DIY dan *stakeholder* terkait.

H. PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN LINTAS SELATAN

1. Latar Belakang

Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) merupakan salah satu upaya mendukung aksesibilitas di wilayah DIY untuk menekan ketimpangan pembangunan di DIY, terutama wilayah bagian selatan. Jalur Jalan lintas Selatan diharapkan menjadi pemicu (*triger*) bagi pusat-pusat pertumbuhan baru (*new emerging growth center*) di kawasan selatan, sekaligus menjadi penyeimbang pertumbuhan ekonomi wilayah dan mengurangi kesenjangan antar wilayah.



Gambar 6.5. Peta Jalur Jalan Lintas Selatan di Pulau Jawa
Sumber: DPUPESDM DIY, 2021

Dalam rangka mewujudkan pengembangan wilayah khususnya pembangunan jalan JJLS telah disepakati antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam hal pembagian tanggung jawab dan yang menjadi kewajiban masing-masing diatur sebagai berikut :

- a. Pemerintah Daerah baik kabupaten setempat maupun DIY sesuai kemampuan keuangan daerah tiap tahunnya mengalokasikan anggaran untuk pembebasan tanah, tanam tumbuh/ Karangkitri maupun bangunan.
- b. Pemerintah Pusat dalam hal ini lewat Kementerian Pekerjaan Umum berkewajiban membangun fisik konstruksi jalan berikut bangunan pelengkap pada lokasi yang tanahnya telah dibebaskan oleh Pemerintah Daerah.

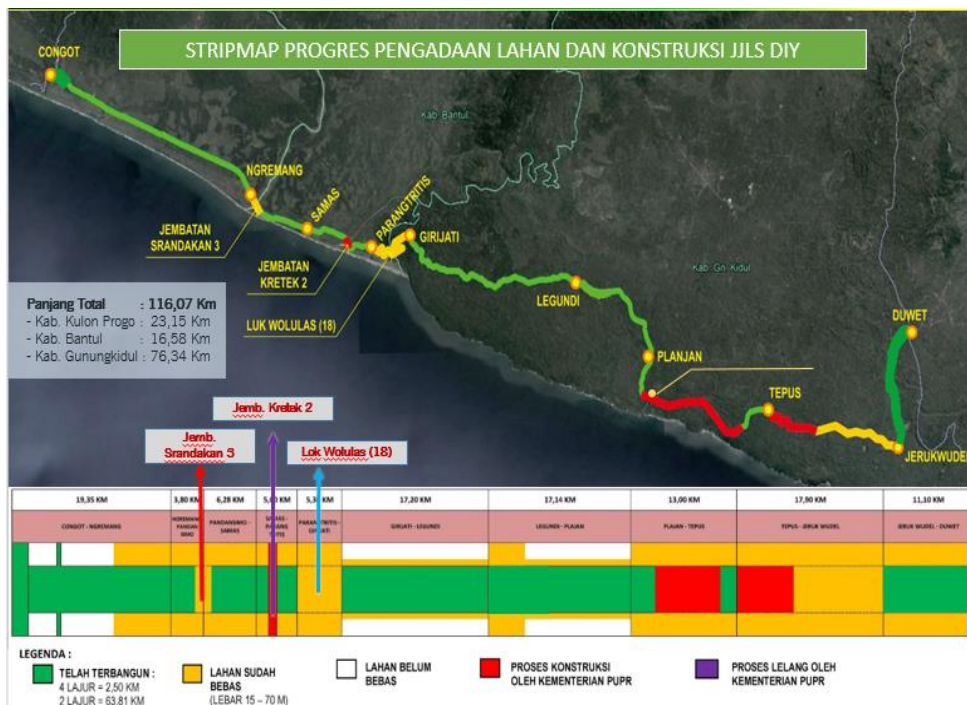
Infrastruktur jalan sebagai kebutuhan dasar yang diperlukan sebagai layanan dan fasilitas dalam menunjang perekonomian, sosial dan budaya dapat berfungsi dengan baik. Jaringan jalan sebagai prasarana transportasi memiliki kedudukan yang sangat penting dan strategis dalam rangka mendukung terciptanya aksesibilitas arus manusia, barang dan jasa secara meluas di seluruh wilayah. Pengembangan sarana dan prasarana jalan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) sepanjang 116,07 km meliputi 3 Kabupaten yaitu Gunungkidul (76,34 km), Bantul (16,58 km) dan Kulon Progo (23,15 km) yang dapat digambarkan sebagai berikut,

Trase jalan JJLS DIY dimulai dari ujung barat Congot (Kabupaten Kulon Progo) yang berbatasan dengan kabupaten Purworejo (Jawa Tengah) dan berakhir di ujung timur di Desa Duwet (Kabupaten Gunungkidul) yang berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah). Rute JJLS di Kabupaten Kulon Progo meliputi Congot – Ngremang – Jembatan Srandakan 3 sepanjang 23,15 km. Adapun rute JJLS di Kabupaten Bantul melalui Pandansimo – Samas - Parangtritis – Girijati sepanjang 16,58 km. Sedangkan rute JJLS di Kabupaten Gunungkidul rute yang dilalui adalah ruas jalan Girijati – Tlogowarak – Klampok – Legundi – Planjan – Tepus – Jerukwudel – Baran – Duwet 76,34km.

2. Progress Sampai dengan Tahun 2021

Pembangunan JJLS di DIY dilakukan secara bertahap berupa pembebasan lahan dan pelaksanaan konstruksi. Pada tahap sebelumnya telah dilakukan pembebasan lahan selebar 30 m untuk rencana pembangunan jalan 4 lajur, sebagai tahap pertama telah dibangun jalan dengan tipe jalan 2 (dua) lajur dengan lebar 7 m. Sampai dengan akhir tahun 2021, dari target

pembebasan tanah seluas 3.771.128 m² telah dapat dibebaskan seluas 2.600.374 m² (68,95%). Sedangkan untuk pembangunan konstruksi jalan dari target 116,07 km, telah diselesaikan sepanjang 75,89 km (65,38%). Dari pembangunan jalan tersebut, sepanjang 2,6 km diantaranya telah mempunyai lebar 14m (dari Congot kearah timur 2 km dan dari arah Duwet ke arah barat 0,6 km). Sedangkan untuk ruas lainnya masih dengan lebar perkerasan 7 m.



Gambar 6.6. Progres Pembangunan JJLS pada Sepanjang Wilayah Selatan DIY
 Sumber: DPUPESDM DIY, 2021

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan JJLS, Pemda DIY telah melaksanakan serangkaian kegiatan demi terwujudnya pembangunan JJLS sepanjang 116,07 Km. Serangkaian kegiatan tersebut dimulai dari tahap perencanaan, persiapan dan pelaksanaan pengadaan tanah. Dalam tahap perencanaan, proses yang harus dilaksanakan antara lain: sosialisasi kepada intansi terkait dan masyarakat yang terdampak, melaksanakan pemberkasan, dan menyusun Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah. Selanjutnya dalam tahapan persiapan, proses yang harus dilaksanakan antara lain: penetapan

tim persiapan, sosialisasi kepada masyarakat yang terdampak, konsultasi publik, dan penerbitan IPL oleh Gubernur. Setelah tahapan persiapan, tahapan selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, proses yang harus dilakukan antara lain: penetapan tim pelaksana pengadaan tanah, inventarisasi dan identifikasi, pengumuman daftar nominatif dan peta bidang, dilaksanakan verifikasi dan perbaikan daftar nominatif dan peta bidang, pelaksanaan penilaian harga tanah (appraisal), musyawarah bentuk ganti kerugian, pelepasan hak atas tanah, dan pembayaran ganti kerugian. Hingga pada akhirnya dilaksanakan proses pensertifikatan yang akan diserahkan kepada warga yang terdampak jika tanahnya sebagian terkena, dan menjadi aset pemerintah daerah jika tanah yang terkena adalah seluruhnya. Semua tahapan pembebasan lahan menggunakan dana keistimewaan. Karena kegiatan tersebut merupakan kewenangan tata ruang untuk Satuan Ruang Strategis keistimewaan. Pada anggaran 2021, telah dialokasikan dana untuk kegiatan sebagai berikut :

a. Perencanaan Pembebasan Lahan untuk Segmen Legundi – Planjan (Lanjutan; 9,5 km)

Segmen Legundi – Planjan memiliki panjang rencana 17,14 km. Dari total panjang tersebut, sepanjang 4,70 km telah dibebaskan untuk memenuhi rencana 4 lajur, sehingga masih terdapat 12,44 km yang harus dibebaskan agar lebar rencana 4 lajur dapat terpenuhi. Menindaklanjuti Dokumen Perencanaan Tahap II untuk Segmen Legundi-Planjan tahap 2 (segmen Planjan – Karangasem & Planjan – Kemadang), diusulkan untuk melaksanakan IPL Segmen Legundi (Kemadang) – Planjan. Tetapi pada BA Perubahan Tahap I karena adanya refocusing, untuk TUK tersebut tidak dilanjutkan. Karena TUK tersebut tidak dilanjutkan dan masih ada sebagian lahan yang belum terbebaskan untuk 2 lajur sepanjang 700 m dan sekaligus 4 lajur, maka disusunlah Ijin Penetapan Lokasi (IPL) pada Simpang Bundaran Planjan pada tahun 2021.

b. Persiapan Pembebasan Lahan untuk Segmen Garongan-Congot (Lanjutan; 8,89 km)

Ruas Jalan Segmen Garongan-Congot telah tersambung karena telah terdapat jalan eksisting. Meskipun demikian ruas jalan tersebut belum memenuhi syarat untuk kebutuhan lebar desain 4 lajur. Sehingga perlu dilakukan pembebasan lahan pada sisi luar jalan eksisting. Sampai dengan akhir tahun 2021, telah terselesaikan pembayaran ganti rugi pengadaan tanah untuk segmen Garongan-Congot yang terlaksana seluas 52.790 m².

Tabel 6.15. Jadwal Rencana Pelaksanaan Pembebasan Lahan JJLS DIY Segmen Garongan - Congot

NO.	URAIAN	TAHUN ANGGARAN								KETERANGAN
		s.d. 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1.	Dokumen Perencanaan									
2.	IPL									IPL 2019 - 2022
3.	Appraisal									
4.	Pembayaran									
5.	SPS (Pensertipikatan Tanah)									



Sudah Terlaksana



On Progress



Rencana

Sumber : Dinas PUPESDM DIY, 2021

Selain 2 kegiatan tersebut di atas, Pemda DIY melalui Dana Keistimewaan melaksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan pembebasan lahan dan pembangunan JJLS yaitu :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah JJLS untuk: Segmen Legundi - Planjan tahap 2 (segmen Planjan - Karangasem & Planjan - Kemadang).
- 2) Pendaftaran Sertifikat Tanah/SPS di Gunungkidul.
- 3) Pengadaan dan Pemasangan Tanda Batas Rumija JJLS.
- 4) IPL Simpang Bundaran Planjan (Segmen Legundi – Planjan).
- 5) Pembebasan Tanah JJLS: Segmen Garongan-Congot seluas 52.790m²
- 6) Proses pensertipikatan tanah JJLS di Kulon Progo.

- 7) Pengadaan dan Pemasangan Tanda Batas Rumija JJLS Ngremang – Garongan.
- 8) Pensertifikatan Tanah JJLS Pandansimo - Parangtritis.
- 9) Daftar nominatif untuk pengadaan tanah tambahan JJLS Segmen Kretek-Girijati

Tabel 6.16. Ringkasan progress pembebasan lahan dan konstruksi Jalur Jalan Lintas Selatan DIY

No	Ruas	Panjang (km)	Pembebasan Lahan				Konstruksi		Keterangan
			2 lajur		4 lajur		2 lajur (km)	4 lajur (km)	
			Bebas (km)	Belum Bebas (km)	Bebas (km)	Belum Bebas (km)			
I	Kab. Kulon Progo	23,15	23,15	-	16,10	7,05	23,15	2,00	
1	Cogot - Ngremang	19,35	19,35	-	12,30	7,05	19,35	2,00	Pembebasan Segmen Cogot – Garongan (2021 – 2022)
2	Ngremang Pandansimo	- 3,80	3,80	-	3,80	-	3,80	-	
II	Kab. Bantul	16,58	16,58	-	16,58	-	7,22	-	
3	Pandansimo Samas	- 6,28	6,28	-	6,28	-	4,58	-	
4	Samas Parangtritis	- 5,00	5,00	-	5,00	-	2,64	-	Fase Konstruksi Jembatan Kretek 2 (2,015 km)
5	Parangtritis Girijati	- 5,30	5,30	-	5,30	-	-	-	
III	Kab. Gunungkidul	76,34	76,34	0,70	46,70	29,64	48,74	0,50	
6	Girijati - Legundi	17,20	17,20	-	-	17,20	17,20	-	
7	Legundi Planjan	17,14	16,44	0,70	4,70	12,44	17,14	-	
8	Planjan - Tepus	13,00	13,00	-	13,00	-	3,30	-	Fase Konstruksi 2 lajur : 9,725 Km
9	Tepus - Jerukwudel	17,90	17,90	-	17,90	-	-	-	
10	Jerukwudel Duwet	- 11,10	11,10	-	11,10	-	11,60	0,50	
	Panjang Total	116,07	115,37	0,70	79,38	36,69	79,11	2,50	
	Persentase Terhadap Panjang Total		99,40 %	0,60 %	68,39 %	31,61 %	68,16 %	2,15%	

Sumber : Dinas PUPESDM DIY, 2021

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Kendala proses pensertifikatan tanah JJLS pada pembebasan lahan diantaranya (1) belum tersedianya peta pembebasan tanah sebagai salah satu syarat pensertifikatan; dan (2) lamanya waktu yang dibutuhkan untuk proses pensertifikatan menyebabkan masih adanya pembebasan tanah yang dilakukan tahun sebelumnya belum terselesaikan proses pensertifikatnya.
- 2) Skala pembangunan JJLS yang luas membutuhkan lahan yang sangat besar. Sehingga pembangunan konstruksinya memerlukan perencanaan yang detail dengan tahapan yang berkesinambungan. Kondisi tersebut mengakibatkan kebutuhan anggaran yang besar.

b. Solusi

- 1) Pemda DIY perlu menyediakan Peta Pembebasan Tanah yang komprehensif untuk mendukung proses sertifikasi tanah JJLS.
- 2) Meningkatkan koordinasi dan sinergi lintas sektor Pemda DIY dengan BPN/Kantor Pertanahan yang berwenang untuk penerbitan sertifikat untuk penyelesaian permasalahan sertifikasi, khususnya sertifikasi tanah JJLS.
- 3) Dalam rangka penyelesaian konstruksi jalan 4 lajur diperlukan perencanaan dan penganggaran yang berkelanjutan untuk menyelesaikan pembebasan lahan dan konstruksi.

I. PEMBANGUNAN TAMAN BUDAYA SE DIY

1. Latar Belakang

Kebudayaan merupakan salah satu pilar utama keistimewaan DIY. Kebudayaan menjadi salah satu urusan yang diamanahkan dalam Undang-Undang Keistimewaan. Banyaknya even seni dan budaya yang dilaksanakan baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat memerlukan ruang yang representatif agar even seni budaya menjadi lebih berkualitas. Taman Budaya sebagai salah satu tempat pelaksanaan even seni budaya bagi semua pelaku

seni budaya di DIY. Dengan banyaknya agenda seni budaya yang dilaksanakan di DIY, tentu saja membutuhkan sarana dan prasarana yang mencukupi.

Pemda DIY telah melaksanakan pembangunan ruang seni di kabupaten/kota se-DIY antara lain balai budaya di desa-desa budaya dan Taman Budaya di kabupaten/kota. Selanjutnya, Pembangunan Taman Budaya di kabupaten/kota menjadi prioritas Pemda DIY untuk memenuhi kebutuhan ruang apresiasi seni dan budaya dalam rangka memajukan kebudayaan. Keberadaan Taman Budaya di Kabupaten/Kota diharapkan dapat menumbuhkembangkan aktivitas kebudayaan lokal dan mengenalkan ruang ekspresi yang lebih representatif dalam upaya mewujudkan DIY sebagai Pusat Kebudayaan terkemuka di Asia Tenggara. Selain itu dapat mendorong kegiatan berdimensi kebudayaan lebih merata dan akhirnya dapat mendukung aktivitas perekonomian wilayah melalui aktivitas kebudayaan.

2. Progres sampai dengan Tahun 2021

Progres pembangunan taman budaya di wilayah kabupaten/kota se-DIY adalah sebagai berikut:

Tabel 6.17. Progres Pembangunan Taman Budaya se-DIY

No.	Lokasi	Tahun	Uraian
1.	Taman Budaya Yogyakarta	2021	Pelaksanaan Kajian Materi Teknis Pusat Pengembangan Kebudayaan (PPK) Yogyakarta. Penyusunan dokumen materi teknis perencanaan PPK yang memuat konsep, arahan, pedoman dari aspek-aspek strategis yang akan menjadi acuan perencanaan dan pembangunan PPK. Materi tersebut akan diserahkan kepada Dinas PUP-ESDM DIY untuk dilakukan review dan pelaksanaan tahapan selanjutnya dalam pembuatan Master Plan serta DED PPK
2	Taman Budaya Kabupaten Kulon Progo	2021	Taman Budaya Kulon Progo telah selesai dibangun (2019)sudah beroperasi untuk kegiatan seni budaya di Kabupaten Kulonprogo Khususnya serta DIY pada Umumnya
3	Taman Budaya Kabupaten Gunungkidul	2021	Taman Budaya Gunungkidul yang dibangun secara <i>multiyears</i> , tahun 2021 ini memasuki tahun ke-3, dimana realisasi hasil pekerjaan fisik konstruksi secara keseluruhan nilai kontrak 100 %. Untuk mengelola Taman Budaya Gunungkidul telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Taman Budaya Gunungkidul berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2021 tanggal 28 Juli 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Budaya Gunungkidul. Pembentukan UPT Taman Budaya Gunungkidul dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Ayat (4c) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur

No.	Lokasi	Tahun	Uraian
			<p>Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan.</p> <p>Unit Pelaksana Teknis Taman Budaya Gunungkidul merupakan unsur pelaksana teknis pada Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Gunungkidul yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pelayanan, pengembangan, pemasaran, dan kerja sama seni budaya daerah</p>
4.	Taman Budaya Kabupaten Sleman	2021	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembebasan lahan tahun 2021 seluas 2.395 m² dengan anggaran Rp 4.454.700.000,-, ▪ Sayembara Desain Taman Budaya Sleman oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman) ▪ Penyusunan Detail Engineering Desain (DED) oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman)
5.	Taman Budaya Kabupaten Bantul	2021	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sosialisasi pembebasan lahan Sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2021 bertempat di Balai Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pajangan dengan mengundang 19 pemilik tanah yang terdampak pembangunan Taman Budaya Bantul. ▪ Pemberkasan ukur ulang Pengukuran ulang wajib dilaksanakan sebagai dasar pembayaran atas tanah yang akan dibebaskan. Proses pengumpulan berkas para pemilik tanah diberi batas waktu sampai akhir bulan Maret 2021. Setelah berkas terkumpul kemudian dikirimkan ke BPN Bantul untuk dilaksanakan proses ukur ulang. ▪ Ukur ulang. Proses ukur ulang dilaksanakan oleh BPN Bantul untuk memastikan kesesuaian ukuran tanah yang tertera di sertifikat dengan kondisi riil di lokasi. Proses pengukuran ulang disaksikan oleh unsur Dinas Kebudayaan, unsur pemerintah Kalurahan Sendangsari dan pemilik tanah. Dari hasil ukur ulang luasan total berubah dari 49.090 m² menjadi 49.105 m². ▪ Appraisal ulang harga tanah berdasar hasil ukur BPN Karena terdapat perbedaan luasan lahan antara yang tertera di sertifikat dengan hasil ukur ulang BPN maka perlu dilakukan penyesuaian harga tanah perbidangnya. Dalam hal ini penyesuaian harga dilakukan oleh konsultan appraisal yang melakukan appraisal tanah sebelumnya. Hasil appraisal ulang harga tanah total berubah dari Rp. 25.587.000.000, menjadi Rp. 25.615.000.000,00. ▪ Sosialisasi hasil ukur ulang dan appraisal ulang Setelah mendapatkan hasil ukur ulang dari BPN dan hasil appraisal ulang maka pada tanggal 21 Juli 2021 kembali dilakukan sosialisasi kepada 19 pemilik tanah. ▪ Pemberkasan proses pembayaran Setelah semua pemilik tanah dapat menerima hasil ukur ulang dan perubahan harga perbidangnya maka pada tanggal 28 Juli 2021 dilakukan pertemuan kembali untuk melengkapi berkas-berkas dan persyaratan pembayaran. ▪ Pembayaran pembebasan tanah

No.	Lokasi	Tahun	Uraian
			<p>Pembayaran dilaksanakan setelah proses pengukuran ulang dan penyesuaian harga tanah per bidang disetujui oleh pemilik tanah. Proses transfer ke rekening kepada 19 pemilik dilaksanakan pada tanggal 29-30 Juli 2021 dan 3 Agustus 2021 dengan total pembayaran sebesar Rp. 25.615.000.000,00</p> <ul style="list-style-type: none"> Proses pensertifikatan tanah <p>Sampai dengan akhir Desember 2021 sedang dilaksanakan proses peralihan hak atas tanah di BPN Bantul dari pemilik lama ke Pemerintah Kabupaten Bantul.</p>
6	Taman Budaya Kota Yogyakarta	2021	<ul style="list-style-type: none"> Reviu DED Pengembangan <i>Aquatic Science Park</i> Taman Pintar dengan Pembangunan Taman Budaya di Kawasan Embung Giwangan Addendum AMDAL Pengembangan <i>Aquatic Science Park</i> Taman Pintar dengan Pembangunan Taman Budaya di Kawasan Embung Giwangan

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2021



Gambar 6.7. Foto Udara Delineasi Rencana Lokasi Pembangunan Taman Budaya Bantul
Sumber: Disbud DIY 2022

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan pembangunan taman budaya, khususnya di Kabupaten Bantul terjadi karena adanya perbedaan luas lahan setelah dilakukan ukur ulang oleh Badan Pertanahan Nasional.

Sebagai solusi permasalahan tersebut yaitu dengan melaksanakan *appraisal* ulang dan sosialisasi hasil ukur ulang terhadap pemilik lahan yang akan dibebaskan.

J. PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT BERTARAF INTERNASIONAL - RSUD WATES

1. Latar Belakang

Pengembangan dan pembangunan RSUD Wates dengan tujuan sebagai fasilitas penunjang keberadaan Bandara Yogyakarta International Airport (YIA). RSUD Wates dirancang sebagai rumah sakit pendidikan sekaligus sebagai pusat rujukan yang unggul menuju pelayanan berstandar internasional. Beberapa fasilitas pendukung yang dibangun antara lain fasilitas Gedung Medik Terpadu, Gedung Rawat Inap, Asrama dan Apartemen yang berfungsi menjadi tempat magang dan pelatihan bagi tenaga medis. Pembangunan RSUD Wates mendapat dukungan melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemda DIY tahun 2018 - 2020.

Hasil pembangunan dan pengembangan RSUD Wates mulai dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat Kulon Progo dan sekitarnya bahkan dari luar DIY baik pasien umum maupun maternal dan perinatal. BOR (*Bed Occupation Rate*) atau angka keterisian tempat tidur di tahun 2021 (di masa pandemi) tercatat 27,15%. Adapun LOS (*Average Length of Stay*) atau angka rata-rata lamanya pasien dirawat adalah 3,57 hari.

Terhadap keberadaan dan beroperasionalnya Bandara Yogyakarta International Airport (YIA), dukungan RSUD Wates berupa layanan preventif maupun promotif. Diantaranya adalah kegiatan vaksinasi massal COVID-19 untuk karyawan YIA dan pelayanan Kir Kesehatan karyawan YIA. Layanan kegawatdaruratan bedah dan jantung disiapkan sejak penjemputan menggunakan ambulans yang dilengkapi alat, sarana prasarana *Emergency* dan penanganan kegawatdaruratan dan perawatan intensif di RSUD Wates. Selain itu disiapkan pula Pelayanan Mini ICU di Bandara YIA untuk melayani kedatangan pejabat publik apabila terjadi kegawatdaruratan.

2. Progres Sampai dengan Tahun 2021

a. Pemanfaatan Bangunan dan Jenis Layanan

1) *Gedung Medik Terpadu*

- Lantai I dimanfaatkan untuk pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD), Rawat Jalan (Poliklinik), Pendaftaran, Laboratorium, Radiologi, Farmasi dan Kassa. Pengadaan alat kesehatan pada Poliklinik bersumber dari dana BKK Pemda DIY. Selama tahun 2021 tercatat ada 28.972 kunjungan yang didominasi oleh pasien jantung dengan persentase 80%.
- Data jumlah kunjungan di Instalasi Laboratorium, Instalasi Radiologi dan Instalasi Farmasi tercatat sebanyak 151.943 orang.
- Data pasien Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Wates tahun 2021 tercatat sebanyak 8.768 kasus. Tindak lanjut kasus yang mendapat perawatan sebanyak 2674 orang sedangkan sisanya dirujuk atau pulang.
- Lantai II dimanfaatkan untuk pelayanan Rawat Jalan (Poliklinik), Ruang Bersalin dan Kamar Operasi IGD.
- Data jumlah kunjungan Poliklinik (penerima alat kesehatan BKK) selama tahun 2021, sebanyak 9503 orang dengan jumlah kunjungan terbesar di klinis Obsgyn. Kamar Operasi IGD saat ini belum operasional.
- Lantai III dimanfaatkan untuk pelayanan Ruang Intensif, Instalasi Bedah Sentral (IBS). Ruang Perawatan Intensif dewasa, anak dan bayi, terdiri dari 29 tempat tidur dengan jumlah pasien yang dirawat sebanyak 641 pasien. Jumlah pasien yang mendapatkan penanganan di IBS dengan kasus pasien operasi sebanyak 1644 pasien.

2) Gedung Rawat Inap

Gedung Baru, meliputi:

- Ruang Rawat Inap Kelas I terdiri dari 27 tempat tidur berada di lantai I dan II
- Ruang Rawat Inap Kelas II terdiri dari 28 tempat tidur berada di lantai I dan II
- Ruang Rawat Inap Kelas III terdiri dari 36 tempat tidur, berada di lantai I dan II
- Ruang rawat inap VIP dan VVIP di lantai III Gedung Rawat Inap baru belum operasional, dikarenakan belum adanya alat kesehatan dan SDM. Efek rujukan berjenjang dan masa pandemi ini jumlah pasien RSUD Wates juga menurun, sehingga Ruang rawat inap VIP dan VVIP belum dikembangkan/dioperasionalkan.

Gedung Lama, meliputi:

- Ruang Rawat Inap Isolasi penerima Alat Kesehatan dengan dana BKK dan Hibah terdiri dari 44 tempat tidur:
- Gedung Asrama Mahasiswa mempunyai 32 kamar lengkap dengan kamar mandi dalam, AC dan Televisi serta dapat menampung mahasiswa maksimal sejumlah 128 orang/ per kamar 4 orang. Direncanakan telah dapat menampung mahasiswa yang melakukan praktik klinis di RSUD Wates sehingga mahasiswa tidak perlu lagi mencari penginapan atau kost .
- Seiring dengan terjadinya wabah COVID-19 sampai saat ini, Asrama Mahasiswa belum digunakan karena pembelajaran dilakukan dengan sistem online.
- Saat ini Asrama Mahasiswa digunakan untuk Rumah Singgah Tratai (RST) sebagai tempat untuk isolasi bagi Pasien covid 19 yang OTG (Orang Tanpa Gejala) dan mess sementara bagi TNI dan POLRI yang melaksanakan tugas pendampingan tenaga kesehatan di Kulon Progo.

Gedung Apartemen (2 lantai)

- Gedung apartemen terdapat 8 ruang tipe 36 dengan 1 kamar dan 4 tipe 45 dengan 2 kamar sehingga total kamar tersedia ada 16 kamar . Perencanaan awal peruntukan Gedung Apartemen untuk penginapan bagi keluarga Pasien apabila menunggu keluarga yang di rawat di RSUD Wates dan atau untuk tempat tinggal sementara bagi dokter spesialis atau sub spesialis yang harus siaga di RSUD Wates. Saat ini sementara dipakai sebagai kamar untuk Residen (Program Pendidikan Dokter Spesialis-PPDS) bagi Residen Patologi Klinik, Residen Anak, Residen Bedah Saraf, Residen Bedah Orthopedhi, Residen Ilmu Penyakit Dalam, dan Residen Ilmu Penyakit Saraf.
- Pemanfaatan ini sifatnya sementara apabila situasi dan kondisi semakin membaik atau pandemi COVID-19 selesai maka akan berfungsi sebagaimana mestinya.

b. Pengadaan Alat Kesehatan/Kedokteran

Pengadaan Alat Kesehatan/Kedokteran dengan dana BKK dan hibah ditempatkan pada berbagai ruangan dengan penerima manfaat tercatat sebanyak 35.260 pasien.

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan:

- 1) Pandemi COVID-19 mempengaruhi pelayanan kesehatan rujukan
- 2) Adanya kebijakan baru dari pemerintah dan BPJS
- 3) Sarana prasarana pelayanan belum lengkap terutama peralatan kesehatan/kedokteran

b. Solusi/penyelesaian:

- 1) Menangani pandemi COVID-19 sesuai dengan aturan dan prosedur pemerintah yang ditetapkan
- 2) Penyelenggaraan urusan menyesuaikan dan menyelaraskan dengan kebijakan pemerintah dan BPJS

- 3) Melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana dengan mencari pendanaan dari berbagai sumber dana yang dibenarkan secara peraturan perundangan yang berlaku

K. REVITALISASI TPA PIYUNGAN

1. Latar Belakang

Berdasarkan Laporan Akhir Studi Peningkatan Kinerja TPA Regional Piyungan Kabupaten Bantul pada tahun 2017, umur teknisnya hanya sampai dengan tahun 2019. Selanjutnya untuk menambah daya tampung sampah, dilakukan dengan mencari solusi jangka panjang dan jangka pendek.



Gambar 6.8. Kondisi TPA pada akhir tahun 2021
Sumber: DLHK DIY, 2021

Hingga saat ini pengelolaan TPA Regional Piyungan masih dilakukan dengan sistem *controlled landfill*. Kondisi ini masih belum sesuai dengan amanah UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Perda DIY Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Khusus pada tahun 2021 dilakukan kerja sama kegiatan penataan sampah dengan Kementerian PUPR dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) DIY menggunakan sistim terasering/ ditutup dengan lapisan *geotextil & landstone*, pembuatan saluran lindi dan pemasangan pipa gas serta perbaikan IPL menggunakan dana APBN. Rencana jangka pendek, melakukan optimalisasi kapasitas TPA Regional Piyungan dengan melakukan penataan sel sampah di Zona A dan Zona B yang dibuat

terasering dengan elevasi Zona A 140 mdpl dan Zona B 108 mdpl guna memperpanjang usia pakai TPA. Rencana jangka panjang pengelolaan sampah TPA Piyungan dengan menggunakan teknologi tinggi yang ramah lingkungan menggunakan sistem Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

2. Progress Sampai dengan Tahun 2021

Pengelolaan sampah di TPA Regional Piyungan sebagai berikut :

- a. **Rencana jangka pendek** berupa optimalisasi TPA Regional Piyungan, untuk memperpanjang usia TPA agar mampu menampung sampah hingga akhir Maret tahun 2022 sebagai berikut :
 - 1) Pemda DIY telah menyiapkan lahan seluas 1,9 ha untuk menjadi area buang sampah setelah penutupan Zona A TPA eksisting pada bulan April 2022.
 - 2) Melanjutkan pekerjaan penataan Zona A dan B dikerjakan oleh Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR sudah mencapai progres fisik 95%, diharapkan selesai pada April 2022.
 - 3) Pengurugan badan sampah dan membuat akses jalan agar armada truk pengangkut sampah bisa masuk ke badan sampah menggunakan tanah urug sebanyak 31.362 m³ dan dilapisi dengan sirtu/ pasir batu sebanyak 1.800 m³ (agar lapisan tanah tidak lengket di roda kendaraan).
 - 4) Mengaktifkan kembali dermaga bawah (zona B) dengan melakukan penataan sampah seperti pada zona A (bila zona transisi 1,9 ha belum siap).
 - 5) Secara rutin memberikan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada 2 (dua) desa terdampak yaitu Desa Bawuran dan Desa Sitimulyo sesuai dengan proposal desa masing-masing (kegiatan Tahun 2021 digunakan untuk cor jalan kampung) sebagai bentuk kompensasi dari Pemda DIY kepada masyarakat.

- b. **Rencana jangka panjang** menggunakan teknologi tinggi dengan mekanisme KPBU. KPBU merupakan kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha dalam hal penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu kepada spesifikasi yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah/ BUMN/ BUMD yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak. Proses tahapan dalam KPBU yaitu Planning, Preparation, Transaction, Construction, dan Operation. Saat ini proses KPBU untuk TPA Regional Piyungan telah memasuki tahapan penyusunan *Project Development Facility* (PDF). Market sounding telah dilaksanakan pada November 2020, kajian awal prastudi kelayakan atau *Outline Bussines Case* (OBC) telah selesai dilakukan pada Februari 2021. Pengajuan permohonan fasilitas kajian akhir prastudi kelayakan KPBU dan pendampingan transaksi kepada Kemenkeu RI dilakukan pada tanggal 5 Maret 2021. Sedangkan pada tanggal 29 November 2021 sudah dilakukan tanda tangan perjanjian kesepakatan induk oleh Pemda DIY yang diwakili oleh Gubernur DIY dengan Kemenkeu RI. Adapun progres KPBU saat ini yaitu lelang jasa konsultasi dalam rangka melakukan kajian akhir untuk menetapkan teknologi apa yang tepat untuk diterapkan di TPA Regional Piyungan. Pada bulan Desember 2021 dilakukan Final Bussines Case (FBC) dengan PT. PII.

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Proses bongkar muat masih belum dapat dilakukan secara cepat dan efektif antara lain karena terbatasnya luas dermaga. Semua angkutan sampah belum memakai dump truck dan jumlah alat berat yang membantu proses bongkar muat masih terbatas.
- 2) Pengelolaan lindi di TPA masih belum optimal karena Instalasi Pengolah Limbah (IPL) belum dapat beroperasi selama 24 jam (sesuai spesifikasi mesin genset hanya mampu bekerja selama 8 jam).

- 3) Terjadinya pergerakan timbunan sampah sehingga menyebabkan pergeseran pada saluran drainase, jalan, dan menyebabkan longsornya batas dinding antara jalan dengan kolam IPL.
- 4) Jalan akses TPA yang masih menjadi satu dengan jalan umum warga cukup memperlambat mobilitas truk sampah yang akan masuk ke TPA Piyungan.

b. Solusi

- 1) Untuk kelancaran bongkar muat sampah telah dilakukan usulan kepada kabupaten/ kota terkait penertiban armada truk sampah yang masuk ke dalam TPA harus menggunakan hidrolik *dump* yang dilengkapi surat rekomendasi dari kab/kota. Keterbatasan jumlah dan operasional alat berat untuk proses bongkar muat, sehingga perlu penambahan alat berat yang telah dilakukan pengadaan alat berat pada tahun 2021 yaitu 1 unit *bulldozer* dan 1 unit *excavator*.
- 2) Penambahan daya listrik sebesar 190 kVA pada tahun anggaran 2021 agar operasional aerator dapat berjalan selama 24 jam, sehingga IPL dapat bekerja lebih optimal.
- 3) Telah dilakukan pembuatan talud di selatan Kolam IPL berupa beronjong yang diisi batu bertujuan untuk memperkuat pondasi badan sampah.
- 4) Penertiban pengaturan antrian lalu lintas armada truk pengangkut sampah.

L. PENANGGULANGAN KEMISKINAN

1. Latar Belakang

Permasalahan kemiskinan membutuhkan penanganan yang bersifat komprehensif. Isu ini perlu diselesaikan secara bersama-sama antar berbagai pihak yang berkepentingan, tidak bisa dilakukan secara sporadis dan tanpa koordinasi. Sehingga perlu penguatan struktur kelembagaan untuk menanggulangi kemiskinan. Kelembagaan yang kuat akan menjadikan program-program pengentasan kemiskinan berjalan sesuai harapan. Masih tingginya tingkat kemiskinan di DIY bila dibandingkan pada wilayah lainnya di

Jawa, menjadi suatu permasalahan yang harus diselesaikan. Kemiskinan merupakan masalah multidimensi dan lintas sektor sebagaimana tertuang pada IKU Pemda dalam RPJMD DIY 2017-2022. Upaya penanggulangan kemiskinan dapat diatasi dengan perbaikan pendapatan masyarakat dan peningkatan pola konsumsi masyarakat.

Upaya penanggulangan kemiskinan memerlukan kebijakan yang terintegrasi dan berkelanjutan yang dituangkan pada bentuk program-program nyata yang berdampak langsung. Disamping itu, pembenahan basis data kemiskinan juga harus dilakukan dengan terus melakukan *update* dan konsolidasi dengan data kependudukan agar terus didapatkan data yang valid terkini. Pelaksanaan program-program strategis ini diharapkan efektif dan berdampak langsung sehingga bisa menekan tingginya tingkat kemiskinan DIY yang sudah mencapai 11,91% per September 2021.

2. Progres Sampai Dengan Tahun 2021

a. Ulasan kegiatan penanggulangan kemiskinan di DIY

Upaya penanggulangan kemiskinan di DIY mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang fakir miskin dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah serta Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan SDM TKPKD Kabupaten/Kota. Dari beberapa regulasi tersebut diterjemahkan kedalam 2 Peraturan Gubernur dan Peraturan Daerah, yaitu Pergub DIY Nomor 139 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan dalam rangka Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dan Perda DIY Nomor 11 tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

Pemerintah membuat tim khusus sebagai upaya melakukan langkah kongkret untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dijelaskan bahwa “Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat”. Selanjutnya disebutkan “Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi”. Perpres tersebut menjabarkan tentang tim penanggulangan kemiskinan pada berbagai tingkatan yang diperbarui dengan adanya Peraturan Menteri Dalam, Negeri Nomor 53 tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) DIY menyepakati bersama upaya sinergis lintas sektor dalam penanggulangan kemiskinan di lingkungan Pemda DIY maupun pihak-pihak di luar Pemda DIY untuk mengarah kepada 15 lokus kapanewon prioritas penanggulangan kemiskinan yang telah ditetapkan. 15 Lokus kapanewon prioritas tersebut diantaranya: Sentolo, Saptosari, Kokap, Playen, Gedangsari, Nglipar, Ponjong, Pengasih, Tempel, Seyegan, Tepus, Karangmojo, Prambanan, Samigaluh, dan Imogiri. Dalam pelaksanaan Program/Kegiatan OPD DIY menggunakan kerangka dan acuan kelompok program yang sudah diatur dalam Perda DIY Nomor 11 tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang dikelompokkan menjadi 4 kelompok program sebagai berikut:

Tabel 6.18. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Kelompok Program	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah OPD
Kelompok Perlindungan Sosial	11 Program	19 Kegiatan	169.172.027.743	124.281.217.686	8
Kelompok Rehabilitasi Sosial	7 Program	33 Kegiatan	24.167.854.675	20.692.053.595	6
Kelompok Pemberdayaan Masyarakat	34 Program	47 Kegiatan	56.536.017.439	50.540.094.409	19
Peningkatan Akses Pelayanan Dasar	10 Program	16 Kegiatan	75.837.212.204	59.782.372.205	5
	62 Program	115 Kegiatan	325.713.112.061	255.295.737.895	31

Sumber: Bappeda DIY, 2022

Program pemberian bantuan makanan untuk warga miskin sudah dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Intervensi dengan bantuan makanan untuk warga miskin adalah sebagai berikut.

- 1) Program Nasional tahun 2021 berupa BPNT bagi Warga Miskin berupa Kartu untuk pembelian beras, telur, sayur mayur, dan daging ayam/ikan lele dengan besaran Rp. 200.000,00 per bulan per KPM selama 1 tahun.
- 2) Pembentukan Tim Koordinator BPNT Tingkat Provinsi yang ditetapkan melalui SK Gubernur yang beranggotakan Sekda DIY (ketua), Asisten Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat (Wakil Ketua), Dinsos DIY dan Biro Bermas Setda DIY (sekretaris), dilengkapi dengan Pokja dan Staf Sekretariat.

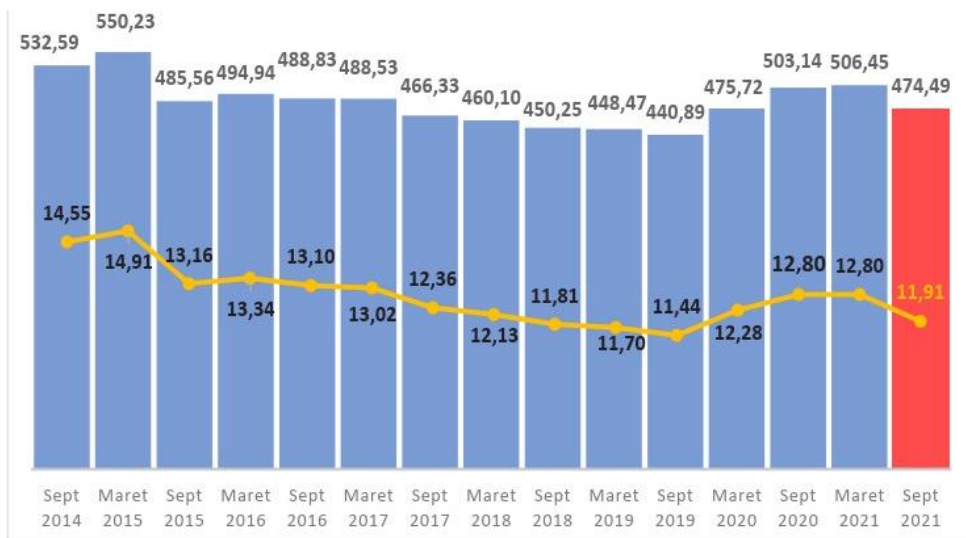
Intervensi bantuan permakanan lainnya untuk warga miskin pada kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar meliputi: (1) Bantuan permakanan lanjut usia terlantar (LUT), berupa bahan makanan tambahan selama enam bulan dengan nilai bantuan Rp 108.000,00 per bulani per LUT; dan (2) Fasilitas *Home Care*, yakni berupa bantuan makanan dan kebutuhan dasar kepada LUT selama enam bulan dengan nilai bantuan Rp 66.000,00 per bulan per LUT. Sedangkan untuk Jaminan

Sosial di berikan Bantuan Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU) sebesar Rp. 200.000,00/bulan/LUT selama 6 bulan.

Selain program BPNT Program nasional lainnya yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), syarat KPM penerima bantuan harus memenuhi beberapa komponen diantaranya : ibu hamil, anak balita, anak usia sekolah, disabilitas berat serta lanjut usia. Besaran bantuan yang diterima oleh KPM tergantung jumlah komponen yang dimilikinya. Bantuan sosial diberikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar permakanan, kesehatan dan pendidikan.

b. Capaian Kemiskinan pada 2021

Secara umum, pada periode September 2014 – September 2021, tingkat kemiskinan di DIY menunjukkan kecenderungan yang menurun, baik dari sisi jumlah maupun persentase. Namun demikian, terdapat beberapa fluktuasi peningkatan kemiskinan. Pada Maret 2015 peningkatan kemiskinan dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok akibat kenaikan harga bahan bakar minyak. Selain itu, pada Maret 2020, September 2020, dan Maret 2021 terjadi peningkatan kemiskinan yang diantaranya disebabkan wabah COVID-19.



Gambar 6.9. Jumlah Penduduk Miskin di DIY 2014 - 2021

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Jumlah penduduk miskin di DIY pada September 2014 mencapai 532,59 ribu orang. Sampai dengan September 2019, jumlah penduduk miskin telah berkurang sebanyak 91,7 ribu orang. Namun dengan adanya wabah COVID-19, jumlah penduduk miskin meningkat kembali menjadi 475,72 ribu orang pada Maret 2020. Selanjutnya, jumlah penduduk miskin kembali meningkat sampai dengan Maret 2021. Penduduk miskin pada periode ini tercatat sebanyak 506,45 ribu orang. Pada September 2021, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 474,49 ribu orang. Jika dibandingkan dengan Maret 2021, terjadi penurunan penduduk miskin sebanyak 32 ribu orang.

Jumlah penduduk miskin secara absolut di DIY paling banyak terdapat di daerah perkotaan. Berdasarkan hasil Susenas September 2021, jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan DIY tercatat sebanyak 331,71 ribu orang. Jumlah ini lebih dari dua kali lipat jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan yang banyaknya 142,78 ribu orang.

Sementara itu, secara persentase, penduduk miskin di perdesaan lebih banyak dibandingkan di perkotaan. Pada September 2021, persentase penduduk miskin di perdesaan tercatat sebanyak 13,99 persen. Dengan demikian, secara rata-rata terdapat sekitar 14 penduduk miskin diantara 100 orang penduduk yang ada di perdesaan. Sementara itu, pada waktu yang sama, persentase penduduk miskin di perkotaan sebanyak 11,20 persen. Selama periode September 2020 – September 2021, tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan dan perdesaan menunjukkan kecenderungan yang menurun. Pada periode tersebut, jumlah penduduk miskin di perkotaan DIY turun sebanyak 21,5 ribu orang. Sementara itu, jumlah penduduk miskin di perdesaan turun sebanyak 7,15 ribu orang. Dengan demikian, dalam setahun terakhir, jumlah penduduk miskin DIY berkurang sebanyak 28,65 ribu orang. Pada periode yang sama, persentase penduduk miskin perkotaan turun sebanyak 0,97 persen poin. Adapun persentase penduduk miskin perdesaan turun sebanyak 0,58 persen poin. Dalam setahun terakhir persentase kemiskinan DIY turun sebanyak 0,89 persen poin. Berikut ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 6.19. Jumlah Penduduk Miskin di Perkotaan dan Perdesaan Tahun 2021

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)
Perkotaan		
September 2020	353,21	12,17
Maret 2021	358,66	12,23
September 2021	331,71	11,20
Perdesaan		
September 2020	149,93	14,57
Maret 2021	147,80	14,44
September 2021	142,78	13,99
Total		
September 2020	503,14	12,80
Maret 2021	506,45	12,80
September 2021	474,49	11,91

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

3. Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang terjadi dalam penanggulangan kemiskinan di DIY :

- Belum adanya satu kesepahaman terkait kemiskinan terutama yang tertuang dalam Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan.
- Belum optimalnya peran dan tugas TKPKD DIY serta koordinasi lintas sektor antara OPD DIY maupun pihak-pihak diluar OPD DIY dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di DIY.
- Pandemi COVID-19 yang berkelanjutan berdampak pada perubahan perilaku serta aktivitas ekonomi penduduk sehingga mempengaruhi angka kemiskinan.
- Belum tersinerginya kegiatan korporasi anggota Forum Tanggungjawab Sosial Lingkungan perusahaan (TSLP/CSR) DIY dengan lokus kapanewon prioritas penanggulangan kemiskinan dan program-program Pemda DIY

Penanggulangan kemiskinan kedepan, diperlukan beberapa upaya percepatan yang pasti diantaranya :

- a. Diperlukan inventarisasi data pada setiap mitra bidang-bidang di BAPPEDA DIY.
- b. Diperlukan kesadaran penuh dari masing-masing anggota TKPKD mengenai tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Diperlukan penguatan atas legalitas dari hasil kerja TKPKD, dengan memasukkan strategi dan program penanggulangan kemiskinan dalam RPJMD maupun RKPD DIY.
- c. Dibutuhkan koordinasi intensif dan komunikasi dengan pihak yang akan bekerjasama dalam program pemberdayaan masyarakat (dalam hal ini, PT. Yogyakarta Isti Parama selaku pihak swasta yang bekerjasama dengan Pemda DIY dalam Gerakan Ayo Sejahtera).
- d. Dibutuhkan komunikasi yang intensif antara Pemerintah Daerah DIY selaku Sekretariat dengan pengurus Forum TSLP/CSR DIY.

PENYELENGGARA TUGAS UMUM PEMERINTAH

A. KERJA SAMA ANTAR DAERAH

1. Kerja sama Daerah Dengan Pemerintah Pusat

a. Sinergi Dengan Pemerintah Pusat

Sebagai bentuk sinergi dengan Pemerintah Pusat, Pemda DIY melaksanakan fasilitasi kerja sama dengan Pemerintah Pusat melalui Biro Tata Pemerintahan Setda DIY pada Sub bagian Kerja sama Dalam Negeri. Sinergi yang dilakukan pada tahun 2021 berupa Nota Kesepakatan yang teldengan Pemerintah Pusat sebanyak 6 naskah kerja sama yang meliputi 5 (lima) bidang yaitu bidang keuangan, pendidikan, kesehatan, trantibumlinas dan pertanahan dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 7.1. Sinergi Pemerintah Daerah DIY dengan Pemerintah Pusat Tahun 2021

NO	URAIAN	NO /TANGGAL	JANGKA WAKTU
1	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah DIY dengan Perwakilan Badan Pengawasa Keuangan dan Pembangunan DIY tentang Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	119/5274/2021, tanggal 17-03-2021	5 tahun
2	Nota Kesepakatan antara Universitas Negeri Yogyakarta dengan Pemerintah Daerah DIY tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pembangunan Daerah	119/5346/2021, tanggal 18-03-2021	5 tahun
3	Nota Kesepakatan antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan Pemda DIY tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat	119/7457/2021, tanggal 16-04-2021	5 tahun
4	Nota Kesepakatan antara Pemda DIY dengan Universitas Tidar tentang Kerja Sama dalam Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di DIY	119/14659/2021	5 tahun
5	Nota Kesepakatan Pemda DIY dengan Lembaga Ketahanan Nasional RI tentang Sinergi Peningkatan dan Pengembangan Ketahanan Nasional DIY	119/22643/2021, tanggal 17-11-2021	5 tahun
6	Adendum Nota Kesepakatan Pemda DIY dengan Kanwil Pertanahan Nasional DIY tentang Pelaksanaan Agenda Reforma	119/21568/2021, tanggal 29-10-2021	5 tahun

NO	URAIAN	NO /TANGGAL	JANGKA WAKTU
	Agraria dalam mendukung terwujudnya desa mandiri budaya di DIY		

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2021

Nota Kesepakatan yang ditandatangani telah ditindaklanjuti dengan naskah rencana kerja sebanyak 11 (sebelas) naskah. Naskah tersebut meliputi (1) Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; (2) BPJS Ketenagakerjaan bidang pegawai Tenaga Bantu (Naban); (3) Program Pembangunan dan Pengembangan Pusat Desain Industri Nasional; (4) Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya; (5) Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru; (6) Pelaksanaan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi; (7) Penguatan Pengasuhan Berbasis Budaya Jawa; (8) Pengawasan Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan Jaminan Kesehatan Nasional; (9) Optimalisasi Pengawasan dan Pemeriksaan Jaminan Kesehatan pada Sistem Jaminan Sosial Nasional; (10) Pendataan, Pengembangan Sistem Ekonomi Hub (Pusat) dan Pengembangan Sektor Riil Perekonomian, dan (11) Penguatan Keluarga melalui Desa di DIY dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 7.2. Daftar Rencana Kerja Tindak Lanjut Nota Kesepakatan Pemda DIY Dengan Pemerintah Pusat Tahun 2021

NO	URAIAN	NOMOR	TANGGAL DITETAPKAN	JANGKA WAKTU
1	Rencana Kerja antara Pemerintah Daerah DIY dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Yogyakarta tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di DIY	119/3535/2021	23-02-2021	5 tahun
2	Rencana Kerja antara Pemerintah Daerah DIY dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Yogyakarta tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Tenaga Bantu	119/4149/2021	02-03-2021	5 tahun

NO	URAIAN	NOMOR	TANGGAL DITETAPKAN	JANGKA WAKTU
	(NABAN) di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY			
3	Rencana Kerja antara Direktorat Jendral Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementrian Perindustrian dengan Pemerintah Daerah DIY dengan Pemerintah Kota Yogyakarta tentang Program Pembangunan dan Pengembangan Pusat Desain Industri Nasional	119/4896/2021	12-03-2021	5 tahun
4	Rencana Kerja antara Universitas Negeri Yogyakarta dan Pemda DIY tentang Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan , Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya	119/02524/2021	19-04-2021	5 tahun
5	Rencana Kerja antara Pemda DIY dengan Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru	119/10845/2021	31-05-2021	5 tahun
6	Rencana Kerja antara Pemda DIY dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Yogyakarta tentang Pelaksanaan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi di DIY	119/01960/2021	44234	5 tahun
7	Rencana Kerja antara Pemda DIY dengan Pusat Studi Kebudayaan UGM Yogyakarta tentang Penguatan Pengasuhan Berbasis Budaya Jawa di DIY	119/02730/2021	14-09-2021	5 tahun
8	Rencana Kerja BPJS Kesehatan dengan Pemda DIY tentang Pengawasan Kepatuhan Terhadap PerUU Jaminan Kesehatan Nasional di Wilayah DIY	119/02862/2021	24-09-2021	5 tahun
9	Rencana Kerja BPJS Kesehatan dengan Pemda DIY tentang Optimalisasi Pengawasan dan Pemeriksaan Jaminan Kesehatan pada Sistem Jaminan Sosial Nasional di Wilayah DIY	119/02861/2021	24-09-2021	5 tahun
10	Rencana Kerja Pemda DIY dengan Kanwil Bank Indonesia DIY tentang	119/19386/2021	22-09-2021	5 tahun

NO	URAIAN	NOMOR	TANGGAL DITETAPKAN	JANGKA WAKTU
	Pendataan, Pengembanagan Sistem Ekonopmi Hub (Pusat) dan Pengembanagan Sektor Riil Perekonomian DIY			
11	Rencana Kerja Pemda DIY dengan UGM Yogyakarta tentang Penguatan Keluarga melalui Desa di DIY	119/24564/2021	24-12-2021	5 tahun

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2021

2. Kerja sama Antar Daerah

Pelaksanaan kerja sama antar daerah yang dilakukan oleh Pemda DIY didasari oleh ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja sama Daerah dan Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga. Berikut ini adalah kerja sama daerah yang dilakukan pada tahun 2021:

a. Daerah yang melakukan kerja sama

Kerja sama antar daerah yang dilakukan oleh Pemda DIY pada tahun 2021 meliputi 6 (enam) Kesepakatan Bersama dan 5 (lima) Perjanjian Kerja Sama. Kesepakatan Bersama tersebut mencakup beberapa daerah yaitu dengan Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Daerah Khusus Ibu Kota (DKI), Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Bawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Bali, Provinsi Lampung, Provinsi Banten, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Sleman dan Walikota Yogyakarta. Berikut adalah rincian kerja sama yang dilakukan Pemda DIY dengan daerah lain pada tahun 2021:

Tabel 7.3. Kerja sama Pemda DIY dengan Daerah Lain Tahun 2021

NO	URAIAN	NO. NASKAH KERJA SAMA	TGL DITETAPKAN	JANGKA WAKTU
1	Perjanjian Kerja Sama antara Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum Perkotaan (PIALAMP) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY dan Perumda PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta dan Prumda Air Minum Tirta Sembada Kab.Sleman dan Perumda Tirta Projotamansari Kab.Bantul tentang Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama antara Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum Perkotaan (PIALAMP) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY dan Perumda PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta dan PDAM Tirta Dharma Kab.Sleman dan PDAM Tirta Dharma Kab.Bantul NOMOR: 815/6203; NOMOR: 690/1565; NOMOR: 66/SPKS/PDAM/SLM/X/2017; NOMOR: 690/174/PDAM/BTL/X/2017 tentang Pemanfaatan Sistem Penyediaan Air Minum Regieonal di Wilayah Kota Yogyakarta, Kab.Sleman, dan Kab.Bantul DIY	119/3951/2021	26-02-2021	Pengakhiran Perjanjian kerja sama,
2	Kesepakatan Bersama antara Pemda Prov Kalimantan Timur dan Pemda DIY tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di Provinsi Kalimantan Timur	119/6928/2021	08-04-2021	5 tahun
3	Kesepakatan Bersama antara Pemda Prov Sulawesi Tenggara dan Pemda DIY tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di Prov Sulawesi Tenggara	119/6930/2021	08-04-2021	5 tahun
4	Kesepakatan Bersama antara Pemprov Sulawesi Selatan dan Pemda DIY tentang	119/6931/2021	08-04-2021	5 tahun

NO	URAIAN	NO. NASKAH KERJA SAMA	TGL DITETAPKAN	JANGKA WAKTU
	Penyelenggaraan Transmigrasi di Provinsi Sulawesi selatan			
5	Kesepakatan Bersama DIY dengan Provinsi Kalimantan Tengah tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah dan Potensi Daerah	119/6927/2021	27-05-2021	5 tahun
6	Perubahan (<i>Addendum</i>) Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY dengan Pemprov Jawa Tengah tentang Perubahan (<i>Addendum</i>) Perjanjian Kerja Sama Nomor 119/03010 dan Nomor 0195/8811/2020 Tanggal 23 November 2020 tentang Pemanfaatan Galeri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) Pasar Kotagede Yogyakarta International Airport (YIA)	119/10693/2021	28-05-2021	2 tahun
7	Perjanjian Kerja sama antara Provinsi Jabar, DKI, Jateng, DIY, Jatim, Bali, Lampung, NTB, Banten dan NTT tentang Penyelenggaraan Program Travel Corridor.	91/PKS/MPU/2021,	24-06-2021	5 tahun
8	Perjanjian Kerja sama antara Pemda DIY dengan Kartamantul tentang Perubahan addendum PKS antara Pemda DIY dgn Kartamantul tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan di wil Kartamantul.	119/17607/2021	23-08-2021	31-12-2021
9	Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Sinergi Layanan Perlindungan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana di Wilayah DIY	119/18609/2021	7/9/2021	5 tahun
10	Perjanjian Kerja sama Pemda DIY dengan PT POS Indonesia tentang Pengiriman Produk Koperasi dan UMKM di DIY melalui web SIBAKUL.	519/06387/23021	25-09-2021	3 tahun

NO	URAIAN	NO. NASKAH KERJA SAMA	TGL DITETAPKAN	JANGKA WAKTU
11	Kesepakatan Bersama Pemda DIY dengan Provinsi Jawa Barat tentang Pengembangan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik	119/23316/2021	1/12/2021	5 tahun

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2022

b. Bidang Kerja sama

Bidang kerja sama antar daerah yang telah dilaksanakan Pemda DIY pada tahun 2021 meliputi:

- 1) Pembangunan daerah;
- 2) Pengelolaan dan Pengembangan Sarpras air limbah domestik sistem terpusat;
- 3) Pemanfaatan Galeri Kotagede di Bandara YIA ;
- 4) Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Regional Kamijoro;
- 5) Transmigrasi;
- 6) Lingkungan Hidup;
- 7) Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat (PUPR).

c. Mitra Praja Utama (MPU)

MPU merupakan forum kerja sama antar daerah yang beranggotakan 10 provinsi yaitu Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT. Pada tanggal 24, 25 dan 27 Mei 2021 Pemda DIY menjadi tuan rumah penyelenggaraan Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU), yang dilaksanakan secara daring. Rapat Kerja Gubernur FKD MPU Tahun 2021 ini dibahas tema kerja sama yang terkait dengan pandemi COVID-19. Topik kerja sama penanganan Pandemi COVID-19 adalah peningkatan imunitas penderita komorbid melalui vaksinasi, penanganan lintas batas dalam mencegah lonjakan kasus positif COVID-19, penegakkan hukum (*law enforcement*) protokol kesehatan untuk mencegah dan mengendalikan COVID-19, dan strategi membuka koridor travel bebas COVID-19 (*Free covid travel corridor*) untuk pariwisata di zona hijau.

Adapun naskah Kesepakatan Bersama yang dihasilkan dari pelaksanaan Rapat Kerja Gubernur FKD MPU Tahun 2021 yaitu:

- 1) KSB No. 04/SK/MPU/2021 tentang Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- 2) KSB No. 05/SK/MPU/2021 tentang Penanganan Bersama Lintas Batas Pandemi COVID-19.

Selanjutnya Pemda DIY juga berpartisipasi dalam Kegiatan Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia (APPSI) di tahun 2021. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk Rapat yang agendanya membahas program kerja APPSI yang akan dilaksanakan pada tahun 2022.

3. Kerja sama Daerah dengan Pihak Ketiga

a. Pihak Ketiga/Badan/Swasta yang telah bekerjasama

Pemda DIY pada tahun 2021 telah melakukan kerja sama dengan pihak ketiga/swasta yang menghasilkan 12 kesepakatan bersama dan 3 perjanjian kerja sama dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 7.4. Rincian Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama

NO	URAIAN	NOMOR NASKAH KERJA SAMA	TGL DITETAPKAN	JANGKA WAKTU
1	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah DIY dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Terpadu Yogyakarta tentang Kerja sama Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya di DIY	119/0308/2021	07-01-2021	5 tahun
2	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah DIY dengan PT POS Indonesia (PERSERO) tentang Pemulihan dan Pengembangan Ekonomi	119/16619/2021	28-01-2021	5 tahun
3	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah DIY dengan Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa tentang Kerja Sama Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan	119/2529/2021	10-02-2021	5 tahun
4	Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Daerah DIY dengan PT Brilliant Ecommerce Berjaya tentang Pemanfaatan Platform <i>E-Marketplace</i> untuk Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY	119/2532/2021	10/2/2021	3 tahun
5	Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah daerah DIY dengan PT Angkasa Pura I	119/6151/2021	26-03-2021	1 tahun

NO	URAIAN	NOMOR NASKAH KERJA SAMA	TGL DITETAPKAN	JANGKA WAKTU
	(PERSERO) tentang Sinergi Pembangunan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah DIY			
6	Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tentang Kerja Sama Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya di DIY	119/10845/2021	21-06-2021	5 tahun
7	Amandemen Perjanjian antara Pemda DIY dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur tentang Pelaksanaan Fasilitas Penyiapan Proyek dan Pelaksanaan Transaksi pada Proyek Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum Regional Kamijoro	119/13876/2021	05-07-2021	Sesuai Jangka Waktu Proyek
8	Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dan Universitas Islam Indonesia tentang Kerja Sama Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya di DIY	119/14069/2021	7/7/2021	5 tahun
9	Kesepakatan Bersama Pemda DIY dengan PT. MNC Portal Indonesia tentang Kerja sama Sosialisasi dan Publikasi Pemda DIY	119/14765/2021	15-07-2021	2 tahun
10	Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dan Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA Yogyakarta tentang Peningkatan dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Daerah DIY Melalui Penelitian, Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat	119/17343/2021	19-08-2021	5 tahun
11	Kesepakatan Bersama Pemda DIY dengan PT. Global Digital Niaga (Blibli.com) tentang Pengembangan Bisnis Pelaku Usaha Melalui Penjualan secara Online.	119/21571	29-10-2021	5 tahun
12	Kesepakatan Bersama Pemda DIY dengan UAD Yogyakarta tentang Kerja sama Pengembangan dan Pemberdayaan sumber daya di DIY	119/22210/2021	09-11-2021	5 tahun
13	Kesepakatan Bersama Pemda DIY dengan PT. Ekonomi Sirkular Indonesia tentang Kerja sama Pengembangan Kewirausahaan manajemen Produk Berlebih untuk meningkatkan perekonomian Daerah	119/22583/2021	16-11-2021	5 tahun
14	Kesepakatan Bersama Pemda DIY dengan PT. Shoopee Internasional Indonesia tentang Pengembangan Ekonomi Digital di DIY	119/22720/2021	18-11-2021	2 tahun
15	Kesepakatan Bersama Pemda DIY dengan PT. Syncore Indonesia tentang Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Milik Kalurahan di DIY	119/22375/2021	12/11/2021	3 tahun

Sumber: Biro Tapem Setda DIY, 2022

b. Bidang Kerja sama

Pada tahun 2021 bidang kerja sama yang dilakukan Pemda DIY dengan pihak ketiga meliputi:

- 1) Pendidikan Pelatihan, Penelitian dan Pengkajian dan Pengembangan SDM.
- 2) Perekonomian
- 3) Tehnologi dan Informasi
- 4) PUPR
- 5) Koperasi dan UMKM

4. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Monitoring dan evaluasi belum dilaksanakan secara optimal karena kerja sama daerah masih kurang dianggap penting dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan serta belum tersedia database kerja sama yang lengkap.

b. Solusi

Monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan kerja sama daerah yang telah diterbitkan Pemerintah daerah perlu dilakukan dengan mengkaji potensi-potensi pemetaan kerja sama serta membangun database kerja sama sehingga mampu menjadi instrumen pendukung penyelenggaraan pembangunan yang efektif. yang penting dalam memantau proses kerja sama maupun dalam mendorong kerja sama daerah.

B. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

1. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki magnet di selatan Jawa dari potensi pariwisata, budaya, pendidikan dan aspek sosial ekonomi yang lain. Daya tarik tersebut menarik banyak orang untuk datang ke DIY dengan berbagai

kepentingan dalam berbagai kesempatan waktu. Potensi tersebut dapat menimbulkan permasalahan dan hal-hal krusial yang perlu dipersiapkan antara lain terkait (1) kemacetan lalu lintas terutama pada saat musim libur / hari besar seperti hari Lebaran, Natal dan Tahun Baru; (2) ketersediaan bahan pokok, bahan bakar dan stok uang tunai (3) resiko penularan COVID-19 selama pandemi, serta (4) gangguan keamanan dan ketertiban yang disebabkan oleh tindakan intoleransi. Potensi permasalahan tersebut perlu diantisipasi oleh Forkopimda baik Provinsi/Kabupaten/Kota/ Kecamatan yang dibentuk untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tugas Forkopimda Provinsi yang diketuai oleh Gubernur dan beranggotakan unsur pimpinan DPRD, TNI, Polri, dan Kejaksaan adalah mengoptimalkan fungsi dari masing-masing unsur dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan penyelesaian masalah-masalah aktual di daerah bersama pemangku kepentingan terkait.

Dalam kondisi aktual pandemi COVID-19 saat ini, peran Forkopimda sangat penting untuk menjaga situasi kondusif dan rasa aman serta keselamatan warga masyarakat terutama pada hari-hari libu besar keagamaan seperti perayaan Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru. Dalam rangka mewujudkan situasi kondusif tersebut, Pemda DIY melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol DIY) melaksanakan Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melalui program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dengan anggaran APBD sebesar RpRp2.308.039.000.

Kegiatan yang telah dikoordinasikan dalam Forkopimda pada tahun anggaran 2021 antara lain,

- a. Antisipasi gangguan keamanan di DIY jelang Idul Fitri 2021
- b. Antisipasi gangguan mobilitas wisatawan yang datang dan keluar DIY jelang Idul Fitri 2021
- c. Antisipasi gangguan keamanan di DIY jelang Natal 2021 dan Tahun Baru 2022

- d. Antisipasi gangguan mobilitas wisatawan yang datang dan keluar DIY jelang Natal 2021 dan Tahun Baru 2022
- e. Menjamin ketersediaan bahan pokok, bahan bakar minyak dan stok uang tunai selama perayaan Natal 2021 dan tahun baru 2022.
- f. Antisipasi penyebaran virus COVID 19 di DIY

2. Komite Intelijen Daerah (Kominda)

Komite Intelijen Daerah (Kominda) merupakan forum koordinasi para pimpinan penyelenggara Intelijen Negara di daerah yang dibentuk oleh Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Koordinasi Intelijen Negara. Kominda dipimpin oleh Kepala Binda dengan anggota Bakesbangpol DIU bersama instansi vertikal terkait antara lain Badan Intelijen Negara Daerah DIY, Korem 072 Pamungkas, Kepolisian Daerah DIY, Pangkalan TNI AU, Pangkalan TNI AL, Kejaksaan Tinggi DIY, Pengadilan Tinggi DIY, Kanwil Kementerian Agama, Kanwil Hukum dan HAM DIY, Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta, Kanwil Bea Cukai Yogyakarta, dan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak DIY.

Kominda bertugas untuk mencegah dan mengatasi berbagai potensi konflik yang mungkin akan terjadi dengan deteksi dan identifikasi potensi konflik secara dini. Kominda melaksanakan Koordinasi Deteksi Dini dan Cegah Dini untuk permasalahan strategis di tingkat lokal, nasional, regional, dan global yang diperkirakan berdampak terhadap situasi dan kondisi keamanan, ketertiban masyarakat di DIY. Pada tahun 2021, hal tersebut dilaksanakan melalui Rapat Kerja Kominda DIY dan Rapat Koordinasi Kominda DIY yang anggarannya difasilitasi sepenuhnya oleh BIN. Hasil koordinasi tersebut adalah: (a) Pertukaran informasi intelijen; (b) Harmonisasi, sinkronisasi, dan integrasi kegiatan dan produk intelijen; (c) Perumusan kegiatan dan/atau operasi intelijen bersama; (d) Rekomendasi tindakan yang akan dilakukan dan masukan kebijakan kepada Gubernur selaku Kepala Daerah tingkat Provinsi. Tindak lanjut hasil koordinasi bahwa semua informasi dan fakta menjadi pedoman untuk dilaksanakan oleh masing-masing penyelenggara intelijen sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

3. Permasalahan dan Solusi

a. Forkopimda

1) *Permasalahan*

Perlunya penguatan fungsi koordinasi antar unsur forkopimda dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelesaian masalah-masalah aktual di daerah dengan melakukan rapat-rapat koordinasi rutin yang menghasilkan rekomendasi strategis dan taktis untuk Kepala Daerah.

2) *Solusi*

Dalam mengoptimalkan peran Forkopimda dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelesaian masalah-masalah aktual di daerah dapat direkomendasikan agar,

- a) Unsur Forkopimda memfungsikan kembali kembali pusat pengendalian krisis (Pusdalsis) di daerah agar meningkatkan konektivitas antar Pusdalsis Pusat dan Daerah agar dapat dilakukan langkah cepat, preventif dan pengambilan kebijakan yang tepat baik Gubernur, Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda).
- b) Unsur Forkopimda untuk dapat mengoptimalkan fasilitasi rapat koordinasi setiap bulan agar diperoleh informasi akurat dari setiap lini, serta mengoptimalkan sistem pelaporan yang ada dalam mendukung pengambilan keputusan cepat dan tepat.

b. Kominda

1) *Permasalahan*

Belum optimalnya koordinasi, kecepatan penyampaian informasi terkini, serta sinergi antar anggota Kominda terkait perkembangan situasi terkini di daerah.

2) Solusi

Berdasarkan permasalahan tersebut dapat direkomendasikan,

- a) Peningkatan kesepahaman, kesolidan, serta koordinasi antar unsur Kominda baik dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun aparat TNI/Polri agar dapat dihasilkan informasi intelijen yang akurat.
- b) Mengoptimalkan peran Kominda di tengah pemangku kepentingan di daerah sebagai komunitas strategis yang berperan penting sebagai penyampai informasi terdepan untuk melakukan deteksi dini dan cegah dini potensi konflik di daerah,

C. PEMBINAAN BATAS DAERAH

1. Gambaran Umum

Batas daerah di DIY sejumlah 8 (delapan) segmen, yang terdiri dari 1 (satu) segmen batas daerah antar provinsi (DIY dengan Provinsi Jawa Tengah), dan 7 (tujuh) segmen batas daerah antar kabupaten/kota di DIY. Pada masing-masing segmen batas daerah dimaksud telah dilaksanakan penegasan batas daerah, dan mendapatkan penetapan yuridis melalui Permendagri Nomor 141 tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah.

Tabel 7.5. Permendagri tentang Batas Daerah Lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Segmen Batas Daerah		Dasar Hukum	Lampiran Permendagri
1.	Daerah Istimewa Yogyakarta	Jawa Tengah	Permendagri 19/2006	Peta Batas Wilayah skala 1: 100.000
2.	Bantul	Kulon Progo	Permendagri 70/2007	Peta Batas Daerah skala 1: 25.000
3.	Gunungkidul	Bantul	Permendagri 71/2007	Peta Batas Daerah skala 1: 40.000
4.	Kota Yogyakarta	Sleman	Permendagri 72/2007	Peta Batas Daerah skala 1: 5.000
5.	Gunungkidul	Sleman	Permendagri 4/2009	Peta Batas Daerah skala 1: 10.000
6.	Kulon Progo	Sleman	Permendagri 61/2009	Peta Batas Daerah skala 1: 18.000

No	Segmen Batas Daerah		Dasar Hukum	Lampiran Permendagri
7.	Kota Yogyakarta	Bantul	Permendagri 15/2012	Peta Batas Daerah skala 1: 10.000
8.	Bantul	Sleman	Permendagri 83/2013	Peta Batas Daerah skala 1: 25.000

Sumber: Biro Tapem Setda DIY, 2022

Lampiran peta pada Permendagri Batas Daerah DIY-Jateng memiliki skala 1 :100.000. Sedangkan skala peta batas daerah di kab/kota di DIY bervariasi (1:10.000, 1:18.000, 1:25.000, dan 1:40.000). Peta skala kecil tentu saja memiliki kelemahan, diantaranya garis batas pada peta tidak sesuai dengan garis batas di lapangan, dan berdampak pada ketidaksesuaian batas wilayah dan tumpang tindih pemanfaatan lahan dan kawasan.

Menyikapi kondisi tersebut dan menindaklanjuti Perpres Nomor 9 Tahun 2016 jo. Perpres Nomor 23 tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, Pemda DIY bersama Tim Penegasan Batas Provinsi dan Kabupaten sejak Tahun 2019 melakukan rekonstruksi penegasan batas daerah DIY dengan Provinsi Jawa Tengah pada tiap segmen perbatasan. Segmen batas daerah DIY-Provinsi Jawa Tengah terbagi dalam 8 (delapan) segmen yaitu perbatasan Kulon Progo dengan Purworejo, Kulon Progo dengan Magelang, Sleman dengan Magelang, Sleman dengan Boyolali, Sleman dengan Klaten, Gunungkidul dengan Klaten, Gunungkidul dengan Sukoharjo dan Gunungkidul dengan Wonogiri. Sampai dengan tahun 2021 telah dilakukan usulan revisi Permendagri Nomor 19 Tahun 2006 untuk segmen batas daerah Kulon Progo dengan Purworejo dengan skala peta 1:50.000, Sleman dengan Klaten skala peta 1:40.000, Gunungkidul dengan Klaten skala peta 1:25.000, sedangkan segmen Sleman dengan Magelang masih dalam proses pembahasan.

2. Program dan Kegiatan Pembinaan Batas Wilayah

Dalam upaya menjaga kepastian terhadap batas administrasi daerah, menjaga stabilitas keamanan sosial politik masing-masing daerah di perbatasan, memberikan kepastian dalam pelaksanaan pengelolaan batas daerah antara DIY dengan Jawa Tengah serta mewujudkan Kebijakan Satu

Peta. Pemda DIY dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja sama tentang Pengelolaan Batas Daerah. Kegiatan pengelolaan batas daerah yang dilakukan Pemda DIY pada Tahun 2021 yaitu penyusunan Database Pilar Batas Segmen Batas Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah pada perbatasan Kalurahan Banyurejo, Kalurahan Sumberrejo, Kalurahan Pondokrejo, Kalurahan Lumbungrejo, dan Kalurahan Merdikorejo Kapanewon Tempel dan Kalurahan Wonokerto Kapanewon Turi Kabupaten Sleman. Database pilar batas ini memuat informasi mengenai kondisi pilar batas antara lain: data lokasi pilar, situasi lokasi pilar, sketsa lokasi serta foto kondisi pilar.

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Batas daerah antara DIY dengan Jawa Tengah yang diatur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2006 memiliki lampiran peta dengan skala 1:100.000. Skala peta 1:100.000 berpotensi adanya ketidaksesuaian garis di dalam peta dengan kondisi di lapangan yang dapat menimbulkan kerawanan pada wilayah yang saling berbatasan terutama pada titik-titik yang memiliki potensi ekonomi.

b. Solusi

- 1) Melakukan usulan revisi Permendagri Nomor 19 tahun 2006 tentang Batas Daerah DIY dengan Provinsi Jawa Tengah pada tiap-tiap segmen perbatasan antar kabupaten di perbatasan provinsi dengan lampiran skala peta yang lebih besar.
- 2) Pada kondisi tertentu (misalnya pada garis batas yang dianggap berpotensi perbedaan pendapat di dua pemerintah daerah yang berbatasan) perlu dilakukan rekonstruksi dan dibuat peta situasi yang digambarkan dengan skala 1 : 1.000.

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Gambaran Umum

Negara Indonesia yang berada di belahan Asia merupakan salah satu negara yang rawan bencana alam di dunia (menurut *United Nations International Strategy for Disaster Reduction/ UNISDR*). Berdasarkan kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis, wilayah DIY memiliki potensi kejadian bencana yang cukup tinggi, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam maupun faktor manusia. Kejadian bencana dapat berdampak negatif berupa korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Semua dampak negatif tersebut tentu saja akan menghambat laju perekonomian dan pembangunan baik fisik maupun non fisik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 menyatakan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Rangkaian peristiwa tersebut berpotensi terjadi pada kondisi daerah beragam seperti dataran rendah, banyak sungai, pegunungan aktif, perbukitan dan kemiringan lahan dan didukung oleh faktor manusia yang memicu peningkatan kerentanan di suatu wilayah seperti di DIY. Kompleksnya kondisi wilayah dan faktor manusia, menjadikan DIY rawan terhadap bencana. Hal ini dapat dilihat berdasarkan sejarah kejadian bencana di DIY dan juga kajian ancaman bencana yang telah berkembang saat ini. Potensi ancaman bencana tersebut mengakibatkan resiko bencana seperti korban jiwa, membawa kerugian material yang besar, menghambat pertumbuhan pembangunan dan menurunkan kondisi ekonomi.

Paradigma penanganan bencana berubah dari responsif menjadi preventif, tujuannya untuk menghilangkan atau mengurangi risiko bencana. Pengurangan Risiko Bencana (PRB) merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan, serta meningkatkan kemampuan masyarakat

dalam menghadapi bencana (Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana). Kegiatan PRB dapat dilakukan secara fisik/struktural maupun non fisik secara terpadu dan berkelanjutan. Beberapa upaya yang telah dilakukan Pemda DIY dalam rangka pengurangan resiko bencana adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) sesuai Peraturan Kepala BNPB nomor 4 tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman Bencana. Program SPAB tahun 2021 dilaksanakan untuk membentuk 35 (tiga puluh lima) sekolah aman bencana yang terdiri dari SMA/SMK Negeri dan swasta.
- b. Pembentukan Desa Tangguh Bencana sesuai Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012. Program Desa/Kalurahan/Kelurahan Tangguh Bencana merupakan salah satu program utama BNPB yang mulai dilaksanakan pada tahun 2012 dan terus dikembangkan sampai saat ini. Pada tahun 2021 dilaksanakan kegiatan pembentukan Kalurahan/Kelurahan Tangguh Bencana di 25 (lima) kalurahan/kelurahan yang dimana 3 (tiga) kalurahan merupakan lanjutan dari tahun 2020 yang tersebar di semua kabupaten/kota di DIY.
- c. Menyusun Dokumen Rencana Kontijensi yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi Pemda DIY dan para pemangku kepentingan untuk menyelenggarakan kegiatan tanggap darurat bencana.

2. Potensi Bencana

Upaya pengurangan resiko bencana menjadi sangat relevan untuk dilakukan mengingat DIY memiliki 12 jenis potensi bencana yang sudah teridentifikasi berdasarkan sejarah kejadiannya. Potensi bencana tersebut adalah Banjir, Endemi dan Wabah Penyakit, Gelombang ekstrem dan abrasi, gempa bumi, tsunami, kekeringan, letusan gunung api, angin kencang, tanah longsor, kebakaran, kegagalan teknologi dan bencana sosial (Data dan Informasi Bencana, 2021).

a. Banjir

Potensi Banjir dapat terjadi karena faktor alam dan juga faktor perilaku manusia. Faktor alam yang berpengaruh diantaranya curah hujan yang tinggi dan daya serap tanah yang rendah sehingga mengakibatkan luncuran air yang sangat deras. Beberapa faktor yang disebabkan oleh perilaku manusia antara lain (1) membuang sampah sembarangan yang menyebabkan selokan dan sungai menjadi dangkal dan terhambat alirannya (2) semakin rendahnya daya serap tanah terhadap air karena tanah tertutup oleh aspal jalan raya dan bangunan dan (3) penebangan pohon yang tidak menerapkan sistem reboisasi. Selama tahun 2021 terdapat enam belas (16) kejadian banjir di wilayah DIY.

b. Epidemik dan Wabah Penyakit

Bencana epidemik dan wabah penyakit merupakan ancaman bencana yang diakibatkan oleh menyebarnya penyakit menular yang berjangkit di suatu daerah tertentu dan waktu tertentu, salah satu pandemi yang sedang terjadi saat ini adalah adanya wabah COVID-19. Di Indonesia wabah COVID-19 diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020. Perkembangan pandemi COVID-19 tidak semakin menurun, namun justru semakin meningkat dan menyebar ke seluruh wilayah Indonesia tidak terkecuali di DIY dan masih berlanjut sampai akhir tahun 2021. COVID-19 berpengaruh sangat besar pada hampir semua sendi kehidupan.

c. Gelombang Ekstrem dan Abrasi

Bencana gelombang ekstrem abrasi terjadi satu kali dengan mengakibatkan 59 rumah rusak ringan di Bantul pada tahun 2007 dan untuk skala yang ringan terjadi beberapa kali. Selama tahun 2021 tidak ada kejadian gelombang ekstrem di DIY.

d. Gempa Bumi

DIY diapit oleh 2 sistem sungai besar yang merupakan sungai patahan dilihat dari morfologinya yaitu; Sungai Opak - Sungai Oya, dan Sungai Progo. Gempa bumi yang terjadi mereaktivasi patahan pada sungai

tersebut sehingga berdampak pada tingkat kerusakan tinggi “*collaps*” pada jalur sungai tersebut. Hasil kajian lapangan menunjukkan bahwa gempa bumi yang terjadi disebabkan adanya gerakan sesar aktif di DIY yang kemudian disebut dengan Sesar Kali Opak. Selama tahun 2021 terdapat 245 kejadian Gempa di wilayah DIY.

e. Tsunami

Catatan kejadian tsunami yang pernah terjadi di masa lalu, run up di wilayah pesisir selatan Jawa ini berkisar antara 3-10 meter. Kondisi saat ini keberadaan hutan mangrove sebagai perlindungan alami terhadap gelombang tsunami khususnya di pesisir kabupaten Bantul sudah tidak ada lagi. Pelindung alami yang sekarang masih ada terdiri dari gumuk pasir, laguna dan beting gisik yang mempunyai daya lindung yang sangat terbatas terutama hanya melindungi wilayah/pemukiman yang berada di sebaliknya. Gumuk pasir masih bisa dijumpai di Parangkusumo Parangtritis dengan ketinggian sampai 20 m. Di Kabupaten Kulon Progo pesisirnya terbuka sehingga risiko terkena tsunami menjadi besar. Sudah ada usaha secara vegetatif membuat *green belt* yaitu dengan menanam jenis cemara di bantaran pantai pada jarak 200 meter dari bibir pantai. Ini bisa ditemui di daerah Ring I dan Ring II, walaupun kurang berhasil dalam pengembangannya, tetapi usaha secara vegetatif bisa dilanjutkan lagi dengan merapatkan jarak tanam atau mencari jenis tanaman yang dapat bertahan hidup pada kondisi pantai. Sedangkan, di Kabupaten Gunungkidul dengan perkembangan pariwisata pantai yang pesat, sudah di siapkan kesiapsiagaan terhadap potensi Tsunami.

f. Kegagalan Teknologi

Potensi gagal teknologi di DIY selain berupa kecelakaan transportasi juga potensi kegagalan teknologi reaktor nuklir. Salah satu reaktor nuklir yang ada di DIY dinamakan sebagai Reaktor Kartini, reaktor ini dibangun mulai akhir 1974 dan mulai beroperasi pada Januari 1979, reaktor ini menjadi salah satu fasilitas yang dimiliki oleh pusat penelitian bahan murni dan instrumentasi (ppbmi)-BATAN Yogyakarta, tipe reactor ini memiliki daya dengan kapasitas 100 kwat, yang didesain untuk tujuan

penelitian, latihan dan juga pendidikan. Selama tahun 2021, tidak ada potensi kegagalan teknologi.

g. Kekeringan

Pada umumnya kekeringan sering terjadi di Kabupaten Gunungkidul. Hal ini disebabkan oleh rendahnya curah hujan, jenis tanah karst yang tidak dapat menampung dan menyimpan air. Sumber air yang tersedia hanya dalam bentuk sungai bawah tanah yang banyak dijumpai di kabupaten ini. Kekeringan di kabupaten lainnya lebih disebabkan oleh tidak mampunya permukaan tanah menyerap air hujan karena hilangnya vegetasi penutup permukaan tanah dan tertutup oleh lapisan kedap air dan diperparah oleh pengambilan air tanah berlebihan dan tidak terkendali.

h. Letusan Gunung Api

Gunung Merapi yang aliran laharnya masuk kedalam wilayah Kabupaten Sleman merupakan salah satu gunung teraktif di dunia Karena periodesitas letusannya relative pendek yaitu 3-7 tahun. Bahkan setiap harinya gunung ini menunjukkan aktivitasnya yaitu guguran kubah lava. Merapi juga merupakan pertemuan persilangan dua buah sesar 27 transversal yang membentangi wilayah tengah Jawa Tengah dan DIY. Berdasarkan pantauan kegempaan dari laporan aktivitas Gunung Merapi BPPTKG selama tahun 2021 terdapat aktivitas gempa guguran sebanyak 5.063 kali, guguran lava sebanyak 657 kali dan awan panas guguran sebanyak 5 kali. Gunung Merapi masih berstatus Siaga sejak 5 November 2020.

i. Cuaca ekstrim

Berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Meteorologi dan Geofisika bencana alam cuaca ekstrim berupa angin kencang pernah beberapa kali terjadi di DIY. Hal ini disebabkan oleh adanya siklon tropis maupun sering terjadi pada saat pergantian musim. Pada tahun 2021 terdapat kejadian Angin kencang sebanyak 156 kali dan kejadian pohon tumbang sebanyak 113 kali.

j. Tanah Longsor

Bencana tanah longsor di wilayah DIY terjadi pada beberapa titik rawan dengan kondisi tanah curam yang biasanya berada pada dinding sungai dan di sepanjang kawasan pegunungan menoreh yang memiliki potensi Tanah Longsor yang sangat tinggi ketika musim penghujan. Selain itu, bencana tanah longsor juga terjadi di kabupaten lain yang memiliki lereng dengan kontur ekstrem dan karena adanya potensi curah hujan yang tinggi. Selama tahun 2021 terdapat 351 kejadian tanah longsor di wilayah DIY yang dihimpun oleh Pusdalops BPBD DIY.

k. Kebakaran Gedung dan Permukiman

Perumahan padat di Kota Yogyakarta memiliki potensi tinggi untuk terjadinya kebakaran gedung dan permukiman. Kebakaran gedung dan permukiman adalah bencana yang diakibatkan oleh manusia. Berdasarkan data dari Pusdalops BPBD DIY selama tahun 2021 terdapat 187 kejadian kebakaran yang terjadi di wilayah DIY.

l. Konflik Sosial

DIY sebagai miniatur Indonesia merasakan dampak adanya kemajuan dan heterogenitas kelompok masyarakat yang ada baik dari agama, etnis/ suku, budaya, bahasa, dan adat kebiasaan. Dengan karakteristik masyarakat yang sangat majemuk tersebut DIY menyimpan potensi munculnya berbagai konflik sosial terutama konflik yang bernuansa agama, konflik antar suku, konflik antar golongan, konflik antar pengikut partai, konflik antara kebijakan pemerintah daerah dengan sebagian masyarakat dan lain-lain. Konflik sosial ini sering terjadi di kawasan yang mahasiswa yang mendiami suatu wilayah tertentu DIY dan menjadi salah satu prioritas penanganan bencana di DIY

Tabel 7.6. Data Kejadian Bencana Alam di DIY Tahun 2018 – 2021

Nama Kejadian	2018	2019	2020	2021
Angin Kencang	147	168	167	156
Tanah longsor	216	506	475	351
Banjir	12	12	15	16
Kekeringan	1	1	1	0
Gempa	124	122	135	245

Nama Kejadian	2018	2019	2020	2021
Gunung Api	12	4	9	2
Pandemi			1	1
Kebakaran	270	542	255	187
Gelombang Pasang	1	2	1	0
Laka (Sungai, Laut, Darat)	39	107	33	8
Pohon Tumbang	88	156	187	113
Nominal Kerusakan	Rp 12.203.480.000	Rp 39.815.860.000	Rp 19.445.004.000	Rp 18.360.750.000
Data Korban Bencana				
Luka-luka (R, S, B)	109	773	65	37
Meninggal	36	118	334	13

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Belum ada regulasi yang mengatur penggunaan dana untuk kebutuhan mendesak untuk penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Selama ini kerusakan akibat bencana tidak bisa segera dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi karena mekanisme penganggaran mengharuskan usulannya n-1 sehingga kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi selalu tertunda, padahal seharusnya segera tertangani.
- 2) Pembentukan SPAB belum dapat dilakukan secara optimal mengingat dengan banyaknya jumlah sekolah yang ada.
- 3) Kapasitas Desa Tangguh Bencana/Destana belum mampu berperan secara optimal dalam rangka pengurangan risiko bencana;
- 4) Banyaknya kawasan rawan bencana di DIY yang membutuhkan sistem peringatan dini bencana;
- 5) Belum semua ancaman bencana telah disusun rencana kontijensinya;
- 6) Belum ada pengelolaan pengurangan risiko bencana pada kawasan strategis keistimewaan di DIY;
- 7) Belum tersedianya informasi lahan untuk relokasi warga masyarakat yang tinggal di Kawasan Rawan Bencana / KRB III;

- 8) Masih banyaknya permasalahan yang berpotensi menimbulkan bencana di kawasan sungai di DIY
- 9) Belum tersedianya sebuah sistem informasi manajemen kebencanaan yang terintegrasi/terpadu
- 10) Belum adanya Database kebencanaan, database relawan.
- 11) Pemahaman aparat dan relawan dalam penanggulangan bencana masih beragam dan perlu ditingkatkan
- 12) Masih adanya sarana dan prasarana PB (peralatan PB) yang belum memenuhi standar.
- 13) Penanganan kedaruratan kebencanaan di perbatasan perlu disinergiskan

b. Solusi

- 1) Dibuat aturan atau Peraturan Gubernur untuk penggunaan dana kebutuhan mendesak untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
- 2) Penyusunan pedoman dan pembentukan SPAB mandiri serta meningkatkan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten / Kota;
- 3) Perlunya kesinambungan kegiatan Desa Tangguh Bencana dengan kegiatan pengembangan Desa Tangguh Bencana yang merupakan kelanjutan dari Pembentukan Desa Tangguh Bencana, serta pemenuhan sarana prasarana dalam rangka peningkatan kapasitas Destana;
- 4) Penyusunan database Sistem Peringatan Dini yang dimiliki instansi, lembaga maupun masyarakat, serta pemetaan kebutuhan sistem peringatan dini bencana;
- 5) Melengkapi rencana kontijensi sesuai dengan ancaman bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 6) Perlu disusun kajian pengelolaan pengurangan risiko bencana pada kawasan strategis keistimewaan

- 7) Mendorong warga dan Pemerintah Kabupaten Sleman untuk menyediakan lahan relokasi warga masyarakat yang tinggal di Kawasan Rawan Bencana / KRB III;
- 8) Melakukan kajian rawan bencana di kawasan sungai di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 9) Pengadaan kajian kebutuhan Logistik PB di DIY
- 10) Pembuatan *database* kebencanaan dan relawan
- 11) Perlu dilakukan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi bagi aparat/relawan dalam penanggulangan bencana di Kab/Kota.
- 12) Perlu pengadaan pembuatan sistem informasi aplikasi manajemen logistik bencana, pengembangan sistem informasi dan pelatihan pengoperasian peralatan PB.
- 13) Sinergisitas penanganan kedaruratan kebencanaan di perbatasan

E. PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gambaran Umum

Gangguan ketentraman dan ketertiban umum (tantribum) adalah ancaman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat. Apabila suatu daerah dianggap tidak aman, tidak tertib dan tidak tentram maka pertumbuhan ekonomi tidak akan terjadi dan investasi akan sulit berkembang. Selain aspek perekonomian, aspek lainnya seperti sosial budaya dan politik juga akan terancam karena tidak kondusif. DIY sebagai kota wisata, kota pendidikan dan kota budaya menjadi daya tarik bagi banyak masyarakat dari berbagai daerah untuk datang baik untuk menetap maupun hanya berkunjung. Kondisi ini menyebabkan DIY menjadi daerah yang penduduknya majemuk karena multi etnis dan multi kultur sehingga rawan terjadinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Gangguan ketentraman dan ketertiban umum tersebut harus diminimalisir dan dikendalikan dengan baik melalui kerja sama terpadu semua pihak, khususnya pemerintah dan masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum sudah diatur melalui berbagai peraturan dan ditindaklanjuti di tingkat daerah

menjadi berbagai peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Supaya berbagai peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dapat berjalan dengan efektif perlu diimbangi dengan upaya penegakan terhadap berbagai peraturan tersebut. Berikut ini adalah aspek-aspek yang berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan:

- a. Peredaran minuman beralkohol karena memicu munculnya berbagai tindak kriminalitas salah satunya adalah kejahatan jalanan;
- b. Reklame besar yang melintang hampir di setiap jalan yang membahayakan pengguna jalan karena berpotensi roboh pada saat angin kencang. Beberapa reklame besar dipasang tidak pada tempatnya;
- c. Maraknya penambangan liar baik di aliran sungai, perbukitan dan gunung yang dilakukan oleh masyarakat tanpa ijin yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan sosial maupun alam;
- d. Banyaknya gelandangan dan pengemis di persimpangan jalan yang mengganggu ketentraman masyarakat serta melanggar Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis;
- b. Aksi kejahatan jalanan marak terjadi yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja yang mengancam keselamatan masyarakat;
- a. Bencana berupa pandemi COVID-19 yang mewabah di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia yang mengakibatkan timbulnya berbagai permasalahan antara lain banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan potensi meningkatnya angka kriminalitas. Salah satu upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 adalah dengan penegakan prokes yang ketat. Dalam beberapa hal penegakan prokes secara ketat sering diabaikan di masyarakat.
- b. Peredaran rokok ilegal yang marak di lingkungan masyarakat berdampak buruk pada bangsa dan negara. Rokok ilegal selain merugikan terhadap penurunan pendapatan negara melalui cukai juga berpotensi meningkatkan jumlah perokok dan perokok pemula karena murah harganya rokok di pasaran. Selain itu rokok ilegal juga tidak mematuhi peraturan pemerintah terkait pemasangan Peringatan Kesehatan Bergambar.

2. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Berbagai permasalahan dalam menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, antara lain:

- 1) Banyak beredar minuman keras / minuman beralkohol di toko kelontong / warung-warung kecil di wilayah DIY secara ilegal;
- 2) Masyarakat kurang memahami Perda dan Perkada sehingga petugas mengalami banyak hambatan ketika melaksanakan penertiban;
- 3) Pelaku ekonomi yang tidak mematuhi Perda dan Perkada;
- 4) Maraknya penambangan liar baik di aliran sungai, perbukitan dan gunung yang dilakukan oleh masyarakat tanpa ijin yang menimbulkan kerusakan lingkungan sosial maupun alam;
- 5) Masyarakat cenderung abai dalam melaksanakan proses menghadapi pandemi COVID-19.

b. Solusi

Dengan adanya berbagai permasalahan tersebut, maka Satpol PP DIY berupaya melakukan beberapa strategi, yakni :

- 1) Melakukan operasi yustisi kepada pengedar minuman beralkohol, baik yang legal maupun ilegal. Hal tersebut dilakukan agar para pelanggar jera dengan adanya putusan pengadilan dan efek malu;
- 2) Melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat yang rentan terhadap pelanggaran Perda, Perdaes dan/atau Perkada untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat. Selain itu juga dilakukan edukasi kepada masyarakat melalui media cetak, media sosial/ online, termasuk edukasi sebelum dilakukan penertiban terhadap pelanggaran Perda dan / atau Perkada;
- 3) Melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada pelaku ekonomi yang melakukan pelanggaran Perda, Perdaes dan/atau Perkada, kemudian ditindaklanjuti dengan kegiatan penertiban non yustisi dan / atau yustisi. Setelah itu secara rutin dan berkala dilakukan

pengawasan / pemantauan guna mencegah pelanggaran tersebut tidak diulangi kembali;

- 4) Melakukan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penindakan secara non yustisial terhadap pelanggar Perda penambangan liar yang terjaring melalui operasi penertiban perijinan;
- 5) Pemda DIY melalui Satpol PP melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat untuk melaksanakan prokes yakni memakai masker, melakukan jaga jarak dan menjauhi kerumunan di tempat umum. Berdasarkan Pergub DIY Nomor 24 Tahun 2021 dilaksanakan operasi non yustisi di wilayah perkantoran pemerintah dan perkantoran swasta, pelaku usaha (restoran, cafe, UMKM serta masyarakat umum) terhadap pelanggar prokes COVID-19.

F. TUGAS-TUGAS UMUM PEMERINTAHAN LAINNYA YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH

1. Lembaga Ombudsman Daerah (LOD)

a. Narasi Umum

Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY) adalah lembaga nonstruktural daerah dibentuk berdasarkan Pergub DIY Nomor 69 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Pergub DIY Nomor 28 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Pergub DIY Nomor 69 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta. LO DIY melaksanakan fungsi pengawasan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan mengawasi pelaksanaan etika usaha swasta. Dalam menjalankan fungsi tersebut, LO DIY dapat melakukan upaya preventif dengan berkoordinasi dan/atau bekerja sama dengan berbagai lembaga, baik pemerintah maupun badan usaha. LO DIY juga menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat atas adanya dugaan maladministrasi dalam

penyelenggaraan pelayanan publik atau dugaan pelanggaran etika usaha swasta.

Keanggotaan LO DIY untuk masa jabatan tahun 2021-2024 ditetapkan melalui SK Gubernur DIY No. 14/Kep/2021 tentang Penetapan Anggota LO DIY Masa Jabatan Tahun 2021- 2024. Surat Keputusan tersebut merupakan amanat dari Pasal 15 Pergub DIY No. 69 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman DIY. Dalam Pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa keanggotaan LO DIY berjumlah 7 (tujuh) orang yang bersifat kolektif kolegial, dan dalam ayat (4) dinyatakan bahwa Keanggotaan LO DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur. Pengangkatan Anggota LO DIY ditetapkan dari hasil seleksi calon anggota LO DIY yang memenuhi persyaratan dan proses seleksi oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Gubernur DIY.

Pada tahun 2021 LO DIY telah melakukan upaya preventif dengan melaksanakan beberapa kegiatan di antaranya monitoring pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di sentra-sentra vaksinasi, monitoring Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah (ASPD), monitoring Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT), dan penjajakan kerja sama penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) dengan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Pada tahun 2021 LO DIY telah menerbitkan 52 (lima puluh dua) produk akhir yang terdiri dari 32 (tiga puluh dua) rekomendasi dan 20 (dua puluh) laporan penyelesaian kasus.

Selama tahun 2021, LO DIY telah menangani total 261 (dua ratus enam puluh satu) perkara dari masyarakat terkait penyelenggaraan pelayanan publik dan praktik etika usaha swasta. Rincian dari perkara yang ditangani terdiri dari 187 (seratus delapan puluh tujuh) perkara dapat diselesaikan pada tahap konsultasi dan 74 (tujuh puluh empat) perkara diselesaikan sebagai laporan pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan. Rincian perkara yang masuk dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 7.7. Perkara yang Masuk Ke Lembaga Ombudsman DIY Berdasarkan Bidang Periode Tahun 2021

No	Nama Bidang	Aduan	Konsultasi	Total Perkara
1	Instansi Swasta	52	80	132
2	Aparatur Pemerintah Daerah	22	83	105
3	Lainnya	-	24	24
Total		74	187	261

Sumber: Data Lembaga Ombudsman DIY Tahun 2022

Untuk perkara yang selesai di tahap konsultasi dari total 187 (seratus delapan puluh tujuh) dapat dikategorikan berdasarkan bidangnya yaitu 83 (delapan puluh tiga) laporan (44.39%) bidang aparatur pemerintah daerah, 80 (delapan puluh) laporan (42.78%) bidang instansi swasta dan 24 (dua puluh empat) laporan (12.83%) bidang lainnya.

Apabila diklasifikasikan jumlah konsultasi berdasarkan sektor, terdapat 6 (enam) sektor diantaranya sektor lainnya sebanyak 76 (tujuh puluh enam) laporan (40.64%), sektor keuangan sebanyak 31(tiga puluh satu) laporan (16.58%), sektor properti sebanyak 28 (dua puluh delapan) laporan (14.97%), sektor pendidikan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) laporan (14.44%), sektor pertanahan sebanyak 14 (empat belas) laporan (7.49 %), dan sektor ketenagakerjaan sebanyak 11 (sebelas) laporan (5.88%).

Apabila diklasifikasikan jumlah konsultasi berdasarkan wilayah yaitu sebanyak 70 (tujuh puluh) laporan (37.43%) dari Kota Yogyakarta, 61 (enam puluh satu) laporan (32.62%) dari Kabupaten Sleman, 41 (empat puluh satu) laporan (21.93 %) dari Kabupaten Bantul, 6 (enam) laporan (3.21%) dari luar wilayah DIY, 5 (lima) laporan (2.67%) dari Kabupaten Kulonprogo, dan 4 (empat) laporan (2.14 %) dari Kabupaten Gunungkidul.

Sementara itu berdasarkan dari 74 (tujuh puluh empat) laporan pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kewenangan Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat dikategorikan berdasarkan bidangnya yaitu 52 (lima puluh dua) laporan (70,27%)

bidang instansi swasta dan 22 (dua puluh dua) laporan (29,73%) bidang aparaturnya pemerintah daerah.

b. Bidang Sosialisasi, Kerja Sama, dan Penguatan Jaringan (SKPJ)

Pada tahun 2021 LO DIY telah melakukan kegiatan sosialisasi, kerja sama dan penguatan jaringan melalui kegiatan sosialisasi tugas dan fungsi LO DIY baik secara langsung, melalui media elektronik (radio), dan media sosial. Selain itu juga dilakukan penguatan jaringan dengan menghadiri Undangan dan Audiensi dari Jejaring LO DIY.

c. Bidang Monitoring dan Evaluasi

LO DIY pada tahun 2021 mengeluarkan 52 (lima puluh dua) Produk Akhir, yang terdiri atas 32 (tiga puluh dua) Rekomendasi dan 20 (dua puluh) Laporan Penyelesaian Kasus (LPK). Bidang Monitoring dan Evaluasi telah melakukan kegiatan monitoring terhadap beberapa Rekomendasi yang diterbitkan pada tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Mengirim 15 (lima belas) surat monitoring kepada para pihak terkait penerima Rekomendasi dan 4 (empat) diantaranya telah mendapatkan tanggapan/ respon;
- 2) Melakukan monitoring secara langsung dengan kunjungan, korespondensi melalui Telepon dan pesan singkat kepada Terlapor dan para pihak terkait Rekomendasi, antara lain sebagai berikut:
 - a) LO DIY melakukan kunjungan monitoring secara langsung terhadap rekomendasi ke SMK Kesehatan Insan Mulia Yogyakarta pada tanggal 13 Desember 2021;
 - b) Melakukan monitoring terhadap rekomendasi tentang Jual Beli Lahan Perumahan oleh PT. Maro Anugrah Jaya melalui telepon dan mengirimkan pesan singkat kepada Direktur PT. Maro Anugrah Jaya.

Terhadap Produk Akhir berupa 20 (dua puluh) LPK Bidang Monitoring dan Evaluasi tidak melakukan monitoring karena proses tersebut dianggap telah selesai, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Telah diselesaikan para pihak sebanyak 16 (enam belas) produk;
- 2) Kewenangan Lembaga Lainnya sebanyak 1 (satu) produk;
- 3) Tidak ditemukan adanya pelanggaran pelayanan publik 3 (tiga) produk.

Selain melakukan kegiatan monitoring terhadap rekomendasi yang telah diterbitkan, Bidang Monitoring dan Evaluasi juga memberikan inisiatif penyusunan draft Prosedur Operasional Standar Bidang Monitoring dan Evaluasi berkaitan dengan tugas Monitoring dan Evaluasi Internal kelembagaan terhadap efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan dalam menindaklanjuti laporan masyarakat.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa sejak bulan Maret 2020, telah terjadi wabah pandemi COVID-19 hingga saat ini, sehingga berbagai kegiatan monitoring ke lapangan atau kontak langsung dengan para pihak penerima Rekomendasi dikurangi untuk tetap menjaga *physical /social distancing*, dan dialihkan ke sarana komunikasi via telpon atau WA.

Selanjutnya Bidang Monitoring dan Evaluasi pada bulan November 2021 telah menyusun Prosedur Operasional Standar Monitoring dan Evaluasi, sebanyak 9 (sembilan) halaman dan tinggal menunggu proses pengesahan.

d. Bidang Penelitian dan Pengembangan Jaringan

Sebagai lembaga independen yang berfungsi memberikan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, di sisi lain juga sekaligus sebagai laboratorium (*resource center*) praktik-praktik pelayanan publik pemerintah daerah maupun pelaku usaha sektor swasta yang bisa dipelajari dan dicermati oleh segenap kelompok masyarakat yang mempunyai minat dalam isu tersebut. Untuk itu, LO DIY membuka ruang dan kesempatan bagi semua lapisan masyarakat untuk mengkaji lebih dalam melalui kegiatan penelitian ataupun program magang. Program ini merupakan upaya agar LO DIY secara kelembagaan dapat dikenal lebih luas oleh masyarakat. Harapannya fungsi pengawasan yang

dilakukan oleh LO DIY bisa mendorong kesadaran kolektif masyarakat untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas guna terwujudnya *good governance* dan *good corporate governance* di DIY.

Bidang Penelitian dan Pengembangan Jaringan mengoptimalkan tugasnya dengan melaksanakan diskusi publik dan hubungan kelembagaan, sebagai berikut:

a. Diskusi Publik

Pada tahun 2021 Diskusi Publik mengambil tema Hambatan dan Tantangan dalam Inovasi serta Implementasi *e-Government* untuk Pelayanan Publik di DIY sebelum dan pada masa pandemi COVID-19. Tujuan dari acara Diskusi Publik ini adalah untuk berbagi informasi, kendala atau hambatan pada masing-masing instansi sehingga akan menjadi bahan pembelajaran bersama untuk perbaikan layanan melalui *e-government* sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Diskusi ini membahas manfaat *e-government* dalam pelayanan publik dan prasyarat implementasi serta kendala yang perlu diantisipasi.

b. Hubungan Kelembagaan

Salah satu kewenangan LO DIY adalah membangun jaringan kerja multi pihak dalam upaya pencegahan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan praktik usaha. Sehubungan dengan pelaksanaan kewenangan ini, LO DIY telah berkolaborasi dengan dunia Pendidikan untuk melaksanakan Program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yaitu program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) sesuai dengan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. LO DIY memfasilitasi MBKM tersebut dengan fasilitasi pemagangan untuk mahasiswa agar dapat belajar mengenai seluk beluk pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik baik terhadap aparatur pemerintah daerah maupun etika

usaha swasta. Selain itu, disediakan pula ruang untuk akademisi berpartisipasi dalam kegiatan LO DIY sebagai wujud Tri Darma Perguruan Tinggi dari aspek pengabdian pada masyarakat.

e. **Permasalahan dan Solusi**

Beberapa hal permasalahan utama yang dihadapi oleh LO DIY dan solusi yang dilaksanakan, sebagai berikut :

1) **Properti.**

- a) **Permasalahan:** Pengembang Perumahan tidak profesional diantaranya pada (1) komitmen untuk menyelesaikan rumah pesanan tepat waktu karena pengembang memiliki keterbatasan modal dan (2) aspek legalitas pembangunan proyek perumahan yang diragukan karena terdapat oknum pengembang yang memalsukan legalitas pembangunan. Sehingga terdapat masyarakat yang telah bertransaksi sebelumnya bermaksud membatalkan pembelian dan meminta uang yang dibayarkan dapat dikembalikan.
- b) **Solusi:** LO DIY telah berupaya melakukan observasi, mediasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat melalui pertemuan secara langsung, media sosial dan koordinasi dengan pimpinan asosiasi jasa konstruksi serta OPD terkait.

2) **Pendidikan.**

- a) **Permasalahan:** LO DIY melakukan advokasi sektor pendidikan terutama pada permasalahan aduan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan masalah lain di luar masa PPDB. Adapun permasalahan yang diadukan antara lain (1) sistem persentase penilaian nilai rapot dan nilai harian sekolah yang dirasa tidak adil dan merugikan, (2) peraturan zonasi yang menentukan pemilihan sekolah bagi calon peserta didik. Sedangkan permasalahan yang diadukan di luar masa PPDB antara lain (1) penarikan sumbangan oleh sekolah yang dibatasi jumlah dan waktu pembayaran, (2) penambahan rombongan belajar

(rombel) tidak sesuai dengan regulasi yang ada, (3) ketidaksesuaian antara kurikulum yang diajarkan di sekolah tinggi dengan nomenklatur regulasinya.

- b) **Solusi:** LO DIY berkoordinasi dengan OPD terkait dan pemerhati pendidikan untuk mencermati pelaksanaan PPDB dan permasalahan lain di sekolah atau Lembaga Pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan. LO DIY juga mengkaji permasalahan yang muncul pada tahun ajaran sebelumnya, pungutan pendidikan di sekolah, permasalahan rombel, ketidaksesuaian kurikulum di sekolah tinggi yang tidak sesuai dengan regulasi. Selanjutnya LO DIY akan memberikan arahan untuk perbaikan kebijakan dan pelaksanaan pada perangkat daerah terkait, sekolah, dan masyarakat yang terlibat dalam lingkungan sekolah misalnya komite sekolah. Selain itu LO DIY berupaya berkoordinasi dengan kementerian dan pihak-pihak terkait untuk memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan tersebut.

3) *Ketenagakerjaan*

- a) **Permasalahan:** Pelanggaran etika bisnis dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang tidak dicatatkan oleh pelaku usaha kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat, aduan masyarakat mengenai keterlambatan pemberian gaji, THR dan uang servis tenaga kerja oleh pelaku usaha karena terdampak pandemi, pengambilan tabungan karyawan yang dipersulit.
- b) **Solusi:** Mengundang para pihak untuk mendapatkan informasi yang berimbang selanjutnya dilakukan mediasi dalam hal pembayaran keterlambatan hak karyawan. Melakukan koordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan untuk melakukan penanganan aduan ketenagakerjaan.

4) *Keuangan*

- a) **Permasalahan:** LO DIY menerima aduan dari masyarakat terkait (1) pemberhentian kerja sama polis asuransi karena polis tidak dapat dipulihkan dengan alasan keterlambatan pembayaran kumulatif dan (2) aduan mengenai koperasi terkait kesulitan penarikan dana simpanan anggota, kesulitan anggota memenuhi kewajiban karena terdampak pandemi sehingga membutuhkan relaksasi, kelalaian manajemen yang merugikan nasabah dan perselisihan yang lain.
- b) **Solusi:** Mengundang para pihak yaitu Pelapor dan Terlapor untuk melakukan mediasi. Berkoordinasi dengan Dinas Koperasi setempat guna melihat aspek perizinan dan pengawasan terhadap koperasi yang berangkutan

5) *Pertanahan*

- a) **Permasalahan:** LO DIY menangani aduan pencacatan khusus surat tanah masyarakat dan aduan terkait pemberian SK tanah *pengareng-areng* terhadap mantan lurah.
- b) **Solusi:** Melakukan koordinasi dengan Kantor Pertanahan Nasional setempat dan pemerintah kalurahan terkait.

Berkenaan dengan permasalahan dan solusi tersebut dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Perlu dilakukan pembenahan manajemen pelayanan publik.
- 2) Perlu dilakukan pengembangan manajemen pelayanan publik yang inklusif terhadap semua warga negara tanpa terkecuali.
- 3) Birokrasi penyelenggaraan layanan publik didorong untuk mengoptimalkan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
- 4) Manajemen pelayanan publik perlu membuka ruang partisipasi warga dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- 5) Pengelolaan layanan publik perlu melibatkan kemitraan dengan pendekatan manajemen kolaboratif multi pihak.

2. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)

a. Narasi Umum

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Komite Nasional Indonesia Daerah istimewa Yogyakarta (KONI DIY) bertujuan melaksanakan pembinaan prestasi olahraga secara terintegrasi dan meningkatkan prestasi olahraga DIY di ajang nasional. Fokus kegiatan KONI DIY pada tahun 2021 adalah berkompetisi dalam PON XX di Papua yang diselenggarakan pada tanggal 2-15 Oktober 2021. Beberapa cabang olahraga andalan DIY dalam PON XX antara lain: terbang layang, terjun payung, atletik, bermotor, biliar, voli pasir, menembak, panahan, pencak silat, dan sepatu roda. Sebagai bentuk dukungan terhadap partisipasi dalam PON XX, Pemda DIY menyalurkan hibah sebesar Rp25.600.000.000,00 kepada KONI DIY yang telah diterima seluruhnya.

Kontingen yang dikirim DIY untuk berkompetisi dalam PON XX sebanyak 18 cabang olahraga. Prestasi yang diperoleh kontingen DIY adalah 8 medali emas, 12 medali perak, dan 18 medali perunggu. Medali emas berhasil diraih oleh cabang olahraga biliar, catur, terjun payung, atletik, panahan, terbang layang, dan menembak.

b. Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi KONI DIY dalam pengembangan olahraga, khususnya peningkatan prestasi, antara lain:

- 1) Keterbatasan sarana prasarana pembinaan di DIY, misalnya untuk cabang olahraga terjun payung, menembak, dan balap motor
- 2) Belum adanya skema pembinaan jangka panjang bagi atlet DIY

KONI DIY telah berupaya melakukan beberapa strategi dalam rangka optimalisasi peningkatan prestasi, antara lain:

- 1) Bekerjasama dengan pihak-pihak yang mampu mendukung penyediaan sarana prasana pelatihan, misalnya dengan TNI AU untuk pembinaan terjun payung, Brimob untuk pembinaan

menembak. KONI DIY juga berupaya memfasilitasi pelatihan balap motor dengan mengirimkan atlet untuk berlatih di Semarang karena keterbatasan prasarana di DIY.

- 2) Berkoordinasi intensif dengan sekolah yang memiliki kelas khusus olahraga, Pengda, dan KONI Kabupaten/Kota untuk membuat desain pembinaan jangka panjang bagi atlet DIY. Pembinaan calon atlet perlu dilakukan sedini mungkin sehingga perlu dukungan dan kerja sama dari unit terkecil untuk memperoleh bibit-bibit atlet terbaik DIY.

3. Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DIY

a. Narasi Umum

Tugas pokok Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka DIY adalah untuk mendidik kaum muda di DIY menjadi insan berkarakter baik, berkecakapan hidup, dan menjunjung nilai-nilai luhur budaya. Dalam menjalankan tugas pokoknya, Kwarda DIY menjalankan beberapa program prioritas seperti pengembangan kearifan lokal dan kebudayaan, pembinaan anggota muda, pembinaan anggota dewasa, penguatan organisasi dan kelembagaan, pengembangan teknologi informasi dan kerja sama masyarakat, serta pengabdian kepada masyarakat, penanggulangan bencana, dan lingkungan hidup. Program-program ini untuk mendukung Revitalisasi Gerakan Pramuka dalam rangka mendidik pemuda agar memiliki kecakapan dalam menghadapi era globalisasi sesuai nilai-nilai keistimewaan DIY.

Kegiatan Kwarda Gerakan Pramuka DIY pada tahun 2021 masih terbatas dalam skala lokal karena menyesuaikan dengan ketentuan penyelenggaraan kegiatan pada masa pandemi COVID-19. Penguatan organisasi Kwarda DIY dilakukan melalui penelitian potensi dan masalah Pramuka DIY serta penelitian kebutuhan dan eksistensi Pramuka DIY untuk mewujudkan gambaran profil Pramuka Istimewa. Penguatan organisasi juga didukung dengan penguatan Dewan Kerja Daerah dan Pitaran Pelatih Pembina Pramuka. Terkait pengabdian kepada masyarakat, Kwarda DIY menyelenggarakan bimbingan teknis Pramuka

Peduli serta berperan aktif dalam fasilitasi koordinasi kesiapsiagaan bencana dan melakukan rintisan kampung pramuka.

Pemda DIY memberikan dukungan operasional kepada Kwarda DIY pada tahun 2021 yang bersumber dari APBD sebesar Rp1.000.000.000,00 dan seluruhnya telah disalurkan.

b. Permasalahan dan Solusi

Dalam penyelenggaraan kegiatannya, Kwarda Gerakan Pramuka DIY masih menghadapi beberapa permasalahan seperti:

- 1) Belum optimalnya kewirausahaan atau kemandirian Kwarda DIY
- 2) Perlunya peningkatan kemampuan para anggota di bidang teknologi informasi

Dalam menghadapi permasalahan-permasalahan di atas, Kwarda Gerakan Pramuka DIY telah mempersiapkan beberapa strategi seperti:

- 1) Mulai mengembangkan Pramuka Wirausaha yang diharapkan menjadi penggerak kewirausahaan berbasis komunitas. Salah satu inovasi yang dihadirkan oleh Kwarda DIY adalah pembentukan Koperasi Pandu Usaha Sejahtera. Koperasi ini diharapkan dapat memfasilitasi kreatifitas anggota untuk menghasilkan produk bernilai jual melalui pelatihan keterampilan bagi anggota maupun masyarakat luas. Pembentukan koperasi ini juga diharapkan dapat memberi dukungan terhadap perbaikan kondisi ekonomi masyarakat di tengah pandemi COVID-19.
- 2) Mengintensifkan pelatihan kader, terutama para anggota muda untuk mengembangkan kemampuan di bidang teknologi informasi. Salah satu upaya yang telah dilaksanakan adalah penyelenggaraan kegiatan pramuka dengan sistem bauran serta bimbingan teknis jurnalistik yang menggabungkan penguatan digitalisasi media dan mendorong para anggota pramuka aktif menyalurkan aspirasi pada media elektronik.

4. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)

a. Narasi Umum

Sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam bertugas melaksanakan Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945. Jumlah anggota KPU sebanyak tujuh orang; KPU Provinsi sebanyak lima atau tujuh orang; dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak tiga atau lima orang dengan masing-masing dibantu oleh sekretariat. Penetapan jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan. Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota. Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota. Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama. Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota lima tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Kegiatan yang dilakukan oleh KPU DIY selama tahun 2021 antara lain:

- 1) Evaluasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 melibatkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan memperhatikan protokol kesehatan.
- 2) Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih di Kabupaten Sleman, Bantul dan Gunungkidul melalui sidang pleno.
- 3) Evaluasi dan Perencanaan Strategi Sosialisasi Melalui Laman Resmi dan Media Sosial KPU DIY. Rapat tersebut bertujuan untuk mengevaluasi konten dan merencanakan strategi sosialisasi melalui laman resmi dan media sosial.

- 4) Monitoring Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan dan Penyampaian Laporan Kinerja Tahun 2020. Kegiatan ini dilakukan untuk menyamakan persepsi KPU DIY dan KPU Kabupaten/Kota se-DIY terhadap Surat Edaran KPU RI nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021.
- 5) Evaluasi Pemilihan Umum Serentak untuk mengetahui pelaksanaan Pemilihan di Bantul, Sleman dan Gunungkidul, serta untuk memberikan solusi dan rekomendasi guna perbaikan proses tahapan di Pemilihan Serentak mendatang.
- 6) Rapat Redaksi Pengelola Laman Resmi dan Media Sosial
- 7) Pendidikan Pemilih Bersama Partai Politik Guna Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Proses Demokrasi
- 8) Rapat Kesatkeran Sebagai Wujud Koordinasi KPU Kabupaten/Kota se-DIY
- 9) Koordinasi Pendidikan Pemilih, Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan serta Bakohumas
- 10) Pengelolaan Dokumen Hasil Pemilu dan Pemilihan KPU DIY
- 11) Pembuatan Aplikasi Arsip Digital KPU DIY. Pembuatan aplikasi arsip digital ini juga merupakan langkah awal KPU DIY untuk mewujudkan pengelolaan dan penyajian arsip/dokumen yang lebih aman dan lebih mudah diakses.
- 12) Lelang Online Logistik Eks Pemilihan Tahun 2020
- 13) Rakor Evaluasi dan Dokumentasi Pendistribusian Logistik Pemilihan 2020
- 14) Rapat Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan Juli Tahun 2021 Daerah Istimewa Yogyakarta
- 15) Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) Berkelanjutan
- 16) Peluncuran dan Bedah Buku “Pilkada di Tengah Dua Bencana”
- 17) Evaluasi dan Penyusunan Jadwal Pemberitaan Laman Resmi dan Media Sosial KPU DIY

b. Permasalahan dan Solusi

Dalam implementasinya, banyak ditemui permasalahan yang terjadi di lapangan, antara lain:

- 1) Masih ada kekurangan dalam menyajikan informasi publik.
- 2) Evaluasi terhadap pelaksanaan tahapan verifikasi partai politik untuk perbaikan Pemilu 2024 masih belum optimal.
- 3) Minimnya sarana pengendalian dan sarana koordinasi bagi KPU se-DIY.

Atas permasalahan-permasalahan tersebut, diberikan solusi penyelesaian masalah sebagai berikut.

- 1) Menyelenggarakan Evaluasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik KPU DIY.
- 2) Melakukan percepatan regulasi dan verifikasi Partai Politik jelang Pemilu 2024.
- 3) Melakukan intensifikasi rapat-rapat koordinasi antar KPU se-DIY.

5. Badan Pengawasan Pemilihan Umum DIY

a. Narasi Umum

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah provinsi. Bawaslu Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi.

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas Bawaslu yaitu:

- 1) Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
- 2) Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu; dan sengketa proses pemilu;
- 3) Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu,

- 4) Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu
- 5) Mencegah terjadinya praktik politik uang;
- 6) Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- 7) Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan,
- 8) Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
- 9) Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
- 10) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- 11) Mengevaluasi pengawasan Pemilu;
- 12) Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
- 13) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota terdiri atas individu yang memiliki tugas pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dengan rincian jumlah anggota sebagai berikut.

- 1) Bawaslu sebanyak lima orang;
- 2) Bawaslu Provinsi sebanyak lima atau tujuh orang;
- 3) Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak tiga atau lima orang; dan
- 4) Panwaslu Kecamatan sebanyak tiga orang.

Tabel 7.8. Kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu DIY selama tahun 2021

No.	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1	Sosialisasi Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2020 tentang tata cara pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilihan umum kepada Bawaslu Kabupaten dan Kota se-D.I. Yogyakarta.	26 Februari 2021
2	Webinar berjudul “Peran Perempuan Pada Pilkada 2020” untuk melihat keterlibatan perempuan serta hambatan dan tantangan keterlibatan perempuan dalam Pilkada 2020.	9 Maret 2021
3	Sosialisasi <i>draft</i> inisiasi Desa atau Kelurahan Peduli Demokrasi untuk mewujudkan DIY sebagai Provinsi yang memiliki indeks kepedulian dan kesadaran terhadap pelaksanaan demokrasi	16 Maret 2021

No.	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
4	Dialog interaktif dengan tema “Strategi Komunikasi untuk Keterlibatan Perempuan dalam Politik” untuk membangkitkan semangat perempuan dalam meningkatkan kualitas diri dalam berkomunikasi agar dapat mengambil peran dan ikut dalam proses pembangunan nasional.	21 April 2021
5	Launching kegiatan pojok pengawasan berupa KUDAPAN (Kupas Demokrasi dan Pengawasan untuk Masa Depan) di kantor Bawaslu Kabupaten Bantul untuk mengawal demokrasi yang bersih dan berintegritas.	5 Mei 2021
6	KUPAS PEMILU (Kuliah Pengawasan Pemilu) dengan tema “Problem dan Tantangan Desain Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024”.	7 Juni 2021
7	Rapat koordinasi evaluasi Peraturan Bupati (Perbup) tentang pemasangan APK dalam Pilkada 2020 di wilayah DIY	9 Juni 2021
8	Rapat koordinasi mengenai evaluasi efektivitas penyelesaian sengketa antar peserta pemilu yang disertai dengan diskusi aktif dari para peserta, terutama pemaparan pengalaman lapangan dari tim pemenangan paslon pada Pilkada 2020	11 Juni 2021
9	Bersama dengan Badan Kesbangpol DIY, menyelenggarakan Workshop Pendidikan Politik Bagi Kelompok Pemilih Pemula	17 Juni 2021
10	Rapat perumusan usulan/masukan juknis terkait persiapan dan pelaksanaan persidangan pendahuluan pelanggaran administrasi Pemilu dan administrasi TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masif)	8 Oktober 2021
11	Pelatihan Jurnalistik kepada Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-DIY untuk mengembangkan kualitas pemberitaan online.	15 Oktober 2021
12	Program SKPP (Sekolah Kader Pengawas Partisipatif) tingkat menengah untuk menyosialisasikan kelembagaan Bawaslu, baik dari tingkat kerumitannya sampai bagaimana partisipasi masyarakat yang dianggap penting.	18 Oktober 2021
13	Bimbingan teknis Program Anti Korupsi Bagi Penyelenggara Pemilu yang Berkualitas dan Berintegritas di Daerah Istimewa Yogyakarta	17 November 2021

Sumber: Yogyakarta.bawaslu.go.id

b. Permasalahan dan Solusi

Dalam implementasinya, banyak ditemui permasalahan yang terjadi di lapangan, antara lain:

- 1) Pelaksanaan Pilkada mengalami Keterbatasan pada masa pandemi COVID-19.
- 2) Logistik Pemilu, berupa kertas surat suara yang rusak
- 3) Beberapa pelanggaran dalam tahapan penyelenggaraan pilkada berupa pelanggaran pemasangan APK, Netralitas ASN, Kampanye terbatas, debat publik dll.
- 4) Belum optimalnya partisipasi pemilih yang sedang menjalani masa hukuman di Lapas/Rutan.

- 5) Masih terdapat pemilih terutama pemilih pemula yang data Daftar Pemilih Tetap (DPT)-nya belum terekam pada basis data e-KTP.

Atas permasalahan-permasalahan tersebut, solusi penyelesaian masalah ialah sebagai berikut:

- 1) Penerapan protokol kesehatan di setiap pelaksanaan kegiatan misalnya Rekrutmen KPPS, Kampanye dan *Rapid Test* bagi Petugas penyelenggara serta dalam pemungutan suara.
- 2) Mendorong KPU untuk menyediakan Logistik Pemilu sesuai ketentuan.
- 3) Melakukan proses penanganan pelanggaran terhadap dugaan pelanggaran pidana, administrasi, dan kode etik.
- 4) Melakukan koordinasi dengan pihak lapas/rutan untuk mendirikan TPS maupun layanan TPS di sekitar Lapas/Rutan.
- 5) Berkenaan dengan masalah DPT yang belum sinkron dengan basis data e-KTP, Bawaslu (1) melaksanakan kerja sama dengan Disdukcapil untuk memastikan layanan perekam e-KTP dapat berjalan dengan baik dan (2) melaksanakan kerja sama dengan Dikpora/Balai Dikmen untuk mendorong pelajar yang belum rekam untuk segera melakukan perekaman e-KTP.

6. Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD)

a. Narasi Umum

Pelaksanaan penanggulangan HIV di Indonesia menuntut upaya sungguh-sungguh, komprehensif, dan berkelanjutan mulai dari tingkat pusat hingga ke tingkat kabupaten/kota. Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) sebagai lembaga yang ditunjuk pemerintah melalui PP 75 tahun 2006, kemudian diterbitkan Perubahan Peraturan Presiden No 124 Tahun 2016, telah berupaya memimpin pencegahan penularan HIV melalui koordinasi berjenjang pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Mekanisme program penanggulangan yang terkoordinasi tersebut diharapkan dapat membendung penyebaran virus HIV dan mencegah timbulnya infeksi baru.

Penanggulangan HIV/AIDS merupakan implementasi dari tujuan ke-3 dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/ SDGs*) yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Penanggulangan HIV/AIDS telah tertuang dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) maupun Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs . Sehingga upaya untuk menghambat laju perkembangan epidemi HIV/AIDS memerlukan komitmen dan dukungan dari pelaksana program di tingkat provinsi dan kabupaten. Upaya tersebut dapat berupa mobilisasi seluruh sumber daya yang dimiliki secara efektif dan peningkatan kemampuan untuk memahami/ menangani situasi epidemi di tingkat provinsi dan kabupaten agar epidemi tersebut dapat ditangani secara tepat.

Segenap pemangku kepentingan di DIY telah menyusun strategi dan Rencana Aksi dalam penanggulangan, pembuatan kebijakan, dan penghimpunan dana yang bersumber baik dari daerah, swasta, maupun sumber dana dari lembaga donor untuk percepatan pencapaian target tersebut. Dalam tugasnya, KPA DIY mengkoordinasikan program penanggulangan diberbagai sektor maupun SKPD, agar lebih terarah, komprehensif, terutama dalam pelaksanaan program, baik koordinasi dengan SKPD, LSM, Layanan bagi ODHA (orang dengan HIV dan AIDS), dan kelompok dukungan sebaya ODHA. Melalui dukungan dana APBD diharapkan dapat terbentuk sinergitas antar program baik dari semua sektor, LSM, swasta, dan masyarakat dengan ODHA di DIY dapat berjalan secara terpadu, efektif dan komprehensif. Dalam melaksanakan tugasnya KPA DIY pada tahun 2021 mendapatkan hibah Pemda DIY sebesar Rp500.000.000,00 untuk pelaksanaan operasional selama 1 tahun dengan realisasi fisik dan keuangan tercapai sebesar 93,06 %. Hibah tersebut disalurkan melalui Dinas Kesehatan DIY.

b. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan:

- a) Kurang optimalnya keterlibatan dan peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS di DIY.
- b) Meningkatnya kasus perkembangan ODHA dari kasus pada disabilitas dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).
- c) Penanggulangan HIV dimasa pandemi COVID-19 mengalami beberapa kendala, diantaranya kegiatan yang memerlukan tatap muka.
- d) Belum optimalnya inovasi kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS pada disabilitas.
- e) Terjadinya stigma dan diskriminasi terhadap ODHA di berbagai lapisan masyarakat.
- f) Terjadinya kerentanan HIV/AIDS dan kekerasan seksual pada orang dengan disabilitas.

2) Solusi:

- a) Mendorong semua OPD untuk dapat berkolaborasi terlibat dan berperan aktif dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS di DIY.
- b) Pengembangan dan integrasi isu HIV, HIV dengan Difabel dan HIV dengan ODGJ.
- c) Pengembangan kegiatan dengan integrasi penanggulangan COVID-19 dan HIV serta mengoptimalkan kegiatan secara daring.
- d) Pelibatan *stakeholder* sebagai upaya penanggulangan HIV pada disabilitas, diantaranya dengan inovasi pengembangan media bagi disabilitas.
- e) Penguatan informasi HIV dan AIDS kepada masyarakat terus dilakukan dengan melibatkan semua *stakeholder*, LSM, komunitas, dan masyarakat untuk menghilangkan stigma dan diskriminasi yang masih terjadi di masyarakat.

- f) Menjalin kerja sama dengan ILO (*International Labour Organization*) untuk Pelatihan Guru Disabilitas dalam integrasi muatan kesehatan reproduksi, HIV AIDS dan kekerasan seksual, serta bekerja sama dengan para pemangku kepentingan terkait.

7. Palang Merah Indonesia (PMI)

a. Narasi Umum

Palang Merah Indonesia (PMI) adalah organisasi kemanusiaan terbesar di Indonesia yang melaksanakan fungsi *auxiliary role to government* sesuai dengan UU Nomor 1 tahun 2018 tentang Kepalangmerahan dan PP Nomor 7 Tahun 2019, dengan tugas:

- 1) Memberikan bantuan kepada korban konflik bersenjata, kerusuhan, dan gangguan kemanan lainnya;
- 2) Memberikan pelayanan darah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Melakukan pembinaan relawan;
- 4) Melaksanakan Pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan Kepalangmerahan;
- 5) Menyebarkan Pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kegiatan Kepalangmerahan;
- 6) Membantu dalam penanganan musibah dan/atau bencana di dalam dan di luar negeri;
- 7) Membantu pemberian pelayanan kesehatan dan sosial;
- 8) Melaksanakan tugas kemanusiaan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah.

Dalam rangka melaksanakan fungsi *auxiliary role to government*, PMI berkoordinasi dengan Pemerintah, khususnya sektor-sektor yang terkait dengan kegiatan-kegiatan PMI.

Sumber dana PMI DIY dalam menjalankan program dan kegiatannya berasal dari Pemerintah, swasta, dan masyarakat. Selain itu, PMI DIY juga mengembangkan diri menjadi Lembaga mandiri dan netral sesuai

mandat Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dengan memperluas program kemanusiaan yang lebih luas, salah satunya adalah mendukung pemerintah dalam percepatan vaksin COVID-19.

Selain masih fokus pada penanggulangan pandemi COVID-19 dan krisis kesehatan lainnya, PMI DIY juga berperan dalam pelayanan penanggulangan bencana di wilayah DIY maupun wilayah lain terdampak bencana.

Visi dan Misi Palang Merah Indonesia

1) Visi

Terwujudnya PMI yang Profesional dan Berintegritas serta Bergerak bersama Masyarakat

2) Misi

- a) Memelihara reputasi organisasi PMI di tingkat nasional dan internasional;
- b) Menjadi organisasi kemanusiaan terdepan yang memberikan layanan berkualitas kepada masyarakat sesuai Prinsip-prinsip Dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah;
- c) Meningkatkan integritas dan kemandirian organisasi melalui kerja sama strategis yang berkesinambungan dengan pemerintah, swasta, mitra gerakan, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya di semua tingkatan PMI dengan mengutamakan keberpihakan kepada masyarakat yang memerlukan bantuan.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, PMI menuangkannya dalam delapan tujuan strategis

- 1) Mewujudkan PMI yang berfungsi baik di semua tingkatan, serta strategis dalam pelaksanaan kegiatan, peraturan organisasi, sistem, dan prosedur yang ditetapkan.

- 2) Meningkatkan kapasitas sumber daya organisasi PMI di semua tingkatan, baik sumber daya manusia maupun sarana prasarana yang diperlukan dalam melayani masyarakat.
- 3) Meningkatkan kualitas operasi penanganan bencana dan krisis kesehatan di seluruh wilayah Indonesia, baik dari segi kecepatan, cakupan, dan efektivitas pelayanan.
- 4) Meningkatkan ketahanan masyarakat untuk mengurangi risiko dan dampak bencana serta penyakit melalui program-program kesiapsiagaan, kesehatan dan sosial serta pelayanan kesehatan rujukan.
- 5) Meningkatkan ketersediaan darah yang aman, mudah dijangkau, dan berkualitas di seluruh Indonesia.
- 6) Memperkuat hubungan kerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah, sektor publik, swasta, mitra gerakan, lembaga donor, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka menjalankan mandat dan fungsi PMI.
- 7) Meningkatkan akuntabilitas PMI sebagai organisasi kemanusiaan di tingkat nasional maupun internasional.
- 8) Meningkatkan pemahaman seluruh elemen masyarakat tentang nilai-nilai kemanusiaan, prinsip-prinsip dasar gerakan internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah serta Hukum Perikemanusiaan Internasional melalui upaya komunikasi, edukasi dan diseminasi.

PMI DIY secara rutin memperoleh dana APBD DIY melalui Dinas Kesehatan DIY sebesar Rp500.000.000,00. Dana tersebut dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat termasuk pelayanan darah, penanggulangan bencana dan pembinaan generasi muda (relawan). Realisasi fisik dan keuangan dana hibah kelembagaan untuk PMI DIY tahun 2021 sebesar Rp414.613.826,00.

PMI DIY terus berupaya mengembangkan unit-unit pelayanan teknis yang dimiliki seperti Klinik Pratama PMI DIY dan Pusdiklat PMI DIY dalam rangka menjalankan fungsi sebagai organisasi kemanusiaan yang netral

dan mandiri menuju PMI berkarakter, profesional, mandiri, dan dicintai masyarakat.

Selama tahun 2021, kegiatan PMI DIY turut aktif dalam penanganan pandemi COVID-19 di DIY baik dalam hal skrining dan testing COVID-19, penyediaan donor konvalesen dan vaksinasi.

b. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

Pandemi COVID-19 mempunyai dampak cukup besar dalam pelaksanaan program kerja tahun 2021. Instruksi pemerintah dalam upaya mengurangi risiko penularan COVID-19 seperti pembatasan aktivitas sosial cukup mempengaruhi kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan seperti perjalanan dinas, rapat atau pertemuan, kegiatan yang melibatkan peserta banyak, dan lainnya. Ada beberapa kegiatan yang ditunda atau bahkan tidak terlaksana, atau kegiatan dialihkan menjadi kegiatan daring.

2) Solusi

Ada beberapa strategi kegiatan yang disesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19 di antaranya yaitu penyesuaian kegiatan yang diarahkan ke penanganan COVID-19. Begitu pula dengan metode kegiatan dari luring menjadi daring ataupun perpaduan luring dan daring. Beberapa biaya penanganan COVID-19 juga mendapatkan bantuan dari donasi masyarakat.

8. Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) DIY

a. Narasi Umum

Gerakan PKK merupakan gerakan masyarakat secara Nasional dalam pembangunan yang tumbuh dari bawah, oleh dan untuk masyarakat dalam rangka mewujudkan keluarga yang sejahtera yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudi luhur sehat jasmani dan rohani serta mandiri dengan menerapkan 10 program

pokok PKK. Dasar Pembentukan PKK adalah Perpres Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Permendagri Nomor 36 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan Permendagri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Pada tahun 2021 serangkaian kegiatan telah dilaksanakan oleh TP-PKK DIY yang bersinergi dengan Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat (Biro Bermas) Setda DIY selaku Perangkat Daerah yang mengampu pencairan Dana Hibah TP-PKK DIY sebesar Rp. 960.000.000. Sehubungan masih dalam kondisi wabah COVID-19, alokasi anggaran kegiatan TP PKK DIY juga dilaksanakan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 antara lain: Penguatan kesehatan mental dan spiritual dalam ketahanan keluarga, Bimbingan dan pemberian bantuan modal UP2K-KK, Pemberian bibit ikan dalam ember, Bantuan bibit tanaman, Pemberian bantuan infometer, Pembuatan buku pedoman pencegahan dan penanganan stunting, Penyampaian hasil RAKERNAS IX Tahun 2021, dan ikut berpartisipasi dalam program percepatan vaksin COVID-19 menuju zona hijau dengan memberikan bantuan sembako dan *sharing* pelaksanaan vaksin COVID-19.

Beberapa hambatan dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2021 antara lain: Pemberlakuan PPKM berdampak pada perubahan jadwal kegiatan dan Rencana anggaran biaya yang telah direncanakan, Pembinaan secara daring, Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara visual dan data profil. Meskipun secara teknis terdapat kendala, secara keseluruhan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target kegiatan.

9. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY

a. Narasi Umum

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY adalah Lembaga Negara Independen yang tugasnya antara lain menjaga agar masyarakat

mendapatkan informasi yang layak dan menjadi benteng untuk membendung masuknya budaya asing. Tugas ini memiliki dua sisi yang saling berbeda. Pada satu sisi harus membina dan memberikan perlindungan hukum agar lembaga penyiaran di DIY dapat tumbuh berkembang dengan sehat. Lembaga penyiaran yang berkembang dan sehat ini diharapkan dapat mendorong minat investor untuk mendirikan usaha penyiaran di DIY, sehingga dapat berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Di sisi lain dalam rangka melindungi masyarakat, KPID harus memberikan sanksi tegas kepada lembaga penyiaran yang melanggar peraturan.

Berkaitan dengan pembinaan lembaga penyiaran, DIY telah memiliki Peraturan Daerah DIY Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran, yang ditindaklanjuti dengan pengesahan Peraturan Gubernur DIY Nomor 37 Tahun 2017 tentang Fasilitasi Pembentukan Lembaga Penyiaran Komunitas dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 38 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi dan Pemberian Penghargaan atas Penyelenggaraan Penyiaran.

Pada tahun 2021 dengan adanya pandemi COVID-19 program kegiatan KPID dilaksanakan secara *online* atau daring maupun secara *hybrid*. Refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 juga berdampak pada penyesuaian beberapa kegiatan akan tetapi tidak mempengaruhi pencapaian tolak ukur kinerja. KPID DIY dalam merealisasikan program kerja menggandeng berbagai pihak agar kegiatan dapat berjalan dengan semestinya.

Pada tahun 2021, KPID DIY telah melaksanakan (1) Talkshow di Radio dan Televisi; (2) Pemasangan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) di Radio dan Televisi; (3) Pengiriman paket informasi berupa leaflet dan buku; (4) Pembinaan dan pertemuan berkala; (5) Pendampingan/layanan konsultasi; (6) Seleksi Anggota KPID DIY Periode 2020 – 2023; dan (7) Kunjungan lapangan ke kantor atau studio lembaga penyiaran.

Kegiatan KPID dalam Pembinaan kepada lembaga penyiaran dalam sebuah forum dilakukan sebanyak 7 pertemuan dengan menitikberatkan pada Optimalisasi Pemenuhan Konten Lokal di Lembaga Penyiaran Televisi selama 6 bulan. Diharapkan dengan adanya pembinaan, Lembaga Penyiaran Swasta televisi yang mempunyai program berbahasa Jawa, maupun yang program siaran lokalnya memenuhi 10% dari total siaran.

KPID DIY juga ikut serta membantu dalam hal menyebarluaskan informasi dan sosialisasi program dan anjuran pemerintah dalam bentuk Iklan Layanan Masyarakat (ILM) agar ditayangkan di lembaga penyiaran Penayangan. ILM yang tayang di televisi (Jogja TV) maupun radio (Sonora FM Yogyakarta, Adhikaswara FM dan Lembaga Penyiaran Komunitas) dengan tema: Digitalisasi Penyiaran, COVID-19 dan vaksinasi. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan informasi bagaimana media dan lembaga penyiaran harus bersikap dan mendukung program pemerintah serta menyampaikan informasi sesuai tema terkini.

KPID juga bertugas untuk membantu, mendampingi dan melaksanakan Evaluasi Pra Permohonan/Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) bagi lembaga penyiaran yang sedang mengajukan permohonan IPP baik baru maupun perpanjangan. Proses perpanjangan perizinan yang difasilitasi KPID DIY tahun 2021 meliputi pelaksanaan Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) Lembaga Penyiaran Swasta Radio sebanyak lima kali.

Pelaksanaan pengawasan materi siaran dari semua lembaga penyiaran dilakukan setiap hari terutama pada program siaran local. Informasi hasil pemantauan dilakukan setiap dua (2) bulan sekali sebagai bentuk evaluasi. Hasilnya, pada tahun 2021 KPID DIY mengeluarkan sanksi administrasi teguran tertulis terhadap beberapa Lembaga Penyiaran Swasta televisi yang tidak mempunyai program berbahasa Jawa atau program siaran lokalnya belum memenuhi 10% dari total siaran. Indikasi pelanggaran bisa didapat dari hasil pemantauan sendiri maupun aduan masyarakat yang disampaikan ke KPID DIY. Hal ini kemudian

ditindaklanjuti dengan melakukan pendalaman dan komunikasi dengan Lembaga penyiaran terkait untuk dilakukan pembinaan. KPID DIY sampai saat ini telah memberikan apresiasi berupa Penghargaan Khusus dalam 7 kategori kepada lembaga penyiaran:

- 1) Radio yang aktif menyiarkan informasi kebencanaan gempa bumi tahun 2006 : Sonora FM Yogyakarta;
- 2) Televisi lokal yang konsisten menyiarkan konten lokal seni budaya DIY : JogjaTV;
- 3) Radio yang konsisten menyiarkan konten lokal seni budaya DIY : RRI Pro-4 Yogyakarta;
- 4) Televisi Stasiun Sistem Jaringan (SSJ) yang menyiarkan program siaran lokal terbanyak tahun 2020 : GTV Yogyakarta;
- 5) Televisi Stasiun Sistem Jaringan (SSJ) yang menyiarkan program siaran lokal terbanyak tahun 2021 : Trans 7 Yogyakarta;
- 6) Televisi lokal yang menyiarkan siaran Iklan Layanan Masyarakat (ILM) covid-19 mandiri terbanyak : RBTv;
- 7) Televisi Stasiun Sistem jaringan (SSJ) yang menyiarkan siaran Iklan Layanan Masyarakat (ILM) covid-19 mandiri terbanyak : Trans TV Yogyakarta.

Melalui berbagai kegiatan di atas, diharapkan siaran radio dan tayangan televisi menunjukkan peningkatan dari sisi kualitas isi siaran, dipatuhinya regulasi daerah yang berkaitan dengan program siaran lokal serta terjadi penurunan yang cukup signifikan pada pelanggaran isi siaran.

b. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang masih dijumpai dalam bidang penyiaran antara lain:

- 1) Lembaga penyiaran masih kurang memahami regulasi di bidang penyiaran dan alur proses perizinan secara *online*;
- 2) Persoalan yang dihadapi dalam proses migrasi dari siaran analog menjadi digital, misal belum semua masyarakat memiliki peralatan pendukung yang sesuai sehingga masih membutuhkan sosialisasi.

- 3) Belum semua masyarakat yang menjadi penonton televisi dan pendengar radio melek media sehingga informasi yang diterima belum sepenuhnya dipilih dan dipilah dengan baik;
- 4) Kurangnya partisipasi masyarakat yang tinggal dalam radius 2,5 km jangkauan siar Lembaga Penyiaran Komunitas untuk mengkritisi isi siarannya;
- 5) Lembaga Penyiaran belum semua secara aktif menyiarkan (publikasi dan sosialisasi) kebijakan pemerintah daerah melalui saluran media yang mereka miliki.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, hal-hal yang sudah dilakukan antara lain:

- 1) Melakukan pembinaan terhadap lembaga penyiaran agar semakin baik isi siaran dan mematuhi regulasi yang ada;
- 2) Layanan konsultasi, pendampingan dan sosialisasi terkait regulasi dan alur proses pengurusan perizinan penyiaran secara online kepada Lembaga Penyiaran;
- 3) Kegiatan Literasi media kepada seluruh lapisan masyarakat sebagai salah satu bentuk pendidikan melek media dengan melibatkan para pihak terkait sehingga terwujud masyarakat yang cerdas bermedia;
- 4) Kegiatan yang bersifat advokasi dan persuasi kepada masyarakat untuk membantu KPID dalam memantau dan melakukan aduan isi siaran yang tidak sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 SPS).
- 5) Kegiatan Pembinaan kepada lembaga penyiaran untuk membantu secara aktif menyiarkan (publikasi dan sosialisasi) kebijakan pemerintah daerah melalui saluran media yang dimiliki.

10. Komisi Informasi DIY

a. Narasi Umum

Pemda DIY membentuk Komisi Informasi Daerah (KID) DIY untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya.

Ketugasan Komisi Informasi Daerah memastikan keterbukaan informasi oleh Badan Publik di DIY, menyelesaikan sengketa informasi dan mendorong masyarakat untuk dapat memperoleh informasi yang benar dan tepat. Penyelesaian sengketa informasi melalui proses menerima, memeriksa dan memutuskan sengketa informasi publik di daerah melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi. Selama tahun 2021 kegiatan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari 3 pokok kelembagaan :

1) *Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI)*

Penyelesaian Sengketa Informasi merupakan ketugasan yang diemban KID di dalam melayani masyarakat untuk mendapatkan hak atas informasi dan memastikan Badan publik mengumumkan dan menyediakan informasi, serta melayani permintaan informasi dari masyarakat. Pada tahun 2021, selain menyelesaikan 2 (dua) register sengketa informasi yang masuk ke KID DIY pada tahun 2021, KID DIY juga menyelesaikan 3 register sengketa informasi yang masuk pada akhir tahun 2020. Dengan demikian, terdapat 5 (lima) register sengketa informasi yang diselesaikan pada tahun 2021. Sengketa informasi yang ditangani dengan mayoritas objek sengketa berupa informasi tentang pertanahan yang 4 register di antaranya di tingkat kalurahan di Kabupaten Sleman, sedangkan 1 register di tingkat Kantor Pertanahan. Penyelesaian Sengketa Informasi tersebut menghasilkan tiga (3) putusan adjudikasi dan dua (2) putusan mediasi.

2) *Bidang Advokasi Sosialisasi dan Edukasi (ASE)*

Sebagai sebuah lembaga yang salah satu fungsinya adalah memastikan badan publik melakukan kewajibannya memberikan dan mengelola informasi yang dikuasai untuk selanjutnya disampaikan kepada masyarakat. Di sisi lain lembaga ini juga berkewajiban memastikan agar masyarakat memahami dan mengetahui hak untuk memperoleh informasi yang benar. Berbagai kegiatan dilakukan dalam rangka melakukan Sosialisasi dan Edukasi

Keterbukaan Informasi Publik dalam rangka peningkatan kesadaran akan Hak atas Informasi Publik dan mendorong Badan Publik mengimplementasikan UU KIP, sekaligus juga menjadi media untuk sosialisasi akan keberadaan Komisi Informasi Daerah DIY. Adapun kegiatan dari Bidang ASE sebagai berikut :

a) **Advokasi dan Sosialisasi sekaligus Perkenalan dengan Mitra Taktis**

Kegiatan ini bertujuan untuk membuka peluang kerja sama khususnya kerja-kerja di kota/kabupaten dan desa di DIY di antaranya adalah audiensi dengan Bupati, Walikota se DIY dan Stakholder terkait di DIY.

b) **Sosialisasi dan Edukasi Keterbukaan Informasi Publik kepada Badan Publik dan Masyarakat**

Kegiatan sosialisasi dan edukasi dilakukan dengan melibatkan beberapa pihak. Tujuannya agar tercipta keseimbangan antara hak masyarakat dan kewajiban badan publik dalam keterbukaan informasi publik. Untuk menyeimbangkan keduanya maka sosialisasi perlu terus dilakukan meski dalam situasi anggaran yang minimalis. Beberapa kegiatan menggunakan anggaran dari KID DIY dan yang lain dengan sistem kolaborasi dengan *stakeholder* terkait diantaranya Sosialisasi Basis, Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik, Bimtek Narasumber Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik yang diadakan oleh beberapa Lembaga di DIY.

c) **Sekolah Keterbukaan Informasi (SKI)**

Pada Tahun 2021, KID DIY membuat terobosan baru dalam memperluas cakupan penyebaran keterbukaan informasi publik dengan kegiatan Sekolah Keterbukaan Informasi Publik. Sekolah Keterbukaan Informasi yang dilaksanakan tahun 2021 merupakan upaya perbaikan dan lanjutan dari kegiatan

sebelumnya yang masih dalam tahap sosialisasi keterbukaan informasi publik. Terobosan yang dilakukan setelah sosialisasi diikuti dengan pembentukan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di sekolah.

Mengingat anggaran yang sangat terbatas, maka dibentuk *pilot project* terlebih dahulu, dan menjadi embrio untuk pembentukan di sekolah lain.

Setelah penyusunan dan pencetakan modul dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan koordinasi dan MoU dengan Dinas Dikpora DIY. Dalam koordinasi disepakati untuk menetapkan 3 (tiga) sekolah sebagai sasaran Sekolah Keterbukaan Informasi yaitu SMA 7 Yogyakarta, SMA Negeri Sewon, dan SMK Negeri 2 Yogyakarta.

d) Peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional

Peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional yang jatuh pada tanggal 30 April, untuk tahun ini tidak dapat dilaksanakan dengan melibatkan banyak elemen masyarakat, mengingat masa pandemi belum berakhir. Namun demikian, mengingat HKIN merupakan momen yang bersejarah, maka KID DIY tetap menggelar beberapa kegiatan di antaranya adalah: Talkshow Televisi, Publikasi Radio, Pembuatan spanduk; dan Membuat ucapan HKIN 2021 dengan tema “Keterbukaan Informasi Publik Untuk Mewujudkan Indonesia Damai Berkeadilan “ melalui berbagai media seperti spanduk, video pendek di media sosial (instagram, facebook, dan twiter).

e) Peringatan Hari Hak Untuk Tahu (HHUT)

Tanggal 28 September oleh seluruh pegiat keterbukaan informasi di dunia diperingati sebagai Hari Hak Untuk Tahu Sedunia (*The International Right to Know Day*). Untuk tahun 2021 Indonesia yang dipelopori oleh Komisi Informasi dalam

rangka peringatan Hari Hak Untuk Tahu mengambil tema “Membangun Sinergitas Keterbukaan Informasi Publik Untuk Indonesia Maju dan Berintegritas”

Komisi Informasi Daerah DIY dalam rangka memperingati Hari Hak Untuk Tahu, masih dalam situasi Pandemi COVID 19 yang membatasi aktivitas melibatkan massa, maka KID DIY mengadakan serangkaian acara dalam rangka Hari Hak Untuk Tahu, pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 antara lain: Talk show di TV, Pembuatan ILM di radio, Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik, Pembuatan video pendek yang ditayangkan di media sosial KID DIY oleh Atasan PPID Utama se DIY.

3) Bidang Kelembagaan

Terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan untuk penguatan PPID mitra taktis antara lain: bekerja sama dengan PPID UGM dalam mendorong pengembangan PPID Desa; dan bekerja sama dengan Badan Kesbangpol DIY untuk mendorong Keterbukaan Informasi Publik pada Parpol.

a) Forum PPID

Dalam upaya mendorong implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik khususnya di lingkungan Pemerintahan, sejak tahun 2013 KID DIY menginisiasi pembentukan Forum PPID se-DIY. Forum ini rutin dilaksanakan setiap 1 kali dalam 2 bulan, dengan fokus utama bersama-sama mendorong penguatan fungsi PPID. Forum ini beranggotakan PPID Pemda DIY, PPID Pemda Kabupaten Bantul, PPID Pemda Kabupaten Gunungkidul, PPID Pemda Kabupaten Kulon Progo, PPID Pemda Kabupaten Sleman, PPID Pemerintah Kota Yogyakarta, dan PPID Komisi Informasi Daerah DIY. Selain bertujuan untuk mendorong penguatan fungsi PPID, Forum PPID juga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan informasi Publik. Di Indonesia

hanya DIY yang berinisiatif membentuk dan memberdayakan Forum PPID. Kegiatan forum PPID pada tahun ini juga dilaksanakan dengan mematuhi prokes kesehatan dan peserta yang terbatas.

b) Rapat Kerja Daerah Komisi Informasi Daerah DIY Tahun 2021

Dalam upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik di DIY maka perlu sinergitas dari berbagai *stakeholder* agar dapat berjalan optimal. Menyadari hal tersebut, maka didalam proses perencanaan harus memperhatikan masukan semua pihak agar program dan kegiatan yang dilakukan dapat berdaya guna dan berhasil guna. Untuk itu, KID DIY menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah Tahun 2021 sekaligus juga sebagai evaluasi kegiatan tahun sebelumnya. Kegiatan Rapat Kerja Daerah Tahun 2021 ini bertujuan: mendapatkan masukan yang komprehensif terkait dengan implementasi ketugasan KID sebagai pilar keterbukaan informasi Publik di DIY; dan menentukan kebijakan yang strategis dalam upaya peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik di badan Publik DIY.

c) Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tahun Anggaran 2021 adalah Tahun ketujuh Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan monitoring dan evaluasi (monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik berkaitan dengan implementasi seluruh kewajiban Badan Publik seperti yang diamanatkan oleh UU KIP dengan metode yang selalu dikembangkan dan ditingkatkan untuk menghasilkan suatu hasil yang lebih terukur dan akurat.

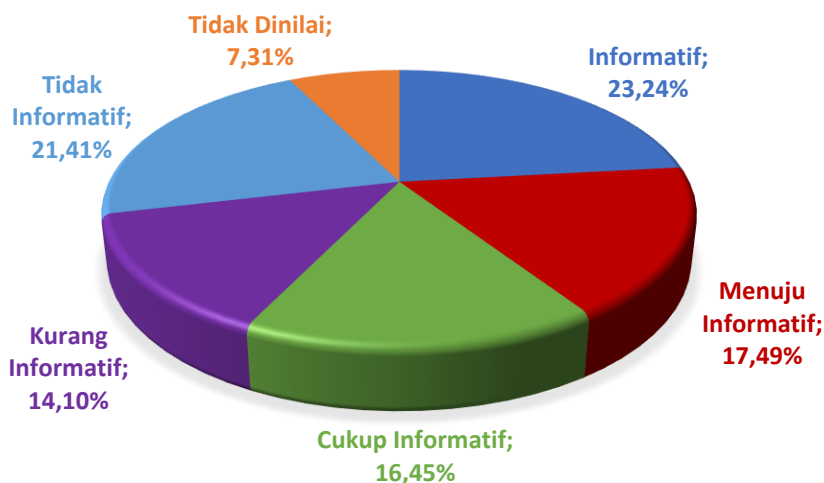
Sebagaimana monev keterbukaan informasi badan publik di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2020, monev tahun ini juga dimaksudkan untuk melakukan pemeringkatan dan kejuaraan

keterbukaan informasi Badan Publik. Dengan demikian, tahun 2021 merupakan tahun kedua KID DIY melakukan money dengan dua hasil tersebut. Tahapan money meliputi: Pembentukan Tim, Sosialisasi kepada Badan Publik, Pengisian SAQ, Uji Website, Uji Akses, dan Visitasi kepada Badan Publik. Tabel di bawah merupakan hasil Money Keterbukaan Badan Publik Tahun 2021.

Tabel 7.9. Klasifikasi Berdasarkan *Cluster* Badan Publik DIY

No	Cluster	Jumlah Badan Publik
1	<i>Informatif</i>	89 Badan Publik
2	<i>Menuju Informatif</i>	67 Badan Publik
3	<i>Cukup Informatif</i>	63 Badan Publik
4	<i>Kurang Informatif</i>	55 Badan Publik
5	<i>Tidak Informatif</i>	82 Badan Publik
6	Tidak dinilai	28 Badan Publik

Sumber data: Money KID Tahun 2021



Gambar 7.1. Klasifikasi Berdasarkan Pemeringkatan

Sumber: Diskominfo DIY, 2022

d) Pengelolaan website

Merujuk pada Pasal 7 ayat (3) UU KIP yang mengatur bahwa "Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik

secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, maka Komisi Informasi Daerah DIY sejak tahun 2013 membuat website dengan alamat www.komisi-informasi.jogjaprov.go.id. KIP memfasilitasi Badan Publik dalam Pemeringkatan keterbukaan Badan Publik KIP dengan pengelolaan portal e monev dengan alamat: <http://monev-kid.jogjaprov.go.id/>.

b. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dalam implementasi keterbukaan informasi :

- 1) Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang keberadaan Komisi Informasi Daerah DIY;
- 2) Kondisi pandemi yang belum berakhir mengharuskan semua kegiatan dilakukan secara terbatas dan mengikuti protokol kesehatan yang ketat, sehingga kegiatan secara daring masih menjadi prioritas, sedangkan luring/offline baik dalam sosialisasi advokasi dan edukasi kepada masyarakat masih belum optimal, termasuk didalam persidangan penyelesaian sengketa informasi;
- 3) Masih kurangnya komitmen, komunikasi dan pendampingan Badan Publik di DIY sehingga belum semuanya masuk pada *cluster informatif*

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, hal-hal yang sudah dilakukan antara lain:

- 1) Membangun kesadaran masyarakat serta mendorong badan publik terhadap keterbukaan informasi dan melakukan sosialisasi UU KIP serta mendorong Kelembagaan Badan Publik di desa dan kelurahan kepada pemangku kepentingan, badan publik, dan kelompok masyarakat;
- 2) Membangun kerja sama kemitraan dengan seluruh jaringan masyarakat (akademisi, organisasi masyarakat, media, kelompok kepentingan) dan pemerintah serta Menyediakan sarana dan prasarana lembaga yang representatif sesuai kewenangannya.

- 3) Melakukan sosialisasi koordinasi dengan Badan Publik melalui PPID Utama dan memastikan instrument indikator keterbukaan informasi dipahami oleh Badan Publik

11. Trans Jogja

a. Narasi Umum

Pemda DIY sejak 2008 telah menjalankan layanan angkutan umum perkotaan berbasis subsidi dengan beroperasionalnya Angkutan Perkotaan Trans Jogja. Layanan angkutan bersubsidi ini sering disebut dengan Sistem *Buy the Service* (BTS) karena pola subsidinya berbasis pada pembelian pelayanan. Sistem ini masih berjalan hingga sekarang, dengan nama Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja.

Sebagian besar dari prinsip-prinsip layanan angkutan umum telah diterapkan: layanan yang bersifat menyeluruh (jangkauan rute yang melayani di semua kecamatan di Kawasan Perkotaan Yogyakarta), rute yang tetap dan jadwal yang teratur, titik perhentian bus yang bersifat tetap dan dioperasikan dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang tertuang di dalam kontrak antara Dinas Perhubungan (Dishub) DIY dengan operator. Operator dalam hal ini PT Anindya Mitra Internasional (AMI) yang mendapatkan penugasan dari Pemda DIY dalam menjalankan operasional Bus Trans Jogja. Pemda DIY berharap dengan beroperasinya Bus Trans Jogja dapat berperan sebagai sistem layanan angkutan umum yang dapat memberikan fasilitasi mobilitas penduduk di Kota Yogyakarta dan sekitarnya atau dalam Kawasan Perkotaan Yogyakarta. Saat ini Bus Trans Jogja yang beroperasi melayani masyarakat sebanyak 128 armada sehingga rata-rata *headway* antar bus masih cukup tinggi yaitu sekitar 30 menit. Rencana selanjutnya Pemda DIY mengupayakan menambah jumlah bus Trans Jogja menjadi 286 armada sehingga rata-rata *headway* dapat ditekan mencapai 15 menit.

Pada akhir tahun 2021, seluruh rute/trayek Trans Jogja sebanyak 17 rute telah dilayani dengan 83 unit armada Siap Operasi (SO) yaitu armada yang digunakan secara efektif untuk melayani ke 17 trayek tersebut dari

total 128 armada Siap Guna Operasi (SGO) yaitu total armada yang secara teknis dan ekonomis masih dapat digunakan bilamana sebagian armada mengalami pemeliharaan ataupun proses pengurusan surat-surat. Selain itu ada tambahan 44 unit armada bus yang disubsidi oleh Pemerintah Pusat melalui Program BTS yang membuat cakupan wilayah layanan Bus Trans Jogja menjadi bertambah menjadi 25 kecamatan, yang semula hanya 22 kecamatan. Kendala yang masih dihadapi oleh Bus Trans Jogja adalah banyaknya ruas-ruas dan simpang yang mengalami kemacetan lalu lintas, khususnya di sepanjang wilayah pelayanan Bus Trans Jogja di Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY). Pertumbuhan kendaraan pribadi yang tinggi di Yogyakarta yang mencapai angka 10-12 persen per tahun berkorelasi secara linear terhadap tingginya angka kemacetan lalu lintas di ruas-ruas dan simpang di KPY, termasuk juga hambatan terhadap perjalanan Bus Trans Jogja karena sifat operasinya yang masih bercampur dengan lalu lintas lainnya (*mix traffic*).

Operasionalisasi Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja didasarkan pada Pergub DIY Nomor 109 Tahun 2020 tentang Penugasan Pengelolaan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja dengan Sistem *Buy the Service* kepada PT. AMI serta Pergub DIY Nomor 119 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Angkutan Perkotaan Trans Jogja dengan Sistem *Buy the Service*. Berdasarkan aturan di atas, beberapa ketugasan dari Dishub DIY adalah: a. merencanakan, membangun dan mengembangkan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja sesuai dengan dokumen perencanaan; b. mengawasi pengoperasian Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja agar tersedia layanan yang memenuhi SPM dengan tata kelola yang baik (*good governance*); c. menetapkan kebijakan terkait penyediaan dan pemeliharaan Prasarana Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja; d. menetapkan tarif layanan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja.

Berkaitan dengan ketugasan Dishub DIY dalam pengawasan operasional Bus Trans Jogja sepanjang pada tahun 2021, maka dapat dijelaskan beberapa hal berikut.

1) Evaluasi Laporan Pengawasan melalui *Closed Circuit Television* (CCTV)

Salah satu mekanisme pengawasan operasional Bus Trans Jogja dilakukan dengan menggunakan piranti CCTV yang terpasang di seluruh armada Bus Trans Jogja dan terpantau secara langsung di *Control Room* Dishub DIY. Hasil laporan pengawasan melalui CCTV ini sepanjang tahun 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut.

Masih terdapat beberapa pelanggaran pramudi berupa:

- a) Beberapa armada bus mengemudi melebihi batas maksimal kecepatan yang ditentukan, selama 1 tahun jumlah kecepatan tinggi antara 61-70 km/jam terjadi 5 kali, kecepatan 71-80 km/jam terjadi 8.344 kali, kecepatan 81-90 km/jam terjadi 1.835 kali bahkan ada bus mengemudi dengan kecepatan 91-100 km/jam dan terjadi 73 kali dalam 1 tahun. Kecepatan tersebut sudah melebihi batas kecepatan bus saat di luar kota dan di dalam kota.
- b) Pelanggaran pramudi selama 1 tahun terjadi sebanyak 57 kali. Pelanggaran pramudi yang sering terjadi adalah main *handphone* dengan mengemudi. Hal ini membahayakan penumpang dan seisi bus. Supir tidak menggunakan sabuk pengaman, menggunakan *handphone* saat berkendara, merokok di dalam bus saat berhenti, dan tidak memakai masker

Tindaklanjut dari hasil pengawasan tersebut di atas adalah melaporkan kepada pihak pengelola atas pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kedisiplinan, etika, dan lain-lain serta meneruskan kepada pihak berwajib atas pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas.

2) Evaluasi Kinerja dan Pelayanan

Kegiatan ini merupakan implementasi bentuk evaluasi dan pengawasan yang dilakukan secara langsung di lapangan menggunakan teknik sampling, dengan hasil sebagai berikut.

3) Karakteristik Penumpang Bus Trans Jogja Tahun 2021.

- a) Berdasarkan jenis kelamin, penumpang Trans Jogja didominasi perempuan sebesar 54,9 % sedangkan laki-laki 45,1 %.
- b) Berdasarkan profesi penumpang, pengguna Bus Trans Jogja terbesar adalah karyawan swasta 32,1 % ibu rumah tangga/belum bekerja (33,6%), mahasiswa (16,4%), pendidik (6,7 %) wiraswasta (6 %), PNS/TNI/POLRI (2,2 %) dan pekerja lepas 0,7 %.
- c) Berdasarkan tingkat pendidikan, penumpang Bus Trans Jogja terbanyak adalah lulusan SLTA (54,7%), disusul S1/D4 (15,4%), SLTP (15,1%), SD (7,3%), Diploma (5,7 %), dan S2 (1,8%).
- d) Berdasarkan penghasilan, sebagian besar pengguna Bus Trans Jogja (55,2%) berpenghasilan bulanan di bawah tiga juta rupiah per bulan.
- e) Berdasarkan frekuensi penggunaan, sebanyak 30,1% pengguna Bus Trans Jogja melakukan perjalanan 2 sampai 3 kali seminggu.
- f) Sebagian besar pengguna Bus Trans Jogja menyatakan bahwa tarif Bus Trans Jogja termasuk murah, pelayanan yang cukup bagus, dan kondisi armada yang cukup baik.
- g) Berdasarkan survei kuesioner, beberapa keluhan pengguna Bus Trans Jogja sebagian besar berhubungan dengan waktu tunggu yang terlalu lama pada jalur-jalur tertentu serta aspek ketepatan waktu yang kurang baik. Hal ini disebabkan karena pola penggunaan ruang jalan Bus Trans Jogja yang masih *mix traffic* (bercampur dengan lalu lintas yang lain).

4) Kinerja Teknis Bus Trans Jogja.

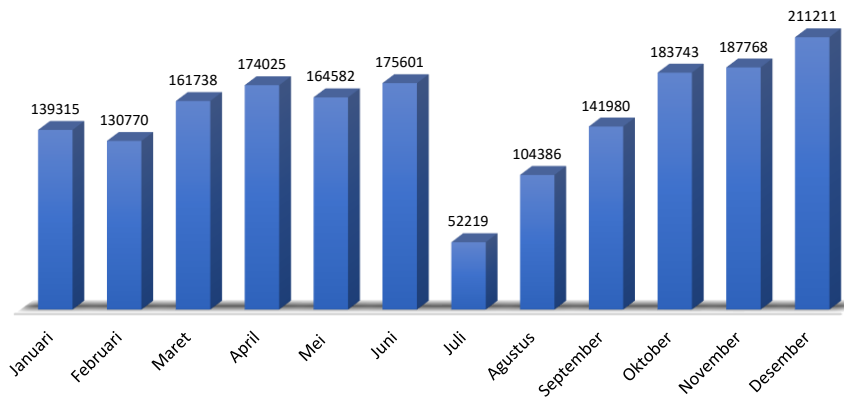
Kinerja teknis Bus Trans Jogja dilakukan pada tahun 2021 dengan menganalisis beberapa parameter yang meliputi :

- Aspek waktu antar bus (*headway*). Rata-rata untuk seluruh jalur Bus Trans Jogja memiliki nilai *headway* yang cukup tinggi, yaitu 30 menit pada hari libur dan 29,15 menit pada hari kerja. Nilai *headway* terpendek adalah jalur 14 sebesar 6,55 menit, sedangkan *headway* tertinggi ada pada jalur 5B yaitu sebesar 74,58 menit. Tingginya nilai *headway* ini juga tidak terlepas dari adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan adanya pengurangan jumlah armada dari 128 menjadi 95 armada.
- Aspek kecepatan. Seluruh jalur Bus Trans Jogja memiliki kecepatan rata-rata sebesar 20,57 km/jam, dengan kecepatan rata-rata tertinggi pada Jalur 14 sebesar 31,33 km/jam, dan terendah pada Jalur 10 sebesar 17,19 km/jam.
- Aspek *load factor* (LF) atau tingkat keterisian penumpang. *Load factor* rata-rata pada hari libur adalah 10,14 % dan pada hari kerja 9,71 %. LF tertinggi terjadi pada Jalur 1A sebesar 26,3 persen, sedangkan LF terendah pada Jalur 14 sebesar 2,3 persen.
- Berdasarkan jumlah *trip* dan penumpang yang naik/turun pada 8 Pos yang terdiri dari Pos Jombor, Amplas, Giwangan, Taman Pintar, Samsat, Bandara, Pool AMI dan Pool JTT, maka dapat dilihat jumlah penumpang harian rata-rata pada tabel di bawah ini :

Tabel 7.10. Jumlah Penumpang Bus Trans Jogja per Bulan pada Tahun 2021

Bulan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Jumlah Penumpang	139 .315	130 .770	161 .738	174 .025	164 .582	175 .601	52 .219	104 .386	141 .980	183 .743	187 .768	211 .211

Sumber: PT AMI dan Dinas Perhubungan DIY, 2021



Gambar 7.2. Grafik Jumlah Penumpang Bus Trans Jogja per Bulan pada Tahun 2021
 Sumber: Dishub DIY, 2022

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa jumlah penumpang Bus Trans Jogja mengalami fluktuasi yang cukup signifikan khususnya pada awal semester kedua tahun 2021, dengan jumlah penumpang yang turun drastis pada bulan Juli 2021, atau terendah pada tahun 2021. Hal ini disebabkan karena lonjakan kasus COVID-19 sebanyak 6 kali lipat dibanding bulan Juni, yang semula 525 kasus menjadi 3.122 kasus. Peningkatan kasus tersebut berdampak pada penerapan PPKM Level 3 di wilayah DIY dan penerapan kebijakan untuk mobilisasi masyarakat menggunakan kendaraan pribadi atau angkutan umum.

Sebagai bentuk pengendalian penularan Virus COVID-19 Pemda DIY melakukan percepatan vaksinasi hingga mencapai 100 % pada tahun 2021. Hal ini berdampak positif terhadap penurunan kasus dan status level di wilayah DIY sehingga adanya berdampak pada peningkatan aktivitas masyarakat dan jumlah penumpang Bus Trans Jogja pada bulan-bulan berikutnya. Hingga Desember 2021 Bus Trans Jogja memiliki jumlah penumpang terbanyak sepanjang tahun 2021 yaitu 211.211 penumpang. Secara umum, jumlah rata-rata penumpang Bus Trans Jogja adalah 152.278 penumpang per

bulan, atau bila dikonversi ke harian, maka didapat angka rata-rata 5.075 penumpang per hari.

b. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan:

- a) Penerapan PPKM Level 3 pada tahun 2021 di wilayah DIY berdampak pada pengaturan mobilitas dengan pembatasan perjalanan menggunakan kendaraan pribadi dan angkutan umum, aktivitas pendidikan dan perkantoran. Layanan operasional Bus Trans Jogja juga mengalami perubahan semula 05.30 – 21.30 WIB, menjadi 06.00 – 19.00 WIB.
- b) Operasional Bus Trans Jogja yang masih bercampur dengan moda transportasi lainnya di jalan (*mix traffic*) membuat hambatan terhadap kinerja ketepatan waktu, waktu antar bus (*headway*), hingga waktu tunggu penumpang yang cukup tinggi.
- c) Operasional armada Bus Trans Jogja hingga saat ini masih menggunakan bahan bakar fosil sebagai sumber tenaga penggerak, penggunaan bahan bakar fosil baik solar ataupun bensin menyebabkan tingginya gas buang berupa CO₂ yang dihasilkan oleh kendaraan sehingga akan mengurangi kualitas udara yang ada.
- d) Operasionalisasi Bus Trans Jogja belum didukung sepenuhnya dengan *Intelligent Transport System (ITS)* yang sistematis.

2) Solusi:

- a) Upaya bersama untuk menekan laju pertumbuhan COVID-19 yang bertujuan menurunkan Level PPKM sehingga kebutuhan mobilitas masyarakat akan meningkat yang diikuti dengan penambahan jam operasional Bus Trans Jogja untuk mempermudah pergerakan masyarakat.
- b) Upaya memberikan *previlege* operasional Bus Trans Jogja untuk mengurangi hambatan dengan jalur khusus *contra flow* menuju Kawasan pedestrian Malioboro, penambahan halte

pada pusat bangkitan yang tinggi (misal Jalan Urip Sumohardjo, Stasiun Yogyakarta) penanganan simpang dengan *bus priority* terutama pada simpang atau ruas jalan yang sering mengalami kemacetan atau tundaan tinggi serta penambahan jumlah armada untuk mengurangi waktu tunggu.

- c) Upaya merintis penggunaan Bus Listrik guna peremajaan Bus Trans Jogja pada Rute Kridosono – Malioboro – Ngabean untuk mengurangi penggunaan bahan bakar berbahan dasar fosil, menekan polusi dan meningkatkan kualitas udara.
- d) Upaya penggunaan ITS yang sistematis dalam mendukung peningkatan layanan operasional Bus Trans Jogja pada simpang-simpang yang *men-support* kawasan pedestrian Malioboro.
- e) Beberapa agenda tambahan yang diperlukan untuk meningkatkan layanan operasional Bus Trans Jogja adalah :
 - (1) Mengintegrasikan sistem tiket antara Bus Trans Jogja dengan Teman Bus yang juga dapat mengakomodasi kebutuhan pelajar, wisatawan, maupun masyarakat umum dengan pemberlakuan tarif khusus atau tiket yang berfungsi selama periode tertentu
 - (2) Penyediaan layanan angkutan umum Bus Trans Jogja yang menghubungkan kawasan Stasiun Yogyakarta – Stasiun Lempuyangan – Terminal Giwangan.
 - (3) Perluasan area layanan sampai pusat Kota Bantul dan Pusat Pemerintahan Kabupaten Sleman.
 - (4) Giratori kawasan Kraton dan Malioboro menjadi pusat pergerakan bus angkutan perkotaan. Perlu kajian mengenai pemberlakuan *contra flow* pada lokasi yang memungkinkan perlu dilakukan, seperti misalnya di Jalan Pasar Kembang (Selatan Stasiun Yogyakarta).

PENUTUP

Penyusunan dokumen LKPJ adalah upaya Pemda DIY untuk meningkatkan kualitas evaluasi atas capaian pembangunan daerah. Dokumen LKPJ Kepala Daerah DIY Tahun 2021 menjadi cerminan, evaluasi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan daerah selama satu tahun. Paparan hasil pembangunan daerah tersebut dapat diukur melalui kontribusi sejumlah program dan kegiatan pembangunan dalam melaksanakan arah kebijakan dan atau urusan yang telah ditetapkan. Kontribusi program dan kegiatan yang berkualitas diharapkan dapat memiliki daya ungkit terhadap pencapaian sasaran pemerintah daerah sebagai bukti keberhasilan pembangunan daerah berkelanjutan yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Kondisi Pandemi COVID-19 sejak awal Tahun 2020 berdampak pada berbagai aspek kehidupan sosial ekonomi DIY. Kondisi pandemi tersebut menjadi konteks tema pembangunan RKPD DIY 2021 yaitu: *“Penguatan SDM Unggul dan Percepatan Pemulihan Sosial Ekonomi Masyarakat DIY”* selaras dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 *“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial.”* Tema RKPD DIY 2021 tersebut berkesinambungan dengan tema RKPD DIY 2020 *“Penanganan Kesehatan dan Sosial Kemasyarakatan serta Upaya Penguatan Ekonomi Guna Meminimalisir Dampak Pandemi COVID-19.”* Tema RKPD DIY 2021 menggambarkan tantangan yang dialami DIY dengan pernyataan kunci: (1) Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul dalam pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan ekonomi; dan (2) Pemulihan sosial ekonomi dalam rangka bangkit dari keterpurukan akibat pandemi, utamanya pada sektor kesehatan, pariwisata, industri dan investasi.

Sampai dengan akhir tahun 2021 terdapat 5 sasaran dengan 6 indikator dari 14 indikator pada RPJMD 2017-2022 yang belum optimal capaiannya. Sasaran yang belum optimal yaitu: 1) Sasaran Daerah *“Meningkatnya Derajat Kualitas SDM”* pada indikator *“Indeks Pembangunan Manusia (IPM)”*; 2) Sasaran Daerah *“Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat”* pada indikator *“Indeks Gini”* dan *“Persentase Angka Kemiskinan”*; 3) Sasaran Daerah *“Meningkatnya Aktivitas*

Perekonomian yang Berkelanjutan” pada indikator “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)”; 4) Sasaran Daerah “Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah” dengan indikator “Indeks Williamson”; serta 5) Sasaran Daerah “Meningkatnya Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa” dengan indikator “Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten, dan Tanah Desa yang Terfasilitasi untuk Dikelola serta Dimanfaatkan”. Namun jika dibandingkan dengan target indikator kinerja sasaran pada RKPDP hanya terdapat 3 indikator yang tidak tercapai, yaitu IPM, Indeks Gini, dan IKLH. Capaian indikator yang belum optimal antara lain, secara sistemik dipengaruhi oleh: (1) kondisi pandemi yaitu Persentase Angka Kemiskinan dan Indeks Gini; (2) terjadinya disparitas antar kabupaten/kota seperti IPM dan Indeks Williamson; serta (3) berkenaan dengan penyelesaian administrasi pihak eksternal pada Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah Desa. Pada aspek mikro sasaran dan program pada OPD, dampak pandemi, perubahan kebijakan nasional, dan faktor eksternal lain menjadi penyebab belum optimalnya ketercapaian indikator outcome pembangunan. Dalam upaya perbaikan ke depan pada penyusunan RPD/RPJMD DIY di masa yang akan datang, dirancang indikator dan target yang memperhitungkan aspek eksternalitas, kerangka waktu pengukuran, dan sesuai konkurensi kewenangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu perlu diperkuat aspek koordinasi lintas sektor dan kewilayahan dalam rangka pencapaian indikator strategis pemerintah daerah di masa yang akan datang.

Sebagai penutup, penyampaian LKPJ Tahun 2021 ini menjadi laporan pelaksanaan tahun keempat dalam rentang waktu periode RPJMD DIY 2017-2022. Capaian tahun keempat ini menjadi evaluasi penting terhadap pelaksanaan tahun-tahun selanjutnya agar pencapaian sasaran daerah menjadi lebih optimal, terlebih mendekati akhir periode RPJMD DIY 2017-2022 dan RPJPD 2005-2025. Akhirnya, kinerja pembangunan daerah yang sudah dijalankan diharapkan dapat menjadi sebuah hasil yang diapresiasi, diberikan catatan kritis terhadap hambatan dan tantangan yang dilalui, serta menjadi penanda kebangkitan kolektif *“Jogja Satu Bangkit Bersama”* untuk pulih dari pandemi dan mewujudkan peningkatan martabat manusia DIY yang berkelanjutan.